



**BAGIAN ANGGARAN 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
GEDUNG A**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024**

# **LAPORAN KEUANGAN KEMENDAGRI TAHUN 2024 AUDITED**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7 JAKARTA PUSAT  
TELP. (021) 3450038  
WEBSITE : [WWW.KEMENDAGRI.GO.ID](http://WWW.KEMENDAGRI.GO.ID)**

# **BAGIAN ANGGARAN 010**



**LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
TAHUN ANGGARAN 2024  
*AUDITED***

**JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT**



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Mei 2025

**MENTERI DALAM NEGERI,**  
  
**MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	xiv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	87
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	144
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	178
F. Pengungkapan Penting Lainnya	189
G. Penutup	192
VI. Lampiran dan Daftar	

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1 : Pagu dan Realisasi Belanja untuk Pelaksanaan Prioritas Nasional s.d. 31 Desember 2024	11
Tabel 2 : Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I	16
Tabel 3 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	22
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	25
Tabel 5 : Kriteria Kualitas Piutang	27
Tabel 6 : Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2024	28
Tabel 7 : Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program	28
Tabel 8 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2024 per MAP	29
Tabel 9 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2024 per Eselon I	29
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi PNBK Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I	30
Tabel 11 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	31
Tabel 12 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program s.d. 31 Desember 2024	32
Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Unit Eselon I	32
Tabel 14 : Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	33
Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Neto s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	33
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	34
Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	34

Tabel 18	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Akun s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	35
Tabel 19	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	36
Tabel 20	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	36
Tabel 21	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	36
Tabel 22	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	37
Tabel 23	: Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	37
Tabel 24	: Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	38
Tabel 25	: Perbandingan Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan per Eselon I s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	38
Tabel 26	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program Percepatan Penurunan Stunting pada Ditjen Bina Bangda s.d. 31 Desember 2024	81
Tabel 27	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting pada Ditjen Dukcapil s.d. 31 Desember 2024	81
Tabel 28	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk Masing-Masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2024	84
Tabel 29	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional I	84
Tabel 30	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional II	85
Tabel 31	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional III	85
Tabel 32	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional IV	85
Tabel 33	: Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I pada Prioritas Nasional V	86

Tabel 34	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VI	86
Tabel 35	Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VII	86
Tabel 36	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I	87
Tabel 37	: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I	88
Tabel 38	: Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan	88
Tabel 39	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I	90
Tabel 40	: Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I	95
Tabel 41	: Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang Pertanggungjawabannya Belum Lengkap per 31 Desember 2023	96
Tabel 42	: Mutasi Belanja Dibayar Dimuka	96
Tabel 43	: Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I	97
Tabel 44	: Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima	98
Tabel 45	: Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I	99
Tabel 46	: Mutasi Piutang Bukan Pajak per Jenis Transaksi	100
Tabel 47	: Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak	101
Tabel 48	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	102
Tabel 49	: Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I	103
Tabel 50	: Mutasi Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2024	103
Tabel 51	: Rincian Persediaan	104
Tabel 52	: Rincian Persediaan per Unit Eselon I	105
Tabel 53	: Mutasi Persediaan	105
Tabel 54	: Rincian Tanah per Unit Eselon I	107
Tabel 55	: Rincian Mutasi Tanah	108
Tabel 56	: Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I	110

Tabel 57	: Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	110
Tabel 58	: Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I	116
Tabel 59	: Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	117
Tabel 60	: Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I	121
Tabel 61	: Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	121
Tabel 62	: Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I	124
Tabel 63	: Mutasi Aset Tetap Lainnya	124
Tabel 64	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I	126
Tabel 65	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	127
Tabel 66	: Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	127
Tabel 67	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	129
Tabel 68	: Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I	130
Tabel 69	: Mutasi Tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2024	130
Tabel 70	: Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I	132
Tabel 71	: Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024	133
Tabel 72	: Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	133
Tabel 73	: Mutasi Aset Tak Berwujud	134
Tabel 74	: Rincian Aset Lain-Lain Menurut Uraian Akun per 31 Desember 2024	136
Tabel 75	: Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I	137
Tabel 76	: Mutasi Aset Lain-Lain	137
Tabel 77	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	140
Tabel 78	: Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I	141
Tabel 79	: Pendapatan Diterima di Muka	142
Tabel 80	: Utang Jangka Pendek Lainnya	143

Tabel 81	: Perbandingan Rincian PNBPN Tahun 2024 dengan Tahun 2023	144
Tabel 82	: Selisih PNBPN antara Basis Kas dan Basis Akrua	145
Tabel 83	: Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2024 dengan Tahun 2023	148
Tabel 84	: Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis Akrua	149
Tabel 85	: Perbandingan Beban Persediaan Tahun 2024 dengan Tahun 2023	156
Tabel 86	: Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan Tahun 2024	156
Tabel 87	: Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan Dengan Beban Persediaan	157
Tabel 88	: Perbandingan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan Tahun 2023	158
Tabel 89	: Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis Akrua	159
Tabel 90	: Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel	163
Tabel 91	: Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dengan Tahun 2023	163
Tabel 92	: Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis Akrua	164
Tabel 93	: Penyajian Beban Pemeliharaan	165
Tabel 94	: Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan	166
Tabel 95	: Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dengan Tahun 2023	167
Tabel 96	: Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis Akrua	167
Tabel 97	: Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dengan Tahun 2023	169
Tabel 98	: Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	170
Tabel 99	: Penjelasan Selisih Mutasi Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	170
Tabel 100	: Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023	171

Tabel 101	: Penjelasan Hubungan Penyusutan Periode Berjalan dengan Penyusutan	171
Tabel 102	: Penjelasan Selisih Penyusutan Periode Berjalan dengan Penyusutan	172
Tabel 103	: Penjelasan Hubungan Amortisasi Periode Berjalan dengan Amortisasi	172
Tabel 104	: Penjelasan Selisih Amortisasi Periode Berjalan dengan Amortisasi	173
Tabel 105	: Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dengan Tahun 2023	173
Tabel 106	: Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	174
Tabel 107	: Penjelasan Selisih Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	174
Tabel 108	: Perbandingan Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dengan Tahun 2023	174
Tabel 109	: Selisih Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Basis Akrua	175
Tabel 110	: Selisih Realisasi Beban dari Kegiatan Non Operasional antara Basis Kas dan Basis Akrua	177
Tabel 111	: Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2024	179
Tabel 112	: Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2024	180
Tabel 113	: Rincian Koreksi Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2024	183
Tabel 114	: Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2024	184
Tabel 115	: Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat Tahun 2021 dan Progres Penyelesaiannya pada Tahun 2022	190
Tabel 116	: Rekapitulasi Progres Penyelesaiannya Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama per 31 Desember 2024	191

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Hal</b>
Grafik 1 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto T.A. 2024 dan T.A 2023	31

## DAFTAR LAMPIRAN

### A. DAFTAR LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALK

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
- Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran Belanja
- Lampiran III : Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
- Lampiran IV : Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Kegiatan, Program, Output, dan Target dari Masing-Masing Fungsi dan Sub Fungsi
- Lampiran V : Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Kegiatan, Program, Output dan Target dari Masing-Masing yang Menjadi Prioritas Nasional
- Lampiran VI : Rincian Pagu dan Realisasi Kesalahan Penganggaran Per Satker
- Lampiran VII : Rincaian Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya, dan Setara Kas Per Satker
- Lampiran VIII : Rincian Penyetoran Kas Setelah Tanggal Neraca
- Lampiran IX : Rincian Desa dengan Laporan Pertanggungjawaban yang Belum Lengkap
- Lampiran X : Rekapitulasi Persediaan Per Satker Menurut Akun
- Lampiran XI : Rincian Mutasi Persediaan Per Eselon I
- Lampiran XII : Rincian Mutasi Persediaan Per Akun
- Lampiran XIII : Daftar Persediaan Tidak dikuasai
- Lampiran XIV : Rekapitulasi Aset Tetap Per Satker Per 31 Desember 2024
- Lampiran XV : Rincian Mutasi Tanah Per Unit Eselon I
- Lampiran XVI : Rincian Mutasi Peralatan Dan Mesin Per Unit Eselon I

- Lampiran XVII : Rincian Pembelian (101) Peralatan Dan Mesin Per Satker
- Lampiran XVIII : Rincian Mutasi Gedung Dan Bangunan Per Unit Eselon I
- Lampiran XIX : Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Unit Eselon I
- Lampiran XX : Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
- Lampiran XXI : Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Eselon I
- Lampiran XXII : Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Satker
- Lampiran XXIII : Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya serta Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Per Satuan Kerja Per 31 Desember 2024
- Lampiran XXIV : Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I
- Lampiran XXV : Rekapitulasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya
- Lampiran XXVI : Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I
- Lampiran XXVII : Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga
- Lampiran XXVIII : Rincian Pendapatan Diterima Di Muka Per Satker
- Lampiran XXIX : Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
- Lampiran XXX : Rincian Koreksi Lain-Lain
- Lampiran XXXI : Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk
- Lampiran XXXII : Rekapitulasi Satker Inaktif yang Saldonya Dialihkan ke Satker Pusat
- Lampiran XXXIII : Rekapitulasi Ketidaksiesuaian Kode Akun vs Kode BMN Kementerian Dalam Negeri Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014

Lampiran : Daftar Rekening Kementerian Dalam Negeri  
XXXIV

## **B. DAFTAR LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN**

Lampiran Neraca Percobaan Akruwal Tingkat Kemendagri Per 1 Januari 2024

Lampiran Neraca Percobaan Akruwal Tingkat Kemendagri Per 31 Desember 2024

Lampiran Neraca Percobaan Kas Tingkat Kemendagri Per 31 Desember 2024

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka COVID-19 Tingkat Kemendagri Menurut Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kemendagri Menurut Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Wilayah/Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kemendagri Menurut Eselon I/Akun Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Lampiran Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) *Audited* T.A. 2024

Lampiran Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 *Audited* yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sepanjang sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan selaku Menteri Dalam Negeri.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2025

**MENTERI DALAM NEGERI,**



**MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semesteran dan Tahunan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp972.605.329.846,00 atau mencapai 133,89% dari estimasi pendapatan sebesar Rp726.399.819.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.169.335.036.396,00 atau mencapai 96,55% dari alokasi anggaran sebesar Rp5.354.037.566.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp17.468.025.720.161,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp406.229.319.023,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp16.539.724.528.503,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp99.725.566,00 dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya) sebesar Rp521.972.147.069,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp562.243.848.997,00 dan Rp16.905.781.871.164,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp922.205.703.793,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.796.856.511.033,00 sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp3.874.650.807.240,00). Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.350.465.192,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp3.870.300.342.048,00).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp16.599.721.292.944,00, ditambah Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp3.870.300.342.048,00), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah/(mengurangi) Ekuitas sebesar (Rp1.436.536.902,00) dan transaksi antar entitas sebesar Rp4.177.797.457.170,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.905.781.871.164,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode pelaporan 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>					
<b>Pendapatan Perpajakan</b>		0	0	0,00	0
Pajak Dalam Negeri		0	0	0,00	0
Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0,00	0
<b>Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>B.1</b>	<b>726.399.819.000</b>	<b>972.605.329.846</b>	<b>133,89</b>	<b>881.280.249.636</b>
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0,00	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0,00	0
Pendapatan BLU		0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		726.399.819.000	972.605.329.846	133,89	881.280.249.636
<b>Pendapatan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>					
		<b>726.399.819.000</b>	<b>972.605.329.846</b>	<b>133,89</b>	<b>881.280.249.636</b>
<b>BELANJA NEGARA</b>					
	<b>B.2.</b>				
<b>Belanja Pemerintah Pusat</b>		<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.169.335.036.396</b>	<b>96,55</b>	<b>4.265.153.052.424</b>
Belanja Pegawai	B.3	879.202.795.000	870.809.194.004	99,05	825.439.024.218
Belanja Barang	B.4	3.809.656.702.000	3.635.460.169.466	95,43	3.194.834.083.702
Belanja Modal	B.5	665.178.069.000	663.065.672.926	99,68	244.879.944.504
Belanja Pembayaran Bunga Utang		0	0	0,00	0
Belanja Subsidi		0	0	0,00	0
Belanja Hibah		0	0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0,00	0
Belanja Lain-lain		0	0	0,00	0
<b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Transfer ke Daerah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Dana Perimbangan		0	0	0,00	0
Dana Transfer Umum		0	0	0,00	0
Dana Bagi Hasil		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Umum		0	0	0,00	0
Dana Transfer Khusus		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Khusus Fisik		0	0	0,00	0
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0	0,00	0
Dana Insentif Daerah		0	0	0,00	0
Dana Keistimewaan DIY		0	0	0,00	0
Dana Otonomi Khusus		0	0	0,00	0
Dana Desa		0	0	0,00	0
Hibah Kepada Daerah		0	0	0,00	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>					
		<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.169.335.036.396</b>	<b>96,55</b>	<b>4.265.153.052.424</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	2024				2023			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>726.399.819.000</b>	<b>972.605.329.846</b>	<b>246.205.510.846</b>	<b>133,89</b>	<b>467.710.176.000</b>	<b>881.280.249.636</b>	<b>(413.570.073.636)</b>	<b>188,42</b>
	1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	3. Pendapatan BLU	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	726.399.819.000	972.605.329.846	246.205.510.846	133,89	467.710.176.000	881.280.249.636	(413.570.073.636)	188,42
	<b>III. Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I+A.II+A.III)</b>	<b>726.399.819.000</b>	<b>972.605.329.846</b>	<b>246.205.510.846</b>	<b>133,89</b>	<b>467.710.176.000</b>	<b>881.280.249.636</b>	<b>(413.570.073.636)</b>	<b>188,42</b>
	<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.169.335.036.396</b>	<b>(184.702.529.604)</b>	<b>96,55</b>	<b>4.385.969.126.000</b>	<b>4.265.153.052.424</b>	<b>120.816.073.576</b>	<b>97,25</b>
	1. Belanja Pegawai	879.202.795.000	870.809.194.004	(8.393.600.996)	99,05	828.044.726.000	825.439.024.218	2.605.701.782	99,69
	2. Belanja Barang	3.809.656.702.000	3.635.460.169.466	(174.196.532.534)	95,43	3.312.510.979.000	3.194.834.083.702	117.676.895.298	96,45
	3. Belanja Modal	665.178.069.000	663.065.672.926	(2.112.396.074)	99,68	245.413.421.000	244.879.944.504	533.476.496	99,78
	4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	5. Belanja Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	6. Belanja Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	2024				2023			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>II. Transfer ke Daerah</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	4. Dana Otonomi Daerah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	6. Dana Desa	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	7. Insentif Fiskal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>Jumlah Belanja Negara (B.I+B.II)</b>	<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.169.335.036.396</b>	<b>(184.702.529.604)</b>	<b>96,55</b>	<b>4.385.969.126.000</b>	<b>4.265.153.052.424</b>	<b>(120.816.073.576)</b>	<b>97,25</b>
	<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta Mei 2025  
Menteri Dalam Negeri,  
  
Muhammad Tito Karnavian



# NERACA

## II. NERACA

### KEMENTERIAN DALAM NEGERI NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	112.599.303	56.709.120
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	2.343.805.012
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	64.956.638.835	231.660.949.224
Belanja Dibayar Dimuka	C.4	299.007.100	7.050.534.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	94.651.450	124.718.757
Piutang Bukan Pajak	C.6	12.640.675.594	13.536.525.594
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(11.043.686.930)	(9.844.326.180)
Bagian Lancar TP/TGR	C.8	300.680.096	78.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	(1.503.401)	-
Persediaan	C.10	338.870.256.976	204.121.721.283
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>406.229.319.023</b>	<b>449.128.636.810</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.11	13.251.627.720.522	13.166.366.737.522
Peralatan dan Mesin	C.12	4.156.760.195.772	3.663.742.657.834
Gedung dan Bangunan	C.13	2.922.592.918.649	2.904.113.214.212
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.14	299.793.586.980	293.820.847.621
Aset Tetap Lainnya	C.15	95.015.581.772	160.744.484.125
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.16	25.366.869.749	29.571.282.509
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.17	(4.211.432.344.941)	(4.002.301.576.867)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>16.539.724.528.503</b>	<b>16.216.057.646.956</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.18	17.950.315.934	17.850.089.235
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.19	(17.850.590.368)	(17.850.089.235)
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>99.725.566</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.20	830.510.381.843	744.115.321.306
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21	384.325.357.961	54.982.239.721
Aset Lain-Lain	C.22	182.864.064.500	211.955.882.101
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(875.727.657.235)	(865.096.598.431)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>521.972.147.069</b>	<b>145.956.844.697</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>17.468.025.720.161</b>	<b>16.811.143.128.463</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	401.816.267.044	83.654.061.625
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	160.307.263.241	127.686.367.506
Uang Muka dari KPPN	C.26	112.599.303	56.709.120
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27	7.719.409	24.697.268
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>562.243.848.997</b>	<b>211.421.835.519</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>562.243.848.997</b>	<b>211.421.835.519</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	16.905.781.871.164	16.599.721.292.944
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>16.905.781.871.164</b>	<b>16.599.721.292.944</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>17.468.025.720.161</b>	<b>16.811.143.128.463</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2024	2023	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	112.599.303	56.709.120	55.890.183	98,56
Kas di Bendahara Penerimaan	0	2.343.805.012	(2.343.805.012)	(100,00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	64.956.638.835	231.660.949.224	(166.704.310.389)	(71,96)
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	299.007.100	7.050.534.000	(6.751.526.900)	(95,76)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	94.651.450	124.718.757	(30.067.307)	(24,11)
Piutang Bukan Pajak	12.640.675.594	13.536.525.594	(895.850.000)	(6,62)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(11.043.686.930)	(9.844.326.180)	(1.199.360.750)	12,18
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>1.596.988.664</b>	<b>3.692.199.414</b>	<b>(2.095.210.750)</b>	<b>(56,75)</b>
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	300.680.096	78.000.000	222.680.096	285,49
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1.503.401)	0	(1.503.401)	0,00
<b>BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)</b>	<b>299.176.695</b>	<b>78.000.000</b>	<b>221.176.695</b>	<b>283,56</b>
Persediaan	338.870.256.976	204.121.721.283	134.748.535.693	66,01
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>406.229.319.023</b>	<b>449.128.636.810</b>	<b>(42.899.317.787)</b>	<b>(9,55)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	13.251.627.720.522	13.166.366.737.522	85.260.983.000	0,65
Peralatan dan Mesin	4.156.760.195.772	3.663.742.657.834	493.017.537.938	13,46
Gedung dan Bangunan	2.922.592.918.649	2.904.113.214.212	18.479.704.437	0,64
Jalan Irigasi dan Jaringan	299.793.586.980	293.820.847.621	5.972.739.359	2,03
Aset Tetap Lainnya	95.015.581.772	160.744.484.125	(65.728.902.353)	(40,89)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.366.869.749	29.571.282.509	(4.204.412.760)	(14,22)
Akumulasi Penyusutan	(4.211.432.344.941)	(4.002.301.576.867)	(209.130.768.074)	5,23
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>16.539.724.528.503</b>	<b>16.216.057.646.956</b>	<b>323.666.881.547</b>	<b>2,00</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	17.950.315.934	17.850.089.235	100.226.699	0,56
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi	(17.850.590.368)	(17.850.089.235)	(501.133)	0,00
<b>TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)</b>	<b>99.725.566</b>	<b>0</b>	<b>99.725.566</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>99.725.566</b>	<b>0</b>	<b>99.725.566</b>	<b>0,00</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2024	2023	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	830.510.381.843	744.115.321.306	86.395.060.537	11,61
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	384.325.357.961	54.982.239.721	329.343.118.240	599,00
Aset Lain-lain	182.864.064.500	211.955.882.101	(29.091.817.601)	(13,73)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(875.727.657.235)	(865.096.598.431)	(10.631.058.804)	1,23
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>521.972.147.069</b>	<b>145.956.844.697</b>	<b>376.015.302.372</b>	<b>257,62</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>17.468.025.720.161</b>	<b>16.811.143.128.463</b>	<b>656.882.591.698</b>	<b>3,91</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang Kepada Pihak Ketiga	401.816.267.044	83.654.061.625	318.162.205.419	380,33
Pendapatan Diterima Dimuka	160.307.263.241	127.686.367.506	32.620.895.735	25,55
Uang Muka dari KPPN	112.599.303	56.709.120	55.890.183	98,56
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.719.409	24.697.268	(16.977.859)	(68,74)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>562.243.848.997</b>	<b>211.421.835.519</b>	<b>350.822.013.478</b>	<b>165,93</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>562.243.848.997</b>	<b>211.421.835.519</b>	<b>350.822.013.478</b>	<b>165,93</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	16.905.781.871.164	16.599.721.292.944	306.060.578.220	1,84
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.905.781.871.164</b>	<b>16.599.721.292.944</b>	<b>306.060.578.220</b>	<b>1,84</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.905.781.871.164</b>	<b>16.599.721.292.944</b>	<b>306.060.578.220</b>	<b>1,84</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN</b>	<b>17.468.025.720.161</b>	<b>16.811.143.128.463</b>	<b>656.882.591.698</b>	<b>3,91</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta Mei 2025

Menteri Dalam Negeri,



Muhammad Tito Karnavian



# LAPORAN OPERASIONAL

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	922.205.703.793	747.377.561.641
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>922.205.703.793</b>	<b>747.377.561.641</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	864.086.036.643	826.005.414.719
Beban Persediaan	D.3	19.970.224.791	21.794.582.829
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.478.607.689.361	2.196.254.071.643
Beban Pemeliharaan	D.5	132.764.844.357	125.554.899.637
Beban Perjalanan Dinas	D.6	581.369.053.204	581.055.989.412
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	341.841.028.210	319.337.106.602
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	376.790.972.933	298.246.135.111
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	1.426.661.534	1.171.673.142
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>4.796.856.511.033</b>	<b>4.369.419.873.095</b>
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		<b>(3.874.650.807.240)</b>	<b>(3.622.042.311.454)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	1.941.411.725	2.218.013.487
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		10.076.972.716	304.297.318
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		12.681.234.768	6.769.867.037
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		195.208.585	166.871.413
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>4.350.465.192</b>	<b>8.516.711.793</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(3.870.300.342.048)</b>	<b>(3.613.525.599.661)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	D.11	0	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) - LO</b>		<b>(3.870.300.342.048)</b>	<b>(3.613.525.599.661)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2024	2023	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	0	0	0	
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	0	0	0	
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
<b>Jumlah Pendapatan Perpajakan</b>	0	0	0	
<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	922.205.703.793	747.377.561.641	174.828.142.152	23,392
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>	<b>922.205.703.793</b>	<b>747.377.561.641</b>	<b>174.828.142.152</b>	<b>23,392</b>
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
<b>Jumlah Pendapatan Hibah</b>	0	0	0	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>922.205.703.793</b>	<b>747.377.561.641</b>	<b>174.828.142.152</b>	<b>23,392</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	0	0	0	
Beban Pegawai	864.086.036.643	826.005.414.719	38.080.621.924	4,610
Beban Persediaan	19.970.224.791	21.794.582.829	(1.824.358.038)	(8,371)
Beban Barang dan Jasa	2.478.607.689.361	2.196.254.071.643	282.353.617.718	12,856
Beban Pemeliharaan	132.764.844.357	125.554.899.637	7.209.944.720	5,742
Beban Perjalanan Dinas	581.369.053.204	581.055.989.412	313.063.792	0,054
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	341.841.028.210	319.337.106.602	22.503.921.608	7,047
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	376.790.972.933	298.246.135.111	78.544.837.822	26,336
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.428.661.534	1.171.673.142	254.988.392	21,763
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>4.796.856.511.033</b>	<b>4.369.419.873.095</b>	<b>427.436.637.938</b>	<b>9,782</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(3.874.650.807.240)</b>	<b>(3.622.042.311.454)</b>	<b>(252.608.495.786)</b>	<b>6,974</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2024	2023	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0	0	0	
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET</b>	(8.135.560.991)	1.913.716.169	(10.049.277.160)	(525,118)
Pendapatan Pelepasan Aset	1.941.411.725	2.218.013.487	(276.601.762)	(12,471)
Beban Pelepasan Aset	10.076.972.716	304.297.318	9.772.675.398	3.211,555
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	12.486.026.183	6.602.995.624	5.883.030.559	89,096
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.681.234.768	6.769.867.037	5.911.367.731	87,319
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	195.208.585	166.871.413	28.337.172	16,981
<b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	4.350.465.192	8.516.711.793	(4.166.246.601)	(48,918)
<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(3.870.300.342.048)	(3.613.525.599.661)	(256.774.742.387)	7,106
<b>POS LUAR BIASA</b>	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
<b>POS LUAR BIASA</b>	0	0	0	
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>	(3.870.300.342.048)	(3.613.525.599.661)	(256.774.742.387)	7,106

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta Mei 2025  
Menteri Dalam Negeri,



Muhammad Tito Karnavian



# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	16.599.721.292.944	15.835.604.107.918
SURPLUS/(DEFISIT) LO	E.2	(3.870.300.342.048)	(3.613.525.599.661)
KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI) EKUITAS	E.3	(1.436.536.902)	(19.241.506.205)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	395.757	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2	(1.285.557.409)	(19.005.933.912)
Koreksi Lain-lain	E.3.3	(151.375.250)	(235.572.293)
JUMLAH		<b>(1.436.536.902)</b>	<b>(19.241.506.205)</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.177.797.457.170	4.396.884.290.892
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>16.905.781.871.164</b>	<b>16.599.721.292.944</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2024	2023	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>EKUITAS AWAL</b>	16.599.721.292.944	15.835.604.107.918	764.117.185.026	4,83
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(3.870.300.342.048)	(3.613.525.599.661)	(256.774.742.387)	7,11
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	(1.436.536.902)	(19.241.506.205)	17.804.969.303	(92,53)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	395.757	0	395.757	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.285.557.409)	(19.005.933.912)	17.720.376.503	(93,24)
Lain-lain	(151.375.250)	(235.572.293)	84.197.043	(35,74)
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	4.177.797.457.170	4.396.884.290.892	(219.086.833.722)	(4,98)
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	306.060.578.220	764.117.185.026	(458.056.606.806)	(59,95)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	16.905.781.871.164	16.599.721.292.944	306.060.578.220	1,84

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, Mei 2025  
Menteri Dalam Negeri,



Muhammad Tito Karnavian



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Dalam Negeri

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri mengatur tugas Kementerian Dalam Negeri dalam hal menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan

Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi objektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Visi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).

2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, yaitu:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
  - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - 1) Indeks Demokrasi Indonesia.
    - 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu.
    - 3) Indeks Kinerja Ormas.
  - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    - 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    - 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    - 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
  - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
  - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - 1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
    - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2 ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - 1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

- 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
  - 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
  - 4) Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
  - 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
  - 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
  - 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
  - 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
  - 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3 ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
  - 1) Indeks Pengawasan Internal.
  - 2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri memiliki kewajiban untuk melaksanakan tujuh Prioritas Nasional. Rincian alokasi anggaran dan realisasi belanja bruto sampai dengan 31 Desember 2024 dari tujuh Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1**

**Pagu dan Realisasi Belanja Bruto untuk Pelaksanaan Prioritas Nasional s.d. 31 Desember 2024**

Kode PN	Uraian PN	Pagu Belanja Rupiah	Realisasi Belanja Bruto Rupiah	%
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.235.136.000	2.914.617.768	90,09
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	179.014.225.000	161.629.966.506	90,29
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	20.637.826.000	19.703.930.425	95,47
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4.130.711.000	3.884.710.214	94,04
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	31.326.732.000	27.472.583.200	87,70
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	2.778.103.000	2.503.925.835	90,13
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	150.289.996.000	148.414.728.857	98,75
<b>JUMLAH</b>		<b>391.412.729.000</b>	<b>366.524.462.805</b>	<b>93,64</b>

Rincian pagu belanja dan realisasi belanja s.d 31 Desember 2024 untuk masing-masing Prioritas Nasional berdasarkan penanggung jawab Unit Eselon I disajikan pada Catatan Penting Lainnya bagian Laporan Realisasi Anggaran.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 disusun untuk tujuan umum dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan diharapkan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan entitas Kementerian Dalam Negeri.

Laporan keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terdapat ketentuan yang mengatur bahwa SAI diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Satker sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga untuk memproses data transaksi keuangan, barang dan transaksi lainnya. Pemrosesan transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga. Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan SAI diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI diterbitkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab melalui sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi, yaitu Sistem SAKTI.

SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

SAKTI diterapkan dalam sembilan modul, yaitu Modul Administrasi, Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul GL dan Pelaporan (GLP). Data transaksi yang dihasilkan Aplikasi SAKTI digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan SAKTI didukung oleh Aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk monitoring data dan transaksi SAKTI.

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Dalam Negeri yang meliputi eselon I, dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri terdiri dari 11 Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pada Eselon I Setjen terdapat satuan kerja IPDN yang merupakan Lembaga Pendidikan Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. IPDN merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22.701 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Struktur Organisasi dan Tata Kerja IPDN mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, IPDN Kampus Jakarta tidak berdiri sendiri sebagai satuan kerja. IPDN Kampus Jakarta melebur menjadi bagian dari struktur organisasi satuan kerja IPDN Jatinangor yang berada dibawah Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Peleburan IPDN Kampus Jakarta tersebut telah dilaksanakan pada Tahun 2024. Program studi diselenggarakan di IPDN

Kampus Jatinangor dan Kampus Daerah. Terdapat enam IPDN Kampus di Daerah yang berdiri sebagai satuan kerja yang mengelola anggaran sendiri, yaitu IPDN Kampus Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa, IPDN Kampus Sumatera Barat di Kabupaten Agam, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah, IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah, dan IPDN Kampus Papua di Kota Jayapura.

Pada Eselon I Setjen juga terdapat satker Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yaitu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2024, Eselon I Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki satker Dekonsentrasi sebanyak 124 satker yang tersebar di 34 provinsi dan satker Tugas Pembantuan sebanyak 1 satker, yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu.
4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eselon

I Ditjen Bina Pemerintahan Desa membawahi tiga satker daerah, yaitu Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, dan Balai Pemerintahan Desa Lampung.

7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Inspektorat Jenderal  
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri  
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi lima satker daerah, yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Jumlah satuan kerja dengan status aktif di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 sebanyak 152 satker. Rincian jumlah satker dengan status aktif pada masing-masing Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Jumlah Satker Aktif Menurut Unit Eselon I**

NO	KODE ES1	UNIT ESELON I	KP	KD	DK	TP	JUMLAH
1	01	SEKRETARIAT JENDERAL	3	6	-	-	9
2	02	INSPEKTORAT JENDERAL	1	-	-	-	1
3	03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1	-	-	-	1
4	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1	-	124	1	126
5	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	1	3	-	-	4
6	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1	-	-	-	1
7	07	DITJEN OTONOMI DAERAH	1	-	-	-	1
8	08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	-	-	-	1
9	09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	1	-	-	-	1
10	11	BADAN PELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	-	-	-	1
11	12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	5	-	-	6
JUMLAH			13	14	124	1	152

Kementerian Dalam Negeri memiliki satker inaktif bersaldo untuk periode pelaporan Tahun 2024. Satker yang masih menyajikan saldo pada akun-akun Neraca per 31 Desember 2024 sebanyak empat satker, yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Tanimbar, Sekretariat Daerah Kabupaten Morotai, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malinau pada Unit Eselon I Ditjen BAK, serta Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Unit Eselon I BPSDM. Selain itu, terdapat satu satker yang telah dilikuidasi dengan menyelesaikan saldo aset dan kewajiban selama periode pelaporan Tahun 2024, yaitu IPDN Kampus Jakarta. Dengan demikian Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 ini merupakan konsolidasi laporan keuangan 11 Unit Eselon I yang berstatus entitas akuntansi dan 156 satker yang berstatus entitas akuntansi.

*Basis Akuntansi*

**A.3. Basis Akuntansi**

Kementerian Dalam Negeri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai

perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan*

*Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan akuntansi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-*

*LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

#### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Dalam hal terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka kas disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas yang dikelola Kementerian Dalam Negeri terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya dan Setara Kas.
- Piutang Bukan Pajak dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang berdasarkan pungutan diakui dengan memperhatikan terpenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.
- Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan dalam neraca dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu membentuk penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

#### Aset Tetap

#### **Aset Tetap**

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisihnya tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah berdasarkan keputusan pertimbangan entitas bahwa BMN tersebut tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional, sehingga tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus disajikan pada pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan akan mereklasifikasi saldo akun Aset Tetap ke akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas ke pengelola barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan tersebut disajikan pada pos tersendiri dalam neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset Lainnya*

**Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB meliputi *software*, hak paten dan hak cipta, *lisensi* dan waralaba (*franchise*), hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan ATB lainnya.
- ATB diakui jika memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki oleh entitas, mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa di masa depan, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

- ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya, atau meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi.
- Pengeluaran untuk memperoleh ATB melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas, harus dapat dibedakan antara tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap penelitian atau riset diakui sebagai beban pada saat terjadi. Seluruh pengeluaran untuk kegiatan pada tahap pengembangan, apabila telah memenuhi kriteria pengakuan, dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan. Dalam hal terdapat tahapan setelah implementasi/operasionalisasi, umumnya dalam pengembangan *software* komputer, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Terhadap kondisi tersebut maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi. Transaksi penghentian BMN dari penggunaan akan mereklasifikasi saldo akun ATB ke akun Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113) sesuai dengan nomenklatur pada Bagan Akun Standar.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar saldo di rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) atas pengeluaran belanja yang belum diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran atau terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- Aset Lain-lain dapat berupa Aset Tetap dan ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Aset lain-lain tersebut terdiri atas Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112) dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (166113).
- Aset Lain-lain diakui pada saat Aset Tetap dan ATB dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.
- Aset Tetap dan ATB yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap/ATB menjadi objek penyusutan dan amortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan Aset Tetap dan amortisasi Aset Tak Berwujud.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## *Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

### **(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Kriteria Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan berdasarkan Aplikasi Monsakti. Kemendagri melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, salah satunya penerimaan Pinjaman dan Hibah Tahun 2024.

Perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja tersaji pada tabel 6.

**Tabel 6**  
**Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Perubahan (Rp)
<b>Estimasi Pendapatan</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	59.137.754.000	726.399.819.000	667.262.065.000
<b>Total Estimasi Pendapatan</b>	<b>59.137.754.000</b>	<b>726.399.819.000</b>	667.262.065.000
<b>Pagu Belanja</b>			
Belanja Pegawai	954.255.697.000	879.202.795.000	(75.052.902.000)
Belanja Barang	2.253.083.741.000	3.809.656.702.000	1.556.572.961.000
Belanja Modal	141.532.319.000	665.178.069.000	523.645.750.000
<b>Jumlah Pagu Belanja</b>	<b>3.348.871.757.000</b>	<b>5.354.037.566.000</b>	<b>2.005.165.809.000</b>

Perubahan pagu belanja berdasarkan program Kemendagri tersaji pada tabel 7.

**Tabel 7**  
**Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program**

Kode	Program	Anggaran TA 2024	
		Awal	Setelah Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen	2.102.798.091.000	2.375.124.874.000
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	397.436.990.000	1.658.647.723.000
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	691.283.486.000	1.162.640.058.000
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	157.353.190.000	157.624.911.000
<b>Total Pagu Belanja</b>		<b>3.348.871.757.000</b>	<b>5.354.037.566.000</b>

Perubahan pagu belanja disebabkan karena penambahan dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Hibah Langsung Dalam Negeri dan Luar Negeri, serta PNB. Penambahan pagu belanja yang signifikan, antara lain berasal dari Pinjaman Luar Negeri pada satker Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Dukcapil, dan Ditjen Bina Bangda, pagu hasil koreksi Hibah Langsung Luar Negeri dari Uni Emirat Arab pada satker Ditjen Bina Bangda, Pagu PNB pada satker Ditjen Dukcapil. Selain itu, terdapat penambahan pagu belanja yang berasal dari persetujuan tambahan pagu belanja yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk pengadaan server pada satker Setjen.

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp972.605.329.846,  
00*

### B.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp972.605.329.846,00 atau 133,89% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp726.399.819.000,00. Keseluruhan pendapatan

Kemendagri merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) tersaji pada Tabel 8.

**Tabel 8**  
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan**  
**untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2024 per Kode MAP**

Kode MAP	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	316.848.000	1.796.591.725	567,02
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	144.820.000	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.996.307.000	4.139.701.108	207,37
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	102.171.000	271.988.700	266,21
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	37.824.050	0,00
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	24.227.000	46.796.500	193,16
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	227.500.000	217.250.000	95,49
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	18.300.696.000	18.834.607.112	102,92
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	460.000.000	512.177.400	111,34
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	57.328.763.000	58.681.374.000	102,36
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	11.238.628.000	11.219.224.000	99,83
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	636.404.679.000	863.415.196.000	135,67
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	203.832	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	114.960.000	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	78.539.029	0,00
425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	5.437.000	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	157.509.012	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	12.304.420.736	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	568.274.668	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	58.434.974	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>726.399.819.000</b>	<b>972.605.329.846</b>	<b>133,89</b>

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per tanggal pelaporan berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 9.

**Tabel 9**  
**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan**  
**untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2024 per Eselon I**

No	Eselon I	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
1	Setjen	20.727.797.000	27.455.178.729	132,46
2	Itjen	-	302.113.155	0,00
3	Ditjen Polpum	-	141.897.551	0,00
4	Ditjen Bina Adwil	-	810.701.626	0,00
5	Ditjen Bina Pemdes	852.610.000	4.310.043.515	505,51
6	Ditjen Bina Bangda	450.000.000	3.702.959.209	822,88
7	Ditjen Otda	-	61.401.202	0,00
8	Ditjen Dukcapil	636.404.679.000	864.477.683.755	135,84
9	Ditjen Bina Keuda	-	118.018.368	0,00
10	BSKDN	-	34.288.826	0,00
11	BPSDM	67.964.733.000	71.191.043.910	104,75
<b>Jumlah</b>		<b>726.399.819.000</b>	<b>972.605.329.846</b>	<b>133,89</b>

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan per satker disajikan pada **Lampiran I** (Rekap Laporan PNBP).

Rincian realisasi pendapatan per tanggal pelaporan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 berdasarkan Eselon I tersaji pada tabel 10.

**Tabel 10**  
**Perbandingan Realisasi PNB**  
**untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I**

No	Eselon I	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Naik (Turun) %
1	Setjen	27.455.178.729	23.384.601.170	17,41
2	Itjen	302.113.155	198.676.486	52,06
3	Ditjen Polpum	141.897.551	977.039.243	(85,48)
4	Ditjen Bina Adwil	810.701.626	1.102.502.114	(26,47)
5	Ditjen Bina Pemdes	4.310.043.515	1.769.527.376	143,57
6	Ditjen Bina Bangda	3.702.959.209	2.147.576.462	72,43
7	Ditjen Otda	61.401.202	133.988.741	(54,17)
8	Ditjen Dukcapil	864.477.683.755	795.078.317.795	8,73
9	Ditjen Bina Keuda	118.018.368	10.025.240	1.077,21
10	BSKDN	34.288.826	552.472.128	(93,79)
11	BPSDM	71.191.043.910	55.925.522.881	27,30
<b>Jumlah</b>		<b>972.605.329.846</b>	<b>881.280.249.636</b>	<b>10,36</b>

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp972.605.329.846,00 mengalami kenaikan sebesar 10,36% dibandingkan realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp881.280.249.636,00. Kenaikan pendapatan ini karena bertambahnya nilai PNBP fungsional berupa Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi yang merupakan pendapatan dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri pasal 1 ayat (1) huruf f, yaitu pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada Ditjen Dukcapil.

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp58.434.974,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Satker BPSDM sebesar Rp58.377.354,00 berasal dari pembayaran pemakaian listrik PT. MAC Periode 31 Mei 2023 sampai dengan 17 September 2024 sebesar Rp56.534.398,00 dan penerimaan atas adanya kelebihan setor ke rekening Bank Mandiri milik Bendahara Penerimaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan 31 calon peserta diklat sebesar Rp1.842.956,00.
2. Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp57.620,00 berasal dari kelebihan setor pengembalian UP.

Terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp34.000.000,00 pada satker PPSDM Regional DI Yogyakarta yang berasal dari pengembalian biaya pelaksanaan diklat yang disetor dua kali oleh peserta diklat.

## B.2. BELANJA

Realisasi belanja Kemendagri sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.169.335.036.396,00 atau 96,55% dari anggaran belanja sebesar Rp5.354.037.566.000,00. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 21,20% dibandingkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.265.153.052.424,00. Rincian anggaran belanja dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 menurut jenis belanja disajikan pada tabel 11.

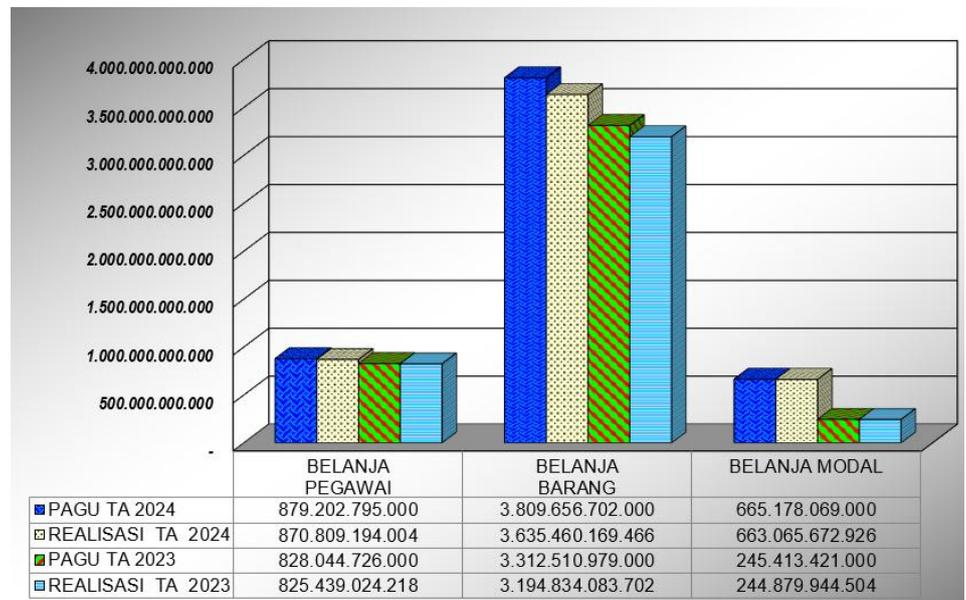
**Tabel 11**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	2024		%	2023		%	Selisih Realisasi Belanja	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Rp	%
<b>Belanja Bruto</b>								
Belanja Pegawai	879.202.795.000	871.025.629.871	99,07	828.044.726.000	825.664.657.615	99,71	45.360.972.256	5,49
Belanja Barang	3.809.656.702.000	3.638.733.335.388	95,51	3.312.510.979.000	3.200.335.088.613	96,61	438.398.246.775	13,70
Belanja Modal	665.178.069.000	663.082.040.140	99,68	245.413.421.000	244.887.226.204	99,79	418.194.813.936	170,77
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.172.841.005.399</b>	<b>96,62</b>	<b>4.385.969.126.000</b>	<b>4.270.886.972.432</b>	<b>97,38</b>	<b>901.954.032.967</b>	<b>21,12</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>								
Belanja Pegawai	-	216.435.867	0,00	-	225.633.397	0,00	(9.197.530)	(4,08)
Belanja Barang	-	3.273.165.922	0,00	-	5.501.004.911	0,00	(2.227.838.989)	(40,50)
Belanja Modal	-	16.367.214	0,00	-	7.281.700	0,00	9.085.514	124,77
<b>Total Pengembalian Belanja</b>	<b>-</b>	<b>3.505.969.003</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>5.733.920.008</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.227.951.005)</b>	<b>(38,86)</b>
<b>Belanja Neto</b>	<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.169.335.036.396</b>	<b>96,55</b>	<b>4.385.969.126.000</b>	<b>4.265.153.052.424</b>	<b>97,25</b>	<b>904.181.983.972</b>	<b>21,20</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Satker disajikan pada **Lampiran II** (Rekap Laporan Belanja).

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja disajikan pada Grafik 1.

**Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto**  
**T.A. 2024 dan T.A. 2023**



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 12.

**Tabel 12**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program**  
**s.d. 31 Desember 2024**

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
WA	Program Dukungan Manajemen	2.375.124.874.000	2.355.323.408.217	99,17
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	1.658.647.723.000	1.506.406.812.834	90,82
CP	Program Tata Kelola Kependudukan	1.162.640.058.000	1.150.674.313.319	98,97
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	157.624.911.000	156.930.502.026	99,56
<b>Jumlah</b>		<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.169.335.036.396</b>	<b>96,55</b>

Rincian anggaran dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 31 Desember 2024 dan realisasi belanja per unit Eselon I sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 13.

**Tabel 13**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Unit Eselon I**

No	Eselon I	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja Bruto 2024 (Rp)	%	Realisasi Belanja Bruto 2023 (Rp)
1	Setjen	1.342.600.757.000	1.335.056.785.902	99,44	1.141.714.627.370
2	Itjen	88.732.681.000	88.261.883.714	99,47	76.327.570.032
3	Ditjen Polpum	221.138.641.000	220.430.489.194	99,68	262.426.990.383
4	Ditjen Bina Adwil	224.738.969.000	210.972.613.374	93,87	216.002.195.003
5	Ditjen Bina Pemdes	1.214.621.448.000	1.093.324.279.868	90,01	995.603.694.324
6	Ditjen Bina Bangda	491.910.565.000	480.348.606.361	97,65	278.275.924.659
7	Ditjen Otda	95.012.875.000	91.113.353.918	95,90	97.292.315.659
8	Ditjen Dukcapil	1.278.777.600.000	1.261.819.250.731	98,67	851.178.841.610
9	Ditjen Bina Keuda	110.137.836.000	107.493.995.075	97,60	80.883.517.783
10	BSKDN	55.559.478.000	54.579.518.742	98,24	51.948.036.955
11	BPSDM	230.806.716.000	229.440.228.520	99,41	219.233.258.654
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.172.841.005.399</b>	<b>96,62</b>	<b>4.270.886.972.432</b>

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja transaksi kas yang terjadi pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Pengembalian belanja atas belanja yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.505.969.003,00.

Rincian realisasi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Eselon I disajikan pada tabel 14.

**Tabel 14**  
**Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Eselon I**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No	Eselon I	Pengembalian Belanja 31 Desember 2024 (Rp)	Pengembalian Belanja 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Setjen	1.214.610.332	1.117.365.148	8,70
2	Itjen	62.222.712	84.047.128	(25,97)
3	Ditjen Polpum	17.948.093	60.596.542	(70,38)
4	Ditjen Bina Adwil	182.980.289	260.894.118	(29,86)
5	Ditjen Bina Pemdes	1.009.767.112	2.261.368.034	(55,35)
6	Ditjen Bina Bangda	376.801.092	273.915.462	37,56
7	Ditjen Otda	210.146.937	120.778.475	73,99
8	Ditjen Dukcapil	135.368.324	1.304.686.127	(89,62)
9	Ditjen Bina Keuda	165.708.509	95.704.872	73,15
10	BSKDN	24.632.380	89.620.413	(72,51)
11	BPSDM	105.783.223	64.943.689	62,88
<b>Jumlah Pengembalian</b>		<b>3.505.969.003</b>	<b>5.733.920.008</b>	<b>(38,86)</b>

Realisasi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.227.951.005,00 atau sebesar 38,86% dibandingkan dengan pengembalian realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Neto sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel 15.

**Tabel 15**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Neto s.d.**  
**31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Jenis Belanja	Realisasi Belanja Neto 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Neto 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	870.809.194.004	825.439.024.218	5,50
Belanja Barang	3.635.460.169.466	3.194.834.083.702	13,79
Belanja Modal	663.065.672.926	244.879.944.504	170,77
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.169.335.036.396</b>	<b>4.265.153.052.424</b>	<b>21,20</b>

*Realisasi Belanja Pegawai  
Rp870.809.194.004,00*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp870.809.194.004,00 atau 99,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp879.202.795.000,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,50% dibandingkan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp825.439.024.218,00. Kenaikan belanja pegawai ini disebabkan adanya pengangkatan CPNS menjadi PNS yang berasal dari Purna Praja IPDN Angkatan XXIX dan XXX serta adanya pengangkatan pegawai PPPK. Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 16.

**Tabel 16**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Urian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	436.547.676.918	441.628.889.919	(1,15)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.399.008.376	1.689.301.400	42,01
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	348.272.400	-	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	2.599.238.722	146.688.200	1.671,95
Belanja Lembur	16.557.715.000	11.751.979.000	40,89
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	412.573.718.455	370.447.799.096	11,37
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>871.025.629.871</b>	<b>825.664.657.615</b>	<b>5,49</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	216.435.867	225.633.397	(4,08)
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>870.809.194.004</b>	<b>825.439.024.218</b>	<b>5,50</b>

*Belanja Barang*  
*Rp3.635.460.169.466,00*

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.635.460.169.466,00 atau 95,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.809.656.702.000,00. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan 13,79% dibandingkan realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp440.626.085.764,00. Kenaikan belanja ini terjadi karena realisasi belanja untuk pengadaan KTP-*el* pada Ditjen Dukcapil yang berasal dari PNBP dan hibah langsung dalam bentuk uang serta terdapat tambahan realisasi belanja yang bersumber dari PHLN pada Ditjen Bina Pemdes dan Ditjen Bina Bangda. Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada tabel 17.

**Tabel 17**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Barang**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
<b>Belanja Bruto</b>			
Belanja Barang Operasional	301.658.037.735	307.250.165.190	(1,82)
Belanja Barang Non Operasional	308.059.008.029	294.734.942.059	4,52
Belanja Barang Persediaan	41.286.970.581	35.843.755.648	15,19
Belanja Jasa	1.834.504.759.148	1.567.780.150.546	17,01
Belanja Pemeliharaan	135.189.625.734	130.114.777.061	3,90
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	564.784.606.521	574.988.026.140	(1,77)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	13.783.572.232	10.402.294.573	32,51
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	149.547.745.904	1.472.959.988	10.052,87
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas	865.762.700	4.308.172.630	(79,90)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	289.053.246.804	273.439.844.778	5,71
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>3.638.733.335.388</b>	<b>3.200.335.088.613</b>	<b>13,70</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>			
Belanja Barang Operasional	43.714.637	39.476.666	10,74
Belanja Barang Non Operasional	18.928.550	18.398.525	2,88
Belanja Barang Persediaan	-	35.600	(100,00)
Belanja Jasa	125.180.754	1.316.364.871	(90,49)
Belanja Pemeliharaan	409.814.527	36.697.069	1.016,75
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.251.053.174	3.704.556.002	(39,24)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	424.474.280	385.476.178	10,12
<b>Jumlah Pengembalian Belanja</b>	<b>3.273.165.922</b>	<b>5.501.004.911</b>	<b>(40,50)</b>
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>3.635.460.169.466</b>	<b>3.194.834.083.702</b>	<b>13,79</b>

Belanja Modal  
Rp663.065.672.926,00

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp663.065.672.926,00 atau 99,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp665.178.069.000,00. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 170,77% dibandingkan realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp244.879.944.504,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per akun sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdapat pada Tabel 18.

**Tabel 18**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Akun**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

MAK	Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) (%)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	546.333.581.481	155.300.461.505	251,79
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.945.113.521	28.003.885.722	(43,06)
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	769.825.000	2.235.178.750	(65,56)
5361	Belanja Modal Lainnya	100.033.520.138	59.347.700.227	68,56
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>663.082.040.140</b>	<b>244.887.226.204</b>	<b>170,77</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>		<b>16.367.214</b>	<b>7.281.700</b>	<b>124,77</b>
<b>Jumlah Belanja Neto</b>		<b>663.065.672.926</b>	<b>244.879.944.504</b>	<b>170,77</b>

Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp546.327.075.767,00

#### B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp546.327.075.767,00 dan Rp155.296.661.473,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 251,80% dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023. Kenaikan realisasi belanja modal berasal dari satker Setjen dan Ditjen Dukcapil yang digunakan sebagian besar untuk pengadaan perangkat server.

Dalam rangka membiayai kegiatan Pengadaan Perangkat Pusat Data Kemendagri dan DRC, satker Setjen mengajukan permintaan penambahan anggaran biaya tambahan sebesar Rp269.766.963.200,00, namun yang disetujui sebesar Rp81.332.690.000,00 sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-432/MK.2/2024 tanggal 4 Desember 2024. Dengan demikian diperlukan *cost sharing* internal Kemendagri dan optimalisasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk memenuhi kebutuhan pengadaan perangkat tersebut senilai Rp91.220.710.500,00. Perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdapat pada Tabel 19.

**Tabel 19**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	543.210.707.156	153.249.129.342	254,46
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	3.122.874.325	2.051.332.163	52,24
<b>Pengembalian</b>			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.505.714	3.800.032	71,20
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>546.327.075.767</b>	<b>155.296.661.473</b>	<b>251,80</b>

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp15.945.113.521,00*

**B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp15.945.113.521,00 dan Rp28.002.177.054,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 43,06% dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdapat pada tabel 20.

**Tabel 20**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.685.000	6.636.723.519	(97,17)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	-	21.990.000	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	68.792.200	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	15.757.428.521	21.276.380.003	(25,94)
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>15.945.113.521</b>	<b>28.003.885.722</b>	<b>(43,06)</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>-</b>	<b>1.708.668</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>15.945.113.521</b>	<b>28.002.177.054</b>	<b>(43,06)</b>

*Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp769.825.000,00*

**B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp769.825.000,00 dan Rp2.235.178.750,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 65,56% dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023. Perbandingan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdapat pada tabel 21.

**Tabel 21**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	395.448.000	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	769.825.000	1.839.730.750	(58,16)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>769.825.000</b>	<b>2.235.178.750</b>	<b>(65,56)</b>

Belanja Modal  
Lainnya  
Rp100.023.658.638,  
00

### B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp100.023.658.638,00 dan Rp59.345.927.227,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 68,54% dibandingkan realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023. Kenaikan Belanja Modal Lainnya disebabkan adanya belanja yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri pada satker Ditjen Bina Pemdes untuk pengadaan *software* komputer, satker Ditjen Dukcapil untuk pengadaan lisensi, serta satker Setjen untuk pengadaan lisensi dan *software* komputer.

**Tabel 22**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	95.111.415.719	57.970.302.595	64,07
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	4.922.104.419	1.377.397.632	257,35
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>100.033.520.138</b>	<b>59.347.700.227</b>	<b>68,56</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>9.861.500</b>	<b>1.773.000</b>	0,00
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>100.023.658.638</b>	<b>59.345.927.227</b>	<b>68,54</b>

### B.6 Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja

Pada T.A. 2024 Kemendagri menerima alokasi anggaran sebesar Rp5.354.037.566.000,00 dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.169.335.036.396,00 atau 96,55% dari anggarannya dengan rincian menurut jenis satker pada tabel 23.

**Tabel 23**  
**Rincian Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Satuan Kerja Pusat dan Daerah	5.306.271.772.000	5.126.335.123.319	4.326.146.271.000	4.211.992.651.059
Realisasi Pengembalian Belanja	-	3.436.475.347	-	5.700.270.086
<b>Satker Pusat &amp; Daerah Setelah Pengembalian</b>	<b>5.306.271.772.000</b>	<b>5.122.898.647.972</b>	<b>4.326.146.271.000</b>	<b>4.206.292.380.973</b>
Dekonsentrasi	46.833.820.000	45.574.475.680	55.250.152.000	54.335.771.883
Realisasi Pengembalian Belanja	-	69.200.856	-	33.649.922
<b>Dekonsentrasi Setelah Pengembalian</b>	<b>46.833.820.000</b>	<b>45.505.274.824</b>	<b>55.250.152.000</b>	<b>54.302.121.961</b>
Tugas Pembantuan	931.974.000	931.406.400	4.572.703.000	4.558.549.490
Realisasi Pengembalian Belanja	-	292.800	-	-
<b>Tugas Pembantuan Setelah Pengembalian</b>	<b>931.974.000</b>	<b>931.113.600</b>	<b>4.572.703.000</b>	<b>4.558.549.490</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.169.335.036.396</b>	<b>4.385.969.126.000</b>	<b>4.265.153.052.424</b>

Belanja Dana  
Dekonsentrasi  
Rp45.505.274.824,00

#### 1) Dana Dekonsentrasi

Pada T.A. 2024 Kemendagri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi melalui program dan kegiatan yang terdapat pada Ditjen

Bina Adwil sebesar Rp46.833.820.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp45.574.475.680,00 atau 97,31% dari anggaran, dengan pengembalian belanja sebesar Rp69.200.856,00, sehingga realisasi belanja neto sebesar Rp45.505.274.824,00.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp55.250.152.000,00 dan terealisasi sebesar Rp54.335.771.883,00 atau 98,35% dari anggaran, dengan pengembalian belanja sebesar Rp33.649.922,00, sehingga realisasi belanja neto sebesar Rp54.302.121.961,00. Rincian realisasi Dana Dekonsentrasi disajikan pada tabel 24.

**Tabel 24**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi per Eselon I**  
**s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No	Eselon I	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Ditjen Bina Adwil	45.574.475.680	54.335.771.883	(16,12)
	Pengembalian	69.200.856	33.649.922	105,65
	<b>Belanja Neto</b>	<b>45.505.274.824</b>	<b>54.302.121.961</b>	<b>(16,20)</b>

*Belanja Dana Tugas  
Pembantuan Rp0,00*

## 2) Dana Tugas Pembantuan

Pada T.A. 2024 Kemendagri mengalokasikan anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah kabupaten/kota melalui program kegiatan sebesar Rp931.974.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp931.406.400,00 atau 99,94% setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp292.800,00.

Sebagai perbandingan, sampai dengan 31 Desember 2023 mengalokasikan anggaran Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp4.572.703.000,00, dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.558.549.490,00 atau 99,69% setelah dikurangi pengembalian sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Dana Tugas Pembantuan disajikan pada tabel 25.

**Tabel 25**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan**  
**per Eselon I s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No	Eselon I	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
1	Ditjen Bina Adwil	931.406.400	4.558.549.490	(79,57)
	Pengembalian	292.800	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>931.113.600</b>	<b>4.558.549.490</b>	<b>(79,57)</b>

## **B.7 Pengungkapan Lainnya**

### **A. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG.**

Pendapatan hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah langsung berupa kas, barang dan jasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri melakukan pengesahan atas pendapatan dan belanja sebagai dokumen sumber pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Satker di Kementerian Negara/Lembaga membukukan dokumen sumber berupa Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) yang diterbitkan KPPN atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dan membukukan dokumen sumber berupa Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga atas belanja yang bersumber dari hibah langsung berupa Barang/Jasa.

Dalam Bab II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan penatausahaan pendapatan hibah berada pada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang secara struktural dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (EAS). Berdasarkan hal tersebut maka Laporan Realisasi Anggaran Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LRA dan Laporan Operasional Kemendagri tidak menyajikan Pendapatan Hibah-LO.

Atas pengeluaran yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang, Kemendagri mencatat belanja pada Laporan Realisasi Anggaran pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sebesar nilai yang disahkan oleh KPPN, dan mencatat beban pada Laporan Operasional pada saat resume tagihan sebesar nilai yang tercantum dalam resume tagihan. Kemendagri mencatat kas atas penerimaan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Neraca.

Atas hibah dalam bentuk barang, Kemendagri mencatat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari hibah pada saat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan diterima oleh Kemendagri sebesar nilai aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan yang diterima oleh Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Atas hibah dalam bentuk jasa, Kemendagri mencatat beban jasa dari hibah tersebut pada saat resume tagihan sebesar nilai jasa yang diterima oleh Kemendagri berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pada tahun 2024 Kemendagri melakukan Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk uang/barang/jasa sebesar Rp209.764.313.738,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp445.956.600,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp209.318.357.138,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. IPDN Kampus Sulawesi Selatan menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk barang berupa enam belas unit alat musik *drumband* sebesar Rp188.850.000,00 dengan Nomor Register 2SHPHM8A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 978.3/459/B.KESRA dan 900.1.4.3/061/IPDN.26/2024 tanggal 10 Januari 2024 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 978.3/460/B.KESRA tanggal 10 Januari 2024.
2. IPDN Jatinangor menerima hibah langsung dalam bentuk barang sebesar Rp2.254.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
  - a. RM Himawan Darmono memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa Patung Soekarno sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan Nomor Register 2DFHRV5A. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 000.3.3.2/84/IPDN.19 tanggal 8 Januari 2024.
  - b. Dr Singgamata S.I.K, M.H. memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tiga buah komputer, satu buah laptop, satu buah *handy talky* (dicatat sebagai ekstrakomptabel), dan satu buah *microphone wireless* sebesar Rp174.850.000,00 dengan Nomor Register 22BMHUNA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 000.3.3.2/87/IPDN.19 tanggal 21 Februari 2024.
  - c. Triwarno Purnomo S.STP., M.Si memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa dua puluh unit proyektor sebesar Rp110.000.000,00 dengan Nomor Register 26YEUN9A. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 000.3.3.2/88/IPDN.19 tanggal 20 Maret 2024.
  - d. Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Karawang memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tujuh puluh lima unit tempat tidur besi sebesar Rp206.250.000,00 dengan Nomor Register 28MFV37A. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 000.3.3.2/135/IPDN.19 tanggal 21 Mei 2024.
  - e. Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Musi Rawas memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa enam puluh lima unit tempat tidur besi sebesar Rp178.750.000,00 dengan Nomor Register 2G7S37YA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 000.3.3.2/134/IPDN.19 tanggal 21 Mei 2024.
  - f. Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Lubuk Linggau memberikan hibah langsung dalam

- bentuk barang berupa enam puluh lima unit tempat tidur besi sebesar Rp178.750.000,00 dengan Nomor Register 2KFCRXAA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 000.3.3.2/133/IPDN.19 tanggal 21 Mei 2024.
- g. Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Bengkalis memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa tujuh puluh lima unit tempat tidur besi sebesar Rp206.250.000,00 dengan Nomor Register 2789CVPA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor tanggal serta 000.3.3.2/132/IPDN.19 tanggal 21 Mei 2024.
3. IPDN Kampus Sulawesi Utara menerima hibah langsung dalam bentuk barang sebesar Rp857.590.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
- a. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa satu unit motor roda dua dan tiga unit laptop sebesar Rp108.090.000,00 dengan Nomor Register 28613GCA. Nilai hibah tersebut. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 02/NPHD/BMT/VII-2024 dan 000.3.3.2/754/IPDN.23/2024 tanggal 31 Juli 2024 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 09/BA/BMT/VIII-2024 dan 000.3.2.2/755/IPDN.23/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- b. Pemerintah Kota Kotamobagu memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa satu unit mobil minibus sebesar Rp749.500.000,00 dengan Nomor Register 2RNQQA2A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 027/PEM-KK/NPHD/VII/2024 dan 000.3.3.2/742/IPDN.23/2024 tanggal 29 Juli 2024 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 117/BASTB/BAG-UMUM/2024 dan 000.3.3.2/831/IPDN.23/ 2024 tanggal 20 Agustus 2024.
4. IPDN Kampus Kalimantan Barat menerima hibah langsung dalam bentuk barang sebesar Rp16.178.420,00 dengan rincian sebagai berikut.
- a. Pegawai IPDN Kampus Kalimantan Barat memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa satu unit AC sebesar Rp4.044.605,00 dengan Nomor Register 22UABN6A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 007/WYN/2024 dan 2024 dan 000.3.1/1197/IPDN.27 tanggal 4 Juni 2024 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 003/WYN/2024 dan 000.3.1/1205/IPDN.27 tanggal 4 Juni 2024.
- b. Pegawai IPDN Kampus Kalimantan Barat memberikan hibah langsung dalam bentuk Barang berupa Satu unit AC sebesar Rp4.044.605,00 dengan Nomor Register 29D4FQ6A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 005/IFS/2024 dan 000.3.1/1199/IPDN.27 tanggal 4 Juni 2024 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 001/IFS/2024 dan 000.3.1/1199/IPDN.27 tanggal 4 Juni 2024.

- c. Pegawai IPDN Kampus Kalimantan Barat memberikan hibah langsung dalam bentuk Barang berupa Satu unit AC sebesar Rp4.044.605,00 dengan Nomor Register 2GUAFULA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 008/AWJ/2024 dan 000.3.1/1198/IPDN.27 tanggal 4 Juni 2024 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 004/AWJ/2024 dan 000.3.1/1206/IPDN.27 tanggal 4 Juni 2024.
  - d. Pegawai IPDN Kampus Kalimantan Barat memberikan hibah langsung dalam bentuk Barang berupa Satu unit AC sebesar Rp4.044.605,00 dengan Nomor Register 2NWZX55A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 006/WSD/2024 dan 000.3.1/1196/IPDN.27 tanggal 4 Juni 2024 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 002/WSD/2024 dan 000.3.1/1204/IPDN.27 tanggal 4 Juni 2024.
5. Sekretariat Jenderal menerima hibah langsung dalam bentuk jasa sebesar Rp108.925.947.628,00 dengan rincian sebagai berikut.
    - a. Pemerintah Australia memberikan hibah langsung dalam bentuk jasa sebesar Rp2.096.231.900,00 untuk Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasa (SKALA) dengan Nomor Register 27BMXZ9A. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor SA-30.03.2023 tanggal 30 Maret 2023 serta 01/BAST-KEMENDAGRI/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebesar Rp311.254.400,00 dan 03/BAST-KEMENDAGRI/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebesar Rp1.784.977.500,00.
    - b. USAID memberikan hibah langsung dalam bentuk jasa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat sebesar Rp22.374.093.728,00 dengan Nomor Register 2F5GEXNA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 53/USAID-INA/BAST-Service/DRG tanggal 14 Oktober 2024.
    - c. Pemerintah Provinsi Papua memberikan hibah langsung dalam bentuk barang berupa Hibah tanah untuk IPDN Kampus Papua sebesar Rp84.455.622.000,00 dengan Nomor Register 2DRTL1A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 900.1.4/4748/SET dan 900.1.4/1996/SJ tanggal 29 April 2024 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 900.1.4/4747/SET dan 900.1.4/1995/SJ tanggal 29 April 2024.
  6. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menerima hibah langsung dari *Japan Firefighters Association (JFA)* dalam bentuk Barang berupa lima unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp758.499.660,00. dengan Nomor Register 26B2RTQA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 100.4.7.2/813/BAK tanggal 2 Juli 2024 serta Berita Acara Serah Terima Nomor 100.4.7.2/1945/BAK tanggal 3 Oktober 2024.
  7. Ditjen Bina Pembangunan Daerah menerima hibah langsung uang dan jasa sebesar sebesar Rp24.818.251.276,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah

Langsung sebesar Rp440.749.600,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp24.377.501.676,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. USAID memberikan hibah langsung dalam bentuk jasa berupa Pelaksanaan Program USAID *Urban Water, Sanitation, Solid Waste, and Hygiene* (UWASSH) sebesar Rp16.405.794.541,00 dengan Nomor Register 26QQTPZA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 136/USAID-INA/BAST-Service/ENV tanggal 18 Juli 2024.
  - b. UNFPA memberikan hibah langsung dalam bentuk uang dalam rangka *Implementation of UNFPA-Funded Workplans Relating to the 2021-2025 UNFPA Country Programme for Republic Indonesia* sebesar Rp1.942.815.000,00 dengan Nomor Register 2TCK92FA. Atas hibah ini juga terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp3.878.400,00.
  - c. UNICEF memberikan hibah langsung dalam bentuk uang dalam rangka berupa Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025 Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri sebesar Rp6.469.641.735,00 dengan Nomor Register 2C7EJQHA. Atas hibah ini juga terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp436.871.200,00.
8. Ditjen Otonomi Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk Jasa dari USAID dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat sebesar Rp7.579.948.460,00 dengan Nomor Register 2F5GEXNA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 136/USAID-INA/BAST-Service/ENV tanggal 18 Juli 2024.
9. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima hibah langsung dalam bentuk uang sebesar Rp58.424.432.000,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp5.207.000,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp58.419.225.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
- a. Pemerintah Kota Balikpapan memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 156.157 keping sebesar Rp1.590.000.000,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp1.608.000,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp1.588.392.000,00 dengan Nomor Register 236HGSXA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 470/126/Disdukcapil dan 000.3.3.2/536/SES tanggal 16 Januari 2024.
  - b. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 30.838 keping sebesar Rp314.000.000,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp3.449.000,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp310.551.000,00 dengan Nomor Register 2JFEPG9A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor B.800/64/DUKCAPIL/2024 dan

000.3.3.2/550/SES tanggal 16 Januari 2024.

- c. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 30.000 keping sebesar Rp305.460.000,00 dengan Nomor Register 2RRL6N4A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 000.3.3.2/178/DUKCAPIL.I/2024 dan 000.3.3.2/674/SES tanggal 19 Januari 2024.
- d. Pemerintah Kota Palembang memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 137.500 keping sebesar Rp1.400.025.000,00 dengan Nomor Register 2YQ7F4XA. Nilai hibah tersebut. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 470/12/DKPS/2024 dan 000.3.3.2/548/SES tanggal 16 Januari 2024.
- e. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 5.000.000 keping sebesar Rp50.910.150.000,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp150.000,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp50.910.000.000,00 dengan Nomor Register 21Q5D7VA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 4574/UD.08.03 dan 000.3.3.2/10002/SES tanggal 24 Juli 2024.
- f. Pemerintah Kabupaten Mempawah memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 19.500 keping sebesar Rp198.549.000,00 dengan Nomor Register 2B4DHS9A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 400.12.2.1/3049/Setda dan 000.3.3.2/5843/SES tanggal 6 Mei 2024.
- g. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 50.500 keping sebesar Rp514.191.000,00 dengan Nomor Register 2BBWST8A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 000.7.7.1.2626/Disdukcapil dan 000.3.3.2/6834/SES tanggal 27 Mei 2024.
- h. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 110.000 keping sebesar Rp1.120.020.000,00 dengan Nomor Register 2BZ5GF5A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 400.12/257/DKP3A-II/IV/2024 dan 000.3.3.2/4449/SES tanggal 1 April 2024.
- i. Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 44.500 keping sebesar Rp453.099.000,00 dengan Nomor Register 2P7ESHUA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 900/2517/418.23/2024 dan 000.3.3.2/13292/SES tanggal 29 September 2024.
- j. Pemerintah Kabupaten Murung Raya memberikan hibah langsung

dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 25.000 keping sebesar Rp254.550.000,00 dengan Nomor Register 2RETP9NA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 000.7.7.2/DISDUKCAPIL/2024 dan 000.3.3.2/6835/SES tanggal 27 Mei 2024.

- k. Pemerintah Kota Manado memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 49.000 keping sebesar Rp498.918.000,00 dengan Nomor Register 2WS1S93A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 00.7.7.1/D.08/DUKCAPIL/450/2024 dan 000.3.3.2/11032/SES tanggal 14 Oktober 2024.
  - l. Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 35.000 keping sebesar Rp356.370.000,00 dengan Nomor Register 2ZEWFBWA. Nilai hibah tersebut. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 400.12.1/5820.Disduk dan 000.3.3.2/14422/SES tanggal 17 Oktober 2024.
  - m. Pemerintah Kota Samarinda memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa Penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 50.000 keping sebesar Rp509.100.000,00 dengan Nomor Register 2ZS74K4A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 000.3.3.2/490.a/100.13 dan 000.3.3.2/6975/SES tanggal 29 Mei 2024.
10. Ditjen Bina Keuangan Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk jasa dari USAID dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat sebesar Rp5.939.766.294,00 dengan Nomor Register 2F5GEXNA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 147/USAID-INA/BAST-Service/DRG tanggal 8 Mei 2024.

Pada periode pelaporan Tahun 2024, Kemendagri memiliki Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp3.260.387.986,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Ditjen Otonomi Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk Jasa dari USAID dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat sebesar Rp2.636.191.053,00 dengan Nomor Register 2F5GEXNA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 95/USAID-INA/BASTService/DRG/2022 tanggal 13 Februari 2023.
2. Ditjen Bina Keuda menerima hibah langsung dalam bentuk Jasa dari USAID dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat sebesar Rp624.196.933,00 dengan Nomor Register 2F5GEXNA. Hibah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 147/USAID-INA/BAST-Service/DRG tanggal 8 Mei 2024.

### **Lanjutan Pengelolaan Hibah Langsung Tahun 2023**

Direktorat Bina Pembangunan Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Uni Emirat Arab untuk *Financing the Regional Development Program* pada Tahun 2023. Pendapatan hibah tersebut sudah

disahkan pada Tahun 2023 sebesar USD15.000.000,00 atau Rp235.500.000.000,00 dengan Nomor Register Hibah 27YDNA6A serta Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Nomor GA.10.04.2023 tanggal 10 April 2023. Pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung tersebut pada Tahun 2023 sebesar Rp4.167.300.475,00 sehingga saldo dana hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp231.332.699.525,00.

Selanjutnya pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung pada Tahun 2024 sebesar Rp169.102.497.549,00. Dengan demikian total realisasi belanja yang bersumber dari hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp173.269.798.024,00 dan saldo dana hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.230.201.976,00.

## **B. PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI.**

Kemendagri Tahun 2024 mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri untuk kegiatan pada satker dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp41.905.977.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp40.455.137.166,00 atau 96,54% dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

***Proyek Improvement Village Service Delivery* atau Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).** Ditjen Bina Adwil salah satu tugas dan fungsinya melakukan penguatan pada pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini Kecamatan sebagai OPD, sesuai Kepmendagri 137 tahun 2022 tentang SOTK Kemendagri. Melalui *Frontline Service Delivery* untuk mendukung capaian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) khususnya pada Komponen 1, belanja desa berkualitas. Dalam rangka mengimplementasikan program P3PD PIU Sub Komponen 1D *Frontline Service Delivery* dibutuhkan dukungan dari pemerintahan daerah di lokasi sasaran. Selanjutnya dalam upaya mempersiapkan program P3PD Sub Komponen 1D, Penguatan Kecamatan dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Frontline Service Delivery*.

### a. Tujuan Program.

Program *Frontline Service Delivery* (FSD) dalam rangka Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa, bertujuan untuk mensinergikan konsepsi perencanaan pembangunan berdasarkan prakarsa dari masyarakat (*bottom-up*) dengan program kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah (*top-down*) sehingga menghasilkan keseimbangan antara demand dan *supply* pembangunan di masyarakat desa melalui kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Hal ini akan mendukung tujuan Pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan dalam layanan dasar dan meningkatkan pemanfaatan dana desa baik dalam sisi kualitas dan kuantitas, dengan meningkatkan koordinasi kelembagaan antar pemangku kepentingan. Pendekatan ini memperkuat instrumen kerja pemerintahan yang ada dan melembagakan pendekatan

untuk mekanisme akuntabilitas antara desa, penyedia layanan, dan pemerintah.

b. Deskripsi Proyek (Komponen).

Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa, melalui *Frontline Service Delivery* menegaskan posisi Kecamatan sebagai hub (penghubung) antara desa dengan pemerintah daerah. Adapun mekanisme kerja program ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dukungan Manajemen. Dukungan manajemen kepada PIU Sub Komponen 1D, berupa:

- a) Sekretariat Pengendalian. Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, PIU Sub Komponen 1D merekrut tenaga sekretariat pengendalian.
- b) *Kick Off Meeting*. Sosialisasi kepada Gubernur di 10 Provinsi dan Bupati di 60 Kabupaten lokasi pilot. Kegiatan ini dilaksanakan secara Swakelola.
- c) Rapat Koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk penyamaan persepsi dan dukungan lintas K/L. Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola.
- d) *Workshop* Penyusunan Modul (1 dan 2). *Workshop* dilaksanakan dalam rangka penyusunan Modul dan Finalisasi Modul. Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola.
- e) Monitoring dan Supervisi. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pengendalian program di 10 Provinsi lokasi pilot. Kegiatan ini dilaksanakan secara Swakelola.

2) Pelatihan.

Tahap pelatihan meliputi 3 agenda, yaitu:

- a) *Training for Master of Trainer* (TMoT). Kegiatan ini untuk menyiapkan tenaga pelatih tingkat Pusat dan Provinsi, diselenggarakan di Jakarta melalui oleh Pihak ketiga. Training ini untuk membentuk Pelatih untuk Calon Pelatih di tingkat Provinsi. *Master of Trainer* terdiri atas unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Inspektorat Provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi, Biro Pemerintahan Setda Provinsi di 10 Provinsi lokasi pilot.
- b) *Training for Trainer* (ToT). Kegiatan ini untuk menyiapkan Tenaga Pelatih di tingkat Kabupaten terdiri atas unsur Bappeda Kabupaten, Inspektorat Kabupaten, Dinas Dukcapil Kabupaten, Dinas PMD Kabupaten, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten di 60 Kabupaten lokasi pilot yang akan melatih Aparatur Kecamatan di 1007 kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan Pihak Ketiga.
- c) Pelatihan Aparatur Kecamatan. Kegiatan ini untuk mempersiapkan Aparatur Kecamatan yang akan difungsikan sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sanitasi. Jumlah peserta dari Kecamatan sebanyak 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Camat dan perangkatnya, UPT

- Kesehatan, UPT Pendidikan, UPT Sanitasi, Pendamping Desa dan Penyuluh. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan Pihak Ketiga. Paket *Training for Trainer* dan Pelatihan Aparatur Kecamatan terdiri dari 10 (sepuluh) paket kegiatan untuk 10 Provinsi lokasi pilot.
- 3) Penjaminan Mutu Pelaksanaan Program. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan program, PIU Sub Komponen 1D dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, melalui jasa konsultan dengan tujuan:
    - a) Dukungan pendampingan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, implementasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
    - b) Pengendalian program untuk menjamin kualitas mutu program;
    - c) Pengendalian kegiatan administrasi keprograman dalam pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Program P3PD;
    - d) Meningkatkan fungsi koordinasi antar pengelola program di pusat sehingga terjadi sinkronisasi pelaksanaan kegiatan PIU Sub Komponen 1D dengan komponen lainnya dalam program P3PD;
    - e) Membantu dalam penyusunan desain implementasi program PIU Sub Komponen 1D;
    - f) Melaksanakan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kegiatan; dan
    - g) Dukungan teknis dan kebijakan lainnya sesuai arahan Kepala PIU.
  - 4) Instrumen Kerja Kecamatan/*Dashboard*. Instrumen Kerja Kecamatan berupa Aplikasi Sistem Informasi untuk Kecamatan berupa sistem Analisis untuk mendukung pengumpulan data perencanaan pembangunan dalam rangka menjawab kebutuhan layanan masyarakat desa. Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan ini dilaksanakan oleh Pihak Ketiga melalui jasa konsultan. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan oleh PIU Sub Komponen 1D dengan melibatkan Pihak Ketiga, melalui jasa lainnya.
- c. Pelaksana Proyek. Penyelenggara Program Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/*Frontline Service Delivery*, melibatkan, antara lain:
- 1) Pelaksana.
    - a) CPMU Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Komponen 1;
    - b) Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, selaku PIU Sub Komponen 1D;
    - c) Sekretariat P3PD PIU Sub Komponen 1D;
    - d) Jasa Konsultan.
  - 2) Koordinasi Pemerintah dengan Donor.
    - a) Kemenko PMK.
    - b) BAPPENAS.
    - c) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
    - d) Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama,

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

e) *Task Team Leader World Bank.*

d. Visibilitas Tingkat Proyek.

1) Bahan.

- a) Panduan Teknis P3PD PIU Sub Komponen 1D;
- b) Aplikasi Instrumen *Frontline Service Delivery*;
- c) Modul Pelatihan Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa;
- d) Instrumen Monitoring Pelaksanaan *Frontline Service Delivery*.

2) Workshop Uji Coba Modul;

3) Sosialisasi Program/*Kick Off Meeting*;

4) *Master of Trainer*;

5) *Training of Trainer*;

6) Pelatihan Penguatan Aparatur Kecamatan; dan

7) Monitoring dan Evaluasi;

e. Rincian Pinjaman. Rincian pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sebagai berikut:

Nomor ID Pinjaman : IBRD 8941-ID

Pemberi Pinjaman : *World Bank*

Tanggal Perjanjian : 30 Januari 2020

Nomor Register : 1CZ6CF2A

*Effective Date* : 30 Januari 2020

Jumlah Pinjaman : USD300.000.000,00

Nomor Reksus : 601306411980

*Closing date* : 31 Desember 2024

*Executing Agency* : Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri

f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Program. Pelaksanaan Kegiatan dari Program Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/*Frontline Service Delivery* antara lain:

1) *Executing Agency*: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.

2) *Central Project Management Unit* (CPMU): Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.

3) *Central Project Implementation Unit* (CPIU): Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri.

4) *Project Implementation Unit* (PIU): Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.

Realisasi belanja Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/*Frontline Service Delivery* sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp40.455.137.166,00 atau 96,54% dari anggarannya sebesar Rp41.905.977.000,00.

2. Ditjen Bina Pemerintahan Desa mengelola anggaran yang bersumber dari

pinjaman luar negeri sebesar Rp1.085.410.809.000,00 untuk program **Proyek Improvement Village Service Delivery atau Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).**

a. Tujuan Program.

Program yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan atau institusi desa untuk memperbaiki kualitas belanja desa di lokasi proyek Program, melalui:

- 1) Perbaiki kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan.
- 2) Perbaiki sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat dalam rangka memperkuat pembangunan partisipatif.
- 3) Pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja (*performance-based grant*, PBG) untuk menguji model dukungan melalui insentif untuk perbaikan kinerja di tingkat desa dan kabupaten.
- 4) Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

Dengan adanya Proyek P3PD ini pada akhirnya diharapkan akan berkontribusi terhadap perbaikan layanan dan dukungan sosial-ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa.

b. Lokasi Sasaran.

Sesuai tujuan P3PD, maka kriteria pertama pemilihan kabupaten adalah kabupaten/kota yang mendapatkan Dana Desa. Selanjutnya, kabupaten/kota dinilai berdasarkan kapasitas pemerintah desa dan kabupaten yang diukur dari indikator sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang mempengaruhi status pembangunan di desa dan kabupaten. Indikator status pembangunan desa dan kapasitas pemerintah desa diproksi dari variabel berikut ini:
  - a) Akses ke sarana prasarana dasar berdasarkan data PODES 2018.
  - b) Kapasitas pemerintah desa (latar belakang Pendidikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, dan kelengkapan komposisi aparat inti desa) – data PODES 2018.
  - c) Kemampuan penganggaran pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas desa (dari alokasi desa untuk peningkatan kapasitas) – data SIPEDE 2018.
- 2) Kapasitas pemerintah desa dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam mendukung pemerintahan desa. Dalam hal ini proksi yang dapat dilakukan dengan mengacu pada alokasi ADD per desa – data Siskeudes.

c. Kelompok Sasaran.

Aparat desa di kabupaten terpilih akan mendapat manfaat dalam bentuk akses ke kegiatan pelatihan maupun dukungan pembinaan teknis yang akan dilaksanakan antara lain melalui *platform* digital (*e-learning*), forum belajar desa di tingkat kecamatan, kegiatan pelatihan tatap-muka, serta fasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten. Masyarakat desa di kabupaten terpilih akan mendapat manfaat dalam bentuk akses ke kegiatan pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan antara lain melalui pembukaan akses terhadap *platform* Akademi Desa 4.0, akses terhadap pendampingan dan Forum Belajar Desa. Masyarakat juga akan mendapatkan akses kepada sistem penanganan keluhan dan pengawasan pembangunan desa berbasis digital.

Selain aparat dan masyarakat desa, pemerintah pusat dan daerah juga akan mendapat dukungan melalui penguatan koordinasi pembangunan desa serta pembuatan sistem informasi desa terintegrasi yang akan menggabungkan data penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta belanja desa dari kementerian/lembaga terkait. Sistem informasi terintegrasi ini akan menjadi sumber data untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan dan belanja desa serta kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Data dan analisis dari sistem informasi ini juga diharapkan akan menjadi masukan dalam pembahasan kebijakan terkait pemerintahan dan pembangunan desa kedepannya.

d. Pendanaan.

Selain dari dana pinjaman IBRD, pencapaian target sasaran P3PD memerlukan Dana Rupiah Murni (RM) yang bersumberkan dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan) dan APBDesa serta kontribusi masyarakat. Bentuk dana RM ini adalah salah satu wujud operasional atau pelaksanaan dari *platform* nasional pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan desa, yang mana dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pencapaian tujuan P3PD.

Selain dana RM, Kementerian dan Lembaga mengalokasikan dana paralel dari Pemerintah Pusat (APBN RM), untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dialokasikan dari porsi pinjaman luar negeri, seperti biaya operasional dan gaji/tunjangan bagi pegawai negeri dalam pengelolaan P3PD atau porsi pembiayaan untuk kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia.

Dana Rupiah Murni lainnya dapat dicatat dalam bentuk program atau kegiatan (bukan dalam bentuk *in cash* yang langsung disalurkan melalui P3PD), namun memberikan kontribusi atau dukungan terhadap pelaksanaan P3PD baik di tingkat pusat maupun daerah dan desa.

Porsi Rupiah Murni yang dapat dihitung ke dalam kontribusi pendanaan P3PD adalah sebagai berikut:

- 1) APBN/APBD yang dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang terlibat dalam P3PD untuk operasional PMU/PIU dan Sekretariat terkait PNS, misalnya biaya pertemuan, honorarium narasumber, perdiem, biaya pemantauan dan supervisi.
- 2) APBN/APBD yang digunakan untuk membiayai sebagian kegiatan P3PD, seperti rapat koordinasi, lokakarya, pelatihan, bantuan teknis

dan fasilitator, dan lainnya.

3) APBDesa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat desa.

e. Rincian Pinjaman.

Rincian pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sebagai berikut:

Nomor ID Pinjaman : IBRD 8941-ID  
Pemberi Pinjaman : *World Bank*  
Tanggal Perjanjian : 30 Januari 2020  
Nomor Register : 1CZ6CF2A  
*Effective Date* : 30 Januari 2020  
Jumlah Pinjaman : USD300.000.000,00  
Nomor Reksus : 601306411980  
*Closing date* : 31 Desember 2024  
*Executing Agency* : Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 untuk program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa sebesar Rp965.588.981.752,00 atau 88,96% dari anggarannya sebesar Rp1.085.410.809.000,00.

3. Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp156.537.332.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp155.734.426.339,00 atau 99,49% dari anggarannya yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

a. ***Flood Management in Selected River Basin (FMSRB).***

1) Latar Belakang.

Banjir, yang terjadi setiap tahun di sebagian besar negara, telah meningkat frekuensinya, menyebabkan kerugian ekonomi setiap tahun. Indonesia salah satu negara yang sangat rentan terhadap banjir karena iklim dan topografinya. Banjir Sungai Cijung pada tahun 2013 berdampak pada 19.674 rumah tangga, menyebabkan 50.527 orang mengungsi dan mengganggu lalu lintas di sepanjang jalan tol Jakarta-Merak yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Pada tahun 2013 juga di Ambon terjadi banjir bandang yang mengakibatkan 59 rumah rusak, 10 orang meninggal dunia, lima orang hilang, dan 7.212 orang mengungsi. Melihat kondisi ini Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Asian Development Bank (ADB)* menyusun sebuah program yang disebut dengan *Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)* yang dituangkan dalam *Loan Agreement* Nomor 3440-INO pada tanggal 2 November 2016.

Program *Flood Management In Selected River Basin (FMSRB)* yang didanai oleh pinjaman dari *Asian Development Bank (ADB)* akan mendanai Pemerintah sebanyak USD108,7 juta yang akan

melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian risiko banjir pada wilayah Daerah Aliran Sungai yang ditargetkan. Banjir yang melanda daerah-daerah rawan pada dasarnya disebabkan beberapa hal, yaitu kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam serta curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan air laut, badai, dan sebagainya.

2) Tujuan Program.

*Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)* bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dalam mengelola dan mengurangi risiko (mitigasi) banjir melalui pendekatan pengelolaan banjir terpadu di wilayah sungai. Program FMSRB memiliki 4 komponen output, yaitu;

- a) Meningkatnya perencanaan pengelolaan risiko banjir.
- b) Meningkatnya pengelolaan lahan dan infrastruktur banjir.
- c) Meningkatnya kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat.
- d) Meningkatnya kebijakan, koordinasi dan kapasitas pengelolaan risiko banjir di tingkat nasional.

3) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri Program *Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)* adalah sebagai berikut:

Pemberi PHLN	:	<i>Asian Development Bank (ADB)</i>
Besaran PHLN	:	USD108.700.000,00
Nomor Pinjaman PHLN	:	3440-INO
Tanggal Efektif PHLN	:	9 Desember 2016
Nomor Register PHLN	:	1RUX78CA
<i>Closing Date</i> PHLN	:	30 September 2024

4) Pelaksana Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan dari Program *Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)* antara lain:

- a) Bappenas selaku *National Steering Committee on Water Resource (NSCWR)*.
- b) Kementerian PUPR selaku *Central Project Management Unit (CPMU)* dan *Executing Agency* kegiatan ini adalah Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
- c) Kemendagri selaku *Central Project Implementation Unit (CPIU)*.
- d) Kementerian Pertanian selaku *Central Project Implementation Unit (CPIU)*.

Lingkup kegiatan Ditjen Bina Bangda, Kemendagri selaku CPIU, yaitu:

- a) Sub-Komponen 1B berupa Penguatan kelembagaan,

perencanaan dan koordinasi pelaksanaan rencana Pengelolaan Risiko Banjir Terpadu (PRBT) di WS Program (WS 3 Ci dan WS Ambon-Seram).

- b) Sub-Komponen 2B berupa Peningkatan pengendalian air buangan (*run-off*) dan erosi di DAS Program.
- c) Sub-Komponen 3A berupa Meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat (PRBBM) di lokasi program.

Metode pelaksanaan dalam rangka mencapai output Program Kegiatan FMSRB adalah dengan metode swakelola dan kontraktual oleh Sub Direktorat Pertanian dan Pangan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I. Asistensi dan Supervisi Program Pengelolaan Risiko Banjir pada kawasan pertanian dan pangan di daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Risiko Banjir. Tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Risiko Banjir adalah agar terwujudnya koordinasi antar pengelola program terkait dengan penyelenggaraan program pada masing-masing tingkatan, sedangkan outputnya adalah berupa laporan rapat koordinasi pelaksana program pengelolaan risiko banjir. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahap pelaporan. Peserta rapat terdiri dari Kemendagri/CPIU Ditjen Bina Bangda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat CPIU PUPR, CPIU Pertanian serta Bappenas dan daerah, yaitu Provinsi Banten dan Maluku serta kabupaten yang terlibat program FMSRB.
- b) Supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Pengelolaan Risiko Banjir. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Manajemen Banjir dan Outputnya, yaitu terlaksananya fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program manajemen Banjir. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari rapat persiapan dan kemudian dilanjutkan kunjungan lapangan ke lokasi program FMSRB. Pelaksana supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Pengelolaan Risiko Banjir, yaitu beberapa instansi di lingkungan CPIU Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.
- c) Pengadaan Jasa *Technical Assistant Institutional Development for Community-Based Flood Risk Management (ID-CBFRM)*. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di CPIU Ditjen Bina Bangda dan menghasilkan output berupa terfasilitasinya kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di CPIU Ditjen Bina Bangda.
- d) Operasional dan Sarana Penunjang Program Operasional dan

sarana penunjang program meliputi fasilitasi operasional kantor dalam rangka pelaksanaan Program Pengelolaan Risiko Banjir, fasilitasi dan operasional staf pendukung, serta pengadaan sarana penunjang kantor pada Program *Flood Management in Selected River Basin* (FMSRB). Dalam masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tahun 2020, terdapat penyesuaian kegiatan. Penyesuaian kegiatan berupa dilakukan perubahan kegiatan yang sebelumnya bersifat pertemuan secara langsung menjadi secara tidak langsung (*online*) serta perubahan penyesuaian anggaran dan kegiatan dari kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.466.120.629,00 atau 99,55% dari anggarannya sebesar Rp4.486.533.000,00.

**b. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP).***

1) Latar Belakang.

Program IPDMIP merupakan salah satu program yang dikembangkan untuk mendukung RPJMN Indonesia tahun 2015 – 2019 yang memprioritaskan peningkatan produktivitas tanaman pangan, melalui revitalisasi penyuluhan pertanian dan produksi benih, perbaikan irigasi melalui pembangunan 65 waduk dan tiga juta ha jaringan irigasi, perbaikan pengelolaan irigasi, peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi dan pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif pada proses perencanaan provinsi dan kabupaten/kota. Program ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB) dan *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF) yang dituangkan dalam *Loan Agreement* Nomor 3529-INO dan *Loan Agreement* Nomor 8327-INO (AIF) pada tanggal 31 Juli 2017.

Program Kegiatan IPDMIP Loan-INO dilaksanakan menggunakan dana pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) sebanyak USD600 juta. Program tersebut dilaksanakan untuk pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi. Dengan satu pengertian bahwa kenyataan berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani penggarap di Indonesia: (i) Kelembagaan petani, air dan irigasi lemah; (ii) Sistem irigasi kurang dan buruk pemeliharannya; (iii) Kurangnya tenaga dan penyuluh pertanian; (iv) Prasarana kurang dan buruk pemeliharannya; (v) Akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa terbatas; (vi) Kepemilikan lahan tidak jelas; (vii) Kesenjangan teknologi; (viii) Potensi komoditas bernilai tinggi terabaikan.

2) Tujuan Program.

Tujuan dari program kegiatan IPDMIP adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan di Indonesia serta meningkatkan nilai dan keberlanjutan pertanian beririgasi. Program kegiatan IPDMIP mengelompokkan output

programnya kedalam 4 komponen sebagai berikut:

- a) Komponen 1: Penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan pertanian beririgasi.
  - b) Komponen 2: Peningkatan pengelolaan sistem irigasi.
  - c) Komponen 3: Peningkatan infrastruktur sistem irigasi.
  - d) Komponen 4: Peningkatan pendapatan pertanian beririgasi.
- 3) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri Program Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) adalah sebagai berikut:

Pemberi PHLN	: <i>Asian Development Bank (ADB)</i> dan <i>ASEAN Infrastructure Fund(AIF)</i> .
Besaran PHLN	: USD500.000.000,00 (ADB) dan USD100.000.000,00 (AIF)
Nomor Pinjaman PHLN	: 3529-INO dan 8327-INO (AIF)
Tanggal Efektif PHLN	: 8 September 2017
Nomor Register PHLN	: 1Z83YQPA (ADB) dan 11DDKS1A (AIF)
<i>Closing Date</i> PHLN	: 30 Juni 2024.

4) Pelaksana Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan dari Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) antara lain:

- a) Bappenas selaku *National Steering Committee (NSC)*.
- b) Kementerian PUPR selaku *National Project Management Unit (NPMU)* dan *Executing Agency* kegiatan ini adalah Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
- c) Kemendagri selaku *National Project Implementation Unit (NPIU)*.
- d) Kementerian Pertanian selaku *National Project Implementation Unit (NPIU)*.

Lingkup kegiatan Ditjen Bina Bangda, Kemendagri selaku NPIU, yaitu:

- a) Komponen I berupa penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem irigasi pertanian yang berkelanjutan serta reorganisasi dan penguatan Komisi Irigasi (KOMIR) dan pendampingan masyarakat (TPM).
- b) Komponen 2 berupa peningkatan pengelolaan operasional dan pemeliharaan irigasi serta Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) dan Rencana Pengelolaan Pertanian Beririgasi (RP2I).

Metode pelaksanaan dalam rangka mencapai output Program Kegiatan IPDMIP adalah dengan metode swakelola dan kontraktual oleh Sub Direktorat Pertanian dan Pangan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I. Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Beririgasi secara Partisipatif dilaksanakan melalui:

a) Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR).

Tujuan Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR) untuk memastikan KOMIR berjalan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan pemantauan di lapangan, penilaian dari hasil pemantauan dan pelaporan hasil kinerja KOMIR. Peserta terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, yaitu Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian serta Bappenas dan unsur daerah peserta program IPDMIP (14 Provinsi).

b) Dukungan Tenaga Sekretariat NPIU Bangda.

Dukungan Tenaga Sekretariat NPIU Bangda bertujuan mendukung tugas kesekretariatan NPIU Ditjen Bina Bangda dalam mendukung pelaksanaan program IPDMIP. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan rapat persiapan dan penentuan proses pengadaan. Pelaksana kegiatan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri.

c) Supervisi dan Monitoring.

Tujuan dari Supervisi dan Monitoring adalah untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program IPDMIP dan terlaksananya fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan rapat persiapan dan kemudian dilanjutkan kunjungan lapangan ke lokasi program. Pelaksana kegiatan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

d) Fasilitasi Operasional NPIU Bangda.

Fasilitasi Operasional NPIU Bangda bertujuan meningkatkan kinerja, fungsi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi para pengelola program dan menghasilkan output kegiatan berupa meningkatnya kinerja Program IPDMIP. Kegiatan dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tahap pelaporan.

e) Pengadaan Jasa Konsultan Pusat dan Regional.

Pengadaan Jasa Konsultan Pusat dan Regional bertujuan memfasilitasi pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) guna

mendukung pelaksanaan program kegiatan di NPIU Ditjen Bina Bangda. Kegiatan dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tahap pelaporan.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp586.348.390,00 atau 96,66% dari anggarannya sebesar Rp606.583.000,00.

**c. *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP).***

1) Latar Belakang.

*Project Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)* merupakan *project* yang diselenggarakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Sumber Daya Air. *Project* ini merupakan wujud dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan daya saing daerah. Realisasi dari RPJMN tahun 2020 – 2024 ini dilakukan dengan konsep Modernisasi Irigasi. Modernisasi irigasi yang akan diimplementasikan di Indonesia dalam *Project SIMURP* ini menggunakan konsep kerangka 5 (lima) pilar modernisasi irigasi yang terdiri dari:

- a) *Irrigation Water Availability;*
- b) *Irrigation Infrastructure;*
- c) *Irrigation Management;*
- d) *Organization and Institution; dan*
- e) *Human Resources.*

Pelaksanaan lima pilar ini harus bergerak bersama-sama karena kegiatan Program SIMURP ini merupakan kegiatan yang *sequence* dan saling mendukung antara Kemendagri dengan kementerian lain yang terkait.

*Project SIMURP* dilaksanakan untuk meningkatkan layanan irigasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan skema irigasi di daerah-daerah terpilih, khususnya pada daerah irigasi kewenangan pusat yang berada di atas 3.000 ha dan sistem irigasi strategis nasional. Dalam pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia di tingkat daerah sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelolaan irigasi pada Program SIMURP akan diperkenalkan satu instrumen, yaitu *Irrigation Service Agreement (ISA)*. *Irrigation Service Agreement (ISA)* merupakan kesepakatan bersama/perjanjian antara pengelola irigasi dengan petani pemakai air dan/atau pengguna air lainnya dalam pelayanan air irigasi.

2) Tujuan program.

Tujuan dari *Project SIMURP* dalam *Loan Agreement* telah disebutkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan irigasi dan

memperkuat akuntabilitas pengelolaan irigasi di daerah yang dipilih. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui rehabilitasi, revitalisasi dan modernisasi Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi, penguatan kelembagaan, perbaikan manajemen, operasi dan pemeliharaan. Namun dengan keterbatasan dana APBN, maka untuk mendukung tujuan dari Program SIMURP Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengupayakan pendanaan dengan menggunakan Pinjaman Luar Negeri. Pelaksanaan Kegiatan *Project SIMURP* pada NPIU Ditjen Bina Bangda terdiri dari tiga komponen besar, yaitu Komponen A merupakan kegiatan Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak, Komponen B merupakan kegiatan Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis dan Komponen C merupakan kegiatan Pengelolaan Proyek.

Kegiatan Proyek *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)* dilaksanakan di delapan provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, melibatkan empat kementerian/lembaga, yaitu Bappenas, Kementerian PUPR, Kemendagri, Kementerian Pertanian. Selain berada di delapan provinsi tersebut, kegiatan ini juga dilaksanakan di 17 Kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jember, Kabupaten Katingan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan *Project SIMURP* akan dilaksanakan di 12 Daerah Irigasi dan dua daerah irigasi rawa yang menjadi kewenangan pusat, yaitu Daerah Irigasi Sei Ular, Daerah Irigasi Cipancuh, Daerah Irigasi Cikeusik, Daerah Irigasi Banjarcahyana, Daerah Irigasi Kedung Putri, Daerah Irigasi Talang, Daerah Irigasi Pondok Waluh, Daerah Irigasi Jurang Batu, Daerah Irigasi Jurang Sate, Daerah Irigasi Pamukkulu, Daerah Irigasi Tabo-tabo, Daerah Irigasi Sanrego, dan dua daerah irigasi rawa, yaitu Daerah Irigasi Karang Agung Ilir dan Daerah Irigasi Katingan. Selain itu *Project SIMURP* juga dilaksanakan di Daerah Irigasi Jatiluhur. Tujuan dari *Project SIMURP* sebagaimana yang tercantum dalam *Loan Agreement* adalah untuk meningkatkan pelayanan irigasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan irigasi di daerah yang dipilih. Hal ini dicapai melalui rehabilitasi, revitalisasi dan modernisasi Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi, penguatan kelembagaan, perbaikan manajemen, operasi dan pemeliharaan. Namun karena keterbatasan dana APBN, maka untuk mendukung tujuan ini Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengupayakan pendanaan dengan menggunakan Pinjaman Luar Negeri. Dengan adanya modernisasi

irigasi di Indonesia dalam *Project SIMURP* maka *outcome*/hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas produksi pangan dan mengurangi impor pangan.
- b) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
- c) Mengendalikan harga pangan yang selalu bergejolak pada musim tertentu.
- d) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat sehingga meminimalisir kasus-kasus kekurangan gizi khususnya pada anak.

*Project* modernisasi irigasi harus dapat mendukung berbagai tujuan pembangunan tidak hanya produksi tanaman pangan dengan meningkatnya kesejahteraan petani.

### 3) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri Program Kegiatan *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) adalah sebagai berikut:

Pemberi PHLN	: IBRD dan AIIB
Besaran PHLN	: USD250.000.000,00 dan USD250.000.000,00
Tanggal Penandatanganan	: 25 Juli 2018 (IBRD) dan 11 Juli 2018 (AIIB)
Nomor Pinjaman PHLN	: IBRD No. 8891-ID dan AIIB No. L0060A
Tanggal Efektif PHLN	: 23 Agustus 2018 (IBRD) dan 23 Agustus 2018 (AIIB)
Nomor Register PHLN	: 1NF3PM6A dan 1HS4NF9A
<i>Closing Date</i> PHLN	: 30 Juni 2024

### 4) Pelaksana Kegiatan.

Lembaga pelaksana kegiatan pada *Project SIMURP* terdiri dari Kementerian dan Lembaga, yaitu:

- a) Bappenas selaku *National Steering Committee for Water Resources* (NSCWR).
- b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku *Executing Agency Project SIMURP*.
- c) Kemendagri selaku *National Project Implementing Unit* (NPIU) yang pelaksanaan kegiatan *project* berada pada Subdirektorat Pekerjaan Umum (PU) dan Subdirektorat Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (KISP).
- d) Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan Kegiatan *Project SIMURP* pada NPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu

- a) Komponen A merupakan kegiatan Rehabilitasi Sistem Irigasi

dan Drainase Mendesak;

b) Komponen B merupakan kegiatan Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis; dan

c) Komponen C merupakan kegiatan Pengelolaan Proyek.

Realisasi belanja untuk Program Kegiatan *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)* sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp10.527.837.702,00 atau 99,39% dari anggarannya sebesar Rp10.592.140.000,00.

d. ***National Urban Supply Water Project (NUSWP)***.

1) Latar Belakang.

RPJMN 2020-2024 sadar bahwa permasalahan di sektor akses air minum layak masih sangat besar, maka dalam periode perencanaan tersebut pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan akses air minum layak menjadi 75,34%, termasuk di antaranya 30,35% akses perpipaan. Untuk memenuhi target tersebut, RPJMN 2020-2024 menyusun salah satu proyek prioritas nasional berupa pembangunan sepuluh juta sambungan rumah. Sementara untuk mendukung pencapaiannya, ditargetkan 100% PDAM meningkat kinerjanya menjadi sehat di akhir periode perencanaan jangka menengah.

Pemenuhan target 10 juta sambungan rumah dalam rangka memperluas dan memenuhi layanan dasar di sektor air minum tentu menjadi tanggung jawab dan diharapkan dikontribusi oleh banyak pihak dan program. *National Urban Water Supply Project (NUWSP)* yang didukung oleh dana pinjaman Bank Dunia diharapkan menjadi salah satu kontributor pencapaian target tersebut. Kemendagri, selaku pembina pemerintah daerah dan menjadi salah satu CPIU dari NUWSP, diharapkan mampu berkontribusi dalam rangka memastikan pemerintah daerah sebagai pelaksana SPM bersama PDAM-nya untuk menjangkau seluas mungkin akses masyarakat terhadap air minum.

Permasalahannya, pekerjaan rumah untuk perluasan akses air minum masih sangat besar. Di luar persoalan teknis terkait pembangunan dan penyediaan prasarana fisik layanan air minum, permasalahan akses terhadap air minum juga terjadi mulai dari sisi kelembagaan dan penyusunan dokumen perencanaan. Poin krusial pada fase ini antara lain adalah masih minimnya kapasitas Pemda dan PDAM untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terukur dan tepat sasaran. Permasalahan kelembagaan dan kapasitas aparatur ini akhirnya juga merembet ke permasalahan kurangnya sinkronisasi kebijakan/program/ kegiatan antara target dan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Di samping masih kerap terjadi masalah dalam sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di daerah, juga ketika mengintegrasikan program/kegiatan baik dalam dokumen perencanaan maupun anggaran.

2) Peranan Kemendagri.

Salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri c.q. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam rangka memastikan dukungan pemerintah dalam pencapaian target nasional peningkatan akses masyarakat terhadap air minum adalah bagaimana meningkatkan kapasitas Pemda dalam meningkatkan layanan penyediaan air minum. Fungsi ini semestinya perlu dilaksanakan terutama dalam rangka melakukan pembinaan umum penerapan SPM yang menjadi kewajiban Pemda, sekaligus dalam rangka menjalankan tugas CPIU dalam proyek NUWS.

Pekerjaan rumah di sektor penguatan kapasitas Pemda dalam program penyediaan air minum, melihat kondisi eksisting di atas, tentu bukan hal yang mudah dan oleh karenanya penting untuk terus dilakukan. Untuk itu, Kemendagri c.q. Ditjen Bina Bangsa selaku pembina umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjadi salah satu CPIU NUWSP memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Program Penyediaan Air Minum Perkotaan di Kawasan Permukiman – NUWSP

3) Tujuan Program.

Tujuan NUWSP adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perkotaan (Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta non-MBR) dan meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemda dan PDAM dalam memberikan pelayanan air minum.

Melalui pelaksanaan NUWSP diharapkan akan berkontribusi terhadap pencapaian target universal akses air minum perkotaan melalui penambahan 1,2 juta Sambungan Rumah (SR) baru di beberapa kota terpilih.

4) Lingkup Program.

Lingkup Program *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) merupakan program kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemendagri, dan *World Bank* untuk penyediaan Air minum yang layak di daerah Perkotaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) komponen sebagai berikut:

- a) Komponen 1: Dukungan Investasi untuk Pengembangan Infrastruktur Penyediaan Air Minum Perkotaan.
- b) Komponen 2: Bantuan Teknis dan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan PDAM.
- c) Komponen 3: Dukungan Penasihat dan Pengembangan Kebijakan untuk Pemerintah Pusat.
- d) Komponen 4: Implementasi Program dan Dukungan Manajemen.

5) Target Kegiatan/Program.

- a) Bertambahnya 1,2 juta Sambungan Rumah baru sebagai hasil intervensi proyek, sedikitnya 20% diantaranya merupakan sambungan rumah untuk MBR;
- b) Setidaknya 40 Pemda mendapatkan bantuan program peningkatan infrastruktur SPAM sebagai insentif pendamping, bantuan berbasis kinerja, ataupun stimulan;
- c) Hingga 200 Pemda dan/atau PDAM berpartisipasi aktif dalam program pelatihan dan peningkatan kapasitas;
- d) Minimal 20 PDAM mengalami peningkatan kinerja dan berhasil naik ke kelompok kinerja di atasnya; dan
- e) Setidaknya 20 PDAM menyiapkan proposal proyek yang *bankable*.

6) Rincian Pinjaman.

Rincian Pinjaman Luar Negeri program *National Urban Supply Water Project* (NUSWP).

Nomor Perjanjian	: IBRD 8872-ID
Nomor Register	: 1CPUK3GA
Tanggal Penandatanganan	: 2 Agustus 2018
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	: 8 Agustus 2018
<i>Closing Date</i>	: 31 Maret 2024
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	: USD100.000.000,00
Jumlah <i>Initial Deposit</i>	: USD1.000.000,00
Nomor Rekening Khusus	: 601333411980

7) Pelaksana Kegiatan.

- a) *Executing Agency*: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b) CPMU Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c) CPIU:
  - Direktorat SUPD II, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.
  - Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuda, Kemendagri.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp10.929.358.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp10.929.358.000,00.

e. ***National Urban Development Project (NUDP)***.

1) Latar Belakang.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia

mengembangkan *National Urban Development Project* (NUDP) atau Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2024. NUDP dikembangkan untuk mengatasi tantangan perkotaan di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a) Pemanfaatan arus urbanisasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah perkotaan.
  - b) Upaya mengurangi kesenjangan infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan perkotaan secara efisien.
  - c) Penguatan sinergi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang perkotaan, diantaranya melalui RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
  - d) Pengembangan akses pemerintah kota dan pelaku lokal dalam pembiayaan infrastruktur perkotaan.
- 2) Tujuan Program.

*National Urban Development Project* (NUDP) bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta perencanaan investasi (*capital investment*). *National Urban Development Project* (NUDP) akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 2020-2024 dengan biaya sebesar IDR 32,4 milyar berasal dari Rupiah Murni (APBN) dan USD49,6 juta dari pinjaman Bank Dunia. Pembiayaan proyek seluruhnya digunakan untuk kegiatan bantuan teknis (*Technical Assistance*), tidak mencakup pembiayaan untuk investasi infrastruktur.

Kesenjangan pembiayaan infrastruktur seringkali diidentifikasi sebagai faktor penghambat pengembangan kota, namun ternyata bukan penyebab tunggal atas masalah tersebut. Meskipun upaya peningkatan pembiayaan infrastruktur sudah banyak dilakukan, namun investasi yang dilakukan tidak efisien yang disebabkan oleh:

- a) Kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota; dan
- b) Tidak adanya prioritas investasi infrastruktur yang didasarkan pada berbagai aspek pengembangan wilayah. NUDP melalui berbagai intervensi dan program peningkatan kapasitas yang diberikan, diharapkan dapat memfasilitasi terlaksananya berbagai inovasi dan pendekatan baru pada perencanaan pembangunan kota, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi kedua jenis perencanaan di tingkat kota.

NUDP terdiri dari empat komponen program, yaitu:

- a) Komponen 1: Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan;

- b) Komponen 2: Keterpaduan perencanaan untuk pembangunan perkotaan;
- c) Komponen 3: Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan; dan
- d) Komponen 4: Dukungan pelaksanaan proyek.

3) Target NUDP.

Output Target dari NUDP ini adalah agar perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal (*capital investment*) dapat ditingkatkan. Pencapaian target NUDP diukur dengan tiga indikator utama, sebagai berikut:

- a) Tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan.
- b) Tersusunnya rencana dan program pembangunan perkotaan terpadu.
- c) Keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran.

Indikator utama diatas digunakan untuk memantau pencapaian program secara regular (tahunan).

4) Rincian Pinjaman.

Rincian pinjaman dalam rangka *National Urban Development Project* (NUDP)

Nomor Pinjaman PHLN	: IBRD 8976-ID
Nomor Registrasi	: 1PF7SCLA
Tanggal Penandatanganan	: 14 November 2019
Tanggal Efektif	: 25 November 2019
<i>Closing Date</i>	: 31 Desember 2024
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	: USD49.6000.000,00
Jumlah <i>Initial Deposit</i>	: USD2.562.500,00
Nomor Rekening Khusus	: 601.342411980

5) Pelaksanaan Kegiatan.

NUDP akan dilaksanakan maksimal di 15 (lima belas) kota pilot *project* di Indonesia. Kegiatan ini dikembangkan sebagai *platform* nasional pembangunan kota yang selanjutnya dapat menjadi contoh untuk diperluas di seluruh kota-kota di Indonesia. NUDP dilaksanakan secara bersama oleh:

- a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sebagai *Executing Agency* (EA) proyek NUDP dan *Central Project Management Unit* (CPMU) dibentuk di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

serta *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk komponen tertentu;

- b) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk penguatan koordinasi dan kebijakan nasional, yang akan dikoordinasikan oleh Direktorat Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional;
- c) Kemendagri (Kemendagri) sebagai *Project Implementation Unit* (PIU) atau pelaksana untuk komponen tertentu, yang terdiri dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II (SUPD II) dan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi dan Pembangunan Daerah (PEIPD) pada Ditjen Bina Bangda.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp98.027.207.565,00 atau 99,90% dari anggarannya sebesar Rp98.120.632.000,00.

**f. *Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP).***

1) Latar Belakang.

*Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP)* merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung gerakan Citarum Harum. Terdapat empat komponen kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan dalam pengelolaan sampah, dukungan dalam perencanaan yang terpadu dan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan dukungan dalam pelaksanaan program dan bantuan teknis.

Pengelolaan sampah yang kurang memadai akan berdampak pada berbagai aspek, seperti lingkungan, estetika, kesehatan manusia, serta dapat memberikan dampak lanjutan yang berujung pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Umumnya, sampah yang tidak tertangani akan berakhir dengan cara dibakar secara terbuka, dikubur, ataupun dibuang bebas ke lingkungan tanpa pengolahan lebih lanjut. Hal tersebut menjadikan sampah yang tidak tertangani berpotensi menjadi sumber pencemaran yang signifikan, menurunkan produktivitas, dan mengganggu kesehatan serta memicu timbulnya penyakit, merusak estetika, hingga tingginya pengeluaran untuk biaya kesehatan. Sampah yang tidak tertangani yang masuk ke badan sungai pun akan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir pada musim hujan. Di sisi lain, pencegahan banjir dengan pengerukan sampah pada saluran air pun menelan biaya yang cukup tinggi terutama bagi kota-kota yang berada di

pesisir dimana sampah akan bermuara sehingga berpotensi dan menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Tujuan Program.

Program Kegiatan *Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project* (ISWMP), merupakan program yang didesain untuk dapat membantu pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan sampah yang layak dengan peningkatan keseluruhan aspek terkait dalam sektor pengelolaan sampah untuk mendukung upaya pencapaian target akses universal persampahan, khususnya di wilayah perkotaan.

Tujuan utama dari pengembangan program ISWMP adalah untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah bagi penduduk perkotaan pada 8 (delapan) kota terpilih di wilayah Indonesia diantaranya: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung barat, Kab. Cianjur, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, dan Kab. Karawang.

3) Dalam rangka mencapai tujuan utama di atas, maka program ini akan dilaksanakan melalui 4 komponen sebagai berikut:

- a) Komponen 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Sampah.
- b) Komponen 2. Perencanaan Terpadu dan Peningkatan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- c) Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah.
- d) Komponen 4. Dukungan Pelaksanaan Program, Bantuan Teknis, dan Monitoring dan Evaluasi.

4) Target Program.

Penerima manfaat Program Kegiatan *Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project* (ISWMP) antara lain:

- a) Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab diberbagai aspek, baik teknis maupun administratif, dalam pengelolaan sampah.
- b) Pemerintah Provinsi yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah regional.
- c) Pemerintah Kabupaten/Kota prioritas.

5) Rincian Pinjaman.

Nomor Perjanjian	:	IBRD 9021-ID
Nomor Register	:	1HFQ7GNA
Tanggal Penandatanganan	:	27 Desember 2019
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	:	3 April 2020
<i>Closing Date</i>	:	30 November 2025

Jumlah Pinjaman Luar Negeri : USD100.000.000,00  
*Executing Agency* : Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

6) Pelaksanaan Kegiatan.

Lembaga pelaksana kegiatan pada Program ISWMP terdiri dari Kementerian dan Lembaga, yaitu:

- a) *Executing Agency*: Direktur Jenderal Cipta Karya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b) *Steering Committee*: Bappenas, Kemenko Maritim, KemenPUPR, KemenKeu, Kemendagri.
- c) CPMU: Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum.
- d) CPIU terdiri dari:
  - Direktorat PPLP, Ditjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum
  - Direktorat SUPD I & II Ditjen Bina Bangda, Kemendagri
  - Ditjen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 – Kementerian LHK.

Peran CPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam ISWMP, adalah:

- a) Membina Pemda dalam pengarusutamaan/prioritisasi pembangunan sektor persampahan;
- b) Mendorong penyusunan kebijakan dan panduan tingkat daerah dalam rangka pencapaian target pengelolaan persampahan;
- c) Mendorong peningkatan alokasi APBD untuk pengelolaan persampahan;
- d) Memfasilitasi Pemda kab/kota pilot dalam menetapkan target Proyek SWM sesuai kinerja Kab/Kota masing-masing.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp27.408.789.232,00 atau 99,81% dari anggarannya sebesar Rp27.460.070.000,00.

**g. *National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)*.**

1) Tujuan NUFReP.

Tujuan NUFReP adalah mengurangi risiko banjir di kota-kota terpilih di Indonesia melalui peningkatan kapasitas di tingkat nasional dan kota serta investasi untuk pengelolaan risiko banjir perkotaan terpadu. Ketercapaian tujuan dari NUFReP diukur dengan Indikator Utama dan Indikator Antara yang meliputi:

- a) Indikator Utama (*Project Development Objective/PDO Indicators*)
  - Jumlah penduduk yang mendapat manfaat dari upaya

ketangguhan banjir perkotaan terpadu di bawah proyek;

- Program nasional ketangguhan banjir perkotaan terbentuk yang panduannya diadopsi untuk pembiayaan investasi, penguatan kelembagaan, dan pertukaran pengetahuan;
- Tim koordinasi antar lembaga tingkat kota terkait ketangguhan banjir perkotaan terbentuk dan berfungsi; dan
- Peraturan perundangan dan/atau kebijakan mengenai ketangguhan banjir perkotaan terpadu yang diadopsi oleh pemerintah kota.

b) Indikator Antara (*Intermediate Results Indicators*)

- Kota-kota dengan model dan pemetaan risiko banjir yang diperbarui untuk mengatasi dampak urbanisasi dan perubahan iklim;
- Kota-kota dengan rencana aksi ketangguhan banjir perkotaan tahun jamak yang dikembangkan dengan langkah-langkah terpadu dan pertimbangan risiko iklim;
- Peningkatan atau perbaikan tepi sungai atau drainase;
- Kegiatan subproyek dengan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dan desain perkotaan yang ramah air (*water sensitive urban design*);
- Kota-kota dengan sistem peringatan dini banjir yang ditingkatkan dan berfungsi;
- Subproyek yang selesai (*completed*) memiliki rencana operasional dan pemeliharaan yang biayanya telah dimasukkan ke dalam anggaran tahunan;
- Individu yang mendapat pelatihan tentang topik-topik pengelolaan risiko banjir yang relevan;
- Keterwakilan perempuan dengan posisi pengambil keputusan dalam tim koordinasi ketangguhan banjir perkotaan di tingkat kota;
- Penerima manfaat (perempuan) yang melaporkan bahwa mereka telah meningkat pengetahuannya untuk mengambil keputusan perihal banjir perkotaan setelah mengikuti pelatihan dan kegiatan kesiapsiagaan;
- Jumlah kota yang mendapatkan dukungan teknis dari platform pengetahuan digital tingkat nasional;
- Jumlah kota yang telah mengadopsi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program nasional; dan
- Penerima manfaat yang melaporkan bahwa kegiatan proyek telah mencerminkan kebutuhan mereka (dipilah berdasarkan gender).

2) Hasil pencapaian indikator akan dipilah berdasarkan jenis kelamin

laki-laki dan perempuan, apabila relevan, dan sub-indikator akan dikuantifikasi jika memungkinkan untuk memastikan efektivitas pemantauan dan evaluasi proyek. Uraian deskripsi dari masing-masing Indikator Utama dan Indikator Antara yang digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi Proyek dapat dilihat pada POM Buku 2 Kerangka Kerja dan Monitoring Pencapaian Tujuan Proyek.

- 3) Ruang lingkup kegiatan NUFReP yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2023 sampai Tahun 2028, antara lain:
  - a) Analisis dan perencanaan risiko banjir perkotaan di 6 (enam) dan kajian teknis di IKN;
  - b) Penanganan banjir perkotaan melalui tindakan struktural dan non-struktural untuk jangka pendek dan menengah yang mencakup integrasi infrastruktur abu-abu (*grey*) dengan biru-hijau (*blue-green*), solusi berbasis alam (*nature-based solutions*), perbaikan ruang publik perkotaan, dan desain perkotaan ramah air (*water-sensitive urban design*);
  - c) Pembentukan program nasional untuk memperkuat ketangguhan kota-kota di Indonesia terhadap banjir melalui pendekatan terpadu dan untuk meningkatkan mitigasi risiko banjir, investasi, dan tata kelola kota-kota yang berpartisipasi;
  - d) Peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan risiko banjir termasuk meningkatkan kemitraan lokal dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan; dan
  - e) Kegiatan pendukung proyek.
- 4) NUFReP terdiri dari 3 komponen, yakni:
  - a) Komponen 1: Perencanaan Penanganan dan Analisis Risiko Banjir. Kegiatan pada komponen ini mencakup pemetaan yang terperinci guna menunjukkan kedalaman genangan serta periode ulang (probabilitas) dengan menggunakan model permukaan digital resolusi tinggi/DTM, model hidrologi, dan model hidrodinamika, termasuk pemetaan probabilitas risiko banjir yang mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan, penurunan muka tanah, dan dampak perubahan iklim (termasuk kenaikan muka air laut dan perubahan intensitas curah hujan) sehingga dapat disusun rencana penanganan risiko banjir perkotaan jangka pendek dan menengah dengan mengintegrasikan kegiatan prioritas struktural maupun non-struktural.
  - b) Komponen 2: Peningkatan Ketangguhan Banjir Perkotaan. Kegiatan pada komponen ini mencakup kegiatan fisik (konstruksi) tindakan struktural dan non-struktural termasuk subproyek prioritas yang menunjukkan dampak langsung pada

pengurangan risiko banjir dan adaptasi iklim (*no-regret measures*). Komponen ini mengedepankan integrasi *grey infrastructure* (infrastruktur abu-abu) dengan *blue-green infrastructure* (infrastruktur biru-hijau) guna meningkatkan ketangguhan wilayah perkotaan secara keseluruhan.

- c) Komponen 3: Manajemen Program dan Dukungan Pelaksanaan. Kegiatan pada komponen ini mencakup dukungan pelaksanaan NUFReP yang meliputi pembentukan dan operasionalisasi Program Nasional, pengelolaan proyek, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan proyek dalam pengelolaan risiko banjir perkotaan, dan peningkatan koordinasi antar lembaga.
- 5) Spesifikasi Pinjaman Luar Negeri Program *National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)* adalah sebagai berikut:

Nomor Perjanjian	: IBRD No.9459-ID
Nomor Register	: 1739NSEA
Tanggal Penandatanganan	: 11 Januari 2023
Tanggal Efektif	: 27 Maret 2023
<i>Closing Date</i>	: 31 Januari 2028
Jumlah Pinjaman Luar Negeri	: USD2.000.000,00
<i>Executing Agency</i>	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- 6) Penerima Manfaat Proyek.
- NUFReP akan memberikan manfaat kepada masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi sasaran sebagai berikut:
- a) Masyarakat yang berpotensi terdampak risiko banjir di Kota Bima, Banjarmasin, Manado, Medan, dan Semarang.
- b) Pemerintah pusat dan pemerintah kota yang terlibat dalam pengurangan risiko banjir di Kota Bima, Banjarmasin, Manado, Medan, dan Semarang.

Di bawah Komponen 1 dan Komponen 2, Pemerintah Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan mendapatkan manfaat langsung dari dukungan kegiatan perencanaan ketangguhan banjir yang komprehensif serta pembangunan infrastruktur banjir perkotaan yang terpadu

- 7) Lokasi Kegiatan Proyek.
- Lokasi kegiatan NUFReP tersebar di 7 (tujuh) kota, di wilayah sungai kewenangan pusat, dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, ketersediaan anggaran pembebasan lahan, dan dukungan pemerintah daerah. Adapun lokasi kegiatan NUFReP adalah

sebagai berikut:

- a) Kota Bima meliputi DAS Rontu.
- b) Kota Manado meliputi DAS Tondano, DAS Sario, DAS Bailang, dan DAS Malalayang.
- c) Kota Medan meliputi DAS Belawan, DAS Deli, DAS Percut.
- d) Kota Banjarmasin meliputi DAS Martapura dan DAS Barito.
- e) Kota Semarang meliputi Sistem drainase Semarang Timur, Sistem drainase Semarang Tengah, Sistem drainase Semarang Barat dan Sistem drainase Mangkang.
- f) Kota Gorontalo meliputi DAS Limboto dan DAS Bolango-Bone.
- g) Ibu Kota Negara (IKN).

Rincian lokasi dan nama paket kegiatan ditetapkan dalam dokumen *Overall Work Plan* dan *Annual Work Plan*. Kegiatan di luar daftar DAS/sungai/kota yang telah disebutkan di atas, dapat diusulkan oleh Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* untuk disetujui oleh Bank Dunia.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.093.877.990,00 atau 99,07% dari anggarannya sebesar Rp2.113.531.000,00.

h. ***Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP)***.

1) **Latar Belakang.**

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa antara tahun 2008 hingga tahun 2021, musibah banjir mengakibatkan 2.813 nyawa hilang, 109.958 orang terluka, 392.000 rumah rusak, dan 6,7 juta rumah terendam di seluruh Indonesia. Kerugian banjir rata-rata tahunan diperkirakan mencapai USD2,4 miliar.

Risiko banjir juga semakin memburuk. Jumlah orang yang tinggal di daerah rendah di pesisir diproyeksikan meningkat dari 39,3 juta (2000) menjadi 93,7 juta di tahun 2060, sedangkan jumlah orang yang hidup di dataran banjir dengan risiko kemungkinan banjir sekali per 100 tahun akan mencapai 14,5 juta orang di tahun 2060 karena naiknya muka air laut. Kerusakan tahunan akibat banjir pesisir diperkirakan akan meningkat 160 kali lipat di tahun 2080 jika tanpa upaya adaptasi. Jumlah kejadian banjir di Indonesia tiap tahunnya cenderung naik sejak tahun 2002 seperti ditunjukkan data BNPB.

Oleh karena itu, penanggulangan banjir melalui pembangunan fisik (*structural approach*), harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (*non-structural approach*), dengan menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya bisa

lebih optimal. Hal tersebut sejalan dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana desentralisasi pendelegasian wewenang secara bertahap dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah aliran sungai dimaksudkan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat lokal mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan.

Atas pertimbangan tersebut, sebagai institusi yang ditugaskan melakukan pembinaan kepada daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya dalam bidang urusan pertanian dan pangan dengan terlibat sebagai *Central Project Implementation Unit (CPIU)* pada *Program Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP/FMNJP)* untuk fokus pada Pengelolaan Risiko Banjir Terpadu (PRBT).

*Program Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP/FMNJP)* dibiayai dari *Loan ADB 4410-INO* dengan fokus lokasi di Wilayah Sungai (WS) Cimanuk Cisanggarung dan WS Jratunseluna.

## **2) Program ini disusun menjadi 2 (dua) output:**

- a) Operasionalisasi pengelolaan risiko banjir. Output ini akan membangun kapasitas organisasi daerah aliran sungai, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk lebih beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang diantisipasi. Proyek ini akan memperkenalkan EOS untuk memprediksi dan memantau banjir dan penurunan tanah di pantai Jawa Utara. EOS akan mendukung perencanaan FRM yang mengintegrasikan proyeksi perubahan iklim, dan penilaian kerusakan untuk menginformasikan dukungan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir Output ini akan memodernisasi sistem hidrometeorologi untuk meningkatkan akuisisi data real-time di kedua wilayah wilayah sungai (RBT). Proyek ini akan mengembangkan kerangka kerja nasional untuk menyelaraskan teknologi untuk *Flood Forecasting, Early Warning and Flood Evaluation System (FFWFES)* di seluruh daerah aliran sungai di Indonesia.
- b) Meningkatnya infrastruktur ketahanan iklim serta Operasi dan Pemeliharaan (O&P). Kegiatan di bawah output ini akan secara langsung mengurangi risiko iklim fisik melalui pembangunan dan peningkatan perlindungan banjir dan fasilitas penyimpanan air. Output ini akan memperkuat kapasitas lembaga pelaksana dan pelaksana dalam manajemen proyek. Ini akan memperkenalkan lembaga pelaksana dan pelaksana praktik terbaik untuk mengarusutamakan adaptasi dan inovasi perubahan iklim dalam operasi mereka.

## **3) Penerima Manfaat.**

- a) Kementerian/Lembaga. Terlaksananya kebijakan program kegiatan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.
- b) Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Terfasilitasi dan tersinkronisasinya pelaksanaan kebijakan program kegiatan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.
- c) Pemerintah Daerah. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.
- d) Masyarakat. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam perlindungan kawasan pertanian di wilayah rawan bencana.

**4) Strategi Pencapaian Keluaran.**

- a) Metode pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode swakelola dan kontraktual oleh Sub Direktorat Pertanian dan Pangan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I.
- b) Tahapan pelaksanaan. Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - Rapat Koordinasi yang meliputi Rapat koordinasi Awal program Tahun Anggaran 2025 dan rapat-rapat koordinasi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Tujuan dan output. Tujuan kegiatan ini agar terwujud koordinasi antar pengelola program terkait dengan penyelenggaraan program pada masing-masing tingkatan, sedangkan outputnya adalah berupa laporan rapat koordinasi pelaksanaan program perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana.
    - Kegiatan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahap pelaporan.
    - Kegiatan akan melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan dan Provinsi serta kabupaten yang terlibat program FMCPNJP/FMNJP.
  - Dukungan Tenaga Sekretariat CPIU Ditjen Bina Bangda: Bertujuan untuk mendukung tugas kesekretariatan CPIU Ditjen Bina Bangda dalam mendukung terlaksananya program FMCPNJP/FMNJP.
  - Supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tujuan dan output. Meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Manajemen Banjir dan outputnya Terlaksananya fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Manajemen Banjir.
- Lokasi kegiatan dilaksanakan pada 16 Daerah.
- Pelaksana: Pelaksana supervisi, pengendalian dan pengawasan Program Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Kawasan Pertanian di Wilayah Rawan Bencana (FMCPNJP/FMNJP) yaitu beberapa Direktorat/Sub Direktorat dilingkungan CPIU Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.
- Jasa *Technical Assistant Project Management and Technical Support Consulting Services* (CS – 04):
- Kegiatan bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di CPIU Ditjen Bina Bangda dan menghasilkan output kegiatan berupa terfasilitasinya kebutuhan pengadaan konsultan (*Technical Assistant*) di Ditjen Bina Bangda.

c) Instansi yang dilibatkan.

Instansi yang dilibatkan di tingkat Pemerintah Pusat antara lain Bappenas Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan sedangkan di tingkat daerah yaitu Bappeda dan instansi terkait lainnya di lokasi pelaksanaan program FMCPNJP/FMNJP.

Untuk mendukung Program *Flood Management in North Java Project* (FMNJP), *Asian Development Bank* (ADB) memberikan pinjaman sebesar JPY36.055.200.000 dengan nomor perjanjian Pinjaman 4410-INO dengan Nomor Register 1NPBHBMA yang mulai efektif pada 9 Februari 2024 dan berakhir pada 30 Juni 2029.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.694.886.831,00 atau 98,88% dari anggarannya sebesar Rp1.714.054.000,00.

i. ***Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).***

*Local Service Delivery Improvement Project* (LSDP) dengan nilai pagu PHLN sebesar Rp514.431.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak ada realisasi belanja dari pinjaman luar negeri untuk program *Local Service Delivery Improvement Project* (LSDP).

4. Ditjen Dukcapil mengelola anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp250.715.450.000,00 untuk program ***ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation (Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital).***

Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar USD250.000.000,00 (sekitar Rp 3,7 triliun) kepada Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Pinjaman

ini untuk memperkuat sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sekaligus meningkatkan penggunaan identifikasi digital. Tujuannya, guna memperkuat pelayanan serta kepercayaan terhadap ekonomi digital di Indonesia. Pinjaman ini akan mendukung proyek *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* (Identifikasi untuk Penyelenggaraan Layanan yang Inklusif dan Transformasi Digital). Proyek tersebut akan mendukung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri meningkatkan sistem kependudukan dan catatan sipil di Indonesia saat ini terutama memperluas cakupannya di 12 Provinsi prioritas dan di kalangan penduduk rentan di seluruh Indonesia.

Proyek ini akan mendukung pengembangan infrastruktur publik digital prioritas. Termasuk *platform* verifikasi identitas dan *electronic-Know Your Customer (e-KYC)*, aplikasi identifikasi digital, serta *platform* pertukaran data untuk memfasilitasi proses berbagi informasi antar lembaga pemerintah yang mudah dan aman. Proyek ini akan memodernisasi infrastruktur data pada Ditjen Dukcapil. Selain juga meningkatkan kemampuannya dalam menjamin keamanan di dunia maya maupun perlindungan terhadap data pribadi serta kerangka privasi. Proyek ini dapat mendukung peningkatan taraf hidup penduduk Indonesia dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga mereka dapat menggunakan NIK dengan mudah untuk melakukan transaksi dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, baik secara fisik maupun dalam jaringan (*daring/online*).

Proyek ini dapat membantu Indonesia terus menjaga keselamatan dan keamanan data kependudukan. Sistem identifikasi diketahui sebagai faktor kunci dalam pembangunan, kemampuan untuk memverifikasi identitas legal dapat meningkatkan akses kepada layanan dari pemerintah maupun swasta, seperti perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, layanan keuangan serta niaga elektronik (*e-commerce*). Selain itu, juga meningkatkan berbagai peluang ekonomi, misalnya, akses terhadap pekerjaan formal.

a. Tujuan dan Sasaran Program:

- 1) Memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil dan meningkatkan penggunaan identifikasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan penyampaian layanan sektor publik dan swasta prioritas untuk seluruh Masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia di 11 provinsi prioritas yang telah memiliki NIK.
- 2) Proporsi anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran.
- 3) Jumlah penduduk Indonesia yang telah menginstal aplikasi ID digital dan melakukan autentikasi minimal satu kali.
- 4) Jumlah orang yang telah menggunakan *platform e-KYC* untuk mengaktifkan layanan terpilih termasuk layanan keuangan.
- 5) Selisih proporsi pria dan wanita Indonesia yang memiliki rekening bank.

6) Jumlah pengguna institusional yang menggunakan verifikasi identitas baru dan *platform e-KYC* untuk autentikasi.

b. Spesifikasi Proyek (Data Proyek) adalah:

Nomor Pinjaman	:	IBRD Loan No.9520-ID
Nomor Register	:	1F2V2KKA
Tanggal Penandatanganan	:	30 Mei 2023
Tanggal efektif	:	12 Mei 2023
Tanggal penutupan	:	31 Desember 2027
Rekening Khusus	:	601.354.411.980
Jumlah Pinjaman	:	USD250.000.000,00 (IBRD 100%)
Pelaksana	Proyek	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
( <i>Executing Agency</i> )		

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp240.303.279.081,00 atau 95,85% dari anggarannya sebesar Rp250.715.450.000,00.

5. Pada Tahun 2024 Ditjen Bina Bangda mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dengan program *Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase-II* dari Bank Dunia (*World Bank*) sebesar Rp12.139.665.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Latar Belakang.

Kegiatan *Investing in Nutrition and Early Years (INEY)* merupakan hibah terencana yang berasal dari Bank Dunia (*World Bank*).

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang diluncurkan Wakil Presiden pada tanggal 12 Juli 2017 ditujukan untuk mengkonsolidasikan dukungan politis dan kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah, memperkuat penyelenggaraan kerangka kerja kebijakan multi-sektor, serta mendorong konvergensi program-program nasional, daerah, dan masyarakat. Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terdiri dari lima pilar yaitu:

- 1) Komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara.
- 2) Kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan, perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas.
- 3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat.
- 4) Mendorong kebijakan gizi dan ketahanan pangan.
- 5) Pemantauan dan evaluasi.

Strategi nasional ini memprioritaskan sejumlah intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan kelompok sasaran prioritas adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan/atau anak berusia 0-24 bulan

(selanjutnya disebut dengan Rumah Tangga 1000 HPK). Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* menetapkan 100 kabupaten lokasi prioritas penanganan pada tahun 2018, dan merencanakan perluasan penanganan secara bertahap sampai dengan seluruh kabupaten/kota dapat tertangani pada tahun 2024.

Pemerintah Indonesia memanfaatkan instrumen *PforR* Bank Dunia agar berbagai program yang termasuk dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat dilaksanakan secara konvergen dan efektif mendukung strategi percepatan penurunan *stunting*. Program *PforR Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) selama tahun 2018-2021 akan mendorong konvergensi program yang termasuk dalam intervensi nutrisi prioritas. Program *PforR* INEY bertujuan untuk meningkatkan penggunaan intervensi nutrisi spesifik dan sensitif secara simultan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) rumah tangga sasaran di Kabupaten/Kota prioritas.

Pelaksanaan Program *PforR* INEY didukung dengan komponen IPF. Komponen IPF dibiayai oleh hibah multi-donor *Global Financing Facility* (GFF). Komponen IPF digunakan untuk mendukung investasi yang bersifat katalitik dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaksanaan dan memperkuat sistem implementasi yang akan memberikan dasar pada reformasi jangka panjang dan kapasitas pelaksanaan yang berkelanjutan.

b. Peranan Kemendagri.

Sejumlah program yang tergolong dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif telah ditetapkan sebagai bagian dari paket program prioritas untuk percepatan penurunan *stunting* dalam strategi nasional. Kemendagri berperan melakukan koordinasi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam implementasi pilar 3 yang melibatkan kementerian teknis terkait, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Pendekatan Pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu melakukan konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan strategi nasional dimaksud mengupayakan agar semua *stakeholders* bersama-sama berkolaborasi untuk menurunkan prevalensi *stunting* yang diukur dengan *Key Performance Indicator* atau yang disebut dengan *Disbursement Link Indicator* (DLI). Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda melaksanakan DLI ke-7, yaitu *Increased Predictability and Result-Oriented of Fiscal Transfers that Support Convergence* atau Konsep Penilaian Kinerja Daerah dalam melaksanakan konvergensi program penurunan *stunting*.

c. Tujuan Program.

Tujuan pengembangan proyek dari komponen IPF adalah sama dengan program *PforR*, yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan intervensi gizi

secara bersamaan pada rumah tangga 1.000 HPK di kabupaten prioritas. Komponen IPF akan dibiayai oleh GFF yang memungkinkan adanya peningkatan sumber pendanaan dalam pelaksanaannya. Investasi tersebut akan meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui dukungan kepada mitra pemerintah utama dalam melaksanakan program pengurangan *stunting* konvergensi di tingkat nasional dan lokal.

Kegiatan Percepatan Pencegahan *Stunting* mempunyai sasaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program melalui dukungan kepada mitra pemerintah utama dalam melaksanakan program pengurangan *stunting* konvergensi di tingkat nasional dan lokal, dan secara khusus mempunyai sasaran sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dukungan pengembangan kapasitas bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan Aksi Konvergensi.
- 2) Melalui Pemerintah Provinsi secara periodik melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan pencegahan *stunting*.
- 3) Pengembangan sistem daring dan pertemuan-pertemuan untuk mempercepat proses pembelajaran dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan Aksi Konvergensi.

Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, konsolidasi serta sinkronisasi program pusat dan daerah sesuai dengan tugas Kemendagri dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* (Pilar ke-3) diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Penerbitan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 8 (delapan) Aksi Konvergensi penurunan *stunting* dan mensosialisasikan petunjuk teknis dimaksud kepada 34 Provinsi, 260 Kabupaten/Kota lokus tahun 2020 dan 100 Kabupaten/Kota lokus tahun 2021.
- 2) Penyelenggaraan *Workshop* Penguatan Kelembagaan, Pemantauan, *Benchmarking* dan Pembelajaran Antar Daerah dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi pada bulan November 2020 di 4 (empat) Regional, yaitu Yogyakarta, Denpasar, Ambon, dan Batam. Hasil *workshop* berupa praktek-praktek terbaik (*best practices*) dalam penanganan *stunting* dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan direplikasikan bagi pemerintah daerah lainnya. *Workshop* dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.
- 3) Melakukan analisis terhadap instrumen monitoring dan evaluasi berupa kuesioner yang dikirimkan kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi. Berdasarkan hasil analisis teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:
  - a) Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi.
  - b) Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap

perencanaan dan penganggaran daerah guna mendorong efektifitas percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

- c) Masih terbatasnya kabupaten/kota dan desa yang ditetapkan menjadi lokus *stunting*, sementara masih terdapat lokasi lain yang memiliki potensi angka *stunting* relatif tinggi.

d. Publikasi.

Hasil penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021 dipublikasikan melalui website [www.aksi.bangda.kemendagri.go.id](http://www.aksi.bangda.kemendagri.go.id) pada tanggal 1 November 2021. Hasil penilaian kinerja tersebut digunakan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lokus dalam upaya meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota non lokus dapat menggunakan hasil penilaian kinerja tersebut sebagai bahan pembelajaran 8 (delapan) aksi konvergensi untuk direplikasi dalam upaya percepatan.

e. Rincian Hibah.

*International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) atau *World Bank* memberikan hibah sebesar USD20.000.000,00 untuk mendukung Program Strategi Percepatan Penurunan *Stunting PforR Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor GFF TF0C1687 IHCA TF0C3114 dengan Nomor Register 2HUXN2PA yang mulai efektif pada tanggal 22 November 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028.

Ditjen Bina Bangda Kemendagri memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp12.139.665.000,00 untuk melaksanakan program *stunting* melalui mekanisme pembayaran rekening khusus nomor 602190411980.

Ditjen Bina Bangda telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan untuk periode Tahun Anggaran 2024 yang sudah diajukan oleh *Executing Agency* (Setwapres) dan sudah disetujui oleh Bank Dunia. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp11.633.255.334,00 atau 95,83% dari anggaran sebesar Rp12.139.665.000,00.

Ditjen Bina Bangda memiliki kegiatan berupa Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dengan output daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan *stunting*. Kegiatan tersebut merupakan program percepatan penurunan *stunting* yang realisasinya berasal dari rupiah murni sebesar Rp457.889.450,00 atau 99,00% dari anggarannya sebesar Rp462.500.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program/kegiatan/output untuk program percepatan penurunan *stunting* pada Ditjen Bina Bangda sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel 26.

Tabel 26

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program Percepatan Penurunan *Stunting* pada Ditjen Bina Bangda s.d. 31 Desember 2024**

No	Program/Kegiatan/Output		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Neto	%	
A.	Jenis Intervensi (3) : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis						
	06	Bina Pembangunan Daerah	600.000.000	12.685.401.000	12.053.978.718	95,02	
		Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III	600.000.000	12.685.401.000	12.053.978.718	95,02	
		6139.FBA.032	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> di Daerah (INEY-II)	-	12.139.665.000	11.633.255.334	95,83
		6139.UBA.011	Daerah yang meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan <i>stunting</i> (RM)	600.000.000	545.736.000	420.723.384	77,09
<b>TOTAL</b>			<b>600.000.000</b>	<b>12.685.401.000</b>	<b>12.053.978.718</b>	<b>95,02</b>	

Kemendagri memiliki program tata kelola kependudukan yang dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil. Salah satu output dalam program tersebut adalah akta kelahiran yang diterbitkan. Serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut pada tahun 2024, yaitu FGD implementasi kebijakan pencatatan kelahiran, asistensi, supervisi dan pendampingan pencatatan kelahiran secara *online* yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pencatatan kelahiran, serta asistensi, supervisi dan pendampingan pencatatan kelahiran yang belum mencapai target nasional di daerah dengan tujuan untuk mendorong tumbuhnya inisiatif dalam meningkatkan cakupan akta kelahiran dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran.

Sumber dana pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari rupiah murni dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp817.107.421,00 atau 91,90% dari anggaran belanja sebesar Rp889.120.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program/kegiatan/output untuk mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* pada Ditjen Dukcapil sampai dengan 31 Desember 2024 pada tabel 27.

Tabel 27

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Mendukung Program Percepatan Penurunan *Stunting* pada Ditjen Dukcapil s.d. 31 Desember 2024**

No	Program/Kegiatan/Output		Anggaran Semula	Pagu Revisi	Realisasi	%	
A	Jenis Intervensi : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau Pendampingan						
	Koordinasi dan Dukungan Teknis						
	010	Program Tata Kelola Kependudukan	1.000.000.000	889.120.000	817.107.421	91,90	
		1269.QAA.004	Akta Kelahiran Yang Diterbitkan	1.000.000.000	889.120.000	817.107.421	91,90
		400.000	Akta Kelahiran				
		051	FGD Implementasi Kebijakan Pencatatan Kelahiran	300.000.000	213.440.000	210.836.528	98,78
		052	Asistensi dan Supervisi Pencatatan Kelahiran Yang Belum Mencapai Target Nasional	300.000.000	288.800.000	285.751.494	98,94
053	Pendampingan Layanan Pencatatan Sipil di perwakilan RI	400.000.000	386.880.000	320.519.399	82,85		
<b>TOTAL</b>			<b>1.000.000.000</b>	<b>889.120.000</b>	<b>817.107.421</b>	<b>91,90</b>	

Dengan demikian anggaran belanja Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan program penurunan *stunting*, baik yang berasal dari hibah terencana maupun yang berasal dari rupiah murni sebesar Rp13.574.521.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp12.871.086.139,00 atau 94,82% dari anggarannya.

6. Pada Tahun 2024 Ditjen Bina Keuangan Daerah mengelola anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri sebesar Rp890.639.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. *Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project* dari Bank Dunia (*World Bank*).

Rincian Hibah Luar Negeri Program *Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project* adalah sebagai berikut.

Nomor Perjanjian PHLN	:	TF0B5420
Nomor Register	:	2FPJR4SA
Tanggal Penandatanganan	:	18 Mei 2021
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	:	18 Mei 2021
<i>Closing Date</i>	:	30 Juni 2025
Jumlah Hibah Luar Negeri	:	USD3.259.000,00
Jumlah <i>Initial Deposit</i>	:	Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan
Nomor Rekening Khusus	:	602199411980
<i>Executing Agency</i>	:	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp505.723.281,00 atau 97,73% dari anggaran sebesar Rp517.472.000,00.

Dana Hibah ini digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan, yaitu:

1. Uji Coba Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp38.540.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp38.449.000,00 atau 99,76%.
2. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp267.500.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp267.292.437,00 atau 99,92%.
3. Lokakarya dan Supervisi terkait Reformasi Pajak Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp211.432.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp199.981.844,00 atau 94,58%.

b. *Strengthening Intergovernmental Transfer and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia* (SINERGIS).

Rincian Hibah Luar Negeri Program *Strengthening Intergovernmental Transfer and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia* (SINERGIS).

Nomor Perjanjian PHLN : TF0C4755  
Nomor Register : 2S9MDU8A  
Tanggal Penandatanganan : Tanggal 22 Mei 2024  
Tanggal Efektif Perjanjian PHLN : Tanggal 22 Mei 2024  
*Closing Date* : Tanggal 30 Juni 2025  
Jumlah Hibah Luar Negeri : Rp373.167.000,00  
Nomor Rekening Khusus : 602208411980  
*Executing Agency* : Direktorat Jenderal  
Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp107.260.000,00 atau 28,74% dari anggaran sebesar Rp373.167.000,00.

Dana Hibah ini digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Redesain Proses Bisnis Pengembangan SIPD RI Bidang Keuangan Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp201.593.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 00,00%.
- 2) Penyusunan Desain dan Pengembangan Program *Management Office* SIPD RI Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp143.494.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp79.180.000,00 atau 55,18%.
- 3) *Focus Group Discussion* Penguatan Sistem Manajemen Keuangan Publik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp28.080.000,00. Realisasi belanja kegiatan ini sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp28.080.000,00 atau 100,00%.

Rincian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri disajikan pada **Lampiran III** (Ikhtisar PHLN).

### **C. CAPAIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN.**

Pelaksanaan APBN pada Kemendagri dapat diklasifikasikan dalam 1 fungsi, yaitu pelayanan umum. Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2024.

**Tabel 28**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Per Eselon I untuk masing-masing Fungsi dan Sub Fungsi Tahun 2024**

FUNGSI SUB FUNGSI	ES I	PAGU	REALISASI	%
Pelayanan Umum_Lembaga Eksekutif Dan Legislatif, Masalah Keuangan Dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri	01	739.996.996.000	733.148.704.387	99,07
	03	157.624.911.000	156.947.324.907	99,57
	07	33.743.503.000	30.373.537.661	90,01
	09	46.683.480.000	44.461.581.144	95,24
<b>SUB TOTAL</b>		<b>978.048.890.000</b>	<b>964.931.148.099</b>	<b>98,66</b>
Pelayanan Umum_Pelayanan Umum	01	602.603.761.000	601.908.081.515	99,88
	02	88.732.681.000	88.261.883.714	99,47
	03	63.513.730.000	63.483.164.287	99,95
	04	71.228.302.000	70.755.440.901	99,34
	05	113.626.613.000	111.636.499.290	98,25
	06	253.544.425.000	252.906.297.313	99,75
	07	61.269.372.000	60.739.816.257	99,14
	08	1.278.777.600.000	1.261.819.250.731	98,67
	09	63.454.356.000	63.032.413.931	99,34
	11	45.284.249.000	44.468.867.369	98,20
	12	159.031.306.000	158.840.682.508	99,88
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.801.066.395.000</b>	<b>2.777.852.397.816</b>
Pelayanan Umum_Pembangunan Daerah	04	137.512.995.000	125.525.050.411	91,28
	05	1.100.994.835.000	981.687.780.578	89,16
	06	238.366.140.000	227.442.309.048	95,42
	11	10.275.229.000	10.110.651.373	98,40
	12	71.775.410.000	70.599.546.012	98,36
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.558.924.609.000</b>	<b>1.415.365.337.422</b>	<b>90,79</b>
Pelayanan Umum.Pelayanan Umum Lainnya	04	15.997.672.000	14.692.122.062	91,84
<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.997.672.000</b>	<b>14.692.122.062</b>	<b>91,84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.172.841.005.399</b>	<b>96,62</b>

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output dan Target dari Masing-Masing Fungsi dan Sub Fungsi disajikan pada **Lampiran IV** (Rincian Fungsi dan Sub Fungsi APBN).

#### **D. PRIORITAS NASIONAL (PN).**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kemendagri terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), yaitu pada PN I, II, III, IV, V, VI, dan VII dari tujuh PN yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran Bruto dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. PN I Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pelaksanaannya tersebar pada 1 (satu) Eselon I dengan pagu mencapai Rp3.235.136.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.914.617.768,00.

**Tabel 29**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional I**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Bangda	3.235.136.000	2.914.617.768	90,09
<b>Total</b>	<b>3.235.136.000</b>	<b>2.914.617.768</b>	<b>90,09</b>

2. PN II Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pelaksanaannya tersebar pada 7 (tujuh) Eselon I dengan pagu mencapai Rp180.771.851.000,00 dan realisasi sebesar Rp163.167.558.991,00.

**Tabel 30**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional II**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Adwil	95.924.452.000	85.104.448.535	88,72
Ditjen Bina Pemdes	36.006.106.000	33.836.570.083	93,97
Ditjen Bina Bangda	16.813.881.000	14.221.401.209	84,58
Ditjen Otda	19.160.581.000	17.398.369.001	90,80
Ditjen Bina Keuda	7.513.000.000	7.322.298.710	97,46
BSKDN	3.704.269.000	3.645.647.504	98,42
BPSDM	1.649.562.000	1.638.823.949	99,35
<b>Total</b>	<b>180.771.851.000</b>	<b>163.167.558.991</b>	<b>90,26</b>

3. PN III Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pelaksanaannya tersebar pada 2 (dua) Eselon I dengan pagu mencapai Rp20.637.826.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.703.930.425,00.

**Tabel 31**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional III**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Bangda	5.555.119.000	4.753.680.543	85,57
Ditjen Dukcapil	15.082.707.000	14.950.249.882	99,12
<b>Total</b>	<b>20.637.826.000</b>	<b>19.703.930.425</b>	<b>95,47</b>

4. PN IV Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pelaksanaannya tersebar pada 2 (dua) Eselon I dengan pagu mencapai Rp4.130.711.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.884.710.214,00.

**Tabel 32**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional IV**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Polpum	3.730.711.000	3.730.431.796	99,99
Ditjen Bina Bangda	400.000.000	154.278.418	38,57
<b>Total</b>	<b>4.130.711.000</b>	<b>3.884.710.214</b>	<b>94,04</b>

5. PN V Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pelaksanaannya tersebar pada 4 (empat) Eselon I dengan pagu mencapai Rp31.326.732.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.472.583.200,00.

**Tabel 33**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional V**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Adwil	1.574.090.000	1.540.543.700	97,87
Ditjen Bina Bangda	26.452.641.000	22.643.586.483	85,60
Ditjen Dukcapil	2.500.001.000	2.498.695.261	99,95
Ditjen Bina Keuda	800.000.000	789.757.756	98,72
<b>Total</b>	<b>31.326.732.000</b>	<b>27.472.583.200</b>	<b>87,70</b>

6. PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pelaksanaannya tersebar pada Eselon I dengan pagu mencapai Rp1.020.477.000,00 dan realisasi sebesar Rp966.333.350,00.

**Tabel 34**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VI**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Bina Adwil	1.020.477.000	966.333.350	94,69
<b>Total</b>	<b>1.020.477.000</b>	<b>966.333.350</b>	<b>94,69</b>

7. PN VII Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya tersebar pada 3 (tiga) Eselon I dengan pagu mencapai Rp150.289.996.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.414.728.857,00.

**Tabel 35**  
**Rekapitulasi Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Penanggung Jawab Unit Eselon I Prioritas Nasional VII**

Penanggung Jawab	Pagu	Realisasi	%
Ditjen Polpum	136.633.109.000	136.627.420.206	100,00
Ditjen Bina Adwil	4.247.863.000	3.721.894.541	87,62
Ditjen Otda	9.409.024.000	8.065.414.110	85,72
<b>Total</b>	<b>150.289.996.000</b>	<b>148.414.728.857</b>	<b>98,75</b>

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Output dan Target dari Masing-Masing Kegiatan yang Menjadi Prioritas Nasional disajikan pada **Lampiran V** (Rincian Prioritas Nasional).

#### **E. KESALAHAN PENGANGGARAN.**

Pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2024 terdapat kesalahan penganggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang menjadi aset sebesar Rp4.507.316.484,00.
2. Belanja Modal menjadi Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp49.075.605,00 dan menjadi Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp197.000.000,00.
3. Antar Belanja Modal sebesar Rp13.831.393.215,00.

Rincian pagu, realisasi kesalahan penganggaran per satker disajikan dalam **Lampiran VI**.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara*

*Pengeluaran*

*Rp112.599.303,00*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp112.599.303,00 dan Rp56.709.120,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Kas dikelola dalam bentuk mata uang rupiah. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada Tabel 36.

Tabel 36

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	109.599.303	4.634.820	104.964.483
2	Ditjen Bina Adwil	3.000.000	52.074.300	(49.074.300)
<b>JUMLAH</b>		<b>112.599.303</b>	<b>56.709.120</b>	<b>55.890.183</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp112.599.303,00 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.000.000,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP sebesar Rp109.599.303,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker disajikan pada **Lampiran VII**.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.599.303,00 terdapat pada satu satker Kantor Pusat (KP) dan tiga satker Dekonsentrasi (DK) yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Setelah Tanggal Neraca terdapat pada **Lampiran VIII**.

*Kas di Bendahara*

*Penerimaan*

*Rp0,00*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.343.805.012,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal Neraca. Kas dikelola dalam bentuk mata uang Rupiah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I tersaji pada Tabel 37.

**Tabel 37**  
**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I**

No	Eselon I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	-	2.343.805.012	(2.343.805.012)
<b>Jumlah</b>		-	<b>2.343.805.012</b>	<b>(2.343.805.012)</b>

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker disajikan pada Lampiran VII.

**Tabel 38**  
**Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>2.343.805.012</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>52.814.789.400</b>
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan, Pendapatan Biaya Pendidikan, dan Pendapatan Pendidikan Lainnya pada Satker IPDN Jatinangor	6.878.293.000
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi pada Satker PPSDM Makassar	11.123.528.500
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya, dan Pendapatan Anggaran Lain-lain pada Satker BPSDM	24.401.929.130
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada Satker PPSDM Yogyakarta	10.411.038.770
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(55.158.594.412)</b>
Penyetoran ke Kas Negara atas penerimaan tahun 2024	(52.814.789.400)
Penyetoran ke Kas Negara atas penerimaan tahun 2023	(2.343.805.012)
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	<b>-</b>

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

- a) penambahan sebesar Rp6.878.293.000,00 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 pada satker IPDN Jatinangor yang terdiri dari Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan sebesar Rp77.250.000,00, Pendapatan Pendidikan Lainnya sebesar Rp204.752.900,00, dan Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp6.596.290.100,00;
- b) penambahan sebesar Rp11.123.528.500,00 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 satker PPSDM Makassar yang terdiri dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp10.836.813.000,00, Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp272.223.000,00, dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp14.492.500,00;
- c) penambahan sebesar Rp24.401.929.130,00 berasal dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 satker BPSDM yang terdiri dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp15.829.537.000,00, Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp113.310,00 dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp8.572.279.000,00;

- d) penambahan sebesar Rp10.411.038.770,00 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 satker PPSDM Yogyakarta yang terdiri dari Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp8.611.580.000,00, Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp1.782.396.000,00, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp8.976.000,00, dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp8.086.770,00;
- e) pengurangan sebesar Rp52.814.789.400,00 berasal dari Penyetoran ke Kas Negara atas penerimaan Tahun 2024 pada Satker IPDN Jatinangor sebesar Rp6.878.293.000,00, PPSDM Makassar sebesar Rp11.123.528.500,00, BPSDM sebesar Rp24.401.929.130,00, dan PPSDM Yogyakarta sebesar Rp10.411.038.770,00; dan
- f) pengurangan sebesar Rp2.343.805.012,00 berasal dari Penyetoran ke Kas Negara atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 yang telah disetorkan pada tanggal 31 Januari 2024 oleh IPDN Jatinangor.

*Kas Lainnya dan Setara Kas*  
*Rp64.956.638.835,00*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp64.956.638.835,00 dan Rp231.660.949.224,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas Lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka kementerian negara/lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 terdiri atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp85.030.129,00 dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp210.495.301.043,00. Kas dikelola dalam bentuk mata uang Rupiah. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I tersaji pada Tabel 39.

**Tabel 39**  
**Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I**

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	132.689.889	118.439.343	14.250.546
2	Ditjen Bina Adwil	2.350.542.231	193.508.923	2.157.033.308
3	Ditjen Bina Pemdes	7.192.991	-	7.192.991
4	Ditjen Bina Bangda	62.443.949.377	231.332.984.360	(168.889.034.983)
5	Ditjen Otda	19.478.954	-	19.478.954
6	Ditjen Bina Keuda	2.260.705	-	2.260.705
7	BPSDM	524.688	16.016.598	(15.491.910)
	<b>JUMLAH</b>	<b>64.956.638.835</b>	<b>231.660.949.224</b>	<b>(166.704.310.389)</b>

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker disajikan pada **Lampiran VII**.

Rincian penyetoran kas setelah tanggal neraca disajikan pada **Lampiran VIII**.

Penjelasan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp64.956.638.835,00 adalah sebagai berikut:

- a) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp132.689.889,00 pada Eselon I Setjen terdiri dari:
  - i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp75.767.076,00 pada Setjen Pusat yang merupakan pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp34.490.000,00 dan pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp41.277.076,00 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024. Sisa saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025;
  - ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp19.421.573,00 pada IPDN Jatinangor terdiri dari kelebihan pembayaran tunjangan istri dan beras Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 sebesar Rp9.574.180,00 dan kelebihan pembayaran gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan fungsional dan tunjangan umum Tahun 2024 yang pengembaliannya dilakukan melalui mekanisme potongan SPM Tahun 2025 sebesar Rp9.847.393,00; dan
  - iii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp37.501.240,00 pada IPDN Kampus NTB terdiri dari kelebihan pembayaran uang makan PNS, uang lembur, tunjangan khusus/kegiatan/kinerja Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 sebesar Rp30.788.740,00 dan pungutan pajak Tahun 2024 yang

disetorkan pada Tahun 2025 sebesar Rp6.712.500,00;

b) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp2.350.542.231,00 pada Eselon I Ditjen Bina Adwil terdiri dari:

- i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.341.253.194,00 pada Satker Ditjen Bina Adwil yang merupakan pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 sebesar Rp204.858.218,00. Selain itu, terdapat sisa kas yang belum didistribusikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak yang berhak sebesar Rp2.136.394.976,00 terdiri dari SPM LS sebesar Rp487.834.734,00 dan TUP sebesar Rp1.648.560.242,00. Saldo sebesar Rp2.136.394.976,00 tidak tercatat di saldo rekening Bendahara Pengeluaran karena telah dipindahbukukan ke rekening pribadi Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024. Namun, seluruh saldo telah didistribusikan kepada pihak yang berhak pada Tahun 2025;
- ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.213.384,00 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran atas Belanja Perjalanan Dinas yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada pihak penerima hak sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 terdapat pada Satker Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kas tersebut telah diserahkan kepada penerima hak pada Tahun 2025;
- iii. Sisa saldo kas pada Rekening satker Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil pengujian data rekening pada Aplikasi SPRINT sebesar Rp25.984,00. Sisa saldo kas tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025;
- iv. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.006.909,00 merupakan pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp170.000,00 dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp836.909,00;
- v. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp32.760,00 yang terdapat pada Satker Bappeda Provinsi Papua sebesar Rp60,00 dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp32.700,00; dan
- vi. Sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kas yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran atas uji coba *Cash Management*

*System (CMS);*

- c) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp7.192.991,00 pada Eselon I Ditjen Bina Pemdes Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 yang terdapat pada Satker Ditjen Bina Pemdes;
  - d) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp62.443.949.377,00 pada Eselon I Ditjen Bina Bangda terdiri dari:
    - i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp213.746.402,00 yang merupakan saldo kas atas denda keterlambatan pekerjaan pemerintah Tahun 2024 pada program Hibah Langsung dari *United Arab Emirates* (UAE);
    - ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp999,00 yang merupakan sisa saldo kas yang tersisa pada rekening atas Hibah Langsung dari UNICEF per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil pengujian data rekening pada aplikasi SPRINT yang telah disetorkan pada Tahun 2025; dan
    - iii. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp62.230.201.976,00 yang merupakan saldo kas dari hibah langsung dalam bentuk uang yang tersisa dari *United Arab Emirates* (UAE) atas Program *Financing The Regional Development* pada Satker Ditjen Bina Bangda.
- Laporan Keuangan Tahun 2024 *Unaudited* menyajikan saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp210.495.301.043,00 yang sebagian dari saldo tersebut belanjanya telah terealisasi namun belum dilakukan pengesahan belanja yang bersumber dari hibah. Kemendagri telah melakukan *void* belanja yang sebelumnya telah tercatat pada laporan keuangan *unaudited* dan melakukan pengesahan belanja yang bersumber dari hibah tersebut pada periode koreksi *audited* untuk menyajikan saldo kas dan belanja yang seharusnya. *Void* dan pengesahan belanja tersebut menyebabkan perubahan saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada Ditjen Bina Bangda menjadi sebesar Rp62.230.201.976,00 atau terkoreksi sebesar Rp148.265.099.067,00 dari saldo laporan keuangan *unaudited*;
- e) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp19.478.954,00 pada Eselon I Ditjen Otda merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025 yang terdapat pada Satker Ditjen Otda;
  - f) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp2.260.705,00 pada Eselon I Ditjen Bina Keuda merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan belanja pegawai (tunjangan

khusus/kegiatan/kinerja) Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara Tahun 2025 yang terdapat pada Satker Ditjen Bina Keuda; dan

- g) Kas Lainnya dan Setara kas sebesar Rp524.688,00 pada Eselon I BPSDM merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok PNS Tahun 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Tahun 2025.

Penjelasan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp231.660.949.224,00 adalah sebagai berikut:

- a) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar pada Eselon I Setjen sebesar Rp118.439.343,00 terdiri dari:
- i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.828.222,00 yang terdapat pada Satker Setjen Pusat. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024;
  - ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2023 sebesar Rp34.050.850,00 dan Belanja Honor Output Kegiatan Tahun 2023 di lingkungan Program Kepamongprajaan sebesar Rp3.186.750,00 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang terdapat pada Satker IPDN Jatinangor. Sisa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024;
  - iii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp19.813.253,00 yang terdapat pada Satker IPDN Kampus Sulawesi Utara. Sisa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024;
  - iv. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Pajak Honor Jasa Profesi Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.490.000,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Sulawesi Utara. Sisa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024;
  - v. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas realisasi pembayaran belanja air yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp27.573.000,00 pada IPDN Kampus Sulut. Sampai dengan 31 Desember 2024 masih belum dilakukan penyerahan kas ke pihak ketiga;

- vi. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp290.000,00 yang terdapat pada Satker IPDN Kampus Jakarta. Sisa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024; dan
  - vii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa Pungutan Pajak atas Transaksi Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas Negara pada IPDN Kampus Papua sebesar Rp22.207.268,00 sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024.
- b) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp193.508.923,00 pada Eselon I Ditjen Bina Adwil terdiri dari:
- i. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp165.015.363,00, Belanja Jasa Profesi sebesar Rp13.760.500,00, dan Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp63.000,00 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke kas negara. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024;
  - ii. Kas yang belum diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima hak sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.670.000,00 yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua;
  - iii. Sisa saldo pada rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp60,00 pada Satker Bappeda Provinsi Papua;
- c) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp231.332.984.360,00 pada Eselon I Ditjen Bina Bangda terdiri dari:
- i. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah berupa hibah langsung dalam bentuk uang yang tersisa dari *United Arab Emirates (UAE)* atas Program *Financing The Regional Development* sebesar Rp235.500.000.000,00 pada Satker Ditjen Bina Bangda yang diterima pada Tahun 2023. Sampai dengan 31 Desember 2024 belanja yang telah terealisasi dari hibah langsung tersebut adalah sebesar Rp4.167.300.475,00 sehingga sisa hibah yang belum terealisasi adalah sebesar Rp231.332.699.525,00; dan
  - ii. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas sisa saldo kas

pada Rekening Bendahara Pengeluaran Ditjen Bangda yang belum disetorkan ke kas Negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp284.835,00 atas Belanja Perjalanan Dinas. Sisa Saldo Kas Lainnya di Rekening Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024.

- d) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp16.016.598,00 pada Eselon I BPSDM merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2023 yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdapat pada BPSDM Kantor Pusat. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2024.

*Belanja Dibayar Dimuka  
(Prepaid)  
Rp299.007.100,00*

#### **C.4 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp299.007.100,00 dan Rp7.050.534.000,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan, namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I terdapat pada Tabel 40.

**Tabel 40**

**Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I**

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	49.007.100	-	49.007.100
2	Ditjen Bina Adwil	-	6.800.534.000	(6.800.534.000)
3	Ditjen Bina Pemdes	250.000.000	250.000.000	-
<b>JUMLAH</b>		<b>299.007.100</b>	<b>7.050.534.000</b>	<b>(6.751.526.900)</b>

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada 31 Desember 2024 sebesar Rp299.007.100,00 terdiri dari sebesar Rp49.007.100,00 merupakan *voucher* pembelian BBM yang diperoleh dari Belanja Tahun 2024 yang masih belum digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 pada Satker IPDN Kampus NTB dan sebesar Rp250.000.000,00 merupakan Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada tahun 2019 yang sampai dengan 31 Desember 2024 bukti pertanggungjawabannya belum lengkap pada Unit Eselon I Ditjen Bina Pemdes dengan rincian nomor SK sebagai berikut:

- i. SK PPK No. 140-257-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahun Anggaran 2019;
- ii. SK PPK No. 140-619-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa

Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019;

iii. SK PPK No. 410-788-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019;

iv. SK PPK No. 410-1001-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2019; dan

v. SK PPK No.140-1108-Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Tahap V.

Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang Pertanggungjawabannya Belum Lengkap terdapat pada Tabel 41.

**Tabel 41**

**Rincian Bantuan Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa yang Pertanggungjawabannya Belum Lengkap per 31 Desember 2024**

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nilai Bantuan (Rp)
1	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pagar Jaya	50.000.000
2	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pulau Legundi	50.000.000
3	Papua	Supiori	Supiori Utara	Mbrurwandi	50.000.000
4	Papua	Merauke	Naukenjerai	Kuler	50.000.000
5	Papua	Merauke	Naukenjerai	Tomer	50.000.000
Jumlah					250.000.000

**Tabel 42**

**Mutasi Belanja Dibayar Dimuka**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023</b>	<b>7.050.534.000</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>299.007.100</b>
Penyesuaian akhir Tahun 2024 atas pengakuan Belanja Dibayar Dimuka	299.007.100
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(7.050.534.000)</b>
Jurnal balik atas jurnal penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir tahun 2023 pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	(6.800.534.000)
Jurnal balik atas jurnal penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka akhir tahun 2023 pada Ditjen Bina Pemdes	(250.000.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>299.007.100</b>

a) Transaksi penambahan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp299.007.100,00 merupakan jurnal penyesuaian akhir Tahun 2024 yang terdapat pada IPDN Kampus NTB sebesar Rp49.007.100,00 atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 untuk *voucher* pembelian BBM yang masih tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 serta pada Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp250.000.000,00 atas Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada Tahun 2019 yang sampai dengan 31 Desember 2024 bukti pertanggungjawabannya belum lengkap. Rincian desa dengan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap terdapat pada **Lampiran IX**;

- b) Transaksi pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp250.000.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes merupakan jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2023 atas Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang berupa bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa pada Tahun 2019 yang bukti pertanggungjawabannya belum lengkap;
- c) Transaksi pengurangan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp6.800.534.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Adwil merupakan jurnal balik pengakuan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2023 atas pembayaran uang muka pekerjaan *Training of Trainer* (ToT) dan pelatihan aparatur kecamatan program penguatan kecamatan dalam mendukung kualitas tata kelola penyelenggaraan desa/*frontline service delivery* yang telah dibayarkan pada Tahun 2023, namun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2024;

Pendapatan yang Masih  
Harus Diterima  
Rp94.651.450,00

### C.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp94.651.450,00 dan Rp124.718.757,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan, namun belum diterima tagihannya.

Tabel 43

#### Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I

NO	ESELON I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	91.951.450	95.534.123	(3.582.673)
2	Ditjen Bina Adwil	-	21.364.634	(21.364.634)
3	Ditjen Bina Bangsa	2.700.000	7.820.000	(5.120.000)
<b>JUMLAH</b>		<b>94.651.450</b>	<b>124.718.757</b>	<b>(30.067.307)</b>

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp94.651.450,00 terdiri dari sebesar Rp34.616.450,00 berupa kelebihan pembayaran belanja tunjangan kinerja pada IPDN Kampus Sulawesi Utara sebesar Rp34.616.450,00 terjadi pada Tahun 2022 dan sampai dengan 31 Desember 2024 masih belum terdapat setoran pengembalian, sebesar Rp57.335.000,00 berupa sewa ATM periode 2019 sampai dengan 2021 yang pembayarannya masih belum diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 pada IPDN Jatinangor, serta sebesar Rp2.700.000,00 yang merupakan kekurangan pembayaran sewa penempatan mesin ATM pada Ditjen Bina Bangsa.

**Tabel 44**  
**Mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>124.718.757</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>60.035.000</b>
Jurnal Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima milik Satker IPDN Kampus Jakarta pada IPDN Jatinangor dalam rangka likuidasi Satker IPDN Jakarta	57.335.000
Jurnal Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas kekurangan pembayaran sewa penempatan mesin ATM pada Satker Ditjen Bina Bangda	2.700.000
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(90.102.307)</b>
Jurnal Balik atas saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada IPDN Jakarta dalam rangka likuidasi satker IPDN Kampus Jakarta	(3.582.673)
Jurnal Balik atas Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada IPDN Kampus Jakarta	(57.335.000)
Jurnal Balik atas Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Ditjen Bina Adwil	(21.364.634)
Jurnal Balik atas Pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Ditjen Bina Bangda	(7.820.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>94.651.450</b>

Penjelasan mutasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima:

- a) penambahan sebesar Rp57.335.000,00 berasal dari jurnal manual pada IPDN Jatinangor untuk mengakui Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas sewa ATM periode 2019 sampai dengan 2021 yang pembayarannya masih belum diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 milik IPDN Kampus Jakarta yang telah dilikuidasi dan menjadi subsatker IPDN Jatinangor;
- b) penambahan sebesar Rp2.700.000,00 berasal dari pengakuan kekurangan pembayaran sewa atas penempatan mesin ATM pada Ditjen Bina Bangda;
- c) pengurangan sebesar Rp3.582.673,00 berasal dari jurnal balik awal tahun atas pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir Tahun 2023 pada IPDN Kampus Jakarta berupa kelebihan pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja yang belum dikembalikan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.582.673,00. Penyesuaian saldo Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan Kinerja) dilakukan pada Satker IPDN Jatinangor karena Satker IPDN Kampus Jakarta telah dilikuidasi dan menjadi subsatker IPDN Jatinangor pada Tahun 2024;
- d) pengurangan sebesar Rp57.335.000,00 berasal dari jurnal balik pada IPDN Kampus Jakarta atas Sewa ATM periode 2019 sampai dengan 2021 yang pembayarannya masih belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp57.335.000,00 karena Satker IPDN Kampus Jakarta telah dilikuidasi dan menjadi subsatker IPDN Jatinangor pada Tahun 2024;

- e) pengurangan sebesar Rp21.364.634,00 berasal dari jurnal balik awal tahun atas pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir Tahun 2023 pada Ditjen Bina Adwil berupa:
- i. Kelebihan pembayaran Belanja Tunjangan Kinerja yang belum dikembalikan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.376.634,00; dan
  - ii. Kelebihan pembayaran Belanja Uang Makan yang belum dikembalikan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.988.000,00 pada Satker Ditjen Bina Adwil.
- f) pengurangan sebesar Rp7.820.000,00 berasal dari jurnal balik atas pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir Tahun 2023 pada Ditjen Bina Bangda atas kegiatan sewa gedung serba guna pada Tahun 2023 yang pembayarannya dilakukan pada Tahun 2024.

*Piutang Bukan Pajak  
Rp12.640.675.594,00*

### **C.6 Piutang Bukan Pajak**

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp12.640.675.594,00 dan Rp13.536.525.594,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayaran. Piutang Bukan Pajak terdiri atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 45.

**Tabel 45**

#### **Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I**

No	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	12.640.675.594	13.536.525.594	(895.850.000)
	<b>Jumlah</b>	<b>12.640.675.594</b>	<b>13.536.525.594</b>	<b>(895.850.000)</b>

Piutang Bukan Pajak pada Eselon I Setjen sebesar Rp12.640.675.594,00 merupakan Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana sebesar Rp11.742.843.000,00 yang terdiri dari Piutang Mahasiswa Program Magister sebesar Rp7.427.925.000,00 dan Program Doktor sebesar Rp4.314.918.000,00, dan Piutang Biaya Pendidikan Praja IPDN yang diberhentikan dari Tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar Rp897.832.594,00 yang terdapat pada IPDN Jatiningor.

**Tabel 46**  
**Mutasi Piutang Bukan Pajak per Jenis Transaksi**

No	Jenis Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<b>PIUTANG PNBP</b>					
1	Pendapatan Pendidikan	13.536.525.594	-	(895.850.000)	12.640.675.594
<b>TOTAL PIUTANG PNBP</b>		<b>13.536.525.594</b>	<b>-</b>	<b>(895.850.000)</b>	<b>12.640.675.594</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.536.525.594</b>	<b>-</b>	<b>(895.850.000)</b>	<b>12.640.675.594</b>

pengurangan sebesar Rp895.850.000,00 terdiri dari:

- a) Koreksi piutang mahasiswa karena tidak aktif dan dibatalkan sebagai mahasiswa angkatan 8 sebesar Rp18.750.000,00, angkatan 21 sebesar Rp26.850.000,00, angkatan 28 sebesar Rp42.750.000,00, angkatan 33 sebesar Rp66.000.000,00, dan angkatan 34 sebesar Rp183.250.000,00 pada IPDN Jatinangor;
- b) Koreksi kelebihan pencatatan piutang mahasiswa angkatan 24 sebesar Rp15.750.000,00 dan angkatan 27 sebesar Rp15.000.000,00 atas kurang catat transaksi pembayaran biaya pendidikan;
- c) Koreksi kelebihan pencatatan piutang mahasiswa angkatan 37 sebesar Rp750.000,00 angkatan 38 sebesar Rp750.000,00 dan angkatan 39 sebesar Rp750.000,00 yang debiturnya baru dapat teridentifikasi pada Tahun 2024 sehingga dilakukan koreksi pencatatan piutang pada IPDN Jatinangor;
- d) Koreksi pencatatan piutang mahasiswa angkatan 32 karena yang bersangkutan telah meninggal dunia sebesar Rp4.500.000,00; dan
- e) Pelunasan Piutang PNBP pada IPDN Jatinangor sebesar Rp520.750.000,00 terdiri dari Program Magister sebesar Rp182.750.000,00 dan Program Doktor Rp338.000.000,00.

**Tabel 47**  
**Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak**

No	ANGKATAN	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi+/- karena tagihan dan pembayaran tahun ini		Koreksi (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
			Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)		
<b>1. IPDN JATINANGOR</b>						
1	XVII	242.650.000	-	-	-	242.650.000
2	XVIII	386.850.000	-	-	-	386.850.000
3	XIX	168.150.000	-	(100.000)	-	168.050.000
4	XX	276.950.000	-	-	-	276.950.000
5	XXI	887.225.000	-	-	(26.850.000)	860.375.000
6	XXII	448.275.000	-	-	-	448.275.000
7	XXIII	862.650.000	-	-	-	862.650.000
8	XXIV	277.375.000	-	-	(15.750.000)	261.625.000
9	XXV	436.250.000	-	-	-	436.250.000
10	XXVI	640.750.000	-	-	-	640.750.000
11	XXVII	320.750.000	-	(32.000.000)	(15.000.000)	273.750.000
12	XXVIII	449.750.000	-	-	(42.750.000)	407.000.000
13	XXIX	265.000.000	-	-	-	265.000.000
14	XXX	591.750.000	-	(36.000.000)	-	555.750.000
15	XXX (I)	162.750.000	-	(18.750.000)	-	144.000.000
16	XXX (II)	416.000.000	-	-	-	416.000.000
17	XXXI	214.750.000	-	(6.500.000)	(4.500.000)	203.750.000
18	XXXII (I)	111.500.000	-	(26.000.000)	(66.000.000)	19.500.000
19	XXXII (II)	29.500.000	-	-	-	29.500.000
20	XXXIV	211.500.000	-	(16.750.000)	(183.250.000)	11.500.000
21	XXXV	294.250.000	-	-	-	294.250.000
22	XXXVI	52.750.000	-	-	-	52.750.000
23	XXXVII	136.400.000	-	(7.150.000)	(750.000)	128.500.000
24	XXXVIII	49.250.000	-	(27.750.000)	(750.000)	20.750.000
25	XXXIX	5.750.000	-	(5.000.000)	(750.000)	-
26	XL	28.250.000	-	(6.750.000)	-	21.500.000
<b>JUMLAH S2</b>		<b>7.967.025.000</b>	-	<b>(182.750.000)</b>	<b>(356.350.000)</b>	<b>7.427.925.000</b>
1	S3-I	571.000.000	-	-	-	571.000.000
2	S3-II	392.500.000	-	(14.750.000)	-	377.750.000
3	S3-III	210.750.000	-	-	-	210.750.000
4	S3-IV	638.800.000	-	-	-	638.800.000
5	S3-IV (II)	18.750.000	-	-	-	18.750.000
6	S3-V (I)	403.493.000	-	(58.500.000)	-	344.993.000
7	S3- V (II)	229.250.000	-	-	-	229.250.000
8	S3- VI	295.250.000	-	(57.500.000)	-	237.750.000
9	S3- VII (I)	111.250.000	-	-	-	111.250.000
10	S3- VII (II)	290.000.000	-	(81.500.000)	-	208.500.000
11	S3-VIII	524.500.000	-	(2.750.000)	(18.750.000)	503.000.000
12	S3-IX	680.750.000	-	(33.500.000)	-	647.250.000
13	S3-X	224.250.000	-	(45.750.000)	-	178.500.000
14	S3-XI	48.625.000	-	(11.250.000)	-	37.375.000
15	S3-XII	32.500.000	-	(32.500.000)	-	-
<b>JUMLAH S3</b>		<b>4.671.668.000</b>	-	<b>(338.000.000)</b>	<b>(18.750.000)</b>	<b>4.314.918.000</b>
<b>TOTAL PIUTANG PASCASARJANA</b>		<b>12.638.693.000</b>	-	<b>(520.750.000)</b>	<b>(375.100.000)</b>	<b>11.742.843.000</b>
Piutang Praja		897.832.594	-	-	-	897.832.594
<b>TOTAL PIUTANG IPDN JATINANGOR</b>		<b>13.536.525.594</b>	-	<b>(520.750.000)</b>	<b>(375.100.000)</b>	<b>12.640.675.594</b>

Status penyelesaian Piutang PNPB Pascasarjana maupun praja yang diberhentikan saat ini masih diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan belum diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih –Piutang Bukan  
Pajak  
Rp11.043.686.930,00

## C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.043.686.930,00 dan Rp9.844.326.180,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan piutang tak tertagih PNPB terdapat pada IPDN Jatinangor.

Tabel 48

### Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

No	Angkatan	Total Piutang 31 Desember 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Total Penyisihan 31 Desember 2024 (Rp)
			Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
1	XVII	242.650.000	242.650.000	-	-	-	242.650.000
2	XVIII	386.850.000	386.850.000	-	-	-	386.850.000
3	XIX	168.050.000	168.050.000	-	-	-	168.050.000
4	XX	276.950.000	276.950.000	-	-	-	276.950.000
5	XXI	860.375.000	860.375.000	-	-	-	860.375.000
6	XXII	448.275.000	448.275.000	-	-	-	448.275.000
7	XXIII	862.650.000	862.650.000	-	-	-	862.650.000
8	XXIV	261.625.000	261.625.000	-	-	-	261.625.000
9	XXV	436.250.000	436.250.000	-	-	-	436.250.000
10	XXVI	640.750.000	640.750.000	-	-	-	640.750.000
11	XXVII	273.750.000	273.750.000	-	-	-	273.750.000
12	XXVIII	407.000.000	407.000.000	-	-	-	407.000.000
13	XXIX	265.000.000	265.000.000	-	-	-	265.000.000
14	XXX	555.750.000	552.000.000	1.875.000	-	-	553.875.000
15	XXXI (I)	144.000.000	143.250.000	-	75.000	-	143.325.000
16	XXXI (II)	416.000.000	336.500.000	39.750.000	-	-	376.250.000
17	XXXII	203.750.000	153.750.000	6.500.000	2.150.000	77.500	162.477.500
18	XXXIII (I)	19.500.000	19.500.000	-	-	-	19.500.000
19	XXXIII (II)	29.500.000	12.000.000	-	-	87.500	12.087.500
20	XXXIV	11.500.000	-	5.750.000	-	-	5.750.000
21	XXXV	294.250.000	279.000.000	7.500.000	-	1.250	286.501.250
22	XXXVI	52.750.000	-	4.250.000	3.125.000	65.000	7.440.000
23	XXXVII	128.500.000	6.000.000	-	-	612.500	6.612.500
24	XXXVIII	20.750.000	-	7.125.000	-	32.500	7.157.500
25	XXXIX	-	-	-	-	-	-
26	XL	21.500.000	-	-	700.000	72.500	772.500
<b>Jumlah S2</b>		<b>7.427.925.000</b>	<b>7.032.175.000</b>	<b>72.750.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>948.750</b>	<b>7.111.923.750</b>
1	S3-I	571.000.000	571.000.000	-	-	-	571.000.000
2	S3-II	377.750.000	377.750.000	-	-	-	377.750.000
3	S3-III	210.750.000	182.750.000	14.000.000	-	-	196.750.000
4	S3-IV	638.800.000	565.800.000	27.625.000	1.775.000	-	595.200.000
5	S3-IV (II)	18.750.000	18.750.000	-	-	-	18.750.000
6	S3-V (I)	344.993.000	342.243.000	-	275.000	-	342.518.000
7	S3- V (II)	229.250.000	-	34.375.000	12.575.000	173.750	47.123.750
8	S3- VI	237.750.000	171.000.000	15.375.000	3.600.000	-	189.975.000
9	S3- VII (I)	111.250.000	96.500.000	7.375.000	-	-	103.875.000
10	S3- VII (II)	208.500.000	193.750.000	7.375.000	-	-	201.125.000
11	S3-VIII	503.000.000	450.250.000	7.875.000	3.350.000	17.500	461.492.500
12	S3-IX	647.250.000	-	-	-	3.236.250	3.236.250
13	S3-X	178.500.000	-	-	-	892.500	892.500
14	S3-XI	37.375.000	-	-	950.000	139.375	1.089.375
15	S3-XII	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah S3</b>		<b>4.314.918.000</b>	<b>2.969.793.000</b>	<b>114.000.000</b>	<b>22.525.000</b>	<b>4.459.375</b>	<b>3.110.777.375</b>
<b>Jumlah Total Pascasarjana</b>		<b>11.742.843.000</b>	<b>10.001.968.000</b>	<b>186.750.000</b>	<b>28.575.000</b>	<b>5.408.125</b>	<b>10.222.701.125</b>
<b>Piutang Praja</b>		<b>897.832.594</b>	<b>777.320.272</b>	<b>41.042.231</b>	<b>2.559.119</b>	<b>64.183</b>	<b>820.985.805</b>
<b>Jumlah Total Piutang</b>		<b>12.640.675.594</b>	<b>10.779.288.272</b>	<b>227.792.231</b>	<b>31.134.119</b>	<b>5.472.308</b>	<b>11.043.686.930</b>

Bagian Lancar Tagihan  
TP/TGR  
Rp300.680.096,00

## C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp300.680.096,00 dan Rp78.000.000,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 49.

Tabel 49

### Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I

No	Uraian	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bagian Lancar TGR	Setjen	300.680.096	78.000.000
Jumlah			300.680.096	78.000.000

Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 50.

Tabel 50

### Mutasi Bagian Lancar TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	78.000.000
<b>Mutasi Tambah (Penyesuaian Akhir Tahun 2025):</b>	<b>300.680.096</b>
Reklasifikasi Masuk dari Piutang TP/TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulawesi Utara)	300.680.096
<b>Mutasi Kurang (Jurnal Balik Awal Tahun):</b>	<b>(78.000.000)</b>
Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR pada Setjen (IPDN Jatinangor)	(78.000.000)
Saldo per 31 Desember 2024	300.680.096

Penjelasan mutasi Bagian Lancar TP/TGR sebagai berikut:

Transaksi penambahan sebesar Rp300.680.096,00 merupakan Reklasifikasi Masuk dari Piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan untuk diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang merupakan TGR atas kerugian negara berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2023 pada IPDN Kampus Sulawesi Utara; dan

Transaksi pengurangan sebesar Rp78.000.000,00 merupakan Reklasifikasi Keluar ke Piutang TP/TGR atas jurnal balik awal tahun pada IPDN Jatinangor.

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Bagian  
Lancar TP/TGR  
Rp1.503.401,00

## C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31

Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.503.401,00 dan Rp0,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR terdapat pada Satker IPDN Kampus Sulawesi Utara yang berasal dari satu debitur dengan kualitas piutang lancar.

*Persediaan*

*Rp338.870.256.976,00*

### C.10 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp338.870.256.976,00 dan Rp204.121.721.283,00.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 51.

**Tabel 51**  
**Rincian Persediaan**

Kode Perkiraan	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<b>I. Persediaan yang akan menjadi Beban Persediaan pada saat digunakan</b>			
117111	Barang Konsumsi	3.616.888.027	4.844.481.786
117199	Persediaan Lainnya	1.152.137.472	1.195.972.582
<b>Total</b>		<b>4.769.025.499</b>	<b>6.040.454.368</b>
<b>II. Persediaan yang akan menjadi Beban Pemeliharaan pada saat digunakan</b>			
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	625.989.968	610.476.442
117114	Suku Cadang	83.808.068	113.491.222
<b>Total</b>		<b>709.798.036</b>	<b>723.967.664</b>
<b>III. Persediaan yang akan menjadi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b>			
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21.391.184.913	21.334.897.038
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	33.349.858.276	382.720.441
117125	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	28.860.434.489	5.095.980.150
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	71.066.062.000	446.822.000
117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	139.951.231.767	160.017.091.880
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	2.521.084.896	9.154.135.762
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	36.251.577.100	925.651.980
<b>Total</b>		<b>333.391.433.441</b>	<b>197.357.299.251</b>
<b>TOTAL PERSEDIAAN</b>		<b>338.870.256.976</b>	<b>204.121.721.283</b>

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Unit Eselon I tersaji pada Tabel 52.

**Tabel 52**  
**Rincian Persediaan per Unit Eselon I**

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	4.003.439.661	4.050.580.802	(47.141.141)
2	Itjen	249.276.380	140.303.120	108.973.260
3	Ditjen Polpum	-	13.480.000	(13.480.000)
4	Ditjen Bina Adwil	25.671.175.183	24.352.228.495	1.318.946.688
5	Ditjen Pemdes	14.230.579.154	14.224.246.284	6.332.870
6	Ditjen Bina Bangda	278.372.114.776	147.442.252.605	130.929.862.171
7	Ditjen Otda	1.678.218.300	3.488.704.430	(1.810.486.130)
8	Ditjen Dukcapil	14.228.224.513	10.008.174.546	4.220.049.967
9	Ditjen Keuda	35.357.450	4.763.171	30.594.279
10	BSKDN	124.821.163	115.410.471	9.410.692
11	BPSDM	277.050.396	281.577.359	(4.526.963)
	<b>Jumlah</b>	<b>338.870.256.976</b>	<b>204.121.721.283</b>	<b>134.748.535.693</b>

Rincian Persediaan per Satker disajikan pada **Lampiran X**.

**Tabel 53**  
**Mutasi Persediaan**

Akun Persediaan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Barang Konsumsi	4.844.481.786	16.668.592.929	17.896.186.688	3.616.888.027
Bahan untuk Pemeliharaan	610.476.442	3.335.891.574	3.320.378.048	625.989.968
Suku Cadang	113.491.222	571.130.571	600.813.725	83.808.068
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	528.000	528.000	-
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21.334.897.038	865.762.700	809.474.825	21.391.184.913
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	382.720.441	37.893.314.419	4.926.176.584	33.349.858.276
Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	5.095.980.150	25.408.511.400	1.644.057.061	28.860.434.489
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	446.822.000	70.619.240.000	-	71.066.062.000
Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	160.017.091.880	23.375.000.000	43.440.860.113	139.951.231.767
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	9.154.135.762	282.745.681.730	289.378.732.596	2.521.084.896
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	925.651.980	39.799.727.820	4.473.802.700	36.251.577.100
Bahan Baku	-	393.607.325	393.607.325	-
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	-	229.250	229.250	-
Persediaan Lainnya	1.195.972.582	2.689.679.122	2.733.514.232	1.152.137.472
<b>TOTAL</b>	<b>204.121.721.283</b>	<b>504.366.896.840</b>	<b>369.618.361.147</b>	<b>338.870.256.976</b>

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Eselon I disajikan pada **Lampiran XI**.

Rincian Jenis Transaksi Mutasi Persediaan per Akun disajikan pada **Lampiran XII**.

Terdapat Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang tidak berada dalam penguasaan Kementerian Dalam Negeri berupa persediaan yang telah diserahterimakan kepada Pemda namun sampai dengan tanggal Neraca belum terbit SK Penghapusannya

sebesar Rp23.982.883.327,00 yang terdiri dari sebesar Rp4.888.439.809,00 pada Ditjen Bina Adwil berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.395.007.844,00 dan Tanah Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp3.493.431.965,00, sebesar Rp419.258.500,00 pada Ditjen Bina Pemdes berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat, sebesar Rp18.667.457.018,00 pada Ditjen Bina Bangda berupa Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat serta sebesar Rp7.728.000,00 berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Otda dengan rincian terlampir pada **Lampiran XIII**.

Terdapat Transaksi Transfer Keluar Likuidasi UAKPB pada IPDN Kampus Jakarta dan Transfer Masuk Likuidasi UAKPB sebesar Rp183.458.454,00 merupakan transaksi dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor.

Transaksi Barang Usang sebesar Rp125.845.777,00 merupakan transaksi dalam rangka mengeluarkan persediaan dengan kondisi usang dari Neraca yang terdapat pada:

- a) Setjen sebesar Rp98.584.000,00 berupa Persediaan dalam rangka penanganan COVID-19;
- b) IPDN Kampus Sulut sebesar Rp1.134.431,00 berupa Obat-obatan;
- c) IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp26.127.346,00 berupa Obat-obatan. Terdapat Transaksi Batal Catat Usang Rusak atas pencatatan barang tersebut sebesar Rp7.494.193,00 sehingga barang dengan kondisi usang yang dikeluarkan dari neraca sebesar adalah Rp18.633.153,00 pada Tahun 2024;

Terdapat Transaksi Rusak dalam rangka mengeluarkan persediaan dengan kondisi rusak dari Neraca sebesar Rp23.500,00 berupa Obat-obatan.

Terdapat Transaksi Koreksi Saldo Awal sebesar Rp395.757,00 atas persediaan berupa obat-obatan yang diperoleh sebelum Tahun 2024 pada Satker IPDN Kampus NTB berdasarkan hasil opname fisik.

Terdapat Transaksi Hibah Masuk sebesar Rp758.499.660,00 pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan berupa lima unit mobil pemadam kebakaran dari *Japan Firefighters Association (JFA)* yang telah diserahkan kepada Pemda Kabupaten Bangka sebanyak 1 unit, Kabupaten Banyuasin sebanyak 1 unit, Kabupaten Bombana sebanyak 1 unit, dan Kabupaten Pematangsiantar sebanyak 2 unit .

Transaksi Perolehan Lainnya sebesar Rp14.936.153.818,00 terdiri dari sebesar Rp149.712.000,00 yang merupakan transaksi dalam rangka mencatat persediaan yang berasal dari Belanja Operasional Lainnya yang semula dicatat sebagai Beban Operasional Lainnya pada IPDN Kampus Sumatera Barat, sebesar Rp14.688.703.000,00

atas pekerjaan yang telah terselesaikan pada Tahun 2024 yang dananya diperoleh dari UAE melalui mekanisme Hibah Langsung yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sehingga disajikan sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Bina Bangda, dan sebesar Rp97.738.818,00 merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan kuantitas dan kode barang persediaan pada saat pencatatan perolehan persediaan pada Ditjen Dukcapil.

Terdapat persediaan berupa sepuluh unit tenda pleton Satpol PP pada Ditjen Bina Adwil yang telah dikeluarkan dari Neraca pada akhir Tahun 2024 karena telah diserahkan kepada sepuluh Pemda dan dilengkapi dengan BAST, namun sampai dengan pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2024 berakhir persediaan tersebut masih berada di Ditjen Bina Adwil.

Adapun rincian sepuluh Pemda penerima bantuan pemerintah berupa tenda pleton Satpol PP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Pemerintah Kota Subulussalam;
4. Pemerintah Kota Sungai Penuh;
5. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Pemerintah Kota Padang Sidempuan;
7. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
9. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
10. Pemerintah Kabupaten Nduga.

Tanah  
Rp13.251.627.720.522,00

### C.11 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.13.251.627.720.522,00 dan Rp13.166.366.737.522,00 .

Rincian Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Unit Eselon I tersaji pada Tabel 54.

**Tabel 54**  
**Rincian Tanah per Unit Eselon I**

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Setjen	10.335.290.899.077	10.183.450.813.077	151.840.086.000
2	Itjen	142.267.725.000	142.267.725.000	-
3	Ditjen Pemdes	613.234.134.493	613.234.134.493	-
4	Ditjen Bina Bangda	479.054.657.019	479.054.657.019	-
5	BSKDN	224.894.826.500	224.894.826.500	-
6	BPSDM	1.456.885.478.433	1.523.464.581.433	(66.579.103.000)
	<b>Jumlah</b>	<b>13.251.627.720.522</b>	<b>13.166.366.737.522</b>	<b>85.260.983.000</b>

Rincian Tanah per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Mutasi Tanah per Eselon I terdapat pada **Lampiran XV**.

**Tabel 55**  
**Rincian Mutasi Tanah**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>13.166.366.737.522</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>2.799.978.087.000</b>
Saldo Awal	69.467.034.000
Transfer Masuk	67.505.536.000
Hibah Masuk	84.455.622.000
Likuidasi Masuk	2.577.683.998.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	60.536.000
Pengembangan Melalui KDP	805.361.000
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(2.714.717.104.000)</b>
Koreksi Susulan	(1.961.498.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(67.505.536.000)
Transfer Keluar	(67.505.536.000)
Koreksi Pencatatan	(60.536.000)
Likuidasi Keluar	(2.577.683.998.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>13.251.627.720.522</b>

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Tanah sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp69.467.034.000,00 terdapat pada IPDN Kampus Sumatera Barat sebesar Rp2.022.034.000,00 yang merupakan koreksi pemecahan NUP Tanah dalam rangka transfer keluar sebagian Tanah ke PPSDM Bukittinggi sebesar Rp60.536.000,00 dan Kepolisian Sektor Baso sebesar Rp1.961.498.000,00 yang merupakan koreksi pemecahan NUP serta pada PPSDM Bukittinggi sebesar Rp67.445.000.000,00 yang merupakan koreksi pemecahan NUP Tanah dalam rangka transfer keluar sebagian Tanah ke IPDN Kampus Sumbar;
- b) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp67.505.536.000,00 terdapat pada IPDN Kampus Sumatera Barat sebesar Rp67.445.000.000,00 atas Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan yang diterima dari PPSDM Bukittinggi, dan pada PPSDM Bukittinggi sebesar Rp60.536.000,00 atas Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan yang diterima dari IPDN Kampus Sumatera Barat;
- c) Transaksi penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp84.455.622.000,00 terdapat pada Setjen Pusat atas Tanah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Papua dengan nomor Sertifikat Hak Pakai 26.01.02.054.4.0003 atas nama Pemerintah Provinsi Papua untuk kemudian diserahkan kepada IPDN Kampus Papua;
- d) Transaksi penambahan dari Likuidasi Masuk sebesar Rp2.577.683.998.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan transaksi transfer masuk Tanah dalam rangka

penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor;

- e) Transaksi penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp60.536.000,00 terdapat pada PPSDM Bukittinggi yang merupakan koreksi dalam rangka menggabungkan nilai Tanah yang diterima dari IPDN Kampus Sumbar menjadi satu NUP;
- f) Transaksi penambahan dari Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp805.361.000,00 pada PPSDM Makassar berupa pekerjaan pengurukan tanah yang meningkatkan kualitas tanah dari yang semula rawa menjadi tanah yang dapat dimanfaatkan sehingga dilakukan reklasifikasi ke aset tetap definitif;
- g) Transaksi pengurangan dari Koreksi Susulan sebesar Rp1.961.498.000,00 pada IPDN Kampus Sumatera Barat yang merupakan koreksi pemecahan NUP Tanah milik IPDN Kampus Sumbar dalam rangka transfer keluar sebagian Tanah ke Kepolisian Sektor Baso;
- h) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp67.505.536.000,00 terdapat pada IPDN Kampus Sumatera Barat sebesar Rp60.536.000,00 yang merupakan koreksi pemecahan NUP Tanah dalam rangka transfer keluar sebagian Tanah ke PPSDM Bukittinggi, dan pada PPSDM Bukittinggi sebesar Rp67.445.000.000,00 yang merupakan koreksi pemecahan NUP Tanah dalam rangka transfer keluar sebagian Tanah ke IPDN Kampus Sumbar;
- i) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp67.505.536.000,00 terdapat pada IPDN Kampus Sumbar sebesar Rp60.536.000,00 atas Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan yang ditransfer ke PPSDM Bukittinggi, dan pada PPSDM Bukittinggi sebesar Rp67.445.000.000,00 atas Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan yang ditransfer ke IPDN Kampus Sumbar;
- j) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp60.536.000,00 terdapat pada PPSDM Bukittinggi yang merupakan koreksi dalam rangka menggabungkan nilai Tanah yang diterima dari IPDN Kampus Sumbar menjadi satu NUP; dan
- k) Transaksi pengurangan dari Likuidasi Keluar sebesar Rp2.577.683.998.000,00 terdapat pada IPDN Kampus Jakarta yang merupakan transaksi transfer keluar Tanah dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor.

Peralatan dan Mesin  
Rp4.156.760.195.772,00

## C.12 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.156.760.195.772,00 dan Rp3.663.742.657.834,00 .

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 56.

**Tabel 56**  
**Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I**

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Setjen	945.568.072.283	788.987.558.413	156.580.513.870
2	Itjen	27.007.975.396	19.694.568.304	7.313.407.092
3	Ditjen Polpum	17.595.012.477	17.651.540.515	(56.528.038)
4	Ditjen Bina Adwil	134.217.143.473	131.256.615.123	2.960.528.350
5	Ditjen Bina Pemdes	103.099.088.506	99.524.006.723	3.575.081.783
6	Ditjen Bina Bangda	67.403.183.914	66.955.981.914	447.202.000
7	Ditjen Otda	23.268.106.047	53.354.583.543	(30.086.477.496)
8	Ditjen Dukcapil	2.643.463.301.276	2.293.725.365.948	349.737.935.328
9	Ditjen Keuda	20.384.999.557	18.984.460.832	1.400.538.725
10	Badan Litbang	25.825.828.789	26.040.568.538	(214.739.749)
11	Badan PSDM	148.927.484.054	147.567.407.981	1.360.076.073
	<b>Jumlah</b>	<b>4.156.760.195.772</b>	<b>3.663.742.657.834</b>	<b>493.017.537.938</b>

Rincian Peralatan dan Mesin per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XVI**.

**Tabel 57**  
**Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>3.663.742.657.834</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>592.301.038.430</b>
Saldo Awal	586.005.762
Pembelian	538.345.436.272
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	7.828.853.810
Transfer Masuk	8.312.660.000
Hibah Masuk	1.924.368.420
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.613.058.195
Reklasifikasi Masuk	8.122.184.303
Perolehan Lainnya	4.292.521.254
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1.599.000
Likuidasi Masuk	16.386.204.108
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	5.414.266
Koreksi Susulan	3.867.250.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	15.483.040
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(99.283.500.492)</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(184.930.525)
Transfer Keluar	(8.312.660.000)
Hibah Keluar	(10.165.000)
Reklasifikasi Keluar	(3.656.373.498)
Koreksi Pencatatan	(12.014.752.501)
Likuidasi Keluar	(16.386.204.108)
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	(3.150.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(58.715.264.860)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>4.156.760.195.772</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(3.460.735.603.007)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>696.024.592.765</b>

Penjelasan transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp586.005.762,00 terdapat pada Setjen merupakan koreksi kesalahan pencatatan kuantitas barang berupa CCTV perolehan TAYL yang semula dicatat sebanyak 99 Unit seharusnya dicatat sebanyak 7 Unit;
- b) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp538.345.436.272,00.

Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp538.345.436.372,00 terdiri terdiri dari Pembelian yang berasal dari Belanja Modal sebesar Rp538.285.870.722,00 yang selanjutnya dilakukan *void* BAST sebesar Rp739.226.736,00 pada Ditjen Dukcapil yang selanjutnya dilakukan koreksi pencatatan karena pendetailan Transaksi Pembelian tersebut berasal dari kesalahan perekaman BAST pada Modul Komitmen yang seharusnya tidak diinput sehingga transaksi Pembelian yang berasal dari Belanja Modal adalah sebesar Rp537.546.643.986,00, serta berasal dari Belanja Barang sebesar Rp59.565.550,00.

Terdapat pendetailan Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp739.226.736,00 pada Ditjen Dukcapil yang selanjutnya dilakukan koreksi pencatatan karena pendetailan Transaksi Pembelian tersebut merupakan tindak lanjut dari kesalahan perekaman BAST pada Modul Komitmen yang seharusnya tidak diinput karena dokumen atas BAST tersebut tidak dilanjutkan sampai dengan SP2D. Ditjen Dukcapil telah melakukan *void* BAST atas kesalahan perekaman tersebut.

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per satker terdapat pada **Lampiran XVII**;

- c) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp7.828.853.810,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp7.827.262.710,00 dan Ditjen Bina Keuda sebesar Rp1.591.100,00 yang seluruhnya berasal dari Belanja Modal;
- d) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp8.312.660.000,00 terdiri dari sebesar Rp7.840.660.000,00 yang merupakan Peralatan dan Mesin yang diterima dari Ditjen Bina Pemdes oleh satker Itjen dan sebesar Rp472.000.000,00 yang merupakan Mobil Ambulance yang diterima dari PPSDM Regional Bandung yang diterima oleh satker Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar;
- e) Transaksi penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp1.924.368.420,00 terdiri dari:
  - i. sebesar Rp1.050.600.000,00 yang terdiri dari 20 Unit proyektor dari T.P. senilai Rp110.000.000,00, 75 Unit tempat

- tidur dari IKAPTK Kabupaten Karawang senilai Rp206.250.000,00, 65 Unit tempat tidur dari IKAPTK Kabupaten Musi Rawas senilai Rp178.750.000,00, 65 Unit tempat tidur dari IKAPTK Kota Lubuk Linggau senilai Rp178.750.000,00, dan Komputer, Laptop, *Handy Talky*, *Microphone Wireless*, dari S.M. senilai Rp170.600.000,00, 75 unit tempat tidur dari IKAPTK Kabupaten Bengkalis senilai Rp206.250.000,00 pada IPDN Jatinangor;
- ii. sebesar Rp16.178.420,00 yang terdiri dari 4 buah *Air Conditioning* (AC) pada IPDN Kampus Kalbar; dan
  - iii. sebesar Rp857.590.000,00 yang terdiri dari 1 unit sepeda motor sebesar Rp34.290.000,00, 3 buah laptop sebesar Rp73.800.000,00, dan *Micro Bus* sebesar Rp749.500.000,00;
- f) Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp2.613.058.195,00 terdapat pada Setjen Pusat merupakan transaksi dalam rangka mencatat KDP menjadi Aset Tetap definitif karena secara substansi aset tersebut telah digunakan dalam kegiatan operasional;
- g) Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp8.122.184.303,00 terdiri dari:
- i. Transaksi dalam rangka koreksi kesalahan pencatatan koreksi kesalahan kode barang perolehan TAYL yang terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp7.098.795.000,00, Balai Pemdes Lampung sebesar Rp110.272.000,00, Ditjen Bina Keuda sebesar Rp306.279.900,00;
  - ii. Transaksi dalam rangka koreksi kesalahan pencatatan kuantitas barang perolehan tahun anggaran berjalan yang terdapat pada terdapat pada Ditjen Polpum sebesar Rp246.561.303,00;
  - iii. Transaksi dalam rangka koreksi pencatatan kode barang perolehan tahun anggaran berjalan yang terdapat pada Ditjen Otda sebesar Rp44.405.000,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp64.000.000,00, Ditjen Bina Keuda sebesar Rp243.071.100,00, dan BSKDN sebesar Rp8.800.000,00;
- h) Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp4.292.521.254,00 terdapat pada:
- i. Setjen sebesar Rp5.490.000,00 untuk mencatat Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Persediaan;
  - ii. DKPP sebesar Rp68.682.640,00 untuk mencatat Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Persediaan;
  - iii. IPDN Jatinangor sebesar Rp3.500.309.491,00 untuk mencatat koreksi kesalahan penginputan kode dan kuantitas barang;
  - iv. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp186.414.820,00 untuk

mencatat kapitalisasi Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

- v. IPDN Kampus Sulawesi Selatan sebesar Rp41.051.000,00 untuk mencatat kapitalisasi Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; dan
- vi. Ditjen Polpum sebesar Rp246.561.303,00 untuk mengoreksi kesalahan penginputan kuantitas barang pada saat pendetailan;
- vii. Ditjen Bina Adwil sebesar Rp161.949.000,00 terdiri dari sebesar Rp80.974.500,00 yang merupakan koreksi untuk mencatat Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Persediaan dan sebesar Rp80.974.500,00 merupakan kesalahan penginputan dalam rangka pencatatan koreksi Belanja Persediaan menjadi Peralatan dan Mesin;
- viii. Ditjen Bina Keuda sebesar Rp73.385.000,00 untuk mencatat Peralatan dan Mesin sesuai dengan substansi yang semula tercatat sebagai Aset Tetap Renovasi; dan
- ix. PPSDM Regional Bandung sebesar Rp8.678.000,00 untuk mengoreksi kesalahan penginputan kuantitas dan nilai satuan barang pada saat pendetailan;
- i) Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp1.599.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka mencatat Peralatan dan Mesin menjadi Belanja Persediaan;
- j) Transaksi penambahan dari Likuidasi Masuk sebesar Rp16.386.204.108,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan transaksi transfer masuk Peralatan dan Mesin dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor;
- k) Transaksi penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai bertambah sebesar Rp5.414.266,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp3.489.266,00 yang merupakan koreksi kesalahan penginputan pengurangan nilai aset dalam rangka pengembalian Belanja Modal TAYL dan terdapat pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp1.925.000,00 yang merupakan koreksi kesalahan penginputan perolehan awal yang semula tercatat sebagai Ekstrakomptabel seharusnya tercatat sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin berupa meja karena secara substansi barang tersebut berupa bagian tidak terpisahkan dari meja tersebut;
- l) Transaksi penambahan dari Koreksi Susulan sebesar Rp3.867.250.000,00 yang merupakan koreksi kesalahan pencatatan kuantitas barang yang semula tercatat sebagai NUP baru pada saat perolehan awal seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai Peralatan dan Mesin yang telah tercatat sebelumnya;

- m) Transaksi penambahan dari Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp15.483.040,00 terdapat pada Balai Pemdes Lampung;
- n) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp184.930.525,00 terdapat pada DKPP sebesar Rp6.505.714,00 yang merupakan koreksi nilai aset dalam rangka pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Berjalan yang menghasilkan aset, IPDN Jatinangor sebesar Rp122.064.604,00 terdiri dari sebesar Rp118.578.337,00 berupa koreksi nilai aset dalam rangka pengembalian Belanja Modal TAYL dan sebesar Rp3.486.267,00 berupa koreksi kesalahan penginputan pengurangan nilai aset dalam rangka penerimaan kembali Belanja Modal TAYL, Ditjen Polpum sebesar Rp47.682.207,00 yang merupakan koreksi nilai aset dalam rangka pengembalian Belanja Modal TAYL dan PPSDM Regional Bandung sebesar Rp8.678.000,00 yang merupakan koreksi kesalahan penginputan kuantitas dan nilai satuan barang pada saat pendetailan;
- o) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp8.312.660.000,00 terdiri dari sebesar Rp7.840.660.000,00 yang merupakan Peralatan dan Mesin yang diterima oleh Itjen dari Ditjen Bina Pemdes dan sebesar Rp472.000.000,00 yang merupakan Mobil Ambulance yang diterima oleh satker Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar dari PPSDM Regional Bandung;
- p) Transaksi pengurangan dari Hibah Keluar sebesar Rp10.165.000,00 berupa P.C. Unit pada Ditjen Bina Pemdes merupakan penyelesaian saldo satker inaktif;
- q) Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.656.373.498,00 terdiri dari:
  - i. Transaksi dalam rangka koreksi kesalahan pencatatan koreksi kesalahan kode barang perolehan TAYL yang terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp2.632.858.195,00, Balai Pemdes Lampung sebesar Rp110.398.000,00 dan Ditjen Bina Keuda sebesar Rp306.279.900,00;
  - ii. Transaksi dalam rangka koreksi kesalahan pencatatan kuantitas barang perolehan tahun anggaran berjalan yang terdapat pada terdapat pada Ditjen Polpum sebesar Rp246.561.303,00;
  - iii. Transaksi dalam rangka koreksi pencatatan kode barang perolehan tahun anggaran berjalan yang terdapat pada Ditjen Otda sebesar Rp44.405.000,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp64.000.000,00, Ditjen Bina Keuda sebesar Rp243.071.100,00 dan BSKDN sebesar Rp8.800.000,00;

- r) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp12.014.752.501,00 terdapat pada:
- i. Setjen Pusat sebesar Rp584.140.962,00 yang merupakan koreksi kesalahan pencatatan kuantitas barang berupa CCTV perolehan TAYL yang semula dicatat sebanyak 99 Unit seharusnya dicatat sebanyak 7 Unit;
  - ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp6.495.000.000,00 yang merupakan koreksi pencatatan kode barang dan kuantitas barang untuk kemudian disajikan sesuai dengan substansinya;
  - iii. DKPP sebesar Rp1.599.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka mencatat Peralatan dan Mesin menjadi Belanja Persediaan;
  - iv. Ditjen Polpum sebesar Rp246.561.303,00 untuk mengoreksi kesalahan penginputan kuantitas barang pada saat pendetailan;
  - v. Ditjen Bina Adwil sebesar Rp80.974.500,00 atas koreksi kesalahan penginputan dalam rangka mencatat Belanja Persediaan menjadi Peralatan dan Mesin;
  - vi. Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp3.867.250.000,00 yang merupakan koreksi kesalahan pencatatan kuantitas barang yang semula tercatat sebagai NUP baru pada saat perolehan awal seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai Peralatan dan Mesin yang telah tercatat sebelumnya;
  - vii. Ditjen Dukcapil sebesar Rp739.226.736,00 terdiri dari sebesar yang merupakan Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin dalam rangka tindak lanjut *void* BAST;
- s) Transaksi pengurangan dari Likuidasi Keluar sebesar Rp16.386.204.108,00 terdapat pada IPDN Kampus Jakarta yang merupakan transaksi transfer keluar Peralatan dan Mesin dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor;
- t) Transaksi Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra sebesar Rp3.150.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka Pengembalian Belanja Modal TAYL yang semula dicatat sebagai Peralatan dan Mesin, namun setelah dilakukan Koreksi Nilai Berkurang, nilai Peralatan dan Mesin tersebut menjadi di bawah batas minimum kapitalisasi sehingga tercatat sebagai ekstrakomptabel;
- u) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp58.715.264.860,00 terdapat pada:
- i. Setjen Pusat sebesar Rp8.251.696.157,00;
  - ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp7.944.475.145,00;

- iii. IPDN Kampus Sulut sebesar Rp673.000.000,00;
- iv. IPDN Kampus NTB sebesar Rp1.645.202.351,00;
- v. Itjen sebesar Rp1.060.943.508,00;
- vi. Ditjen Polpum sebesar Rp1.505.607.404,00;
- vii. Ditjen Bina Adwil sebesar Rp19.066.500,00;
- viii. Balai Pemdes Lampung sebesar Rp122.187.000,00;
- ix. Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp370.387.400,00;
- x. Direktorat Jenderal Bina Pemdes sebesar Rp1.323.738.800,00;
- xi. Ditjen Bina Bangda sebesar Rp44.850.000,00;
- xii. Ditjen Otda sebesar Rp30.904.765.496,00;
- xiii. Ditjen Dukcapil sebesar Rp1.706.706.083,00;
- xiv. Ditjen Bina Keuda sebesar Rp76.104.120,00;
- xv. BSKDN sebesar Rp649.930.849,00;
- xvi. PPSDM Bukittinggi sebesar Rp1.291.862.547,00; dan
- xvii. BPSDM sebesar Rp1.124.741.500,00.

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.725.276.860.298,00 tersebut diantaranya terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp31.412.042.896,00. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri mengungkap adanya peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu atas LHP LK Tahun 2022 pada tiga satker sebesar Rp2.525.519.691,00 dan Tahun 2023 pada 12 satker sebesar Rp28.886.523.205,00.

*Gedung dan Bangunan  
Rp2.922.592.918.649,00*

### C.13 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.922.592.918.649,00 dan Rp2.904.113.214.212,00. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 58.

**Tabel 58**

#### Rincian Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I

No	Eselon I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	2.084.074.148.806	2.072.850.840.900	11.223.307.906
2	Itjen	45.925.502.780	45.459.818.486	465.684.294
3	Ditjen Bina Adwil	1.576.390.000	1.576.390.000	-
4	Ditjen Bina Pemdes	188.820.033.099	186.337.863.344	2.482.169.755
5	Ditjen Bina Bangda	103.940.869.452	103.281.574.926	659.294.526
6	Ditjen Dukcapil	36.357.571.783	36.357.571.783	-
7	BSKDN	32.772.037.871	32.481.509.071	290.528.800
8	BPSDM	429.126.364.858	425.767.645.702	3.358.719.156
<b>Jumlah</b>		<b>2.922.592.918.649</b>	<b>2.904.113.214.212</b>	<b>18.479.704.437</b>

Rincian Gedung dan Bangunan per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XVIII**.

**Tabel 59**  
**Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>2.904.113.214.212</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>118.663.440.056</b>
Pembelian	1.363.434.810
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	13.677.327.595
Transfer Masuk	7.246.819.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	55.000.000
Reklasifikasi Masuk	1.156.239.000
Likuidasi Masuk	89.384.087.872
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	2.842.473.590
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	29.746.446
Pengembangan Melalui KDP	1.915.849.743
Koreksi Manual	397.421.000
Koreksi Susulan	595.041.000
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(100.183.735.619)</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(768.418.937)
Koreksi Manual	(397.421.000)
Transfer Keluar	(7.246.819.000)
Reklasifikasi Keluar	(2.023.223.000)
Koreksi Pencatatan	(55.000.000)
Likuidasi Keluar	(89.384.087.872)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(308.765.810)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>2.922.592.918.649</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(565.839.009.912)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>2.356.753.908.737</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp1.363.434.810,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp187.685.000,00 yang berasal dari realisasi Belanja Modal, pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu sebesar Rp308.765.810,00 yang berasal dari realisasi Belanja Barang yang merupakan kesalahan penginputan pada saat pendetailan dan seharusnya merupakan perolehan Persediaan, pada Ditjen Bina Bangda sebesar Rp866.984.000,00 yang berasal dari realisasi Belanja Modal yang merupakan kesalahan penginputan pada saat pendetailan dan seharusnya dicatat sebagai pengembangan nilai Jalan dan Jembatan;

- b) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai sebesar Rp13.677.327.595,00 terdapat pada Setjen sebesar Rp5.078.727.951,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp3.760.548.000,00, Itjen sebesar Rp465.684.294,00, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu sebesar Rp417.931.620,00 Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp2.482.169.755,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp478.124.500,00, BSKDN sebesar Rp294.470.475,00, BPSDM sebesar Rp699.671.000,00.

Transaksi Pengembangan Nilai terdiri dari sebesar Rp13.259.395.975,00 yang berasal dari Belanja Modal dan sebesar Rp417.931.620,00 yang berasal dari Belanja Barang. Transaksi Pengembangan Nilai yang berasal dari Belanja Barang tersebut selanjutnya dilakukan *void* BAST karena merupakan kesalahan penginputan pada Modul Komitmen yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan sehingga seluruh transaksi Pengembangan Nilai Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Modal yaitu sebesar Rp13.259.395.975,00.

- c) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp7.246.819.000,00 terdapat pada Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar atas Pagar Permanen yang diterima dari BPSDM;
- d) Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp55.000.000,00 terdapat pada Satker PPSDM Makassar atas koreksi dalam rangka penggabungan beberapa KDP menjadi satu KDP dalam rangka reklasifikasi KDP ke Aset Tetap definitif sebagai pengembangan nilai Gedung dan Bangunan;
- e) Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.156.239.000,00 terdapat pada IPDN Kampus Papua dan Balai Pemdes Yogyakarta yang merupakan koreksi kode barang perolehan TAYL;
- f) Transaksi penambahan dari Likuidasi Masuk sebesar Rp89.384.087.872,00 pada IPDN Jatinangor yang merupakan transaksi transfer masuk Gedung dan Bangunan dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor;
- g) Transaksi penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp2.842.473.590,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp1.938.822.874,00 yang merupakan koreksi dalam rangka pencatatan penerimaan ATR dari Kementerian PUPR, sebesar Rp443.199.996,00 merupakan koreksi dalam rangka kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdapat pada IPDN Kampus Sulsel sebesar Rp383.088.496,00 dan IPDN Kampus NTB sebesar Rp60.111.500,00, Ditjen Bina Bangda sebesar Rp262.485.720,00 yang merupakan koreksi

dalam rangka kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, serta PPSDM Regional Yogyakarta sebesar Rp197.965.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan menjadi Gedung dan Bangunan;

- h) Transaksi penambahan dari Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp29.746.446,00 terdapat pada Setjen Pusat atas pekerjaan penambahan nilai Gedung dan Bangunan Setjen Pusat yang digunakan oleh Ditjen Otda;
- i) Transaksi penambahan dari Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp1.915.849.743,00 terdapat pada BPSDM Pusat sebesar Rp1.124.947.483,00 yang merupakan penyelesaian pekerjaan pengembangan nilai Gedung dan Bangunan yang dibagi ke dalam beberapa kontrak dan terdapat pada PPSDM Makassar sebesar Rp790.902.260,00 yang merupakan reklasifikasi KDP ke Aset Tetap definitif atas pekerjaan renovasi gedung;
- j) Transaksi penambahan dari Koreksi Manual sebesar Rp397.421.000,00 merupakan kesalahan penginputan koreksi dalam rangka mencatat penambahan nilai atas Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 karena belanja tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap pada PPSDM Bukittinggi;
- k) Transaksi penambahan dari Koreksi Susulan sebesar Rp595.041.000,00 terdapat pada PPSDM Bandung sebesar Rp197.620.000,00 yang merupakan koreksi kesalahan penginputan kode barang pada saat pendetailan dan pada PPSDM Bukittinggi sebesar Rp397.421.000,00 yang merupakan koreksi Nilai Aset Tetap dalam rangka mencatat penambahan Nilai atas Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 karena belanja tersebut seharusnya memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap;
- l) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp768.418.937,00 terdapat pada:
  - i. Setjen Pusat sebesar Rp67.940.398,00 berupa koreksi nilai Gedung dan Bangunan atas pengembalian Belanja Modal TAYL;
  - ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp85.239.541,00 yang merupakan koreksi nilai Gedung dan Bangunan atas Pengembalian Belanja Modal TAYL;
  - iii. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp20.800.667,00 yang merupakan koreksi nilai Gedung dan Bangunan atas Pengembalian Belanja Modal TAYL;
  - iv. IPDN Kampus Sumatera Barat sebesar Rp41.441.755,00 yang merupakan koreksi nilai Gedung dan Bangunan atas Pengembalian Belanja Modal TAYL;

- v. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu sebesar Rp417.931.620,00 yang merupakan koreksi dalam rangka koreksi *void* BAST atas kesalahan penginputan kode barang pada saat pendetailan;
  - vi. Ditjen Bina Bangda sebesar Rp1.815.694,00 yang merupakan koreksi nilai Gedung dan Bangunan atas Pengembalian Belanja Modal TAYL;
  - vii. BSKDN sebesar Rp3.941.675,00 yang merupakan koreksi nilai Gedung dan Bangunan atas Pengembalian Belanja Modal TAYL; dan
  - viii. Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp129.307.587,00 yang merupakan koreksi nilai Gedung dan Bangunan atas Pengembalian Belanja Modal TAYL;
- m) Transaksi Koreksi Manual sebesar Rp397.421.000,00 terdapat pada PPSDM Bukittinggi yang merupakan kesalahan penginputan koreksi dalam rangka mencatat penambahan nilai atas Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 karena belanja tersebut seharusnya memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap;
  - n) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp7.246.819.000,00 terdapat BPSDM atas transfer Pagar Permanen ke Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar;
  - o) Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.023.223.000,00 terdapat pada IPDN Kampus Papua sebesar Rp994.000.000,00 yang merupakan koreksi kode barang perolehan TAYL, terdapat pada Ditjen Bina Bangda yang merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan Pembelian Gedung dan Bangunan yang seharusnya dicatat sebagai Pengembangan Nilai Jalan dan Jembatan sebesar Rp866.984.000,00, terdapat pada Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp162.239.000,00 yang merupakan reklasifikasi kodefikasi rumah negara perolehan TAYL sesuai dengan fungsinya;
  - p) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp55.000.000,00 terdapat pada PPSDM Makassar yang merupakan koreksi dalam rangka penggabungan beberapa KDP menjadi satu KDP dalam rangka reklasifikasi ke Aset Tetap definitif sebagai pengembangan nilai Gedung dan Bangunan;
  - q) Transaksi pengurangan dari Likuidasi Keluar sebesar Rp89.384.087.872,00 pada IPDN Kampus Jakarta yang merupakan transaksi transfer keluar Gedung dan Bangunan dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor; dan

- r) Transaksi Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp308.765.810,00 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu yang merupakan koreksi kesalahan penginputan kode barang pada saat pendetailan Gedung dan Bangunan yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan;

*Jalan, Irigasi dan Jaringan*

*Rp299.793.586.980,00*

### C.14 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp299.793.586.980,00 dan Rp293.820.847.621,00.

Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 60.

**Tabel 60**

**Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I**

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Setjen	247.236.106.832	241.919.632.153	5.316.474.679
2	Ditjen Bina Adwil	11.245.442.670	11.245.442.670	-
3	Ditjen Pemdes	3.058.859.874	3.058.859.874	-
4	Ditjen Bina Bangsa	4.437.609.690	3.707.596.890	730.012.800
5	Ditjen Otda	-	489.387.520	(489.387.520)
6	Ditjen Dukcapil	2.863.933.000	2.863.933.000	-
7	BSKDN	505.733.100	505.733.100	-
8	BPSDM	30.445.901.814	30.030.262.414	415.639.400
<b>Jumlah</b>		<b>299.793.586.980</b>	<b>293.820.847.621</b>	<b>5.972.739.359</b>

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XIX**.

**Tabel 61**

**Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>293.820.847.621</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>14.034.315.494</b>
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	769.825.000
Reklasifikasi masuk	3.480.042.195
Perolehan Lainnya	1.766.611.484
Likuidasi Masuk	4.891.357.792
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.372.128.200
Koreksi Manual	172.840.000
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	1.581.510.823
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(8.061.576.135)</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(232.336.000)
Koreksi Pencatatan	(866.984.000)
Likuidasi Keluar	(4.891.357.792)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(2.070.898.343)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>299.793.586.980</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(162.008.001.372)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>137.785.585.608</b>

Penjelasan transaksi mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp769.825.000,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal yang berasal dari Belanja Modal;
- b) Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.480.042.195,00 yang terdiri dari sebesar Rp866.984.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Bangda yang merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan Pembelian Gedung dan Bangunan yang seharusnya dicatat sebagai Pengembangan Nilai Jalan dan Jembatan dan sebesar Rp2.613.058.195,00 yang merupakan reklasifikasi Panel yang diperoleh dari Reklas KDP perolehan TAYL ke Aset Tetap definitif karena substansi barang seharusnya merupakan Jaringan;
- c) Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp1.766.611.484,00 terdapat pada IPDN Jatinangor merupakan koreksi dalam rangka mencatat Jaringan yang semula tercatat sebagai Peralatan dan Mesin;
- d) Transaksi penambahan dari Likuidasi Masuk sebesar Rp4.891.357.792,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang merupakan transaksi transfer masuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor;
- e) Transaksi penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp1.372.128.200,00 terdapat pada:
  - i. IPDN Kampus Sulsel sebesar Rp148.000.000,00 dan IPDN Kampus NTB sebesar Rp29.970.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka kapitalisasi Belanja Barang yang menjadi Aset Tetap;
  - ii. Ditjen Bina Bangda sebesar Rp927.012.800,00 terdiri dari sebesar Rp866.984.000,00 yang merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan Pembelian Gedung dan Bangunan yang seharusnya dicatat sebagai Pengembangan Nilai Jalan dan Jembatan. Koreksi pada Ditjen Bina Bangda tersebut dilakukan dengan melakukan reklasifikasi kode barang sehingga menghasilkan NUP baru untuk Jalan dan Jembatan. Selanjutnya dilakukan Koreksi Pencatatan atas Jalan dan Jembatan dengan NUP baru tersebut dan dilakukan penambahan nilai Jalan dan Jembatan dengan NUP yang seharusnya. Selanjutnya terdapat transaksi sebesar Rp60.028.800,00 yang merupakan koreksi dalam rangka kapitalisasi Belanja Barang yang menjadi Aset Tetap;
  - iii. PPSDM Regional Yogyakarta sebesar Rp192.454.400,00 yang merupakan koreksi untuk mencatat Jalan dan Jembatan

yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

iv. PPSDM Regional Makassar sebesar Rp74.691.000,00 yang merupakan koreksi dalam rangka kapitalisasi Belanja Barang yang menjadi Aset Tetap;

- f) Transaksi penambahan dari Koreksi Manual sebesar Rp172.840.000,00 pada PPSDM Bukittinggi yang merupakan koreksi nilai Aset Tetap dalam rangka mencatat penambahan nilai atas Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 karena belanja tersebut seharusnya memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap;
- g) Transaksi penambahan dari Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif sebesar Rp1.581.510.823,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar;
- h) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp232.336.000,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Kalimantan Barat sebesar Rp10.990.000,00 yang merupakan transaksi koreksi dalam rangka Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL, pada Ditjen Bina Bangda sebesar Rp197.000.000,00 untuk mengoreksi pengembangan nilai Jalan dan Jembatan yang tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai Aset Tetap sehingga disajikan sebagai Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan pada Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp24.346.000,00 yang merupakan transaksi koreksi dalam rangka Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL yang menghasilkan Aset;
- i) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp866.984.000,00 merupakan transaksi dalam rangka koreksi kesalahan penginputan Pembelian Gedung dan Bangunan yang seharusnya dicatat sebagai Pengembangan Nilai Jalan dan Jembatan pada Ditjen Bina Bangda. Koreksi Pencatatan diperlukan karena kesalahan penginputan transaksi berasal dari transaksi pembelian yang membentuk NUP baru. Selanjutnya dilakukan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah atas Jalan dan Jembatan dengan NUP yang seharusnya;
- j) Transaksi pengurangan dari Likuidasi Keluar sebesar Rp4.891.357.792,00 terdapat pada IPDN Kampus Jakarta yang merupakan transaksi transfer masuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor; dan
- k) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp2.070.898.343,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp1.581.510.823,00 dan Ditjen Otda sebesar Rp489.387.520,00.

Aset Tetap Lainnya  
Rp95.015.581.772,00

### C.15 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp95.015.581.772,00 dan Rp160.744.484.125,00 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 62.

**Tabel 62**  
**Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I**

No	Eselon I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	31.037.584.948	29.583.491.957	1.454.092.991
2	Ditjen Polpum	642.024.528	-	642.024.528
3	Ditjen Bina Adwil	17.686.224.808	17.686.224.808	-
4	Ditjen Pemdes	13.580.320.108	13.578.079.108	2.241.000
5	Ditjen Bina Bangda	4.951.568.889	4.951.568.889	-
6	Ditjen Otda	14.521.363.182	84.583.688.119	(70.062.324.937)
7	Ditjen Dukcapil	7.196.688.361	5.584.047.737	1.612.640.624
8	Ditjen Keuda	1.913.718.758	1.291.295.317	622.423.441
9	BSKDN	519.862.436	519.862.436	-
10	BPSDM	2.966.225.754	2.966.225.754	-
<b>Jumlah</b>		<b>95.015.581.772</b>	<b>160.744.484.125</b>	<b>(65.728.902.353)</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XX**.

**Tabel 63**  
**Mutasi Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>160.744.484.125</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>9.995.429.727</b>
Pembelian	2.709.605.179
Transfer Masuk	1.938.822.874
Perolehan Lainnya	642.024.528
Likuidasi Masuk	1.486.127.146
Hibah Masuk	1.388.850.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.830.000.000
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(75.724.332.080)</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(73.385.000)
Transfer Keluar	(29.746.446)
Koreksi Pencatatan	(1.938.822.874)
Likuidasi Keluar	(1.486.127.146)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(72.196.250.614)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>95.015.581.772</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(22.849.730.650)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>72.165.851.122</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp2.709.605.179,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp130.000.000,00, DKPP sebesar Rp209.078.668,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp30.000.000,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp2.331.000,00, Ditjen Otda sebesar Rp29.746.446,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp1.612.640.624,00, dan Ditjen Bina Keuda sebesar Rp695.808.441,00 yang berasal dari Belanja Modal;
- b) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp1.938.822.874,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang berasal dari Kementerian PUPR berupa paket pekerjaan renovasi lapangan pertandingan dan lapangan latihan dalam rangka Piala Dunia U-20 Tahun 2023 pada Stadion IPDN;
- c) Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp642.024.528,00 terdapat pada Ditjen Polpum yang berasal dari koreksi penambahan Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) dari Belanja Jasa Lainnya yang memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai SAP berupa renovasi yang akan diserahkan ke entitas lain (Setjen) namun tidak dicatat sebagai penambahan aset tetap lainnya berupa yang berasal dari 3 kontrak pekerjaan, yaitu Pemeliharaan Ruang Kerja Direktorat Organisasi Kemasyarakatan senilai Rp157.000.000,00, Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Kerja Direktorat Kewaspadaan Nasional senilai Rp287.000.000,00, Pemeliharaan Ruang Rapat Kecil Gedung F Lantai 6 Senilai Rp198.024.528,00;
- d) Transaksi penambahan dari Likuidasi Masuk sebesar Rp1.486.127.146,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang berasal dari IPDN Kampus Jakarta dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor;
- e) Transaksi penambahan dari Hibah Masuk sebesar Rp1.388.850.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor sebesar Rp1.200.000.000,00 dan IPDN Kampus Sulsel sebesar Rp188.850.000,00;
- f) Transaksi penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp1.830.000.000,00 terdapat pada DKPP atas koreksi untuk mencatat Aset Tetap Renovasi berupa Pekerjaan Penataan Gedung Kantor DKPP RI yang berasal dari Belanja Jasa Lainnya;
- g) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp73.385.000,00 terdapat pada Ditjen Bina Keuda atas koreksi untuk mencatat Aset Peralatan dan Mesin

berupa meja dan AC yang bersumber dari Belanja penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang semula dicatat sebagai ATR;

- h) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp29.746.446,00 terdapat pada Ditjen Otda kepada Setjen Pusat dalam rangka transfer pekerjaan Aset Tetap Renovasi atas Gedung dan Bangunan milik Setjen;
- i) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.938.822.874,00 terdapat pada IPDN Jatinangor dalam rangka pencatatan penerimaan Aset Tetap Renovasi dari Kementerian PUPR;
- j) Transaksi pengurangan dari Likuidasi Keluar sebesar Rp1.486.127.146,00 terdapat pada IPDN Kampus Jakarta dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor; dan
- k) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp72.196.250.614,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp284.063.798,00, IPDN Jatinangor sebesar Rp1.776.369.371,00, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp55.581.858,00, IPDN Kampus NTB sebesar Rp17.820.650,00, Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp90.000,00, dan Ditjen Otda sebesar Rp70.062.324.937,00.

*Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp25.366.869.749,00*

### C.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp25.366.869.749,00 dan Rp29.571.282.509,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per unit Eselon I tersaji pada Tabel 64.

**Tabel 64**

#### Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I

NO	Eselon I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	24.948.370.899	27.631.034.399	(2.682.663.500)
2	Ditjen Bina Pemdes	24.997.200	24.997.200	-
3	Badan PSDM	393.501.650	1.915.250.910	(1.521.749.260)
	<b>Jumlah</b>	<b>25.366.869.749</b>	<b>29.571.282.509</b>	<b>(4.204.412.760)</b>

Rincian Mutasi KDP per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXI**.

Rincian KDP per Satker disajikan pada **Lampiran XXII**.

**Tabel 65**  
**Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

ESELON I	SATKER	URAIAN	NILAI (Rp)
Setjen	IPDN Kalbar (683070)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	24.948.370.899
<b>Jumlah Setjen</b>			<b>24.948.370.899</b>
Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Pemdes (027753)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	24.997.200
<b>Jumlah Ditjen Bina Pemdes</b>			<b>24.997.200</b>
BPSDM	BPSDM (403231)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	318.987.650
	PPSDM Regional Bandung (403216)	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	74.514.000
<b>Jumlah BPSDM</b>			<b>393.501.650</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>25.366.869.749</b>

KDP senilai Rp25.366.869.749,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp24.948.370.899,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp24.997.200,00, dan BPSDM sebesar Rp318.987.650,00 yang belum memperoleh alokasi anggaran untuk dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan dan dihentikan sementara waktu sehingga sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan seluruh saldo KDP tersebut dicatat sebagai KDP yang Dihentikan dari Operasi dan disajikan pada pos Aset Lain-lain. Reklasifikasi ke Aset Lainnya belum dapat diproses melalui Aplikasi SAKTI sehingga masih disajikan pada pos KDP.

**Tabel 66**  
**Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>29.571.282.509</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>6.840.653.623</b>
Perolehan Penambahan KDP	4.249.071.458
Koreksi Nilai KDP Bertambah	1.711.707.165
Perolehan Lainnya KDP	74.514.000
Reklasifikasi Masuk KDP	805.361.000
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(11.045.066.383)</b>
Penyelesaian Pembangunan KDP	(2.668.058.195)
Pengembangan Melalui KDP	(2.721.210.743)
Reklasifikasi Keluar KDP	(805.361.000)
Koreksi Pencatatan KDP	(4.780.831.140)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(69.605.305)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>25.366.869.749</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan KDP sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Perolehan penambahan KDP sebesar Rp4.249.071.458,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp2.926.503.975,00, BPSDM sebesar Rp1.124.947.483,00, dan PPSDM Regional Bandung sebesar Rp197.620.000,00;
- b) Transaksi penambahan dari Koreksi Nilai KDP Bertambah sebesar Rp1.711.707.165,00 terdapat pada BPSDM sebesar Rp1.111.627.483,00 dalam rangka penggabungan beberapa KDP menjadi satu KDP dan PPSDM Regional Makassar sebesar Rp600.079.682,00 dalam rangka penggabungan beberapa KDP menjadi satu KDP dalam rangka reklasifikasi ke aset definitif sebagai pengembangan nilai Gedung dan Bangunan;
- c) Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya KDP sebesar Rp74.514.000,00 terdapat pada PPSDM Regional Bandung atas koreksi kurang catat gedung dan bangunan yaitu perencanaan renovasi sarana penunjang pelatihan PPSDM Regional Bandung karena Pengeluaran Belanja Jasa Konsultan yang memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai SAP namun tidak dicatat sebagai penambahan aset tetap berdasar SPK 000.4.2/1502/SPK/PL.03/PPSDM tanggal 29 November 2024 dengan nilai pekerjaan Rp74.514.000,00;
- d) Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk KDP sebesar Rp805.361.000,00 terdapat pada PPSDM Regional Makassar atas pekerjaan yang menambah nilai tanah;
- e) Transaksi pengurangan dari Penyelesaian Pembangunan KDP sebesar Rp2.668.058.195,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp2.613.058.195,00 dan PPSDM Regional Makassar sebesar Rp55.000.000,00;
- f) Transaksi pengurangan dari Pengembangan KDP sebesar Rp2.721.210.743,00 terdapat pada BPSDM sebesar Rp1.124.947.483,00 dan PPSDM Regional Makassar sebesar Rp1.596.263.260,00;
- g) Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar KDP sebesar Rp805.361.000,00 terdapat pada PPSDM Regional Makassar;
- h) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan KDP sebesar Rp4.780.831.140,00 terdapat pada:
  - i. Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp2.926.503.975,00 atas kesalahan penginputan kode barang pada saat pendetilan;
  - ii. BPSDM sebesar Rp1.111.627.483,00 atas penggabungan beberapa KDP menjadi satu KDP;
  - iii. PPSDM Regional Makassar sebesar Rp545.079.682,00 atas penggabungan beberapa KDP menjadi satu KDP dalam

rangka reklasifikasi ke aset definitif sebagai pengembangan nilai Gedung dan Bangunan;

- iv. PPSDM Regional Bandung sebesar Rp197.620.000,00 kesalahan penginputan kode barang pada saat pendetilan; dan
- i) Transaksi pengurangan dari Koreksi Nilai KDP Berkurang sebesar Rp69.605.305,00 dalam rangka Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL pada IPDN Kampus Kalbar.

*Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp4.211.432.344.941,00*

### C.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.211.432.344.941,00 dan Rp4.002.301.576.867,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Satker disajikan pada **Lampiran XIV**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 67.

**Tabel 67**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Peralatan dan Mesin	4.156.760.195.772	(3.460.735.603.007)	696.024.592.765
2	Gedung dan Bangunan	2.922.592.918.649	(565.839.009.912)	2.356.753.908.737
3	Jalan dan Jembatan	79.358.601.816	(58.539.429.759)	20.819.172.057
4	Irigasi	48.122.758.537	(31.555.216.171)	16.567.542.366
5	Jaringan	172.312.226.627	(71.913.355.442)	100.398.871.185
6	Aset Tetap Lainnya	95.015.581.772	(22.849.730.650)	72.165.851.122
<b>Jumlah</b>		<b>7.474.162.283.173</b>	<b>(4.211.432.344.941)</b>	<b>3.262.729.938.232</b>

*Piutang Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi  
(TP/TGR)  
Rp17.950.315.934,00*

### C.18 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp17.950.315.934,00 dan Rp17.850.089.235,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang

mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 68.

**Tabel 68**  
**Rincian Piutang TP/TGR per Eselon I**

No	Eselon I	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	100.226.699	-	100.226.699
2	Ditjen Polpum	17.850.089.235	17.850.089.235	-
<b>Jumlah</b>		<b>17.950.315.934</b>	<b>17.850.089.235</b>	<b>100.226.699</b>

Mutasi tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 69.

**Tabel 69**  
**Mutasi Tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2024**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>17.850.089.235</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>515.866.795</b>
Reklasifikasi awal tahun dari Bagian Lancar Piutang TGR pada Setjen (IPDN Jatinangor)	78.000.000
Pengakuan Piutang TGR pada IPDN Kampus Sulut	429.966.795
Pengakuan Piutang TGR pada Ditjen Polpum	7.900.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(415.640.096)</b>
Pembayaran Tagihan Piutang TGR pada Setjen (IPDN Jatinangor)	(78.000.000)
Pembayaran Tagihan Piutang TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulut)	(29.060.000)
Reklasifikasi Keluar dari Piutang TGR pada Setjen (IPDN Kampus Sulut) atas Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun	(300.680.096)
Pembayaran Tagihan Piutang TGR pada Ditjen Polpum	(7.900.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>17.950.315.934</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan pada Setjen sebesar Rp78.000.000,00 berasal dari reklasifikasi masuk dari Bagian Lancar Piutang TP/TGR melalui jurnal balik awal tahun atas pengakuan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Tahun 2023 pada IPDN Jatinangor;
- b) Transaksi penambahan pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp429.966.795,00 berasal dari pengakuan Piutang TP/TGR berdasarkan SKTJM Nomor 900/408/IPDN.23/2024 tanggal Mei 2024 sebesar Rp408.906.795,00 dan SKTJM Nomor 900/425/IPDN.23/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp21.060.000,00 yang merupakan kerugian negara berdasarkan

hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2023;

- c) Transaksi penambahan pada Ditjen Polpum sebesar Rp7.900.000,00 berasal dari pengakuan Piutang TP/TGR berdasarkan SKTJM Nomor 700.1.2.1/3659/POLPUM tanggal 4 November 2024 atas kehilangan kendaraan dinas;
- d) Transaksi pengurangan pada IPDN Jatinangor sebesar Rp78.000.000,00 terdiri dari pembayaran Piutang TGR yang diakui pada Tahun Anggaran Berjalan atas kehilangan kendaraan dinas;
- e) Transaksi pengurangan pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp29.060.000,00 terdiri dari pembayaran Piutang TGR yang diakui pada tahun anggaran berjalan atas temuan pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2023;
- f) Transaksi pengurangan pada IPDN Kampus Sulut sebesar Rp300.680.960,00 berasal dari reklasifikasi keluar dari Piutang TP/TGR yang kemungkinan dapat diterima/diharapkan untuk diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang merupakan TGR atas kerugian negara berdasarkan hasil temuan BPK RI pada Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2023; dan
- g) Transaksi pengurangan pada Ditjen Polpum sebesar Rp7.900.000,00 terdiri dari pelunasan Piutang TGR yang diakui pada Tahun Anggaran Berjalan atas kehilangan kendaraan dinas.

Terdapat Piutang berupa Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Itjen sebesar Rp492.890.339,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan April 2017 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Sekretaris Jenderal yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan dan Aset Nomor 956/181/SJ tanggal 10 Januari 2019 hal penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-01/PUPNC.10.03/2019 tanggal 11 Januari 2019 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III. Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor PSBDT-71/PUPNC.10.03/2021 tanggal 11 November 2021 hal Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, maka kepengurusan piutang tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih. Kemendagri telah mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan piutang negara bersyarat melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 953/6675/SJ tanggal 30 November 2021 hal Permohonan Rekomendasi

Penghapusan Piutang Negara Bersyarat yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Utama Binbangkum PKN BPK RI. Berdasarkan Surat Wakil Ketua BPK RI Nomor 46/S/II/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara atas Nama Sdri. EI, dinyatakan bahwa BPK RI telah menyetujui permohonan rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI. Menteri Keuangan telah menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KM.6/2023 tanggal 11 September 2023. Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sdri. EI. dengan menghapuskan piutang negara tersebut dari pembukuan Inspektorat Jenderal.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Ditjen Polpum sebesar Rp17.850.089.235,00 yang tidak dapat ditagihkan sejak bulan Januari 2012 telah diserahkan kepengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tanggal 16 September 2020 hal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan Surat Ketua Panitia yang ditandatangani Anggota PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-21/PUPNC.10.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III.

*Penyisihan Piutang  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi  
(TP/TGR)  
Rp17.850.590.368,00*

### **C.19 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp17.850.590.368,00 dan Rp17.850.089.235,00. Penyisihan piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

**Tabel 70**

**Rincian Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I**

No	Komponen	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)
1	Setjen	Lancar	2	100.226.699	501.133
2	Ditjen Polpum	Macet	1	17.850.089.235	17.850.089.235
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>17.950.315.934</b>	<b>17.850.590.368</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp830.510.381.843,00

## C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp830.510.381.843,00 dan Rp744.115.321.306,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 71

### Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai per 31 Desember 2024 (Rp)	Nilai per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Software	756.371.780.413	718.062.251.105	38.309.529.308
2	Lisensi	69.533.433.080	18.323.236.001	51.210.197.079
3	Hasil Kajian/Penelitian	2.271.764.600	2.271.764.600	-
4	ATB Lainnya	2.333.403.750	5.458.069.600	(3.124.665.850)
<b>Total Nilai Perolehan</b>		<b>830.510.381.843</b>	<b>744.115.321.306</b>	<b>86.395.060.537</b>
Nilai Amortisasi ATB		(700.427.422.558)	(667.442.299.426)	(32.985.123.132)
<b>Total Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>		<b>130.082.959.285</b>	<b>76.673.021.880</b>	<b>53.409.937.405</b>

Rincian Aset Tak Berwujud menurut Eselon I per 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 72.

Tabel 72

### Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

No	ESELON I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	73.437.842.168	37.288.415.171	36.149.426.997
2	Itjen	1.289.389.320	789.614.320	499.775.000
3	Ditjen Polpum	8.313.499.230	139.050.000	8.174.449.230
4	Ditjen Bina Adwil	1.034.120.800	1.034.120.800	-
5	Ditjen Bina Pemdes	17.583.975.880	7.828.962.630	9.755.013.250
6	Ditjen Bina Bangda	708.280.140	16.636.280.140	(15.928.000.000)
7	Ditjen Otda	2.487.407.950	4.401.946.950	(1.914.539.000)
8	Ditjen Dukcapil	684.831.981.546	633.582.122.436	51.249.859.110
9	Ditjen Bina Keuda	35.482.587.935	35.522.380.435	(39.792.500)
10	BSKDN	3.600.424.431	6.601.555.981	(3.001.131.550)
11	Badan PSDM	1.740.872.443	290.872.443	1.450.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>830.510.381.843</b>	<b>744.115.321.306</b>	<b>86.395.060.537</b>

Kenaikan signifikan pada Setjen sebesar Rp36.149.426.997,00 diantaranya merupakan perolehan ATB melalui transaksi pembelian *software* sebesar Rp11.062.022.750,00 dan lisensi sebesar Rp31.583.939.422,00, serta pengembangan *software* sebesar Rp8.603.896.938,00 yang sebagian besar diantaranya merupakan pengadaan perangkat pusat data Kemendagri untuk pemenuhan kegiatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Kenaikan signifikan pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp51.249.859.110,00 berasal dari pembelian *software* komputer sebesar Rp11.062.022.750,00 yang sebagian besar diantaranya merupakan perolehan *software* dalam rangka pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital dan Lisensi sebesar Rp31.583.939.422,00 yang sebagian besar diantaranya merupakan perolehan lisensi atas server dan *Backup System*, serta pengembangan nilai *software*

Komputer sebesar Rp8.603.896.938,00 yang sebagian besar diantaranya merupakan pengembangan Aplikasi Koneksitas *Data Warehouse* dan Aplikasi *Gateway/Middleware* untuk sistem pengenalan wajah.

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker disajikan pada **Lampiran XXIII**.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXIV**.

**Tabel 73**  
**Mutasi Aset Tak Berwujud**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>744.115.321.306</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>115.660.556.887</b>
Pembelian	66.037.751.604
Transfer Masuk	8.674.224.230
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	3.409.367.850
Perolehan Lainnya	1.231.545.000
Likuidasi Masuk	29.975.000
Pengembangan Nilai Aset	26.272.194.228
Koreksi Susulan	2.926.503.975
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	7.078.995.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(29.265.496.350)</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(9.861.500)
Transfer Masuk	(499.775.000)
Reklasifikasi Keluar	(7.078.995.000)
Likuidasi Keluar	(29.975.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(21.646.889.850)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>830.510.381.843</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(700.427.422.558)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>130.082.959.285</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Pembelian sebesar Rp66.037.751.604,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp20.466.513.107,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp1.475.276.325,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp42.645.962.172,00, dan BPSDM sebesar Rp1.450.000.000,00 yang berasal dari Belanja Modal;
- b) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp8.674.224.230,00 terdapat pada Itjen sebesar Rp499.775.000,00 berupa *Software* yang berasal dari Ditjen Bina Pemdes dan Ditjen Polpum sebesar Rp8.174.449.230,00 yang berasal dari Kementerian Kominfo atas *Software* Komputer dalam rangka penyerahan aplikasi yang telah dibangun berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama pengembangan aplikasi SPBE yang dilaksanakan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

- c) Transaksi penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp3.409.367.850,00 terdapat pada Setjen Pusat atas *Software* Komputer;
- d) Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp1.231.545.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor atas aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai SAP namun dicatat sebagai peralatan dan mesin sebanyak 2 item aset ekstrakomptabel senilai Rp6.468.525,00 (kode barang 310010199), aset yang substansinya merupakan Jaringan namun dicatat sebagai peralatan dan mesin sebanyak 1 unit jaringan internet senilai Rp1.766.611.484,00 (kode barang 5031001999), dan aset yang substansinya merupakan ATB-software namun dicatat sebagai peralatan dan mesin sebanyak 2 item software senilai Rp1.231.545.000,00 (kode barang 8010101001);
- e) Transaksi penambahan dari Likuidasi Masuk sebesar Rp29.975.000,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang berasal dari IPDN Kampus Jakarta dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor;
- f) Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp26.272.194.228,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp11.537.285.040,00, Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp5.853.007.950,00, Ditjen Otda sebesar Rp149.850.000,00, Ditjen Dukcapil sebesar Rp8.603.896.938,00, dan BSKDN sebesar Rp128.154.300,00 yang berasal dari Belanja Modal;
- g) Transaksi penambahan dari Koreksi Susulan sebesar Rp2.926.503.975,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes kesalahan penginputan kode barang pada saat pendetilan;
- h) Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp9.861.500,00 terdapat pada Setjen Pusat dalam rangka pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Berjalan;
- i) Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp499.775.000,00 berupa transfer *Software* kepada Itjen yang berasal dari Ditjen Bina Pemdes;
- j) Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp7.078.995.000,00 terdapat pada Setjen Pusat atas kesalahan kode barang Aset Tetap perolehan TAYL;
- k) Transaksi pengurangan dari Likuidasi Keluar sebesar Rp29.975.000,00 terdapat pada IPDN Kampus Jakarta dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor; dan
- l) Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp21.646.889.850,00 terdapat pada:

- i. Setjen Pusat sebesar Rp394.762.500,00 atas *Software Komputer*;
- ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp90.660.000,00 atas *Software Komputer*;
- iii. Ditjen Bangda sebesar Rp15.928.000.000,00 atas *Software Komputer*;
- iv. Ditjen Otda sebesar Rp2.064.389.000,00 atas *Software Komputer*;
- v. Ditjen Bina Keuda sebesar Rp39.792.500,00 atas *Software Komputer*;
- vi. BPSDM sebesar Rp4.620.000,00 atas Lisensi dan Rp3.124.665.850,00 atas ATB Lainnya.

*Dana Yang Dibatasi  
Penggunaannya  
Rp384.325.357.961,00*

### **C.21 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp384.325.357.961,00 dan Rp54.982.239.721,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada **Lampiran XXV**.

*Aset Lain-Lain  
Rp182.864.064.500,00*

### **C.22 Aset Lain-Lain**

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp182.864.064.500,00 dan Rp211.955.882.101,00. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kemendagri serta dalam proses penghapusan dari BMN.

**Tabel 74**

**Rincian Aset Lain-Lain Menurut Uraian Akun per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	120.974.236.236
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	61.889.828.264
<b>Total</b>		<b>182.864.064.500</b>

Rincian Aset Lain-Lain menurut Eselon I per 31 Desember 2024

tersaji pada Tabel 75.

**Tabel 75**  
**Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I**

No	ESELON I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	23.278.604.600	37.528.625.868	(14.250.021.268)
2	Itjen	-	7.138.187.300	(7.138.187.300)
3	Ditjen Polpum	-	1.611.327.750	(1.611.327.750)
4	Ditjen Bina Adwil	2.832.484.380	8.217.658.578	(5.385.174.198)
5	Ditjen Pemdes	750.410.747	4.938.080.077	(4.187.669.330)
6	Ditjen Bina Bangda	48.785.882.881	33.883.173.281	14.902.709.600
7	Ditjen Otda	87.992.566.356	39.936.911.063	48.055.655.293
8	Ditjen Dukcapil	2.017.817.909	63.535.874.527	(61.518.056.618)
9	Ditjen Keuda	5.913.636.030	5.797.739.410	115.896.620
10	BSKDN	3.138.663.350	-	3.138.663.350
11	Badan PSDM	8.153.998.247	9.368.304.247	(1.214.306.000)
	<b>Jumlah</b>	<b>182.864.064.500</b>	<b>211.955.882.101</b>	<b>(29.091.817.601)</b>

Rincian Aset Lain-Lain per Satker disajikan pada **Lampiran XXIII**.

Rincian Mutasi Aset Lain-lain per Unit Eselon I terdapat pada **Lampiran XXVI**.

**Tabel 76**  
**Mutasi Aset Lain-Lain**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>211.955.882.101</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>158.998.643.301</b>
Transfer Masuk	2.787.828.811
Penghentian Aset dari Penggunaan	154.629.303.667
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	1.581.510.823
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>(188.090.460.902)</b>
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(8.675.988.863)
Penghapusan	(17.991.400)
Likuidasi Keluar Henti Guna	(2.787.828.811)
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(56.518.937.660)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(120.089.714.168)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>182.864.064.500</b>
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi s.d 31 Desember 2024	(175.300.234.677)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>7.563.829.823</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain sebagai berikut:

- a) Transaksi penambahan dari Transfer Masuk sebesar Rp2.787.828.811,00 terdapat pada IPDN Jatinangor yang berasal dari IPDN Kampus Jakarta;
- b) Transaksi penambahan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp154.629.303.667,00 terdapat pada:

- i. Setjen Pusat sebesar Rp8.930.522.455,00;
  - ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp9.811.504.516,00;
  - iii. IPDN Kampus Sulut sebesar Rp673.000.000,00;
  - iv. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp1.637.092.681,00;
  - v. IPDN Kampus NTB sebesar Rp1.663.023.001,00;
  - vi. Itjen Pusat sebesar Rp1.060.943.508,00;
  - vii. Ditjen Polpum sebesar Rp1.505.607.404,00;
  - viii. Ditjen Bina Adwil sebesar Rp19.066.500,00;
  - ix. Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp1.323.738.800,00;
  - x. Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp370.477.400,00;
  - xi. Balai Pemdes Lampung sebesar Rp122.187.000,00;
  - xii. Ditjen Bina Bangda sebesar Rp15.972.850.000,00;
  - xiii. Ditjen Otda sebesar Rp103.520.866.953,00;
  - xiv. Ditjen Dukcapil sebesar Rp1.706.706.083,00;
  - xv. Ditjen Bina Keuda sebesar Rp115.896.620,00;
  - xvi. BSKDN sebesar Rp3.779.216.699,00;
  - xvii. BPSDM sebesar Rp1.124.741.500,00; dan
  - xviii. PPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp1.291.862.547,00.
- c) Transaksi penambahan dari Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp1.581.510.823,00 terdapat pada IPDN Kampus Kalbar berupa Saluran *Drainage*;
  - d) Transaksi pengurangan dari Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp8.675.988.863,00 terdapat pada Setjen Pusat sebesar Rp7.078.995.000,00, IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp1.581.510.823,00, dan Balai Pemdes Lampung sebesar Rp15.483.040,00 yang akan direklasifikasikan dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap;
  - e) Transaksi pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp17.991.400,00 terdapat pada Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp1.577.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.3.4-1253 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Ditjen Bina Pemdes dan Ditjen Bina Bangda sebesar Rp16.414.400,00 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-5469 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab-Sebab Lain Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua pada Ditjen Bina Bangda;

- f) Transaksi pengurangan dari Likuidasi Keluar Henti Guna sebesar Rp2.787.828.811,00 terdapat pada IPDN Kampus Jakarta dalam rangka penggabungan Satker IPDN Kampus Jakarta menjadi subsatker IPDN Jatinangor;
- g) Transaksi pengurangan dari Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp56.518.937.660,00 terdapat pada Ditjen Bina Bangda sebesar Rp1.053.726.000,00 dan Ditjen Otda sebesar Rp55.465.211.660,00; dan
- h) Transaksi pengurangan dari Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp120.089.714.168,00 terdapat pada:
  - i. Setjen Pusat sebesar Rp13.015.317.580,00;
  - ii. IPDN Jatinangor sebesar Rp12.129.110.800,00;
  - iii. IPDN Kampus Sulut sebesar Rp981.650.000,00;
  - iv. IPDN Kampus Kalbar sebesar Rp2.784.119.081,00;
  - v. IPDN Kampus NTB sebesar Rp975.971.460,00;
  - vi. Itjen Pusat sebesar Rp8.199.130.808,00;
  - vii. Ditjen Polpum sebesar Rp3.116.935.154,00;
  - viii. Ditjen Bina Adwil sebesar Rp5.404.240.698,00;
  - ix. Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp4.830.509.300,00;
  - x. Balai Pemdes Yogyakarta sebesar Rp370.477.400,00;
  - xi. Balai Besar PMD Malang sebesar Rp786.025.790,00;
  - xii. Ditjen Dukcapil sebesar Rp63.224.762.701,00;
  - xiii. BSKDN sebesar Rp640.553.349,00;
  - xiv. BPSDM sebesar Rp1.296.241.500,00;
  - xv. PPSDM Regional Bandung sebesar Rp498.960.000,00;
  - xvi. PPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp1.290.080.547,00; dan
  - xvii. Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar sebesar Rp545.628.000,00.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*  
Rp875.727.657.235,00

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp875.727.657.235,00 dan Rp865.096.598.431,00.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya tersaji pada tabel 77.

**Tabel 77**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	756.371.780.413	(692.217.866.817)	Rp 64.153.913.596
2	Lisensi	69.533.433.080	(8.209.555.741)	Rp 61.323.877.339
3	Hasil Kajian/Penelitian	2.271.764.600	-	Rp 2.271.764.600
4	ATB Lainnya	2.333.403.750	-	Rp 2.333.403.750
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 830.510.381.843</b>	<b>Rp (700.427.422.558)</b>	<b>Rp 130.082.959.285</b>
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	756.371.780.413	(116.962.354.763)	Rp 639.409.425.650
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	61.889.828.264	(58.337.879.914)	Rp 3.551.948.350
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 818.261.608.677</b>	<b>Rp (175.300.234.677)</b>	<b>Rp 642.961.374.000</b>
	<b>Total</b>	<b>Rp 1.648.771.990.520</b>	<b>Rp (875.727.657.235)</b>	<b>Rp 773.044.333.285</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per Satker disajikan pada **Lampiran XXIII**.

*Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp401.816.267.044,00*

#### **C.24 Utang kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp401.816.267.044,00 dan Rp83.654.061.625,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp401.816.267.044,00 terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp20.135.070.660,00 berasal dari jurnal penyesuaian akhir tahun atas Belanja Pegawai Tahun 2024 yang akan dibayarkan pada Tahun 2025 sehingga diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan;
- b) Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp16.077.414.847,00 yang terdiri dari:
  - i. Pekerjaan yang dananya diperoleh dari UAE melalui mekanisme Hibah Langsung dan telah terselesaikan pada Tahun 2024 namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp15.063.700.565,00; serta
  - ii. Belanja Barang Tahun 2024 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dibayarkan kepada pihak ketiga sehingga diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan sebesar Rp1.013.714.282,00;
- c) Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp365.603.781.537,00 yang terdiri dari:

- i. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp8.213.384,00 berasal dari Belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada penerima hak sampai dengan tanggal pelaporan;
- ii. Sisa saldo pada rekening bendahara pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan menggunakan mekanisme LS Bendahara sebesar Rp32.760,00;
- iii. Sisa saldo pada rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp10.000,00 yang merupakan kas yang diterima oleh bendahara pengeluaran atas uji coba *Cash Management System* (CMS);
- iv. Sisa saldo yang berasal dari SPM LS sebesar Rp487.834.734,00 dan TUP sebesar Rp1.648.560.242,00 atau total sebesar Rp2.136.394.976,00 yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Ditjen Bina Adwil. Seharusnya saldo tersebut didistribusikan kepada pihak yang berhak pada Tahun 2024. Namun oleh Bendahara Pengeluaran Ditjen Bina Adwil ditunda pembayarannya sehingga baru selesai didistribusikan kepada pihak yang berhak pada Tahun 2025; dan
- v. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp363.459.130.417,00 merupakan kewajiban atas belanja yang dibayarkan dengan mekanisme RPATA yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum diserahkan kepada pelaksana pekerjaan dan masih berada di dalam rekening penampungan.

Perbandingan rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Unit Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 78**  
**Daftar Perbandingan Utang Pihak Ketiga per Unit Eselon I**

No	ESELON I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	108.920.181.383	17.730.722.028	91.189.459.355
2	Itjen	1.425.437.942	1.858.367.294	(432.929.352)
3	Ditjen Polpum	1.319.946.454	1.457.463.856	(137.517.402)
4	Ditjen Bina Adwil	2.416.223.984	30.219.180	2.386.004.804
5	Ditjen Pemdes	32.223.490.651	2.659.958.051	29.563.532.600
6	Ditjen Bangda	20.618.132.350	3.586.504.728	17.031.627.622
7	Ditjen Otda	1.027.236.045	1.394.721.341	(367.485.296)
8	Ditjen Dukcapil	229.453.569.230	49.929.456.780	179.524.112.450
9	Ditjen Keuda	990.015.346	1.403.503.090	(413.487.744)
10	BSKDN	157.167.582	939.916.474	(782.748.892)
11	BPSDM	3.264.866.077	2.663.228.803	601.637.274
<b>Jumlah</b>		<b>401.816.267.044</b>	<b>83.654.061.625</b>	<b>318.162.205.419</b>

Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada **Lampiran XXVII**.

*Pendapatan Diterima Di Muka*  
*Rp160.307.263.241,00*

### **C.25 Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp160.307.263.241,00 dan Rp127.686.367.506,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Perbandingan rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Unit Eselon I tersaji pada tabel 79.

**Tabel 79**  
**Pendapatan Diterima di Muka**

NO	ESELON I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	7.717.137.930	7.168.606.801	548.531.129
2	Itjen	2.652.944	18.570.611	(15.917.667)
3	Ditjen Bina Pemdes	28.817.528	90.797.195	(61.979.667)
4	Ditjen Bina Bangda	292.330.000	293.353.500	(1.023.500)
5	Ditjen Dukcapil	151.974.364.000	119.943.814.000	32.030.550.000
6	BPSDM	291.960.839	171.225.399	120.735.440
<b>Jumlah</b>		<b>160.307.263.241</b>	<b>127.686.367.506</b>	<b>32.620.895.735</b>

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Satker terdapat pada **Lampiran XXVIII**.

*Utang Muka dari KPPN*  
*Rp112.599.303,00*

### **C.26 Utang Muka dari KPPN**

Utang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp112.599.303,00 dan Rp56.709.1200,00. Utang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Jangka Pendek Lainnya*  
*Rp7.719.409,00*

### **C.27 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.719.409,00 dan Rp56.709.1200,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pungutan pajak Tahun 2024 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetorkan ke kas negara.

**Tabel 80**  
**Utang Jangka Pendek Lainnya**

NO	ESELON I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Setjen	6.712.500	24.697.268	(17.984.768)
2	Ditjen Bina Adwil	1.006.909	-	1.006.909
<b>Jumlah</b>		<b>7.719.409</b>	<b>24.697.268</b>	<b>(16.977.859)</b>

### C.28 Ekuitas

*Ekuitas*  
*Rp16.905.781.871.164,00*

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp16.905.781.871.164,00 dan Rp16.599.721.292.944,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP  
Rp922.205.703.793

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp922.205.703.793,00 dan Rp747.377.561.641,00. Pendapatan-LO terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari PNBP fungsional antara lain pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada Ditjen Dukcapil, penyelenggaraan pendidikan pascasarjana IPDN dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta PNBP umum yang berasal dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel 81**

**Perbandingan Rincian PNBP Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

KODE AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.133.995.861	3.871.916.523	6,77
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	1.665.000	(100,00)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	271.988.700	-	100,00
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	46.796.500	30.080.000	55,57
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	182.500.000	225.747.100	(19,16)
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	15.473.847.612	15.772.013.373	(1,89)
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	454.942.900	404.203.000	12,55
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	58.681.374.000	50.243.378.000	16,79
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	11.219.224.000	2.286.950.000	390,58
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	831.384.646.000	673.874.677.500	100,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	1.201.093	(100,00)
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	203.832	-	100,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	292.285.431	59.538.792	390,92
425839	Pendapatan Denda Lainnya	5.437.000	388.498.703	100,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	58.461.957	217.692.557	(73,14)
<b>JUMLAH</b>		<b>922.205.703.793</b>	<b>747.377.561.641</b>	<b>23,39</b>

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp922.205.703.793,00, sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp972.605.329.846,00, diantaranya sebesar Rp957.480.929.655,00 berasal dari kegiatan operasional. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak (basis kas) sebesar Rp35.275.225.862,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 82**  
**Selisih PNBP antara Basis Kas dan Basis Akrua**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.139.701.108	4.133.995.861	(5.705.247)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	271.988.700	271.988.700	-
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	46.796.500	46.796.500	-
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	217.250.000	182.500.000	(34.750.000)
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	18.834.607.112	15.473.847.612	(3.360.759.500)
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	512.177.400	454.942.900	(57.234.500)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	58.681.374.000	58.681.374.000	-
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	11.219.224.000	11.219.224.000	-
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	863.415.196.000	831.384.646.000	(32.030.550.000)
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	203.832	203.832	-
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	78.539.029	292.285.431	213.746.402
425839	Pendapatan Denda Lainnya	5.437.000	5.437.000	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	58.434.974	58.461.957	26.983
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>		<b>957.480.929.655</b>	<b>922.205.703.793</b>	<b>(35.275.225.862)</b>

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi PNBP menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berbeda sebesar Rp5.705.247,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
  - a. Pengakuan Pendapatan-LO sebesar Rp2.598.428.651,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2023 atas bagian Tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN Kampus Sulsel, IPDN Kampus NTB, Itjen, Ditjen Bina Pemdes, Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, Ditjen Bina Bangda, BPSDM, PPSDM Regional Yogyakarta, PPSDM Regional Bukittinggi, serta Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.593.122.651,00; dan
    - 2) Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan atas Koreksi Lainnya pada Balai Besar Pemerintahan Desa Malang sebesar Rp5.306.000,00.

- b. Tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp2.604.133.898,00 yang terdiri dari:
  - 1) Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 pada Ditjen Bina Bangda sebesar Rp7.820.000,00; dan
  - 2) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 atas pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Sekretariat Jenderal, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN Kampus Sulsel, IPDN Kampus NTB, Itjen, Ditjen Bina Pemdes, Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, Ditjen Bina Bangda, BPSDM, PPSDM Regional Yogyakarta, serta Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.596.313.898,00.
- 2. Pelunasan Pendapatan-LO dari Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara Tahun 2024 pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp34.750.000,00.
- 3. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Biaya Pendidikan berbeda sebesar Rp3.360.759.500,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
  - a. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka Tahun 2023 atas bagian Tahun 2024 pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp5.174.795.384,00.
  - b. Tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp8.535.554.884,00 pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang terdiri dari:
    - 1) Pendapatan Biaya Pendidikan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 atas pengakuan Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka sebesar Rp5.759.249.872,00;
    - 2) Pelunasan Pendapatan-LO dari Pendapatan Biaya Pendidikan Tahun 2023 yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara pada Tahun 2024 sebesar Rp2.265.555.012,00; dan
    - 3) Pelunasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Biaya Pendidikan yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 sebesar Rp510.750.000,00.

4. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Pendidikan Lainnya berbeda sebesar Rp57.234.500,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
  - a. Pelunasan Pendapatan-LO dari Pendapatan Pendidikan Lainnya yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara Tahun 2024 pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp53.500.000,00; dan
  - b. Pendapatan-LO yang tidak dapat diakui pada tahun 2024 atas atas pembayaran denda buku tahun 2023 dari Pendapatan Pendidikan Lainnya pada IPDN Kampus NTB sebesar Rp3.734.500,00.
5. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi berbeda sebesar Rp32.030.550.000,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
  - a. Pengakuan Pendapatan-LO dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi atas Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp119.943.814.000,00; dan
  - b. Pendapatan-LO yang tidak dapat diakui pada tahun 2024 dari Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Di Muka pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp151.974.364.000,00.
6. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada Ditjen Bina Bangda atas Hibah Langsung dari Uni Emirat Arab Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp213.746.402,00.
7. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Anggaran Lain-Lain berbeda sebesar Rp26.983,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
  - a. Jurnal Koreksi atas pencatatan sisa kas di rekening pada satker dekonsentrasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor VA 9890244841671000 atas nama BPG 042 INSPEKTORAT KALBAR per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil pengujian data rekening pada aplikasi SPRINT sebesar Rp25.984,00; dan
  - b. Sisa Kas Lainnya di Rekening Bendahara Ditjen Bina Bangda Nomor 7187436437 RPL 133 PDH BAPPEDA ACEH UTK 2C7EJQHA yang berasal dari Pembulatan atas pencairan yang tidak dapat ditarik, telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 23 April 2025 sebesar Rp999,00.

Beban Pegawai  
Rp864.086.036.643

## D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp864.086.036.643,00 dan Rp826.005.414.719,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 83**  
**Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Gaji Pokok PNS	315.893.809.747	319.093.323.670	(1,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	4.623.853	5.407.657	(14,49)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	15.950.645.354	15.030.664.766	6,12
Beban Tunjangan Anak PNS	4.309.855.155	4.110.323.446	4,85
Beban Tunjangan Struktural PNS	9.350.256.290	9.466.753.550	(1,23)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	22.058.276.800	23.427.656.078	(5,85)
Beban Tunjangan PPh PNS	3.211.056.808	1.433.774.802	123,96
Beban Tunjangan Beras PNS	13.167.006.090	14.320.204.065	(8,05)
Beban Uang Makan PNS	30.290.885.350	30.575.086.900	(0,93)
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	57.050.000	56.150.000	1,60
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	208.660.000	205.800.000	1,39
Beban Tunjangan Umum PNS	10.715.482.540	13.265.491.183	(19,22)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	8.943.487.983	8.448.335.305	5,86
Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	2.299.358.200	1.757.966.800	30,80
Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	72.400.000	88.800.000	(18,47)
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	2.399.008.376	1.689.301.400	42,01
Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti	348.272.400	-	100,00
Beban Gaji Pokok PPPK	1.830.121.500	66.115.200	2.668,08
Beban Pembulatan Gaji PPPK	29.664	532	5.475,94
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	78.805.870	6.611.520	1.091,95
Beban Tunjangan Anak PPPK	20.053.688	991.728	1.922,10
Beban Tunjangan Struktural PPPK	21.875.000	70.000.000	(68,75)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	255.056.000	-	100,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	81.834.600	2.969.220	2.656,10
Beban Uang Makan PPPK	326.798.600	-	100,00
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	875.000	-	100,00
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	2.975.000	-	100,00
Beban Uang Lembur	15.924.009.960	12.366.528.000	28,77
Beban Uang Lembur PPPK	17.781.000	-	100,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	403.597.926.913	370.374.445.332	8,97
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.647.758.902	142.713.565	1.755,30
<b>TOTAL</b>	<b>864.086.036.643</b>	<b>826.005.414.719</b>	<b>4,61</b>

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp864.086.036.643,00, sedangkan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp870.809.194.004,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pegawai (basis akrual) dengan Belanja Pegawai (basis kas) sebesar Rp6.723.157.361,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 84**  
**Selisih Beban Pegawai antara Basis Kas dan Basis Akrual**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	315.754.837.376	315.893.809.747	138.972.371
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.622.584	4.623.853	1.269
511121	Beban TunjanganSuami/Istri PNS	15.958.198.595	15.950.645.354	(7.553.241)
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	4.311.704.027	4.309.855.155	(1.848.872)
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	9.344.995.790	9.350.256.290	5.260.500
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	22.036.409.800	22.058.276.800	21.867.000
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	3.209.931.276	3.211.056.808	1.125.532
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	13.164.036.870	13.167.006.090	2.969.220
511129	Beban Uang Makan PNS	30.386.159.800	30.290.885.350	(95.274.450)
511135	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	57.050.000	57.050.000	-
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	208.660.000	208.660.000	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10.710.267.540	10.715.482.540	5.215.000
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	8.943.487.983	8.943.487.983	-
511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	2.299.358.200	2.299.358.200	-
511194	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/Polri	72.400.000	72.400.000	-
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	2.399.008.376	2.399.008.376	-
511514	Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti	348.272.400	348.272.400	-
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1.825.659.000	1.830.121.500	4.462.500
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	29.654	29.664	10
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	78.359.620	78.805.870	446.250
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	20.053.688	20.053.688	-
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	17.500.000	21.875.000	4.375.000
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	255.056.000	255.056.000	-
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	81.689.760	81.834.600	144.840
511628	Beban Uang Makan PPPK	317.041.000	326.798.600	9.757.600
511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	875.000	875.000	-
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	2.975.000	2.975.000	-
512211	Beban Uang Lembur	16.539.934.000	15.924.009.960	(615.924.040)
512212	Beban Uang Lembur PPPK	17.781.000	17.781.000	-
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	410.005.255.243	403.597.926.913	(6.407.328.330)
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.437.584.422	2.647.758.902	210.174.480
<b>BEBAN PEGAWAI</b>		<b>870.809.194.004</b>	<b>864.086.036.643</b>	<b>(6.723.157.361)</b>

Perbedaan pencatatan beban pegawai menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Gaji Pokok PNS berbeda sebesar Rp138.972.371,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp15.068.829,00 yang terdiri dari:
    - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp14.219.400,00; dan
    - 2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran gaji pokok PNS Tahun 2024 yang disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp849.429,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp154.041.200,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp141.784.400,00; dan
    - 2) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas kekurangan pembayaran gaji pokok PNS Tahun 2024 yang dibayarkan pada T.A. 2025 sebesar Rp12.256.800,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Pembulatan Gaji PNS berbeda sebesar Rp1.269,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.583,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp2.852,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp1.488,00; dan
    - 2) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas pembulatan kekurangan pembayaran gaji pokok PNS Tahun 2024 yang dibayarkan pada T.A. 2025 sebesar Rp1.364,00.
3. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Suami/Istri PNS berbeda sebesar Rp7.553.241,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp9.453.451,00 yang terdiri dari:
    - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp893.151,00; dan

- 2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran tunjangan suami/istri PNS Tahun 2024 yang disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp8.560.300,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp1.900.210,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp1.036.770,00; dan
    - 2) Belanja pegawai yang masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran tunjangan suami/istri PNS Tahun 2024 yang dibayarkan pada T.A. 2025 sebesar Rp863.440,00.
4. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Anak PNS berbeda sebesar Rp1.848.872,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp2.204.902,00 yang terdiri dari:
    - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp202.250,00; dan
    - 2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran tunjangan anak PNS Tahun 2024 yang disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp2.002.652,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp356.030,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp313.574,00; dan
    - 2) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas kekurangan pembayaran tunjangan anak PNS Tahun 2024 yang dibayarkan pada T.A. 2025 sebesar Rp42.456,00.
5. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Struktural PNS berbeda sebesar Rp5.260.500,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp5.400.000,00; dan
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp10.660.500,00.

6. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Fungsional PNS berbeda sebesar Rp21.867.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp8.058.000,00 yang terdiri dari:
    - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.458.000,00; dan
    - 2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional PNS Tahun 2024 yang disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp4.600.000,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp29.925.000,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp8.096.000,00; dan
    - 2) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas kekurangan pembayaran tunjangan fungsional PNS Tahun 2024 yang dibayarkan pada T.A. 2025 sebesar Rp21.829.000,00.
7. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan PPh PNS berbeda sebesar Rp1.125.532,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp171.076,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp1.296.608,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp626.877,00; dan
    - 2) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas kekurangan pembayaran tunjangan PPh PNS Tahun 2024 yang dibayarkan pada T.A. 2025 sebesar Rp669.731,00.
8. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Beras PNS berbeda sebesar Rp2.969.220,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran tunjangan beras PNS Tahun 2024 yang disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp1.013.880,00.

- b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp3.983.100,00 yang terdiri dari:
- 1) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp3.838.260,00; dan
  - 2) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas kekurangan pembayaran tunjangan beras PNS Tahun 2024 yang dibayarkan pada T.A. 2025 sebesar Rp144.840,00.
9. Beban-LO untuk akun Beban Uang Makan PNS berbeda sebesar Rp95.274.450,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp1.704.814.300,00 yang terdiri dari:
- 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.674.111.400,00;
  - 2) Koreksi Lainnya atas Beban Uang Makan Tahun 2023 pada satker IPDN Kampus Jakarta (kode satker 352593) yang dilikuidasi pada Tahun 2024 dan dibayarkan dengan DIPA Institut Pemerintahan Dalam Negeri (kode satker 448302) Tahun 2024 sebesar Rp28.469.000,00; dan
  - 3) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran uang makan PNS Tahun 2024 yang disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp2.233.900,00.
- b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp1.609.539.850,00 yang terdiri dari:
- 1) Pengakuan Beban-LO dari Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas kelebihan pembayaran uang makan PNS Tahun 2023 sebesar Rp16.988.000,00; dan
  - 2) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp1.592.551.850,00.
10. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Umum PNS berbeda sebesar Rp5.215.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp3.110.000,00 yang terdiri dari:
- 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp190.000,00; dan

- 2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran tunjangan umum PNS Tahun 2024 yang disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp2.920.000,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp8.325.000,00.
11. Beban-LO untuk akun Beban Gaji Pokok PPPK berbeda sebesar Rp4.462.500,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024.
  12. Beban-LO untuk akun Beban Pembulatan Gaji PPPK berbeda sebesar Rp10,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024.
  13. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK berbeda sebesar Rp446.250,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024.
  14. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Struktural PPPK berbeda sebesar Rp4.375.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024.
  15. Beban-LO untuk akun Beban Tunjangan Beras PPPK berbeda sebesar Rp144.840,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024.
  16. Beban-LO untuk akun Beban Uang Makan PPPK berbeda sebesar Rp9.757.600,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
    - a. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp7.722.600,00; dan
    - b. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas kekurangan pembayaran uang makan PPK Tahun 2024 yang dibayarkan pada T.A. 2025 sebesar Rp2.035.000,00.
  17. Beban-LO untuk akun Beban Uang Lembur berbeda sebesar Rp615.924.040,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
    - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp645.457.040,00 yang terdiri dari:
      - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp634.478.000,00; dan

- 2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran uang lembur PNS Tahun 2024 yang disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp10.979.040,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp29.533.000,00.
18. Beban-LO untuk akun Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) berbeda sebesar Rp6.407.328.330,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp24.488.422.267,00 yang terdiri dari:
    - 1) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp24.472.376.112,00; dan
    - 2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja Tahun 2024 yang disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp16.046.155,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp18.081.093.937,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja Tahun 2023 sebesar Rp4.376.634,00;
    - 2) Koreksi Lainnya atas Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) Tahun 2023 pada satker IPDN Kampus Jakarta (kode satker 352593) yang dilikuidasi pada Tahun 2024 dan dibayarkan dengan DIPA Institut Pemerintahan Dalam Negeri (kode satker 448302) Tahun 2024 sebesar Rp3.582.673,00;
    - 3) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp18.037.349.548,00; dan
    - 4) Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas kekurangan pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja Tahun 2024 yang dibayarkan pada T.A. 2025 sebesar Rp35.785.082,00.
19. Beban-LO untuk akun Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK berbeda sebesar Rp210.174.480,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp202.294.929,00; dan

- b. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas kekurangan pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja PPPK Tahun 2024 yang dibayarkan pada T.A. 2025 sebesar Rp7.879.551,00.

*Beban Persediaan*  
Rp19.970.224.791

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp19.970.224.791,00 dan Rp21.794.582.829,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pemakaian/konsumsi atas persediaan dinilai menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini beban persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing persediaan yang terpakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 85**  
**Perbandingan Beban Persediaan Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN ) (%)
Beban Persediaan Konsumsi	17.694.547.822	18.080.607.583	(2,14)
Beban Persediaan Lainnya	2.275.676.969	3.713.975.246	(38,73)
<b>TOTAL</b>	<b>19.970.224.791</b>	<b>21.794.582.829</b>	<b>(8,37)</b>

Penjelasan hubungan mutasi kurang persediaan dengan beban persediaan sebagai berikut:

**Tabel 86**  
**Penjelasan Hubungan Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan Tahun 2024**

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PEMAKAIAN (Rp)	BEBAN PERSEDIAAN (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)	(g)	(h) = (f) - (g)
117111	Barang Konsumsi	4.844.481.786		3.616.888.027	1.227.593.759	17.694.547.822	(16.466.954.063)
117199	Persediaan Lainnya	1.195.972.582		1.152.137.472	43.835.110	2.275.676.969	(2.231.841.859)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		40.493.136.077		40.493.136.077		40.493.136.077
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		793.834.504		793.834.504		793.834.504
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.040.454.368</b>	<b>41.286.970.581</b>	<b>4.769.025.499</b>	<b>42.558.399.450</b>	<b>19.970.224.791</b>	<b>22.588.174.659</b>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 (saldo awal) sebesar Rp6.040.454.368,00 dan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 (saldo akhir) sebesar Rp4.769.025.499,00. Selama Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi belanja barang persediaan sebesar Rp41.286.970.581,00 sehingga perhitungan pemakaian persediaan sebesar Rp42.558.399.450,00. Perbedaan sebesar Rp22.588.174.659,00 antara pemakaian persediaan sebesar Rp42.558.399.450,00 dengan Beban Persediaan sebesar Rp19.970.224.791,00 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 87**  
**Penjelasan Selisih Mutasi Kurang Persediaan dengan Beban Persediaan**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Batal Catat Usang Rusak	(7.494.193)
2	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311) menjadi Persediaan	(760.725.668)
3	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112) menjadi Persediaan	(681.502.052)
4	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123) menjadi Persediaan	(1.231.358.396)
5	Belanja Persediaan menjadi Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat (117127)	23.325.000.000
6	Belanja Persediaan menjadi Bahan untuk Pemeliharaan (117113)	1.341.534.368
7	Belanja Persediaan menjadi Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat (117124)	399.400.000
8	Belanja Persediaan menjadi Suku Cadang (117114)	47.845.333
9	Jurnal Reklasifikasi Antar Beban	77.868.125
10	Perolehan Lainnya	(149.712.000)
11	Reklasifikasi Keluar	50.428.300
12	Reklasifikasi Masuk	(16.650.378)
13	Transfer Keluar Likuidasi UAKPB	183.458.454
14	Transfer Masuk Likuidasi UAKPB	(183.458.454)
15	Usang	125.845.777
16	Rusak	23.500
17	Jurnal Koreksi <i>Audited</i> untuk mencatat Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Persediaan (5218) yang sebelumnya telah dikeluarkan dari Neraca sebagai Beban Persediaan	68.067.700
18	Jurnal Koreksi <i>Audited</i> untuk mencatat koreksi saldo awal Persediaan berdasarkan Hasil Opname Fisik yang diperoleh Tahun 2021	(395.757)
<b>JUMLAH</b>		<b>22.588.174.659</b>

*Beban Barang Dan Jasa*  
*Rp2.478.607.689.361*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.478.607.689.361,00 dan Rp2.196.254.071.643,00. Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2.478.607.689.361,00 terdiri dari kegiatan operasional secara normal sebesar Rp2.478.607.689.361,00 dan kegiatan operasional khusus penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp0,00. Beban Barang dan Jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 88**  
**Perbandingan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Keperluan Perkantoran	174.031.249.117	172.799.688.061	0,71
Beban Pengadaan Bahan Makanan	42.864.902.905	52.548.682.582	(18,43)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.292.124.238	2.310.178.542	(0,78)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	374.669.424	547.327.567	(31,55)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	11.816.135.250	20.304.718.000	(41,81)
Beban Barang Operasional Lainnya	64.341.047.141	58.217.024.786	10,52
Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	8.784.288.000	-	100,00
Beban Bahan	127.467.897.811	124.511.508.927	2,37
Beban Honor Output Kegiatan	18.352.382.750	18.175.751.750	0,97
Beban Barang Non Operasional Lainnya	152.851.349.396	150.823.214.050	1,34
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	500.073.052	786.727.723	(36,44)
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	44.375.000	-	100,00
Beban Langganan Listrik	40.843.136.347	39.861.488.702	2,46
Beban Langganan Telepon	385.844.039	358.955.234	7,49
Beban Langganan Air	4.190.570.471	4.803.774.631	(12,77)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	937.547.888	1.000.144.083	(6,26)
Beban Jasa Pos dan Giro	2.000.000	-	100,00
Beban Jasa Konsultan	248.891.368.043	169.826.623.038	46,56
Beban Sewa	107.122.387.382	88.869.712.912	20,54
Beban Jasa Profesi	46.101.374.279	49.254.013.505	(6,40)
Beban Jasa Lainnya	1.426.379.493.303	1.238.619.921.599	15,16
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	33.473.525	2.177.572.158	(98,46)
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	81.500.000	(100,00)
<b>Subtotal Akun Normal</b>	<b>2.478.607.689.361</b>	<b>2.195.878.527.850</b>	<b>12,88</b>
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	153.048.359	(100,00)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	222.495.434	(100,00)
<b>Subtotal Akun Khusus COVID</b>	<b>-</b>	<b>375.543.793</b>	<b>(100,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.478.607.689.361</b>	<b>2.196.254.071.643</b>	<b>12,86</b>

Jumlah Beban Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2.478.607.689.361,00, sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan operasional secara normal sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.444.033.980.971,00. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Beban Barang dan Jasa (basis akrual) dengan Belanja Barang dan Jasa (basis kas) untuk kegiatan operasional secara normal sebesar Rp34.573.708.390,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 89**  
**Selisih Beban Barang dan Jasa antara Basis Kas dan Basis Akrua**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	174.109.981.646	174.031.249.117	(78.732.529)
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	42.864.902.905	42.864.902.905	-
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.292.124.238	2.292.124.238	-
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	374.669.424	374.669.424	-
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	11.816.135.250	11.816.135.250	-
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	70.156.509.635	64.341.047.141	(5.815.462.494)
521211	Beban Bahan	127.467.897.811	127.467.897.811	-
521213	Beban Honor Output Kegiatan	18.352.382.750	18.352.382.750	-
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	152.851.349.396	152.851.349.396	-
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	8.784.288.000	8.784.288.000	-
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	539.786.522	500.073.052	(39.713.470)
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	44.375.000	44.375.000	-
522111	Beban Langganan Listrik	41.540.212.201	40.843.136.347	(697.075.854)
522112	Beban Langganan Telepon	391.135.267	385.844.039	(5.291.228)
522113	Beban Langganan Air	4.271.086.685	4.190.570.471	(80.516.214)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	934.819.718	937.547.888	2.728.170
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	2.000.000	2.000.000	-
522131	Beban Jasa Konsultan	233.484.596.859	248.891.368.043	15.406.771.184
522141	Beban Sewa	107.122.387.382	107.122.387.382	-
522151	Beban Jasa Profesi	46.110.374.279	46.101.374.279	(9.000.000)
522191	Beban Jasa Lainnya	1.400.522.966.003	1.426.379.493.303	25.856.527.300
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	33.473.525	33.473.525
<b>BEBAN BARANG DAN JASA</b>		<b>2.444.033.980.971</b>	<b>2.478.607.689.361</b>	<b>34.573.708.390</b>

Perbedaan pencatatan beban barang dan jasa dalam kegiatan operasional secara normal menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Keperluan Perkantoran berbeda sebesar Rp78.732.529,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024.
2. Beban-LO untuk akun Beban Barang Operasional Lainnya berbeda sebesar Rp5.815.462.494,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

- a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.000.000,00;
  - b. Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp149.712.000,00; dan
  - c. Jurnal koreksi Beban-LO karena pada saat pengajuan revisi pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung berupa uang dari UNICEF dan UNFPA tidak dapat menggunakan akun Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp5.662.750.494,00.
3. Beban-LO untuk akun Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel berbeda sebesar Rp39.713.470,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (kode akun 532111) sebesar Rp19.852.080,00; dan
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel yang menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp59.565.550,00.
4. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Listrik berbeda sebesar Rp697.075.854,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp1.586.688.801,00 yang terdiri dari:
    - 1) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.453.368.599,00; dan
    - 2) Koreksi Lainnya atas Beban Langganan Listrik Tahun 2023 pada satker IPDN Kampus Jakarta (kode satker 352593) yang dilikuidasi pada Tahun 2024 dan dibayarkan dengan DIPA Institut Pemerintahan Dalam Negeri (kode satker 448302) Tahun 2024 sebesar Rp133.320.202,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp889.612.947,00.
5. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Telepon berbeda sebesar Rp5.291.228,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp6.623.301,00; dan
  - b. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp1.332.073,00.

6. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Air berbeda sebesar Rp80.516.214,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp81.927.600,00;
  - b. Selisih antara nilai SP2D Penampungan dengan SP2D Pembayaran sebesar Rp26,00; dan
  - c. Pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp1.411.412,00.
7. Beban-LO untuk akun Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya berbeda sebesar Rp2.728.170,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena terdapat pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024.
8. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Konsultan berbeda sebesar Rp15.406.771.184,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp1.396.290.472,00 yang terdiri dari:
    - 1) Selisih antara nilai SP2D Penampungan dengan SP2D Pembayaran sebesar Rp1.244.942.971,00;
    - 2) Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp76.833.501,00; dan
    - 3) Jurnal koreksi *audited* dalam rangka koreksi kapitalisasi belanja jasa konsultan menjadi KDP atas hasil pemeriksaan BPK RI T.A. 2024 sebesar Rp74.514.000,00.
  - b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp16.803.061.656,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2024 sebesar Rp16.405.794.541,00;
    - 2) Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi sebesar Rp22.269.550,00; dan
    - 3) Jurnal koreksi *audited* untuk mencatat pekerjaan yang telah terselesaikan pada Tahun 2024 atas Hibah Langsung dari UAE namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp374.997.565,00.
9. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Profesi berbeda sebesar Rp9.000.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024.

10. Beban-LO untuk akun Beban Jasa Lainnya berbeda sebesar Rp25.856.527.300,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:

a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp22.198.395.748,00 yang terdiri dari:

- 1) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 yang tidak dapat diakui sebagai Beban-LO Tahun 2024 sebesar Rp5.216.645,00;
- 2) Selisih antara nilai SP2D Penampungan dengan SP2D Pembayaran sebesar Rp19.621.284.545,00;
- 3) Pembelian Aset Tak Berwujud berupa *Software* Komputer menggunakan Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp99.870.030,00;
- 4) Jurnal koreksi *audited* untuk mencatat Aset Tetap Renovasi berupa Pekerjaan Penataan Gedung Kantor DKPP RI yang berasal dari Belanja Jasa Lainnya (5221) sebesar Rp1.830.000.000,00; dan
- 5) Jurnal koreksi *audited* dalam rangka kapitalisasi aset berupa Aset Tetap Renovasi atas 3 (tiga) Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja di Lingkungan Ditjen Polpum yang menggunakan Belanja Jasa Lainnya berdasarkan Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK Tahun 2024 sebesar Rp642.024.528,00.

b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp48.054.923.048,00 yang terdiri dari:

- 1) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp3.960.680,00;
- 2) Belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*) Tahun 2024 sebesar Rp6.800.534.000,00;
- 3) Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp37.990.040.382,00; dan
- 4) Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp3.260.387.986,00.

11. Beban-LO untuk akun Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin berbeda sebesar Rp33.473.525,00 dengan Belanja-LRA yang disebabkan karena:

- a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (kode akun 532111) sebesar Rp22.755.000,00;
- b. Hibah Masuk sebesar Rp4.250.000,00; dan
- c. Perolehan Lainnya sebesar Rp6.468.525,00.

Penjelasan hubungan mutasi aset ekstrakomtabel periode berjalan dengan beban aset ekstrakomtabel sebagai berikut:

**Tabel 90**  
**Penyajian Beban Aset Ekstrakomtabel**

AKUN BEBAN			MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL PADA LBMN				PERBEDAAN ANTARA BEBAN DENGAN MUTASI ASET EKSTRAKOMTABEL (Rp)	
BEBAN PERALATAN DAN MESIN - EKSTRAKOMTABEL (521252) (Rp)	BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN (595112) (Rp)	BEBAN GEDUNG DAN BANGUNAN - EKSTRAKOMTABEL (521253) (Rp)	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG			MUTASI NETTO EKSTRAKOMTABEL PADA LBMN (Rp)
			URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Rp)	URAIAN TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Rp)		
500.073.052	22.755.000	44.375.000	Pembelian	567.203.052			567.203.052	-
	4.250.000		Hibah Masuk	4.250.000			4.250.000	-
	6.468.525		Perolehan Lainnya	6.468.525			6.468.525	-
500.073.052	33.473.525	44.375.000		577.921.577		-	577.921.577	-

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset ekstrakomtabel sampai dengan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp577.921.577,00 dan Rp0,00 sehingga perhitungan mutasi neto aset ekstrakomtabel sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp577.921.577,00. Beban aset ekstrakomtabel untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 terdiri dari Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel sebesar Rp500.073.052,00, Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.473.525,00 dan Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel sebesar Rp44.375.000,00. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan antara mutasi aset ekstrakomtabel dengan beban aset ekstrakomtabel.

*Beban Pemeliharaan  
Rp132.764.844.357*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp132.764.844.357,00 dan Rp125.554.899.637,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 91**  
**Perbandingan Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79.612.100.618	74.294.893.988	7,16
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.119.706.116	3.670.101.378	39,50
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.348.376.632	36.677.446.518	4,56
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.846.250	1,04
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	197.000.000	-	100,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	4.508.116.163	5.991.620.081	(24,76)
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.051.341.948	1.638.001.100	(35,82)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	3.361.353.173	2.786.728.031	20,62
Beban Persediaan Suku Cadang	551.849.707	396.280.691	39,26
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	84.981.600	(100,00)
<b>TOTAL</b>	<b>132.764.844.357</b>	<b>125.554.899.637</b>	<b>5,74</b>

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp132.764.844.357,00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp134.779.811.207,00 sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Pemeliharaan (basis akrual) dengan Belanja Pemeliharaan (basis kas) sebesar Rp2.014.966.850,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 92**  
**Selisih Beban Pemeliharaan antara Basis Kas dan Basis Akrual**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81.000.860.036	79.612.100.618	(1.388.759.418)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.644.957.383	-	(2.644.957.383)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.119.706.116	5.119.706.116	-
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.689.309.552	38.348.376.632	(340.932.920)
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.750.520.009	-	(1.750.520.009)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	-
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	197.000.000	197.000.000
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	4.508.116.163	4.508.116.163	-
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.051.341.948	1.051.341.948	-
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	3.361.353.173	3.361.353.173
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	-	551.849.707	551.849.707
<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>		<b>134.779.811.207</b>	<b>132.764.844.357</b>	<b>(2.014.966.850)</b>

Perbedaan pencatatan Beban Pemeliharaan menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berbeda sebesar Rp1.388.759.418,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Jurnal koreksi nilai aset tetap non revaluasi atas pemeliharaan gedung dan bangunan yang dikapitalisasi menambah nilai gedung dan bangunan sebesar Rp988.405.516,00;
  - b. Selisih antara nilai SP2D Penampungan dengan SP2D Pembayaran sebesar Rp2,00;
  - c. Jurnal koreksi *audited* atas kurang catat peralatan dan mesin dari Belanja Pemeliharaan (52) yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp9.934.500,00; dan

- d. Jurnal koreksi *audited* atas pencatatan Aset Tetap yang dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan namun kegiatan pemeliharaan tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp390.419.400,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berbeda sebesar Rp340.932.920,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- Jurnal koreksi Beban-LO yang seharusnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp227.465.820,00;
  - Jurnal koreksi nilai aset tetap non revaluasi atas pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi menambah nilai peralatan dan mesin sebesar Rp29.970.000,00;
  - Jurnal penyesuaian atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 yang dikembalikan pada Tahun 2025 sebesar Rp34.490.000,00; dan
  - Jurnal koreksi *audited* atas kurang catat voucher pembelian BBM T.A. 2024 yang masih digunakan atau tersisa lebih dari 31 Desember 2024 sebesar Rp49.007.100,00.
3. Beban-LO untuk akun Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berbeda sebesar Rp197.000.000,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena jurnal koreksi *audited* atas pencatatan Aset Tetap Jalan yang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sehingga belanja tersebut direklas ke Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Penjelasan Perbedaan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.644.957.383,00, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.750.520.009,00, Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp3.361.353.173,00 dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp551.849.707,00 secara lebih rinci digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 93**  
**Penyajian Beban Pemeliharaan**

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PEMAKAIAN (Rp)	BEBAN PEMELIHARAAN (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) + (d) - (e)	(g)	(h) = (f) - (g)
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	610.476.442	-	625.989.968	(15.513.526)	3.361.353.173	(3.376.866.699)
117114	Suku Cadang	113.491.222	-	83.808.068	29.683.154	551.849.707	(522.166.553)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		2.644.957.383		2.644.957.383		2.644.957.383
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1.750.520.009		1.750.520.009		1.750.520.009
	<b>JUMLAH</b>	<b>723.967.664</b>	<b>4.395.477.392</b>	<b>709.798.036</b>	<b>4.409.647.020</b>	<b>3.913.202.880</b>	<b>496.444.140</b>

Saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 31 Desember 2023 (saldo awal) sebesar Rp723.967.664,00 dan saldo Persediaan Barang Pemeliharaan per 31 Desember 2024 (saldo akhir) sebesar Rp709.798.036,00. Selama Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi Belanja Barang Pemeliharaan sebesar Rp4.395.477.392,00 sehingga perhitungan pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp4.409.647.020,00. Perbedaan sebesar Rp496.444.140,00 antara pemakaian persediaan barang pemeliharaan sebesar Rp4.409.647.020,00 dengan Beban Pemeliharaan dari pemakaian persediaan sebesar Rp3.913.202.880,00 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 94**

**Penjelasan Selisih Pemakaian Persediaan dengan Beban Pemeliharaan**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526131) menjadi Persediaan Pemeliharaan	(2.470.000)
2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) menjadi Persediaan Pemeliharaan	(1.388.149.323)
3	Belanja Pemeliharaan menjadi Bahan Baku (117131)	7.093.125
4	Belanja Pemeliharaan menjadi Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat (117128)	298.250
5	Belanja Pemeliharaan menjadi Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat (117124)	1.151.500
6	Belanja Pemeliharaan menjadi Persediaan Barang Konsumsi (117111)	1.826.600.743
7	Belanja Pemeliharaan menjadi Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial (117141)	229.250
8	Belanja Pemeliharaan menjadi Persediaan Lainnya (117199)	79.166.580
9	Jurnal Reklasifikasi Antar Beban	(78.033.125)
10	Reklasifikasi Keluar	8.192.200
11	Reklasifikasi Masuk	(44.714.500)
12	Jurnal Koreksi <i>Audited</i> untuk Mencatat Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Persediaan (5218) yang sebelumnya telah dikeluarkan dari Neraca sebagai Beban Persediaan Pemeliharaan	87.079.440
<b>JUMLAH</b>		<b>496.444.140</b>

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp581.369.053.204*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp581.369.053.204,00 dan Rp581.055.989.412,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk kegiatan operasional secara normal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 95**  
**Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	358.225.906.045	344.043.270.974	4,12
Beban Perjalanan Dinas Tetap	2.367.306.425	3.852.776.374	(38,56)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.019.601.561	10.387.665.634	(3,54)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	124.060.018.333	122.366.172.328	1,38
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73.498.824.116	90.435.096.269	(18,73)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	13.197.396.724	9.971.007.833	32,36
<b>TOTAL</b>	<b>581.369.053.204</b>	<b>581.055.989.412</b>	<b>0,05</b>

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp581.369.053.204,00, sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp575.892.651.299,00, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban Perjalanan Dinas (basis akrual) dengan Belanja Perjalanan Dinas (basis kas) sebesar Rp5.476.401.905,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 96**  
**Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara Basis Kas dan Basis Akrual**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	356.063.233.138	358.225.906.045	2.162.672.907
524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	2.367.306.425	2.367.306.425	-
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.019.601.561	10.019.601.561	-
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	123.074.382.533	124.060.018.333	985.635.800
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	71.009.029.690	73.498.824.116	2.489.794.426
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	13.359.097.952	13.197.396.724	(161.701.228)
	<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>575.892.651.299</b>	<b>581.369.053.204</b>	<b>5.476.401.905</b>

Perbedaan pencatatan Beban Perjalanan Dinas menurut basis kas dan basis akrual disebabkan karena:

1. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Biasa berbeda sebesar Rp2.162.672.907,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
  - a. Tidak dapat diakui sebagai Beban-LO sebesar Rp89.534.476,00 yang terdiri dari:
    - 1) Jurnal penyesuaian atas Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024 yang dikembalikan pada Tahun 2025 sebesar Rp41.277.076,00;
    - 2) Jurnal koreksi *audited* atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa Tahun 2024 yang disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp30.462.295,00;

- 3) Jurnal koreksi *audited* atas sisa kas dari SPM LS yang belum disetorkan per 31 Desember 2024 dan disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp17.510.270,00; dan
  - 4) Jurnal koreksi *audited* atas kesalahan pembentukan jurnal balik yang telah direkam pada periode pelaporan Tahun 2024 *unaudited* berupa belanja perjalanan dinas T.A. 2023 yang dikembalikan ke kas negara T.A. 2024 menggunakan akun Penerimaan Kembali sebesar Rp284.835,00.
- b. Pengakuan Beban-LO sebesar Rp2.252.207.383,00 yang terdiri dari:
- 1) Pengakuan Beban-LO dari penyetoran Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Tahun 2023 sebesar Rp284.835,00;
  - 2) Pengakuan Beban-LO dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 sebesar Rp90.249.000,00; dan
  - 3) Jurnal koreksi Beban-LO karena pada saat pengajuan revisi pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung berupa uang dari UNICEF dan UNFPA tidak dapat menggunakan akun Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.161.673.548,00.
2. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota berbeda sebesar Rp985.635.800,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena pada saat pengajuan revisi pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung berupa uang dari UNICEF dan UNFPA tidak dapat menggunakan akun Belanja Perjalanan Dinas.
3. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berbeda sebesar Rp2.489.794.426,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena:
- a. Jurnal koreksi Beban-LO karena pada saat pengajuan revisi pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung berupa uang dari UNICEF dan UNFPA tidak dapat menggunakan akun Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.515.441.146,00; dan
  - b. Jurnal koreksi *audited* atas sisa kas dari SPM LS yang belum disetorkan per 31 Desember 2024 dan disetorkan pada T.A. 2025 sebesar Rp25.646.720,00.

4. Beban-LO untuk akun Beban Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri berbeda sebesar Rp161.701.228,00 dengan Belanja-LRA disebabkan karena jurnal koreksi *audited* atas sisa kas dari SPM LS yang belum disetorkan per 31 Desember 2024 dan disetorkan pada T.A. 2025.

*Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat  
Rp341.841.028.210*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp341.841.028.210,00 dan Rp319.337.106.602,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan Barang Milik Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 97**  
**Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**  
**Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang	1.500.000.000	550.000.000	172,73
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	809.474.825	3.520.415.640	(77,01)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	3.965.713.605	6.580.002.221	(39,73)
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada masyarakat	1.644.057.061	-	100,00
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	34.174.108.918	19.314.078.659	76,94
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	299.747.673.801	289.372.610.082	3,59
<b>TOTAL</b>	<b>341.841.028.210</b>	<b>319.337.106.602</b>	<b>7,05</b>

Penjelasan hubungan mutasi kurang Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dengan beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 98**  
**Penyajian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AWAL (Rp)	PEMBELIAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	PENYERAHAN (Rp)	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN		SELISIH (Rp)
						AKUN	SALDO (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) - (e)	(g)	(h)	(i) = (f) - (h)
117122	Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	21.334.897.038		21.391.184.913	(56.287.875)	593122	809.474.825	(865.762.700)
117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	382.720.441		33.349.858.276	(32.967.137.835)	593124	3.965.713.605	(36.932.851.440)
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.095.980.150		28.860.434.489	(23.764.454.339)	593125	1.644.057.061	(25.408.511.400)
117126	Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	446.822.000		71.066.062.000	(70.619.240.000)			(70.619.240.000)
117127	Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	160.017.091.880		139.951.231.767	20.065.860.113	593127	34.174.108.918	(14.108.248.805)
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat	9.154.135.762		2.521.084.896	6.633.050.866	593128	299.747.673.801	(293.114.622.935)
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses	925.651.980		36.251.577.100	(35.325.925.120)			(35.325.925.120)
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		28.578.172.384		28.578.172.384			28.578.172.384
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		25.408.511.400		25.408.511.400			25.408.511.400
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		94.061.062.120		94.061.062.120			94.061.062.120
526123	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang		1.500.000.000		1.500.000.000			1.500.000.000
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah		865.762.700		865.762.700	526123	1.500.000.000	(634.237.300)
526311	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		289.053.246.804		289.053.246.804			289.053.246.804
	<b>JUMLAH</b>	<b>197.357.299.251</b>	<b>439.466.755.408</b>	<b>333.391.433.441</b>	<b>303.432.621.218</b>		<b>341.841.028.210</b>	<b>(38.408.406.992)</b>

Saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 31 Desember 2023 (saldo awal) sebesar Rp197.357.299.251,00 dan saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat per 31 Desember 2024 (saldo akhir) sebesar Rp333.391.433.441,00. Selama Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi Belanja Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp439.466.755.408,00 sehingga perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp303.432.621.218,00. Perbedaan sebesar Rp38.408.406.992,00 antara perhitungan penyerahan Persediaan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp303.432.621.218,00 dengan Beban Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp341.841.028.210,00 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 99**  
**Penjelasan Selisih Mutasi Persediaan yang Diserahkan dengan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) menjadi Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	(23.325.000.000)
2	Belanja Barang Persediaan Lainnya (521832) menjadi Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	(399.400.000)
3	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat menjadi Barang Konsumsi (117111)	763.195.668
4	Hibah Masuk	(758.499.660)
5	Jurnal Koreksi <i>Audited</i> untuk mencatat pekerjaan yang telah terselesaikan pada Tahun 2024 atas Hibah Langsung dari UAE namun belum dibayarkan kepada Pihak Ketiga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024	(14.688.703.000)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(38.408.406.992)</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp376.790.972.933

## D8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp376.790.972.933,00 dan Rp298.246.135.111,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 100**  
**Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	238.046.638.986	174.613.986.831	36,33
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.937.462.402	78.250.059.967	0,88
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.745.471.970	7.300.241.118	(21,30)
Beban Penyusutan Irigasi	2.990.082.329	4.796.503.626	(37,66)
Beban Penyusutan Jaringan	5.286.172.985	4.602.239.925	14,86
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	57.080.598	61.218.881	(6,76)
Beban Amortisasi Software	40.184.935.861	26.550.893.666	51,35
Beban Amortisasi Lisensi	5.191.574.347	1.724.885.277	200,98
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	11.215.000	49.680.125	(77,43)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	340.338.455	296.425.695	14,81
<b>TOTAL</b>	<b>376.790.972.933</b>	<b>298.246.135.111</b>	<b>26,34</b>

Penjelasan hubungan penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan sebagai berikut:

**Tabel 101**  
**Penjelasan Hubungan Penyusutan Periode Berjalan**  
**dengan Beban Penyusutan**

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)	PENYUSUTAN PERIODE BERJALAN (Rp)	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2024 (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g) = (e) - (f)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.460.735.603.007	3.274.188.181.175	186.547.421.832	238.046.638.986	(51.499.217.154)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	565.839.009.912	486.261.917.923	79.577.091.989	78.937.462.402	639.629.587
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	58.539.429.759	51.619.327.489	6.920.102.270	5.745.471.970	1.174.630.300
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	31.555.216.171	28.558.348.182	2.996.867.989	2.990.082.329	6.785.660
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	71.913.355.442	66.995.459.088	4.917.896.354	5.286.172.985	(368.276.631)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	22.849.730.650	94.678.343.010	(71.828.612.360)	57.080.598	(71.885.692.958)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	116.962.354.763	78.939.040.303	38.023.314.460	340.338.455	37.682.976.005
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.328.394.699.704</b>	<b>4.081.240.617.170</b>	<b>247.154.082.534</b>	<b>331.403.247.725</b>	<b>(84.249.165.191)</b>

*Handwritten signature*

Terdapat perbedaan sebesar Rp84.249.165.191,00 antara penyusutan periode berjalan dengan beban penyusutan dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 102**  
**Penjelasan Selisih Penyusutan Periode Berjalan dengan Beban Penyusutan**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Hibah Keluar	(10.165.000)
2	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Hibah Keluar (Bmn yang Dihentikan)	(53.173.369.660)
3	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Koreksi Pencatatan	(448.465.659)
4	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(58.131.793)
5	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Likuidasi	(47.948.778.710)
6	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	(37.151.463.864)
7	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Penghapusan	(17.991.400)
8	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan	(2.793.511.977)
9	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Reklasifikasi Keluar	(264.715.378)
10	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Transfer Keluar	(2.222.224.674)
11	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Koreksi Manual	172.840.000
12	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.596.808.064
13	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Likuidasi Masuk	45.475.485.006
14	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Reklasifikasi Masuk	7.362.609.660
15	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Saldo Awal	449.025.094
16	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Transfer Masuk	2.222.224.674
17	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan yang disebabkan Transaksi Transfer Masuk (Henti Guna)	2.473.293.704
18	Jurnal Koreksi <i>Audited</i> untuk mencatat Aset Tetap berupa Jalan dan Jembatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan namun kegiatan pemeliharaan tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap sehingga seharusnya tidak dicatat sebagai penambah nilai Jalan dan Jembatan serta tidak menimbulkan penyusutan	(197.000.000)
19	Jurnal Koreksi <i>Audited</i> untuk mencatat Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, kegiatan pemeliharaan tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap sehingga seharusnya dicatat sebagai penambah nilai Gedung dan Bangunan serta menimbulkan penyusutan	91.912.322
20	Jurnal Koreksi <i>Audited</i> untuk mencatat Aset Tetap berupa Jalan dan Jembatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, kegiatan pemeliharaan tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap sehingga seharusnya dicatat sebagai penambah nilai Jalan dan Jembatan serta menimbulkan penyusutan	192.454.400
<b>JUMLAH</b>		<b>(84.249.165.191)</b>

Penjelasan hubungan amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi sebagai berikut:

**Tabel 103**  
**Penjelasan Hubungan Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi**

AKUN	URAIAN AKUN	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)	AMORTISASI PERIODE BERJALAN (Rp)	BEBAN AMORTISASI TAHUN 2024 (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g) = (e) - (f)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	692.217.866.817	664.419.698.032	27.798.168.785	40.184.935.861	(12.386.767.076)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	8.209.555.741	3.022.601.394	5.186.954.347	5.191.574.347	(4.620.000)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	58.337.879.914	118.715.258.702	(60.377.378.788)	11.215.000	(60.388.593.788)
<b>JUMLAH</b>		<b>758.765.302.472</b>	<b>786.157.558.128</b>	<b>(27.392.255.656)</b>	<b>45.387.725.208</b>	<b>(72.779.980.864)</b>

Terdapat perbedaan sebesar Rp72.779.980.864,00 antara amortisasi periode berjalan dengan beban amortisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 104**  
**Penjelasan Selisih Amortisasi Periode Berjalan dengan Beban Amortisasi**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Mutasi Kurang Akumulasi Amortisasi yang disebabkan Transaksi Hibah Keluar (BMN yang Dihentikan)	(3.345.568.000)
2	Mutasi Kurang Akumulasi Amortisasi yang disebabkan Transaksi Likuidasi	(18.898.000)
3	Mutasi Kurang Akumulasi Amortisasi yang disebabkan Transaksi Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	(68.486.254.788)
4	Mutasi Kurang Akumulasi Amortisasi yang disebabkan Transaksi Reklasifikasi Keluar	(7.078.995.000)
5	Mutasi Tambah Akumulasi Amortisasi yang disebabkan Transaksi Transfer Masuk	6.130.836.924
6	Mutasi Tambah Akumulasi Amortisasi yang disebabkan Transaksi Transfer Masuk (Henti Guna)	18.898.000
<b>JUMLAH</b>		<b>(72.779.980.864)</b>

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp1.426.661.534*

#### **D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.426.661.534,00 dan Rp1.171.673.142,00.

**Tabel 105**  
**Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	1.424.657.000	1.177.083.201	21,03
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-TP/TGR	2.004.534	(5.410.059)	(137,05)
<b>TOTAL</b>	<b>1.426.661.534</b>	<b>1.171.673.142</b>	<b>21,76</b>

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang timbul sebagai akibat pembentukan cadangan piutang agar piutang dapat disajikan sesuai dengan tingkat ketertagihannya.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.895.780.699,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.694.415.415,00 atau terdapat perubahan sebesar Rp1.201.365.284,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.426.661.534,00 sehingga terdapat perbedaan antara perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp225.296.250,00.

**Tabel 106**  
**Perbandingan Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024**  
**dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH					BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH			
AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AKHIR (PER 31 DESEMBER 2024) (Rp)	SALDO AWAL (PER 31 DESEMBER 2023) (Rp)	PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2024 (Rp)	AKUN	URAIAN AKUN	SALDO AKHIR (PER 31 DESEMBER 2024) (Rp)	PERUBAHAN PENYISIHAN PIUTANG DENGAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e) - (h)
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBPNP	11.043.686.930	9.844.326.180	1.199.360.750	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPNP	1.424.657.000	(225.296.250)
116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Teguhan Tunutan Ganti Rugi	1.503.401	-	1.503.401	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Teguhan Tunutan Perbendaharaan/ Tunutan	-	1.503.401
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tunutan Perbendaharaan/ Tunutan Ganti Rugi	17.850.590.368	17.850.089.235	501.133	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunutan Perbendaharaan/ Tunutan Ganti Rugi	2.004.534	(1.503.401)
	<b>JUMLAH</b>	<b>28.895.780.699</b>	<b>27.694.415.415</b>	<b>1.201.365.284</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>1.426.661.534</b>	<b>(225.296.250)</b>

Penjelasan perbedaan perubahan penyisihan piutang tak tertagih dengan beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp225.296.250,00 sebagai berikut:

**Tabel 107**  
**Penjelasan Selisih Perubahan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Mutasi Kurang Penyisihan Piutang tidak Tertagih dari koreksi Piutang PNBPNP	(225.296.250)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(225.296.250)</b>

*Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp4.350.465.192*

#### **D.10 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 108**  
**Perbandingan Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

KODE AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	NAIK/(TURUN) (%)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.796.591.725	1.605.149.886	11,93
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	144.820.000	612.863.601	(76,37)
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	37.824.050	-	100,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	437.866.795	27.700.000	1.480,75
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	157.509.012	1.450.321.018	(89,14)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	12.018.765.361	4.990.129.679	140,85
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7.000.000	283.926.270	(97,53)
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	22.269.550	17.790.070	25,18
	<b>Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>14.622.646.493</b>	<b>8.987.880.524</b>	<b>62,69</b>
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	10.076.972.716	304.297.318	3.211,55
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	118.375.084	166.840.345	(29,05)
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	76.833.501	31.068	100,00
	<b>Total Beban dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>10.272.181.301</b>	<b>471.168.731</b>	<b>2.080,15</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>4.350.465.192</b>	<b>8.516.711.793</b>	<b>(48,92)</b>

*gus*

Jumlah Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp14.622.646.493,00, sedangkan realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp972.605.329.846,00, diantaranya sebesar Rp15.124.400.191 berasal dari kegiatan non operasional. Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional sebesar Rp14.622.646.493,00 yang diantaranya merupakan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL berupa pekerjaan pengawasan rehabilitasi sarana pendidikan atas pekerjaan Tahun 2015 sebesar Rp7.000.000,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Sulawesi Utara. Dengan demikian terdapat perbedaan penyajian Pendapatan-LO dari kegiatan non operasional (basis akrual) dengan Pendapatan-LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kegiatan non operasional (basis kas) sebesar Rp501.753.698,00 dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 109**  
**Selisih Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional**  
**antara Basis Kas dan Basis Akrual**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.796.591.725	1.796.591.725	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	144.820.000	144.820.000	-
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	37.824.050	37.824.050	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	114.960.000	437.866.795	322.906.795
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yg Lalu	157.509.012	157.509.012	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yg Lalu	12.304.420.736	12.018.765.361	(285.655.375)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yg Lalu	568.274.668	7.000.000	(561.274.668)
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	22.269.550	22.269.550
<b>PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>15.124.400.191</b>	<b>14.622.646.493</b>	<b>(501.753.698)</b>

Penjelasan perbedaan pencatatan realisasi pendapatan dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain berbeda sebesar Rp322.906.795,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
  - a. Pengakuan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2024 sebesar Rp400.906.795,00; dan
  - b. Pelunasan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp78.000.000,00.

2. Pendapatan-LO untuk akun Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL berbeda sebesar Rp285.655.375,00 dengan Pendapatan-LRA disebabkan karena:
  - a. Pelunasan Pendapatan-LO dari penerimaan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pengembalian belanja barang TAYL sebesar Rp252.196.314,00;
  - b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp24.346.000,00 yang disebabkan karena koreksi nilai kurang atas Belanja Barang Pengadaan Pemeliharaan Jalan Kantor;
  - c. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp8.828.222,00 yang disebabkan karena Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas T.A. 2023 yang Dibayarkan pada Tahun 2024; dan
  - d. Jurnal koreksi atas kesalahan pembentukan jurnal balik yang telah direkam pada periode pelaporan Tahun 2024 *unaudited* berupa belanja perjalanan dinas T.A. 2023 yang dikembalikan ke kas negara T.A. 2024 menggunakan akun Penerimaan Kembali sebesar Rp284.839,00.
3. Pengurangan Pendapatan-LO yang berasal dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi atas pengembalian belanja modal TAYL sebesar Rp561.274.668,00.
4. Pendapatan-LO untuk akun Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi sebesar Rp22.269.550,00 berasal dari perbedaan selisih kurs saat pencatatan di modul komitmen (SPP) dan saat pembayaran (SP2D) atas belanja jasa konsultan dengan valuta asing sebesar 75.490,00 USD. Nilai tagihan dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SPP sebesar Rp2.421.643.710,00, sedangkan nilai realisasi dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SP2D sebesar Rp2.399.374.160,00.

Jumlah Beban dari kegiatan non operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp10.272.181.301,00, sedangkan LRA tidak menyajikan kegiatan non operasional, sehingga terdapat perbedaan penyajian Beban dari kegiatan non operasional antara basis kas dan basis akrual dengan rincian akun sebagai berikut:

**Tabel 110**  
**Selisih Realisasi Beban dari Kegiatan Non Operasional**  
**antara Basis Kas dan Basis AkruaI**

KODE AKUN	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	10.076.972.716	10.076.972.716
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	-	118.375.084	118.375.084
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	76.833.501	76.833.501
<b>TOTAL</b>		-	<b>10.272.181.301</b>	<b>10.272.181.301</b>

Penjelasan perbedaan pencatatan beban dari kegiatan non operasional menurut basis kas dan basis akrual sebagai berikut:

1. Beban-LO untuk akun Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp10.076.972.716,00 berasal dari transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan terhadap aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp9.412.473.200,00 dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp664.499.516,00;
2. Beban-LO untuk akun Kerugian Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp118.375.084,00 berasal dari nilai persediaan yang dikeluarkan dari Neraca karena rusak/usang berdasarkan hasil opname fisik sebesar Rp125.869.277,00 dan atas transaksi batal catat rusak/usang sebesar Rp7.494.193,00; dan
3. Beban-LO untuk akun Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp76.833.501,00 berasal dari perbedaan selisih kurs saat pencatatan di modul komitmen (SPP) dan saat pembayaran (SP2D) atas belanja jasa konsultan dengan valuta asing sebesar 26.356,00 USD, 66.712,00 USD, 75.490,00 USD, dan 47.800,00 USD. Nilai tagihan dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SPP sebesar Rp4.611.445.866,00, sedangkan nilai realisasi dengan kurs rupiah yang berlaku saat penerbitan SP2D sebesar Rp4.688.279.367,00.

Terhadap transaksi tersebut tidak terjadi arus kas keluar atau masuk sehingga realisasi belanja tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

*Pos-Pos Luar Biasa*  
*Rp0,00*

#### **D.12 POS-POS LUAR BIASA**

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 nihil.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp16.599.721.292.944*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp16.599.721.292.944,00 dan Rp15.835.604.107.918,00.

*Defisit LO  
Rp3.870.300.342.048*

### **E.2 Surplus (Defisit) - LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp3.870.300.342.048,00 dan Rp3.613.525.599.661,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi Nilai Persediaan  
Rp395.757*

### **E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp395.757,00 dan Rp0,00.

Koreksi Persediaan bertambah sebesar Rp395.757,00 terdapat pada satker IPDN Kampus NTB (683084) yang merupakan koreksi saldo awal Persediaan berdasarkan hasil opname fisik atas 3 buah Kapas 1000 gr dengan total nilai Rp20.757,00 dan 3 buah kasa Hexa dengan total nilai Rp375.000,00 yang diperoleh sebelum Tahun 2024.

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi  
(Rp1.285.557.409)*

### **E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp1.285.557.409,00) dan (Rp19.005.933.912,00). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp1.285.557.409,00) dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp0,00. Penjelasan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

### E.3.2.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Akun ini juga menampung koreksi kuantitas dan/atau jenis barang milik negara, koreksi perhitungan akumulasi penyusutan, dan koreksi nilai aset tetap yang disebabkan adanya pengembalian realisasi belanja modal.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.285.557.409,00) terdapat pada satker-satker dengan rincian pada tabel 111 sebagai berikut:

**Tabel 111**  
**Rincian Saldo Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per Satker sampai dengan 31 Desember 2024**

NO	KODE SATKER	URAIAN SATKER	NOMINAL (Rp)
1	403200	Sekretariat Jenderal	3.946.146
2	448302	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	(466.633.580)
3	677024	IPDN Kampus Sulawesi Selatan	(152.792.613)
4	677045	IPDN Kampus Sumatera Barat	522.125
5	683070	IPDN Kampus Kalimantan Barat	(36.347.612)
6	683084	IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat	(14.541.985)
7	027210	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	7.853.142
8	039729	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	(729.979.176)
9	662766	Ditjen Bina Keuangan Daerah	(19.025.282)
10	403222	BSKDN	303.205
11	027114	PPSDM Regional DI Yogyakarta	(284.366.722)
12	027177	PPSDM Regional Makassar	(18.347.663)
13	506137	PPSDM Regional Bukittinggi	397.421.000
14	506138	Balai Damkar dan Satpol PP	26.431.606
<b>JUMLAH</b>			<b>(1.285.557.409)</b>

Penjelasan terkait Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat pada tabel 112.

**Tabel 112**  
**Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sampai dengan**  
**31 Desember 2024**

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
1	Koreksi tambah Peralatan dan Mesin dalam rangka penggabungan beberapa NUP yang diantaranya tercatat sebagai ekstrakomptabel perolehan TAYL pada satker Setjen	1.864.800
2	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi penggabungan NUP yang sebelumnya tercatat sebagai ekstrakomptabel perolehan TAYL pada satker Setjen	(559.435)
3	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Setjen	2.640.781
4	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Jatinangor	11.857.537
5	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai berkurang Gedung dan Bangunan karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Jatinangor	5.272.960
6	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi ATR menjadi Gedung dan Bangunan pada satker IPDN Jatinangor	(483.764.077)
7	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai bertambah Gedung dan Bangunan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker IPDN Kampus Sulawesi Selatan	(56.592.613)
8	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai bertambah Jalan dan Jembatan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker IPDN Kampus Sulawesi Selatan	(96.200.000)
9	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai berkurang Gedung dan Bangunan karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker IPDN Kampus Sumatera Barat	522.125
10	Koreksi Nilai berkurang KDP, Gedung dan Bangunan serta Jaringan atas pengembalian belanja modal yang disetor ke kas negara pada tahun anggaran yang lalu pada satker IPDN Kampus Kalbar	(37.999.999)

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
11	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan serta Akumulasi Penyusutan Jaringan yang berasal dari koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal yang disetor pada tahun anggaran yang lalu sebesar Rp37.999.999,00 dan tahun anggaran berjalan sebesar Rp25.395.974,00 pada satker IPDN Kampus Kalbar	1.652.387
12	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai bertambah Gedung dan Bangunan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat	(7.756.325)
13	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Irigasi yang disebabkan koreksi pencatatan nilai bertambah Irigasi atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat	(6.785.660)
14	Koreksi kurang Peralatan dan Mesin yang disebabkan pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Polpum dimana beberapa barang yang semula dicatat sebagai Peralatan dan Mesin direklasifikasi menjadi ekstrakomptabel karena nilai perolehannya dibawah nilai batas kapitalisasi	(1.215.500)
15	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang disebabkan pencatatan nilai berkurang karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Polpum	9.068.642
16	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai bertambah Jalan dan Jembatan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker Ditjen Bina Bangda	(60.028.800)
17	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai berkurang Gedung dan Bangunan karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Bangda	33.624
18	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan yang disebabkan penggabungan menjadi 1 NUP atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran berjalan melalui menu koreksi pencatatan nilai bertambah pada satker Ditjen Bina Bangda	(866.984.000)
19	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan yang disebabkan koreksi pencatatan berkurang karena realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran berjalan tidak memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker Ditjen Bina Bangda sehingga diakui sebagai Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	197.000.000

NO	URAIAN TRANSAKSI	NOMINAL (Rp)
20	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena adanya reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk Peralatan dan Mesin untuk melakukan koreksi kode barang yang memiliki masa manfaat yang berbeda pada satker Ditjen Keuda	(19.025.282)
21	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai berkurang Gedung dan Bangunan karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker BSKDN	303.205
22	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai bertambah Gedung dan Bangunan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker PPSDM Regional DI Yogyakarta	(91.912.322)
23	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai bertambah Jalan dan Jembatan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker PPSDM Regional DI Yogyakarta	(192.454.400)
24	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai bertambah Gedung dan Bangunan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker PPSDM Regional Makassar	(10.878.563)
25	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai bertambah Jalan dan Jembatan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker PPSDM Regional Makassar	(7.469.100)
26	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai bertambah Jalan dan Jembatan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada satker Ditjen Bina Bangda	397.421.000
27	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang disebabkan koreksi pencatatan nilai berkurang Gedung dan Bangunan karena adanya pengembalian belanja modal TAYL pada satker Ditjen Bina Bangda	2.085.606
28	Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan yang disebabkan penggabungan menjadi 1 NUP atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran berjalan melalui menu koreksi pencatatan nilai bertambah pada satker Ditjen Bina Bangda	24.346.000
<b>JUMLAH</b>		<b>(1.285.557.409)</b>

Rincian pada **Lampiran XXIX** (Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi).

*Koreksi Lain-Lain  
(Rp151.375.250)*

### **E.3.3 Koreksi Lain - Lain**

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi atas akun tersebut untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 sebesar (Rp151.375.250,00) dan (Rp235.572.293,00).

Koreksi Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp151.375.250,00) terdapat pada satker IPDN Jatinangor (448302) sebesar (Rp149.803.750,00), IPDN Kampus NTB (683084) sebesar Rp3.734.500,00, dan Balai Besar Pemerintahan Desa Malang (028830) sebesar (Rp5.306.000,00).

Rincian Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat pada tabel 113.

**Tabel 113**

**Rincian Koreksi Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN TRANSAKSI</b>	<b>NOMINAL (Rp)</b>
1	Koreksi kurang Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satker IPDN Jatinangor yang disebabkan kesalahan pencatatan piutang mahasiswa yang berstatus tidak aktif dan dibatalkan sebagai mahasiswa sebesar Rp337.600.000,00, kelebihan pencatatan piutang sebesar Rp30.750.000,00, kekurangan pencatatan pembayaran biaya pendidikan karena debitur baru dapat teridentifikasi pada Tahun 2024 sebesar Rp2.250.000,00, dan debitur meninggal dunia sebesar Rp4.500.000,00	(375.100.000)
2	Koreksi kurang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBPN pada satker IPDN Jatinangor yang disebabkan adanya koreksi kurang Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	225.296.250
3	Koreksi kurang Pendapatan Pendidikan Lainnya berupa denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan yang seharusnya diakui sebagai Pendapatan-LO Tahun 2023 pada satker IPDN Kampus NTB	3.734.500
4	Koreksi tambah Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, yaitu sewa Gedung Koperasi pada satker Balai Besar Pemdes Malang karena perubahan perhitungan Pendapatan Sewa Diterima di Muka Tahun 2023 dan 2024 yang disebabkan adanya kenaikan tarif sewa	(5.306.000)
<b>JUMLAH</b>		<b>(151.375.250)</b>

Rincian pada **Lampiran XXX** (Rincian Koreksi Lain-Lain)

#### E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.177.797.457.170,00 dan Rp4.396.884.290.892,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat pada tabel 114.

**Tabel 114**  
**Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2024**

Akun	Uraian	2024 (Rp)
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.933.841.606.712
313121	Diterima dari Entitas Lain	(972.605.329.846)
313211	Transfer Keluar	(2.726.175.200.370)
313221	Transfer Masuk	2.730.157.635.550
391131	Pengesahan Hibah Langsung	209.764.313.738
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(445.956.600)
391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	3.260.387.986
<b>JUMLAH</b>		<b>4.177.797.457.170</b>

##### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (972.605.329.846,00) sedangkan DKEL sebesar Rp4.933.841.606.712,00.

##### E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.730.157.635.550,00 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal (403200), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302), IPDN Kampus Sumatera Barat (677045), Inspektorat Jenderal (027203), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (027210), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi (506137), serta Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (506138).

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.726.175.200.370,00) terdapat satker IPDN Kampus Jakarta (352593), IPDN Kampus Sumatera Barat (677045), Ditjen Bina Pemdes (027753), Ditjen Otonomi Daerah (621892), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (403231), Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung (403216), dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi (506137).

Penjelasan selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk secara neto dan absolut untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

1. Perbedaan saldo pada Neraca Percobaan antara akun Transfer Keluar sebesar (Rp2.718.688.698.245,00) dengan Transfer Masuk sebesar Rp2.722.671.133.425,00 menyebabkan terdapat selisih secara neto sebesar Rp3.982.435.180,00. Selisih tersebut berasal dari:
  - a. Transfer masuk berupa Aset Tetap Renovasi sebesar Rp1.938.822.874,00 pada satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Prasarana Strategis (033.05.631097) Kementerian PUPR. Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Kementerian PUPR, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.
  - b. Transfer masuk berupa 6 (enam) unit *Software* sebesar Rp8.174.449.230,00 dan Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar (Rp6.130.836.924,00) pada satker Ditjen Polpum (027210) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (059.04.664262) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.
2. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk diperoleh melalui pengurangan kolom Transfer Keluar dan Transfer Masuk. Selanjutnya, hasil pengurangan yang bernilai negatif diabsolutkan atau hasilnya dibuat positif. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk secara absolut sebesar Rp59.492.892,00. Selisih tersebut berasal dari pemeliharaan gedung dan bangunan milik Sekretariat Jenderal oleh satker Ditjen Otonomi Daerah sebesar Rp29.746.446,00. Pada saat diserahterimakan, Ditjen Otonomi Daerah mencatat Transfer Keluar ATR sebesar Rp29.746.446,00 dan Sekretariat Jenderal mencatat transfer masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.746.446,00.

Rincian transaksi transfer masuk dan transfer keluar pada **Lampiran XXXI** (Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk).

### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp209.764.313.738,00 yang terdapat pada satker Setjen (403200), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302), IPDN Kampus Sulawesi Utara (677010), IPDN Kampus Sulsel (677024), IPDN Kampus Kalimantan Barat (683070), Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (027486), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (039729), Ditjen Otonomi Daerah (621892), Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (634082), dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (662766). Hibah langsung tersebut sudah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp445.956.600,00) terdapat pada satker Ditjen Bina Pembangunan Daerah (039729) sebesar (Rp440.749.600,00) dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (634082) sebesar (Rp5.207.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengesahan pengembalian hibah langsung pada satker Ditjen Bina Bangda (039729) yang merupakan pengembalian atas Hibah Langsung dalam bentuk uang sebesar Rp440.749.600,00 yang berasal dari:
  - a. UNFPA Memberikan hibah langsung dalam bentuk uang dalam rangka *Implementation of UNFPA-Funded Workplans Relating to the 2021-2025 UNFPA Country Programme for Republic Indonesia* sebesar Rp1.942.815.000,00 dengan Nomor Register 2TCK92FA. Atas hibah ini juga terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp3.878.400,00; dan
  - b. UNICEF memberikan hibah langsung dalam bentuk uang dalam rangka Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025 Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri sebesar Rp6.469.641.735,00 dengan Nomor Register 2C7EJQHA. Atas hibah ini juga terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp436.871.200,00.

2. Pengesahan pengembalian hibah langsung pada satker Ditjen Kependudukan dan pencatatan Sipil (634082) yang merupakan pengembalian atas Hibah Langsung dalam bentuk uang sebesar Rp5.207.000,00 yang berasal dari:
- a. Pemerintah Kota Balikpapan memberikan hibah langsung memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 156.157 keping sebesar Rp1.590.000.000,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp1.608.000,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp1.588.392.000,00 dengan Nomor Register 236HGSXA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 470/126/Disdukcapil dan 000.3.3.2/536/SES tanggal 16 Januari 2024;
  - b. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 30.838 keping sebesar Rp314.000.000,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp3.449.000,00 sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp310.551.000,00 dengan Nomor Register 2JFEPG9A. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor B.800/64/DUKCAPIL/2024 dan 000.3.3.2/550/SES tanggal 16 Januari 2024; dan
  - c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan hibah langsung dalam bentuk uang berupa penyediaan blangko KTP-*el* sebanyak 5.000.000 keping sebesar Rp50.910.150.000,00 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp150.000,00, sehingga hibah langsung yang diterima sebesar Rp50.910.000.000,00 dengan Nomor Register 21Q5D7VA. Hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 4574/UD.08.03 dan 000.3.3.2/10002/SES tanggal 24 Juli 2024.

#### **E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu**

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung yang diterima pada Tahun 2024 dan/tahun-tahun sebelumnya namun baru disahkan pada tahun anggaran berjalan. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.260.387.986,00 terdapat pada satker Ditjen Otonomi Daerah (621892) sebesar Rp2.636.191.053,00, dan satker Ditjen Bina Keuangan Daerah (662766) sebesar Rp624.196.933,00.

Penjelasan Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Ditjen Otonomi Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk jasa sebesar Rp2.636.191.053,00 dari USAID dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat yang dituangkan dalam BAST Hibah Jasa dari USAID kepada Ditjen Otonomi Daerah Nomor 95/USAID-INA/BASTService/DRG/2022 tanggal 13 Februari 2023. Nomor Register Hibah 2F5GEXNA.
2. Ditjen Bina Keuangan Daerah menerima hibah langsung dalam bentuk jasa sebesar Rp624.196.933,00 dari USAID dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat yang dituangkan dalam BAST Hibah Jasa dari USAID kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Nomor 94/USAID-INA/BASTService/DRG/2022 tanggal 8 Februari 2023. Nomor Register Hibah 2F5GEXNA.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp16.905.781.871.164*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp16.905.781.871.164,00 dan Rp16.599.721.292.944,00.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada Kemendagri.

### **F.2 CATATAN PENTING LAINNYA**

1. Terdapat Aset Tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak yang sudah tidak berhak menghuni/pihak lain yaitu:
  - a. Tanah Balai PMD Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Melati Kab. Sleman Yogyakarta yang di atasnya berdiri satu unit rumah ditempati oleh masyarakat eks Timor-Timur tanpa didukung perjanjian pinjam pakai. Langkah awal penyelesaian permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan pengamanan secara fisik berupa pemasangan papan kepemilikan Kemendagri di depan Asrama Eks Timor-Timur.
  - b. Tanah seluas 258 m<sup>2</sup> beserta bangunan seluas 45 m<sup>2</sup> senilai Rp66.273.500,00 yang terletak di lingkungan perkantoran Ditjen Bina Pemdes dan awalnya merupakan kantor Ditjen Bina Pemdes dikuasai oleh pensiunan pegawai Ditjen Bina Pemdes dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4304/Kelurahan Pejaten Barat, tanggal 28 Maret 2022. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/4853/SJ tanggal 22 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hal Pembatalan atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4304/Kelurahan Pejaten Barat, tanggal 28 Maret 2022, seluas 258 m<sup>2</sup>. Penyelesaian permasalahan tersebut masih menunggu keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. DKI Jakarta atas permohonan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pembatalan Sertifikat Hak Milik dimaksud.
  - c. Terdapat hunian warga (semi permanen) yang dibangun tanpa izin di atas sebidang tanah eks-rumah dinas milik Setjen yang terletak di Jalan Danau Indah XVI Blok B-6 Nomor 27 s.d. 30 Sunter Jaya. Kepala Biro Umum memberikan izin kepada petugas penjaga untuk menempati tanah tersebut sekaligus untuk mengawasi aset tanah Kemendagri berdasarkan Surat Izin Penghunian Nomor 012.7/4356/BU tanggal 2 Agustus 2019. Namun demikian, izin yang diberikan kepada petugas penjaga tidak termasuk pemberian izin dan/atau kewenangan kepada petugas penjaga untuk mengelola tanah maupun pembangunan hunian semi permanen untuk warga lainnya.
2. Terdapat satu bidang tanah milik Kemendagri yang masih bersertifikat atas nama PT. SAC Nusantara. Tanah tersebut terletak di Komplek Perumahan SAC Nusantara Blok I Kav. Nomor 34 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kemendagri telah mendirikan pagar sebagai upaya pengamanan dan memproses balik nama sertipikat tanah menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Dalam Negeri.
3. Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti kebijakan pencatatan Barang Milik Negara pada satker inaktif bersaldo yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun

2021 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-286/PB/2021 tanggal 21 November 2021 hal Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo (SIB). Kebijakan tersebut berupa penyelesaian hingga tuntas proses likuidasi Satker Inaktif Bersaldo (SIB) menjadi Satker Inaktif Tidak Bersaldo (SITB). Satker inaktif bersaldo dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun 2021, dilikuidasi dengan cara mengalihkan aset satker inaktif bersaldo tersebut ke satker pusat pada Unit Eselon I yang menjadi penanggung jawab proses likuidasi.

Rincian jumlah satker dan saldo aset berupa barang milik negara yang dialihkan ke satker pusat per Unit Eselon I pada Tahun 2021 dan progres penyelesaian aset tersebut selama Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 115**  
**Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif yang Dialihkan Saldo Asetnya ke Satker Pusat Tahun 2021 dan Progres Penyelesaiannya pada Tahun 2022**

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2021	Aset Tetap per 31 Desember 2021		Aset Lainnya per 31 Desember 2021	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	25	23.449.827.140	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	348	14.722.362.945	2.793.319.365	(2.793.319.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	97	191.707.612.750	597.752.000	(597.752.000)	17.881.146.014	(17.881.146.014)
4	Ditjen Otda	21	10.937.697.046	85.208.189.815	(85.208.189.815)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
<b>Jumlah</b>		<b>491</b>	<b>240.817.499.881</b>	<b>92.834.265.629</b>	<b>(92.834.265.629)</b>	<b>34.420.200.991</b>	<b>(34.420.200.991)</b>
No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2022	Aset Tetap per 31 Desember 2022		Aset Lainnya per 31 Desember 2022	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	25	23.449.827.140	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	348	14.722.362.945	2.793.319.365	(2.793.319.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	78	160.453.206.096	-	-	16.608.103.564	(16.608.103.564)
4	Ditjen Otda	21	10.937.697.046	85.208.189.815	(85.208.189.815)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
<b>Jumlah</b>		<b>472</b>	<b>209.563.093.227</b>	<b>92.236.513.629</b>	<b>(92.236.513.629)</b>	<b>33.147.158.541</b>	<b>(33.147.158.541)</b>
<b>Perubahan</b>		<b>(19)</b>	<b>(31.254.406.654)</b>	<b>(597.752.000)</b>	<b>597.752.000</b>	<b>(1.273.042.450)</b>	<b>1.273.042.450</b>

Penyelesaian aset tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya.

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 25 Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan, maka terhadap persediaan yang tidak dikuasai atau persediaan yang sudah diserahkan namun secara administrasi masih belum selesai, pencatatan persediaan tersebut dipindahkan dari Laporan Barang Persediaan ke Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai. Pencatatan tersebut diakui apabila dokumen serah terima atau dokumen sumber lainnya yang dapat dipersamakan menyatakan bahwa telah dilakukan penyerahan persediaan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk menyelesaikan aset eks. satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama tersebut. Selama periode pelaporan Tahun 2023, aset eks. satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang berasal dari 17 satker telah dieliminasi dari neraca dengan nilai persediaan sebesar Rp29.207.138.507,00, Aset Tetap sebesar Rp20.793.696.021,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp20.793.696.021,00) dan Aset Lainnya sebesar Rp1.582.358.985,00 dengan akumulasi penyusutan/amortisasi sebesar (Rp1.582.358.985,00).

Progres penyelesaian aset eks. satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama selama Tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel 116**  
**Rekapitulasi Progres Penyelesaiannya Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama per 31 Desember 2024**

No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2023	Aset Tetap per 31 Desember 2023		Aset Lainnya per 31 Desember 2023	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	22	19.370.862.156	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	342	14.141.386.945	2.763.654.365	(2.763.654.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	73	143.831.099.395	-	-	15.025.744.579	(15.025.744.579)
4	Ditjen Otda	18	3.012.606.224	64.444.158.794	(64.444.158.794)	16.539.054.977	(16.539.054.977)
	<b>Jumlah</b>	<b>455</b>	<b>180.355.954.720</b>	<b>71.442.817.608</b>	<b>(71.442.817.608)</b>	<b>31.564.799.556</b>	<b>(31.564.799.556)</b>
No	Eselon I	Jlh Satker	Saldo Persediaan per 31 Desember 2024	Aset Tetap per 31 Desember 2024		Aset Lainnya per 31 Desember 2024	
				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Ditjen Adwil	20	18.561.387.331	4.235.004.449	(4.235.004.449)	-	-
2	Ditjen Pemdes	341	14.141.386.945	2.753.489.365	(2.753.489.365)	-	-
3	Ditjen Bangda	60	115.408.242.322	-	-	11.325.460.879	(11.325.460.879)
4	Ditjen Otda	13	1.368.549.163	33.088.546.155	(33.088.546.155)	13.193.486.977	(13.193.486.977)
	<b>Jumlah</b>	<b>434</b>	<b>149.479.565.761</b>	<b>40.077.039.969</b>	<b>(40.077.039.969)</b>	<b>24.518.947.856</b>	<b>(24.518.947.856)</b>
	<b>Perubahan</b>	<b>(21)</b>	<b>(30.876.388.959)</b>	<b>(31.365.777.639)</b>	<b>31.365.777.639</b>	<b>(7.045.851.700)</b>	<b>7.045.851.700</b>

Sampai dengan 31 Desember 2024, Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan aset yang disajikan pada akun Persediaan sebesar Rp30.876.388.959,00, Aset Tetap sebesar Rp31.365.777.639,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp31.365.777.639,00) dan Aset Lainnya sebesar Rp7.045.851.700,00 dengan akumulasi penyusutan/amortisasi sebesar (Rp7.045.851.700,00). Penyelesaian aset tersebut diantaranya berupa reklasifikasi saldo persediaan sebesar Rp19.476.931.843,00 ke daftar persediaan yang tidak dikuasai.

Rincian aset eks. Aset Eks. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran XXXII.

- Indikator kualitas data laporan keuangan yang perlu dijelaskan berdasarkan menu-menu pada Aplikasi MonSAKTI disajikan pada lampiran Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB (Lampiran XXXIII).
- Daftar Rekening Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 disusun berdasarkan data Aplikasi Sprint dan hasil konfirmasi dengan Unit Eselon I terkait. Daftar rekening tersebut disajikan pada Lampiran XXXIV.

## G. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan. Penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan dan pengungkapan lainnya diperoleh berdasarkan dokumen sumber dan/atau laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) di lingkungan Kemendagri yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang diberikan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan, semoga tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pengguna laporan keuangan dapat tercapai.

Jakarta, Mei 2025



**MENTERI DALAM NEGERI**

**MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**



**LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI  
PENDUKUNG CALK:**



# LAMPIRAN I

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	19.562.823.000	22.443.047.429	-	22.443.047.429	114,72
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	1.164.974.000	1.973.224.914	-	1.973.224.914	169,38
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	KP	-	850.961.659	-	850.961.659	0,00
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	-	212.822.477	-	212.822.477	0,00
01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	KD	-	552.942.466	-	552.942.466	0,00
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	-	953.550	-	953.550	0,00
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	-	182.216.716	-	182.216.716	0,00
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	-	11.351.421	-	11.351.421	0,00
01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	KD	-	1.227.658.097	-	1.227.658.097	0,00
		<b>KP : .....</b>		<b>20.727.797.000</b>	<b>25.267.234.002</b>	<b>-</b>	<b>25.267.234.002</b>	<b>121,90</b>
		<b>KD : .....</b>		<b>-</b>	<b>2.187.944.727</b>	<b>-</b>	<b>2.187.944.727</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Setjen : .....</b>		<b>20.727.797.000</b>	<b>27.455.178.729</b>	<b>-</b>	<b>27.455.178.729</b>	<b>132,46</b>
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	KP	-	302.113.155	-	302.113.155	0,00
		<b>KP : .....</b>		<b>-</b>	<b>302.113.155</b>	<b>-</b>	<b>302.113.155</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Itjen : .....</b>		<b>-</b>	<b>302.113.155</b>	<b>-</b>	<b>302.113.155</b>	<b>0,00</b>
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	-	141.897.551	-	141.897.551	0,00
		<b>KP : .....</b>		<b>-</b>	<b>141.897.551</b>	<b>-</b>	<b>141.897.551</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Ditjen Polpum : .....</b>		<b>-</b>	<b>141.897.551</b>	<b>-</b>	<b>141.897.551</b>	<b>0,00</b>

gaf

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	KP	-	807.064.006	-	807.064.006	0,00
04	484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	DK	-	3.580.000	-	3.580.000	0,00
04	249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	DK	-	57.620	-	57.620	0,00
		<b>KP : .....</b>		-	<b>807.064.006</b>	-	<b>807.064.006</b>	<b>0,00</b>
		<b>DK : .....</b>		-	<b>3.637.620</b>	-	<b>3.637.620</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Ditjen Bina Adwil : .....</b>		-	<b>810.701.626</b>	-	<b>810.701.626</b>	<b>0,00</b>
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	KP	-	2.832.179.348	-	2.832.179.348	0,00
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	KD	178.921.000	120.940.800	-	120.940.800	67,59
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	KD	89.945.000	373.589.252	-	373.589.252	415,35
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	583.744.000	983.334.115	-	983.334.115	168,45
		<b>KP : .....</b>		-	<b>2.832.179.348</b>	-	<b>2.832.179.348</b>	<b>0,00</b>
		<b>KD : .....</b>		<b>852.610.000</b>	<b>1.477.864.167</b>	-	<b>1.477.864.167</b>	<b>173,33</b>
		<b>Total Ditjen Bina Pemdes : .....</b>		<b>852.610.000</b>	<b>4.310.043.515</b>	-	<b>4.310.043.515</b>	<b>505,51</b>
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	450.000.000	3.702.959.209	-	3.702.959.209	822,88
		<b>KP : .....</b>		<b>450.000.000</b>	<b>3.702.959.209</b>	-	<b>3.702.959.209</b>	<b>822,88</b>
		<b>Total Ditjen Bina Bangda : .....</b>		<b>450.000.000</b>	<b>3.702.959.209</b>	-	<b>3.702.959.209</b>	<b>822,88</b>
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	KP	-	61.401.202	-	61.401.202	0,00
		<b>KP : .....</b>		-	<b>61.401.202</b>	-	<b>61.401.202</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Ditjen Otda : .....</b>		-	<b>61.401.202</b>	-	<b>61.401.202</b>	<b>0,00</b>

gub

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

ESELON I	SATKER	NAMA SATKER	JK	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	% REALISASI PENDAPATAN
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KP	636.404.679.000	864.477.683.755	-	864.477.683.755	135,84
		KP : .....		<b>636.404.679.000</b>	<b>864.477.683.755</b>	-	<b>864.477.683.755</b>	<b>135,84</b>
		Total Ditjen Dukcapil : .....		<b>636.404.679.000</b>	<b>864.477.683.755</b>	-	<b>864.477.683.755</b>	<b>135,84</b>
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	-	118.018.368	-	118.018.368	0,00
		KP : .....		-	<b>118.018.368</b>	-	<b>118.018.368</b>	<b>0,00</b>
		Total Ditjen Bina Keuda : .....		-	<b>118.018.368</b>	-	<b>118.018.368</b>	<b>0,00</b>
11	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	KP	-	34.288.826	-	34.288.826	0,00
		KP : .....		-	<b>34.288.826</b>	-	<b>34.288.826</b>	<b>0,00</b>
		Total BSKDN : .....		-	<b>34.288.826</b>	-	<b>34.288.826</b>	<b>0,00</b>
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KP	24.401.816.000	25.576.857.947	-	25.576.857.947	104,82
12	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	10.194.765.000	10.605.778.770	-	10.605.778.770	104,03
12	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	KD	12.227.584.000	12.459.190.294	-	12.459.190.294	101,89
12	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	10.153.568.000	11.132.147.996	-	11.132.147.996	109,64
12	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	KD	10.357.000.000	10.581.045.821	34.000.000	10.547.045.821	102,16
12	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	630.000.000	870.023.082	-	870.023.082	138,10
		KP : .....		<b>24.401.816.000</b>	<b>25.576.857.947</b>	-	<b>25.576.857.947</b>	<b>104,82</b>
		KD : .....		<b>43.562.917.000</b>	<b>45.648.185.963</b>	<b>34.000.000</b>	<b>45.614.185.963</b>	<b>104,79</b>
		Total BPSDM : .....		<b>67.964.733.000</b>	<b>71.225.043.910</b>	<b>34.000.000</b>	<b>71.191.043.910</b>	<b>104,80</b>
		KP : .....		<b>681.984.292.000</b>	<b>923.321.697.369</b>	-	<b>923.321.697.369</b>	<b>135,39</b>
		KD : .....		<b>44.415.527.000</b>	<b>49.313.994.857</b>	<b>34.000.000</b>	<b>49.279.994.857</b>	<b>111,03</b>
		DK : .....		-	<b>3.637.620</b>	-	<b>3.637.620</b>	<b>0,00</b>
		Total Kementerian : .....		<b>726.399.819.000</b>	<b>972.639.329.846</b>	<b>34.000.000</b>	<b>972.605.329.846</b>	<b>133,90</b>



## LAMPIRAN II

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	567.297.544.000	663.728.823.000	657.032.553.004	557.210.294	656.475.342.710	98,99	7.253.480.290
01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	427.873.283.000	433.452.626.000	433.133.840.375	238.713.333	432.895.127.042	99,93	557.498.958
01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	67.532.578.000	76.268.173.000	76.116.151.383	392.400.154	75.723.751.229	99,80	544.421.771
01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	28.896.533.000	26.652.547.000	26.636.924.752	34.454	26.636.890.298	99,94	15.656.702
01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	32.855.243.000	30.908.688.000	30.908.068.918	22.466.566	30.885.602.352	100,00	23.085.648
01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	24.646.457.000	23.887.688.000	23.870.651.348	1.182	23.870.650.166	99,93	17.037.834
01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	30.027.005.000	27.509.409.000	27.509.188.148	371.600	27.508.816.548	100,00	592.452
01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	31.494.444.000	28.554.535.000	28.211.225.041	3.411.524	28.207.813.517	98,80	346.721.483
01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	32.885.290.000	31.638.268.000	31.638.182.933	1.225	31.638.181.708	100,00	86.292
	KP : .....			<b>1.062.703.405.000</b>	<b>1.173.449.622.000</b>	<b>1.166.282.544.762</b>	<b>1.188.323.781</b>	<b>1.165.094.220.981</b>	<b>99,39</b>	<b>8.355.401.019</b>
	KD : .....			<b>180.804.972.000</b>	<b>169.151.135.000</b>	<b>168.774.241.140</b>	<b>26.286.551</b>	<b>168.747.954.589</b>	<b>99,78</b>	<b>403.180.411</b>
	Total Setjen : .....			<b>1.243.508.377.000</b>	<b>1.342.600.757.000</b>	<b>1.335.056.785.902</b>	<b>1.214.610.332</b>	<b>1.333.842.175.570</b>	<b>99,44</b>	<b>8.758.581.430</b>
02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	81.036.698.000	88.732.681.000	88.261.883.714	62.222.712	88.199.661.002	99,47	533.019.998
	KP : .....			<b>81.036.698.000</b>	<b>88.732.681.000</b>	<b>88.261.883.714</b>	<b>62.222.712</b>	<b>88.199.661.002</b>	<b>99,47</b>	<b>533.019.998</b>
	Total Itjen : .....			<b>81.036.698.000</b>	<b>88.732.681.000</b>	<b>88.261.883.714</b>	<b>62.222.712</b>	<b>88.199.661.002</b>	<b>99,47</b>	<b>533.019.998</b>
03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	223.062.368.000	221.138.641.000	220.430.489.194	17.948.093	220.412.541.101	99,68	726.099.899
	KP : .....			<b>223.062.368.000</b>	<b>221.138.641.000</b>	<b>220.430.489.194</b>	<b>17.948.093</b>	<b>220.412.541.101</b>	<b>99,68</b>	<b>726.099.899</b>
	Total Ditjen Polpum : .....			<b>223.062.368.000</b>	<b>221.138.641.000</b>	<b>220.430.489.194</b>	<b>17.948.093</b>	<b>220.412.541.101</b>	<b>99,68</b>	<b>726.099.899</b>
04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	117.610.770.000	176.973.175.000	164.466.731.294	113.486.633	164.353.244.661	92,93	12.619.930.339
04	019080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	301.425.000	226.279.000	224.601.519	-	224.601.519	99,26	1.677.481
04	029134	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	2.177.100.000	1.491.577.000	1.373.550.942	1.953.500	1.371.597.442	92,09	119.979.558
04	039667	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1.706.817.000	1.273.638.000	1.234.335.307	182.000	1.234.153.307	96,91	39.484.693
04	049061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	1.030.914.000	682.848.000	682.525.400	-	682.525.400	99,95	322.600
04	059663	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	809.379.000	-	-	-	-	-	-
04	069084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	2.204.751.000	1.700.065.000	1.579.383.127	-	1.579.383.127	92,90	120.681.873
04	079078	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	1.578.732.000	1.180.436.000	1.175.269.386	3.502.936	1.171.766.450	99,56	8.669.550
04	089106	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1.435.373.000	921.996.000	846.306.831	-	846.306.831	91,79	75.689.169
04	099438	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	1.327.327.000	1.233.126.000	1.230.538.554	-	1.230.538.554	99,79	2.587.446
04	109074	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	1.240.222.000	964.685.000	964.667.484	-	964.667.484	100,00	17.516

905

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	119082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.747.178.000	1.205.639.000	1.203.371.300	-	1.203.371.300	99,81	2.267.700
04	129074	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1.392.278.000	1.010.686.000	988.234.179	-	988.234.179	97,78	22.451.821
04	129098	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	131.707.000	81.086.000	81.086.000	-	81.086.000	100,00	-
04	139078	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.408.422.000	1.308.465.000	1.304.049.335	-	1.304.049.335	99,66	4.415.665
04	149072	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.510.832.000	1.048.128.000	1.008.595.750	-	1.008.595.750	96,23	39.532.250
04	149130	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	146.133.000	89.967.000	89.966.200	-	89.966.200	100,00	800
04	159071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.164.721.000	899.461.000	871.772.544	-	871.772.544	96,92	27.688.456
04	169185	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	587.087.000	-	-	-	-	-	-
04	179088	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	224.067.000	137.948.000	137.926.774	-	137.926.774	99,98	21.226
04	179223	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2.205.920.000	2.299.364.000	2.299.230.191	-	2.299.230.191	99,99	133.809
04	189087	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.598.324.000	1.210.613.000	1.208.124.874	-	1.208.124.874	99,79	2.488.126
04	199080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.893.662.000	1.420.049.000	1.363.020.130	-	1.363.020.130	95,98	57.028.870
04	209071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.435.589.000	939.891.000	676.094.026	-	676.094.026	71,93	263.796.974
04	209095	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	246.449.000	151.727.000	151.727.000	-	151.727.000	100,00	-
04	219062	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	1.570.723.000	1.409.858.000	1.421.011.129	40.522.091	1.380.489.038	100,79	29.368.962
04	229068	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	1.272.025.000	1.157.518.000	1.156.325.497	-	1.156.325.497	99,90	1.192.503
04	239236	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.507.775.000	1.400.767.000	1.391.857.382	18.692.579	1.373.164.803	99,36	27.602.197
04	249136	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2.234.497.000	2.075.913.000	2.069.998.724	-	2.069.998.724	99,72	5.914.276
04	249174	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	262.006.000	161.305.000	161.247.380	-	161.247.380	99,96	57.620
04	250048	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	969.652.000	546.999.000	502.955.260	-	502.955.260	91,95	44.043.740
04	259084	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	195.905.000	19.530.000	-	-	-	-	19.530.000
04	269093	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	1.180.416.000	847.893.000	842.992.046	-	842.992.046	99,42	4.900.954
04	289095	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	162.196.000	79.725.000	77.492.000	-	77.492.000	97,20	2.233.000
04	289174	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	1.705.997.000	1.705.973.000	1.665.394.600	-	1.665.394.600	97,62	40.578.400
04	299348	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	753.436.000	510.336.000	466.699.300	-	466.699.300	91,45	43.636.700
04	309148	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	1.289.266.000	937.414.000	923.283.183	-	923.283.183	98,49	14.130.817
04	319061	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSIGORONTALO	1.051.906.000	977.252.000	976.490.000	-	976.490.000	99,92	762.000
04	329116	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	979.217.000	686.638.000	683.991.817	-	683.991.817	99,61	2.646.183
04	339161	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	796.519.000	70.110.000	70.110.000	-	70.110.000	100,00	-

90/6

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	340166	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	1.157.739.000	1.075.573.000	1.069.678.106	-	1.069.678.106	99,45	5.894.894
04	349011	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	126.154.000	77.667.000	76.935.600	-	76.935.600	99,06	731.400
04	359002	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	135.567.000	83.462.000	82.662.353	-	82.662.353	99,04	799.647
04	417697	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.108.072.000	840.613.000	822.483.518	-	822.483.518	97,84	18.129.482
04	433316	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	246.839.000	87.184.000	87.144.408	-	87.144.408	99,95	39.592
04	433317	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	117.667.000	33.549.000	30.320.000	-	30.320.000	90,38	3.229.000
04	433318	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	101.509.000	33.115.000	32.730.000	-	32.730.000	98,84	385.000
04	433341	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	156.680.000	44.673.000	43.410.000	-	43.410.000	97,17	1.263.000
04	433342	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	194.430.000	119.701.000	118.567.190	-	118.567.190	99,05	1.133.810
04	433343	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	123.855.000	59.728.000	59.691.200	-	59.691.200	99,94	36.800
04	433344	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	153.095.000	94.253.000	94.199.450	-	94.199.450	99,94	53.550
04	433345	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	107.066.000	65.916.000	65.158.000	-	65.158.000	98,85	758.000
04	433347	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	125.786.000	35.864.000	30.572.600	-	30.572.600	85,25	5.291.400
04	433348	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	155.047.000	95.455.000	95.455.000	-	95.455.000	100,00	-
04	433349	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	133.885.000	82.427.000	82.078.980	-	82.078.980	99,58	348.020
04	433350	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	188.614.000	116.121.000	116.121.000	-	116.121.000	100,00	-
04	433351	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	192.756.000	118.671.000	118.670.000	-	118.670.000	100,00	1.000
04	433352	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	152.225.000	77.252.000	77.130.000	-	77.130.000	99,84	122.000
04	433353	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	157.005.000	96.661.000	96.613.260	-	96.613.260	99,95	47.740
04	484101	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	261.368.000	160.912.000	160.718.260	-	160.718.260	99,88	193.740
04	484102	DK	BAPPEDA PROVINSI ACEH	550.751.000	225.979.000	184.132.434	-	184.132.434	81,48	41.846.566
04	484103	DK	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	290.542.000	131.697.000	126.699.624	-	126.699.624	96,21	4.997.376
04	484105	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	195.354.000	79.797.000	75.586.632	3.450.000	72.136.632	94,72	7.660.368
04	484106	DK	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA (BAPPELITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA)	353.955.000	145.426.000	145.255.789	-	145.255.789	99,88	170.211
04	484107	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	245.767.000	138.739.000	126.226.000	-	126.226.000	90,98	12.513.000
04	484109	DK	BAPPEDA PROVINSI RIAU	329.422.000	182.328.000	179.572.245	-	179.572.245	98,49	2.755.755
04	484110	DK	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	153.574.000	94.548.000	93.788.650	-	93.788.650	99,20	759.350
04	484112	DK	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	321.400.000	91.638.000	87.220.059	-	87.220.059	95,18	4.417.941
04	484113	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	101.762.000	29.014.000	26.819.700	597.750	26.221.950	92,44	2.792.050

90/6

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	484115	DK	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	381.925.000	235.133.000	231.219.470	-	231.219.470	98,34	3.913.530
04	484116	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	182.823.000	112.556.000	111.424.500	-	111.424.500	98,99	1.131.500
04	484118	DK	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	390.101.000	177.184.000	174.523.305	-	174.523.305	98,50	2.660.695
04	484119	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	194.635.000	87.264.000	83.935.328	-	83.935.328	96,19	3.328.672
04	484121	DK	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	404.304.000	190.849.000	188.230.730	-	188.230.730	98,63	2.618.270
04	484122	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	177.900.000	50.723.000	47.562.816	-	47.562.816	93,77	3.160.184
04	484124	DK	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	344.073.000	174.925.000	174.684.500	-	174.684.500	99,86	240.500
04	484125	DK	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	166.148.000	102.290.000	101.149.500	-	101.149.500	98,89	1.140.500
04	484127	DK	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	304.869.000	183.528.000	183.202.400	-	183.202.400	99,82	325.600
04	484128	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	134.482.000	38.343.000	38.335.800	-	38.335.800	99,98	7.200
04	484131	DK	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	352.382.000	167.982.000	167.243.772	-	167.243.772	99,56	738.228
04	484132	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	193.777.000	119.299.000	118.123.000	-	118.123.000	99,01	1.176.000
04	484134	DK	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	177.109.000	56.350.000	55.914.000	-	55.914.000	99,23	436.000
04	484135	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	90.647.000	25.845.000	25.845.000	-	25.845.000	100,00	-
04	484137	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	238.415.000	125.740.000	124.879.660	-	124.879.660	99,32	860.340
04	484138	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	528.753.000	277.952.000	277.224.503	-	277.224.503	99,74	727.497
04	484139	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	235.784.000	111.620.000	111.500.128	-	111.500.128	99,89	119.872
04	484145	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	266.932.000	140.235.000	140.198.390	-	140.198.390	99,97	36.610
04	484146	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	506.777.000	224.308.000	189.950.500	-	189.950.500	84,68	34.357.500
04	484147	DK	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	327.892.000	201.868.000	200.608.490	-	200.608.490	99,38	1.259.510
04	484149	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY	113.198.000	69.691.000	69.691.000	-	69.691.000	100,00	-
04	484150	DK	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	277.654.000	136.969.000	136.134.000	-	136.134.000	99,39	835.000
04	484151	DK	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	139.346.000	68.469.000	68.469.000	-	68.469.000	100,00	-
04	484153	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	203.004.000	91.356.000	91.346.900	-	91.346.900	99,99	9.100
04	484154	DK	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	503.295.000	194.459.000	191.977.800	-	191.977.800	98,72	2.481.200
04	484157	DK	BAPPEDA PROVINSI BALI	346.781.000	150.263.000	137.287.000	-	137.287.000	91,36	12.976.000
04	484158	DK	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	151.923.000	70.431.000	69.947.640	-	69.947.640	99,31	483.360
04	484160	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	400.872.000	212.726.000	212.678.000	-	212.678.000	99,98	48.000
04	484161	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	193.760.000	90.872.000	90.597.179	-	90.597.179	99,70	274.821

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	484163	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	878.634.000	409.633.000	409.624.141	-	409.624.141	100,00	8.859
04	484164	DK	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	289.720.000	140.345.000	124.391.000	-	124.391.000	88,63	15.954.000
04	484166	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	665.268.000	283.204.000	274.793.716	-	274.793.716	97,03	8.410.284
04	484167	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	185.105.000	85.550.000	84.780.090	-	84.780.090	99,10	769.910
04	484169	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	376.771.000	185.573.000	184.596.198	-	184.596.198	99,47	976.802
04	484170	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	185.663.000	114.304.000	113.967.398	-	113.967.398	99,71	336.602
04	484172	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	123.105.000	51.088.000	35.861.000	-	35.861.000	70,19	15.227.000
04	484173	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	252.629.000	155.532.000	155.383.136	-	155.383.136	99,90	148.864
04	484174	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	144.418.000	-	-	-	-	-	-
04	484176	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	120.310.000	-	-	-	-	-	-
04	484177	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	397.398.000	113.306.000	109.904.491	-	109.904.491	97,00	3.401.509
04	484178	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	113.732.000	32.427.000	16.340.000	-	16.340.000	50,39	16.087.000
04	484180	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	526.156.000	84.634.000	56.045.399	-	56.045.399	66,22	28.588.601
04	484181	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	128.634.000	52.919.000	52.750.100	-	52.750.100	99,68	168.900
04	484183	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	783.206.000	412.149.000	400.652.251	-	400.652.251	97,21	11.496.749
04	484184	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	289.757.000	178.390.000	178.390.000	-	178.390.000	100,00	-
04	484187	DK	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	297.352.000	135.697.000	135.670.109	-	135.670.109	99,98	26.891
04	484188	DK	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	134.355.000	56.211.000	56.155.000	-	56.155.000	99,90	56.000
04	484190	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	343.091.000	153.991.000	153.989.920	-	153.989.920	100,00	1.080
04	484191	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	154.718.000	78.041.000	77.978.000	-	77.978.000	99,92	63.000
04	484193	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	440.748.000	125.666.000	124.627.283	300.000	124.327.283	99,17	1.338.717
04	484194	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	251.180.000	117.530.000	117.508.300	-	117.508.300	99,98	21.700
04	484196	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	380.573.000	200.834.000	200.802.800	-	200.802.800	99,98	31.200
04	484197	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	180.866.000	83.870.000	82.935.440	-	82.935.440	98,89	934.560
04	484199	DK	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	465.573.000	247.930.000	247.930.000	-	247.930.000	100,00	-
04	484200	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	327.125.000	141.202.000	139.961.200	-	139.961.200	99,12	1.240.800
04	484202	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	592.112.000	331.855.000	331.193.000	-	331.193.000	99,80	662.000
04	484203	DK	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	240.118.000	68.462.000	68.219.118	-	68.219.118	99,65	242.882
04	484205	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	463.717.000	213.782.000	208.681.750	-	208.681.750	97,61	5.100.250

9/11/24

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
04	484206	DK	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	211.772.000	-	-	-	-	-	-
04	484208	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	396.027.000	-	-	-	-	-	-
04	484209	DK	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	187.901.000	63.718.000	63.716.300	-	63.716.300	100,00	1.700
04	484211	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	142.314.000	-	-	-	-	-	-
04	484212	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	172.658.000	-	-	-	-	-	-
04	484213	DK	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	153.902.000	43.879.000	43.879.000	-	43.879.000	100,00	-
04	240270	TP	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU	1.099.925.000	931.974.000	931.406.400	292.800	931.113.600	99,94	860.400
<b>KP : .....</b>				<b>117.610.770.000</b>	<b>176.973.175.000</b>	<b>164.466.731.294</b>	<b>113.486.633</b>	<b>164.353.244.661</b>	<b>92,93</b>	<b>12.619.930.339</b>
<b>DK : .....</b>				<b>72.000.000.000</b>	<b>46.833.820.000</b>	<b>45.574.475.680</b>	<b>69.200.856</b>	<b>45.505.274.824</b>	<b>97,31</b>	<b>1.328.545.176</b>
<b>TP : .....</b>				<b>1.099.925.000</b>	<b>931.974.000</b>	<b>931.406.400</b>	<b>292.800</b>	<b>931.113.600</b>	<b>99,94</b>	<b>860.400</b>
<b>Total Ditjen Bina Pemes : .....</b>				<b>190.710.695.000</b>	<b>224.738.969.000</b>	<b>210.972.613.374</b>	<b>182.980.289</b>	<b>210.789.633.085</b>	<b>93,87</b>	<b>13.949.335.915</b>
05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	107.332.085.000	1.176.545.051.000	1.055.874.010.590	974.543.245	1.054.899.467.345	89,74	121.645.583.655
05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	13.015.520.000	13.389.106.000	13.140.954.418	4.106.410	13.136.848.008	98,15	252.257.992
05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	12.293.922.000	13.104.433.000	12.912.853.417	22.110.952	12.890.742.465	98,54	213.690.535
05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	11.638.792.000	11.582.858.000	11.396.461.443	9.006.505	11.387.454.938	98,39	195.403.062
<b>KP : .....</b>				<b>107.332.085.000</b>	<b>1.176.545.051.000</b>	<b>1.055.874.010.590</b>	<b>974.543.245</b>	<b>1.054.899.467.345</b>	<b>89,74</b>	<b>121.645.583.655</b>
<b>KD : .....</b>				<b>36.948.234.000</b>	<b>38.076.397.000</b>	<b>37.450.269.278</b>	<b>35.223.867</b>	<b>37.415.045.411</b>	<b>98,36</b>	<b>661.351.589</b>
<b>Total Ditjen Bina Bangda : .....</b>				<b>144.280.319.000</b>	<b>1.214.621.448.000</b>	<b>1.093.324.279.868</b>	<b>1.009.767.112</b>	<b>1.092.314.512.756</b>	<b>90,01</b>	<b>122.306.935.244</b>
06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	185.993.148.000	491.910.565.000	480.348.606.361	376.801.092	479.971.805.269	97,65	11.938.759.731
<b>KP : .....</b>				<b>185.993.148.000</b>	<b>491.910.565.000</b>	<b>480.348.606.361</b>	<b>376.801.092</b>	<b>479.971.805.269</b>	<b>97,65</b>	<b>11.938.759.731</b>
<b>Total Setjen : .....</b>				<b>185.993.148.000</b>	<b>491.910.565.000</b>	<b>480.348.606.361</b>	<b>376.801.092</b>	<b>479.971.805.269</b>	<b>97,65</b>	<b>11.938.759.731</b>
07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	99.061.548.000	95.012.875.000	91.113.353.918	210.146.937	90.903.206.981	95,90	4.109.668.019
<b>KP : .....</b>				<b>99.061.548.000</b>	<b>95.012.875.000</b>	<b>91.113.353.918</b>	<b>210.146.937</b>	<b>90.903.206.981</b>	<b>95,90</b>	<b>4.109.668.019</b>
<b>Total Ditjen Otda : .....</b>				<b>99.061.548.000</b>	<b>95.012.875.000</b>	<b>91.113.353.918</b>	<b>210.146.937</b>	<b>90.903.206.981</b>	<b>95,90</b>	<b>4.109.668.019</b>
08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	804.942.775.000	1.278.777.600.000	1.261.819.250.731	135.368.324	1.261.683.882.407	98,67	17.093.717.593
<b>KP : .....</b>				<b>804.942.775.000</b>	<b>1.278.777.600.000</b>	<b>1.261.819.250.731</b>	<b>135.368.324</b>	<b>1.261.683.882.407</b>	<b>98,67</b>	<b>17.093.717.593</b>
<b>Total Ditjen Dukcapil : .....</b>				<b>804.942.775.000</b>	<b>1.278.777.600.000</b>	<b>1.261.819.250.731</b>	<b>135.368.324</b>	<b>1.261.683.882.407</b>	<b>98,67</b>	<b>17.093.717.593</b>
09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	113.886.425.000	110.137.836.000	107.493.995.075	165.708.509	107.328.286.566	97,60	2.809.549.434
<b>KP : .....</b>				<b>113.886.425.000</b>	<b>110.137.836.000</b>	<b>107.493.995.075</b>	<b>165.708.509</b>	<b>107.328.286.566</b>	<b>97,60</b>	<b>2.809.549.434</b>

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

ESELON I	SATKER	JK	NAMA SATKER	DIPA	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETO	PERSENTASE	SISA
<b>Total Ditjen Bina Keuda : .....</b>				<b>113.886.425.000</b>	<b>110.137.836.000</b>	<b>107.493.995.075</b>	<b>165.708.509</b>	<b>107.328.286.566</b>	<b>97,60</b>	<b>2.809.549.434</b>
11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	56.321.248.000	55.559.478.000	54.579.518.742	24.632.380	54.554.886.362	98,24	1.004.591.638
<b>KP : .....</b>				<b>56.321.248.000</b>	<b>55.559.478.000</b>	<b>54.579.518.742</b>	<b>24.632.380</b>	<b>54.554.886.362</b>	<b>98,24</b>	<b>1.004.591.638</b>
<b>Total BSKDN : .....</b>				<b>56.321.248.000</b>	<b>55.559.478.000</b>	<b>54.579.518.742</b>	<b>24.632.380</b>	<b>54.554.886.362</b>	<b>98,24</b>	<b>1.004.591.638</b>
12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	109.245.108.000	113.488.235.000	112.694.410.077	46.911.722	112.647.498.355	99,30	840.736.645
12	027114	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONALDI YOGYAKARTA	26.662.005.000	30.364.621.000	30.188.565.216	12.834.973	30.175.730.243	99,42	188.890.757
12	027177	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	20.123.482.000	25.728.570.000	25.675.158.042	16.075.127	25.659.082.915	99,79	69.487.085
12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	23.764.765.000	27.538.245.000	27.435.385.333	561.698	27.434.823.635	99,63	103.421.365
12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONALBUKIT TINGGI	16.873.054.000	23.041.493.000	22.781.680.248	4.997.147	22.776.683.101	98,87	264.809.899
12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.399.742.000	10.645.552.000	10.665.029.604	24.402.556	10.640.627.048	100,18	4.924.952
<b>KP : .....</b>				<b>109.245.108.000</b>	<b>113.488.235.000</b>	<b>112.694.410.077</b>	<b>46.911.722</b>	<b>112.647.498.355</b>	<b>99,30</b>	<b>840.736.645</b>
<b>KD : .....</b>				<b>96.823.048.000</b>	<b>117.318.481.000</b>	<b>116.745.818.443</b>	<b>58.871.501</b>	<b>116.686.946.942</b>	<b>99,51</b>	<b>631.534.058</b>
<b>Total BPSDM : .....</b>				<b>206.068.156.000</b>	<b>230.806.716.000</b>	<b>229.440.228.520</b>	<b>105.783.223</b>	<b>229.334.445.297</b>	<b>99,41</b>	<b>1.472.270.703</b>
<b>KP : .....</b>				<b>2.961.195.578.000</b>	<b>4.981.725.759.000</b>	<b>4.803.364.794.458</b>	<b>3.316.093.428</b>	<b>4.800.048.701.030</b>	<b>96,42</b>	<b>181.677.057.970</b>
<b>KD : .....</b>				<b>314.576.254.000</b>	<b>324.546.013.000</b>	<b>322.970.328.861</b>	<b>120.381.919</b>	<b>322.849.946.942</b>	<b>99,51</b>	<b>1.696.066.058</b>
<b>DK : .....</b>				<b>72.000.000.000</b>	<b>46.833.820.000</b>	<b>45.574.475.680</b>	<b>69.200.856</b>	<b>45.505.274.824</b>	<b>97,31</b>	<b>1.328.545.176</b>
<b>TP : .....</b>				<b>1.099.925.000</b>	<b>931.974.000</b>	<b>931.406.400</b>	<b>292.800</b>	<b>931.113.600</b>	<b>99,94</b>	<b>860.400</b>
<b>Total Kementerian : .....</b>				<b>3.348.871.757.000</b>	<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.172.841.005.399</b>	<b>3.505.969.003</b>	<b>5.169.335.036.396</b>	<b>96,62</b>	<b>184.702.529.604</b>

906



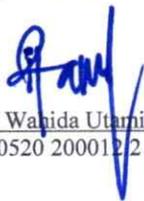
## LAMPIRAN III

# IKHTISAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI  
PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN  
PER 31 DESEMBER 2024**

No		LK PLN I	Jumlah
1	Nama PLN	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	
2	Pemberi Pinjaman	<i>The World Bank</i>	
3	Nama Proyek	<i>Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project (Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/ Frontline Service Delivery)</i>	
4	<i>Loan ID</i>	8941-ID	
5	No. Register	1CZ6CF2A	
6	<i>Date Sign</i>	30 Januari 2020	
7	<i>Date Effective</i>	19 Februari 2020	
8	<i>Closing Date</i>	31 Desember 2024	
9	<i>Loan Amount</i>	USD 6.000.000	USD 6.000.000
10	<i>Disbursement s.d. 2020</i>		-
11	<i>Disbursement pada tahun 2021</i>		-
12	<i>Disbursement pada tahun 2022</i>		-
13	<i>Disbursement pada tahun 2023</i>	13.069.878.000	13.069.878.000
14	<i>Disbursement pada tahun 2024</i>	41.905.977.000	41.905.977.000
15	<b>Belanja Tahun 2024 (Rupiah)</b>	<b>40.455.137.166</b>	<b>40.455.137.166</b>
	a. Belanja Pegawai	-	-
	b. Belanja Barang	40.455.137.166	40.455.137.166
	c. Belanja Modal	-	-
	d. Belanja Bansos	-	-
16	Neraca (Rupiah)	-	-
	a. Aset Lancar	-	-
	b. Aset Tetap	-	-
	c. Aset Lainnya	-	-
	d. Kewajiban	-	-
17	<i>Executing Agency</i>	Kementerian Dalam Negeri	
18	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)		

Kepala Bagian Keuangan,

  
Mey Rany Wahida Utami, S.STP, MM  
NIP. 19820520 2000122 001

Paraf Koordinasi	
Kabag Ken	
Kasubbag	
Staf	

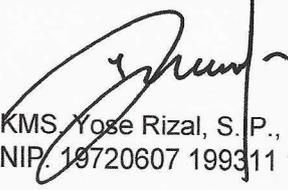
PARAF KOORDINASI	
1. KASUBDIT	
2. KASUBAG TU	
3. KASI	
4. STAF	



**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI  
PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA  
PER 31 DESEMBER 2024**

No		LK PLN 1	LK PLN 2	Jumlah
1	Nama PLN	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
2	Pemberi Pinjaman	The World Bank		
3	Nama Proyek	Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project		
4	Loan ID	8941-ID		
5	No. Register	1CZ6CF2A		
6	Date Sign	30 Januari 2020		
7	Date Effective	19 Februari 2020		
8	Closing Date	31 Desember 2024		
9	Loan Amount	\$ 153,020,000	\$	153,020,000
10	Disbursement pada tahun 2020	Rp 850,976,500	Rp	850,976,500
11	Disbursement pada tahun 2021	Rp 34,048,360,462	Rp	34,048,360,462
12	Disbursement pada tahun 2022	Rp 37,982,101,946	Rp	37,982,101,946
13	Disbursement pada tahun 2023	Rp 856,874,791,500	Rp	856,874,791,500
14	Disbursement pada tahun 2024	Rp 965,588,981,752	Rp	965,588,981,752
14	Belanja Tahun 2024 (Rupiah)	Rp 965,588,981,752	Rp	965,588,981,752
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang	Rp 943,626,283,502	Rp	943,626,283,502
	c. Belanja Modal	Rp 21,962,698,250	Rp	21,962,698,250
	d. Belanja Bansos			
15	Neraca (Rupiah)	21,962,698,250		21,962,698,250
	a. Aset Lancar			
	b. Aset Tetap	21,962,698,250		
	c. Aset Lainnya			
	d. Kewajiban			
16	Executing Agency	Kementerian Dalam Negeri		
17	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK		

Kepala Bagian Keuangan,

  
 KMS. Yose Rizal, S. P., M.Si  
 NIP. 19720607 199311 1 001

9066

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI  
PADA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2024**

NO.	LK PLN 1	LK PLN 2	LK PLN 3	LK PLN 4	LK PLN 5	LK PLN 6	LK PLN 7	LK PLN 8	LK PLN 9	Jumlah
1	Nama PHLN	<i>Flood Management In Selected River Basins (FMSRB)</i>	<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i>	<i>Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)</i>	<i>Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP)</i>	<i>National Urban Supply Water Project (NUWSP)</i>	<i>National Urban Development Project (NUDP)</i>	<i>National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)</i>	<i>Flood Management in North Java Project (FMNJP)</i>	<i>Local Service Delivery Improvement Project (LSDP)</i>
2	Pemberi Pinjaman	ADB	ADB	IBRD dan AIIB	IBRD	IBRD	IBRD	IBRD	ADB	-
3	Nama Proyek	FMSRB	IPDMIP	SIMURP	ISWMP	NUSWP	NUDP	NUFReP	FMNJP	-
4	Loan ID	3440-INO	3529-INO dan 8327-INO (AIF)	IBRD No. 8891-ID dan AIIB No. L0060A	IBRD No. 9021-ID	IBRD LOAN No. 8872-ID	IBRD LOAN No. 8967-ID	IBRD No. 9459-ID	4410-INO	-
5	No. Register	1RUX78CA	1Z83YQPA dan	1NF3PM6A dan	1HFQ7GNA	1CPUK3GA	1PF7SCLA	1739NSEA	1NPBHBMA	-
6	Data Sign	2 Nopember 2016	31 Juli 2017	IBRD 25 Juli 2018 dan AIIB 11 Juli 2018	6 Januari 2020	20 Agustus 2018	15 November 2019	11 Januari 2023	14 Desember 2023	-
7	Data Effective	9 Desember 2016	8 September 2017	25 Oktober 2018 dan 11 Oktober 2018	3 April 2020	20 Agustus 2018	25 November 2019	27 Maret 2023	9 Februari 2024	-
8	Closing Date	30 September 2024	30 Juni 2024	30 Juni 2024	30 November 2025	31 Maret 2024	31 Desember 2024	31 Januari 2028	30 Juni 2029	-
9	Loan Amount	USD 108.700.000	USD 600.000.000	USD 250.000.000 dan USD 250.000.000	12.125.000.000	50.750.000.000	USD 49.600.000	USD 2.000.000	JPY36.055.200.000	-
10	Disbursement s.d 2017	8.268.298.905	-	-	-	-	-	-	-	8.268.298.905
11	Disbursement s.d 2018	15.155.070.803	17.425.523.167	-	-	-	-	-	-	32.580.593.970
12	Disbursement s.d 2019	15.300.000.000	47.000.000.000	6.787.750.000	-	9.228.258.000	-	-	-	78.316.008.000
13	Disbursement s.d 2020	11.341.125.000	26.903.931.000	16.070.000.000	-	15.007.500.000	5.855.810.000	-	-	75.178.366.000
14	Disbursement s.d 2021	15.032.812.556	28.036.722.742	35.613.132.668	8.428.417.805	12.730.906.574	3.991.965.575	-	-	103.833.957.920
15	Disbursement s.d 2022	18.262.156.000	38.811.422.000	50.233.638.000	17.972.260.000	16.354.553.000	28.685.835.000	-	-	170.319.864.000
16	Disbursement s.d 2023	6.532.000.000	18.343.646.000	41.796.150.000	14.645.786.000	20.388.432.000	37.850.992.000	631.106.000	-	140.188.112.000
17	Disbursement s.d 2024	4.486.533.000	606.583.000	10.592.140.000	27.460.070.000	10.929.358.000	98.120.632.000	2.113.531.000	1.714.054.000	514.431.000
18	<b>Belanja Tahun 2024 (Rupiah)</b>	<b>4.466.120.629</b>	<b>586.348.390</b>	<b>10.527.837.702</b>	<b>27.408.789.232</b>	<b>10.929.358.000</b>	<b>98.027.207.565</b>	<b>2.093.877.990</b>	<b>1.694.886.831</b>	<b>-</b>
	a. Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Belanja Barang	4.466.120.629	586.348.390	10.527.837.702	27.408.789.232	10.929.358.000	98.027.207.565	2.093.877.990	1.694.886.831	-
	c. Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Belanja Bansos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	<b>Neraca (Rupiah)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Aset Lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Kewajiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Executing Agency	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditjen Cipta Karya Dit. Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	
21	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK	BPK	BPK	BPK	BPK	BPK	BPK	BPK	

Kepala Bagian Keuangan

Amaryadi, S.IP., M.AP.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197711122006041001

gus

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI  
PADA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2024

NO.		LK HLN 1	Jumlah
1	Nama PHLN	<i>Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase-II</i>	
2	Pemberi Pinjaman	Bank Dunia (World Bank)	
3	Nama Proyek	INEY Phase-II	
4	Loan ID	GFF TF0C1687 IHCA TF0C3114	
5	No. Register	2HUXN2PA	
6	Data Sign	22 November 2023	
7	Data Effective	22 November 2023	
8	Closing Date	31 Agustus 2028	
9	Loan Amount	77.000.000.000	
10	Disbursement s.d 2017		-
11	Disbursement s.d 2018		-
12	Disbursement s.d 2019		-
13	Disbursement s.d 2020		-
14	Disbursement s.d 2021		-
15	Disbursement s.d 2022		-
16	Disbursement s.d 2023		-
17	Disbursement s.d 2024	12.139.665.000	12.139.665.000
<b>18</b>	<b>Belanja Tahun 2024 (Rupiah)</b>	<b>11.633.255.334</b>	<b>11.633.255.334</b>
	a. Belanja Pegawai		-
	b. Belanja Barang	11.633.255.334	11.633.255.334
	c. Belanja Modal		-
	d. Belanja Bansos		-
<b>19</b>	<b>Neraca (Rupiah)</b>	-	-
	a. Aset Lancar		-
	b. Aset Tetap		-
	c. Aset Lainnya		-
	d. Kewajiban		
20	Executing Agency	Sekretaris Wakil Presiden	
21	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPKP	

Kepala Bagian Keuangan

  
Amaryadi, S.IP., M.AP  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP 197711122006041001

gub



**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN  
PINJAMAN LUAR NEGERI  
ID FOR INCLUSIVE SERVICE DELIVERY AND DIGITAL TRANSFORMATION IN  
INDONESIA PROJECT IBRD LOAN NO. 9520-ID  
PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
PER 31 DESEMBER 2024**

No.	Uraian	Keterangan	Jumlah
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	<i>ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation in Indonesia Project</i>	
2	Pemberi Pinjaman	<i>International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) World Bank</i>	
3	Nama Proyek	Penguatan Adminstrasi Kependudukan Dan Pengenalan Identitas Digital Untuk Mendukung Pelayanan Yang Inklusif Dan Transformasi	
4	<i>Loan ID</i>	No. 9520-ID	
5	No. Register	1F2VZKKA	
6	<i>Date Sign</i>	30 Mei 2023	
7	<i>Date Effective</i>	3 Agustus 2023	
8	<i>Closing Date</i>	31 Desember 2027	
9	<i>Loan Amount</i>		USD250,000,000.00
10	<i>Disbursement s.d. 2023</i>		USD83,930.00
	<i>Disbursement s.d. 31 Des 2024</i>		USD16,000,000.00
11	Belanja Tahun 2024 (Rupiah)		Rp240.399.275.068,00
	a. Belanja Pegawai		
	b. Belanja Barang		Rp28.029.328.754,00
	c. Belanja Modal		Rp212.369.946.314,00
	d. Belanja Bansos		
12	Neraca (Rupiah)		
	a. Aset Lancar		
	b. Aset Tetap		
	c. Aset Lainnya		
	d. Kewajiban		
13	<i>Executing Agency</i>	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	
14	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)	BPK	

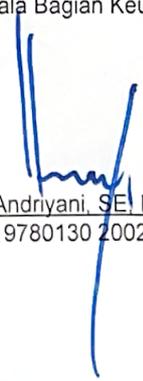
Kepala Bagian Keuangan,

Abdul Rachman, SE, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750409 200112 1 001

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI  
PADA DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2024**

No		LK HLN 1	LK PHLN 2	Jumlah
1	Nama Hibah	<i>Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project</i>	<i>Program Strengthening Intergovernmental Transfer and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia (SINERGIS)</i>	
2	Pemberi Hibah	The World Bank	The World Bank	
3	Nama Proyek	<i>Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project</i>	<i>Program Strengthening Intergovernmental Transfer and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia (SINERGIS)</i>	
4	Loan ID	Grant No TF0B5420	Grant No TF0C4755	
5	No. Register	2FPJR4SA	2S9MDU8A	
6	Date Sign	18 Mei 2021	22 Mei 2024	
7	Date Effective	18 Mei 2021	22 Mei 2024	
8	Closing Date	30 Juni 2025	30 Juni 2025	
9	Loan Ammount	USD 3.259.000	Rp 373.167.000	
11	Disbursement pada tahun 2021	Rp 1.643.769.290	22 Rp 2024	Rp 1.643.769.290
	Disbursement pada tahun 2022	Rp 771.865.390	22 Rp 2024	Rp 771.865.390
	Disbursement pada tahun 2023	Rp 1.037.484.348	22 Rp 2024	Rp 1.037.484.348
	Disbursement pada tahun 2024	Rp 505.723.281	Rp 107.260.000	Rp 612.983.281
12	Belanja Tahun 2024 (Rupiah)	Rp 505.723.281		Rp 505.723.281
	a. Belanja Pegawai	Rp -		Rp -
	b. Belanja Barang	Rp 505.723.281	Rp 107.260.000	Rp 612.983.281
	c. Belanja Modal	Rp -		Rp -
	d. Belanja Bansos	Rp -		Rp -
13	Neraca (Rupiah)	Rp -		Rp -
	a. Aset Lancar			
	b. Aset Tetap			
	c. Aset Lainnya			
	d. Kewajiban			
14	Executing Agency	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan	
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)			

Kepala Bagian Keuangan,

  
 Andriyani, SE, M.Si  
 NIP. 19780130 200212 2 001

9006



## LAMPIRAN IV

# RINCIAN PAGU ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, KEGIATAN, PROGRAM, OUTPUT DAN TARGET DARI MASING- MASING FUNGSI DAN SUB FUNGSI

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>01_403200_SEKRETARIAT JENDERAL</b>										
	Program Dukungan Manajemen									
	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal									
			RO_Asistensi dan Supervisi Litigasi dan Advokasi Hukum Pemerintahan Daerah	399.195.000	399.195.000	100,00	64	Daerah(Prov/Kab/Kota)	64	100,00
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	1.330.000.000	1.329.243.256	99,94	10	Kesepakatan	29	290,00
			RO_Kerjasama Luar Negeri	2.500.000.000	2.497.920.897	99,92	13	Kesepakatan	14	107,69
			RO_Layanan Bantuan Hukum	92.980.000	92.976.300	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Hukum	879.642.000	908.936.242	103,33	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Pusat Fasilitasi Kerja Sama	951.219.000	950.113.204	99,88	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Hukum	7.592.568.000	7.628.185.216	100,47	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Rekomendasi Perjalanan Luar Negeri	256.147.000	255.660.408	99,81	1	layanan	1	100,00
			RO_Layanan Umum	9.362.634.000	9.279.710.940	99,11	1	Layanan	1	100,00
			RO_Penanganan Perkara Litigasi	1.891.892.000	1.891.881.600	100,00	120	Perkara	129	107,50
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal									
			RO_Layanan BMN	2.010.000.000	2.006.902.755	99,85	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Administrasi Pimpinan	1.144.184.000	1.144.123.973	99,99	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Keuangan dan Aset	934.021.000	923.157.757	98,84	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan	2.574.471.000	2.574.342.441	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Umum	500.100.000	493.933.987	98,77	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Ketatausahaan dan Koordinasi Tugas Pimpinan	20.329.693.000	20.128.464.709	99,01	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	4.705.979.000	4.643.231.337	98,67	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	206.448.000	205.766.745	99,67	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.419.180.000	1.389.964.166	97,94	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Implementasi SAKIP, Manajemen Kinerja dan Penugasan Lainnya Bidang Monitoring dan Evaluasi lingkup Kemendagri	2.112.737.000	2.106.101.601	99,69	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi Program serta Anggaran Sekretariat Jenderal	682.065.000	682.055.832	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal	692.131.000	692.125.710	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	35.657.000	35.656.650	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal di atas 10 unit	180.815.000	180.576.570	99,87	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit	414.475.000	414.096.987	99,91	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	270.059.000	270.057.995	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.644.947.000	4.633.401.990	99,75	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	332.818.368.000	327.776.251.603	98,49	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	5.259.855.000	5.208.727.951	99,03	4	Unit	4	100,00
			RO_Layanan Protokoler	4.162.225.000	4.162.140.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	34.878.606.000	34.389.893.076	98,60	346	Unit	346	100,00
			RO_Layanan Umum	5.955.249.000	5.871.962.075	98,60	1	Layanan	1	100,00
	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal									
			RO_Asistensi dan Supervisi Kehumasan Pemda	1.009.102.000	1.009.068.645	100,00	408	Daerah(Prov/Kab/Kota)	204	50,00
			RO_Asistensi dan Supervisi Pengaduan Masyarakat dan Layanan Informasi Pemda	1.716.872.000	1.716.752.285	99,99	28	Daerah(Prov/Kab/Kota)	36	128,57
			RO_Layanan Data dan Informasi	3.689.215.000	3.667.127.303	99,40	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Pusat Data dan Sistem Informasi	1.597.240.000	1.589.379.437	99,51	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Pusat Penerangan	1.102.000.000	1.101.969.394	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	27.350.000	27.338.726	99,96	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Pengaduan	259.075.000	258.885.174	99,93	1	layanan	1	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Umum	613.450.000	613.416.067	99,99	1	Layanan	1	100,00
			RO_Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID Kemendagri	205.850.000	205.719.070	99,94	1	Layanan	1	100,00
			RO_Pengadaan Data Center	101.418.650.000	101.301.837.500	99,88	2	Unit	2	100,00
			RO_Pengadaan Jaringan	18.445.969.000	18.436.978.652	99,95	3	Unit	3	100,00
			RO_Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	6.797.237.000	6.795.708.903	99,98	3	Unit	3	100,00
			RO_Pengadaan Sistem Keamanan	7.611.712.000	7.598.514.546	99,83	1	Unit	1	100,00
			RO_Pengelolaan Aplikasi Situs Web ULA	412.943.000	403.523.730	97,72	1	SistemInformasi	1	100,00
			RO_Pengelolaan dan Implementasi SI Manajemen dan Eksekutif	1.732.509.000	1.727.476.191	99,71	1	SistemInformasi	1	100,00
			RO_Pengelolaan Implementasi SIPD	28.705.215.000	28.601.533.325	99,64	1	SistemInformasi	1	100,00
			RO_Publikasi	10.104.306.000	10.103.580.818	99,99	1	Layanan	1	100,00
			RO_Strategi Komunikasi	376.382.000	376.369.520	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal							
			RO_Asistensi dan Supervisi Kelembagaan Sekretariat Daerah	896.108.000	895.517.624	99,93	181	Provinsi	181	100,00
			RO_Asistensi dan Supervisi Ketatalaksanaan Pemda	461.661.000	461.594.750	99,99	7	Provinsi	7	100,00
			RO_Asistensi dan Supervisi Reformasi Birokrasi Pemda	1.211.312.000	1.211.108.500	99,98	34	Provinsi	34	100,00
			RO_Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Teladan Kementerian Dalam Negeri	35.280.000	34.883.000	98,87	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00
			RO_Layanan Administrasi dan Konsultasi Pemda	152.482.000	152.282.000	99,87	34	Provinsi	34	100,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Kepegawaian	834.771.000	836.165.465	100,17	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Dukungan Manajemen Biro Organisasi dan Tata Laksana	1.003.546.000	1.002.981.047	99,94	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	14.556.216.000	14.167.654.542	97,33	7.329	Orang	7.428	101,35
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.276.421.000	3.283.489.704	100,22	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi	2.238.765.000	2.235.929.118	99,87	1	layanan	1	100,00
			RO_Penilaian Kompetensi Jabatan administrator, pengawas dan fungsional di Lingkungan Kemendagri	140.906.000	140.903.747	100,00	60	Orang	33	55,00
			RO_Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	1.551.990.000	1.551.517.334	99,97	480	Orang	473	98,54
			RO_Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	356.746.000	356.587.914	99,96	180	Orang	89	49,44
<b>01_483005_DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu							
			RO_Jumlah Peraturan/Revisi Peraturan Perundang-Undangan Lingkup DKPP	314.743.000	306.452.100	97,37	5	peraturan	8	160,00
			RO_Layanan Bantuan Hukum	5.750.000	5.750.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Data dan Informasi	116.217.000	116.216.500	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	818.093.000	777.466.803	95,03	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	39.274.270.000	39.376.613.646	100,26	1	layanan	1	100,00
			RO_Layanan Penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu	2.035.257.000	2.022.600.800	99,38	822	Lembaga	822	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	20.036.296.000	19.948.401.811	99,56	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Protokoler	335.998.000	332.928.442	99,09	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana dan Prasarana Internal	7.831.126.000	7.831.125.418	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Umum	5.500.423.000	5.398.595.863	98,15	1	Layanan	1	100,00
<b>03_027210_DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										
			Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum							
			Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan							
			RO_Bantuan Keuangan ke Partai Politik	128.404.595.000	128.404.594.750	100,00	9	Lembaga	9	100,00
			RO_Fasilitasi dan Evaluasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	550.000.000	550.000.000	100,00	18	Laporan	18	100,00
			RO_Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	1.030.572.000	1.024.940.879	99,45	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Iklan Layanan Masyarakat Bidang Politik Dalam Negeri	250.736.000	250.735.640	100,00	3	publikasi	3	100,00
			RO_Indeks Kinerja Ormas	291.800.000	291.733.121	99,98	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00

905

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Kapasitas pengurus ormas	210.000.000	209.996.637	100,00	300	Orang	300	100,00
			RO_Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	172.500.000	172.500.000	100,00	2	Rekomendasi Kebijakan	2	100,00
			RO_Kinerja daerah dalam pelayanan dan pengawasan ormas	1.250.492.000	1.249.985.903	99,96	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bidang organisasi kemasyarakatan	1.200.000.000	1.199.889.239	99,99	6	forum	6	100,00
			RO_Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Menjelang Pelaksanaan Pemilu Serentak, Pasca Pemilu dan Menjelang Pelaksanaan Pilkada	599.273.000	599.264.528	100,00	15	Laporan	15	100,00
			RO_Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.097.708.000	1.097.535.760	99,98	220	KelompokMasyarakat	220	100,00
			RO_Pembinaan Teknis Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	3.750.000.000	3.080.724.779	82,15	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	300.000.000	300.000.000	100,00	200	Orang	200	100,00
			RO_Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	870.000.000	869.999.675	100,00	1.000	Orang	1.000	100,00
			RO_Penguatan Demokrasi Bagi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pilkada	776.919.000	776.919.000	100,00	6	Daerah(Prov/Kab/Kota)	6	100,00
			RO_Peningkatan pemahaman demokrasi bagi tokoh masyarakat	200.000.000	200.000.000	100,00	100	Orang	100	100,00
			Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya							
			RO_Fasilitas pembentukan dan penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	356.875.000	356.843.548	99,99	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intrasuku, umat beragama Ras dan Golongan	500.000.000	499.979.879	100,00	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika	495.442.000	495.414.717	99,99	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi Literasi Budaya dalam Kerangka Ketahanan Identitas Bangsa	99.820.000	99.814.903	99,99	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi penanganan ketahanan ekonomi	250.000.000	249.855.865	99,94	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam membangun Harmoni Kebangsaan Dalam Rangka Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	130.468.000	130.463.829	100,00	2	Daerah(Prov/Kab/Kota)	2	100,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Dalam Menumbuhkan semangat Nasionalisme Dalam Rangka Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	113.920.000	113.909.730	99,99	18	Daerah(Prov/Kab/Kota)	18	100,00
			RO_Indeks Harmoni Indonesia	300.000.000	299.665.000	99,89	1	Kajian	1	100,00
			RO_Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	984.155.000	983.962.713	99,98	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinnekaan	323.996.000	323.980.715	100,00	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Komunikasi Sosial dan pembahasan isu strategis Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	2.740.718.000	2.739.943.474	99,97	10	Daerah(Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			RO_Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.259.237.000	1.259.143.763	99,99	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Penguatan Kinerja PPWK di daerah	1.161.402.000	1.161.385.168	100,00	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila Untuk Menyukseskan Pemilu Tahun 2024	404.283.000	404.279.773	100,00	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	100,00
			RO_Tim terpadu PKS daerah yang efektif	900.000.000	899.999.000	100,00	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Peningkatan Kewaspadaan Nasional							
			RO_Dukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Melalui Komunikasi Sosial Bidang Kewaspadaan Nasional	1.200.000.000	1.199.972.149	100,00	4	forum	4	100,00
			RO_Fasilitasi kewaspadaan nasional di Indonesia	770.950.000	770.908.093	99,99	10	Daerah(Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			RO_Izin penelitian di daerah	79.050.000	79.021.300	99,96	300	Orang	309	103,00
			RO_Kapasitas aparaturnya pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	4.250.000.000	4.249.974.548	100,00	450	Orang	450	100,00
			RO_Kebijakan/regulasi Indeks kewaspadaan Nasional	350.000.000	349.986.829	100,00	3	RekomendasiKebijakan	3	100,00
<b>07_621892_DITJEN OTONOMI DAERAH</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
			RO_Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kinerja 6 urusan wajib pelayanan dasar	104.310.000	104.140.000	99,84	10	Daerah(Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			RO_Dokumen Indeks kapasitas pemerintahan daerah	31.750.000	31.750.000	100,00	1	NSPK	1	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	967.939.000	690.231.812	71,31	234	Daerah (Prov/Kab/Kota)	234	100,00
			RO_Pemutakhiran Aplikasi Geographic Information System (GIS) Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Si-LPPD dan EPPD	52.800.000	32.301.700	61,18	1	SistemInformasi	1	100,00
			RO_Permendagri Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 terkait Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah	56.400.000	55.462.000	98,34	1	PerMen	1	100,00
			RO_Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	2.643.155.000	2.211.800.532	83,68	16	Daerah (Prov/Kab/Kota)	16	100,00
			RO_Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kapasitas Daerah	56.400.000	56.350.000	99,91	1	R.Perpres	1	100,00
			RO_Revisi Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	56.400.000	55.870.000	99,06	1	PerMen	1	100,00
			RO_Transformasi Digital Pemda Dalam Rangka Implementasi SPBE	61.940.000	61.500.000	99,29	40	Daerah(Prov/Kab/Kota)	40	100,00
			Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa							
			RO_Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi diselesaikan permasalahannya	2.794.595.000	2.736.331.042	97,92	22	Daerah (Prov/Kab/Kota)	22	100,00
			RO_Provinsi yang disupervisi Kinerjanya dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus/Keistimewaan sesuai Undang-Undang	2.906.919.000	2.792.802.631	96,07	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan DPOD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan Daerah	1.600.297.000	1.596.572.305	99,77	4	Rekomendasi Kebijakan	4	100,00
			RO_Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Daerah, Kekhususan/Keistimewaan Daerah	4.431.804.000	4.271.363.637	96,38	8	Rekomendasi Kebijakan	8	100,00
			Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa							
			RO_Daerah yang dianalisis kebutuhan pembentukan perda	82.430.000	82.180.000	99,70	34	Daerah(Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Database peraturan daerah	844.197.000	826.469.145	97,90	1	Data	1	100,00
			RO_Fasilitasi Capaian Pembentukan Perda dan Perkada bagi Daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah	217.570.000	213.456.786	98,11	271	Daerah(Prov/Kab/Kota)	271	100,00
			RO_Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1.231.578.000	878.119.960	71,30	7	Rekomendasi	7	100,00
			RO_Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1.135.135.000	900.648.705	79,34	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat K/L dan daerah	604.962.000	494.029.232	81,66	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00
			Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah							
			RO_Asosiasi Pemerintahan Daerah dan DPRD yang optimal	67.421.000	66.805.500	99,09	7	Lembaga	7	100,00
			RO_Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Air Limbah	192.717.000	100.508.092	52,15	1	RPP	1	100,00
			RO_Evaluasi Kinerja KDH dan DPRD	100.000.000	88.806.500	88,81	34	Provinsi	34	100,00
			RO_Fasilitasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyesuaian Mekanisme Kerja Pemerintah Daerah	1.350.043.000	1.330.814.470	98,58	32	Daerah (Prov/Kab/Kota)	32	100,00
			RO_Fasilitasi penyelenggaraan penataan ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah	47.681.000	47.457.775	99,53	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi Penyelesaian permasalahan KDH dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	39.425.000	29.796.000	75,58	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi Persiapan Pilkada Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.058.981.000	6.734.599.640	83,57	545	Daerah (Prov/Kab/Kota)	545	100,00
			RO_Fasilitasi Tugas dan Fungsi KDH dan DPRD	50.000.000	47.511.900	95,02	7	Provinsi	7	100,00
			RO Indeks Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah	40.860.000	40.856.600	99,99	1	Pedoman	1	100,00
			RO_Kebijakan terkait kelembagaan dan kepegawaian	42.851.000	42.850.000	100,00	2	RekomendasiKebijakan	2	100,00
			RO_Kepala Daerah yang Menyampaikan LKPJ Tepat Waktu	30.000.000	29.902.000	99,67	150	Daerah(Prov/Kab/Kota)	150	100,00
			RO_Monitoring dan evaluasi penerapan PP 18/2016 dan Permendagri pedoman nomenklatur perangkat daerah	170.001.000	168.415.300	99,07	1	Laporan	1	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Netralitas ASN di daerah dalam rangka pilkada serentak	992.594.000	962.465.817	96,96	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah	179.945.000	166.879.000	92,74	32	Daerah(Prov/Kab/Kota)	32	100,00
			RO_Penyelesaian Administrasi KDH dan DPRD tepat Waktu	13.154.000	11.472.050	87,21	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah	2.208.307.000	2.136.727.502	96,76	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Rekomendasi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah	278.942.000	276.290.028	99,05	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00
<b>09_662766 DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah							
			RO_Daerah yang Optimal Memanfaatkan Dana Transfer	1.600.000.000	1.576.954.260	98,56	542	Daerah(Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	550.000.000	540.161.997	98,21	70	Daerah (Prov/Kab/Kota)	70	100,00
			RO_Data dan Informasi Pengelolaan Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	400.000.000	395.231.391	98,81	1	Data	1	100,00
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah							
			RO_Modul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	8.390.000.000	8.011.738.403	95,49	7	ModulAplikasi	7	100,00
			RO_Daerah Otonom Baru Yang di Fasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	3.500.000.000	3.432.100.590	98,06	4	Daerah(Prov/Kab/Kota)	4	100,00
			RO_Daerah yang BUMDnya Memberikan Kontribusi Terhadap Penerimaan Daerah	1.100.000.000	1.035.777.093	94,16	281	Daerah (Prov/Kab/Kota)	281	100,00
			RO_Daerah yang LKPDnya Akuntabel	350.000.000	349.983.500	100,00	542	Daerah(Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Daerah yang Melakukan Penatausahaan BMD Secara Wajar	850.000.000	837.762.600	98,56	542	Daerah (Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Daerah yang Melakukan Penyesuaian Perda PDRD	1.050.000.000	1.036.063.538	98,67	542	Daerah (Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Daerah yang Memenuhi Indikator Mandatory Spending	250.000.000	245.337.647	98,14	542	Daerah (Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Daerah yang memenuhi Pendanaan Pilkada Serentak	1.700.000.000	1.686.842.579	99,23	541	Daerah(Prov/Kab/Kota)	541	100,00
			RO_Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	250.000.000	239.343.025	95,74	542	Daerah (Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Daerah yang Menerapkan PPK BLUD	525.000.000	524.547.200	99,91	542	Daerah(Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Daerah yang Menerapkan SIPD Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dalam Rangka Penguatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	16.476.377.000	15.405.759.122	93,50	542	Daerah(Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Daerah yang Menerapkan SIPD Bidang Perencanaan Anggaran Dalam Rangka Penguatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	800.000.000	789.757.756	98,72	542	Daerah (Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Daerah yang Menerapkan Transaksi Non Tunai (Cashless)/Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Penerimaan Daerah	150.000.000	145.598.699	97,07	250	Daerah(Prov/Kab/Kota)	250	100,00
			RO_Daerah yang Menerapkan Transaksi Non Tunai (Cashless)/Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Pengeluaran Daerah	150.000.000	145.603.904	97,07	542	Daerah(Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	2.375.000.000	2.342.223.745	98,62	542	Daerah (Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Data dan Informasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	500.000.000	496.266.806	99,25	1	Data	1	100,00
			RO_Data dan Informasi Penerima Beasiswa Unggul Papua Luar Negeri	1.000.000.000	961.202.601	96,12	1	layanan	1	100,00
			RO_Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	218.464.000	211.160.822	96,66	1	Data	1	100,00
			RO_Data dan Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	500.000.000	451.514.823	90,30	1	Data	1	100,00
			RO_Konferensi dan Event Pengelolaan Keuangan Daerah	1.200.000.000	1.123.265.797	93,61	16	Kegiatan	16	100,00
			RO_Lokakarya dan Supervisi terkait Reformasi Pajak Daerah	211.432.000	211.287.303	99,93	1	Kegiatan	1	100,00
			RO_Permendagri Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	100.000.000	94.418.285	94,42	1	PerMen	1	100,00
			RO_Permendagri Bidang Pendapatan Daerah	100.000.000	99.349.132	99,35	1	PerMen	1	100,00
			RO_Permendagri Bidang Pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD	100.000.000	97.373.905	97,37	1	PerMen	1	100,00
			RO_Permendagri Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	150.000.000	149.136.520	99,42	1	PerMen	1	100,00
			RO_Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen	350.000.000	348.317.706	99,52	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu	738.000.000	697.311.359	94,49	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Provinsi yang Mengesahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu	302.000.000	301.406.420	99,80	34	Daerah(Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Provinsi yang Patuh Terhadap hasil Evaluasi Ranperda APBD	68.000.000	65.781.179	96,74	34	Daerah(Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Rancangan Standar Redesain Proses Bisnis SIPD RI Bidang Keuangan Daerah	373.167.000	107.260.000	28,74	1	RancanganStandar	1	100,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan Evaluasi pengelolaan Keuangan Daerah	306.040.000	305.741.437	99,90	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
 Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL SUB FUNGSI: LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI				978.048.890.000	964.931.148.099	98,66	22.375		22.194	99,19

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>01_448302_INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI</b>										
	Program Dukungan Manajemen									
		Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN								
			RO_ Keputusan Menteri Dalam Negeri Terkait IPDN	82.692.000	82.686.550	99,99	3	peraturan	3	100,00
			RO_ Peraturan Rektor IPDN	81.298.000	81.295.000	100,00	3	peraturan	3	100,00
			RO_ Layanan Bantuan Hukum	215.028.000	214.859.500	99,92	2	Layanan	2	100,00
			RO_ Layanan Hukum	117.322.000	117.319.400	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_ Peraturan Menteri Yang Bersifat Internal	79.288.000	82.297.408	103,80	2	PerMen	2	100,00
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_ Layanan Manajemen Keuangan	662.892.000	662.311.968	99,91	1	Dokumen	1	100,00
			RO_ Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I dengan Unit Vertikal 1 s.d 6 Satker	158.883.000	158.882.600	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_ Layanan Perencanaan dan Penganggaran	829.021.000	829.005.700	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_ Layanan Perkantoran	331.279.380.000	331.256.042.381	99,99	1	Layanan	1	100,00
			RO_ Layanan Prasarana Internal	3.955.549.000	3.948.233.000	99,82	27	Unit	27	100,00
			RO_ Layanan Sarana Internal	9.833.392.000	9.818.629.500	99,85	521	Unit	521	100,00
			RO_ Layanan Umum	5.607.125.000	5.601.744.158	99,90	1	Layanan	1	100,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
			RO_ Layanan Data dan Informasi	222.736.000	221.678.655	99,53	1	Layanan	1	100,00
			RO_ Layanan Kehumasan dan Informasi	206.717.000	206.717.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_ Layanan Protokoler	279.488.000	279.255.954	99,92	1	Layanan	1	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								
			RO_ Akreditasi Institusi dan Prodi	1.871.955.000	1.828.681.504	97,69	19	produk	19	100,00
			RO_ Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 2 s.d. 6 satker	62.571.000	62.566.113	99,99	1	Dokumen	1	100,00
			RO_ Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	340.636.000	340.621.751	100,00	2	Dokumen	2	100,00
			RO_ Kerjasama Dalam Negeri	305.721.000	295.582.200	96,68	8	Kesepakatan	15	187,50
			RO_ Kerjasama Luar Negeri	721.247.000	700.514.468	97,13	1	Kesepakatan	1	100,00
			RO_ Layanan Audit Internal	1.041.944.000	1.040.559.839	99,87	1	Dokumen	1	100,00
			RO_ Layanan Manajemen SDM	1.937.925.000	1.900.920.776	98,09	1.361	Orang	1.361	100,00
			RO_ Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	948.540.000	948.285.401	99,97	2	Laporan	2	100,00
			RO_ Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	269.203.000	233.252.242	86,65	1	Layanan	1	100,00
		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN								
			RO_ Laporan Kajian Aktual Strategis (3 Naskah Kebijakan)	80.313.000	79.555.316	99,06	3	RekomendasiKebijakan	3	100,00
			RO_ Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	4.591.706.000	4.588.065.828	99,92	58	RekomendasiKebijakan	58	100,00
			RO_ Layanan Pendidikan Kedinasan	41.900.855.000	41.891.429.034	99,98	3.069	Orang	3.069	100,00
			RO_ Layanan Pendidikan Program Pasca Sarjana	9.398.272.000	9.249.840.314	98,42	170	Orang	170	100,00
			RO_ Layanan Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan	2.044.875.000	2.043.378.689	99,93	150	Orang	150	100,00
			RO_ Pengabdian Masyarakat	1.647.466.000	1.647.451.480	100,00	4	RekomendasiKebijakan	4	100,00
			RO_ Seleksi Penerimaan Calon Praja	12.678.586.000	12.722.176.646	100,34	721	Orang	721	100,00
<b>01_677010_IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA</b>										
	Program Dukungan Manajemen									
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN								
			RO_ Layanan Manajemen Keuangan	77.306.000	77.209.000	99,87	1	Dokumen	1	100,00
			RO_ Layanan Perencanaan dan Penganggaran	199.016.000	199.015.863	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_ Layanan Perkantoran	24.078.808.000	24.067.074.256	99,95	1	Layanan	1	100,00
			RO_ Layanan Umum	215.060.000	213.113.673	99,09	1	Layanan	1	100,00
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN								
			RO_ Layanan Data dan Informasi	15.110.000	15.110.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN								

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	42.252.000	42.252.000	100,00	1	Kesepakatan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	282.972.000	282.816.636	99,95	55	Orang	55	100,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	126.032.000	125.494.095	99,57	1	Laporan	1	100,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8.935.000	8.645.000	96,75	1	Layanan	1	100,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.607.056.000	1.606.194.229	99,95	53	Orang	53	100,00
<b>01_677024_IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	63.300.000	63.300.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	274.165.000	274.154.310	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	29.057.689.000	29.057.431.707	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Umum	198.005.000	197.939.195	99,97	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			RO_Layanan Data dan Informasi	9.582.000	9.582.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	5.720.000	5.720.000	100,00	1	Kesepakatan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	56.530.000	56.412.980	99,79	67	Orang	67	100,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	99.638.000	99.638.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6.010.000	6.010.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.138.049.000	1.137.880.726	99,99	109	Orang	109	100,00
<b>01_677045_IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	209.204.000	209.202.309	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	213.947.000	213.947.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	21.395.898.000	21.381.358.581	99,93	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Umum	233.548.000	232.839.800	99,70	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			RO_Layanan Data dan Informasi	59.530.000	59.528.968	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	25.138.000	25.137.300	100,00	1	Kesepakatan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	145.095.000	145.088.760	100,00	45	Orang	45	100,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	116.610.000	116.610.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.488.718.000	1.486.938.630	99,88	108	Orang	108	100,00
<b>01_683070_IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	94.580.000	94.579.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	202.666.000	202.666.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	25.446.263.000	25.446.058.628	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Umum	176.392.000	176.390.841	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			RO_Layanan Data dan Informasi	22.310.000	22.308.475	99,99	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	8.810.000	8.810.000	100,00	1	Kesepakatan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	41.154.000	41.153.965	100,00	35	Orang	38	108,57
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	97.180.000	97.179.481	100,00	1	Laporan	1	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	19.872.000	19.871.500	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.400.182.000	1.400.170.258	100,00	108	Orang	108	100,00
<b>01_683084_IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	108.524.000	108.443.477	99,93	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	328.694.000	328.590.288	99,97	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	26.241.516.000	25.899.721.336	98,70	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Umum	325.171.000	325.155.520	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			RO_Layanan Data dan Informasi	6.550.000	6.550.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	9.510.000	9.508.435	99,98	1	Kesepakatan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	83.274.000	83.253.726	99,98	74	Orang	74	100,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	129.814.000	129.806.438	99,99	1	Laporan	1	100,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	12.370.000	12.311.230	99,52	1	Layanan	1	100,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	1.309.112.000	1.307.884.591	99,91	107	Orang	107	100,00
<b>01_683091_IPDN KAMPUS PAPUA</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	28.305.000	28.305.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	118.452.000	118.451.500	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	29.167.051.000	29.166.972.703	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Umum	64.115.000	64.112.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN							
			RO_Layanan Data dan Informasi	16.780.000	16.780.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN							
			RO_Kerjasama Dalam Negeri	13.620.000	13.620.000	100,00	1	Kesepakatan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	135.090.000	135.089.500	100,00	40	Orang	40	100,00
			RO_Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	40.432.000	40.432.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	15.529.000	15.529.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN							
			RO_Layanan Pendidikan Kedinasan	2.038.894.000	2.038.891.230	100,00	53	Orang	53	100,00
<b>02_027203_INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			RO_Layanan Hukum	337.742.000	337.735.724	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD							
			RO_Penguatan Kapasitas PPUPD	210.186.000	210.183.892	100,00	600	Orang	600	100,00
			RO_STANDARISASI HASIL KERJA PPUPD INSPEKTORAT	999.814.000	899.747.028	89,99	2.514	Orang	2.514	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	639.735.000	639.735.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100.513.000	100.513.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal (SBKU)	10.800.000	10.800.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa satker vertikal (SBKU)	78.252.000	78.243.800	99,99	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	164.907.000	164.889.434	99,99	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	58.411.247.000	58.048.714.080	99,38	2	Layanan	2	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Prasarana Internal	466.299.000	465.684.294	99,87	1	Unit	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	533.701.000	533.690.600	100,00	1	Unit	1	100,00
			RO_Layanan Umum	656.125.000	656.122.689	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			RO_Layanan Data dan Informasi	309.038.000	309.037.500	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	42.462.000	42.461.270	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah							
			RO_LAYANAN FASILITASI KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN	131.996.000	130.933.028	99,19	3	Dokumen	3	100,00
			RO_Layanan Manajemen SDM	727.342.000	727.067.918	99,96	317	Orang	317	100,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	229.221.000	229.220.450	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus							
			RO_Audit Kinerja Audit Kinerja BPSDM	18.900.000	18.900.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja BNPP	29.045.000	29.045.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja BSKD	18.900.000	18.900.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina ADWIL	27.175.000	27.175.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina BANGDA	30.349.000	30.349.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina KEUDA	32.470.000	32.470.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina PEMDES	30.599.000	30.599.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen Bina POLPUM	27.175.000	27.175.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen DUKCAPIL	27.175.000	27.175.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja Ditjen OTDA	31.725.000	31.677.449	99,85	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja DKPP	24.754.000	24.754.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja IPDN	111.559.000	111.558.500	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Audit Kinerja Sekretariat Jenderal	30.440.000	30.440.000	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Daerah	52.660.000	52.659.450	100,00	1	Laporan	1	100,00
			RO_KOORDINASI PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.850.562.000	7.850.164.808	99,99	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Pembangunan Integritas Lingkup Kemendagri dan Pemda	135.165.000	135.097.920	99,95	1	Lembaga	1	100,00
			RO_PEMERIKSAAN INTERNAL LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL	1.458.080.000	1.458.071.935	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_PENANGANAN PEMERIKSAAN KHUSUS KEMENDAGRI DAN BNPP	416.467.000	416.316.009	99,96	2	Dokumen	2	100,00
			RO_PENGAWASAN INTERNAL LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL	2.267.138.000	2.262.766.673	99,81	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Pengawasan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Daerah	1.028.759.000	1.028.759.000	100,00	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT JENDERAL	8.683.411.000	8.682.839.005	99,99	38	PemerintahDaerah	38	100,00
			RO_PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KHUSUS	1.997.002.000	1.996.572.219	99,98	8	PemerintahDaerah	8	100,00
			RO_Pengelolaan Bersama Pelaksanaan MCP Kemendagri	340.296.000	340.144.039	99,96	38	PemerintahDaerah	38	100,00
			RO_PENINGKATAN KAPASITAS INSPEKTORAT DAERAH	13.495.000	13.495.000	100,00	38	Pemda	38	100,00
<b>03_027210 DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum							
			RO_Layanan Hukum	1.000.000.000	999.980.128	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum							
			RO_Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	17.300.000	17.299.400	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Dokumen RKA Satker Eselon I tanpa satker vertikal (SBKU)	51.700.000	51.699.400	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	1.000.000.000	999.997.115	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	239.997.412	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.543.781.000	2.543.768.949	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	49.135.426.000	49.105.069.777	99,94	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.500.000.000	1.499.911.573	99,99	189	Unit	189	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Umum	3.475.523.000	3.475.492.122	100,00	2	Layanan	2	100,00
			RO_Pembinaan Teknis Politik dan Pemerintahan Umum	500.000.000	499.998.489	100,00	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum							
			RO_Layanan Data dan Informasi	2.500.000.000	2.499.970.650	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum							
			RO_Layanan Manajemen SDM	350.000.000	349.998.388	100,00	287	Orang	287	100,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.200.000.000	1.199.980.884	100,00	1	Layanan	1	100,00
<b>04_027486 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah							
			RO_Layanan Hukum	1.965.552.000	1.915.608.468	97,46	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah							
			RO_Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	17.300.000	17.300.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	51.700.000	51.700.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	1.845.268.000	1.833.375.938	99,36	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	383.700.000	383.240.000	99,88	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.324.692.000	2.295.330.238	98,74	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	50.347.346.000	50.086.584.409	99,48	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	2.900.000.000	2.898.620.350	99,95	72	Unit	72	100,00
			RO_Layanan Umum	7.339.124.000	7.307.029.489	99,56	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah							
			RO_Layanan Data dan Informasi	1.012.000.000	929.187.950	91,82	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.100.000.000	1.098.470.690	99,86	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah							
			RO_Layanan Manajemen SDM	1.041.620.000	1.039.404.523	99,79	275	Orang	275	100,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	900.000.000	899.588.846	99,95	1	Layanan	1	100,00
<b>05_027753 DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Hukum	907.785.000	905.761.500	99,78	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 dengan Unit Vertikal 1 S.D. 6 Satker	560.000	-	0,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	463.190.000	463.180.950	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	1.726.851.000	1.720.211.746	99,62	2	Dokumen	2	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.386.276.000	1.343.999.870	96,95	2	Dokumen	2	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	67.196.040.000	65.884.399.048	98,05	2	Layanan	2	100,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	2.700.000.000	2.660.650.818	98,54	5	Unit	5	100,00
			RO_Layanan Protokol	1.027.510.000	1.027.482.330	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.082.295.000	1.080.027.410	99,79	45	Unit	45	100,00
			RO_Layanan Umum	784.543.000	782.961.885	99,80	2	Layanan	2	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Data dan Informasi	540.150.000	518.915.280	96,07	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen SDM	1.086.278.000	1.082.769.107	99,68	60	Orang	60	100,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	405.699.000	395.489.658	97,48	2	Layanan	2	100,00
<b>05_028449 BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	32.250.000	32.100.000	99,53	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	91.272.000	89.161.518	97,69	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	12.176.119.000	11.934.663.346	98,02	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen SDM	28.309.000	28.107.050	99,29	100	Orang	100	100,00
<b>05_028830_BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	20.000.000	19.498.000	97,49	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	66.000.000	65.865.000	99,80	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	11.204.504.000	11.024.425.717	98,39	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	75.000.000	74.835.000	99,78	12	Unit	12	100,00
			RO_Layanan Umum	40.302.000	40.282.300	99,95	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen SDM	65.144.000	64.852.400	99,55	71	Orang	71	100,00
<b>05_613629_BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	33.999.000	33.981.120	99,95	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	26.000.000	25.995.940	99,98	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	10.311.827.000	10.188.564.169	98,80	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	78.717.000	78.694.327	99,97	1	Dokumen	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa							
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	69.993.000	69.623.801	99,47	1	Layanan	1	100,00
<b>06_039729_DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah							
			RO_Pelaksanaan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2.890.860.000	2.890.706.806	99,99	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.437.257.000	2.436.916.758	99,99	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah							
			RO_Layanan Hukum	1.332.476.000	1.182.386.800	88,74	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah							
			RO_Layanan BMN	223.296.000	222.678.764	99,72	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	1.432.916.000	1.314.015.298	91,70	7	Dokumen	7	100,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	139.015.000	138.906.338	99,92	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Pembinaan Pembangunan Daerah	170.525.295.000	170.485.504.714	99,98	10	Dokumen	10	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal - SBKU	11.300.000	11.300.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal - SBKU	51.700.000	51.700.000	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	511.602.000	507.092.000	99,12	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	65.945.199.000	65.702.693.184	99,63	2	Layanan	2	100,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	1.367.065.000	1.365.088.500	99,86	1	Unit	1	100,00
			RO_Layanan Protokoler	1.028.279.000	1.022.615.639	99,45	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	508.546.000	507.206.000	99,74	86	Unit	86	100,00
			RO_Layanan Umum	2.306.108.000	2.305.163.041	99,96	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah							
			RO_Layanan Data dan Informasi	533.207.000	533.053.600	99,97	1	Layanan	1	100,00
			RO_Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.721.000.000	1.721.000.000	100,00	2	Unit	2	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah							
			RO_Layanan Manajemen SDM	141.910.000	134.830.197	95,01	291	Orang	291	100,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	404.994.000	343.209.674	84,74	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	32.400.000	30.230.000	93,30	1	Dokumen	1	100,00
<b>07_621892_DITJEN OTONOMI DAERAH</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah							
			RO_Layanan Hukum	1.691.558.000	1.686.488.200	99,70	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah							
			RO_Layanan Audit Internal	46.410.000	45.730.000	98,53	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan BMN	834.700.000	833.213.476	99,82	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Data dan Informasi	1.562.183.000	1.454.503.750	93,11	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	1.487.940.000	1.446.185.457	97,19	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8.406.000	8.305.000	98,80	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	11.960.000	11.280.000	94,31	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa satker vertikal	23.490.000	20.935.000	89,12	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	546.822.000	526.525.311	96,29	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	52.896.987.000	52.566.302.850	99,37	12	Layanan	12	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	850.000.000	848.034.446	99,77	1	Unit	1	100,00
			RO_Layanan Umum	606.000.000	602.677.175	99,45	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah							
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	154.460.000	151.628.280	98,17	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah							
			RO_Layanan Manajemen SDM	166.900.000	166.900.000	100,00	270	Orang	270	100,00
			RO_Layanan Reformasi Kinerja	381.556.000	371.107.312	97,26	1	Dokumen	1	100,00
<b>08_634082_DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			RO_Layanan Hukum	2.795.000.000	2.646.656.193	94,69	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			RO_Dukungan Pelayanan administrasi kependudukan (Operasionalisasi SiAK dan Jarkomdat)	29.412.298.000	28.661.148.175	97,45	552	Daerah(Prov/Kab/Kota)	552	100,00
			RO_Layanan BMN	2.773.640.000	2.740.532.029	98,81	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	620.000.000	619.999.715	100,00	3	Dokumen	3	100,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	212.743.000	196.013.146	92,14	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	587.220.000	557.383.972	94,92	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	8.310.000	8.150.109	98,08	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I - tanpa satker vertikal	26.700.000	26.676.228	99,91	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.498.632.000	3.480.235.029	99,47	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	58.832.215.000	56.060.487.634	95,29	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	700.000.000	689.248.178	98,46	1	Unit	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	6.646.502.000	5.777.191.504	86,92	58	Unit	58	100,00
			RO_Layanan Umum	1.461.744.000	1.438.314.101	98,40	1	Layanan	1	100,00
			RO_Pemeliharaan Perangkat KTP-el	2.322.372.000	2.139.052.310	92,11	1	SistemInformasi	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			RO_Layanan Data dan Informasi	3.419.322.000	3.376.376.319	98,74	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Protokol	338.000.000	193.399.534	57,22	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.482.844.000	2.422.822.504	97,58	1	Layanan	1	100,00
			Program Tata Kelola Kependudukan							
			Pembinaan Administrasi Kependudukan							
			RO_Akta Kelahiran yang diterbitkan	889.120.000	817.107.421	91,90	450.000	Akta	5.834.371	#####
			RO_Akta Kematian yang diterbitkan	512.522.000	497.139.651	97,00	300.000	Akta	1.866.044	622,01
			RO_Akta Perceraian yang diterbitkan	528.198.000	527.021.332	99,78	4.500	Akta	15.433	342,96
			RO_Akta Perkawinan yang diterbitkan	800.000.000	797.099.434	99,64	35.000	Akta	184.020	525,77
			RO_Blangko KTP-el untuk daerah	283.370.545.000	283.370.113.923	100,00	27.769.141	Keping	27.769.141	100,00
			Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
			RO_Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.595.517.000	10.545.892.107	99,53	552	Daerah(Prov/Kab/Kota)	552	100,00
			RO_Fasilitasi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.319.474.000	6.239.479.546	98,73	552	Daerah(Prov/Kab/Kota)	552	100,00
			RO_Fasilitasi Integrasi data kependudukan Daerah	5.171.166.000	5.149.268.341	99,58	552	Daerah(Prov/Kab/Kota)	552	100,00
			RO_Fasilitasi Integrasi data kependudukan Nasional	1.926.250.000	1.900.529.489	98,66	100	Daerah(Prov/Kab/Kota)	100	100,00
			RO_Fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1.994.736.000	1.951.038.543	97,81	552	Daerah(Prov/Kab/Kota)	552	100,00
			RO_Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	2.500.001.000	2.498.695.261	99,95	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	200,00
			RO_Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	2.713.170.000	2.705.710.062	99,73	50	Daerah (Prov/Kab/Kota)	50	100,00
			Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan							
			RO_Fasilitasi Data Balik Nasional	3.370.691.000	3.367.544.594	99,91	250	Lembaga	250	100,00
			RO_Fasilitasi Data Kependudukan Nasional	3.886.702.000	3.862.033.179	99,37	250	Lembaga	250	100,00
			RO_Fasilitasi Data Balik Daerah	652.669.000	652.424.206	99,96	250	Lembaga	250	100,00
			RO_Fasilitasi Data Kependudukan Daerah	767.517.000	767.373.622	99,98	250	Lembaga	250	100,00
			RO_Fasilitasi Online Layanan Jaringan Komunikasi Data	191.316.025.000	190.706.447.460	99,68	522	Daerah(Prov/Kab/Kota)	522	100,00
			RO_Pelayanan Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	9.639.697.000	9.606.171.982	99,65	1.000	Lembaga	6.774	677,40
			RO_Sarpras SIAK serta DC dan DRC Kependudukan	21.942.074.000	21.881.391.548	99,72	1	Unit	1	100,00
			RO_Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	313.407.259.000	312.966.660.084	99,86	1	SistemInformasi	1	100,00
			RO_Sistem Informasi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	194.900.000	194.900.000	100,00	1	SistemInformasi	1	100,00
			RO_Sistem Informasi Integrasi Data dan Dokumen Kependudukan Nasional	49.176.375.000	49.132.936.479	99,91	1	SistemInformasi	1	100,00
			RO_Sistem Informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	250.000.000	245.715.487	98,29	1	SistemInformasi	1	100,00
			Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital							
			RO_Aplikasi ID digital	6.000.000	5.974.700	99,58	1	SistemInformasi	1	100,00
			RO_Dukungan Manajemen PMU Identitas Digital	9.238.622.000	5.003.182.019	54,16	1	layanan	1	100,00
			RO_Fasilitasi layanan adminduk bagi kelompok penduduk rentan	1.812.436.000	1.586.584.903	87,54	15	Daerah(Prov/Kab/Kota)	15	100,00
			RO_Fasilitasi Pendaftaran Penduduk melalui layanan jemput bola di daerah 12 Provinsi dengan cakupan kinerja rendah	1.596.689.000	1.594.898.300	99,89	15	Daerah(Prov/Kab/Kota)	15	100,00
			RO_Grand Desain Penyelenggaraan Adminduk	721.500.000	639.312.613	88,61	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00
			RO_Infrastruktur ABIS untuk sidik jari dan deduplikasi berbasis iris yang dimodernisasi	183.265.450.000	183.265.447.314	100,00	40	Unit	40	100,00
			RO_Infrastruktur Dukcapil untuk Pemanfaatan Data Kependudukan	26.693.037.000	26.693.037.000	100,00	4	Unit	4	100,00
			RO_Penguatan Kelembagaan Ditjen dan Dinas Dukcapil Dalam Pelayanan Adminduk	1.447.170.000	1.420.237.525	98,14	552	Orang	552	100,00
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Dalam Rangka Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	4.971.146.000	4.946.648.528	99,51	1.656	Orang	1.656	100,00
			RO_Peningkatan Kapasitas Aparatur PMU ID Digital	1.764.000.000	1.764.000.000	100,00	350	Orang	350	100,00
			RO_Perangkat dan Jaringan Layanan Adminduk di daerah perbatasan	1.290.000.000	1.289.997.600	100,00	6	Unit	6	100,00
			RO_Peraturan Menteri mengenai Grand Desain Penyelenggaraan Adminduk	85.350.000	-	0,00	1	PerMen	1	100,00
			RO_Promosi interoperabilitas dan pengakuan ID digital dengan Lembaga Pengguna	2.808.931.000	2.797.258.875	99,58	1	Kegiatan	1	100,00
			RO_Rebranding Dukcapil	3.777.000.000	3.591.131.082	95,08	1	layanan	1	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Rekomendasi peningkatan layanan administrasi kependudukan di daerah	1.121.200.000	1.094.899.067	97,65	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00
			RO_Rekomendasi Mekanisme Optimalisasi Sistem Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Secara Merata	848.697.000	57.000.000	6,72	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00
			RO_Rekomendasi Standarisasi peralatan pelayanan adminduk	195.197.000	7.109.600	3,64	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00
			RO_Rekomendasi Status Kepegawaian Tenaga Non ASN	257.230.000	221.393.953	86,07	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00
			RO_Reviu dan analisis penegakkan hukum	639.470.000	365.647.220	57,18	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00
			RO_Roadmap e-KYC dan sistem otentikasi biometrik	4.116.574.000	173.267.330	4,21	1	NSPK	1	100,00
			RO_Roadmap pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, e-KYC dan digital ID, dan pengelolaan lembaga pengguna	512.335.000	511.505.161	99,84	1	NSPK	1	100,00
			RO_Roadmap pengadaan infrastruktur TIK dan informasi serta keamanan siber	115.040.000	114.859.500	99,84	1	NSPK	1	100,00
			RO_Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk	1.498.058.000	1.474.407.764	98,42	1	Unit	1	100,00
			RO_Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk di wilayah bencana atau keadaan darurat lainnya	180.624.000	171.790.000	95,11	15	Unit	15	100,00
			RO_Sistem baru dan implementasi proses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, e-KYC dan ID digital, serta pengelolaan lembaga pengguna	864.419.000	845.556.958	97,82	1	SistemInformasi	1	100,00
			RO_Standar autentikasi biometrik dan teknologi deduplikasi adminduk	76.900.000	13.142.700	17,09	1	NSPK	1	100,00
			RO_Standar pengarsipan digital dokumen kependudukan	743.000.000	685.205.588	92,22	1	NSPK	1	100,00
			RO_Tanda tangan elektronik dan standardisasi data alamat	69.375.000	69.375.000	100,00	1	SistemInformasi	1	100,00
<b>09_662766 DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah							
			RO_Layanan Bantuan Hukum	150.000.000	149.615.478	99,74	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Hukum	250.000.000	248.548.883	99,42	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah							
			RO_Layanan BMN	170.000.000	166.962.722	98,21	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	550.000.000	544.168.095	98,94	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	238.283.000	99,28	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	17.300.000	17.231.750	99,61	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa satker vertikal	51.700.000	48.948.000	94,68	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	337.340.000	334.761.343	99,24	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	56.630.016.000	56.260.130.806	99,35	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	2.100.000.000	2.099.066.286	99,96	82	Unit	82	100,00
			RO_Layanan Umum	1.620.000.000	1.601.456.790	98,86	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah							
			RO_Layanan Data dan Informasi	290.000.000	287.449.744	99,12	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	458.000.000	451.128.684	98,50	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah							
			RO_Layanan Manajemen SDM	200.000.000	197.905.655	98,95	270	Orang	270	100,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	390.000.000	386.756.695	99,17	1	Layanan	1	100,00
<b>11_403222 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			RO_Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	175.000.000	174.995.600	100,00	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			RO_Dokumen Lakin Satker - Eselon I Tanpa Satker Vertikal	17.300.000	14.218.100	82,19	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	228.865.160	95,36	5	Dokumen	5	100,00
			RO_Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker - Eselon I Tanpa Satker Vertikal	51.700.000	48.329.100	93,48	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Manajemen Keuangan	700.000.000	699.999.120	100,00	2	Dokumen	2	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	304.507.000	269.726.184	88,58	5	Dokumen	5	100,00
			RO_Layanan Perencanaan dan Penganggaran	590.394.000	533.262.939	90,32	5	Dokumen	5	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	39.870.348.000	39.199.837.242	98,32	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Prasarana Internal	425.988.000	425.954.475	99,99	7	Unit	7	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	304.012.000	303.707.100	99,90	23	Unit	23	100,00
			RO_Layanan Umum	1.535.000.000	1.510.767.263	98,42	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			RO_Layanan Data dan Informasi	70.000.000	69.638.343	99,48	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri							
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	765.062.000	764.298.879	99,90	2	Layanan	2	100,00
			RO_Layanan Pendidikan dan Pelatihan	234.938.000	225.267.864	95,88	25	Orang	25	100,00
<b>12_027114_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Perkantoran	20.932.246.000	20.930.326.689	99,99	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	283.250.000	271.048.000	95,69	23	Unit	23	100,00
			RO_Pengelolaan keuangan	158.500.000	153.173.975	96,64	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	81.192.000	81.100.634	99,89	1	Dokumen	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Manajemen SDM	100.000.000	99.639.161	99,64	92	Orang	92	100,00
<b>12_027177_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	111.932.000	111.931.788	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	15.082.966.000	15.081.817.058	99,99	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	529.858.000	529.795.320	99,99	93	Unit	93	100,00
			RO_Layanan Umum	150.000.000	149.998.960	100,00	2	Layanan	2	100,00
			RO_Pengelolaan keuangan	91.424.000	90.669.865	99,18	3	Dokumen	3	100,00
			RO_Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	121.644.000	121.643.455	100,00	3	Dokumen	3	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Manajemen SDM	321.866.000	320.567.174	99,60	59	Orang	59	100,00
<b>12_403216_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24.920.000	24.895.764	99,90	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	16.180.042.000	16.167.758.892	99,92	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	821.400.000	809.758.360	98,58	79	Unit	79	100,00
			RO_Layanan Umum	97.250.000	97.212.281	99,96	1	Layanan	1	100,00
			RO_Pengelolaan keuangan	60.070.000	59.659.050	99,32	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	85.080.000	84.614.518	99,45	1	Dokumen	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Manajemen SDM	63.270.000	63.051.307	99,65	57	Orang	57	100,00
<b>12_403231_BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>										
			Program Dukungan Manajemen							
			Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Hukum	167.800.000	167.022.896	99,54	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Dokumen Lakin Satker Eselon I dengan Unit Vertikal 1 s/d 6 Unit satker	135.160.000	135.117.599	99,97	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 Dengan Unit Vertikal 1 S/D 6 Satker	210.468.000	210.373.031	99,95	1	Layanan	1	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	383.722.000	381.091.360	99,31	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	65.372.284.000	65.348.197.548	99,96	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	4.008.000.000	4.004.699.223	99,92	59	Unit	59	100,00
			RO_Layanan Umum	1.400.000.000	1.393.751.603	99,55	1	Layanan	1	100,00
			RO_Pengelolaan keuangan	912.296.000	912.106.337	99,98	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	635.000.000	634.409.343	99,91	1	Dokumen	1	100,00
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Data dan Informasi	515.534.000	515.328.250	99,96	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	871.113.000	889.529.798	102,11	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Integrasi Sistem Informasi	507.704.000	505.657.823	99,60	1	Layanan	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Manajemen SDM	250.000.000	249.766.273	99,91	206	Orang	206	100,00
			RO_Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	237.850.000	237.635.160	99,91	1	Layanan	1	100,00
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi							
			RO_NSPK Standarisasi dan Sertifikasi	1.700.000.000	1.671.853.900	98,34	17	NSPK	17	100,00
			RO_Sertifikasi Jabatan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	1.598.459.000	1.598.458.948	100,00	817	Orang	817	100,00
			<b>12_506137_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI</b>							
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	20.000.000	17.190.000	85,95	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	13.444.633.000	13.394.432.721	99,63	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	717.538.000	717.278.000	99,96	45	Unit	45	100,00
			RO_Layanan Umum	150.000.000	149.942.000	99,96	1	Layanan	1	100,00
			RO_Pengelolaan keuangan	703.343.000	652.202.739	92,73	1	Dokumen	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Manajemen SDM	39.800.000	32.460.000	81,56	50	Orang	50	100,00
			<b>12_506138_BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>							
			Program Dukungan Manajemen							
			Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Pemantauan dan Evaluasi	88.000.000	90.070.933	102,35	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Layanan Perkantoran	8.436.672.000	8.454.492.272	100,21	1	Layanan	1	100,00
			RO_Layanan Sarana Internal	1.100.000.000	1.100.000.000	100,00	20	Unit	20	100,00
			RO_Layanan Umum	37.180.000	37.180.000	100,00	1	Layanan	1	100,00
			RO_Pengelolaan keuangan	24.390.000	24.338.400	99,79	1	Dokumen	1	100,00
			RO_Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	41.130.000	41.128.400	100,00	1	Dokumen	1	100,00
			Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia							
			RO_Layanan Manajemen SDM	26.320.000	26.305.700	99,95	22	Orang	22	100,00
			<b>TOTAL SUB FUNGSI: PELAYANAN UMUM</b>	<b>2.801.066.395.000</b>	<b>2.777.852.397.816</b>	<b>99,17</b>	<b>28.581.641</b>		<b>35.697.798</b>	<b>124,90</b>

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>04_019080_Sekretariat Daerah Provinsi Dki Jakarta</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	226.279.000	224.601.519	99,26	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_027486_DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	1.000.000.000	995.959.668	99,60	46	Daerah (Prov/Kab/Kota)	46	100,00
			RO_Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	944.453.000	909.647.939	96,31	80	Daerah (Prov/Kab/Kota)	80	100,00
			RO_Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	1.855.413.000	1.780.664.054	95,97	86	Daerah (Prov/Kab/Kota)	86	100,00
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	15.146.686.000	6.555.069.514	43,28	22	Rekomendasi Kebijakan	22	100,00
			RO_Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	1.574.090.000	1.540.543.700	97,87	76	Daerah (Prov/Kab/Kota)	90	118,42
			RO_Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	1.974.600.000	1.962.639.969	99,39	34	Laporan	34	100,00
			RO_Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1.000.000.000	981.101.592	98,11	18	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18	100,00
			RO_Piloting Penguatan Peran Kecamatan (Frontline Service) dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa	41.905.977.000	40.457.506.726	96,54	60	Daerah(Prov/Kab/Kota)	60	100,00
	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
			RO_Bantuan Sarpras Tibumtranmas	2.040.000.000	1.920.079.156	94,12	100	Unit	100	100,00
			RO_Daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan	1.000.000.000	998.878.650	99,89	38	Provinsi	38	100,00
			RO_Fasilitas dan dukungan trantibumlinmas dalam pemilu dan pilkada Tahun 2024	16.700.370.000	16.485.573.771	98,71	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	50	131,58
			RO_NSPK Urusan Trantibumlinmas	500.000.000	496.915.850	99,38	3	NSPK	3	100,00
			RO_Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	680.318.000	672.795.544	98,89	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	1.259.597.000	1.172.616.419	93,09	449	Daerah (Prov/Kab/Kota)	449	100,00
			RO_Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	1.020.477.000	966.333.350	94,69	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Penerapan SPM sub bidang Bencana	1.038.597.000	1.037.302.574	99,88	542	Daerah (Prov/Kab/Kota)	542	100,00
			RO_Penerapan SPM sub urusan Trantibum	1.038.597.000	1.016.946.255	97,92	542	Daerah (Prov/Kab/Kota)	542	100,00
<b>04_029134_Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.491.577.000	1.373.550.942	92,09	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_039667_Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.273.638.000	1.234.335.307	96,91	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_049061_Sekretariat Daerah Provinsi Di Yogyakarta</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah									
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	682.848.000	682.525.400	99,95	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_069084_Sekretariat Daerah Provinsi Aceh</b>										

9/2/24

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.700.065.000	1.579.383.127	92,90	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_079078_Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.180.436.000	1.175.269.386	99,56	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_089106_Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	921.996.000	846.306.831	91,79	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_099438_Sekretariat Daerah Provinsi Riau</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.233.126.000	1.230.538.554	99,79	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_109074_Sekretariat Daerah Provinsi Jambi</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	964.685.000	964.667.484	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_119082_Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.205.639.000	1.203.371.300	99,81	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_129074_Sekretariat Daerah Provinsi Lampung</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.010.686.000	988.234.179	97,78	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_129098_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	81.086.000	81.086.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_139078_Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.308.465.000	1.304.049.335	99,66	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_149072_Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.048.128.000	1.008.595.750	96,23	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_149130_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah</b>										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									

9/2/24

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	89.967.000	89.966.200	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_159071_Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	899.461.000	871.772.544	96,92	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_179088_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	137.948.000	137.926.774	99,98	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_179223_Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	2.299.364.000	2.299.230.191	99,99	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_189087_Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.210.613.000	1.208.124.874	99,79	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_199080_Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.420.049.000	1.363.020.130	95,98	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_209071_Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	939.891.000	676.094.026	71,93	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_209095_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	151.727.000	151.727.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_219062_Sekretariat Daerah Prop. Maluku</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.409.858.000	1.421.011.129	100,79	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_229068_Sekretariat Daerah Provinsi Bali</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.157.518.000	1.156.325.497	99,90	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_239236_Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.400.767.000	1.391.857.382	99,36	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_249136_Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	2.075.913.000	2.069.998.724	99,72	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_249174_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	161.305.000	161.247.380	99,96	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_250048_Sekretariat Daerah Provinsi Papua</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	546.999.000	502.955.260	91,95	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_259084_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	19.530.000	-	0,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_269093_Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	847.893.000	842.992.046	99,42	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_289095_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	79.725.000	77.492.000	97,20	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_289174_Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.705.973.000	1.665.394.600	97,62	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_299348_Sekretariat Daerah Provinsi Banten</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	510.336.000	466.699.300	91,45	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_309148_Sekretariat Daerah Provinsi Bangka Belitung</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	937.414.000	923.283.183	98,49	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_319061_Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	977.252.000	976.490.000	99,92	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_329116_Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	686.638.000	683.991.817	99,61	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_339161_Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	70.110.000	70.110.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_340166_Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	1.075.573.000	1.069.678.106	99,45	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_349011_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	77.667.000	76.935.600	99,06	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_359002_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	83.462.000	82.662.353	99,04	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_417697_Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	840.613.000	822.483.518	97,84	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433316_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	87.184.000	87.144.408	99,95	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433317_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	33.549.000	30.320.000	90,38	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433318_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	33.115.000	32.730.000	98,84	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433341_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	44.673.000	43.410.000	97,17	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433342_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	119.701.000	118.567.190	99,05	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433343_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bangka Belitung</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	59.728.000	59.691.200	99,94	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433344_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	94.253.000	94.199.450	99,94	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433345_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	65.916.000	65.158.000	98,85	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433347_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	35.864.000	30.572.600	85,25	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433348_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	95.455.000	95.455.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433349_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	82.427.000	82.078.980	99,58	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433350_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	116.121.000	116.121.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433351_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	118.671.000	118.670.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433352_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	77.252.000	77.130.000	99,84	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_433353_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	96.661.000	96.613.260	99,95	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484101_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	160.912.000	160.718.260	99,88	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484102_Bappeda Provinsi Aceh</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	225.979.000	184.132.434	81,48	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484103_Inspektorat Provinsi Aceh</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	131.697.000	126.699.624	96,21	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484105_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	79.797.000	75.586.632	94,72	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484106_Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara)</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	145.426.000	145.255.789	99,88	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484107_Inspektorat Provinsi Sumatera Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	138.739.000	126.226.000	90,98	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484109_Bappeda Provinsi Riau</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	182.328.000	179.572.245	98,49	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484110_Inspektorat Provinsi Riau</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	94.548.000	93.788.650	99,20	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484112_Bappeda Provinsi Kepulauan Riau</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	91.638.000	87.220.059	95,18	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484113_Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	29.014.000	26.819.700	92,44	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484115_Bappeda Provinsi Jambi</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	235.133.000	231.219.470	98,34	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484116_Inspektorat Provinsi Jambi</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	112.556.000	111.424.500	98,99	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484118_Bappeda Provinsi Sumatera Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	177.184.000	174.523.305	98,50	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484119_Inspektorat Provinsi Sumatera Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	87.264.000	83.935.328	96,19	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484121_Bappeda Provinsi Sumatera Selatan</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	190.849.000	188.230.730	98,63	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484122_Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	50.723.000	47.562.816	93,77	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484124_Bappeda Provinsi Lampung</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	174.925.000	174.684.500	99,86	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484125_Inspektorat Provinsi Lampung</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	102.290.000	101.149.500	98,89	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484127_Bappeda Provinsi Bengkulu</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	183.528.000	183.202.400	99,82	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484128_Inspektorat Provinsi Bengkulu</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	38.343.000	38.335.800	99,98	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484131_Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	167.982.000	167.243.772	99,56	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484132_Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	119.299.000	118.123.000	99,01	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484134_Bappeda Provinsi Banten</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	56.350.000	55.914.000	99,23	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484135_Inspektorat Provinsi Banten</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	25.845.000	25.845.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484137_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	125.740.000	124.879.660	99,32	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484138_Bappeda Provinsi Jawa Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	277.952.000	277.224.503	99,74	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484139_Inspektorat Provinsi Jawa Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	111.620.000	111.500.128	99,89	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484145_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	140.235.000	140.198.390	99,97	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484146_Bappeda Provinsi Jawa Tengah</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	224.308.000	189.950.500	84,68	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484147_Inspektorat Provinsi Jawa Tengah</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	201.868.000	200.608.490	99,38	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484149_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Diy</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	69.691.000	69.691.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484150_Bappeda Provinsi Di Yogyakarta</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	136.969.000	136.134.000	99,39	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484151_Inspektorat Provinsi Di Yogyakarta</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	68.469.000	68.469.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484153_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	91.356.000	91.346.900	99,99	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484154_Bappeda Provinsi Jawa Timur</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	194.459.000	191.977.800	98,72	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484157_Bappeda Provinsi Bali</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	150.263.000	137.287.000	91,36	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484158_Inspektorat Provinsi Bali</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	70.431.000	69.947.640	99,31	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484160_Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	212.726.000	212.678.000	99,98	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484161_Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	90.872.000	90.597.179	99,70	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484163_Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	409.633.000	409.624.141	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484164_Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	140.345.000	124.391.000	88,63	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484166_Bappeda Provinsi Kalimantan Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	283.204.000	274.793.716	97,03	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484167_Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	85.550.000	84.780.090	99,10	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484169_Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	185.573.000	184.596.198	99,47	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484170_Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	114.304.000	113.967.398	99,71	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484172_Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	51.088.000	35.861.000	70,19	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484173_Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	155.532.000	155.383.136	99,90	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484177_Bappeda Provinsi Kalimantan Timur</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	113.306.000	109.904.491	97,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484178_Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	32.427.000	16.340.000	50,39	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484180_Bappeda Provinsi Kalimantan Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	84.634.000	56.045.399	66,22	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484181_Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	52.919.000	52.750.100	99,68	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484183_Bappeda Provinsi Sulawesi Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	412.149.000	400.652.251	97,21	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484184_Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	178.390.000	178.390.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484187_Bappeda Provinsi Gorontalo</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	135.697.000	135.670.109	99,98	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484188_Inspektorat Provinsi Gorontalo</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	56.211.000	56.155.000	99,90	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484190_Bappeda Provinsi Sulawesi Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	153.991.000	153.989.920	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484191_Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	78.041.000	77.978.000	99,92	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484193_Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	125.666.000	124.627.283	99,17	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484194_Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	117.530.000	117.508.300	99,98	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484196_Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	200.834.000	200.802.800	99,98	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484197_Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	83.870.000	82.935.440	98,89	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484199_Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	247.930.000	247.930.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484200_Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	141.202.000	139.961.200	99,12	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484202_Bappeda Provinsi Maluku</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	331.855.000	331.193.000	99,80	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484203_Inspektorat Provinsi Maluku</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	68.462.000	68.219.118	99,65	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484205_Bappeda Provinsi Maluku Utara</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	213.782.000	208.681.750	97,61	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484209_Inspektorat Provinsi Papua</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	63.718.000	63.716.300	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>04_484213_Inspektorat Provinsi Papua Barat</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							
			RO_Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	43.879.000	43.879.000	100,00	0	Rekomendasi Kebijakan	0	
<b>05_027753_DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA</b>										
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa							
			RO_Kebijakan/Regulasi/Pedoman Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	550.178.000	522.532.833	94,98	1	NSPK	1	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penataan kelembagaan Desa							
			RO_Fasilitasi Pembentukan dan penataan Lembaga BPD	451.910.000	451.134.000	99,83	10	Lembaga	10	100,00
			RO_Fasilitasi pembentukan dan penataan Lembaga Linmas	350.000.000	344.541.196	98,44	75	Lembaga	75	100,00
			RO_Lembaga PKK yang tertata	3.500.000.000	3.435.605.297	98,16	4.500	Lembaga	4.500	100,00
			RO_Lembaga Posyandu yang tertata	1.500.000.000	1.378.374.623	91,89	2.500	Lembaga	2.500	100,00
			RO_LPM yang Tertata dan Berdaya	350.000.000	349.063.062	99,73	75	Lembaga	75	100,00
			Penataan sistem pelayanan administrasi desa							
			RO_Nama dan kode desa yang telah divalidasi dan diklarifikasi	12.548.000	12.540.000	99,94	50	Desa	50	100,00
			RO_Desa dan Kelurahan yang melakukan pemutakhiran data Prodeskel	501.832.000	500.637.333	99,76	10.000	Desa	10.000	100,00
			RO_Desa dengan status kategori "Berkembang" dan "Cepat Berkembang"	567.380.000	564.430.000	99,48	2.000	Desa	2.000	100,00
			RO_Desa yang Ditata dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa	454.354.000	454.349.000	100,00	5	Desa/Kelurahan	5	100,00
			RO_Desa yang menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif	414.000.000	413.402.660	99,86	70	Desa	70	100,00
			RO_Desa yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE dan Desa yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa serentak	550.000.000	549.995.000	100,00	200	Desa	200	100,00
			RO_Desa yang Telah Difasilitasi dalam Penataan Kewenangan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa	213.338.000	213.334.000	100,00	50	Desa	50	100,00
			RO_Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	1.000.000.000	999.297.000	99,93	100	Desa	100	100,00
			RO_Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	690.000.000	660.920.000	95,79	105	Desa	105	100,00
			RO_Desa yang tertib dan disiplin anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa	497.961.000	470.960.000	94,58	90	Desa	90	100,00
			RO_Dukungan Delegasi RI pada Sidang Internasional	169.564.000	169.564.000	100,00	1	Kegiatan	1	100,00
			RO_Sistem Informasi Ditjen Bina Pemdes yang Terintegrasi dengan Layanan Prodeskel	54.000.000	53.500.000	99,07	1	SistemInformasi	1	100,00
			Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa							
			RO_Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	70.257.717.000	61.879.154.111	88,07	1.008	Daerah(Prov/Kab/Kota)	1.008	100,00
			RO_Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang ditingkatkan Kualitasnya	702.827.417.000	665.442.235.861	94,68	212.263	Orang	212.263	100,00
			RO_Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	31.316.106.000	29.185.930.493	93,20	40.000	Desa	40.000	100,00
			RO_Dukungan Manajemen P3PD	274.428.772.000	203.671.455.139	74,22	18	layanan	18	100,00
			RO_Sistem dan Prosedur yang dikembangkan	6.580.797.000	6.285.205.380	95,51	9	NSPK	9	100,00
<b>05</b>	<b>028449</b>		<b>BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA</b>							
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa							
			RO_Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	1.061.156.000	1.056.922.504	99,60	330	Orang	330	100,00
<b>05</b>	<b>028830</b>		<b>BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG</b>							
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa							
			RO_Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	1.633.483.000	1.623.095.000	99,36	642	Orang	642	100,00
<b>05</b>	<b>613629</b>		<b>BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG</b>							
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa							
			RO_Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	1.062.322.000	999.602.086	94,10	330	Orang	300	90,91
<b>06</b>	<b>039729</b>		<b>DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
			Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
			Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah							
			RO_Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Tahun 2024	9.912.804.000	8.396.456.403	84,70	38	Provinsi	38	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	59.556.992	59,56	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang persampahan (LSDP)	514.431.000	-	0,00	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	197.780.000	184.780.000	93,43	1	PerMen	1	100,00
			RO_Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan	18.957.781.000	16.558.980.547	87,35	1	Sistem Informasi	1	100,00
			Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah							
			RO_Rekomendasi Hasil Pengendalian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri	205.679.000	118.065.967	57,40	3	Rekomendasi	3	100,00
			RO_Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	450.000.000	336.669.774	74,82	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)	11	100,00
			RO_Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	650.000.000	487.720.733	75,03	28	Daerah (Prov/Kab/Kota)	28	100,00
			RO_Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	650.000.000	472.701.500	72,72	32	Daerah (Prov/Kab/Kota)	32	100,00
			RO_Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di lokasi OSS	697.000.000	674.412.522	96,76	23	Daerah (Prov/Kab/Kota)	23	100,00
			RO_Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perkotaan)	979.000.000	651.717.059	66,57	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
			RO_Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	648.300.000	506.533.410	78,13	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	699.100.000	698.196.059	99,87	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	30	100,00
			RO_Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK	450.000.000	393.839.179	87,52	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)	11	100,00
			RO_Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak	500.000.000	498.727.766	99,75	60	Daerah (Prov/Kab/Kota)	60	100,00
			RO_Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	822.490.000	736.409.515	89,53	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)	412	100,00
			RO_Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Air Limbah	1.100.000.000	876.384.108	79,67	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)	412	100,00
			RO_Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	1.100.000.000	875.919.550	79,63	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)	412	100,00
			RO_Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat	1.100.000.000	924.700.499	84,06	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)	412	100,00
			RO_Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	872.177.000	854.089.003	97,93	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)	412	100,00
			RO_Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas	927.410.000	905.725.072	97,66	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)	412	100,00
			RO_Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	545.736.000	423.375.844	77,58	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	514	100,00
			RO_Daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	400.000.000	370.905.699	92,73	8	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8	100,00
			RO_Daerah yang ranperda rencana tata ruang daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	36.132.000	36.130.100	99,99	43	Daerah(Prov/Kab/Kota)	68	158,14
			RO_Fasilitasi Promosi dan Kemudahan Berusaha UMKM Daerah	358.336.000	358.333.471	100,00	30	Daerah(Prov/Kab/Kota)	30	100,00
			RO_Fasilitasi Pelaksanaan Perhutanan Sosial Daerah	299.540.000	248.754.917	83,05	20	Daerah(Prov/Kab/Kota)	20	100,00
			RO_Fasilitasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	45.000.000	45.000.000	100,00	15	Daerah(Prov/Kab/Kota)	15	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Fasilitasi Pelayanan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di daerah	98.928.000	94.820.250	95,85	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	34	89,47
			RO_Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan pada 4 DOB Papua	1.700.000.000	1.242.962.934	73,12	4	Provinsi	4	100,00
			RO_Fasilitasi Pencapaian Target Rencana Umum Energi Daerah RUED-P	74.361.000	38.302.037	51,51	4	Daerah(Prov/Kab/Kota)	1	25,00
			RO_Fasilitasi Penerapan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Daerah	41.850.000	40.383.320	96,50	15	Daerah(Prov/Kab/Kota)	15	100,00
			RO_Fasilitasi Penerapan Kebijakan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Daerah	100.000.000	64.913.530	64,91	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi Penerapan Pengelolaan Sumber Daya Air Strategis (SIMURP)	10.592.140.000	10.527.874.202	99,39	34	Daerah(Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Fasilitasi Penerapan Penyederhanaan Regulasi dan Kebijakan terkait Penanaman Modal dan Investasi Daerah	204.699.000	166.182.841	81,18	20	Daerah(Prov/Kab/Kota)	20	100,00
			RO_Fasilitasi Penerapan SDI pembangunan olahraga nasional	29.950.000	26.411.500	88,19	30	Daerah(Prov/Kab/Kota)	30	100,00
			RO_Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Sungai Citarum (ISWMP)	27.460.070.000	27.423.174.675	99,87	15	Daerah(Prov/Kab/Kota)	15	100,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	1.994.860.000	1.404.161.336	70,39	33	Daerah (Prov/Kab/Kota)	33	100,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (NUFReP)	2.113.531.000	2.095.030.000	99,12	5	Daerah(Prov/Kab/Kota)	5	100,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	240.333.000	200.782.474	83,54	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Kewirausahaan, usaha mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi di Daerah	1.255.019.000	1.251.344.208	99,71	5	Daerah(Prov/Kab/Kota)	5	100,00
			RO_Fasilitasi Penguatan Pokja Daerah yang telah Menyusun GDPK 5 Pilar	97.990.000	66.187.900	67,55	55	Daerah(Prov/Kab/Kota)	23	41,82
			RO_Fasilitasi Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	610.679.000	531.889.579	87,10	34	Daerah(Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah	400.000.000	154.278.418	38,57	60	Daerah (Prov/Kab/Kota)	60	100,00
			RO_Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan dan Pengendalian Persampahan Daerah	49.725.000	16.363.000	32,91	448	Daerah(Prov/Kab/Kota)	448	100,00
			RO_Fasilitasi Peningkatan Kinerja Daerah dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	961.983.000	935.916.278	97,29	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	514	100,00
			RO_Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah (INEY)	12.139.665.000	11.641.622.818	95,90	100	Daerah(Prov/Kab/Kota)	100	100,00
			RO_Fasilitasi Penyediaan Air Minum Perkotaan Kawasan Permukiman (NUWSP)	10.929.358.000	10.929.358.000	100,00	12	Daerah(Prov/Kab/Kota)	12	100,00
			RO_Fasilitasi Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	9.672.375.000	9.441.163.616	97,61	56	Daerah(Prov/Kab/Kota)	56	100,00
			RO_Fasilitasi penyelenggaraan penerapan kearsipan	49.675.000	49.475.000	99,60	34	Daerah(Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Transmigrasi	166.850.000	127.964.280	76,69	23	Daerah(Prov/Kab/Kota)	23	100,00
			RO_Fasilitasi Penyusunan dan Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS ke dalam RPJMD	292.508.000	114.494.250	39,14	34	Daerah(Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Fasilitasi Penyusunan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah dalam Rangka Pemindahan Ibu kota	25.000.000	7.186.000	28,74	2	Daerah(Prov/Kab/Kota)	2	100,00
			RO_Fasilitasi Percepatan Penurunan Stunting di daerah	100.000.000	-	0,00	12	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0	0,00
			RO_Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Resiko Banjir di Daerah Terpilih pada Area Cekungan Tangkapan Sungai (FSMRB)	4.486.533.000	4.466.120.629	99,55	5	Daerah(Prov/Kab/Kota)	5	100,00
			RO_Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Risiko Bencana di Kawasan Pertanian (FMCPNJP)	1.714.054.000	1.697.373.691	99,03	15	Daerah(Prov/Kab/Kota)	15	100,00
			RO_Fasilitasi Perencanaan Terpadu dalam Pembangunan Daerah di Perkotaan (NUDP)	98.120.632.000	98.027.207.565	99,90	15	Daerah(Prov/Kab/Kota)	15	100,00
			RO_Implementasi Lahan Pertanian Beririgasi yang Terintegrasi (IPDMIP)	606.583.000	596.528.235	98,34	88	Daerah(Prov/Kab/Kota)	88	100,00
			RO_Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	900.000.000	703.106.828	78,12	48	Daerah (Prov/Kab/Kota)	48	100,00
			RO_NSPK dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang disinkronkan	1.179.957.000	819.006.646	69,41	20	NSPK	20	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RO_Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	700.000.000	610.484.540	87,21	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	700.000.000	455.965.801	65,14	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi	650.000.000	618.742.095	95,19	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
			RO_Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	800.000.000	799.921.500	99,99	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	500.000.000	491.491.408	98,30	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	500.000.000	498.567.190	99,71	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	500.000.000	251.758.000	50,35	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	600.000.000	456.538.969	76,09	25	Daerah (Prov/Kab/Kota)	35	140,00
			RO_Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	438.136.000	414.924.212	94,70	9	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7	77,78
			RO_Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	850.000.000	749.999.970	88,24	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	500.000.000	498.243.634	99,65	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
<b>11_403222_BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI</b>										
Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa										
Pembinaan inovasi daerah										
			RO_Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L	750.000.000	708.033.620	94,40	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	111,76
			RO_Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)	820.000.000	816.767.723	99,61	191	Daerah (Prov/Kab/Kota)	177	92,67
			RO_Penerapan Pilot Project Inovasi Daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di daerah 3T	500.000.000	499.476.200	99,90	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5	100,00
			RO_penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah	1.634.269.000	1.621.369.961	99,21	542	Daerah (Prov/Kab/Kota)	529	97,60
Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah										
			RO_Fasilitasi dan Pembinaan Strategi Kebijakan di daerah	2.000.000.000	1.949.593.955	97,48	25	Daerah(Prov/Kab/Kota)	25	100,00
Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri										
			RO_Forum Diskusi Aktual/ Diskusi Publik	955.410.000	926.292.289	96,95	5	RekomendasiKebijakan	5	100,00
			RO_Jumlah Sistem Aplikasi yang disusun	30.000.000	29.947.800	99,83	1	SistemInformasi	1	100,00
			RO_Pembinaan Strategis pada 4 Daerah Otonomi Baru	1.200.000.000	1.193.013.066	99,42	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00
			RO_Pengukuran Pengelolaan Keuangan Daerah	520.000.000	518.913.652	99,79	34	Daerah(Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah	260.960.000	260.959.520	100,00	34	Daerah(Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah	238.550.000	220.283.030	92,34	34	Daerah(Prov/Kab/Kota)	34	100,00
			RO_Rekomendasi Proyeksi/Perkiraan Strategik Nasional	150.000.000	150.000.000	100,00	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00
			RO_Rekomendasi Strategi Kebijakan lingkup Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik	376.040.000	376.002.765	99,99	2	RekomendasiKebijakan	2	100,00
			RO_Rekomendasi Strategi Kebijakan Lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Desa	400.000.000	399.998.692	100,00	2	RekomendasiKebijakan	2	100,00
			RO_Rekomendasi strategi kebijakan lingkup Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri	440.000.000	439.999.100	100,00	2	RekomendasiKebijakan	2	100,00
<b>12_027114_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA</b>										
Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa										
Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri										
			RO_Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Regional	86.768.000	86.463.270	99,65	60	Orang	60	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda	8.722.665.000	8.566.813.487	98,21	1.629	Orang	1.629	100,00

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pembangunan Daerah

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>12_027177_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR</b>										
Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa										
Pembangunan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri										
			RO_Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Regional	86.768.000	86.418.540	99,60	60	Orang	60	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda	9.232.112.000	9.182.315.882	99,46	1.317	Orang	1.317	100,00
<b>12_403216_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG</b>										
Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa										
Pembangunan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri										
			RO_Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Regional	86.768.000	82.938.700	95,59	60	Orang	60	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda	10.119.445.000	10.045.496.461	99,27	2.836	Orang	2.836	100,00
<b>12_403231_BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>										
Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa										
Pembangunan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri										
			RO_Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	344.050.000	344.018.200	99,99	120	Orang	120	100,00
			RO_Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri	207.072.000	203.992.614	98,51	120	Orang	119	99,17
			RO_Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah	207.072.000	207.062.000	100,00	120	Orang	120	100,00
			RO_Aparatur yang meningkatkan Kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat)	207.072.000	204.319.350	98,67	120	Orang	148	123,33
			RO_Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Pusat	337.224.000	337.181.000	99,99	210	Orang	210	100,00
			RO_Pembinaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri	146.517.000	143.827.000	98,16	2	Lembaga	2	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Manajemen Kepemimpinan	76.920.000	76.919.700	100,00	30	Orang	30	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	76.920.000	73.066.000	94,99	30	Orang	30	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	76.920.000	76.882.200	99,95	30	Orang	30	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Standarisasi dan Sertifikasi	76.920.000	75.570.000	98,24	30	Orang	30	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi 6 Hari Bidang Standarisasi dan Sertifikasi	88.325.000	88.325.000	100,00	30	Orang	30	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda	2.400.000.000	2.376.733.657	99,03	120	Orang	120	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	6.790.248.000	6.576.657.442	96,85	2.037	Orang	2.037	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan	12.423.247.000	12.383.713.526	99,68	2.534	Orang	2.534	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	10.962.448.000	10.509.254.996	95,87	5.004	Orang	5.004	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi	161.890.000	161.888.300	100,00	213	Orang	213	100,00
<b>12_506137_PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI</b>										
Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa										
Pembangunan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri										
			RO_Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Regional	86.768.000	86.430.275	99,61	60	Orang	60	100,00
			RO_Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda	7.879.411.000	7.731.744.513	98,13	1.557	Orang	1.557	100,00
<b>12_506138_BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>										
Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa										
Pembangunan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri										
			RO_Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda	891.860.000	891.513.899	99,96	320	Orang	320	100,00
<b>TOTAL SUB FUNGSI: PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>1.558.924.609.000</b>	<b>1.415.365.337.422</b>	<b>90,79</b>	<b>301.855</b>		<b>301.799</b>	<b>99,98</b>

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

Fungsi Pelayanan Umum  
Sub Fungsi Pelayanan Umum lainnya

Kegiatan				Belanja			Output			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04_027486_DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi								
			RO_K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan	408.191.000	397.989.929	97,50	12	Kesepakatan	12	100,00
			RO_Kantor Pemerintahan di Lokpri Perbatasan	200.000.000	198.081.521	99,04	1	Unit	1	100,00
			RO_Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	4.247.863.000	3.721.894.541	87,62	5	Kesepakatan	4	80,00
			RO_NSPK di Bidang Kawasan, Perkotaan, Batas Negara, Batas Wilayah, dan Toponimi	200.000.000	188.189.860	94,09	1	NSPK	1	100,00
			RO_Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1.757.626.000	1.537.592.485	87,48	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	12	120,00
			RO_Penanganan Konflik Pertanahan	1.104.740.000	1.026.521.979	92,92	25	Daerah(Prov/Kab/Kota)	25	100,00
			RO_Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kawasan khusus	2.661.094.000	2.467.179.209	92,71	6	Lembaga	6	100,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan Batas Daerah	4.286.184.000	4.024.073.142	93,88	30	Rekomendasi Kebijakan	30	100,00
			RO_Rekomendasi Kebijakan Perkotaan	200.000.000	199.192.996	99,60	1	RekomendasiKebijakan	1	100,00
04_240270_BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU										
	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa									
		Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi								
			RO_Kantor Pemerintahan di Lokpri Perbatasan	931.974.000	931.406.400	99,94	1	Unit	1	100,00
<b>TOTAL SUB FUNGSI: PELAYANAN UMUM LAINNYA</b>				<b>15.997.672.000</b>	<b>14.692.122.062</b>	<b>91,84</b>	<b>92</b>		<b>93</b>	<b>101,09</b>
<b>TOTAL FUNGSI: PELAYANAN UMUM</b>				<b>5.354.037.566.000</b>	<b>5.172.841.005.399</b>	<b>96,62</b>	<b>28.905.963</b>		<b>36.021.884</b>	<b>124,62</b>



## LAMPIRAN V

**RINCIAN PAGU ANGGARAN,  
REALISASI ANGGARAN,  
KEGIATAN, PROGRAM, OUTPUT  
DAN TARGET DARI MASING-  
MASING YANG MENJADI  
PRIORITAS NASIONAL**

**NOTA KESEPAKATAN  
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024  
YANG MASUK DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024**

**Nomor : NK- 010/COPN/2025**

Pada hari ini, tanggal 21 Februari 2025, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rekonsiliasi secara daring untuk menyepakati dan menyetujui angka terkait rincian *output* (RO) Prioritas Nasional, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka pelaporan rincian *output* dari Program Prioritas Nasional untuk pengungkapan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka Kementerian Dalam Negeri menyetujui akan melaporkan dan mengungkapkan secara memadai pada Laporan Keuangan Tahun 2024 atas rincian *output* dari Program Prioritas Nasional sesuai dengan angka dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

**PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI**

Kementerian PPN/Bappenas  
Direktorat Pembangunan Daerah

Alen Ermanita

Kementerian PPN/Bappenas  
Direktorat Politik dan  
Komunikasi

Maharani

Kementerian PPN/Bappenas  
Direktorat Kependudukan dan  
Jaminan Sosial

Widaryatmo

Kementerian Dalam Negeri

Erliani Budi Lestari

Direktorat Jenderal  
Perbendaharaan

Rahmat Mulyono 

Direktorat Jenderal Anggaran

Itjok Henandarto 

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es 1	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,00	18	
1	010	Kementerian Dalam Negeri	04	03	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	001	Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasku, umat beragama Ras dan Golongan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000	499.979.879	100,00	38	38	100,00	
2	010	Kementerian Dalam Negeri	04	03	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	002	Penguatan Kinerja PPWK di daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.161.402.000	1.161.385.168	100,00	38	38	100,00	
3	010	Kementerian Dalam Negeri	04	03	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	003	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	Daerah (Prov/Kab/Kota)	984.155.000	983.962.713	99,98	38	38	100,00	Terdapat perbedaan Uraian RO, Kode PN, dan Uraian PN antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data Bappenas berdasarkan Lampiran III.b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024
4	010	Kementerian Dalam Negeri	04	03	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	004	Penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila Untuk Menyukseskan Pemilu Tahun 2024	Daerah (Prov/Kab/Kota)	404.283.000	404.279.773	100,00	2	2	100,00	
5	010	Kementerian Dalam Negeri	04	03	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	005	Fasilitas pembentukan dan penguatan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	356.875.000	356.843.548	99,99	38	38	100,00	
6	010	Kementerian Dalam Negeri	04	03	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CR	1233	UBA	006	Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinnekaan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	323.996.000	323.980.715	100,00	38	38	100,00	
7	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	1233	UBA	007	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika	Daerah (Prov/Kab/Kota)	495.442.000	495.414.717	99,99	38	38	100,00	
8	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	1233	UBA	008	Tim terpadu PKS daerah yang efektif	Daerah (Prov/Kab/Kota)	900.000.000	899.999.000	100,00	38	38	100,00	
9	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	1234	UAC	001	Kapasitas aparaturnya pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	Orang	4.250.000.000	4.249.974.548	100,00	450	450	100,00	
10	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	PBC	001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	Rekomendasi Kebijakan	172.500.000	172.500.000	100,00	2	2	100,00	
11	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QDC	001	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	Orang	870.000.000	869.999.675	100,00	1.000	1.000	100,00	Terdapat perbedaan Uraian RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data Bappenas berdasarkan Lampiran III.b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024
12	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QDC	002	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	Orang	300.000.000	300.000.000	100,00	200	200	100,00	Terdapat perbedaan Uraian RO, Kode PN, dan Uraian PN antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data Bappenas berdasarkan Lampiran III.b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024
13	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QDC	003	Kapasitas pengurus ormas	Orang	210.000.000	209.996.637	100,00	300	300	100,00	
14	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	QEI	001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	Lembaga	128.404.595.000	128.404.594.750	100,00	9	9	100,00	
15	010	Kementerian Dalam Negeri	07	03	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CR	6145	UBA	001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.030.572.000	1.024.940.879	99,45	38	38	100,00	Terdapat perbedaan Kode PN dan Uraian PN antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data Bappenas berdasarkan Lampiran III.b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024

Handwritten signature or initials.

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,00	18	18
16	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	PBL	001	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	Rekomendasi Kebijakan	61.980.506.000	52.129.545.194	84,11	22	22	100,00	Terdapat perbedaan Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target Volume RO, dan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data yang disepakati adalah: 1. Pagu Anggaran yang disepakati adalah data Bappenas 2. Relisasi Anggaran yang disepakati adalah update data dari K/L. Hal ini karena ada satu Satker (Sekretariat Daerah Provinsi Papua/250048) yang telah melakukan realisasi anggaran sebesar Rp502.955.260 pada SAKTI, tetapi belum tersinkronisasi pada MONSAKTI. Bukti perekaman data oleh Sekretariat Daerah Provinsi Papua (250048) pada SAKTI terlampir dalam Data Dukung. 3. Target dan Realisasi Volume RO yang disepakati adalah update data dari K/L. Kendala pada aplikasi membuat perekaman target pada MONSAKTI dan RENJA K/L terekam pada banyak daerah. Seharusnya hanya ada di satker pusat (22).
17	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UAE	001	Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	Laporan	1.974.600.000	1.962.639.969	99,39	34	34	100,00	
18	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	001	Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	Daerah (Prov/Kab/Kota)	944.453.000	909.647.939	96,31	80	80	100,00	
19	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	002	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.855.413.000	1.780.664.054	95,97	86	86	100,00	
20	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	004	Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	995.959.668	99,60	46	46	100,00	Terdapat perbedaan Uraian RO, Kode PN, dan Uraian PN antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data Bappenas berdasarkan Lampiran III.b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024
21	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1237	UBA	005	Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	981.101.592	98,11	18	18	100,00	
22	010	Kementerian Dalam Negeri	05	04	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	1237	UBA	006	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.574.090.000	1.540.543.700	97,87	76	90	118,42	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data yang disepakati adalah data Bappenas. Realisasi Volume RO yang berkurang dari data MONSAKTI akibat adanya pengurangan target di tahun 2020 akibat pandemi. Selanjutnya, target ini ditambahkan sebagai target tahun 2024 sehingga terdapat realisasi yang melebihi target. Secara akumulatif, hasil identifikasi per tanggal 2025, Realisasi volume sebesar 90. Penambahan ini terjadi pada 14 daerah, yaitu: 1) Kab. Kebumen, 2) Kab. Magelang, 3) Kab. Tegal, 4) Kota Pekalongan, 5) Kab. Bitar, 6) Kab. Gresik, 7) Kota Kediri, 8) Kab. Barito Kuala, 9) Kab. Halmahera Timur, 10) Kab. Minahasa Tenggara, 11) Kota Gunungstoli, 12) Kota Tasikmalaya, 13) Kota Prabumulih, 14) Kab. Cirebon <b>Tanggapan Dit PD Bappenas:</b> Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO
23	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1241	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan Batas Daerah	Rekomendasi Kebijakan	4.286.184.000	4.024.073.142	93,88	30	30	100,00	
24	010	Kementerian Dalam Negeri	07	04	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CM	1241	PEC	001	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	Kesepakatan	4.247.863.000	3.721.894.541	87,62	5	4	80,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data yang disepakati adalah data Bappenas. Pengurangan realisasi volume RO pada MONSAKTI akibat adanya penundaan sidang RI-RD/TL untuk disepakati di tahun 2025. Dengan demikian, output kesepakatan di tahun 2024 hanya 4 kesepakatan.
25	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1241	PEC	002	K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan	Kesepakatan	408.191.000	397.989.929	97,50	12	12	100,00	

DP

gust

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,00	18	
26	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1241	UBA	001	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.757.626.000	1.537.592.485	87,48	10	12	120,00	Terdapat perbedaan Uraian RO, Realisasi Volume RO, dan Uraian PN antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan Uraian RO dan Uraian PN menggunakan data Bappenas berdasarkan Lampiran III.b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024. Data realisasi volume RO yang disepakati adalah data Bappenas.
27	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	001	Penerapan SPM sub bidang Bencana	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.038.597.000	1.037.302.574	99,88	542	542	100,00	
28	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	002	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.259.597.000	1.172.616.419	93,09	449	449	100,00	
29	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	003	Penerapan SPM sub urusan Trantibum	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.038.597.000	1.016.946.255	97,92	542	542	100,00	
30	010	Kementerian Dalam Negeri	06	04	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	CM	6136	UBA	004	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.020.477.000	966.333.350	94,69	34	34	100,00	
31	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	005	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Daerah (Prov/Kab/Kota)	680.318.000	672.795.544	98,89	34	34	100,00	
32	010	Kementerian Dalam Negeri	02	04	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6136	UBA	006	Fasilitasi dan dukungan trantribumlinas dalam pemilu dan pilkada Tahun 2024	Daerah (Prov/Kab/Kota)	16.700.370.000	16.485.573.771	98,71	38	50	131,58	Terdapat perbedaan Realisasi Anggaran antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI. Terlaksananya Pemecatan Daerahi Rawan Trantibum dalam rangka dukungan trantribumlinas dalam pemilu dan pilkada Tahun 2024 di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di 50 Daerah: 1. Kab. Aceh Jaya; 2. Kab. Sumbawa; 3. Kab. Selayar; 4. Kab. Bojonegoro; 5. Kab. Purwakarta; 6. Kab. Aceh; 7. Kab. Kediri; 8. Kab. Bangi; 9. Kab. Lahat; 10. Kab. Pasuruan; 11. Kab. Bantaeng; 12. Kab. Kepulauan Tanimbar; 13. Kab. Aceh Tamiang; 14. Kab. Aceh Besar; 15. Kab. Kepulauan Anambas; 16. Kab. Sukoharjo; 17. Kab. Kendal; 18. Kab. Sukamara; 19. Kab. Kutai Timur; 20. Kab. Batu; 21. Kab. Maduru; 22. Kab. Hulu Sungai Selatan; 23. Kab. Soppeng; 24. Kab. Gowa; 25. Kab. Tuban; 26. Kab. Aceh Jaya; 27. Kab. Padang Pariaman; 28. Kab. Tulangbawang; 29. Kab. PALI; 30. Kab. Batola; 31. Kab. Demak; 32. Kab. Lamandau; 33. Kab. Lumajang; 34. Kab. Lampung Timur; 35. Kab. Pekalongan; 36. Kab. Waropen; 37. Kab. Aceh Utara; 38. Kab. Trenggaleh; 39. Kota Yogyakarta; 40. Kota Padang; 41. Kota Banda Aceh; 42. Kota Sukakarta; 43. Kota Medan; 44. Kota Mataram; 45. Kota Semarang; 46. Kota Tanjungpinang; 47. Kota Kediri; 48. Kota Sukabumi; 49. Kota Tangerang; 50. Provinsi DIY <b>Tanggapan Dit PD Bappenas:</b> volume capaian perlu di sesuaikan pada aplikasi EMONEV Bappenas
33	010	Kementerian Dalam Negeri	02	05	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1244	UBB	013	Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	Desa	1.000.000.000	999.297.000	99,93	100	100	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Berdasarkan hasil penelusuran, data realisasi sebesar 75 pada e-monev merupakan realisasi pada komponen 052. Secara total, realisasi sebesar 100. Dengan demikian, data yang disepakati adalah data MONSAKTI.
34	010	Kementerian Dalam Negeri	02	05	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1244	UBB	014	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	Desa	690.000.000	660.920.000	95,79	105	105	100,00	
35	010	Kementerian Dalam Negeri	02	05	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6484	UBB	001	Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	Desa	31.316.106.000	29.185.930.493	93,20	40000	40000	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Anggaran antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI.
36	010	Kementerian Dalam Negeri	02	05	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1248	UAC	004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Orang	3.000.000.000	2.990.422.590	99,68	930	930	100,00	Terdapat perbedaan Target Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat satu satker (Balai Pemerintahan Desa Malang) dengan target 330 tidak tersinkronisasi dengan baik sehingga terjadi kekurangan target. Dengan demikian, data yang disepakati adalah data MONSAKTI. <b>Tanggapan Dit PD Bappenas:</b> volume capaian perlu di sesuaikan pada aplikasi EMONEV Bappenas
37	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	1254	UAB	001	Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangsa) yang dikembangkan	Sistem Informasi	18.957.781.000	16.558.980.547	87,35	1	1	100,00	

Handwritten signature and initials.

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,00	18	
38	010	Kementerian Dalam Negeri	02	06	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1254	UBA	001	Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Tahun 2024	Provinsi	9.912.804.000	8.396.456.403	84,70	38	38	100,00	
39	010	Kementerian Dalam Negeri	02	06	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	001	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Air Limbah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.100.000.000	876.384.108	79,67	412	412	100,00	
40	010	Kementerian Dalam Negeri	02	06	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	002	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.100.000.000	924.700.499	84,06	412	412	100,00	
41	010	Kementerian Dalam Negeri	02	06	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	003	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	822.490.000	736.409.515	89,53	412	412	100,00	
42	010	Kementerian Dalam Negeri	02	06	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	004	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	Daerah (Prov/Kab/Kota)	872.177.000	854.089.003	97,93	412	412	100,00	
43	010	Kementerian Dalam Negeri	02	06	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	005	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Transbumilimas	Daerah (Prov/Kab/Kota)	927.410.000	905.725.072	97,66	412	412	100,00	
44	010	Kementerian Dalam Negeri	02	06	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	006	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.100.000.000	875.919.550	79,63	412	412	100,00	
45	010	Kementerian Dalam Negeri	02	06	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6139	UBA	007	Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perkotaan)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	979.000.000	651.717.059	66,57	10	10	100,00	Tanggapan Dit PD Bappenas: volume capaian perlu di sesuaikan pada aplikasi EMONEV Bappenas
46	010	Kementerian Dalam Negeri	01	06	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	008	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	600.000.000	456.538.969	76,09	25	35	140,00	
47	010	Kementerian Dalam Negeri	01	06	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	009	Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di lokasi OSS	Daerah (Prov/Kab/Kota)	697.000.000	674.412.522	96,76	23	23	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Berdasarkan data riil, realisasi yang tepat adalah data pada MONSAKTI. Dengan demikian, data yang disepakati adalah data MONSAKTI.
48	010	Kementerian Dalam Negeri	01	06	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	010	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	Daerah (Prov/Kab/Kota)	438.136.000	414.924.212	94,70	9	7	77,78	
49	010	Kementerian Dalam Negeri	03	06	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	011	Daerah yang meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	Daerah (Prov/Kab/Kota)	545.736.000	423.375.844	77,58	514	514	100,00	
50	010	Kementerian Dalam Negeri	01	06	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	012	Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	850.000.000	749.999.970	88,24	34	34	100,00	
51	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	013	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrennda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Daerah (Prov/Kab/Kota)	700.000.000	455.965.801	65,14	34	34	100,00	
52	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	014	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000	498.567.190	99,71	34	34	100,00	

Handwritten signature and initials.

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	015	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas daerah melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000	251.758.000	50,35	34	34	100,00	
54	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	016	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	800.000.000	799.921.500	99,99	34	34	100,00	
55	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	017	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000	498.243.634	99,65	34	34	100,00	
56	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	018	Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Daerah (Prov/Kab/Kota)	900.000.000	703.106.828	78,12	48	48	100,00	
57	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	019	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000	491.491.408	98,30	34	34	100,00	
58	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	020	Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	700.000.000	610.484.540	87,21	34	34	100,00	
59	010	Kementerian Dalam Negeri	03	06	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	021	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK	Daerah (Prov/Kab/Kota)	450.000.000	393.839.179	87,52	11	11	100,00	
60	010	Kementerian Dalam Negeri	03	06	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	022	Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	Daerah (Prov/Kab/Kota)	450.000.000	336.669.774	74,82	11	11	100,00	
61	010	Kementerian Dalam Negeri	03	06	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	023	Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000	498.727.766	99,75	60	60	100,00	
62	010	Kementerian Dalam Negeri	03	06	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	024	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	648.300.000	506.533.410	78,13	34	34	100,00	
63	010	Kementerian Dalam Negeri	03	06	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	025	Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	650.000.000	472.701.500	72,72	32	32	100,00	
64	010	Kementerian Dalam Negeri	03	06	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	026	Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	650.000.000	487.720.733	75,03	28	28	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Anggaran antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data yang disepakati adalah data MONSAKTI.
65	010	Kementerian Dalam Negeri	03	06	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	027	Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	699.100.000	698.196.059	99,87	30	30	100,00	
66	010	Kementerian Dalam Negeri	01	06	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CM	6139	UBA	028	Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi	Daerah (Prov/Kab/Kota)	650.000.000	618.742.095	95,19	38	38	100,00	
67	010	Kementerian Dalam Negeri	04	06	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	CM	6139	UBA	029	Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	400.000.000	154.278.418	38,57	60	60	100,00	
68	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	030	Daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	400.000.000	370.905.699	92,73	8	8	100,00	
69	010	Kementerian Dalam Negeri	03	06	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CM	6139	UBA	031	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Daerah dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Daerah (Prov/Kab/Kota)	961.983.000	935.916.278	97,29	514	514	100,00	

DP

gus

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,00	18	
70	010	Kementerian Dalam Negeri	05	06	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6139	UBA	032	Facilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.994.860.000	1.404.161.336	70,39	33	33	100,00	
71	010	Kementerian Dalam Negeri	02	07	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PBL	001	Rekomendasi Kebijakan DPOD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	1.600.297.000	1.596.572.305	99,77	4	4	100,00	
72	010	Kementerian Dalam Negeri	02	07	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	PBL	002	Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Daerah, Kekhususan/Keistimewaan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	4.431.804.000	4.271.363.637	96,38	8	8	100,00	
73	010	Kementerian Dalam Negeri	02	07	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	UBA	001	Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi diselesaikan permasalahannya	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.794.595.000	2.736.331.042	97,92	22	22	100,00	
74	010	Kementerian Dalam Negeri	02	07	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1259	UBA	002	Provinsi yang disupervisi Kinerjanya dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus/ Keistimewaan sesuai Undang-Undang	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.906.919.000	2.792.802.631	96,07	10	10	100,00	Terdapat perbedaan Target Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Setelah ditelusuri, terjadi duplikasi data pada Bappenas untuk target pada KRO dan RO yang sama. Dengan demikian, data yang disepakati adalah data MONSAKTI.
75	010	Kementerian Dalam Negeri	02	07	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1261	UBA	001	Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPDD)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.643.155.000	2.211.800.532	83,68	16	16	100,00	
76	010	Kementerian Dalam Negeri	02	07	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1261	UBA	002	Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPDD)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	967.939.000	690.231.812	71,31	234	234	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data Bappenas belum menggunakan update data terbaru. Dengan demikian, data yang disepakati adalah data MONSAKTI.
77	010	Kementerian Dalam Negeri	02	07	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	PBL	001	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat K/L dan daerah	Rekomendasi Kebijakan	604.962.000	494.029.232	81,66	1	1	100,00	Terdapat perbedaan Uraian RO, Kode PN, dan Uraian PN antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data Bappenas berdasarkan Lampiran III. b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024
78	010	Kementerian Dalam Negeri	02	07	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	QMA	001	Database peraturan daerah	Data	844.197.000	826.469.145	97,90	1	1	100,00	Terdapat perbedaan Uraian RO, Kode PN, dan Uraian PN antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data Bappenas berdasarkan Lampiran III. b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024
79	010	Kementerian Dalam Negeri	02	07	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	UAE	001	Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	Rekomendasi	1.231.578.000	878.119.960	71,30	7	7	100,00	
80	010	Kementerian Dalam Negeri	02	07	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	3991	UBA	001	Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.135.135.000	900.648.705	79,34	34	34	100,00	Terdapat perbedaan Uraian RO, Kode PN, Uraian PN, dan Realisasi Anggaran antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data Uraian RO, Kode PN, Uraian PN yang disepakati adalah data Bappenas berdasarkan Lampiran III. b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024. Data realisasi anggaran yang disepakati adalah data MONSAKTI.
81	010	Kementerian Dalam Negeri	07	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CM	6140	UBA	001	Facilitasi Persiapan Pilkada Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.058.981.000	6.734.599.640	83,57	545	545	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Anggaran antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data Bappenas. Perbedaan terjadi akibat adanya koreksi kode akun 4111111 menjadi 4111211 pada SPM 008167/621892/2024 yang sudah dicatat di SAKTI, tetapi belum ter-update pada MONSAKTI.
82	010	Kementerian Dalam Negeri	07	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CM	6140	UBA	002	Facilitasi Kebijakan Penederhanaan Birokrasi dan Penyesuaian Mekanisme Kerja Pemerintah Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.350.043.000	1.330.814.470	98,58	32	32	100,00	
83	010	Kementerian Dalam Negeri	03	08	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1268	QAB	001	Pelayanan Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	Lembaga	9.639.697.000	9.606.171.982	99,65	1.000	6.774	677,40	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO, Realisasi Anggaran, Kode PN, dan Uraian PN antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data Kode PN dan Uraian PN yang disepakati adalah data Bappenas berdasarkan Lampiran III. b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024. Data realisasi anggaran yang disepakati adalah data MONSAKTI. Selanjutnya, terdapat update data realisasi volume RO berdasarkan akumulasi pemanfaatan data antara OPD, lembaga pusat, dan lembaga lain menjadi 6.774.

Handwritten signature and initials.

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es 1	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,00	18	
84	010	Kementerian Dalam Negeri	03	08	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	001	Akta Kematian yang diterbitkan	Akta	512.522.000	497.139.651	97,00	300.000	1.866.044	622,01	Terdapat perbedaan Kode PN, Uraian PN, dan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data Kode PN dan Uraian PN yang diepakati adalah data Bappenas berdasarkan Lampiran III.b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024. Data realisasi volume RO yang diepakati adalah update data dari K/L sebesar 1.866.044.
85	010	Kementerian Dalam Negeri	03	08	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	002	Akta Perkawinan yang diterbitkan	Akta	800.000.000	797.099.434	99,64	35.000	184.020	525,77	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data realisasi volume RO yang diepakati adalah update data dari K/L sebesar 184.020.
86	010	Kementerian Dalam Negeri	03	08	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	003	Akta Perceraian yang diterbitkan	Akta	528.198.000	527.021.332	99,78	4.500	15.433	342,96	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data realisasi volume RO yang diepakati adalah update data dari K/L sebesar 15.433.
87	010	Kementerian Dalam Negeri	03	08	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1269	QAA	004	Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta	889.120.000	817.107.421	91,90	450.000	5.834.371	1.296,53	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data realisasi volume RO yang diepakati adalah update data dari K/L sebesar 5.834.371. Penjelasan lebih detail terdapat pada Data Dukung.
88	010	Kementerian Dalam Negeri	03	08	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	CP	1271	UBA	001	Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.713.170.000	2.705.710.062	99,73	50	50	100,00	Terdapat perbedaan Target dan Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI. Perbedaan pada target terjadi akibat perubahan target. Pada awal tahun 2024, target sebesar 50. Kemudian ada kebijakan pengurangan pagu sehingga target diturunkan menjadi 15. Kemudian, terdapat dukungan dana PHLN sehingga target kembali disesuaikan menjadi 50.
89	010	Kementerian Dalam Negeri	05	08	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CP	1271	UBA	002	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.500.001.000	2.498.695.261	99,95	5	10	200,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data update data dari K/L sebesar 10. Penjelasan lebih detail terdapat pada Data Dukung.
90	010	Kementerian Dalam Negeri	02	09	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1276	UBA	002	Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	550.000.000	540.161.997	98,21	70	70	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI. <b>Tanggapan Dit PD Bappenas:</b> volume capaian perlu di sesuaikan pada aplikasi EMONEV Bappenas
91	010	Kementerian Dalam Negeri	02	09	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	001	Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu	Daerah (Prov/Kab/Kota)	738.000.000	697.311.359	94,49	34	34	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO dan Realisasi Anggaran antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI.
92	010	Kementerian Dalam Negeri	02	09	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	002	Daerah yang Memenuhi Indikator Mandatory Spending	Daerah (Prov/Kab/Kota)	250.000.000	245.337.647	98,14	542	542	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI.
93	010	Kementerian Dalam Negeri	05	09	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	CM	6141	UBA	003	Daerah yang Menerapkan SIPD Bidang Perencanaan Anggaran Dalam Rangka Penguatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	800.000.000	789.757.756	98,72	542	542	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI.
94	010	Kementerian Dalam Negeri	02	09	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	004	Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	Daerah (Prov/Kab/Kota)	250.000.000	239.343.025	95,74	542	542	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI. <b>Tanggapan Dit PD Bappenas:</b> volume capaian perlu di sesuaikan pada aplikasi EMONEV Bappenas
95	010	Kementerian Dalam Negeri	02	09	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	005	Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen	Daerah (Prov/Kab/Kota)	350.000.000	348.317.706	99,52	34	34	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO dan Realisasi Anggaran antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI.
96	010	Kementerian Dalam Negeri	02	09	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	006	Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.375.000.000	2.342.223.745	98,62	542	542	100,00	Terdapat perbedaan Target Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Terjadi duplikasi target volume di KOR dan RO yang sama pada data Bappenas. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI.
97	010	Kementerian Dalam Negeri	02	09	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	007	Daerah yang Melakukan Penyesuaian Perda PDRD	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.050.000.000	1.036.063.538	98,67	542	542	100,00	
98	010	Kementerian Dalam Negeri	02	09	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	008	Daerah yang BUMDnya Memberikan Kontribusi Terhadap Penerimaan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.100.000.000	1.035.777.093	94,16	281	281	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI.

ap

gaf

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es 1	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,00	18	
99	010	Kementerian Dalam Negeri	02	09	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6141	UBA	009	Daerah yang Melakukan Penatausahaan BMD Secara Wajar	Daerah (Prov/Kab/Kota)	850.000.000	837.762.600	98,56	542	542	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI.
100	010	Kementerian Dalam Negeri	02	11	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	001	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJAINDAH)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	820.000.000	816.767.723	99,61	191	177	92,67	Terdapat perbedaan Uraian RO, Kode PN, Uraian PN, dan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Data Uraian RO, Kode PN, dan Uraian PN yang disepakati adalah data Bappenas berdasarkan Lampiran III.b Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024. Data Realisasi Volume RO yang disepakati juga menggunakan data Bappenas. Data realisasi yang direkam pada SAKTI merupakan data akumulasi. Penjelasan lebih detail terdapat pada bagian Data Dukung.
101	010	Kementerian Dalam Negeri	02	11	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	002	Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L	Daerah (Prov/Kab/Kota)	750.000.000	708.033.620	94,40	34	38	111,76	capaian pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L kepada 38 Daerah (Prov/Kab/Kota) melalui bimbingan teknis Indeks Inovasi Daerah secara lintas K/L dan FGD di 4 wilayah yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali dan Provinsi Papua sudah termasuk 4 daerah otonomi baru berdasarkan Kepmendagri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024. (A. Kategori Provinsi)  Tanggapan Dit PD Bappenas: volume capaian perlu di sesuaikan pada aplikasi EMONEV Bappenas
102	010	Kementerian Dalam Negeri	02	11	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	003	Penerapan Pilot Project Inovasi Daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di daerah 3T	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000	499.476.200	99,90	5	5	100,00	
103	010	Kementerian Dalam Negeri	02	11	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	1283	UBA	004	Penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.634.269.000	1.621.369.961	99,21	542	529	97,60	Capaian penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah terhadap 529 Daerah (Prov/Kab/Kota) yang dapat di nilai berdasarkan Kepmendagri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024. pencapaian kinerja dimaksud melalui : - Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah baik terkait kebijakan inovasi, pemenuhan indikator, dan penjelasan teknis penginputan melalui sistem aplikasi indeks inovasi daerah. - Melakukan monitoring pada masa pelaporan secara berkala untuk mengidentifikasi pemerintah daerah yang belum melakukan pelaporan, selanjutnya melakukan komunikasi dan penyampaian kembali kewajiban terkait pelaporan inovasi daerah. - Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. - Membenarkan layanan konsultasi mengenai inovasi daerah kepada pemerintah daerah. (529 Daerah (Prov/Kab/Kota) yang terdiri 38 Provinsi, 398 Kabupaten, dan 93 Kota)  Tanggapan Dit PD Bappenas: volume capaian perlu di sesuaikan pada aplikasi EMONEV Bappenas
104	010	Kementerian Dalam Negeri	02	12	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	007	Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional	Orang	347.072.000	342.250.785	98,61	240	240	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI.
105	010	Kementerian Dalam Negeri	02	12	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	002	Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerapan SPM di Daerah Lingkup Pusat	Orang	337.224.000	337.181.000	99,99	210	210	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI.
106	010	Kementerian Dalam Negeri	02	12	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	003	Aparatur yang meningkatkan Kompetensinya dalam Hal Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat)	Orang	207.072.000	204.319.350	98,67	120	148	123,33	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data Bappenas.  Tanggapan Dit PD Bappenas: volume capaian perlu di sesuaikan pada aplikasi EMONEV Bappenas

DP

gust

Lampiran Nota Kesepakatan

No	BA	Nama BA	Kode PN	Kode Es I	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,00	18	
107	010	Kementerian Dalam Negeri	02	12	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	004	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah	Orang	207.072.000	207.062.000	100,00	120	120	100,00	
108	010	Kementerian Dalam Negeri	02	12	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	005	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri	Orang	207.072.000	203.992.614	98,51	120	119	99,17	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data Bappenas. <b>Tanggapan Dit PD Bappenas:</b> volume capaian perlu di sesuaikan pada aplikasi EMONEV Bappenas
109	010	Kementerian Dalam Negeri	02	12	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	CM	6144	UAC	006	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Orang	344.050.000	344.018.200	99,99	120	120	100,00	Terdapat perbedaan Realisasi Volume RO antara data Bappenas dan MONSAKTI. Kesepakatan menggunakan data MONSAKTI.
												391.412.729.000	366.524.462.806	93,64	846,57	7.962,75	940,59	

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian PPN/Bappenas  
Direktorat Pembangunan Daerah



Alen Ermanita

Kementerian PPN/Bappenas  
Direktorat Politik dan Komunikasi



Maharani

Kementerian PPN/Bappenas  
Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial



Widaryatmo

Direktorat Jenderal Anggaran



Itjok Henandarto

Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Rahmat Mulyono

Kementerian Dalam Negeri



Erlani Budi Lestari





## LAMPIRAN VI

# RINCIAN PAGU DAN REALISASI KESALAHAN PENGANGGARAN PER SATKER

## REKAPITULASI KESALAHAN PENGANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024

Kode Es I	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun Belanja	Nama Akun	Saldo	Kode Akun Neraca	Nama Akun	Saldo
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	522191	Belanja Jasa Lainnya	99.870.030	162151	Software	99.870.030
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	43.484.250	132111	Peralatan dan Mesin	43.484.250
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6.626.700	132111	Peralatan dan Mesin	6.626.700
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.490.000	132111	Peralatan dan Mesin	5.490.000
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.497.000	132111	Peralatan dan Mesin	5.497.000
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63.185.640	132111	Peralatan dan Mesin	63.185.640
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	522191	Belanja jasa lainnya	1.830.000.000	135111	Aset Tetap Renovasi	1.830.000.000
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000	132111	Peralatan dan Mesin	12.000.000
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.051.000	132111	Peralatan dan Mesin	29.051.000
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	148.000.000	134111	Jalan dan Jembatan	148.000.000
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	185.690.000	133111	Gedung dan Bangunan	185.690.000
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.398.496	133111	Gedung dan Bangunan	41.398.496
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156.000.000	133111	Gedung dan Bangunan	156.000.000
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	167.068.320	132111	Peralatan dan Mesin	167.068.320
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.346.500	132111	Peralatan dan Mesin	19.346.500
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.111.500	133111	Gedung dan Bangunan	60.111.500
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.970.000	134112	Irigasi	29.970.000
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.934.500	132111	Peralatan dan mesin	9.934.500
03	027210	DITJEN BINA POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	522191	Belanja jasa lainnya	642.024.528	135111	Aset Tetap Renovasi	642.024.528

## REKAPITULASI KESALAHAN PENGANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024

Kode Es I	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun Belanja	Nama Akun	Saldo	Kode Akun Neraca	Nama Akun	Saldo
04	027486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	80.974.500	132111	Peralatan dan Mesin	80.974.500
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182.985.720	133111	Gedung dan Bangunan	182.985.720
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.028.800	134111	Jalan dan Jembatan	60.028.800
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7.602.800	132111	Peralatan dan Mesin	7.602.800
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.851.800	132111	Peralatan dan Mesin	1.851.800
12	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	74.691.000	134111	Jalan dan jembatan	74.691.000
12	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79.500.000	133111	Gedung dan Bangunan	79.500.000
12	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	522131	Belanja Jasa Konsultan	74.514.000	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	74.514.000
12	027114	PPSDM REGIONAL DI YOGYAKARTA	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	197.965.000	133111	Gedung dan Bangunan	197.965.000
12	027114	PPSDM REGIONAL DI YOGYAKARTA	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	192.454.400	134111	Jalan dan jembatan	192.454.400
<b>KESALAHAN PENGANGGARAN BELANJA BARANG MENJADI ASET</b>								<b>4.507.316.484</b>
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.755.000	595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	22.755.000
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	971.000	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	971.000
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.132.200	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.132.200
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	674.880	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	674.880
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.920.000	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.920.000
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.468.525	595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	6.468.525
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.154.000	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	15.154.000
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	197.000.000	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	197.000.000

## REKAPITULASI KESALAHAN PENGANGGARAN PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024

Kode Es I	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun Belanja	Nama Akun	Saldo	Kode Akun Neraca	Nama Akun	Saldo
<b>KESALAHAN PENGANGGARAN BELANJA MODAL TIDAK MENJADI ASET</b>								<b>246.075.605</b>
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.225.300.000	162161	Lisensi	5.225.300.000
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	536111	Belanja Modal Lainnya	477.427.000	132111	Peralatan dan Mesin	477.427.000
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	130.000.000	135111	Aset Tetap Renovasi	130.000.000
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.766.611.484	134113	Jaringan	1.766.611.484
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.231.545.000	162151	Software	1.231.545.000
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	209.078.668	135111	Aset Tetap Renovasi	209.078.668
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.331.000	135121	Aset Tetap Lainnya	2.331.000
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	44.544.303	132111	Peralatan dan Mesin	44.544.303
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	105.694.200	132111	Peralatan dan Mesin	105.694.200
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	28.242.560	132111	Peralatan dan Mesin	28.242.560
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	3.867.250.000	132111	Peralatan dan Mesin	3.867.250.000
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	669.984.000	134111	Jalan dan Jembatan	669.984.000
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	28.242.560	132111	Peralatan dan Mesin	73.385.000
<b>KESALAHAN PENGANGGARAN ANTAR BELANJA MODAL</b>								<b>13.831.393.215</b>



## LAMPIRAN VII

**RINCIAN KAS DI BENDAHARA  
PENGELUARAN, KAS DI  
BENDAHARA PENERIMAAN,  
SERTA KAS LAINNYA DAN  
SETARA KAS PER SATKER**

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN SERTA KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER SATKER  
PER 31 DESEMBER 2024

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2024	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 31 DESEMBER 2024	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP PER 31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2024	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2024	KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH 31 DESEMBER 2024	KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH 31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.000	(290.000)	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	-	-	-	109.599.303	-	109.599.303	-	-	-	75.767.076	8.828.222	66.938.854	-	-	-
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.421.573	37.237.600	(17.816.027)	-	-	-
4	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	-	4.634.820	(4.634.820)	-	-	2.343.805.012	(2.343.805.012)	-	-	-	-	-
5	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPIUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.876.253	(49.876.253)	-	-	-
6	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.207.268	(22.207.268)	-	-	-
7	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.501.240	-	37.501.240	-	-	-
8	04	159071	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	-	42.073.185	(42.073.185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	04	259084	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPIUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.670.000	(14.670.000)	-	-	-
10	04	417697	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.213.384	-	8.213.384	-	-	-
11	04	433349	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	04	484163	DK	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000	-	170.000	-	-	-
13	04	484167	DK	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.984	-	25.984	-	-	-
14	04	484173	DK	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836.909	-	836.909	-	-	-
15	04	484176	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	04	484187	DK	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	-	1.115	(1.115)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	04	484197	DK	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.700	-	32.700	-	-	-
18	04	484205	DK	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	-	-	-
19	04	484208	DK	BAPPEDA PROVINSI PAPIUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-
20	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.192.991	-	7.192.991	-	-	-
21	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.747.401	284.835	213.462.566	62.230.201.976	231.332.699.525	(169.102.497.549)
22	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.478.954	-	19.478.954	-	-	-
23	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.260.705	-	2.260.705	-	-	-
24	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524.688	16.016.598	(15.491.910)	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>3.000.000</b>	<b>52.074.300</b>	<b>(49.074.300)</b>	<b>109.599.303</b>	<b>4.634.820</b>	<b>104.964.483</b>	<b>-</b>	<b>2.343.805.012</b>	<b>(2.343.805.012)</b>	<b>2.726.436.859</b>	<b>328.249.699</b>	<b>2.398.187.160</b>	<b>62.230.201.976</b>	<b>231.332.699.525</b>	<b>(169.102.497.549)</b>



## LAMPIRAN VIII

# RINCIAN PENYETORAN KAS SETELAH TANGGAL NERACA

## RINCIAN PENYETORAN KAS SETELAH TANGGAL NERACA

NO	KODE ES.I	KODE SATKER	NAMA SATKER	Saldo Kas (Rp)	TANGGAL SETOR	NTPN	JUMLAH SETORAN (Rp)	KETERANGAN
<b>KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN</b>								
1	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	109.599.303	07-Jan-25	322FE6QTC944HC88	109.599.303	
2	04	433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	3.000.000	02-Jan-25	3F3DF522A1A3UJ7R	2.660.900	
					10-Jan-25	56AE345KSPDICU5D	6.000	
					20-Jan-25	543F80JUT79MH48	333.100	
<b>JUMLAH KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN</b>				<b>112.599.303</b>			<b>112.599.303</b>	
<b>KAS LAINNYA DAN SETARA KAS</b>								
1	01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	75.767.076	07-Jan-25	A9DEC0UQSE5HIEA	34.490.000	
					07-Jan-25	DB37A7QLV2172IOM	18.342.500	
					07-Jan-25	FBA9D3CIFT58VEHR	22.934.576	
				9.574.180	26-Feb-25	C5A153CIFT8P0U03	9.574.180	
2	01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	9.847.393				Pengembalian kelebihan pembayaran Gaji Pokok, Tunjangan Anak, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Umum, Tahun 2024 yang dibayarkan melalui potongan SPM Tahun 2025
3	01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	37.501.240	06-Feb-25	E98A43CIFT88BJ41	420.900	
					06-Feb-25	DBABC1JNG83FHK5C	10.979.040	
					06-Feb-25	5B1622G502LRUMQJ	13.785.450	
					06-Feb-25	5BB22G502LRUMQJ	1.813.000	
					05-Feb-25	D2AA561QVCVBCGII	542.884	
					06-Feb-25	1317761QVCVDIKQM	1.315.490	
					06-Feb-25	371146U8F7HPVLD8	110.000	
					06-Feb-25	7FB8F3CIFT88BGKE	30.816	
					12-Feb-25	5486F6U8F7HUEJEL	480.000	
					12-Feb-25	E48F15SD1FDSKMIIF	149.800	
					12-Feb-25	0E7248U8F7HUEKVC	1.117.060	
					12-Feb-25	AF83861QVCV2D95	4.800	
					15-Feb-25	CD27A61QVCVVLVB2	39.500	
					06-Jan-25	993151VBROFG63B8	2.145.000	
					07-Jan-25	2C63C5BBSJ6BOCJ2	292.500	
					06-Jan-25	178382RPBL1SSSPB	1.674.200	
					07-Jan-25	BB6EA746S8B3L53L	228.300	
					07-Jan-25	F076F2RPBL1T20S7	60.000	
					07-Jan-25	D90E279SQPUF1689	2.035.000	
					07-Jan-25	2C2C02M3D3F7GERC	277.500	
					11-Apr-25	2B1721JNG89J7MP9	308.624	
					11-Apr-25	D10750NA0DN6M4M4	242.256	
					14-Apr-25	C7F952G502S1RHAV	18.000	
					15-Apr-25	033AC48VV00QOHC2	68.000	
					11-Apr-25	552A07QLV2AA346D	129.600	
					11-Apr-25	FC5EA7QLV2AA2JV1	154.743	
					13-Apr-25	D7E0D61QVD5H8JB0	169.506	
					14-Apr-25	2198A1JNG89J99OV	1.481.500	
					14-Apr-25	9EF6D55DFJ72NUR	1.770.358	
					15-Apr-25	1EFF561QVD5JG629	29.000	
					14-Apr-25	A8D087QLV2ADF63F	519.640	
					14-Apr-25	E93397QLV2ACASAK	2.456.240	
					17-Feb-25	838661JNG89LEMG1	256.118	
					18-Feb-25	EE3392G502M3RD9F	1.516.000	
					11-Apr-25	DFCAD2G502M3R0I1	7.277.600	
					18-Feb-25	27EE73CIFTCE2A3S	10.500	
					16-Apr-25	48D4461QVCVOMM7A	9.798.220	
					13-Apr-25	4A46248VV00G8BS8	6.706.000	
					14-Apr-25	76A4C3CIFTCE39FQ	2.535.650	
					18-Apr-25	9C4611JNG89LEGSD	2.000	
					11-Apr-25	705312G502RVMCST	2.839.160	
					14-Apr-25	15E730NA0DN4H3PS	124.074.283	
					14-Apr-25	AA6FB48VV00QOHP2P	260.000	
					14-Apr-25	864DB0NA0DHB11LD	1.900.000	
					11-Apr-25	8D3CD61QVD5E154F	22.207.225	
					14-Apr-25	CA2D77QLV2AC9QFQ	135.000	
					14-Apr-25	69A1348VV00QLOTJ	195.660	
					14-Apr-25	177B448VV00QLLGI	6.581.020	
					11-Apr-25	52ED06U8F7NTLO7C	1.568.380	
					9-Apr-25	FA15E3CIFT9009C	200.250	
					14-Apr-25	4AFC248VV00QLF22	228.000	
					11-Apr-25	42D6156DFJ4RNOA	114.740	
					16-Apr-25	A0F6248VV00GBCM	6.901.000	
					14-Apr-25	A132955DFJ7E3I	152.385	
					13-Apr-25	40EE755DFJ4TA4V	32.560	
					6-Apr-25	549AEGU8F7NTNCC3	2.019.000	
				2.136.394.976				Sisa kas dari SPM LS dan TUP yang belum didistribusikan kepada yang berhak per 31 Desember 2024
5	04	417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	8.213.384				Sisa saldo kas yang masih berada dalam penguasaan bendahara pengeluaran atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas yang belum diserahkan kepada penerima hak per tanggal 31 Desember 2024. Kas telah diserahkan kepada penerima hak pada Tahun 2025
6	04	484163	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	170.000	22-Jan-24	0C367746S9N2KC9F	170.000	
7	04	484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	25.984	25-Apr-25	E821B2CPT76303QB	25.984	
8	04	484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	836.909	18-Feb-25	59AE431G17AF5RSJ	144.545	
					18-Feb-25	11FCA2M3G202M841	361.364	
					18-Feb-25	8042800RQJ07MRD	331.000	
9	04	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	32.700				Sisa saldo dana titipan pada rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara
10	04	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	10.000				Sisa saldo pada rekening bendahara pengeluaran atas uji coba transaksi CMS
11	04	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	60				Sisa saldo dana titipan pada rekening Bendahara Pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme LS Bendahara

## RINCIAN PENYETORAN KAS SETELAH TANGGAL NERACA

NO	KODE ES.I	KODE SATKER	NAMA SATKER	Saldo Kas (Rp)	TANGGAL SETOR	NTPN	JUMLAH SETORAN (Rp)	KETERANGAN
12	05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	7.192.991	19-Feb-25	73D437QLV24IM3C0	6.600.200	
					19-Feb-25	BEF931JNG83RR4EC	590.670	
					19-Feb-25	B5F117QLV24IM5QF	2.121	
13	06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	62.230.201.976				sisa hibah langsung dalam bentuk uang dari UAE atas Program <i>Financing The Regional Development</i> sebesar Rp235.500.000.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp4.167.300.475,00 pada Tahun 2023 dan Rp169.102.497.549,00 pada Tahun 2024. Terdapat realisasi sebesar Rp148.051.352.665,00 pada Tahun 2024 yang pengesahan belanjanya belum dilakukan
				213.746.402				Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Hibah Langsung dari UAE
				999	23-Apr-25	78EC91JNG89U9R1U	999	
					14-Feb-25	C48D161QVCVLD43R	100.000	
					26-Feb-25	3EFF10NA0DHM182T	1.007.300	
					26-Feb-25	868223CIFTR89Q9	7.000	
					26-Feb-25	5E83C7QLV24P99EJ	197.200	
					19-Feb-25	B99E261QVCVPPNVI	914.400	
					26-Feb-25	D3B6448VVNR7L7K5	1.460.100	
					26-Feb-25	CB3EC3CIFTR88K2	46.000	
					19-Feb-25	9FF863CIFTR8M60	464.800	
					26-Feb-25	B821F55DFDK2A6H	765.500	
					13-Feb-25	37AC12G502M1HM09	1.845.500	
					14-Feb-25	BED4A5SDFD902NA	1.314.100	
					13-Feb-25	7AED861QVCVJ6861	60.000	
					19-Feb-25	FEA2F61QVCVPPP9	669.000	
					19-Feb-25	173DC61QVCVPPN7N	2.731.800	
					13-Feb-25	0ADF11JNG83L4L6F	503.400	
					19-Feb-25	7F80461QVCVPPQOE	1.388.400	
					14-Feb-25	EF8AA3CIFTR8G63NE	101.000	
					19-Feb-25	B7F9948VVNR0VNL1	2.268.800	
					13-Feb-25	1237B55DFID6QGH	482.500	
					13-Feb-25	9C2C93CIFTR8V201	8.800	
					14-Feb-25	08D530NAODIHAV330	3.143.354	
					14-Jan-25	4BD590NAODEBF4BQ	274.119	
15	09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	2.260.705	14-Jan-25	608736U8F72A3U5	1.871.706	
					14-Jan-25	5E8F60NAODEBF45J	114.680	
16	12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	524.688	20-Jan-25	BE1F155DFIAF1EJI	524.688	
			<b>JUMLAH KAS LAINNYA DAN SETARA KAS</b>	<b>64.956.638.835</b>			<b>335.926.598</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>65.069.238.138</b>			<b>448.525.901</b>	



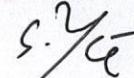
## LAMPIRAN IX

# RINCIAN DESA DENGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG BELUM LENGKAP

## DESA YANG BELUM MENYERAHKAN LAPORAN PER 23 JANUARI 2024

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN	LPJ	BAST	NOTA	BUKTI PAJAK	FOTO	KET DOKUMEN
1	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pagar Jaya	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto
2	Lampung	Pesawaran	Punduh Pedada	Pulau Legundi	50.000.000	Berkas LPJ sudah dikirim dan ada resi pengirimannya namun berkas tidak sampai dikarenakan salah nama sehingga diminta untuk dikirimkan ulang	v	v	v	v	-	Kurang bukti pajak
3	Papua	Supiori	Supiori Utara	Mbrurwandi	50.000.000	Berkas sudah diterima berupa soft file, info dr bnpp bukti pajaknya tidak ada	v	v	v	-	v	Kurang bukti pajak
4	Papua	Merauke	Naukenjerai	Kuler	50.000.000	Berkas berupa softfile	-	-	v	-	v	Kurang LPJ, BAST dan bukti pajak
5	Papua	Merauke	Naukenjerai	Tomer	50.000.000	Berkas berupa softfile	v	v	v	-	-	Kurang bukti pajak dan foto

Mengetahui,  
Plh. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa



Sri Wahyu Febrianti Firman, ST  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19750207.200502.2.003



## LAMPIRAN X

# REKAPITULASI PERSEDIAAN PER SATKER MENURUT AKUN

**REKAPITULASI PERSEDIAAN PER SATKER MENURUT AKUN  
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ES1	KODE SATKER	KODE KEWENANGAN	NAMA SATKER	AKUN PERSEDIAAN										SALDO PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024			
					117111	117113	117114	117122	117124	117125	117126	117127	117128	117129		117199		
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	549.808.129	434.354.627	81.165.996	-	-	-	-	-	636.480.000	-	-	441.680.797	2.143.489.549	
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	636.949.145	121.067.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.653.267	966.669.412	
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA	212.674.236	4.202.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.876.976	
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	48.492.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.716.500	107.209.088	
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	31.050.378	642.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.713.956	90.406.334	
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	158.692.449	3.885.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.534.032	263.111.481	
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	35.449.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.722.689	83.172.359	
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	1.753.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.488.297	47.241.685	
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	67.427.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.834.850	85.262.777	
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	249.276.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.276.380	
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI	7.970.022	-	-	15.374.241.313	1.937.923.224	3.177.105.294	-	-	-	-	-	-	20.497.239.853	
14	04	240270	DK	BADAN PENGELOAL PERBATASAN DAERAH KAB	-	-	-	865.762.700	-	-	-	-	-	-	-	-	865.762.700	
15	04	356000	DK	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	-	-	-	1.570.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570.910.000	
16	04	417936	DK	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	-	-	-	1.879.281.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.879.281.000	
17	04	433344	DK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	04	690639	DK	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANIMBAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.981.630	-	857.981.630	
19	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN	92.711.464	-	-	-	-	-	-	14.060.914.995	-	-	-	4.052.388	14.157.678.847	
20	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	57.697.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.282	57.976.147	
21	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	12.217.000	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.917.000	
22	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	831.160	176.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.007.160	
23	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	186.077.050	3.810.000	1.104.000	1.700.989.900	31.406.432.384	25.408.511.400	71.066.062.000	113.192.760.072	-	35.393.595.470	12.772.500	278.372.114.776		
24	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	306.702.751	2.966.386	-	-	5.502.668	274.817.795	-	1.088.228.700	-	-	-	-	1.678.218.300	
25	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	695.834.317	38.457.300	-	-	-	-	-	11.609.328.000	1.884.604.896	-	-	-	14.228.224.513	
26	09	662766	KP	DITJEN KEUANGAN DAERAH	30.939.650	4.417.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.357.450	
27	11	403222	KP	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9.852.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.968.940	124.821.163	
28	12	027114	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA	12.506.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.506.694	
29	12	027177	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR	19.619.370	1.558.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.177.870	
30	12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	149.263.636	8.752.615	1.538.072	-	-	-	-	-	-	-	40.398.474	-	199.952.797	
32	12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	27.356.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.356.600	
33	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	15.733.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322.500	16.056.435	
<b>TOTAL</b>					<b>3.616.888.027</b>	<b>625.989.968</b>	<b>83.808.068</b>	<b>21.391.184.913</b>	<b>33.349.858.276</b>	<b>28.860.434.489</b>	<b>71.066.062.000</b>	<b>139.951.231.767</b>	<b>2.521.084.896</b>	<b>36.251.577.100</b>	<b>1.152.137.472</b>	<b>338.870.256.976</b>		



## LAMPIRAN XI

# RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

## RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Setjen	Itjen	Ditjen Polpum	Ditjen BAK	Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Bangda	Ditjen Otda	Ditjen Dukcapil	Ditjen Bina Keuda	BSKDN	BPSDM	TOTAL
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>		<b>4.050.580.802</b>	<b>140.303.120</b>	<b>13.480.000</b>	<b>24.352.228.495</b>	<b>14.224.246.284</b>	<b>147.442.252.605</b>	<b>3.488.704.430</b>	<b>10.008.174.546</b>	<b>4.763.171</b>	<b>115.410.471</b>	<b>281.577.359</b>	<b>204.121.721.283</b>
Koreksi Saldo Awal	M01	395.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.757
Pembelian	M02	11.597.031.978	489.137.990	430.832.590	7.191.468.468	2.636.126.309	149.478.773.554	1.427.609.338	307.336.896.770	969.378.507	242.981.597	1.540.300.470	483.340.537.571
Hibah (Masuk)	M04	-	-	-	758.499.660	-	-	-	-	-	-	-	758.499.660
Perolehan Lainnya	M06	149.712.000	-	-	-	-	14.688.703.000	-	97.738.818	-	-	-	14.936.153.818
Reklasifikasi Masuk	M10	73.693.622	-	-	99.800.000	3.445.368	1.664.000	9.940.050	50.000.000	-	21.750.560	10.796.400	271.090.000
Reklasifikasi dari Aset	M11	-	-	-	308.765.810	-	-	-	-	-	-	-	308.765.810
Transfer Masuk Likuidasi UAKPB	M14	183.458.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.458.454
Persediaan Dalam Proses Masuk	M15	-	-	-	4.473.802.700	-	-	-	-	-	-	-	4.473.802.700
Batal Catat Usang Rusak	M93	7.494.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.494.193
Hasil Opname Fisik Kurang	P01	65.915.058	-	-	19.881.819	-	902.000	-	-	-	-	-	86.698.877
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>12.077.701.062</b>	<b>489.137.990</b>	<b>430.832.590</b>	<b>12.852.218.457</b>	<b>2.639.571.677</b>	<b>164.170.042.554</b>	<b>1.437.549.388</b>	<b>307.484.635.588</b>	<b>969.378.507</b>	<b>264.732.157</b>	<b>1.551.096.870</b>	<b>504.366.896.840</b>
Habis Pakai	K01	(7.497.513.686)	(380.164.730)	(444.312.590)	(5.190.882.765)	(2.629.793.439)	(1.351.541.170)	(3.238.095.468)	(303.116.846.803)	(938.784.228)	(233.570.905)	(1.544.827.433)	(326.566.333.217)
Hibah Keluar	K03	-	-	-	(939.429.660)	-	(13.216.751.195)	-	-	-	-	-	(14.156.180.855)
Barang Usang	K04	(125.845.777)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(125.845.777)
Rusak	K05	(23.500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.500)
Catat Persediaan Tidak dikuasai	K09	-	-	-	(809.474.825)	-	(18.667.457.018)	-	-	-	-	-	(19.476.931.843)
Reklasifikasi Keluar	K10	(73.693.622)	-	-	(99.800.000)	(3.445.368)	(1.664.000)	(9.940.050)	(50.000.000)	-	(21.750.560)	(10.796.400)	(271.090.000)
Reklasifikasi ke Aset	K11	(1.599.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.599.000)
Transfer Keluar Likuidasi UAKPB	K14	(183.458.454)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(183.458.454)
Persediaan Dalam Proses Keluar	K15	-	-	-	(4.473.802.700)	-	-	-	-	-	-	-	(4.473.802.700)
Koreksi Kuantitas Kurang	K99	-	-	-	-	-	-	-	(97.738.818)	-	-	-	(97.738.818)
Hasil Opname Fisik Lebih	P01	(4.242.708.164)	-	-	(19.881.819)	-	(2.767.000)	-	-	-	-	-	(4.265.356.983)
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(12.124.842.203)</b>	<b>(380.164.730)</b>	<b>(444.312.590)</b>	<b>(11.533.271.769)</b>	<b>(2.633.238.807)</b>	<b>(33.240.180.383)</b>	<b>(3.248.035.518)</b>	<b>(303.264.585.621)</b>	<b>(938.784.228)</b>	<b>(255.321.465)</b>	<b>(1.555.623.833)</b>	<b>(369.618.361.147)</b>
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>		<b>4.003.439.661</b>	<b>249.276.380</b>	<b>-</b>	<b>25.671.175.183</b>	<b>14.230.579.154</b>	<b>278.372.114.776</b>	<b>1.678.218.300</b>	<b>14.228.224.513</b>	<b>35.357.450</b>	<b>124.821.163</b>	<b>277.050.396</b>	<b>338.870.256.976</b>



## LAMPIRAN XII

# RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

## RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN PER AKUN

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	Kode Transaksi	Barang Konsumsi (117111)	Bahan untuk Pemeliharaan (117113)	Suku Cadang (117114)	Pita Cukai, Materai dan Leges (117121)	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117122)	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (117124)	Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat (117125)	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (117126)	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat (117127)	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat (117128)	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses (117129)	Bahan Baku (117131)	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial (117141)	Persediaan Lainnya (117199)	TOTAL
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>		<b>4.844.481.786</b>	<b>610.476.442</b>	<b>113.491.222</b>	-	<b>21.334.897.038</b>	<b>382.720.441</b>	<b>5.095.980.150</b>	<b>446.822.000</b>	<b>160.017.091.880</b>	<b>9.154.135.762</b>	<b>925.651.980</b>	-	-	<b>1.195.972.582</b>	<b>204.121.721.283</b>
Koreksi Saldo Awal	M01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.757	395.757
Pembelian	M02	16.302.078.026	3.288.638.574	570.549.071	528.000	-	30.702.292.940	25.408.511.400	58.735.137.000	23.375.000.000	282.745.681.730	39.490.962.010	393.232.325	229.250	2.327.697.245	483.340.537.571
Hibah (Masuk)	M04	-	-	-	-	-	758.499.660	-	-	-	-	-	-	-	-	758.499.660
Perolehan Lainnya	M06	247.450.818	-	-	-	-	2.804.600.000	-	11.884.103.000	-	-	-	-	-	-	14.936.153.818
Reklasifikasi Masuk	M10	102.812.958	44.133.000	581.500	-	-	-	-	-	-	-	99.800.000	-	-	23.762.542	271.090.000
Reklasifikasi dari Aset	M11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.965.810	-	-	99.800.000	308.765.810
Transfer Masuk Likuidasi UAKPB	M14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.458.454	183.458.454
Persediaan Dalam Proses Masuk	M15	-	-	-	-	865.762.700	3.608.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.473.802.700
Batal Catat Usang Rusak	M93	425.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.068.856	7.494.193
Hasil Opname Fisik Kurang	P01	15.825.790	3.120.000	-	-	-	19.881.819	-	-	-	-	-	375.000	-	47.496.268	86.698.877
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>16.668.592.929</b>	<b>3.335.891.574</b>	<b>571.130.571</b>	<b>528.000</b>	<b>865.762.700</b>	<b>37.893.314.419</b>	<b>25.408.511.400</b>	<b>70.619.240.000</b>	<b>23.375.000.000</b>	<b>282.745.681.730</b>	<b>39.799.727.820</b>	<b>393.607.325</b>	<b>229.250</b>	<b>2.689.679.122</b>	<b>504.366.896.840</b>
Habis Pakai	K01	(14.697.512.847)	(2.557.094.948)	(592.813.147)	(528.000)	-	(3.965.878.605)	(1.644.057.061)	-	(15.506.651.900)	(285.378.434.346)	-	(250.122.125)	-	(1.973.240.238)	(326.566.333.217)
Hibah Keluar	K03	-	-	-	-	-	(939.429.660)	-	-	(9.216.751.195)	(4.000.000.000)	-	-	-	-	(14.156.180.855)
Barang Usang	K04	(3.327.398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(122.518.379)	(125.845.777)
Rusak	K05	(23.500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.500)
Catat Persediaan tak Dikuasai	K09	-	-	-	-	(809.474.825)	-	-	-	(18.667.457.018)	-	-	-	-	-	(19.476.931.843)
Reklasifikasi Keluar	K10	(35.053.060)	(1.422.000)	(8.000.578)	-	-	(986.500)	-	-	(50.000.000)	(298.250)	-	(69.780.200)	(229.250)	(105.320.162)	(271.090.000)
Reklasifikasi ke Aset	K11	(1.599.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.599.000)
Transfer Keluar Likuidasi UAKPB	K14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(183.458.454)	(183.458.454)
Persediaan Dalam Proses Keluar	K15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.473.802.700)	-	-	-	(4.473.802.700)
Koreksi Kuantitas Kurang	K99	(97.738.818)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(97.738.818)
Hasil Opname Fisik Lebih	P01	(3.060.932.065)	(761.861.100)	-	-	-	(19.881.819)	-	-	-	-	-	(73.705.000)	-	(348.976.999)	(4.265.356.983)
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(17.896.186.688)</b>	<b>(3.320.378.048)</b>	<b>(600.813.725)</b>	<b>(528.000)</b>	<b>(809.474.825)</b>	<b>(4.926.176.584)</b>	<b>(1.644.057.061)</b>	<b>-</b>	<b>(43.440.860.113)</b>	<b>(289.378.732.596)</b>	<b>(4.473.802.700)</b>	<b>(393.607.325)</b>	<b>(229.250)</b>	<b>(2.733.514.232)</b>	<b>(369.618.361.147)</b>
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>		<b>3.616.888.027</b>	<b>625.989.968</b>	<b>83.808.068</b>	-	<b>21.391.184.913</b>	<b>33.349.858.276</b>	<b>28.860.434.489</b>	<b>71.066.062.000</b>	<b>139.951.231.767</b>	<b>2.521.084.896</b>	<b>36.251.577.100</b>	-	-	<b>1.152.137.472</b>	<b>338.870.256.976</b>

gaf



## LAMPIRAN XIII

# DAFTAR PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI

## DAFTAR PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI PER 31 DESEMBER 2024

NO	KODE	URAIAN ESELON I	KODE	URAIAN SATKER EKS-TP	KODE	URAIAN AKUN	URAIAN BARANG	NILAI
1	04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179317	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN 179317	1.132.438.140
			251525	KANTOR PERBATASAN DAN KERJASAMA DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	MESS WISMA BUNGALOW TEMPAT PERISTIRAHATAN SEMI PERMANEN BARAK PEGAWAI DISTRIK TP 2012 251525	1.551.519.000
			170010	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA (TP)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	RUMAH DINAS CAMAT MIANGAS	702.568.212
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	KANTOR CAMAT PERBATASAN	692.439.632
			250300	BADAN PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROV. PAPUA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI NEGARA	345.658.565
			259396	BADAN PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI PROV. PAPUA	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG MENARA PENUNJAU PERMANEN	463.816.260
			<b>SUBTOTAL</b>					
2	05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	119281	BPMD KAB. BANYUASIN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI PASAR PERMANEN	83.000.000
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	174.258.500
					117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI PASAR PERMANEN	162.000.000
			<b>SUBTOTAL</b>					
3	06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	071623	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	1.924.780.798
			080928	DINAS KIMPRASWIL KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN	1.488.917.069
			090728	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KAB. ROKAN HULU	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	897.448.130
			111123	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. OKU SELATAN	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	2.866.994.200
			131013	DINAS KIMPRASWIL, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KAB. SEKADAU	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	2.520.867.077
			140824	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SUKAMARA (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN	1.773.454.541
			241420	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROTE NDAO (06)	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	3.498.550.603
			280514	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPULAUAN SULA	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	3.696.444.600
<b>SUBTOTAL</b>								<b>18.667.457.018</b>
4	07	DITJEN OTDA	120730	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS)	7.728.000
			<b>SUBTOTAL</b>					
<b>TOTAL PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI</b>								<b>23.982.883.327</b>



## LAMPIRAN XIV

# REKAPITULASI ASET TETAP PER SATKER PER 31 DESEMBER 2024

REKAPITULASI ASET TETAP PER SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2024

Table with columns: NO, KODE ES1, KODE SATKER, KODE KEWENANGAN, NAMA SATKER, TANAH, PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, JALAN DAN JEMBATAN, IRIGASI, JARINGAN, ASET TETAP RENOVASI, ASET TETAP LAINNYA, KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN, AKUMULASI PERALATAN DAN MESIN, AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN, AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN, AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI, AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN, AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA. Rows include sections like SEKRETARIAT JENDERAL, INSPEKTORAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM, and DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA.

Handwritten signature or initials in blue ink.



## LAMPIRAN XV

# RINCIAN MUTASI TANAH PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI TANAH PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	PEMDES	BANGDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>10.183.450.813.077</b>	<b>142.267.725.000</b>	<b>613.234.134.493</b>	<b>479.054.657.019</b>	<b>224.894.826.500</b>	<b>1.523.464.581.433</b>	<b>13.166.366.737.522</b>
Saldo Awal	100	2.022.034.000	-	-	-	-	67.445.000.000	<b>69.467.034.000</b>
Hibah Masuk	103	84.455.622.000	-	-	-	-	-	<b>84.455.622.000</b>
Transfer Masuk	102	67.445.000.000	-	-	-	-	60.536.000	<b>67.505.536.000</b>
Likuidasi Masuk	131	2.577.683.998.000	-	-	-	-	-	<b>2.577.683.998.000</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	204	-	-	-	-	-	60.536.000	<b>60.536.000</b>
Pengembangan Melalui KDP	208	-	-	-	-	-	805.361.000	<b>805.361.000</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>2.731.606.654.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.371.433.000</b>	<b>2.799.978.087.000</b>
Koreksi Susulan	214	(1.961.498.000)	-	-	-	-	-	<b>(1.961.498.000)</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(60.536.000)	-	-	-	-	(67.445.000.000)	<b>(67.505.536.000)</b>
Transfer Keluar	302	(60.536.000)	-	-	-	-	(67.445.000.000)	<b>(67.505.536.000)</b>
Koreksi Pencatatan	305	-	-	-	-	-	(60.536.000)	<b>(60.536.000)</b>
Likuidasi Keluar	311	(2.577.683.998.000)	-	-	-	-	-	<b>(2.577.683.998.000)</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(2.579.766.568.000)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(134.950.536.000)</b>	<b>(2.714.717.104.000)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>		<b>10.335.290.899.077</b>	<b>142.267.725.000</b>	<b>613.234.134.493</b>	<b>479.054.657.019</b>	<b>224.894.826.500</b>	<b>1.456.885.478.433</b>	<b>13.251.627.720.522</b>



## LAMPIRAN XVI

# RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	KODE TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN POLPUM	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN OTDA	DITJEN DUKAPIL	DITJEN BINA KEUDA	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>788.987.558.413</b>	<b>19.694.568.304</b>	<b>17.651.540.515</b>	<b>131.256.615.123</b>	<b>99.524.006.723</b>	<b>66.955.981.914</b>	<b>53.354.583.543</b>	<b>2.293.725.365.948</b>	<b>18.984.460.832</b>	<b>26.040.568.538</b>	<b>147.567.407.981</b>	<b>3.663.742.657.834</b>
Saldo Awal	100	586.005.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.005.762
Pembelian	101	161.080.529.694	533.690.600	1.499.911.573	2.898.620.350	13.226.862.943	492.052.000	818.288.000	352.181.943.147	1.401.666.745	435.191.100	3.776.680.120	538.345.436.272
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	202	7.827.262.710	-	-	-	-	-	-	-	1.591.100	-	-	7.828.853.810
Transfer Masuk	102	-	7.840.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	472.000.000	8.312.660.000
Hibah Masuk	103	1.924.368.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.924.368.420
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	2.613.058.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.613.058.195
Reklasifikasi Masuk	107	7.098.795.000	-	246.561.303	-	110.272.000	-	44.405.000	64.000.000	549.351.000	8.800.000	-	8.122.184.303
Perolehan Lainnya	112	3.801.947.951	-	246.561.303	161.949.000	-	-	-	-	73.385.000	-	8.678.000	4.292.521.254
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	115	1.599.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.599.000
Likuidasi Masuk	131	16.386.204.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.386.204.108
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	204	3.489.266	-	-	-	-	-	-	1.925.000	-	-	-	5.414.266
Koreksi Susulan	214	-	-	-	-	3.867.250.000	-	-	-	-	-	-	3.867.250.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	402	-	-	-	-	15.483.040	-	-	-	-	-	-	15.483.040
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>201.323.260.106</b>	<b>8.374.350.600</b>	<b>1.993.034.179</b>	<b>3.060.569.350</b>	<b>17.219.867.983</b>	<b>492.052.000</b>	<b>862.693.000</b>	<b>352.247.868.147</b>	<b>2.025.993.845</b>	<b>443.991.100</b>	<b>4.257.358.120</b>	<b>592.301.038.430</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(128.570.318)	-	(47.682.207)	-	-	-	-	-	-	-	(8.678.000)	(184.930.525)
Transfer Keluar	302	-	-	-	-	(7.840.660.000)	-	-	-	-	-	(472.000.000)	(8.312.660.000)
Hibah Keluar	303	-	-	-	-	(10.165.000)	-	-	-	-	-	-	(10.165.000)
Reklasifikasi Keluar	304	(2.632.858.195)	-	(246.561.303)	-	(110.398.000)	-	(44.405.000)	(64.000.000)	(549.351.000)	(8.800.000)	-	(3.656.373.498)
Koreksi Pencatatan	305	(7.080.739.962)	-	(246.561.303)	(80.974.500)	(3.867.250.000)	-	-	(739.226.736)	-	-	-	(12.014.752.501)
Likuidasi Keluar	311	(16.386.204.108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.386.204.108)
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	369	-	-	(3.150.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.150.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	401	(18.514.373.653)	(1.060.943.508)	(1.505.607.404)	(19.066.500)	(1.816.313.200)	(44.850.000)	(30.904.765.496)	(1.706.706.083)	(76.104.120)	(649.930.849)	(2.416.604.047)	(58.715.264.860)
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(44.742.746.236)</b>	<b>(1.060.943.508)</b>	<b>(2.049.562.217)</b>	<b>(100.041.000)</b>	<b>(13.644.786.200)</b>	<b>(44.850.000)</b>	<b>(30.949.170.496)</b>	<b>(2.509.932.819)</b>	<b>(625.455.120)</b>	<b>(658.730.849)</b>	<b>(2.897.282.047)</b>	<b>(99.283.500.492)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>		<b>945.568.072.283</b>	<b>27.007.975.396</b>	<b>17.595.012.477</b>	<b>134.217.143.473</b>	<b>103.099.088.506</b>	<b>67.403.183.914</b>	<b>23.268.106.047</b>	<b>2.643.463.301.276</b>	<b>20.384.999.557</b>	<b>25.825.828.789</b>	<b>148.927.484.054</b>	<b>4.156.760.195.772</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024</b>		<b>(737.430.239.527)</b>	<b>(17.024.400.202)</b>	<b>(14.598.029.673)</b>	<b>(126.229.384.964)</b>	<b>(97.729.994.041)</b>	<b>(64.790.080.798)</b>	<b>(21.266.660.315)</b>	<b>(2.204.955.887.591)</b>	<b>(17.789.621.830)</b>	<b>(22.976.704.961)</b>	<b>(135.944.599.105)</b>	<b>(3.460.735.603.007)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>		<b>208.137.832.756</b>	<b>9.983.575.194</b>	<b>2.996.982.804</b>	<b>7.987.758.509</b>	<b>5.369.094.465</b>	<b>2.613.103.116</b>	<b>2.001.445.732</b>	<b>438.507.413.685</b>	<b>2.595.377.727</b>	<b>2.849.123.828</b>	<b>12.982.884.949</b>	<b>696.024.592.765</b>

9026



## LAMPIRAN XVII

# RINCIAN PEMBELIAN (101) PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

## RINCIAN PEMBELIAN (101) PERALATAN DAN MESIN PER SATKER

Es I	Kode	Nama Satker	Nilai
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	143.669.853.444
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	7.622.046.750
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	9.788.629.500
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	533.690.600
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1.499.911.573
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	2.898.620.350
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	262.775.470
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	12.964.087.473
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	492.052.000
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	818.288.000
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	352.181.943.147
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1.401.666.745
11	403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	435.191.100
12	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	717.278.000
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	730.080.740
12	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	529.795.320
12	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	271.048.000
12	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.100.000.000
12	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	428.478.060
<b>TOTAL</b>			<b>538.345.436.272</b>



## LAMPIRAN XVIII

# RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>2.072.850.840.900</b>	<b>45.459.818.486</b>	<b>1.576.390.000</b>	<b>186.337.863.344</b>	<b>103.281.574.926</b>	<b>36.357.571.783</b>	<b>32.481.509.071</b>	<b>425.767.645.702</b>	<b>2.904.113.214.212</b>
Pembelian	101	187.685.000	-	308.765.810	-	866.984.000	-	-	-	1.363.434.810
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	202	8.839.275.951	465.684.294	417.931.620	2.482.169.755	478.124.500	-	294.470.475	699.671.000	13.677.327.595
Transfer Masuk	102	-	-	-	-	-	-	-	7.246.819.000	7.246.819.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000	55.000.000
Reklasifikasi Masuk	107	994.000.000	-	-	162.239.000	-	-	-	-	1.156.239.000
Likuidasi Masuk	131	89.384.087.872	-	-	-	-	-	-	-	89.384.087.872
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	204	2.382.022.870	-	-	-	182.985.720	-	-	277.465.000	2.842.473.590
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	206	29.746.446	-	-	-	-	-	-	-	29.746.446
Pengembangan Melalui KDP	208	-	-	-	-	-	-	-	1.915.849.743	1.915.849.743
Koreksi Manual	209	-	-	-	-	-	-	-	397.421.000	397.421.000
Koreksi Susulan	214	-	-	-	-	-	-	-	595.041.000	595.041.000
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>101.816.818.139</b>	<b>465.684.294</b>	<b>726.697.430</b>	<b>2.644.408.755</b>	<b>1.528.094.220</b>	<b>-</b>	<b>294.470.475</b>	<b>11.187.266.743</b>	<b>118.663.440.056</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(215.422.361)	-	(417.931.620)	-	(1.815.694)	-	(3.941.675)	(129.307.587)	(768.418.937)
Koreksi Manual	209	-	-	-	-	-	-	-	(397.421.000)	(397.421.000)
Transfer Keluar	302	-	-	-	-	-	-	-	(7.246.819.000)	(7.246.819.000)
Reklasifikasi Keluar	304	(994.000.000)	-	-	(162.239.000)	(866.984.000)	-	-	-	(2.023.223.000)
Koreksi Pencatatan	305	-	-	-	-	-	-	-	(55.000.000)	(55.000.000)
Likuidasi Keluar	311	(89.384.087.872)	-	-	-	-	-	-	-	(89.384.087.872)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	315	-	-	(308.765.810)	-	-	-	-	-	(308.765.810)
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(90.593.510.233)</b>	<b>-</b>	<b>(726.697.430)</b>	<b>(162.239.000)</b>	<b>(868.799.694)</b>	<b>-</b>	<b>(3.941.675)</b>	<b>(7.828.547.587)</b>	<b>(100.183.735.619)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>		<b>2.084.074.148.806</b>	<b>45.925.502.780</b>	<b>1.576.390.000</b>	<b>188.820.033.099</b>	<b>103.940.869.452</b>	<b>36.357.571.783</b>	<b>32.772.037.871</b>	<b>429.126.364.858</b>	<b>2.922.592.918.649</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024</b>		<b>(379.840.210.599)</b>	<b>(8.187.720.874)</b>	<b>(269.247.757)</b>	<b>(48.053.512.573)</b>	<b>(19.810.678.832)</b>	<b>(5.788.901.324)</b>	<b>(9.449.161.069)</b>	<b>(94.439.576.884)</b>	<b>(565.839.009.912)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>		<b>1.704.233.938.207</b>	<b>37.737.781.906</b>	<b>1.307.142.243</b>	<b>140.766.520.526</b>	<b>84.130.190.620</b>	<b>30.568.670.459</b>	<b>23.322.876.802</b>	<b>334.686.787.974</b>	<b>2.356.753.908.737</b>

9056



## LAMPIRAN XIX

# RINCIAN MUTASI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN PER UNIT ESELON I

(dalam rupiah)

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	DITJEN BAK	DITJEN BINA PEMDES	DITJEN BINA BANGDA	DITJEN OTDA	DITJEN DUKCAPIL	BSKDN	BPSDM	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>241.919.632.153</b>	<b>11.245.442.670</b>	<b>3.058.859.874</b>	<b>3.707.596.890</b>	<b>489.387.520</b>	<b>2.863.933.000</b>	<b>505.733.100</b>	<b>30.030.262.414</b>	<b>293.820.847.621</b>
Pengembangan Nilai Aset	202	769.825.000	-	-	-	-	-	-	-	769.825.000
Reklasifikasi masuk	107	2.613.058.195	-	-	866.984.000	-	-	-	-	3.480.042.195
Perolehan Lainnya	112	1.766.611.484	-	-	-	-	-	-	-	1.766.611.484
Likuidasi Masuk	131	4.891.357.792	-	-	-	-	-	-	-	4.891.357.792
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	204	177.970.000	-	-	927.012.800	-	-	-	267.145.400	1.372.128.200
Koreksi Manual	209	-	-	-	-	-	-	-	172.840.000	172.840.000
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	402	1.581.510.823	-	-	-	-	-	-	-	1.581.510.823
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>11.800.333.294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.793.996.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>439.985.400</b>	<b>14.034.315.494</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(10.990.000)	-	-	(197.000.000)	-	-	-	(24.346.000)	(232.336.000)
Koreksi Pencatatan	305	-	-	-	(866.984.000)	-	-	-	-	(866.984.000)
Likuidasi Keluar	311	(4.891.357.792)	-	-	-	-	-	-	-	(4.891.357.792)
Penghentian Aset dari Penggunaan	401	(1.581.510.823)	-	-	-	(489.387.520)	-	-	-	(2.070.898.343)
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(6.483.858.615)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.063.984.000)</b>	<b>(489.387.520)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(24.346.000)</b>	<b>(8.061.576.135)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>		<b>247.236.106.832</b>	<b>11.245.442.670</b>	<b>3.058.859.874</b>	<b>4.437.609.690</b>	<b>-</b>	<b>2.863.933.000</b>	<b>505.733.100</b>	<b>30.445.901.814</b>	<b>299.793.586.980</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024</b>		<b>(132.616.972.546)</b>	<b>(4.076.469.054)</b>	<b>(2.153.923.389)</b>	<b>(2.859.582.682)</b>	<b>-</b>	<b>(700.508.068)</b>	<b>(173.311.992)</b>	<b>(19.427.233.641)</b>	<b>(162.008.001.372)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>		<b>114.619.134.286</b>	<b>7.168.973.616</b>	<b>904.936.485</b>	<b>1.578.027.008</b>	<b>-</b>	<b>2.163.424.932</b>	<b>332.421.108</b>	<b>11.018.668.173</b>	<b>137.785.585.608</b>

9/2/24



## LAMPIRAN XX

# RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI		SETJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2023	SA	29.583.491.957	-	17.686.224.808	13.578.079.108	4.951.568.889	84.583.688.119	5.584.047.737	1.291.295.317	519.862.436	2.966.225.754	160.744.484.125
Pembelian	101	101T	369.078.668			2.331.000		29.746.446	1.612.640.624	695.808.441			2.709.605.179
Transfer Masuk	102	102T	1.938.822.874										1.938.822.874
Hibah Masuk	103	103T	1.388.850.000										1.388.850.000
Perolehan Lainnya	112	112T	-	642.024.528		-				-			642.024.528
Likuidasi Masuk	131	131T	1.486.127.146										1.486.127.146
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	204	204T	1.830.000.000										1.830.000.000
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>7.012.878.688</b>	<b>642.024.528</b>	<b>-</b>	<b>2.331.000</b>	<b>-</b>	<b>29.746.446</b>	<b>1.612.640.624</b>	<b>695.808.441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.165.429.727</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	264k	-						-	(73.385.000)			(73.385.000)
Transfer Keluar	302	302k	-					(29.746.446)					(29.746.446)
Koreksi Pencatatan	305	305k	(1.938.822.874)							-			(1.938.822.874)
Likuidasi Keluar	311	311k	(1.486.127.146)										(1.486.127.146)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	401	401k	(2.133.835.677)			(90.000)		(70.062.324.937)					(72.196.250.614)
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(5.558.785.697)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(90.000)</b>	<b>-</b>	<b>(70.092.071.383)</b>	<b>-</b>	<b>(73.385.000)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(75.724.332.080)</b>
Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 30 Juni 2024	31.037.584.948	642.024.528	17.686.224.808	13.580.320.108	4.951.568.889	14.521.363.182	7.196.688.361	1.913.718.758	519.862.436	2.966.225.754	93.185.581.772
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	asi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(7.605.081.398)		-	(280.836.320)	-	(14.521.363.182)	(419.899.750)	-	-	(22.550.000)	(22.849.730.650)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Nilai Buku per 31 Desember 2024	ilai Buku per 30 Juni 2024	23.432.503.550		17.686.224.808	13.299.483.788	4.951.568.889	-	6.776.788.611	1.913.718.758	519.862.436	2.943.675.754	70.335.851.122



## LAMPIRAN XXI

# RINCIAN MUTASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI KDP PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	PEMDES	BPSDM	JUMLAH
1		2	4	5	6
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>27.631.034.399</b>	<b>24.997.200</b>	<b>1.915.250.910</b>	<b>29.571.282.509</b>
Perolehan Penambahan KDP	502	-	2.926.503.975	1.322.567.483	4.249.071.458
Koreksi Nilai KDP Bertambah	504	-		1.711.707.165	1.711.707.165
Perolehan Lainnya KDP	510	-		74.514.000	74.514.000
Reklasifikasi Masuk KDP	514	-		805.361.000	805.361.000
<b>Mutasi Tambah</b>		<b>-</b>	<b>2.926.503.975</b>	<b>3.914.149.648</b>	<b>6.840.653.623</b>
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	105	(2.613.058.195)		(55.000.000)	(2.668.058.195)
Pengembangan Melalui KDP	208	-		(2.721.210.743)	(2.721.210.743)
Reklasifikasi Keluar KDP	513	-		(805.361.000)	(805.361.000)
Koreksi Pencatatan KDP	517	-	(2.926.503.975)	(1.854.327.165)	(4.780.831.140)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	564	(69.605.305)			(69.605.305)
<b>Mutasi Kurang</b>		<b>(2.682.663.500)</b>	<b>(2.926.503.975)</b>	<b>(5.435.898.908)</b>	<b>(11.045.066.383)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>24.948.370.899</b>	<b>24.997.200</b>	<b>393.501.650</b>	<b>25.366.869.749</b>



## LAMPIRAN XXII

# RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER SATKER

## RINCIAN KDP PER SATKER

No	Kode ES.I	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Kontrak	Jangka Waktu	Nilai Kontrak	% Penyelesaian	Nilai KDP posisi 31 Desember 2024	Keterangan	Penjelasan Belum Selesai	Apakah akan dilanjutkan atau tidak?
2	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/020/SPK.MK/IPDN.28.2	10 Maret sd 3 April 2020	195.450.000	100%	195.450.000	Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
3	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/023/SPK.KP/IPDN.28.2	10 Maret sd 30 April 2020	231.200.000	100%	231.200.000	Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
4	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR				100%	202.098.311	Honor Pengelola Kegiatan TA 2020 untuk 4 NUP Gedung dan Bangunan berupa 2 Unit Wisma Putri, 1 Unit Auditorium, dan 1 Unit Posko Pengasuhan	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
5	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	011/2711/PAKPA Tanggal 9 September			20%	5.429.180.237	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
6	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	6.488.726.913	Asrama Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
7	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	6.400.755.659	Asrama Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
8	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR	027/150/SPK/IPDN.26.1 Tanggal 13 Oktober 2015			20%	5.600.040.676	Gedung Pos Jaga Permanen	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
9	01	683070	IPDN KAMPUS KALBAR		1 Januari s/d 31 Desember 2022			400.919.103	Lanjutan Pembangunan Gedung IPDN Kampus Kalimantan Barat TA 2022 (Biaya Pengelola Kegiatan Gedung Perpustakaan dan Gedung Pos Jaga Permanen)	Belum mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Dilanjutkan
<b>JUMLAH SETJEN</b>						<b>426.650.000</b>		<b>24.948.370.899</b>			
1	05	027753	DITJEN BINA PEMDES	6973/SPK/BPD/X/2023	1 TAHUN	24.997.200	100%	24.997.200	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Parkir Sepeda Motor dan Selasar Gedung Ditjen Bina Pemdes	Tidak mendapat alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan	Tidak Dilanjutkan
<b>JUMLAH DITJEN BINA PEMDES</b>						<b>24.997.200</b>		<b>24.997.200</b>			
1	12	403231	BPSDM	027/1273/KONT/IX/2015 dan 027/577/KONT/III/2017	6 Bulan	318.987.650	100%	318.987.650	KDP berupa Realisasi konsultan perencana Pembangunan Gedung Alat Bantu Damkar pada Satker Balai Pol PP dan Damkar Rokan Hilir tidak direklas ke Aset Tetap Definitif	Satker Balai Pol PP dan Damkar Rohil sudah dalam posisi Satker Inaktif Bersaldo (SIB) dan aset pada Satker Balai Pol PP dan Damkar Bogor juga sudah terpisah dari BPSDM Kemendagri	Tidak Dilanjutkan
2	12	403216	PPSDM REGIONAL BANDUNG	SPK 000.4.2/1502/SPK/PL.03/PPSDM		74.514.000		74.514.000	Jasa Konsultan atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana yang akan digunakan untuk Pekerjaan Fisik Renovasi Sarana Penunjang Pelatihan PPSDM	Pekerjaan masih berupa rancangan sehingga belum memenuhi kriteria untuk diakui sebagai penambahan nilai Gedung dan Bangunan	Dilanjutkan
<b>JUMLAH BPSDM</b>						<b>393.501.650</b>		<b>393.501.650</b>			
<b>TOTAL</b>						<b>501.164.000</b>		<b>25.366.869.749</b>			



## LAMPIRAN XXIII

# REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2024

REKAPITULASI SALDO ASET LAINNYA SERTA AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2024

NO	KODE ES1	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	SOFTWARE	LISENSI	HASIL KAJIAN/ PENELITIAN	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/ Lembaga	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE	AKUMULASI AMORTISASI LISENSI	AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN
1	01	352593	KD	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	403200	KP	SEKRETARIAT JENDERAL	38.666.353.620	26.762.045.698	1.676.759.600	53.300.000	98.020.945.752	3.490.500.335	1.375.897.625	(1.128.212.494)	(30.537.521.340)	(4.173.232.391)	(1.375.897.625)
3	01	448302	KP	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	3.376.857.500	-	197.795.000	1.590.421.750	905.824.766	12.595.607.827	18.898.000	(12.309.324.278)	(2.251.755.625)	-	(18.898.000)
4	01	483005	KP	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	1.000.000.000	-	-	-	258.080.276	234.819.113	-	(234.819.113)	(375.000.000)	-	-
5	01	677010	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	-	-	-	-	162.214.525	680.065.000	-	(680.065.000)	-	-	-
6	01	677024	KD	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	24.717.000	-	-	-	267.117.303	-	-	-	(18.537.750)	-	-
7	01	677045	KD	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	70.120.000	-	-	-	55.508.996	2.559.667.160	23.000.000	(2.559.667.160)	(61.355.000)	-	(23.000.000)
8	01	683070	KD	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	19.472.000	-	-	-	644.146.669	-	-	(626.603.675)	(19.472.000)	-	-
9	01	683084	KD	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	162.937.471	939.806.871	-	(938.704.971)	-	-	-
10	01	683091	KD	IPDN KAMPUS PAPUA	-	-	-	-	-	367.096.000	349.100.000	(367.096.000)	-	-	-
11	02	027203	KP	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	1.289.389.320	-	-	-	-	-	-	-	(852.086.195)	-	-
12	03	027210	KP	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	8.313.499.230	-	-	-	-	-	-	-	(7.291.693.080)	-	-
13	04	027486	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	836.030.200	198.090.600	-	-	29.400.000	2.832.484.380	-	(2.832.484.380)	(595.469.563)	(49.522.650)	-
14	05	027753	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	16.862.160.880	-	397.210.000	299.605.000	50.322.295.474	255.073.247	200.343.000	(252.964.668)	(8.598.989.576)	-	(200.343.000)
15	05	028449	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(25.000.000)	-	-
16	05	028830	KD	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	-	-	-	-	-	84.724.500	-	(77.729.545)	-	-	-
17	05	613629	KD	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	-	-	-	-	-	210.270.000	-	(210.104.667)	-	-	-
18	06	039729	KP	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	708.280.140	-	-	-	4.135.673.016	28.828.730.789	19.957.152.092	(28.193.487.111)	(659.103.873)	-	(19.957.152.092)
19	07	621892	KP	DITJEN OTONOMI DAERAH	2.487.407.950	-	-	-	-	53.203.559.159	34.789.007.197	(53.042.780.814)	(1.833.641.350)	-	(34.710.824.697)
20	08	634082	KP	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	642.041.175.764	42.571.041.782	-	219.764.000	229.372.442.230	120.195.909	1.897.622.000	(120.195.909)	(600.049.625.567)	(3.984.545.700)	(1.897.622.000)
21	09	662766	KP	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	35.482.587.935	-	-	-	5.764.113.530	149.522.500	5.482.770.674	(5.482.770.674)	(35.422.421.179)	-	(149.522.500)
22	11	403222	KP	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	3.598.169.431	2.255.000	-	-	-	9.377.500	3.129.285.850	(9.377.500)	(3.326.530.831)	(2.255.000)	(4.620.000)
23	12	027114	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	2.698.000	-	(2.148.000)	-	-	-
24	12	027177	KD	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR	54.500.000	-	-	20.750.000	-	1.265.809.308	-	(1.130.824.580)	(54.500.000)	-	-
25	12	403216	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	-	-	-	49.885.000	-	-	-	-	-	-	-
26	12	403231	KP	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.516.059.443	-	-	99.678.000	517.800.000	6.664.760.539	-	(6.542.263.824)	(245.163.888)	-	-
27	12	506138	KD	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI	-	-	-	-	94.718.152	218.948.400	-	(218.948.400)	-	-	-
28	12	506137	KD	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	-	-	-	-	20.400.000	1.782.000	-	(1.782.000)	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>756.371.780.413</b>	<b>69.533.433.080</b>	<b>2.271.764.600</b>	<b>2.333.403.750</b>	<b>384.325.357.961</b>	<b>120.974.236.236</b>	<b>61.889.828.264</b>	<b>(116.962.354.763)</b>	<b>(692.217.866.817)</b>	<b>(8.209.555.741)</b>	<b>(58.337.879.914)</b>



## LAMPIRAN XXIV

# RINCIAN MUTASI ASET TAK BERWUJUD PER UNIT ESELON I

## RINCIAN MUTASI ASET TAK BERUJUD PER UNIT ESELON I

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2023	37.288.415.171	789.614.320	139.050.000	1.034.120.800	7.828.962.630	16.636.280.140	4.401.946.950	633.582.122.436	35.522.380.435	6.601.555.981	290.872.443	744.115.321.306
Pembelian	101	20.466.513.107				1.475.276.325			42.645.962.172			1.450.000.000	66.037.751.604
Transfer Masuk	102		499.775.000	8.174.449.230									8.674.224.230
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	105	3.409.367.850											3.409.367.850
Perolehan Lainnya	112	1.231.545.000											1.231.545.000
Likuidasi Masuk	131	29.975.000											29.975.000
Pengembangan Nilai Aset	202	11.537.285.040			-	5.853.007.950		149.850.000	8.603.896.938		128.154.300		26.272.194.228
Koreksi Susulan	214					2.926.503.975					-		2.926.503.975
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	402	7.078.995.000										-	7.078.995.000
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>43.753.680.997</b>	<b>499.775.000</b>	<b>8.174.449.230</b>	<b>-</b>	<b>10.254.788.250</b>	<b>-</b>	<b>149.850.000</b>	<b>51.249.859.110</b>	<b>-</b>	<b>128.154.300</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>115.660.556.887</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	264	(9.861.500)											(9.861.500)
Transfer Keluar	302					(499.775.000)							(499.775.000)
Reklasifikasi Keluar	304	(7.078.995.000)											(7.078.995.000)
Likuidasi Keluar	311	(29.975.000)											(29.975.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	401	(485.422.500)			-		(15.928.000.000)	(2.064.389.000)		(39.792.500)	(3.129.285.850)	-	(21.646.889.850)
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(7.604.254.000)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(499.775.000)</b>	<b>(15.928.000.000)</b>	<b>(2.064.389.000)</b>	<b>-</b>	<b>(39.792.500)</b>	<b>(3.129.285.850)</b>	<b>-</b>	<b>(29.265.496.350)</b>
Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2024	73.437.842.168	1.289.389.320	8.313.499.230	1.034.120.800	17.583.975.880	708.280.140	2.487.407.950	684.831.981.546	35.482.587.935	3.600.424.431	1.740.872.443	830.510.381.843
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2024	Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2024	(37.436.874.106)	(789.614.320)	(7.291.693.080)	(644.992.213)	(8.686.461.451)	(659.103.873)	(1.833.641.350)	(604.034.171.267)	(35.422.421.179)	(3.328.785.831)	(299.663.888)	(700.427.422.558)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Nilai Buku per 31 Desember 2024	36.000.968.062	499.775.000	1.021.806.150	389.128.587	8.897.514.429	49.176.267	653.766.600	80.797.810.279	60.166.756	271.638.600	1.441.208.555	130.082.959.285



## LAMPIRAN XXV

# REKAPITULASI DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

## Rekapitulasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163119) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
1	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	98.020.945.752	02094T/403200/2024	241330301000816	31-Des-24	522191	19.835.145	815619	(19.835.145)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 87/KU.ROPEG/II/2024 untuk Pelaksanaan Perawatan Mesin Finger Print di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	00007T/403200/2025	259991302005676	13-Jan-25	825619	19.835.145	411124	(357.390)	17.512.110	-	Pembayaran Pelaksanaan Perawatan Mesin Finger Print di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai BAST Nomor 816/KU.ROPEG/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024
	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(1.965.645)			
2	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02100T/403200/2024	241330301000721	31-Des-24	532111	91.220.710.500	815619	(91.220.710.500)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/7898/Pusdatin/2024 untuk Pengadaan Perangkat Pusat Data Kemendagri dan DRC	00027T/403200/2025	259991301003219	13-Jan-25	825619	91.220.710.500	411122	(1.232.712.304)	80.948.107.966	-	Pembayaran Pengadaan Perangkat Pusat Data Kemendagri dan DRC sesuai BAST Nomor 000.4/8388/Pusdatin/2024 Tanggal 31-12-2024
	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(9.039.890.230)			
3	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02091T/403200/2024	241330301000692	27-Des-24	523111	814.671.474	815619	(814.671.474)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 602/074/PPK/II/BU untuk Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Pusat, Rumah Dinas, Gedung Arsip dan Gedung Pertemuan Cipayang	00024T/403200/2025	259991302005690	13-Jan-25	825619	814.671.474	411124	(14.678.765)	719.259.500	-	Pembayaran Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Pusat, Rumah Dinas, Gedung Arsip dan Gedung Pertemuan Cipayang sesuai BAST Nomor 602/6157/PPK/XII/BU Tanggal 31-12-2024
	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(80.733.209)			
4	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02082T/403200/2024	241330301000717	27-Des-24	522191	120.223.027	815619	(120.223.027)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8653/Pusdatin/2023 untuk Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi dan Call Center	00009T/403200/2025	259991302005674	13-Jan-25	825619	120.223.027	411124	(2.166.181)	106.142.852	-	Pembayaran Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi dan Call Center sesuai BAST Nomor 000.4/8408/Pusdatin/2024 Tanggal 31-12-2024
	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(11.913.994)			
5	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02079T/403200/2024	241330301000705	27-Des-24	522131	807.987.500	815619	(807.987.500)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/6118/Pusdatin/2024 untuk Manajemen, Standarisasi dan Operasionalisasi Pusat Penanganan Insiden Siber	00010T/403200/2025	259991303002716	13-Jan-25	825619	807.987.500	411124	(14.558.333)	713.358.334	-	Pembayaran Manajemen, Standarisasi dan Operasionalisasi Pusat Penanganan Insiden Siber sesuai BAST Nomor 000.4/8414/Pusdatin/2024 Tanggal 31-12-2024
	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(80.070.833)			
6	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02078T/403200/2024	241330301000704	27-Des-24	522141	337.691.600	815619	(337.691.600)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8661/Pusdatin/2023 untuk Pengadaan Layanan Video Conference	00011T/403200/2025	259991302005661	13-Jan-25	825619	337.691.600	411124	(6.084.533)	298.142.134	-	Pembayaran Pengadaan Layanan Video Conference sesuai BAST Nomor 000.4/8402/Pusdatin/2024 Tanggal 31-12-2024
	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(33.464.933)			
14	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02080T/403200/2024	241330301000709	27-Des-24	522141	87.332.830	815619	(87.332.830)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8657/Pusdatin/2023 untuk Sewa Layanan Virtual Private Network	00012T/403200/2025	259991302005664	13-Jan-25	825619	87.332.830	411124	(1.573.565)	85.759.265	-	Pembayaran Sewa Layanan Virtual Private Network sesuai BAST Nomor 000.4/8411/Pusdatin/2024 Tanggal 31-12-2024
15	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02081T/403200/2024	241330301000708	27-Des-24	522191	164.178.250	815619	(164.178.250)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8663/Pusdatin/2023 untuk Pemeliharaan Perangkat Operasional LAN/WAN dan Data Center	00013T/403200/2025	259991302005662	13-Jan-25	825619	164.178.250	411124	(2.958.167)	144.950.166	-	Pembayaran Pemeliharaan Perangkat Operasional LAN/WAN dan Data Center sesuai BAST Nomor 000.4/8405/Pusdatin/2024 Tanggal 31-12-2024
	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(16.269.917)			
17	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02074T/403200/2024	241330301000635	27-Des-24	522141	291.500.000	815619	(291.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8666/Pusdatin/2023 untuk Sewa Layanan Akses Internet Secondary	00023T/403200/2025	259991303002717	13-Jan-25	825619	291.500.000	411124	(5.252.252)	257.360.361	-	Pembayaran Sewa Layanan Akses Internet Secondary sesuai BAST Nomor 000.4/8426/Pusdatin/2024 Tanggal 31-12-2024
18	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(28.887.387)			
19	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		02073T/403200/2024	241330301000628	27-Des-24	522141	291.666.666	815619	(291.666.666)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/8665/Pusdatin/2023 untuk Sewa Layanan Akses Internet	00014T/403200/2025	259991302005663	13-Jan-25	825619	291.666.666	411124	(5.255.255)	286.411.411	-	Pembayaran Sewa Layanan Akses Internet sesuai BAST Nomor 000.4/8425/Pusdatin/2024 Tanggal 31-12-2024

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Pemertanian/ Kementerian/ Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D
21	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		020777/403200/2024	241330301000655	27-Dec-24	536111	1.591.946.460	815619	(1.591.946.460)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1537/Pusdatin/2024 untuk Pengembangan SIPD	000087/403200/2025	259991301002353	09-Jan-25	825619	1.591.946.460	411124	(28.683.720)	1.405.502.280	-	Pembayaran Pengembangan SIPD sesuai BAST Nomor 000.4/8352/Pusdatin/2024 Tanggal 27-12-2024
22	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(157.760.460)			
23	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		020767/403200/2024	241330301000650	27-Dec-24	536111	948.239.700	815619	(948.239.700)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/5356/Pusdatin/2024 untuk Pengintegrasian Aplikasi SIPD	000167/403200/2025	259991303001679	09-Jan-25	825619	948.239.700	411124	(17.085.400)	837.184.600	-	Pembayaran Pengintegrasian Aplikasi SIPD sesuai BAST Nomor 000.4/8391/Pusdatin/2024 Tanggal 30-12-2024
24	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(93.969.700)			
23	403200	SEKRETARIAT JENDERAL		020757/403200/2024	241330301000641	27-Dec-24	536111	1.324.962.600	815619	(1.324.962.600)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/6236/Pusdatin/2024 untuk Pengembangan Modul LPPD EPPD Microservices	000157/403200/2025	259991302003713	09-Jan-25	825619	1.324.962.600	411124	(23.873.200)	1.169.786.800	-	Pembayaran Pengembangan Modul LPPD EPPD Microservices sesuai BAST Nomor 000.4/8416/Pusdatin/2024 Tanggal 31-12-2024
24	403200	SEKRETARIAT JENDERAL																411211	(131.302.600)			
25	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	905.824.766	022657/448302/2024	240870301000072	27-Dec-24	522131	97.458.000	815619	(97.458.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1525.a/SPK/BEK/XI/2024 untuk Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola Layanan Umum pada Lembaga Penelitian di IPDN Kampus Jatinangor	000147/448302/2025	259991302001592	07-Jan-25	825619	97.458.000	411124	(1.756.000)	86.044.000	-	Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola Layanan Umum pada Lembaga Penelitian di IPDN Kampus Jatinangor sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/1738/BAST/BEK/XII/2024 Tanggal 28-12-2024
																		411211	(9.658.000)			
26	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		022497/448302/2024	240870301000071	24-Dec-24	523111	360.747.235	815619	(360.747.235)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.2.8.6/01/SP/II/2024 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) di IPDN Kampus Jatinangor Tahun Anggaran 2024	000087/448302/2025	259991302000610	03-Jan-25	825619	360.747.235	411124	(6.499.950)	318.497.559	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) di IPDN Kampus Jatinangor Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.2.8.6/1747.a/BAST/BEK/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
																		411211	(35.749.726)			
25	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		022487/448302/2024	240870301000070	24-Dec-24	523111	288.477.233	815619	(288.477.233)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.2.8.6/02/SP/II/2024 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Pertamanan di IPDN Kampus Jatinangor Tahun Anggaran 2024	000077/448302/2025	259991303000643	03-Jan-25	825619	288.477.233	411124	(5.197.787)	254.691.612	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Pertamanan di IPDN Kampus Jatinangor Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.2.8.6/1749/BAST/BEK/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
																		411211	(28.587.834)			
26	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		022447/448302/2024	240870301000068	23-Dec-24	523111	159.142.298	815619	(159.142.298)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2/IPDN.6.1 untuk Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan IPDN Kampus Jakarta	000137/448302/2025	259991303000614	03-Jan-25	825619	159.142.298	411124	(2.867.428)	140.504.012	-	Pembayaran Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan IPDN Kampus Jakarta sesuai BAST/BAPP Nomor 027/1090/BA-STHP/BEK/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
																		411211	(15.770.858)			
27	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	258.080.276	003027/483005/2024	241330301000592	27-Dec-24	522191	128.080.276	815619	(128.080.276)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 059/SP/PPK-DKPP/II/2024 untuk PENYEDIAAN LAYANAN CALL CENTER DKPP RI BULAN FEBRUARI S.D DESEMBER 2024	000097/483005/2025	259991302003668	09-Jan-25	825619	128.080.276	411124	(2.307.753)	113.079.883	-	Pembayaran PENYEDIAAN LAYANAN CALL CENTER DKPP RI BULAN FEBRUARI S.D DESEMBER 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor 222/BAST/PPK-DKPP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
28	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU									-							411211	(12.692.640)			
29	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU		003017/483005/2024	241330301000610	27-Dec-24	522191	130.000.000	815619	(130.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 004/SP/PPK-DKPP/II/2024 untuk JASA PENYEDIA ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER TERMASUK DOMAIN DAN COLLOCATION) KANTOR DKPP RI	000067/483005/2025	259991301002318	09-Jan-25	825619	130.000.000	411124	(2.342.342)	114.774.775	-	Pembayaran JASA PENYEDIA ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER TERMASUK DOMAIN DAN COLLOCATION) KANTOR DKPP RI sesuai BAST/BAPP Nomor 223/BAST/PPK-DKPP/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
30	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU									-							411211	(12.882.883)			

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penempatan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D
31	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	162.214.525	00533T/677010/2024	240490301000230	24-Dec-24	523111	74.356.317	815619	(74.356.317)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/03/IPDN.27/2024 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Pertamanan IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2024	000077/677010/2025	259991302002574	08-Jan-25	825619	74.356.317	411124	(1.913.934)	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Pertamanan IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/219/BAST/PPK-BPT/IPDN.23.1/2024 Tanggal 31-12-2024	
32	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA																411211	(10.526.634)			
33	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA		00531T/677010/2024	240490301000235	24-Dec-24	523111	40.949.390	815619	(40.949.390)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/04/IPDN.27/2024 untuk Pekerjaan Jasa Kebersihan/Cleaning Service IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2024	00008T/677010/2025	259991302002566	08-Jan-25	825619	40.949.388	411124	(1.054.037)	34.098.138	-	Pembayaran Pekerjaan Jasa Kebersihan/Cleaning Service IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/231/BAST-13-PPK-CS/IPDN.23.1/2024 Tanggal 31-12-2024
34	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA																411211	(5.797.211)			
													00009T/677010/2025	250490301000004	08-Jan-25	825619	2	425912	(2)		Penhilan RPATA atas Kontrak Nomor 027/04/IPDN.27/2024 untuk Pekerjaan Jasa Kebersihan/Cleaning Service IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2024	
35	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA		00532T/677010/2024	240490301000234	24-Dec-24	522113	46.908.818	815619	(46.908.818)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/02/IPDN.27/2024 untuk Belanja Langganan Air Bersih IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2024	00004T/677010/2025	259991302002565	08-Jan-25	825619	46.908.792	411124	(1.340.251)	45.568.541	-	Pembayaran Belanja Langganan Air Bersih IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4/219/BAST/PPK-BLAB/IPDN.23.1/2024 Tanggal 31-12-2024
36	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA																411211	(26)		Penhilan RPATA atas Kontrak Nomor 027/02/IPDN.27/2024 untuk Belanja Langganan Air Bersih IPDN Kampus Sulawesi Utara Tahun 2024	
37	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	267.117.303	00268T/677024/2024	240540301000172	20-Dec-24	523111	126.667.303	815619	(126.667.303)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 004.3/002/SPK/IPDN.26/2024 untuk PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE IPDN KAMPUS SULSEL	00003T/677024/2025	259991303000382	03-Jan-25	825619	126.667.303	411124	(2.282.284)	111.832.403	-	Pembayaran PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE IPDN KAMPUS SULSEL sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.3/2601/BAST/IPDN.24.1/2024 Tanggal 31-12-2024
38	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN																411211	(12.552.616)			
37	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN		00269T/677024/2024	240540301000187	20-Dec-24	523111	140.450.000	815619	(140.450.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.3/005/SPK/IPDN.26/2024 untuk PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN DAN PEKARANGAN IPDN KAMPUS SULSEL	00002T/677024/2025	259991302000714	03-Jan-25	825619	140.450.000	411124	(2.530.631)	124.000.901	-	PENATAAN GEDUNG DKPP RI LANTAI 3, LANTAI 4, DAN TOILET PIMPINAN Pembayaran PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN TAMAN, HALAMAN DAN PEKARANGAN IPDN KAMPUS SULSEL sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.3/2605/BAST/IPDN.24.1/2024 Tanggal 31-12-2024 BAST Nomor 551/BAST/PPK-DKPP/XII/2023 Tanggal 29-12-2023
38	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN																411211	(13.918.468)			
37	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	55.508.996	00384T/677045/2024	240110301000208	27-Dec-24	523111	55.508.996	815619	(55.508.996)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.3/242/SP-CS/Taman/PPK/IPDN.25.2 untuk Pengadaan Jasa Pemeliharaan kebersihan (Cleaning Service) dan Pemeliharaan Halaman Keras/Pertamanan Tahun 2024 dan BA-PP Nomor 000.4.3/150/BAPP/IPDN.22.1 tgl 20-12-2024	00004T/677045/2025	259991303002020	09-Jan-25	825619	55.508.996	411124	(1.000.162)	49.007.943	-	Pembayaran belanja barang berupa Pengadaan jasa kebersihan dan Pertamanan Termin XIII Tahun 2024 sesuai SP No:000.4.3/242/SP-CS/Taman/PPK/IPDN.25.2 tgl 28-12-2023 dan BA-ST No:000.4.3/151/BA-ST/IPDN.22.1 tgl 31-12-2024 NK.Rp.1.997.924.268,-
38	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT																411211	(5.500.891)			

9056

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Pemampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi			
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D					
39	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	162.937.471	003487/683084/2024	240380301000251	23-Dec-24	523111	162.937.471	815619	(162.937.471)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/02/SP/IPDN.29/2024 Tgl 2-1-2024 untuk Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Kebersihan Gedung dan Halaman IPDN Kampus NTB Tahun Anggaran 2024 dan BAPP No:000.2.8/85/BAPP/IPDN.25/24 Tgl 16-12-2024	000027/683084/2025	259991302000031	02-Jan-25	825619	162.937.471	411124	(3.258.749)	182.343.177	-	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Kebersihan Gedung dan Halaman IPDN Kampus NTB TA 2024 sesuai Kontrak No: 027/02/SP/IPDN.29/2024 Tgl 2-1-2024 BAST No: 000.2.8/85/BAST/IPDN.25/2024 Tanggal 31-12-2024			
																	411211	(16.146.957)							
40	27486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	29.400.000	018187/027486/2024	241330301000194	23-Dec-24	522131	7.700.000	815619	(7.700.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 602/909.5/SEKR/BAK/IX/2024 untuk Tenaga Ahli Manajer Kantor Administratif	000047/027486/2025	259991301002990	10-Jan-25	825619	7.700.000	411124	(192.500)	7.507.500	-	Pembayaran Tenaga Ahli Manajer Kantor Administratif sesuai BAST/BAPP Nomor 602/1211.114/SEKR/BAK/XII/2024 Tanggal 30-12-2024			
40	27486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		018167/027486/2024	241330301000204	23-Dec-24	522131	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 602/809.2/SEKR/BAK/VIII/2024 untuk Jasa Konsultan Tenaga Ahli Operator Data Basis Web	000067/027486/2025	259991302003675	09-Jan-25	825619	7.000.000	411124	(175.000)	6.825.000	-	Pembayaran Jasa Konsultan Tenaga Ahli Operator Data Basis Web sesuai BAST/BAPP Nomor: 602/1211.6/SEKR/BAK/XII/2024 Tanggal 30-12-2024			
40	27486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		018177/027486/2024	241330301000193	23-Dec-24	522131	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 602/809.3/SEKR/BAK/VIII/2024 untuk Jasa Konsultan Tenaga Ahli Maintenance Website Ditjen Bina Adwil	000057/027486/2025	259991302003679	09-Jan-25	825619	7.000.000	411124	(175.000)	6.825.000	-	Pembayaran Jasa Konsultan Tenaga Ahli Maintenance Website Ditjen Bina Adwil sesuai BAST/BAPP Nomor 602/1211.6/SEKR/BAK/XII/2024 Tanggal 30-12-2024			
40	27486	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		018157/027486/2024	241330301000198	23-Dec-24	522131	7.700.000	815619	(7.700.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 602/509.2/SEKR/BAK/VI/2024 untuk Jasa konsultan Tenaga Agli Hubungan Antar Lembaga	000077/027486/2025	259991302003679	09-Jan-25	825619	7.700.000	411124	(192.500)	7.507.500	-	Pembayaran Jasa konsultan Tenaga Agli Hubungan Antar Lembaga sesuai BAST/BAPP Nomor: 602/1211.115/SEKR/BAK/XII/2024 Tanggal 31-12-2024			
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	50.322.295.474	021417/027753/2024	241330301000813	31-Dec-24	522191	3.796.222.453	815619	(3.796.222.453)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0706/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region III (PPA, RMC-III) (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo)	000107/027753/2025	259991301003467	16-Jan-25	825619	1.679.068.433			1.679.068.433	-	Pembayaran Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region III (PPA, RMC-III) (Sultra, Sulut, Sulawesi Tengah, Gorontalo) sesuai BAST/BAPP Nomor 3449/BAPP/SEKPIUP3PD/XII/2024 Tanggal 31-12-2024			
41	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA																							Penhilan RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0706/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region III (PPA, RMC-III) (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo)
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		021057/027753/2024	241330301000758	30-Dec-24	536111	2.926.503.975	815619	(2.926.503.975)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 3966/SPK/DIT.V/XII/2023 untuk Development of Learning Management System Platform	000277/027753/2025	259991303002814	15-Jan-25	825619	2.926.503.975				2.926.503.975	-	Pembayaran Development of Learning Management System Platform sesuai BAST/BAPP Nomor 3676/BASTHP/DIT.V/XII/2024 Tanggal 31-12-2024		
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		021047/027753/2024	241330301000759	30-Dec-24	522131	4.398.343.500	815619	(4.398.343.500)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 4026/SPK/DIT.V/XII/2023 untuk Content Development for Learning Management System	000287/027753/2025	259991301003456	15-Jan-25	825619	4.398.343.500	411124			4.398.343.500	-	Pembayaran Content Development for Learning Management System sesuai BAST/BAPP Nomor 3683/BASTHP/DIT.V/XII/2024 Tanggal 31-12-2024		

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi			
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D	
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		02143T/027753/2024	241330301000720	31-Des-24	522191	5.803.396.281	815619	(5.803.396.281)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0641/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region V (PPA, RMC-V) (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalsel, Kalimantan Selatan, Kaltim, Kaltara)	00012T/027753/2025	259991302006028	16-Jan-25	825619	2.055.170.206				2.055.170.206	-	Pembayaran Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region V (PPA, RMC-V) (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalsel, Kaltim, Kaltara) sesuai BAST/BAPP Nomor 3451/BAPP/SEKCIUP3PD/XII/2024
41	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA										00021T/027753/2025	251330301000058	16-Jan-25	825619	3.748.226.075	425912	(3.748.226.075)					Penhilan RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0641/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region V (PPA, RMC-V) (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kaltim, Kaltara)
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		02140T/027753/2024	241330301000719	31-Des-24	522191	5.474.782.814	815619	(5.474.782.814)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0705/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region II (PPA, RMC-II) (NTB, NTT, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat)	00009T/027753/2025	259991302006029	16-Jan-25	825619	1.746.370.575				1.746.370.575	-	Biaya Bandwidth Internet Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 006/PRC/PPK-SET/II/2023 Tanggal 2 Januari 2023, sesuai BAST Pembayaran Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region II (PPA, RMC-II) (NTB, NTT, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) sesuai BAST/BAPP Nomor 3448/BAPP/SEKCIUP3PD/XII/2024 Tanggal 31 6407/PrC/PPK-SET/XII/2023 Tanggal
41	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA										00018T/027753/2025	251330301000059	16-Jan-25	825619	3.728.412.239	425912	(3.728.412.239)					Penhilan RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0705/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region II (PPA, RMC-II) (NTB, NTT, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat)
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		02139T/027753/2024	241330301000688	27-Des-24	522191	4.418.608.093	815619	(4.418.608.093)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0704/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region I (PPA, RMC-I) (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara)	00008T/027753/2025	259991301003473	16-Jan-25	825619	1.905.327.573				1.905.327.573	-	Pembayaran Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region I (PPA, RMC-I) (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara) sesuai BAST/BAPP Nomor 3447/BAPP/SEKCIUP3PD/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
41	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA										00017T/027753/2025	251330301000062	16-Jan-25	825619	2.513.280.520	425912	(2.513.280.520)					Penhilan RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0704/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region I (PPA, RMC-I) (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara)
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		02142T/027753/2024	241330301000707	27-Des-24	522191	3.526.277.831	815619	(3.526.277.831)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0641.1/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region IV (PPA, RMC-IV) (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur)	00011T/027753/2025	259991303002825	16-Jan-25	825619	1.693.158.216				1.693.158.216	-	Pembayaran Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region IV (PPA, RMC-IV) (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur) sesuai BAST/BAPP Nomor 3450/BAPP/SEKCIUP3PD/XII/2024 Tanggal 31-1

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Pemungutan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan		
41	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA										000207/027753/2025	251330301000063	16-Jan-25	825619	1.833.119.615	425912	(1.833.119.615)		Penhilan RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0641.1/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region IV (PPA, RMC-IV) (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur)
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		021387/027753/2024	241330301000714	27-Dec-24	522131	4.976.091.000	815619	(4.976.091.000)	-	000077/027753/2025	259991301003472	16-Jan-25	825619	3.764.748.029		3.764.748.029	-	Pembayaran National Management Consultant (NMC) Institutional Strengthening For Improved Village Service Delivery Project - P3PD sesuai BAST/BAPP Nomor 3454/BAPP/SEKCIUP3PD/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
41	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA										000167/027753/2025	251330301000061	16-Jan-25	825619	1.211.342.971	425912	(1.211.342.971)		Penhilan RPATA atas Kontrak Nomor 814.1/699/SEK3PD/2022 untuk National Management Consultant (NMC) Institutional Strengthening For Improved Village Service Delivery Project - P3PD
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		021217/027753/2024	241330301000695	27-Dec-24	522191	435.000.000	815619	(435.000.000)	-	000047/027753/2025	259991301003425	15-Jan-25	825619	435.000.000		435.000.000	-	Pembayaran Dukungan Publikasi dalam bentuk Blocking Time Konten Talkshow di Televisi Nasional Program Penguatan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa (P3PD)
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		021487/027753/2024	241330301000696	27-Dec-24	536121	3.867.250.000	815619	(3.867.250.000)	-	000157/027753/2025	259991302005946	15-Jan-25	825619	3.867.250.000		3.867.250.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengembangan Infrastruktur LMS PKAD dalam Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.3.340/PPK-P3PD/XII/2024 Tanggal 31-12-2024
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		021457/027753/2024	241330301000706	27-Dec-24	522191	4.133.932.631	815619	(4.133.932.631)	-	000147/027753/2025	259991303002828	16-Jan-25	825619	1.774.262.244		1.774.262.244	-	RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0642.1/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region VII (PPA, RMC-VII) (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi)
41	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA										000237/027753/2025	251330301000060	16-Jan-25	825619	2.359.670.387	425912	(2.359.670.387)		Penhilan RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0642.1/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region VIII (PPA, RMC-VIII) (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi)
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		021447/027753/2024	241330301000698	27-Dec-24	522191	4.828.686.896	815619	(4.828.686.896)	-	000137/027753/2025	259991302005883	14-Jan-25	825619	1.507.265.207		1.507.265.207	-	RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0642/1/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region VII (PPA, RMC-VI) (Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung)

900.6

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D
41	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA									000227/027753/2025	251330301000050	14-Jan-25	825619	3.321.421.689	425912	(3.321.421.689)		Penhilan RPATA atas Kontrak Nomor 900.1.4.4/0642/BPD untuk Belanja Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi Regional Management Consultant Region VI (PPA, RMC-VI) (Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung)			
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		021631/027753/2024	241330301000683	30-Des-24	522131	737.200.000	815619	(737.200.000)	-	000257/027753/2025	259991301003475	16-Jan-25	825619	703.600.000		703.600.000	Pembayaran Pengelolaan Pengembangan Platform dan Konten LMS PKAD Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa sesuai BAST/BAPP Nomor 3690/BASTHP/DIT.VI/XII/2024 Tanggal 3 1-12-2024			
41	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA									000267/027753/2025	251330301000056	16-Jan-25	825619	33.600.000	425912	(33.600.000)		Penhilan RPATA atas Kontrak Nomor 1247/SPK/DIT.VI/VI/2024 untuk Pengelolaan Pengembangan Platform dan Konten LMS PKAD Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa			
40	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		021007/027753/2024	241330301000326	24-Des-24	522191	600.000.000	815619	(600.000.000)	-	000057/027753/2025	259991302005947	15-Jan-25	825619	600.000.000		600.000.000	Pembayaran Pengadaan Video Bentuk Video Dokumenter dan Pelaksanaan Produksi dalam rangka Dukungan Manajemen P3PD Ditjen Bina Pemesdes			
42	27753	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA		020997/027753/2024	241330301000325	24-Des-24	522191	400.000.000	815619	(400.000.000)	-	000067/027753/2025	259991303002906	30-Jan-25	825619	400.000.000			Pembayaran Paket Pekerjaan Penerbitan Media Publikasi Jurnal/Majalah Internal Cetak dan Pendistribusian/pengiriman Komponen 1 P3PD, Dukungan Manajemen P3PD Ditjen Bina Pemesdes			
43	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	4.135.673.016	025887/039729/2024	241330301000804	31-Des-24	522131	2.243.945.333	815619	(2.243.945.333)	-	000127/039729/2025	259991302003678	09-Jan-25	825619	2.243.945.333	411124	(40.431.447)	1.981.140.925	Pembayaran JASA KONSULTAN PENGUATAN DAN PENERAPAN MODUL INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SIPD		
44	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH														411211	(222.372.961)					
45	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025627/039729/2024	241330301000756	30-Des-24	522191	13.200.000	815619	(13.200.000)	-	000117/039729/2025	259991302003676	09-Jan-25	825619	13.200.000	411124	(528.000)	12.672.000	Pembayaran Jasa Lainnya Tenaga Teknis Kelembagaan sesuai BAST/BAPP Nomor 4065/SD.II/DIT.SUPD.II/2024 Tanggal 31-12-2024		
47	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025617/039729/2024	241330301000757	30-Des-24	522191	12.375.000	815619	(12.375.000)	-	000107/039729/2025	259991302003677	09-Jan-25	825619	12.375.000	411121	(371.250)	12.003.750	Pembayaran Jasa Lainnya Tenaga Teknis Kebijakan Publik sesuai BAST/BAPP Nomor 4066/SD.II/DIT.SUPD.II/2024 Tanggal 31-12-2024		

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Pemampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D				
45	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025777/039729/2024	241330301000533	27-Des-24	522131	1.506.854.944	815619	(1.506.854.944)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 400.5/3927/SD.I/SUPD.III untuk Technical Assistance Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction (LGCB-ASR) Investing in Nutrition and Early Years Phase-II	000137/039729/2025	259991301002423	09-Jan-25	825619	1.506.854.944					1.506.854.944	-	Pembayaran Technical Assistance Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction (LGCB-ASR) investing in Nutrition and Early Years Phase-II sesuai BAPP Nomor 400.5/6953/SD.I/SU PD.III Tanggal 31-12-2024
47	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025637/039729/2024	241330301000366	24-Des-24	522191	9.000.000	815619	(9.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 01/SD I/DIT.SUPD.II/2021 untuk Tenaga Teknis Perencanaan Prgram	000077/039729/2025	259991302003698	09-Jan-25	825619	9.000.000					9.000.000	-	Pembayaran Tenaga Teknis Perencanaan Prgram sesuai BAST/BAPP Nomor 4068/SD.I/DIT.SUPD.II/2024 Tanggal 31-12-2024
47	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025647/039729/2024	241330301000365	24-Des-24	522191	9.000.000	815619	(9.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 02/SD I/DIT.SUPD.II/2021 untuk Tenaga Teknis Perencanaan Anggaran	000087/039729/2025	259991302003697	09-Jan-25	825619	9.000.000					9.000.000	-	Pembayaran Tenaga Teknis Perencanaan Anggaran sesuai BAST/BAPP Nomor 4069/SD.I/DIT.SUPD.II/2024 Tanggal 31-12-2024
45	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025657/039729/2024	241330301000367	24-Des-24	522191	7.000.000	815619	(7.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 04/SD I/DIT.SUPD.II/2021 untuk Tenaga Pendukung Teknis Perencanaan Program	000097/039729/2025	259991302003699	09-Jan-25	825619	7.000.000					7.000.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Teknis Perencanaan Program sesuai BAST/BAPP Nomor 4070/SD.I/DIT.SUPD.II/2024 Tanggal 31-12-2024
47	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025697/039729/2024	241330301000173	23-Des-24	522131	161.519.766	815619	(161.519.766)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 401/PRC/PPK-SET/I/2024 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024	000037/039729/2025	259991301002390	09-Jan-25	825619	161.519.766	411124	(2.910.266)			142.603.037	-	Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Bantuan Teknis Sekretariat Bersama SPM Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor 6908/PRC/PPK-SET/II/Bangda/2024 Tanggal 31-12-2024
48	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH																411211	(16.006.463)				-	
47	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		025727/039729/2024	241330301000137	23-Des-24	522131	172.777.973	815619	(172.777.973)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 398/PRC/PPK-SET/I/2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Bantuan Teknis Bersama Pengendalian DAK Tahun Anggaran 2024	000047/039729/2025	259991301002336	09-Jan-25	825619	172.777.973	411124	(3.113.117)			152.542.714	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Bantuan Teknis Bersama Pengendalian DAK Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor 6905/PRC/PPK-SET/II/Bangda/2024 Tanggal 31-12-2024
48	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH																411211	(17.122.142)				-	
49	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	229.372.442.230	033677/634082/2024	241330301000769	31-Des-24	532111	7.497.500.000	815619	(7.497.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/27556/PIAK.2024 untuk Pekerjaan Pengadaan Cadangan Server Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran Berbasis Elektronik (E-Office) dan SIDARA Tahun 2024	001377/634082/2025	259991302005042	10-Jan-25	825619	7.497.500.000	411122	(101.317.568)			6.653.186.937	-	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Cadangan Server Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran Berbasis Elektronik (E-Office) dan SIDARA Tahun 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30892/PIAK Tanggal 31-12-2024
																		411211	(742.995.495)				-	
50	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033697/634082/2024	241330301000773	31-Des-24	536111	12.500.000.000	815619	(12.500.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/27552/PIAK.2024 untuk Pekerjaan Pengadaan Backup Sistem FR DRC Batam Tahun 2024	001387/634082/2025	259991302005062	10-Jan-25	825619	12.500.000.000	411122	(168.918.919)			11.092.342.342	-	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Backup Sistem FR DRC Batam Tahun 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30900/PIAK Tanggal 31-12-2024
																		411211	(1.238.738.739)				-	
51	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033717/634082/2024	241330301000764	27-Des-24	532111	59.998.000.000	815619	(59.998.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/26114/PIAK.2024 untuk Pengadaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Jaringan	001437/634082/2025	259991302005097	10-Jan-25	825619	59.998.000.000	411122	(810.783.784)			59.187.216.216	-	Pembayaran Pengadaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Jaringan sesuai BAST Nomor 000.4/31032/PIAK Tanggal 31-12-2024
52	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		026317/634082/2023	231330301000330	27-Des-24	522131	15.900.000	815619	(15.900.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/12290/PIAK.2022 untuk Tenaga Ahli Administrator Database Junior	000187/634082/2024	249991303003710	10-Jan-24	825619	15.900.000	411121	(1.287.500)			14.612.500	-	Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15819/PIAK Tanggal 31-12-2023

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi			
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D	
53	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03381T/634082/2024	241330301000755	30-Des-24	532111	11.984.000.000	815619	(11.984.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/6335/DKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras Pemanfaatan IKD (Layanan Publik)	00038T/634082/2025	259991303002427	10-Jan-25	825619	11.984.000.000	411122	(161.945.946)	10.634.450.450	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras Pemanfaatan IKD (Layanan Komersil) sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/6694/DKN Tanggal 31-12-2024	
54	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(1.187.603.604)				
55	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03330T/634082/2024	241330301000725	31-Des-24	532111	7.803.697.000	815619	(7.803.697.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/18176/PMU.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras Untuk Aplikasi Preperso	00016T/634082/2024	249991302002020	11-Jan-24	825619	19.650.000	411121	(1.718.750)	17.931.250	7.784.047.000	-	Tenaga Ahli Data Analis Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15837/PIAK Tanggal 31-12-2023
56	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03382T/634082/2024	241330301000684	30-Des-24	532111	11.984.000.000	815619	(11.984.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/6333/DKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras Pemanfaatan IKD (Layanan Komersil)	00028T/634082/2024	249991304001580	10-Jan-24	825619	7.550.000	411121	(377.500)	7.172.500	11.976.450.000	-	Tenaga Ahli Infrastruktur Junior Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15837/PIAK Tanggal 31-12-2023
57	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03336T/634082/2024	241330301000682	30-Des-24	532111	3.183.840.000	815619	(3.183.840.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/18178/PMU.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras Untuk Aplikasi Situs IDKN	00027T/634082/2024	249991305000460	10-Jan-24	825619	5.500.000	411121	(275.000)	5.225.000	3.178.340.000	-	Operator KTP-EI Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15858/PIAK Tanggal 31-12-2023
58	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03478T/634082/2024	241330301000658	27-Des-24	522191	960.000.000	815619	(960.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/29909/PIAK.2024 untuk Media Lainnya	00029T/634082/2024	249991303003700	10-Jan-24	825619	6.199.000	411121	(309.950)	5.889.050	953.801.000	-	Tenaga Ahli Aplikasi Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15843/PIAK Tanggal 31-12-2023
59	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03348T/634082/2024	241330301000580	31-Des-24	522191	6.868.697.001	815619	(6.868.697.001)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/3156/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2024	00113T/634082/2025	259991302005132	10-Jan-25	825619	6.868.697.001	411124	(123.760.306)	6.064.255.010	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRAC Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/30826/PIAK Tanggal 31-12-2024	
																		411211	(680.681.685)				
60	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03346T/634082/2024	241330301000541	24-Des-24	522131	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1670/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Programmer Senior Tahun Anggaran 2024	00051T/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.370.881.917	411124	(27.417.638)	1.343.464.279	(1.363.381.917)	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRAC Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15869/PIAK Tanggal 31-12-2023
61	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03354T/634082/2024	241330301000540	24-Des-24	522191	486.879.300	815619	(486.879.300)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/6004/PIAK.2024 untuk Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	00120T/634082/2025	259991302005048	10-Jan-25	825619	486.879.300	411124	(8.772.600)	429.857.400	-	Pembayaran Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/30997/PIAK Tanggal 31-12-2024	
																		411211	(48.249.300)				
62	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03351T/634082/2024	241330301000535	24-Des-24	522131	5.950.000	815619	(5.950.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/4401/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2024	00118T/634082/2025	259991305000339	10-Jan-25	825619	5.950.000	411121	(148.750)	5.801.250	-	Pembayaran Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30875/PIAK Tanggal 31-12-2024	
63	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03352T/634082/2024	241330301000534	24-Des-24	522131	5.950.000	815619	(5.950.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/4403/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2024	00042T/634082/2024	249991302001840	10-JAN-24	825619	291.282.315	411124	(5.248.330)	257.168.170	(285.332.315)	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Dashboard Profil Data Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15897/PIAK Tanggal 31-12-2023
64	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(28.865.815)				
65	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03350T/634082/2024	241330301000538	24-Des-24	522131	19.000.000	815619	(19.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/4302/PIAK untuk Tenaga Ahli Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2024	00116T/634082/2025	259991302005043	10-Jan-25	825619	19.000.000	411121	(879.545)	18.120.455	-	Pembayaran Tenaga Ahli Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30922/PIAK Tanggal 31-12-2024	

9/2/24

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D
67	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033557/634082/2024	241330301000536	24-Des-24	522191	1.068.000.000	815619	(1.068.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/6504/PIAK.2024 untuk Annual Technical Support Perangkat Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	001217/634082/2025	259991302005054	10-Jan-25	825619	1.068.000.000	411124	(19.243.243)	942.918.919	-	Pembayaran Annual Technical Support Perangkat Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/31002/PIAK Tanggal 31-12-2024
68	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(105.837.838)				
69	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033537/634082/2024	231330301000340	24-Des-24	522191	430.458.000	815619	(430.458.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/5804/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Perangkat Jaringan dan Perangkat Keamanan Jaringan DC MMU dan DRC Batam Tahun 2024	001197/634082/2025	259991302005014	10-Jan-25	825619	430.458.000	411124	(7.756.000)	380.044.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Perangkat Jaringan dan Perangkat Keamanan Jaringan DC MMU dan DRC Batam Tahun 2024
																	411211	(42.658.000)				
70	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033477/634082/2024	241330301000548	24-Des-24	522131	282.284.100	815619	(282.284.100)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2181/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Layanan Keahlian Operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	001127/634082/2025	259991302005134	10-Jan-25	825619	282.284.100	411124	(5.086.200)	249.223.800	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Layanan Keahlian Operasional Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/30821/PIAK Tanggal 31-12-2024
																	411211	(27.974.100)				
71	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033497/634082/2024	241330301000539	24-Des-24	522131	8.000.000	815619	(8.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/3606/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Pengelolaan Data Center Tahun Anggaran 2024	000537/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	10.133.190.000	411124	(182.580.000)	9.950.610.000	(10.125.190.000)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15910/PIAK Tanggal 31-12-2023
72	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(1.004.190.000)	(1.004.190.000)			
73	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033437/634082/2024	241330301000512	24-Des-24	522191	6.999.500	815619	(6.999.500)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1656/PIAK.2024 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2024	000447/634082/2024	249991303003700	10-JAN-24	825619	528.554.250	411124	(9.523.500)	466.651.500	(521.554.750)	Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15948/PIAK Tanggal 31-12-2023
74	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(52.379.250)				
75	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033287/634082/2024	241330301000504	24-Des-24	522131	6.000.000	815619	(6.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/237/PIAK.2024 untuk Operator KTP-el Tahun Anggaran 2024	000357/634082/2024	249991302001980	11-JAN-24	825619	17.000.000	411121	(1.425.000)	15.575.000	(11.000.000)	Tenaga Ahli Administrator Database Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15807/PIAK Tanggal 31-12-2023
76	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033457/634082/2024	241330301000511	24-Des-24	522131	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1673/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Programmer Senior Tahun Anggaran 2024	000207/634082/2024	249991302001860	10-Jan-24	825619	6.495.834	411121	(324.792)	6.171.042	1.004.166	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Programmer sesuai BAST Nomor 000.4/15822/PIAK Tanggal 31-12-2023
77	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033447/634082/2024	241330301000510	24-Des-24	522131	8.000.000	815619	(8.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1676/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Programmer Senior Tahun Anggaran 2024	001087/634082/2025	259991302005087	10-Jan-25	825619	8.000.000	411121	(200.000)	7.800.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Programmer Senior Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30848/PIAK Tanggal 31-12-2024
78	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033317/634082/2024	241330301000507	24-Des-24	522131	5.975.000	815619	(5.975.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/233/PIAK.2024 untuk Operator KTP-el Tahun Anggaran 2024	000407/634082/2024	249991303003710	10-Jan-24	825619	6.975.000	411121	(348.750)	6.626.250	(1.000.000)	Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15885/PIAK Tanggal 31-12-2023
79	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033667/634082/2024	241330301000498	24-Des-24	522191	2.155.925.250	815619	(2.155.925.250)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/16009/PIAK.2024 untuk Operasionalisasi dan Pemeliharaan SIAK Terpusat	001267/634082/2025	259991302005083	10-Jan-25	825619	2.155.925.250	411124	(38.845.500)	1.903.429.500	-	Pembayaran Operasionalisasi dan Pemeliharaan SIAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/31027/PIAK Tanggal 31-12-2024
80	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(213.650.250)				

9/2/24

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Pemertanian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D
81	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033267/634082/2024	241330301000508	24-Dec-24	522131	6.000.000	815619	(6.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/241/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Administrasi Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2024	000497/634082/2024	249991303003700	10-Jan-24	825619	1.663.750.000	411124	(29.977.477)	1.468.896.397	(1.657.750.000)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15875/PIAK Tanggal 31-12-2023
82	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(164.876.126)			
51	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034007/634082/2024	241330301000500	24-Dec-24	536111	675.222.324	815619	(675.222.324)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/040/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Konektivitas Data Warehouse Kependudukan	000257/634082/2024	249991304001590	10-Jan-24	825619	7.600.000	411121	(380.000)	7.220.000	667.622.324	Tenaga Ahli Programmer Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15855/PIAK Tanggal 31-12-2023
52	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033297/634082/2024	241330301000509	24-Dec-24	522131	6.000.000	815619	(6.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/235/PIAK.2024 untuk Operator KIP-al Tahun Anggaran 2024	000187/634082/2024	249991303003710	10-Jan-24	825619	15.900.000	411121	(1.287.500)	14.612.500	(9.900.000)	Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15819/PIAK Tanggal 31-12-2023
53	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033077/634082/2024	241330301000516	24-Dec-24	522191	106.320.000	815619	(106.320.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/24966/PIAK.2023 757/SP/A2/12/2023 untuk Layanan Managed Service DRC Batam Kerjasama dengan BP Batam	000467/634082/2024	249991304001600	10-Jan-24	825619	1.037.995.965	411124	(18.702.630)	916.428.870	(931.675.965)	Annual Technical Server Perangkat Server Unit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15944/PIAK Tanggal 31-12-2023
54	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(102.864.465)			
55	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033427/634082/2024	241330301000517	24-Dec-24	522191	6.999.500	815619	(6.999.500)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1665/PIAK.2024 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2024	000167/634082/2024	249991302002020	11-Jan-24	825619	19.650.000	411121	(1.718.750)	17.931.250	(12.650.500)	Tenaga Ahli Data Analis Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15810/PIAK Tanggal 31-12-2023
56	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033647/634082/2024	241330301000496	31-Dec-24	522191	5.654.500.000	815619	(5.654.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/28928/PIAK.2024 untuk Annual Technical Support Perangkat Jaringan Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	001407/634082/2025	259991302005047	10-Jan-25	825619	5.654.500.000	411124	(101.882.883)	4.992.261.261	-	Pembayaran Annual Technical Support Perangkat Jaringan Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/31012/PIAK Tanggal 31-12-2024
57	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033727/634082/2024	241330301000495	31-Dec-24	522191	6.856.790.700	815619	(6.856.790.700)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/22484/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Periode 1 Oktober 2024 s.d 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024	001297/634082/2025	259991302005093	10-Jan-25	825619	6.856.790.700	411124	(123.545.778)	6.733.244.922	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Periode 1 Oktober 2024 s.d 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30982/PIAK Tanggal 31-12-2024
58	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034787/634082/2024	241330301000658	27-Dec-24	522191	960.000.000	815619	(960.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/29909/PIAK.2024 untuk Media Lainnya	000297/634082/2024	249991303003700	10-Jan-24	825619	6.199.000	411121	(309.950)	5.889.050	953.801.000	Tenaga Ahli Aplikasi Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15843/PIAK Tanggal 31-12-2023
59	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033687/634082/2024	241330301000494	31-Dec-24	522191	14.007.071.063	815619	(14.007.071.063)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/22492/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Periode 1 Oktober 2024 s.d 31 Desember 2024 Tahun Anggaran n 2024	001277/634082/2025	259991302005138	10-Jan-25	825619	14.007.071.063	411124	(252.379.659)	13.754.691.404	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Periode 1 Oktober 2024 s.d 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30972/PIAK Tanggal 31-12-2024
60	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033937/634082/2024	241330301000472	24-Dec-24	522191	210.456.000	815619	(210.456.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/204/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Key Management System (KMS)	000517/634082/2024	249991304001580	10-Jan-24	825619	1.370.881.917	411124	(27.417.638)	1.343.464.279	(1.160.425.917)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15869/PIAK Tanggal 31-12-2023

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
61	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033967/634082/2024	241330301000466	24-Dec-24	522191	174.603.000	815619	(174.603.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/286/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengelolaan Konektivitas SAM Online	000227/634082/2025	259991303002886	22-Jan-25	825619	174.603.000	411124	(3.146.000)	154.154.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengelolaan Konektivitas SAM Online, sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/6632/IDKN Tanggal 31-12-2024
																		411211	(17.303.000)			
62	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033231/634082/2024	241330301000451	24-Dec-24	522131	8.000.000	815619	(8.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/231/PIAK untuk Tenaga Ahli Adjudikasi Senior Tahun Anggaran 2024	000487/634082/2024	249991306000220	10-JAN-24	825619	15.700.000	411121	(632.045)	15.067.955	(7.700.000)	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15831/PIAK Tanggal 31-12-2023
63	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033411/634082/2024	241330301000458	24-Dec-24	522191	6.999.500	815619	(6.999.500)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1662/PIAK.2024 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2024	000427/634082/2024	249991302001840	10-JAN-24	825619	291.282.315	411124	(5.248.330)	257.168.170	(284.282.815)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Dashboard Profil Data Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15897/PIAK Tanggal 31-12-2023
64	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(28.865.815)			
65	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033977/634082/2024	241330301000460	24-Dec-24	522191	16.400.000	815619	(16.400.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/001/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Pengelolaan Dan Penerbitan Kartu SAM	000337/634082/2024	249991303003970	11-Jan-24	825619	938.984.160	411124	(16.918.634)	829.013.042	(922.584.160)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/15960/PIAK Tanggal 31-12-2023
66	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(93.052.484)			
67	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033111/634082/2024	241330301000446	24-Dec-24	522131	16.900.000	815619	(16.900.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/202/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Senior	000477/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.234.364.400	411124	(22.240.800)	1.089.799.200	(1.217.464.400)	Annual Technical Support Perangkat Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15940/PIAK Tanggal 31-12-2023
68	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(122.324.400)			
69	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033207/634082/2024	241330301000477	24-Dec-24	522131	8.000.000	815619	(8.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/219/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Jaringan Teknologi Informasi Senior Tahun Anggaran 2024	000597/634082/2024	249991303003710	10-JAN-24	825619	19.955.000	411121	(1.756.875)	18.198.125	(11.955.000)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15965/PIAK Tanggal 31-12-2023
70	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033087/634082/2024	241330301000433	24-Dec-24	522131	19.950.000	815619	(19.950.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/15452/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Professional IT Senior	000887/634082/2025	259991303002420	10-Jan-25	825619	19.950.000	411121	(996.250)	18.953.750	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Professional IT Senior sesuai BAST Nomor 000.4/31041/PIAK Tanggal 31-12-2024
71	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033777/634082/2024	241330301000479	24-Dec-24	522191	3.769.116.000	815619	(3.769.116.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/25208/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2024	001347/634082/2025	259991302005095	10-Jan-25	825619	3.769.116.000	411124	(67.912.000)	3.701.204.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30992/PIAK Tanggal 31-12-2024
73	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033657/634082/2024	241330301000439	24-Dec-24	522191	1.705.489.862	815619	(1.705.489.862)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/15801/PIAK.2024 untuk Annual Technical Support Perangkat Server Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan	000447/634082/2024	249991303003700	10-JAN-24	825619	528.554.250	411124	(9.523.500)	466.651.500	1.176.935.612	Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15948/PIAK Tanggal 31-12-2023
74	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(52.379.250)			
75	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033597/634082/2024	241330301000484	24-Dec-24	522191	4.553.007.166	815619	(4.553.007.166)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/7602/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Operasionalisasi Call Center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	000357/634082/2024	249991302001980	11-JAN-24	825619	17.000.000	411121	(1.425.000)	15.575.000	4.536.007.166	Tenaga Ahli Administrator Database Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15807/PIAK Tanggal 31-12-2023

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
76	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033147/634082/2024	241330301000483	24-Des-24	522131	21.450.000	815619	(21.450.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/208/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Data Analis	000207/634082/2024	249991302001860	10-Jan-24	825619	6.495.834	411121	(324.792)	6.171.042	14.954.166	Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Programmer sesuai BAST Nomor 000.4/15822/PIAK Tanggal 31-12-2023
52	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033097/634082/2024	241330301000467	24-Des-24	522131	19.955.000	815619	(19.955.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/15462/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Jaringan Senior	000897/634082/2025	259991302005012	10-Jan-25	825619	19.955.000	411121	(996.625)	18.958.375	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Jaringan Senior sesuai BAST Nomor 000.4/31044/PIAK Tanggal 31-12-2024
53	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033177/634082/2024	241330301000453	24-Des-24	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/214/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Operator Komputer	000467/634082/2024	249991304001600	10-JAN-24	825619	1.037.995.965	411124	(18.702.630)	916.428.870	(1.032.495.965)	Annual Technical Server Perangkat Server Unit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15944/PIAK Tanggal 31-12-2023
54	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(102.864.465)				
55	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033217/634082/2024	241330301000436	24-Des-24	522131	8.000.000	815619	(8.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/221/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Aplikasi Senior Tahun Anggaran 2024	000937/634082/2025	259991302005102	10-Jan-25	825619	8.000.000	411121	(200.000)	7.800.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Aplikasi Senior Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30839/PIAK Tanggal 31-12-2024
56	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033767/634082/2024	241330301000442	31-Des-24	522191	799.500.000	815619	(799.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/25212/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2024	001367/634082/2025	259991302005131	10-Jan-25	825619	799.500.000	411124	(14.405.405)	705.864.865	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30967/PIAK Tanggal 31-12-2024
																	411211	(79.229.730)				
57	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033357/634082/2024	241330301000454	24-Des-24	522131	1.879.507.500	815619	(1.879.507.500)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1201/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIAK Terpusat	001307/634082/2025	259991302005128	10-Jan-25	825619	1.879.507.500	411124	(33.865.000)	1.659.385.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/30895/PIAK Tanggal 31-12-2024
																	411211	(186.257.500)				
58	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033397/634082/2024	241330301000475	24-Des-24	522131	8.300.000	815619	(8.300.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1552/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Infrastruktur Senior Tahun Anggaran 2024	001037/634082/2025	259991303002429	10-Jan-25	825619	8.300.000	411121	(207.500)	8.092.500	-	Pembayaran Tenaga Ahli Infrastruktur Senior Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30833/PIAK Tanggal 31-12-2024
59	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033227/634082/2024	241330301000447	24-Des-24	522131	8.000.000	815619	(8.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/225/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Aplikasi Senior Tahun Anggaran 2024	000947/634082/2025	259991304000646	10-Jan-25	825619	8.000.000	411121	(200.000)	7.800.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Aplikasi Senior Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30842/PIAK Tanggal 31-12-2024
60	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033707/634082/2024	241330301000441	24-Des-24	522191	1.931.300.000	815619	(1.931.300.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/22855/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Periode 1 November s.d 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024	001287/634082/2025	259991302005130	10-Jan-25	825619	1.931.300.000	411124	(34.798.198)	1.705.111.712	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Periode 1 November s.d 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30962/PIAK Tanggal 31-12-2024
																	411211	(191.390.090)				
61	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033917/634082/2024	241330301000464	24-Des-24	522131	7.800.000	815619	(7.800.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/231/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staff	000577/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	14.500.000	411121	(1.056.250)	13.443.750	(6.700.000)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15968/PIAK Tanggal 31-12-2023

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penempatan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
62	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03323T/634082/2024	241330301000451	24-Dec-24	522131	8.000.000	815619	(8.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/231/PIAK untuk Tenaga Ahli Adjudikasi Senior Tahun Anggaran 2024	00095T/634082/2025	259991303002424	10-Jan-25	825619	8.000.000	411211	(200.000)	7.800.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Adjudikasi Senior Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30854/PIAK Tanggal 31-12-2024
63	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03389T/634082/2024	241330301000474	24-Dec-24	522131	7.800.000	815619	(7.800.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/019/DKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Koneksitas Data Warehouse Kependudukan	00042T/634082/2024	249991302001840	10-JAN-24	825619	291.282.315	411214	(5.248.330)	257.168.170	(283.482.315)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Dashboard Profil Data Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15897/PIAK Tanggal 31-12-2023
64	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(28.865.815)				
65	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03375T/634082/2024	241330301000478	24-Dec-24	522191	925.959.000	815619	(925.959.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/25204/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2024	00131T/634082/2025	259991302005094	10-Jan-25	825619	925.959.000	411214	(16.683.946)	909.275.054	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30987/PIAK Tanggal 31-12-2024
67	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03310T/634082/2024	241330301000481	24-Dec-24	522131	14.950.000	815619	(14.950.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/15465/PIAK.2023 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Jaringan Junior	00090T/634082/2025	259991302005080	10-Jan-25	825619	14.950.000	411211	(621.250)	14.328.750	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Jaringan Junior sesuai BAST Nomor 000.4/31047/PIAK Tanggal 31-12-2024
69	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03313T/634082/2024	241330301000452	24-Dec-24	522131	16.000.000	815619	(16.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/206/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior	00081T/634082/2025	259991302005091	10-Jan-25	825619	16.000.000	411211	(700.000)	15.300.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Professional Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/30942/PIAK Tanggal 31-12-2024
70	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03394T/634082/2024	241330301000473	24-Dec-24	522191	498.860.640	815619	(498.860.640)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/009/DKN untuk Paket Pekerjaan ATS Perangkat Key Management System (KMS) Blangko KTP-el Dan SAM	00058T/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	19.900.000	411211	(1.750.000)	18.150.000	478.960.640	Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Professional IT Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15971/PIAK Tanggal 31-12-2023
71	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03333T/634082/2024	241330301000476	24-Dec-24	522131	344.120.535	815619	(344.120.535)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/702/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi Dashboard Profil Data Kependudukan	00087T/634082/2025	259991303002418	10-Jan-25	825619	344.120.535	411214	(6.200.370)	303.818.130	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi Dashboard Profil Data Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/30957/PIAK Tanggal 31-12-2024
72	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(34.102.035)				
73	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03378T/634082/2024	241330301000443	24-Dec-24	522191	1.790.870.000	815619	(1.790.870.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/25517/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2024	00135T/634082/2025	259991302005137	10-Jan-25	825619	1.790.870.000	411214	(32.267.928)	1.758.602.072	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30977/PIAK Tanggal 31-12-2024
75	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		03338T/634082/2024	241330301000463	24-Dec-24	522191	2.021.171.472	815619	(2.021.171.472)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/707/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC Tahun 2024	00102T/634082/2025	259991302005053	10-Jan-25	825619	2.021.171.472	411214	(36.417.504)	1.784.457.696	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC Tahun 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30803/PIAK Tanggal 31-12-2024
																	411211	(200.296.272)				

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penempatan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D
76	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033377/634082/2024	241330301000444	24-Des-24	522191	2.184.700.000	815619	(2.184.700.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/709/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2024	001427/634082/2025	259991302005139	10-Jan-25	825619	2.184.700.000	411124	(39.363.964)	1.928.834.234	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/31052/PIAK Tanggal 31-12-2024
																	411211	(216.501.802)				
58	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033127/634082/2024	241330301000448	24-Des-24	522131	6.575.000	815619	(6.575.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/204/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Programmer	000297/634082/2024	249991303003700	10-Jan-24	825619	6.199.000	411121	(309.950)	5.889.050	376.000	Tenaga Ahli Aplikasi Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15843/PIAK Tanggal 31-12-2023
59	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033167/634082/2024	241330301000449	24-Des-24	522131	6.500.000	815619	(6.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/212/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Desain Grafis	000397/634082/2024	249991302001850	10-Jan-24	825619	6.975.000	411121	(348.750)	6.626.250	(475.000)	Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15891/PIAK Tanggal 31-12-2023
60	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033957/634082/2024	241330301000465	24-Des-24	522191	181.394.410	815619	(181.394.410)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1096/DKN untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Penerbitan Kartu SAM dan Pemanfaatan Card Reader	000517/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.370.881.917	411124	(27.417.638)	1.343.464.279	(1.189.487.507)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRG Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15869/PIAK Tanggal 31-12-2023
61	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033197/634082/2024	241330301000470	24-Des-24	522131	15.700.000	815619	(15.700.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/216/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior	000867/634082/2025	259991305000338	10-Jan-25	825619	15.700.000	411121	(677.500)	15.022.500	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/30954/PIAK Tanggal 31-12-2024
62	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033257/634082/2024	241330301000435	24-Des-24	522131	8.000.000	815619	(8.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/223/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Database Senior Tahun Anggaran 2024	000487/634082/2024	249991306000220	10-JAN-24	825619	15.700.000	411121	(632.045)	15.067.955	(7.700.000)	Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15831/PIAK Tanggal 31-12-2023
63	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033617/634082/2024	241330301000437	24-Des-24	522131	8.000.000	815619	(8.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/10903/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Database Senior Tahun Anggaran 2024	000427/634082/2024	249991302001840	10-JAN-24	825619	291.282.315	411124	(5.248.330)	257.168.170	(283.282.315)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Dashboard Profil Data Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15897/PIAK Tanggal 31-12-2023
64	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(28.865.815)				
65	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033587/634082/2024	241330301000462	24-Des-24	522191	290.000.000	815619	(290.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/6502/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center Medan Merdeka Utara Tahun 2024	001237/634082/2025	259991302005049	10-Jan-25	825619	290.000.000	411124	(5.225.225)	256.036.037	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center Medan Merdeka Utara Tahun 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30815/PIAK Tanggal 31-12-2024
66	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(28.738.738)				
67	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033347/634082/2024	241330301000445	24-Des-24	522131	13.800.000	815619	(13.800.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/950/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database	000477/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.234.364.400	411124	(22.240.800)	1.089.799.200	(1.220.564.400)	Annual Technical Support Perangkat Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15940/PIAK Tanggal 31-12-2023
68	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(122.324.400)				
69	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033407/634082/2024	241330301000457	24-Des-24	522191	6.999.500	815619	(6.999.500)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1659/PIAK.2024 untuk Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2024	001067/634082/2025	259991302005086	10-Jan-25	825619	6.999.500	411121	(174.988)	6.824.512	-	Pembayaran Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 000.4/30904/PIAK Tanggal 31-12-2024

9026

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		
70	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033907/634082/2024	241330301000455	24-Des-24	522131	7.800.000	815619	(7.800.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/017/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Implementasi Aplikasi Konektivitas Data Warehouse Kependudukan	000587/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	19.900.000	411121	(1.750.000)	18.150.000	(12.100.000)	Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Professional IT Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15971/PIAK Tanggal 31-12-2023
71	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033637/634082/2024	241330301000456	24-Des-24	522191	111.601.204	815619	(111.601.204)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/13957/PIAK.2024 untuk Pemeliharaan Zimbra Mail Server	000537/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	10.133.190.000	411124	(182.580.000)	9.950.610.000	(10.021.588.796)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15910/PIAK Tanggal 31-12-2023
72	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(1.004.190.000)	(1.004.190.000)			
73	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033157/634082/2024	241330301000468	24-Des-24	522131	18.000.000	815619	(18.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/210/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Senior	000447/634082/2024	249991303003700	10-JAN-24	825619	528.554.250	411124	(9.523.500)	466.651.500	(510.554.250)	Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15948/PIAK Tanggal 31-12-2023
74	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(52.379.250)				
75	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033627/634082/2024	241330301000463	24-Des-24	522191	2.021.171.472	815619	(2.021.171.472)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/707/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC Tahun 2024	000357/634082/2024	249991302001980	11-JAN-24	825619	17.000.000	411121	(1.425.000)	15.575.000	2.004.171.472	Tenaga Ahli Administrator Database senior sesuai BAST Nomor 000.4/15807/PIAK Tanggal 31-12-2023
76	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033377/634082/2024	241330301000444	24-Des-24	522191	2.184.700.000	815619	(2.184.700.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/709/PIAK.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage Data Center MMU Tahun 2024	000207/634082/2024	249991302001860	10-Jan-24	825619	6.495.834	411121	(324.792)	6.171.042	2.178.204.166	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Programmer sesuai BAST Nomor 000.4/15822/PIAK Tanggal 31-12-2023
58	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033627/634082/2024	241330301000461	24-Des-24	521811	68.000.000	815619	(68.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/28932/PIAK.2024 untuk Pekerjaan Pengadaan Lisensi Anydesk Professional	000297/634082/2024	249991303003700	10-Jan-24	825619	6.199.000	411121	(309.950)	5.889.050	61.801.000	Tenaga Ahli Aplikasi Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15843/PIAK Tanggal 31-12-2023
59	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033227/634082/2024	241330301000447	24-Des-24	522131	8.000.000	815619	(8.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/225/PIAK.2024 untuk Tenaga Ahli Aplikasi Senior Tahun Anggaran 2024	000397/634082/2024	249991302001850	10-Jan-24	825619	6.975.000	411121	(348.750)	6.626.250	1.025.000	Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15891/PIAK Tanggal 31-12-2023
60	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033927/634082/2024	241330301000480	24-Des-24	522131	17.950.000	815619	(17.950.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/015/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Jaringan	000147/634082/2025	259991302005098	10-Jan-25	825619	17.950.000	411121	(846.250)	17.103.750	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Jaringan, sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/6790/IDKN Tanggal 31-12-2024
61	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033187/634082/2024	241330301000429	31-Des-24	532111	8.710.785.000	815619	(8.710.785.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/16770/PMU.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Sistem Operasi dan VM Tahun Anggaran 2024	000577/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	14.500.000	411121	(1.056.250)	13.443.750	8.696.285.000	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15968/PIAK Tanggal 31-12-2023
62	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033247/634082/2024	241330301000432	31-Des-24	532111	14.440.000.001	815619	(14.440.000.001)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/18971/PMU.2024 untuk Pengadaan Server Tahun Anggaran 2024	000487/634082/2024	249991306000220	10-JAN-24	825619	15.700.000	411121	(632.045)	15.067.955	14.424.300.001	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15831/PIAK Tanggal 31-12-2023

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D
63	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033327/634082/2024	241330301000431	31-Des-24	532111	5.960.000.000	815619	(5.960.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/16566/PMU.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Tape Backup Tahun Anggaran 2024	000427/634082/2024	249991302001840	10-JAN-24	825619	291.282.315	411124	(5.248.330)	257.168.170	5.668.717.685	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Dashboard Profil Data Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15807/PIAK Tanggal 31-12-2023
64	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(28.865.815)			
65	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033277/634082/2024	241330301000430	31-Des-24	532111	9.725.000.000	815619	(9.725.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/18787/PMU.2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras Untuk Aplikasi Pemanfaatan IKD	000337/634082/2024	249991303003970	11-Jan-24	825619	938.984.160	411124	(16.918.634)	829.013.042	8.786.015.840	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/15960/PIAK Tanggal 31-12-2023
66	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(93.052.484)			
67	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032737/634082/2024	241330301000401	24-Des-24	522131	25.000.000	815619	(25.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/97062/PMU.2024 untuk Tenaga Ahli Pengembangan Manajemen Keluhan Junior Tahun 2024	000477/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.234.364.400	411124	(22.240.800)	1.089.799.200	(1.209.364.400)	Annual Technical Support Perangkat Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15940/PIAK Tanggal 31-12-2023
68	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(122.324.400)			
69	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032687/634082/2024	241330301000415	24-Des-24	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/128/PMU.2024 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024	000477/634082/2025	259991303002786	14-Jan-25	825619	7.500.000			7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/24191/PMU.2024 Tanggal 31-12-2024
70	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032677/634082/2024	241330301000419	24-Des-24	522191	9.500.000	815619	(9.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/140/PMU.2024 untuk Tenaga Pendukung Administrasi dan Penerjemah Dokumen Tahun Anggaran 2024	000417/634082/2025	259991301003213	13-Jan-25	825619	9.500.000			9.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi dan Penerjemah Dokumen Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/24188/PMU.2024 Tanggal 31-12-2024
71	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034017/634082/2024	241330301000408	24-Des-24	536111	319.470.687	815619	(319.470.687)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/550/IDN untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Data Balikan Pusat Dan Daerah	000537/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	10.133.190.000	411124	(182.580.000)	9.950.610.000	(9.813.719.313)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15910/PIAK Tanggal 31-12-2023
72	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(1.004.190.000)	(1.004.190.000)		
73	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032617/634082/2024	241330301000394	24-Des-24	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1273/PMU.2024 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024	000427/634082/2025	259991302005569	13-Jan-25	825619	7.500.000			7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/24173/PMU.2024 Tanggal 31-12-2024
75	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033987/634082/2024	241330301000406	24-Des-24	522191	1.130.150.940	815619	(1.130.150.940)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1554/IDN untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Keras Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan	000357/634082/2024	249991302001980	11-JAN-24	825619	17.000.000	411121	(1.425.000)	15.575.000	1.113.150.940	Tenaga Ahli Administrator Database Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15807/PIAK Tanggal 31-12-2023
76	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032577/634082/2024	241330301000399	24-Des-24	522131	28.000.000	815619	(28.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/3567/PMU.2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli IKD Utilization Developer	000207/634082/2024	249991302001860	10-Jan-24	825619	6.495.834	411121	(324.792)	6.171.042	21.504.166	Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Programmer sesuai BAST Nomor 000.4/15822/PIAK Tanggal 31-12-2023
58	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032627/634082/2024	241330301000392	24-Des-24	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1256/PMU.2024 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024	000487/634082/2025	259991302005057	10-Jan-25	825619	7.500.000			7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/24179/PMU.2024 Tanggal 31-12-2024

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penempatan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA								Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA								Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D		No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan	Nilai SP2D				
59	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032667/634082/2024	241330301000420	24-Dec-24	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/686/PMU.2024 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024	000467/634082/2025	259991302005058	10-Jan-25	825619	7.500.000					7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/24200/PMU.2024 Tanggal 31-12-2024
60	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034077/634082/2024	241330301000413	24-Dec-24	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/09/DKD/2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi :Tenaga IT Support	000517/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.370.881.917	411124	(27.417.638)			1.343.464.279	(1.365.381.917)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage ORC Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15869/PIAK Tanggal 31-12-2023
61	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032757/634082/2024	241330301000402	24-Dec-24	522131	18.000.000	815619	(18.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/969/PMU.2024 untuk Tenaga Ahli Wartawan Muda Reporter Tahun Anggaran 2024	000577/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	14.500.000	411121	(1.056.250)			13.443.750	3.500.000	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15968/PIAK Tanggal 31-12-2023
62	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032587/634082/2024	241330301000395	24-Dec-24	522131	21.945.000	815619	(21.945.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.7/2164/PMU.2024 untuk Tenaga Ahli Manajemen Proyek Tahun 2024	000487/634082/2024	249991306000220	10-JAN-24	825619	15.700.000	411121	(632.045)			15.067.955	6.245.000	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15831/PIAK Tanggal 31-12-2023
63	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034087/634082/2024	241330301000409	24-Dec-24	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/15/DKD/2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi :Tenaga IT Support	000427/634082/2024	249991302001840	10-JAN-24	825619	291.282.315	411124	(5.248.330)			257.168.170	(285.782.315)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Dashboard profil Data Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15897/PIAK Tanggal 31-12-2023
64	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(28.865.815)					
65	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033997/634082/2024	241330301000418	24-Dec-24	536111	695.451.075	815619	(695.451.075)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/992/DKN untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gateway/Middleware untuk Sistem Pengenalan Wajah (FR)	000337/634082/2024	249991303003970	11-Jan-24	825619	938.984.160	411124	(16.918.634)			829.013.042	(243.533.089)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/15960/PIAK Tanggal 31-12-2023
66	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(93.052.484)					
67	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032597/634082/2024	241330301000398	24-Dec-24	522131	21.000.000	815619	(21.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/3569/PMU.2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi Sementara Tahun 2024	000477/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.234.364.400	411124	(22.240.800)			1.089.799.200	(1.213.364.400)	Annual Technical Support Perangkat Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15940/PIAK Tanggal 31-12-2023
68	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(122.324.400)					
69	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034117/634082/2024	241330301000412	24-Dec-24	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/11/DKD/2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi :Tenaga IT Support	000597/634082/2024	249991303003710	10-JAN-24	825619	19.955.000	411121	(1.756.875)			18.198.125	(14.455.000)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15965/PIAK Tanggal 31-12-2023
70	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034057/634082/2024	241330301000404	24-Dec-24	536111	2.300.000.000	815619	(2.300.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/5012/DKN untuk Paket Pekerjaan Penguatan Pengembangan Gateway API Management untuk Pemanfaatan IKD Dokumen Kependudukan	000587/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	19.900.000	411121	(1.750.000)			18.150.000	2.280.100.000	Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Profesional IT Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15971/PIAK Tanggal 31-12-2023
71	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032647/634082/2024	241330301000391	24-Dec-24	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/687/PMU.2024 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024	000497/634082/2025	259991302005056	10-Jan-25	825619	7.500.000					7.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/24194/PMU.2024 Tanggal 31-12-2024

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Pemampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi			
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D	
73	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034107/634082/2024	241330301000410	24-Des-24	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/13/IDKD/2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi :Tenaga IT Support	000447/634082/2024	249991303003700	10-JAN-24	825619	528.554.250	411124	(9.523.500)	466.651.500	(523.054.250)	Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15948/PIAK Tanggal 31-12-2023	
74	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(52.379.250)				
75	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034037/634082/2024	241330301000422	24-Des-24	522191	182.151.000	815619	(182.151.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/4497/IDN untuk Paket Pekerjaan Uji Pentest Aplikasi Koenkitas Data Warehouse Kependudukan	000297/634082/2025	259991302005133	10-Jan-25	825619	182.151.000	411124	(3.282.000)	160.818.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Uji Pentest Aplikasi Koenkitas Data Warehouse Kependudukan, sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/6736/IDN Tanggal 28-12-2024	
																		411211	(18.051.000)				
76	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034027/634082/2024	241330301000407	24-Des-24	522191	463.425.000	815619	(463.425.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/483/IDN untuk Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Telekomunikasi	000287/634082/2025	259991302005096	10-Jan-25	825619	463.425.000	411124	(8.350.000)	409.150.000	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/6736/IDN Tanggal 31-12-2024	
																		411211	(45.925.000)				
58	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034127/634082/2024	241330301000417	24-Des-24	522131	24.300.000	815619	(24.300.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/1602/IDN/2024 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Analisis Keamanan Informasi	000297/634082/2024	249991303003700	10-Jan-24	825619	6.199.000	411121	(309.950)	5.889.050	18.101.000	-	Tenaga Ahli Aplikasi Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15843/PIAK Tanggal 31-12-2023
59	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032620/634082/2024	241330301000416	24-Des-24	522131	30.415.000	815619	(30.415.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1454/PMU/2024 untuk Tenaga Ahli Manajemen Keuangan Tahun Anggaran 2024	000457/634082/2025	259991302005050	10-Jan-25	825619	30.415.000			30.415.000	-	Pembayaran Tenaga Ahli Manajemen Keuangan Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/24203/PMU.2024 Tanggal 31-12-2024	
60	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032637/634082/2024	241330301000393	24-Des-24	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/1258/PMU.2024 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024	000517/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.370.881.917	411124	(27.417.638)	1.343.464.279	(1.363.381.917)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRG Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15869/PIAK Tanggal 31-12-2023	
61	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032837/634082/2024	241330301000396	24-Des-24	522131	20.000.000	815619	(20.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2484/PMU.2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Budgeting dan Rencana Strategis Tahun Anggaran 2024	000577/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	14.500.000	411121	(1.056.250)	13.443.750	5.500.000	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringn Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15968/PIAK Tanggal 31-12-2023
62	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034097/634082/2024	241330301000411	24-Des-24	522131	5.500.000	815619	(5.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/07/IDKD/2024 untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi :Tenaga IT Support	000487/634082/2024	249991306000220	10-JAN-24	825619	15.700.000	411121	(632.045)	15.067.955	(10.200.000)	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15831/PIAK Tanggal 31-12-2023	
63	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032697/634082/2024	241330301000414	24-Des-24	522191	9.500.000	815619	(9.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/139/PMU.2024 untuk Tenaga Pendukung Administrasi dan Penerjemah Dokumen Tahun Anggaran 2024	000437/634082/2025	259991305000340	10-Jan-25	825619	9.500.000			9.500.000	-	Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi dan Penerjemah Dokumen Tahun Anggaran 2024 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/24197/PMU.2024 Tanggal 31-12-2024	
65	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032717/634082/2024	241330301000397	24-Des-24	522131	25.000.000	815619	(25.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2822/PMU.2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Hukum Tahun 2024	000337/634082/2024	249991303003970	11-Jan-24	825619	938.984.160	411124	(16.918.634)	829.013.042	(913.984.160)	-	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/15960/PIAK Tanggal 31-12-2023
66	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(93.052.484)	-			

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D
67	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032657/634082/2024	241330301000390	24-Dec-24	522191	7.500.000	815619	(7.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/688/PMU.2024 untuk Tenaga Pendukung Administrasi Tahun Anggaran 2024	000477/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.234.364.400	411124	(22.240.800)	1.089.799.200	(1.226.864.400)	Annual Technical Support Perangkat Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15940/PIAK Tanggal 31-12-2023
68	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(122.324.400)			
69	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032707/634082/2024	241330301000400	24-Dec-24	522131	49.050.000	815619	(49.050.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.9/7059/PMU.2024 untuk Tenaga Ahli Pengembangan Manajemen Keluhan Senior Tahun 2024	000597/634082/2024	249991303003710	10-JAN-24	825619	19.955.000	411121	(1.756.875)	18.198.125	29.095.000	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15965/PIAK Tanggal 31-12-2023
70	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034737/634082/2024	241330301000405	24-Dec-24	536111	1.000.000.000	815619	(1.000.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/5018/DKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Software Pemanfaatan IKD (Layanan Publik) - Postgresql	000587/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	19.900.000	411121	(1.750.000)	18.150.000	980.100.000	Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Professional IT Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15971/PIAK Tanggal 31-12-2023
71	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		034047/634082/2024	241330301000421	24-Dec-24	522191	893.550.000	815619	(893.550.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/4499/DKN untuk Paket Pekerjaan Rekonsiliasi PNBP atas Jasa Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	000537/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	10.133.190.000	411124	(182.580.000)	9.950.610.000	(9.239.640.000)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15910/PIAK Tanggal 31-12-2023
72	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																411211	(1.004.190.000)	(1.004.190.000)		
73	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032497/634082/2024	241330301000323	24-Dec-24	522131	24.000.000	815619	(24.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/20051/PMU.2024 untuk TENAGA AHLI JUNIOR IMPLEMENTASI DAN MONEV PROGRAM PENGUATAN PENDAFTARAN PENUJUK DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024	000397/634082/2025	259991303002726	13-Jan-25	825619	24.000.000			24.000.000	-	Pembayaran TENAGA AHLI JUNIOR IMPLEMENTASI DAN MONEV PROGRAM PENGUATAN PENDAFTARAN PENUJUK DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/24170/PMU.2024 Tanggal 31-12-2024
75	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033047/634082/2024	241330301000335	24-Dec-24	522131	20.000.000	815619	(20.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2483/PMU.2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Budgeting dan Rencana Strategis Tahun Anggaran 2024	000357/634082/2024	249991302001980	11-JAN-24	825619	17.000.000	411121	(1.425.000)	15.575.000	3.000.000	Tenaga Ahli Administrator Database Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15807/PIAK Tanggal 31-12-2023
76	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033027/634082/2024	241330301000317	24-Dec-24	522131	25.000.000	815619	(25.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2761/PMU.2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Hukum Tahun Anggaran 2024	000207/634082/2024	249991302001860	10-Jan-24	825619	6.495.834	411121	(324.792)	6.171.042	18.504.166	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Programmer sesuai BAST Nomor 000.4/15822/PIAK Tanggal 31-12-2023
58	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032987/634082/2024	241330301000336	24-Dec-24	522131	35.000.000	815619	(35.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/2479/PMU.2024 untuk Pengadaan Tenaga Ahli Senior Budgeting dan Rencana Strategis Tahun Anggaran 2024	000297/634082/2024	249991303003700	10-Jan-24	825619	6.199.000	411121	(309.950)	5.889.050	28.801.000	Tenaga Ahli Aplikasi Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15843/PIAK Tanggal 31-12-2023
59	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032567/634082/2024	241330301000359	24-Dec-24	522131	30.000.000	815619	(30.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/2852/PMU.2024 untuk Paket Pekerjaan Tenaga Ahli Individu Utilization Cyber Security and Cryptography	000397/634082/2024	249991302001850	10-Jan-24	825619	6.975.000	411121	(348.750)	6.626.250	23.025.000	Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15891/PIAK Tanggal 31-12-2023
60	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033567/634082/2024	241330301000348	24-Dec-24	536111	1.000.000.000	815619	(1.000.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/5014/DKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Software Pemanfaatan IKD (Layanan Publik) - Redis	000367/634082/2025	259991302005046	10-Jan-25	825619	1.000.000.000	411124	(18.018.018)	882.882.883	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Software Pemanfaatan IKD (layanan komersil) - Redis, sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/6667/DKN Tanggal 31-12-2024
																		411211	(99.099.099)			

gaf

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penempatan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D
61	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032997/634082/2024	241330301000340	24-Dec-24	522131	22.000.000	815619	(22.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/6866/PMU.2024 untuk Tenaga Ahli Social Media Branding Tahun 2024	000577/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	14.500.000	411121	(1.056.250)	13.443.750	7.500.000	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15968/PIAK Tanggal 31-12-2023
62	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032557/634082/2024	241330301000337	24-Dec-24	522131	29.225.000	815619	(29.225.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/4366/PMU.2024 untuk Paket Pekerjaan Tenaga Ahli IKD Utilization Specialist	000487/634082/2024	249991306000220	10-JAN-24	825619	15.700.000	411121	(632.045)	15.067.955	13.525.000	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15831/PIAK Tanggal 31-12-2023
63	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033007/634082/2024	241330301000334	24-Dec-24	522191	12.000.000	815619	(12.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.7/2124/PMU.2024 untuk Paket Jasa Perorangan Tenaga Pendukung Media Online Independent	000427/634082/2024	249991302001840	10-JAN-24	825619	291.282.315	411124	(5.248.330)	257.168.170	(279.282.315)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Dashboard Profil Data Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15897/PIAK Tanggal 31-12-2023
64	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(28.865.815)				
65	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032867/634082/2024	241330301000350	24-Dec-24	522131	20.000.000	815619	(20.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/3620/PMU.2024 untuk Tenaga Ahli Hukum TA. 2024	000337/634082/2024	249991303003970	11-Jan-24	825619	938.984.160	411124	(16.918.634)	829.013.042	(918.984.160)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIAK Terpusat sesuai BAST Nomor 000.4/15960/PIAK Tanggal 31-12-2023
66	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(93.052.484)				
67	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032977/634082/2024	241330301000339	24-Dec-24	522131	17.600.000	815619	(17.600.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/6820/PMU.2024 untuk Tenaga Ahli Content Creator Tahun 2024	000477/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.234.364.400	411124	(22.240.800)	1.089.799.200	(1.216.764.400)	Annual Technical Support Perangkat Storage Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15940/PIAK Tanggal 31-12-2023
68	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(122.324.400)				
69	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033037/634082/2024	241330301000338	24-Dec-24	522131	36.000.000	815619	(36.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/4572/PMU.2024 untuk Tenaga Ahli Rebranding dan Strategi Komunikasi Senior Tahun Anggaran 2024	000597/634082/2024	249991303003710	10-JAN-24	825619	19.955.000	411121	(1.756.875)	18.198.125	16.045.000	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Senior sesuai BAST Nomor 000.4/15965/PIAK Tanggal 31-12-2023
70	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		032487/634082/2024	241330301000344	24-Dec-24	522131	33.000.000	815619	(33.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/20050/PMU.2024 untuk TENAGA AHLI SENIOR IMPLEMENTASI DAN MONEV PROGRAM Penguatan DAN MONEV PROGRAM Penguatan PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024	000407/634082/2025	259991303002725	13-Jan-25	825619	33.000.000			33.000.000	-	Pembayaran TENAGA AHLI SENIOR IMPLEMENTASI DAN MONEV PROGRAM Penguatan DAN MONEV PROGRAM Penguatan PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024 sesuai BAST Nomor 900.1.4.8/24166/PMU.2024 Tanggal 31-12-2024
71	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033837/634082/2024	241330301000283	24-Dec-24	522131	7.999.000	815619	(7.999.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/003/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staff	000537/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	10.133.190.000	411124	(182.580.000)	9.950.610.000	(10.125.191.000)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Aplikasi Biometrik KTP-el Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15910/PIAK Tanggal 31-12-2023
72	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(1.004.190.000)	(1.004.190.000)			
73	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033887/634082/2024	241330301000290	24-Dec-24	522131	7.800.000	815619	(7.800.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/013/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staff	000447/634082/2024	249991303003700	10-JAN-24	825619	528.554.250	411124	(9.523.500)	466.651.500	(520.754.250)	Pemeliharaan Perangkat Pendukung Unit Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai BAST Nomor 000.4/15948/PIAK Tanggal 31-12-2023
74	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															411211	(52.379.250)				
75	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033797/634082/2024	241330301000277	24-Dec-24	536111	1.000.000.000	815619	(1.000.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/6232/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Software Pemanfaatan IKD (layanan komersil) - Redis	000327/634082/2025	259991302005045	10-Jan-25	825619	1.000.000.000	411124	(18.018.018)	882.882.883	-	Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Software Pemanfaatan IKD (Layanan Publik) - Redis sesuai BAST/BAPP Nomor 000.4.2/6653/IDKN Tanggal 31-12-2024

gus

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Pemungutan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi		
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan	Nilai SP2D
																		411211	(99.099.099)			
76	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033807/634082/2024	241330301000306	24-Dec-24	536111	1.000.000.000	815619	(1.000.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/6322.4/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Software Pemanfaatan IKD (layanan komersil) - Postgresql	000207/634082/2024	249991302001860	10-Jan-24	825619	6.495.834	411121	(324.792)	6.171.042	993.504.166	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Programmer sesuai BAST Nomor 000.4/15822/PIAK Tanggal 31-12-2023
58	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033857/634082/2024	241330301000278	24-Dec-24	522131	6.300.000	815619	(6.300.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/004/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perseorangan Tenaga Ahli IT Support	000297/634082/2024	249991303003700	10-Jan-24	825619	6.199.000	411121	(309.950)	5.889.050	101.000	Tenaga Ahli Aplikasi Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15843/PIAK Tanggal 31-12-2023
59	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033577/634082/2024	241330301000292	24-Dec-24	536111	1.498.500.000	815619	(1.498.500.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/6322.2/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Software Pemanfaatan IKD (layanan komersil) - Secure Data Platform	000397/634082/2024	249991302001850	10-Jan-24	825619	6.975.000	411121	(348.750)	6.626.250	1.491.525.000	Tenaga IT Support Tahun Anggaran 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15891/PIAK Tanggal 31-12-2023
60	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033867/634082/2024	241330301000279	24-Dec-24	522131	6.990.000	815619	(6.990.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/021/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perseorangan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staff	000517/634082/2024	249991304001580	10-JAN-24	825619	1.370.881.917	411124	(27.417.638)	1.343.464.279	(1.363.891.917)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Annual Technical Support Server dan Storage DRC Tahun 2023 sesuai BAST Nomor 000.4/15869/PIAK Tanggal 31-12-2023
61	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033847/634082/2024	241330301000276	24-Dec-24	522131	6.300.000	815619	(6.300.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/005/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perseorangan Tenaga Ahli IT Support	000577/634082/2024	249991303003690	10-JAN-24	825619	14.500.000	411121	(1.056.250)	13.443.750	(8.200.000)	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengadaan Tenaga Ahli Jaringan Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15968/PIAK Tanggal 31-12-2023
62	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		033877/634082/2024	241330301000280	24-Dec-24	522131	6.990.000	815619	(6.990.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4.2/022/IDKN untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perseorangan Tenaga Ahli Junior Asisten Profesional Staff	000487/634082/2024	249991306000220	10-JAN-24	825619	15.700.000	411121	(632.045)	15.067.955	(8.710.000)	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Administrator Database Junior sesuai BAST Nomor 000.4/15831/PIAK Tanggal 31-12-2023
122	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	517.800.000	016507/403231/2024	241330301000469	24-Dec-24	522191	432.000.000	815619	(432.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/23/SP/II/2024 untuk Pengadaan Jasa Petugas Kebersihan pada BPSDM Kemendagri TA 2024	000027/403231/2024	249991302001840	10-JAN-24	825619	120.000.000	411124	(2.162.162)	105.945.946	312.000.000	Paket Pengadaan Jasa Langgan Internet pada BPSDM Kemendagri TA 2023 sesuai BAST Nomor 027/5079/BA-ST/II/2023 Tanggal 31-12-2023
123	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																411211	(11.891.892)			
124	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		016527/403231/2024	241330301000239	24-Dec-24	521111	25.800.000	815619	(25.800.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/219/SP/II/2024 untuk Paket Pengadaan Jasa Langgan Internet (Backup Provider) pada BPSDM Kemendagri TA 2024	000037/403231/2024	249991302001980	11-JAN-24	825619	51.600.000	411124	(927.729)	45.538.757	(25.800.000)	Paket Pengadaan Jasa Langgan Internet (backup provider) pada BPSDM Kemendagri TA 2023 sesuai BAST Nomor 027/5081/BA-ST/II/2023 Tanggal 31-12-2023
125	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																411211	(5.133.514)			
124	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		016517/403231/2024	241330301000246	24-Dec-24	521111	60.000.000	815619	(60.000.000)	-	RPATA atas Kontrak Nomor 027/219/SP/II/2024 untuk Paket RPATA atas Kontrak Nomor 027/217/SP/II/2024 untuk Paket Pengadaan Jasa Langgan Internet pada BPSDM Kemendagri TA 2024 Jasa Langgan Internet pada BPSDM Kemendagri TA 2024 Jasa Langgan Internet (Backup Provider) pada BPSDM Kemendagri TA 2024	000037/403231/2024	249991302001980	11-JAN-24	825619	51.600.000	411124	(927.729)	45.538.757	8.400.000	Paket Pengadaan Jasa Langgan Internet (backup provider) pada BPSDM Kemendagri TA 2023 sesuai BAST Nomor 027/5081/BA-ST/II/2023 Tanggal 31-12-2023

gus

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (163139) per 31 Desember 2024	SPM Penampungan RPATA							Deskripsi Transaksi	SPM Pembayaran RPATA							Saldo RPATA	Deskripsi Transaksi	
				No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan	Nilai Potongan		Nilai SP2D	No SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Akun Belanja	Nilai Belanja	Akun Potongan			Nilai Potongan
125	506137	PPSDM REGIONAL BUKITTINGGI	20.400.000	005367/506137/2024	240110301000194	19-Des-24	523111	20.400.000	815619	(20.400.000)	RPATA atas Kontrak No. 000.4.2/35/PPSDM-BKT untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Cleaning Service Asrama dan Aula Nusantara Pusat Pengembangan SDM Regional Bukittinggi Tahun 2024						411211	(5.133.514)			
126	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	94.718.152	002807/506138/2024	240230301000178	23-Des-24	522191	11.143.312	815619	(11.143.312)	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/10/e-CAT/SP/Balai-KMG untuk Pengadaan Jasa Tenaga Pengemudi (Driver)	000027/506138/2024	249991302000610	05-JAN-24	825619	90.390.000	411124	(1.628.649)	79.803.783	(79.246.688)	Pengadaan Jasa Petugas Kebersihan (Cleaning Service) sesuai BAST Nomor 000.4/7172/e-CAT/BAST-PI/Balai-KMG Tanggal 31 Desember 2023
127	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN															411211	(8.957.568)			
128	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		002797/506138/2024	240230301000159	23-Des-24	522191	83.574.840	815619	(83.574.840)	RPATA atas Kontrak Nomor 000.4/9/e-CAT/SP/Balai-KMG untuk Pengadaan jasa petugas kebersihan (cleaning service)	003687/506138/2023	239991302000390	29-DEC-23	825619	1.834.933.350	411128	(28.929.129)	1.624.163.979	(1.751.358.510)	Renovasi penambahan nilai bangunan permanen asrama kenanga sesuai BAST No. 000.4/7205/e-CAT/BAST/Balai-KMG Tgl 28 Des 2023 Jaminan Pemeliharaan No.20.06.01.1106.00106 Tgl 29 Des 2023
129	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN															411211	(181.840.242)			
<b>Jumlah</b>			<b>384.325.357.961</b>					<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>						<b>383.564.937.091</b>	<b>(49.323.930.873)</b>	<b>333.808.944.311</b>	<b>5.854.217.502</b>		

gaf



## LAMPIRAN XXVI

# RINCIAN MUTASI ASET LAIN- LAIN PER UNIT ESELON I

RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN PER UNIT ESELON I

LAMPIRAN XXVI

JENIS TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	SETJEN	ITJEN	POLPUM	BAK	PEMDES	BANGDA	OTDA	DUKCAPIL	KEUDA	LITBANG	BPSDM	JUMLAH
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2023	37.528.625.868	7.138.187.300	1.611.327.750	8.217.658.578	4.938.080.077	33.883.173.281	39.936.911.063	63.535.874.527	5.797.739.410	-	9.368.304.247	211.955.882.101
Transfer Masuk	192	2.787.828.811				-		-	-		-		2.787.828.811
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	401	22.715.142.653	1.060.943.508	1.505.607.404	19.066.500	1.816.403.200	15.972.850.000	103.520.866.953	1.706.706.083	115.896.620	3.779.216.699	2.416.604.047	154.629.303.667
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	912	1.581.510.823											1.581.510.823
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>27.084.482.287</b>	<b>1.060.943.508</b>	<b>1.505.607.404</b>	<b>19.066.500</b>	<b>1.816.403.200</b>	<b>15.972.850.000</b>	<b>103.520.866.953</b>	<b>1.706.706.083</b>	<b>115.896.620</b>	<b>3.779.216.699</b>	<b>2.416.604.047</b>	<b>158.998.643.301</b>
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	402	(8.660.505.823)				(15.483.040)						-	(8.675.988.863)
Penghapusan	301					(1.577.000)	(16.414.400)				-		(17.991.400)
Likuidasi Keluar Henti Guna	312	(2.787.828.811)											(2.787.828.811)
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	393						(1.053.726.000)	(55.465.211.660)					(56.518.937.660)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	911	(29.886.168.921)	(8.199.130.808)	(3.116.935.154)	(5.404.240.698)	(5.987.012.490)			(63.224.762.701)		(640.553.349)	(3.630.910.047)	(120.089.714.168)
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(41.334.503.555)</b>	<b>(8.199.130.808)</b>	<b>(3.116.935.154)</b>	<b>(5.404.240.698)</b>	<b>(6.004.072.530)</b>	<b>(1.070.140.400)</b>	<b>(55.465.211.660)</b>	<b>(63.224.762.701)</b>	<b>-</b>	<b>(640.553.349)</b>	<b>(3.630.910.047)</b>	<b>(188.090.460.902)</b>
Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2024	23.278.604.600	-	-	2.832.484.380	750.410.747	48.785.882.881	87.992.566.356	2.017.817.909	5.913.636.030	3.138.663.350	8.153.998.247	182.864.064.500
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(20.262.288.316)	-	-	(2.832.484.380)	(741.141.880)	(48.150.639.203)	(87.753.605.511)	(2.017.817.909)	(5.632.293.174)	(13.997.500)	(7.895.966.804)	(175.300.234.677)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Nilai Buku per 31 Desember 2024	3.016.316.284	-	-	-	9.268.867	635.243.678	238.960.845	-	281.342.856	3.124.665.850	258.031.443	7.563.829.823

gaf



## LAMPIRAN XXVII

# REKAPITULASI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

## Rekapitulasi Utang Kepada Pihak Ketiga

KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 Desember 2024				31 Desember 2023			
			BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
01	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	-	-	-	-	28.469.000	133.320.202	154.577.688	316.366.890
01	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	5.042.551.780	-	98.020.945.752	103.063.497.532	5.082.246.771	-	4.154.181.904	9.236.428.675
01	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	3.092.871.018	-	905.824.766	3.998.695.784	5.434.581.669	-	144.717.455	5.579.299.124
01	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	291.258.561	52.264.679	258.080.276	601.603.516	6.808.000	167.955.170	189.345.000	364.108.170
01	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	227.642.248	-	162.214.497	389.856.745	346.508.583	-	27.573.000	374.081.583
01	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	191.875.866	-	267.117.303	458.993.169	423.134.094	42.076.319	-	465.210.413
01	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	70.251.804	-	55.508.996	125.760.800	279.917.085	-	-	279.917.085
01	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	57.759.305	36.657.061	-	94.416.366	189.701.826	111.747.810	-	301.449.636
01	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	-	24.420.000	162.937.471	187.357.471	459.122.584	77.531.575	99.603.000	636.257.159
01	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	-	-	-	-	148.078.393	29.524.900	-	177.603.293
02	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	1.425.437.942	-	-	1.425.437.942	1.771.713.895	86.653.399	-	1.858.367.294
03	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1.319.042.470	903.984	-	1.319.946.454	1.456.481.950	981.906	-	1.457.463.856
04	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	151.923.864	90.249.000	2.165.794.976	2.407.967.840	6.549.120	-	-	6.549.120
04	259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	-	-	-	-	-	-	14.670.000	14.670.000
04	417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	-	-	8.213.384	8.213.384	-	-	-	-
04	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	-	-	32.700	32.700	-	-	-	-
04	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-
04	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	-	-	60	60	-	-	60	60
04	484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	9.000.000	-	9.000.000
05	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1.652.914.106	292.836.172	29.456.067.958	31.401.818.236	1.493.515.729	387.239.153	-	1.880.754.882
05	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	279.228.395	37.070.435	-	316.298.830	264.680.529	34.091.444	-	298.771.973
05	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	231.125.056	18.240.298	-	249.365.354	223.755.400	10.529.100	-	234.284.500
05	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	233.451.134	22.557.097	-	256.008.231	212.280.465	33.866.231	-	246.146.696
06	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1.199.567.500	15.282.891.834	4.135.673.016	20.618.132.350	1.672.103.919	219.159.005	1.695.241.804	3.586.504.728
07	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	1.027.236.045	-	-	1.027.236.045	1.393.678.021	1.043.320	-	1.394.721.341
08	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	81.127.000	-	229.372.442.230	229.453.569.230	1.469.817.369	189.108.545	48.270.530.866	49.929.456.780
09	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	990.015.346	-	-	990.015.346	1.403.503.090	-	-	1.403.503.090
11	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	157.167.582	-	-	157.167.582	939.916.474	-	-	939.916.474

9/2/24

KODE ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	31 Desember 2024				31 Desember 2023			
			BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212111)	BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (212112)	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (212191)	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
12	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	638.293.219	-	-	638.293.219	569.906.745	-	-	569.906.745
12	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	452.320.573	-	-	452.320.573	-	-	-	-
12	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	452.771.606	-	-	452.771.606	376.011.671	38.758.702	-	414.770.373
12	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI	-	-	20.400.000	20.400.000	-	-	-	-
12	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	762.009.272	183.939.037	517.800.000	1.463.748.309	1.104.698.323	187.633.345	171.600.000	1.463.931.668
12	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	107.228.968	35.385.250	94.718.152	237.332.370	76.789.267	35.388.750	102.442.000	214.620.017
<b>JUMLAH</b>			<b>20.135.070.660</b>	<b>16.077.414.847</b>	<b>365.603.781.537</b>	<b>401.816.267.044</b>	<b>26.833.969.972</b>	<b>1.795.608.876</b>	<b>55.024.482.777</b>	<b>83.654.061.625</b>

gaf



## LAMPIRAN XXVIII

# RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

## RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

ESELON I	SATKER	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
Setjen	Kantor Pusat (403200)	Penempatan 1 (satu) unit mesin ATM Bank Mandiri	39.762.000,00	19.428.000,00
		Penempatan Kantor Kas Bank BRI	363.817.500,00	-
		Penempatan 2 (dua) unit mesin ATM Bank BRI		
		BNI Gedung B Lantai I (Bank)	416.527.767,00	563.537.567,00
		Penempatan 1 (satu) unit mesin ATM Bank BSI	19.643.000,00	-
		Koperasi P (Kantin Gedung C)	154.098.300,00	205.464.400,00
		Koperasi Prajamukti	189.242.300,00	-
		DPP PP PAUD	62.133.000,00	-
		Dharma Wanita	7.077.500,00	6.759.000,00
		PT. DTN	27.272.727,00	68.181.818,00
	PT. TBS	74.402.987,00	186.007.467,00	
	IPDN Kampus Jakarta (352593)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. (Kampus Jakarta)	-	15.926.389,00
		PT. BNI (PERSERO) Tbk. (Kampus Jakarta)	-	15.926.389,00
		PT. BRI (PERSERO) Tbk. (Kampus Jakarta)	-	15.926.388,00
		PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) (Kampus Jakarta)	-	15.926.389,00
		PT. STU (Kampus Jakarta)	-	9.781.389,00
		Koprasi BBP (Kantin Kampus Jakarta)	26.972.344,00	26.972.344,00
		Koprasi BBP (Koprasi Kampus Jakarta)	12.788.646,00	12.788.646,00
	IPDN Jatinangor (448302)	Gedung Fitnes Tim Raga Praja Gym	-	3.666.667,00
		Bank BJB Jatinangor	83.179.250,00	113.426.250,00
		Bank BJB	62.150.000,00	84.750.000,00
		CV. M	-	40.037.500,00
		PT. STU	-	16.009.375,00
		PT. STU	20.718.750,00	35.343.750,00
		PT. STU	22.383.333,00	38.183.333,00
		PT. STU	23.701.056,00	-
		BNI (samping Pengasuhan)	-	3.640.000,00
		BNI Cabang PTB	17.820.000,00	38.880.000,00
		Koperasi AP	-	5.217.375,00
		PT. SS	-	68.866.000,00
		Dharma Wanita	-	9.799.500,00
		Dharma Wanita Persatuan IPDN	30.000.000,00	-
		CV. KMR	163.503.167,00	248.809.167,00
		Koperasi KDKS	10.259.167,00	16.414.667,00
		Koprasi BBP	13.012.292,00	44.241.792,00
		Koprasi BBP	9.011.333,00	-
		Koprasi BBP (Fitness Center)	14.901.333,00	-
		Koprasi BBP (Kantin samping menza)	6.444.556,00	-
		AYI cs	-	1.417.229,00
		AYI cs	1.101.875,00	-
		Rizalul Fauzi	5.208.333,00	-
	CV. BBS	62.601.583,00	-	
	KAMPUS PASCASARJANA	5.759.249.872,00	5.174.795.384,00	
	IPDN Kampus Sulsel (677024)	Koperasi WP	-	3.784.667,00
		Koperasi WP	-	16.500.000,00
		PT. BNI (PERSERO) Tbk.	7.790.292,00	16.288.792,00
	IPDN Kampus NTB (683084)	Koprasi Konsumen AP Mandalika	10.363.667,00	25.909.167,00
<b>Total Setjen</b>			<b>7.717.137.930,00</b>	<b>7.168.606.801,00</b>
Itjen	Itjen (027203)	PT Bank Negara Indonesia	2.652.944,00	18.570.611,00
<b>Total Itjen</b>			<b>2.652.944,00</b>	<b>18.570.611,00</b>
Ditjen Bina Pemdes	Ditjen Bina Pemdes (027753)	PT Bank Negara Indonesia	11.602.000,00	34.806.000,00
		PT Bank Mandiri	4.741.083,00	23.705.417,00
		PT. Bank BRI	6.321.445,00	25.285.778,00
	Balai Besar PMD Malang (028830)	Koperasi RAS	6.153.000,00	7.000.000,00
<b>Total Ditjen Bina Pemdes</b>			<b>28.817.528,00</b>	<b>90.797.195,00</b>
Ditjen Bina Bangda	Ditjen Bina Bangda (039729)	PT Bank Negara Indonesia	-	23.684.000,00
		PT. Bank Mandiri	25.000.000,00	40.000.000,00
		PT. Bank BRI	26.250.000,00	41.250.000,00
		Sewa Gedung Serbaguna	241.080.000,00	160.640.000,00
		Sewa Koperasi PM	-	27.779.500,00
<b>Total Ditjen Bina Bangda</b>			<b>292.330.000,00</b>	<b>293.353.500,00</b>

## RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER SATKER

ESELON I	SATKER	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
Ditjen Dukcapil	Ditjen Dukcapil (634082)	Voucher Jasa Layanan Kependudukan	151.974.364.000,00	119.943.814.000,00
<b>Total Ditjen Dukcapil</b>			<b>151.974.364.000,00</b>	<b>119.943.814.000,00</b>
BPSDM	Kantor Pusat (403231)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	1.256.278,00	16.331.611,00
		Koperasi PP-I Kemendagri	-	28.697.000,00
		PT. Bank BRI (PERSERO) Tbk.	126.525.000,00	-
		PT. MSD	95.365.000,00	-
	PPSDM Regional Yogyakarta (027114)	BPD DIY	37.917.483,00	49.015.283,00
		KPN MELATI	6.065.078,00	-
	PPSDM Regional Bukittinggi (506137)	BNI	-	5.280.419,00
		BRI Cab Sumedang	-	5.315.419,00
		BPD SUMBAR	-	25.199.000,00
	Balai PK Satpol PP dan Damkar (506138)	PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.	24.832.000,00	41.386.667,00
<b>Total BPSDM</b>			<b>291.960.839,00</b>	<b>171.225.399,00</b>
<b>Total Keseluruhan</b>			<b>160.307.263.241,00</b>	<b>127.686.367.506,00</b>



## LAMPIRAN XXIX

# RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
1	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	20-AUG-21	A01242	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132.944.188	132.944.188
2	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	02-OCT-19	A01245	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	163.715.142	163.715.142
3	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-Jul-20	A01243	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	40.142.015	40.142.015
4	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	31-DEC-21	A01247	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	12.395.987	12.395.987
5	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	02-OCT-19	A01244	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	160.051.198	160.051.198
6	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	01-Jul-22	A01248	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9.079.800	9.079.800
7	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	26-MAY-20	A01246	100	Saldo Awal	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	67.677.432	67.677.432
8	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05246	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	12.395.987	(12.395.987)
9	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05242	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	40.142.015	(40.142.015)
10	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05241	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	132.944.188	(132.944.188)
11	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05245	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	67.677.432	(67.677.432)
12	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05247	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	7.215.000	(7.215.000)
13	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05244	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	163.715.142	(163.715.142)
14	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05243	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	160.051.198	(160.051.198)
15	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	01-Jul-22	A01248	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.723.940	(2.723.940)
16	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	20-AUG-21	A01242	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.472.095	(66.472.095)
17	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	02-OCT-19	A01245	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	147.343.626	(147.343.626)
18	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	31-DEC-21	A01247	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.197.995	(6.197.995)
19	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	26-MAY-20	A01246	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	54.141.944	(54.141.944)
20	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	02-OCT-19	A01244	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	144.046.080	(144.046.080)
21	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	28-Jul-20	A01243	100	Saldo Awal	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.099.414	(28.099.414)
22	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05244	305	Koreksi Pencatatan	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	147.343.634	147.343.634
23	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05247	305	Koreksi Pencatatan	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.164.500	2.164.500
24	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05242	305	Koreksi Pencatatan	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	28.099.414	28.099.414
25	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05246	305	Koreksi Pencatatan	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	6.197.999	6.197.999
26	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05245	305	Koreksi Pencatatan	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	54.141.948	54.141.948
27	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05243	305	Koreksi Pencatatan	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	144.046.094	144.046.094
28	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	C05241	305	Koreksi Pencatatan	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	66.472.070	66.472.070
29	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	14.062.194	(14.062.194)

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
30	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	B21243	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	53.878.204	(53.878.204)
31	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	30-Jun-24	ADJ202406001			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	67.940.398	67.940.398
32	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	669.628	669.628
33	1001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	KP	15-Jan-24	B21243	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.971.153	1.971.153
34	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	(1.000.000)
35	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21244	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	(1.000.000)
36	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21249	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	(1.000.000)
37	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B212412	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.646.865	(1.646.865)
38	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21247	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	(1.000.000)
39	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21248	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	(1.000.000)
40	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B212411	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	3.000.000	(3.000.000)
41	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21246	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	(1.000.000)
42	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212423	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.606.643	(2.606.643)
43	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212433	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.479.513	(2.479.513)
44	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212440	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	526.588	(526.588)
45	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212425	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	658.042	(658.042)
46	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212438	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	744.779	(744.779)
47	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212418	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	914.012	(914.012)
48	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212419	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	664.596	(664.596)
49	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212430	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.472.982	(1.472.982)
50	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212454	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.853.267	(1.853.267)
51	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212443	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.205.039	(2.205.039)
52	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212421	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	618.722	(618.722)
53	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212428	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.279.463	(1.279.463)
54	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212417	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.527.337	(1.527.337)
55	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212437	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.460.624	(2.460.624)

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
56	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212446	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.444.986	(2.444.986)
57	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212427	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.060.886	(1.060.886)
58	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212435	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	874.306	(874.306)
59	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212426	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.528.493	(1.528.493)
60	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212450	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.148.021	(2.148.021)
61	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212452	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	3.642.425	(3.642.425)
62	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212455	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.260.765	(2.260.765)
63	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212453	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	5.252.152	(5.252.152)
64	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212441	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.439.421	(2.439.421)
65	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212444	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	737.840	(737.840)
66	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	21-OCT-24	B212458	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	3.001	(3.001)
67	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212436	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	530.443	(530.443)
68	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212442	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	742.466	(742.466)
69	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212416	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	5.070.049	(5.070.049)
70	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212447	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	3.470.731	(3.470.731)
71	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212432	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.767.116	(1.767.116)
72	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212439	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.205.039	(2.205.039)
73	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212445	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.444.986	(2.444.986)
74	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21245	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	(1.000.000)
75	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212456	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	12.705.917	(12.705.917)
76	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212422	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.851.925	(1.851.925)
77	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212429	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	5.088.553	(5.088.553)
78	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	(1.000.000)
79	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212434	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	3.219.666	(3.219.666)
80	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212451	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	3.483.258	(3.483.258)
81	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212449	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	3.393.726	(3.393.726)

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
82	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21243	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	(1.000.000)
83	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212448	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.396.720	(2.396.720)
84	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212457	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	10.205.917	(10.205.917)
85	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212415	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	856.573	(856.573)
86	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212420	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	840.382	(840.382)
87	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B212410	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.000.000	(1.000.000)
88	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	18-Nov-24	B212461	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	3.483.260	(3.483.260)
89	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212424	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	551.645	(551.645)
90	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212431	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	705.458	(705.458)
91	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	25-OCT-24	B212459	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	4	(4)
92	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-Nov-24	B212460	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2	(2)
93	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	25-OCT-24	B04243	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	6.002	6.002
94	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-Nov-24	B04245	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.483.258	3.483.258
95	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	21-OCT-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2	2
96	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-Nov-24	B04244	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	132111	Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4	4
97	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B212414	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	70.760.841	(70.760.841)
98	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B212413	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	14.478.700	(14.478.700)
99	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	019/jb/2024			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	48.225.600	48.225.600
100	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	018/jb/2024			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	12.705.917	12.705.917
101	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	017/jb/2024			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	32.791.039	32.791.039
102	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	28-Jun-24	011/KoreksiNonreval/2024			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	99.886.406	99.886.406
103	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	020/jb/2024			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	10.205.917	10.205.917
104	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B212414	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.614.837	4.614.837
105	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B212413	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	658.123	658.123
106	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	25-OCT-24	B04243	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	600	(600)
107	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-Nov-24	B04245	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	348.326	(348.326)

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
108	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B212412	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	164.686	164.686
109	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21248	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	100.000	100.000
110	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B212410	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	100.000	100.000
111	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212447	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	347.073	347.073
112	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212451	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	348.326	348.326
113	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212445	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	244.499	244.499
114	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212424	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	55.165	55.165
115	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212441	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	243.942	243.942
116	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212446	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	244.499	244.499
117	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212423	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	260.664	260.664
118	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212430	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	147.298	147.298
119	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212440	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	52.659	52.659
120	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212456	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.270.592	1.270.592
121	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212436	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	53.044	53.044
122	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212442	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	74.247	74.247
123	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212425	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	65.804	65.804
124	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212433	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	247.951	247.951
125	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212449	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	339.373	339.373
126	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212431	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	70.546	70.546
127	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212452	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	364.243	364.243
128	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212457	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.020.592	1.020.592
129	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212417	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	152.734	152.734
130	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212419	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	66.460	66.460
131	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212438	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	74.478	74.478
132	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212422	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	185.193	185.193
133	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212426	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	152.849	152.849

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
134	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212428	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	127.946	127.946
135	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	21-OCT-24	B212458	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	300	300
136	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212444	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	73.784	73.784
137	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212437	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	246.062	246.062
138	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21247	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	100.000	100.000
139	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	100.000	100.000
140	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212434	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	321.967	321.967
141	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21243	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	100.000	100.000
142	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212429	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	508.855	508.855
143	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21246	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	100.000	100.000
144	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212416	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	507.005	507.005
145	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212439	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	220.504	220.504
146	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212432	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	176.712	176.712
147	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212450	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	214.802	214.802
148	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212448	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	239.672	239.672
149	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B212411	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	300.000	300.000
150	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212420	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	84.038	84.038
151	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212443	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	220.504	220.504
152	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212455	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	226.077	226.077
153	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21245	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	100.000	100.000
154	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212435	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	87.431	87.431
155	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212427	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	106.089	106.089
156	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212454	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	185.327	185.327
157	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	100.000	100.000
158	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21249	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	100.000	100.000
159	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212453	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	525.215	525.215

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
160	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212421	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	61.872	61.872
161	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	03-Jun-24	B21244	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	100.000	100.000
162	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212415	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	85.657	85.657
163	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	14-AUG-24	B212418	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	91.401	91.401
164	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	18-Nov-24	B212461	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	348.326	348.326
165	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	21-OCT-24	C05241	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	135111	Aset Tetap Renovasi	1.938.822.874	(1.938.822.874)
166	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	01-OCT-24	B04242	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.938.822.874	1.938.822.874
167	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	01-OCT-24	B04242	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	483.764.077	(483.764.077)
168	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	31-DEC-24	C05243	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	6.495.000.000	(6.495.000.000)
169	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	31-DEC-24	031/Koreksi/2024			491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	6.488.531.475	6.488.531.475
170	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	31-DEC-24	030/Koreksi/2024			595112	Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	6.468.525	6.468.525
171	1001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	29-AUG-24	B04244	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	156.000.000	156.000.000
172	1001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	29-AUG-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	41.398.496	41.398.496
173	1001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	29-AUG-24	B04243	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	185.690.000	185.690.000
174	1001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	29-AUG-24	B04242	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	148.000.000	148.000.000
175	1001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	30-Sep-24	900.1.3.10/024/MP/IPDN.26/2024			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	531.088.496	(531.088.496)
176	1001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	29-AUG-24	B04244	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.045.453	(23.045.453)
177	1001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	29-AUG-24	B04243	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.431.475	(27.431.475)
178	1001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	29-AUG-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.115.685	(6.115.685)
179	1001	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	KD	29-AUG-24	B04242	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	96.200.000	(96.200.000)
180	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	15-Nov-84	A01242	100	Saldo Awal	131111	Tanah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.961.498.000	1.961.498.000
181	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	29-Nov-24	B14241	214	Koreksi Susulan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	131111	Tanah	1.961.498.000	(1.961.498.000)
182	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	15-Nov-84	A01241	100	Saldo Awal	131111	Tanah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	60.536.000	60.536.000
183	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	10-Jun-24	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	131111	Tanah	60.536.000	(60.536.000)
184	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	30-Sep-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	7.569.229	(7.569.229)
185	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	30-Sep-24	B21243	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	7.569.229	(7.569.229)

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
186	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	30-Sep-24	B21245	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	7.569.231	(7.569.231)
187	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	30-Sep-24	B21246	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	11.164.837	(11.164.837)
188	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	30-Sep-24	B21244	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	7.569.229	(7.569.229)
189	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	30-Sep-24	000.2.1.1/317/IPDN.22			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	41.441.755	41.441.755
190	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	30-Sep-24	B21245	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	88.014	88.014
191	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	30-Sep-24	B21246	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	146.906	146.906
192	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	30-Sep-24	B21244	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	99.595	99.595
193	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	30-Sep-24	B21243	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	99.595	99.595
194	1001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	KD	30-Sep-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	88.015	88.015
195	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	16-OCT-24	J02241	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.581.510.823	1.581.510.823
196	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-24	4			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	596111	Beban Pelepasan Aset	1.581.510.823	(1.581.510.823)
197	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	16-OCT-24	J02241	912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	790.755.410	(790.755.410)
198	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	31-DEC-24	5			596111	Beban Pelepasan Aset	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	790.755.410	790.755.410
199	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	29-DEC-22	E21241	564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	69.605.305	(69.605.305)
200	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	20-Jun-23	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	20.800.667	(20.800.667)
201	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	19-Jun-23	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134113	Jaringan	10.990.000	(10.990.000)
202	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	30-Sep-24	1			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	63.395.973	63.395.973
203	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	20-Jun-23	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	416.012	416.012
204	1001	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	KD	19-Jun-23	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.236.375	1.236.375
205	1001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	06-AUG-24	B04242	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	60.111.500	60.111.500
206	1001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	30-AUG-24	31082024			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.111.500	(60.111.500)
207	1001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	06-AUG-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	134112	Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	29.970.000	29.970.000
208	1001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	30-AUG-24	30082024			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.970.000	(29.970.000)
209	1001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	06-AUG-24	B04242	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.756.325	(7.756.325)
210	1001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	06-AUG-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	6.785.660	(6.785.660)

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
211	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	25-Jun-24	C05241	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	246.561.303	(246.561.303)
212	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	28-Jun-24	0006/JK-010.03.027210/VI/2024			491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	246.561.303	246.561.303
213	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212411	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	6.036.476	(6.036.476)
214	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212420	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.152.469	(1.152.469)
215	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212414	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	8.085.720	(8.085.720)
216	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212417	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.152.496	(1.152.496)
217	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212413	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.399.505	(1.399.505)
218	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21247	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.594.000	(1.594.000)
219	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21249	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.350.000	(1.350.000)
220	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212418	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.152.496	(1.152.496)
221	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21248	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.548.000	(1.548.000)
222	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21243	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	3.738.380	(3.738.380)
223	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212415	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	4.893.011	(4.893.011)
224	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212419	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.152.496	(1.152.496)
225	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21245	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.594.000	(1.594.000)
226	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21246	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.800.000	(1.800.000)
227	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	4.001.490	(4.001.490)
228	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212421	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.152.500	(1.152.500)
229	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212410	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	4.368.140	(4.368.140)
230	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21244	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	2.109.000	(2.109.000)
231	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212422	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	27	(27)
232	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212412	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.399.505	(1.399.505)
233	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212416	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	132111	Peralatan dan Mesin	1.152.496	(1.152.496)
234	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	30-Sep-24	0007/JK-010.03.027210/IX/2024			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	49.616.707	49.616.707
235	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212410	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	873.628	873.628

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
236	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212415	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	489.301	489.301
237	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21249	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	270.000	270.000
238	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21248	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	309.600	309.600
239	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212411	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.207.295	1.207.295
240	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212417	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	230.499	230.499
241	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212419	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	230.499	230.499
242	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21244	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	421.800	421.800
243	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212414	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	808.572	808.572
244	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212421	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	230.500	230.500
245	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212420	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	230.494	230.494
246	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21247	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	318.800	318.800
247	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212416	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	230.499	230.499
248	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212413	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	279.901	279.901
249	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212418	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	230.499	230.499
250	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212412	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	279.901	279.901
251	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.000.372	1.000.372
252	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21243	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	747.676	747.676
253	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21245	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	318.800	318.800
254	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B21246	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	360.000	360.000
255	1003	27210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	KP	27-Sep-24	B212422	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	6	6
256	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	27-Jun-24	B04244	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	60.028.800	60.028.800
257	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	31-DEC-24	42			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.028.800	(60.028.800)
258	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	27-Jun-24	B04244	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	60.028.800	(60.028.800)
259	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	28-Jun-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	866.984.000	866.984.000
260	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	28-Jun-24	C05241	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134111	Jalan dan Jembatan	866.984.000	(866.984.000)
261	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	28-Jun-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	866.984.000	(866.984.000)

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
262	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	27-Sep-24	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	1.815.694	(1.815.694)
263	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	27-Sep-24	18			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.815.694	1.815.694
264	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	27-Sep-24	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	33.624	33.624
265	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	09-Jul-24	B04242	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133.735.020	133.735.020
266	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	24-Jan-24	B04243	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	49.250.700	49.250.700
267	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	31-DEC-24	41			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133.735.020	(133.735.020)
268	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	31-DEC-24	43			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.250.700	(49.250.700)
269	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	31-DEC-24	51			523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	197.000.000	197.000.000
270	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	30-DEC-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134111	Jalan dan Jembatan	197.000.000	(197.000.000)
271	1006	39729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	KP	30-DEC-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	197.000.000	197.000.000
272	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	19-Feb-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	135111	Aset Tetap Renovasi	47.520.000	(47.520.000)
273	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	10-Jul-24	B21243	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	135111	Aset Tetap Renovasi	17.640.000	(17.640.000)
274	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	26-Apr-24	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	135111	Aset Tetap Renovasi	8.225.000	(8.225.000)
275	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	31-DEC-24	12			491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	73.385.000	73.385.000
276	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	11-Feb-22	A082420	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.188.000	(1.188.000)
277	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	16-Nov-20	A082443	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.540.000	(1.540.000)
278	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	07-Apr-20	A082427	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	525.000	(525.000)
279	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	16-Nov-20	A082444	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.540.000	(1.540.000)
280	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	07-Apr-20	A082431	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	525.000	(525.000)
281	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	26-DEC-22	A082432	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	192.307	(192.307)
282	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	07-Apr-20	A082430	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	525.000	(525.000)
283	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	07-Apr-20	A082438	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.400.000	(4.400.000)
284	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	26-DEC-22	A082434	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	192.307	(192.307)
285	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	15-Feb-23	A082421	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.359.525	(4.359.525)
286	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	07-Apr-20	A082428	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	525.000	(525.000)
287	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	26-DEC-22	A082433	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	192.307	(192.307)

gaf

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
288	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	16-Nov-20	A082441	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.540.000	(1.540.000)
289	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	07-Apr-20	A082437	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.400.000	(4.400.000)
290	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	07-Apr-20	A082439	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.400.000	(4.400.000)
291	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	07-Apr-20	A082440	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.400.000	(4.400.000)
292	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	16-Nov-20	A082445	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.540.000	(1.540.000)
293	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	16-Nov-20	A082442	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.540.000	(1.540.000)
294	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	26-DEC-22	A082435	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	192.307	(192.307)
295	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	26-DEC-22	A082436	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	192.307	(192.307)
296	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	07-Apr-20	A082429	107	Reklasifikasi Masuk	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	525.000	(525.000)
297	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-OCT-20	A082449	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.520.000	1.520.000
298	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-OCT-20	A082446	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	546.000	546.000
299	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	11-Jul-22	A082462	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.897.500	1.897.500
300	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	20-Sep-22	A082470	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.221.278	1.221.278
301	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-OCT-20	A082447	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	546.000	546.000
302	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-Nov-20	A082452	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	546.000	546.000
303	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-Nov-20	A082455	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	546.000	546.000
304	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-OCT-20	A082448	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	546.000	546.000
305	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-Nov-20	A082456	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	546.000	546.000
306	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-Nov-20	A082457	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	540.000	540.000
307	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-Nov-20	A082459	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	540.000	540.000
308	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-Nov-20	A082453	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	546.000	546.000
309	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-Nov-20	A082460	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	540.000	540.000
310	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-Nov-20	A082454	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	546.000	546.000
311	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	11-Feb-22	A082461	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.150.000	3.150.000
312	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-Nov-20	A082450	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	546.000	546.000
313	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-Nov-20	A082451	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	546.000	546.000

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
314	1009	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	KP	06-Nov-20	A082458	107	Reklasifikasi Masuk	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	540.000	540.000
315	1011	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KP	26-Sep-24	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	3.941.675	(3.941.675)
316	1011	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KP	27-Sep-24	4			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.941.675	3.941.675
317	1011	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KP	26-Sep-24	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	303.205	303.205
318	1012	27114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	KD	31-DEC-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	197.965.000	197.965.000
319	1012	27114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	KD	31-DEC-24	013/JP/2024			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	197.965.000	(197.965.000)
320	1012	27114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	KD	31-DEC-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	91.912.322	(91.912.322)
321	1012	27114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	KD	31-DEC-24	B04242	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	192.454.400	192.454.400
322	1012	27114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	KD	31-DEC-24	014/JP/2024			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	192.454.400	(192.454.400)
323	1012	27114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	KD	31-DEC-24	B04242	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	192.454.400	(192.454.400)
324	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	31-OCT-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	79.500.000	79.500.000
325	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	31-OCT-24	1			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79.500.000	(79.500.000)
326	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	31-OCT-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.878.563	(10.878.563)
327	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	31-OCT-24	B04242	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	74.691.000	74.691.000
328	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	31-OCT-24	2			391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	74.691.000	(74.691.000)
329	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	31-OCT-24	B04242	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.469.100	(7.469.100)
330	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	E04241	504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	600.079.682	600.079.682
331	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	C05241	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	55.000.000	(55.000.000)
332	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	E17241	517	Koreksi Pencatatan KDP	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	13.764.400	(13.764.400)
333	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	E17245	517	Koreksi Pencatatan KDP	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	300.000	(300.000)
334	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	E172410	517	Koreksi Pencatatan KDP	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	318.037.630	(318.037.630)
335	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	E17244	517	Koreksi Pencatatan KDP	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	12.867.500	(12.867.500)
336	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	E17246	517	Koreksi Pencatatan KDP	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	127.215.052	(127.215.052)
337	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	E17248	517	Koreksi Pencatatan KDP	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	9.530.500	(9.530.500)
338	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	E17249	517	Koreksi Pencatatan KDP	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	19.400.000	(19.400.000)
339	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	E17242	517	Koreksi Pencatatan KDP	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	10.984.000	(10.984.000)

## RINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dok	Trn BMN	Uraian BMN	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116)
									Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
340	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	E17243	517	Koreksi Pencatatan KDP	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	13.580.600	(13.580.600)
341	1012	27177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	KD	19-Nov-24	E17247	517	Koreksi Pencatatan KDP	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	19.400.000	(19.400.000)
342	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	10-Jun-24	C05242	305	Koreksi Pencatatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	131111	Tanah	60.536.000	(60.536.000)
343	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	10-Jun-24	B04241	204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	131111	Tanah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	60.536.000	60.536.000
344	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	01-Mar-24	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	131111	Tanah	67.445.000.000	(67.445.000.000)
345	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	15-Nov-84	A01241	100	Saldo Awal	131111	Tanah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	67.445.000.000	67.445.000.000
346	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	29-Nov-24	B14242	214	Koreksi Susulan	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	198.840.000	198.840.000
347	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	29-Nov-24	B14241	214	Koreksi Susulan	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	198.581.000	198.581.000
348	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	12-Sep-22	B09241	209	Koreksi Manual	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	198.840.000	198.840.000
349	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	12-Sep-22	B09243	209	Koreksi Manual	133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	198.581.000	198.581.000
350	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	29-Nov-24	B09244	209	Koreksi Manual	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	198.581.000	(198.581.000)
351	1012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	KD	29-Nov-24	B09245	209	Koreksi Manual	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	198.840.000	(198.840.000)
352	1012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	26-Mar-24	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	129.307.587	(129.307.587)
353	1012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	30-Jun-24	9			425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	129.307.587	129.307.587
354	1012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	26-Mar-24	B21241	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.085.606	2.085.606
355	1012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	26-Mar-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134111	Jalan dan Jembatan	24.346.000	(24.346.000)
356	1012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	30-Sep-24	10			425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	24.346.000	24.346.000
357	1012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KD	26-Mar-24	B21242	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	24.346.000	24.346.000
<b>TOTAL</b>														<b>(1.285.557.409)</b>



## LAMPIRAN XXX

## RINCIAN KOREKSI LAIN-LAIN

## RINCIAN KOREKSI LAIN-LAIN

LAMPIRAN XXX

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dokumen	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Lainnya (391119)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
1	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45343	00004/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
2	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45343	00003/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	15.750.000	15.750.000
3	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45412	00001/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	3.750	3.750
4	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45444	00002/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	9.375.000	9.375.000
5	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45475	00036/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	1.250.000	1.250.000
6	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00014/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
7	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00015/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
8	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00019/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	1.000.000	1.000.000
9	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00021/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
10	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00024/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
11	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00011/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
12	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00013/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
13	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00009/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
14	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00020/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	1.000.000	1.000.000
15	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00031/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	750.000	750.000
16	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00012/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
17	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00037/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
18	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00026/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
19	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00027/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
20	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00032/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	1.750.000	1.750.000
21	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00034/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	750.000	750.000
22	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00005/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	26.850.000	26.850.000
23	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00008/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	15.750.000	15.750.000
24	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00007/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
25	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00018/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	1.000.000	1.000.000
26	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00028/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
27	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00023/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	1.000.000	1.000.000
28	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00017/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
29	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00029/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
30	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00006/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	7.500.000	7.500.000
31	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00033/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	750.000	750.000

gaf

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dokumen	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Lainnya (391119)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
32	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00035/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	1.000.000	1.000.000
33	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00025/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	1.000.000	1.000.000
34	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00016/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.000.000	2.000.000
35	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00022/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.750.000	2.750.000
36	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00010/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	22.500	22.500
37	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00030/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	750.000	750.000
38	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45496	00041/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	3.750	3.750
39	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45504	00038/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	3.750	3.750
40	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45560	00039/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	15.750.000	15.750.000
41	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	07-AUG-24	00040/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	15.000.000	15.000.000
42	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00044/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	32.500	32.500
43	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00053/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
44	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00055/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
45	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00049/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	650.000	650.000
46	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00061/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
47	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00047/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	32.500	32.500
48	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00042/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	32.500	32.500
49	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00065/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
50	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00046/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	32.500	32.500
51	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00060/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	4.250.000	4.250.000
52	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00054/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	4.250.000	4.250.000
53	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00043/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	32.500	32.500
54	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00052/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	4.250.000	4.250.000
55	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00051/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
56	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00058/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	525.000	525.000
57	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00059/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	6.500.000	6.500.000
58	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00057/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
59	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00050/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	650.000	650.000
60	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00056/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	2.625.000	2.625.000
61	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00066/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	1.750.000	1.750.000
62	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00048/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	650.000	650.000
63	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00062/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000

gaf

No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dokumen	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Lainnya (391119)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
64	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00067/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
65	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00045/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	391119	Koreksi Lainnya	2.150.000	2.150.000
66	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00063/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	391119	Koreksi Lainnya	3.250.000	3.250.000
67	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00064/KOR/448302/2024	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	391119	Koreksi Lainnya	2.625.000	2.625.000
68	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45343	00003/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.750.000	(15.750.000)
69	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45343	00004/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
70	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45412	00001/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	750.000	(750.000)
71	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45444	00002/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	18.750.000	(18.750.000)
72	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45475	00036/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.250.000	(1.250.000)
73	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00018/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.000.000	(1.000.000)
74	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00032/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.750.000	(1.750.000)
75	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00012/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000.000	(2.000.000)
76	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00007/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
77	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00026/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000.000	(2.000.000)
78	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00009/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
79	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00005/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	26.850.000	(26.850.000)
80	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00019/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.000.000	(1.000.000)
81	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00031/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	750.000	(750.000)
82	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00006/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.000.000	(15.000.000)
83	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00014/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000.000	(2.000.000)
84	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00010/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.500.000	(4.500.000)
85	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00034/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	750.000	(750.000)
86	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00008/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.750.000	(15.750.000)
87	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00024/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000.000	(2.000.000)
88	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00015/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000.000	(2.000.000)
89	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00037/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000.000	(2.000.000)
90	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00022/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.750.000	(2.750.000)
91	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00021/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000.000	(2.000.000)
92	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00030/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	750.000	(750.000)
93	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00025/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.000.000	(1.000.000)
94	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00017/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.000.000	(2.000.000)
95	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45476	00033/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	750.000	(750.000)

gaf



No	Kode Eselon I	Kode Satker	Uraian Satker	Kode Dekon	Tanggal Dok	Nomor Dokumen	Debet		Kredit		Rupiah Jurnal	Saldo Akun Koreksi Lainnya (391119)
							Kode Akun	Uraian Akun	Kode Akun	Uraian Akun		
128	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00055/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
129	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00067/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
130	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00063/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
131	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00051/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
132	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00045/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	21.500.000	(21.500.000)
133	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00057/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
134	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	16-AUG-24	00042/KOR/448302/2024	391119	Koreksi Lainnya	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.500.000	(6.500.000)
135	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45565	15	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	718.700.950	718.700.950
136	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45565	15	391119	Koreksi Lainnya	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	718.700.950	(718.700.950)
137	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45473	016/Koreksi lainnya/2024	594211	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	391119	Koreksi Lainnya	67.139.500	67.139.500
138	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45473	016/Koreksi lainnya/2024	391119	Koreksi Lainnya	594211	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	67.139.500	(67.139.500)
139	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45473	016/Koreksi lainnya/2024	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	67.139.500	(67.139.500)
140	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45473	016/Koreksi lainnya/2024	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	67.139.500	67.139.500
141	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45565	15	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	718.700.950	(718.700.950)
142	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45565	15	391119	Koreksi Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	718.700.950	718.700.950
143	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		01-Jan-24	005/01/2024	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	391119	Koreksi Lainnya	28.469.000	28.469.000
144	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		01-Jan-24	006/01/2024	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	391119	Koreksi Lainnya	133.320.202	133.320.202
145	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45473	014/jbkekurangan uang makan/2024	391119	Koreksi Lainnya	511129	Belanja Uang Makan PNS	28.469.000	(28.469.000)
146	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45473	15/jb/2024	391119	Koreksi Lainnya	522111	Belanja Langganan Listrik	133.320.202	(133.320.202)
147	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	31-DEC-24	024/koreksi/2024	391119	Koreksi Lainnya	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	113.247.934	(113.247.934)
148	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		01-Jan-24	007/01/2024	219211	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka	391119	Koreksi Lainnya	113.247.934	113.247.934
149	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		01-Jan-24	002/01/2024	391119	Koreksi Lainnya	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	290.000	(290.000)
150	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	31-DEC-24	025/koreksi/2024	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	391119	Koreksi Lainnya	290.000	290.000
151	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		01-Jan-24	004/01/2024	391119	Koreksi Lainnya	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	3.582.673	(3.582.673)
152	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	45473	013/jb/2024	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	391119	Koreksi Lainnya	3.582.673	3.582.673
153	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	KP	31-DEC-24	017/12/2024	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	391119	Koreksi Lainnya	57.335.000	57.335.000
154	1001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		01-Jan-24	003/01/2024	391119	Koreksi Lainnya	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	57.335.000	(57.335.000)
155	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	KD	45446	00002/KOR/677010/2024	391119	Koreksi Lainnya	115212	Piutang Lainnya	408.906.795	(408.906.795)
156	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	KD	45446	00001/KOR/677010/2024	391119	Koreksi Lainnya	115212	Piutang Lainnya	21.060.000	(21.060.000)
157	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	KD	45446	2,02407E+15	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	391119	Koreksi Lainnya	21.060.000	21.060.000
158	1001	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	KD	45446	2,02407E+15	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	391119	Koreksi Lainnya	408.906.795	408.906.795
159	1001	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	KD	13-DEC-24	13122024	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	391119	Koreksi Lainnya	3.734.500	3.734.500
160	1005	28830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	KD	31-DEC-24	09/KEU/I/2025	391119	Koreksi Lainnya	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.306.000	(5.306.000)
<b>TOTAL</b>											<b>5.285.221.758</b>	<b>(151.375.250)</b>

gaf



## LAMPIRAN XXXI

# RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK

## RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Selisih Absolut	Selisih Neto
1	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	117199	Persediaan Lainnya	183.458.454	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	183.458.454	-	-	-
2	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	131111	Tanah	2.577.683.998.000	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	2.577.683.998.000	-	-	-
3	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	132111	Peralatan dan Mesin	16.386.204.108	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	16.386.204.108	-	-	-
4	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	133111	Gedung dan Bangunan	89.384.087.872	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	89.384.087.872	-	-	-
5	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	134111	Jalan dan Jembatan	2.611.678.000	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	2.611.678.000	-	-	-
6	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	134112	Irigasi	2.160.986.040	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	2.160.986.040	-	-	-
7	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	134113	Jaringan	118.693.752	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	118.693.752	-	-	-
8	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	135121	Aset Tetap Lainnya	1.486.127.146	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	1.486.127.146	-	-	-
9	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.962.000.038)	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	(14.962.000.038)	-	-	-
10	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(26.771.204.516)	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	(26.771.204.516)	-	-	-
11	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.611.678.000)	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	(2.611.678.000)	-	-	-
12	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1.078.028.264)	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	(1.078.028.264)	-	-	-
13	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(52.574.188)	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	(52.574.188)	-	-	-
14	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	29.975.000	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	29.975.000	-	-	-
15	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.768.930.811	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	2.768.930.811	-	-	-
16	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	18.898.000	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	18.898.000	-	-	-
17	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(2.473.293.704)	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	(2.473.293.704)	-	-	-
18	'01001	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(18.898.000)	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	(18.898.000)	-	-	-
19	'01001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	131111	Tanah	60.536.000	'01012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	60.536.000	-	-	-
20	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	132111	Peralatan dan Mesin	7.840.660.000	'01002	'027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	7.840.660.000	-	-	-
21	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(791.461.000)	'01002	'027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	(791.461.000)	-	-	-
22	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	162151	Software	499.775.000	'01002	'027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	499.775.000	-	-	-
23	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(62.471.875)	'01002	'027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	(62.471.875)	-	-	-
24	'01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	133111	Gedung dan Bangunan	-	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	29.746.446	(29.746.446)	29.746.446	-
25	'01007	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	135111	Aset Tetap Renovasi	29.746.446	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	-	29.746.446	29.746.446	-
26	'01012	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	132111	Peralatan dan Mesin	472.000.000	'01012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	472.000.000	-	-	-
27	'01012	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(269.714.287)	'01012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	(269.714.287)	-	-	-
28	'01012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	133111	Gedung dan Bangunan	7.246.819.000	'01012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.246.819.000	-	-	-
29	'01012	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.161.049.387)	'01012	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	(1.161.049.387)	-	-	-
30	'01012	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	131111	Tanah	67.445.000.000	'01001	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	67.445.000.000	-	-	-

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Selisih Absolut	Selisih Neto
31	'03305	631097	DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS	135111	Aset Tetap Renovasi	1.938.822.874	'01001	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	1.938.822.874	-	-	1.938.822.874
32	'05904	664262	DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	162151	Software	8.174.449.230	'01003	'027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	8.174.449.230	-	-	8.174.449.230
33	'05904	664262	DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(6.130.836.924)	'01003	'027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	(6.130.836.924)	-	-	(6.130.836.924)
<b>TOTAL</b>						<b>2.730.157.635.550</b>	<b>TOTAL</b>			<b>2.730.157.635.550</b>	-	<b>59.492.892</b>	<b>3.982.435.180</b>

gaf



## LAMPIRAN XXXII

# REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
<b>ADWIL</b>											
1	01004	065129	DK	BAPPEDA PROPINSI NAD	-	17.500.000	(17.500.000)	-	-	-	P.C UNIT
2	01004	080054	TP	DINAS PRASJAL DAN TARUKIM PROPINSI SUMATERA BARAT	1.809.502.117	-	-	-	-	1.809.502.117	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
3	01004	130017	TP	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (TP)	1.575.601.236	1.629.744.712	(1.629.744.712)	-	-	1.575.601.236	INSTALASI PLTS KAPASITAS KECIL RAK KAYU TELEVISI PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA LAINNYA
4	01004	160080	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	-	14.500.000	(14.500.000)	-	-	-	P.C UNIT
5	01004	170090	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
6	01004	170420	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	-	795.460.000	(795.460.000)	-	-	-	SEPEDA MOTOR PERAHU PENUMPANG UNIT TRANCEIVER SSB PORTABLE P.C UNIT PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
7	01004	170520	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	-	18.000.000	(18.000.000)	-	-	-	SEPEDA MOTOR
8	01004	240084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
9	01004	240149	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KUPANG	2.837.269.543	248.875.000	(248.875.000)	-	-	2.837.269.543	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG POS JAGA PERMANEN RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A SEMI PERMANEN RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN BANGUNAN DERMAGA SEPEDA MOTOR UNIT TRANCEIVER SsB PORTABLE P.C UNIT PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
10	01004	240260	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. B E L U	291.825.605	174.900.000	(174.900.000)	-	-	291.825.605	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)
11	01004	240342	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	762.374.061	175.000.000	(175.000.000)	-	-	762.374.061	GEDUNG POS JAGA PERMANEN RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE B PERMANEN TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI NEGARA MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)
12	01004	240351	TP	BAPPEDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	367.994.675	-	-	-	-	367.994.675	GEDUNG POS JAGA PERMANEN
13	01004	250026	TP	BADAN PERBATASAN KERJASAMA DAERAH PROVINSI PAPUA (TP)	567.007.449	1.074.129.737	(1.074.129.737)	-	-	567.007.449	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) LAINNYA TELEVISI HANDY TALKY (HT) ALAT KOMUNIKASI RASIO SsB LAINNYA STELATH DIGITAL REPEATER RADIO LINK PORTABLE REPORTER LINK PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA LAINNYA SWITCHER/MENARA ANTENA LAINNYA PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF STATIONARY UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS)
14	01004	250084	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
16	01004	251418	TP	BADAN KESBANG DAN LINMAS KAB. ASMAT	5.436.558.750	-	-	-	-	5.436.558.750	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN
17	01004	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	197.937.405	-	-	-	-	197.937.405	GEDUNG POS JAGA PERMANEN BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA LAINNYA
18	01004	251907	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	3.917.569.440	-	-	-	-	3.917.569.440	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
19	01004	255161	TP	BADAN PENGELOLA PERBATASAN KOTA JAYAPURA	797.747.050	-	-	-	-	797.747.050	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
21	01004	280067	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	-	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
22	01004	320052	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	-	26.895.000	(26.895.000)	-	-	-	STABILIZER/UPS P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
<b>PEMDES</b>											
23	01005	239250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	144.164.028	-	-	-	-	144.164.028	P.C UNIT
24	01005	029367	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	166.000.000	-	-	-	-	166.000.000	BANGUNAN PASAR/RAISER IKAN HIAS
25	01005	029367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUKABUMI	-	9.775.000	(9.775.000)	-	-	-	P.C UNIT
26	01005	029376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BEKASI	499.000	9.800.000	(9.800.000)	-	-	499.000	P.C UNIT PENJEPIT KERTAS ORDNER DAN MAP KERTAS HVS
27	01005	029436	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TASIKMALAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
28	01005	029472	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
29	01005	029472	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAJALENGKA	-	10.120.000	(10.120.000)	-	-	-	P.C UNIT
30	01005	029478	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANDUNG BARAT	-	9.982.500	(9.982.500)	-	-	-	P.C UNIT
31	01005	039438	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	170.461.250	-	-	-	-	170.461.250	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
32	01005	039438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
33	01005	039443	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KENDAL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
34	01005	039452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DEMAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
35	01005	039465	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEKALONGAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
36	01005	039470	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BATANG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
37	01005	039480	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEGAL	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
38	01005	039490	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	161.028.000	-	-	-	-	161.028.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
39	01005	039490	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PATI	-	10.125.000	(10.125.000)	-	-	-	P.C UNIT
40	01005	039500	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUDUS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
41	01005	039504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PEMALANG	-	10.145.000	(10.145.000)	-	-	-	P.C UNIT
42	01005	039514	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	164.716.820	-	-	-	-	164.716.820	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
43	01005	039514	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. REMBANG	-	10.147.500	(10.147.500)	-	-	-	P.C UNIT
44	01005	039519	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
45	01005	039530	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	37.850	9.900.000	(9.900.000)	-	-	37.850	P.C UNIT KERTAS HVS
46	01005	039538	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	79.444.800	-	-	-	-	79.444.800	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
47	01005	039538	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. CILACAP	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
48	01005	039546	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	82.910.360	-	-	-	-	82.910.360	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
49	01005	039546	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
50	01005	039554	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANJARNEGARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
51	01005	039562	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAGELANG	-	9.320.000	(9.320.000)	-	-	-	P.C UNIT
52	01005	039568	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TEMANGGUNG	-	9.665.000	(9.665.000)	-	-	-	P.C UNIT
53	01005	039579	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. WONOSOBO	-	9.923.500	(9.923.500)	-	-	-	P.C UNIT
54	01005	039599	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
55	01005	039605	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	74.629.350	-	-	-	-	74.629.350	PASAR DESA
56	01005	039605	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KLATEN	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
57	01005	039612	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali	-	9.700.000	(9.700.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
58	01005	039621	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SRAGEN	302.500	-	-	-	-	302.500	BUKU TULIS ORDNER DAN MAP ALAT TULIS KANTOR LAINNYA KERTAS HVS
59	01005	039626	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUKOHARJO	135.000	-	-	-	-	135.000	ATK
60	01005	039639	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. WONOGIRI	134.000	10.065.000	(10.065.000)	-	-	134.000	P.C UNIT KERTAS HVS
61	01005	049147	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	417.809.252	-	-	-	-	417.809.252	KANTOR DESA/PASAR DESA
62	01005	049147	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTUL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
63	01005	049173	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN & KB KAB. KULONPROGO	-	10.140.000	(10.140.000)	-	-	-	P.C UNIT
64	01005	059456	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GRESIK	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
65	01005	059464	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	82.641.440	-	-	-	-	82.641.440	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
66	01005	059464	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MOJOKERTO	-	10.162.900	(10.162.900)	-	-	-	P.C UNIT
67	01005	059478	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	-	10.105.000	(10.105.000)	-	-	-	P.C UNIT
68	01005	059491	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. JOMBANG	160.704.000	-	-	-	-	160.704.000	KANTOR DESA
69	01005	059498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. SUMENEP	-	9.750.000	(9.750.000)	-	-	-	P.C UNIT
70	01005	059527	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA KAB. BANYUWANGI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
71	01005	059556	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PROBOLINGGO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
72	01005	059560	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LUMAJANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
73	01005	059586	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGANJUK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
74	01005	059613	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MADIUN	165.438.090	-	-	-	-	165.438.090	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
75	01005	059620	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	81.331.700	-	-	-	-	81.331.700	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
76	01005	059620	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. NGAWI	-	9.915.000	(9.915.000)	-	-	-	P.C UNIT
77	01005	059623	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	829.360.823	-	-	-	-	829.360.823	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
78	01005	059623	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. MAGETAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
79	01005	059630	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KAB. PONOROGO	172.474.830	-	-	-	-	172.474.830	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
80	01005	059652	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB KAB. TUBAN	-	9.780.000	(9.780.000)	-	-	-	P.C UNIT
81	01005	059661	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LAMONGAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
82	01005	069280	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	80.776.430	-	-	-	-	80.776.430	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN
83	01005	069280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BESAR	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
84	01005	069284	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. PIDIE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
85	01005	069290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH UTARA	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
86	01005	069303	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
87	01005	069309	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
88	01005	069321	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ACEH TENGGARA	-	10.100.000	(10.100.000)	-	-	-	P.C UNIT
89	01005	069328	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIMEULEU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
90	01005	069334	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. ACEH SINGKIL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
91	01005	069345	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KAB. ACEH BARAT DAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
92	01005	069352	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. GAYO LUES	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
93	01005	069356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA GAMPONG KAB. ACEH JAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
94	01005	069358	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. NAGAN RAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
95	01005	069362	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. ACEH TAMIANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
96	01005	069367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA & PERLINDUNGAN PEREMPUAN KAB. BENER MERIAH	75.000	10.000.000	(10.000.000)	-	-	75.000	P.C UNIT
											KERTAS HVS
97	01005	069371	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. PIDIE JAYA	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
98	01005	079353	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KARO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
99	01005	079359	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	82.165.850	-	-	-	-	82.165.850	PASAR DESA
100	01005	079359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KELURAHAN KAB. LANGKAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
101	01005	079369	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	83.000.000	-	-	-	-	83.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
102	01005	079369	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH	-	10.160.000	(10.160.000)	-	-	-	P.C UNIT
103	01005	079376	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH NAGORI KAB. SIMALUNGUN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
104	01005	079383	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN KAB. LABUHAN BATU	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
105	01005	079390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DAIRI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
106	01005	079393	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. TAPANULI UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
107	01005	079395	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
108	01005	079413	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KAB. NIAS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
109	01005	079425	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA (BPMPOD) KAB. SAMOSIR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
110	01005	079438	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	165.751.000	-	-	-	-	165.751.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
111	01005	079438	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANDAILING NATAL	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
112	01005	079444	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PAK-PAK BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
113	01005	079447	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
114	01005	079450	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOBA SAMOSIR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
115	01005	079457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERDANG BEDAGAI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
116	01005	079459	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATUBARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
117	01005	079463	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PADANG LAWAS	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
118	01005	079471	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU SELATAN	-	9.436.000	(9.436.000)	-	-	-	P.C UNIT
119	01005	079473	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	494.680.000	-	-	-	-	494.680.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
											GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
120	01005	079473	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LABUHAN BATU UTARA	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
121	01005	089289	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LIMA PULUH KOTA	-	9.949.995	(9.949.995)	-	-	-	P.C UNIT
122	01005	089298	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
101	01005	089305	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	162.530.600	-	-	-	-	162.530.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
102	01005	089305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. PADANG PARIAMAN	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
103	01005	089313	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN NAGARI, KELUARGA BERENCANA & PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN KAB. PESISIR SELATAN	-	10.155.000	(10.155.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
104	01005	089319	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANAH DATAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
105	01005	089338	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	82.116.050	-	-	-	-	82.116.050	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
106	01005	089338	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. DHARMAS RAYA	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
107	01005	089345	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SOLOK SELATAN	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
108	01005	089356	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
109	01005	099452	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	161.747.080	-	-	-	-	161.747.080	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
110	01005	099452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KAMPAR	-	10.157.960	(10.157.960)	-	-	-	P.C UNIT
111	01005	099457	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKALIS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
112	01005	099476	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	157.805.820	-	-	-	-	157.805.820	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
113	01005	099476	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. INDRAGIRI HILIR	-	9.845.000	(9.845.000)	-	-	-	P.C UNIT
114	01005	099484	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	164.489.400	-	-	-	-	164.489.400	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
115	01005	099484	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PELALAWAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
116	01005	099498	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ROKAN HULU	-	10.163.000	(10.163.000)	-	-	-	P.C UNIT
117	01005	099504	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	159.489.000	-	-	-	-	159.489.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
118	01005	099504	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIAK	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
119	01005	099510	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	78.282.280	-	-	-	-	78.282.280	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
120	01005	099510	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KUANTAN SINGINGI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
121	01005	109222	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	152.031.100	-	-	-	-	152.031.100	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BANGUNAN PASAR IKAN HIGIENIS/PIH
122	01005	109222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BATANGHARI	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
123	01005	109234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
124	01005	109238	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO BUNGO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
125	01005	109247	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SAROLANGUN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
126	01005	109254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KERINCI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
127	01005	109269	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
128	01005	109272	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	173.071.600	-	-	-	-	173.071.600	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
129	01005	109272	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TEBO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
130	01005	109280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARO JAMBI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
131	01005	119239	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI BANYUASIN	-	9.994.000	(9.994.000)	-	-	-	P.C UNIT
132	01005	119245	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. OGAN KOMERING ULU	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
133	01005	119252	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	72.658.200	-	-	-	-	72.658.200	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
134	01005	119252	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUARA ENIM	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
135	01005	119265	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUSI RAWAS	170.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	170.000	P.C UNIT
136	01005	119274	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
137	01005	119281	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANYUASIN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
138	01005	119288	UB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. OKU TIMUR	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
139	01005	119294	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	171.565.320	-	-	-	-	171.565.320	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
140	01005	119294	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OKU SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
141	01005	119299	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. EMPAT LAWANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
142	01005	129235	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG	71.678.000	-	-	-	-	71.678.000	ALAT TULIS ORDNER DAN MAP PENGGARIS ISI STAPLES BARANG CETAKAN KERTAS HVS BERBAGAI KERTAS CD/DVD BAHAN KOMPUTER LAINNYA
143	01005	129247	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	245.032.600	-	-	-	-	245.032.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
144	01005	129247	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
145	01005	129253	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN BINA PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. LAMPUNG TENGAH	-	9.976.000	(9.976.000)	-	-	-	P.C UNIT
146	01005	129266	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON KAB. LAMPUNG BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
147	01005	129270	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	82.087.000	-	-	-	-	82.087.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
148	01005	129270	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN KAB. TULANG BAWANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
149	01005	129288	UB	KANTOR PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LAMPUNG TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
150	01005	129292	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAY KANAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
151	01005	129296	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	233.945.280	-	-	-	-	233.945.280	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPRAS/PASAR LAINNYA
152	01005	129296	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PESAWARAN	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
153	01005	139250	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALBAR	-	59.975.000	(59.975.000)	-	-	-	UPS (UNIT POWER SUPPLY) P.C UNIT LAPTOP PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
154	01005	139267	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	82.917.000	-	-	-	-	82.917.000	BANGUNAN INDUSTRI LAINNYA
155	01005	139267	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SANGGAU	754.500	10.165.000	(10.165.000)	-	-	754.500	P.C UNIT KERTAS HVS
156	01005	139274	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	159.870.510	-	-	-	-	159.870.510	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
157	01005	139274	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SINTANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
158	01005	139285	TP	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	75.558.620	-	-	-	-	75.558.620	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
159	01005	139285	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PONTIANAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
160	01005	139295	UB	BADAN PEMBERDAYAAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
161	01005	139313	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	163.443.600	-	-	-	-	163.443.600	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
162	01005	139313	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKAYANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
163	01005	139325	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MELAWI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
164	01005	139328	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT KESATUAN BANGSA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SEKADAU	-	9.965.000	(9.965.000)	-	-	-	P.C UNIT
165	01005	139330	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA	-	10.015.000	(10.015.000)	-	-	-	P.C UNIT
166	01005	139335	TP	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA	602.913.780	-	-	-	-	602.913.780	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
167	01005	139335	UB	BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. KUBU RAYA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
168	01005	149235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
169	01005	149242	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO SELATAN	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
170	01005	149257	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KOTAWARINGIN BARAT	80.750.451	-	-	-	-	80.750.451	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
171	01005	149257	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KOTAWARINGIN BARAT	-	9.880.000	(9.880.000)	-	-	-	P.C UNIT
172	01005	149267	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SERUYAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
173	01005	149270	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SUKAMARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
174	01005	149278	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GUNUNG MAS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
175	01005	149285	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PULANG PISAU	-	9.750.000	(9.750.000)	-	-	-	P.C UNIT
176	01005	149296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO TIMUR	2.901.500	9.950.000	(9.950.000)	-	-	2.901.500	P.C UNIT
177	01005	159202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANJAR	225.500	9.790.000	(9.790.000)	-	-	225.500	P.C UNIT KERTAS HVS
178	01005	159214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAPIN	1.470.850	10.165.000	(10.165.000)	-	-	1.470.850	P.C UNIT KERTAS HVS
179	01005	159219	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
180	01005	159224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI TENGAH	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
181	01005	159240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOTA BARU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
182	01005	159245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HULU SUNGAI UTARA	-	9.700.000	(9.700.000)	-	-	-	P.C UNIT
183	01005	159250	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANAH BUMBU	82.709.500	-	-	-	-	82.709.500	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
184	01005	159255	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KB KAB. BALANGAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
185	01005	169192	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PASER	-	9.999.900	(9.999.900)	-	-	-	P.C UNIT
186	01005	169196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BULUNGAN	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
187	01005	169202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. BERAU	-	9.850.000	(9.850.000)	-	-	-	P.C UNIT
188	01005	169206	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	140.722.920	-	-	-	-	140.722.920	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
189	01005	169206	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NUNUKAN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
190	01005	169211	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. KUTAI BARAT	-	9.125.000	(9.125.000)	-	-	-	P.C UNIT
191	01005	169218	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PENAJAM PASER UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
192	01005	169223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KUTAI KARTANEGARA	87.547.620	-	-	-	-	87.547.620	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPRASIPASAR LAINNYA SALURAN DRAINASE
193	01005	169226	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TANA TIDUNG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
194	01005	179275	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
195	01005	179280	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. MINAHASA TENGGARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
196	01005	179283	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
197	01005	179296	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	468.985.950	-	-	-	-	468.985.950	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
198	01005	179296	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
199	01005	189223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
200	01005	189223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POSO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
201	01005	189229	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	242.270.570	-	-	-	-	242.270.570	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
202	01005	189229	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. DONGGALA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
203	01005	189234	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TOLI-TOLI	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
204	01005	189240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
205	01005	189243	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUOL	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
206	01005	189249	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	162.000.000	-	-	-	-	162.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR SEMI PERMANEN
207	01005	189249	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MOROWALI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
208	01005	189254	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
209	01005	189260	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	995.592.470	-	-	-	-	995.592.470	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
210	01005	189260	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PARIGI MOUTONG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
211	01005	189271	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIGI	82.680.450	-	-	-	-	82.680.450	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
212	01005	199398	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PINRANG	178.750	9.750.000	(9.750.000)	-	-	178.750	P.C UNIT
213	01005	199407	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GOWA	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
214	01005	199415	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	162.893.000	-	-	-	-	162.893.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
215	01005	199415	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAJO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
216	01005	199421	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	83.000.000	-	-	-	-	83.000.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
217	01005	199421	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BONE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
218	01005	199430	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG KAB. TANA TORAJA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
219	01005	199442	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	149.400.000	-	-	-	-	149.400.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
220	01005	199442	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
221	01005	199452	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LUWU	55.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	55.000	P.C UNIT
222	01005	199488	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BANTAENG	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
223	01005	199499	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. JENEPONTO	265.000	10.165.000	(10.165.000)	-	-	265.000	P.C UNIT
224	01005	199508	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
225	01005	199515	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAKALAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
226	01005	199522	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. BARRU	-	10.115.000	(10.115.000)	-	-	-	P.C UNIT
227	01005	199530	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	82.253.000	-	-	-	-	82.253.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
228	01005	199530	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SIDENRENG RAPPANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
229	01005	199542	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
230	01005	199560	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ENREKANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
231	01005	199570	UB	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara	840.500	10.115.000	(10.115.000)	-	-	840.500	P.C UNIT KERTAS HVS
232	01005	199574	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN DESA KAB. LUWU TIMUR	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
233	01005	199578	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TORAJA UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
234	01005	209209	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BUTON	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
235	01005	209212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MUNA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
236	01005	209219	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOLAKA	157.950.000	-	-	-	-	157.950.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
237	01005	209219	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOLAKA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
238	01005	209227	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	82.975.930	-	-	-	-	82.975.930	BANGUNAN PASAR/RAISER IKAN HIAS
239	01005	209227	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE SELATAN	-	9.950.000	(9.950.000)	-	-	-	P.C UNIT
240	01005	209234	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. WAKATOBİ	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
241	01005	209239	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KOLAKA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
242	01005	209244	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	327.489.230	-	-	-	-	327.489.230	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR LAINNYA
243	01005	209244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
244	01005	209245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KONAWE UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
245	01005	209250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BUTON UTARA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
246	01005	219188	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
247	01005	219194	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
248	01005	219208	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. KEPULAUAN ARU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
249	01005	219214	UB	BAGIAN KESRA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA KAB. SERAM BAGIAN BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
250	01005	219217	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	173.238.430	-	-	-	-	173.238.430	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
251	01005	219217	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
252	01005	219222	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BURU SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
253	01005	229177	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BULELENG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
254	01005	229189	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KLUNGKUNG	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
255	01005	229193	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. GIANJAR	-	7.160.000	(7.160.000)	-	-	-	P.C UNIT
256	01005	229223	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	418.821.685	-	-	-	-	418.821.685	PAS
257	01005	229223	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN	-	9.800.000	(9.800.000)	-	-	-	P.C UNIT
258	01005	239244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. LOMBOK BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
259	01005	239250	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LOMBOK TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
260	01005	239273	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA	684.538.904	-	-	-	-	684.538.904	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
261	01005	239281	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. DOMPU	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
262	01005	239290	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. SUMBAWA BARAT	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
263	01005	239291	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
264	01005	249309	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	86.670.000	-	-	-	-	86.670.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
265	01005	249309	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. KUPANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
266	01005	249318	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. BELU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
267	01005	249325	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TIMOR TENGAH UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
268	01005	249335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. ALOR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
269	01005	249344	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SIKKA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
270	01005	249350	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. FLORES TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
271	01005	249357	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. ENDE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
272	01005	249361	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. NGADA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
273	01005	249367	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI	-	8.665.000	(8.665.000)	-	-	-	P.C UNIT
274	01005	249377	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SUMBA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
275	01005	249384	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
276	01005	249390	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
277	01005	249395	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO	165.422.652	-	-	-	-	165.422.652	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
278	01005	249399	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI BARAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
279	01005	249401	UB	BPMD, BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KB & KESBANG KAB. NAGEKEO	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
280	01005	249405	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
281	01005	249409	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. SUMBA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
282	01005	249414	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MANGGARAI TIMUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
283	01005	259277	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. YAPEN WAROPEN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
284	01005	259291	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
285	01005	259305	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PANIAI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
286	01005	259312	UB	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. PUNCAK JAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
287	01005	259331	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN KAB. ASMAT	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
288	01005	259335	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. BOVEN DIGOEL	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
289	01005	259339	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. SARMI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
290	01005	259345	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. KEEROM	82.834.000	-	-	-	-	82.834.000	PASAR DESA

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
291	01005	259354	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MAMBERAMO RAYA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
292	01005	259359	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB. WAROPEN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
293	01005	259363	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. YAHUKIMO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
294	01005	259369	UB	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
295	01005	269204	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
296	01005	269204	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BENGKULU UTARA	-	10.065.000	(10.065.000)	-	-	-	P.C UNIT
297	01005	269214	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	78.112.130	-	-	-	-	78.112.130	P.C UNIT
298	01005	269214	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BENGKULU SELATAN	-	9.970.000	(9.970.000)	-	-	-	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
299	01005	269224	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG	169.009.580	-	-	-	-	169.009.580	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
300	01005	269224	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. REJANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
301	01005	269227	UB	BADAN PMD, PEREMPUAN DAN KELUARGA BENCANA KAB.	-	10.140.000	(10.140.000)	-	-	-	P.C UNIT
302	01005	269230	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAUR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
303	01005	269235	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. MUKO-MUKO	-	10.010.000	(10.010.000)	-	-	-	P.C UNIT
304	01005	269240	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LEBONG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
305	01005	269245	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHANG	165.677.960	-	-	-	-	165.677.960	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
306	01005	269245	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KEPAHANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
307	01005	269248	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKULU TENGAH	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
308	01005	289187	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	80.925.000	-	-	-	-	80.925.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
309	01005	289187	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TENGAH	749.000	-	-	-	-	749.000	KERTAS HVS
310	01005	289190	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. HALMAHERA UTARA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
311	01005	289196	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA SELATAN	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
312	01005	289207	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HALMAHERA TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
313	01005	289212	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
314	01005	290451	UB	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANGERANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
315	01005	299452	UB	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KAB. SERANG	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
316	01005	299468	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	638.050.190	-	-	-	-	638.050.190	KANTOR DESA/PASAR DESA
317	01005	299468	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
318	01005	299477	TP	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	79.792.050	-	-	-	-	79.792.050	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
319	01005	299477	UB	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. LEBAK	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
320	01005	299483	TP	BADAN KETAHANAN PANGAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TANGERANG	74.700.000	-	-	-	-	74.700.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
321	01005	299501	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG SELATAN	-	9.090.910	(9.090.910)	-	-	-	P.C UNIT
322	01005	309247	TP	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	162.597.000	-	-	-	-	162.597.000	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
323	01005	309247	UB	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BELITUNG TIMUR	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
324	01005	319176	UB	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. POHUWATO	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
325	01005	329122	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KAB. BINTAN	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
326	01005	329128	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KAB. KARIMUN	-	9.900.000	(9.900.000)	-	-	-	P.C UNIT
327	01005	329137	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. NATUNA	161.616.770	-	-	-	-	161.616.770	GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
328	01005	329137	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.NATUNA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
329	01005	329144	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LINGGA	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
330	01005	329146	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. KEP. ANAMBAS	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
331	01005	339176	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. MANOKWARI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
332	01005	339185	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SORONG	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
333	01005	339194	UB	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. SORONG SELATAN	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
334	01005	339200	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. RAJA AMPAT	-	10.035.000	(10.035.000)	-	-	-	P.C UNIT
335	01005	339202	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. TELUK BINTUNI	-	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	P.C UNIT
336	01005	339210	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAIMANA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
337	01005	340170	DK	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT	-	78.930.200	(78.930.200)	-	-	-	P.C UNIT LAPTOP PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) PERALATAN PERSONAL KOMPUTER LAINNYA
338	01005	340244	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAMUJU	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
339	01005	340448	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. POLEWALI MANDAR	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
340	01005	340536	TP	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	165.869.690	-	-	-	-	165.869.690	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN GEDUNG PERTOKOAN KOPERASI/PASAR PERMANEN
341	01005	340536	UB	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAMASA	-	10.165.000	(10.165.000)	-	-	-	P.C UNIT
<b>BANGDA</b>											
342	01006	052151	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB. BLITAR	1.877.956.850	-	-	-	-	1.877.956.850	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
343	01006	071519	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PAKPAK BARAT	1.595.071.168	-	-	249.500.000	(249.500.000)	1.595.071.168	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
346	1006	081021	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. DHARMAS RAYA (06)	1.229.483.605	-	-	193.634.400	(193.634.400)	1.229.483.605	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
347	01006	081219	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PASAMAN BARAT	2.473.039.371	-	-	370.670.000	(370.670.000)	2.473.039.371	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
348	01006	090256	TP	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB BENGKALIS	67.670.350	-	-	-	-	67.670.350	KONSSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KONTRAK PERENCANAAN)
350	01006	100729	TP	DINAS KEMPRASDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	1.222.663.310	-	-	239.766.400	(239.766.400)	1.222.663.310	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
351	01006	100930	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MUARO JAMBI	2.213.241.257	-	-	349.459.800	(349.459.800)	2.213.241.257	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
354	01006	140645	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KATINGAN (06)	3.171.799.345	-	-	335.790.000	(335.790.000)	3.171.799.345	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
355	01006	140727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERUYAN	2.260.972.450	-	-	267.560.000	(267.560.000)	2.260.972.450	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
357	01006	140920	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU	1.869.300.944	-	-	298.000.000	(298.000.000)	1.869.300.944	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
358	01006	141019	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. GUNUNG MAS (06)	4.990.853.839	-	-	329.095.000	(329.095.000)	4.990.853.839	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
359	01006	141338	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO TIMUR	2.851.322.966	-	-	448.853.000	(448.853.000)	2.851.322.966	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
360	01006	151126	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BALANGAN	1.246.208.645	-	-	153.659.600	(153.659.600)	1.246.208.645	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
361	01006	160626	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. MALINAU	3.192.334.944	-	-	496.630.000	(496.630.000)	3.192.334.944	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
362	01006	160927	TP	DINAS KIMPRASWIL KAB. PENAJAM PASER UTARA	428.239.499	-	-	322.278.000	(322.278.000)	428.239.499	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
363	01006	180734	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN (06)	1.849.065.910	-	-	53.642.150	(53.642.150)	1.849.065.910	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
364	01006	180924	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA	1.095.340.500	-	-	-	-	1.095.340.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
365	01006	180925	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TOJO UNA-UNA (06)	1.419.376.840	-	-	172.341.800	(172.341.800)	1.419.376.840	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
366	01006	191426	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELAYAR (06)	947.211.500	-	-	149.850.000	(149.850.000)	947.211.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
367	01006	191429	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELAYAR	2.538.006.797	-	-	75.000.000	(75.000.000)	2.538.006.797	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
369	01006	192274	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LUWU UTARA	2.981.170.039	-	-	429.232.000	(429.232.000)	2.981.170.039	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
370	01006	200623	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOMBANA (06)	2.814.142.510	-	-	-	-	2.814.142.510	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
371	01006	200715	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAKATOBI (06)	1.888.382.030	-	-	239.551.500	(239.551.500)	1.888.382.030	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
372	01006	200816	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KOLAKA UTARA	2.241.171.436	-	-	324.751.850	(324.751.850)	2.241.171.436	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
373	01006	210156	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MALUKU TENGAH (06)	907.769.600	-	-	-	-	907.769.600	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
374	01006	210428	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PULAU BURU (06)	1.425.853.520	-	-	-	-	1.425.853.520	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
375	01006	210726	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	403.454.789	-	-	-	-	403.454.789	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
376	01006	210727	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR (06)	1.404.555.405	-	-	-	-	1.404.555.405	RUMAH NEGARA GOL.II TIPE A PERMANEN
377	01006	215128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA AMBON	446.822.000	-	-	-	-	446.822.000	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI
378	01006	240553	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. A L O R	233.085.375	-	-	-	-	233.085.375	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
380	01006	250936	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANIAI	1.638.600.005	-	-	234.500.000	(234.500.000)	1.638.600.005	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN

**REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
381	01006	251128	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA	1.609.527.750	-	-	249.306.000	(249.306.000)	1.609.527.750	BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN
382	01006	251129	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. PUNCAK JAYA (06)	2.474.045.920	-	-	378.641.000	(378.641.000)	2.474.045.920	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
383	01006	251413	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. ASMAT	1.781.455.000	-	-	-	-	1.781.455.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
384	01006	251514	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL	213.186.750	-	-	-	-	213.186.750	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
385	01006	251516	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOVEN DIGOEL	3.791.009.500	-	-	538.600.000	(538.600.000)	3.791.009.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
386	01006	251607	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI (06)	3.573.969.688	-	-	469.761.000	(469.761.000)	3.573.969.688	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
387	01006	251717	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEEROM	2.636.985.383	-	-	405.882.950	(405.882.950)	2.636.985.383	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
388	01006	251721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEEROM	264.262.500	-	-	-	-	264.262.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
389	01006	251812	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TOLIKARA	2.280.065.006	-	-	224.100.000	(224.100.000)	2.280.065.006	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
390	01006	251918	TP	BADAN PERBATASAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	5.357.304.290	-	-	703.999.885	(703.999.885)	5.357.304.290	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
391	01006	252318	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. WAROPEN	1.700.989.900	-	-	-	-	1.700.989.900	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN PERMANEN
392	01006	260830	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KEPAHANG	2.530.783.703	-	-	398.350.000	(398.350.000)	2.530.783.703	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
393	01006	265156	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU	533.109.500	-	-	49.925.000	(49.925.000)	533.109.500	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
394	01006	280076	TP	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (06)	5.774.912.835	-	-	-	-	5.774.912.835	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
395	01006	280253	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	1.039.440.340	-	-	-	-	1.039.440.340	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
396	01006	280322	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA	1.051.489.810	-	-	-	-	1.051.489.810	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
397	01006	280417	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. HALMAHERA SELATAN	3.241.547.215	-	-	698.997.544	(698.997.544)	3.241.547.215	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
398	01006	280424	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	1.061.420.000	-	-	-	-	1.061.420.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
400	01006	280525	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA	1.062.666.110	-	-	-	-	1.062.666.110	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
401	01006	280621	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	1.626.293.274	-	-	-	-	1.626.293.274	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
402	01006	280723	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	1.398.942.800	-	-	-	-	1.398.942.800	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
403	01006	285125	TP	SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE	331.568.877	-	-	-	-	331.568.877	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
404	01006	310224	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BOALEMO	2.523.955.206	-	-	396.261.000	(396.261.000)	2.523.955.206	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
405	01006	310321	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. POHUWATO	2.541.268.140	-	-	399.585.000	(399.585.000)	2.541.268.140	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
406	01006	330620	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK BINTUNI (06)	2.170.532.366	-	-	348.786.000	(348.786.000)	2.170.532.366	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
407	01006	330721	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TELUK WONDAMA	2.256.803.760	-	-	329.500.000	(329.500.000)	2.256.803.760	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
408	01006	436044	TP	KPU KABUPATEN TANAH LAUT / POLEWALI MANDAR	2.757.039.900	-	-	-	-	2.757.039.900	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
409	01006	436096	TP	KAB SERAM BAGIAN TIMUR	1.519.500.000	-	-	-	-	1.519.500.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
410	01006	436122	TP	KAB HALMAHERA TENGAH	1.380.000.000	-	-	-	-	1.380.000.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
<b>OTDA</b>											
411	01007	060082	DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.088.228.700	10.000.000	(10.000.000)	-	-	1.088.228.700	HARD DISK
412	01007	070244	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO	-	-	-	2.076.889.018	(2.076.889.018)	-	HASIL KAJIAN/PENELITIAN
413	01007	075133	TP	BAPPEDA KOTA MEDAN	-	-	-	2.825.836.000	(2.825.836.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
											RAK-RAK PENYIMPANAN
											FILING CABINET BESI
											LCD PROJECTOR/INFOCUS
											KURSI DORONG
											MEJA KERJA (ALAT LABORATORIUM LAINNYA)
											P.C UNIT
											NOTE BOOK
											HARD DISK
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SOFTWARE KOMPUTER
414	01007	080435	TP	SEKRETARIAT DAERAH KAB. SOLOK	274.817.795	4.541.238.182	(4.541.238.182)	-	-	274.817.795	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN LOKAL
											JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM
											RENOVASI
415	01007	080444	TP	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SOLOK	-	9.980.125.000	(9.980.125.000)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM
											RENOVASI
416	01007	110097	DK	BAPPEDA PROP. SUMATERA SELATAN	-	-	-	624.800.000	(624.800.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
417	01007	110805	TP	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	5.502.668	334.516.696	(334.516.696)	1.577.738.504	(1.577.738.504)	5.502.668	PERALATAN DAN MESIN
											SCANNER (UNIVERSAL TESTER)
											LEMARI PENYIMPANAN
											FILING CABINET BESI
											LCD PROJECTOR/INFOCUS
											KURSI BESI/METAL
											MEJA RAPAT
											A.C. SPLIT
											TELEVISI
											MEJA KERJA (ALAT LABORATORIUM LAINNYA)
											UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS)
											LOCAL AREA NETWORK (LAN)
											P.C UNIT
											LAPTOP
											NOTE BOOK

REKAPITULASI SATKER INAKTIF YANG SALDONYA DIALIHKAN KE SATKER PUSAT  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

NO	KODE ESI	KODE SATKER	JK	NAMA SATKER	PERSEDIAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN	ASET LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN	Grand Total	KETERANGAN
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SERVER
											HUB
											MODEM
											PERALATAN DAN MESIN
											SOFTWARE KOMPUTER
418	01007	119267	TP	BAPPEDA KAB. OGAN KOMERING ILIR	-	-	-	502.946.000	(502.946.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
419	01007	120730	TP	BAPPEDA KAB. LAMPUNG TIMUR	-	-	-	1.438.332.000	(1.438.332.000)	-	LEMARI PENYIMPANAN
											RAK BESI
											FILING CABINET BESI
											LCD PROJECTOR/INFOCUS
											MEJA KERJA BESI/METAL
											KURSI BESI/METAL
											KURSI KAYU
											WIRELESS
											P.C UNIT
											HARD DISK
											PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)
											SERVER
											PERALATAN JARINGAN LAINNYA
											SOFTWARE KOMPUTER
420	01007	190223	TP	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA	-	1.480.000.000	(1.480.000.000)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
421	01007	205205	TP	SEKDA KOTA BAU-BAU	-	-	-	2.494.545.455	(2.494.545.455)	-	SOFTWARE KOMPUTER
422	01007	234007	DK	BAPPEDA PROP. NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	1.652.400.000	(1.652.400.000)	-	SOFTWARE KOMPUTER
423	01007	290355	TP	DINAS BINA MARGA KAB. LEBAK	-	16.742.666.277	(16.742.666.277)	-	-	-	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI
<b>TOTAL</b>					149.479.565.761	40.077.039.969	(40.077.039.969)	24.518.947.856	(24.518.947.856)	149.479.565.761	



## LAMPIRAN XXXIII

# REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

No	BAESI	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Keterangan
1	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTR	'000.4/7791/P	04-12-2024	536111	Belanja Modal Lainnya	Pengadaan Interactive Flat Panel	3050105037	1	238.713.500	238.713.500	241331301061170	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)
2	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTR	'000.4/7791/P	04-12-2024	536111	Belanja Modal Lainnya	Pengadaan Interactive Flat Panel	3050105037	1	238.713.500	238.713.500	241331301061170	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)
3	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTR	'000.4/8388/P	31-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Perangkat Pusat Data Kemendagri dan DRC	8010101002	10	92.150.000	921.500.000	259991301003219	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 536111 (Belanja Modal Lainnya)
4	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTR	'000.4/8388/P	31-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Perangkat Pusat Data Kemendagri dan DRC	8010101002	18	239.100.000	4.303.800.000	259991301003219	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 536111 (Belanja Modal Lainnya)
5	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKON	'00115/UP_TU	05-06-2024	522191	Belanja Jasa Lainnya	Biaya paket pekerjaan pembuatan modul perencanaan, penganggaran, pendendalian dan evaluasi kinerja kemendagritahun anggaran 2024	8010101001	1	99.870.030	99.870.030	241331301029482	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 536111 (Belanja Modal Lainnya)
6	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKON	'00167/UP_TU	21-08-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pembayaran pekerjaan peralatan kantor berupa meja dan kursi kantin kemendagri setjen kemendagri tgl 19 juli 2024	3050201003	5	855.000	4.275.000	241331301049956	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel)
7	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST NONKON	'00167/UP_TU	21-08-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	pembayaran pekerjaan peralatan kantor berupa meja dan kursi kantin kemendagri setjen kemendagri tgl 19 juli 2024	3050201003	24	770.000	18.480.000	241331301049956	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel)
8	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTR	'602/5607/PPK	03-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Soundsystem Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024	3100204002	1	640.000	640.000	241331301061765	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel)
9	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTR	'602/5607/PPK	03-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Soundsystem Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024	3100204002	1	640.000	640.000	241331301061765	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel)
10	'01001	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	BAST KONTR	'602/5607/PPK	03-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Soundsystem Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024	3100204002	1	640.000	640.000	241331301061765	Kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel)
11	'01001	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	BAST KONTRAKTUAL	'176/BAST/PK-DKPP/X/2024	14-10-2024	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	BELANJA PENAMBAHAN NILAI PERALATAN DAN MESIN BERUPA INVERTER DRIVE ASSY	6070301001	1	209.078.668	209.078.668	241331301049743	Terdapat Ketidaksesuaian Kode Akun Aset Tetap vs Kode BMN yaitu Belanja Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp209.078.699,00 yang merupakan pembelian berupa belanja mesin lift gedung kantor DKPP RI yang merupakan aset milik BRL. Pada tahun 2024 terjadi kerusakan pada komponen mesin lift di Gedung DKPP yang mengharuskan pergantian seluruh kerusakan dan ditanggung oleh DKPP selaku peminjam pakai gedung oleh karena itu dipilihlah kode akun 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin.
12	'01004	240270	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU	BAST KONTR	'BPBD/06/PPK	15-10-2024	526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Jasa Kontrak Pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Naekasa	4010101001	1	208.965.810	208.965.810	241721303001533	Kesalahan pencatatan kode barang untuk Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Atas kesalahan tersebut, telah dilakukan reklasifikasi keluar ke persediaan pada bulan November 2024.

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

No	BAESI	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Keterangan
13	'01004	240270	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU	BAST KONTRA	BPPD.RENC.	06-09-2024	526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor desa Naekasa	4010101999	1	99.800.000	99.800.000	241721303001283	Kesalahan pencatatan kode barang untuk Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Atas kesalahan tersebut, telah dilakukan reklasifikasi keluar ke persediaan pada bulan September 2024
14	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	BAST KONTRA	000.4.3.365/P	31-12-2024	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengembangan Infrastruktur LMS PKAD dalam Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa	3100204001	1	3.867.250.000	3.867.250.000	259991302005946	Kesalahan dalam pencatatan NUP BMN (dicatat dalam NUP baru)
15	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	BAST KONTRA	4343/BASTH	12-08-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Mebebeuler/Furniture Peralatan dan Mesin Ruang Direktur Jenderal dalam rangka Renovasi dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024	6010303003	1	2.331.000	2.331.000	241331302019759	Kesalahan kode akun belanja seharusnya (536 111) Belanja Modal Lainnya
16	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	BAST KONTRA	6028/BASTH	31-10-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Pengadaan Mic Conference System Kabel Delegate dan TV LED Video Tron Gedung C Lantai IV Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024	3060102168	2	52.847.100	105.694.200	241331302028743	Kesalahan kode akun belanja seharusnya (532111) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	BAST KONTRA	6028/BASTH	31-10-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Pengadaan Mic Conference System Kabel Delegate dan TV LED Video Tron Gedung C Lantai IV Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024	3050206002	1	44.544.303	44.544.303	241331302028743	Kesalahan kode akun belanja seharusnya (532111) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18	'01005	'027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	BAST KONTRA	6028/BASTH	31-10-2024	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Pengadaan Mic Conference System Kabel Delegate dan TV LED Video Tron Gedung C Lantai IV Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024	3050206015	10	2.824.256	28.242.560	241331302028743	Kesalahan kode akun belanja seharusnya (532111) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19	'01006	'039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	BAST KONTRA	000.4.2/6533/	09-12-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Kursi Rapat Pada Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah	3050201003	25	606.160	15.154.000	241331302034557	Mutasi transaksi pengurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.154.000,00 pada Ditjen Bina Bangda berupa pengadaan Peratalan Mesin yang tercatat pada Barang Ekstrakomptabel berupa pengadaan 25 Unit Kursi Besi senilai Rp15.154.000,00 atau Rp606.160,00/unit. Barang tercatat pada Ekstrakomptabel disebabkan pada perencanaan awal akan digunakan untuk pengadaan Kursi Ruang Rapat dengan nilai diatas kapitalisasi dengan akun Belanja Modal yang pada realisasi akhir diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kursi besi.

**REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

No	BAESI	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Keterangan
20	01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAST NONKON	00005/UP_TU	28-06-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Meubelair untuk Ruang Staf Gedung E dan B dalam rangka Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	3050201999	5	275.000	1.375.000	241331701000960	Terdapat ketidaksesuaian akun pembelian barang ekstrakomptabel berupa 7 buah meubelair lainnya (dudukan printer) NUP 105 s.d 111 dengan nilai harga satuan sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang seharusnya menggunakan akun 521252 Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel dan telah dilakukan koreksi pencatatan (305) pada barang tersebut yang kemudian dilakukan koreksi perubahan nilai bertambah (204) pada Meja Kerja Kayu NUP 1217 s.d 1223
21	01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAST NONKON	00005/UP_TU	28-06-2024	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Meubelair untuk Ruang Staf Gedung E dan B dalam rangka Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	3050201999	2	275.000	550.000	241331701000960	Terdapat ketidaksesuaian akun pembelian 5 buah hard disk NUP 6838 s.d. 6842 dengan nilai sebesar Rp9.454.600 (sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan menggunakan akun belanja 521252 Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel yang seharusnya menggunakan akun 532111 Peralatan dan Mesin Intrakomptabel
22	01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAST NONKON	00077	02-12-2024	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Barang Ekstrakomptabel berupa hardisk	3100201012	4	1.900.700	7.602.800	241331303021500	Terdapat ketidaksesuaian akun pembelian 5 buah hard disk NUP 6838 s.d. 6842 dengan nilai sebesar Rp9.454.600 (sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan menggunakan akun belanja 521252 Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel yang seharusnya menggunakan akun 532111 Peralatan dan Mesin Intrakomptabel
23	01008	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAST NONKON	00078	02-12-2024	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Barang Ekstrakomptabel berupa Hard Disk	3100201012	1	1.851.800	1.851.800	241331303021500	Terdapat ketidaksesuaian akun pembelian 5 buah hard disk NUP 6838 s.d. 6842 dengan nilai sebesar Rp9.454.600 (sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan menggunakan akun belanja 521252 Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel yang seharusnya menggunakan akun 532111 Peralatan dan Mesin Intrakomptabel



# LAMPIRAN XXXIV

## DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	0000008887988875	RPL 133 PS SETJEN KEMENDAGRI UTK DOM	BRI	30	S-1714/MK.5/2015	04/03/2015
2	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	1174197874	RKK SETJEN KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-514/WPB.12/KP.04/2021	10/02/2021
3	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	32901004322309	RKK SETJEN KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1403/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
4	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001000	BPG 133 SETJEN KEMENDAGRI	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
5	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001001	BPP 133 BIRO HUKUM	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
6	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001002	BPP 133 BIRO KEPEGAWAIAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
7	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001003	BPP 133 BIRO ORTALA	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
8	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001005	BPP 133 BIRO UMUM	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
9	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001006	BPP 133 PUSAT FASKERJASAMA	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
10	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001007	BPP 133 BIRO KEUANGAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
11	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001008	BPP 133 PUSDATIN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
12	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001009	BPP 133 BIRO ADMINISTRASI	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
13	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650364032001010	BPP 133 PUSAT PENERANGAN	BRI	51	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
14	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	650364830051000	BPG 133 DKPP	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
15	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	403200	SEKRETARIAT JENDERAL	650714032001004	BPP 133 BIRO PERENCANAAN	BRI	51	S-4800/WPB.12/KP.0404/2021	19/11/2021
16	Sumedang	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	9891484483021000	BPG 087 IPDN	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
17	Manado	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	9891486770101000	BPG 049 IPDN KAMPUS SULUT	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
18	Makassar I	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	00000001067702427	BNP 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	10	001980/050	13/01/2021
19	Makassar I	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	9891486770241000	BPG 054 IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
20	Bukittinggi	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	9891486770451000	BPG 011 IPDN KAMPUS BUKITTINGGI	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
21	Pontianak	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	9891486830701000	BPG 042 IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
22	Mataram	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	9891486830841000	BPG 038 IPDN KAMPUS NTB	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
23	Jayapura	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	683091	IPDN KAMPUS PAPUA	9891486830911000	BPG 063 IPDN KAMPUS PAPUA	BNI	50	S-581/WPB.12/KP.04/2021	11/02/2021
24	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	32901004326303	RKK ITJEN KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1163/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
25	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650700272031000	BPG 133 ITJEN KEMENDAGRI	BRI	50	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
26	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031001	BPP 133 INSPEKTORAT I	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
27	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031002	BPP 133 Inspektorat II	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
28	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031003	BPP 133 Inspektorat III	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
29	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031004	BPP 133 Inspektorat IV	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
30	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650700272031005	BPP 133 INSPEKTORAT KHUSUS	BRI	21	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
31	Jakarta IV	01002	INSPEKTORAT JENDERAL	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	650410272031006	BPP 133 SETTJEN KEMENDAGRI	BRI	51	S-1164/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
32	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	32901004346303	RKK DITJEN POLPUM KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
33	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101000	BPG 133 DITJEN POLPUM KEMENDAGRI	BRI	50	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
34	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101001	BPP 133 SEKRETARIAT	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
35	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101002	BPP 133 DIREKTORAT WASBANG	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
36	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101003	BPP 133 DIREKTORAT POLDAGRI	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
37	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101004	BPP 133 DIREKTORAT EKOSOSBUD	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
38	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650720272101005	BPP 133 DIREKTORAT ORMAS	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
39	Jakarta IV	01003	DITJEN POLPUM	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	650870272101006	BPP 133 DIREKTORAT WASNAS	BRI	51	S-1263/WPB.12/KP.04/2020	11/03/2020
40	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	9890240190801000	BPG 133 SETDA PROV DKI JAKARTA	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
41	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	00000000967302571	RKK DITJEN BAK KEMENDAGRI OPS	BSI	Rekening Induk	S-1050/WPB.12/KP.04/2021/133	17/03/2021
42	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	8808000009	RKK DITJEN BINA ADWIL OPS	BNI	Rekening Induk	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020

get

## DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
43	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861000	BPG 133 DITJEN BINA ADM. KEWILAYAHAN	BNI	50	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
44	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861001	BPP 133 SEKRETARIAT DITJEN ADWIL	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
45	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861002	BPP 133 DIR. DEKONSENTRASI TP	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
46	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861003	BPP 133 DIREKTORAT WASKOBAN	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
47	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861004	BPP 133 DIR. POLPP DAN LINMAS	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
48	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861005	BPP 133 DIREKTORAT TOPOBAD	BNI	51	S-1418/WPB.12/KP.04/2020	26 Mei 2020
49	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9890240274861006	BPP 133 DIREKTORAT MPBK	BNI	51	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
50	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	9890240291341000	BPG 022 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
51	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	9890240396671000	BPG 026 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
52	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	9890240490611000	BPG 030 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DIY 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
53	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	8100710690841000	BPG 001 SEKDA PROVINSI ACEH 04	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
54	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	9890240790781000	BPG 123 SETDAPROVSU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
55	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	089106	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	9890240891061000	BPG 010 SETDA PROV SUMBAR	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
56	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	099438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	9890240994381000	BPG 008 SETDA PROV RIAU 04 DK	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
57	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	9890241090741000	BPG 012 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
58	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890241190821000	BPG 014 SEKRETARIAT DAERAH PROV SUMSEL 2	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
59	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	9890241290741000	BPG 017 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
60	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	129098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	9890241290981000	BPG 017 DPMPSTP LAMPUNG PROV LAMPUNG	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
61	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890241390781000	BPG 042 SETDA PROV. KALBAR 139078	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
62	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890241490721000	BPG 043 SETDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
63	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890241491301000	BPG 043 DPMPSTP PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
64	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890241590711000	BPG 045 SEKDA PROV KAL SEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
65	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	160552	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	9890241605521000	BPG 152 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH NUNUKAN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
66	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890241691851000	BPG 046 SETDA PROV KALTIM	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
67	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	9890241790881000	BPG 049 DINAS PENANAMAN MODAL PTSPD PROV SULUT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
68	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	9890241792231000	BPG 049 SEKDA PROV SULUT BIRO PEMERINTAHAN HUMAS	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
69	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890241890871000	BPG 051 SETDA PROV SULTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
70	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	199080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890241990801000	BPG 054 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
71	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890242090711000	BPG 060 SETDA PROV. SULTRA DK 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
72	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890242090951000	BPG 060 DPMPSTP PROV SULTRA 04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
73	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	219062	SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	9890242190621000	BPG 061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU 219062	BNI	50	S-1625/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
74	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	9890242290681000	BPG 037 SEKDA PROVINSI BALI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
75	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890242392361000	BPG 038 SETDA PROV NTB	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021

get

## DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
76	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890242491361000	BPG 039 SEKDA PROV NTT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	4 Juni 2021
77	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890242491741000	BPG 039 DPMPSTSP PROV NTT 249174	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
78	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	9890242590841000	BPG 063 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. PAPUA	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
79	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	269093	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	9890242690931000	BPG 016 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
80	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	9890242890951000	BPG 062 DINAS PMPTSP PROV MALUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
81	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	9890242891741000	BPG 062 SEKRETARIAT DAERAH PROV MALUKU UTARA 04 DK	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
82	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	9890242993481000	BPG 020 SETDA PROV BANTEN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
83	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	309148	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	9890243091481000	BPG 015 SETDA PROV.BABEL-04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
84	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	9890243190611000	BPG 050 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
85	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890243291161000	BPG 009 SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAUES04	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
86	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	9890243391611000	BPG 065 SETDA PROV PAPUA BARAT	BNI	50	S-2115WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
87	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	340166	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	9890243401661000	BPG 178 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
88	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	9890243490111000	BPG 178 DINAS PMPTSP SULAWESI BARAT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
89	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	356000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU	9890243560001000	BPG 185 DUPRPPK KAB MALINAU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
90	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890243590021000	BPG 185 DPMDPTSP PROV KALTARA 359002	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
91	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244176971000	BPG 185 SEKDA KALTARA 04 417697	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
92	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244333161000	BPG 010 DPMPSTSP PROV SUMBAR	BNI	50	S-1625/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
93	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	9890244333171000	BPG 008 DINAS PMPTSP PROV RIAU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
94	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244333181000	BPG 009 DPMPSTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	BNI	50	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
95	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	9890244333411000	BPG 012 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
96	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244333421000	BPG 014 DINAS PMPTSP SUMSEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
97	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433343	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	9890244333431000	BPG 015 DPMPSTSP BABEL	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
98	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	9890244333441000	BPG 016 DINAS PMPTSP PROV BENGKULU	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
99	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	9890244333451000	BPG 020 DINAS PMPTSP PROV BANTEN	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
100	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	9890244333471000	BPG 037 DINAS PMPTSP PROV BALI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
101	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433348	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244333481000	BPG 042 DINAS PMPTSP PROV KALBAR	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021

## DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
102	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	9890244333491000	BPG 050 DPM-ESDM-TRANS GORONTALO	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
103	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244333501000	BPG 051 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROV SULTENG 433350	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
104	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244333511000	BPG 054 DPMPSTP SULSEL	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
105	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890244333521000	BPG 038 DPMPST SATU PINTU PROV NTB	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
106	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	9890244333531000	BPG 061 DINAS PMPTSP PROV MALUKU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
107	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	8100714841011000	BPG 001 DPM DAN PTSP PROV	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
108	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	8100714841021000	BPG 001 BAPPEDA PROV ACEH	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
109	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	8100714841031000	BPG 001 INSPEKTORAT PROV ACEH	BSI	50	S-1235/WPB.12/KP.04/2021	25 Maret 2021
110	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	9890244841051000	BPG 004 DPMPSTP SUMUT	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021
111	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	9890244841071000	BPG 123 INSPEKTORAT PROVINSI SUMUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
112	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU	9890244841091000	BPG 008 BAPPEDA RIAU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
113	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484110	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	9890244841101000	BPG 008 INSPEKTORAT PROV RIAU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
114	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244841121000	BPG 009 BAPPEDA PROV KEPRI	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
115	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9890244841131000	BPG 009 INSPEKTORAT PROV KEPRI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
116	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	9890244841151000	BPG 012 BAPPEDA PROVINSI JAMBI	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
117	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	9890244841161000	BPG 012 INSPEKTORAT PROV JAMBI	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
118	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484118	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244841181000	BPG 010 BAPPEDA PROV SUMBAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
119	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	9890244841191000	BPG 010 INSPEKTORAT PROV SUMBAR	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
120	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244841211000	BPG 014 BAPPEDA PROV SUMSEL	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
121	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	9890244841221000	BPG 014 INSPEKTORAT SUMSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19 April 2021
122	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	9890244841241000	BPG 017 BAPPEDA PROV LAMPUNG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
123	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	9890244841251000	BPG 017 INSPEKTORAT LAMPUNG	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
124	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	9890244841271000	BPG 016 BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
125	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	9890244841281000	BPG 016 INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
126	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9890244841311000	BPG 015 BAPPEDABABEL 484131	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
127	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9890244841321000	BPG 015 INSPEKTORAT PROV. BABEL	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
128	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484134	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	9890244841341000	BPG 020 BAPPEDA PROV BANTEN	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
129	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484135	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	9890244841351000	BPG 001 INSPEKTORAT BANTEN	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
130	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	9890244841371000	BPG 022 DINAS PMPTSP JABAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
131	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	9890244841381000	BPG 022 BAPPEDA PROV JABAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
132	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484139	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	9890244841391000	BPG 022 INSPEKTORAT DAERAH PROV JABAR	BNI	50	S-2255/WPB.12/KP.04/2021	04 Juni 2021

gaf

## DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
133	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841451000	BPG 026 DINAS PMPTSP PROV JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
134	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841461000	BPG 026 BAPPEDA PROV JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
135	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484147	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	9890244841471000	BPG 026 INSPEKTORAT PROVINSI JATENG	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
136	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484149	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY	9890244841491000	BPG 030 DPMPTSP PROVINSI D.I YOGYAKARTA	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
137	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484150	BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	9890244841501000	BPG 030 BAPPEDA PROVINSI DI YOGYAKARTA	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
138	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	9890244841511000	BPG 030 INSPEKTORAT PROV DIY	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
139	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	9890244841531000	BPG 135 DINAS PMPTSP JATIM	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
140	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484154	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	9890244841541000	BPG 135 BAPPEDA PROV JATIM	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
141	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484157	BAPPEDA PROVINSI BALI	9890244841571000	BPG 037 BAPPEDA PROV BALI	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
142	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	9890244841581000	BPG 037 INSPEKTORAT BALI	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
143	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890244841601000	BPG 038 BAPPEDA PROV NTB	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
144	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9890244841611000	BPG 038 INSPEKTORAT PROV NTB	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
145	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484163	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890244841631000	BPG 039 DEKON BAPPELITBANGDA	BNI	50	S-3391/WPB.12/KP.04/2021	24 Agustus 2021
146	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484164	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9890244841641000	BPG 039 INSPEKTORAT PROV NTT	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
147	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244841661000	BPG 042 BAPPEDA PROVINSI KALBAR 484166	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
148	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9890244841671000	BPG 042 INSPEKTORAT KALBAR	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
149	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890244841691000	BPG 043 BAPPEDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
150	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9890244841701000	BPG 043 INSPEKTORAT PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
151	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841721000	BPG 045 PMPTSP PROV KALSEL	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
152	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841731000	BPG 045 BAPPEDA PROV KALSEL 484173	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
153	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484174	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	9890244841741000	BPG 015 INSPEKTORAT KALSEL	BNI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
154	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484176	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841761000	BPG 046 DINAS PMPTSP PROV KALTIM	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
155	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841771000	BPG 046 BAPPEDA KALIMANTAN TIMUR	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
156	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	9890244841781000	BPG 046 INSPEKTORAT KALTIM	BNI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
157	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244841801000	BPG 185 BAPPEDA PROV KALUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
158	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9890244841811000	BPG 185 INSPEKTORAT PROV KALIMANTAN UTARA	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31/03/2021
159	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	9890244841831000	BPG 049 BAPPEDA PROV SULUT	BNI	50	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
160	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	9890244841841000	BPG 049 INSPEKTORAT PROV SULUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
161	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	9890244841871000	BPG 050 BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	BSI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
162	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	9890244841881000	BPG 050 INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
163	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	9890244841901000	BPG 178 BAPPEDA PROV SULBAR	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
164	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	9890244841911000	BPG 178 INSPEKTORAT PROV SULBAR	BSI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021

gaf

## DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
165	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244841931000	BPG 054 BAPPEDA SULSEL	BSI	50	S-1626/WPB.12/KP.04/2021	19/04/2021
166	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	9890244841941000	BPG 054 INSPEKTORAT PROV SULSUL	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
167	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244841961000	BPG 051 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	BRI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
168	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	9890244841971000	BPG 051 ITDA PROV SULTENG	BRI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
169	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890244841991000	BPG 060 BAPPEDA PROV SULTRA	BRI	50	S-2115/WPB.12/KP.04/2021	20 Mei 2021
170	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484200	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9890244842001000	BPG 060 INSPEKTORAT DAERAH PROV SULTRA (04)	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
171	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484202	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	9890244842021000	BPG 061 BAPPEDA PROVINSI MALUKU	BNI	50	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
172	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	9890244842031000	BPG 061 INSPEKTORAT PROV MALUKU	BNI	50	S-1729/WPB.12/KP.04/2021	23/04/2021
173	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	9890244842051000	BPG 062 BAPPEDA PROV MALUT	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
174	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	9890244842061000	BPG 062 INSPEKTORAT PROV MALUT	BNI	50	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31/03/2021
175	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	9890244842081000	BPG 063 BAPPEDA PROV PAPUA	BNI	50	S-2433/KPN.1204/2022	18/08/2022
176	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	9890244842091000	BPG 063 INSPEKTORAT PROV PAPUA	BNI	50	S-1247/KPN.1204/2022	08/04/2022
177	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842111000	BPG 065 DPMPSTP PABAR	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17/03/2021
178	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484212	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842121000	BPG 065 BAPPEDA PROV PABAR	BNI	50	S-2433/KPN.1204/2022	18/08/2022
179	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	9890244842131000	BPG 065 INSPEKTORAT PABAR	BNI	50	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19/07/2021
180	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	240270	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU	9890242402701000	BPG 172 BPPD KAB BELU	BNI	50	S-1469/KPN.1204/2024	09/08/2024
181	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	966535960	RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1342/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
182	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	032901004381303	RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1344/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
183	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	7187439398	RKK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI OPS	BSI	Rekening Induk	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
184	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531000	BPG 133 Ditjen Bina Pemdes Kemendagri	BSI	50	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
185	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531001	BPP 133 Direktorat PAPD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
186	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531002	BPP 133 Direktorat FPKAD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
187	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531003	BPP 133 Direktorat FKAD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
188	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531004	BPP 133 Direktorat KKD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
189	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531005	BPP 133 Direktorat EPD	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
190	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	8101280277531006	BPP 133 Sekretariat	BSI	51	S-364/WPB.12/KP.04/2022	18/01/2022
191	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	9890280284491000	BPG 030 BALAI PEMERINTAHAN DESA YK	BNI	50	S-1342/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
192	Yogyakarta	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	1889064884	BPN 030 BALAI PEMERINTAHAN DESA YK	BNI	10	000078/030	23/09/2024
193	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	651560288301000	BPG 032 BBPMD MALANG	BRI	50	S-1343/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
194	Malang	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	005101003361303	BPN 032 BBPD MALANG	BRI	10	S-251/WPB.16/KP.04/2021	08/02/2021
195	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	651566136291000	BPG 017 BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	BRI	50	S-1343/WPB.12/KP.04/2020	16/03/2020
196	Bandar Lampung	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	1140028362815	BPN 017 BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	MANDIRI	10	S-758/KPN.0801/2024	16/05/2024
197	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	967410258	RKK DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1559/WPB.12/KP.04/2020	03/04/2020
198	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291000	BPG 133 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI	BNI	50	S-1558/WPB.12/KP.04/2020	03/04/2020

gaf

## DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
199	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291001	BPP: 133 SEKRETARIAT	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
200	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291002	BPP: 133 DIREKTORAT PEIPD	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
201	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291003	BPP: 133 Direktorat SUPD I	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
202	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291004	BPP: 133 Direktorat SUPD II	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
203	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291005	BPP 133: Direktorat SUPD III	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
204	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	9890260397291006	BPP: 133 Direktorat SUPD IV	BNI	51	S-1558/WPB.12/KP.0404/2020	03/04/2020
205	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240002324250	RPL 140 PDHL DITJEN BANGDA untuk 2TCK92FA	MANDIRI	30	000105/140	16/03/2021
206	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240011070373	RPL 133 PDHL DITBINABANGDA UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005344/WPB.12/KP.04/2021	16/12/2021
207	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1240012217528	RPL 140 PDHL BANGDA untuk 27YDNA6A	MANDIRI	30	WPB.12/KP00035608/2023	17/05/2023
208	Khusus Pinjaman & Hibah	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	138007714777	RPL 140 PDH BANGDA untuk 27YDNA6A	MANDIRI	30	WPB.12/KP00040708/2023	30/10/2023
209	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	7187436437	RPL 133 PDH BAPPEDA ACEH UTK 2C7EJQHA	BSI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
210	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1350018299303	RPL 133 PDH BAPPEDA JTG UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
211	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1810013300133	RPL 133 PDH BAPPEDA NTT UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
212	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1610009727434	RPL 133 PDH BAPPEDA NTB UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
213	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1520031369222	RPL 133 PDH BAPPEDA SULSEL UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
214	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1860002829840	RPL 133 PDH BAPPEDA MALUKU UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
215	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1540017450739	RPL 133 PDH BAPPEDA PAPUA UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
216	Jakarta IV	01006	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1600004285322	RPL 133 PDH BAPPEDA PABAR UTK 2C7EJQHA	MANDIRI	30	S-005487/WPB.12/KP.04/2021	27/12/2021
217	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	32901004310302	RKK DITJEN OTDA KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1234/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
218	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921000	BPG : 133 DITJEN OTDA KEMENDAGRI	BRI	50	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
219	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921001	BPP : 133 SEKRETARIAT	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
220	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921002	BPP : 133 DIR.PENATAAN DAERAH	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
221	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650406218921003	BPP 133 DIR.KEPALA DAERAH	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
222	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921004	BPP : 133 DIR.KELEMBAGAAN	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
223	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921005	BPP : 133 DIR.PRODUK HUKUM	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
224	Jakarta IV	01007	DITJEN OTONOMI DAERAH	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	650356218921006	BPP : 133 DIR.EVALUASI KINERJA	BRI	51	S-1232/WPB.12/KP.04/2020	09/03/2020
225	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1448029944	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2FWTYN9A	BNI	30	S-002342/KPN.1204/2022	08 Agustus 2023
227	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1881149814	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2BBWST8A	BNI	30	S-1458/KPN.1204/2024	08/07/2024
230	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1881154405	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2RET99NA	BNI	30	S-1458/KPN.1204/2024	08/07/2024
226	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1881136768	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2BZ5GF5A	BNI	30	S-1458/KPN.1204/2024	08/07/2024
228	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1881151696	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2ZS74K4A	BNI	30	S-1458/KPN.1204/2024	08/07/2024
229	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1881153309	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 21Q5D7VA	BNI	30	S-1516/KPN.1204/2024	16/8/2024
231	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1895925236	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2WS1S93A	BNI	30	S-1737/KPN.1204/2024	24/9/2024
232	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1895928260	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2B4DHS9A	BNI	30	S-1737/KPN.1204/2024	24/9/2024
234	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1902295243	RPL133 PDHL DUKCAPIL UTK 2P7ESHUA	BNI	30	S-2061/KPN.1204/2024	11/11/2024
233	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1902295094	RPL133 PDHL DUKCAPIL UTK 2ZEWF8WA	BNI	30	S-2061/KPN.1204/2024	11/11/2024

gaf

## DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
235	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	917164447	RKK DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1181/WPB.12/KP.04/2020	06/03/2020
236	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821000	BPG 133 DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI	BNI	50	S-1175/WPB.12/KP.0404/2020	06 Maret 2020
237	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821001	BPP 133 SEKRETARIAT PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.0404/2020	06 Maret 2020
238	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821002	BPP 133 INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN DAERAH	BNI	51	S-1316/KPN.1204/2023	12 Juni 2023
239	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821003	BPP 133 PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	BNI	51	S-1316/KON.1206/2023	12 Juni 2023
240	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821004	BPP 133 INFORMASI	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06 Maret 2020
241	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821005	BPP 133 INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL	BNI	51	S-1316/KPN.1204/2023	12 Juni 2023
242	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821006	BPP 133 BINA APARATUR PEMERINTAH	BNI	51	S-1175/WPB.12/KP.04/2020	06 Maret 2020
243	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821007	BPP 133 SEKRETARIAT 2	BNI	51	S-159/KPN.1204/2023	17 Januari 2023
244	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821008	BPP 133 DUKCAPIL PHLN	BNI	51	S-2841/KPN.1204/2023	04 Desember 2023
245	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821009	BPP 133 DUKCAPIL PHLN 2	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	25 Juni 2024
246	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821010	BPP 133 DUKCAPIL PHLN 3	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	25 Juni 2024
247	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9891006340821011	BPP 133 DUKCAPIL PHLN 4	BNI	51	S-1132/KPN.1204/2024	26 Juni 2024
248	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1825299039	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 236HGSXA	BNI	30	S-523/KPN.1204/2024	04/04/2024
249	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1825300272	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2JFEPG9A	BNI	30	S-523/KPN.1204/2024	04/04/2024
250	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1825303579	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2YQ7F4XA	BNI	30	S-523/KPN.1204/2024	04/04/2024
251	Jakarta IV	01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1825304801	RPL 133 PDHL DUKCAPIL UTK 2RRL6N4A	BNI	30	S-523/KPN.1204/2024	04/04/2024
252	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	32901004307309	RKK DITJEN BINA KEUDA KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1251/WPB.12/KP.04/2020	10-03-2020
253	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661000	BPG 133 DITJEN BINA KEUDA KEMENDAGRI	BRI	50	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
254	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661001	BPP 133 SEKRETARIAT KEUDA	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
255	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661002	BPP 133 DIREKTORAT PAD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
256	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661003	BPP 133 DIREKTORAT PPKD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
257	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661004	BPP 133 DIREKTORAT PD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
258	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661005	BPP 133 DIREKTORAT FDPPD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
259	Jakarta IV	01009	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	650336627661006	BPP 133 DIT BUMD BLUD BMD	BRI	51	S-1252/WPB.12/KP.04/2020	10/03/2020
260	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	32901004321303	RKK BALITBANG KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1305/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
261	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221000	BPG 133 BALITBANG KEMENDAGRI	BRI	50	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
262	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221001	BPP 133 PUSLITBANG OTDAPOLPUM	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
263	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221002	BPP 133 PUSLITBANG ADWIL	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
264	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221003	BPP 133 PUSLITBANG KEUDA	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
265	Jakarta IV	01011	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	403222	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650374032221004	BPP 133 PUSLITBANG INOVASI	BRI	51	S-1306/WPB.12/KP.04/2021	13/03/2020
266	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	042601001412305	RKK BPSDM KEMENDAGRI OPS	BRI	Rekening Induk	S-1114/WPB.12/KP.04/2020	4 Maret 2020
267	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	913758491	RKK BPSDM KEMENDAGRI OPS	BNI	Rekening Induk	S-1116/WPB.12/KP.04/2020	4 Maret 2020
268	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311000	BPG 133 BADAN PENGEMB. SDM KEMENDAGRI	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020

gaf

## DAFTAR REKENING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## I. REKENING YANG DIGUNAKAN

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
269	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311001	BPP 133 Sekretariat	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
270	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311002	BPP 133 Pusat I	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
271	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311003	BPP 133 Pusat II	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
272	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311004	BPP 133 Pusat III	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
273	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	650064032311005	BPP 133 Pusat IV	BRI	51	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
274	Jakarta IV	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1240009999484	BPN 133 BPSDM	MANDIRI	10	S-7197/WPB.12/KP.0404/2018	18/12/2018
275	Yogyakarta	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	650060271141000	BPG 030 PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
276	Yogyakarta	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	1370007202589	BPN 030 PUSDIKLAT REGIONAL YOGYAKARTA	MANDIRI	10	S-1156/WPB.15/KP/01/2015	26/02/2015
277	Makassar I	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	7145711667	BPN 054 PPSDM REGIONAL MAKASSAR	BSI	40	001960/054	20/10/2020
278	Makassar I	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	9890070271771000	BPG 054 PPSDM REGIONAL MAKASSAR	BNI	50	001117/054	04/03/2020
279	Bandung I	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	1320010408616	BPN 022 PUSDIKLAT REGIONAL BANDUNG	MANDIRI	10	S-414/WPB.13/KP.022/2015	02/03/2015
280	Bandung I	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	8100124032161000	BPG 022 PPSDM REGIONAL BANDUNG	MANDIRI	50	S-1119/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
281	Bukittinggi	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	650065061371000	BPG 011 PPSDM REGIONAL BUKITTINGGI	BRI	50	S-1115/WPB.12/KP.04/2020	04/03/2020
282	Bogor	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	650065061381000	BPG023 BPSDM SATPOLPP DAMKAR	BRI	50	S-2782/WPB.12/KP.04/2021	13/07/2021
283	Bogor	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	038701002020309	BPN 023 BPSDM SATPOLPP DAMKAR	BRI	10	000415	20/09/2024

## II. DATA REKENING YANG AKAN DITUTUP

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	00000000188380452	BPG 022 SEKDA PROV JABAR	BNI	50	S-1711/WPB.13/KP.022/2015	14 Juli 2020
2	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	059663	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	11204619	BPG 135 SETDA JATIM 04	BNI	20	S-1320/WPB.12/KP.04/2021	31 Maret 2021
3	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	299348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	00000000290873641	BPG 020 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	BNI	20	S-1730/WPB.12/KP.04/2021	23 April 2021
4	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	1049158897	BPG 001 INSPEKTORAT PROV ACEH	BSI	20	S-701/WPB.01/KP.01/2020	12 Mei 2020

## III. DATA REKENING YANG SUDAH DITUTUP

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	650363525931000	BPG 133 IPDN KAMPUS JAKARTA	BRI	50	S-1402/WPB.12/KP.0404/2020	18/03/2020
										Surat Penutupan Rekening: S-839/KPN.1204/2024	Tanggal Surat Penutupan: 13/05/2024
2	Sumedang	01001	SEKRETARIAT JENDERAL	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	2200088665	BPN 087 IPDN Jatinangor Sumedang	BNI	10	000294/087	12/03/2021
										Surat Penutupan Rekening: 900.1.3.5/209/IPDN.19	Tanggal Surat Penutupan: 06/08/2024
3	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	024301000879308	BPG 043 SETDA PROV KALTENG	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
										Surat Penutupan Rekening: B.1379/KC-X/OPS/05/2021	Tanggal Surat Penutupan: 05/05/2021

get

## DAFTAR REKUNING KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
4	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	1500013456239	BPG 050 DPM-ESDM-TRANS Gorontalo	MANDIRI	20	S-1100/WPB.12/KP.04/2021 Surat Penutupan Rekening: 560/DPMESDMTRANS/229/1/2019	17 Maret 2021 Tanggal Surat Penutupan: 29/01/2019
5	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	0000000810101009	BPG 001 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH (04)	BNI	50	S-1101/WPB.12/KP.04/2021 Surat Penutupan Rekening: KFBDA/0023	17 Maret 2021 Tanggal Surat Penutupan: 04/03/2024
6	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	249395	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. ROTE NDAO	1401050001542	BPG 039 BPMPD KAB ROTE NDAO	BRI	50		
7		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	215140	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KOTA AMBON	000101001108306	BPG (061) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA AMBON	BRI	50	Rekening Koran Penutupan: BRI CA Close Acc Cash	Rekening Koran Penutupan: 11/05/2023
8		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	240858	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENDE	002401001021308	BPG 040 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB ENDE	BRI	50	Surat Keterangan Penutupan: Surat Keterangan Rekening Closed	Tanggal Surat Penutupan: 29 November 2024
9		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	241437	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROTENDAO	01401050001361	BPG 039 DUKCAPIL KAB ROTE NDAO	Bank NTT	50	Surat Keterangan Penutupan: 013/014-CS/XII/2024	Tanggal Surat Penutupan: 20/12/2024
10		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	251323	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAPPI	4000106000413	BPG 068 DUKCAPIL NAKERKIM KAB MAPPI	Bank Papua	50	Surat Keterangan Penutupan: 900/336/DUKCAPIL/XI/2024	Tanggal Surat Penutupan: 29 November 2024
11		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	251626	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SARMI	030701002206309	BPG 063 DUKCAPIL KAB SARMI	BRI	50	Penutupan Rekening: 4061-KC/XVIII/OPS/12/2024	Penutupan Rekening: 30/12/2024
12	Makassar I	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	203294002	BPN 054 PPSDM Regional Makassar	BNI	10	Surat Penutupan Rekening: 900/0815/PPSDM-MKS	Tanggal Surat Penutupan: 22/10/2020

## IV. DATA REKUNING YANG MASIH DITELUSURI

No	KPPN	BaEs1	Nama BaEs1	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Jenis	No izin	Tgl izin
1	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	2500481000	BPG 063 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	MANDIRI	20	WPB.12/KP00035608/2023	17 Mei 2023
2	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	202301000043307	BPG 050 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	BNI	20	S-2871/WPB.12/KP.04/2021	19 Juli 2021
3	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	695698626	BPG 037 DINAS PMPT SATU PINTU PROVINSI BALI	BNI	20	S-1100/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
4		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419638	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE	0000008888676762	BPG 060 BPBD KAB KONAWE	BNI	50		
5		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	418159	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO	025201001095304	BPG 056 BPBD KABUPATEN JENEPONTO	BRI	50		
6		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	209093	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	00101055001318	BPG 060 SAT.POL.PP PROV. SULTRA	BPD SULTRA	50		
7		01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	199389	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	00000002013072013	BPG 054 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SULSEL	BNI	50		
8	Tobelo	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	419064	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	522301001363309	BPG 112 BP PERBATASAN MOROTAI	BRI	50	S-276/WPB.30/KP.0230/2017	10/04/2017
9	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	0001701300004816	BPG 063 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	BTN	50	S-1508/KPN.1204/2023	11 Juli 2023
11	Jakarta IV	01004	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	00000000950679851	BPG 009 DPMPSTP PROV KEPRI	BNI	20	S-1101/WPB.12/KP.04/2021	17 Maret 2021
12	Jakarta IV	01005	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	259291	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KAB. MERAUKE	4000106002128	BPG 068 BPMK KAB MERAUKE		50		
13		01008	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	209029	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	20501050000069	BPG 060 SETDA PROV. SULTRA 08 DK	BPD Sultra	50	S-272/WPB.27/KP.0130/2009	31/03/2009



# LAMPIRAN-LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN



# NERACA PERCOBAAN AKRUAL (SALDO AWAL)

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 05/05/2025

lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	52,074,300	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	4,634,820	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	2,343,805,012	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	328,249,699	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	231,332,699,525	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	7,050,534,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	124,718,757	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13,536,525,594	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	78,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	9,844,326,180
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,844,481,786	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	610,476,442	0
0.0	117114	Suku Cadang	113,491,222	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21,334,897,038	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	382,720,441	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	5,095,980,150	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	446,822,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	160,017,091,880	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	9,154,135,762	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	925,651,980	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,195,972,582	0
0.0	131111	Tanah	13,166,366,737,522	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,663,742,657,834	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,904,113,214,212	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	78,064,949,616	0
0.0	134112	Irigasi	48,092,788,537	0
0.0	134113	Jaringan	167,663,109,468	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	95,518,621,512	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	65,225,862,613	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	29,571,282,509	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,274,188,181,175
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	486,261,917,923
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	51,619,327,489
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	28,558,348,182
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	66,995,459,088
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	94,678,343,010
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	17,850,089,235	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	17,850,089,235

*Handwritten signature*

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl. Cetak 05/05/2025

lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162151	Software	718,062,251,105	0
0.0	162161	Lisensi	18,323,236,001	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	2,271,764,600	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	5,458,069,600	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	54,982,239,721	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	83,389,652,699	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	128,566,229,402	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	78,939,040,303
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	664,419,698,032
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	3,022,601,394
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	118,715,258,702
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	26,833,969,972
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,795,608,876
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	55,024,482,777
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,567,758,122
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	125,118,609,384
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	56,709,120
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	24,697,268
0.0	391111	Ekuitas	0	16,599,721,292,944
<b>JUMLAH</b>			<b>21,706,235,719,176</b>	<b>21,706,235,719,176</b>



# NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 16/05/25 12:24 AM

Tgl Cetak : 19/05/25 2:49 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	3,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	109,599,303	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2,726,436,859	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	62,230,201,976	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	299,007,100	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	94,651,450	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,640,675,594	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	300,680,096	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	11,043,686,930
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan	0	1,503,401
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,616,888,027	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	625,989,968	0
0.0	117114	Suku Cadang	83,808,068	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	21,391,184,913	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	33,349,858,276	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	28,860,434,489	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	71,066,062,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	139,951,231,767	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	2,521,084,896	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat –	36,251,577,100	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,152,137,472	0
0.0	131111	Tanah	13,251,627,720,522	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,156,760,195,772	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,922,592,918,649	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	79,358,601,816	0
0.0	134112	Irigasi	48,122,758,537	0
0.0	134113	Jaringan	172,312,226,627	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	30,462,708,978	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	64,552,872,794	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	25,366,869,749	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,460,735,603,007
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	565,839,009,912
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	58,539,429,759
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	31,555,216,171
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	71,913,355,442
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	22,849,730,650
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	17,950,315,934	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan	0	17,850,590,368

9/25

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 16/05/25 12:24 AM

Tgl Cetak : 19/05/25 2:49 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162151	Software	756,371,780,413	0
0.0	162161	Lisensi	69,533,433,080	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	2,271,764,600	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,333,403,750	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	384,325,357,961	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	120,974,236,236	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	61,889,828,264	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	116,962,354,763
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	692,217,866,817
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	8,209,555,741
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	58,337,879,914
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	20,135,070,660
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	16,077,414,847
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	365,603,781,537
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	2,573,649,369
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	157,733,613,872
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	112,599,303
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	7,719,409
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,933,841,606,712
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	972,605,329,846	0
0.0	313211	Transfer Keluar	2,726,175,200,370	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,730,157,635,550
0.0	391111	Ekuitas	0	16,599,721,292,944
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	395,757
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,285,557,409	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	151,375,250	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	209,764,313,738
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	445,956,600	0
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,260,387,986
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,796,591,725
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	144,820,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,133,995,861
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	271,988,700
3.0	425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	37,824,050
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	46,796,500
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	182,500,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	15,473,847,612
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	454,942,900

gus

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 16/05/25 12:24 AM

Tgl Cetak : 19/05/25 2:49 PM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	58,681,374,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	11,219,224,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	831,384,646,000
3.0	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	203,832
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	437,866,795
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	292,285,431
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	5,437,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	157,509,012
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	12,018,765,361
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	7,000,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	58,461,957
3.0	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	22,269,550
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	315,893,809,747	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	4,623,853	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	15,950,645,354	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	4,309,855,155	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9,350,256,290	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	22,058,276,800	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,211,056,808	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	13,167,006,090	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	30,290,885,350	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	57,050,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	208,660,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,715,482,540	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	8,943,487,983	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	2,299,358,200	0
3.0	511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	72,400,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,399,008,376	0
3.0	511514	Beban Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti	348,272,400	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,830,121,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	29,664	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	78,805,870	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	20,053,688	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	21,875,000	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	255,056,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	81,834,600	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	326,798,600	0
3.0	511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	875,000	0

*Handwritten signature*

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 16/05/25 12:24 AM

Tgl Cetak : 19/05/25 2:49 PM

Halaman : 4

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	2,975,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	15,924,009,960	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	17,781,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	403,597,926,913	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,647,758,902	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	174,031,249,117	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	42,864,902,905	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2,292,124,238	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	374,669,424	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	11,816,135,250	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	64,341,047,141	0
3.0	521211	Beban Bahan	127,467,897,811	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	18,352,382,750	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	152,851,349,396	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	8,784,288,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	500,073,052	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	44,375,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	40,843,136,347	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	385,844,039	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,190,570,471	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	937,547,888	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	2,000,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	248,891,368,043	0
3.0	522141	Beban Sewa	107,122,387,382	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	46,101,374,279	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,426,379,493,303	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79,612,100,618	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,119,706,116	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38,348,376,632	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	197,000,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	4,508,116,163	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,051,341,948	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	358,225,906,045	0
3.0	524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	2,367,306,425	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,019,601,561	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	124,060,018,333	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73,498,824,116	0

*gub*

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 16/05/25 12:24 AM

Tgl Cetak : 19/05/25 2:49 PM

Halaman : 5

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	13,197,396,724	0
3.0	526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	1,500,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	238,046,638,986	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78,937,462,402	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5,745,471,970	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	2,990,082,329	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,286,172,985	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	57,080,598	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	40,184,935,861	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	5,191,574,347	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	11,215,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	340,338,455	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	17,694,547,822	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,361,353,173	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	551,849,707	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau	809,474,825	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	3,965,713,605	0
3.0	593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk	1,644,057,061	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	34,174,108,918	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	299,747,673,801	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	2,275,676,969	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	1,424,657,000	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –	2,004,534	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	33,473,525	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	10,076,972,716	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	118,375,084	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	76,833,501	0
JUMLAH			<b>31,091,873,614,845</b>	<b>31,091,873,614,845</b>

Keterangan :

FINAL



# NERACA PERCOBAAN KAS

# NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 16/05/25 12:24 AM

Tgl Cetak : 19/05/25 2:51 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,169,335,036,396
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	972,605,329,846	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,796,591,725
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	144,820,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,139,701,108
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	271,988,700
3.0	425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	37,824,050
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	46,796,500
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	217,250,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	18,834,607,112
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	512,177,400
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	58,715,374,000
3.1	425421	Pengembalian Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau	34,000,000	0
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	11,219,224,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	863,415,196,000
3.0	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	203,832
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	114,960,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	78,539,029
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	5,437,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	157,509,012
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	12,304,420,736
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	568,274,668
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	58,434,974
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	315,775,035,524	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	20,198,148
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	167,129
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,789,713	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,960,170,175	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,971,580
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,312,616,617	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	912,590
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,353,496,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	8,500,210
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	22,044,235,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	7,825,200
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,209,931,276	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	13,165,340,430	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,303,560

*Handwritten signature*

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 16/05/25 12:24 AM

Tgl Cetak : 19/05/25 2:51 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	14,761,200
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	30,400,921,000	0
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	57,050,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	208,660,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,740,185,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	29,917,460
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	8,943,487,983	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,299,358,200	0
3.0	511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS	72,400,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,399,008,376	0
3.0	511514	Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang	348,272,400	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,825,659,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	29,654	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	78,359,620	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	20,053,688	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	17,500,000	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	255,056,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	81,689,760	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	317,041,000	0
3.0	511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	875,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	2,975,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	16,539,934,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	17,781,000	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	130,878,790
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	410,136,134,033	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,437,584,422	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	580,172
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	174,110,561,818	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	42,896,792,020	0
3.1	521112	Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	31,889,115
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,292,124,238	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	374,669,424	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	11,245,350
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	11,827,380,600	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	70,156,509,635	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	8,729,800
3.0	521211	Belanja Bahan	127,476,627,611	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	10,198,750

gus

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 16/05/25 12:24 AM

Tgl Cetak : 19/05/25 2:51 PM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	18,362,581,500	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	152,851,349,396	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	8,784,288,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	539,786,522	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	44,375,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40,493,136,077	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	793,834,504	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	41,540,212,201	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	391,135,267	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,271,086,685	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	934,819,718	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2,000,000	0
3.1	522131	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan	0	1,750,000
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	233,486,346,859	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	10,410,484
3.0	522141	Belanja Sewa	107,132,797,866	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	46,201,389,279	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	91,015,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,400,544,971,273	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	22,005,270
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	44,470,934
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81,045,330,970	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	2,644,957,383	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,119,706,116	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38,937,518,912	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	248,209,360
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	1,750,520,009	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,625,250,396	0
3.1	523133	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	117,134,233
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,051,341,948	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	357,883,902,515	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,820,669,377
3.0	524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2,367,306,425	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,019,751,561	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	150,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	172,690,320
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	123,247,072,853	0

gus

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 010 ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tgl Data : 16/05/25 12:24 AM

Tgl Cetak : 19/05/25 2:51 PM

Halaman : 4

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_kl\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	257,543,477
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	71,266,573,167	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	13,783,572,232	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	424,474,280
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	28,578,172,384	0
3.0	526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada	25,408,511,400	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	94,061,062,120	0
3.0	526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	1,500,000,000	0
3.0	526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk	865,762,700	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	289,053,246,804	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	6,505,714
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	543,210,707,156	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	3,122,874,325	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187,685,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	15,757,428,521	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	769,825,000	0
3.1	536111	Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	9,861,500
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	95,111,415,719	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	4,922,104,419	0
JUMLAH			<b>6,145,480,335,245</b>	<b>6,145,480,335,245</b>

Keterangan :

FINAL

9/25



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
Tanggal : 05/05/25 10:25 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	334,440,392,000	316,334,698,000	315,775,035,524	20,198,148	315,754,837,376	99.82	579,860,624
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,592,000	6,149,000	4,789,713	167,129	4,622,584	77.89	1,526,416
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	18,411,403,000	16,000,814,000	15,960,170,175	1,971,580	15,958,198,595	99.75	42,615,405
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,437,864,000	4,334,473,000	4,312,616,617	912,590	4,311,704,027	99.5	22,768,973
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	10,363,274,000	9,413,567,000	9,353,496,000	8,500,210	9,344,995,790	99.36	68,571,210
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	22,562,013,000	22,138,077,000	22,044,235,000	7,825,200	22,036,409,800	99.58	101,667,200
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,330,693,000	3,308,911,000	3,209,931,276	0	3,209,931,276	97.01	98,979,724
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	13,535,681,000	13,217,359,000	13,165,340,430	1,303,560	13,164,036,870	99.61	53,322,130
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	169,074,000	0	0	0	0		0
511129	Belanja Uang Makan PNS	34,741,356,000	31,975,531,000	30,400,921,000	14,761,200	30,386,159,800	95.08	1,589,371,200
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	55,575,000	57,050,000	57,050,000	0	57,050,000	100	0
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	106,445,000	208,660,000	208,660,000	0	208,660,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,781,268,000	10,809,924,000	10,740,185,000	29,917,460	10,710,267,540	99.35	99,656,460
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	8,706,438,000	8,967,118,000	8,943,487,983	0	8,943,487,983	99.74	23,630,017
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,366,400,000	2,299,893,000	2,299,358,200	0	2,299,358,200	99.98	534,800
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	99,600,000	72,400,000	72,400,000	0	72,400,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>463,112,068,000</b>	<b>439,144,624,000</b>	<b>436,547,676,918</b>	<b>85,557,077</b>	<b>436,462,119,841</b>	<b>99.41</b>	<b>2,682,504,159</b>
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,705,620,000	2,399,022,000	2,399,008,376	0	2,399,008,376	100	13,624
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113</b>	<b>1,705,620,000</b>	<b>2,399,022,000</b>	<b>2,399,008,376</b>	<b>0</b>	<b>2,399,008,376</b>	<b>100</b>	<b>13,624</b>
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511514	Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau	0	348,274,000	348,272,400	0	348,272,400	100	1,600
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115</b>	<b>0</b>	<b>348,274,000</b>	<b>348,272,400</b>	<b>0</b>	<b>348,272,400</b>	<b>100</b>	<b>1,600</b>
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	57,862,000	1,872,064,000	1,825,659,000	0	1,825,659,000	97.52	46,405,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,000	72,000	29,654	0	29,654	41.19	42,346
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,796,000	117,184,000	78,359,620	0	78,359,620	66.87	38,824,380
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,162,000	27,020,000	20,053,688	0	20,053,688	74.22	6,966,312
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	61,250,000	61,250,000	17,500,000	0	17,500,000	28.57	43,750,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	262,150,000	255,056,000	0	255,056,000	97.29	7,094,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,060,000	98,688,000	81,689,760	0	81,689,760	82.78	16,998,240
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8,856,000	337,712,000	317,041,000	0	317,041,000	93.88	20,671,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	0	875,000	875,000	0	875,000	100	0

*gaf*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
Tanggal : 05/05/25 10:25 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	2,975,000	2,975,000	0	2,975,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	2,000	0	0	0	0	2,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116</b>	<b>139,000,000</b>	<b>2,779,992,000</b>	<b>2,599,238,722</b>	<b>0</b>	<b>2,599,238,722</b>	<b>93.5</b>	<b>180,753,278</b>
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	14,459,524,000	16,985,566,000	16,539,934,000	0	16,539,934,000	97.38	445,632,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	21,113,000	17,781,000	0	17,781,000	84.22	3,332,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>	<b>14,459,524,000</b>	<b>17,006,679,000</b>	<b>16,557,715,000</b>	<b>0</b>	<b>16,557,715,000</b>	<b>97.36</b>	<b>448,964,000</b>
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	474,403,035,000	414,818,637,000	410,136,134,033	130,878,790	410,005,255,243	98.87	4,813,381,757
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	436,450,000	2,705,567,000	2,437,584,422	0	2,437,584,422	90.1	267,982,578
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124</b>	<b>474,839,485,000</b>	<b>417,524,204,000</b>	<b>412,573,718,455</b>	<b>130,878,790</b>	<b>412,442,839,665</b>	<b>98.81</b>	<b>5,081,364,335</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>954,255,697,000</b>	<b>879,202,795,000</b>	<b>871,025,629,871</b>	<b>216,435,867</b>	<b>870,809,194,004</b>	<b>99.07</b>	<b>8,393,600,996</b>
52	<b>BELANJA BARANG</b>							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	171,077,360,000	174,665,202,000	174,110,561,818	580,172	174,109,981,646	99.68	555,220,354
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	69,770,923,000	42,921,158,000	42,896,792,020	31,889,115	42,864,902,905	99.94	56,255,095
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,488,046,000	2,299,475,000	2,292,124,238	0	2,292,124,238	99.68	7,350,762
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	945,634,000	392,504,000	374,669,424	0	374,669,424	95.46	17,834,576
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,492,313,000	12,218,200,000	11,818,096,600	11,245,350	11,806,851,250	96.73	411,348,750
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	57,881,602,000	70,376,199,000	70,700,421,120	0	70,700,421,120	100.46	(324,222,120)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	48,100,000	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>320,703,978,000</b>	<b>302,872,738,000</b>	<b>302,192,665,220</b>	<b>43,714,637</b>	<b>302,148,950,583</b>	<b>99.78</b>	<b>723,787,417</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	116,570,193,000	138,822,825,000	127,433,120,211	8,729,800	127,424,390,411	91.8	11,398,434,589
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	21,349,557,000	18,734,393,000	18,474,254,000	10,198,750	18,464,055,250	98.61	270,337,750
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	147,524,090,000	153,054,542,000	152,851,349,396	0	152,851,349,396	99.87	203,192,604
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	8,784,288,000	8,784,288,000	0	8,784,288,000	100	0
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,800,000	130,000	0	0	0	0	130,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	707,650,000	549,482,000	539,786,522	0	539,786,522	98.24	9,695,478
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	44,000,000	44,388,000	44,375,000	0	44,375,000	99.97	13,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>286,197,290,000</b>	<b>319,990,048,000</b>	<b>308,127,173,129</b>	<b>18,928,550</b>	<b>308,108,244,579</b>	<b>96.29</b>	<b>11,881,803,421</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,795,997,000	40,519,916,000	40,493,136,077	0	40,493,136,077	99.93	26,779,923
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	1,500,000	100,000	0	0	0	0	100,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	476,635,000	793,836,000	793,834,504	0	793,834,504	100	1,496

*gus*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
Tanggal : 05/05/25 10:25 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	26,274,132,000	41,313,852,000	41,286,970,581	0	41,286,970,581	99.93	26,881,419
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	41,086,774,000	41,917,192,000	41,540,212,201	0	41,540,212,201	99.1	376,979,799
522112	Belanja Langganan Telepon	1,178,300,000	412,812,000	391,135,267	0	391,135,267	94.75	21,676,733
522113	Belanja Langganan Air	5,687,019,000	4,272,496,000	4,271,086,685	0	4,271,086,685	99.97	1,409,315
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,150,955,000	945,895,000	934,819,718	0	934,819,718	98.83	11,075,282
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2,750,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	105,410,029,000	243,205,121,000	234,290,251,832	1,750,000	234,288,501,832	96.33	8,916,619,168
522141	Belanja Sewa	87,336,524,000	108,488,565,000	106,677,697,866	10,410,484	106,667,287,382	98.33	1,821,277,618
522151	Belanja Jasa Profesi	50,831,922,000	48,193,277,000	46,202,289,279	91,315,000	46,110,974,279	95.87	2,082,302,721
522191	Belanja Jasa Lainnya	473,677,722,000	1,509,615,576,000	1,400,539,574,037	22,005,270	1,400,517,568,767	92.77	109,098,007,233
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	766,361,995,000	1,957,052,934,000	1,834,849,066,885	125,480,754	1,834,723,586,131	93.76	122,329,347,869
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71,013,532,000	81,189,754,000	81,949,538,970	44,470,934	81,905,068,036	100.94	(715,314,036)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,652,558,000	2,650,089,000	2,644,957,383	0	2,644,957,383	99.81	5,131,617
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,382,047,000	5,142,075,000	5,119,706,116	0	5,119,706,116	99.56	22,368,884
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42,374,143,000	39,619,086,000	38,937,518,912	248,209,360	38,689,309,552	98.28	929,776,448
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,957,862,000	1,972,654,000	1,750,520,009	0	1,750,520,009	88.74	222,133,991
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5,868,970,000	4,575,757,000	4,625,250,396	117,134,233	4,508,116,163	101.08	67,640,837
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,291,788,000	1,074,936,000	1,051,341,948	0	1,051,341,948	97.81	23,594,052
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	129,555,900,000	136,239,351,000	136,093,833,734	409,814,527	135,684,019,207	99.89	555,331,793
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	284,280,597,000	377,123,494,000	357,572,719,430	1,820,669,377	355,752,050,053	94.82	21,371,443,947
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1,662,193,000	3,022,524,000	2,367,306,425	0	2,367,306,425	78.32	655,217,575
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,460,285,000	10,471,310,000	10,019,751,561	150,000	10,019,601,561	95.69	451,708,439
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	134,319,539,000	131,980,371,000	123,015,844,453	172,690,320	122,843,154,133	93.21	9,137,216,867
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	57,604,937,000	75,603,554,000	71,240,323,167	257,543,477	70,982,779,690	94.23	4,620,774,310
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	490,327,551,000	598,201,253,000	564,215,945,036	2,251,053,174	561,964,891,862	94.32	36,236,361,138
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	6,553,034,000	14,504,687,000	13,783,572,232	424,474,280	13,359,097,952	95.03	1,145,589,048
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	6,553,034,000	14,504,687,000	13,783,572,232	424,474,280	13,359,097,952	95.03	1,145,589,048
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	0	28,578,173,000	0	0	0	0	28,578,173,000
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada	0	25,408,512,000	0	0	0	0	25,408,512,000

*gaf*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
Tanggal : 05/05/25 10:25 AM  
Halaman : 4  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	0	94,061,063,000	0	0	0	0	94,061,063,000
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261</b>	<b>500,000,000</b>	<b>149,547,748,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,547,748,000</b>
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas							
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan	2,134,136,000	866,260,000	865,762,700	0	865,762,700	99.94	497,300
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262</b>	<b>2,134,136,000</b>	<b>866,260,000</b>	<b>865,762,700</b>	<b>0</b>	<b>865,762,700</b>	<b>99.94</b>	<b>497,300</b>
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda							
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	224,475,725,000	289,067,831,000	289,053,246,804	0	289,053,246,804	99.99	14,584,196
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263</b>	<b>224,475,725,000</b>	<b>289,067,831,000</b>	<b>289,053,246,804</b>	<b>0</b>	<b>289,053,246,804</b>	<b>99.99</b>	<b>14,584,196</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>2,253,083,741,000</b>	<b>3,809,656,702,000</b>	<b>3,490,468,236,321</b>	<b>3,273,465,922</b>	<b>3,487,194,770,399</b>	<b>91.62</b>	<b>322,461,931,601</b>
53	<b>BELANJA MODAL</b>							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77,075,689,000	544,435,821,000	543,210,707,156	6,505,714	543,204,201,442	99.77	1,231,619,558
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,200,000,000	3,129,079,000	3,122,874,325	0	3,122,874,325	99.8	6,204,675
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>79,275,689,000</b>	<b>547,564,900,000</b>	<b>546,333,581,481</b>	<b>6,505,714</b>	<b>546,327,075,767</b>	<b>99.78</b>	<b>1,237,824,233</b>
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	189,635,000	187,685,000	0	187,685,000	98.97	1,950,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	6,222,897,000	15,861,533,000	15,757,428,521	0	15,757,428,521	99.34	104,104,479
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331</b>	<b>6,222,897,000</b>	<b>16,051,168,000</b>	<b>15,945,113,521</b>	<b>0</b>	<b>15,945,113,521</b>	<b>99.34</b>	<b>106,054,479</b>
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	200,000,000	771,740,000	769,825,000	0	769,825,000	99.75	1,915,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341</b>	<b>200,000,000</b>	<b>771,740,000</b>	<b>769,825,000</b>	<b>0</b>	<b>769,825,000</b>	<b>99.75</b>	<b>1,915,000</b>
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	54,089,733,000	95,724,414,000	95,111,415,719	9,861,500	95,101,554,219	99.36	622,859,781
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1,744,000,000	5,065,847,000	4,922,104,419	0	4,922,104,419	97.16	143,742,581
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361</b>	<b>55,833,733,000</b>	<b>100,790,261,000</b>	<b>100,033,520,138</b>	<b>9,861,500</b>	<b>100,023,658,638</b>	<b>99.25</b>	<b>766,602,362</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>	<b>141,532,319,000</b>	<b>665,178,069,000</b>	<b>663,082,040,140</b>	<b>16,367,214</b>	<b>663,065,672,926</b>	<b>99.68</b>	<b>2,112,396,074</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3,348,871,757,000</b>	<b>5,354,037,566,000</b>	<b>5,024,575,906,332</b>	<b>3,506,269,003</b>	<b>5,021,069,637,329</b>	<b>93.85</b>	<b>332,967,928,671</b>

*gaf*



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATKER

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
010010100KP 403200	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA SEKRETARIAT JENDERAL	567,297,544,000	663,728,823,000	657,032,553,004	557,210,294	656,475,342,710	98.91	7,253,480,290
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	567,297,544,000	663,728,823,000	657,032,553,004	557,210,294	656,475,342,710	98.99	7,253,480,290
010010200KP 448302	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	427,873,283,000	433,452,626,000	433,133,840,375	238,713,333	432,895,127,042	99.87	557,498,958
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	427,873,283,000	433,452,626,000	433,133,840,375	238,713,333	432,895,127,042	99.93	557,498,958
010010800KD 677045	BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	24,646,457,000	23,887,688,000	23,870,651,348	1,182	23,870,650,166	99.93	17,037,834
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT	24,646,457,000	23,887,688,000	23,870,651,348	1,182	23,870,650,166	99.93	17,037,834
010011300KD 683070	BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	30,027,005,000	27,509,409,000	27,509,188,148	371,600	27,508,816,548	100	592,452
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	30,027,005,000	27,509,409,000	27,509,188,148	371,600	27,508,816,548	100	592,452
010011700KD 677010	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	28,896,533,000	26,652,547,000	26,636,924,752	34,454	26,636,890,298	99.94	15,656,702
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	28,896,533,000	26,652,547,000	26,636,924,752	34,454	26,636,890,298	99.94	15,656,702
010011900KD 677024	BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	32,855,243,000	30,908,688,000	30,908,068,918	22,466,566	30,885,602,352	99.93	23,085,648
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN	32,855,243,000	30,908,688,000	30,908,068,918	22,466,566	30,885,602,352	100	23,085,648
010012300KD 683084	BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	31,494,444,000	28,554,535,000	28,211,225,041	3,411,524	28,207,813,517	98.79	346,721,483
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	31,494,444,000	28,554,535,000	28,211,225,041	3,411,524	28,207,813,517	98.8	346,721,483
010012500KD 683091	BA(010) ES1(01) PAPUA IPDN KAMPUS PAPUA	32,885,290,000	31,638,268,000	31,638,182,933	1,225	31,638,181,708	100	86,292
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(01) PAPUA	32,885,290,000	31,638,268,000	31,638,182,933	1,225	31,638,181,708	100	86,292
null 483005	Kode UAPPAW Tidak Ada DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	67,532,578,000	76,268,173,000	76,116,151,383	392,400,154	75,723,751,229	99.29	544,421,771
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	67,532,578,000	76,268,173,000	76,116,151,383	392,400,154	75,723,751,229	99.8	544,421,771
	JUMLAH BELANJA 01	1,243,508,377,000	1,342,600,757,000	1,335,056,785,902	1,214,610,332	1,333,842,175,570	99.44	8758581430
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
010020100KP 027203	BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	81,036,698,000	88,732,681,000	88,261,883,714	62,222,712	88,199,661,002	99.4	533,019,998
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA	81,036,698,000	88,732,681,000	88,261,883,714	62,222,712	88,199,661,002	99.47	533,019,998
	JUMLAH BELANJA 02	81,036,698,000	88,732,681,000	88,261,883,714	62,222,712	88,199,661,002	99.47	533019998

945

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
010030100KP	BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA							
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	223,062,368,000	221,138,641,000	220,430,489,194	17,948,093	220,412,541,101	99.67	726,099,899
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA	223,062,368,000	221,138,641,000	220,430,489,194	17,948,093	220,412,541,101	99.68	726,099,899
	JUMLAH BELANJA 03	223,062,368,000	221,138,641,000	220,430,489,194	17,948,093	220,412,541,101	99.68	726099899
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	1,051,906,000	977,252,000	976,490,000	0	976,490,000	99.92	762,000
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	1,051,906,000	977,252,000	976,490,000	0	976,490,000	99.92	762,000
010040100KP	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA							
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	117,610,770,000	176,973,175,000	164,466,731,294	113,486,633	164,353,244,661	92.87	12,619,930,339
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	117,610,770,000	176,973,175,000	164,466,731,294	113,486,633	164,353,244,661	92.93	12,619,930,339
010040400	BA(010) ES1(04) DI YOGYAKARTA							
049061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	1,030,914,000	682,848,000	682,525,400	0	682,525,400	99.95	322,600
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) DI YOGYAKARTA	1,030,914,000	682,848,000	682,525,400	0	682,525,400	99.95	322,600
010040700	BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA							
079078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	1,578,732,000	1,180,436,000	1,175,269,386	3,502,936	1,171,766,450	99.27	8,669,550
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SUMATERA UTARA	1,578,732,000	1,180,436,000	1,175,269,386	3,502,936	1,171,766,450	99.56	8,669,550
010040800	BA(010) ES1(04) SUMATERA BARAT							
089106	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1,435,373,000	921,996,000	846,306,831	0	846,306,831	91.79	75,689,169
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SUMATERA BARAT	1,435,373,000	921,996,000	846,306,831	0	846,306,831	91.79	75,689,169
010040900DK	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU							
099438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	1,327,327,000	1,233,126,000	1,230,538,554	0	1,230,538,554	99.79	2,587,446
433317	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU	117,667,000	33,549,000	30,320,000	0	30,320,000	90.38	3,229,000
	JUMLAH BELANJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU	1,444,994,000	1,266,675,000	1,260,858,554	0	1,260,858,554	99.54	5,816,446
010041400DK	BA(010) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH Dekonsentrasi							
149072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1,510,832,000	1,048,128,000	1,008,595,750	0	1,008,595,750	96.23	39,532,250
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH Dekonsentrasi	1,510,832,000	1,048,128,000	1,008,595,750	0	1,008,595,750	96.23	39,532,250
010041900	BA(010) ES1(04) SULAWESI SELATAN							
199080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	1,893,662,000	1,420,049,000	1,363,020,130	0	1,363,020,130	95.98	57,028,870
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SULAWESI SELATAN	1,893,662,000	1,420,049,000	1,363,020,130	0	1,363,020,130	95.98	57,028,870
010042000	BA(010) ES1(04) SULAWESI TENGGARA							
209071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1,435,589,000	939,891,000	676,094,026	0	676,094,026	71.93	263,796,974

*Handwritten signature/initials*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	1,435,589,000	939,891,000	676,094,026	0	676,094,026	71.93	263,796,974
010042100 219062	BA(010) ES1(04) MALUKU SEKRETARIAT DAERAH PROP. MALUKU	1,570,723,000	1,409,858,000	1,421,011,129	40,522,091	1,380,489,038	97.92	29,368,962
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) MALUKU	1,570,723,000	1,409,858,000	1,421,011,129	40,522,091	1,380,489,038	100.79	29,368,962
010042600 269093 433344	BA(010) ES1(04) BENGKULU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	1,180,416,000 153,095,000	847,893,000 94,253,000	842,992,046 94,199,450	0 0	842,992,046 94,199,450	99.42 99.94	4,900,954 53,550
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BENGKULU	1,333,511,000	942,146,000	937,191,496	0	937,191,496	99.47	4,954,504
010042900 299348	BA(010) ES1(04) BANTEN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN	753,436,000	510,336,000	466,699,300	0	466,699,300	91.45	43,636,700
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BANTEN	753,436,000	510,336,000	466,699,300	0	466,699,300	91.45	43,636,700
010043000 309148 433343	BA(010) ES1(04) BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANGKA BELITUNG	1,289,266,000 123,855,000	937,414,000 59,728,000	923,283,183 59,691,200	0 0	923,283,183 59,691,200	98.49 99.94	14,130,817 36,800
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(04) BANGKA BELITUNG	1,413,121,000	997,142,000	982,974,383	0	982,974,383	98.58	14,167,617
010043400DK 340166	BA(010)ES(04) SULAWESI BARAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	1,157,739,000	1,075,573,000	1,069,678,106	0	1,069,678,106	99.45	5,894,894
	JUMLAH BELANJA BA(010)ES(04) SULAWESI BARAT	1,157,739,000	1,075,573,000	1,069,678,106	0	1,069,678,106	99.45	5,894,894
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
019080	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	301,425,000	226,279,000	224,601,519	0	224,601,519	99.26	1,677,481
029134	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	2,177,100,000	1,491,577,000	1,373,550,942	1,953,500	1,371,597,442	91.96	119,979,558
039667	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1,706,817,000	1,273,638,000	1,234,335,307	182,000	1,234,153,307	96.9	39,484,693
059663	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	809,379,000	0	0	0	0	0	0
069084	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ACEH	2,204,751,000	1,700,065,000	1,579,383,127	0	1,579,383,127	92.9	120,681,873
109074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI	1,240,222,000	964,685,000	964,667,484	0	964,667,484	100	17,516
119082	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1,747,178,000	1,205,639,000	1,203,371,300	0	1,203,371,300	99.81	2,267,700
129074	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1,392,278,000	1,010,686,000	988,234,179	0	988,234,179	97.78	22,451,821
129098	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	131,707,000	81,086,000	81,086,000	0	81,086,000	100	0
139078	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1,408,422,000	1,308,465,000	1,304,049,335	0	1,304,049,335	99.66	4,415,665
149130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	146,133,000	89,967,000	89,966,200	0	89,966,200	100	800
159071	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1,164,721,000	899,461,000	871,772,544	0	871,772,544	96.92	27,688,456
169185	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	587,087,000	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 4  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
179088	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA	224,067,000	137,948,000	137,926,774	0	137,926,774	99.98	21,226
179223	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2,205,920,000	2,299,364,000	2,299,230,191	0	2,299,230,191	99.99	133,809
189087	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1,598,324,000	1,210,613,000	1,208,124,874	0	1,208,124,874	99.79	2,488,126
209095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	246,449,000	151,727,000	151,727,000	0	151,727,000	100	0
229068	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	1,272,025,000	1,157,518,000	1,156,325,497	0	1,156,325,497	99.9	1,192,503
239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,507,775,000	1,400,767,000	1,391,857,382	18,692,579	1,373,164,803	98.03	27,602,197
240270	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. BELU	1,099,925,000	931,974,000	931,406,400	292,800	931,113,600	99.91	860,400
249136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2,234,497,000	2,075,913,000	2,069,998,724	0	2,069,998,724	99.72	5,914,276
249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	262,006,000	161,305,000	161,247,380	0	161,247,380	99.96	57,620
250048	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	969,652,000	546,999,000	502,955,260	0	502,955,260	91.95	44,043,740
259084	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA	195,905,000	19,530,000	0	0	0	0	19,530,000
289095	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA	162,196,000	79,725,000	77,492,000	0	77,492,000	97.2	2,233,000
289174	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	1,705,997,000	1,705,973,000	1,665,394,600	0	1,665,394,600	97.62	40,578,400
329116	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	979,217,000	686,638,000	683,991,817	0	683,991,817	99.61	2,646,183
339161	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	796,519,000	70,110,000	70,110,000	0	70,110,000	100	0
349011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	126,154,000	77,667,000	76,935,600	0	76,935,600	99.06	731,400
359002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	135,567,000	83,462,000	82,662,353	0	82,662,353	99.04	799,647
417697	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,108,072,000	840,613,000	822,483,518	0	822,483,518	97.84	18,129,482
433316	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT	246,839,000	87,184,000	87,144,408	0	87,144,408	99.95	39,592
433318	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	101,509,000	33,115,000	32,730,000	0	32,730,000	98.84	385,000
433341	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI	156,680,000	44,673,000	43,410,000	0	43,410,000	97.17	1,263,000
433342	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN	194,430,000	119,701,000	118,567,190	0	118,567,190	99.05	1,133,810
433345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN	107,066,000	65,916,000	65,158,000	0	65,158,000	98.85	758,000
433347	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	125,786,000	35,864,000	30,572,600	0	30,572,600	85.25	5,291,400
433348	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	155,047,000	95,455,000	95,455,000	0	95,455,000	100	0
433349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	133,885,000	82,427,000	82,078,980	0	82,078,980	99.58	348,020
433350	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH	188,614,000	116,121,000	116,121,000	0	116,121,000	100	0

*Handwritten signature/initials*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 5  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
433351	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN	192,756,000	118,671,000	118,670,000	0	118,670,000	100	1,000
433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	152,225,000	77,252,000	77,130,000	0	77,130,000	99.84	122,000
433353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU	157,005,000	96,661,000	96,613,260	0	96,613,260	99.95	47,740
484101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH	261,368,000	160,912,000	160,718,260	0	160,718,260	99.88	193,740
484102	BAPPEDA PROVINSI ACEH	550,751,000	225,979,000	184,132,434	0	184,132,434	81.48	41,846,566
484103	INSPEKTORAT PROVINSI ACEH	290,542,000	131,697,000	126,699,624	0	126,699,624	96.21	4,997,376
484105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA	195,354,000	79,797,000	75,586,632	3,450,000	72,136,632	90.4	7,660,368
484106	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA (BAPPELITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA)	353,955,000	145,426,000	145,255,789	0	145,255,789	99.88	170,211
484107	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA	245,767,000	138,739,000	126,226,000	0	126,226,000	90.98	12,513,000
484109	BAPPEDA PROVINSI RIAU	329,422,000	182,328,000	179,572,245	0	179,572,245	98.49	2,755,755
484110	INSPEKTORAT PROVINSI RIAU	153,574,000	94,548,000	93,788,650	0	93,788,650	99.2	759,350
484112	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	321,400,000	91,638,000	87,220,059	0	87,220,059	95.18	4,417,941
484113	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	101,762,000	29,014,000	26,819,700	597,750	26,221,950	90.38	2,792,050
484115	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	381,925,000	235,133,000	231,219,470	0	231,219,470	98.34	3,913,530
484116	INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI	182,823,000	112,556,000	111,424,500	0	111,424,500	98.99	1,131,500
484118	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	390,101,000	177,184,000	174,523,305	0	174,523,305	98.5	2,660,695
484119	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	194,635,000	87,264,000	83,935,328	0	83,935,328	96.19	3,328,672
484121	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	404,304,000	190,849,000	188,230,730	0	188,230,730	98.63	2,618,270
484122	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	177,900,000	50,723,000	47,562,816	0	47,562,816	93.77	3,160,184
484124	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	344,073,000	174,925,000	174,684,500	0	174,684,500	99.86	240,500
484125	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	166,148,000	102,290,000	101,149,500	0	101,149,500	98.89	1,140,500
484127	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	304,869,000	183,528,000	183,202,400	0	183,202,400	99.82	325,600
484128	INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU	134,482,000	38,343,000	38,335,800	0	38,335,800	99.98	7,200
484131	BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	352,382,000	167,982,000	167,243,772	0	167,243,772	99.56	738,228
484132	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	193,777,000	119,299,000	118,123,000	0	118,123,000	99.01	1,176,000
484134	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	177,109,000	56,350,000	55,914,000	0	55,914,000	99.23	436,000
484135	INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN	90,647,000	25,845,000	25,845,000	0	25,845,000	100	0
484137	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	238,415,000	125,740,000	124,879,660	0	124,879,660	99.32	860,340
484138	BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	528,753,000	277,952,000	277,224,503	0	277,224,503	99.74	727,497
484139	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT	235,784,000	111,620,000	111,500,128	0	111,500,128	99.89	119,872

*gub*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 6  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
484145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	266,932,000	140,235,000	140,198,390	0	140,198,390	99.97	36,610
484146	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	506,777,000	224,308,000	189,950,500	0	189,950,500	84.68	34,357,500
484147	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	327,892,000	201,868,000	200,608,490	0	200,608,490	99.38	1,259,510
484149	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIY	113,198,000	69,691,000	69,691,000	0	69,691,000	100	0
484150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH DIY	277,654,000	136,969,000	136,134,000	0	136,134,000	99.39	835,000
484151	INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA	139,346,000	68,469,000	68,469,000	0	68,469,000	100	0
484153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	203,004,000	91,356,000	91,346,900	0	91,346,900	99.99	9,100
484154	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR	503,295,000	194,459,000	191,977,800	0	191,977,800	98.72	2,481,200
484157	BAPPEDA PROVINSI BALI	346,781,000	150,263,000	137,287,000	0	137,287,000	91.36	12,976,000
484158	INSPEKTORAT PROVINSI BALI	151,923,000	70,431,000	69,947,640	0	69,947,640	99.31	483,360
484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	400,872,000	212,726,000	212,678,000	0	212,678,000	99.98	48,000
484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	193,760,000	90,872,000	90,597,179	0	90,597,179	99.7	274,821
484163	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	878,634,000	409,633,000	409,624,141	0	409,624,141	100	8,859
484164	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	289,720,000	140,345,000	124,391,000	0	124,391,000	88.63	15,954,000
484166	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	665,268,000	283,204,000	274,793,716	0	274,793,716	97.03	8,410,284
484167	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	185,105,000	85,550,000	84,780,090	0	84,780,090	99.1	769,910
484169	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	376,771,000	185,573,000	184,596,198	0	184,596,198	99.47	976,802
484170	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	185,663,000	114,304,000	113,967,398	0	113,967,398	99.71	336,602
484172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	123,105,000	51,088,000	35,861,000	0	35,861,000	70.19	15,227,000
484173	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	252,629,000	155,532,000	155,383,136	0	155,383,136	99.9	148,864
484174	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	144,418,000	0	0	0	0	0	0
484176	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	120,310,000	0	0	0	0	0	0
484177	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	397,398,000	113,306,000	109,904,491	0	109,904,491	97	3,401,509
484178	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	113,732,000	32,427,000	16,340,000	0	16,340,000	50.39	16,087,000
484180	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	526,156,000	84,634,000	56,045,399	0	56,045,399	66.22	28,588,601
484181	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	128,634,000	52,919,000	52,750,100	0	52,750,100	99.68	168,900
484183	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA	783,206,000	412,149,000	400,652,251	0	400,652,251	97.21	11,496,749
484184	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA	289,757,000	178,390,000	178,390,000	0	178,390,000	100	0
484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	297,352,000	135,697,000	135,670,109	0	135,670,109	99.98	26,891
484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	134,355,000	56,211,000	56,155,000	0	56,155,000	99.9	56,000
484190	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	343,091,000	153,991,000	153,989,920	0	153,989,920	100	1,080

*gub*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 7  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	154,718,000	78,041,000	77,978,000	0	77,978,000	99.92	63,000
484193	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	440,748,000	125,666,000	124,627,283	300,000	124,327,283	98.93	1,338,717
484194	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	251,180,000	117,530,000	117,508,300	0	117,508,300	99.98	21,700
484196	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	380,573,000	200,834,000	200,802,800	0	200,802,800	99.98	31,200
484197	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	180,866,000	83,870,000	82,935,440	0	82,935,440	98.89	934,560
484199	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	465,573,000	247,930,000	247,930,000	0	247,930,000	100	0
484200	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA	327,125,000	141,202,000	139,961,200	0	139,961,200	99.12	1,240,800
484202	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	592,112,000	331,855,000	331,193,000	0	331,193,000	99.8	662,000
484203	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU	240,118,000	68,462,000	68,219,118	0	68,219,118	99.65	242,882
484205	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	463,717,000	213,782,000	208,681,750	0	208,681,750	97.61	5,100,250
484206	INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA	211,772,000	0	0	0	0	0	0
484208	BAPPEDA PROVINSI PAPUA	396,027,000	0	0	0	0	0	0
484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	187,901,000	63,718,000	63,716,300	0	63,716,300	100	1,700
484211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT	142,314,000	0	0	0	0	0	0
484212	BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT	172,658,000	0	0	0	0	0	0
484213	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT	153,902,000	43,879,000	43,879,000	0	43,879,000	100	0
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	55,489,393,000	34,393,464,000	33,639,167,589	25,468,629	33,613,698,960	97.81	779,765,040
	JUMLAH BELANJA 04	190,710,695,000	224,738,969,000	210,972,613,374	182,980,289	210,789,633,085	93.87	13949335915
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
010050100KP	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA							
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	107,332,085,000	1,176,545,051,000	1,055,874,010,590	974,543,245	1,054,899,467,345	89.66	121,645,583,655
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	107,332,085,000	1,176,545,051,000	1,055,874,010,590	974,543,245	1,054,899,467,345	89.74	121,645,583,655
010050400KD	BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA							
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	13,015,520,000	13,389,106,000	13,140,954,418	4,106,410	13,136,848,008	98.12	252,257,992
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA	13,015,520,000	13,389,106,000	13,140,954,418	4,106,410	13,136,848,008	98.15	252,257,992
010050500KD	BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR							
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	12,293,922,000	13,104,433,000	12,912,853,417	22,110,952	12,890,742,465	98.37	213,690,535
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR	12,293,922,000	13,104,433,000	12,912,853,417	22,110,952	12,890,742,465	98.54	213,690,535
010051200KD	BA(010) ES1(05) LAMPUNG							
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	11,638,792,000	11,582,858,000	11,396,461,443	9,006,505	11,387,454,938	98.31	195,403,062
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(05) LAMPUNG	11,638,792,000	11,582,858,000	11,396,461,443	9,006,505	11,387,454,938	98.39	195,403,062
	JUMLAH BELANJA 05	144,280,319,000	1,214,621,448,000	1,093,324,279,868	1,009,767,112	1,092,314,512,756	90.01	122306935244
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
010060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							

905

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 8  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	185,993,148,000	491,910,565,000	332,083,507,294	376,801,092	331,706,706,202	67.43	160,203,858,798
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	185,993,148,000	491,910,565,000	332,083,507,294	376,801,092	331,706,706,202	67.51	160,203,858,798
	JUMLAH BELANJA 06	185,993,148,000	491,910,565,000	332,083,507,294	376,801,092	331,706,706,202	67.51	160203858798
07 010070100KP 621892	DITJEN OTONOMI DAERAH BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA DITJEN OTONOMI DAERAH	99,061,548,000	95,012,875,000	91,113,353,918	210,146,937	90,903,206,981	95.67	4,109,668,019
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA	99,061,548,000	95,012,875,000	91,113,353,918	210,146,937	90,903,206,981	95.9	4,109,668,019
	JUMLAH BELANJA 07	99,061,548,000	95,012,875,000	91,113,353,918	210,146,937	90,903,206,981	95.9	4109668019
08 010080100KP 634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	804,942,775,000	1,278,777,600,000	1,261,819,250,731	135,368,324	1,261,683,882,407	98.66	17,093,717,593
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA	804,942,775,000	1,278,777,600,000	1,261,819,250,731	135,368,324	1,261,683,882,407	98.67	17,093,717,593
	JUMLAH BELANJA 08	804,942,775,000	1,278,777,600,000	1,261,819,250,731	135,368,324	1,261,683,882,407	98.67	17093717593
09 010090100KP 662766	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	113,886,425,000	110,137,836,000	107,493,995,075	166,008,509	107,327,986,566	97.45	2,809,849,434
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	113,886,425,000	110,137,836,000	107,493,995,075	166,008,509	107,327,986,566	97.6	2,809,849,434
	JUMLAH BELANJA 09	113,886,425,000	110,137,836,000	107,493,995,075	166,008,509	107,327,986,566	97.6	2809849434
11 010110100KP 403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	56,321,248,000	55,559,478,000	54,579,518,742	24,632,380	54,554,886,362	98.19	1,004,591,638
	JUMLAH BELANJA SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	56,321,248,000	55,559,478,000	54,579,518,742	24,632,380	54,554,886,362	98.24	1,004,591,638
	JUMLAH BELANJA 11	56,321,248,000	55,559,478,000	54,579,518,742	24,632,380	54,554,886,362	98.24	1004591638
12 010120100KP 403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode UAPPAW Tidak Ada BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	109,245,108,000	113,488,235,000	112,694,410,077	46,911,722	112,647,498,355	99.26	840,736,645
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	109,245,108,000	113,488,235,000	112,694,410,077	46,911,722	112,647,498,355	99.3	840,736,645
010120200KD 403216	BA(010) ES1(12) JAWA BARAT PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	23,764,765,000	27,538,245,000	27,435,385,333	561,698	27,434,823,635	99.62	103,421,365
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) JAWA BARAT	23,764,765,000	27,538,245,000	27,435,385,333	561,698	27,434,823,635	99.63	103,421,365
010120400KD 027114	BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	26,662,005,000	30,364,621,000	30,188,565,216	12,834,973	30,175,730,243	99.38	188,890,757

*Handwritten signature*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 9  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA	26,662,005,000	30,364,621,000	30,188,565,216	12,834,973	30,175,730,243	99.42	188,890,757
010120800KD 506137	BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	16,873,054,000	23,041,493,000	22,781,680,248	4,997,147	22,776,683,101	98.85	264,809,899
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT	16,873,054,000	23,041,493,000	22,781,680,248	4,997,147	22,776,683,101	98.87	264,809,899
010121900KD 027177	BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	20,123,482,000	25,728,570,000	25,675,158,042	16,075,127	25,659,082,915	99.73	69,487,085
	JUMLAH BELANJA BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN	20,123,482,000	25,728,570,000	25,675,158,042	16,075,127	25,659,082,915	99.79	69,487,085
null 506138	Kode UAPPAW Tidak Ada BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9,399,742,000	10,645,552,000	10,665,029,604	24,402,556	10,640,627,048	99.95	4,924,952
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	9,399,742,000	10,645,552,000	10,665,029,604	24,402,556	10,640,627,048	100.18	4,924,952
	JUMLAH BELANJA 12	206,068,156,000	230,806,716,000	229,440,228,520	105,783,223	229,334,445,297	99.41	1472270703
	JUMLAH BELANJA	3,348,871,757,000	5,354,037,566,000	5,024,575,906,332	3,506,269,003	5,021,069,637,329	93.85	332,967,928,671

*gub*



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	481,368,889,000	415,593,843,000	412,353,663,114	31,431,433	412,322,231,681	99.21	3,271,611,319
52	BELANJA BARANG	677,848,774,000	711,954,623,000	708,338,827,668	1,166,811,685	707,172,015,983	99.33	4,782,607,017
53	BELANJA MODAL	84,290,714,000	215,052,291,000	214,364,295,120	16,367,214	214,347,927,906	99.67	704,363,094
	<b>JUMLAH BELANJA (01) SEKRETARIAT JENDERAL</b>	<b>1,243,508,377,000</b>	<b>1,342,600,757,000</b>	<b>1,335,056,785,902</b>	<b>1,214,610,332</b>	<b>1,333,842,175,570</b>	<b>99.44</b>	<b>8,758,581,430</b>
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	42,599,689,000	45,266,747,000	45,266,716,394	9,353,885	45,257,362,509	99.98	9,384,491
52	BELANJA BARANG	36,937,009,000	42,465,934,000	41,995,792,426	52,868,827	41,942,923,599	98.77	523,010,401
53	BELANJA MODAL	1,500,000,000	1,000,000,000	999,374,894	0	999,374,894	99.94	625,106
	<b>JUMLAH BELANJA (02) INSPEKTORAT JENDERAL</b>	<b>81,036,698,000</b>	<b>88,732,681,000</b>	<b>88,261,883,714</b>	<b>62,222,712</b>	<b>88,199,661,002</b>	<b>99.47</b>	<b>533,019,998</b>
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							
51	BELANJA PEGAWAI	35,888,624,000	36,615,605,000	36,585,266,086	1,125,212	36,584,140,874	99.91	31,464,126
52	BELANJA BARANG	185,673,744,000	183,023,036,000	182,345,311,535	16,822,881	182,328,488,654	99.62	694,547,346
53	BELANJA MODAL	1,500,000,000	1,500,000,000	1,499,911,573	0	1,499,911,573	99.99	88,427
	<b>JUMLAH BELANJA (03) DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>223,062,368,000</b>	<b>221,138,641,000</b>	<b>220,430,489,194</b>	<b>17,948,093</b>	<b>220,412,541,101</b>	<b>99.68</b>	<b>726,099,899</b>
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							
51	BELANJA PEGAWAI	44,061,322,000	38,283,544,000	38,023,406,127	8,786,964	38,014,619,163	99.3	268,924,837
52	BELANJA BARANG	143,749,373,000	183,555,425,000	170,050,586,897	174,193,325	169,876,393,572	92.55	13,679,031,428
53	BELANJA MODAL	2,900,000,000	2,900,000,000	2,898,620,350	0	2,898,620,350	99.95	1,379,650
	<b>JUMLAH BELANJA (04) DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN</b>	<b>190,710,695,000</b>	<b>224,738,969,000</b>	<b>210,972,613,374</b>	<b>182,980,289</b>	<b>210,789,633,085</b>	<b>93.87</b>	<b>13,949,335,915</b>
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA							
51	BELANJA PEGAWAI	64,689,555,000	62,567,818,000	60,744,019,670	26,377,506	60,717,642,164	97.04	1,850,175,836
52	BELANJA BARANG	77,615,764,000	1,125,751,310,000	1,006,614,108,250	983,389,606	1,005,630,718,644	89.33	120,120,591,356
53	BELANJA MODAL	1,975,000,000	26,302,320,000	25,966,151,948	0	25,966,151,948	98.72	336,168,052
	<b>JUMLAH BELANJA (05) DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>144,280,319,000</b>	<b>1,214,621,448,000</b>	<b>1,093,324,279,868</b>	<b>1,009,767,112</b>	<b>1,092,314,512,756</b>	<b>90.01</b>	<b>122,306,935,244</b>
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	46,779,880,000	46,779,880,000	46,613,218,899	2,002,288	46,611,216,611	99.64	168,663,389
52	BELANJA BARANG	138,102,371,000	443,275,074,000	283,617,973,895	374,798,804	283,243,175,091	63.9	160,031,898,909
53	BELANJA MODAL	1,110,897,000	1,855,611,000	1,852,314,500	0	1,852,314,500	99.82	3,296,500
	<b>JUMLAH BELANJA (06) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>185,993,148,000</b>	<b>491,910,565,000</b>	<b>332,083,507,294</b>	<b>376,801,092</b>	<b>331,706,706,202</b>	<b>67.51</b>	<b>160,203,858,798</b>
07	DITJEN OTONOMI DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	45,559,723,000	41,511,050,000	41,506,626,371	106,057,864	41,400,568,507	99.73	110,481,493
52	BELANJA BARANG	52,741,825,000	52,501,825,000	48,608,843,101	104,089,073	48,504,754,028	92.39	3,997,070,972
53	BELANJA MODAL	760,000,000	1,000,000,000	997,884,446	0	997,884,446	99.79	2,115,554

*Handwritten signature*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_kl\_poc

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**: 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA (07) DITJEN OTONOMI DAERAH	99,061,548,000	95,012,875,000	91,113,353,918	210,146,937	90,903,206,981	95.9	4,109,668,019
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
51	BELANJA PEGAWAI	40,397,839,000	40,397,839,000	38,528,550,364	1,861,211	38,526,689,153	95.37	1,871,149,847
52	BELANJA BARANG	721,131,228,000	833,045,960,000	818,993,013,822	133,507,113	818,859,506,709	98.3	14,186,453,291
53	BELANJA MODAL	43,413,708,000	405,333,801,000	404,297,686,545	0	404,297,686,545	99.74	1,036,114,455
	JUMLAH BELANJA (08) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	804,942,775,000	1,278,777,600,000	1,261,819,250,731	135,368,324	1,261,683,882,407	98.67	17,093,717,593
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH							
51	BELANJA PEGAWAI	44,652,101,000	44,898,308,000	44,859,901,709	10,729,832	44,849,171,877	99.89	49,136,123
52	BELANJA BARANG	67,384,324,000	63,139,528,000	60,535,027,080	155,278,677	60,379,748,403	95.63	2,759,779,597
53	BELANJA MODAL	1,850,000,000	2,100,000,000	2,099,066,286	0	2,099,066,286	99.96	933,714
	JUMLAH BELANJA (09) DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	113,886,425,000	110,137,836,000	107,493,995,075	166,008,509	107,327,986,566	97.6	2,809,849,434
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI							
51	BELANJA PEGAWAI	24,923,984,000	24,923,984,000	24,263,219,107	2,678,011	24,260,541,096	97.34	663,442,904
52	BELANJA BARANG	30,538,264,000	29,776,494,000	29,458,483,760	21,954,369	29,436,529,391	98.86	339,964,609
53	BELANJA MODAL	859,000,000	859,000,000	857,815,875	0	857,815,875	99.86	1,184,125
	JUMLAH BELANJA (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM	56,321,248,000	55,559,478,000	54,579,518,742	24,632,380	54,554,886,362	98.24	1,004,591,638
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
51	BELANJA PEGAWAI	83,334,091,000	82,364,177,000	82,281,042,030	16,031,661	82,265,010,369	99.88	99,166,631
52	BELANJA BARANG	121,361,065,000	141,167,493,000	139,910,267,887	89,751,562	139,820,516,325	99.05	1,346,976,675
53	BELANJA MODAL	1,373,000,000	7,275,046,000	7,248,918,603	0	7,248,918,603	99.64	26,127,397
	JUMLAH BELANJA (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	206,068,156,000	230,806,716,000	229,440,228,520	105,783,223	229,334,445,297	99.41	1,472,270,703
	JUMLAH BELANJA	3,348,871,757,000	5,354,037,566,000	5,024,575,906,332	3,506,269,003	5,021,069,637,329	93.85	332,967,928,671

*gub*



# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
<b>01</b>	<b>RUPIAH MURNI</b>							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	85,780,358,000	70,329,062,000	60,300,102,116	88,654,216	60,211,447,900	11980.37	10,117,614,100
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	11,683,714,000	15,997,672,000	14,692,122,062	32,315,912	14,659,806,150	191.04	1,337,865,850
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	7,095,800,000	5,124,977,000	5,062,928,993	70,143,783	4,992,785,210	97.42	132,191,790
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	3,800,000,000	3,550,178,000	3,512,955,423	2,607,200	3,510,348,223	393.77	39,829,777
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	29,300,000,000	29,168,365,000	25,199,773,942	236,650,441	24,963,123,501	85.58	4,205,241,499
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	10,791,300,000	11,733,615,000	11,397,069,615	45,894,672	11,351,174,943	96.74	382,440,057
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4,031,094,000	4,031,094,000	3,299,406,044	532,400	3,298,873,644	81.84	732,220,356
1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	2,550,000,000	2,550,000,000	2,512,347,648	0	2,512,347,648	98.52	37,652,352
1283	Pembinaan inovasi daerah	4,140,000,000	3,704,269,000	3,645,647,504	6,794,068	3,638,853,436	98.23	65,415,564
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	1,666,011,000	1,766,011,000	1,737,864,848	0	1,737,864,848	98.41	28,146,152
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	4,115,872,000	4,115,872,000	3,394,903,828	9,097,507	3,385,806,321	82.26	730,065,679
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20,316,586,000	25,277,956,000	24,767,441,569	46,567,297	24,720,874,272	97.8	557,081,728
6138	Penataan kelembagaan Desa	6,867,557,000	6,151,910,000	5,958,718,178	16,871,197	5,941,846,981	96.59	210,063,019
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	32,730,850,000	32,549,067,000	26,866,538,156	85,889,921	26,780,648,235	82.28	5,768,418,765
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	14,805,237,000	13,862,922,000	12,282,158,174	28,147,236	12,254,010,938	88.39	1,608,911,062
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	48,934,984,000	43,242,841,000	41,324,944,756	132,577,335	41,192,367,421	95.26	2,050,473,579
6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5,000,000,000	4,570,960,000	4,515,409,914	500,000	4,514,909,914	98.77	56,050,086
6143	Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah	700,000,000	2,000,000,000	1,949,593,955	8,765,810	1,940,828,145	97.04	59,171,855

*gub*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	15,280,164,000	15,061,229,000	14,953,443,309	9,494,473	14,943,948,836	593.67	117,280,164
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CM</b>	<b>309,589,527,000</b>	<b>294,788,000,000</b>	<b>267,373,370,034</b>	<b>821,503,468</b>	<b>266,551,866,566</b>	<b>90.7</b>	<b>28,236,133,434</b>
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	425,536,123,000	428,903,909,000	427,775,050,641	503,506	427,774,547,135	99.74	1,129,361,865
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	227,954,000,000	227,681,010,000	227,589,256,761	342,500	227,588,914,261	99.96	92,095,739
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	36,793,363,000	31,220,314,000	30,990,613,349	10,813,507	30,979,799,842	99.23	240,514,158
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CP</b>	<b>690,283,486,000</b>	<b>687,805,233,000</b>	<b>686,354,920,751</b>	<b>11,659,513</b>	<b>686,343,261,238</b>	<b>99.789</b>	<b>1,461,971,762</b>
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum							
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	12,076,772,000	10,020,316,000	10,018,642,077	130,899	10,018,511,178	99.98	1,804,822
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	7,000,000,000	6,650,000,000	6,649,862,919	1,860,500	6,648,002,419	99.97	1,997,581
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	138,276,418,000	140,954,595,000	140,278,819,911	14,831,482	140,263,988,429	99.51	690,606,571
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CR</b>	<b>157,353,190,000</b>	<b>157,624,911,000</b>	<b>156,947,324,907</b>	<b>16,822,881</b>	<b>156,930,502,026</b>	<b>99.57</b>	<b>694,408,974</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	67,532,578,000	76,268,173,000	76,116,151,383	392,400,154	75,723,751,229	99.29	544,421,771
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal	15,000,000,000	25,256,277,000	25,233,823,063	67,746,523	25,166,076,540	99.64	90,200,460
6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	438,519,544,000	425,931,265,000	419,932,935,910	428,586,154	419,504,349,756	98.49	6,426,915,244
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal	93,278,000,000	185,825,077,000	185,535,179,286	20,183,901	185,514,995,385	99.83	310,081,615
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	20,500,000,000	26,716,204,000	26,330,614,745	40,693,716	26,289,921,029	98.4	426,282,971
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	686,711,000	575,628,000	578,457,858	3,182,000	575,275,858	99.94	352,142
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	508,684,836,000	508,406,221,000	508,003,641,294	189,014,589	507,814,626,705	698.45	591,594,295

*gub*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	1,029,092,000	838,803,000	837,511,052	0	837,511,052	699.81	1,291,948
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	9,725,104,000	8,946,937,000	8,796,984,580	15,122	8,796,969,458	697.67	149,967,542
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	77,581,970,000	69,709,637,000	69,735,337,968	57,314,553	69,678,023,415	699.58	31,613,585
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	600,000,000	337,742,000	337,735,724	163,241	337,572,483	99.95	169,517
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	58,301,379,000	61,061,579,000	60,698,392,897	9,533,646	60,688,859,251	99.39	372,719,749
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	360,500,000	351,500,000	351,498,770	0	351,498,770	100	1,230
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	1,604,501,000	1,088,559,000	1,087,221,396	192,000	1,087,029,396	99.86	1,529,604
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	1,150,000,000	1,210,000,000	1,109,930,920	439,480	1,109,491,440	91.69	100,508,560
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	19,020,318,000	24,683,301,000	24,677,104,007	51,894,345	24,625,209,662	99.76	58,091,338
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,500,000,000	1,000,000,000	999,980,128	0	999,980,128	100	19,872
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	60,159,178,000	58,463,730,000	58,433,234,237	1,125,212	58,432,109,025	99.95	31,620,975
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	2,500,000,000	2,500,000,000	2,499,970,650	0	2,499,970,650	100	29,350
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	1,550,000,000	1,550,000,000	1,549,979,272	0	1,549,979,272	100	20,728
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	1,965,552,000	1,965,552,000	1,915,608,468	295,500	1,915,312,968	97.44	50,239,032
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	66,402,485,000	65,209,130,000	64,873,180,424	12,777,804	64,860,402,620	99.47	348,727,380
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	1,762,000,000	2,112,000,000	2,027,658,640	0	2,027,658,640	96.01	84,341,360
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	1,800,000,000	1,941,620,000	1,938,993,369	0	1,938,993,369	99.86	2,626,631
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	1,000,000,000	907,785,000	905,761,500	0	905,761,500	99.78	2,023,500
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	113,039,013,000	110,429,934,000	108,477,682,167	41,970,700	108,435,711,467	393.1	1,994,222,533
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	870,150,000	618,867,000	597,609,607	1,830,000	595,779,607	195.7	23,087,393

*gub*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	1,593,195,000	1,655,423,000	1,640,842,016	1,345,000	1,639,497,016	397.3	15,925,984
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	5,300,000,000	5,328,117,000	5,327,623,564	2,381,200	5,325,242,364	99.95	2,874,636
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1,440,000,000	1,332,476,000	1,182,386,800	413,000	1,181,973,800	88.71	150,502,200
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	74,237,866,000	74,947,180,000	74,531,465,929	14,858,388	74,516,607,541	99.43	430,572,459
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2,511,725,000	2,254,207,000	2,254,053,600	0	2,254,053,600	99.99	153,400
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	638,275,000	579,304,000	508,269,871	0	508,269,871	87.74	71,034,129
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	1,550,000,000	1,691,558,000	1,686,488,200	12,308,410	1,674,179,790	98.97	17,378,210
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	62,996,685,000	58,874,898,000	58,363,692,465	113,022,112	58,250,670,353	98.94	624,227,647
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	154,460,000	154,460,000	151,628,280	0	151,628,280	98.17	2,831,720
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	616,900,000	548,456,000	538,007,312	1,144,600	536,862,712	97.89	11,593,288
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,000,000,000	2,795,000,000	2,646,656,193	1,874,713	2,644,781,480	94.63	150,218,520
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	107,359,289,000	107,102,376,000	102,394,432,130	22,054,061	102,372,378,069	95.58	4,729,997,931
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,800,000,000	3,757,322,000	3,569,775,853	0	3,569,775,853	95.01	187,546,147
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,500,000,000	2,482,844,000	2,422,822,504	188,818	2,422,633,686	97.57	60,210,314
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	400,000,000	400,000,000	398,164,361	0	398,164,361	99.54	1,835,639
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	60,663,441,000	61,716,356,000	61,311,008,792	21,710,715	61,289,298,077	99.31	427,057,923
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	748,000,000	748,000,000	738,578,428	415,000	738,163,428	98.68	9,836,572
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	590,000,000	590,000,000	584,662,350	0	584,662,350	99.1	5,337,650
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	175,000,000	175,000,000	174,995,600	0	174,995,600	100	4,400
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	45,236,248,000	44,039,249,000	43,234,666,683	8,487,358	43,226,179,325	98.15	813,069,675

*gub*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 5

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	70,000,000	70,000,000	69,638,343	0	69,638,343	99.48	361,657
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	1,000,000,000	1,000,000,000	989,566,743	85,144	989,481,599	98.95	10,518,401
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	175,000,000	167,800,000	167,022,896	310,938	166,711,958	99.35	1,088,042
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	149,253,950,000	149,671,631,000	149,583,914,573	67,615,661	149,516,298,912	599.23	155,332,088
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,350,000,000	1,894,351,000	1,910,515,871	18,535,309	1,891,980,562	99.87	2,370,438
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	975,000,000	817,240,000	808,662,910	234,400	808,428,510	580.47	8,811,490
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>2,091,457,945,000</b>	<b>2,188,698,769,000</b>	<b>2,170,771,721,582</b>	<b>1,606,343,467</b>	<b>2,169,165,378,115</b>	<b>99.181</b>	<b>19,533,390,885</b>
	<b>JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI</b>	<b>3,248,684,148,000</b>	<b>3,328,916,913,000</b>	<b>3,281,447,337,274</b>	<b>2,456,329,329</b>	<b>3,278,991,007,945</b>	<b>98.574</b>	<b>49,925,905,055</b>
<b>02</b>	<b>PINJAMAN LUAR NEGERI</b>							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	500,000,000	41,905,977,000	40,457,506,726	2,369,560	40,455,137,166	96.54	1,450,839,834
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	514,431,000	514,431,000	0	0	0	0	514,431,000
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	500,000,000	0	0	0	0	0	0
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	39,320,001,000	156,022,901,000	155,762,666,997	28,240,658	155,734,426,339	99.82	288,474,661
6484	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	10,000,000,000	1,085,410,809,000	966,463,980,984	874,999,232	965,588,981,752	88.96	119,821,827,248
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CM</b>	<b>50,834,432,000</b>	<b>1,283,854,118,000</b>	<b>1,162,684,154,707</b>	<b>905,609,450</b>	<b>1,161,778,545,257</b>	<b>90.562</b>	<b>122,075,572,743</b>
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	0	250,715,450,000	240,402,870,300	99,591,219	240,303,279,081	95.85	10,412,170,919
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CP</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>250,715,450,000</b>	<b>240,402,870,300</b>	<b>99,591,219</b>	<b>240,303,279,081</b>	<b>95.887</b>	<b>10,412,170,919</b>

*Handwritten signature*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 6

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	<b>JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI</b>	<b>51,834,432,000</b>	<b>1,534,569,568,000</b>	<b>1,403,087,025,007</b>	<b>1,005,200,669</b>	<b>1,402,081,824,338</b>	<b>91.432</b>	<b>132,487,743,662</b>
<b>04</b>	<b>PNBP</b>							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	0	756,961,000	689,197,000	0	689,197,000	199.14	67,764,000
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	519,280,000	1,532,448,000	1,532,448,000	0	1,532,448,000	100	0
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	36,493,751,000	56,714,181,000	55,646,102,703	9,592,442	55,636,510,261	591.75	1,077,670,739
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CM</b>	<b>37,013,031,000</b>	<b>59,003,590,000</b>	<b>57,867,747,703</b>	<b>9,592,442</b>	<b>57,858,155,261</b>	<b>98.075</b>	<b>1,145,434,739</b>
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	0	165,700,000,000	165,608,548,000	0	165,608,548,000	99.94	91,452,000
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CP</b>	<b>0</b>	<b>165,700,000,000</b>	<b>165,608,548,000</b>	<b>0</b>	<b>165,608,548,000</b>	<b>99.945</b>	<b>91,452,000</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	4,061,000	2,437,696,000	2,417,240,000	0	2,417,240,000	99.16	20,456,000
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	124,738,000	74,392,000	74,389,760	0	74,389,760	100	2,240
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	10,841,743,000	11,614,447,000	11,464,519,003	15,473,620	11,449,045,383	98.58	165,401,617
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	14,604,000	14,604,000	14,604,000	0	14,604,000	100	0
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	345,000,000	2,959,959,000	2,879,491,545	0	2,879,491,545	390.05	80,467,455
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	10,000,000	221,866,000	220,761,865	0	220,761,865	99.5	1,104,135
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>11,340,146,000</b>	<b>17,322,964,000</b>	<b>17,071,006,173</b>	<b>15,473,620</b>	<b>17,055,532,553</b>	<b>98.546</b>	<b>267,431,447</b>
	<b>JUMLAH BELANJA PNPB</b>	<b>48,353,177,000</b>	<b>242,026,554,000</b>	<b>240,547,301,876</b>	<b>25,066,062</b>	<b>240,522,235,814</b>	<b>99.389</b>	<b>1,504,318,186</b>
<b>09</b>	<b>HIBAH LUAR NEGERI</b>							

*gus*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 7

Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	12,139,665,000	11,641,622,818	8,367,484	11,633,255,334	95.83	506,409,666
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	0	890,639,000	624,288,740	11,305,459	612,983,281	68.83	277,655,719
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CM</b>	<b>0</b>	<b>13,030,304,000</b>	<b>12,265,911,558</b>	<b>19,672,943</b>	<b>12,246,238,615</b>	<b>94.134</b>	<b>784,065,385</b>
	<b>JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI</b>	<b>0</b>	<b>13,030,304,000</b>	<b>12,265,911,558</b>	<b>19,672,943</b>	<b>12,246,238,615</b>	<b>94.134</b>	<b>784,065,385</b>
<b>10</b>	<b>HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI</b>							
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	0	58,419,375,000	58,419,225,000	0	58,419,225,000	100	150,000
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CP</b>	<b>0</b>	<b>58,419,375,000</b>	<b>58,419,225,000</b>	<b>0</b>	<b>58,419,225,000</b>	<b>100</b>	<b>150,000</b>
	<b>JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI</b>	<b>0</b>	<b>58,419,375,000</b>	<b>58,419,225,000</b>	<b>0</b>	<b>58,419,225,000</b>	<b>100</b>	<b>150,000</b>
<b>11</b>	<b>HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI</b>							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	0	7,971,711,000	7,971,707,135	0	7,971,707,135	100	3,865
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM CM</b>	<b>0</b>	<b>7,971,711,000</b>	<b>7,971,707,135</b>	<b>0</b>	<b>7,971,707,135</b>	<b>100</b>	<b>3,865</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	0	169,103,141,000	20,837,398,482	0	20,837,398,482	12.32	148,265,742,518
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>	<b>0</b>	<b>169,103,141,000</b>	<b>20,837,398,482</b>	<b>0</b>	<b>20,837,398,482</b>	<b>12.322</b>	<b>148,265,742,518</b>
	<b>JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI</b>	<b>0</b>	<b>177,074,852,000</b>	<b>28,809,105,617</b>	<b>0</b>	<b>28,809,105,617</b>	<b>16.269</b>	<b>148,265,746,383</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,348,871,757,000</b>	<b>5,354,037,566,000</b>	<b>5,024,575,906,332</b>	<b>3,506,269,003</b>	<b>5,021,069,637,329</b>	<b>93.85</b>	<b>332,967,928,671</b>

*Handwritten signature*



**LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN BELANJA DALAM  
RANGKA COVID-19 MENURUT  
JENIS BELANJA / AKUN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1  
 Tanggal : 05/05/25 10:25 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid\_kl --

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	48,100,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	48,100,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,800,000	130,000	0	0	0	0	130,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,800,000	130,000	0	0	0	0	130,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	49,900,000	130,000	0	0	0	0	130,000
	JUMLAH BELANJA	49,900,000	130,000	0	0	0	0	130,000

*gub*



**LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN BELANJA MENURUT  
SUMBER DANA / JENIS  
BELANJA / AKUN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
<b>01</b>	<b>RUPIAH MURNI</b>							
<b>51</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	334,440,392,000	316,334,698,000	315,775,035,524	20,198,148	315,754,837,376	99.82	579,860,624
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,592,000	6,149,000	4,789,713	167,129	4,622,584	77.89	1,526,416
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	18,411,403,000	16,000,814,000	15,960,170,175	1,971,580	15,958,198,595	99.75	42,615,405
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,437,864,000	4,334,473,000	4,312,616,617	912,590	4,311,704,027	99.5	22,768,973
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	10,363,274,000	9,413,567,000	9,353,496,000	8,500,210	9,344,995,790	99.36	68,571,210
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	22,562,013,000	22,138,077,000	22,044,235,000	7,825,200	22,036,409,800	99.58	101,667,200
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,330,693,000	3,308,911,000	3,209,931,276	0	3,209,931,276	97.01	98,979,724
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	13,535,681,000	13,217,359,000	13,165,340,430	1,303,560	13,164,036,870	99.61	53,322,130
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	169,074,000	0	0	0	0	0	0
511129	Belanja Uang Makan PNS	34,741,356,000	31,975,531,000	30,400,921,000	14,761,200	30,386,159,800	95.08	1,589,371,200
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	55,575,000	57,050,000	57,050,000	0	57,050,000	100	0
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	106,445,000	208,660,000	208,660,000	0	208,660,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,781,268,000	10,809,924,000	10,740,185,000	29,917,460	10,710,267,540	99.35	99,656,460
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	8,706,438,000	8,967,118,000	8,943,487,983	0	8,943,487,983	99.74	23,630,017
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,366,400,000	2,299,893,000	2,299,358,200	0	2,299,358,200	99.98	534,800
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	99,600,000	72,400,000	72,400,000	0	72,400,000	100	0
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,705,620,000	2,399,022,000	2,399,008,376	0	2,399,008,376	100	13,624
511514	Belanja Uang Penghargaan Bagi Wakil Menteri Yang Berhenti Atau Telah Berakhir Masa Jabatannya	0	348,274,000	348,272,400	0	348,272,400	100	1,600
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	57,862,000	1,872,064,000	1,825,659,000	0	1,825,659,000	97.52	46,405,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,000	72,000	29,654	0	29,654	41.19	42,346
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,796,000	117,184,000	78,359,620	0	78,359,620	66.87	38,824,380
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,162,000	27,020,000	20,053,688	0	20,053,688	74.22	6,966,312
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	61,250,000	61,250,000	17,500,000	0	17,500,000	28.57	43,750,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	262,150,000	255,056,000	0	255,056,000	97.29	7,094,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,060,000	98,688,000	81,689,760	0	81,689,760	82.78	16,998,240
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8,856,000	337,712,000	317,041,000	0	317,041,000	93.88	20,671,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	0	875,000	875,000	0	875,000	100	0
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	2,975,000	2,975,000	0	2,975,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	2,000	0	0	0	0	2,000
512211	Belanja Uang Lembur	14,459,524,000	16,985,566,000	16,539,934,000	0	16,539,934,000	97.38	445,632,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	21,113,000	17,781,000	0	17,781,000	84.22	3,332,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	474,403,035,000	414,818,637,000	410,136,134,033	130,878,790	410,005,255,243	98.87	4,813,381,757
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	436,450,000	2,705,567,000	2,437,584,422	0	2,437,584,422	90.1	267,982,578
	<b>JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>	<b>954,255,697,000</b>	<b>879,202,795,000</b>	<b>871,025,629,871</b>	<b>216,435,867</b>	<b>870,809,194,004</b>	<b>99.07</b>	<b>8,393,600,996</b>
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	171,077,360,000	174,542,700,000	173,988,343,374	580,172	173,987,763,202	99.68	554,936,798
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	69,770,923,000	42,921,158,000	42,896,792,020	31,889,115	42,864,902,905	99.94	56,255,095

*Handwritten signature/initials*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,488,046,000	2,299,475,000	2,292,124,238	0	2,292,124,238	99.68	7,350,762
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	938,934,000	390,955,000	373,620,924	0	373,620,924	95.57	17,334,076
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,229,213,000	11,473,100,000	11,101,612,600	11,245,350	11,090,367,250	96.76	382,732,750
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	57,881,602,000	64,657,113,000	64,437,577,246	0	64,437,577,246	99.66	219,535,754
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	48,100,000	0	0	0	0	0	0
521211	Belanja Bahan	100,707,787,000	105,374,976,000	94,926,186,223	6,740,800	94,919,445,423	90.08	10,455,530,577
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	18,996,822,000	14,231,979,000	13,865,730,000	4,933,750	13,860,796,250	97.43	371,182,750
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	145,560,414,000	150,522,777,000	150,330,851,711	0	150,330,851,711	99.87	191,925,289
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,800,000	130,000	0	0	0	0	130,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	707,650,000	542,582,000	532,886,522	0	532,886,522	98.21	9,695,478
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	44,000,000	44,388,000	44,375,000	0	44,375,000	99.97	13,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,764,147,000	25,439,929,000	25,416,159,185	0	25,416,159,185	99.91	23,769,815
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	1,500,000	100,000	0	0	0	0	100,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	476,635,000	793,836,000	793,834,504	0	793,834,504	100	1,496
522111	Belanja Langganan Listrik	41,086,774,000	41,917,192,000	41,540,212,201	0	41,540,212,201	99.1	376,979,799
522112	Belanja Langganan Telepon	1,178,300,000	412,812,000	391,135,267	0	391,135,267	94.75	21,676,733
522113	Belanja Langganan Air	5,687,019,000	4,272,496,000	4,271,086,685	0	4,271,086,685	99.97	1,409,315
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,150,955,000	945,895,000	934,819,718	0	934,819,718	98.83	11,075,282
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	2,750,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	77,701,629,000	49,837,028,000	49,451,848,592	1,750,000	49,450,098,592	99.23	386,929,408
522141	Belanja Sewa	83,951,677,000	96,980,156,000	96,029,045,471	10,410,484	96,018,634,987	99.02	961,521,013
522151	Belanja Jasa Profesi	38,432,922,000	27,938,299,000	26,683,849,779	41,850,000	26,641,999,779	95.51	1,296,299,221
522191	Belanja Jasa Lainnya	461,401,771,000	492,319,801,000	490,285,699,471	22,005,270	490,263,694,201	99.59	2,056,106,799
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71,013,532,000	81,189,754,000	81,045,330,970	44,470,934	81,000,860,036	99.82	188,893,964
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,652,558,000	2,650,089,000	2,644,957,383	0	2,644,957,383	99.81	5,131,617
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,382,047,000	5,142,075,000	5,119,706,116	0	5,119,706,116	99.56	22,368,884
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42,374,143,000	39,619,086,000	38,937,518,912	248,209,360	38,689,309,552	98.28	929,776,448
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,957,862,000	1,972,654,000	1,750,520,009	0	1,750,520,009	88.74	222,133,991
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5,868,970,000	4,575,757,000	4,625,250,396	117,134,233	4,508,116,163	101.08	67,640,837
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,291,788,000	1,074,936,000	1,051,341,948	0	1,051,341,948	97.81	23,594,052
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	269,187,520,000	319,083,434,000	307,393,147,243	978,125,364	306,415,021,879	96.34	12,668,412,121
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1,662,193,000	3,022,524,000	2,367,306,425	0	2,367,306,425	78.32	655,217,575
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,549,105,000	9,747,155,000	9,444,217,461	150,000	9,444,067,461	96.89	303,087,539
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	129,714,417,000	99,674,275,000	94,385,645,751	24,183,219	94,361,462,532	94.69	5,312,812,468
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	55,257,447,000	52,831,418,000	51,466,006,576	255,373,917	51,210,632,659	97.42	1,620,785,341
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	5,735,959,000	12,144,639,000	12,157,313,702	424,474,280	11,732,839,422	100.1	411,799,578
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	500,000,000	0	0	0	0	0	0
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	2,134,136,000	866,260,000	865,762,700	0	865,762,700	99.94	497,300

*gaf*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	224,475,725,000	230,648,456,000	230,634,021,804	0	230,634,021,804	99.99	14,434,196
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>2,153,061,132,000</b>	<b>2,172,118,389,000</b>	<b>2,134,492,838,127</b>	<b>2,223,526,248</b>	<b>2,132,269,311,879</b>	<b>98.27</b>	<b>39,849,077,121</b>
<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76,910,689,000	208,838,216,000	207,896,097,542	6,505,714	207,889,591,828	99.55	948,624,172
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2,200,000,000	3,129,079,000	3,122,874,325	0	3,122,874,325	99.8	6,204,675
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	6,222,897,000	14,871,447,000	14,775,088,521	0	14,775,088,521	99.35	96,358,479
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	200,000,000	771,740,000	769,825,000	0	769,825,000	99.75	1,915,000
536111	Belanja Modal Lainnya	54,089,733,000	48,919,400,000	48,310,129,469	9,861,500	48,300,267,969	98.75	619,132,031
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1,744,000,000	1,065,847,000	1,054,854,419	0	1,054,854,419	98.97	10,992,581
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>141,367,319,000</b>	<b>277,595,729,000</b>	<b>275,928,869,276</b>	<b>16,367,214</b>	<b>275,912,502,062</b>	<b>99.4</b>	<b>1,683,226,938</b>
	<b>JUMLAH RUPIAH MURNI</b>	<b>3,248,684,148,000</b>	<b>3,328,916,913,000</b>	<b>3,281,447,337,274</b>	<b>2,456,329,329</b>	<b>3,278,991,007,945</b>	<b>98.57</b>	<b>49,925,905,055</b>
<b>02</b>	<b>PINJAMAN LUAR NEGERI</b>							
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	122,502,000	122,218,444	0	122,218,444	99.77	283,556
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	41,152,000	41,151,715	0	41,151,715	100	285
521211	Belanja Bahan	654,643,000	9,237,209,000	8,546,094,858	0	8,546,094,858	92.52	691,114,142
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	7,950,000	7,950,000	0	7,950,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,800,000	102,175,000	102,175,000	0	102,175,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	43,677,000	41,540,000	0	41,540,000	95.11	2,137,000
522131	Belanja Jasa Konsultansi	27,708,400,000	181,738,741,000	172,666,779,958	0	172,666,779,958	95.01	9,071,961,042
522141	Belanja Sewa	2,167,148,000	8,259,375,000	7,854,868,640	0	7,854,868,640	95.1	404,506,360
522151	Belanja Jasa Profesi	225,400,000	2,791,801,000	2,177,100,000	48,400,000	2,128,700,000	77.98	663,101,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	11,523,739,000	1,008,028,660,000	901,347,643,623	0	901,347,643,623	89.42	106,681,016,377
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,429,032,000	43,461,602,000	36,904,568,268	806,294,008	36,098,274,260	84.91	7,363,327,740
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	467,380,000	200,290,000	59,560,000	0	59,560,000	29.74	140,730,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,653,890,000	27,715,342,000	24,346,495,902	148,337,101	24,198,158,801	87.84	3,517,183,199
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,000,000,000	18,051,904,000	15,135,082,891	2,169,560	15,132,913,331	83.84	2,918,990,669
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	1,579,000,000	845,213,144	0	845,213,144	53.53	733,786,856
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>51,834,432,000</b>	<b>1,301,381,380,000</b>	<b>1,170,198,442,443</b>	<b>1,005,200,669</b>	<b>1,169,193,241,774</b>	<b>89.92</b>	<b>132,188,138,226</b>
<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	217,883,174,000	217,716,544,314	0	217,716,544,314	99.92	166,629,686
536111	Belanja Modal Lainnya	0	11,305,014,000	11,304,788,250	0	11,304,788,250	100	225,750
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	4,000,000,000	3,867,250,000	0	3,867,250,000	96.68	132,750,000
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>0</b>	<b>233,188,188,000</b>	<b>232,888,582,564</b>	<b>0</b>	<b>232,888,582,564</b>	<b>99.87</b>	<b>299,605,436</b>
	<b>JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI</b>	<b>51,834,432,000</b>	<b>1,534,569,568,000</b>	<b>1,403,087,025,007</b>	<b>1,005,200,669</b>	<b>1,402,081,824,338</b>	<b>91.43</b>	<b>132,487,743,662</b>
<b>04</b>	<b>PNBP</b>							
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>							

*gaf*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 4  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,700,000	1,549,000	1,048,500	0	1,048,500	67.69	500,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	263,100,000	318,000,000	298,668,000	0	298,668,000	93.92	19,332,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	15,182,000	15,030,180	0	15,030,180	99	151,820
521211	Belanja Bahan	15,207,763,000	22,816,390,000	22,612,011,912	1,989,000	22,610,022,912	99.1	206,367,088
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,352,735,000	3,363,374,000	3,358,449,000	5,265,000	3,353,184,000	99.85	10,190,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,958,876,000	2,296,137,000	2,284,870,185	0	2,284,870,185	99.51	11,266,815
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31,850,000	15,036,310,000	15,035,436,892	0	15,035,436,892	99.99	873,108
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	1,196,000,000	1,194,514,000	0	1,194,514,000	99.88	1,486,000
522141	Belanja Sewa	1,217,699,000	2,086,090,000	2,085,940,000	0	2,085,940,000	99.99	150,000
522151	Belanja Jasa Profesi	12,173,600,000	16,319,924,000	16,198,487,000	1,065,000	16,197,422,000	99.26	122,502,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	752,212,000	1,603,662,000	1,596,358,300	0	1,596,358,300	99.54	7,303,700
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,664,045,000	13,408,668,000	12,515,275,321	16,577,062	12,498,698,259	93.34	909,969,741
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	443,800,000	520,465,000	514,274,100	0	514,274,100	98.81	6,190,900
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,951,232,000	4,075,879,000	4,000,226,800	170,000	4,000,056,800	98.14	75,822,200
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,347,490,000	3,786,824,000	3,784,178,000	0	3,784,178,000	99.93	2,646,000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	817,075,000	781,048,000	781,045,386	0	781,045,386	100	2,614
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>48,188,177,000</b>	<b>87,632,402,000</b>	<b>86,282,713,576</b>	<b>25,066,062</b>	<b>86,257,647,514</b>	<b>98.46</b>	<b>1,374,754,486</b>
<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165,000,000	117,714,431,000	117,598,065,300	0	117,598,065,300	99.9	116,365,700
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	189,635,000	187,685,000	0	187,685,000	98.97	1,950,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	990,086,000	982,340,000	0	982,340,000	99.22	7,746,000
536111	Belanja Modal Lainnya	0	35,500,000,000	35,496,498,000	0	35,496,498,000	99.99	3,502,000
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>165,000,000</b>	<b>154,394,152,000</b>	<b>154,264,588,300</b>	<b>0</b>	<b>154,264,588,300</b>	<b>99.92</b>	<b>129,563,700</b>
	<b>JUMLAH PNPB</b>	<b>48,353,177,000</b>	<b>242,026,554,000</b>	<b>240,547,301,876</b>	<b>25,066,062</b>	<b>240,522,235,814</b>	<b>99.39</b>	<b>1,504,318,186</b>
<b>09</b>	<b>HIBAH LUAR NEGERI</b>							
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>							
521211	Belanja Bahan	0	284,178,000	282,264,437	0	282,264,437	99.33	1,913,563
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	4,659,072,000	4,398,925,000	0	4,398,925,000	94.42	260,147,000
522141	Belanja Sewa	0	196,050,000	196,050,000	0	196,050,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	0	127,600,000	126,300,000	0	126,300,000	98.98	1,300,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	5,710,594,000	5,362,411,823	0	5,362,411,823	93.9	348,182,177
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	858,606,000	759,728,598	19,672,943	740,055,655	88.48	118,550,345
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	3,400,000	1,700,000	0	1,700,000	50	1,700,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	283,646,000	283,476,000	0	283,476,000	99.94	170,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	907,158,000	855,055,700	0	855,055,700	94.26	52,102,300
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>0</b>	<b>13,030,304,000</b>	<b>12,265,911,558</b>	<b>19,672,943</b>	<b>12,246,238,615</b>	<b>94.13</b>	<b>784,065,385</b>
	<b>JUMLAH HIBAH LUAR NEGERI</b>	<b>0</b>	<b>13,030,304,000</b>	<b>12,265,911,558</b>	<b>19,672,943</b>	<b>12,246,238,615</b>	<b>94.13</b>	<b>784,065,385</b>
<b>10</b>	<b>HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI</b>							

*Handwritten mark*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN DESEMBER 2024**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 05/05/25 10:26 AM  
Halaman : 5  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_kl\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	58,419,375,000	58,419,225,000	0	58,419,225,000	100	150,000
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>0</b>	<b>58,419,375,000</b>	<b>58,419,225,000</b>	<b>0</b>	<b>58,419,225,000</b>	<b>100</b>	<b>150,000</b>
	<b>JUMLAH HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI</b>	<b>0</b>	<b>58,419,375,000</b>	<b>58,419,225,000</b>	<b>0</b>	<b>58,419,225,000</b>	<b>100</b>	<b>150,000</b>
<b>11</b>	<b>HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI</b>							
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>							
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	427,100,000	417,816,000	0	417,816,000	97.83	9,284,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	5,662,752,000	6,206,661,979	0	6,206,661,979	109.61	(543,909,979)
521211	Belanja Bahan	0	1,110,072,000	1,066,562,781	0	1,066,562,781	96.08	43,509,219
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,131,090,000	1,242,125,000	0	1,242,125,000	109.82	(111,035,000)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	133,453,000	133,452,500	0	133,452,500	100	500
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	8,784,288,000	8,784,288,000	0	8,784,288,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	5,774,280,000	6,578,184,282	0	6,578,184,282	113.92	(803,904,282)
522141	Belanja Sewa	0	966,894,000	511,793,755	0	511,793,755	52.93	455,100,245
522151	Belanja Jasa Profesi	0	1,015,653,000	1,016,552,500	0	1,016,552,500	100.09	(899,500)
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	1,952,859,000	1,947,460,820	0	1,947,460,820	99.72	5,398,180
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	904,208,000	0	904,208,000	0	(904,208,000)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	311,184,000	0	0	0	0	311,184,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	231,229,000	0	0	0	0	231,229,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	26,250,000	0	0	0	0	26,250,000
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	28,578,173,000	0	0	0	0	28,578,173,000
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	25,408,512,000	0	0	0	0	25,408,512,000
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	94,061,063,000	0	0	0	0	94,061,063,000
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>0</b>	<b>177,074,852,000</b>	<b>28,809,105,617</b>	<b>0</b>	<b>28,809,105,617</b>	<b>16.27</b>	<b>148,265,746,383</b>
	<b>JUMLAH HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI</b>	<b>0</b>	<b>177,074,852,000</b>	<b>28,809,105,617</b>	<b>0</b>	<b>28,809,105,617</b>	<b>16.27</b>	<b>148,265,746,383</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3,348,871,757,000</b>	<b>5,354,037,566,000</b>	<b>5,024,575,906,332</b>	<b>3,506,269,003</b>	<b>5,021,069,637,329</b>	<b>93.85</b>	<b>332,967,928,671</b>

*gaf*



**LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN BELANJA MENURUT  
FUNGSI / SUB FUNGSI /  
PROGRAM / KEGIATAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tanggal : 05/05/25 10:25 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_fsfpk\_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1259	Fasilitas Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	151,078,200,000	164,270,610,000	159,558,974,610	642,525,408	158,916,449,202	96.74	5,354,160,798
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	56,435,316,000	56,435,316,000	46,191,684,616	7,453,600	46,184,231,016	81.84	10,251,084,984
1276	Pembinaan dan Fasilitas Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	35,700,000,000	35,700,000,000	35,172,867,072	0	35,172,867,072	98.52	527,132,928
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	57,622,208,000	57,622,208,000	47,528,653,592	127,365,098	47,401,288,494	82.26	10,220,919,506
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	103,636,659,000	97,040,454,000	85,975,107,218	197,030,652	85,778,076,566	88.39	11,262,377,434
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	342,544,888,000	308,934,360,000	293,644,634,472	1,007,179,558	292,637,454,914	94.72	16,296,905,086
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa</b>	<b>747,017,271,000</b>	<b>720,002,948,000</b>	<b>668,071,921,580</b>	<b>1,981,554,316</b>	<b>666,090,367,264</b>	<b>92.79</b>	<b>53,912,580,736</b>
CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum							
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	24,153,544,000	20,040,632,000	20,037,284,154	261,798	20,037,022,356	99.98	3,609,644
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	14,000,000,000	13,300,000,000	13,299,725,838	3,721,000	13,296,004,838	99.97	3,995,162
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	138,276,418,000	140,954,595,000	140,278,819,911	14,831,482	140,263,988,429	99.51	690,606,571
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum</b>	<b>176,429,962,000</b>	<b>174,295,227,000</b>	<b>173,615,829,903</b>	<b>18,814,280</b>	<b>173,597,015,623</b>	<b>99.61</b>	<b>698,211,377</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1,485,716,716,000	1,677,899,806,000	1,674,555,330,426	8,632,803,388	1,665,922,527,038	99.29	11,977,278,962
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal	165,000,000,000	277,819,047,000	277,572,053,693	745,211,753	276,826,841,940	99.64	992,205,060
6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	4,823,714,984,000	4,685,243,915,000	4,619,262,295,010	4,714,447,694	4,614,547,847,316	98.49	70,696,067,684
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal	1,026,058,000,000	2,044,075,847,000	2,040,886,972,146	222,022,911	2,040,664,949,235	99.83	3,410,897,765
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	225,500,000,000	293,878,244,000	289,636,762,195	447,630,876	289,189,131,319	98.4	4,689,112,681
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen</b>	<b>7,725,989,700,000</b>	<b>8,978,916,859,000</b>	<b>8,901,913,413,470</b>	<b>14,762,116,622</b>	<b>8,887,151,296,848</b>	<b>99.14</b>	<b>91,765,562,152</b>
	<b>JUMLAH SUBFUNGSI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI</b>	<b>8,649,436,933,000</b>	<b>9,873,215,034,000</b>	<b>9,743,601,164,953</b>	<b>16,762,485,218</b>	<b>9,726,838,679,735</b>	<b>98.69</b>	<b>146,376,354,265</b>
03	PELAYANAN UMUM							
CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	30,594,074,000	46,178,426,000	45,784,379,872	0	45,784,379,872	99.15	394,046,128
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa</b>	<b>30,594,074,000</b>	<b>46,178,426,000</b>	<b>45,784,379,872</b>	<b>0</b>	<b>45,784,379,872</b>	<b>99.15</b>	<b>394,046,128</b>
CP	Program Tata Kelola Kependudukan							
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	851,072,246,000	1,189,207,818,000	1,186,767,197,282	1,007,012	1,186,766,190,270	99.79	2,441,627,730
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	455,908,000,000	572,200,770,000	572,016,963,522	685,000	572,016,278,522	99.97	184,491,478
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	75,586,726,000	62,440,628,000	61,981,226,698	21,627,014	61,959,599,684	99.23	481,028,316

*Handwritten signature*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tanggal : 05/05/25 10:25 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_fsfgp\_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	0	250,715,450,000	240,402,870,300	99,591,219	240,303,279,081	95.85	10,412,170,919
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Tata Kelola Kependudukan</b>	<b>1,382,566,972,000</b>	<b>2,074,564,666,000</b>	<b>2,061,168,257,802</b>	<b>122,910,245</b>	<b>2,061,045,347,557</b>	<b>99.35</b>	<b>13,519,318,443</b>
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	7,553,821,000	6,331,908,000	6,363,036,438	35,002,000	6,328,034,438	99.94	3,873,562
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	5,595,577,867,000	5,619,283,087,000	5,614,629,694,234	2,079,160,479	5,612,550,533,755	99.88	6,732,553,245
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	11,320,012,000	9,226,833,000	9,212,621,572	0	9,212,621,572	99.85	14,211,428
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	108,348,262,000	99,234,619,000	97,585,117,740	166,342	97,584,951,398	98.34	1,649,667,602
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	972,660,843,000	894,564,924,000	893,198,426,681	800,669,903	892,397,756,778	99.76	2,167,167,222
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	6,600,000,000	3,715,162,000	3,715,092,964	1,795,651	3,713,297,313	99.95	1,864,687
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	641,315,169,000	671,677,369,000	667,682,321,867	104,870,106	667,577,451,761	99.39	4,099,917,239
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	3,965,500,000	3,866,500,000	3,866,486,470	0	3,866,486,470	100	13,530
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	17,649,511,000	11,974,149,000	11,959,435,356	2,112,000	11,957,323,356	99.86	16,825,644
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	12,650,000,000	13,310,000,000	12,209,240,120	4,834,280	12,204,405,840	91.69	1,105,594,160
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	209,223,498,000	271,516,311,000	271,448,144,077	570,837,795	270,877,306,282	99.76	639,004,718
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	16,500,000,000	11,000,000,000	10,999,781,408	0	10,999,781,408	100	218,592
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	661,750,958,000	643,101,030,000	642,765,576,607	12,377,332	642,753,199,275	99.95	347,830,725
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	27,500,000,000	27,500,000,000	27,499,677,150	0	27,499,677,150	100	322,850
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	17,050,000,000	17,050,000,000	17,049,771,992	0	17,049,771,992	100	228,008
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	21,621,072,000	21,621,072,000	21,071,693,148	3,250,500	21,068,442,648	97.44	552,629,352
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	730,427,335,000	717,300,430,000	713,604,984,664	140,555,844	713,464,428,820	99.47	3,836,001,180
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	19,382,000,000	23,232,000,000	22,304,245,040	0	22,304,245,040	96.01	927,754,960
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	19,800,000,000	21,357,820,000	21,328,927,059	0	21,328,927,059	99.86	28,892,941
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	11,000,000,000	9,985,635,000	9,963,376,500	0	9,963,376,500	99.78	22,258,500
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	1,243,589,787,000	1,214,889,918,000	1,193,415,147,837	461,677,700	1,192,953,470,137	98.19	21,936,447,863
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	9,571,650,000	6,807,537,000	6,573,705,677	20,130,000	6,553,575,677	96.27	253,961,323
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	17,525,145,000	18,209,653,000	18,049,262,176	14,795,000	18,034,467,176	99.04	175,185,824
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	58,300,000,000	58,609,287,000	58,603,859,204	26,193,200	58,577,666,004	99.95	31,620,996
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	15,840,000,000	14,657,236,000	13,006,254,800	4,543,000	13,001,711,800	88.71	1,655,524,200
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	816,616,526,000	2,684,553,531,000	1,049,057,508,521	163,442,268	1,048,894,066,253	39.07	1,635,659,464,747
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang	27,628,975,000	24,796,277,000	24,794,589,600	0	24,794,589,600	99.99	1,687,400

926

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tanggal : 05/05/25 10:25 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap\_lra\_fsfpkg\_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	Pembangunan Daerah							
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	7,021,025,000	6,372,344,000	5,590,968,581	0	5,590,968,581	87.74	781,375,419
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	17,050,000,000	18,607,138,000	18,551,370,200	135,392,510	18,415,977,690	98.97	191,160,310
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	692,963,535,000	647,623,878,000	642,000,617,115	1,243,243,232	640,757,373,883	98.94	6,866,504,117
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	1,699,060,000	1,699,060,000	1,667,911,080	0	1,667,911,080	98.17	31,148,920
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	6,785,900,000	6,033,016,000	5,918,080,432	12,590,600	5,905,489,832	97.89	127,526,168
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33,000,000,000	30,745,000,000	29,113,218,123	20,621,843	29,092,596,280	94.63	1,652,403,720
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,180,952,179,000	1,178,126,136,000	1,126,338,753,430	242,594,671	1,126,096,158,759	95.58	52,029,977,241
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19,800,000,000	41,330,542,000	39,267,534,383	0	39,267,534,383	95.01	2,063,007,617
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16,500,000,000	27,311,284,000	26,651,047,544	2,076,998	26,648,970,546	97.57	662,313,454
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	4,400,000,000	4,400,000,000	4,379,807,971	0	4,379,807,971	99.54	20,192,029
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	667,297,851,000	678,879,916,000	674,421,096,712	238,817,865	674,182,278,847	99.31	4,697,637,153
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	8,228,000,000	8,228,000,000	8,124,362,708	4,565,000	8,119,797,708	98.68	108,202,292
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	6,490,000,000	6,490,000,000	6,431,285,850	0	6,431,285,850	99.1	58,714,150
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	1,925,000,000	1,925,000,000	1,924,951,600	0	1,924,951,600	100	48,400
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	497,598,728,000	484,431,739,000	475,581,333,513	93,360,938	475,487,972,575	98.15	8,943,766,425
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	770,000,000	770,000,000	766,021,773	0	766,021,773	99.48	3,978,227
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	11,000,000,000	11,000,000,000	10,885,234,173	936,584	10,884,297,589	98.95	115,702,411
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,925,000,000	1,845,800,000	1,837,251,856	3,420,318	1,833,831,538	99.35	11,968,462
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,645,588,450,000	1,678,947,490,000	1,677,097,467,298	743,772,271	1,676,353,695,027	99.85	2,593,794,973
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	14,850,000,000	20,837,861,000	21,015,674,581	203,888,399	20,811,786,182	99.87	26,074,818
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	10,835,000,000	11,430,166,000	11,323,672,525	2,578,400	11,321,094,125	99.05	109,071,875
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen</b>	<b>16,147,647,659,000</b>	<b>17,986,406,658,000</b>	<b>16,230,845,640,350</b>	<b>7,394,273,029</b>	<b>16,223,451,367,321</b>	<b>90.24</b>	<b>1,762,955,290,679</b>
	<b>JUMLAH SUBFUNGSI PELAYANAN UMUM</b>	<b>17,560,808,705,000</b>	<b>20,107,149,750,000</b>	<b>18,337,798,278,024</b>	<b>7,517,183,274</b>	<b>18,330,281,094,750</b>	<b>91.2</b>	<b>1,776,868,655,25</b>
<b>06</b>	<b>PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
<b>CM</b>	<b>Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa</b>							
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1,207,925,012,000	1,571,290,546,000	1,410,606,523,788	1,274,332,864	1,409,332,190,924	89.69	161,958,355,076
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	99,341,200,000	71,749,678,000	70,881,005,902	982,012,962	69,898,992,940	97.42	1,850,685,060
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus	53,200,000,000	60,299,946,000	58,830,133,922	36,500,800	58,793,633,122	97.5	1,506,312,878

926

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tanggal : 05/05/25 10:25 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap\_lra\_fsfpkg\_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	Kelembagaan Desa							
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	417,402,034,000	415,559,144,000	352,796,835,188	3,313,106,174	349,483,729,014	84.1	66,075,414,986
1283	Pembinaan inovasi daerah	57,960,000,000	51,859,766,000	51,039,065,056	95,116,952	50,943,948,104	98.23	915,817,896
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	145,716,102,000	176,945,692,000	173,372,090,983	325,971,079	173,046,119,904	97.8	3,899,572,096
6138	Penataan kelembagaan Desa	48,072,899,000	43,063,370,000	41,711,027,246	118,098,379	41,592,928,867	96.59	1,470,441,133
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	504,355,957,000	1,460,783,408,000	1,415,697,745,742	857,486,441	1,414,840,259,301	96.85	45,943,148,699
6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	35,000,000,000	31,996,720,000	31,607,869,398	3,500,000	31,604,369,398	98.77	392,350,602
6143	Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah	4,900,000,000	14,000,000,000	13,647,157,685	61,360,670	13,585,797,015	97.04	414,202,985
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	362,417,405,000	502,427,870,000	494,196,822,084	133,608,405	494,063,213,679	98.34	8,364,656,321
6484	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	70,000,000,000	7,597,875,663,000	6,765,247,866,888	6,124,994,624	6,759,122,872,264	88.96	838,752,790,736
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa</b>	<b>3,006,290,609,000</b>	<b>11,997,851,803,000</b>	<b>10,879,634,143,882</b>	<b>13,326,089,350</b>	<b>10,866,308,054,532</b>	<b>90.68</b>	<b>1,131,543,748,468</b>
	<b>JUMLAH SUBFUNGSI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3,006,290,609,000</b>	<b>11,997,851,803,000</b>	<b>10,879,634,143,882</b>	<b>13,326,089,350</b>	<b>10,866,308,054,532</b>	<b>90.68</b>	<b>1,131,543,748,46</b>
<b>90</b>	<b>PELAYANAN UMUM LAINNYA</b>							
<b>CM</b>	<b>Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa</b>							
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	163,571,996,000	223,967,408,000	205,689,708,868	452,422,768	205,237,286,100	91.64	18,730,121,900
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa</b>	<b>163,571,996,000</b>	<b>223,967,408,000</b>	<b>205,689,708,868</b>	<b>452,422,768</b>	<b>205,237,286,100</b>	<b>91.84</b>	<b>18,730,121,900</b>
	<b>JUMLAH SUBFUNGSI PELAYANAN UMUM LAINNYA</b>	<b>163,571,996,000</b>	<b>223,967,408,000</b>	<b>205,689,708,868</b>	<b>452,422,768</b>	<b>205,237,286,100</b>	<b>91.84</b>	<b>18,730,121,900</b>
	<b>JUMLAH FUNGSI PELAYANAN UMUM</b>	<b>29,380,108,243,000</b>	<b>42,202,183,995,000</b>	<b>39,166,723,295,727</b>	<b>38,058,180,610</b>	<b>39,128,665,115,117</b>	<b>92.81</b>	<b>3,073,518,879,88</b>

*gaf*



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	316,848,000	1,796,591,725	0	1,796,591,725	567.02
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	144,820,000	0	144,820,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,996,307,000	4,139,701,108	0	4,139,701,108	207.37
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	102,171,000	271,988,700	0	271,988,700	266.21
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	37,824,050	0	37,824,050	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251</b>	<b>2,415,326,000</b>	<b>6,390,925,583</b>	<b>0</b>	<b>6,390,925,583</b>	<b>264.6</b>
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	24,227,000	46,796,500	0	46,796,500	193.16
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253</b>	<b>24,227,000</b>	<b>46,796,500</b>	<b>0</b>	<b>46,796,500</b>	<b>193.16</b>
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	227,500,000	217,250,000	0	217,250,000	95.49
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	18,300,696,000	18,834,607,112	0	18,834,607,112	102.92
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	460,000,000	512,177,400	0	512,177,400	111.34
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	57,328,763,000	58,715,374,000	34,000,000	58,681,374,000	102.36
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	11,238,628,000	11,219,224,000	0	11,219,224,000	99.83
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254</b>	<b>87,555,587,000</b>	<b>89,498,632,512</b>	<b>34,000,000</b>	<b>89,464,632,512</b>	<b>102.18</b>
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	636,404,679,000	863,415,196,000	0	863,415,196,000	135.67
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256</b>	<b>636,404,679,000</b>	<b>863,415,196,000</b>	<b>0</b>	<b>863,415,196,000</b>	<b>135.67</b>
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	203,832	0	203,832	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	114,960,000	0	114,960,000	0

*gaf*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	115,163,832	0	115,163,832	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	78,539,029	0	78,539,029	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	5,437,000	0	5,437,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	83,976,029	0	83,976,029	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	157,509,012	0	157,509,012	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,304,420,736	0	12,304,420,736	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	568,274,668	0	568,274,668	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	58,434,974	0	58,434,974	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	13,088,639,390	0	13,088,639,390	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	726,399,819,000	972,639,329,846	34,000,000	972,605,329,846	133.89
	JUMLAH PENDAPATAN	726,399,819,000	972,639,329,846	34,000,000	972,605,329,846	133.89

*gub*



**LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT ESELON I / WILAYAH /  
SATUAN KERJA**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
<b>01</b>	<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>					
010010100KP	BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA					
403200	SEKRETARIAT JENDERAL	1,164,974,000	1,973,224,914	0	1,973,224,914	169.38
	JUMLAH PENDAPATAN 010010100KP BA(010) ES1(01) DKI JAKARTA	1,164,974,000	1,973,224,914	0	1,973,224,914	169.38
010010200KP	BA(010) ES1(01) JAWA BARAT					
448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	19,562,823,000	22,443,047,429	0	22,443,047,429	114.72
	JUMLAH PENDAPATAN 010010200KP BA(010) ES1(01) JAWA BARAT	19,562,823,000	22,443,047,429	0	22,443,047,429	114.72
010010800KD	BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT					
677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	0	212,822,477	0	212,822,477	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010010800KD BA(010) ES1(01) SUMATERA BARAT	0	212,822,477	0	212,822,477	
010011300KD	BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT					
683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	0	182,216,716	0	182,216,716	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011300KD BA(010) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	0	182,216,716	0	182,216,716	
010011700KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA					
677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	0	1,227,658,097	0	1,227,658,097	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011700KD BA(010) ES1(01) SULAWESI UTARA	0	1,227,658,097	0	1,227,658,097	
010011900KD	BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN					
677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	0	953,550	0	953,550	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010011900KD BA(010) ES1(01) SULAWESI SELATAN	0	953,550	0	953,550	
010012300KD	BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT					
683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	0	11,351,421	0	11,351,421	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010012300KD BA(010) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	0	11,351,421	0	11,351,421	
010012500KD	BA(010) ES1(01) PAPUA					

*gus*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
683091	IPDN KAMPUS PAPUA	0	552,942,466	0	552,942,466	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010012500KD BA(010) ES1(01) PAPUA	0	552,942,466	0	552,942,466	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0	850,961,659	0	850,961,659	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	850,961,659	0	850,961,659	
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	20,727,797,000	27,455,178,729	0	27,455,178,729	132.46
<b>02</b>	<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>					
010020100KP	BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA					
027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	0	302,113,155	0	302,113,155	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010020100KP BA(010) ES1(02) DKI JAKARTA	0	302,113,155	0	302,113,155	
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	302,113,155	0	302,113,155	
<b>03</b>	<b>DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					
010030100KP	BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA					
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	141,897,551	0	141,897,551	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010030100KP BA(010) ES1(03) DKI JAKARTA	0	141,897,551	0	141,897,551	
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	141,897,551	0	141,897,551	
<b>04</b>	<b>DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN</b>					
010040100KP	BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA					
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	807,064,006	0	807,064,006	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010040100KP BA(010) ES1(04) DKI JAKARTA	0	807,064,006	0	807,064,006	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
249174	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0	57,620	0	57,620	0
484209	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	0	3,580,000	0	3,580,000	0

*gaf*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	3,637,620	0	3,637,620	
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	810,701,626	0	810,701,626	
<b>05</b>	<b>DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA</b>					
010050100KP	BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA					
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	0	2,832,179,348	0	2,832,179,348	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010050100KP BA(010) ES1(05) DKI JAKARTA	0	2,832,179,348	0	2,832,179,348	
010050400KD	BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA					
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	89,945,000	373,589,252	0	373,589,252	415.35
	JUMLAH PENDAPATAN 010050400KD BA(010) ES1(05) DI YOGYAKARTA	89,945,000	373,589,252	0	373,589,252	415.35
010050500KD	BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR					
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	583,744,000	983,334,115	0	983,334,115	168.45
	JUMLAH PENDAPATAN 010050500KD BA(010) ES1(05) JAWA TIMUR	583,744,000	983,334,115	0	983,334,115	168.45
010051200KD	BA(010) ES1(05) LAMPUNG					
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	178,921,000	120,940,800	0	120,940,800	67.59
	JUMLAH PENDAPATAN 010051200KD BA(010) ES1(05) LAMPUNG	178,921,000	120,940,800	0	120,940,800	67.59
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	852,610,000	4,310,043,515	0	4,310,043,515	505.51
<b>06</b>	<b>DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
010060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	450,000,000	3,702,959,209	0	3,702,959,209	822.88
	JUMLAH PENDAPATAN 010060100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	450,000,000	3,702,959,209	0	3,702,959,209	822.88
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	450,000,000	3,702,959,209	0	3,702,959,209	822.88
<b>07</b>	<b>DITJEN OTONOMI DAERAH</b>					
010070100KP	BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA					

*gub*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	0	61,401,202	0	61,401,202	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010070100KP BA(010) ES1(07) DKI JAKARTA	0	61,401,202	0	61,401,202	
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	61,401,202	0	61,401,202	
<b>08</b>	<b>DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
010080100KP	BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA					
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	636,404,679,000	864,477,683,755	0	864,477,683,755	135.84
	JUMLAH PENDAPATAN 010080100KP BA(010) ES1(08) DKI JAKARTA	636,404,679,000	864,477,683,755	0	864,477,683,755	135.84
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	636,404,679,000	864,477,683,755	0	864,477,683,755	135.84
<b>09</b>	<b>DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH</b>					
010090100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	0	118,018,368	0	118,018,368	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010090100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	118,018,368	0	118,018,368	
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	118,018,368	0	118,018,368	
<b>11</b>	<b>BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI</b>					
010110100KP	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
403222	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0	34,288,826	0	34,288,826	0
	JUMLAH PENDAPATAN 010110100KP SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	34,288,826	0	34,288,826	
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0	34,288,826	0	34,288,826	
<b>12</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					
010120100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24,401,816,000	25,576,857,947	0	25,576,857,947	104.82
	JUMLAH PENDAPATAN 010120100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	24,401,816,000	25,576,857,947	0	25,576,857,947	104.82
010120200KD	BA(010) ES1(12) JAWA BARAT					

*gus*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 5

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	12,227,584,000	12,459,190,294	0	12,459,190,294	101.89
	JUMLAH PENDAPATAN 010120200KD BA(010) ES1(12) JAWA BARAT	12,227,584,000	12,459,190,294	0	12,459,190,294	101.89
010120400KD	BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA					
027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	10,357,000,000	10,581,045,821	34,000,000	10,547,045,821	101.83
	JUMLAH PENDAPATAN 010120400KD BA(010) ES1(12) DI YOGYAKARTA	10,357,000,000	10,581,045,821	34,000,000	10,547,045,821	101.83
010120800KD	BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT					
506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	10,194,765,000	10,605,778,770	0	10,605,778,770	104.03
	JUMLAH PENDAPATAN 010120800KD BA(010) ES1(12) SUMATERA BARAT	10,194,765,000	10,605,778,770	0	10,605,778,770	104.03
010121900KD	BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN					
027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	10,153,568,000	11,132,147,996	0	11,132,147,996	109.64
	JUMLAH PENDAPATAN 010121900KD BA(010) ES1(12) SULAWESI SELATAN	10,153,568,000	11,132,147,996	0	11,132,147,996	109.64
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	630,000,000	870,023,082	0	870,023,082	138.1
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	630,000,000	870,023,082	0	870,023,082	138.1
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	67,964,733,000	71,225,043,910	34,000,000	71,191,043,910	104.75
	JUMLAH PENDAPATAN	726,399,819,000	972,639,329,846	34,000,000	972,605,329,846	133.89

926



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT ESELON I / AKUN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	316,848,000	1,347,293,011	0	1,347,293,011	425.22
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,417,026,000	1,286,346,265	0	1,286,346,265	90.78
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	37,824,050	0	37,824,050	0
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	5,727,000	6,552,000	0	6,552,000	114.41
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	227,500,000	217,250,000	0	217,250,000	95.49
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	18,300,696,000	18,834,607,112	0	18,834,607,112	102.92
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	460,000,000	512,177,400	0	512,177,400	111.34
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	107,060,000	0	107,060,000	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	5,437,000	0	5,437,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	76,172,727	0	76,172,727	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,640,866,159	0	4,640,866,159	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	383,593,005	0	383,593,005	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL</b>	<b>20,727,797,000</b>	<b>27,455,178,729</b>	<b>0</b>	<b>27,455,178,729</b>	<b>132.46</b>
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	251,812,600	0	251,812,600	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,640,000	0	9,640,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40,660,555	0	40,660,555	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL</b>	<b>0</b>	<b>302,113,155</b>	<b>0</b>	<b>302,113,155</b>	
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	7,900,000	0	7,900,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	84,380,844	0	84,380,844	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	49,616,707	0	49,616,707	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN</b>	<b>0</b>	<b>141,897,551</b>	<b>0</b>	<b>141,897,551</b>	

92/6

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,009,000	0	2,009,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	61,669,000	0	61,669,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,091,922	0	1,091,922	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	745,874,084	0	745,874,084	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	57,620	0	57,620	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI</b>	<b>0</b>	<b>810,701,626</b>	<b>0</b>	<b>810,701,626</b>	
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	40,590,715	0	40,590,715	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	129,281,000	525,576,300	0	525,576,300	406.54
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	4,341,000	10,331,400	0	10,331,400	238
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	18,500,000	40,244,500	0	40,244,500	217.54
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	700,488,000	867,996,000	0	867,996,000	123.91
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,125,252	0	5,125,252	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,820,179,348	0	2,820,179,348	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>852,610,000</b>	<b>4,310,043,515</b>	<b>0</b>	<b>4,310,043,515</b>	<b>505.51</b>
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	450,000,000	1,300,922,000	0	1,300,922,000	289.09
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,451,592	0	4,451,592	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,395,769,923	0	2,395,769,923	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,815,694	0	1,815,694	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>450,000,000</b>	<b>3,702,959,209</b>	<b>0</b>	<b>3,702,959,209</b>	<b>822.88</b>
07	DITJEN OTONOMI DAERAH					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	39,458,526	0	39,458,526	0

*gaf*

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,942,676	0	21,942,676	0
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN OTONOMI DAERAH	0	61,401,202	0	61,401,202	
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	11,259,000	0	11,259,000	0
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	636,404,679,000	863,415,196,000	0	863,415,196,000	135.67
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	203,832	0	203,832	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	69,837,937	0	69,837,937	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	981,186,986	0	981,186,986	0
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN KEPENDUDUKAN DAN	636,404,679,000	864,477,683,755	0	864,477,683,755	135.84
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	59,400,000	0	59,400,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,120,855	0	14,120,855	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	44,497,513	0	44,497,513	0
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	0	118,018,368	0	118,018,368	
11	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	11,517,000	0	11,517,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	237,018	0	237,018	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,593,133	0	18,593,133	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,941,675	0	3,941,675	0
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM	0	34,288,826	0	34,288,826	
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	154,886,399	0	154,886,399	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	975,000	0	975,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,026,856,543	0	1,026,856,543	0

926

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT ESELON I / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 05/05/25 10:26 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	97,830,000	261,657,300	0	261,657,300	267.46
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	56,628,275,000	57,847,378,000	34,000,000	57,813,378,000	102.09
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	11,238,628,000	11,219,224,000	0	11,219,224,000	99.83
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,249,500	0	4,249,500	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,662,712	0	11,662,712	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	510,469,515	0	510,469,515	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	129,307,587	0	129,307,587	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	58,377,354	0	58,377,354	0
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	67,964,733,000	71,225,043,910	34,000,000	71,191,043,910	104.8
	JUMLAH PENDAPATAN	726,399,819,000	972,639,329,846	34,000,000	972,605,329,846	133.9

*gub*



**KERTAS KERJA TELAAH  
LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2024 *AUDITED***

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)  
AUDITED TA 2024**

Kode dan Nama K/L : (010) Kementerian Dalam Negeri

**KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN**

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	v		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	v		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	v		Ada

**KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI**

Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v		Sama

*Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.*

**KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI**

Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v		Sama

**PENGECEKAN PADA MONSAKTI**

To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		v	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	v		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	v		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		v	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v	Tidak

*Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah*

--	--	--	--	--

*gaf*

<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v	Tidak
	a. Pagu/DIPA		v	Tidak
	b. Estimasi PNPB		v	Tidak
	c. Belanja		v	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	e. Pendapatan		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	g. Kas BLU		v	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		v	Tidak
	i. Kas Hibah		v	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		v	Tidak
	<b>Rekon Internal</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		v	Tidak
	<b>Daftar MONSAKTI</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
	<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akruwal		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
	<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	v		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	v		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	v		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	v		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
	<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak

gub

4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak
	<b>Jika Bukan Satker BLU</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
	<b>Terikat Satker BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
	<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
	<b>Hibah Langsung</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		v	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	-	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya

gub

Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal				
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		59.492.892	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		3.982.435.180	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
	<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	v		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		v	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	-	-	Ya
	<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	-	-	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	<b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		v	Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	N/A	N/A	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	-	-	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	v		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang		v	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		v	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	v		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak

gaf

Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	v		Ya
<b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b>				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		v	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		v	Tidak
<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	v		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	N/A		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	v		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	v		Ya
<b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	v		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	v		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
<b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)</b>				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak

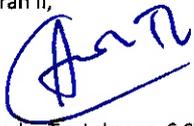
gab

## LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

- 1 Berdasarkan data pada Aplikasi MonSAKTI terdapat Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB untuk periode pelaporan Tahun 2024 sebagai berikut:
  - a. Terdapat kesalahan penggunaan akun anggaran pada Satker Setjen (403200) sebesar Rp477.427.000 kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin), sebesar Rp5.325.170.000 akibat kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 536111 (Belanja Modal Lainnya), dan sebesar Rp24.675.000 kesalahan menggunakan Akun Anggaran seharusnya menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel).
  - b. Satker DKPP (483005) yaitu Belanja Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp209.078.699,00 yang merupakan pembelian berupa belanja mesin lift gedung kantor DKPP RI yang merupakan aset milik BRI. Pada tahun 2024 terjadi kerusakan pada komponen mesin lift di Gedung DKPP yang mengharuskan pergantian seluruh kerusakan dan ditanggung oleh DKPP selaku pemegang gedung oleh karena itu dipilihlah kode akun 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin.
  - c. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu (240270) kesalahan pencatatan kode barang untuk Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah, atas kesalahan tersebut, telah dilakukan reklasifikasi keluar ke persediaan pada bulan September sebesar Rp99.800.000 dan pada bulan November sebesar Rp208.965.810.
  - d. Ditjen Bina Pemdes (027753) sebesar Rp3.867.250.000 atas kesalahan dalam pencatatan NUP BMN (dicatat dalam NUP baru), kesalahan kode akun belanja seharusnya (536111) sebesar Rp2.331.000, dan kesalahan kode akun belanja seharusnya (532111) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp178.481.063,00.
  - e. Ditjen Bina Bangda (039729) mutasi transaksi pengurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.154.000,00 pada Ditjen Bina Bangda berupa pengadaan Peralatan Mesin yang tercatat pada Barang Ekstrakomptabel berupa pengadaan 25 Unit Kursi Besi senilai Rp15.154.000,00 atau Rp606.160,00/unit. Barang tercatat pada Ekstrakomptabel disebabkan pada perencanaan awal akan digunakan untuk pengadaan Kursi Ruang Rapat dengan nilai diatas kapitalisasi dengan akun Belanja Modal yang pada realisasi akhir diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kursi besi.
  - f. Ditjen Dukcapil (634082) terdapat ketidaksesuaian akun pembelian barang ekstrakomptabel berupa 7 buah meubelair lainnya (dudukan printer) NUP 105 s.d 111 dengan nilai harga satuan sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang seharusnya menggunakan akun 521252 Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel dan telah dilakukan koreksi pencatatan (305) pada barang tersebut yang kemudian dilakukan koreksi perubahan nilai bertambah (204) pada Meja Kerja Kayu NUP 1217 s.d 1223. Terdapat ketidaksesuaian akun pembelian 5 buah hard disk NUP 6838 s.d. 6842 dengan nilai sebesar Rp9.454.600 (sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan menggunakan akun belanja 521252 Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel yang seharusnya menggunakan akun 532111 Peralatan dan Mesin Intrakomptabel.
- 2 Perbedaan saldo pada Neraca Percobaan antara akun Transfer Keluar sebesar (Rp2.718.688.698.245,00) dengan Transfer Masuk sebesar Rp2.722.671.133.425,00 menyebabkan terdapat selisih secara neto sebesar Rp3.982.435.180,00. Transfer masuk berupa Aset Tetap Renovasi sebesar Rp1.938.822.874,00 pada satker Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Prasarana Strategis (033.05.631097) Kementerian PUPR. Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Kementerian PUPR, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri. Transfer masuk berupa 6 (enam) unit Software sebesar Rp8.174.449.230,00 dan Akumulasi Amortisasi Software sebesar (Rp6.130.836.924,00) pada satker Ditjen Polpum (027210) Kemendagri yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (059.04.664262) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menu Monitoring Transfer Keluar/Masuk pada Aplikasi MonSAKTI menyajikan Transfer Keluar yang berasal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, namun Transfer Keluar tersebut tidak tercatat pada Laporan Keuangan Kemendagri.
- 3 Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk diperoleh melalui pengurangan kolom Transfer Keluar dan Transfer Masuk. Selanjutnya, hasil pengurangan yang bernilai negatif diabsolutkan atau hasilnya dibuat positif. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk secara absolut sebesar Rp59.492.892,00. Selisih tersebut berasal dari pemeliharaan gedung dan bangunan milik Sekretariat Jenderal oleh satker Ditjen Otonomi Daerah sebesar Rp29.746.446,00. Pada saat diserahkan, Ditjen Otonomi Daerah mencatat Transfer Keluar ATR sebesar Rp29.746.446,00 dan Sekretariat Jenderal mencatat transfer masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.746.446,00.
- 4 Masih terdapat Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) sebesar Rp7.000.000,00 yang terdapat pada IPDN Kampus Sulawesi Utara yang merupakan pengembalian ke kas negara atas sebagian nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI sehingga belum dilakukan koreksi nilai aset.

Diperiksa oleh:  
Kepala Subbagian Akuntansi dan  
Pelaporan II,



Ady Candra Try Laksana, S.STP  
NIP. 19900601 201010 1 005

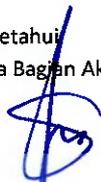
Jakarta, 7 Mei 2025

Penelaah,



Cicilia Eka Yunita, A.Md.Ak  
NIP. 20000609 202302 2 004

Mengetahui  
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan,



I Nengah Sandiyasa, M.Ak  
NIP. 19741208 200604 1 001



# LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2024



# LAPORAN KINERJA

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

### TAHUN 2024



# Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024







**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.



Saya menyambut baik disusunnya Buku Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dengan benar dan tepat waktu sebagai perwujudan akuntabilitas atas pencapaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 (Adendum). Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 merupakan laporan tahun ke 5 (lima) atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 merupakan hasil kompilasi dari analisis terhadap capaian kinerja 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama, sekaligus menggambarkan capaian pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri Tahun 2024, yang antara lain menjaga stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri dalam sinergi pembangunan pusat dan daerah, pelayanan publik yang berkualitas, penguatan kebijakan strategis, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan internal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan ini, saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024. Saya melihat masih terdapat bagian-bagian yang perlu ditingkatkan kinerjanya, kiranya seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat mengupayakan perbaikan pada tahun yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Sekian dan Terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Menteri Dalam Negeri,**

**Muhammad Tito Karnavian**





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Timur nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391  
Fax. (021) 384 9422 Website: [www.itjen.kemendagri.go.id](http://www.itjen.kemendagri.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Semua Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait.

Berdasarkan reviu dimaksud, kami meyakini bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 24 Februari 2025

Inspektur Jenderal,



S. M. Mahendra Jaya

## Daftar Isi

Kata pengantar	iii
Surat Pernyataan Telah Direviu	v
Penghargaan/Prestasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024	xvii

---

### BAB I:

<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri	2
Latar Belakang	4
Visi & Misi Presiden	5
Visi & Misi Kementerian Dalam Negeri	8
Tugas dan Fungsi	8
Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri	9
Tantangan dan Isu Strategis Kementerian Dalam Negeri	10
Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri	13
Data Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri	34

---

### BAB II:

<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>37</b>
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024	38
Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024	42
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	45
Pengukuran Kinerja Tahun 2024	48
Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	52

---

### BAB III:

<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>87</b>
------------------------------	-----------

Capaian Kinerja Tahun 2024	89
----------------------------	----

<b>Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia</b>	<b>93</b>
---	-----------

Indikator Sasaran:	
• Indeks Demokrasi Indonesia	95
• Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	111
• Indeks Kinerja Ormas	119

**Sasaran Strategis 2:**  
**Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah** 129

Indikator Sasaran:  
Indeks Harmoni Indonesia 130

---

**Sasaran Strategis 3:**  
**Meningkatnya Kewaspadaan Nasional** 145

Indikator Sasaran:  
Indeks Kewaspadaan Nasional 147

---

**Sasaran Strategis 4:**  
**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas** 155

Indikator Sasaran:  
Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik" 157

---

**Sasaran Strategis 5:**  
**Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri** 167

Indikator Sasaran:  
Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun 169  
Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri 185  
Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional 191  
Indeks Kepuasan **Stakeholder** terhadap Kinerja Alumni 199

---

**Sasaran Strategis 6:**  
**Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah** 219

Indikator Sasaran:  
Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah 221

**Sasaran Strategis 7:**  
**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif** **229**

Indikator Sasaran:

- Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD 231
  - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 135
  - Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah 239
  - Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 247
  - Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik" 255
  - Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 263
  - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi 279
  - Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah 289
  - Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah 295
- 

**Sasaran Strategis 8:**  
**Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan** **305**

Indikator Sasaran:

- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 307
  - Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik 313
- 

**Sasaran Strategis 9:**  
**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan** **319**

Indikator Sasaran:

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan 321
- 

**Sasaran Strategis 10:**  
**Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri** **329**

Indikator Sasaran:

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 331

**Sasaran Strategis 11:  
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang  
Akuntabel dan Berintegritas** **343**

Indikator Sasaran:

- Indeks Pengawasan Internal 345
  - Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus 349
- 

**Sasaran Strategis 12:  
Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi  
Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan  
di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri** **353**

Indikator Sasaran:

Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri 353

---

**Pagu dan Realisasi Anggaran  
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024** **359**

---

**BAB IV  
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI** **365**

- Tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Tahun 2024 366
  - Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Kemendagri TA.2024 370
  - Implementasi dan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan Pengendalian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Lingkup Kemendagri Tahun 2024 379
- 

**BAB V  
PENUTUP** **381**  
Penutup 382

---

**LAMPIRAN** **383**

## Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tingkat Keberhasilan dengan Skala Ordinal	49
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2024	93
Tabel 3.2 Rincian aspek, indikator, data provinsi, sumber data provinsi, data pusat, dan sumber data pusat IDI	96
Tabel 3.3 Kategorisasi dan Rentang Nilai dalam Pengukuran IDI	99
Tabel 3.4 Indikator Aspek Kebebasan IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023	104
Tabel 3.5 Indikator Aspek Kesetaraan IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023	105
Tabel 3.6 Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023	106
Tabel 3.7 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2023 dan 2024	107
Tabel 3.8 Pencairan Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 dalam dua tahapan	108
Tabel 3.9 Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2024	112
Tabel 3.10 Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	116
Tabel 3.11 Data Pilkada Ulang pada Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka	116
Tabel 3.12 Dimensi, Variabel dan Indikator pada Indeks Kinerja Ormas	113
Tabel 3.13 Data Jumlah Organisasi Masyarakat	121
Tabel 3.14 Kategorisasi Nilai Indeks Kinerja Ormas	121
Tabel 3.15 Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas	123
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah	129
Tabel 3.17 Kategorisasi Skor Indeks IHaI	132
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Tahun 2024	145
Tabel 3.19 Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2024	149
Tabel 3.20 Lokasi dan Hasil Pengukuran IKN Tahun 2024	150
Tabel 3.21 Kategorisasi Nilai Indeks Kewaspadaan Nasional	151
Tabel 3.22 Hasil Pengukuran IKN 5 Dimensi Provinsi DKI Jakarta	151
Tabel 3.23 Hasil Pengukuran IKN 5 Dimensi Provinsi Kalimantan Selatan	152
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2024	155
Tabel 3.25 Kategorisasi Indeks Trantibumlinmas	159

Tabel 3.26 Contoh Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	159
Tabel 3.27 Daftar Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah Berkategori Sangat Baik dan Baik	160
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024	167
Tabel 3.29 Kegiatan Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya Tahun 2020 s.d. 2024	180
Tabel 3.30 Pejabat Fungsional Auditor Kemendagri berdasarkan Jenjang	186
Tabel 3.31 Diklat dan PKS yang telah dilaksanakan di Inspektorat Jenderal	187
Tabel 3.31 Jumlah PPUPD Secara Nasional	192
Tabel 3.32 Pelatihan Perjenjangan	193
Tabel 3.33 Jumlah PPUPD berdasarkan Jenjang	194
Tabel 3.34 Dimensi dan Sub Dimensi Yang Dinilai Pada Survei Kepuasan Stakeholders Terhadap Kinerja Alumni IPDN Tahun 2024	201
Tabel 3.35 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan	204
Tabel 3.36 Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Pada 16 (enam belas) Provinsi	205
Tabel 3.37 Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Pada 16 (enam belas) Provinsi	206
Tabel 3.38 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (1)	207
Tabel 3.39 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (2)	208
Tabel 3.40 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (3)	209
Tabel 3.41 Rekapitulasi Gap Analysis pada 16 (enam belas) Provinsi	209
Tabel 3.42 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (1)	210
Tabel 3.43 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (2)	211
Tabel 3.44 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (3)	212
Tabel 3.45 Rekapitulasi Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi	212
Tabel 3.46 Kriteria Kompetensi dan Posisinya pada Diagram Kartesius IPA	214
Tabel 3.47 Kategorisasi Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	215
Tabel 3.48 Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni Tahun 2020 s.d. 2024	216
Tabel 3.49 Penjabaran Aspek, Variabel dan Indikator, dan Dokumen Data Dukung	222
Tabel 3.50 Pembobotan Skala Indeks IKD	225
Tabel 3.51 Penghitungan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah Tahun 2023	226

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2024	230
Tabel 3.53 Kategorisasi Penilaian Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	232
Tabel 3. 54 Hasil Penilaian Kemitraan KDH dan DPRD di 55 Daerah Tahun 2024	232
Tabel 3.55 Kategorisasi Skala EPPD	236
Tabel 3.56 Kategorisasi Nilai Capaian Penerapan SPM	239
Tabel 3.57 Target dan Realisasi Penerapan SPM dalam RO Prioritas Nasional Tahun 2024	245
Tabel 3.58 Kategorisasi Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	249
Tabel 3.59 Perbandingan Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik” Tahun sebelumnya	258
Tabel 3.60 Jumlah Data Profil Desa yang terpublikasi secara online tahun 2020-2024	259
Tabel 3.61 Rekapitulasi Jumlah Daerah Kategori IPKD Tahun 2024	264
Tabel 3.62 Rekapitulasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024	265
Tabel 3.63 Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD Tahun 2020 s.d 2024	265
Tabel 3.64 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurnya tiap Provinsi dengan nilai minimum 66	266
Tabel 3.65 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurnya tiap Kabupaten dengan nilai minimum 66	267
Tabel 3.66 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurnya tiap Kota dengan nilai minimum 66	275
Tabel 3.67 Kategorisasi Nilai Indeks Inovasi Daerah	280
Tabel 3.68 Daftar Provinsi dengan Predikat Sangat Inovatif	281
Tabel 3.69 Daftar Kabupaten dengan Predikat Sangat Inovatif	281
Tabel 3.70 Daftar Kota dengan Predikat Sangat Inovatif	283
Tabel 3.71 Rekapitulasi Jumlah Daerah pada tiap Kategori Indeks Inovasi Daerah	285
Tabel 3.72 Sampel Inovasi Daerah	286
Tabel 3.73 Hasil Pengawasan dalam rangka Pencegahan Penyimpangan Tiap Daerah	292
Tabel 3.74 Tabel Rentang nilai Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	296
Tabel 3.75 Nilai Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM Inspektorat Daerah	296
Tabel 3.76 Nilai Kecukupan Anggaran Pengawasan pada Inspektorat Daerah	298
Tabel 3.77 Level Kapabilitas APiP pada Inspektorat Daerah	299
Tabel 3.78 Nilai Persentase Pengawasan Dugaan Penyimpangan pada Inspektorat Daerah	301
Tabel 3.79 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	306

Tabel 3.80 Penggunaan Anggaran PNBPN lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	316
Tabel 3.81 Capaian Kinerja sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2024	319
Tabel 3.82 Contoh Perhitungan Indeks Kewilayahan berdasarkan Indeks Komposit	323
Tabel 3.83 Daftar Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kategori Baik Tahun 2024	324
Tabel 3.84 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024	329
Tabel 3.85 Indikator Penyusun Indeks Reformasi Birokrasi	332
Tabel 3.86 Komponen dan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024	334
Tabel 3.87 Hasil Penilaian per Indikator Komponen RB General Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023-2024	334
Tabel 3.88 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas Tahun 2024	343
Tabel 3.89 Kategorisasi Predikat Opini BPK	345
Tabel 3.90 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024	353
Tabel 3.91 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024	355
Tabel 3.92 Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Mendagri ke Pemangku Kepentingan Tahun 2024	356
Tabel 3.93 Penambahan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024	360
Tabel 3.94 Pengurangan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024	360
Tabel 3.95 Realisasi Kemendagri per Unit Kerja Eselon I Tahun 2024	360
Tabel 3.96 Realisasi Kemendagri Setelah Dikurangi per Unit Kerja Eselon I Tahun 2024	362
Tabel 4.1 Capaian dan Kinerja Prioritas Nasional Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA. 2024	371
Tabel 4.2 Nilai Maturitas SPIP Tahun 2022 s.d 2024	380
Tabel 5.1 Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2024	380

## Daftar Grafik

Grafik 3.1 Nilai IDI Nasional, Pusat, dan Provinsi berdasarkan Aspek Tahun 2023	100
Grafik 3.2 Nilai IDI Nasional, Pusat, dan Provinsi Tahun 2023	100
Grafik 3.3 Nilai IDI Tahun 2019 s.d 2023	101
Grafik 3.4 Nilai Aspek IDI Nasional Tahun 2021 s.d. 2023	102
Grafik 3.5 Nilai Aspek IDI Pusat Tahun 2021 s.d. 2023	102
Grafik 3.6 Nilai Aspek IDI Provinsi Tahun 2021 s.d. 2023	103
Grafik 3.7 Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas	123
Grafik 3.8 Nilai Ormas per Dimensi	124
Grafik 3.9 Indeks Kinerja Ormas Tahun 2021 s.d. 2024	124
Grafik 3.10 Perhitungan Nilai IHal per Daerah	133
Grafik 3.11 Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Minimal 20 JP Pertahun Tahun 2020 s.d 2024	176
Grafik 3.12 Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah periode Tahun 2020 s.d. 2024	178
Grafik 3.13 Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting Tahun 2021 s.d. 2024	177
Grafik 3.14 Pengembangan Kompetensi Fungsional PPUPD Tahun 2020 s.d. 2024	177
Grafik 3.15 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) Tahun 2021 s.d. 2024	178
Grafik 3.16 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah Tahun 2020 s.d. 2024	178
Grafik 3.17 Training of Trainer (ToT) Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja, Diklat Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 s.d. 2024	178
Grafik 3.18 Pendidikan dan Pelatihan Manajerial bagi pejabat pengawas, pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama serta pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 s.d 2024	179
Grafik 3.19 Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya Tahun 2020 s.d. 2024	180
Grafik 3.20 Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Tahun 2020 s.d Tahun 2024	181
Grafik 3.21 Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri Aparatur Alih Jabatan dan Kenaikan Jenjang Polisi Pamong Praja dan PPUPD Tahun 2020 s.d Tahun 2024	181
Grafik 3.22 Perbandingan Capaian Nasional Penerapan SPM dengan target RPJMN Tahun 2020-2024	242
Grafik 3.23 Perbandingan Penerapan SPM Nasional per Bidang Tahun 2020-2024	242
Grafik 3.24 Perbandingan Penerapan SPM Provinsi per Bidang Tahun 2020-2024	243
Grafik 3.25 Perbandingan Penerapan SPM Kabupaten/Kota per Bidang Tahun 2020-2024	243
Grafik 3.26 Perbandingan Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2021 s.d.2024	244
Grafik 3.27 Persandingan Nilai Indeks Bersarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022 s.d. 2024	252
Grafik 3.28 Persandingan IPKD Tahun 2020 s.d 2024	265

Grafik 3.29 Jumlah Daerah yang Mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi Tahun 2021-2024	286
Grafik 3.30 Penerbitan Kartu Identitas Anak tiap Provinsi	308
Grafik 3.31 Perekaman KTP tiap Provinsi	308
Grafik 3.32 Penerbitan Akta Kelahiran tiap Provinsi	309
Grafik 3.33 Penerbitan Akta Kematian tiap Provinsi	309
Grafik 3.34 Penerbitan Akta Perkawinan	309
Grafik 3.35 Penerbitan Akta Perceraian	310
Grafik 3.36 Target dan Capaian Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024	311
Grafik 3.37 Klasifikasi Lembaga Pengguna Data Kependudukan yang Membayarkan PNBPNBP	315
Grafik 3.38 Pemasukan PNBPNBP Pemanfaatan Data Kependudukan per Bulan Tahun 2024	315
Grafik 3.39 Target dan Capaian Indeks RB Kemendagri Tahun 2020-2024	339

## Daftar Gambar

Gambar 3.1 Alur Pengukuran IDI	109
Gambar 3.2 Peserta Pemilihan Serentak	113
Gambar 3.3 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada	114
Gambar 3.4 Data Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc	115
Gambar 3.5 Realisasi Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024	115
Gambar 3.6 Alokasi DIPA pada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk Pemilu	118
Gambar 3.7 Rakor Netralitas ASN dan SEB Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan	118
Gambar 3.8 Data & Lokasi Indeks Harmoni 2024	118
Gambar 3.9 Perhitungan Nilai IHaI Tahun 2024	131
Gambar 3.10 Infografis Indeks Harmoni Indonesia	133
Gambar 3.11 Aplikasi Trantibumlinmas	164
Gambar 3.12 Sebaran Jenis Pengembangan Kompetensi	174
Gambar 3.13 Importance Performance Analysis (IPA) pada 16 (enam belas) Provinsi	213
Gambar 3.14 Jumlah Desa tiap Provinsi	256
Gambar 3.15 Jumlah Desa yang Memperbaharui Data Prodeskel dan Terpublikasi Secara Online Tahun 2024	259
Gambar 3.16 Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang & Berkembang Tahun 2024	260
Gambar 3.17 Rincian Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik Tahun 2024	314



# Prestasi dan Penghargaan Kemendagri Tahun 2024



# A. Penghargaan Tingkat Kementerian



1

Penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri atas "Extraordinary Achievements in Reform of Domestic Governance" dari CNN Indonesia Awards.

Penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri atas komitmen dan kesungguhan upaya dalam peningkatan kinerja kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan pembinaan kearsipan pemerintahan daerah secara nasional dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

2



3

Penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri atas Peran dan Dukungannya dalam Penyediaan Database Kependudukan dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan dari Kementerian ATR/BPN.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) Award Tahun 2024 Kategori Kementerian/ Lembaga Anggaran Menengah dari Kementerian Perindustrian.

4



5

Kementerian Dalam Negeri meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2023 (10 kali secara berturut-turut) dari BPK RI.



Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi, dengan Indeks sebesar 85,05 atau Predikat "Memuaskan" (A) dari Kementerian PANRB.

6



7

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024 dengan nilai sebesar 77,90 atau Predikat "Sangat Baik" (BB) dari Kementerian PANRB.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif (Level 3) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

8



9

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Penyelenggaraan Maturitas SPIP dengan nilai 3,531 (Level 3) atau kategori "Terdefinisi" berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Kategori Kementerian Informatif dari Komisi Informasi.

10





11

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Lembaga Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian yang memperoleh peringkat XVI dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2023 dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

12



13

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Nilai 4,21 dari skala 1-5 predikat "Memuaskan" dari Kementerian PANRB

14



## B. Penghargaan Tingkat Unit Kerja Eselon I

### Sekretariat Jenderal



Penghargaan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri Telah Mendapatkan Sertifikasi Informasi Security Management System (ISMS) Berstandar Internasional ISO 27001

### Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Penghargaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai Satuan Kerja Terbaik ke-1 Tingkat Zero Retur dan Validitas SPM Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV



Prestasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai peringkat 4 dalam Evaluasi Kearsipan Tahun 2024 dengan nilai 88,53 dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

### Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Penghargaan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta sebagai Peringkat I Satuan Kerja dengan Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik Tahun 2024.



Penghargaan Balai Besar Pemerintahan Desa Malang sebagai Peringkat III Satker Terbaik atas IKPA Kategori Satker dengan Pagu Rp 5 Milyar s.d. Rp 20 Milyar Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai Satker Terbaik Pengelolaan Penyerapan Anggaran Semester I TA.2024 dari KPPN Jakarta IV.



Penghargaan Balai Besar Pemerintahan Desa Malang sebagai Peringkat III Satker Terbaik atas IKPA Kategori Satker dengan Pagu Rp 5 Milyar s.d. Rp 20 Milyar Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai Satker Terbaik ke-1 Nilai IKPA Kategori Pagu di atas 800 Miliar Semester I Tahun 2024 dari KPPN Jakarta IV.



### Ditjen Bina Pembangunan Daerah



Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada ajang BPH Migas Awards 2024 atas kontribusi signifikan dalam mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan dengan tepat sasaran

### Ditjen Otonomi Daerah

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai Satuan Kerja Terbaik ke-3 nilai IKPA Semester I Tahun 2024 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.



## Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Penghargaan Perbarindo kepada Ditjen Dukcapil atas Dukungan dan Kontribusi Ditjen Dukcapil yang Sangat Berharga terhadap Digitalisasi Industri BPR dan BPRS dari Perbarindo.

Penghargaan Menteri ATR/BPN kepada Ditjen Dukcapil atas Peran dan Dukungannya dalam Penyediaan Database Kependudukan dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan dari Kementerian ATR/BPN.



Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024 atas Transformasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan dengan basis data perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Ditjen Dukcapil sebagai Special Mention Transformative Agency of The Year atas kontribusinya dalam mendorong percepatan transformasi digital dalam layanan publik dari GovInsider



Penghargaan kepada Ditjen Dukcapil sebagai peringkat ke-5 Konten TikTok Terpopuler dari RevoU pada ajang Government Social Media Award 2024.

Penghargaan kepada Ditjen Dukcapil sebagai peringkat ke-16 Akun TikTok Paling Menarik dari RevoU pada ajang Government Social Media Award 2024.



### Ditjen Bina Keuangan Daerah



Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai Satuan Kerja Terbaik Transaksi Digital Payment (Digipay) Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV, dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai Satuan Kerja Terbaik ke-3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu 50 s.d 150 Miliar Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV, dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



### Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Sertifikat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri sebagai lembaga pelatihan pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Terakreditasi A, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penghargaan kepada PPSDM Regional Yogyakarta sebagai Satuan Kerja dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berprestasi Sangat Baik Periode Semester I Tahun 2024 lingkup KPPN Yogyakarta, dari KPPN Yogyakarta.





Penghargaan Apresiasi Kelestarian dan Kerawatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya Tahun 2024 kepada PPSDM Regional Yogyakarta dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

### Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Penghargaan kepada IPDN Kampus Kalimantan Barat sebagai Satker dengan nilai IKPA terbaik Semester I Tahun 2024 lingkup Kanwil DjPb Provinsi Kalimantan Barat (dengan nilai IKPA 100), dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.





# BAB I PENDAHULUAN

MENDAGRI

# Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri

“ Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. ”

## 1942

Diawali dengan zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departemen van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi dan Agraria.

## 1942-1945

Departemen van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部 *naimubu*) yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara Nomor 7, Jakarta, sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

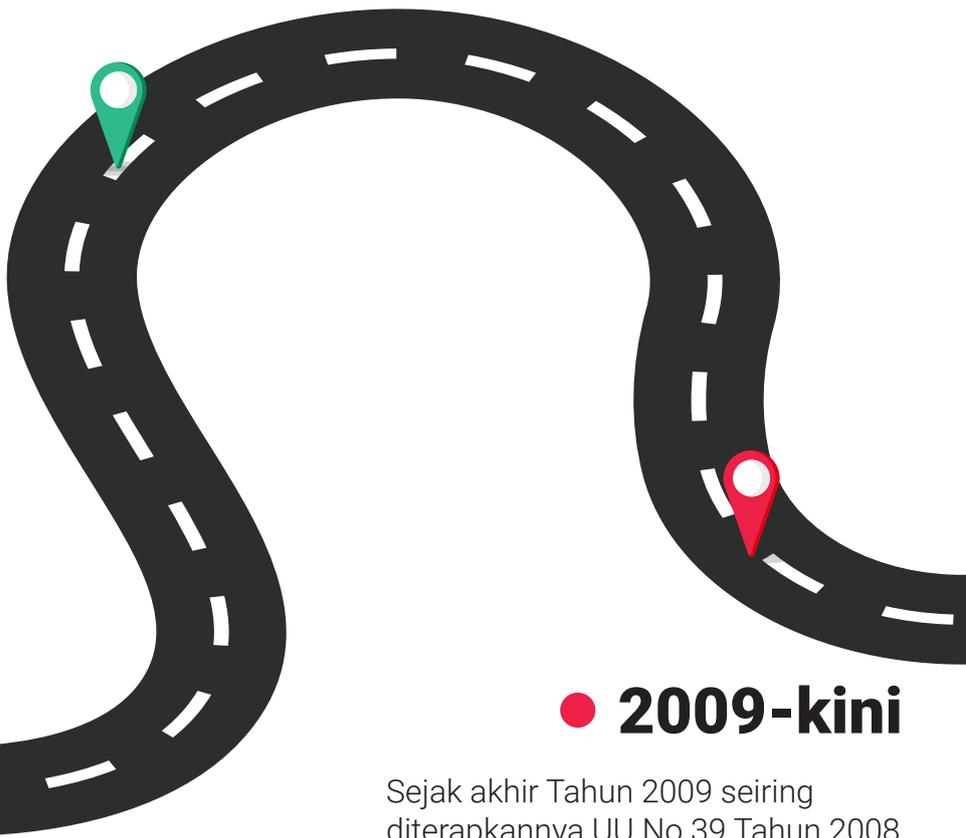
## 1945

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.



## ● 1959-1968

Departemen Dalam Negeri dalam kabinet Pembangunan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.



## ● 1945-1949

Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat edaran pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MPR/RI/1959.

## ● 2009-kini

Sejak akhir Tahun 2009 seiring diterapkannya UU No.39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, istilah "Departemen" diubah kembali menjadi "Kementerian".



# Latar Belakang

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menjamin dan mengawal terselenggaranya roda pemerintahan dalam negeri, khususnya pada pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan di atas, Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga publik perlu menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, dan sekaligus bagian dari penyelenggaraan good governance. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu agar setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan dan sistematika Laporan Kinerja Tahun 2024 mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2024 juga bentuk pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai sarana bagi Stakeholder dalam memberikan masukan perbaikan bagi kinerja Kementerian Dalam Negeri.



**Visi Misi**  
**Presiden dan Wakil Presiden**  
**Republik Indonesia**





Visi Misi Presiden  
**Joko Widodo-Ma'ruf Amin**  
Periode 2019-2024

## Visi

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,  
dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.**

## Misi

- 1** Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- 2** Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing.
- 3** Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
- 4** Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
- 5** Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
- 6** Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
- 7** Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
- 8** Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
- 9** Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.



Visi Misi Presiden

**Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka**

Periode 2024-2029

## Visi

**Bersama Indonesia Maju Menuju  
Indonesia Emas 2045.**

## Misi

**1**

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

**2**

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

**3**

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

**4**

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

**5**

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

**6**

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

**7**

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

**8**

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

# Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri

## Visi

Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

## Misi

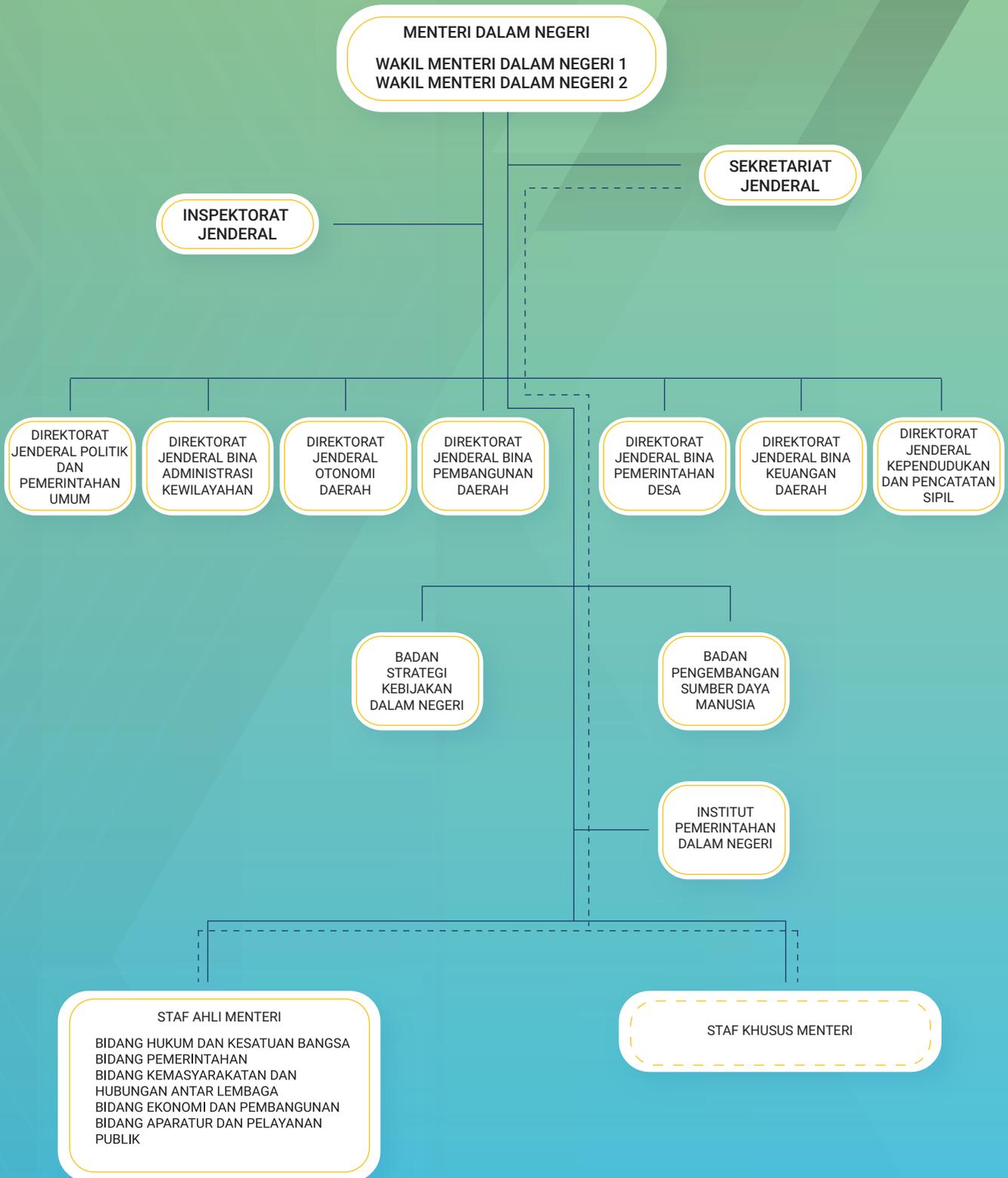
1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematangan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan Trantibumlinmas.

## Tugas dan Fungsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. Pengekoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
7. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

# Struktur Organisasi



— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi

## Tantangan

Kementerian Dalam Negeri, dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara, tentu menghadapi berbagai permasalahan. Namun, permasalahan-permasalahan tersebut sejatinya dapat dilihat sebagai tantangan yang memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja. Setiap tantangan yang dihadapi oleh Kemendagri menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan, inovasi, dan penyempurnaan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Sistem politik Indonesia terus mengalami demokratisasi, tetapi masih terdapat tantangan dalam memperluas ruang keadilan sosial yang merata, ditambah dengan peningkatan jumlah organisasi kemasyarakatan dan bantuan partai politik.
2. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, meskipun sudah mendorong pertumbuhan ekonomi, menimbulkan ketimpangan antara daerah dan kota besar, yang berpotensi mempengaruhi pelayanan publik serta pengurangan kemiskinan di wilayah tertentu.
3. Meski sudah ada upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran elektronik (e-planning dan e-budgeting) masih menemui hambatan terkait penyediaan data yang akurat di tingkat daerah.
4. Gubernur menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat, terutama dalam pengawasan daerah, meskipun ada dukungan pendanaan melalui APBN untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.
5. Pandemi COVID-19 mempercepat penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan, namun masih ada tantangan besar terkait kesenjangan infrastruktur dan pengintegrasian sistem antar lembaga, yang menghambat percepatan birokrasi.
6. Pengembangan kompetensi aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan belum optimal dengan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN.

## Isu Strategis

### 1. Stabilitas Politik Dalam Negeri

Stabilitas politik dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam peningkatan kualitas demokrasi, penguatan ideologi kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan peningkatan pada aspek lembaga demokrasi, namun masih perlu upaya lebih lanjut dalam kebebasan sipil dan hak-hak politik. Minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila serta ancaman radikalisme dan komunisme memerlukan strategi pembumih nilai-nilai kebangsaan yang lebih efektif. Selain itu, kesenjangan sosial akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi memicu konflik, sementara globalisasi membawa tantangan baru, termasuk masuknya peneliti asing yang perlu diawasi dengan kewaspadaan nasional. Dalam aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat (Trantibumlinmas), masih terdapat kelemahan dalam mitigasi bencana, kapasitas kelembagaan daerah, serta efektivitas penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP, yang memerlukan integrasi kebijakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung.

### 2. SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan, termasuk jabatan fungsional strategis, masih menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Ketidaksinkronan antara penyelenggaraan diklat dengan kebutuhan kompetensi di berbagai unit organisasi menghambat pengembangan kapasitas ASN yang optimal. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan, terutama di BPSDM Kemendagri dan IPDN, perlu ditingkatkan untuk menciptakan aparatur yang adaptif dan kompetitif di tingkat regional maupun global. Selain itu, penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit menjadi kunci untuk membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

### 3. Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa

- a. Tuntutan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terus meningkat, sementara tantangan penguatan desentralisasi asimetris juga menghadirkan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, seperti di Papua, Aceh, dan DIY. Selain itu, daerah induk masih belum menyelesaikan kewajiban terkait aset dan batas wilayah hasil pemekaran.
- b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan integrasi sistem perencanaan berbasis elektronik (e-planning dan e-budgeting) belum optimal, mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Hal ini juga diperburuk dengan kurangnya sinergi antar kementerian dan lembaga yang menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih regulasi di tingkat daerah.
- c. Gubernur menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran daerah, dengan kurangnya sinergi dalam administrasi pemerintahan dan perencanaan pembangunan berbasis konsep money follow program yang belum diterapkan secara optimal.
- d. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah masih belum maksimal, dengan adanya keterlambatan dalam penetapan APBD di beberapa daerah dan rendahnya kapasitas SDM pengelola keuangan yang tersertifikasi. Selain itu, inovasi dalam pembiayaan pembangunan daerah seperti pinjaman dan obligasi daerah juga masih terbatas.
- e. Kurangnya inisiatif untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, disertai rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah dalam riset dan analisis data. Hal ini diperparah dengan terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung penguatan inovasi.
- f. Pilkada serentak yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Nasional 2024 menghadirkan tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik serta memastikan proses demokrasi yang berjalan efektif dan minim konflik, memerlukan evaluasi kebijakan Pilkada sebelumnya untuk menyukseskan penyelenggaraan tersebut.
- g. Otonomi Khusus Papua dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua tanpa menambah kompleksitas birokrasi yang ada.
- h. Digitalisasi pemerintahan melalui SPBE menawarkan peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun tantangannya meliputi kurangnya integrasi sistem antar daerah, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan kompetensi ASN dalam pemanfaatan teknologi digital.
- i. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara menimbulkan tantangan dalam hal regulasi, infrastruktur, dan kesiapan pemerintah daerah sekitar IKN. Perlu adanya strategi mitigasi agar pemindahan ini tidak menciptakan ketimpangan ekonomi baru antara Jakarta dan daerah tujuan IKN.





# Profil Pejabat Kemendagri





Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.  
**Menteri Dalam Negeri**

**TTL** Palembang, 26 Oktober 1964

**DOMISILI** Jakarta

- RIWAYAT PENDIDIKAN**
- 2013 | Ph.D. in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore dengan predikat Magna Cum Laude.
  - 2011 | Lemhannas RI PPSA XVII (Peserta terbaik peraih bintang Seroja).
  - 2000 | Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.
  - 1998 | Bachelor of Arts in Strategic Studies, Massey University Auckland, New Zealand.
  - 1998 | Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, New Zealand.
  - 1996 | Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Wiyata Cendekia).
  - 1993 | Master of Arts in Police Studies, University of Exeter, United Kingdom.
  - 1987 | Akademi Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Adhi Makayasa).
  - 1983 | SMAN 2 Palembang.

- RIWAYAT JABATAN**
- 2019 - Sekarang | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
  - 2017 | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
  - 2016 | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
  - 2015 | Kapolda Metro Jaya.
  - 2014 | Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.
  - 2012 | Kapolda Papua.
  - 2010 | Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
  - 2009 | Kadensus 88 AT Bareskrim Polri.
  - 2005 | Kapolres Serang Polda Banten.
  - 2003 | Kasat I /Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
  - 2000 | Kasat Serse Umum Ditserse Polda Metro Jaya.
  - 1999 | Kasat Serse Ekonomi Ditserse Polda Metro Jaya.





**John Wempi Wetipo SH., MH**  
**Wakil Menteri Dalam Negeri**

**TTL** Hulakaima, 15 September 1972

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2011 | S2 Universitas Cendrawasih, Papua.
- 2009 | S1 Universitas Cendrawasih, Papua.
- 1994 | D.III Akademi Pariwisata Manado.
- 1991 | SMA Katholik Taruna Dharma Jayapura, Papua.
- 1988 | SMP Negeri 2 Wamena, Papua.
- 1985 | SD YPPGI Hitigima Wamena, Papua.

**RIWAYAT JABATAN**

- 2022 - September 2024 | Wakil Menteri Dalam Negeri.
- 2019 | Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2013 - 2018 | Bupati Kabupaten Jayawijaya
- 2008 - 2013 | Bupati Kabupaten Jayawijaya.
- 2006 | Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jayawijaya.
- 2001 | Kepala Seksi Pemasaran Wisata.





**Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.M**  
**Wakil Menteri Dalam Negeri I**

**TTL** Piramyd, 10 Januari 1971

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2016 | S3 Doktor Manajemen Universitas Cendrawasih.
- 2009 | S2 Magister Manajemen Universitas Cendrawasih.
- 1996 | S1 Sarjana Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Silas Papare
- 1991 | SMA YPK Diaspora
- 1988 | SMP YPK Sentani
- 1985 | SD Inpres Mulele

**RIWAYAT JABATAN**

- 21 Oktober 2024 - Sekarang | Wakil Menteri Dalam Negeri
- 2023 | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- 2022 | PJ. Gubernur Provinsi Papua Tengah.
- 2022 | Staf Ahli Mendagri Bid. Aparatur dan Pelayanan Publik.
- 2021 | Penjabat Bupati Kab. Yalimo, Provinsi Papua.
- 2020 | Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua
- 2017 | Penjabat Bupati Kab. Mappi, Provinsi Papua Selatan.
- 2017 | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua
- 2014 | Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua.
- 2013 | Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua
- 2010 | Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Jayawijaya.
- 2009 | Kasubbag Tata Usaha Kab. Jayawijaya.
- 2003 | Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. Jayawijaya.
- 2001 | Kasubdin Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Kab. Jayawijaya.
- 2000 | Kepala Distrik Asologaima di KIMBIM



**Bima Arya Sugiarto**  
**Wakil Menteri Dalam Negeri II**



**TTL** Bogor, 17 Desember 1972

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 1991-1996 | Sarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan Bandung
- 1988-1991 | SMAN 1 Bogor
- 1986-1988 | SMP 1 Bogor
- 1985-1986 | SMPN 1 Medan
- 1985 | SDN Polisi 4 Bogor
- 1982-1984 | SD Kebon Baru IV Cirebon
- 1980-1982 | SD Tarumanagara Karawang
- 1979-1980 | SD Sukaresmi Subang
- 1977-1978 | TK Bhayangkari

**RIWAYAT JABATAN**

- 21 Oktober 2024 - Sekarang | Wakil Menteri Dalam Negeri
- 2014 - 2024 | Wali Kota Bogor
- 2010 | Komisararis Charta Politika Indonesia
- 2010 | Dosen Pasca Sarjana Universitas Paramadina
- 2009-2010 | Pemimpin Redaksi Majalah Rakyat Merdeka
- 2008-2010 | Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia
- 2007-2008 | Konsultan di Partnership for Governance Reform, UNDP
- 2006-2010 | Direktur Eksekutif Lead Institute Paramadina
- 2004-2005 | Research Fellow di Center For Strategic and International Studies, CSIS
- 2004 - 2006 | Peneliti di Research School for Pacific and Asian Studies, Canberra
- 2001 - 2014 | Dosen Universitas Paramadina
- 2001 - 2002 | Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Paramadina
- 1998-2001 | Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan





Komjen Pol. Drs. Toms Tohir, M.Si.

**Sekretaris Jenderal (Periode 11 Februari 2025 - Saat ini)**

**Plt Sekretaris Jenderal (Periode 2024 - 11 Februari 2025)**



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

**Sekretaris Jenderal**

**(Periode 2022 - April 2024)**

**TTL**

Kota Bandar Lampung, 30 Januari 1969

**DOMISILI**

Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2001 | Magister Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
- 1997 | Sarjana Ilmu Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta.
- 1990 | Akademi Kepolisian.
- 1987 | SMA Negeri 1 Jakarta.
- 1984 | SMP Negeri 15 Bandung.
- 1981 | SD Kristen PPKP Palembang.

**RIWAYAT JABATAN**

- 11 Februari 2025 s.d Sekarang | Sekretaris Jenderal
- 2024 - 11 Februari 2025 | Plt. Sekretaris Jenderal
- 2022 - 11 Februari 2025 | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2019 | Kapolda Nusa Tenggara Barat.
- 2018 | Kapolda Banten.
- 2017 | Karowassidik Bareskrim Polri.
- 2016 | Sesropaminal Divpropam Polri.
- 2016 | Dirreskrimsus Polda Sumsel.
- 2014 | Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri.
- 2011 | Kabid Propam Polda Jawa Timur.
- 2010 | Wakapolrestabes Surabaya.
- 2009 | Kapolres Jombang.
- 2007 | Kapolres Pamekasan.
- 2006 | Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
- 2005 | Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- 2004 | Kasatresmob Polda Metro Jaya.



Sang Made Mahendra Jaya  
Inspektur Jenderal  
(Periode 11 Februari 2025 - Saat Ini)  
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum Dan  
Kesatuan Bangsa (Periode 11 Februari 2025 - Saat Ini)



Komjen Pol. Drs. Tomsu Tohir, M.Si.  
Inspektur Jenderal  
(Periode 2022 - 11 Februari 2025)



**TTL** Singaraja, 3 Juli 1966

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2001 | S2 Universitas Hasanudin (Magister)
- 1996 | S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
- 1989 | Akademi Kepolisian
- 1985 | SMAN 2 Samarinda
- 1982 | SMPN 1 Singaraja
- 1979 | SDN 10 Naikoten I Kupang

**RIWAYAT JABATAN**

- 11 Februari 2025 - Saat ini | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 2023 - Saat ini | Pj. Gubernur Bali
- 2023 - 11 Februari 2025 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum Dan Kesatuan Bangsa
- 2020 - 2023 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan Dan Hukum
- 2020 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan, Hukum, Dan Pengawasan
- 2018 - 2020 | Kasetum Polri
- 2016 - 2018 | Dirreskrimum Polda Bali
- 2015 - 2016 | Analis Kebijakan Madya Bidang Pidexsus Bareskrim Polri (Dlm Rangka Dik Sespimti 2015)
- 2014 - 2015 | Kasubdit | Dittipidexsus Bareskrim Polri
- 2011 - 2014 | Dirreskrimsus Polda Bengkulu
- 2010 - 2011 | Penyidik Utama Tk Iii Dit Iii/Kor Dan Wcc Bareskrim Polri
- 2008 - 2010 | Waka Poltabes Samarinda Polda Kaltim
- 2008 | Kapolres Paser Polda Kaltim
- 2007 - 2008 | Kapolres Nunukan Polda Kaltim
- 2004 - 2007 | Penyidik Madya Unit V Bareskrim Polri (Ditugaskan Sebagai Anggota Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- 2004 | Pama Pd Ptik (Dlm Rangka Dik Ptik)
- 2003 - 2004 | Kasat Iv Dit Reskrim Polda Sulsel
- 2002 - 2003 | Kasubbag Bin Ops Tipiter Dit Serse Polda Sulsel
- 2001 - 2002 | Waka Polres Pangkep Polwil Pare-Pare Polda Sulsel
- 2000 - 2001 | Kasubbag Binops Bag Serse Tipikor Dit Reskrim Polda Sulsel
- 2000 | Kasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel
- 1999 - 2000 | Wakasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel
- 1997 - 1999 | Kapolsekta Tamalate Poltabes Ujungpandang Polda Sulsel
- 1996 - 1997 | Pamin Ops C Pus Kodal Ops Polda Sulselra
- 1993 - 1996 | Ka Kpp3 Tenau Polres Kupang Polda Nusra
- 1992 - 1993 | Kapolsek Kupang Barat Polres Kupang Polda Nusra
- 1991 - 1992 | Kaurbin Ops Sat Bimmas Polres Kupang Polda Nusra
- 1990 - 1991 | Pamapta 1 Polres Kupang Polda Nusra



Dr. Drs. Safrizal, Z.A., M.Si  
**Direktur Jenderal Bina  
Administrasi Kewilayahan  
Periode 2020 - Saat Ini**



Dr. Drs. Amran, MT  
**Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi  
Kewilayahan (November 2023 s.d saat ini)**

**TTL** Banda Aceh, 21 April 1970

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2019 | Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2007 | Pascasarjana STIA YAPPAN Program Magister Administrasi Publik.
- Program Magister Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UNPAD.
- 1998 | Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta.
- 1992 | STPDN Jatinangor.

**RIWAYAT JABATAN**

- 2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
- 2024 | Pj. Gubernur Aceh
- 2023 | Pj. Gubernur Bangka Belitung
- 2021 | Pj. Gubernur Kalimantan Selatan.
- 2019 | Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan .
- 2017 | Kepala Pusat Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan.
- 2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda.
- 2015 | Kabag Perencanaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
- 2012 | Kabag Perencanaan Ditjen Pemerintahan Umum.
- 2011 | Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana, Ditjen Pemerintahan Umum.
- 2009 | Kasubdit Otonomi Khusus, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
- 2005 | Kasi Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
- 2000 | Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab. Bireuen.
- 1999 | Pelaksana Camat Makmur Kab. Aceh Utara.
- 1998 | Sekretaris Kecamatan Makmur Kab. Aceh Utara.
- 1995 | Lurah Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.



Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.  
**Direktur Jenderal Politik dan  
Pemerintahan Umum**



Drs. Syarmadani, M.Si  
**Plh. Direktur Jenderal Politik dan  
Pemerintahan Umum (2024 - saat ini)**



**TTL** Bone, 16 Januari 1973

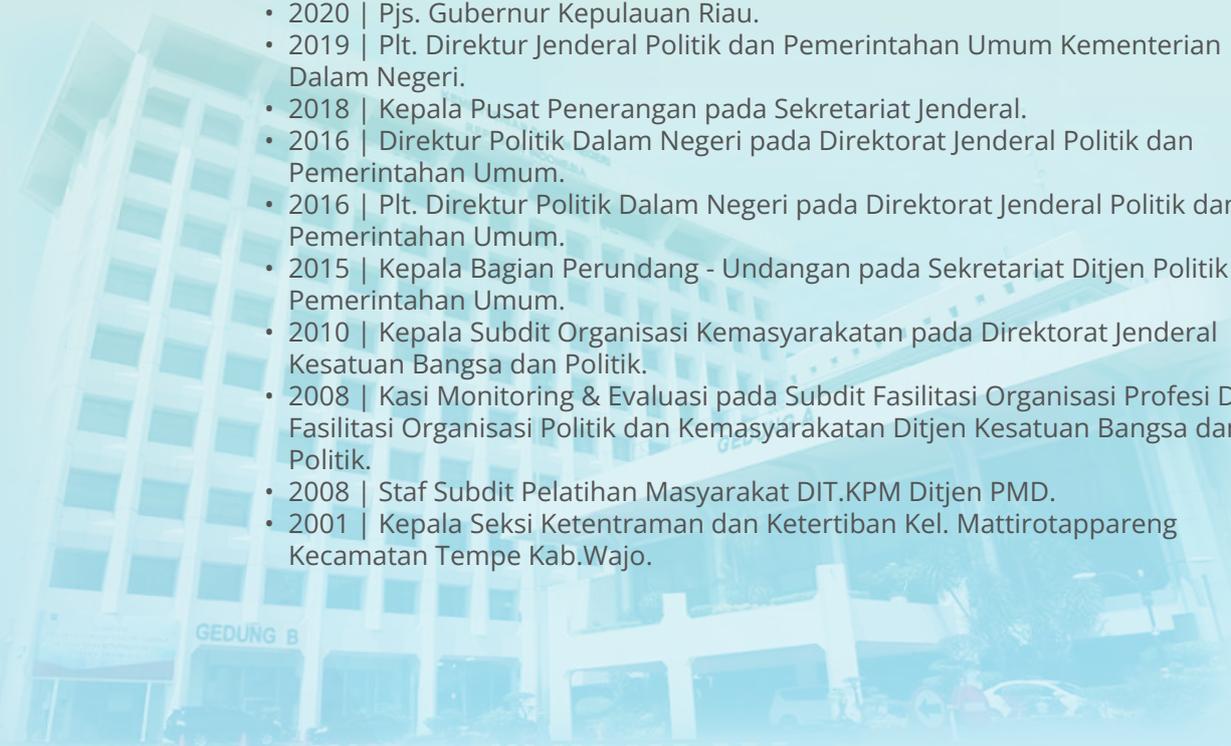
**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2013 | S3/DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.
- 2008 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.
- 2000 | S1/SARJANA Ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan.
- 1995 | D3/DIPLOMA III Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemeritahan Dalam Negeri.
- 1991 | SLTA 2 Watampone.
- 1998 | SLTP 4 Watampone.
- 1985 | SD Inpres 6/75 Biru Bone.

**RIWAYAT JABATAN**

- 2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- 2024 - Sekarang | Pj. Gubernur Sulawesi Barat
- 2023 | Pj. Gubernur Sulawesi Selatan
- 2020 | Pjs. Gubernur Kepulauan Riau.
- 2019 | Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 | Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal.
- 2016 | Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2016 | Plt. Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2015 | Kepala Bagian Perundang - Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2010 | Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2008 | Kasi Monitoring & Evaluasi pada Subdit Fasilitas Organisasi Profesi Dit. Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2008 | Staf Subdit Pelatihan Masyarakat DIT.KPM Ditjen PMD.
- 2001 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kab.Wajo.





Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd  
**Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil**



Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si  
**Plh. Direktur Jenderal Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil (2024 s.d saat ini)**

**TTL** Banyumas, 08 Maret 1967

**DOMISILI** Jakarta

- RIWAYAT PENDIDIKAN**
- 2021 | S3 Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.
  - 1998 | S2/Magister Bidang Pendidikan IKIP Negeri Jakarta.
  - 1991 | Sarjana S1 Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
  - 1986 | SMA Negeri I Purwokerto.
  - 1983 | SMP Negeri III Purwokerto.
  - 1980 | SD Negeri Bobosan II.

- RIWAYAT JABATAN**
- 2023 - Sekarang | Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
  - 2024 - Sekarang | Pj. Gubernur Jakarta
  - 2022 - 2023 | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
  - 2020 | Pjs. Gubernur Kalimantan Utara.
  - 2018 | Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara.
  - 2016 - 2022 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
  - 2014 - 2016 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
  - 2010 - 2014 | Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
  - 2007 | Plt. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
  - 2004 | Kabid Teknis pada Pusdiklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
  - 2002 | Kabag Sumber Pembelajaran pada Sekretariat Badan Diklat.
  - 2001 | Kasubbid Akreditasi Kebutuhan Diklat pada Pusat Fungsional Badan Diklat.
  - 1998 | Pj . Kasubbid Diklat Tenaga Fungsional/Widyaiswara PD Pusat Pembinaan Manajemen Pemerintahan Badan Diklat.
  - 1996 | Plt. Kasubag Data dan Evaluasi pada Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Diklat.



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si  
**Direktur Jenderal Otonomi Daerah**



Komjen Pol. Drs. Tomsu Tohir, M.Si.  
**Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Periode 2024 s.d Sekarang**



**TTL** Pulau Punjung, 16 Maret 1970

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2021 | S-3 Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- 2002 | S-2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- 1998 | S-1 Sarjana Manajemen Pembangunan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).
- 1993 | D-III Diploma Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

**RIWAYAT JABATAN**

- 2019 - Sekarang | Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2023 - Sekarang | Pj. Gubernur Kalimantan Timur
- 2022 - 2023 | Pj. Gubernur Sulawesi Barat.
- 2019 | Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 - 2019 | Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2016 - 2018 | Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2015 - 2016 | Kepala Subdit Pemerintah Aceh, DKI dan DIY pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2014 - 2015 | Kepala Subdit Otonom Khusus Wilayah I pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2012 - 2014 | Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Daerah pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2011 - 2012 | Kepala Seksi Wilayah IIIa pada Subdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah .
- 2009 | Pj. Kabag Bina Keagamaan, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 2008 | Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Keagamaan, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 1995 | Kasubsi Lingkungan Hidup PMD VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
- 1994 | Pj. Kepala Desa di Desa Barangan Selatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.



Ir. Restuardy Daud, M.Sc.

**Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah**

**TTL** Manado, Sulawesi Utara, 29 Desember 1967

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2001 | S2 IDEC Hiroshima University, Jepang
- 1992 | S1 Fakultas Teknik, Jurusan Sipil (Struktur dan Geoteknik), Universitas Hasanudin, Makassar
- 1986 | SMA Negeri 1 Manado.
- 1983 | SMP Negeri 1 Manado.
- 1980 | SD Eben Haezar.

**RIWAYAT JABATAN**

- 2023 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2020 - 2023 | Sekretaris BNPP.
- 2020 | Pjs. Gubernur Jambi
- 2018 | Pj. Gubernur Kalimantan Timur.
- 2017 | Deputy Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan pada BNPP RI.
- 2015 | Kepala Biro Perencanaan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 2014 | Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri
- 2014 | Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri.
- 2013 | Kepala Pusat Penerangan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 2012 | Kepala Pusat Data Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.



**Dr. La Ode Ahmad P Bolombo**  
**Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa**



**Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA**  
**Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa**  
**Periode Oktober 2022 - Februari 2024**



**TTL**

Wakuru, 24 Februari 1974

**DOMISILI**

Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2021 | S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2010 | S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Nusa Bangsa.
- 2001 | S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan.
- 1997 | Diploma Pemerintahan STPDN.
- 1992 | SMA Umum jurusan Fisika SMAN 2 Raha.
- 1989 | SMP Negeri 1 Raha.
- 1986 | SDN 1 Wakuru.

**RIWAYAT JABATAN**

- 2024 - Sekarang Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- 2023 | Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
- 2023 | Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- 2021 | Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
- 2020 | Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 2019 | Penjabat Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2018 | Direktur Politik Dalam Negeri.
- 2016 | Direktur Organisasi Kemasyarakatan.
- 2015 | Kasubdit Penanganan Konflik.
- 2012 | Kasubdit Penanganan Konflik Pemerintahan.
- 2010 | Kasi Otonomi Khusus Aceh dan DKI.
- 2008 | Kasi Penataan Daerah Ditjen Otda.
- 2003 | Kasubbag Umum pada Set. KPU Kota Bitung.
- 2002 | Kasubbag Tata Pemerintahan.
- 2000 | Sekcam Bitung Timur.
- 1998 | Kasi Pemerintahan pada Kec. Bitung Tengah.





Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si  
**Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah**



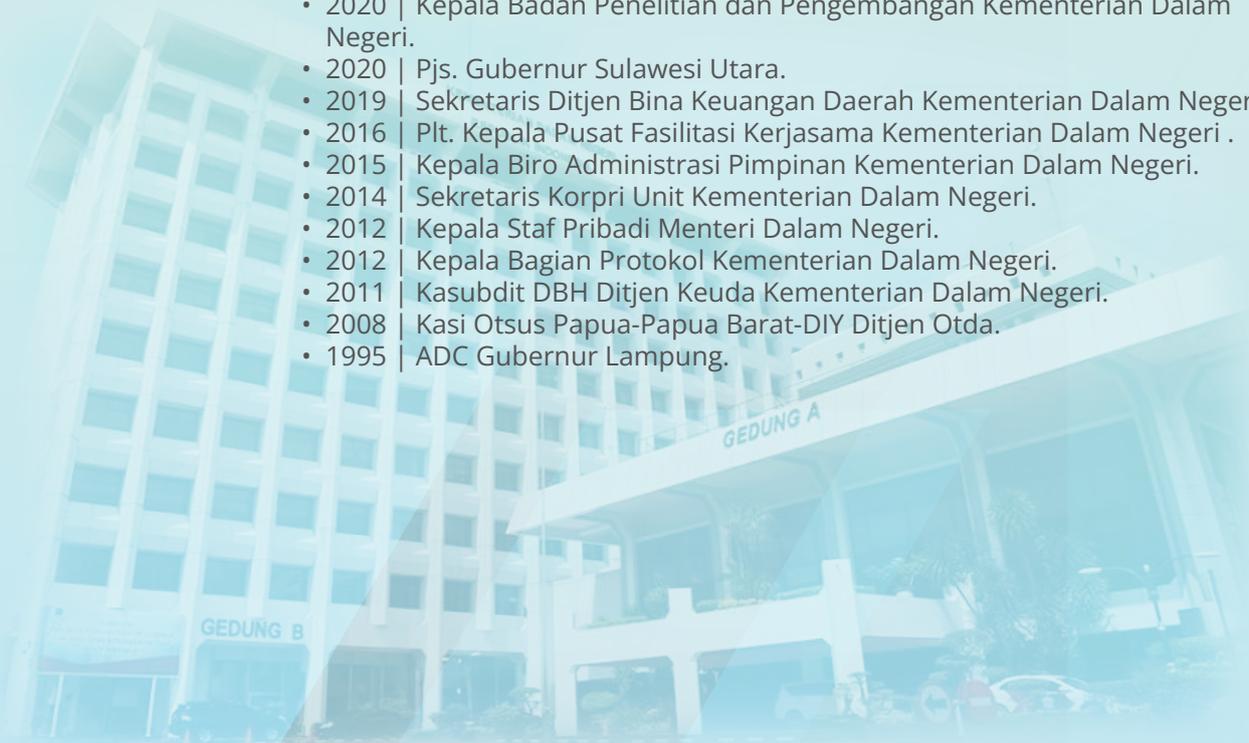
Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev  
**Plh. Direktur Jenderal Keuangan Daerah  
(Oktober 2023 - Saat Ini)**

**TTL** Sukabumi (Lampung), 6 Juni 1972

**DOMISILI** Jakarta

- RIWAYAT PENDIDIKAN**
- 2009 | S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
  - 2003 | S2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
  - 1999 | S1 Sarjana Institut Ilmu Pemerintah, IIP Jakarta.
  - 1994 | D III STPDN Jatinangor.

- RIWAYAT PEKERJAAN**
- 2022 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
  - 2024 | Pj. Gubernur Sumatera Utara
  - 2023 | Pj. Gubernur Sumatera Selatan
  - 2021 | Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
  - 2020 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
  - 2020 | Pjs. Gubernur Sulawesi Utara.
  - 2019 | Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
  - 2016 | Plt. Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Kementerian Dalam Negeri .
  - 2015 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
  - 2014 | Sekretaris Korpri Unit Kementerian Dalam Negeri.
  - 2012 | Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri.
  - 2012 | Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri.
  - 2011 | Kasubdit DBH Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri.
  - 2008 | Kasi Otsus Papua-Papua Barat-DIY Ditjen Otda.
  - 1995 | ADC Gubernur Lampung.



Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M.  
**Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri**



**TTL** Klaten, 3 April 1960

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2019 | S3 Ilmu Pemerintahan IPDN Jatinangor.
- 2000 | S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia (M.M) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- 1985 | S1 Ilmu Pemerintahan (Drs.) Universitas Diponegoro Semarang.
- 1979 | SMAN 2 Klaten.
- 1975 | SMPN Klaten.
- 1973 | SD Kristen I Grobogan.

**RIWAYAT JABATAN**

- 2020 - Sekarang | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2019 | Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2018 | Pj. Gubernur Sumatera Selatan.
- 2018 | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2017 | Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2017 | Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2016 | Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
- 2015 | Pj. Gubernur Kalimantan Tengah.
- 2014 | Deputy I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.
- 2014 | Staf Ahli Menteri Bidang SDM dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- 2008 | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2005 | Asisten Administrasi Setprov Jawa Tengah.
- 2000 | Kepala Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.
- 1996 | Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.
- 1994 | Kepala Sub Bagian Perkotaan Biro Pembangunan Daerah Setprov Jawa Tengah.
- 1988 | Kepala Sub Bagian Sosial Budaya Biro Pembangunan Daerah Setprov Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.





Dr. Sugeng Hariyono  
**Kepala Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia**

<b>TTL</b>	Temanggung. 17 Oktober 1966
<b>DOMISILI</b>	Jakarta
<b>RIWAYAT PENDIDIKAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2013   S3 (Doktor) Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung.</li><li>• 1997   S2 (Master) Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta.</li><li>• 1990   S1 (Sarjana) FISIPOL Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta.</li></ul>
<b>RIWAYAT JABATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2022 - Sekarang   Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.</li><li>• 2021   Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.</li><li>• 2020   Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri.</li><li>• 2020   Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Adwil, Pemdes dan Kependudukan pada Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.</li><li>• 2019   Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri.</li><li>• 2017   Inspektur II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.</li><li>• 2016   Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri.</li><li>• 2012   Kepala Pusat Litbang PUM dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.</li><li>• 2010   Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan.</li></ul>



Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd  
**Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri**



---

**TTL** Parigi, 29 April 1967

---

**DOMISILI** Jakarta

---

- RIWAYAT PENDIDIKAN**
- 2008 | S3 Universitas Negeri Jakarta.
  - 1997 | S2 IKIP Jakarta.
  - 1992 | S1 Jakarta IIP Jurusan Keuangan Daerah.
  - 1989 | D4 APDN Manado Jurusan Manajemen Pemerintahan.
  - 1985 | SMA Negeri 1 Gorontalo.
  - 1982 | SMP Negeri 2 Gorontalo.
  - 1979 | SD Negeri 1 Talulobutu, Tapa, Gorontalo.

- 
- RIWAYAT JABATAN**
- 2022 - Sekarang | Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.
  - 2020 | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
  - 2020 | Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
  - 2019 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri.
  - 2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
  - 2015 | Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama IPDN.
  - 2013 | Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
  - 2010 | Kabid Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
  - 2006 | Kabag Perencanaan, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
  - 2004 | Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
  - 2000 | Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
  - 1998 | Pj. Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.





Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc  
**Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan  
dan Hubungan Antar Lembaga**

**TTL** Brastagi, 28 Oktober 1965

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- Sekarang - Program Doktorat Ilmu Pemerintahan IPDN Jakarta.
- 1997 | Master Degree Geographic Information UNSW, Sydney Australia.
- 1995 | Cert. Eng Landuse Planning ITC, Enschede, Belanda.
- 1991 | Sarjana Konservasi Tanah dan Air IPB Bogor.

**RIWAYAT JABATAN**

- 2022 - Sekarang | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga.
- 2024 | Pj. Gubernur Kalimantan Utara
- 2023 | Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum
- 2021 | Pengawas Ahli Utama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2020 | Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
- 2016 | Asdep Jaminan Sosial, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
- 2014 | Asdep Tanggap Cepat Bencana, Kemenko Kesra.
- 2012 | Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Perubahan Iklim, Kemenko Kesra.
- 2010 | Asisten Deputi Urusan Berencana, Kemenko Kesra.
- 2008 | Kabag Perencanaan Ditjen Otonomi Daerah Depdagri.
- 2006 | Kasubdit Batas Antar Negara Depdagri.
- 2001 | Kabag Perencanaan Inspektorat Jenderal Depdagri.
- 2000 | Kasi, Otorita dan Kawasan Khusus, Ditjen PUM Depdagri.





Dr.Dra. Rochayati Basra, M.Pd  
**Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan**

**TTL** Cirebon, 31Oktober 1967

**DOMISILI** Jakarta

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2011 | (S3) Doktor Bidang Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia
- 2002 | (S2) Magister Bidang Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
- 1992 | (S1) Tarbiyah IAIN Sunan Gn Jati
- 1986 | SMA Negeri 1 Sumber - Cirebon
- 1983 | SMP Negeri 1 Sumber - Cirebon
- 1980 | SD Negeri II Sumber - Cirebon

**RIWAYAT JABATAN**

- 2023 - Sekarang | Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Bidang Pemerintahan
- 2020 | Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pada Badan Pengembangan Sumber Daya
- 2017 | Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2015 | Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan
- 2014 | Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan
- 2010 | Widyaiswara Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan



## Staf Khusus Menteri



**Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D**  
Staf Khusus Menteri  
Bidang Pemerintahan



**Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H.**  
Staf Khusus Menteri  
Bidang Keamanan dan Hukum



**Dr. H. Apep Fajar Kurniawan, S.Th.i, M.Si**  
Staf Khusus Menteri  
Bidang Politik Pembentukan Jaringan



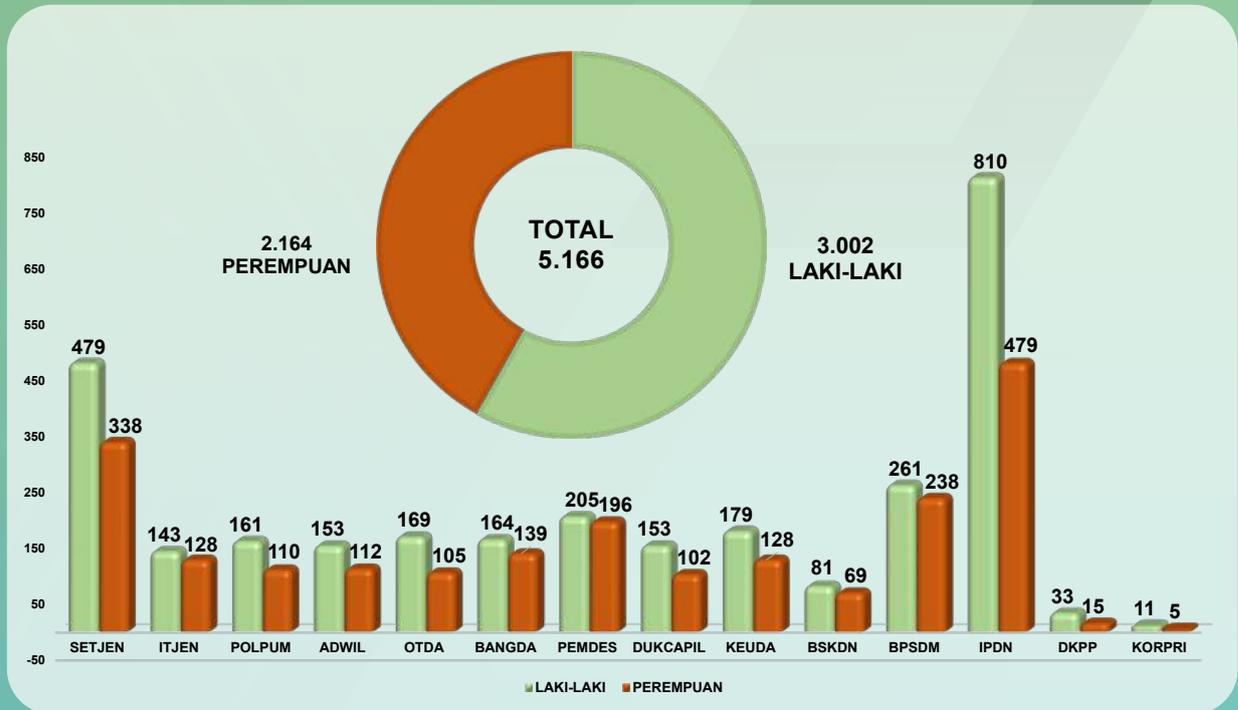
**Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH, M.Hum**  
Staf Khusus Menteri  
Bidang Pemerintahan Desa  
dan Pembangunan Perbatasan



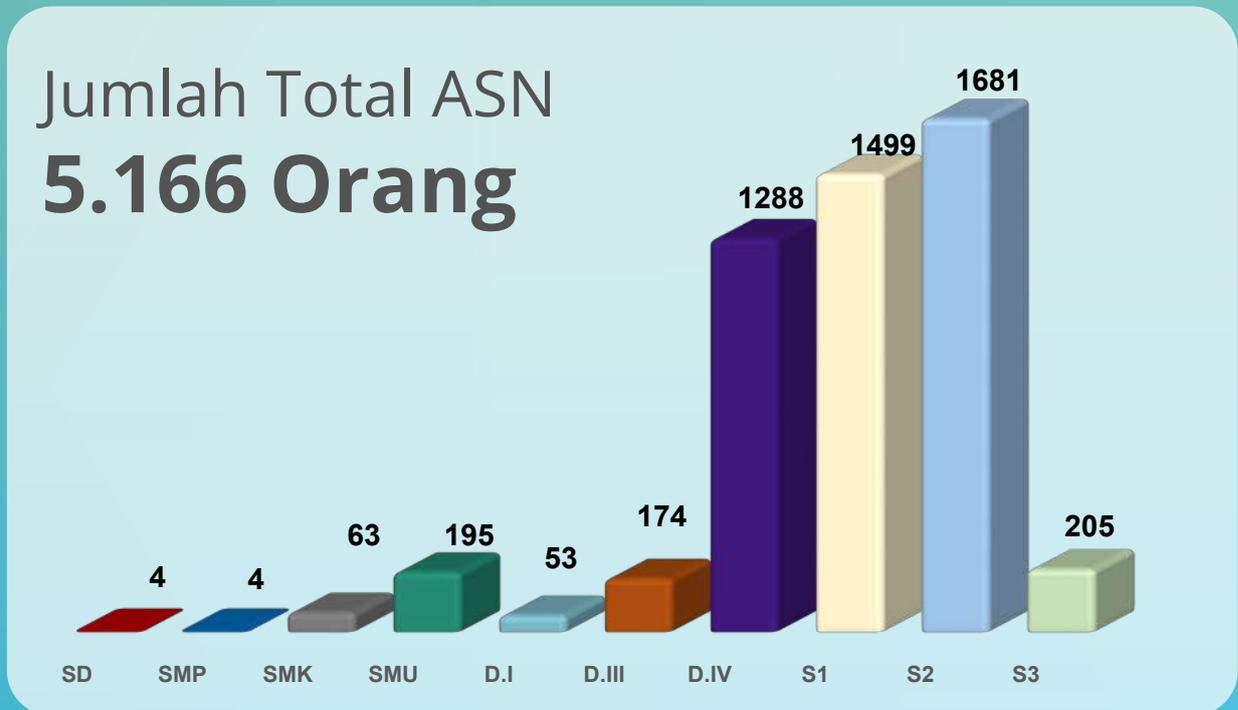
**Dr. Kastorius Sinaga**  
Staf Khusus Menteri  
Bidang Politik dan Media

# Sumber Daya Manusia

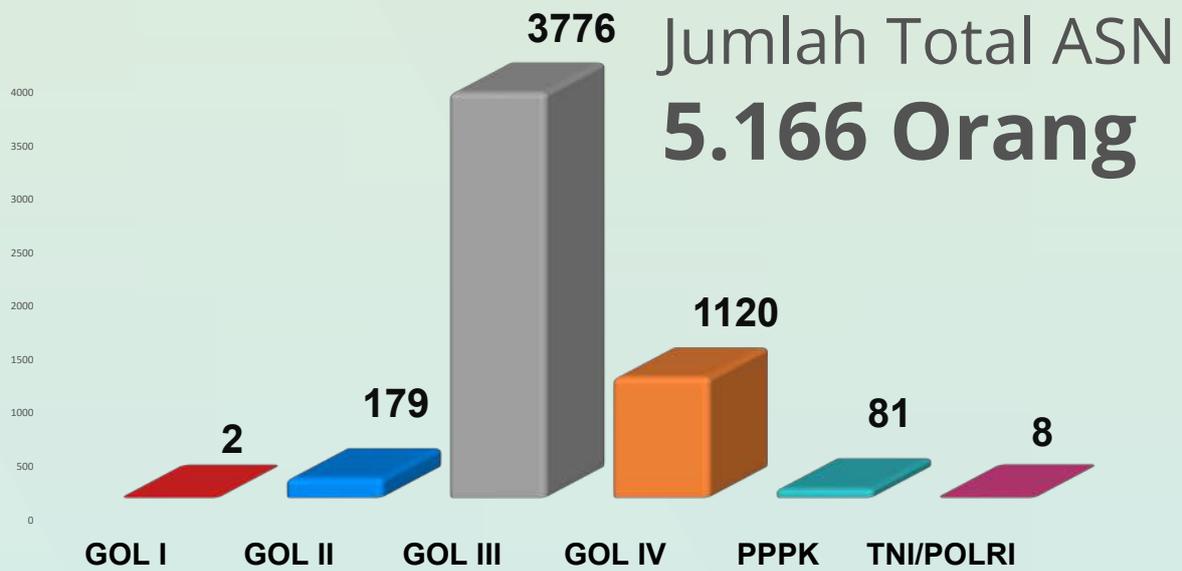
## 1. Berdasarkan Jenis Kelamin



## 2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

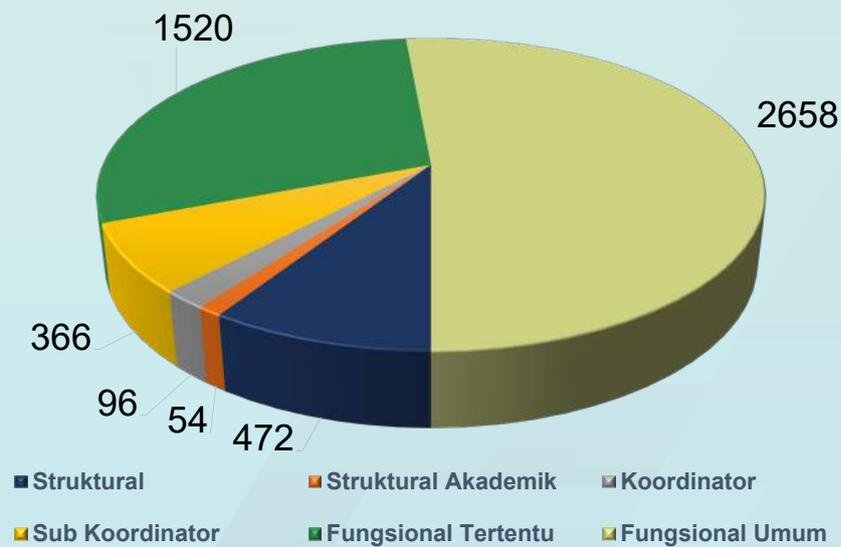


### 3. Berdasarkan golongan

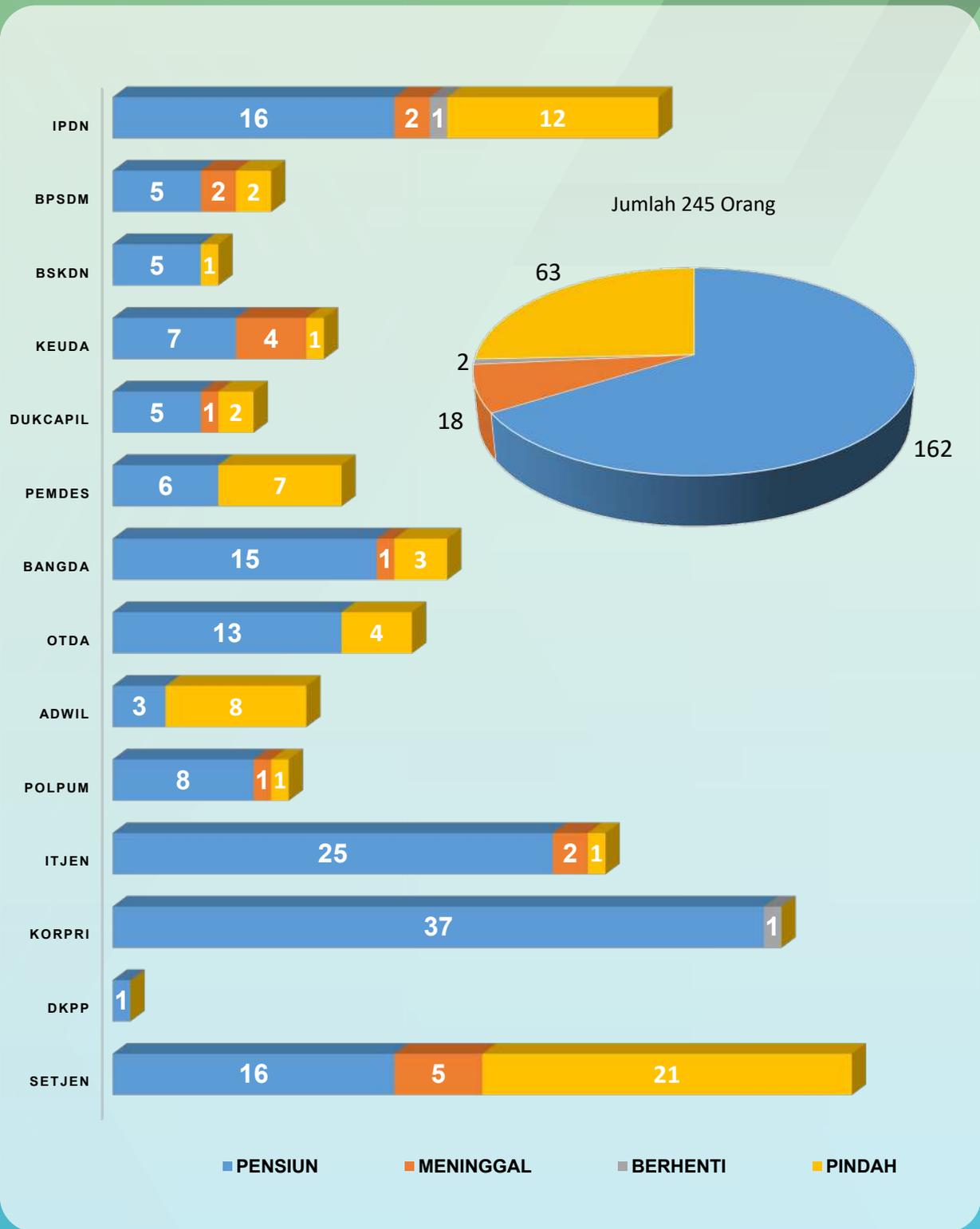


### 4. Berdasarkan jenis jabatan

Jumlah Total ASN **5.166** Orang



### 5. Berdasarkan Pensiun, Meninggal, Pindah Wilayah Kerja, dan Berhenti







## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**



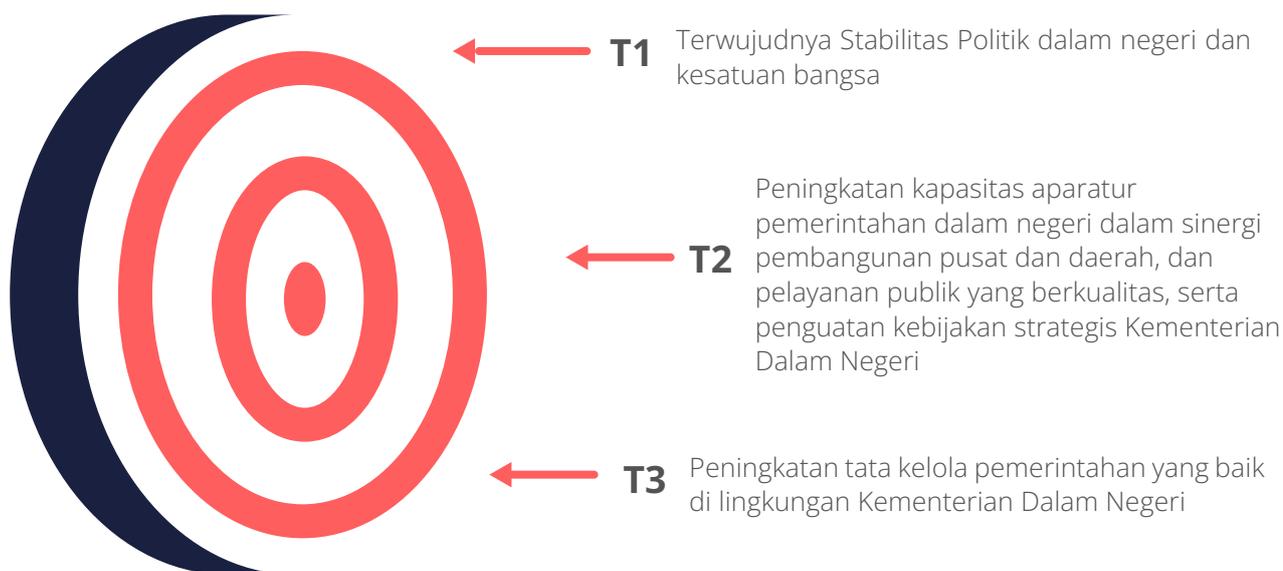
## Rencana Strategis

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan hasil evaluasi atas Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 yang indikator, target, dan pagu mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2024, yang dalam penyusunannya didasari pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai pertanggungjawaban atas peran dan mandat yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Adapun penjabaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, sebagai berikut:



## Sejalan dengan Visi dan Misi, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian:



Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

### Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 1:

#### Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 1:

- 1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
  - a. Indeks Demokrasi Indonesia.
  - b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
  - c. Indeks Kinerja Ormas.
- 2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
  - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
  - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
  - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
  - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
  - e. Indeks Harmoni Indonesia.
- 3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.**
- 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.**

## Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 2:

- 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
  - a. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
  - b. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
  - c. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
  - d. Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
  
- 2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
  
- 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
  - a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - b. Nilai Kinerja Kemitraan KDN dan DPRD.
  - c. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - d. Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah.
  - e. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  - f. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
  - g. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - h. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
  - i. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
  - j. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
  
- 4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
  - a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - b. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.
  
- 5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

## Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 3:

### Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 2:

- 1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.**
- 2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
  - a. Indeks Pengawasan Internal.
  - b. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- 3. Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Strategi Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Yang Direkomendasikan Dan Ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri.**



## Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun periode Renstra. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arah Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024 dan langkah keberlanjutan dalam mendukung Asta Cita pada Kabinet Merah Putih yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada Kementerian Dalam Negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing Sasaran Strategis, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
1 Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 77,36	Nilai 79,58
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)
		Indeks Kinerja Ormas	.*	Nilai 66
	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	-
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	-	-
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	-
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,31	-
		Indeks Harmoni Indonesia	-	Nilai 6,3
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	.*	Nilai 64
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	.*	150 daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024	
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	75%
			Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
			Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
			Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,00	Nilai 3,60
		Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	.*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	.*	-
			Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	.*	Sedang
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Sedang)	Nilai 4,00 (Tinggi)
			Persentase Capaian penerapan SPM di Daerah	30%	100%
			Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	.*	Nilai 100 (Sinkron)
			Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	4%
			Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 66

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024	
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	-*	36%
			Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 100
			Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	-*	Nilai 90 (A)
		Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
			Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	300 Lembaga Pengguna	1.500 Lembaga Pengguna
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-*
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 85,01
		Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 100
			Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80	Nilai 85
		Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	40%	45%

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta sebagai wujud komitmen dalam pencapaian kinerja, disusun Perjanjian Kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan turunan atau periodisasi satu tahun dari target kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan mengacu pada Rencana Kerja 2024, RKA-K/L 2024, dan DIPA Tahun 2024 lingkup Kementerian Dalam Negeri, dengan penjabaran sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	DITJEN POLPUM
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	DITJEN POLPUM
	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66	DITJEN POLPUM
2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	DITJEN POLPUM
3 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	DITJEN POLPUM
4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori "Baik"	150 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	BPSDM
	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	ITJEN
	Tingkat Kapasitas PPUKD secara Nasional	Level 3 (100%)	ITJEN
	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,6	IPDN

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA
7		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai 4,00 (Tinggi)	DITJEN OTDA
	Persentase capaian penerapan SPM di daerah		100%	DITJEN BINA BANGDA
	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai 100 (Sinkron)	DITJEN BINA BANGDA
	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"		4%	DITJEN BINA PEMDES
	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		Nilai 66	DITJEN BINA KEUDA
	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi		36%	BSKDN
	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah		Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah		Nilai 90 (A)	ITJEN
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan		Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik	1.500 Lembaga Pengguna	DITJEN DUKCAPIL

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas Reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)	ITJEN
12	Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	BSKDN

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kementerian Dalam Negeri mendapat dukungan anggaran dari APBN TA. 2024 sebesar **5.205.771.827.000,-** yang digunakan untuk melaksanakan 4 Program, sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.226.859.135.000,-
Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 1.658.647.723.000,-
Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 1.162.640.058.000,-
Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 157.624.911.000,-

\*Terdapat pagu blokir sebesar Rp.40.290.593.000,-

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 (Adendum).

## Pengukuran Kinerja

Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagaimana secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sejak Tahun 2018 pelaporan kinerja dilakukan melalui aplikasi e-Sakip Reviu (esr) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator sasaran strategis atau disebut juga Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri merupakan instrumen manajemen atau tolok ukur untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan strategis dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerja (wujud pertanggungjawaban) dalam waktu 1 (satu) tahun melalui media pelaporan. Dalam Laporan Kinerja ini, pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja IKU, kinerja Sasaran Strategis, yang selanjutnya menjadi gambaran umum capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri. Adapun pengukuran kinerja masing-masing tingkatan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

### 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan target yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan target yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan target yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

Penilaian capaian kinerja Sasaran Strategis diukur berdasarkan rata-rata capaian IKU pada setiap sasaran strategis yang menunjukkan semakin tinggi capaian maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah capaian maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran Strategis} = \frac{\sum \text{Capaian IKU dalam sasaran strategis}}{\sum \text{IKU dalam sasaran strategis}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja sasaran strategis di atas dapat dirata-ratakan, yang dijadikan sebagai capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri, adapun rumus yang digunakan:

$$\text{Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri} = \frac{\sum \text{Capaian Kinerja Sasaran Strategis}}{\sum \text{Sasaran Strategis}} \times 100\%$$

Untuk menentukan tingkat keberhasilan atas kinerja Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis, dan tingkat Kementerian menggunakan pengukuran skala ordinal, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Keberhasilan dengan Skala Ordinal**

Skala Ordinal	Predikat	Kategori
$\geq 100\%$	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
$90\% \geq x < 100\%$	Tinggi	Berhasil
$75\% \geq x < 90\%$	Sedang	Cukup Berhasil
$50\% \geq x < 75\%$	Rendah	Tidak Berhasil
$< 50\%$	Sangat Rendah	Sangat Tidak Berhasil

X = Capaian Kinerja

Dalam Laporan Kinerja ini, Apabila perhitungan berdasarkan analisis gap terdapat capaian Indikator Kinerja Utama lebih besar dari 100%, maka penulisan capaian dibatasi maksimal sampai dengan 120%, sekaligus menjadi dasar perhitungan capaian kinerja sasaran strategis. Dalam penjelasan masing-masing indikator kinerja utama dapat menarasikan capaian kinerja IKU lebih besar dari 120%.







# Manual Indikator

## Indikator Kinerja Utama 1

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Dalam Upaya Peningkatan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, nilai demokrasi diidentikkan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Ditjen Polpum yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada dan Pemilu serta Indeks Kinerja Ormas.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek Demokrasi, yaitu: Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi yang merupakan Instrumen pengukuran untuk mengetahui kondisi dan Perkembangan demokrasi nasional maupun provinsi. Instrumen Pengukuran IDI terdiri dari 3 (tiga) Aspek yang dijabarkan ke dalam 22 Indikator. Guna meningkatkan skor IDI tersebut, perlu adanya peran Kementerian Dalam Negeri dalam penguatan kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi seluruh Indonesia, serta penguatan pada 13 indikator (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara, Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat, terjaminnya kebebasan berkeyakinan, terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan, Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, Kesetaraan Gender, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, Kesetaraan dalam pelayanan dasar, Kinerja Lembaga Legislatif, Netralitas Penyelenggara Pemilu, Trasparansi Anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh Pemerintah, Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan pendidikan politik pada kader partai politik).
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
<b>Formula Pengukuran</b>	Mengukur Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia dengan IDI berdasarkan 3 (tiga) Aspek dan 22 Indikator. Pengukuran dilakukan di setiap Provinsi, kemudian hasil pengukuran IDI di setiap Provinsi dirata-ratakan menjadi nilai IDI Nasional. Nilai hasilnya dalam bentuk angka 0 sampai 100, angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian : 60< Buruk, 60-80 sedang, >80 baik.
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, BPS dan Pemda
<b>Sumber Data</b>	1. Badan Pusat Statistik (BPS) 2. Dokumen, Focus Group Discussion, Wawancara, Surat Kabar satu per provinsi, Big Data Verifikasi
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Tahun (IDI Tahun Sebelumnya diukur di Tahun Berikut H+1)
<b>Target Tahun 2024</b>	Nilai 79,58

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 2

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Dalam Upaya Peningkatan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Ditjen Polpum yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada dan Pemilu serta Indeks Kinerja Ormas.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Partisipasi politik identik dengan tingkat kesadaran politik masyarakat guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Partisipasi politik salah satu budaya politik berupa kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam ambil bagian untuk turut serta menciptakan situasi pemerintahan yang demokratis. Kesadaran politik yang tinggi akan membawa partisipasi yang aktif dalam penyelenggara pemilu. Oleh karena itu perlu mengukur Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada/ Pemilu, dimana persentase tersebut dipengaruhi oleh partisipasi dan minat masyarakat aktif dalam pemilu, masyarakat bebas dalam mengeluarkan pendapat.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase (%)
<b>Formula Pengukuran</b>	Tata cara penghitungan berasal dari formulir D. Hasil-KWK, seluruh pengguna hak pilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) di Seluruh Indonesia dibagi jumlah pemilih dari DPT ditambah DPTb dari Seluruh Indonesia dikali 100 persen.
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) 2. KPU Provinsi/Kab/Kota. 3. Kesbangpol Prov/Kab/Kota.
<b>Sumber Data</b>	Berdasarkan Dokumen DPT, DPTb, DPPH, Data Jumlah Pemilih DPT dan Jumlah Pemilih DPTb.
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Tahun (Setiap Ada Pelaksanaan Pemilukada/Pemilu)
<b>Target Tahun 2024</b>	79,5%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 3

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	<p>Dalam Upaya Peningkatan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, nilai demokrasi diidentikkan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Ditjen Polpum yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada dan Pemilu serta Indeks Kinerja Ormas.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Kinerja Ormas
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	<p>Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga sebagai representasi kekuatan civil society, sejak era reformasi telah muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan- kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ormas hadir untuk melakukan pemberdayaan dan berbagai edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Sebagai upaya Meningkatkan Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengindikasikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Asing menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki perhatian yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya variabel indikator yang jelas oleh stakeholders. Variabel dan Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Variabel pengukuran Indeks Kinerja Ormas terdiri dari variabel Sumber Daya manusia (terdiri dari 4 Indikator dan 16 Sub Indikator) dan variabel Program (terdiri dari 3 Indikator dan 14 Sub Indikator)</p>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
<b>Formula Pengukuran</b>	<p>Kinerja sebuah organisasi mempunyai variasi antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya bergantung pada tujuan dan tugas yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Meskipun bentuk dari kinerja setiap organisasi berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap organisasi dapat diukur kinerjanya melalui beberapa variabel yang meliputi variabel input, output, outcome dan impact. Tingkatan variabel kinerja dapat pula dikelompokkan menjadi variabel mikro, meso dan makro. Untuk mengukur kinerja Ormas, perlu ditetapkan variabel beserta indikator setiap variabel tersebut. Adapun variabel dan indikator pengukuran kinerja Ormas adalah sebagai berikut :</p> <p>(1)Variabel Sumber Daya dengan Indikator Kepemilikan kantor/sekretariat dan perlengkapannya, Karyawan, Sumber Pendapatan, Penerimaan sumbangan bagi kegiatan ormas, Pemanfaatan pendapatan/anggaran dan Akutansi Keuangan ;  (2)Variabel Program dengan Indikator Dasar Penyusunan Program, Rencana program, Pelaksanaan program, Manfaat Program yang dirasakan dan Evaluasi.</p> <p>Nilai Sama atau lebih dari 100 (Kinerja Baik Sekali); Nilai 75-99 (Baik); Nilai 50-74 (Cukup Baik) dan Nilai 25-49 (Kinerja Buruk).</p> <p>Hasil pengukuran Indeks Kinerja Ormas pada Tahun 2022 ini dilakukan dengan berfokus kepada 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur yang dinilai memiliki heteroginitas tinggi atau keberagaman karakteristik yang cenderung lebih besar dibanding dengan Provinsi lain di Indonesia. Dengan Formulasi Pengukuran %Indikator = <math>\frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%</math> Kemudian %Variabel = <math>\frac{n\% \text{Indikator}}{n \text{ Variabel}}</math> dan %Dimensi = <math>\frac{n\% \text{Variabel}}{n \text{ Dimensi}}</math></p>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Direktorat Organisasi Masyarakat, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Organisasi Masyarakat, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Sumber Data</b>	Database Ormas terdaftar SKT Kemendagri, Googleform pengisian kertas kerja dan hasil survey pengukuran kinerja Ormas
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)
<b>Target Tahun 2024</b>	Nilai 66

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



## Indikator Kinerja Utama 4

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	<p>Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Simpul Strategis Pembumian Pancasila Berjalan Optimal merupakan salah satu sasaran program dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukurannya yaitu Indeks Harmoni Indonesia dan Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah Secara Efektif</p>
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Harmoni Indonesia
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	<p>Pengukuran Indeks Harmoni menggunakan 4 dimensi : Ekonomi (30%), Sosial (23%), Budaya (22%), Keberagamaan (25%), yang terdiri dari 10 variabel dan 31 indikator. Pengukuran Indeks Harmoni sebagai instrumen evaluasi yang esensial dalam menganalisis tingkat keselarasan dan keseimbangan antara berbagai dimensi pembangunan. Sebagai instrumen evaluasi, pengukuran ini melibatkan proses pengumpulan dan analisis data untuk menyusun indeks yang bercerminkan status pembangunan suatu wilayah. Langkah-langkah ini mencakup identifikasi indikator yang relevan, penentuan bobot atau pentingnya setiap indikator, dan pembuatan rumus atau metode penghitungan untuk menghasilkan nilai Indeks Harmoni. Indeks Harmoni menjadi alat evaluasi yang dapat memberikan wawasan mendalam terkait efektifitas pembangunan suatu wilayah, membantu mengidentifikasi kelemahan atau ketidakseimbangan dan memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan tindakan strategis.</p>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 9) beserta nilai variabel Sangat Baik, Baik, Moderat ke Arah Baik, Moderat dan kurang
<b>Formula Pengukuran</b>	<p>Pengukuran Indeks Harmoni (IHal) menggunakan wellbeing methodology (WM) dengan menganalisis skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat terhadap variabel Xi dengan rumusan pengukuran : Ruang Lingkup dan Uji Instrumen Survey, Analisis Regularity (R), Analisis Response Rate (RR), Analisis Singifikansi Skor Penilaian (SSP) dengan Standar Acuan Signifikansi (SAS), Analisis Standar Deviasi (SD), Analisis Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR), Analisis Data Matriks, Analisis Distribusi Skor Penilaian, Analisis Keseimbangan Data PPA, Analisis Resume Data Non Struktural</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota
<b>Sumber Data</b>	Unsur dodeca-helix di Kabupaten/Kota terdiri dari : akademisi, kelompok usahawan, organisasi profesi, ormas, wirausahawan sosial, lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, penanam modal/investor, pasar/agen ekonomi, jurnalis dan media massa dan masyarakat penerima manfaat
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Tahun (pengukuran tanggal 17 November sampai dengan 17 Desember 2024)
<b>Target Tahun 2024</b>	Nilai 6,3

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 5

### Sasaran Strategis

Meningkatnya kewaspadaan nasional

### Deskripsi Sasaran Strategis

Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran adalah Indeks Kewaspadaan Nasional dalam rangka Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah Dalam Melaksanakan Deteksi Dini Dan Cegah Dini

### Indikator Kinerja Utama

Indeks Kewaspadaan Nasional

### Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Program (IKP) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran program yang harus dicapai. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Direktorat Kewaspadaan Nasional memiliki tugas dan fungsi, yakni pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing, maka diperlukan sebuah kajian ilmiah yang dapat menjadi alat mitigasi atau deteksi dini soal ancaman seputar kewaspadaan nasional. Maka dari itu diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) merupakan bagian dari IKU Direktorat Kewaspadaan Nasional yang selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 – 2024. Tujuan dari disusunnya Indeks Kewaspadaan Nasional tersebut diantaranya adalah::

1. Untuk melakukan pemetaan, pengukuran, dan prediksi dalam menentukan wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah potensial untuk dilakukan penetrasi kebijakan;
2. Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan antisipasi kebijakan;
3. Dapat dijadikan alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini;
4. Sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi untuk pengambil kebijakan;
5. Dijadikan pijakan keberhasilan melakukan program ke masyarakat.

### Satuan Pengukuran

Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)

## Formula Pengukuran

Cara pengukuran dilakukan dengan cara pebobotan, sebagai berikut:

1. Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks. Dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu kesepakatan di antara pihak terlibat (para pakar) tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan.
2. Setiap penentuan indeks memiliki kekhasan atau unit unik sendiri. Tidak bisa digeneralisasi sama antara indeks satu dengan indeks yang lain. Setiap indeks tergantung dari kesepakatan atau keinginan pengguna. Bahkan, termasuk di dalamnya apa yang ingin dipotret atau di zooming oleh pengguna, seperti menggunakan komponen dimensi, variabel, dan indikator. Namun, ada indeks pengukuran yang menggunakan variabel dan indikator saja.
3. Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik pendapat umum—opini publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu lokasi mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran—pendapat mayoritas masyarakat.
4. Metode opini publik—survei, dapat digunakan untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk nasional, unit analisisnya adalah provinsi. Untuk provinsi, maka unit analisisnya adalah kabupaten/kota. Sedangkan unit kabupaten dan kota, maka unit analisisnya adalah kecamatan. Dengan begitu, Indeks ini dapat memotret unit pemerintahan tingkat terkecil yakni kecamatan.
5. Survei ini menggunakan penarikan sampel tidak acak (non probability sampling). Teknik sampel yang digunakan dalam riset ini adalah purposive sampling. Sesuai namanya, sampel dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Pilihan kenapa seseorang dipilih menjadi responden serta diwawancara didasar pada tujuan dan dasar tertentu. Ada pertimbangan (judgment) tertentu ketika memilih responden.

<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait Lainnya
<b>Sumber Data</b>	Hasil Survey dan Database Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)
<b>Target Tahun 2024</b>	Nilai 64

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 6

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	<p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sub Urusan Trantibum;</li><li>2. Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat;</li><li>3. Sub Urusan Bencana; dan</li><li>4. Sub Urusan Kebakaran.</li></ol>
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<p>Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>• PP No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li><li>• PP No. 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;</li><li>• Permendagri No. 10/2009 ttg Penugasan Satlinmas dlm penanganan trantib &amp; Keamanan Pemilihan Umum;</li><li>• Permendagri No. 42/2017 ttg Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas;</li><li>• Permendagri No. 101/2018 ttg Standar teknis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;</li><li>• Permendagri No. 114/2018 ttg standar teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan Kebakaran;</li><li>• Permendagri No. 26/2020 tentang penyelenggaraan trantibumlinmas;</li><li>• Permendagri No. 59/2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li><li>• Kepmendagri No. 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.</li></ul>
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	<p>Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah alat untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.</p> <p>Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 4 (empat) indeks, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Bencana (IPT SUB) IKP1;</li><li>2. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) IKP2;</li><li>3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM SATLINMAS) IKP3; dan</li><li>4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (IPT SUK) IKP4.</li></ol> <p>Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas terdiri dari 18 dimensi/ Pilar dan 27 subdimensi/Indikator. Setiap dimensi, subdimensi/ indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework) dengan menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP), yaitu:</p>

PARAMETER DAN DEFINISI INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS			
IKP	Dimensi/Pilar	Subdimensi /Indikator	Bobot
IPT SUB	Kelembagaan	Struktur, Peran, Tanggung Jawab, Komunikasi	0,25
	Sumber Daya Aparatur	Pembagian Tugas dan Monitoring	
	Regulasi dan Kebijakan	Regulasi, rencana PB, Evaluasi	
	Keuangan	Alokasi Anggaran dan Sumber Pendanaan	
	Teknis Operasional	Ketersediaan Logistik, Peringatan Dini, Sistem informasi	
	Kepemimpinan	Pengambilan keputusan	
IPKKU	Strategi	Strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam menegakkan Perda & Strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam Penyelenggaraan Tantribum Pemberdayaan SDM dan Peningkatan kapasitas SDM	0,25
	Sumber Daya Manusia	Pemberdayaan SDM dan Peningkatan kapasitas SDM	
	Sistem	Sarana dan prasarana, Perencanaan dan Anggaran, Akuntabilitas	
IPM SATLIN MAS	Strategi	Pelaksanaan fungsi Satlinmas dan Kebijakan Satlinmas	0,25
	Sumber Daya Manusia	Inovasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas	
	Sistem	Sarana dan Prasarana Satlinmas	
IPT SUK	Kelembagaan, Perencanaan anggaran, Pemenuhan capaian SPM, Pemenuhan sarana dan prasarana, Pemenuhan SDM terverifikasi, Pemberdayaan masyarakat		0,25

### Satuan Pengukuran

Daerah

Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit yaitu dengan formula Additive Aggregation Methods sebagai berikut:

$$IPT = \sum_{q=1}^Q w_q I_q$$

$$IPT = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{tantribum} \times I_{tantribum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

### Formula Pengukuran

Keterangan:

IPT : Nilai Ditjen Bina Adwil  
 $w_q$  : Bobot Indikator Kinerja Program ke- $iq$   
 $I_q$  : Nilai Indikator Kinerja Program ke- $i$

Kategori Penilaian IPT:

- Sangat Baik = 80,01 – 100
- Baik = 50,01 – 80,00
- Cukup = 25,01 – 50,00
- Buruk = 00,00 – 25,00

### Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

### Unit/Pihak Penyedia Data

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

### Sumber Data

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

### Periode Pelaporan

Tahunan

### Target Tahun 2024

150 Daerah

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 7

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM aparatur yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan baik itu lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan efektif serta mendorong para ASN untuk dapat berkinerja tinggi.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator ini mengukur sejauhmana implementasi jam pelajaran minimal (20JP) yang harus diikuti oleh setiap ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN untuk Melakukan Pengembangan Kompetensi pada Lingkup Kemendagri.</li> <li>Pengembangan kompetensi yang diukur dan menjadi kinerja dalam indikator ini merupakan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan.</li> <li>Pengembangan kompetensi SDM aparatur dimaksud mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan dan pelatihan;</li> <li>Bimbingan teknis;</li> <li>Workshop; dan</li> <li>Seminar/webinar.</li> </ol> </li> <li>Penetapan Target pada dalam indikator meru pakan jumlah total target peserta pengembangan kompetensi berdasarkan Renstra BPSDM periode 2020-2024. Jumlah total target peserta tersebut dibagi kedalam proporsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah ASN Kemendagri sebanyak 5.448 orang; dan</li> <li>Jumlah ASN Pemda sebanyak 39.932 orang.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase (%)
<b>Formula Pengukuran</b>	$\frac{((\text{jumlah ASN Kemendagri yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP} / \text{jumlah ASN Kemendagri} \times 100\%) + (\text{jumlah ASN Pemerintah Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP} / \text{target ASN Pemerintah Daerah sesuai dokumen Renstra} \times 100\%))}{2}$
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)
<b>Sumber Data</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Renstra Kemendagri</li> <li>Dokumen rencana tahunan kemendagri</li> <li>Data alumni pengembangan kompetensi BPSDM Kemendagri</li> </ol>
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahun (2024)
<b>Target Tahun 2024</b>	75%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 8

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Kemendagri, khususnya SDM Pengawasan.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Formula Pengukuran</b>	<p>Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat pemenuhan jumlah auditor (bobot 20%);</li><li>2. Tingkat pemenuhan jam pelatihan (bobot 20%);</li><li>3. Tingkat pemenuhan auditor kemendagri yang bersertifikasi profesi (bobot 20%);</li><li>4. Persentase modul-modul pengawasan bagi auditor (bobot 20%); dan</li><li>5. Persentase Auditor Kemendagri yang menjadi anggota organisasi profesi (bobot 20%).</li></ol> <p>Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 9

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Indikator Tingkat Kapabilitas PPUPD secara nasional adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, khususnya SDM Pengawasan.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Formula Pengukuran</b>	<p>Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat Pemenuhan Jumlah PPUPD (bobot 25%);</li><li>2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%);</li><li>3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi PPUPD (bobot 25%); dan</li><li>4. Persentase PPUPD yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%).</li></ol> <p>Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 10

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui: a. Pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; b. Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri; c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri; d. Pembangunan Big Data SDM ASN; e. Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah bidang manajemen pembangunan daerah; f. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional; g. Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan; dan h. Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Menunjukkan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni IPDN, berkaitan dengan harapan/keinginan stakeholders atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri oleh Alumni IPDN.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks
<b>Formulasi Pengukuran</b>	<p>Ketercapaian target diukur dari Indeks kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni diperoleh melalui Survei kepada Pemerintah Daerah dan K/L terhadap alumni IPDN yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah Daerah dan K/L, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden di daerah dan K/L tersebut yang meliputi 8 dimensi yaitu , dengan menggunakan skala likert (1 - 4). Sebagai responden adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). PNS dari Pemerintah Daerah non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di OPD yang bersangkutan.</li> <li>2). PNS dari beberapa K/L non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di K/L yang bersangkutan.</li> </ol> <p>Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus :</p> $\text{Indeks Kepuasan Stakeholders} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Ket:            Nilai Indeks:            1,00 - 1,75 = Kurang Puas            1,76 - 2,51 = Cukup Puas            2,52 - 3,27 = Puas            3,28 - 4 = Sangat Puas</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	IPDN
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Biro Adm. Keprajaan, Kemahasiswaan, dan Alumni
<b>Sumber Data</b>	Kuesioner, Wawancara, Data Alumni
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	Nilai 3,6

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 11

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks kepatuhan penyusunan Produk Hukum Daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Jumlah Daerah yang dalam pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan permendagri nomor 80 tahun 2015)
<b>Satuan Pengukuran</b>	Provinsi
<b>Formula Pengukuran</b>	Pengukuran menggunakan pembobotan dan skala dalam rangka penghitungan peringkat Provinsi sebagai berikut: 1. Sangat Rendah (0% - 20%) 2. Rendah ( $\geq 20\%$ - 40%) 3. Sedang ( $\geq 40\%$ - 60%) 4. Tinggi ( $\geq 60\%$ - 80%) 5. Sangat Tinggi ( $\geq 80\%$ - 100%)
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Direktur Jenderal Otonomi Daerah
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Produk Hukum Daerah
<b>Sumber Data</b>	1. Jumlah daerah yang mengajukan permohonan fasilitasi produk hukum daerah 2. Jumlah daerah yang menyampaikan propemperda 3. Jumlah daerah yang dipimpin pejabat kepala daerah mengajukan persetujuan pembahasan dan penandatanganan produk hukum daerah 4. Jumlah daerah yang menetapkan produk hukum daerah sesuai dengan jadwal propemperda 5. Publikasi produk hukum daerah yang telah diundangkan
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	Nilai 85

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 12

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Dalam konteks otonomi daerah dibutuhkan penciptaan hubungan yang dinamis dan demokratis antara kepala daerah ( Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan DPRD dengan menerapkan prinsip check and balance, kesetaraan, kemitraan dan mengedepankan penegakan hukum.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Kategori
<b>Formula Pengukuran</b>	Pengukuran menggunakan kategori perhitungan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rendah (1 poin): dilaksanakan tapi cukup banyak kekurangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hubungan kemitraan antara Kepala Daerah dan DPRD kurang baik;</li><li>• Sedang (2 poin): dilaksanakan, namun ada sedikit kekurangan atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan atau hubungan kemitraan Kepala Daerah dan DPRD baik; dan</li><li>• Tinggi (3 poin): sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan atau hubungan kemitraan kepada daerah dan DPRD sangat baik.</li></ul>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Direktur Jenderal Otonomi Daerah
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Fasilitasi KDH dan DPRD
<b>Sumber Data</b>	Instrumen Pengukuran Kinerja Kemitraan
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahun
<b>Target Tahun 2024</b>	Sedang

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 13

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	(1) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 dilakukan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. (2) LPPD dan EPPD dilakukan berbasis aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) .
<b>Satuan Pengukuran</b>	Provinsi dan Kabupaten/Kota
<b>Formula Pengukuran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melalui penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD sebanyak 114 IKK Provinsi dan 126 IKK Kab/Kota</li> <li>Penetapan Bobot Penilaian Berdasarkan IKK</li> <li>Perhitungan Skoring berdasarkan akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan atau laju kinerja makro</li> <li>Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: - Status kinerja sangat rendah (skor 1 - 1,8), rendah (skor 1,81 - 2,60), sedang (skor 2,61 - 3,40), tinggi (skor 3,41 - 4,20), sangat tinggi (skor 4,21 - 5,00)</li> </ol>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Direktur Jenderal Otonomi Daerah
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
<b>Sumber Data</b>	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 pada aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	Nilai 4,00 (Tinggi)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 14

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, dalam mencapai pemenuhan pelayanan dasar bagi setiap warga negara yang behak sesuai dengan SPM.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase capaian penerapan SPM di daerah  Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari bidang: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan Kawasan Permukiman 5. Trantibumlinmas 6. Sosial  Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu: 1) capaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan 2) capaian Penerima Layanan Dasar. Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.  $\text{IP SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{BP})$  Keterangan: IP SPM = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini. BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80  Kategori nilai indeks pencapaian SPM 1. Nilai 100 : Tuntas Paripurna 2. Nilai 90-99 : Tuntas Utama 3. Nilai 80-89 : Tuntas Madya 4. Nilai 70-79 : Tuntas Pratama 5. Nilai 60-69 : Tuntas Muda 6. Nilai <60 : Belum
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase

IP SPM = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) +  
(Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)

Keterangan:

IP SPM = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018.

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis

Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini.

BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20

BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Kategori nilai indeks pencapaian SPM

1. Nilai 100 : Tuntas Paripurna
2. Nilai 90-99 : Tuntas Utama
3. Nilai 80-89 : Tuntas Madya
4. Nilai 70-79 : Tuntas Pratama
5. Nilai 60-69 : Tuntas Muda
6. Nilai <60 : Belum

## Formulasi Pengukuran

### Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

### Unit/Pihak Penyedia Data

- Ditjen Bina Pembangunan Daerah
- Direktorat SUPD II
- Direktorat SUPD III
- Direktorat SUPD IV
- Sekretariat Ditjen Bina Bangda (Sekber SPM)
- Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

### Sumber Data

Aplikasi e-SPM

### Periode Pelaporan

Tahunan

### Target Tahun 2024

100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 15

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, dalam mencapai sinkronisasi penyelenggaraan urusan di daerah.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<p>Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sinkronisasi dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.</p> <p>Urusan Pemerintahan daerah merupakan urusan konkuren yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada setiap urusan konkuren dilakukan pengukuran pada salah satu sub urusannya.</p> <p>Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinilai melalui indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui 3 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan).</li><li>2. Aspek implementasi kebijakan (program dan kegiatan).</li><li>3. Aspek Kinerja kebijakan (capaian kinerja dan anggaran).</li></ol> <p>Norma Standar Prosedur dan Kriteria merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).</p> <p>NSPK yang ditetapkan oleh K/L merupakan pedoman bagi daerah dalam menjalankan penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangannya. Kementerian Dalam Negeri sebagai pembinan umum, menyusun indeks penyelenggaraan urusan yang bertujuan untuk mensinronkan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan di daerah.</p> <p>Daerah yang diukur adalah 34 Provinsi</p> <p>Hasil pengukuran Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kemudian dilakukan pengkategorian, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika nilai indeks &lt;50 (kurang dari lima puluh), maka kategori yang didapat adalah "Kurang Sinkron";</li><li>2. jika nilai indeks <math>\geq 50</math> (lebih besar atau sama dengan lima puluh) dan &lt; 80 (lebih kecil dari delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sinkron"; dan</li><li>3. jika nilai indeks <math>\geq 80</math> (lebih besar atau sama dengan delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sangat Sinkron".</li></ol>
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	
<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks

$IS = (\% \text{ Kebijakan} \times BK) + (\% \text{ Implementasi Kebijakan} \times BIK) + (\% \text{ Kinerja Kebijakan} \times BKK)$

Keterangan:

- IS (Indeks Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) adalah ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan.
- Nilai capaian kebijakan (%kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian kesesuaian dan keselarasan kebijakan.
  - Kesesuaian adalah ketersediaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan urusan, artinya semua sub urusan di masing-masing urusan pemerintahan konkuren mempunyai landasan kebijakan dalam implementasinya.
  - Keselarasan adalah substansi kebijakan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan urusan selaras dengan norma Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan turunannya serta kebijakan lainnya termasuk kebijakan daerah (Perda dan Perkada).
- Nilai capaian implementasi (% Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan daerah. • Nilai capaian kinerja (% kebijakan x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian target kinerja berdasarkan indikator.
- BK (Bobot Kebijakan) adalah nilai pentingnya kebijakan (kesesuaian dan keselarasan) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, dengan nilai 40.
- BIK (Bobot Implementasi Kebijakan) adalah nilai pentingnya implementasi kebijakan (integrasi program dan kegiatan dalam dokrenda terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30.
- BKK (Bobot Kinerja Kebijakan) adalah nilai pentingnya kinerja kebijakan (capaian target sesuai indikator) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30.

## Formula Pengukuran

<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
<b>Sumber Data</b>	Ditjen Bina Pembangunan Daerah NSPK Kementerian/Lembaga RKPD dan Laporan Daerah Provinsi
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	Nilai 100

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 16

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan kapasitas, dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Desa dengan target kategori nilai "baik" merupakan target kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dicapai melalui pelaksanaan sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, peningkatan kapasitas aparatur dan pengurus kelembagaan desa, serta penataan kelembagaan desa.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Presentase Desa
<b>Formula Pengukuran</b>	Formula perhitungan pencapaian kinerja utama diperoleh dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang dirumuskan melalui 3 indikator kinerja program yang harus dicapai melalui, yakni: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten,</li><li>2. Pembentukan dan penataan kelembagaan desa yang tertib administrasi;</li><li>3. Penataan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
<b>Sumber Data</b>	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahun 2024
<b>Target Tahun 2024</b>	4%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 17

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dalam rangka peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, diantaranya diwujudkan dengan peningkatan tata kelola keuangan daerah
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat Dimensi dan Indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
<b>Satuan Pengukuran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai</li></ul>
<b>Formula Pengukuran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) diukur permasing-masing daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>• Hasil pengukuran IPKD di rata-ratakan secara nasional.</li></ul>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Ditjen Bina Keuangan Daerah
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, BPK-RI, Pemda.
<b>Sumber Data</b>	SIPD, LKPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, LRA dan Opini BPK
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	Nilai 66

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 18

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Menteri Dalam Negeri memberikan tugas tambahan kepada BSKDN Kemendagri untuk melaksanakan penilaian inovasi daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ Insentif inovasi daerah. Daerah yang mempunyai indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 35,01-100 (Kategori Inovatif dengan nilai 35,01-60 dan Kategori Sangat Inovatif dengan nilai 60,01-100) berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kecuali kabupaten/kota administratif (542 daerah) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lain.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Formulasi Pengukuran</b>	$\frac{\text{Jumlah daerah dengan kategori sangat inovatif dan inovatif}}{\text{Jumlah daerah (542)}} \times 100\%$
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Pusat strategi kebijakan pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inovasi pemerintahan dalam negeri
<b>Sumber Data</b>	Laporan Indeks Inovasi Daerah
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	36%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 19

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dapat menjadi komposit indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks
<b>Formula Pengukuran</b>	Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut: 1. Persentase hasil pengawasan umum (bobot 40%); 2. Persentase hasil pengawasan teknis (bobot 30%); 3. Persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan (bobot 30%); Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	100

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 20

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Indeks Pengawasan Inspektorat Daerah dapat menjadi komposit indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks
<b>Formula Pengukuran</b>	<p>Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (bobot 15%);</li><li>2. Kecukupan anggaran pengawasan (15%);</li><li>3. Level Kapabilitas APIP (bobot 30%);</li><li>4. Persentase pengawasan dugaan penyimpangan (bobot 20%); dan</li><li>5. Persentase kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu (bobot 20%).</li></ol> <p>Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan</p> <p>Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	90 (A)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 21

<b>Sasaran Strategis</b>	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) KTP-el & KIA, (4) Suket Pindah, (5) Suket Pindah Datang, (6) Suket Pindah ke Luar Negeri, (7) Suket Datang dari Luar Negeri, (8) Suket Tempat Tinggal, (9) Suket Kelahiran, (10) Suket Lahir Mati, (11) Suket Pembatalan Perkawinan, (12) Suket Pembatalan Perceraian, (13) Suket Kematian, (14) Suket Pengangkatan anak, (15) Suket pelepasan kewarganegaran Indonesia, (16) Suket Pengganti Tanda Identitas, (17) Suket Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20) Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan Anak, (23) Akta Pengesahan Anak, (24) Data Kependudukan (Data Perseorangan dan Data Agregat).
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Jumlah Dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, seperti: (1). KTP elektronik, (2). KIA, (3). Akta Kelahiran, (4). Akta Kematian, (5). Akta Perkawinan, (6). Akta Perceraian
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Formula Pengukuran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP elektronik : <math>\frac{\text{Jumlah Perekaman}}{\text{Jumlah WKTP}} \times 100\%</math></li> <li>2. KIA: <math>\frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Wajib KIA (0-17 &lt; 1 hari)}} \times 100\%</math></li> <li>3. Akta Kelahiran : <math>\frac{\text{Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%</math></li> <li>4. Akta Kematian : <math>\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%</math></li> <li>5. Akta Perkawinan : <math>\frac{\text{Jumlah akta Perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%</math></li> <li>6. Akta Perceraian : <math>\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%</math></li> </ol> <p>Capaian : Rata-rata capaian 6 (enam) Layanan Dukcapil.</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Dit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Daerah
<b>Sumber Data</b>	Hasil pengolahan data layanan adminduk yang dilakukan oleh dinas Dukcapil kabupaten/kota
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	100%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 22

<b>Sasaran Strategis</b>	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) KTP-el & KIA, (4) Suket Pindah, (5) Suket Pindah Datang, (6) Suket Pindah ke Luar Negeri, (7) Suket Datang dari Luar Negeri, (8) Suket Tempat Tinggal, (9) Suket Kelahiran, (10) Suket Lahir Mati, (11) Suket Pembatalan Perkawinan, (12) Suket Pembatalan Perceraian, (13) Suket Kematian, (14) Suket Pengangkatan anak, (15) Suket pelepasan kewarganegaran Indonesia, (16) Suket Pengganti Tanda Identitas, (17) Suket Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20) Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan Anak, (23) Akta Pengesahan Anak, (24) Data Kependudukan (Data Perseorangan dan Data Agregat).
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Jumlah lembaga pengguna pusat dan daerah yang menandatangani PKS dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Jumlah
<b>Formula Pengukuran</b>	Jumlah PKS
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Dit Integrasi Data Kependudukan Nasional & Dit Integrasi Data Kependudukan Daerah
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Dit Integrasi Data Kependudukan Nasional & Dit Integrasi Data Kependudukan Daerah
<b>Sumber Data</b>	Laporan PKS Pusat dan Daerah
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	1.500 Lembaga Pengguna

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 23

### Sasaran Strategis

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

### Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan melalui:

1. Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
2. Implementasi Standar Pelayanan Perkotaan;
3. Pelaksanaan pelayanan perizininan terintegrasi dan terpadu;
4. Integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial; dan
5. Penyelenggaraan kinerja kecamatan yang efektif.

### Indikator Kinerja Utama

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

- UU 25/2007 tentang Penanaman Modal;
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- PP 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan;
- PP 19/2008 tentang Kecamatan;
- PP 33/2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- Perpres 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan
- Kepmendagri No. 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di daerah yang menjadi domain pembinaan Kementerian Dalam Negeri.

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 5 (lima) indeks, yaitu:

1. Jumlah provinsi dengan indeks kinerja GWPP kategori "Baik" (IKP 1);
2. Persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial (IKP 2);
3. Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan kategori "Baik" (IKP 3);
4. Persentase daerah dengan pelayanan perizinan & non perizinan yang terintegrasi dan terpadu (IKP 4); dan
5. Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori "Baik" (IKP 5).

### Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan terdiri dari 22 (dua puluh dua) dimensi/pilar/sector/variabel dan 73 (tujuh puluh tiga) komponen/Indikator/SubVariabel yang memiliki jenis pembobotan berbeda setiap Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:

PARAMETER PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN			
IKP	Dimensi/Pilar/ Sektor/Variabel	Komponen /Indikator/ Sub Variabel	Bobot
IKP 1	Pemerintahan	15 Komponen	Setiap komponen yang ada pada masing-masing Dimensi memiliki 2
	Hukum dan Organisasi	10 Komponen	
	Keuangan	4 Komponen	
	Perencanaan	7 Komponen	

	Pengawasan	10 Komponen	aspek penilaian yaitu "Pelaksanaan" dengan bobot 40% serta "Hasil & Pelaporan" dengan bobot 60%
IKP 2	Segmen Batas	Daerah telah selesai segmen batas secara menutup (membentuk polygon tertutup) yang dibuktikan dengan Permendagri	40
	Rupa Bumi	Pembaharuan Kepmendagri tentang kode data wilayah	40
	Terintegrasi	Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Permendagri dan telah disampaikan kepada K/L terkait yang membidangi informasi geospasial	20
IKP 3	Pendidikan	3 Indikator	Sesuai SNI/ISO 37122 tentang Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan - Indikator Kota Cerdas
	Kesehatan	3 Indikator	
	Perumahan	2 Indikator	
	Populasi dan Kondisi Sosial	4 Indikator	
	Keamanan	1 Indikator	
	Perencanaan Kota	4 Indikator	
IKP 4	Perizinan	Kepala Daerah telah mendelegasikan pelayanan Perkada perizinan kepada DPMPSTP	25
	Non Perizinan	Kepala Daerah telah mendelegasikan pelayanan Perkada non perizina kepada DPMPSTP	25
	Terintegrasi	Daerah telah menggunakan aplikasi mandiri dalam pelayanan perizinan & non perizinan	25
		Daerah telah menerapkan/menggunakan aplikasi OSS RBA dalam rangka pelayanan perizinan & non perizinan	
Terpadu	Daerah telah mendelegasikan pelayanan dalam satu pintu	25	
IKP 5	Program Penyeleggaaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4 Sub Variabel	40%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Sub Variabel	20%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Sub Variabel	20%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Sub Variabel	20%

<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai
<b>Formulasi Pengukuran</b>	<p>Nilai ITKK diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang dari setiap indikator penyusun ITKK. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan penimbang masing-masing indikator, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $ITKK = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n \text{ atau } ITKK = W_1P_1 + W_2P_2 + W_3P_3 + \dots + W_nP_n$
	<p>Ket:  ITKK : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan  <math>I_n</math> : Skor indikator ke-n  <math>W_n</math> : Penimbang parameter indikator ke-n  <math>P_n</math> : Parameter dari indikator ke-n (misalnya : parameter 1 = 1, parameter 2 = 2, dst.)</p>
	<p>ITKK disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan di tingkat provinsi dan kab/kota. Nilai indeks mempunyai rentang 0 sampai dengan 100, dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <p><b>Kategori Penilaian IPT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat Baik = 75 – 100</li> <li>- Baik = 50 – 74</li> <li>- Cukup Baik = 1 – 49</li> <li>- Belum Mengisi = 0</li> </ul>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
<b>Sumber Data</b>	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	Nilai 60

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 24

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	<p>merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.</p> <p>langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komponen Pengungkit (60%) terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aspek pemenuhan 20%</li> <li>b. Aspek hasil antara 10%</li> <li>c. Aspek reform 30%</li> </ol> </li> <li>2. Komponen hasil (40%) terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akuntabilitas kinerja dan keuangan 10%</li> <li>b. Kulaitas pelayanan publik 10%</li> <li>c. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10%</li> <li>d. Kinerja organisasi 10%</li> </ol> </li> </ol> <p>Didukung dengan kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim pelaksana RB di lingkungan Kemendagri</li> <li>2. Melakukan sosialisasi ke seluruh komponen Kemendagri</li> <li>3. Membuat rencana aksi pelaksanaan RB Lingkup Kemendagri</li> <li>4. Melakukan rapat kesiapan atas rencana aksi yang telah disusun</li> <li>5. Berkoordinasi dengan tim penilai Kemenpan RB</li> <li>6. Mengisi lembar kerja dan evaluasi dari tim penilai Kemenpan RB</li> <li>7. Tim internal melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB</li> <li>8. Melakukan kesiapan penilaian RB oleh tim Kemenpan RB</li> <li>9. Melaksanakan entry meeting pelaksanaan RB</li> <li>10. Melakukan pendampingan penilaian oleh tim Kemenpan RB</li> <li>11. Melaksanakan exit meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh kementerian Pan-RB</li> </ol>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai
<b>Formula Pengukuran</b>	Penilaian Ekternal oleh Tim Evaluator RB dari KemenpanRB
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Sekretariat Jenderal
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Biro Organisasi dan Tatalaksana
<b>Sumber Data</b>	Biro Organisasi dan Tatalaksana
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	85,01

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 25

<b>Sasaran Strategis</b>	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Indeks Pengawasan Internal merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks pengawasan Internal
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Semakin tinggi nilai indeks pengawasan internal dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks
<b>Formula Pengukuran</b>	<p>Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini laporan keuangan Kemendagri (bobot 20%);</li> <li>2. Nilai SAKIP Kemendagri (bobot 20%);</li> <li>3. Nilai Maturitas SPIP (bobot 20%);</li> <li>4. Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan Pelaksanaan Pengawasan Internal oleh APIP Kementerian Dalam Negeri (bobot 20%); dan</li> <li>5. Nilai Kapabilitas APIP Kemendagri (bobot 20%);</li> </ol> <p>Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	100

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 26

<b>Sasaran Strategis</b>	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri. Semakin tinggi nilai indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dapat dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Indeks penanganan pemeriksaan khusus merupakan indikator yang mengukur dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Fokus dan lokus indeks penanganan pemeriksaan khusus pada Indikator ini hanya yang subjek dan objeknya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Nilai Indeks
<b>Formula Pengukuran</b>	<p>Formula pengukuran indikator dilakukan dengan melakukan pembobotan antar subindikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi Lainnya (bobot 60%); dan</li><li>2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi (bobot 40%).</li></ol> <p>Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.</p>
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat Jenderal Kemendagri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	85

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

## Indikator Kinerja Utama 27

<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri
<b>Deskripsi Sasaran Strategis</b>	Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, tugas Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	Persentase rekomendasi hasil kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri
<b>Deskripsi Indikator Kinerja Utama</b>	Jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (UKE I) di lingkup Kemendagri, sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri yang berdampak signifikan terhadap perubahan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Formula Pengukuran</b>	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh MDN ke Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan kepada Mendagri}} \times 100\%$
<b>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</b>	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
<b>Sumber Data</b>	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
<b>Periode Pelaporan</b>	Tahunan
<b>Target Tahun 2024</b>	45%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah





# BAB III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA



**Sasaran Strategis 1:  
Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia**

**Indikator Sasaran:**

- Indeks Demokrasi Indonesia
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
- Indeks Kinerja Ormas

**Sasaran Strategis 2:  
Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah**

**Indikator Sasaran:**

- Indeks Harmoni Indonesia

**Sasaran Strategis 3:  
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional**

**Indikator Sasaran:**

- Indeks Kewaspadaan Nasional

**Sasaran Strategis 4:  
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas**

**Indikator Sasaran:**

- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"

**Sasaran Strategis 5:  
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri**

**Indikator Sasaran:**

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
- Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
- Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

**Sasaran Strategis 6:  
Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah**

**Indikator Sasaran:**

- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

**Sasaran Strategis 7:  
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif**

**Indikator Sasaran:**

- Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD
- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Persentase capaian penerapan SPM di daerah
- Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

**Sasaran Strategis 8:  
Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan**

**Indikator Sasaran:**

- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik

**Sasaran Strategis 9:  
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan**

**Indikator Sasaran:**

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

**Sasaran Strategis 10:  
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri**

**Indikator Sasaran:**

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

**Sasaran Strategis 11:  
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas**

**Indikator Sasaran:**

- Indeks Pengawasan Internal
- Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

**Sasaran Strategis 12:  
Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri**

**Indikator Sasaran:**

- Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang Pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri

## Capaian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang tergambarakan melalui pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dilihat dari ketercapaian indikator kinerja tahunan, dengan capaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana data berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	79,51	99,91%
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	81,37%	102,35%
	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66	Nilai 71,64	108,55%
2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	Nilai 7,13	113,17%
3 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	Nilai 72,89	113,89%
4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "baik"	150 Daerah	151 Daerah	100,67%
5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	75,23%	100,31%
	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)	100%
	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)	100%
	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	Nilai 3,69	102,50%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	73,63* Nilai Tahun Lalu	86,62%
	7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	Sedang
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai 4,00 (Tinggi)	Nilai 2,82 *nilai proyeksi	70,50%	
Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah		100%	87,86%	87,86%	
Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai 100 (Sinkron)	Nilai 99,91	99,91%	
Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"		4%	12,30%	120%	
Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		Nilai 66	Nilai 71,90	108,94%	
Persentase Daerah yang Mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi		36%	76,92%	120%	
Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah		Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 100 Sangat Baik)	100%	
Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah		Nilai 90 (A)	Nilai 90,40	100,44%	
8		Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	98,46% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik		1.500 Lembaga Pengguna	4.753 Lembaga Pengguna	120%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	Nilai 60	100%
10	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,69 *Nilai Sementara	103,15%
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 100 (Sangat Baik)	100%
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)	Nilai 85,7	100,82%
12	Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Hasil Strategi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang Direkomendasikan dan Ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	92,30%	120%

**Catatan:**

Capaian Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja dimaksud maksimal 120%. Untuk capaian riil tertuang dalam penjelasan masing-masing IKU pada BAB III.





# SASARAN 1

## Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Salah satu karakteristik dari pembangunan politik adalah tumbuhnya peningkatan partisipasi warga negara dalam beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang resmi atau mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah (konvensional) sampai bentuk yang tidak resmi (inkonvensional). Pada saat ini pemerintah Indonesia berusaha mengadakan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Aspek yang termasuk di dalamnya antara lain “Pembangunan Politik” yang mempunyai beberapa segi diantaranya pelibatan partisipasi politik.

Sasaran strategis “Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia” diartikan sebagai kondisi terhadap pelaksanaan demokrasi yang berkualitas yang menggambarkan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas ancaman serta bertujuan mengoptimalkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Pembangunan politik dalam negeri dilaksanakan melalui tiga program, yakni Program Perbaikan Struktur Politik, Program Peningkatan Kualitas Proses Politik, dan Program

Pengembangan Budaya Politik.

Untuk mencapai Sasaran meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia yang capaian kinerjanya diukur dari 3 Indikator Kinerja yaitu: (1) Indeks Demokrasi Indonesia, Ukuran ini telah dilembagakan dalam RPJMN 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024. Dalam pengukurannya, IDI terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni Aspek Kesetaraan, Aspek Kebebasan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dan 22 Indikator dan didapatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 79,51 dengan capaian sebesar 99,91%; (2) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu sebesar 81,37% yang pengukurannya diperoleh dari rata-rata atas Tingkat Partisipasi Pemilu (Pilpres 81,48%, DPR 81,14%, dan DPD 81,50%), sehingga diperoleh capaian sebesar 102,35%; dan (3) Indeks Kinerja Ormas, menggunakan 3 indikator dimensi, yaitu dimensi kerawanan, dimensi kelembagaan, dan dimensi partisipasi. Dari pemetaan 3 provinsi yang diukur (Provinsi Bali, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat) didapatkan nilai Indeks Kinerja Ormas sebesar 71,64 dengan capaian sebesar 108,55%.

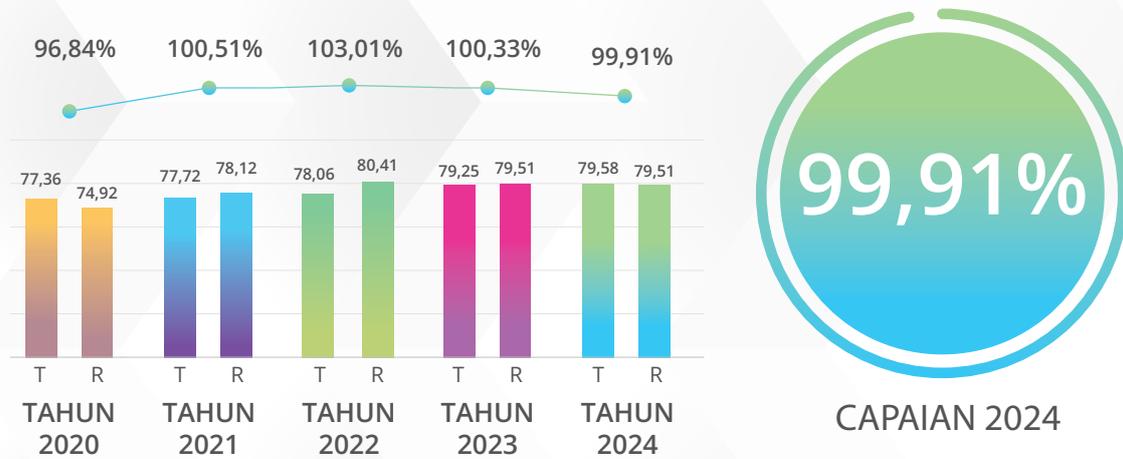
Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia” diperoleh sebesar 103,60% sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil Hal ini didukung oleh capaian kinerja 2 (dua) indikator dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil dan 1 (satu) indikator dengan predikat Tinggi atau kategori Berhasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	Nilai 79,51	99,91%	Tinggi/Berhasil
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	81,37% (Pilpres: 81,48% DPR: 81,14% DPD: 81,50%)	102,35%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
3	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66	Nilai 71,64	108,55%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				103,60%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



## Indeks Demokrasi Indonesia



T = Target R = Realisasi

IDI memegang peranan krusial pada pembangunan demokrasi nasional sebab IDI telah lama menjadi alat ukur pembangunan kualitas politik yang diintegrasikan ke dalam RPJMN pada periode 2010–2014, 2015–2019, dan 2020–2024.

Pada tahun 2020-2024, pembangunan di bidang politik dan komunikasi diarahkan untuk menuju konsolidasi demokrasi yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas demokrasi. Hal tersebut saat ini masih membutuhkan perhatian besar dan upaya seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang dari ideologi bangsa. Dengan demikian ukuran-ukuran yang digunakan IDI diharapkan mengandung nilai-nilai penting dalam Pancasila.

Dalam RPJPN 2025-2045, pembangunan dalam lingkup Politik dan Komunikasi diarahkan untuk mewujudkan demokrasi substansial, yaitu kondisi di mana nilai-nilai demokrasi telah terinternalisasi dan menjadi norma perilaku masyarakat, tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang bersifat prosedural, melainkan demokrasi yang bisa mengemban amanat rakyat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demokrasi substansial memiliki dimensi yang tidak hanya sebatas pada lingkup politik, namun juga merambah pada dimensi lain seperti aspek sosial dan ekonomi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi.

Dalam pengukuran IDI, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penilaian menggunakan 3 (tiga) aspek yakni Aspek Kebebasan, Aspek Kesenjangan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Adapun rincian aspek, indikator, data provinsi, sumber data provinsi, data pusat, dan sumber data pusat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Rincian aspek, indikator, data provinsi, sumber data provinsi, data pusat, dan sumber data pusat IDI

INDIKATOR		DATA PROVINSI	SUMBER DATA PROVINSI	DATA PUSAT	SUMBER DATA PUSAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
<b>ASPEK KEBEBASAN</b>					
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD	Prevalensi kasus per jumlah K/L	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD	Agregasi provinsi	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	Komnas HAM Surat Kabar Portal Berita Online FGD	Prevalensi kasus per jumlah K/L	Komnas HAM Surat Kabar Portal Berita Online FGD
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Jumlah pemda yang memiliki aturan diskriminatif/ jumlah pemda	Perda/Pergub/ SE	Jumlah UU/aturan yang dikaji Komnas HAM per jumlah K/L	Komnas HAM
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Kasus pelanggaran pemilu/100.000 pemilih	Bawaslu	Agregasi provinsi	Bawaslu
6	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Persentase pekerja yang memiliki (semua) jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua	Sakernas BPS	Agregasi provinsi	Sakernas BPS
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi	Dewan Pers	Indeks Kemerdekaan Pers Nasional	Dewan Pers
<b>ASPEK KESETARAAN</b>					
8	Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Badan Pusat Statistik	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Badan Pusat Statistik
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPRD (RDP Umum, seminar, sosialisasi, dll) di DPRD Provinsi terhadap jumlah kursi DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi	Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, sosialisasi, dll) di DPR dan DPD terhadap jumlah kursi DPR dan DPD.	Sekretariat DPR dan DPD RI
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	Indeks Persaingan Usaha Provinsi	KPPU	Indeks Persaingan Usaha Nasional	KPPU
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	Persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan pada masing-masing provinsi	Susenas BPS	Agregasi provinsi	Susenas BPS
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi	Badan Pusat Statistik	Agregasi provinsi	Badan Pusat Statistik

INDIKATOR		DATA PROVINSI	SUMBER DATA PROVINSI	DATA PUSAT	SUMBER DATA PUSAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
<b>ASPEK KESETARAAN</b>					
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	Indikator 2 (Akses dan Diseminasi informasi) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat	Indikator 2 (Akses dan Diseminasi informasi) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan dasar Provinsi	Badan Pusat Statistik	Agregasi provinsi	Badan Pusat Statistik
<b>ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI</b>					
15	Kinerja Lembaga Legislatif	Persentase Perda/UU yang disahkan terhadap target Propemperda	Sekretariat DPRD	Persentase UU disahkan terhadap target Prolegnas Prioritas Tahunan	Sekretariat DPR
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	Persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan	Mahkamah Agung	Persentase putusan terhadap beban di MA dan MK	Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	Jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per jumlah kabupaten/kota	Bawaslu	Rasio putusan yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara pemilu tingkat pusat per/ total penyelenggara pemilu	DKPP
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah kab/kota	PTUN	Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah K/L	PTUN
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	KLHK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional	KLHK
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/APBD oleh Pemerintah	Persentase informasi APBD yang tersedia di website	Pemda	Persentase informasi APBN yang tersedia di Kemenkeu	Kemenkeu
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik Provinsi	Kemenpan RB	Indeks Pelayanan Publik K/L	Kemenpan RB
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	Rasio kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD oleh kepengurusan lingkup provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD	- Surat Kabar - Portal Berita Online - Kemendagri/ Bakesbangpol	Rasio kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPR oleh kepengurusan lingkup nasional terhadap jumlah partai politik di DPR	- Surat Kabar - Portal Berita Online - Kemendagri

Sumber: Badan Pusat Statistik

\*Pada Indikator yang Berwarna Hijau merupakan Indikator yang dipengaruhi langsung oleh Kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Koordinasi, Bimbingan dan Pengawasan

Berdasarkan pada tabel indikator IDI diatas, dapat dilihat bahwa dari 22 indikator tersebut, ada 13 indikator yang dipengaruhi oleh kinerja Kemendagri dalam bentuk koordinasi, bimbingan dan pengawasan. Kemendagri memiliki jaringan yang luas di tingkat pemerintah daerah, yang memungkinkan untuk mengkoordinasikan dan mengumpulkan data terkait implementasi prinsip-prinsip demokrasi di berbagai daerah, Kemendagri terlibat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan demokrasi, seperti memperkuat otonomi daerah, transparansi pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, Kemendagri berpartisipasi dan berperan aktif serta mendukung penilaian terhadap 3 (tiga) indikator antara lain:

1. Indikator nomor 18 "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah" yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Kemendagri berperandalam memberikan evaluasi terhadap suatu produk hukum daerah, memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengawasi pelaksanaan peraturan daerah. Indikator ini mengukur jumlah peraturan daerah/kebijakan, keputusan pejabat yang dinyatakan salah atau bertentangan dalam sidang PTUN.
2. Indikator nomor 20 "Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah", yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Kemendagri memainkan peran penting dalam mendorong transparansi anggaran di daerah dengan memfasilitasi kebijakan dan regulasi yang tepat, mendorong penggunaan teknologi, serta melakukan pengawasan yang ketat. Kemendagri memastikan bahwa anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi selain itu Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan data APBD dalam format yang terbuka, seperti melalui portal atau situs web resmi, yang dapat diakses oleh publik. Indikator ini didapatkan dari pemantauan situs web pemerintah daerah terkait dengan transparansi anggaran.
3. Indikator nomor 22 "Pendidikan Politik pada kader partai politik", yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Kemendagri berperan dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan transparansi

penyaluran bantuan politik kepada partai politik di tingkat daerah. Peran ini termasuk dalam menyusun regulasi terkait bantuan keuangan, memfasilitasi transparansi dalam penggunaan dana, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Kemendagri juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti KPU dan Bawaslu untuk menjaga agar bantuan politik disalurkan dan digunakan dengan cara yang akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam melakukan penghitungan dengan metode baru, IDI menggunakan 3 jenis indeks, yaitu Indeks Demokrasi di Tingkat Provinsi, Indeks Demokrasi di Tingkat Pusat, dan Indeks Demokrasi di Tingkat Nasional yang didapatkan dari nilai provinsi dan pusat. Penghitungan IDI dilakukan melalui empat tahap penghitungan, yaitu Penghitungan IDI untuk setiap provinsi, penghitungan IDI provinsi, penghitungan IDI pusat, dan penghitungan IDI nasional.

1. Perhitungan IDI tiap Provinsi:

Langkah pertama adalah menghitung indeks tiap-tiap indikator di tingkat provinsi. Skor indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$$

Keterangan:

- X<sub>ijk</sub>: tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari provinsi ke i, aspek ke j, indikator ke k.
- X<sub>ideal</sub>: tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator X<sub>ijk</sub>
- X<sub>terburuk</sub>: tingkat capaian terburuk dari indikator X<sub>ijk</sub>

Sehingga persamaan (2) menghasilkan nilai  $0 \leq \text{Indeks}(X_{ijk}) \leq 100$ ;

Langkah ketiga adalah menghitung IDI tingkat provinsi yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus perhitungannya adalah:

$$IDI_i = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{ij})$$

Keterangan:

- IDI<sub>i</sub> : Indeks Demokrasi Indonesia di provinsi ke-i
- P<sub>j</sub> : Nilai penimbang dari aspek ke-j
- I (A<sub>ij</sub>) : Indeks provinsi ke-i aspek ke-j
- j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga
- demokrasi

2. Perhitungan IDI Provinsi (rata-rata)  
Indeks Provinsi dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari indikator provinsi. Langkah pertama, indikator provinsi didapatkan dari rata-rata skor indikator semua provinsi dengan rumus sebagai berikut:

$$I(X_{jk\_provinsi}) = \frac{\sum_{i=1}^n I(X_{ijk})}{n_i}$$

Keterangan:

- $I(X_{jk\_provinsi})$  : Skor indikator ke-k di aspek ke-j untuk seluruh provinsi
- $I(X_{ijk})$  : Skor Indikator ke-k di aspek ke-j pada provinsi ke-i
- $n_i$  : jumlah provinsi

Langkah kedua adalah menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_{j\_provinsi}) = \sum_{k=1}^n P_{jk} I(X_{jk})$$

Keterangan:

- $I(A_{j\_provinsi})$  : Indeks aspek ke-j
- $P_{jk}$  : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k
- $I(X_{jk})$  : Indeks indikator komponen penyusun IDI aspek ke-j, indikator ke-k

Langkah ketiga adalah menghitung IDI provinsi yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_{provinsi} = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{j\_provinsi})$$

Keterangan:

- $IDI_{provinsi}$  : Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat provinsi
- $P_j$  : Nilai penimbang aspek ke-j
- $I(A_{j\_provinsi})$  : Indeks aspek ke-j
- $j$  : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi.

3. Perhitungan IDI Pusat  
Langkah pertama adalah penghitungan indeks tiap-tiap indikator pada tingkat pusat. Indikator pusat hanya dihitung untuk indikator yang memiliki data untuk pusat. Sebagai contoh, pada indikator 2 hambatan kebebasan yang dilakukan masyarakat tidak tersedia data pusat karena tidak ada masyarakat di tingkat pusat. Skor indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I(X_{jk\_pusat}) = \frac{(X_{jk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$$

Keterangan:

- $X_{jk\_pusat}$  : tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke-j, indikator ke-k
- $X_{ideal}$  : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator
- $X_{terburuk}$  : tingkat capaian terburuk dari indikator  $X_{jk}$  Sehingga persamaan (8) menghasilkan nilai  $0 \leq \text{Indeks}(X_{jk}) \leq 100$ ;

Langkah kedua adalah menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$IDI_{pusat} = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{j\_pusat})$$

Keterangan:

- $I(A_{j\_pusat})$  : Indeks aspek ke-j
- $P_{jk}$  : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k
- $I(X_{jk})$  : Indeks indikator komponen penyusun IDI pusat aspek ke-j, indikator ke-k

Langkah ketiga adalah menghitung IDI tingkat pusat yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_{pusat} = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{j\_pusat})$$

Keterangan:

- $IDI_{pusat}$  : Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat pusat
- $P_j$  : Nilai penimbang aspek ke-j
- $I(A_{j\_pusat})$  : Indeks aspek ke-j
- $j$  : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi.

#### 4. Perhitungan Nilai IDI Nasional

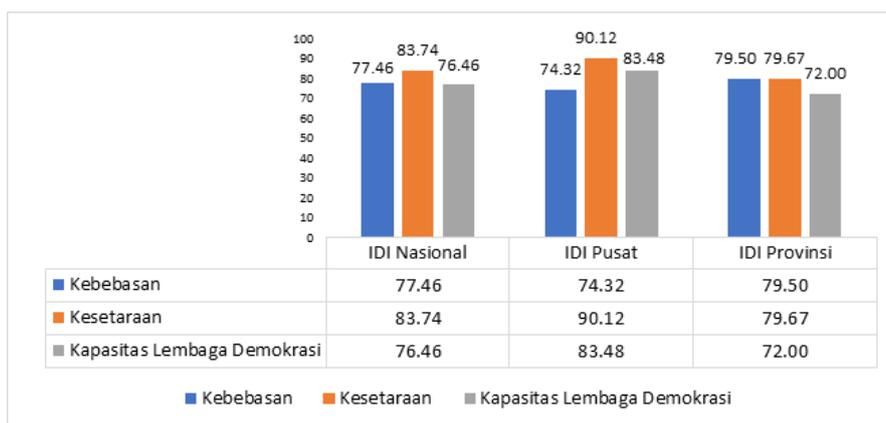
Nilai IDI Nasional didapatkan dengan cara menghitung secara agregat dengan komposisi 65% Nilai IDI Provinsi dan 35% Nilai IDI Pusat

Capaian IDI yang dituangkan pada Laporan ini merupakan capaian Tahun 2023 yang pengukuran dilakukan di Tahun 2024. Pengukuran IDI Tahun 2023 menghasilkan gambaran mengenai wajah terkini demokrasi di Tanah Air, khususnya berkenaan dengan pentingnya revitalisasi kapasitas lembaga demokrasi di daerah. Fokus ini diambil karena performa lembaga demokrasi di daerah masih cenderung lemah merujuk pada hasil pengukuran IDI 2023. Peran lembaga-lembaga demokrasi di daerah perlu diperkuat, khususnya lembaga legislatif dan partai politik. Hal ini karena kedua lembaga tersebut menjadi

wadah dan sarana utama dalam menjangkau partisipasi politik masyarakat. Melalui dua institusi ini, aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan diproses, dan diformulasikan menjadi kebijakan publik. Proses tersebut menunjukkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, pada hakikatnya masyarakat terlibat dalam penyusunan kebijakan. Pada satu sisi, lembaga ini juga merupakan tonggak dalam pelaksanaan pemerintahan demokratis karena mewakili masyarakat untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan melalui mekanisme check and balances.

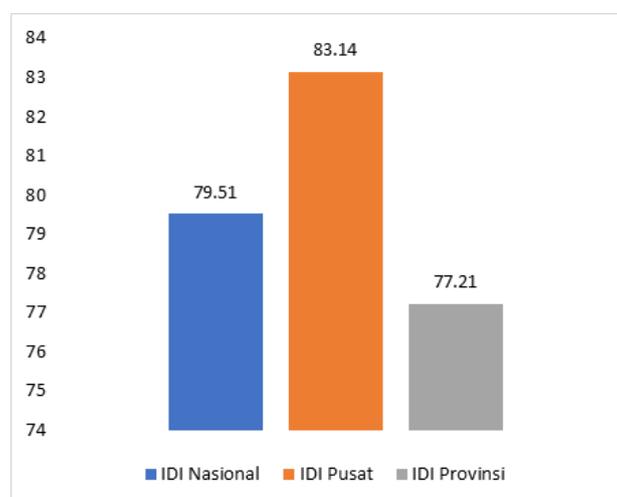
Hasil pengukuran IDI tahun 2023, menghasilkan 3 (tiga) Tingkat pengukuran yaitu tingkat nasional, pusat, dan provinsi dengan hasil sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 3.1 Nilai IDI Nasional, Pusat, dan Provinsi berdasarkan Aspek Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.2 Nilai IDI Nasional, Pusat, dan Provinsi Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara nasional, Nilai IDI 2023 dihitung secara agregat dengan komposisi 65% Nilai IDI Provinsi, dan 35% Nilai IDI Pusat sehingga diperoleh nilai IDI nasional sebesar 79,51 (kategori sedang), IDI pada tingkat provinsi sebesar 77,21 (kategori sedang),

dan IDI tingkat pusat sebesar 83,14 (kategori tinggi). Adapun kategorisasi dan rentang nilai dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3.3 Kategorisasi dan Rentang Nilai dalam Pengukuran IDI

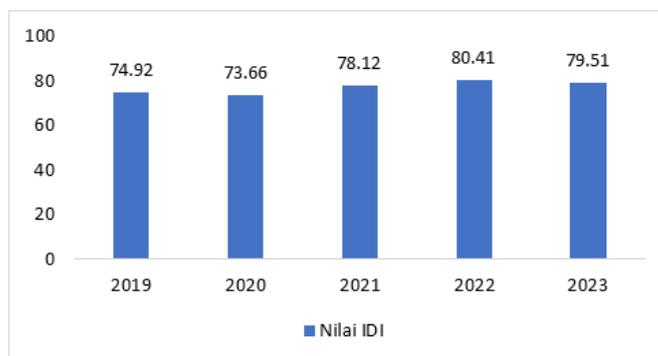
Kategorisasi	Rendah	Sedang	Tinggi
Aspek Kesetaraan	<60	60 – 80	>80
Aspek Kebebasan	<60	60 – 80	>80
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	<60	60 – 80	>80

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tingkat nasional hasil penghitungan IDI 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,9 poin. Bukan hanya itu, perubahan indeks dari 80,41 menjadi 79,51 sekaligus menarik kategori demokrasi Indonesia dari “tinggi” kembali ke “sedang”. Kategori “tinggi” yang hanya sekali terjadi pada Tahun 2022 sepanjang pengukuran IDI yang sudah dilakukan sejak 2009, menunjukkan fakta

bahwa mempertahankan capaian IDI tidaklah mudah. Hal ini wajar mengingat indikator-indikator yang diukur dalam IDI multi-dimensi dan multi-aktor. Sekalipun IDI 2023 mengalami penurunan, yang patut disyukuri angka 79,51 ini masih di atas target RPJMN 2020-2024 yang dipatok sebesar 78,37 pada 2024.

Grafik 3.3 Nilai IDI Tahun 2019 s.d 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tren nilai IDI Tahun 2019 s.d 2023 cenderung fluktuatif. Nilai IDI 2023 sebesar 79,51 menunjukkan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 80,41. Hal ini disebabkan oleh kualitas demokrasi Indonesia yang menurun pada 2023. Ini terlihat dari hasil kajian The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Freedom House (FH). Hasil EIU menunjukkan capaian Democracy Index Indonesia menurun dari 6,71 di 2022 menjadi 6,53 di 2023.

Sementara berdasarkan hasil FH menunjukkan penurunan skor Indonesia pada pengukuran freedom in the world (FITW) dari 59 menjadi 58 pada periode yang sama. Lebih jauh hasil FITW pada 2024 kembali menyematkan penurunan

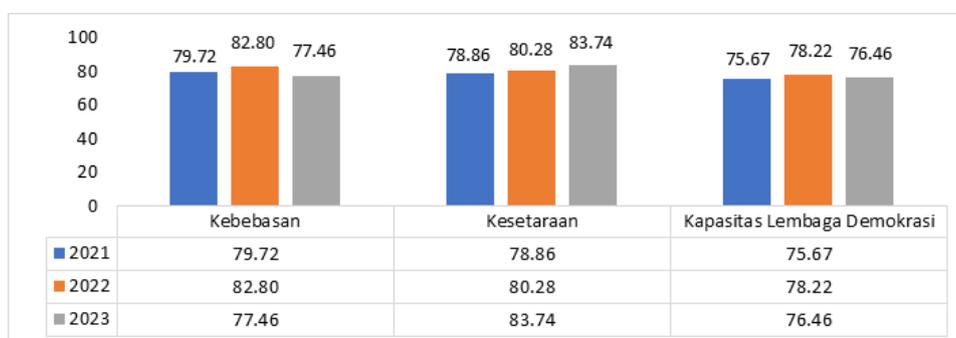
pada Indonesia dengan skor yang menjadi 57. Tren penurunan ini bisa dibaca melalui dua sudut pandang. Pertama, sebagai fenomena global yang menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas demokrasi di seluruh dunia hampir satu dekade terakhir. Situasi ini terkonfirmasi oleh kajian IDEA yang menunjukkan sebanyak 47 persen negara mengalami penurunan faktor performa demokrasi dalam lima tahun terakhir.

Dari sumber yang sama negara yang mengalami peningkatan hanya sebesar 30 persen. Dalam lingkup yang lebih sempit, Asia Pasifik, disparitasnya bahkan lebih tajam. Komposisi negara yang naik dan yang turun perbandingannya sebesar 51 dan 26 persen.

Sudut pandang kedua berupa siklus menjelang pemilu, yang memiliki kecenderungan diikuti oleh penurunan kinerja lembaga-lembaga demokrasi. Dalam konteks Indonesia ini terjadi pada IDI 2013, 2018, dan terbaru pada 2023. Pada masa ini kinerja lembaga legislatif dan partai politik umumnya menurun karena pergantian prioritas untuk konsolidasi kemenangan pemilu. Selain itu, pada tahun-tahun menjelang pemilu, termasuk pada Tahun 2023, lazim ditemukan kasus-kasus berupa tekanan, intimidasi, atau ancaman pada kebebasan memilih yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau masyarakat.

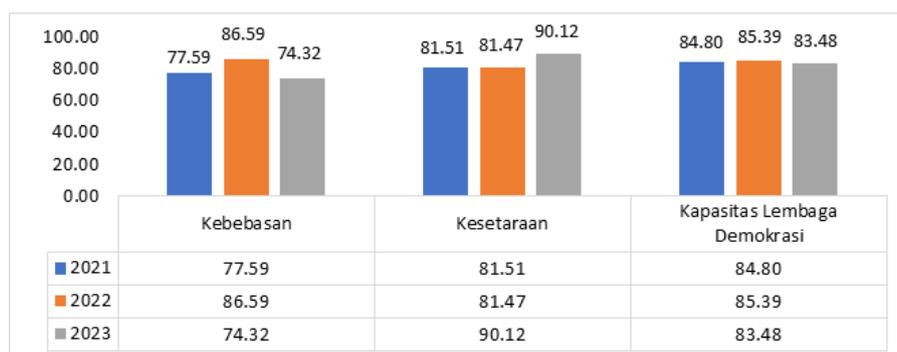
Pemerintah dapat melihat berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau peningkatan kinerja yang dimana hal tersebut dapat dilihat pada data IDI 2023 sebagai acuan program penguatan demokrasi. Pada aspek kebebasan, pemerintah perlu melihat ancaman kebebasan berpendapat yang masih terjadi sebagai prioritas. Ini bisa dimulai dengan mendorong aparat pemerintah untuk memberikan jaminan pada penyampaian aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Aspek Kesetaraan merupakan satu-satunya yang mengalami kenaikan pada 2023, yaitu sebesar 3,46 poin. Adapun perbandingan nilai IDI berdasarkan Aspek pada Tahun 2021 s.d 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4 Nilai IDI Nasional, Pusat, dan Provinsi Tahun 2023



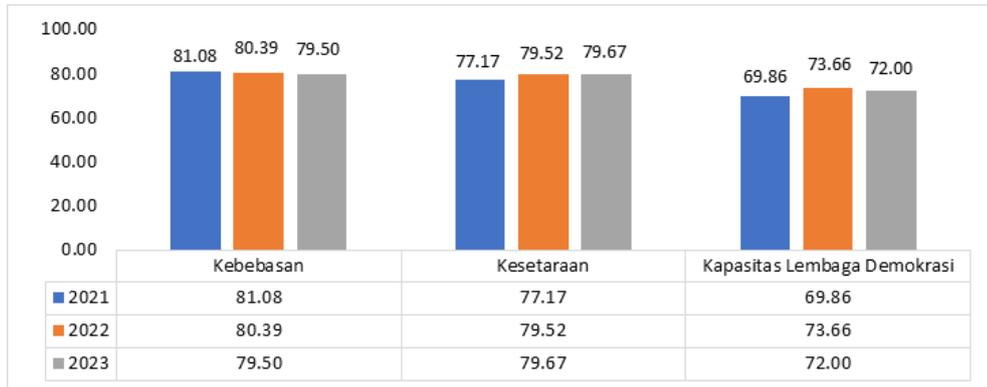
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.5 Nilai Aspek IDI Pusat Tahun 2021 s.d. 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Grafik 3.6 Nilai Aspek IDI Provinsi Tahun 2021 s.d. 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Sebagai catatan pada tingkat pusat terdapat dua indikator dengan nilai 100 yaitu indikator kesetaraan gender yang diambil dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang disusun oleh BPS. Adapun nilai masing-masing indikator pada setiap aspek IDI berdasarkan provinsi, sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 3.4 Indikator Aspek Kebebasan IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Aspek 1	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4	Indikator 5	Indikator 6	Indikator 7
Bali	85,23	100,00	70,17	80,11	100,00	99,24	56,57	82,58
DKI Jakarta	90,66	97,50	93,74	95,83	100,00	98,05	72,40	71,73
DI Yogyakarta	77,76	79,24	82,70	65,40	100,00	70,39	71,03	74,56
Jawa Barat	87,97	95,07	95,89	82,64	85,71	95,95	77,90	83,02
Kalimantan Timur	83,00	78,76	82,30	76,40	72,73	97,97	95,57	84,38
Jawa Timur	87,29	97,47	92,10	90,52	97,44	98,07	50,43	76,55
Kalimantan Barat	92,16	100,00	100,00	100,00	100,00	98,79	58,93	79,07
Jawa Tengah	85,84	95,74	89,36	90,54	94,44	94,18	54,13	74,48
Kalimantan Selatan	81,40	100,00	83,20	100,00	35,71	97,28	71,20	80,13
Sumatera Utara	81,40	100,00	83,20	100,00	35,71	97,28	71,20	80,13
Gorontalo	81,68	100,00	100,00	100,00	71,43	47,95	63,00	78,63
Sulawesi Tengah	87,11	90,79	100,00	84,66	100,00	98,16	59,87	72,61
Lampung	73,79	85,07	55,20	80,09	75,00	94,41	49,27	69,76
Sumatera Selatan	80,94	93,54	91,93	73,09	88,89	94,73	49,83	70,83
Kepulauan Riau	79,72	47,37	100,00	78,07	87,50	77,68	100,00	77,41
Kalimantan Tengah	85,71	94,76	100,00	73,80	95,83	98,07	60,93	75,43
Aceh	85,71	94,76	100,00	73,80	95,83	98,07	60,93	75,43
Nusa Tenggara Timur	90,05	94,66	86,64	100,00	100,00	99,55	67,07	74,78
Sulawesi Tenggara	71,72	89,39	0,00	100	83,33	69,26	62,83	76,67
Sulawesi Selatan	81,7	88,24	77,95	90,2	84	94,41	57,83	72,59
Sulawesi Utara	78,15	59,88	74,92	100,00	100,00	58,45	68,37	76,20
Sumatera Barat	72,15	85,49	75,81	67,75	50,00	77,29	72,30	78,90
Sumatera Barat	72,15	85,49	75,81	67,75	50,00	77,29	72,30	78,90
Kep. Bangka Belitung	68,34	81,75	54,38	69,58	62,5	47,59	77,97	81,03
Banten	83,11	97,74	94,34	100,00	33,33	97,80	86,87	74,33
Riau	79,39	95,67	89,19	63,95	76,92	91,76	64,83	74,79
Sulawesi Barat	74,87	80,23	100,00	67,06	42,86	99,16	70,80	73,09
Jambi	65,28	69,45	42,71	74,54	66,67	57,49	61,87	77,23
Bengkulu	74,62	86,57	66,42	77,61	90,91	47,67	68,93	75,33
Nusa Tenggara Barat	64,49	89,67	9,60	65,56	72,73	78,27	50,67	72,89
Maluku	70,55	70,49	26,23	100,00	83,33	49,70	75,57	73,80
Papua	79,98	93,60	0,00	100,00	100,00	99,48	88,53	64,01
Papua	79,98	93,60	0,00	100,00	100,00	99,48	88,53	64,01
Maluku Utara	65,58	56,86	46,08	64,05	100,00	49,30	64,33	72,22
Provinsi	79,50	84,87	74,90	82,94	82,88	82,00	69,08	75,69
Pusat	74,32	70,11		77,01	87,36			61,95
Nasional	77,48							

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.5 Indikator Aspek Kesetaraan IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Aspek 2	Indikator 8	Indikator 9	Indikator 10	Indikator 11	Indikator 12	Indikator 13	Indikator 14
Bali	85,75	97,28	100,00	63,50	86,90	97,31	83,86	81,50
DKI Jakarta	86,51	100,00	100,00	78,50	89,54	93,47	76,70	73,33
DKI Jakarta	86,51	100,00	100,00	78,50	89,54	93,47	76,70	73,33
DI Yogyakarta	89,21	100,00	100,00	76,50	91,73	96,31	81,37	85,04
Jawa Barat	83,63	94,60	100,00	72,50	74,97	92,56	88,41	73,08
Kalimantan Timur	81,08	90,94	100,00	65,00	74,18	94,69	81,43	73,07
Jawa Timur	83,24	98,77	100,00	73,00	72,78	95,12	78,12	77,45
Kalimantan Barat	78,55	96,33	100,00	63,33	59,92	94,95	80,38	72,89
Jawa Tengah	80,24	97,82	58,33	77,83	78,38	94,87	80,16	77,79
Kalimantan Utara	81,24	77,62	100,00	64,33	86,36	95,99	78,34	70,84
Kalimantan Selatan	82,60	100,00	100,00	65,33	79,70	95,69	75,61	73,98
Sumatera Utara	81,49	91,23	100,00	73,67	66,02	94,11	82,69	75,36
Gorontalo	83,32	93,77	100,00	61,67	94,32	96,94	72,72	70,54
Sulawesi Tengah	74,78	100,00	26,67	64,33	83,60	97,05	81,19	71,31
Lampung	80,48	89,88	100,00	65,50	73,21	95,77	73,67	77,13
Sumatera Selatan	82,14	100,00	100,00	71,50	70,73	95,89	75,48	75,14
Kepulauan Riau	78,82	77,58	100,00	64,67	70,92	93,20	78,98	75,96
Kalimantan Tengah	77,66	100,00	100,00	60,83	57,55	95,90	80,53	68,96
Aceh	74,47	83,82	32,10	51,67	98,41	93,97	82,25	74,39
Nusa Tenggara Timur	75,66	99,03	43,08	62,67	83,53	96,86	83,37	64,06
Sulawesi Tenggara	87,06	97,03	100,00	76,17	89,38	96,85	80,04	76,22
Sulawesi Selatan	79,52	99,22	61,18	60,00	89,17	95,67	79,18	76,88
Sulawesi Utara	78,09	100,00	62,22	71,17	81,26	93,90	68,46	74,27
Sumatera Barat	81,48	86,16	100,00	68,33	78,89	94,06	76,39	74,84
Sumatera Barat	81,48	86,16	100,00	68,33	78,89	94,06	76,39	74,84
Kep. Bangka Belitung	78,98	76,77	100,00	64,33	69,28	95,44	83,83	73,37
Banten	80,59	92,14	100,00	67,33	73,70	92,48	74,81	75,11
Riau	80,13	95,33	100,00	63,17	65,34	95,77	84,87	72,64
Sulawesi Barat	81,68	88,26	100,00	55,83	93,83	97,73	72,47	70,48
Jambi	76,91	89,76	100	57,17	59	95,47	80,38	74,67
Bengkulu	79,27	92,39	75,56	63,83	78,52	96,58	79,49	76,22
Nusa Tenggara Barat	79,26	70,26	76,92	68,33	80,15	97,20	85,86	77,34
Maluku	77,60	100,00	100,00	59,83	74,42	93,69	57,29	72,36
Papua	60,10	86,64	20,29	58,33	49,25	97,33	68,33	48,31
Maluku Utara	74,84	100,00	100,00	54,83	52,23	95,69	68,94	75,22
Papua Barat	72,52	82,31	75	50	77,69	94,62	67,83	67,93
Provinsi	79,67	92,50	86,22	65,15	76,61	95,39	77,75	73,46
Pusat	90,12	100,00	100,00				71,76	
Nasional	83,74							

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.6 Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Berdasarkan Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Aspek 3	Indikator 15	Indikator 16	Indikator 17	Indikator 18	Indikator 19	Indikator 20	Indikator 21	Indikator 22
Bali	84,28	82,35	83,94	70,00	85,00	71,38	100,00	84,20	100,00
DKI Jakarta	76,24	36,84	79,52	64,29	92,86	54,57	100,00	80,60	100,00
DI Yogyakarta	83,51	50,00	87,25	75,00	100,00	66,29	100,00	92,00	94,00
Jawa Barat	77,49	69,23	84,11	50,00	53,57	64,77	100,00	90,60	100,00
Kalimantan Timur	83,00	71,43	85,33	77,27	72,73	75,47	100,00	80,00	100,00
Jawa Timur	75,34	38,46	87,48	83,33	11,54	69,59	100,00	87,20	100,00
Kalimantan Barat	75,13	54,55	89,47	6,67	93,33	73,73	100,00	86,40	100,00
Jawa Tengah	76,73	58,33	86,51	87,50	68,06	68,59	100,00	82,20	46,67
Kalimantan Utara	75,48	39,13	89,85	100,00	91,67	80,77	100,00	68,20	18,33
Kalimantan Selatan	76,92	63,64	93,27	53,57	85,71	73,50	100,00	80,60	58,00
Sumatera Utara	76,22	59,09	83,94	45,59	83,82	72,80	100,00	70,20	98,18
Gorontalo	73,43	53,85	80,18	71,43	85,71	79,52	100,00	84,80	16,00
Sulawesi Tengah	76,48	75,00	83,30	89,29	0,00	79,93	100,00	68,40	100,00
Lampung	80,36	73,68	88,93	87,50	59,38	69,91	100,00	81,00	71,11
Sumatera Selatan	70,68	100,00	87,71	36,11	30,56	70,20	100,00	87,00	36,36
Kepulauan Riau	74,25	25,00	84,75	87,50	100,00	74,26	100,00	82,60	22,00
Kalimantan Tengah	73,07	52,94	88,70	93,33	80,00	75,17	100,00	42,20	49,09
Aceh	73,12	40,00	91,23	58,33	89,58	78,53	100,00	86,80	22,67
Nusa Tenggara Timur	66,97	50,00	85,59	84,78	78,26	74,18	57,14	72,00	20,00
Sulawesi Tenggara	70,27	52,94	89,13	61,11	36,11	78,41	100,00	70,20	56,36
Sulawesi Selatan	67,53	73,33	86,72	34,00	54,00	74,30	100,00	86,80	10,91
Sulawesi Utara	72,25	50,00	87,21	71,88	75,00	73,87	100,00	84,00	15,56
Sumatera Barat	74,09	56,25	85,39	87,50	87,50	75,85	100,00	66,80	22,22
Kep. Bangka Belitung	79,83	77,78	91,75	100,00	75,00	71,62	100,00	70,00	42,22
Banten	62,96	57,14	78,95	0,00	22,22	62,52	100,00	74,80	100,00
Riau	66,30	31,82	87,55	30,77	7,69	70,42	100,00	80,80	100,00
Sulawesi Barat	65,72	33,33	87,61	21,43	100,00	78,05	100,00	67,40	32,00
Jambi	80,61	85,71	87,22	83,33	54,17	68,15	100,00	65,60	100,00
Bengkulu	67,91	30,43	88,17	54,55	100,00	72,10	100,00	74,00	9,09
Nusa Tenggara Barat	64,46	15,38	82,48	54,55	59,09	71,92	100,00	79,40	28,33
Maluku	58,31	50,00	85,19	29,17	50,00	78,75	100,00	35,40	31,67
Papua	64,50	90,48	87,82	75,00	91,67	81,31	71,43	22,20	3,08
Maluku Utara	54,47	10,71	87,61	0,00	81,82	80,36	85,71	58,40	20,00
Papua Barat	49,96	24,32	87,57	64,29	92,86	83,31	0,00	34,00	12,73
Provinsi	72,00	53,92	86,51	61,44	69,09	73,36	94,54	72,85	54,02
Pusat	83,48	52,38	99,29	83,33	57,47		100,00	81,40	100,00
Nasional	76,46								

Sumber: Badan Pusat Statistik

Alternatif solusi serta upaya yang dilakukan oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam membantu menjaga stabilitas demokrasi ialah melakukan koordinasi dengan intens kepada K/L terkait dan Pemerintah Provinsi baik secara langsung maupun asistensi terkait pembahasan kesiapan data IDI dalam bentuk konfirmasi, diskonfirmasi, klarifikasi, penambahan data baru terkait indikator IDI guna untuk meningkatkan capaian IDI Tahun 2024 yang akan dilakukan penilaian pada Tahun 2025 termasuk mempersiapkan 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua untuk kepentingan pengukuran IDI Tahun 2025.

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap keberhasilan IDI, Kelompok Kerja (Pokja) pada masing-masing Pemerintah Provinsi baik itu Pemerintah Daerah maupun K/L vertikal yang berada di daerah sudah relatif baik, namun perlu ditingkatkan lagi khususnya pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap masing-masing indikator yang menjadi penilaian sehingga

data yang disajikan pada saat proses pelaksanaan penilaian IDI bisa terverifikasi, tervalidasi serta maksimal untuk meningkatkan capaian IDI pada tahun berikutnya.

Adapun program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian target nilai IDI Tahun 2024:

1. Sehubungan dengan indikator 22 “Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik”, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyediakan Bantuan Partai Politik yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai, masyarakat, serta dapat menjadi dana penunjang kegiatan operasional sekretariat partai politik. Bantuan Partai Politik dimaksud nantinya akan berdampak pada pencapaian nilai IDI khususnya pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Rekapitulasi Jumlah Bantuan Partai Politik Tahun 2023 dan 2024 sebagaimana di bawah ini:

Tabel 3.7 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2023 dan 2024

No.	Nama Partai Politik	2023	2024	Total
1	PDI-Perjuangan	27.053.961.000	26.636.639.000	53.690.600.000
2	Partai Gerindra	17.594.839.000	18.213.965.500	35.808.804.500
3	Partai Golkar	17.229.789.000	18.724.463.750	35.954.252.750
4	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097.000	14.206.412.250	27.776.509.250
5	Partai Nasdem	12.661.792.000	13.161.426.000	25.823.218.000
6	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663.000	11.815.557.500	23.309.220.500
7	Partai Demokrat	10.876.507.000	10.978.143.500	
8	Partai Amanat Nasional	9.572.623.000	9.925.627.000	19.498.250.000
9	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147.000		
<b>Total</b>		<b>126.376.418.000</b>	<b>128.404.594.750</b>	<b>254.781.012.750</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, data diolah

Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 dilakukan dengan 2 tahap, dimana pencairan tahap pertama sebesar Rp.94.782.313.500,- diberikan kepada 9 partai politik yang mendapat kursi di DPR RI hasil pemilu

tahun 2019, dan Pencairan tahap kedua sebesar Rp.33.622.281.250,- diberikan kepada 8 partai politik yang mendapat kursi di DPR RI hasil pemilu tahun 2024 dengan rincian:

Tabel 3.8 Pencairan Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 dalam dua tahapan

No.	Nama Partai Politik	Jumlah dana Bantuan	
		Tahap I	Tahap II
1	PDI-Perjuangan	20.290.470.750	6.346.168.250
2	Partai Gerindra	13.196.129.250	5.017.836.250
3	Partai Golkar	12.922.341.750	5.802.122.000
4	Partai Kebangkitan Bangsa	10.177.572.750	4.028.839.500
5	Partai Nasdem	9.496.344.000	3.665.082.000
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.620.247.250	3.195.310.250
7	Partai Demokrat	8.157.380.250	2.820.763.250
8	Partai Amanat Nasional	7.179.467.250	2.746.159.750
9	Partai Persatuan Pembangunan	4.742.360.250	
<b>Total</b>		<b>94.782.313.500</b>	<b>33.622.281.250</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, data diolah

- Kegiatan Asistensi Pokja IDI Penguatan Kelembagaan Demokrasi di Daerah yang dilaksanakan di Hotel Golden Boutique Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024.



- Kegiatan Rapat fasilitasi verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik tahap II tahun 2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 di Aone Hotel Jakarta.



4. Kegiatan Rapat Konsolidasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2024 di Bogor.



- b. Webinar pada tanggal 28 Maret 2024 dengan jumlah peserta 357 orang.
- c. Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 27 Mei 2024 dengan jumlah peserta 100 orang.



5. Kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagaan Demokrasi di Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 di Hotel Orchardz Jakarta.



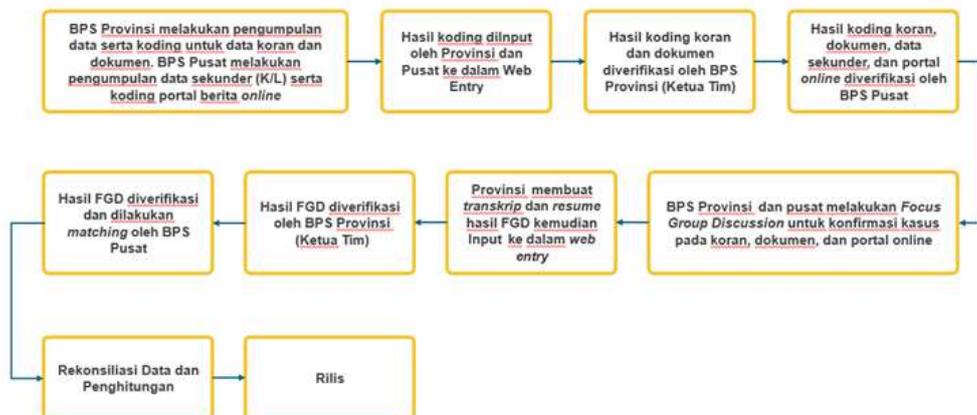
- 7. Kegiatan Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Perempuan yang dilaksanakan di:
  - a. Kota Yogyakarta, D.I.Y pada tanggal 6 Februari 2024 dengan jumlah peserta 100 orang.
  - b. Webinar pada tanggal 3 April 2024 dengan jumlah peserta 314 orang.
  - c. Kota Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 7 Mei 2024 dengan jumlah peserta 500 orang.



6. Kegiatan Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Pemuda yang dilaksanakan di:
 

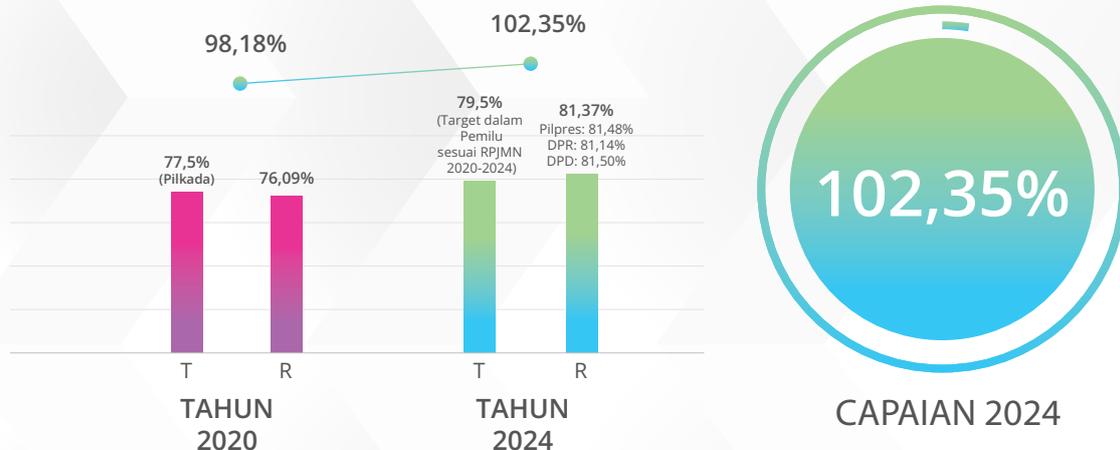
- a. Kota Malang, Jawa Timur pada Tanggal 25 Januari 2024 dengan jumlah peserta 100 orang.

Gambar 3.1 Alur Pengukuran IDI





## Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu



Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu merupakan indikator penting dari kualitas demokrasi. Upaya bersama antara pemerintah, lembaga pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil diperlukan untuk terus meningkatkan partisipasi dan memastikan bahwa suara rakyat terwakili dengan baik dalam proses demokrasi.

T = Target R = Realisasi

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum (Pemilu). Partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik, kepercayaan terhadap sistem demokrasi, dan kepedulian warga terhadap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada digunakan untuk mengukur seberapa besar keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi melalui pemilihan perwakilan mereka di pemerintahan. Data tingkat partisipasi pemilih ini penting untuk:

1. Mengukur Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu  
Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa memiliki kepentingan dalam proses politik dan percaya pada sistem pemilihan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah bisa mengindikasikan adanya masalah dalam sosialisasi, kepercayaan publik terhadap kandidat atau partai politik, atau bahkan masalah teknis dalam pelaksanaan pemilu.

2. Mengevaluasi Efektivitas Program Sosialisasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan pihak terkait sering melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Data tingkat partisipasi membantu mengevaluasi apakah program-program tersebut efektif atau perlu perbaikan.
3. Memahami Perilaku Pemilih  
Analisis data partisipasi, dikombinasikan dengan data demografi dan faktor lainnya, dapat membantu memahami perilaku pemilih, seperti mengapa kelompok masyarakat tertentu lebih aktif berpartisipasi daripada yang lain.
4. Sebagai Indikator Kesehatan Demokrasi  
Partisipasi yang tinggi secara umum dianggap sebagai indikator positif bagi kesehatan demokrasi suatu negara. Ini menunjukkan bahwa warga negara aktif terlibat dalam menentukan arah pemerintahan.
5. Perencanaan dan Kebijakan  
Data partisipasi dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu diperoleh dari hasil rekapitulasi partisipasi pemilih oleh penyelenggara pemilu, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan KPU RI Nomor 1043 Tahun 2024 Tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada

Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 tanggal 27 Juli 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2023 dan 2024

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persentase
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	81,48%
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan DPR	81,14%
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan DPD	81,50%
Rata-rata	81,37%

Sumber: KPU RI, data diolah

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 sebesar 81,37% menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih relatif tinggi karena melebihi target RPJMN 2020-2024 yang ditargetkan sebesar 79,5%, atau tercapai sebesar 102,35%. Adapun keberhasilan tingkat partisipasi yang tinggi didorong oleh:

1. Legitimasi yang Kuat  
Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat secara luas menerima dan mendukung proses demokrasi. Hasil pemilu atau pilkada dengan partisipasi tinggi memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata publik.
2. Keterlibatan Aktif Warga Negara  
Partisipasi yang tinggi mencerminkan bahwa warga negara merasa memiliki tanggung jawab dan peran dalam menentukan arah pemerintahan. Hal ini menunjukkan kesadaran politik yang baik dan keinginan untuk berkontribusi pada pembangunan.
3. Representasi yang Lebih Baik  
Semakin banyak pemilih yang berpartisipasi, semakin representatif pula hasil pemilu atau pilkada terhadap kehendak rakyat secara keseluruhan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara semua lapisan masyarakat didengar.
4. Kepercayaan pada Sistem Demokrasi  
Partisipasi yang tinggi dapat diartikan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya.
5. Pengawasan yang Lebih Efektif  
Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat secara tidak langsung turut mengawas jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat.

Secara umum, capaian tahun 2024 sebesar 81,37% apabila dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019, mengalami sedikit penurunan. Pada Pemilu Tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 81,97%, Pemilihan DPR 81,69% dan Pemilihan DPD 82,52%. Walaupun terjadi sedikit penurunan, namun penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dinilai lebih baik, karena relatif lebih aman dan terkendali dibandingkan Pemilu Tahun 2019, di mana pada saat pengumuman hasil, terjadi gejolak di masyarakat yang menimbulkan korban jiwa dan mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan. Pemilu 2024 juga bisa meminimalisir peristiwa meninggalnya ratusan korban jiwa petugas KPPS yang terjadi di pemilu Tahun 2019 sehingga tidak terulang kembali.

Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian target Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu Tahun 2024, yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Demokrasi Bagi Tokoh Masyarakat dilaksanakan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang dengan Narasumber dan Unsur Pemerintah dan Akademisi.
2. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Mahasiswa melalui Forum Demokrasi dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang dengan Narasumber dari Akademisi sebanyak 4 (empat) orang di berbagai Universitas di wilayah Jawa Barat.
3. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Mahasiswa melalui Forum Demokrasi

dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang dengan Narasumber dari Unsur Pemerintah, dan Akademisi Universitas di Wilayah Nusa Tenggara Barat.

4. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Daerah Partisipasi Rendah dilaksanakan di Hotel Orchardz Jayakarta, Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah sebanyak 100 (seratus) orang dengan Narasumber dari Unsur Pemerintah, Penggiat Kepemiluan dan Perwakilan dari DPR RI.
5. Kegiatan Pengembangan Literasi Politik Bagi Masyarakat dengan target sebesar 1.000 orang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Forum pengembangan literasi politik bagi Pemuda diselenggarakan di Kota Malang (Jawa Timur) pada tanggal 25 Januari 2024 dengan peserta sebanyak 100 orang, Kota Bogor (Jawa Barat) pada tanggal 27 Mei 2024 dengan peserta sebanyak 100 orang, dan Webinar pada tanggal 28 Maret 2024 dengan peserta sebanyak 361 orang.
  - b. Forum pengembangan literasi politik bagi Perempuan diselenggarakan di Kota Yoga

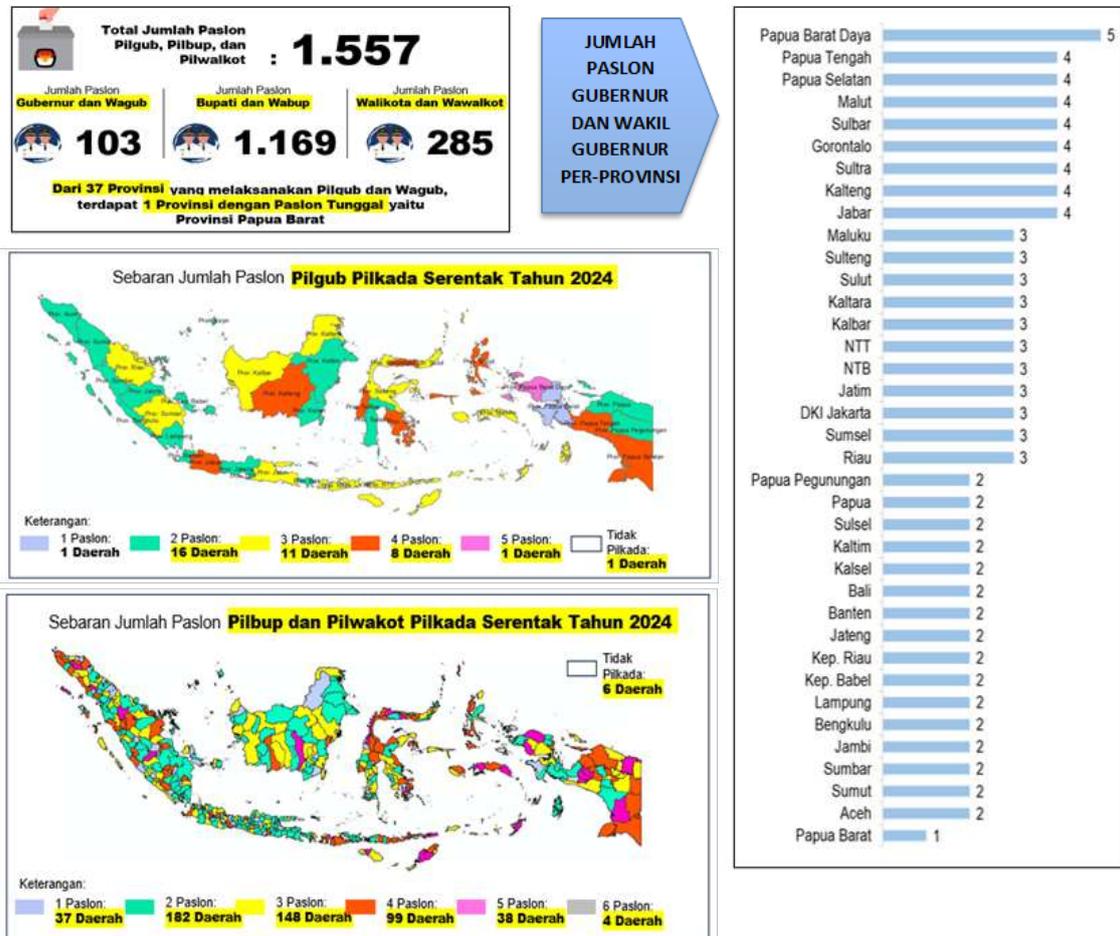
(D.I Yogyakarta) pada tanggal 26 Maret 2024 dengan peserta sebanyak 100 orang, Kota Semarang (Jawa Tengah) pada tanggal 7 Mei 2024 dengan peserta sebanyak 100 orang. Dan Webinar pada tanggal 3 April 2024 dengan peserta sebanyak 318 peserta.

Situasi dan kondisi stabilitas nasional pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024 berjalan dengan kondusif namun di beberapa daerah khususnya di wilayah Papua sampai sejauh ini masih terus bergejolak. Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi Pilkada serentak:

1. Peserta Pemilihan Serentak

Pemilihan serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada 545 (lima ratus empat puluh lima) daerah dengan rincian 37 (tiga puluh tujuh) provinsi, 415 (empat ratus lima belas) kabupaten, dan 93 (sembilan puluh tiga) kota. Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) daerah yang pemilihannya hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, terdiri dari 1 provinsi, 31 kabupaten dan 5 kota.

Gambar 3.2 Peserta Pemilihan Serentak



2. Pemungutan dan Rekapitulasi Suara  
 Pasca pelaksanaan pemungutan suara sejumlah TPS harus dilakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 247 TPS, Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 102 TPS, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 249 TPS dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di 4 TPS, dan semua telah selesai dilaksanakan. Sementara untuk proses rekapitulasi, berdasarkan data Rilis KPU pada Kamis 12 Desember 2024, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekap tingkat kecamatan sudah 98,72%, rekap tingkat kab/kota yang sudah 98,23% dan rekap tingkat provinsi yang sudah menyelesaikan dan mengumumkan 91,8 %.

Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk tingkat kecamatan yang sudah 98,53%, sedangkan untuk rekap tingkat kab/kota yang sudah menyelesaikan rekap dan mengumumkan 98,23%. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang belum selesai, ada 9 kab/kota; tersebar di Kota Jayapura (Papua), Puncak Jaya, Paniai, Puncak dan Intan Jaya (Papua Tengah), Jayawijaya, Tolikara dan Lany Jaya (Papua Pegunungan), Maybrat (Papua Barat Daya) yang belum menyelesaikan Hasilnya.

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2024 berdasarkan Data KPU pada tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam berikut:

Gambar 3.3 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada



Rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, menurut para ahli disebabkan oleh:

- Konteks politik, ketidaksesuaian antara kandidat calon kepala daerah yang diusung partai politik dengan aspirasi publik dinilai menyebabkan pemilih enggan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024.
- Jarak antara penyelenggaraan pemilihan presiden 8 dan anggota legislatif yang terlalu dekat dengan pilkada menyebabkan masyarakat mengalami kejenuhan politik, waktu persiapan penyelenggaraan

tahapan pilkada yang relatif singkat, serta terbatasnya waktu kampanye.

- Aspek aksesibilitas pemilih menjangkau TPS juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat partisipasi, cuaca buruk dan bencana alam di beberapa daerah sebagai faktor penghambat masyarakat untuk menggunakan hak suaranya.

Rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilu, namun juga menyentuh aspek politik dan kelembagaan yang lebih mendalam.

3. Data kecelakaan Kerja Badan AdHoc sampai dengan 10 Desember 2024, terdapat 28 petugas yang meninggal dunia, terdiri dari 4 petugas PPS, 14 KPPS dan 10 anggota Linmas. Angka ini turun banyak dari Pilkada sebelumnya Tahun 2020, sebagaimana tabel di bawah:

Gambar 3.4 Data Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc



4. Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024  
 Pilkada Serentak Tahun 2024 mengabdikan anggaran sebanyak 42,56 Trilyun, yang terdiri dari 28, 71 Trilyun anggaran KPU, 8,80 Trilyun anggaran Bawaslu, 3,38 Trilyun anggaran Pengamanan Polri dan 1,22 Trilyun anggaran Pengamanan TNI. Anggaran tersebut belum termasuk unsur pendukung lainnya.

Gambar 3.5 Realisasi Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024



## 5. Sengketa Hasil

Berdasarkan Surat MK Nomor 76/AP.03.05/01/2025 hal Penyampaian Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 tanggal 6 Januari 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024

NO	KATEGORI	PILKADA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tidak ada gugatan di MK	Gubernur	21	Gubernur terpilih berjumlah 21 + 1 Gubernur Prov. D.I. Yogyakarta = Gubernur
		Bupati	225	
		Walikota	50	
		Total	296	
2	Ada gugatan di MK	Gubernur	16	Dari Total 23 Gugatan yang masuk ke MK
		Bupati	190	Dari Total 239 Gugatan yang masuk ke MK
		Walikota	43	Dari Total 48 Gugatan yang masuk ke MK
		Total	249	

## 6. Pilkada Ulang

Pilkada di dua daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong yakni Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan dilaksanakan pilkada ulang pada tahun 2025. KPU telah menentukan tanggal pemungutan suara pilkada ulang pada Rabu, 27 Agustus 2025 dan KPU telah menyiapkan rancangan PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Ulang tahun 2025. Dalam rancangan PKPU tahapan pilkada ulang sudah dimulai pada Januari 2025 bagi daerah dimenangkan oleh kolom kosong.

Tabel 3.11 Data Pilkada Ulang pada Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka

No	Daerah	Perolehan Persentase Suara
1	Kota Pangkalpinang	Paslon Petahana Maulan – Masagus 35.177 suara (42,02%) Kotak Kosong 48.528 suara (57,98%)
2	Kabupaten Bangka	Paslon Petahana Mulkan – Mahardian 50.433 suara (42,75%) Kotak Kosong 67.546 suara (57,25%)

### Catatan:

Berdasarkan hasil Raker dan RDP Komisi II DPR RI, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu pada Rabu, 4 Desember 2024 yang secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dimenangkan oleh kotak kosong pemungutan suara Pilkada ulang diselenggarakan kembali pada rahun berikutnya, yaitu pada Rabu 27 Agustus 2025.

Peran Kemendagri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, yaitu:

1. Penyiapan Regulasi sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
  - a. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (ditetapkan tanggal 12 Desember 2022) sebagai dampak terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang kemudian Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (ditetapkan tanggal 4 Mei 2023).
  - b. Mengawal penyusunan PKPU, Perbawaslu dan Peraturan DKPP.
  - c. Penyiapan regulasi tentang Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2024).
2. Menerbitkan Surat Edaran dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.  
Kemendagri telah menerbitkan 14 Surat

Edaran yang mengamanatkan kepada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membantu penyelenggara Pemilu dan Pilkada di daerah, diantaranya:

- b. Surat Mendagri Nomor 200.1.1/e-80/Polpum Tanggal 25 Januari 2024 tentang Bantuan Fasilitas Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya dan Provinsi Papua.
- c. Surat Edaran Mendagri No. 100.2.7/2944/SJ Tentang Penjelasan Terkait Persiapan Dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 (Tanggal 5 Juni 2023).
- d. Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.10/3604/SJ Tanggal 19 Juli 2023 Tentang Sosialisasi Logo, Maskot, Jingle, dan Tema Pemilu Tahun 2024 di Daerah;
- e. Surat Edaran Mendagri NO.100.2.4.3/4378/SJ Tentang Penegasan Dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 (Tanggal 6 September 2024)
- f. Telah diterbitkan antara lain SE Mendagri No 900.1.9/8968/SJ tanggal 23 Desember 2022 tentang Dukungan Fasilitas Kantor Sekretariat KPU Provinsi dan Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi DOB dan SE Mendagri No.900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 tentang Dukungan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024
- g. Surat Edaran Mendagri Nomor 200.2.1/807/SJ tanggal 13 Februari 2024 tentang Pemenuhan Jumlah Satlinmas sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.



- Mendorong pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan Anggaran Pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif berasal dari APBN. Kemendagri memfasilitasi sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah kepada KPU RI dan Bawaslu;

Gambar 3.6 Alokasi DIPA pada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk Pemilu

No	Tahun	Usulan (Rp)	Alokasi DIPA	
			Jumlah (Rp)	%
1	2022	8.061.085.734.000	3.516.283.014.000	43,62
2	2023	23.857.317.226.000	20.256.596.163.000	84,91
3	2024	44.737.909.334.000	27.424.534.744.000	61,30
<b>Total</b>		<b>76.656.312.294.000</b>	<b>51.197.413.921.000</b>	<b>66,79</b>

No	TA	Usulan (Rp)	Alokasi DIPA	
			Jumlah (Rp)	%
1.	2022	2.033.278.184.000	1.378.447.175.000	67,7
2.	2023	10.764.157.456.000	8.331.249.263.000	77,3
3.	2024	10.216.061.756.000	9.742.682.946.000	95,3
<b>Total</b>		<b>23.013.497.396.000</b>	<b>19.452.379.384.000</b>	<b>84,5</b>

No	Tahun	Usulan (Rp)	Alokasi DIPA	
			Jumlah (Rp)	%
1	2022	108.245.525.000	18.480.629.000	17,07
2	2023	62.818.471.000	26.100.000.000	41,55
3	2024	116.406.528.000	67.532.578.000	58,01
<b>Total</b>		<b>287.470.524.000</b>	<b>112.113.207.000</b>	<b>39,00</b>

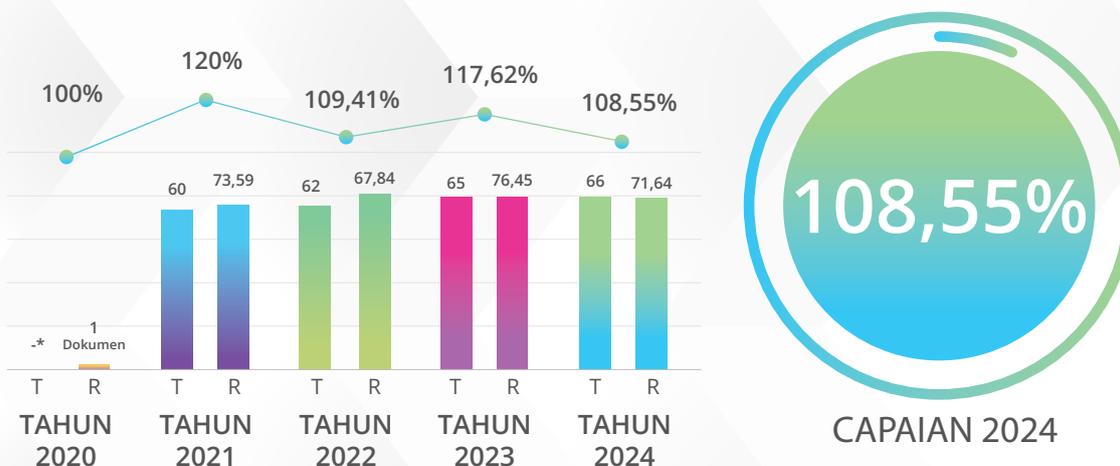
- Mendorong pemerintah daerah untuk menjaga Netralitas ASN Melalui sosialisasi SEB Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (ditetapkan tanggal 22 September 2022).

Gambar 3.7 Rakor Netralitas ASN dan SEB Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan



Secara umum tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, namun untuk ke depannya diperlukan program peningkatan partisipasi perlu dilakukan secara kolaboratif dan sinergi antar pemerintah, penyelenggara pemilu (KPU, bawaslu dan DKPP), partai politik serta organisasi kemasyarakatan, termasuk alternatif metode pelaksanaan program kegiatan yang lebih kekinian untuk menjangkau target audiens yang lebih banyak.

## Indeks Kinerja Ormas



Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebesar 71,64 menggambarkan bahwa kinerja ormas berada dalam kategori baik. Nilai ini mencerminkan ormas sudah berkontribusi dengan baik dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat

T = Target R = Realisasi

Indeks kinerja ormas menggambarkan tingkat efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memberikan gambaran objektif tentang bagaimana sebuah ormas menjalankan fungsinya, mencapai tujuannya, dan memberikan manfaat kepada masyarakat atau komunitas yang dilayani.

Dalam pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2024 menggunakan 3 dimensi, yaitu dimensi kerawanan, dimensi kelembagaan, dan dimensi partisipasi, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.12 Dimensi, Variabel dan Indikator pada Indeks Kinerja Ormas

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Kerawanan	Rekrutmen Pejabat Publik	Pejabat Publik
		Izin Tertulis dan bermaterai
	Nirsengketa	Sengketa
	Atribusi	Atribut Ormas
		Izin Atribut
	Nirvandalisme dan anarkisme	Unras
		Vandalisme Unras
		Anarkis
	Nirkonflik	Konflik
		Konflik 2
Nonpartisan	Sanksi Administratif	
Non Partisan	Afiliasi Parpol	
	Nama Parpol	

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	
Partisipasi	Pelibatan masyarakat	Peran	
		Evaluasi Program	
Kelembagaan	Media	Media Informasi	
		Jenis Media Informasi	
	Legalitas	Kesekretariatan	
		Alamat 2	
		Legalitas	
	Organisasi	Kantor	
		Kantor 2	
		SOTK	
		Pekerja	
		Pekerja 2	
		Status Hukum	
		Jenis Waktu Pekerjaan	
		Jenis Keanggotaan	
		KTA	
		Pendanaan	Iuran
			Besaran Iuran
			Hasil Usaha
	Contoh Hasil Usaha		
	Badan Usaha		
	Terima sumbangan/bantuan/donasi		
	Besaran sumbangan/bantuan/donasi		
	Profiling sumbangan sumbangan/ bantuan/donasi		
	Mengikuti Kemauan Donatur		
	LPJ		
	Pengawasan	Rekening Bank Nasional	
		Mekanisme Internal	
		Contoh kasus	
		Mekanisme Eksternal	
	Program	Contoh Kasus	
		Program Kerja	
		Waktu Program Kerja	
		Dasar Program Kerja	
Pelaksanaan Program Kerja			

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Indeks ini tetap menggunakan metode yang sama seperti pada Indeks Kinerja Ormas Tahun 2023. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan wilayah mana saja yang akan dijadikan basis penelitian. Peneliti dan Tim Kemendagri menyepakati 3 (tiga) wilayah yang menjadi basis penelitian yaitu Provinsi Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Terpilihnya ketiga wilayah ini tentu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Pembiayaan yang hanya mencukupi untuk ketiga wilayah tersebut.
2. Pemilihan wilayah tersebut dapat dianggap sebagai reflektif untuk banyak hal. Seperti soal tingkat pengetahuan para ormas tentang tata kelola. Tingkat pendidikan para ormas serta anggota didasari peluang dan kesempatan memperoleh informasi lebih mudah ketimbang wilayah lain.

Klaim bahwa pemilihan ketiga wilayah itu sebagai representasi sebaran ormas di seluruh Indonesia tentu saja tidak bisa. Jika menggunakan diksi ini maka teknik yang dipilih haruslah metode sampling,

bukan sensus. Sebaliknya jika menggunakan metode sampling maka Kemendagri tidak bisa mengaudit kinerja ormas itu secara menyeluruh. Soalnya, cita-cita pembuatan indeks ini sebagai salah satu alat untuk pemetaan kondisi ormas. Banyaknya jumlah ormas di ketiga provinsi tersebut, maka dilakukan Stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa strata atau kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Setelah populasi dibagi, sampel acak diambil dari setiap strata. Tujuan utama dari metode ini adalah memastikan bahwa setiap subkelompok dari populasi diwakili dalam sampel, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Dari hasil Stratified random sampling ditemukan Populasi Ormas terbagi menjadi Ormas Badan Hukum dan Ormas Tidak Badan Hukum (Ber-SKT), Sehingga dari masing-masing kelompok dilakukan pengukuran Indeks kinerja Ormas. Adapun data jumlah ormas sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Data Jumlah Organisasi Masyarakat

Organisasi Masyarakat	Jumlah
<b>SKT (Kementerian Dalam Negeri)</b>	<b>996</b>
1. Provinsi Aceh	95
2. Provinsi Kepulauan Riau	5
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7
4. Provinsi Bengkulu	3
5. Provinsi Lampung	7
6. Provinsi Jambi	16
7. Provinsi Sumatera Utara	26
8. Provinsi Sumatera Selatan	23
9. Provinsi Sumatera Barat	1
10. Provinsi Riau	1
11. Provinsi Banten	11
12. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	91
13. Provinsi Jawa Barat	19
14. Provinsi Jawa Tengah	3
15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	6
16. Provinsi Jawa Timur	9
17. Provinsi Sulawesi Barat	19
18. Provinsi Gorontalo	0
19. Provinsi Sulawesi Tengah	10
20. Provinsi Sulawesi Utara	2

Organisasi Masyarakat	Jumlah
21. Provinsi Sulawesi Tenggara	51
22. Provinsi Sulawesi Selatan	157
23. Provinsi Bali	1
24. Provinsi Nusa Tenggara Barat	89
25. Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
26. Provinsi Maluku	56
27. Provinsi Maluku Utara	55
28. Provinsi Kalimantan Barat	57
29. Provinsi Kalimantan Selatan	40
30. Provinsi Kalimantan Tengah	13
31. Provinsi Kalimantan Timur	85
32. Provinsi Kalimantan Utara	26
33. Provinsi Papua	5
34. Provinsi Papua Barat	0
35. Provinsi Papua Tengah	5
36. Provinsi Papua Selatan	0
37. Provinsi Papua Pegunungan	0
38. Provinsi Papua Barat Daya	0
<b>Ormas Asing (Kementerian Luar Negeri)</b>	<b>46</b>
<b>Badan Hukum (Kementerian Hukum)</b>	<b>601.913</b>
1. Perkumpulan	234.856
2. Yayasan	367.057
<b>Total</b>	<b>602.955</b>

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2020 Sampai 2024 telah dilakukan pengawasan Ekstrenal terhadap ormas. Secara umum aktivitas Ormas berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kurun waktu dimaksud tidak ada penjatuhan hukuman disiplin terhadap ormas baik teguran tertulis maupun pencabutan SKT ataupun badan hukum. Adapun yang menonjol yaitu kasus Al-zaytun yang berada di bawah naungan ormas yayasan pendidikan islam. Namun setelah dilakukan koordinasi tingkat

kementerian lembaga tidak memungkinkan pemberian sanksi mengingat terdapat ribuan siswa dan ratusan tenaga pendidik di dalamnya yang apabila badan hukumnya dicabut akan mengancam keberlangsungan hak asasi anak atas pendidikan. Sehingga langkah strategis yang di ambil adalah melakukan intervensi melalui kementerian agama. Sementara pimpinan al-Zaytun secara individu dituntut pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Sesuai dengan Pelanggaranya).

Adapun Formula perhitungan dan kategorisasi nilai yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **% Indikator** =  $\frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%$
- **% Variabel** =  $\frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Variabel}} \times 100\%$
- **% Dimensi** =  $\frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Dimensi}} \times 100\%$

Tabel 3.14 Kategorisasi Nilai Indeks Kinerja Ormas

Kategorisasi	Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
Rentang Nilai	00 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 79	80 - 100

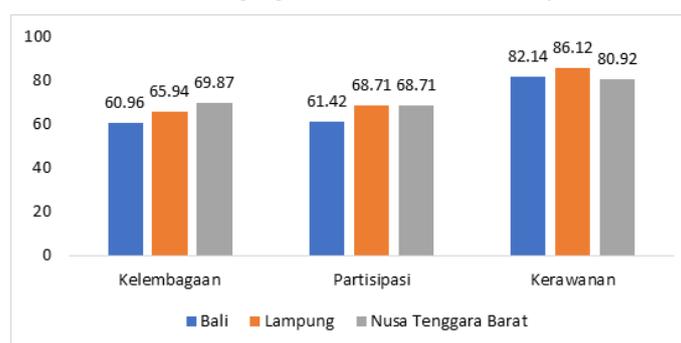
Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Dari pemetaan 3 (tiga) Provinsi yang diukur didapatkan nilai Indeks Kinerja Ormas sebesar 71,64 kategori "Baik" dari target sebesar nilai 66 atau tercapai sebesar 108,55%. Hasil pemetaan Tahun 2024 secara agregat provinsi yaitu Bali, Lampung dan NTB dari 0-100 untuk ketiga dimensi yang diukur adalah Dimensi Kelembagaan (65,59), Dimensi Partisipasi (66,28) dan Dimensi Kerawanan (83,06). Hasil ini menunjukkan bahwa dari kedua dimensi yakni Dimensi Kelembagaan dan Dimensi Partisipasi pada Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Indonesia masih perlu perbaikan secara berkelanjutan.

Nilai Indeks Kinerja Ormas secara Nasional Tahun 2024 sebesar 71,64 merupakan akumulasi dari:

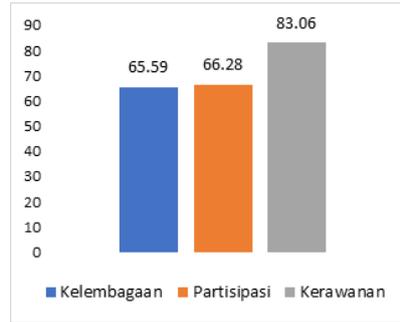
1. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Bali sebesar 68,17, yang terdiri dari:
  - a. Dimensi Kelembagaan 60,96
  - b. Dimensi Partisipasi 61,42
  - c. Dimensi Kerawanan 82,14
2. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Lampung sebesar 73,59, yang terdiri dari:
  - a. Dimensi Kelembagaan 65,94
  - b. Dimensi Partisipasi 68,71
  - c. Dimensi Kerawanan 86,12
3. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 73,17, yang terdiri dari:
  - a. Dimensi Kelembagaan 69,87
  - b. Dimensi Partisipasi 68,71
  - c. Dimensi Kerawanan 80,92

Grafik 3.7 Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas



Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Grafik 3.8 Nilai Ormas per Dimensi



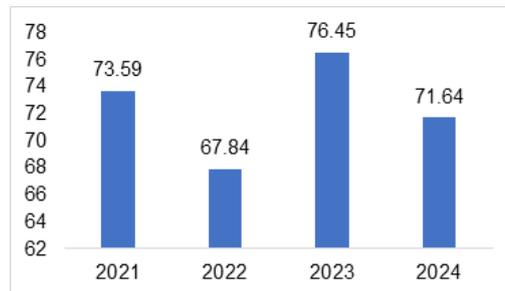
Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Nilai kumulatif dari beberapa daerah terpilih ini yang menjadi nilai Indeks Kinerja Ormas dari tahun ke tahun, hal ini juga menjelaskan tren nilai yang fluktuatif dari tahun ke tahun karena daerah yang menjadi fokus pengukuran berbeda setiap tahunnya.

Nilai Indeks Kinerja Ormas dari Tahun 2021 s.d. 2024 mengalami tren yang fluktuatif, hal ini disebabkan adanya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap nilai pengukuran yakni merebaknya covid-19 pada akhir tahun 2019.

Selama Kurun waktu 3 (tiga) Tahun Organisasi Kemasyarakatan tidak dapat melaksanakan program secara maksimal karena adanya pembatasan-pembatasan pada sektor Non Esensial, Ormas kesulitan dalam memperoleh anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat dari merosotnya sektor perekonomian. Pada sisi yang lain pembatasan gerak masyarakat berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakan program sebagai akibat dari pembatasan gerak masyarakat.

Grafik 3.9 Indeks Kinerja Ormas Tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Pada Pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2024 masih didapatkan permasalahan, diantaranya kantor sekretariat yang didaftarkan tidak sesuai dengan yang dilapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendagri dan pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Ormas agar melaporkan keberadaan dan perubahan Alamat/sekretariat kepada pemerintah daerah setempat.

Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian target nilai Indeks Kinerja Ormas Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Pendampingan Operasional Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan bagi Organisasi

Kemasyarakatan di Semarang, Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 dengan total keseluruhan 300 Peserta dengan maksud untuk mempermudah akses informasi bidang keormasan bagi Pemerintah daerah, dan kesediaan data ormas yang komprehensif bagi Kementerian Dalam Negeri selaku Koordinator Nasional Pengawasan ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum di Indonesia.

2. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan secara daring di di Lantai 5 Gedung f Kementerian Dalam Negeri dengan total keseluruhan 38 Provinsi seluruh Indonesia dengan maksud

peningkatan Pelayanan Pendaftaran bagi Aparatur Kesbangpol seluruh Indonesia.

3. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Penguatan Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan total keseluruhan 200 Peserta dengan maksud untuk meningkatkan komitmen dan kemampuan teknis pelaksanaan fungsi pelayanan pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan partisipasi Ormas yang bermitra dengan Pemerintah melalui kegiatan
  - a. Peningkatan Kapasitas Ormas dengan bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (LEMHANNAS) dengan dilaksanakan secara daring dan luring di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan total keseluruhan 300 Peserta.

Hadirnya seluruh elemen bangsa yang ikut berperan dalam kemajuan pembangunan nasional, termasuk eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia

memiliki beberapa nilai yang bersifat sistematis, nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional terkandung asas-asas maupun norma-norma yang sedikit banyak memiliki sifat yang mutlak, yang memiliki sebuah pengertian bahwa nilai yang terkandung di dalamnya mengandung absolute truth yang tidak dipertanyakan kembali.

Fungsi ormas (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan) yaitu berpartisipasi dan memelihara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itulah dinilai penting Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan ini dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa pada pengurus ormas di daerah dengan harapan melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan kepedulian terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang sesuai jati diri bangsa Indonesia.

Manfaat pada kegiatan ini adalah pengurus Ormas baik ormas nasional maupun ormas di daerah, aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta stakeholder terkait, untuk itulah dianggap penting menyelenggarakan Kursus Singkat Bagi Ormas Dalam Rangka Penguatan Dalam Rangka Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan melalui Kerjasama Lemhannas R.I (LEMHANNAS RI).



- b. Kemitraan bersama Ormas di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh 75 Peserta.

Ormas berperan sebagai katalisator, yakni sebagai perantara antara Pemerintah dengan masyarakat dalam rangka terjalinnya suatu hubungan yang bersinergi dan harmonis di dalam membangun daerah. Demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dalam berbagai bidang. Sehingga perlu menyatukan dan menyelaraskan gerak serta langkah bersama, Pemerintah dan seluruh masyarakat dalam komponen masyarakat, demi keberhasilan pembangunan tersebut.

Ormas dalam hal ini juga hadir sebagai salah satu elemen bangsa yang ikut berperan dalam kemajuan pembangunan nasional, eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masih minimnya kemandirian di organisasi terutama bagi organisasi kemasyarakatan yang belum kuat memerlukan dukungan dalam hal arahan dari Pemerintah dalam mengembangkan program organisasinya, sehingga keberadaan ormas dapat berlangsung dengan penguatan di sumber daya manusia dan perekonomian.

Sehingga dianggap perlu Pemerintah melakukan sinergi dengan organisasi kemasyarakatan di daerah dengan harapan setiap pengurus ormas mendapatkan pencerahan tentang pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi. Dengan meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan ormas dapat tumbuh, berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel dan profesional.

- c. Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Bidang Keormasan di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi DKI Jakarta dengan total 125 Peserta.

Sebagai pembina ormas, Kementerian Dalam Negeri RI dalam hal ini perlu melakukan pembenahan diberbagai sisi pelayanan untuk ormas seperti pelayanan sistem informasi, pemberdayaan dan kemitraan ormas, penanganan sengketa ormas, pembinaan ormas dan ormas asing di daerah.

Dibutuhkannya langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah yang membidangi organisasi kemasyarakatan, dengan menghimpun informasi, koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah terkait hambatan dan tantangan di bidang ormas maka diharapkan solusi dan inovasi segera terbentuk, maka dianggap penting penyelenggaraan forum tersebut agar dapat saling memberikan atau bertukar informasi, data, masalah, hambatan dan tantangan termasuk digitalisasi sehingga pemetaan permasalahan dapat diketahui dan diharapkan melahirkan ide saran dan gagasan sekaligus solusi.

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah pengurus ormas tingkat nasional dan daerah, aparaturnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selaku pembina ormas yang melaksanakan urusan sabsolut, pemerintahan umum, dan konkuren, serta stakeholder terkait yang membidangi organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi informasi dan data di daerah terkait tugas fungsi organisasi kemasyarakatan.

5. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Pencegahan Konflik Organisasi Kemasyarakatan Dalam Rangka Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kota Bandung dengan mengundang 100 kelompok ormas yang berada di Tahun wilayah Bandung dengan Tujuan agar membangun komunikasi efektif antara pemerintah daerah, ormas dan pemerintah pusat untuk melakukan pendataan, pencegahan dan mitigasi konflik ormas menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
6. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Mitigasi Pencegahan Sengketa Ormas di Balai Kota DKI Jakarta dengan mengundang 100 kelompok ormas yang berada di wilayah DKI Jakarta dengan tujuan agar membangun komunikasi

efektif antara pemerintah daerah, ormas dan pemerintah pusat untuk melakukan pendataan, pencegahan dan mitigasi konflik ormas.

7. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Mitigasi Pencegahan Sengketa dan Konflik Ormas di Kopi Tarik Edwin Juanda dengan mengundang Kementerian/Lembaga dengan tujuan untuk berkoordinasi dan menjagajejaringantarKementerian/Lembaga.
8. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas pada tanggal 30 April 2024 secara Daring/Online dengan mengundang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 38 Provinsi di Indonesia.
9. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Ormas 14 Juni 2024 di Malacca Toast Juanda dengan peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
10. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024 9 Oktober 2024 Sunyi Coffe, Jakarta Selatan, dengan Peserta yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
11. Menyelenggarakan pertemuan terkait pengawasan serta kemitraan terkait Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri dan Tim Perizinan Ormas Asing serta Ormas Lokal yang dilaksanakan pada:
  - a. Rapat Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh WNA di Daerah Dalam Rangka Menghadapi Pemilu 2024. (Pada 13 Feb 2024 Di Kantor Bakesbangpol Sulteng)
  - b. Rapat Pengawasan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh WNA/Lembaga Asing Dalam Rangka Persiapan





# SASARAN 2

## Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila digali dari akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa mencakup kebutuhan dasar dan hak-hak asasi manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup serta menjadi tuntunan perilaku seluruh warga negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam implementasinya, nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dengan serius dan konsisten oleh seluruh komponen bangsa, baik pihak eksekutif, yudikatif dan legislatif serta elemen masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa nilai-nilai Pancasila, setiap masyarakat tidak memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, baik dari suku, ras, maupun agama, tanpa adanya gerakan pembangunan karakter bangsa sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila, akan memungkinkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah keberagaman masyarakat.

Revolusi mental merupakan gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Revolusi mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam Pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan RI Tahun 1957.

Semangat revolusi mental tersebut diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

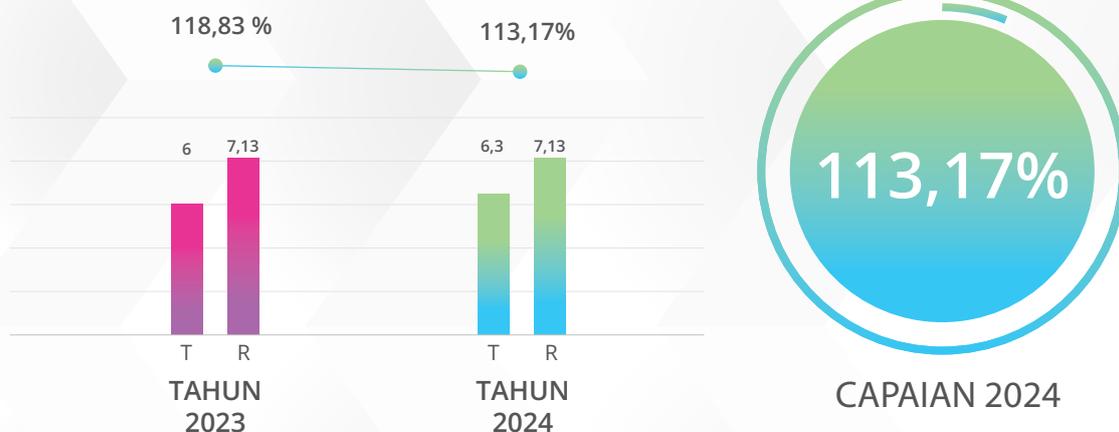
Selain itu perlu dilakukan pengukuran stabilitas sosial, keberagaman, dan toleransi antar kelompok di dalam masyarakat Indonesia. Dalam upaya menjaga keberagaman dan mencegah konflik sosial, pemerintah dan berbagai lembaga di Indonesia dapat menggunakan indeks harmoni Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Dalam pengukuran Indeks Harmoni Tahun 2024 menggunakan 4 dimensi yaitu dimensi Ekonomi (30%), dimensi Sosial (23%), dimensi Budaya (22%) dan dimensi Keberagamaan (25%).

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah" diperoleh sebesar 113,17%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil. Hal ini didukung oleh capaian kinerja 1 (satu) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	Nilai 7,13	113,17%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
<b>Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>113,17%</b>	<b>Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil</b>

## Indeks Harmoni Indonesia



Harmoni adalah keselarasan atau keserasian antar berbagai dimensi kehidupan. Keharmonisan merupakan kondisi dimana berbagai keragaman dapat tetap sejalan dan serasi serta berkesinambungan. Kondisi harmonis tentu merupakan modal utama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang harmonis akan dapat terwujud apabila berbagai aspek dan dimensi dapat berjalan seimbang, diantaranya dimensi ideologi atau keberagaman yang ditunjang dengan tercukupi dimensi ekonomi yang berdampak pada dimensi sosial dan budaya, semua dimensi yang saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lainnya.

T = Target

R = Realisasi

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru menggantikan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi serta Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial dan Budaya. Indeks Harmoni Indonesia rilis pada tahun 2023 dan dilaksanakan secara reguler dengan tujuan mendapatkan pola dan trend mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat.

Indeks Harmoni Indonesia adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial Indonesia, yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman yang bertujuan untuk memastikan stabilitas sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat kohesi sosial serta memitigasi faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi. Tujuan yang hendak dicapai dari IHaI untuk memberikan impact pada optimalisasi "Pembangunan Nasional" disebabkan terciptanya harmoni dari berbagai keberagaman di Indonesia dan teridentifikasinya berbagai potensi permasalahan pembangunan nasional yang bersumber dari keberagaman bangsa Indonesia.

Pengukuran Indeks Harmoni (IHaI) Tahun 2024 menggunakan 4 dimensi yaitu dimensi Ekonomi

(30%), dimensi Sosial (23%), dimensi Budaya (22%) dan dimensi Keberagaman (25%). Manfaat Indeks Harmoni bagi Pemerintah Daerah antara lain:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (PPD);
2. Perbaikan kualitas standar pelayanan minimal (SPM)- Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Trantibum Linmas dan Sosial;
3. Peningkatan Daya Saing Daerah;
4. Pengendalian inflasi dan pengelolaan investasi;
5. Pemantapan rentang kendali dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
6. Penumbuhan kepedulian dan semangat gotong royong; dan
7. Perwujudan hak konstitusional Warga Negara.

Indeks Harmoni terdiri dari 4 Dimensi, 10 variabel, 30 indikator, 2 pertanyaan spesifik dan 1 pertanyaan terbuka untuk mendapatkan masukan, saran serta kritik dari responden. Indikator dan variabel sebagai berikut:

1. Dimensi Harmoni Ekonomi:
  - a. Variabel X1: Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan (ki: 15,05%)
  - b. Variabel X2: Keadilan dan Kesejahteraan (ki: 14,95%)

2. Dimensi Harmoni Sosial:
  - a. Variabel X3: Pluralisme (ki: 7,88%)
  - b. Variabel X4: Pendidikan (ki: 7,54%)
  - c. Variabel X5: Kewarganegaraan (ki: 7,58%)
3. Dimensi Harmoni Budaya:
  - a. Variabel X6: Akulturasi dan Keragaman Budaya (ki: 11,00%)
  - b. Variabel X7: Kearifan Lokal (ki: 11,00%)
4. Dimensi Harmoni Keberagamaan:
  - a. Variabel X8: Kebijakan Pendukung Keberagamaan (ki: 8,56%)
  - b. Variabel X9: Partisipasi Masyarakat dan Ormas Keagamaan (ki: 8,15%)
  - c. Variabel X10: Moderansi Beragama (ki: 8,29%)

Pelaksanaan pengisian e-Survey Indeks Harmoni berdasarkan Surat Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 400.4/1924/Polpum tanggal 27 Juni 2024. Pelaksanaan Pengukurantahun2024yangdilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2024 dan diperpanjang dengan dasar surat Plh. Direktur Jenderal Poolitik dan Pemerintahan Umum Nomor 400.4.7/e-339/Polpum tanggal 1 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Kabupaten Tangerang (2.306 Responden).
  2. Kabupaten Lebak (1.334 Responden).
  3. Kabupaten Bantul (3.206 Responden).
  4. Kabupaten Gungkidul (1.436 Responden).
  5. Kabupaten Kulon Progo (1.325 Responden).
  6. Kabupaten Sleman (1.256 Responden).
  7. Kabupaten Kapuas (1.252 Responden).
  8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (2.046 Responden).
  9. Kota Pagar Alam (1.793 Responden).
  10. Kota Yogyakarta (1.299 Responden).
  11. Kota Batam (1.412 Responden).
  12. Kota Tangerang Selatan (1.359 Responden).
- Pemilihan lokus pada daerah tersebut didasarkan

pada beberapa hal antara lain:

1. Kepulauan Riau merupakan wilayah investasi yang memiliki masyarakat yang heterogen.
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Piloting Tahun 2023 dan merupakan pengukuran untuk membandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Banten merupakan daerah penyangga Jakarta dengan Indeks Kebahagiaan Terendah se-Indonesia.
4. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perwakilan daerah tengah dan kabupaten dengan tingkat potensi konflik tinggi.

Data Indeks Harmoni hasil riset publik dengan minimal responden masing-masing daerah 1.250 responden yang melibatkan unsur dengan melibatkan unsur Dodeca-helix terdiri dari:

1. Akademisi (Accademicians/A).
2. Kelompok usahawan dan pelaku bisnis (Business/B).
3. Komunitas kreatif/organisasi profesi (Community/C).
4. Lembaga donor/organisasi kemasyarakatan/LSM (Donor agency/D).
5. Wirausahawan khususnya wirausahawan sosial (Entrepreneurs/E).
6. Lembaga keuangan dan perbankan (Financial/F).
7. Pemerintah (Government/G).
8. Pemerintah daerah dan pemerintah desa (Local Government/LG dan Rural Government/RG).
9. Penanam modal terutama investor penyandang dana (Investors/I).
10. Pasar dan agen ekonomi (Market & Economic agents/M).
11. Jurnalis dan media massa (Press/P).
12. Masyarakat penerima manfaat (People Beneficiaries/PB).



### Skor Nilai IHaI Keseluruhan 7,13 of 9 Dengan Komponen

1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Responden 8531; Skor IHaI 7,35
2. Provinsi Banten; Responden 7493; Skor IHaI 7,06
3. Provinsi Riau Kepulauan; Responden 3308; Skor IHaI 7,19
4. Provinsi Papua Barat Daya; Responden NA; Skor IHaI Nihil
5. Provinsi Sumatera Selatan; Responden 5685; Skor IHaI 6,85
6. Provinsi Kalimantan Timur; Responden 456; Skor IHaI 6,85
7. Provinsi Kalimantan Tengah; Responden 1742; Skor IHaI 7,27
8. Provinsi Nusa Tenggara Barat; Responden 383; Skor IHaI 7,03, dan Satu Kategori
9. Kabupaten Kepulauan Selayar; Responden 546; Skor IHaI 6,90

**Total Responden 28,134; Skor IHaI Kumulatif 7,13 of 9**

Penilaian Indeks Harmoni dengan melihat keseluruhan variabel yang mempengaruhi dengan melihat beberapa aspek :

1. Skor Signifikansi Penilaian (SSP) dimana untuk wilayah D.I. Yogyakarta SSP sebesar 6,5 dan Kalimantan Tengah serta Sulawesi Selatan 6 (skala 1 sampai 9), karakteristik wilayah mempengaruhi penilaian SSP dari titik tengah skala 1 sampai 9 ditambah karakteristik wilayah 30% untuk daerah yang maju dan prasarana lengkap, 20% untuk wilayah bagian tengah dan 10% untuk wilayah timur dan kepulauan, dari keseluruhan indikator (30) Kabupaten Gunung Kidul terdapat satu Indikator di bawah SSP dengan kesimpulan SSP baik.
2. Standar deviasi yang merupakan ukuran keberagaman dengan acuan SD = 2,0 pada 30 titik, semua titik dibawah 2,0 Kapuas menunjukkan hanya 3 titik nilai dibawah 2,0
3. Skor Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) dari masing-masing variabel batas PRMR 10%, dari 8 daerah ada 3 daerah yang melebihi batas PRMR.
4. Kesimpulan Penilaian:
  - a. 5 daerah dengan SSP (6,5 Wilayah D.I. Yogyakarta, 6 untuk Kalteng dan Sulses), SD (dibawah 2,0), dan PRMR (acuan dibawah 10) yaitu : Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Selayar masuk penilaian Sangat Baik
  - b. 2 Daerah Baik, Gunung Kidul (satu indikator kurang dari SSP) dan Kotim (ada PRMR yang melebihi 10%), dan
  - c. Kapuas Moderat-Baik, karena SD (27 titik diatas 2,0) dan ada variabel yang melebihi PRMR.

Tabel 3.17 Kategorisasi Skor Indeks IHaI

Skor	Predikat
$7 \geq x < 9$	Sangat Baik
$6 \geq x < 7$	Baik
$5,4 \geq x < 6$	Moderat
$x < 5,4$	Kurang Baik

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Skor Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan IKU 6,3 skor IHaI 7,13. Hasil kajian yang diperoleh dari 28,134 responden ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengukuran kondisi keharmonisan di Indonesia. Dengan response rate, survey online kisaran 10%-30% Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) telah menjangkau 100,000 sampai 200,000 warga masyarakat. Gambaran menunjukkan efektivitasnya dalam

mengukur berbagai aspek penting yang berkaitan dengan persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas di masyarakat. Skor secara langsung (direct measurement) yang mencapai 7,13 of 9 menandakan bahwa, secara umum, tingkat keharmonisan sosial di Indonesia berada dalam kondisi baik. Namun, hasil ini juga mengidentifikasi area-area tertentu yang memerlukan perhatian lebih, terutama terkait dengan variabel kesenjangan dan keseimbangan.

Formula perhitungan yang digunakan dalam pengukuran Indeks Harmoni:

$$IHal = \sum(ki \cdot Xi)$$

Keterangan:

IHal: Nilai akhir dari Indeks Harmoni.

$\sum$ : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.

ki: Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.

Xi: Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.

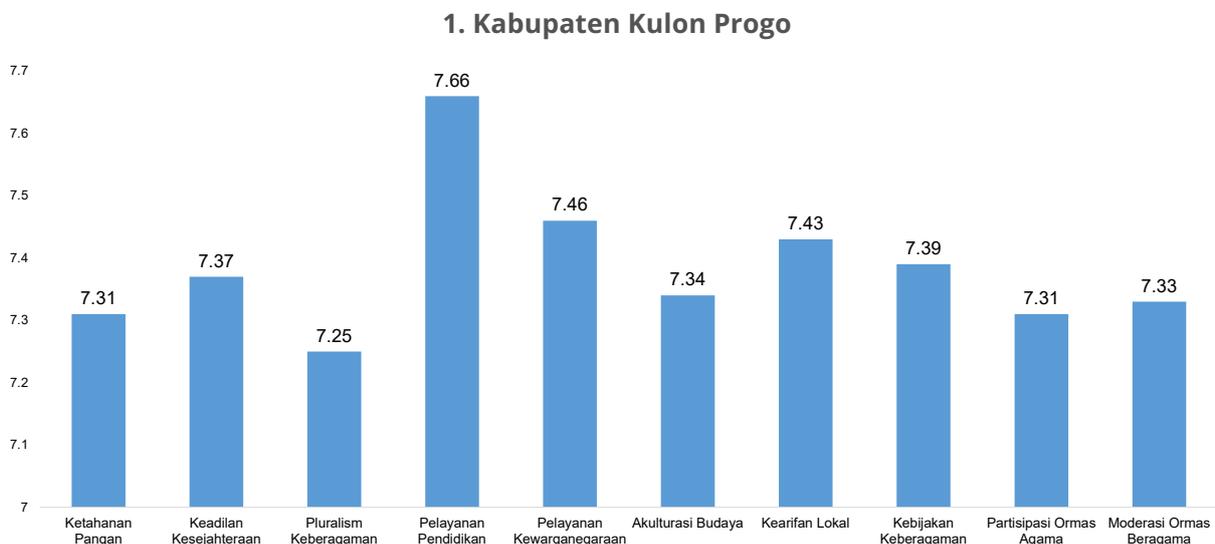
Gambar 3.9 Perhitungan Nilai IHal Tahun 2024

		Riset Publik Indeks Harmoni (IHal), Keseluruhan 2024																															
		Skor Dimensi Ekonomi						Skor Dimensi Sosial						Skor Dimensi Kebudayaan					Skor Dimensi Keberagamaan														
		Variabel X1		Variabel X2		Variabel X3		Variabel X4		Variabel X5		Variabel X6		Variabel X7			Variabel X8		Variabel X9		Variabel X10		Variabel X11										
No Responden		X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	X8.3	X9.1	X9.2	X9.3	X10.1	X10.2	X10.3		
8519	1253	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
8520	1254	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
8521	1255	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
21206	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
21207	2	4	2	2	6	6	6	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
21208	3	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
21585	180	7	2	5	7	5	4	7	7	7	9	9	7	9	9	6	9	9	4	7	7	5	7	7	9	9	7	7	3	3	3	3	
21586	281	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
21587	182	7	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
21588	388	7	8	9	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
21589	1	8	9	8	7	8	7	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
21590	2	1	1	7	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9
21591	3	1	7	6	5	6	5	7	5	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
28132	144	8	4	8	3	3	3	5	7	6	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28133	545	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	3	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28134	146	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skor Nilai Rata		7,13	7,11	6,75	7,36	7,31	6,98	7,10	7,10	6,70	7,61	7,26	7,13	7,42	7,44	7,07	7,33	7,23	6,98	7,37	7,25	7,08	7,36	7,27	7,00	7,21	7,10	6,87	7,25	7,11	6,74		
Skor Max. Ri		6,96			7,08			6,99			7,24			7,20			7,15			7,17		7,20		7,18		7,20		7,10		7,19			
Skor Dim. Di		7,03						7,24						7,17					7,20														
Skor IHal		7,13																															

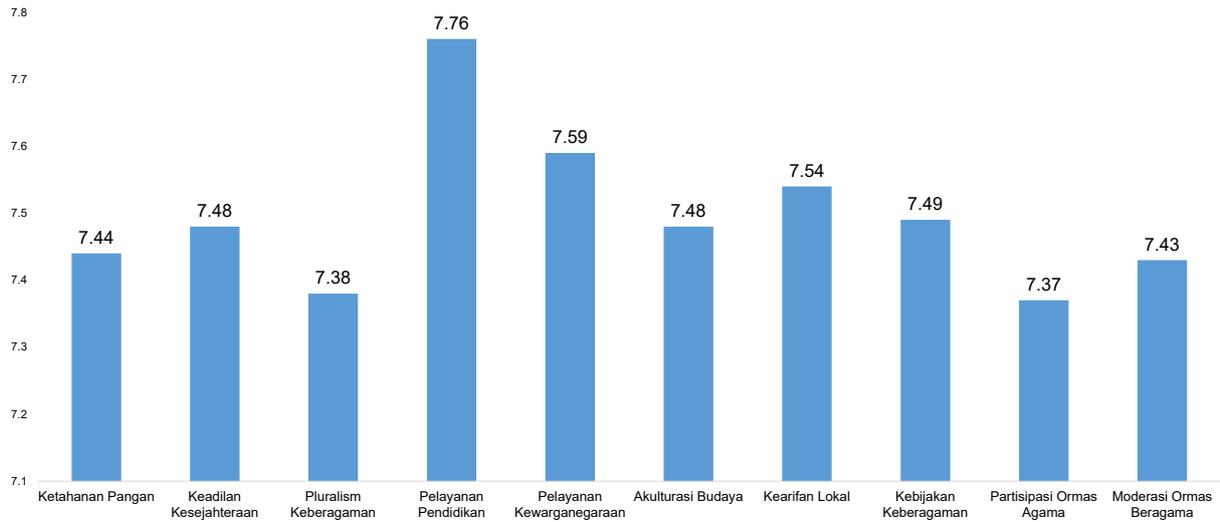
hasil skor IHal 2024 7,13 yang didapat dari 28.134 responden yang terdiri dari dimensi ekonomi dengan skor 7,03, dimensi sosial 7,24, dimensi kebudayaan 7,17 dan dimensi keberagamaan 7,20. Dari 10 variabel seluruhnya telah melebihi standar acuan signifikan (6,5). Berdasarkan hasil diatas nilai indeks harmoni Indonesia dikategorikan bagus sekali.

- skor IHal = (skor dimensi ekonomi X 30 + Skor dimensi sosial X 23 + Skor dimensi budaya X 22 + Skr dimensi keberagamaan X 25) / 100
- skor dimensi ekonomi = (variable X1 X 15,05 + variable X2 X 14,95) / 30
- skor dimensi sosial = (variable X3 X 7,88 + variable X4 X 7,54 +Variabel X5 X 7,58) / 23variabel x8
- skor dimensi kebudayaan = (variable X6 X 11 + Variabel X7 X 11) / 22
- skor dimensi keberagamaan = (Variabel X8 X 8,56 + variabel X9 X 8,15 + variabel X10 X 8,29)/ 25

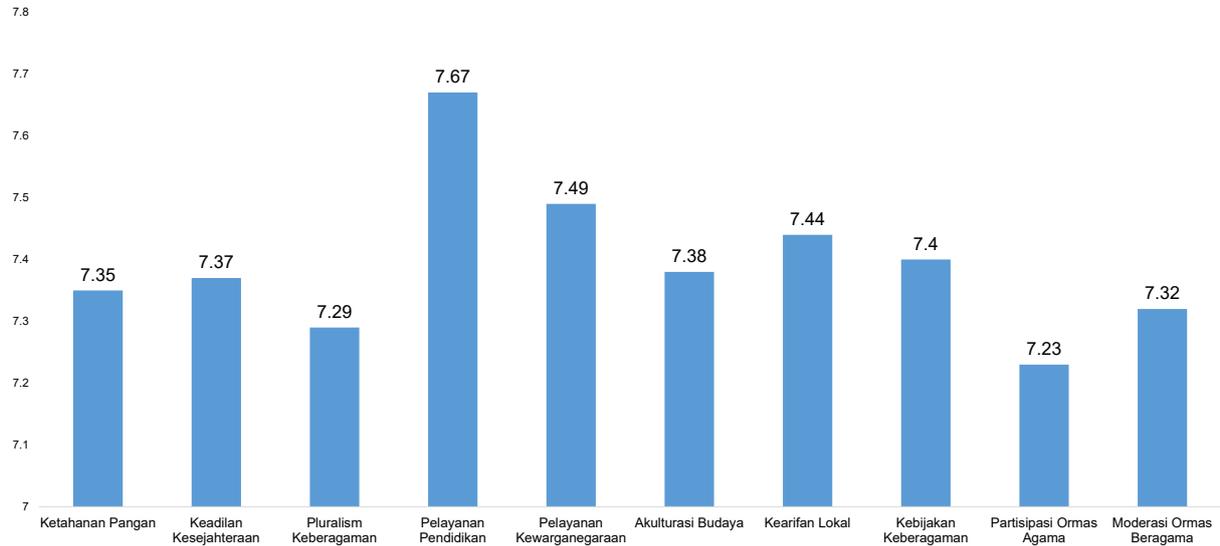
Grafik 3.10 Perhitungan Nilai IHal per Daerah



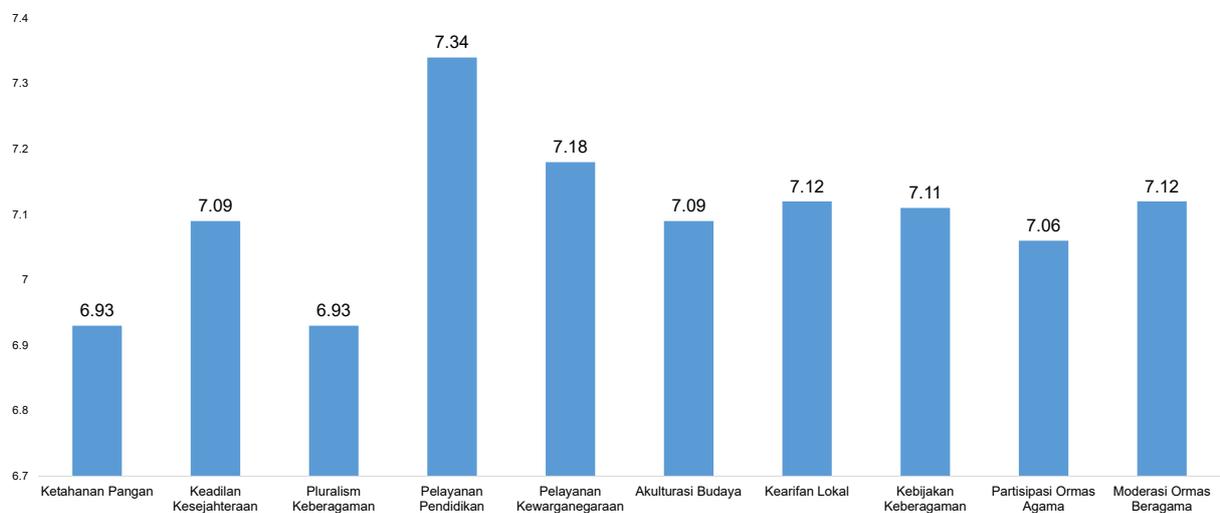
## 2. Kabupaten Bantul



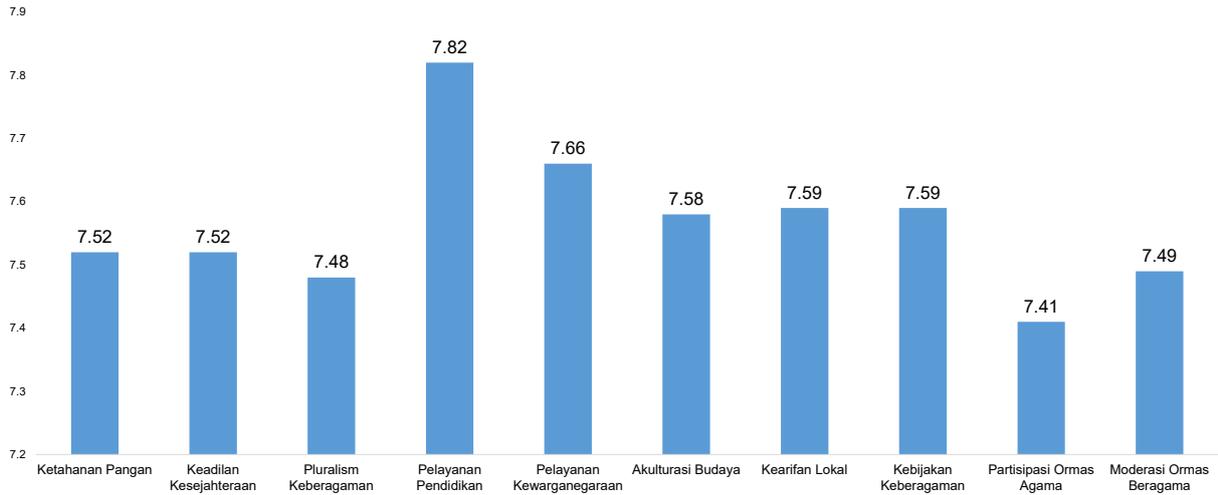
## 3. Kabupaten Sleman



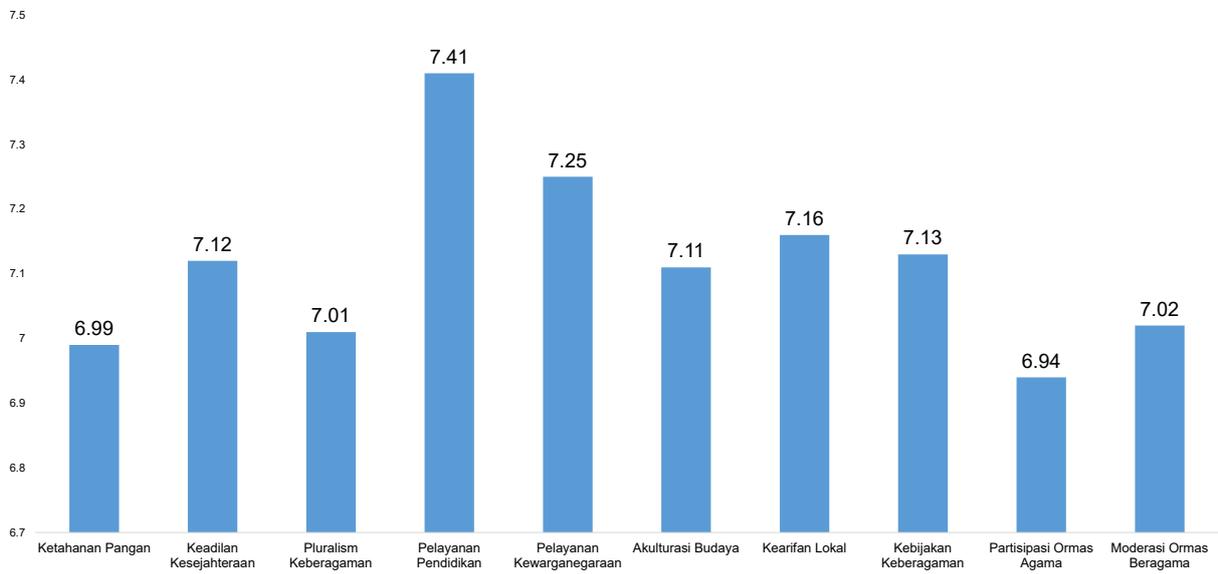
## 4. Kabupaten Gunungkidul



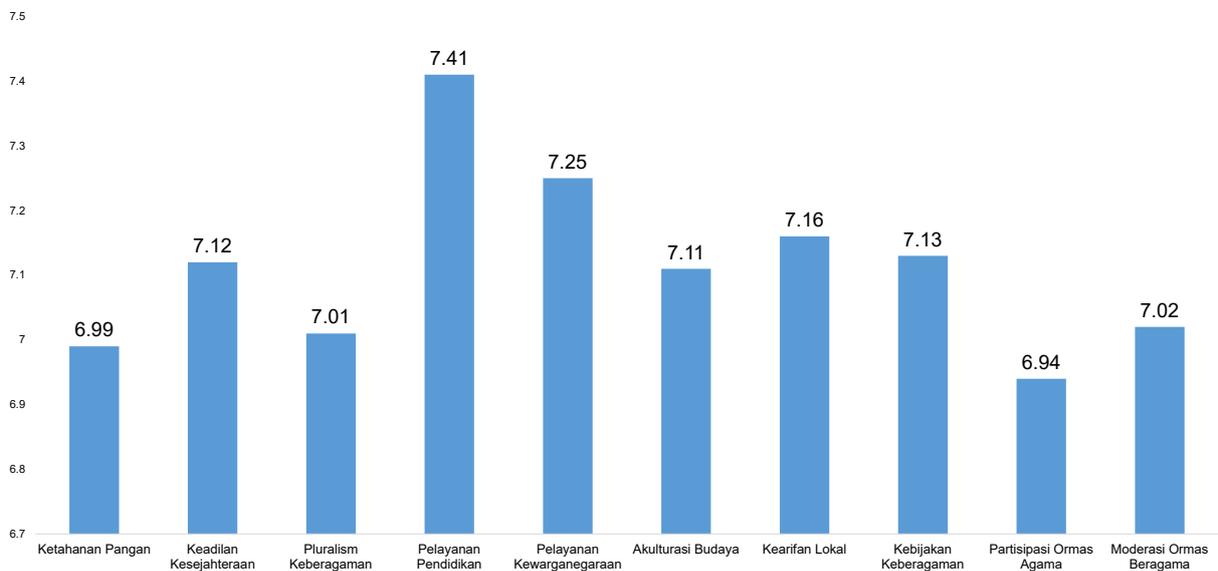
### 5. Kota Yogyakarta



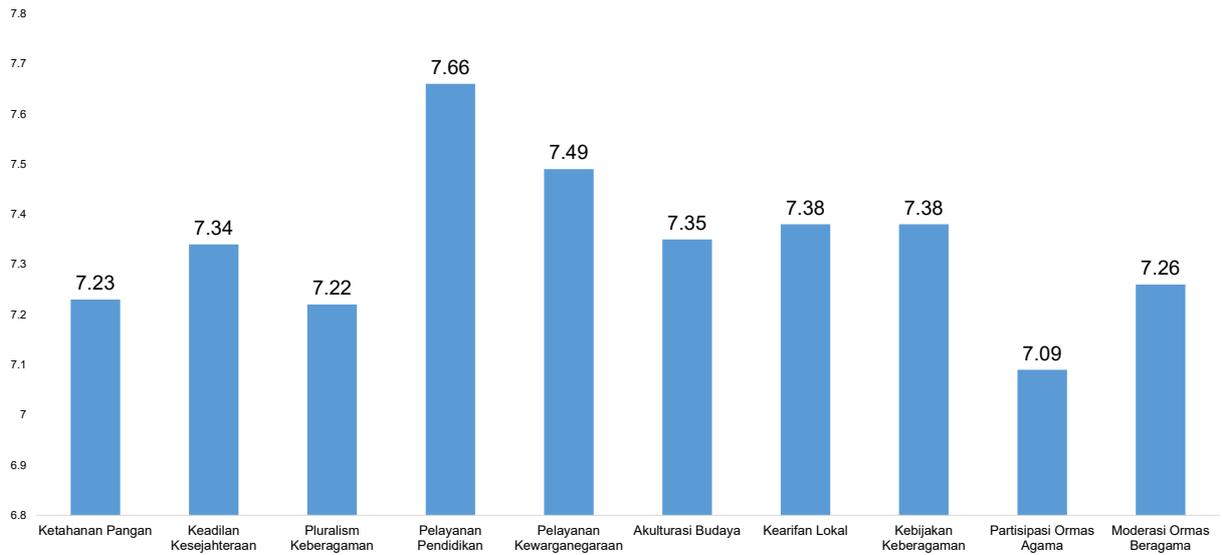
### 6. Bupatien Lebak



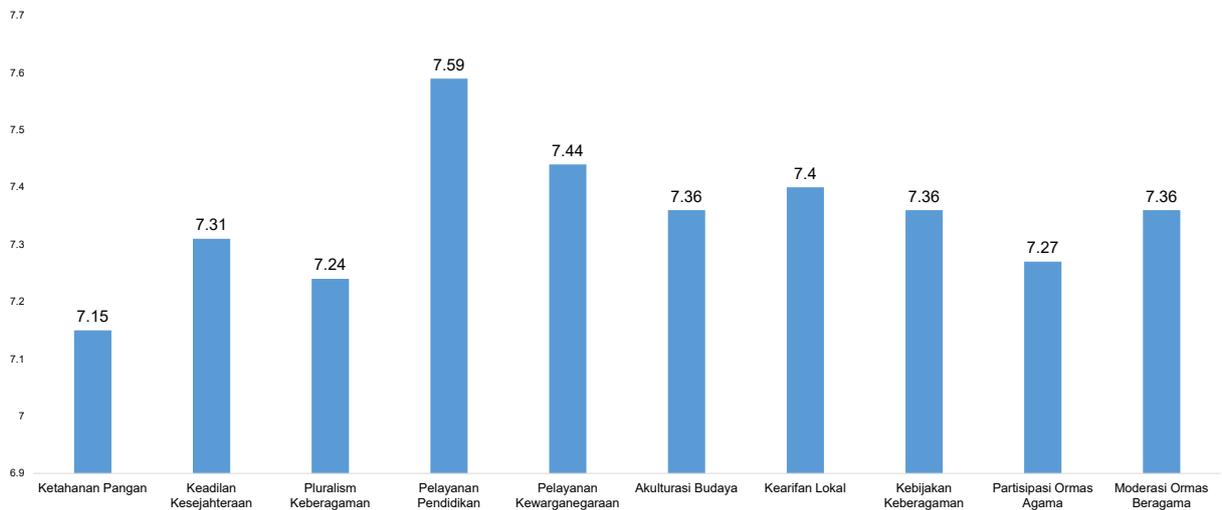
### 7. Kabupaten Tangerang



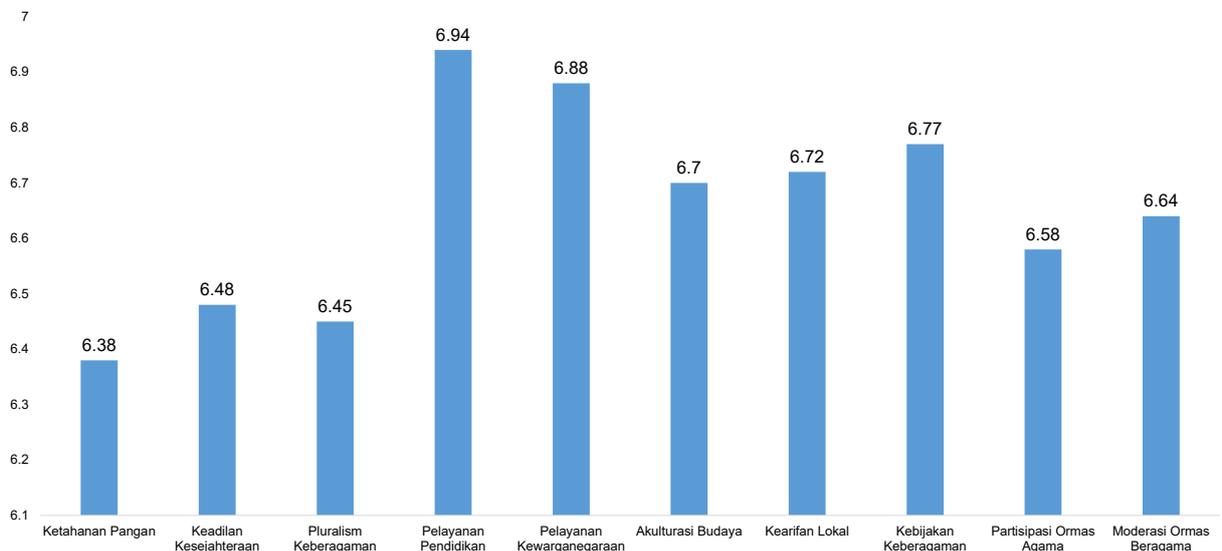
## 8. Kabupaten Tangerang Selatan



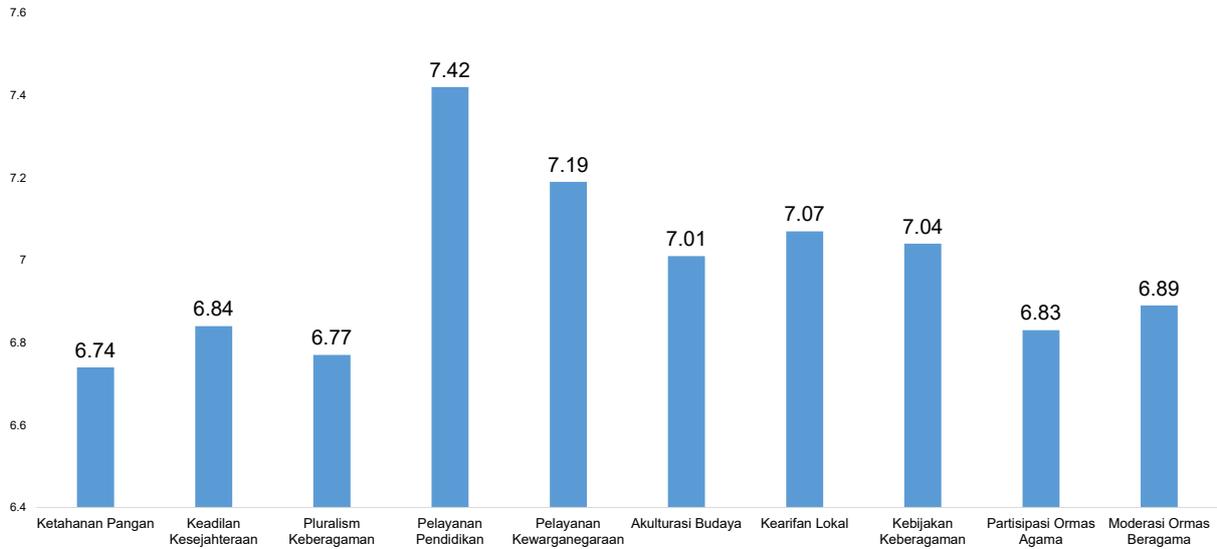
## 9. Kabupaten Kapuas



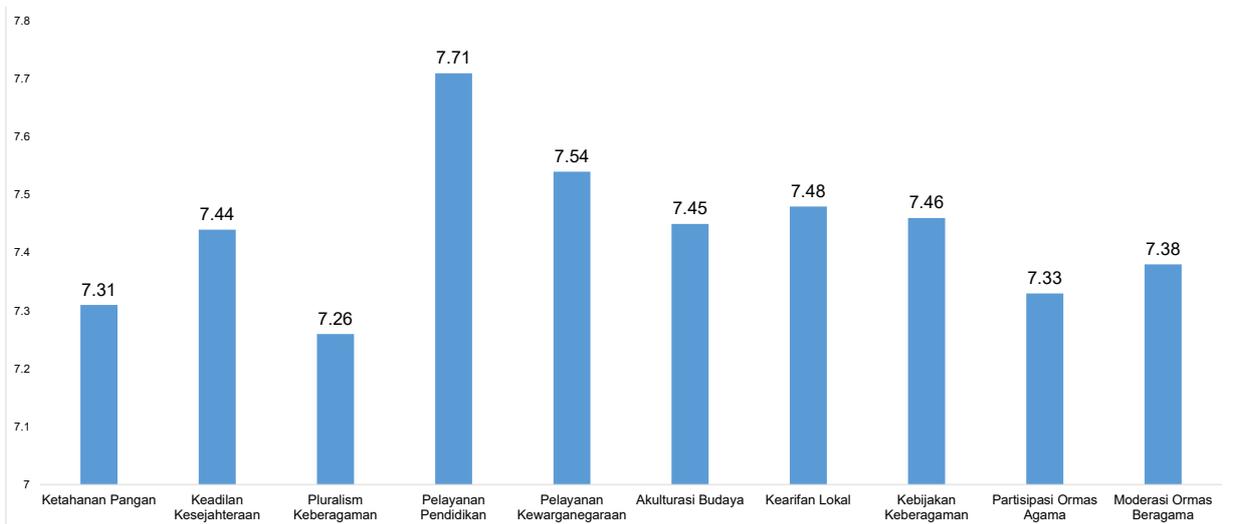
## 10. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



## 11. Kota Pagar Alam



## 12. Kota Batam



Ada beberapa faktor yang meningkatkan kinerja nilai Indeks Harmoni:

1. Penguatan Program Pendidikan dan Literasi: Mengingat variabel X4 (Pendidikan) memiliki dampak yang signifikan, disarankan untuk memperkuat program pendidikan di wilayah tersebut. Ini dapat melibatkan inisiatif peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan literasi pendidikan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik;
2. Pemberdayaan Kearifan Lokal: Dengan adanya variabel X7 (Kearifan Lokal) yang memegang peran penting, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan upaya lebih lanjut dalam melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal. Ini dapat melibatkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung pelestarian budaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tradisional;

3. Stimulasi Partisipasi Masyarakat: Melihat variabel X9 (Partisipasi Masyarakat dan Ormas Keagamaan), Pemerintah Daerah dapat merancang kebijakan yang merangsang Indeks Harmoni : Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel & Kredibel Page 187 partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Program kerukunan antar umat beragama juga dapat ditingkatkan untuk memperkuat kerjasama lintas agama;
4. Implementasi Kebijakan Pendukung Keberagaman: Variabel X8 (Kebijakan Pendukung Keberagaman) menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan penyempurnaan kebijakan atau pembuatan kebijakan baru yang lebih progresif dalam mendukung keragaman keberagaman.

Adapun Alternatif solusi yang telah dilakukan, yaitu Rekomendasi yang dihasilkan dari data non-struktural, usul saran, dan kritik masyarakat menjadi poin penting untuk meningkatkan interaksi dan keberlanjutan program pemerintah. Masyarakat menyampaikan aspirasi mereka melalui usul, saran, dan kritik yang mencakup beragam isu. Oleh karena itu, rekomendasi melibatkan peningkatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, implementasi program edukasi yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan, dan pemberdayaan lebih lanjut kepada ormas serta masyarakat sipil. Inovasi kebijakan pendukung keberagaman dan kolaborasi antar berbagai pihak juga muncul sebagai solusi yang diusulkan untuk memperkuat kerukunan dan harmoni dalam masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Rekomendasi ini mencerminkan kebutuhan untuk respons yang holistik dan inklusif terhadap dinamika sosial dan budaya yang diungkapkan oleh masyarakat dalam riset publik Indeks Harmoni. Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari masyarakat, dalam 6 poin:

1. Peningkatan pemahaman tentang keberagaman.
2. Edukasi sebagai upaya mempertahankan harmoni.
3. Memperkuat kearifan lokal, moderasi beragama, pencegahan intoleransi, dan membangun kebersamaan dalam bingkai Pancasila dan UUD 45.
4. Penguatan moderasi beragama di lingkungan masyarakat.
5. Menanamkan sifat gotong-royong.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya selama pelaksanaan kinerja yaitu dengan melakukan Riset Publik Indeks Harmoni yang menjadi sebuah kolaborasi yang signifikan antara berbagai pihak, mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sukarelawan. Kerjasama ini dirancang untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam proses riset. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan dalam memberikan dukungan regulasi, serta memfasilitasi dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan. Perguruan Tinggi, seperti Universitas Krisnadwipayana (Unkris), mungkin memberikan keahlian akademis dan sumber daya penelitian.

LSM seperti Wellbeing Institute dapat berkontribusi dengan perspektif dan pemahaman yang lebih dalam dari masyarakat, sementara sukarelawan mungkin turut serta dalam pengumpulan data atau kegiatan lainnya. Kolaborasi ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, termasuk peningkatan kualitas penelitian, representasi yang lebih baik dari masyarakat, serta penerapan hasil riset yang lebih berdampak. Melalui upaya bersama ini, diharapkan bahwa riset publik Indeks Harmoni dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tingkat harmoni di masyarakat, serta menjadi landasan untuk perbaikan dan pembangunan lebih lanjut dalam mencapai tujuan harmonisasi.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Indeks Harmoni Indonesia, antara lain:

1. Dimensi Harmoni Ekonomi
  - a. Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Menjaga Stabilitas dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Guna Memperkuat Stabilitas Nasional yang dilaksanakan tanggal 5 Maret 2024 secara hybrid di Ruang Rapat Situation Room Gedung F Lantai 4 Kementerian Dalam Negeri.



Adapun Alternatif solusi yang telah dilakukan, yaitu Rekomendasi yang dihasilkan dari data non-struktural, usul saran, dan kritik masyarakat menjadi poin penting untuk meningkatkan interaksi dan keberlanjutan program pemerintah. Masyarakat menyampaikan aspirasi mereka melalui usul, saran, dan kritik yang mencakup beragam isu. Oleh karena itu, rekomendasi melibatkan peningkatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, implementasi program edukasi yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan, dan pemberdayaan lebih lanjut kepada ormas serta masyarakat sipil. Inovasi kebijakan pendukung keberagaman dan kolaborasi antar berbagai pihak juga muncul sebagai solusi yang diusulkan untuk memperkuat kerukunan dan harmoni dalam masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Rekomendasi ini mencerminkan kebutuhan untuk respons yang holistik dan inklusif terhadap dinamika sosial dan budaya yang diungkapkan oleh masyarakat dalam riset publik Indeks Harmoni. Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari masyarakat, dalam 6 poin:

1. Peningkatan pemahaman tentang keberagaman.
2. Edukasi sebagai upaya mempertahankan harmoni.
3. Memperkuat kearifan lokal, moderasi beragama, pencegahan intoleransi, dan membangun kebersamaan dalam bingkai Pancasila dan UUD 45.
4. Penguatan moderasi beragama di lingkungan masyarakat.
5. Menanamkan sifat gotong-royong.

Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya selama pelaksanaan kinerja yaitu dengan melakukan Riset Publik Indeks Harmoni yang menjadi sebuah kolaborasi yang signifikan antara berbagai pihak, mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sukarelawan. Kerjasama ini dirancang untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam proses riset. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan dalam memberikan dukungan regulasi, serta memfasilitasi dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan. Perguruan Tinggi, seperti Universitas Krisnadwipayana (Unkris), mungkin memberikan keahlian akademis dan sumber daya penelitian.

LSM seperti Wellbeing Institute dapat berkontribusi dengan perspektif dan pemahaman yang lebih dalam dari masyarakat, sementara sukarelawan mungkin turut serta dalam pengumpulan data atau kegiatan lainnya. Kolaborasi ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, termasuk peningkatan kualitas penelitian, representasi yang lebih baik dari masyarakat, serta penerapan hasil riset yang lebih berdampak. Melalui upaya bersama ini, diharapkan bahwa riset publik Indeks Harmoni dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tingkat harmoni di masyarakat, serta menjadi landasan untuk perbaikan dan pembangunan lebih lanjut dalam mencapai tujuan harmonisasi.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Indeks Harmoni Indonesia, antara lain:

#### 1. Dimensi Harmoni Ekonomi

- a. Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Menjaga Stabilitas dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Guna Memperkuat Stabilitas Nasional yang dilaksanakan tanggal 5 Maret 2024 secara hybrid di Ruang Rapat Situation Room Gedung F Lantai 4 Kementerian Dalam Negeri.

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Menjaga Stabilitas dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Guna Memperkuat Stabilitas Nasional



- b. Dialog Nasional Bidang Ketahanan Ekonomi, dengan tema "UMKM dan Pangan, untuk Pangan, untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi di Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 bertepatan dengan rangkaian hari jadi Kabupaten Bogor ke-542 di gedung serbaguna I Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dialog Nasional Bidang Ketahanan Ekonomi  
"UMKM dan Pangan, untuk Pangan, untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi di Daerah"



- c. Forum Digitalisasi Ekonomi dan Pemasaran Produk Pesantren yang diselenggarakan pada saat event Jombang Fest 2024 selama 10 hari penuh, mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2024.

Forum Digitalisasi Ekonomi dan Pemasaran Produk Pesantren



2. Dimensi Harmoni Keberagamaan

- a. Telah dilaksanakan Asistensi Koordinasi dan Monitoring Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan Kementerian/Lembaga seperti, Kementerian Agama, Bakesbangpol dan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilakukan secara langsung di Provinsi Bali pada tanggal 30 Januari 2024 bertempat di Grand Mega Resort Hotel.
- b. Telah dilaksanakan Asistensi Koordinasi dan Monitoring Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan Kementerian/Lembaga seperti, Kementerian Agama, Bakesbangpol dan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilakukan secara langsung di Provinsi D.K.I Jakarta pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat Hotel Orchardz Jayakarta.
- c. Terselenggaranya Webinar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, dan Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada tanggal 14 November 2024.

Kegiatan Asistensi Koordinasi dan Monitoring Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan di Provinsi Bali, Grand Mega Resort Hotel



Kegiatan Asistensi Koordinasi dan Monitoring Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan di Provinsi D.K.I Jakarta, Hotel Orchardz Jakarta



Kegiatan Webinar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, dan Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024



### 3. Dimensi Harmoni Sosial Dan Budaya

- a. Terselenggaranya kegiatan Indonesia Maju Expo & Forum 2024 pada tanggal 4 s.d 7 Juli 2024, di Jakarta Convention Center Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menguatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya bangsa, serta mendorong iklim perekonomian lokal berorientasi ekspor sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi.

Kegiatan Webinar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, dan Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024



- b. Terselenggaranya Webinar Optimalisasi Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam rangka Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan tema “Berantas Narkoba, Sehatkan Bangsa” pada Senin 18 November 2024.

Webinar Optimalisasi Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam rangka Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan tema “Berantas Narkoba, Sehatkan Bangsa”



- c. Terselenggaranya Forum Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Optimalisasi P4GN dan PN “Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Narkoba (Extraordinary)” Tahun 2024 pada tanggal 30 Mei 2024 di Hotel Almadera Makassar.

Forum Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Optimalisasi P4GN dan PN “Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Narkoba (Extraordinary)”



- d. Terselenggaranya Forum Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Optimalisasi P4GN dan PN “Masyarakat Melawan Narkoba” Tahun 2024 pada Kamis 2 Februari 2024 bertempat di Hotel Royal Darmo Malioboro Yogyakarta.



Gambar 3.10 Infografis Indeks Harmoni Indonesia





# SASARAN 3

## Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan nasional adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) dengan meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan dini. ATHG sendiri diartikan sebagai upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional, Direktorat Jenderal

Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan dan mengawal sasaran Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dengan indikator kinerja Indeks Kewaspadaan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022, Direktorat Kewaspadaan Nasional bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi, fasilitasi, pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan informasi dan media, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan orang asing dan penanganan konflik pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Kewaspadaan Nasional" diperoleh sebesar 113,89%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil. Hal ini didukung oleh capaian indikator Indeks Kewaspadaan Nasional dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	Nilai 72,89	113,89%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				113,89%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



## Indeks Kewaspadaan Nasional



113,89%

CAPAIAN 2024

Pencapaian Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) diharapkan dapat menjadi alat mitigasi atau deteksi dini soal ancaman kewaspadaan nasional dan daerah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap setiap potensi kerawanan konflik, baik vertikal maupun horizontal, Urgensi Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah dianggap perlu terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah, di antaranya yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat di lakukan langkah-langkah preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, belum lagi potensi timbulnya konflik Pemerintahan di tengah masyarakat.

T = Target

R = Realisasi

Indeks Kewaspadaan Nasional adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan, kesadaran, dan kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman terhadap stabilitas nasional. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dijadikan referensi oleh pemerintah daerah dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan terhadap gangguan di masyarakat. Selain itu dijadikan pula sebagai alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dalam deteksi dini dan cegah dini bidang Kewaspadaan Nasional, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kewaspadaan nasional di daerah masing-masing.

Kewaspadaan nasional merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keutuhan bangsa dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Indikator yang terdapat dalam berbagai dimensi, seperti konflik pemerintahan, Forkopimda, kewaspadaan informasi media, kewaspadaan dini, serta pengawasan orang asing, berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kewaspadaan

nasional. Berikut adalah penjelasan keterkaitan antara indikator dan pencapaian sasaran strategis tersebut:

## 1. Konflik Pemerintahan

Konflik pemerintahan yang tidak ditangani dengan baik dapat menjadi pemicu instabilitas nasional. Oleh karena itu, pemahaman tentang konflik serta langkah-langkah penanganannya menjadi sangat penting dalam meningkatkan kewaspadaan nasional.

- Jenis Konflik & Sebab Konflik: Mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis konflik serta akar penyebabnya membantu pemerintah dalam menyusun strategi pencegahan dan mitigasi konflik, sehingga dapat mengurangi potensi gangguan keamanan nasional.
- Penanganan, Aktor, & Meredam Konflik: Efektivitas dalam menangani konflik, baik melalui kebijakan maupun keterlibatan aktor yang relevan, berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Upaya meredam konflik secara efektif akan mencegah eskalasi yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

## 2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Peran Forkopimda dalam membangun koordinasi antar-lembaga sangat esensial dalam mendukung kewaspadaan nasional. Hubungan kelembagaan yang solid memungkinkan adanya sinergi dalam menghadapi potensi ancaman di tingkat daerah maupun nasional.

a. Hubungan Kelembagaan & Kualitas Layanan: Keterpaduan antar-lembaga dalam menjaga stabilitas nasional memastikan respons cepat terhadap potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Wawasan Kebangsaan: Peningkatan nasionalisme melalui pemahaman wawasan kebangsaan yang kuat dapat mencegah munculnya sikap separatisme atau radikalisme yang dapat mengancam integrasi bangsa.

## 3. Kewaspadaan Informasi Media

Di era digital, ancaman terhadap kewaspadaan nasional tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui penyebaran informasi yang tidak benar (disinformasi). Oleh karena itu, penguatan literasi informasi dan media menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan nasional.

a. Disinformasi & Etika AI: Penyebaran berita bohong (hoaks) dapat memicu keresahan masyarakat dan memengaruhi stabilitas negara. Oleh karena itu, kemampuan untuk menyaring informasi serta penerapan etika dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi sangat penting.

b. Kepercayaan Media: Keberadaan media yang kredibel dan terpercaya membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, sehingga mengurangi risiko manipulasi opini publik oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri.

## 4. Kewaspadaan Dini

Peningkatan kewaspadaan dini dapat mencegah potensi konflik sosial serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan. Upaya ini mencakup aspek toleransi, pencegahan, serta penguatan nasionalisme.

a. Toleransi Agama & Suku/Etnis: Keragaman budaya dan agama di Indonesia memerlukan penguatan sikap toleransi agar tidak terjadi konflik berbasis SARA. Toleransi yang kuat akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Pencegahan & Pajak: Langkah-langkah pencegahan konflik, baik melalui regulasi maupun pendekatan sosial, memastikan adanya deteksi dini terhadap potensi ancaman. Sementara itu, aspek pajak berkontribusi dalam mendukung stabilitas ekonomi negara, yang merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan ketahanan nasional.

## 5. Pengawasan Orang Asing

Ancaman terhadap kewaspadaan nasional juga dapat datang dari luar negeri, terutama melalui aktivitas orang asing di dalam negeri. Oleh karena itu, pengawasan terhadap orang asing dan pengunjung menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan nasional.

a. Ancaman Asing (WNA Dirikan Ormas Asing): Keberadaan organisasi asing yang memiliki potensi untuk memengaruhi dinamika sosial dan politik dalam negeri perlu diawasi secara ketat guna mencegah dampak negatif terhadap stabilitas nasional.

b. Keberadaan dan Aktivitas Orang Asing: Pemantauan terhadap aktivitas orang asing, termasuk pengunjung, perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyusupan aktor-aktor yang dapat mengancam keamanan nasional, seperti jaringan terorisme atau kejahatan transnasional.

Seluruh indikator dalam berbagai dimensi ini memiliki keterkaitan yang erat dalam meningkatkan kewaspadaan nasional yang merupakan tugas dan fungsi kewaspadaan nasional. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap konflik pemerintahan, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan literasi informasi, penguatan toleransi sosial, serta pengawasan terhadap aktivitas orang asing, Indonesia dapat membangun sistem kewaspadaan yang lebih kuat dan responsif. Dengan demikian, stabilitas dan kedaulatan nasional dapat terus terjaga di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan umum melakukan penyesuaian terhadap Dimensi, Variabel dan Indikator pada pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional, sehingga pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional menggunakan 5 Dimensi, 13 Variabel dan 18 Indikator yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.19 Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2024

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Konflik Pemerintahan	Konflik pemerintahan	Jenis konflik
		Sebab konflik
	Penanganan konflik	Penanganan
	Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Konflik	Aktor
	Meredam konflik	Meredam
Forkimda	Hubungan Kelembagaan	Hubungan kelembagaan
		Kualitas Layanan
	Nasionalisme	Wawasan Kebangsaan
Kewaspadaan informasi media	Literasi informasi	Disinformasi
		Etika AI
	Media	Kepercayaan Media
Kewaspadaan dini	Toleransi	Toleransi agama
	Pencegahan	Toleransi suku/etnis
	Cinta tanah air	Upaya
		Pajak
Pengawasan orang asing	Ancaman asing	WNA dirikan ormas asing
		Keberadaan dan aktifitas orang asing
	Pengungsi	Pengungsi

Sumber: Penetapan IKN Tahun 2024

Dimensi konflik pemerintahan merupakan upaya antisipasi dan penanganan terhadap konflik yang terjadi antar dan inter instansi pemerintahan, variabel yang diambil meliputi upaya penanganan, partisipasi masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik, sistem penyelesaian konflik dan upaya meredam konflik. Contoh konflik Pemerintahan, diantaranya soal perpecahan koalisi pemerintahan daerah pasca menang pilkada serta pada saat menjalankan roda Pemerintahan atau adanya konflik kepentingan yang terkait dengan implementasi kewenangan dan kebijakan pada pemerintahan daerah seperti batas wilayah maupun penunjukan pejabat pemerintahan.

Dimensi kewaspadaan informasi dan media dalam konteks konflik pemerintahan melibatkan pemahaman dan pengelolaan informasi serta media yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintahan dan konflik yang terjadi. Hal ini mencakup penyebaran berita palsu, pengaruh media sosial dan upaya untuk mengontrol narasi publik. Kewaspadaan terhadap informasi dan media menjadi penting untuk memahami dinamika konflik dan mencegah disinformasi yang terus menyebar ke masyarakat dan pemerintahan. Dimensi ini mengulas soal tren penyebaran disinformasi, yang diterjemahkan ke dalam sejumlah indikator dan dioperasionalisasi dalam sejumlah pertanyaan. Misalnya, apakah pernah menerima kabar disinformasi (hoax). Apakah terpengaruh dengan isi disinformasi. Apakah menyebarkan disinformasi tersebut. Apakah tahu cara membedakan isi disinformasi. Dimensi kewaspadaan dini mencakup upaya identifikasi, analisis, dan pemantauan tanda-tanda awal konflik sebelum eskalasi yang serius. Ini melibatkan sistem peringatan dini untuk

mendeteksi potensi konflik, memungkinkan pihak berwenang dan pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau penanganan sebelum konflik menjadi lebih kompleks atau merugikan pemerintahan. Dimensi kewaspadaan dini mengambil variabel mengenai toleransi, upaya pencegahan, nasionalisme dan cinta tanah air.

Dimensi Pengawasan orang asing meliputi upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman asing meliputi; tenaga kerja asing, peneliti asing, tenaga ahli/pakar asing, artis asing, rohaniawan asing dan keberadaan orang asing. Upaya yang dilakukan pemerintah dapat kebijakan untuk meminimalisir ancaman-ancaman orang asing. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dilakukan dengan cara pembobotan yang dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik pendapat umum opini publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu lokasi mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran pendapat mayoritas masyarakat

Teknik wawancara responden menggunakan tiga (3) metode pertanyaan. Pertama, teknik pertanyaan tertutup, yaitu responden diberikan pilihan jawaban oleh enumerator dan instrumen. Kedua, teknik pertanyaan setengah tertutup atau terbuka, yaitu responden diberikan pilihan jawaban oleh Enumerator dan instrumen. Jika pilihan jawaban yang diberikan tidak memuaskan,

maka responden diberikan kesempatan atau peluang memberikan jawaban sendiri berdasarkan pengetahuan maupun pengalamannya. Ketiga, teknik pertanyaan terbuka, yaitu responden tidak diberikan pilihan jawaban oleh Enumerator dan instrumen. Responden diberikan kesempatan atau

peluang memberikan jawaban sendiri berdasarkan pengetahuan maupun pengalamannya.

Dalam penghitungan perumusan 5 dimensi 18 indikator dan 13 variabel digunakan metode perumusan sebagai berikut

$$\% \text{ Indikator} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Variabel} = \frac{n \text{ \% Indikator}}{n \text{ Variabel}}$$

$$\% \text{ Dimensi} = \frac{n \text{ \% Variabel}}{n \text{ Dimensi}}$$

Tahun 2024 pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dilakukan pada 2 Provinsi dan perwakilan 19 Kabupaten/Kota dimasing-masing Provinsi. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional tahun ini belum dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dilakukan pemilihan lokus sesuai dengan ketersediaan anggaran. Pertimbangan atas pemilihan lokus

yaitu berdasarkan kesiapan daerah dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga hanya bisa dilakukan pengukuran pada 2 Provinsi.

Berikut perolehan hasil Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional pada Tahun 2024 di masing-masing daerah:

Tabel 3.20 Lokasi dan Hasil Pengukuran IKN Tahun 2024

NO	PROVINSI	HASIL	KABUPATEN/KOTA	HASIL
1	DKI Jakarta	68,35	Kota Jakarta Selatan	61,8
			Kabupaten Kepulauan Seribu	63,84
			Kota Jakarta Pusat	67,14
			Kota Jakarta Timur	70,42
			Kota Jakarta Utara	72,35
			Kota Jakarta Barat	74,56
2	Kalimantan Selatan	77,44	Kota Banjarmasin	72,11
			Kabupaten Tabalong	74,66
			Kabupaten Tanah Laut	74,87
			Kota Baru	75
			Kabupaten Hulu Sungai Utara	75,33
			Kabupaten Hulu Sungai Selatan	75,36
			Kabupaten Hulu Sungai Tengah	76,38
			Kabupaten Barito Kuala	76,84
			Kabupaten Balangan	78,66
			Kabupaten Tanah Bumbu	78,79
			Kabupaten Tapin	81,5
			Kota Banjarbaru	82,09
			Kabupaten Banjar	85,13
<b>Agregat: 72,87</b>				

Sumber: Penetapan IKN Tahun 2024

Dari formula pengukuran di atas, didapatkan nilai Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2024 sebesar 72,87. Selanjutnya realisasi 72,87 dibandingkan dengan dengan target sesuai Renstra dimana indikasi target IKN tahun 2024 sebesar 64 sehingga tercapai persentase sebesar 113%. Nilai Indeks Kewaspadaan Nasional

sebesar 72.87 dimaksud berada pada kategorisasi Baik yang menggambarkan bahwa tingkat kewaspadaan daerah tersebut cukup baik namun tetap diperlukan strategi dan program kegiatan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional di daerah dan meningkatkan kualitas kewaspadaan di daerah.

Tabel 3.21 Kategorisasi Nilai Indeks Kewaspadaan Nasional

Kategori	Rentang Nilai	Kode
Sangat Baik	>100	Biru
Baik	80-100	Hijau
Cukup	50-79	Kuning
Kurang	<49	Merah
Sangat Tidak Baik	0 - 19	Merah

Adapun hasil pengukuran IKN per dimensi pada setiap daerah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.22 Hasil Pengukuran IKN 5 Dimensi Provinsi DKI Jakarta

No	Provinsi DKI Jakarta	Dimensi				
		Konflik Pemerintahan	Forkopimda	Media	Kewaspadaan Dini	Orang Asing
1.	Jakarta Pusat	78,91	54,08	59,78	92,91	50,00
2.	Jakarta Timur	73,77	50,62	71,67	88,54	67,50
3.	Jakarta Barat	78,05	67,95	99,06	85,63	42,10
4.	Jakarta Selatan	66,41	60,83	60,15	83,49	38,10
5.	Jakarta Utara	78,36	38,73	71,70	95,68	77,30
6.	Kepulauan Seribu	74,96	42,18	63,33	86,25	52,50

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Tabel 3.23 Hasil Pengukuran IKN 5 Dimensi Provinsi Kalimantan Selatan

No	Provinsi DKI Jakarta	Dimensi				
		Konflik Pemerintahan	Forkopimda	Media	Kewaspadaan Dini	Orang Asing
1.	Kota Banjar Baru	91,04	89,95	75,36	96,94	57,15
2.	Kota Banjarmasin	73,44	84,17	64,80	88,17	50,00
3.	Kotabaru	76,13	64,99	78,55	98,17	57,15
4.	Barito Kuala	79,74	86,16	69,68	92,78	55,85
5.	Hulu Sungai Utara	85,24	80,28	64,30	89,62	47,25
6.	Tapin	99,37	98,04	69,57	93,43	43,05
7.	Tabalong	81,22	92,59	46,21	94,95	58,35
8.	Tanah Bumbu	75,70	74,85	78,60	95,40	69,40
9.	Tanah Laut	83,60	80,76	68,41	88,94	52,65
10.	Banjar	98,44	93,37	83,93	97,54	52,40
11.	Hulu Sungai Selatan	83,29	82,16	67,83	90,58	52,95
12.	Hulu Sungai Tengah	78,29	80,31	68,93	92,63	61,75
13.	Balangan	85,58	79,81	69,82	94,24	63,85

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target nilai Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2024, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan Diklat Intelijen dan Antisipasi cegah dini menjelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
2. Pelaksanaan rapat Koordinasi dalam rangka meningkatkan Kewaspadaan informasi dan media di Kota Tangerang tahun 2024.
3. Pelaksanaan Forum persaudaraan masyarakat melanesia Indonesia di Provinsi Yogyakarta.
4. Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Modul Penanganan Konflik Pemerintahan.
5. Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tahun 2024.
7. Komunikasi Sosial Bidang Kewaspadaan Nasional Tahun 2024.

Apabila melihat realisasi Indeks Kewaspadaan Nasional selama 5 tahun terakhir, terlihat tren yang fluktuatif yang disebabkan oleh Adanya penyesuaian dan perubahan terhadap:

1. Instrumen, metode survey dan perubahan terhadap responden survey.
2. Regulasi atau kebijakan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kemendagri.
3. Pelaksanaan survey Tahun 2024 dilakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan respondendenganberbagaisgmen, sehingga memerlukan sinergitas dan kerjasama yang lebih baik.

Secara umum, meskipun ada penurunan capaian dari tahun ke tahun setelah 2022, kinerja tetap berada di atas target (>100%). Dalam rangka perbaikan ke depannya, diperlukan kebijakan yang lebih kuat dalam implementasi pengukuran IKN di daerah, dan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor utama penyebab penurunan agar strategi yang lebih baik bisa diterapkan di tahun berikutnya.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja, yaitu:

1. Evaluasi dan Perbaikan Strategi dengan dilakukannya perubahan dan penyempurnakan Dimensi, Variabel dan Indikator dari Tahun 2021 s/d 2024, berdasarkan:
  - a. Benchmarking dengan indeks lainnya yang lebih komprehensif dan implementatif diseluruh wilayah.

- b. Peningkatan efisiensi kerja melalui otomatisasi atau penyederhanaan proses, menggunakan media elektronik, namun per;u ditentukan dengan jelas batasan penggunaan media.
2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dilakukannya perubahan dan penambahanjumlahrespondendanmerekrut enumerator di daerah.
3. Optimalisasi Teknologi dan Sistem Kerja, melalui:
  - a. Optimalisasi sistem digital atau perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisiensi.
  - b. Pemanfaatan data analytics untuk memprediksitrendanmembuatkeputusan berbasis data.
  - c. Integrasi sistem kerja agar lebih sinkron dan mengurangi hambatan administratif.
4. Meningkatkan Dukungan dan Sumber Daya, melalui:
  - a. Pengalokasikan sumber daya yang lebih optimal, baik SDM, anggaran, maupun alat kerja.
  - b. Peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan dukungan atau referensi terbaik.

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya selama pelaksanaan kinerja, yaitu:

1. Optimalisasi SDM dan teknologi yang menghasilkan output lebih tinggi dari target.
2. Metode kerja baru atau strategi yang lebih efektif.





# SASARAN 4

## Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan amanat pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana trantibumlinmas merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaannya telah diterbitkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan

Kebakaran, Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana.

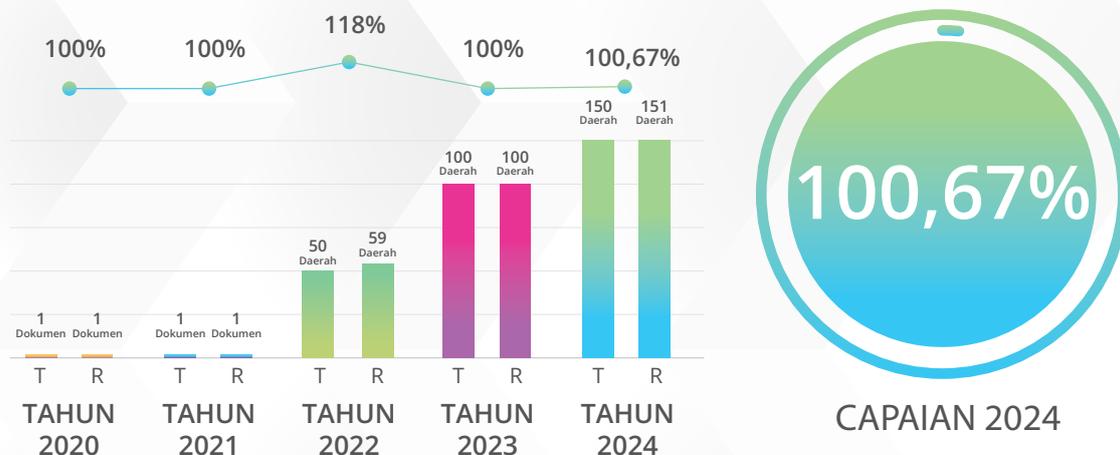
Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas" diperoleh sebesar 100,67%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil. Hal ini didukung oleh capaian indikator Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik" dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150 Daerah	151 Daerah	100,67%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				100,67%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



## Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik



Dengan adanya hasil pengukuran atas Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas di daerah yang merupakan urusan wajib layanan dasar, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan strategis di tingkat pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan trantibumlinmas

T = Target R = Realisasi

Salah satu sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Peningkatan penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan amanat pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana Trantibumlinmas merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaannya telah diterbitkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran, Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki Tugas dan Fungsi sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-699 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang diukur melalui 4 indeks komposit penilaiannya, yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan aspek penilaian yang meliputi Implementasi Penegakan Peraturan Daerah/

Peraturan Kepala Daerah, Implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sarana dan Prasarana dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP.

2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, dengan aspek penilaian yang meliputi Kelembagaan penanggulangan bencana, Manajemen Sumber Daya Manusia penanggulangan bencana, Kebijakan penanggulangan bencana, Pendanaan penanggulangan bencana, Manajemen Layanan Kebencanaan, Kepemimpinan pemangku penanggulangan bencana.
3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan aspek Fungsi dan Kebijakan Satlinmas, Manajemen Sumber Daya Manusia, Perberdayaan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Satlinmas.
4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran, dengan aspek penilaian yang meliputi Kelembagaan, Perencanaan Anggaran Penanggulangan Kebakaran, Pemenuhan Capaian SPM, Pemenuhan Sarana Prasarana, Pemenuhan SDM Tersertifikasi, Pemberdayaan Masyarakat.

Metode perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihasilkan dari penghitungan 4 indeks komposit di atas dengan metode Pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan diagregasikan sesuai kondisi data (Additive Aggregation Methods), dengan formulasi sebagai berikut:

$$IKU = \sum_{q=1}^Q w_q I_q$$

Keterangan:

IKU : Nilai Indeks Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik

$w_q$  : Bobot Indikator Kinerja Program ke-i

$I_q$  : Nilai Indikator Kinerja Program ke-i

Atau lebih spesifiknya rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IKU = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{tantribum} \times I_{tantribum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

Pengkategorian daerah berdasarkan hasil formula di atas dilakukan dengan rentang nilai sebagai berikut:



Tabel 3.25 Kategorisasi Indeks Trantibumlinmas

Rentang Nilai	Kategori
0,00 – 25,00	Buruk
25,01 – 50,00	Cukup
50,01 – 80,00	Baik
80,01 – 100,00	Sangat Baik

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Tabel 3.26 Contoh Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Kab/Kota	Nilai Capaian IPKKU	Nilai Capaian Satlinmas	Nilai Capaian Kebakaran	Nilai Capaian Bencana	Akumulasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
	0,25	0,25	0,25	0,25		
Kota Salatiga	90,154	81,640	68,000	88,333	82,032	Kategori Baik

Formula perhitungan yang digunakan sebagai berikut:

$$IPT = (0,2 \times 88,33) + (0,25 \times 90,15) + (0,25 \times 81,64) + (0,25 \times 68,00) = 82,032$$

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga perhitungan nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang dilakukan di 514 daerah dengan target 150 daerah yang berkategori baik. Realisasi daerah dengan Indeks Trantibumlinmas Tahun 2024 telah melampaui target dengan 151 daerah yang berkategori sangat baik dan baik. Dalam 3 Tahun terakhir pelaksanaan penghitungan Indeks Trantibumlinmas, hasil capaian

menunjukkan hasil yang memuaskan dengan peningkatan jumlah daerah yang berkategori sangat baik dan baik serta telah mencapai target di tiap tahunnya. Hasil capaian Nilai indeks Trantibumlinmas Tahun 2024 di daerah dikategorikan sebagai berikut:

- 22 daerah dengan kategori sangat baik.
- 129 daerah dengan kategori baik.
- 200 daerah dengan kategori cukup.
- 163 daerah dengan kategori buruk.



Tabel 3.27 Daftar Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah Berkategori Sangat Baik dan Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
1	Kota Surakarta	87,56	99,99	98,66	100,00	96,55	IKU Sangat Baik
2	Kota Surabaya	88,89	99,99	96,43	80,00	91,33	IKU Sangat Baik
3	Kabupaten Kediri	92,00	96,15	97,99	73,00	89,79	IKU Sangat Baik
4	Kabupaten Sumbawa	83,67	85,56	95,01	93,00	89,31	IKU Sangat Baik
5	Kabupaten Malang	91,11	94,64	93,48	73,00	88,06	IKU Sangat Baik
6	Kabupaten Cilacap	84,33	94,57	98,66	73,00	87,64	IKU Sangat Baik
7	Kabupaten Indragiri Hilir	83,22	97,86	95,60	73,00	87,42	IKU Sangat Baik
8	Kabupaten Magelang	91,50	99,14	84,91	73,00	87,14	IKU Sangat Baik
9	Kabupaten Luwu	86,89	94,62	73,54	93,00	87,01	IKU Sangat Baik
10	Kota Banda Aceh	80,67	94,62	97,32	71,00	85,90	IKU Sangat Baik
11	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	79,45	99,32	81,86	81,00	85,41	IKU Sangat Baik
12	Kabupaten Sukoharjo	89,72	99,99	85,83	66,00	85,39	IKU Sangat Baik
13	Kota Madiun	85,78	69,55	97,35	88,00	85,17	IKU Sangat Baik
14	Kota Bandung	82,56	72,43	91,11	93,00	84,78	IKU Sangat Baik
15	Kabupaten Blitar	88,11	97,65	84,70	68,00	84,61	IKU Sangat Baik
16	Kabupaten Badung	90,06	71,52	90,38	85,00	84,24	IKU Sangat Baik
17	Kabupaten Sumenep	84,56	93,15	97,03	61,00	83,93	IKU Sangat Baik
18	Kabupaten Tuban	83,78	99,32	80,22	68,00	82,83	IKU Sangat Baik
19	Kota Semarang	77,45	73,25	97,99	78,00	81,67	IKU Sangat Baik
20	Kabupaten Lamongan	87,45	89,40	83,68	66,00	81,63	IKU Sangat Baik
21	Kabupaten Ponorogo	84,17	99,32	75,47	66,00	81,24	IKU Sangat Baik
22	Kabupaten Probolinggo	86,06	93,79	76,76	68,00	81,15	IKU Sangat Baik
23	Kabupaten Bone	78,33	86,11	76,89	73,00	78,58	IKU Baik
24	Kota Tanjung Pinang	78,11	89,12	73,82	73,00	78,51	IKU Baik
25	Kota Mataram	68,56	71,08	97,70	73,00	77,59	IKU Baik
26	Kabupaten Paser	82,78	33,33	100,00	93,00	77,28	IKU Baik
27	Kota Tangerang Selatan	83,22	33,33	93,04	95,00	76,15	IKU Baik
28	Kota Administrasi Jakarta Timur	89,89	35,95	83,72	93,00	75,64	IKU Baik
29	Kabupaten Karangasem	83,56	33,33	90,28	93,00	75,04	IKU Baik
30	Kota Administrasi Jakarta Utara	89,89	35,95	78,73	93,00	74,39	IKU Baik
31	Kota Kendari	79,78	33,33	94,18	90,00	74,32	IKU Baik
32	Kota Bogor	84,00	33,33	89,84	90,00	74,29	IKU Baik
33	Kabupaten Sukabumi	85,72	33,33	89,25	88,00	74,08	IKU Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
34	Kota Administrasi Jakarta Selatan	89,89	35,95	77,19	93,00	74,01	IKU Baik
35	Kabupaten Kendal	93,45	33,33	94,15	73,00	73,48	IKU Baik
36	Kabupaten Sleman	95,67	99,32	98,66	0,00	73,41	IKU Baik
37	Kabupaten Bogor	84,06	33,33	92,43	83,00	73,20	IKU Baik
38	Kabupaten Lombok Utara	87,33	42,07	90,83	71,00	72,81	IKU Baik
39	Kota Yogyakarta	0,00	99,14	97,32	93,00	72,37	IKU Baik
40	Kota Samarinda	0,00	98,47	89,84	100,00	72,08	IKU Baik
41	Kota Banjarmasin	0,00	99,99	99,70	88,00	71,92	IKU Baik
42	Kabupaten Bener Meriah	87,00	33,33	98,66	66,00	71,25	IKU Baik
43	Kabupaten Pangandaran	77,56	36,88	88,94	78,00	70,34	IKU Baik
44	Kota Balikpapan	0,00	85,98	100,00	95,00	70,25	IKU Baik
45	Kabupaten Buton	67,22	39,09	85,20	88,00	69,88	IKU Baik
46	Kabupaten Nganjuk	0,00	98,10	92,87	88,00	69,74	IKU Baik
47	Kota Tegal	88,22	97,25	91,17	0,00	69,16	IKU Baik
48	Kota Blitar	88,11	98,52	0,00	90,00	69,16	IKU Baik
49	Kabupaten Tanah Bumbu	81,11	33,33	93,68	68,00	69,03	IKU Baik
50	Kabupaten Pacitan	87,22	33,33	86,24	68,00	68,70	IKU Baik
51	Kota Administrasi Jakarta Pusat	89,89	35,95	54,85	93,00	68,42	IKU Baik
52	Kabupaten Wonogiri	87,67	97,85	87,68	0,00	68,30	IKU Baik
53	Kabupaten Gresik	86,89	97,71	0,00	88,00	68,15	IKU Baik
54	Kabupaten Lampung Selatan	74,56	33,33	71,31	93,00	68,05	IKU Baik
55	Kabupaten Bojonegoro	0,00	81,32	97,32	93,00	67,91	IKU Baik
56	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	82,78	33,33	97,32	58,00	67,86	IKU Baik
57	Kabupaten Sampang	82,56	33,33	83,89	71,00	67,69	IKU Baik
58	Kabupaten Magetan	88,67	94,62	86,35	0,00	67,41	IKU Baik
59	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	81,00	33,33	83,73	71,00	67,27	IKU Baik
60	Kota Palangkaraya	75,00	99,99	0,00	93,00	67,00	IKU Baik
61	Kabupaten Ciamis	88,78	87,88	90,48	0,00	66,78	IKU Baik
62	Kabupaten Wajo	85,95	89,45	89,54	0,00	66,23	IKU Baik
63	Kabupaten Purwakarta	91,67	94,75	0,00	78,00	66,10	IKU Baik
64	Kabupaten Tegal	90,00	33,33	72,55	68,00	65,97	IKU Baik
65	Kabupaten Muara Enim	81,33	33,33	53,70	95,00	65,84	IKU Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
66	Kabupaten Seluma	71,33	33,33	92,11	66,00	65,69	IKU Baik
67	Kabupaten Lebong	80,78	33,33	87,64	61,00	65,69	IKU Baik
68	Kabupaten Ogan Komering Ulu	77,61	91,86	0,00	93,00	65,62	IKU Baik
69	Kabupaten Subang	0,00	93,88	89,84	78,00	65,43	IKU Baik
70	Kabupaten Bantul	82,11	33,33	73,22	73,00	65,42	IKU Baik
71	Kabupaten Bekasi	0,00	85,87	96,42	78,00	65,07	IKU Baik
72	Kabupaten Kampar	77,45	33,33	78,53	68,00	64,33	IKU Baik
73	Kabupaten Hulu Sungai Utara	74,22	92,86	0,00	90,00	64,27	IKU Baik
74	Kabupaten Lumajang	88,33	85,35	0,00	83,00	64,17	IKU Baik
75	Kota Mojokerto	0,00	98,52	89,70	68,00	64,06	IKU Baik
76	Kabupaten Bondowoso	88,00	99,32	0,00	68,00	63,83	IKU Baik
77	Kabupaten Banyuwangi	89,67	80,73	0,00	83,00	63,35	IKU Baik
78	Kabupaten Jombang	85,45	94,62	0,00	73,00	63,27	IKU Baik
79	Kota Probolinggo	86,11	83,53	0,00	83,00	63,16	IKU Baik
80	Kota Magelang	81,78	73,39	96,12	0,00	62,82	IKU Baik
81	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	77,67	99,33	73,22	0,00	62,56	IKU Baik
82	Kabupaten Trenggalek	87,33	94,60	0,00	68,00	62,48	IKU Baik
83	Kota Batu	91,45	65,48	0,00	93,00	62,48	IKU Baik
84	Kota Subulussalam	80,33	33,33	78,11	58,00	62,44	IKU Baik
85	Kota Medan	77,67	98,48	0,00	73,00	62,29	IKU Baik
86	Kabupaten Tanah Laut	73,11	99,32	0,00	75,00	61,86	IKU Baik
87	Kota Tasikmalaya	0,00	88,36	80,63	78,00	61,75	IKU Baik
88	Kota SuKabupatenumi	85,11	72,51	0,00	88,00	61,41	IKU Baik
89	Kabupaten Aceh Timur	67,33	33,33	88,95	56,00	61,40	IKU Baik
90	Kabupaten Pasuruan	80,83	98,47	0,00	66,00	61,33	IKU Baik
91	Kabupaten Ketapang	74,45	73,31	97,32	0,00	61,27	IKU Baik
92	Kota Padang Sidempuan	0,00	78,24	94,98	71,00	61,06	IKU Baik
93	Kabupaten Tulungagung	88,00	99,24	0,00	56,00	60,81	IKU Baik
94	Kota Padang	92,67	70,33	0,00	80,00	60,75	IKU Baik
95	Kota Solok	78,67	33,33	59,58	71,00	60,64	IKU Baik
96	Kota Bandar Lampung	0,00	79,37	95,01	68,00	60,59	IKU Baik
97	Kabupaten Lombok Barat	88,78	81,81	0,00	71,00	60,40	IKU Baik
98	Kabupaten Aceh Barat	61,56	93,31	84,32	0,00	59,80	IKU Baik
99	Kabupaten Tapin	0,00	88,42	77,57	73,00	59,75	IKU Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
100	Kabupaten Grobogan	84,22	86,47	0,00	68,00	59,67	IKU Baik
101	Kabupaten Pekalongan	86,78	75,87	75,65	0,00	59,58	IKU Baik
102	Kabupaten Maros	0,00	92,35	84,62	61,00	59,49	IKU Baik
103	Kabupaten Bengkalis	66,56	90,98	0,00	80,00	59,38	IKU Baik
104	Kota Bontang	0,00	71,30	81,69	83,00	59,00	IKU Baik
105	Kabupaten Kotawaringin Timur	74,83	83,07	0,00	78,00	58,98	IKU Baik
106	Kabupaten Bombana	78,33	89,32	0,00	68,00	58,91	IKU Baik
107	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	82,11	71,53	80,47	0,00	58,53	IKU Baik
108	Kabupaten Cianjur	90,22	75,87	0,00	68,00	58,52	IKU Baik
109	Kabupaten Sidoarjo	91,11	84,56	0,00	58,00	58,42	IKU Baik
110	Kabupaten Pamekasan	0,00	91,85	75,65	66,00	58,37	IKU Baik
111	Kabupaten Lampung Utara	64,33	82,92	0,00	76,00	55,81	IKU Baik
112	Kota Tangerang	90,89	33,33	97,32	0,00	55,39	IKU Baik
113	Kabupaten Siak	0,00	81,35	72,64	66,00	55,00	IKU Baik
114	Kabupaten Aceh Tamiang	79,00	89,90	0,00	51,00	54,98	IKU Baik
115	Kabupaten Administrasi Kep. Seribu	89,89	35,95	0,00	93,00	54,71	IKU Baik
116	Kota Administrasi Jakarta Barat	89,89	35,95	0,00	93,00	54,71	IKU Baik
117	Kota Cirebon	92,11	33,33	0,00	93,00	54,61	IKU Baik
118	Kabupaten Jember	79,00	71,27	0,00	68,00	54,57	IKU Baik
119	Kabupaten Lombok Tengah	0,00	86,40	74,83	56,00	54,31	IKU Baik
120	Kabupaten Bandung	0,00	33,33	95,60	88,00	54,23	IKU Baik
121	Kabupaten Mesuji	0,00	33,33	90,52	93,00	54,21	IKU Baik
122	Kabupaten Kotawaringin Barat	0,00	74,58	76,86	65,00	54,11	IKU Baik
123	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,00	33,33	92,92	90,00	54,06	IKU Baik
124	Kabupaten Labuhanbatu	62,61	77,17	75,47	0,00	53,81	IKU Baik
125	Kabupaten Lampung Barat	79,67	74,25	0,00	61,00	53,73	IKU Baik
126	Kabupaten Tabalong	81,67	74,81	0,00	58,00	53,62	IKU Baik
127	Kabupaten Barito Utara	83,56	33,33	97,32	0,00	53,55	IKU Baik
128	Kabupaten Purworejo	89,61	33,33	91,17	0,00	53,53	IKU Baik
129	Kota Denpasar	85,00	33,33	0,00	95,00	53,33	IKU Baik
130	Kabupaten Tabanan	87,00	33,33	92,11	0,00	53,11	IKU Baik
131	Kabupaten Pati	90,00	33,33	88,91	0,00	53,06	IKU Baik
132	Kabupaten Lebak	77,33	73,57	0,00	61,00	52,98	IKU Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
133	Kabupaten Temanggung	84,22	33,33	94,17	0,00	52,93	IKU Baik
134	Kabupaten Bangkalan	67,11	79,53	0,00	65,00	52,91	IKU Baik
135	Kabupaten Kotabaru	0,00	75,28	73,22	63,00	52,88	IKU Baik
136	Kabupaten Belitung	84,33	33,33	93,68	0,00	52,84	IKU Baik
137	Kabupaten Buleleng	0,00	33,33	83,48	93,00	52,45	IKU Baik
138	Kabupaten Blora	88,67	33,33	87,21	0,00	52,30	IKU Baik
139	Kabupaten Banyumas	91,33	33,33	84,09	0,00	52,19	IKU Baik
140	Kabupaten Bengkulu Selatan	80,78	35,85	91,15	0,00	51,94	IKU Baik
141	Kabupaten Nagan Raya	79,22	33,33	94,81	0,00	51,84	IKU Baik
142	Kota Depok	0,00	33,33	85,63	88,00	51,74	IKU Baik
143	Kabupaten Pulang Pisau	81,78	33,33	91,16	0,00	51,57	IKU Baik
144	Kabupaten Pesawaran	84,78	48,20	72,88	0,00	51,47	IKU Baik
145	Kota Bau Bau	0,00	33,33	88,76	83,00	51,27	IKU Baik
146	Kabupaten Enrekang	82,67	33,33	88,95	0,00	51,24	IKU Baik
147	Kabupaten Aceh Besar	0,00	33,33	97,04	73,00	50,84	IKU Baik
148	Kabupaten Sijunjung	0,00	33,33	89,25	80,00	50,64	IKU Baik
149	Kota Bengkulu	84,00	33,33	0,00	85,00	50,58	IKU Baik
150	Kabupaten Gunungkidul	88,00	33,33	80,69	0,00	50,50	IKU Baik
151	Kabupaten Lampung Timur	80,72	41,30	79,64	0,00	50,42	IKU Baik

Keberhasilan pencapaian Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik didukung dengan penggunaan media sistem informasi pemenuhan data dukung melalui Aplikasi Trantibumlinmas (<https://trantibumlinmas.kemendagri.go.id/>) sebagai sistem informasi penginputan data serta monitoring pelaksanaan urusan Trantibumlinmas di daerah. Selain itu, terdapat juga sistem informasi pada 4 sub urusan Indeks Trantibumlinas, antara lain:

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (Simlinmas) pada <https://simlinmas.kemendagri.go.id>
2. Aplikasi Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja (Simplop) pada <https://satpolpp.kemendagri.go.id>
3. Aplikasi Pagar SPM Bencana pada <https://pagarbencana.kemendagri.go.id>
4. Penyebaran kuisisioner p[ada setiap kegiatan sub urusan kebakaran yang melibatkan peserta dari pemerintah daerah.

Gambar 3.11 Aplikasi Trantibumlinmas



Pelaksanaan kinerja indikator jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik didukung dengan beberapa RO Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024, antara lain:

1. Penerapan SPM sub bidang bencana dengan capaian penerapan di 542 daerah dari target 542 daerah.
2. Penerapan SPM sub bidang kebakaran dengan capaian penerapan di 542 daerah dari target 542 daerah.
3. Penerapan SPM sub bidang Trantibum dengan capaian penerapan di 542 daerah dari target 542 daerah.
4. Pelaksanaan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana dengan capaian pelaksanaan di 34 Daerah dari target 34 Daerah
5. Fasilitasi dan dukungan Trantibumlinmas dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan capaian 50 daerah dari target 38 daerah.
6. Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah dengan capaian 34 daerah dari target 34 daerah.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil telah melakukan serangkaian Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Pemutakhiran data capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, Sub Urusan Trantibum, Sub Urusan Kebakaran dan Manajemen Satlinmas.
2. Peningkatan kapasitas pengintegrasian dan pengarusutamaan terkait Trantibumlinmas.
3. Penyusunan Standardisasi Sarana Prasarana Trantibumlinmas di Daerah melalui Petunjuk Teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah kepada Daerah.
4. Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Implementasi Mutu Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas.
5. Pemutakhiran data layanan pencegahan dan kesiapsiagaan urusan Trantibumlinmas.
6. Meningkatkan peran Kemendagri melalui asistensi dan supervisi pelaksanaan teknis urusan trantibumlinmas di daerah.
7. Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam urusan trantibumlinmas.
8. Peningkatan layanan konsultasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan/OPD yang membidangi urusan trantibumlinmas di

daerah.

Kendala yang dihadapi pada pencapaian IKU ini yang dirincikan melalui 4 indeks kompositnya, antara lain:

1. Sub Urusan Trantibum terdapat kendala pada indikator Sumber Daya Manusia. Perlu adanya peningkatan kapasitas pada Satpol PP, baik dalam bentuk diklat, bimtek, dan pelatihan sejenis lainnya sehingga SDM pada Satpol PP dapat berkinerja baik dan unggul.
2. Sub Urusan Bencana terdapat kendala pada indikator pendanaan. Proporsi pendanaan dalam rangka Penanggulangan Bencana di daerah yang bersumber dari APBD masih belum maksimal, yaitu masih belum mencapai 1% dari total APBD. Mayoritas daerah juga masih mengandalkan bantuan pemerintah pusat melalui Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN untuk menangani Darurat Bencana di daerahnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penanggulangan bencana masih belum prioritas di daerah. Padahal, paradigma penanggulangan bencana sudah berubah yang semula reaktif menjadi preventif sehingga membutuhkan dukungan dari APBD.
3. Sub Urusan Perlindungan Masyarakat pada indikator kebijakan yang disebabkan beberapa faktor, antara lain:
  - a. Belum menetapkan SK Satgas Linmas sebagai bentuk penguatan kelembagaan penyelenggaraan Linmas di daerah
  - b. Belum termuatnya kebijakan kepala daerah terkait pelibatan Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas di dalam RPJMD.
  - c. Belum menetapkan regulasi berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah terkait pedoman pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas.
  - d. Belum menyusun instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program-kegiatan terkait pelibatan Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas.
4. Sub Urusan Kebakaran terdapat kendala pada indikator pemenuhan sarana dan prasarana. Banyak daerah yang belum mampu memenuhi kebutuhan sarana prasarana, khususnya biaya Pembangunan Pos Sektor pemadam kebakaran yang cukup besar. Terbatasnya anggaran menjadi kendala dalam pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain:

1. Sub Urusan Trantibum  
  - a. Melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi atas Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum di Kabupaten/Kota;
  - b. Meningkatkan kualitas manajemen SDM Pol PP di daerah melalui penyusunan standar kompetensi jabatan bersama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegak perda/perkada, serta optimalisasi perhitungan kebutuhan fokasi jabatan Pol PP di daerah
  - c. Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana trantibumlinmas sub urusan trantibum
2. Sub Urusan Bencana  
  - a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyiapkan anggaran yang memadai dalam APBD untuk pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana.
  - b. Memperkuat SDM BPBD dalam mendukung capaian SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota melalui Bimbingan Teknis Penerapan SPM Sub Urusan Bencana.
  - c. Melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi atas Penerapan SPM Sub Urusan Bencana di Kabupaten/Kota.
  - d. Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana trantibumlinmas sub urusan bencana.
3. Sub Urusan Kebakaran  
  - a. Mengoptimalkan penerapan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPM Sub Urusan Kebakaran dan regulasi pendukung lainnya.
  - b. Mendorong daerah untuk mengoptimalkan penganggaran pada penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran
  - c. Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar sesuai standar layanan kebakaran.
  - d. Mendorong pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan baik melalui pemerintah pusat maupun in house training.
4. Sub Urusan Perlindungan Masyarakat  
  - a. Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas sebagaimana amanat Permendagri No 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas.
  - b. Mendorong prioritas penggunaan anggaran terhadap penyelenggaraan satlinmas untuk mendukung penyelenggaraan Trantibumlinmas sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar .
  - c. Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana satlinmas di daerah melalui bantuan pemerintah dan mekanisme pendanaan lainnya.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah penggunaan sistem informasi digital dalam melakukan penginputan data Indeks Trantibumlinmas melalui Website Trantibumlinmas. Website ini juga digunakan untuk memonitoring pelaksanaan urusan Trantibumlinmas di daerah. Dengan adanya aplikasi ini, pelaksanaan pengumpulan informasi Trantibumlinmas menjadi lebih cepat dan akurat serta mempermudah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah pada urusan Trantibumlinmas.



# SASARAN 5

## Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Pembangunan SDM di Indonesia merupakan Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi butir dalam nawa-cita, serta menjadi salah satu dari 5 (lima) arahan program prioritas pembangunan Indonesia maju. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM termasuk Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya melakukan percepatan pengembangan sumber daya manusia baik di internal Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah daerah. Pengembangan SDM aparatur dimaksud dilakukan melalui sertifikasi, pengembangan kompetensi yang sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan setiap ASN minimal 20 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Selain hal tersebut,

pengembangan SDM dilakukan terhadap . Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini terhadap Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Selanjutnya kegiatan pengajaran, pelatihan, pengasuhan bagi mahasiswa/praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri, dan lulusannya akan ditempatkan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui pengembangan SDM yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri diharapkan mampu mempercepat pembangunan bangsa yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia

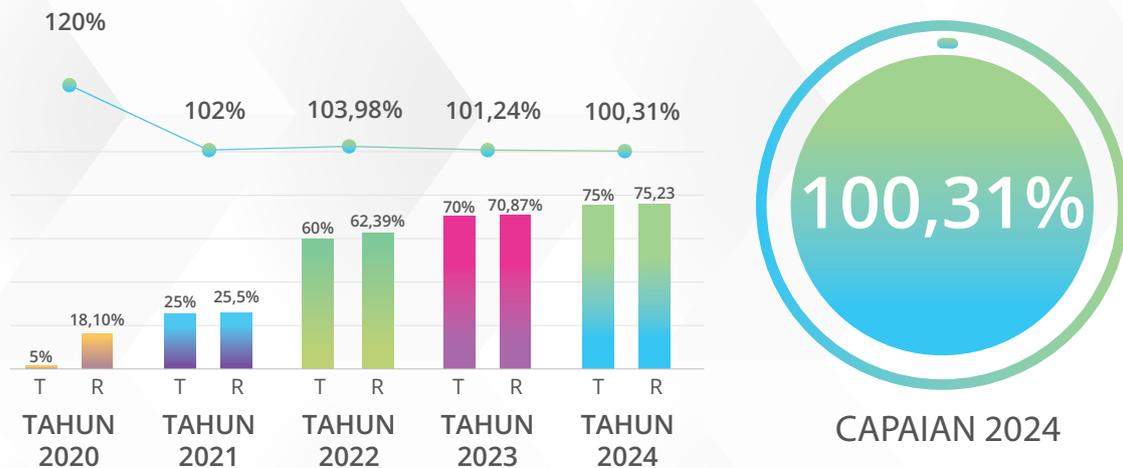
Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri” diperoleh sebesar 100,70%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil. Hal ini didukung oleh capaian 4 (empat) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	75,23%	100,31	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)	100	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
3	Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)	100	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
4	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	Nilai 3,69	102,50	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				100,70	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



## Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun



Pengembangan kapasitas SDM terselenggara optimal bagi ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah melalui sertifikasi dan pengembangan kompetensi yang dimodifikasi mengikuti platform pembelajaran pasca pandemi Covid 19, dengan skema pembiayaan yang bersumber dari APBN, PNBPN dan Fasilitas. Sebanyak 34.139 orang ASN dinyatakan lulus dan kompeten, yang diharapkan mampu memenuhi minimal 20 JP per tahun

T = Target R = Realisasi

Pemenuhan pengembangan kompetensi SDM Aparatur minimal 20 JP per tahun berperan penting dalam peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri. Dengan adanya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, kemampuan aparatur akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (K/L maupun pemerintah daerah).

Dari berbagai program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan, banyak aparatur yang menunjukkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini secara langsung mendukung tercapainya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, yang menjadi sasaran strategis yang ingin dicapai.

Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal (20JP) yang harus diikuti oleh setiap aparatur sipil negara (ASN). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri selain berfungsi untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) internal Kementerian Dalam

Negeri juga untuk ASN Pemerintah Daerah, sehingga perlu pemerataan sertifikasi dan pengembangan kompetensi baik di Kemendagri maupun Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan setiap ASN minimal 20 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum dijadikan sebagai dasar penghitungan capaian indikator dimaksud mengingat belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang-Undang tersebut.

Untuk mencapai implementasi tersebut, Kemendagri melalui BPSDM melakukan fungsinya yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia bagi ASN di internal Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan fasilitas. Hal ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi BPSDM yang tertuang pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yaitu standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi. Adapun Pengembangan SDM yang dimaksud mencakup kegiatan:

1. Sertifikasi (Uji Kompetensi).
2. Pengembangan kompetensi yang mencakup Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, dan Seminar/Webinar bagi aparatur pemerintahan dalam negeri pada jabatan fungsional dan manajerial.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah di reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2023 dan 2024 yang menyatakan bahwa IKU masih berorientasi pada Output dan bukan Outcome. Tetapi hal tersebut masih dipertimbangkan dikarenakan Indikator Kinerja Utama ini merupakan Indikator yang dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan sesuai pasal 203 ayat (3), (4), dan (4a) peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil menyatakan

bahwa setiap pns memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi pns yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university), sehingga IKU tersebut dapat dirubah/diperbaiki agar saat Rencana Strategis Tahun 2025-2029 tidak lagi berorientasi output tetapi sudah berorientasi outcome.

Penetapan target indikator dimaksud disesuaikan dengan target total yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 untuk pengembangan SDM Kemendagri dan pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi sebanyak 21.060 angkatan atau 702 orang.
2. Sertifikasi sebanyak 14.320 orang.
3. Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 10.000 orang.

Adapun persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun diukur melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pemenuhan PK} &= \frac{\text{Jumlah alumni PK} + \text{jumlah alumni Sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{jumlah alumni PK} + \text{jumlah alumni Sertifikasi yang menjadi target sesuai Renstra 2020 - 2024}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah alumni PK} + \text{jumlah sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{jumlah alumni PK} + \text{jumlah alumni Sertifikasi yang menjadi target sesuai renstra 2020 - 2024}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{30.908 \text{ orang} + 3.231 \text{ Orang} = 34.139}{31.060 \text{ Orang} + 14.320 \text{ Orang} = 45.380 \text{ Orang}} \times 100\% = 75,23\% \\
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 \text{Capaian} &= \frac{75,23\%}{75\%} \times 100\% = 100,31\%
 \end{aligned}$$

Indikator ini berasal dari penjabaran sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dan tujuan strategis peningkatan kapasitas dan sinergitas pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Untuk melihat capaian IKU, pembilang merupakan penjabaran dari jumlah alumni Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi dalam 1 Tahun dan penyebutnya dijabarkan dengan

jumlah alumni Pengembangan Kompetensi dan sertifikasi sesuai target renstra. Hal ini dilakukan untuk melihat kenaikan persentase IKU setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Utama Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per Tahun dapat dikatakan berhasil karena beberapa faktor-faktor pendukung keberhasilan Capaian IKU BPSDM antara lain:

1. Sertifikasi  
Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan Sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) melalui sumber dana Rupiah Murni, PNBPN dan Fasilitasi dengan bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal pemerintahan Desa, PPSDM regional dan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga sertifikasi dapat dilaksanakan dengan baik dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Adapun kegiatan sertifikasi yang mendukung tercapainya IKU antara lain (1) Sertifikasi Jabatan Fungsional PPUPD, (2) Sertifikasi Jabatan Fungsional Pol-PP, (3) Sertifikasi Pengelola Keuangan Daerah, (4) Sertifikasi Jabatan Administrator, (5) Sertifikasi Asesor Pemerintahan Dalam Negeri, dan (6) Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Pengembangan Kompetensi Prioritas Nasional  
Pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas nasional SDMA Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024, telah dilaksanakan seluruhnya dengan baik dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Kegiatan (Rincian Output) pengembangan Kompetensi Prioritas Nasional antara lain,
  - Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerapan SPM di Daerah Lingkup Pusat.
  - Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri.
  - Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
  - Aparatur yang meningkatkan Kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat).
  - Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah.
  - Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional.
3. Pengembangan Kompetensi yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN)  
Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan anggaran yang bersumber dari APBN dengan capaian inerja yang baik. Adapun kegiatan yang mendukung IKU antara lain:
  - Diklat Teknologi Pembelajaran pada 4 Daerah Otonomi Baru
  - Diklat Keuangan Daerah 4 Daerah Otonomi Baru
  - Diklat Perencanaan dan Penganggaran 4 Daerah Otonomi Baru
  - Diklat Tata Naskah Dinas 4 Daerah Otonomi Baru
  - Diklat Legal Drafting 4 Daerah Otonomi Baru
  - Diklat Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 4 DOB
  - Diklat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi ASN di Nusa Tenggara Timur Secara Virtual
  - TOT SIPD dalam Optimalisasi Keuangan dan Perencanaan Daerah;
  - TOT Keuangan Daerah
  - Rakor Teknis Persiapan orientasi DPRD Tahun 2024
  - Diklat Wawasan Kebangsaan
  - Diklat Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  - Diklat Kearsipan Bagi ASN Di Lingkungan Kemendagri
  - Diklat Dasar Pol PP Bagi Pengawas dan Pelaksana
  - Pelatihan PPUPD Penjenjangan Ahli Pertama
  - Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Level 1 Blended Learning
  - Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Untuk Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C - Blended Learning
  - Diklat Pengelolaan Informasi Bagi Pejabat Fungsional Pustakawan
  - Diklat Dasar Pol PP bagi PNS yang diangkat dalam Formasi Jabatan Fungsional
  - Diklat Pemadam Kebakaran - Kualifikasi Pemadam I
  - Diklat Pemadam Kebakaran
4. Pengembangan Kompetensi yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui anggaran PNBPN yang terdiri dari lingkup BPSDM Kantor Pusat, Regional dan Balai sehingga peserta dapat melaksanakan pengembangan kompetensi dari seluruh Indonesia dapat

terakomodir sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Adapun kegiatan yang mendukung IKU antara lain:

- Diklat Asesor Kompetensi Pemerintahan
- TOT Kompetensi Pemerintahan
- Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah
- Diklat Penanganan Konflik Sosial
- Diklat Pemantapan Tugas Sekretaris Perangkat Daerah Mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
- Diklat Pengelolaan dan Pengamanan basis Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Diklat Penyelenggaraan Pemerintahan saat Tanggap Darurat dan Pascabencana
- Diklat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Diklat Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Diklat Tata Kelola Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Pemerintah Daerah
- Diklat Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Diklat Sekretaris Perangkat daerah Penghasil Pendapatan Asli Daerah
- Diklat Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Pemerintah Daerah
- Diklat Penegasan dan Penetapan Batas Desa
- Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah
- Diklat Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bagi Pemerintah Daerah
- Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah
- Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Diklat Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah
- Diklat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD
- Diklat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Diklat Penilaian Aset Daerah
- Diklat Tata Cara Penghapusan Aset Daerah
- Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
- Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah
- Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024
- cc. Training Of Trainers Orientasi DPRD
- Pelatihan Fasilitasi Penyusunan Pokok Pikiran DPRD Berbasis Elektronik bagi Pejabat Strategis Sekretariat DPRD
- Bimtek Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2024
- Diklat Kepamongprajaan bagi Camat
- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk II Blended Learning
- Diklat Analisis Jabatan
- Diklat Manajemen Resiko
- Diklat Tata Naskah Dinas
- Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Diklat Manajemen Kepegawaian
- Diklat Reviu RKA Berbasis SIPD
- Diklat Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Desa
- Diklat Audit Digital Investigasi melalui digital forensik
- Diklat Dasar Pol PP Bagi Jabatan Administrator
- Diklat Teknis Pemberkasan Bagi PPNS Penegak Perda
- Pelatihan Penata Perizinan
- Diklat Dasar Pol PP bagi Pengawas dan Pelaksana
- Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Muda
- Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Madya
- Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama
- Diklat Manajemen Pengawasan
- Diklat Reviu Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Diklat Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya
- Diklat Reviu LPPD
- Diklat Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa
- Diklat Audit Kinerja
- Diklat Reviu RKA Berbasis SIPD
- Diklat Reviu RKPD dan Perubahannya
- Dukungan Pengembangan Kompetensi Mekanisme PNB
- Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Muda
- Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Level 1
- Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Publikasi Bagi Pejabat Fungsional
- Diklat Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
- Diklat Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertahanan Bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

- Diklat Audit Digital Investigasi melalui Digital Forensik
- Diklat Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
- Resilience Training : Strategi Menghadapi Tantangan dan Perubahan dalam Pembangunan Kompetensi SDM Aparatur
- Pelatihan Audit Investigasi
- Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
- Diklat Reviu Kinerja dan BLUD Kabupaten Banjar Tahun 2024
- Pelatihan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Penyelenggaraan SPBE
- Pelatihan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI
- Pelatihan Manajemen Perkantoran Berbasis IT
- Training of Trainers Orientasi DPRD
- Diklat Reviu RPJPD 2025-2045 dan RPJMD (daring)
- Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan PPSDM Regional Yogyakarta
- Diklat Dasar Teknis Pemadam I / Diklat Pemadam Kebakaran - Kualifikasi Pemadam I
- Diklat Reviu Atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
- Pelatihan Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
- Pengembangan Kompetensi Pimpinan dan Widyaiswara Utama
- Diklat Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- Diklat Pengawasan Penerapan SPM
- Pelatihan Teknis Auditor Kinerja Berbasis Resiko bagi APIP
- Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- Pelatihan Teknis Pemanapan Tugas Sekretaris Perangkat Daerah
- Pelatihan Teknis Manajemen Pelayanan Publik
- Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas APIP

Pada Tahun 2024 capaian kinerja atas indikator ini adalah sebesar 75,23% dengan realisasi sebesar 100,31% dari target tahun 2024 sebesar 75%. Capaian atas Indikator ini diperoleh dari beberapa kegiatan Pengembangan Kompetensi, yaitu:

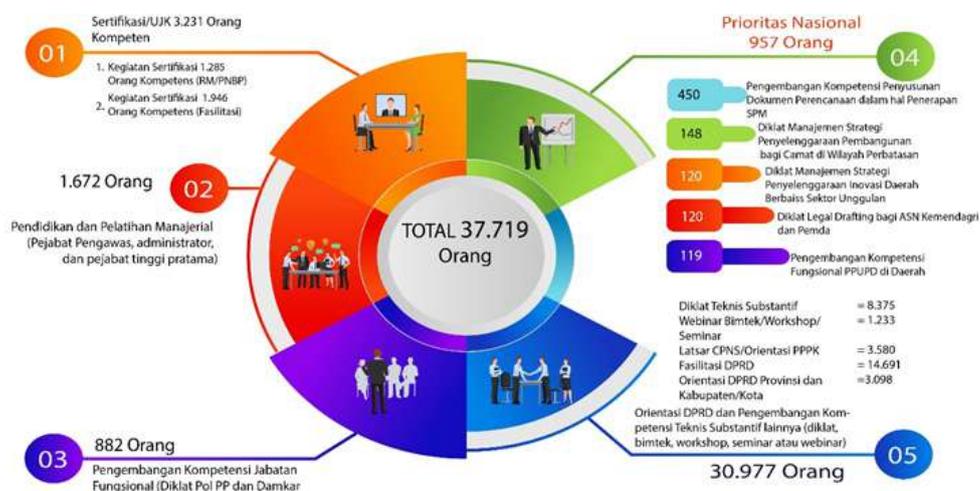
1. Target Jumlah Pejabat Strategis pemerintahan dalam negeri yang tersertifikasi dalam Rencana Strategis BPSDM Kemendagri Tahun

2024 sebanyak 3.486 orang dan dinyatakan kompeten sebanyak 3.231 orang (92,69%), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Kegiatan sertifikasi untuk Jabatan Aparatur Lingkup Kementerian Dalam Negeri, Sertifikasi Perpindahan Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Polisi Pamong Praja, Sertifikasi Jenjang PPUPD, Sertifikasi Jenjang Pemadam Kebakaran, Sertifikasi PPK, Bendahara, dan Sertifikasi Asesor melalui mekanisme APBN atau rupiah murni (RM) dan kontribusi PNPB yang dinyatakan kompeten sebanyak 1.285 orang.
  - b. Terlaksananya sertifikasi melalui mekanisme Fasilitasi sebagai bentuk pembinaan terhadap kegiatan sertifikasi di daerah oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) yang dinyatakan kompeten 1.946 orang.
2. Kegiatan pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas nasional SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024, telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah alumni sebanyak 957 orang alumni. Kegiatan pengembangan atas prioritas nasional tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:
    - a. Workshop/Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, trantibumlinmas, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebanyak 450 orang dengan rincian peserta 9 orang berasal dari Kemendagri dan 441 dari Pemda. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan SPM di daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
    - b. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antar Negara sebanyak 148 orang dengan rincian peserta 1 orang berasal dari Kemendagri dan 147 dari Pemda. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi Camat terutama bagi Camat di wilayah perbatasan.
    - c. Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah sebanyak 120 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung

- implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai media bagi para ASN untuk dilatih lebih kritis mengidentifikasi permasalahan di daerah dan memberikan solusi inovasi atas permasalahan tersebut guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Diklat Legal Drafting Bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Diklat Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 120 orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tujuan peningkatan kapasitas ASN dalam bidang legal drafting penyusunan peraturan guna meningkatkan kualitas output peraturan daerah, meningkatkan kemampuan analisis kebijakan bidang hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan antara satu dan lainnya yang bermuara terganggunya iklim investasi serta perlambatan pembangunan di daerah.
  - e. Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sebanyak 119 orang dengan rincian peserta 104 orang berasal dari Kemendagri dan 15 dari pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna peningkatan kapasitas pejabat fungsional PUPD di lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah baik secara anggaran maupun secara kinerja.
3. Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional meliputi pelaksanaan diklat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sebanyak 882 orang. Pengembangan kompetensi ini mencakup diklat teknis yang mendukung peningkatan kapasitas pejabat fungsional di bidangnya dan diklat dasar.
  4. Pendidikan dan Pelatihan Manajerial dengan sasaran pejabat pengawas, pejabat administrator, dan pejabat tinggi pratama sebanyak 1.672 orang alumni yang berasal dari pejabat lingkup Kemendagri 80 orang dan pemerintah daerah 1.592 Orang.
  5. Pendidikan Latihan Dasar CPNS, Orientasi PPPK dan Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif lainnya baik itu berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar atau webinar yang dilaksanakan baik melalui pembelajaran klasikal, blended learning, dan Seminar/Webinar serta fasilitasi adalah sebanyak 27.879 orang. Kegiatan diklat yang termasuk dalam kelompok ini merupakan kelompok diklat teknis substantif Kemendagri yang mencakup substantif pemerintahan dalam negeri dalam bidang keuangan daerah, politik dan pemerintahan, administrasi kewilayahan, perencanaan dan pembangunan daerah, manajemen administrasi, standarisasi dan sertifikasi, serta lain sebagainya dengan rincian peserta 1.940 orang berasal dari Kemendagri dan 25.939 dari pemerintah daerah.
  6. Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebanyak 3.098 orang.

Gambar 3.12 Sebaran Jenis Pengembangan Kompetensi



Sumber: BPSDM Kemendagri, Januari 2025

Dapat dijelaskan bahwa infografis di atas adalah jumlah total pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri sebanyak 37.719 orang, akan tetapi yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 34.139 orang karena pelatihan dasar CPNS dan PPPK sebanyak 3.580 orang tidak termasuk kedalam IKU Menteri karena belum menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat beberapa prioritas nasional yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa dari capaian di atas merupakan target Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Workshop/Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM.  
Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Salah satu fokusnya adalah mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah agar mampu menerapkan standar pelayanan yang baik dan efektif.
2. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antar Negara.  
RPJMN menekankan pada penguatan kapasitas kepala daerah dan pejabat struktural di pemerintahan daerah, termasuk camat yang memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
3. Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah.

Inovasi menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki kualitas layanan publik (Peningkatan Inovasi untuk Pembangunan Nasional). RPJMN 2020-2024 mencakup upaya mendorong inovasi di sektor pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efisien. Diklat Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, memperbaiki pelayanan publik, dan mendorong kemajuan di berbagai sektor pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

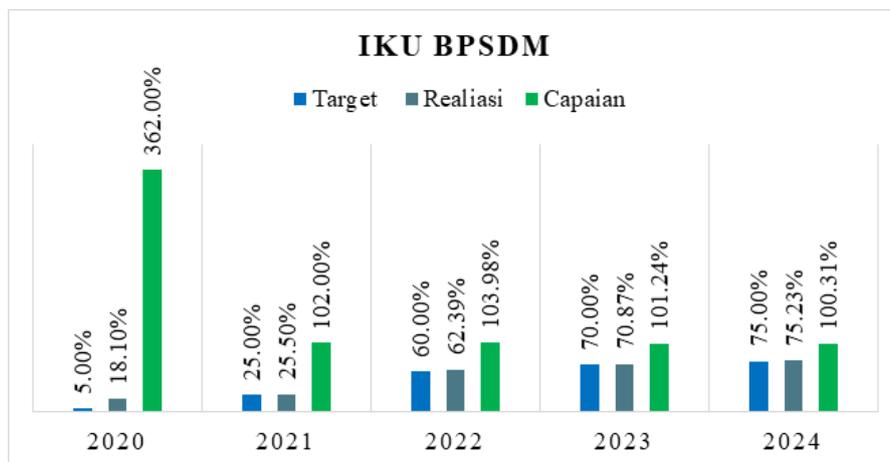
4. Diklat Legal Drafting Bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Diklat Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.  
RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya peningkatan kapasitas di bidang hukum bagi aparat pemerintah untuk memastikan pembuatan regulasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki dampak yang positif bagi pembangunan.
5. Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.  
RPJMN 2020-2024 juga menekankan penguatan sistem pengawasan di pemerintahan daerah (penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah), khususnya terkait dengan jabatan fungsional pengawas pemerintah urusan pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.



Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Minimal 20 JP per tahun sejak Tahun 2020 s.d. 2024 mengalami peningkatan atau dapat dikategorikan "sangat berhasil". Selain dari penguatan pembinaan terhadap pemerintah daerah, melalui anggaran Kementerian Dalam Negeri diselenggarakan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, seminar, bimbingan teknis, workshop, dan webinar.

Penentuan target pemenuhan pengembangan kompetensi disesuaikan dengan target yang tertuang dalam Renstra Kemendagri 2020-2024, yaitu pengembangan kompetensi sebanyak 702 angkatan (21.060 orang), sertifikasi sebanyak 14.320 orang, dan pelatihan dasar CPNS lulusan IPDN sebanyak 10.000 orang. Adapun persentase pemenuhan berdasarkan target di atas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.11 Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Minimal 20 JP Per tahun Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

BPSDM Kemendagri berupaya untuk terus berinovasi dalam hal teknologi dan metode pembelajaran sehingga kegiatan pengembangan kompetensi dapat terus dirasakan oleh seluruh tingkatan/jenjang ASN. Inisiasi inovasi tersebut terus dilakukan dengan melakukan kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah dan kementerian/Lembaga lainnya. Pekerjaan bidang pembangunan SDM memang bukan semata pekerjaan sektor tertentu namun merupakan kerja bersama antara seluruh sektor dan stakeholder baik penyedia layanan maupun pengguna layanan. Pengembangan kompetensi yang dilakukan secara bersama-sama dan masif akan memberikan dampak yang cukup besar dalam hal peningkatan kapasitas ASN yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan ASN yang kompeten, dinamis, professional, dan mampu bersaing di kancah global dalam rangka mencapai Indonesia emas 2045.

Beberapa kegiatan Prioritas Nasional yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu

Beberapa jenis pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, yaitu:

1. Pembekalan Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi KDH/WKDH, dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

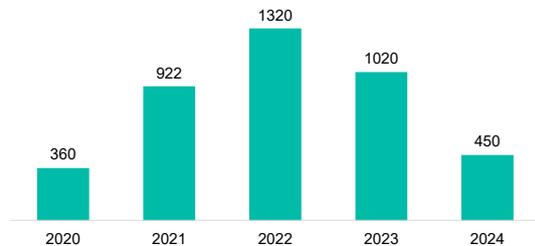
Pembekalan Bupati/Wali Kota Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dilaksanakan secara daring



Sumber: BPSDM Kemendagri

2. Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah periode Tahun 2020 s.d. Desember 2024 bagi 4.072 orang alumni (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.12 Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah periode Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

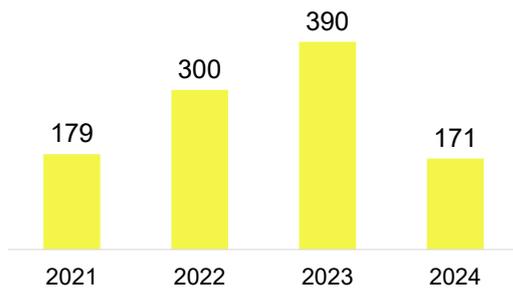
Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah



Sumber: BPSDM Kemendagri

3. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) bagi 1.040 aparatur Pemerintah Dalam Negeri, untuk meningkatkan kemampuan analisis kebijakan bidang hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan, dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.13 Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting Tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

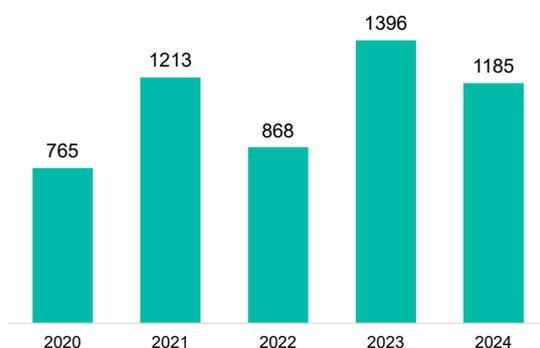
Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting



Sumber: BPSDM Kemendagri

4. Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Tahun 2020 s.d. Desember 2024 bagi 5.427 orang, dengan rincian:

Grafik 3.14 Pengembangan Kompetensi Fungsional PPUPD Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

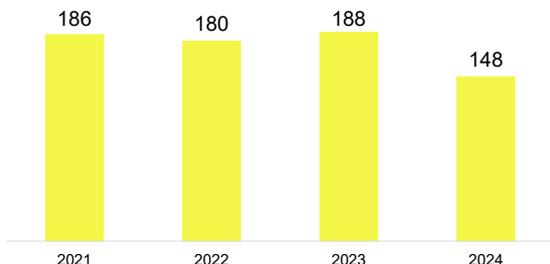
Pengembangan Kompetensi Fungsional PPUPD



Sumber: BPSDM Kemendagri

5. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) Tahun 2021 s.d. Desember 2024 bagi 702 orang camat/aparatur kecamatan, dengan rincian:

Grafik 3.15 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) Tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri

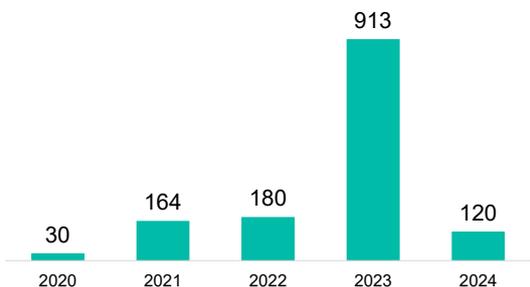
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) Tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri

6. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah Tahun 2020 s.d. Desember 2024 bagi 1.407 orang alumni, dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Adapun rincian sebagai berikut:

Grafik 3.16 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

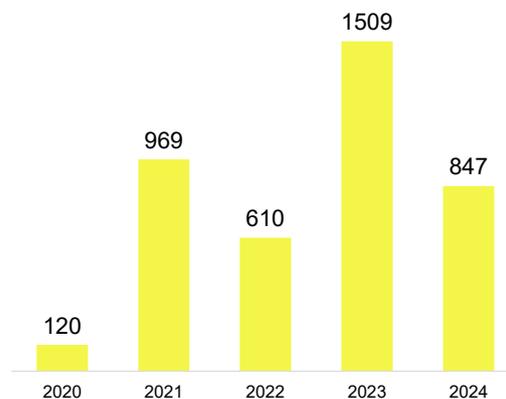


Sumber: BPSDM Kemendagri

Kemendagri telah melaksanakan Pengembangan Kompetensi yang menjadi prioritas Tahun 2020 s.d. Desember 2024 dengan jumlah alumni sebanyak 365.389 Alumni, dengan penjelasan:

1. Terselenggaranya Training of Trainer (ToT) Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja, Diklat Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran sebanyak 4.055 orang yang mencakup diklat teknis yang mendukung peningkatan kapasitas pejabat fungsional di bidangnya dan diklat dasar, dengan rincian:

Grafik 3.17 Training of Trainer (ToT) Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja, Diklat Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Pendidikan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja



Pendidikan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja

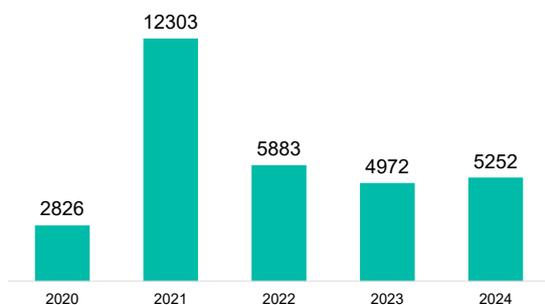


Pendidikan Pelatihan Pemadam Kebakaran



2. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajerial bagi pejabat pengawas, pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama serta pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 s.d Desember 2024 dengan jumlah 31.236 orang alumni (internal Kemendagri, K/L, dan pemerintah daerah), dengan rincian:

Grafik 3.18 Pendidikan dan Pelatihan Manajerial bagi pejabat pengawas, pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama serta pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Latihan Dasar CPNS IPDN



Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator



Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional T.K. II



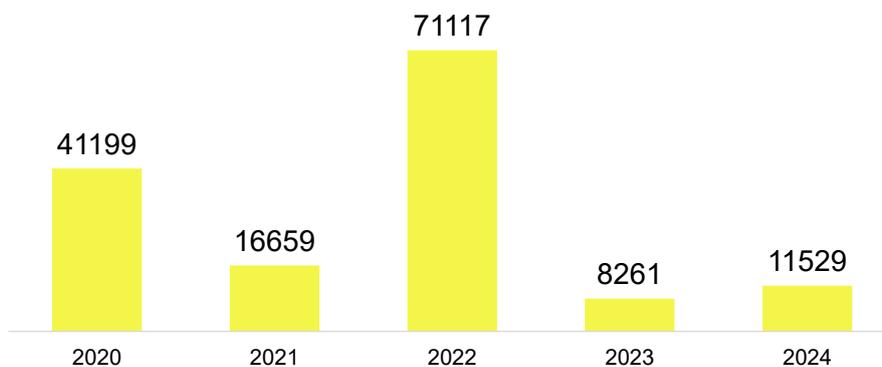
3. Terselenggaranya Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya (pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, webinar, seminar, sosialisasi) Tahun 2020 s.d Desember 2024 bagi 154.765 orang alumni, dengan muatan materi mencakup substansi pemerintahan dalam negeri bidang keuangan daerah, politik dan pemerintahan, administrasi kewilayahan, perencanaan dan pembangunan daerah, manajemen administrasi, standarisasi serta sertifikasi. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 3.29 Kegiatan Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya Tahun 2020 s.d. 2024

NO	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Diklat Teknis Substantif	2.053	1.645	3.181	5.616	6.857	19.352
2	Workshop, Seminar, Rakor, Bimtek dan Sosialisasi	2.967	3.180	17.618	1.286	1.136	26.187
3	Diklat Sekretariat DPRD dan ToT dan Orientasi DPRD		224	422	465	3.366	4.477
4	Fasilitasi	671	930	845	46	170	2.662
5	Webinar	35.508	10.680	55.051	848		102.087
<b>Total</b>		<b>41.199</b>	<b>16.659</b>	<b>77.117</b>	<b>8.261</b>	<b>11.529</b>	<b>154.765</b>

Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Grifik 3.19 Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Dapat dijelaskan bahwa pada periode 2020-2022 terjadi pandemi covid-19 hal ini terjadinya peralihan pengembangan kompetensi yang tadinya dilaksanakan secara langsung atau klasikal dirubah menjadi daring/online dengan dilaksanakannya webinar dengan peserta sebanyak 101.239, karena adanya penghematan anggaran untuk prioritas nasional penanggulangan covid-19, sedangkan periode 2023-2024 webinar hanya dilaksanakan dengan peserta sebanyak 848 selebihnya dilaksanakan dengan metode klasikal dan blended learning.

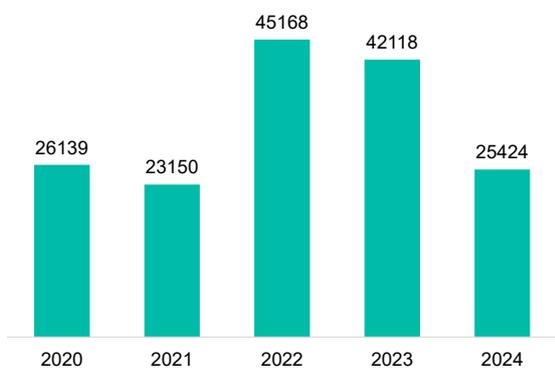
Diklat Teknis Substantif dan Teknis lainnya



4. Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD
  - a. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
  - b. Terselenggaranya Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD dan Rekom DPRD Tahun 2020 s.d. Desember 2024 yang diikuti sebanyak 161.999 orang, dengan rincian:

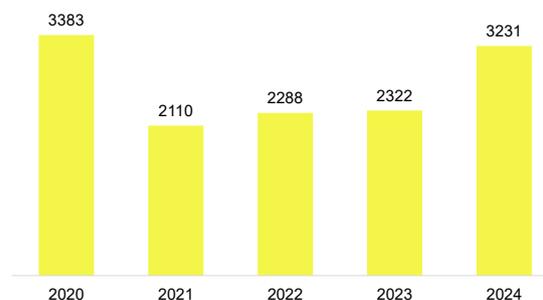
5. Terselenggaranya Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri Aparatur Alih Jabatan dan Kenaikan Jenjang Polisi Pamong Praja dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), jabatan Struktural, Camat, Lurah dan Jabatan terkait Penataan dan administrasi Pemerintahan desa Tahun 2020 s.d. Desember 2024 sebanyak 13.334 orang dengan rincian:

Grafik 3.20 Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Grafik 3.21 Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri Aparatur Alih Jabatan dan Kenaikan Jenjang Polisi Pamong Praja dan PPUPD Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

# RAKORNAS BPSDM 2024

KOLABORASI PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DALAM MENYUKSESKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN)  
2025-2045



Adapun efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam melaksanakan sertifikasi dan pengembangan kompetensi:

1. BPSDM menginisiasi penggunaan Teknologi Informasi termasuk mengembangkan Kementerian Dalam Negeri Corporate University.
2. Memanfaatkan Infrastruktur (sarana dan prasarana) yang ada untuk digunakan dalam kegiatan sertifikasi dan pengembangan kompetensi.
3. Mengoptimalkan manajemen keuangan yang efisien.
4. Peningkatan kolaborasi dengan K/L dalam dan luar negeri.
5. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan BPSDM, PPSDM Regional dan Balai untuk melaksanakan sertifikasi dan pengembangan kompetensi dengan baik.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada 31 Oktober 2023, bahwa pengembangan kompetensi merupakan kewajiban bagi ASN melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi, sehingga perlu penyesuaian terhadap strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi kedepan apalagi dengan keterbatasan anggaran, BPSDM kemendagri perlu segera membuat strategi untuk melaksanakan sertifikasi dan pengembangan kompetensi bagi pegawai Kemendagri dan pemda yang tidak efektif lagi jika dilaksanakan secara klasikal/offline/luring.
2. Belum optimalnya implementasi Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKK-PDN) dan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri

(SP2-PDN) dalam pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri.

3. Kegiatan pengembangan kompetensi belum menjadi salah satu prioritas yang berdampak terhadap keterbatasan anggaran utamanya dalam APBD (penganggaran PNBPN) dan berdampak pula terhadap keterbatasan aparatur yang diusulkan menjadi peserta, termasuk di internal Kemendagri.
4. Perubahan kebijakan yang dinamis serta perkembangan teknologi yang cukup pesat, belum diimbangi dengan penyesuaian dan pembaharuan perangkat dan metode pengembangan kompetensi.

Adapun alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Saat ini BPSDM Kemendagri sedang Membangun sistem berbasis teknologi Learning Management System (LMS) untuk mensinkronkan seluruh data pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh seluruh pihak terkait serta peningkatan koordinasi.
2. Peningkatan koordinasi antar K/L terkait dan percepatan penyusunan SKK-PDN dan SP2-PDN yang sejalan dengan perubahan tugas dan fungsi BPSDM. Kementerian/ Lembaga yang terlibat penyusunan SKK-PDN seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Penguatan dan peningkatan koordinasi, dan mendorong kegiatan pengembangan kompetensi untuk diprioritaskan dan diatur dalam pedoman penyusunan APBD di setiap tahun.
4. Pembaharuan perangkat dan pengembangan kompetensi yang dikordinasikan oleh Kemendagri sehingga adanya persamaan

metode oleh seluruh penyelenggara terkait, BPSDM pada Tahun 2024 telah menyusun perangkat pembelajaran sebagai berikut:

- a. Kepmendagri nomor 800.1.14-856 Tahun 2024 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Pengawasan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Kepmendagri nomor 800.1.14-855 Tahun 2024 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah;
- c. Kepmendagri nomor 800.1.14-857 Tahun 2024 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Laporan Hasil Pengawasan;
- d. Kepmendagri nomor 800.1.14.1-852 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Audit Investigasi;
- e. Kepmendagri nomor 800.1.14.1-853 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Audit Kinerja;
- f. Kepmendagri nomor 800.1.14.1-854 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Perencanaan Berbasis Risiko;
- g. Kepmendagri nomor 800.1.14.1-855 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Review Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. Kepmendagri nomor 800.2.4.4-858 Tahun 2024 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Training Officer Course Pemerintahan Dalam Negeri;
- i. Kepmendagri nomor 800.2 - 034 Tahun 2025 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Management of Training;
- j. Kepmendagri nomor 800.2-036 Tahun 2025 tentang Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Teknis Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- k. Kepmendagri nomor 800.2 - 035

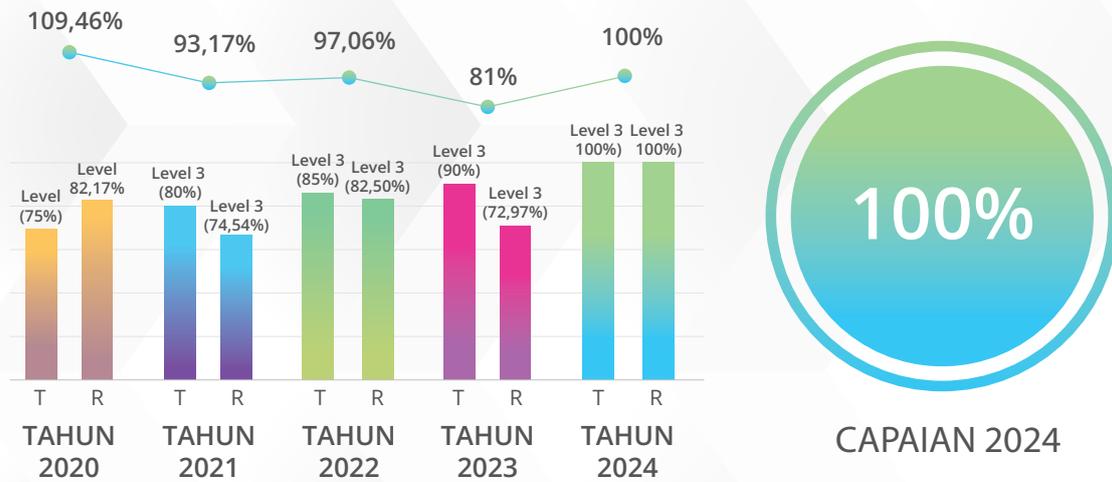
Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Pendidikan dan Pelatihan Digital Forensik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

- l. Kepmendagri nomor 800.2 - 033 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.2.2-1084 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Kepmendagri Nomor 800.2.2.2-1734 Tahun 2024 Pedoman Evaluasi Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- o. Kepmendagri Nomor 100.4.3-1735 Tahun 2024 Tentang Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- p. Pedoman Digitalisasi Standarisasi dan Sertifikasi; dan
- q. Adapun yang masih belum disahkan yaitu Penyusunan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja masih dalam tahap Harmonisasi Kementerian Hukum dan Ham.





## Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri



Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 berhasil mencapai Level 3 (100%) dengan predikat Sangat Baik. Capaian ini mencerminkan komitmen Kemendagri, melalui Inspektorat Jenderal, dalam memastikan ketersediaan auditor yang kompeten secara kuantitas maupun kualitas. Dengan inovasi yang berkelanjutan, Kemendagri terus memperkuat fungsi pengawasan internal guna meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

T = Target      R = Realisasi

Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal memiliki tugas penting sebagai pengawas dan pengawal dalam pelaksanaan program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat strategis, baik dari segi fungsi manajemen maupun pencapaian visi dan misi. Komitmen Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi pemerintah ditunjukkan dengan upaya memperkuat sistem pengawasan yang efektif. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan kapabilitas auditor di Kementerian Dalam Negeri. Tingkat kapabilitas auditor mencerminkan kemampuan dan karakteristik auditor pada level tertentu, yang berkaitan erat dengan struktur tata kelola organisasi. Peningkatan kapabilitas auditor yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah, untuk mencapai praktik pengawasan internal yang lebih baik, diperlukan juga kapabilitas pengawasan yang lebih tinggi.

Jabatan fungsional auditor telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Tugas Jabatan Fungsional Auditor yaitu melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Peningkatan Tingkat kapabilitas auditor penting untuk meningkatkan kapabilitas instansi APIP terkait. Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Auditor baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tingkat kapabilitas auditor penting untuk menjadi dasar bahwa APIP sebagai instansi yang berperan memberikan assurance dan consulting di Kementerian Dalam Negeri memiliki standar Sumber Daya Manusia yang memadai. Indikator ini dihitung dengan memperhatikan tingkat pemenuhan jumlah auditor, tingkat pemenuhan jam pelatihan, persentase modul-modul pengawasan bagi auditor, dan persentase auditor Kementerian Dalam Negeri yang menjadi anggota organisasi profesi.

Peningkatan persentase indikator ini mencerminkan adanya kemajuan dalam kuantitas dan kualitas auditor yang tergabung dalam Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Diharapkan, peningkatan tingkat kapabilitas auditor ini akan sejalan dengan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Capaian atas indikator ini berpengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Dalam Negeri, terutama SDM yang terlibat dalam pengawasan. Pengendalian dan penjaminan kualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik dari sisi kinerja maupun kepatuhan terhadap pengelolaan belanja serta aspek manajerial lainnya, menjadi tanggung jawab utama APIP.

Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, dari target Level 3 (100%), telah tercapai pada Level 3 (100%) yang menunjukkan bahwa auditor pada Inspektorat Jenderal memiliki kualifikasi kemampuan dan ketrampilan yang baik dalam menjalankan tugas pengawasan, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pencapaian target kapabilitas auditor berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, serta mendukung pencapaian sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor (bobot 20%);
2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 20%);
3. Tingkat pemenuhan auditor kemendagri yang bersertifikasi profesi (bobot 20%);
4. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi Auditor (bobot 20%), dan
5. Persentase Auditor Kemendagri yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 20%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai sub indikator.

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor Kementerian Dalam Negeri.

Tingkat pemenuhan jumlah auditor merujuk pada jumlah auditor yang ada memenuhi kebutuhan atau standar yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan audit secara efektif dalam suatu organisasi. Berdasarkan data internal Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri jumlah pejabat fungsional auditor dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.30 Pejabat Fungsional Auditor Kemendagri berdasarkan Jenjang

Jenjang	Jumlah
Auditor Utama	3
Auditor Madya	12
Auditor Muda	35
Auditor Pertama	24
<b>Jumlah Auditor</b>	<b>74</b>
<b>Total Kebutuhan</b>	<b>160</b>

Jumlah kebutuhan auditor pada tahun 2024 yaitu sebesar 160 auditor. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya, Inspektorat Jenderal menargetkan pemenuhan formasi sebesar 45% atau sekitar 72 orang auditor. Pemenuhan terhadap seluruh jenjang ahli pada Inspektorat Jenderal khususnya jenjang Ahli Utama dan Ahli Pertama masih akan terus ditingkatkan sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat jumlah pemenuhan auditor pada Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan target sehingga mendapatkan skor 100% dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil nilai 20%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Auditor} &= \frac{\text{Jumlah auditor Itjen pada 2024}}{\text{Target jumlah auditor pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{74 \text{ auditor}}{72 \text{ auditor}} \times 100\% = 102\% \approx 100\% \end{aligned}$$

2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan bagi Auditor Kementerian Dalam Negeri.

Program pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi auditor diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi auditor internal pada Inspektorat Jenderal Kemendagri. Tujuan utama dari diklat ini adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas audit, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, kinerja, dan risiko.

Pada tahun 2024, pelatihan dan pendidikan (diklat) bagi auditor masih belum dilaksanakan

dengan maksimal dikarenakan kendala waktu penjadwalan diklat yang bersamaan dengan tugas pengawasan dan juga terdapat keterbatasan anggaran. Namun, dalam rangka mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Jenderal mengadakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) guna mendorong peningkatan kompetensi dan pemenuhan jam pelatihan dan pendidikan bagi auditor di Inspektorat Jenderal. Target yang ditetapkan bagi pemenuhan jam pelatihan yaitu selama 8.880 JP, angka ini didapat dari hasil perkalian jumlah auditor yang ada dengan standar jam pelatihan yang diatur sesuai ketentuan yaitu 120 JP.

Tabel 3.31 Diklat dan PKS yang telah dilaksanakan di Inspektorat Jenderal

NO	Diklat/PKS	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah JP	Total (JP)
1	Diklat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	15	50	750
2	Diklat Evaluasi SAKIP	2	50	100
3	Diklat Manajemen Risiko	2	50	100
4	PKS Pemeriksaan dengan e-reviu	40	20	800
5	PKS e-audit PBJ	40	20	800
6	PKS Pengawasan Keuangan Daerah	40	20	800
7	PKS advance Microsoft Excel	40	20	800
8	PKS Evaluasi SAKIP	40	20	800
9	PKS terkait audit berbantuan komputer	40	20	800
10	PKS Pemeriksaan Investigasi	40	20	800
11	PKS Pemeriksaan BUMD	40	20	800
12	PKS Reviu Laporan Keuangan	40	20	800
13	PKS terkait Manajemen Risiko	40	20	800
<b>Total JP</b>				<b>8950</b>

Sumber: BPSDM Kemendagri, data diolah

Berdasarkan pada tabel di atas, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pemenuhan Jam pelatihan pendidikan bagi auditor sehingga mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 20% dengan hasil nilai 20%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Pelatihan} &= \frac{\text{Jumlah JP pada 2024}}{\text{Target JP pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{8.950 \text{ JP}}{8.880 \text{ JP}} \times 100\% = 100,7\% \approx 100\% \end{aligned}$$

3. Persentase Modul-Modul Pengawasan bagi Auditor Kemendagri.  
Modul Pengawasan dibutuhkan oleh auditor sebagai panduan teknis dalam melakukan pengawasan sesuai dengan standar. Pada Tahun 2024, beberapa modul pengawasan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh APIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diantaranya:
- Modul Pengawasan BUMD dan BUMDes.
  - Modul Pengawasan Keuangan Daerah.
  - Modul Pengawasan PBJ.
  - Modul Pengawasan PBJ dengan e-audit PBJ.
  - Modul Pemeriksaan Investigatif dan Pelayanan Publik.
  - Modul Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
  - Modul Monitoring dan Evaluasi Inflasi Daerah.
  - Modul Pengawasan dengan e-reviu.

Modul pengawasan bagi Auditor Kementerian Dalam Negeri telah tersusun sesuai dengan target sebanyak 8 (delapan) modul, sehingga mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil nilai 20%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Modul} &= \frac{\text{Jumlah modul pada 2024}}{\text{Target jumlah modul pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{8 \text{ modul}}{8 \text{ modul}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

4. Tingkat pemenuhan auditor kemendagri yang bersertifikasi profesi (bobot 20%)
- Sertifikasi Auditor Internal Pemerintah adalah proses untuk memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi dan profesionalisme seorang auditor yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa auditor internal pemerintah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas audit dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses sertifikasi ini juga mendorong peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas di sektor publik.
- Pada tahun 2024, ditargetkan pelaksanaan sertifikasi bagi 10 (sepuluh) auditor, yang dalam pelaksanaannya, terdapat 9 (sembilan) auditor telah mengikuti sertifikasi Certified in Government Asset Management (CGAM) dan 3 (tiga) auditor telah mengikuti sertifikasi Certification of Government Risk Assurer (CGRS).
- Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa telah terlaksana sertifikasi untuk auditor sesuai dengan target, sehingga mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil nilai 20%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Sertifikasi} &= \frac{\text{Jumlah auditor tersertifikasi pada 2024}}{\text{Target auditor tersertifikasi pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{12 \text{ auditor}}{10 \text{ auditor}} \times 100\% = 120\% \approx 100\% \end{aligned}$$

5. Persentase Auditor Kemendagri Yang Menjadi Anggota Organisasi  
Keterlibatan Auditor dalam organisasi profesi menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas. Dengan bergabungnya Auditor dalam organisasi profesi diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengetahuan, penerimaan informasi dan peningkatan kompetensi bagi pengembangan kualitas dan metode

pelaksanaan tugas audit. Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah berpartisipasi dan mengusulkan kembali nama-nama bagi Kepengurusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAIP) Periode tahun 2024 s.d. 2027. Pada kepengurusan periode ini Sekretaris Inspektorat Jenderal ditunjuk sebagai Wakil Direktur Eksekutif DPN AAIP dan auditor lainnya menjadi bagian anggota komite pada DPN AAIP. Keikutsertaan auditor Inspektorat Jenderal Kemendagri pada DPN AAIP menunjukkan bahwa Kemendagri memiliki peran aktif dalam organisasi ini.

Auditor Kemendagri telah tergabung secara aktif dalam organisasi AAIP sebagai pengurus maupun anggota komite sehingga dapat mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil nilai 20%.

Analisis Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja Kurun Waktu 5 Tahun menunjukkan bahwa Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri pada tahun 2024 mencapai nilai persentase 100%. Capaian ini merupakan capaian tertinggi pada 5 tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Melalui Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kriteria indikator dengan baik selama satu periode Renstra dan telah berkomitmen dalam peningkatan kapabilitas auditor. Adapun kegiatan dalam menunjang keberhasilan, diantaranya:

1. Terselenggaranya diklat dan juga Pelatihan Kantor Sendiri dalam rangka peningkatan kompetensi auditor.
2. Fasilitasi sertifikasi bagi auditor Kemendagri.
3. Menyusun modul sesuai dengan target yang ditentukan.
4. Berpartisipasi secara aktif dalam kepengurusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. Aspek Anggaran: Jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan Internal dan Daerah di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.087.556.000,-, telah terealisasi sebesar Rp1.087.221.396,- atau sebesar 99.97%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai

dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan. Realisasi anggaran terhadap kegiatan pengelolaan SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal secara mayoritas diarahkan untuk menunjang pengembangan kapasitas APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal, khususnya Auditor.

2. Aspek SDM dan Teknologi: Melaksanakan diklat secara daring dan melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri sehingga tujuan peningkatan kompetensi dapat tercapai dengan sumber daya yang lebih efisien

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

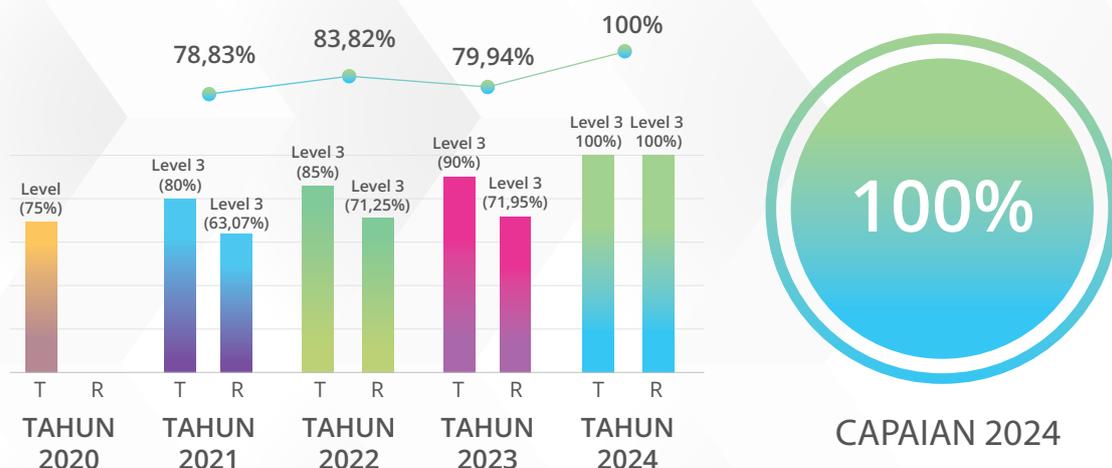
1. Keterbatasan waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi auditor karena sering bersamaan dengan tugas pengawasan sehingga pendidikan dan pelatihan tidak berjalan maksimal;
2. Keterbatasan anggaran yang berdampak dalam mengoptimalkan kegiatan diklat maupun sertifikasi.

Adapun upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi pembina auditor untuk mengakomodir Pendidikan dan Pelatihan, Kursus, dan jenis pengembangan kapasitas lainnya khusus bagi Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Mengalokasikan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bagi Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap penguatan substansi pengawasan/audit yang menjadi fokus dan sasaran pengawasan setiap tahun.
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung keikutsertaan Auditor dalam berbagai pelatihan sertifikasi dan pelatihan kompetensi dengan pihak eksternal.
4. Mengidentifikasi serta menyusun modul pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri termasuk penyediaan instrumen dalam pelaksanaan tugas pengawasan auditor.
5. Mendorong secara konsisten keterlibatan auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara aktif dalam kepengurusan dan keanggotaan organisasi profesi.



## Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional



Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional pada tahun 2024 berhasil mencapai Level 3 (100%) dengan predikat Sangat Baik. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan perannya sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD. Dengan komitmen terhadap perbaikan sistem yang berkelanjutan, Kemendagri terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas PPUPD guna mendukung efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah

T = Target R = Realisasi

Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menjadi instansi pembina jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sehingga perlu mengukur tingkat kapasitas PPUPD secara nasional. Hal ini agar mendorong kualitas pengawasan di daerah sehingga tercipta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, sejak pertama ditetapkan tingkat pemenuhan kapasitas PPUPD secara nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun s.d. Tahun 2024 tingkat pemenuhan kebutuhan PPUPD telah mencapai 25,48% dari kebutuhan yang ada. Hal tersebut tidak terlepas

dari dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam penguatan kapasitas PPUPD sesuai tugas dan fungsi, antara lain:

1. Diterbitkannya Permendagri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Hingga Desember 2024, jumlah PPUPD secara nasional sebanyak 5510 orang, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.31 Jumlah PPUPD Secara Nasional

No	Provinsi	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Aceh	28	53	67	0
2	Sumatera Utara	48	104	146	2
3	Sumatera Barat	53	73	82	0
4	Riau	38	84	94	1
5	Kepulauan Riau	28	29	23	0
6	Jambi	21	50	48	0
7	Bengkulu	22	49	39	0
8	Sumatera Selatan	33	76	73	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	17	19	19	0
10	Lampung	51	129	132	0
11	Gorontalo	20	35	22	0
12	Sulawesi Barat	16	26	17	0
13	Sulawesi Selatan	53	136	137	0
14	Sulawesi Tenggara	26	22	40	1
15	Sulawesi Tengah	82	101	66	0
16	Sulawesi Utara	35	95	90	0
17	Maluku	37	29	9	0
18	Maluku Utara	1	13	6	3
19	Papua	20	25	24	0
20	Papua Barat	9	17	11	1
21	NTT	24	32	25	0
22	Kalimantan Barat	50	61	52	0
23	Kalimantan Selatan	35	43	94	0
24	Kalimantan Tengah	41	33	43	0
25	Kalimantan Timur	11	36	32	0
26	Kalimantan Utara	5	15	8	0
27	Banten	14	60	43	0
28	Bali	40	52	60	0
29	Jakarta	13	48	12	0
30	Jawa Barat	146	186	164	0
31	Jawa Tengah	109	97	147	0
32	Yogyakarta	15	7	17	0
33	Jawa Timur	94	108	92	0
34	NTB	48	76	68	0
35	Papua Selatan	26	15	14	0
36	Papua Tengah	4	11	4	0
37	Papua Pegunungan	18	3	1	0
38	Papua Barat Daya	2	3	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>1357</b>	<b>2087</b>	<b>2049</b>	<b>17</b>

3. Hingga Desember 2024, pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD secara nasional telah dilaksanakan secara berjenjang oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Pelatihan bagi PPUPD selama Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.32 Pelatihan Perjenjangan

No	Provinsi	Pertama	Muda
1	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama	30	100
2	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Muda	29	100
3	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan I	30	173
4	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan II	30	173
5	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama Angkatan I	25	100
6	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama Angkatan II	27	100
7	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Muda	30	100
8	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan III	30	173
9	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan IV	30	173
10	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan V	29	173
11	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan VI	28	173
12	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan VII	29	173
13	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya Angkatan VIII	28	173
14	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Muda	19	210
15	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Muda Angkatan II	16	100
16	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Madya Angkatan I	12	100
<b>Jumlah</b>		<b>422</b>	<b>2294</b>

4. Terbitnya modul pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh Jabatan fungsional PPUPD di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, diantaranya:
  - a. Modul Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan.
  - b. Modul Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansial.
  - c. Modul Pengawasan Urusan Wajib.
  - d. Modul Pengawasan Urusan Teknis
  - e. Modul Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan jabatan fungsional PPUPD berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan indikator Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional menggambarkan hasil dari pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina jabatan fungsional PPUPD di tingkat nasional. Pemenuhan kapasitas jabatan fungsional PPUPD menjadi salah satu prioritas yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal sebagai instansi pembina. Indikator ini dihitung berdasarkan pemenuhan jumlah PPUPD, jam pelatihan yang telah dipenuhi, persentase modul pengawasan untuk PPUPD, serta persentase PPUPD yang tergabung dalam organisasi profesi. Peningkatan persentase indikator ini mencerminkan peningkatan kuantitas dan kualitas PPUPD di tingkat nasional yang dibina oleh Inspektorat Jenderal. Keberhasilan dalam indikator ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengawasan yang dilakukan di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Capaian indikator Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional Tahun 2024, dari target Level 3 (100%) telah tercapai pada Level 3 (100%) yang menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah menjalankan fungsinya sebagai Instansi Pembina dalam mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas dari jabatan fungsional PPUPD.

Capaian kinerja indikator Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah PPUPD (bobot 25%),
2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%),
3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi PPUPD (bobot 25%), dan
4. Persentase PPUPD yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah PPUPD  
 Pada tahun 2024, terdapat pengisian formasi melalui proses alih jabatan dan juga pengisian formasi melalui seleksi perjurangan sehingga pemenuhan jumlah PPUPD di daerah semakin bertambah. Namun dalam pemenuhan formasi PPUPD secara nasional, secara agregat masih terdapat daerah kabupaten/kota yang masih belum memenuhi Jabatan fungsional PPUPD. Kebutuhan formasi PPUPD secara nasional saat ini adalah sebesar 21.627 orang. Pada tahun 2024 Inspektorat Jenderal menargetkan pengisian jabatan PPUPD sebesar 5407 orang atau sekitar 25% dari kebutuhan formasi nasional. Pengisian formasi jabatan PPUPD saat ini telah mencapai persentase 25,48% atau sebesar 5510 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.33 Jumlah PPUPD berdasarkan Jenjang

Jenjang PPUPD	5510
PPUPD Utama	17
PPUPD Madya	2049
PPUPD Muda	2087
PPUPD Pertama	1357
<b>Jumlah PPUPD</b>	<b>5510</b>

Dengan demikian sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan “jumlah PPUPD telah mencapai target pemenuhan kebutuhan yang telah ditentukan”, mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil nilai 25%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan PPUPD} &= \frac{\text{Jumlah PPUPD pada 2024}}{\text{Target jumlah PPUPD pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{5510 \text{ PPUPD}}{5407 \text{ PPUPD}} \times 100\% = 102\% \approx 100\% \end{aligned}$$

2. Tingkat pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD

Pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD secara nasional telah dilaksanakan secara berjenjang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM daerah. Selain melaksanakan diklat perjenjangan, Inspektorat Jenderal bersama dengan BPSDM juga menyelenggarakan diklat pendukung bagi PPUPD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Pada tahun 2024, terdapat 5510 orang PPUPD yang terdaftar secara nasional, dengan demikian jumlah jam pelatihan yang seharusnya dipenuhi adalah sebesar 661.200 JP. Namun demikian, karena keterbatasan anggaran yang ada di pusat maupun daerah, pada tahun 2024 Inspektorat Jenderal menargetkan pemenuhan jam pelatihan sebesar 50% atau sebesar 330.600 JP. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2024 telah dilaksanakan pelatihan selama 340.700 JP dengan melibatkan sebanyak 2840 peserta PPUPD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam indikator ini telah memenuhi kriteria “Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pemenuhan Jam pelatihan bagi PPUPD”, mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil nilai 25%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Pelatihan} &= \frac{\text{Jumlah JP pada 2024}}{\text{Target JP pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{340.700 \text{ JP}}{330.600 \text{ JP}} \times 100\% = 103\% \approx 100\% \end{aligned}$$

3. Presentase modul-modul pengawasan bagi PPUPD

Modul pembelajaran pengawasan merupakan materi yang disusun untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada peserta mengenai konsep, metode, dan praktik pengawasan dalam berbagai konteks, termasuk pengawasan di lingkungan pemerintahan, organisasi, maupun sektor lainnya. Modul ini bertujuan untuk membekali individu dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Pada tahun 2024 Inspektorat Jenderal menargetkan untuk dapat menerbitkan 5 (lima) modul pengawasan, beberapa modul pengawasan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh Jabatan fungsional PPUPD di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, diantaranya:

- a. Modul Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan,
- b. Modul Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansial,
- c. Modul Pengawasan Urusan Wajib, dan
- d. Modul Pengawasan Urusan Teknis.
- e. Modul Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi kriteria “Modul pengawasan bagi PPUPD di Kementerian Dalam Negeri telah tersusun sesuai dengan target.”, mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil nilai 25%. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemenuhan Modul} &= \frac{\text{Jumlah modul pada 2024}}{\text{Target jumlah modul pada 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{5 \text{ modul}}{5 \text{ modul}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

4. Persentase PPUPD yang menjadi anggota organisasi profesi PPUPD

Organisasi profesi memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan budaya profesi dalam suatu bidang kerja. Salah satu peran organisasi profesi yaitu sebagai penjaga standar etika dan perilaku profesional bagi anggotanya. Selain itu, organisasi profesi juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya melalui pelatihan, seminar, dan workshop. Organisasi profesi menyediakan kesempatan bagi anggotanya untuk terus berkembang dan memperbarui keahlian mereka.

Organisasi profesi PPUPD saat ini adalah Asosiasi PPUPD atau (APPUPD) yang didirikan sebagai wadah bagi PPUPD dalam menjaga profesionalitas dan independensi dalam bekerja. Keterlibatan PPUPD dalam organisasi profesi menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas. Harapannya, dengan bergabungnya PPUPD dalam organisasi profesi akan memberikan dampak terhadap pengetahuan, penerimaan informasi dan peningkatan kompetensi bagi pengembangan kualitas dan metode pelaksanaan tugas audit. Sampai dengan saat ini, seluruh PPUPD tergabung dalam organisasi profesi Asosiasi PPUPD (APPUPD) sebagai anggota, namun keterlibatan aktif dalam kepengurusan belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh PPUPD secara Nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator telah memenuhi kriteria "Seluruh PPUPD tergabung dalam organisasi APPUPD sebagai anggota", mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil nilai 25%.

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023. Beberapa Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diantaranya:

1. Terdapat pengisian formasi alih jabatan dan juga pengisian formasi melalui formasi perjenjangan sehingga pemenuhan jumlah PPUPD di daerah semakin bertambah.
2. Pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan bagi PPUPD di daerah dapat dilaksanakan melalui metode daring, hal ini berpengaruh terhadap angka partisipasi dan formasi keikutsertaan peserta PPUPD secara nasional.
3. Peran aktif Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong peningkatan kompetensi melalui penerbitan modul pembelajaran pengawasan
4. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung tugas instansi pembina pada Inspektorat Jenderal dalam hal fasilitasi kebijakan, pengembangan profesi dan kebijakan lainnya terkait peningkatan kapasitas PPUPD secara nasional.



# E-DUPAK

## Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

5. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan kompetensi PPUPD di lingkungan pemerintah daerah juga berdampak terhadap jumlah keikutsertaan PPUPD terhadap diklat substansi maupun sertifikasi yang dilaksanakan sendiri atau yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.

Selama lima tahun terakhir, capaian Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional telah mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 capaian indikator ini telah mencapai kenaikan yang cukup signifikan, hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal sebagai instansi pembina dalam melakukan upaya yang menunjang keberhasilan.

Dari sisi Anggaran, dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, dari total anggaran Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional PPUPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.110.000,000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.109.930.920,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Pemenuhan kecukupan SDM PPUPD masih

belum maksimal sesuai dengan formasi kebutuhan di masing-masing Inspektorat Daerah.

2. Pemenuhan jam pelatihan masih terkendala dengan keterbatasan anggaran.
3. Anggota APPUPD masih belum seluruhnya berperan secara aktif dalam organisasi.

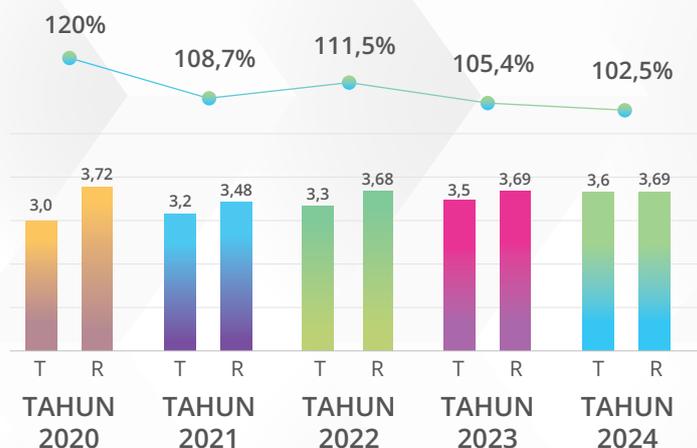
Adapun upaya/kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional, diantaranya:

1. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PPUPD dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pelatihan, dan mitra strategis lainnya dalam mendorong pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD.
2. Menerbitkan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah terkait penguatan pengawasan, dimana didalamnya mengatur prioritas penganggaran pengawasan pada inspektorat daerah yang salah satu unsur pembiayaannya adalah pengalokasian anggaran untuk pengembangan SDM khususnya pejabat fungsional PPUPD di daerah
3. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal mendorong penetapan formasi dan pemenuhan formasi PPUPD di Inspektorat Daerah.





## Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni



# 102,5%

## CAPAIAN 2024

Kepuasan stakeholder terhadap kinerja Alumni IPDN dengan indeks sebesar 3,69 atau Sangat Baik, menggambarkan mutu penyelenggaraan pendidikan di IPDN semakin berkualitas

T = Target

R = Realisasi

Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni merupakan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), berkaitan dengan harapan/keinginan stakeholders atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri oleh Alumni IPDN. Evaluasi kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sangat penting bagi keberhasilan instansi pemerintah sebagai pemangku kepentingan maupun bagi lembaga IPDN karena alumni berperan penting dalam membentuk persepsi terhadap lembaga pendidikan.

Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing", dan 5 (lima) arahan program prioritas

pembangunan Indonesia maju meliputi: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Pembangunan infrastruktur; Penyederhanaan regulasi; Penyederhanaan birokrasi; dan Transformasi ekonomi.

Merujuk pada tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri, yaitu peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, maka telah disusun sasaran strategis Kemendagri Tahun 2020-2024, yaitu meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan salah satu indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis yaitu Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

Pembinaan dan monitoring alumni dalam kerangka peningkatan terapan pendidikan dengan maksud memperoleh data dan informasi tentang perkembangan alumni berkenaan penempatan, pola karir, kualifikasi dan kompetensi serta kinerjanya dalam lingkungan kerja di daerah selain itu untuk memperoleh bahan informasi dan data bagi penyusunan kurikulum fleksibel pada jurusan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, kebijakan pemerintahan serta perkembangan masyarakat berupa materi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.

Evaluasi kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sangat penting bagi keberhasilan instansi pemerintah sebagai pemangku kepentingan maupun bagi lembaga IPDN karena alumni berperan penting dalam membentuk persepsi terhadap lembaga pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan saat ini menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara dan kepuasan stakeholder terhadap kinerja tersebut. Oleh karena itu, IPDN melakukan upaya untuk menganalisis dan meningkatkan mutu pendidikan melalui survei kepuasan stakeholder terhadap capaian Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.

Penelitian Survei Kepuasan Stakeholders terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ini bertujuan untuk: (1) Mengukur kinerja alumni IPDN; (2) Mengetahui harapan pengguna alumni terhadap lulusan IPDN; dan (3) Memetakan kriteria kompetensi lulusan berdasarkan tingkat kepentingan dari perspektif pengguna dan tingkat kinerja yang ditunjukkan alumni IPDN. Dalam penelitian ini, stakeholders adalah para pegawai yang menjadi atasan, bawahan, dan rekan kerja alumni IPDN, serta masyarakat yang dilayani alumni. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada informasi tentang kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan selama tiga tahun terakhir yang

telah bekerja aktif sebagai ASN yaitu lulusan pada Tahun 2021, 2022, dan 2023.

Pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive sampling, yaitu metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen. Pengambilan sampel bermanfaat karena peneliti dapat meneliti semua data.

Dalam survei ini, telah ditetapkan 16 provinsi sebagai lokus survei pada tahun 2024 yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan (16 provinsi tersebut merupakan provinsi yang belum dilakukan survei sejak Tahun 2020 s.d 2023), sehingga untuk menggenapkan akumulasi pelaksanaan survei pada seluruh provinsi di Indonesia, maka lokus survei tahun 2024 di lakukan pada 16 provinsi dimaksud.

Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni diukur dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang meliputi 8 dimensi yaitu quality of work, quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dendabiliy, initiative, personal qualities dari perspektif pengguna, dengan menggunakan skala likert (1 - 4).



Tabel 3.34 Dimensi dan Sub Dimensi Yang Dinilai  
Pada Survei Kepuasan Stakeholders Terhadap Kinerja Alumni IPDN Tahun 2024

No	Dimensi	Sub Dimensi
1.	Quality of Work	1. kemampuan pengetahuan
		2. Akurasi dalam melaksanakan tugas
		3. Ketelitian
		4. Efektivitas dalam bekerja
		5. Kemampuan perencanaan perorganisasian dan berorganisasi
		6. Mampu bekerja dalam tekanan
2.	Quantity of Work	1. Kemampuan melaksanakan tugas dalam periode tertentu dengan baik
		2. Kemampuan menentukan target
		3. Kemampuan dalam mencapai target
3.	Job Knowledge	1. Keterampilan melaksanakan tugas
		2. Kemampuan memahami tugas
		3. Kemampuan bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
		4. Berpikir kritis
		5. Penguasaan bahasa asing
		6. Penguasaan Teknologi Informasi
		7. Mampu menggunakan atribut keselamatan kerja
		8. Mampu menginterpretasikan arahan pimpinan
		9. Kemampuan mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan
		10. Tingkat kesalahan rendah
4.	Creativeness	1. Menciptakan gagasan
		2. Memiliki inovasi keterbaharuan
		3. Mampu menerima kritikan dan saran
		4. Mampu melihat peluang
5.	Cooperation	1. Menerima perbedaan
		2. Mengutamakan tujuan kelompok atau organisasi
		3. Memiliki keterampilan sosial
		4. Bertanggung jawab
		5. Mengarahkan tim untuk mencapai tujuan tugas
		6. Kemampuan berkoordinasi
5.	Dependability	1. Kesetiaan
		2. Menginspirasi
		3. Memegang teguh prinsip
		4. Berambisi dalam menjalankan tugas
		5. Berani mengambil resiko

No	Dimensi	Sub Dimensi
7.	Initiative	1. Berani memulai
		2. Keinginan untuk mengembangkan kompetensi
		3. Kemandirian
		4. Kemampuan manajemen diri
		5. Kemampuan menyelesaikan masalah dan pekerjaan
		6. Kemampuan menyampaikan pendapat
8.	Personal Qualities	1. Jujur
		2. Ramah
		3. Rendah hati
		4. Sopan dan santun dengan Pegawai lainnya
		5. Hormat dengan seluruh pegawai lainnya
		6. Percaya diri
		7. Konsisten
		8. Antusias
		9. Fleksibel
		10. Kepatuhan
		11. Tekun
		12. Dapat diandalkan
		13. Disiplin
		14. Keteladanan

Sumber: Gomes (2003:135)

Dalam mengukur Indeks ini digunakan GAP Analysis dan Importance Performance Analysis (IPA) atau analisa tingkat kepentingan dan kinerja.

$$\text{Kesenjangan}_i (G_i) = \text{Rata-rata Performance} - \text{Rata-rata expected Performance}_i$$

Importance Performance Analysis (IPA) dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mencari Tingkat Kesesuaian, yaitu hasil perbandingan skor kinerja/pelaksanaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (X) dengan skor kepentingan (kebutuhan) pemerintah daerah akan kompetensi lulusan IPDN (Y), dengan rumus:

$$Tki = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

(J. Supranto, 2006:242)

Dimana:

**Tki** = Tingkat Kesesuaian

**Xi** = Skor nilai Kinerja Alumni IPDN.

**Yi** = Skor Kepentingan Pelanggan (Pemda)

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah sebagai berikut:

- a. Jika tingkat kesesuaian > 100%, berarti kinerja alumni telah melebihi apa yang dianggap penting oleh pengguna (Pemda);
- b. Jika tingkat kesesuaian = 100%, berarti kinerja alumni memenuhi apa yang dianggap penting oleh Pengguna/Pemda;
- c. Jika tingkat kesesuaian antara 80-100%, berarti kinerja alumni telah memuaskan pengguna namun masih terdapat ruang untuk perbaikan lagi.

2. Membuat Diagram Cartesius, merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada Titik-titik  $(\bar{X}, \bar{Y})$ , dimana  $\bar{X}$  merupakan rata-rata dari skor kinerja alumni, dan  $\bar{Y}$  adalah rata-rata dari skor tingkat kepentingan (kebutuhan, harapan Pemda). Dalam Hal ini ada 50 atribut (soal dalam angket), jadi  $K= 50$ , menurut J Supranto (2006:242) rumus selanjutnya adalah:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{K}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^N Y_i}{K}$$

Dimana:

$K =$  Banyaknya atribut/faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan

Diagram Cartesius dipergunakan untuk memetakan atribut-atribut kualitas alumni IPDN yang telah dianalisis, dalam penelitian ini telah di tentukan atribut atau faktor sebagai indikator yang telah dituangkan dalam bentuk angket. Selanjutnya sumbu mendatar (x) akan diisi oleh skor tingkat kinerja Alumni IPDN Sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh tingkat kepentingan (kebutuhan, harapan), dengan gambar sebagai berikut:



Keterangan:

- A. Area yang menunjukkan Pelanggan tidak puas atas Kinerja lulusan IPDN. Diketahui dengan Penjelasan Sebagai berikut: unsur-unsur kriteria penentu kualitas lulusan IPDN yang diteliti dianggap sangat penting akan tetapi tingkat kinerja Alumni IPDN tidak baik. Sehingga dapat dikatakan kualitas kinerja alumni IPDN tidak sesuai dengan harapan pelanggan.
- B. Area ini Menunjukkan Pelanggan sangat puas atas Kinerja lulusan IPDN, Diketahui dengan Penjelasan Sebagai berikut: unsur-unsur kriteria penentu kualitas lulusan IPDN yang diteliti dianggap sangat penting dan tingkat kinerja Alumni IPDN dianggap sangat baik. Sehingga dapat dikatakan kinerja alumni IPDN sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

- C. Area ini menunjukkan pelanggan kurang puas atas kinerja alumni IPDN. Hal ini diketahui dengan penjelasan sebagai berikut: unsur-unsur kriteria penentu kinerja alumni IPDN yang diteliti dianggap kurang begitu penting oleh pelanggan dan juga kinerja alumni IPDN kurang baik. Sehingga dapat dikatakan kurang penting (kurang dibutuhkan) oleh pemerintah daerah dan dalam hal ini kurang memuaskan kinerja Alumni IPDN.
- D. Area ini menunjukkan bahwa unsur-unsur kriteria penentu kualitas alumni IPDN yang diteliti dianggap kurang begitu penting bagi pelanggan, akan tetapi kinerja alumni IPDN sangat baik. Sehingga dapat dikatakan kurang penting bagi pemerintah daerah tetapi kinerja alumni IPDN sangat memuaskan.

Analisis data untuk mengukur kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni diadopsi dari Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Kepmen PAN dan RB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan. Penggunaan kedua aturan tersebut dimaksudkan untuk menguji keabsahan penelitian secara teoritis dengan aturan legal formal dari regulasi pemerintah. Sampai saat ini, kedua regulasi tersebut masih relevan untuk mengukur survei kepuasan masyarakat dan indeks kepuasan layanan.

Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{8} = 0,125$$

Untuk memperoleh nilai indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja Alumni digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKU = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKU yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

**Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni x 25**

Dimensi yang dinilai adalah Quality of Work, Quantity of Work, Job Knowledge, Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative, dan Personal Quality dengan 54 item pertanyaan kuesioner.

Tabel 3.35 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKU	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1.00-1.75	25-43.75	D	Tidak baik
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	Kurang Baik
3	2.51-3.25	62.51-81.25	B	Baik
4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Sangat Baik

(Penjelasan formulasi pengukuran sehingga diperoleh Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni Tahun 2024).

Hasil analisis dan evaluasi kinerja alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan pada 16 (enam belas) provinsi berdasarkan aspek quality of work, quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dendability, initiative, dan personal qualities akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.36 Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Pada 16 (enam belas) Provinsi

No	Atribut Kinerja	Nilai Rata-rata Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan														Nilai Rata-rata	Interpretasi		
		Aceh	KePRI	Lampung	Jateng	Jabar	Banten	Bali	Jambi	NTT	Kalsel	Sulut	P. Barat	P. Barat Daya	P. Tengah			P. Selatan	P. Pegunungan
1	Quality of Work	3,68	3,45	3,51	3,55	3,88	3,74	3,92	3,70	3,91	3,78	3,58	3,54	3,91	3,70	3,51	3,62	3,72	Sangat Baik
2	Quantity of Work	3,64	3,85	3,53	3,44	3,79	3,60	3,90	3,69	3,94	3,60	3,65	3,53	3,81	3,66	3,61	3,58	3,68	Sangat Baik
3	Job Knowledge	3,66	3,70	3,54	3,51	3,83	3,64	3,88	3,70	3,73	3,56	3,57	3,44	3,87	3,68	3,61	3,50	3,67	Sangat Baik
4	Creativeness	3,63	3,90	3,52	3,53	3,80	3,70	3,97	3,78	3,91	3,53	3,58	3,51	3,85	3,50	3,49	3,58	3,69	Sangat Baik
5	Cooperation	3,63	3,90	3,41	3,46	3,85	3,63	3,99	3,77	3,89	3,66	3,58	3,53	3,82	3,53	3,62	3,57	3,69	Sangat Baik
6	Dependability	3,56	3,88	3,60	3,48	3,85	3,68	3,73	3,79	3,80	3,86	3,48	3,38	3,73	3,43	3,64	3,43	3,65	Sangat Baik
7	Initiative	3,56	3,87	3,86	3,48	3,86	3,76	3,71	3,80	3,80	3,85	3,58	3,56	3,75	3,59	3,58	3,58	3,70	Sangat Baik
8	Personal Qualities	3,67	3,93	3,66	3,74	3,86	3,82	3,84	3,65	3,89	3,79	3,46	3,49	3,84	3,64	3,55	3,50	3,72	Sangat Baik
<b>Rata-Rata</b>																	<b>3,69</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden menilai kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari semua aspek sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,69 (sangat baik).

Hasil analisis harapan responden sebagai pengguna lulusan IPDN terhadap indikator quality of work, quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative, dan personal qualities. Hasil analisis harapan akan dijelaskan per provinsi dan dilanjutkan dengan hasil analisis rekapitulasi 16 (enam belas) provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.37 Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Pada 16 (enam belas) Provinsi

No	Atribut Kinerja	Nilai Rata-rata Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan														Nilai Rata-rata	Interpretasi		
		Aceh	Kepri	Lampung	Jateng	Jabar	Banten	Bali	Jambi	NTT	Kalsel	Sulut	P. Barat	P. Barat Daya	P. Tengah			P. Selatan	P. Pegunungan
1	Quality of Work	3,69	3,62	3,77	3,99	3,86	3,49	3,49	3,43	3,48	3,78	3,68	3,92	3,67	3,78	3,68	3,86	3,70	Sangat Baik
2	Quantity of Work	3,73	3,58	3,90	4,00	3,85	3,46	3,48	3,46	3,50	3,79	3,66	3,98	3,66	3,66	3,73	3,89	3,71	Sangat Baik
3	Job Knowledge	3,71	3,63	3,79	3,78	3,78	3,52	3,55	3,48	3,56	3,76	3,72	3,71	3,63	3,72	3,74	3,90	3,68	Sangat Baik
4	Creativeness	3,70	3,73	3,85	3,84	3,89	3,67	3,53	3,50	3,52	3,79	3,73	3,73	3,60	3,74	3,71	3,88	3,71	Sangat Baik
5	Cooperation	3,73	3,69	3,79	3,79	3,85	3,78	3,50	3,48	3,53	3,75	3,78	3,64	3,64	3,72	3,70	3,90	3,71	Sangat Baik
6	Dependability	3,74	3,63	3,85	3,80	3,78	3,81	3,53	3,51	3,48	3,78	3,70	3,73	3,60	3,78	3,75	3,89	3,71	Sangat Baik
7	Initiative	3,81	3,77	3,89	3,84	3,86	3,86	3,58	3,44	3,67	3,81	3,86	3,83	3,81	3,79	3,74	3,90	3,78	Sangat Baik
8	Personal Qualities	3,78	3,82	3,87	3,99	3,96	3,49	3,52	3,52	3,54	3,78	3,74	3,77	3,61	3,77	3,70	3,87	3,73	Sangat Baik
<b>Rata-Rata</b>																	<b>3,72</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden menilai kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari semua aspek sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,69 (sangat baik).

Temuan analisis kesenjangan yang dilakukan dengan menggunakan penilaian kinerja Alumni Perguruan Tinggi Kepegawaian dan skor tingkat kepentingan masing-masing indikator. Semakin kecil skor gap maka maknanya semakin baik, bahkan jika bernilai positif maka artinya kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongrajaan melebihi apa yang diharapkan oleh responden, Adapun gap analysis ketujuh provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.38 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (1)

NO	Atribut Kinerja	Gap Analysis Terhadap <u>Penilaian</u> , Kinerja dan Skor Tingkat <u>Keperentingan</u>															
		Aceh		Kepri		Lampung		Jateng		Jabar		Banten		Bali			
		Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi		
1	Quality of Work	-0,0063	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1688	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2625	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,4438	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0062	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2563	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
2	Quantity of Work	-0,0875	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2750	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3750	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,5625	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0625	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1375	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
3	Job Knowledge	-0,0450	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0650	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2483	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2700	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0500	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3350	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
4	Creativeness	-0,0667	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1750	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3333	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3083	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0917	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0333	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4333	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
5	Cooperation	-0,1000	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2000	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3833	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3333	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0000	Kinerja alumni sesuai dengan tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1583	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4917	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
6	Dependability	-0,1833	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2417	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2500	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3250	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0667	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1333	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2000	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
7	Initiative	-0,2563	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1000	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0375	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3625	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0063	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0938	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1313	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		
8	Personal Qualities	-0,1071	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1107	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2162	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2429	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0964	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3321	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3143	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi		

Tabel 3.39 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (2)

NO	Atribut Kinerja	Gap Analysis Terhadap Penilaian Kinerja dan Skor Tingkat Kepentingan																				
		Jambi			NTT			Kalsel			Sulut			P. Barat			P. Barat Daya			P. Tengah		
		Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap
1	Quality of Work	0,2750	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0000	Kinerja alumni sama besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1063	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3750	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2375	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0750	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
2	Quantity of Work	0,2250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,4375	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1875	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0125	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,4500	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1500	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0000	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
3	Job Knowledge	0,2250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1650	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2050	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1550	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2650	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2350	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0450	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
4	Creativeness	0,2833	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3917	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2583	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1500	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2250	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2500	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2417	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
5	Cooperation	0,2833	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3583	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0917	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2000	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1083	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1750	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1833	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
6	Dependability	0,2833	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0833	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2250	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3500	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1250	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,3500	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
7	Initiative	0,3563	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,1313	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0375	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2813	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2688	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,0625	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2063	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							
8	Personal Qualities	0,1286	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,3464	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,0071	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2750	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,2857	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	0,2214	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	-0,1357	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi							

Tabel 3.40 Gap Analysis Pada 16 (enam belas) Provinsi (3)

NO	Atribut Kinerja	Gap Analysis Terhadap <b>Reputasi</b> Kinerja dan Skor Tingkat <b>Kepercayaan</b>		
		P. Selatan	P. Pegunungan	Interpretasi
1	Quality of Work	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
2	Quantity of Work	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
3	Job Knowledge	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
4	Creativeness	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
5	Cooperation	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
6	Dependability	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
7	Initiative	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
8	Personal Qualities	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi

Tabel 3.41 Rekapitulasi Gap Analysis pada 16 (enam belas) Provinsi

NO	Atribut Kinerja	Gap Analysis	Interpretasi
1.	Quality of Work	0,0195	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
2.	Quantity of Work	-0,0234	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
3.	Job Knowledge	-0,0112	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
4.	Creativeness	-0,0219	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
5.	Cooperation	-0,0115	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
6.	Dependability	-0,0568	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
7.	Initiative	-0,0773	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
8.	Personal Qualities	-0,0132	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi

Dari tabel di atas dapat dilihat ke tujuh dari delapan atribut gap analysis masih bernilai negatif. Gap terbesar pada aspek initiative sedangkan gap terendahnya pada aspek quality of work dengan nilai positif. Skor pada ketujuh aspek ini mengartikan bahwa kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan masih lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi yaitu quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative, personal qualities dari perspektif pengguna. Sedangkan pada aspek quality of work kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/dimensi dengan gap 0,0025.

Analisa Tingkat Kesesuaian dihitung berdasarkan skor Tingkat kinerja dibagi skor Tingkat kepentingan x 100% (dilakukan pembulatan). Nilai hasil analisis lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa kinerja alumni lebih unggul dari apa yang dianggap penting oleh pengguna (Pemerintah Daerah dan Masyarakat). Jika tingkat kesesuaian = 100%, berarti kinerja alumni memenuhi apa yang dianggap penting oleh pengguna. Sedangkan jika tingkat kesesuaian antara 80-100%, maka kinerja alumni telah memuaskan pengguna namun masih terdapat ruang untuk memperbaikinya.

Tabel 3.42 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (1)

NO	Atribut Kinerja	Analisa Tingkat Kesesuaian (Kinerja dibagi Tingkat Kepentingan)															
		Aceh		Kepri		Lampung		Jateng		Jabar		Banten		Bali			
		Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi		
1	Quality of Work	100%	Kinerja memuaskan	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	89%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan	107%	Kinerja memuaskan	112%	Kinerja memuaskan		Kinerja memuaskan		
2	Quantity of Work	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	90%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	86%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	104%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	112%	Kinerja memuaskan		Kinerja memuaskan		
3	Job Knowledge	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	101%	Kinerja memuaskan	104%	Kinerja memuaskan	109%	Kinerja memuaskan		Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
4	Creativeness	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	101%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	112%	Kinerja memuaskan		Kinerja memuaskan		
5	Cooperation	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	90%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan	114%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		Kinerja memuaskan		
6	Dependability	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	102%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	106%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
7	Initiative	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan	98%	Kinerja memuaskan	104%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
8	Personal Qualities	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	110%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	109%	Kinerja memuaskan		Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		

Tabel 3.43 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (2)

NO	Atribut Kinerja	Analisa Tingkat Kesesuaian (Kinerja dibagi Tingkat Kepentingan)															
		Jambi		NTT		Kalsel		Sulit		P. Barat		P. Barat Daya		P. Tengah			
		Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi		
1	Quality of Work	108%	Kinerja memuaskan	112%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan	97%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	90%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	106%	Kinerja memuaskan	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
2	Quantity of Work	106%	Kinerja memuaskan	113%	Kinerja memuaskan	95%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan	89%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	104%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan		
3	Job Knowledge	106%	Kinerja memuaskan	105%	Kinerja memuaskan	95%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	93%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	106%	Kinerja memuaskan	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
4	Creativeness	108%	Kinerja memuaskan	111%	Kinerja memuaskan	93%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	94%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	107%	Kinerja memuaskan	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
5	Cooperation	108%	Kinerja memuaskan	110%	Kinerja memuaskan	98%	Kinerja memuaskan	95%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	97%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	105%	Kinerja memuaskan	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
6	Dependability	108%	Kinerja memuaskan	109%	Kinerja memuaskan	102%	Kinerja memuaskan	94%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	103%	Kinerja memuaskan	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
7	Initiative	110%	Kinerja memuaskan	104%	Kinerja memuaskan	101%	Kinerja memuaskan	93%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	93%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		
8	Personal Qualities	104%	Kinerja memuaskan	110%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, harus diperbaiki lagi	106%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi		

Tabel 3.44 Analisa Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi (3)

NO	Atribut Kinerja	Analisa Tingkat Kesesuaian (Kinerja dibagi Tingkat Kepentingan)			
		P. Selatan		P. Pegunungan	
		Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi
1	Quality of Work	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
2	Quantity of Work	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
3	Job Knowledge	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	90%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
4	Creativeness	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
5	Cooperation	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
6	Dependability	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	88%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
7	Initiative	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
8	Personal Qualities	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi

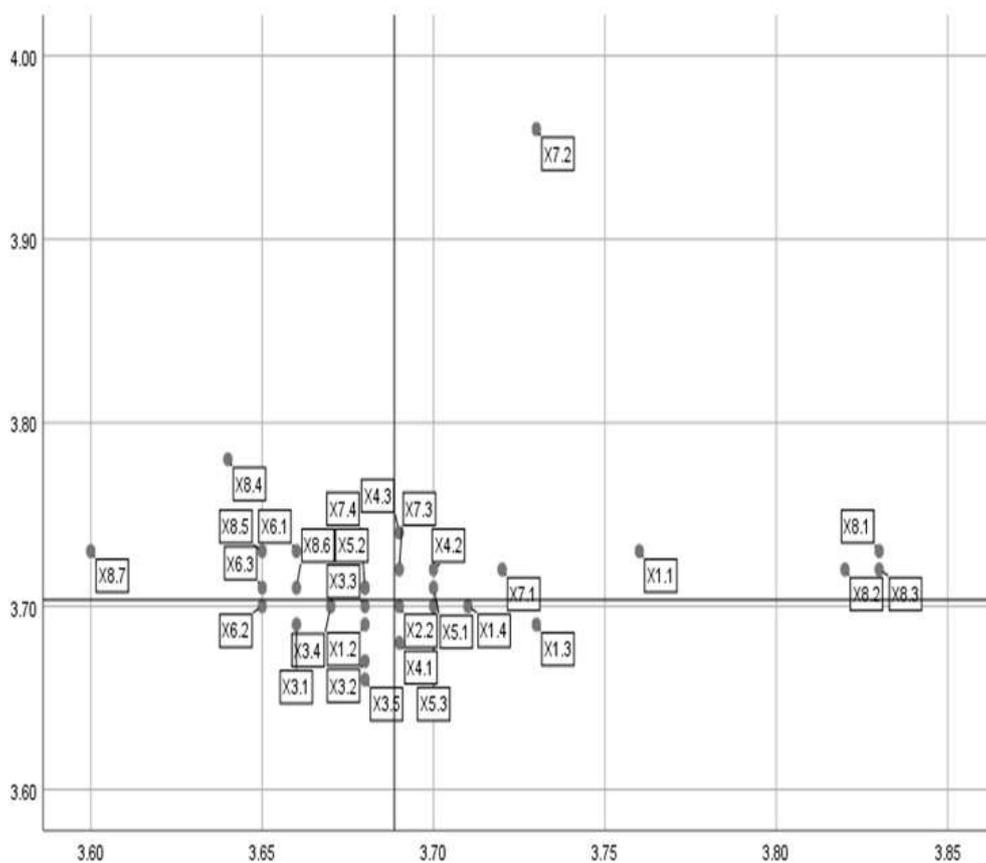
Tabel 3.45 Rekapitulasi Tingkat Kesesuaian Pada 16 (enam belas) Provinsi

NO	Atribut Kinerja	Tingkat Kesesuaian	Interpretasi
1.	Quality of Work	101%	Kinerja memuaskan
2.	Quantity of Work	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
3.	Job Knowledge	100%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
4.	Creativeness	99%	Kinerja memuaskan
5.	Cooperation	100%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
6.	Dependability	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
7.	Initiative	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
8.	Personal Qualities	100%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
<b>Rata-rata</b>		<b>99%</b>	<b>Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, perbandingan skor kinerja alumni dan skor harapan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengguna di 16 (enam belas) provinsi ditemukan tingkat kesesuaian di bawah 100%, yaitu antara 98% - 99%. Meskipun tingkat kesesuaian belum mencapai 100%, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam memenuhi harapan pengguna.

Hasil analisis menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) di 16 lokus penelitian, yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan secara garis besar ditemukan bahwa cenderung lebih banyak menyebar pada di Area B, dengan interpretasi bahwa kriteria tersebut dianggap sangat baik, sehingga dapat dikatakan kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Hasil rekapitulasi IPA dapat dilihat pada Diagram Kartesus sebagai berikut:

Gambar 3.13 Importance Performance Analysis (IPA) pada 16 (enam belas) Provinsi



Tabel 3.46 Kriteria Kompetensi dan Posisinya pada Diagram Kartesius IPA

Kode Kriteria	Kriteria	Posisi Area dalam Diagram Cartesius	Interpretasi
X5.2	Bertanggung jawab	A	Kriteria tersebut dianggap sangat penting akan tetapi tingkat kinerja Alumni belum sesuai dengan harapan
X6.1	Kesetiaan	A	
X6.3	Berani mengambil resiko	A	
X7.4	Kemampuan menyampaikan pendapat	A	
X8.4	Percaya diri	A	
X8.5	Dapat diandalkan	A	
X8.6	Kepemimpinan	A	
X8.7	Kepatuhan	A	
X1.1	Akurasi dan terampil dalam melaksanakan tugas	B	Kriteria tersebut dianggap sangat penting dan tingkat Kinerja Alumni dianggap sangat baik. sehingga dapat dikatakan kinerja alumni IPDN sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.
X2.1	Kemampuan melaksanakan tugas dalam periode tertentu dengan baik	B	
X4.2	Mampu menerima kritikan dan saran	B	
X4.3	Mampu melihat peluang	B	
X5.1	Mengutamakan tujuan kelompok atau organisasi	B	
X7.1	Keinginan untuk mengembangkan kompetensi	B	
X7.2	Kemampuan manajemen diri	B	
X7.3	Kemampuan menyelesaikan masalah dan pekerjaan	B	
X8.1	Jujur	B	
X8.2	Disiplin	B	
X8.3	Hormat dengan seluruh pegawai lainnya	B	
X1.2	Akurasi dan terampil dalam melaksanakan tugas	C	Kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting oleh pengguna, demikian juga kinerja alumni kurang
X3.1	Kemampuan memahami dan menginterpretasikan tugas	C	
X3.2	Kemampuan bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku	C	
X3.3	Penguasaan bahasa asing	C	
X3.4	Penguasaan Teknologi Informasi	C	
X3.5	Kemampuan mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan	C	
X6.2	Memegang teguh prinsip	C	
X1.3	Kemampuan perencanaan perorganisasian dan berorganisasi	D	Kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting bagi pengguna, namun kinerja alumni sangat baik
X1.4	Mampu bekerja dalam tekanan	D	
X2.2	Kemampuan dalam mencapai target	D	
X4.1	Memiliki inovasi	D	
X5.3	Kemampuan berkoordinasi	D	

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil pemetaan kriteria menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) dari 31 (tiga puluh satu) kriteria pada 16 (enam belas) provinsi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Area A terdapat 8 kriteria, yang menunjukkan kriteria tersebut dianggap sangat penting namun tingkat kinerja belum sesuai dengan harapan
2. Pada Area B terdapat 11 kriteria, area ini menunjukkan bahwa kriteria tersebut dianggap sangat penting dan tingkat kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dianggap sangat baik, sehingga dapat dikatakan kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sesuai dengan kebutuhan

dan harapan pengguna;

3. Pada Area C terdapat 7 kriteria, yang menunjukkan kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting oleh pengguna, demikian juga kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kurang;
4. Pada Area D terdapat 5 kriteria, pada area ini menunjukkan kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting namun kinerja alumni IPDN sangat baik.

Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni sebesar 3,69 berada pada kategorisasi Sangat Baik yang menggambarkan bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan di IPDN semakin berkualitas.

Tabel 3.47 Kategorisasi Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

No	Indikator Penilaian	Nilai Unsur Pelayanan		Bobot Rata-rata	Nilai Indeks Kepuasan
1.	Quality Work (X1)	3,75	A	0,125	0,4689
2.	Quantity of Work (X2)	3,66	A	0,125	0,4571
3.	Job Knowledge (X3)	3,64	A	0,125	0,4555
4.	Creativeness (X4)	3,70	A	0,125	0,4629
5.	Cooperation (X5)	3,68	A	0,125	0,4606
6.	Dependability (X6)	3,67	A	0,125	0,4589
7.	Initiative (X7)	3,74	A	0,125	0,4680
8.	Personal Qualities (X8)	3,66	A	0,125	0,4581
<b>Nilai Indeks Kepuasan</b>					<b>3,6900</b>
<b>Nilai IKP Setelah Dikonversi</b>					<b>92,2492</b>
<b>Mutu Pelayanan</b>					<b>A</b>
<b>Kinerja Pelayanan</b>					<b>Sangat Baik</b>

Sumber: Bagian Program Pengasuhan dan Alumni, 2024

Dengan Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni Tahun 2024 sebesar 3,69 maka diperoleh nilai capaian, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,69}{3,60} \times 100\% \\
 &= 102,50\%
 \end{aligned}$$

Analisis yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Pengguna alumni IPDN secara umum puas dengan kinerja alumni IPDN dikarenakan kinerja alumni IPDN pada kriteria Quality Of Work, Quantity Of Work, Job Knowledge, Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative dan Personal Qualities dan menilai bahwa aspek-aspek tersebut adalah bidang kompetensi yang sangat penting bagi pemerintah daerah.
2. IPDN sebagai Pusat Pengembangan Revolusi Mental. Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo telah mencanangkan IPDN sebagai pusat pengembangan revolusi mental di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 15 Juni 2015. Kader Pelopor Revolusi Mental dan telah ditugaskan dengan distribusi: 15%

di Kementerian/lembaga, 35% di Daerah Perbatasan dan Pesisir, dan 50% disebar keseluruh Pemerintah Daerah.

3. Kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada IPDN dalam mengelola rekrutmen calon praja yang dilaksanakan secara online. Proses seleksi calon praja melibatkan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), Badan Kepegawaian Negara, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni Tahun 2020-2024, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.48 Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni Tahun 2020 s.d. 2024. Kategorisasi Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

IKU: Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2024	Nilai 3,60	Nilai 3,69	102,50%
Tahun 2023	Nilai 3,50	Nilai 3,69	105,43%
Tahun 2022	Nilai 3,30	Nilai 3,68	111,52%
Tahun 2021	Nilai 3,20	Nilai 3,48	108,75%
Tahun 2020	Nilai 3,00	Nilai 3,72	124,00%

Sumber data: Laporan Hasil Survei Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni IPDN Tahun 2020-2024

Pencapaian kinerja Tahun 2024 sebesar nilai 3,69 tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja IKU Tahun 2023. Sedangkan terhadap target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024, dimana target 2024 sebesar 3,6, realisasi selama 3 tahun terakhir (Tahun 2022, 2023 dan 2024) telah melampaui target jangka menengah.

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Seminar Nasional dan Stadium General bagi Praja dan Civitas Akademika IPDN, dengan manghadirkan

narasumber dari Pejabat Negara (Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (BSSN), Direktur Pengelolaan Informasi Data Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sekda Kota Surabaya, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Bupati Kaimana, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan Tema:

- Percepatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Pemerintahan;
- Perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten

- Kaimana Serta Berbagai Upaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- Kepemimpinan Transformasi dan Strategi Hilirisasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045;
2. Terselenggaranya penelitian lingkup IPDN Tahun 2024 yang bersifat strategis, yaitu:
    - Collaborative Border Management dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pada Daerah Perbatasan Kalimantan Timur Malaysia;
    - Pengembangan Potensi Ekonomi Perbatasan Melalui Kerjasama Lintas Batas Indonesia Timor Leste;
    - Strategi Percepatan Integrasi Data Kependudukan dalam Mendukung Transformasi Digital di Kota Makassar;
    - Implementasi Kebijakan Perijinan Berusaha Untuk UMKM di Kota Banjarmasin;
    - Analisis Kecenderungan Prefensi Pemilih Generasi Z dalam Pemilu 2024 di DKI Jakarta;
    - Menuju Smart City yang Berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi;
    - Dialektika Kemiskinan dengan Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;
    - Optimalisasi Kinerja ASN Dukcapil di Provinsi Papua Selatan;
    - Strategi Percepatan Integrasi Data Kependudukan dalam Mendukung Transformasi Digital di Kota Makassar;
    - Revitalisasi UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal;
    - Strategi Adaptasi Terhadap Perubahan di Era Pembentukan Smart City;
    - Netralitas Aparatus Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta;
    - Implementasi Kebijakan Single Identity Number untuk Integrasi Data Kependudukan di Kota Makassar;
    - Pembangunan Kawasan Sekitar Pintu Lintas Batas Negara Motaain Belu;
    - Model Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Pemerintahan Kecamatan di daerah Perbatasan Sanggau; dan
    - Pengelolaan Potensi Ekonomi pada Kawasan Perbatasan RI-Timor Leste di Kabupaten Belu NTT.
  3. Terselenggaranya pengabdian masyarakat dalam membantu penyelesaian permasalahan dan pengembangan perekonomian di tengah-tengah masyarakat secara langsung, yaitu:
    - Terlaksananya Bhakti Karya Praja bagi Praja Utama IPDN sejumlah 1.117 Praja, di Provinsi Jawa Tengah;
  - Keikutsertaan Praja Utama IPDN sebanyak 200 Praja Utama dalam kegiatan LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA (LATSITARDA) Nusantara ke-XLIV Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur bersama Taruna Akademi Militer (AKMIL), Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL), Taruna Akademi Angkatan Udara (AAU), Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL), Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dan Mahasiswa dari Universitas Pertahanan;
  - Pelaksanaan Kegiatan Magang I di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Kegiatan Magang II di Kab/Kota lokasi IPDN Kampus Daerah masing2, dan Kegiatan Magang III di Kota Cirebon dan Kab. Majalengka;
  - Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Desa Binaan di 12 Desa Se-Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
  - IPDN memberikan bantuan kepada masyarakat korban gempa bumi di Kab. Cianjur;
  - IPDN memberikan bantuan kepada masyarakat korban Banjir Bandang di Kota Manado.
    4. Keikutsertaan 100 Praja IPDN dalam kegiatan sosialisasi pengawasan dan penguatan pemahaman kepemiluan dari Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dengan konteks mengajak para Praja untuk menjadi pengawas partisipatif.
    5. IPDN terpilih sebagai Lokasi ujisahih Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Aset pada tanggal 28 Mei 2024 oleh Komisi IV DPD RI, yang dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPD RI bersama 19 orang Anggota;
    6. Pertukaran Praja dan Dosen Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN dengan Fakultas Saints Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM);
    7. Menerima Diplomat Kedutaan Amerika Serikat pada tanggal 28 Maret 2024 Dalam Rangka Kerja Sama Pelatihan Bahasa Inggris oleh Kedutaan AS kepada Dosen dan Praja di IPDN;
    8. Praja dan Sivitas Akademika IPDN ikut terjun langsung dalam aksi bersih-bersih dan memberikan bantuan logistik bagi korban bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin yang terjadi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
    9. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan IPDN, yaitu:

- Pengembangan Tenaga Pendidik Lingkup IPDN (Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) bagi Dosen IPDN);
  - Pengembangan Tenaga Kependidikan Lingkup IPDN (Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIM. II) bagi 2 orang Pejabat Struktural di lingkungan IPDN);
10. Fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Pejabat Fungsional di lingkungan IPDN dalam bentuk Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional, Seminar/ Webinar, Focus Group Discussion (FGD), dan Sosialisasi, seperti: PKN II, PKA, Diklat Manajemen Risiko, Pengadaan Barang dan Jasa, SAKIP, Perencana, Pustakawan, dan lainnya;
  11. Meningkatkan penerapan sistem Pengasuhan yang terintegrasi melibatkan tiga komponen yaitu Kampus, Keluarga dan Masyarakat. Metode pengasuhan meliputi metode "among asuh" (saling asah, saling asih dan saling asuh), menerapkan asas-asas ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani melalui metode observasi, pembinaan dan bimbingan, pengawasan, serta keteladanan; dan
  12. Perbaiki Sistem Penerimaan Calon Praja IPDN, dengan mengutamakan keterbukaan, menutup ruang KKN, dan membuka kesempatan yang sama bagi putra/i Indonesia tanpa membedakan status sosial, dengan rincian Tahun 2024, jumlah peminat Calon Praja IPDN sejumlah 33.653 orang dari formasi yang tersedia sejumlah 721 orang dan yang lulus sejumlah 721 orang berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor: 800.1.2.2-362 Tahun 2024 Tentang Hasil Registrasi Calon Praja Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2024.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Akurasi Alumni dalam melaksanakan tugas belum sesuai dengan harapan;
2. Kemampuan Alumni dalam mencapai target belum optimal;
3. Penguasaan Alumni terhadap Teknologi Informasi belum sesuai dengan harapan;
4. Kinerja Alumni belum mengutamakan tujuan kelompok atau organisasi;
5. Sopan dan santun Alumni dengan Pegawai lainnya belum sesuai dengan harapan;
6. Kepatuhan Alumni belum sesuai dengan harapan.

Upaya/Alternatif solusi yang telah dan akan terus dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diantaranya:

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kurikulum Pendidikan, Pelatihan, dan Pengasuhan (Jarlatsuh) sesuai kebutuhan pengguna di lapangan;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Praja terhadap teknologi informasi dengan digitalisasi sistem pembelajaran melalui penerapan smart campus di lingkungan IPDN;
3. Meningkatkan kedisiplinan Praja dan Prestasi Bidang Pengasuhan dan Ekstrakurikuler Praja.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni Tahun 2024, antara lain:

1. IPDN telah memiliki Ikatan Alumni IPDN sehingga pelaksanaan monitoring kinerja alumni dapat berjalan lebih optimal.
2. Survei dilaksanakan secara manual dan online yaitu datang langsung ke lokasi survei dengan menyebarkan kuesioner dan pelaksanaan melalui online melalui google form.



# SASARAN 6

## Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sesungguhnya lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundangundangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia semakin lama menjadi semakin signifikan,

ditengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks antara lain dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh globalisasi. Dimana signifikansi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundangundangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.

Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundangundangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

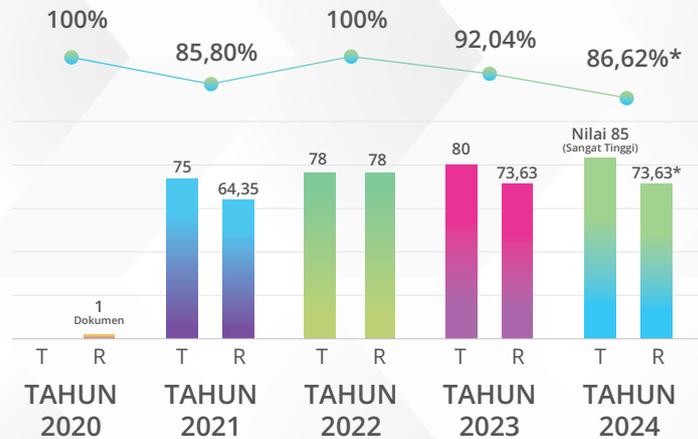
Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah” diperoleh sebesar 86,62%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sedang atau kategori Cukup Berhasil. Hal ini didukung oleh capaian indikator Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan predikat Sedang atau kategori Cukup Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	73,63*	86,62%	Sedang/Cukup Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				86,62%	Sedang/Cukup Berhasil



## Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah



\*Capaian Tahun 2024 menggunakan capaian Tahun 2023

86,62%\*

CAPAIAN 2024

T = Target

R = Realisasi

Dalam rangka menjamin kepastian hukum di daerah dan untuk memastikan produk hukum di daerah berdasarkan asas pembentukan dan asas materi muatan, perlu dilakukan pembinaan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan peraturan perundang-undangan di daerah, yakni peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada). Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah melakukan pembinaan Produk Hukum Daerah dengan indikator pengukuran, yaitu Indeks Kepatuhan terhadap Penyusunan Produk Hukum Daerah. Indeks Kepatuhan terhadap Penyusunan Produk Hukum Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan daerah telah dilakukan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mengurangi peraturan yang berlawanan dengan peraturan di atasnya, tumpang tindih peraturan, dan mencegah terhambatnya pembangunan di daerah.

Indeks Kepatuhan Daerah dalam pembentukan peraturan daerah menjadi salah satu bentuk pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan IKD mengacu terhadap UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pengukuran Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan melalui aplikasi e-Perda sebagai media untuk mengunggah data. Dalam melakukan penghitungan, dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yakni dengan menggunakan alat ukur yang telah disusun dan dirancang berdasarkan asat tahapan pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Pengukuran ini dijabarkan melalui 5 Aspek, 12 Variabel dan 39 Indikator yang dirincikan pada tabel berikut

Tabel 3.49 Penjabaran Aspek, Variabel dan Indikator, dan Dokumen Data Dukung

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
1.	Perencanaan (30%)	Kepatuhan penetapan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Propemperda (35%)	Propemperda ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD (8,75%)	Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun berkenaan
			Jangka waktu Penetapan SK DPRD tentang Propemperda ditetapkan sebelum Perda mengenai APBD Tahun Anggaran berikutnya ditetapkan (8,75%)	
			Propemperda Disepakati Bersama melalui Keputusan DPRD disertai dengan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (8,75%)	Berita Acara Paripurna Penetapan SK Propemperda Tahun berkenaan
			Lampiran Dokumen SK DPRD tentang Propemperda disertai dengan tabel sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (8,75%)	
		Kepatuhan dalam Pembentukan Propemperda dalam kerangka Analisa Kebutuhan Perda dan/ atau Kajian Akademik lainnya (35%)	Judul Ranperda dalam Propemperda yang tertuang dalam Propemperda disertai dengan penjelasan atau keterangan pokok pikiran dan materi muatan yang diatur	Dokumen Penjelasan/ Keterangan Ranperda yang terlampir dalam SK DPRD tentang Propemperda
			Judul Ranperda dalam Propemperda yang disertai penjelasan atau keterangan juga disertai dengan identifikasi/ kajian mengenai mengapa Ranperda dimaksud harus diprioritaskan dan harus didahulukan penetapannya	
			Ranperda dalam Propemperda yang direncanakan yang akan ditetapkan lebih awal merupakan Ranperda dalam skala prioritas 1-3 sesuai dengan prioritas dalam Analisa Kebutuhan Perda (AKP)	Surat Keputusan Tim Penyusunan Ranperda
			Ranperda yang tertuang dalam Propemperda disusun berdasarkan Metode Analisa Kebutuhan Perda (AKP)	
		Kepatuhan dalam Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan (30%)	Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui media daring milik pemerintah daerah (7,5%)	Propemperda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)
			Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui kanal milik Pemerintah Pusat (eperda.kemendagri.go.id) (7,5%)	Propemperda disampaikan kepada Mendagri melalui E-perda (Screenshot)
			Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui kanal media dalam jaringan (online) atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/atau luar daerah (7,5%)	Publikasi Ranperda dalam portal media massa (Screenshot)
			Dilakukan program sosialisasi Propemperda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik (7,5%)	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
2.	Penyusunan (20%)	Kepatuhan Keterlibatan Pihak terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (35%)	Pembentukan Tim Penyusunan dengan Keputusan Kepala Daerah (8,75%)	Surat Keputusan Tim Penyusunan Perda
			Ranperda disusun bersama dengan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (8,75%)	
			Ranperda disusun bersama dengan melibatkan PD dan/atau Instansi Vertikal yang tugas dan kewenangannya berkaitan dengan muatan yang diatur dalam ranperda dimaksud (8,75%)	
			Penyusunan ranperda melibatkan peneliti dan/atau tenaga ahli yang kapasitasnya berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Ranperda (8,75%)	
		Kepatuhan Pengkajian dalam Penyusunan Ranperda (35%)	Dilakukan penyusunan Ranperda antara pemrakarsa dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum atau Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) di DPRD (8,75%)	Surat Hasil Pengharmonisan, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi
			Ranperda dilakukan pengharmonisan, pembulatan, pemantapan konsepsi oleh Bapemperda bagi Ranperda yang berasal dari DPRD dan Kanwil Kemenkumham bagi Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah (8,75%)	
			Teknik Penyusunan Ranperda dilakukan dengan pencermatan oleh Biro Hukum bagi Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah serta oleh Bapemperda bagi Ranperda yang berasal dari DPRD (8,75%)	Berita Acara Pencermatan
		Ranperda disusun berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Materi Muatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait di atasnya (8,75%)		
		Kepatuhan dalam Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan (30%)	Dokumen Ranperda disebarluaskan melalui situs daring milik Pemerintah Daerah (10%)	Ranperda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)
			Dokumen Ranperda disebarluaskan melalui media daring atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/atau luar daerah (10%)	Publikasi Ranperda dalam portal media massa (Screenshot)
Dilakukan program sosialisasi Ranperda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik yang diprakarsai oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah (10%)	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan			

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
3.	Pembahasan (30%)	Kepatuhan Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembahasan Ranperda (40%)	Pembahasan Ranperda dilakukan berdasarkan yang telah ditetapkan dalam Propemperda kecuali yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (10%)	Daftar Ranperda pada Lampiran SK Propemperda dan/ atau SK DPRD tentang Pembahasan Ranperda diluar Propemperda
			Jangka waktu Pembicaraan Tingkat I sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan mengacu pada Propemperda (10%)	Target Waktu pembahasan pada Lampiran SK Propemperda dan Dokumen Jadwal Badan Musyawarah
			Jangka waktu Pembicaraan Tingkat II sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan mengacu pada Propemperda (10%)	
			Ranperda yang selesai dibahas disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan (10%)	Berita Acara Kesepakatan
		Kepatuhan terhadap Fasilitasi/ Evaluasi Ranperda (60%)	Fasilitasi ranperda dilakukan setelah Pembicaraan Tingkat I (15%)	Surat Permohonan Fasilitasi/Evaluasi
			Jangka Waktu tindak lanjut hasil fasilitasi yang akan dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II (15%)	Target Waktu pembahasan pada Lampiran SK Propemperda dan Dokumen Jadwal Badan Musyawarah
			Ranperda yang ditetapkan dalam Persetujuan Bersama telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi / evaluasi Kemendagri (15%)	Surat Hasil Fasilitasi dan Draft Ranperda
			Ranperda yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah disesuaikan dengan Hasil Fasilitasi/ Evaluasi yang dibuktikan dengan Hasil Verifikasi dari Biro Hukum Kemendagri (15%)	Draft Final Ranperda
4.	Penetapan (10%)	Kepatuhan dalam Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan (30%)	Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. (25%)	Surat Penyampaian Ranperda dari DPRD
			Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling Lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah (25%)	Dokumen Perda
		Kepatuhan terhadap Pemberian Nomor Register Ranperda (50%)	Pemerintah Daerah menyampaikan Ranperperda kepada Menteri Dalam Negeri untuk diberikan Nomor Register paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Ranperda dari DPRD (50%)	Surat Permohonan Nomor Register

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
5.	Pengundangan dan Pelaporan (10%)	Kepatuhan Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembahasan Ranperda (40%)	Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan (30%)	Dokumen Perda yang telah diundangkan
			Dokumen Perda disebarluaskan melalui situs daring milik Pemerintah Daerah (11,66%)	Perda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)
			Dokumen Perda disebarluaskan melalui media daring atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/atau luar daerah (11,66%)	Publikasi Perda dalam portal media massa (Screenshot)
			Dilakukan program sosialisasi Perda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD (11,66%)	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan
		Kepatuhan dalam penyampaian / pelaporan Perda yang telah diundangkan (35%)	Jangka Waktu Kepatuhan dalam penyampaian Perda yang telah diundangkan (skala 1 - 7 hari) kepada Menteri Dalam Negeri (17%)	Surat penyampaian Perda yang telah diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri
			Pelaporan Perda yang telah ditetapkan dilakukan melalui kanal milik Pemerintah Pusat (eperda.kemendagri.go.id) (17%)	Tanggal Penyampaian Perda kepada Mendagri menggunakan Aplikasi e-Perda (Screenshot)

Berdasarkan pembobotan tersebut, hasil pengukuran Indeks Kepatuhan Daerah dilakukan kategorisasi penghitungan peringkat Provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.50 Pembobotan Skala Indeks IKD

NO.	SKALA INDEKS	DEFINISI
1.	0% - 20%	Sangat Rendah
2.	≥20% - 40%	Rendah
3.	≥40% - 60%	Sedang
4.	≥60% - 80%	Tinggi
5.	≥80% - 100%	Sangat Tinggi

Penghitungan nilai Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dirumuskan dengan:

$$\text{Capaian Kinerja Nilai IKD} = \frac{\text{Realisasi nilai IKD}}{\text{Target nilai IKD}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2024 dilakukan di 34 Provinsi. Saat ini, pengukuran Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah masih belum selesai sehingga belum didapatkan nilai akhir dari Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah secara Nasional. Proyeksi Nilai Indeks Kepatuhan Produk hukum Daerah Tahun 2024 sama dengan Nilai Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 sebesar 73,63, dengan rincian 8 Provinsi berpredikat "Sangat Tinggi", 22 Provinsi berpredikat "Tinggi", 1 Provinsi berpredikat "Sedang", dan 3 Provinsi berpredikat "Belum dapat dinilai". Berikut nilai Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dari 34 Provinsi.

Tabel 3.51 Penghitungan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah Tahun 2023 Pembobotan Skala Indeks IKD

No.	Provinsi	Nilai Tertinggi	Hasil Penilaian
1.	Nusa Tenggara Timur	87,33	Sangat Tinggi
2.	Jawa Timur	85,46	Sangat Tinggi
3.	Sulawesi Selatan	85,04	Sangat Tinggi
4.	Banten	84,83	Sangat Tinggi
5.	Jawa Barat	83,08	Sangat Tinggi
6.	Sumatera Selatan	82,58	Sangat Tinggi
7.	Bali	81,00	Sangat Tinggi
8.	Maluku	80,29	Sangat Tinggi
9.	Aceh	79,04	Tinggi
10.	Gorontalo	78,08	Tinggi
11.	Bengkulu	77,92	Tinggi
12.	Sulawesi Tengah	77,58	Tinggi
13.	Lampung	76,33	Tinggi
14.	Kalimantan Selatan	75,46	Tinggi
15.	Sumatera Utara	74,67	Tinggi
16.	D.I. Yogyakarta	74,08	Tinggi
17.	Kalimantan Tengah	73,21	Tinggi
18.	Dki Jakarta	72,08	Tinggi
19.	Sulawesi Tenggara	71,62	Tinggi
20.	Riau	70,24	Tinggi
21.	Kalimantan Timur	68,62	Tinggi
22.	Jawa Tengah	67,83	Tinggi
23.	Kalimantan Barat	66,04	Tinggi
24.	Bangka Belitung	65,67	Tinggi
25.	Sumatera Barat	63,33	Tinggi
26.	Kepulauan Riau	62,12	Tinggi
27.	Papua Barat	61,96	Tinggi
28.	Jambi	61,86	Tinggi
29.	Kalimantan Utara	60,46	Tinggi
30.	Nusa Tenggara Barat	60,29	Tinggi
31.	Sulawesi Utara	57,88	Sedang
32.	Maluku Utara	-	Belum dapat dinilai
33.	Sulawesi Barat	-	Belum dapat dinilai
34.	Papua	-	Belum dapat dinilai

Penghambat keluarnya nilai Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dikarenakan proses dan tahapan yang saling keterkaitan dan tidak bisa selesai hanya dalam 1 tahun anggaran, dengan tahapan, antara lain:

1. Pemerintah Daerah melakukan pengunggahan dokumen sebagai bahan penilaian melalui Aplikasi e-Perda.
2. Validasi dan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh Pemerintah Daerah.
3. Analisa pengukuran dengan menggunakan indikator.
4. Finalisasi perhitungan terhadap IKD dan memberikan pengumuman hasil perhitungan IKD.

Indikator Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah didukung melalui adanya RO Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024, antara lain:

1. Database peraturan daerah dengan target 1 Data dan telah direalisasikan dengan adanya website ePerda.
2. Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil revidi Kemendagri.
3. Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum.

Kemendagri melalui Ditjen Otda telah melakukan serangkaian program/kegiatan dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Bapemperda DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara rutin.
2. Asistensi Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan, dan Pelaporan Perda dan Perkada.
3. Penyajian informasi dalam e-Perda yang meliputi revidi Perda dan Perkada serta Penyajian database peraturan daerah.

Efisiensi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja indikator ini berupa pemanfaatan layanan berbasis digital yakni Aplikasi e-Perda. Adanya aplikasi e-Perda membuat penyelenggara pemerintahan di daerah semakin mudah dalam mengunggah berbagai kebutuhan data dukung dalam pengukuran Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilihat dari kinerja dengan realisasi anggaran Ditjen Otda sebesar 95,67% (per tanggal 31 Desember 2024) dan realisasi anggaran Direktorat Produk Hukum Daerah sebesar 82,26% (per tanggal 31 Desember 2024). Dari alokasi anggaran yang diberikan, terjadi efisiensi sebesar 17,74%.







# SASARAN 7

## Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif

Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 memiliki Visi, Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong, serta Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2024.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Profesional dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas

dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya. Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontigensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif” diperoleh sebesar 111,97%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil Hal ini didukung oleh capaian 6 (enam) indikator dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, 1 (satu) indikator dengan predikat Tinggi atau kategori Berhasil, 2 (dua) indikator dengan predikat Sedang atau kategori Cukup Berhasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	Sedang	100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)	Nilai 2,82 *nilai proyeksi	70,50%	Sedang/Cukup Berhasil
3	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	100%	87,86%	87,86%	Sedang/Cukup Berhasil
4	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sinkron)	Nilai 99,91	99,91%	Tinggi/Berhasil
5	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”	4%	12,30%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
6	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 66	Nilai 71,90	108,94%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
7	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%	76,92%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
8	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 100 (Sangat Baik)	100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
9	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	Nilai 90,40	100,44%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
<b>Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>111,97%</b>	<b>Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil</b>



## Nilai Kinerja Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD



100%  
CAPAIAN 2024

T = Target R = Realisasi

Kemendagri melalui Ditjen Otda berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, yang salah satunya adalah kemitraan kepala daerah dan DPRD. Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD merupakan indikator yang baru dilakukan pengukuran pertama kali pada Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Revisi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Indikator semula yang digunakan adalah indeks kinerja kepala daerah dan DPRD, tetapi pada Tahun 2024 adalah masa penyelenggaraan Pilkada serentak dan banyaknya penjabat kepala daerah sehingga tidak relevan untuk mengukur kinerja kepala daerah dan DPRD. Berkenan dengan hal tersebut maka dilakukan revisi indikator kinerja menjadi nilai kinerja kemitraan kepala daerah dan DPRD sebagaimana Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Dalam konteks otonomi daerah, indikator ini menilai hubungan yang dinamis antara Kepala Daerah dan DPRD dengan menerapkan prinsip check and balance, kesetaraan, kemitraan dan mengedepankan penegakan hukum.

Penilaian kinerja kemitraan KDH dan DPRD meliputi 3 jenis kemitraan DPRD dan KDH yang dilakukan di akhir tahun periode penilaian, antara lain:

1. Kemitraan DPRD dan KDH dalam penyusunan Perda.  
Pertanyaan untuk kemitraan DPRD dan KDH dalam penyusunan Perda berupa 11 butir pertanyaan yang menunjukkan kemitraan tersebut dilaksanakan di daerah. Dengan disertai uraian (deskripsi) dan dinilai kualitas pernyataan dengan tinggi, sedang dan rendah.
2. Kemitraan KDH dan DPRD dalam pengawasan.  
Pertanyaan kemitraan KDH dan DPRD dalam pengawasan berupa 9 butir pertanyaan yang menunjukkan kemitraan tersebut dilaksanakan di daerah. Dengan disertai uraian (deskripsi) dan dinilai kualitas pernyataan dengan tinggi, sedang dan rendah.
3. Kemitraan KDH dan DPRD dalam anggaran.  
Pertanyaan kemitraan KDH dan DPRD dalam anggaran berupa 13 butir pertanyaan yang menunjukkan kemitraan tersebut dilaksanakan di daerah. Dengan disertai uraian (deskripsi) dan dinilai kualitas pertanyaan dengan tinggi, sedang dan rendah. Mendukung 3 jenis kemitraan KDH dan DPRD tersebut diatas.

Hasil dari pengisian kuisioner kemudian di skoring dengan deskripsi sebagai berikut:

Tabel 3.53 Hasil Penilaian Kemitraan KDH dan DPRD di 55 Daerah Tahun 2024

Skor	Predikat	Keterangan
3	Tinggi	Sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hubungan kemitraan antara kepala daerah dan DPRD sangat baik
2	Sedang	Dilaksanakan, namun ada sedikit kekurangan/ tidak sesuai dengan perundang-undangan/ hubungan kemitraan kepala daerah dan DPRD baik
1	Rendah	Dilaksanakan tapi cukup banyak kekurangan/tidak sesuai dengan perundang-undangan/ hubungan kemitraan kepala daerah dan DPRD kurang baik

Untuk menentukan nilai kinerja kemitraan Kepala Daerah dan DPRD maka hasil nilai per daerah dijumlah dan dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai akhir secara nasional.

Pengukuran Kemitraan KDH dan DPRD Tahun 2024 dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan di 55 daerah dari target 34 daerah. Pengukuran ini menghasilkan nilai rata-rata sebesar 1,7 (Sedang), dengan hasil per daerah sebagai berikut:

Tabel 3.54 Hasil Penilaian Kemitraan KDH dan DPRD di 55 Daerah Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	No	Nama Indikator	Target
1	Provinsi Sumatera Barat	1,9	24	Kabupaten Tabalong	1,4
2	Provinsi DIY	2,4	25	Kabupaten Balangan	1,8
3	Provinsi Sulawesi Barat	2	26	Kabupaten Tanah Bumbu	1,6
4	Provinsi Sulawesi Tengah	2	27	Kabupaten Tapin	1
5	Provinsi Bali	2,2	28	Kabupaten Sanggau	1,7
6	Provinsi Ntb	2,1	29	Kabupaten Sintang	1,9
7	Provinsi Kalimantan Tengah	1,8	30	Kota Pontianak	1,3
8	Provinsi Kalimantan Barat	1,8	31	Kota Balikpapan	1,7
9	Provinsi Kalimantan Utara	1,6	32	Kabupaten Kartanegara	1,7
10	Provinsi Kalimantan Timur	2	33	Kabupaten Kota Waringin Timur	1,1
11	Kota Padang	2,3	34	Kabupaten Barito Selatan	0,6
12	Kota Tanjungpinang	1,9	35	Kabupaten Kapuas	1,1
13	Kota Bandar Lampung	2,1	36	Kabupaten Gorontalo	1,7
14	Kabupaten Labuhan Batu	1,7	37	Kabupaten Gorontalo Utara	1,9
15	Kabupaten Pacitan	1	38	Kabupaten Pohuwatu	1
16	Kabupaten Klaten	2,3	39	Kota Palu	1,8
17	Kabupaten Lamongan	2,3	40	Kabupaten Buol	1,6
18	Kabupaten Pekalongan	1,5	41	Kota Pare-Pare	1,9
19	Kabupaten Kulon Progo	2,4	42	Kabupaten Boalemo	1,9
20	Kota Cimahi	1	43	Kota Gorontalo	1,8
21	Kabupaten Gunung Kidul	2,4	44	Kabupaten Morowali Utara	2
22	Kabupaten Tasikmalaya	2,2	45	Kabupaten Bangle	2,2
23	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1,5	46	Kabupaten Tabanan	1,6

No	Nama Indikator	Target
47	Kabupaten Lombok Timur	1,9
48	Kota Mataram	1,9
49	Kabupaten Belu	1,9
50	Kabupaten Rote Ndao	2,3
51	Kota Kupang	1,7
52	Kabupaten Buru Selatan	1,6
53	Kota Ambon	1
54	Kabupaten Halmahera Tengah	1
55	Kabupaten Teluk Wondama	1,8
<b>TOTAL</b>		<b>95,8</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1,7 (Sedang)</b>

Secara umum, hasil penilaian kemitraan antara kepala daerah dan DPRD dalam penyusunan perda, anggaran, dan pengawasan pada tahun 2024 menunjukkan kualitas yang sedang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya sedikit kekurangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar lebih optimal. Selain itu, beberapa hasil kerja sama yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun bukan merupakan pelanggaran besar yang berdampak signifikan. Namun, di sisi lain, hubungan kemitraan antara kepala daerah dan DPRD tetap berjalan dengan baik, yang menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi yang cukup efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah.

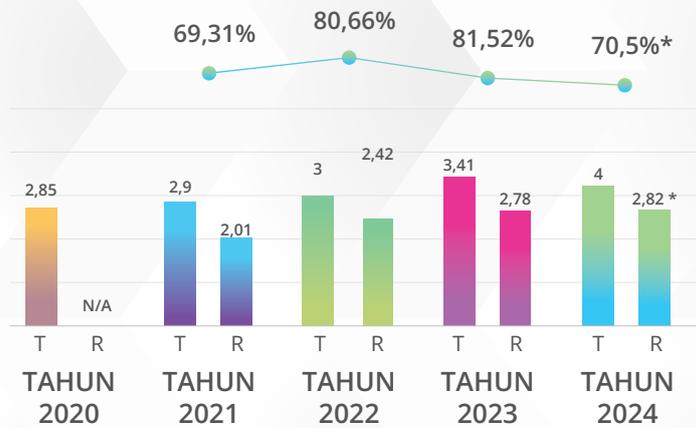
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah kondisi Tahun 2024 yang merupakan tahun politik dilaksanakannya Pemilu dan Pilkada Serentak serta terdapat peningkatan jumlah anggota DPRD hasil pemilu turut meningkatkan beban kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan. Namun, keberhasilan dalam pengisian kuisioner berjalan dengan baik berkat hubungan kerja yang sudah terjalin erat antara Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan Pemerintah Daerah.

Efisiensi sumber daya (anggaran) dapat dilihat dari kinerja realisasi anggaran Ditjen Otda sebesar 95,67% (Per tanggal 31 Desember 2024) dan realisasi anggaran Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD sebesar 83,82% (Per tanggal 31 Desember 2024).





## Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



# 70,5%

## CAPAIAN 2024

T = Target    R = Realisasi

\*Realisasi dan Capaian Proyeksi

Berdasarkan amanat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada satu tahun anggaran. LPPD tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akuntabilitas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Selain itu, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, maka daerah-daerah yang dinilai perlu

pembinaan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemerintahannya diberikan program peningkatan kapasitas sehingga pada tahun berikutnya ketika dievaluasi, diharapkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerahnya dapat meningkat.

Kemendagri melalui Ditjen Otda memiliki peran dalam pelaksanaan EPPD melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah. Kemendagri juga memiliki peran dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan dan pengawasan. Kemendagri juga memiliki peran dalam pembinaan sebagai tindak lanjut atas daerah dengan nilai EPPD rendah. Pengaturan pengukuran nilai EPPD diatur melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Tahun 2023 menggunakan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dengan mempedomani mekanisme evaluasi yang diatur pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. EPPD dilakukan dengan mengukur dua kinerja, yaitu kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan formulasi sebagai berikut:

$$KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$$

Ket:

**KPPD** = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

**CKM** = Capaian Kinerja Makro

**CKUP** = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

**PKM** = Perubahan Kinerja Makro

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai EPPD secara nasional dilakukan perhitungan dan kategorisasi sebagai berikut:

### Nilai Provinsi Tinggi 1 + Nilai Provinsi Tinggi 2 + Dst Target Jumlah Provinsi Kinerja Tinggi

Tabel 3.55 Kategorisasi Skala EPPD

Skor Kinerja	Status Kinerja
1,00 - 1,80	Sangat Rendah
1,81 - 2,60	Rendah
2,61 - 3,40	Sedang
3,41 - 4,20	Tinggi
<b>4,21 - 5,00</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 masih belum diterbitkan sampai dengan buku ini diterbitkan. Pada laporan kinerja ini, Kami mencantumkan nilai Proyeksi EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Tahun 2023 sebesar 2,82.

Nilai EPPD juga menjadi indikator dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, IKU Nilai EPPD juga didukung melalui RO Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024, antara lain

1. Provinsi yang berkinerja tinggi berkinerja tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan target 16 Provinsi.
2. Kabupaten/Kota yang berkinerja tinggi berkinerja tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan target 234 Kabupaten/Kota.

Kemendagri melalui Ditjen Otda telah melakukan serangkaian Program/Kegiatan yang mendukung capaian kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi kinerja pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi.
2. Terselenggaranya Focus Group Discussion lintas K/L kinerja Pemerintah Daerah.
3. Melaksanakan supervisi dan monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Melaksanakan Bimtek penyusunan dan Evaluasi LPPD kepada Pemerintah Daerah.
5. Melaksanakan rapat Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Nilai proyeksi EPPD Tahun 2024 tidak mencapai target disebabkan karena kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota belum mencapai prestasi kinerja Tinggi dengan faktor-faktor penyebab, antara lain:

1. Belum sinkronnya perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam RPJMD dan RKPd dengan indikator kinerja kunci pada LPPD.
2. Target tidak tercapai karena capaian kinerja daerah berada di masing-masing pemerintahan daerah meskipun sudah

dilakukannya pembinaan dan sosialisasi terhadap penyusunan LPPD.

3. Adanya asimetris kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Kebijakan kepala daerah yang belum mendukung penyelenggaraan urusan secara efektif dan efisien yang ditandai dengan terbatasnya alokasi anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tidak maksimal.
5. Perubahan penilaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal dikarenakan pengaruh dari sistem rumusan penilaian pada Perubahan Metodologi yang diakibatkan adanya peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

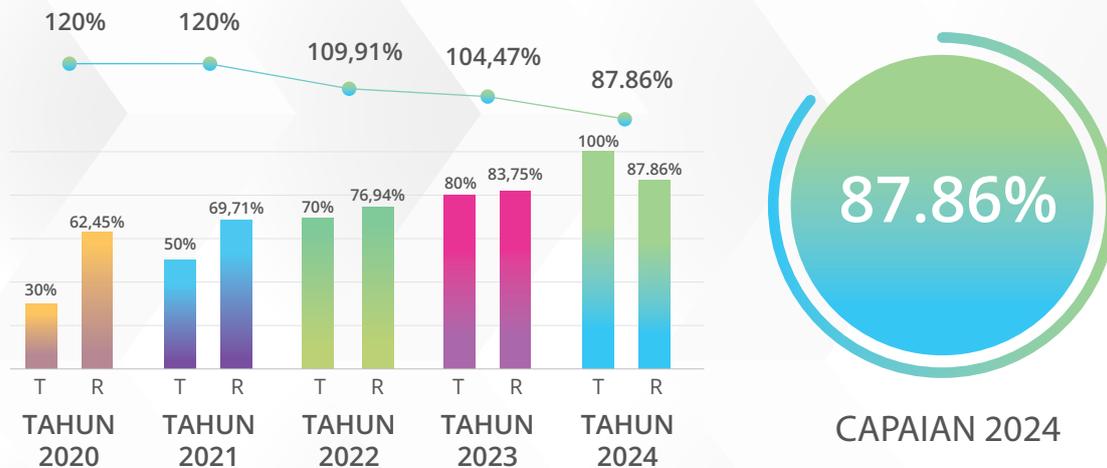
Alternatif solusi untuk mengatasi kendala hasil EPPD Tahun 2024 yang tidak mencapai target kinerja adalah dilakukan pembahasan perubahan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 terkait penyesuaian Indikator Kinerja EPPD sesuai dengan Indikator Kinerja yang digunakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, serta melakukan perubahan terhadap batang tubuh, pembobotan nilai EPPD, metodologi EPPD dan Klasifikasi Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar target kinerja bisa tercapai.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja ini berupa penggunaan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) sehingga Pemerintah Pusat dapat melihat gambaran pelaksanaan urusan konkuren sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya sehingga Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan publik. Penggunaan SILPPD sebagai media penyampaian dan pelaporan secara elektronik memberikan dampak positif berupa perubahan pola kerja menjadi lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu, mereduksi batasan ruang dan waktu dalam tata Kelola analisis data dan informasi pelaporannya.





## Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah



Pencapaian SPM merupakan cerminan dari pemenuhan pelayanan dasar secara minimal yang diberikan kepada warga negara yang berhak dan menjadi prioritas di daerah

“

T = Target R = Realisasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 18 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas); dan sosial. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Melalui penerapan SPM dimaksud, Pemerintah Daerah diminta untuk memastikan adanya peningkatan pemenuhan layanan dasar melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang tertuang dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran dan menjadi acuan dalam implementasi tahapan penerapan SPM khususnya pada tahapan pengumpulan data yang dituangkan pada standar teknis SPM yang bersangkutan.

Pada RPJMN 2020-2024, pelayanan dasar juga telah menjadi salah satu arah kebijakan prioritas, yaitu meningkatkan tata kelola layanan dasar dengan program antara lain percepatan pencapaian SPM di daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan terhadap penerapan SPM memiliki peran dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif" khususnya dalam hal pemenuhan layanan dasar.

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 (dua) aspek yaitu capaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia) dan capaian Penerima Layanan Dasar. Adapun formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

**IP SPM = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)**

Keterangan:

- IP SPM: Indeks pencapaian SPM di masing–masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan.
- BM : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
- BP : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Tabel 3.56 Kategorisasi Nilai Capaian Penerapan SPM

Skor Kinerja	Status Kinerja
100	Tuntas Paripurna
90-99	Tuntas Utama
80-89	Tuntas Madya
70-79	Tuntas Pratama
<b>60-69</b>	<b>Tuntas Muda</b>
<60	Belum



Sampel formulasi perhitungan 2024:

$$IP_{\text{Pendidikan Kota Yogyakarta}} = \frac{\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kota Yogyakarta}}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja/Layanan}}$$

$$\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kota Yogyakarta}} = IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini}} + \dots + IP_{\text{Layanan Pendidikan Kesetaraan}}$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kota Yogyakarta}} = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini } \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini } \times BP)$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kota Yogyakarta}} = \left(\frac{100}{100} \times 20\right) + \left(\frac{100}{100} \times 80\right) = 100$$

$$IP_{\text{Pendidikan Kota Yogyakarta}} = \frac{100 + 100 + 100}{3} = 100$$

$$IP_{\text{Pendidikan Kab Gunung Kidul}} = \frac{\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kab Gunung Kidul}}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja/Layanan}}$$

$$\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kab Gunung Kidul}} = IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini}} + \dots + IP_{\text{Layanan Pendidikan Kesetaraan}}$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kab Gunung Kidul}} = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini } \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini } \times BP)$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kota Gunung Kidul}} = \left(\frac{50,77}{100} \times 20\right) + \left(\frac{89,98}{100} \times 80\right) = 82,14$$

$$IP_{\text{Pendidikan Kab Gunung Kidul}} = \frac{82,14 + 93,17 + 40,17}{3} = 71,83$$

$$IP_{\text{Pendidikan Prov Banten}} = \frac{\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Prov Yogyakarta}}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja/Layanan}}$$

$$\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Prov Yogyakarta}} = IP_{\text{Layanan Pendidikan Menengah}} + IP_{\text{Layanan Pendidikan Khusus}}$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Prov Yogyakarta}} = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Pendidikan Menengah } \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Pendidikan Khusus } \times BP)$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Menengah Prov Yogyakarta}} = \left(\frac{93,35}{100} \times 20\right) + \left(\frac{98,89}{100} \times 80\right) = 98,18$$

$$IP_{\text{Pendidikan Prov Yogyakarta}} = \frac{98,18 + 89,21}{2} = 93,69$$

$$IP_{\text{Pendidikan Seluruh Kabupaten/Kota}} = \frac{\sum IP_{\text{Pendidikan 514 Kabupaten/Kota}}}{514}$$

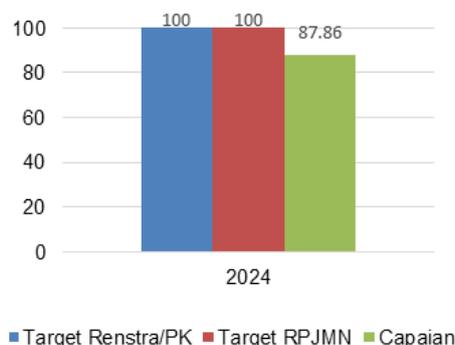
$$IP_{\text{Pendidikan Seluruh Provinsi Nasional}} = \frac{\sum IP_{\text{Pendidikan 38 Provinsi}}}{38}$$

$$IP_{\text{Pendidikan Nasional}} = \frac{IP_{\text{Pendidikan Seluruh Kabupaten/Kota}} + IP_{\text{Pendidikan Seluruh Provinsi}}}{2}$$

$$IP_{\text{SPM Nasional Semua Bidang}} = \frac{\sum SPM_{\text{Bidang Nasional}}}{6}$$

Berdasarkan data pada aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, persentase capaian nasional penerapan SPM Tahun 2024 secara keseluruhan adalah sebesar 87,86%. Capaian ini merupakan data final yang diambil pada tanggal 6 Februari 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPM di daerah mengalami peningkatan sebesar 4,63% dari tahun sebelumnya dari 83,23% menjadi 87,86%. Capaian SPM pada Tahun 2020-2023 sebagaimana yang ditunjukkan pada awal halaman IKU ini merupakan capaian final yang telah dilaporkan kepada Bappenas.

Grifik 3.24 Perbandingan Capaian Nasional Penerapan SPM dengan target RPJMN Tahun 2024



Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan SPM di Daerah terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian penerapan SPM di Daerah salah satunya adalah adanya perubahan Peraturan Menteri teknis terkait yang mengatur penerapan SPM seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang mengakibatkan Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap strategi penerapan SPM. Selain itu, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah sudah melakukan pembinaan kepada seluruh

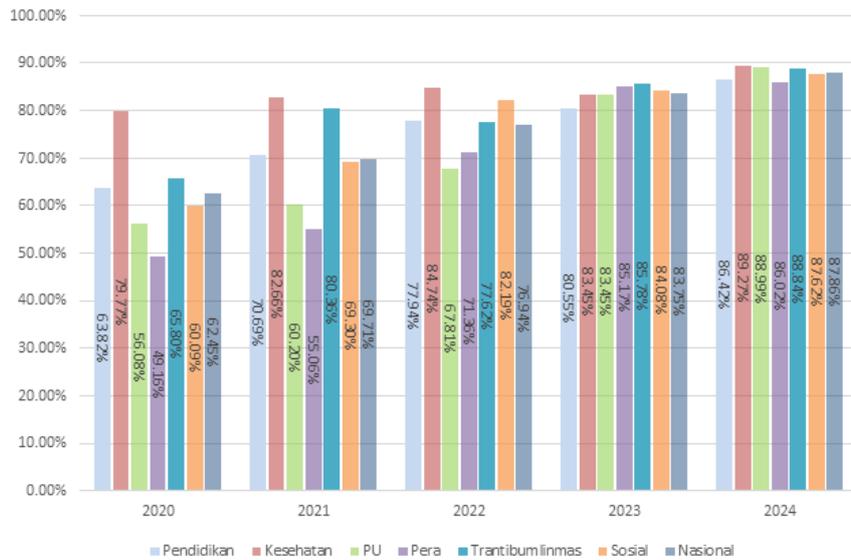
Pemerintah Daerah terhadap penerapan SPM, namun masih ada beberapa Daerah yang belum melaksanakan penerapan SPM dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM dan minimnya ketersediaan anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di Daerah. Adapun capaian nasional penerapan SPM tahun 2024 pada setiap bidang SPM antara lain:

1. Bidang Pendidikan adalah sebesar 86,42%
2. Bidang Kesehatan adalah sebesar 89,27%
3. Bidang Pekerjaan Umum adalah sebesar 88,99%
4. Bidang Perumahan Rakyat adalah sebesar 86,02%
5. Bidang Trantibumlinmas adalah sebesar 88,84%
6. Bidang Sosial adalah sebesar 87,62%

Grifik 3.23 Penerapan SPM Nasional per Bidang Tahun 2024



Grifik 3.24 Perbandingan Penerapan SPM Nasional per Bidang Tahun 2020-2024



Grifik 3.25 Perbandingan Penerapan SPM Provinsi per Bidang Tahun 2020-2024



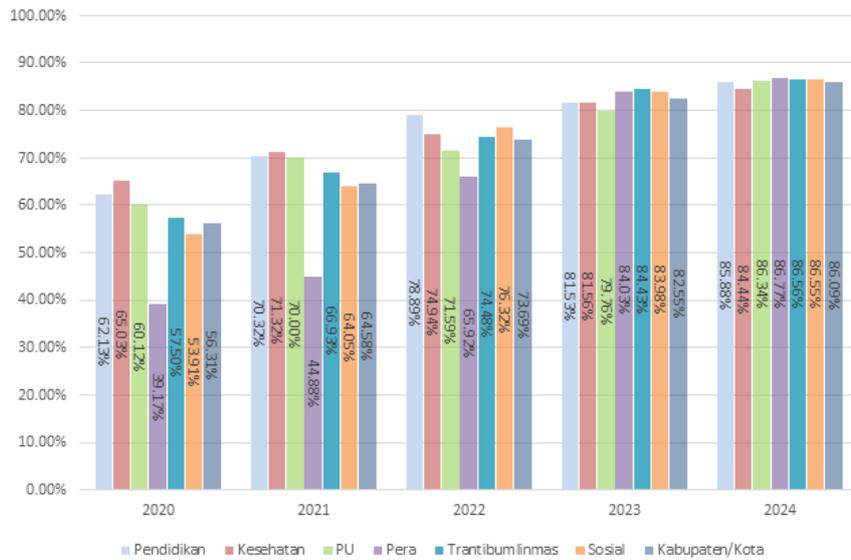
Secara akumulatif rata-rata keseluruhan 6 bidang SPM untuk capaian Provinsi mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,21% setiap tahun sejak tahun 2020 dengan rata-rata capaian sebesar 68,60% sedangkan di tahun 2024 rata-rata capaian sebesar 89,63%. Perbandingan penerapan SPM Provinsi per bidang Tahun 2020 s.d. 2024, antra lain:

- Kesehatan: Capaian penerapan SPM di tingkat provinsi mengalami fluktuasi, dari 94,50% pada 2020, turun menjadi 85,35% pada 2023, lalu naik kembali menjadi 94,09% pada 2024.
- Pekerjaan Umum: Capaian penerapan SPM di tingkat provinsi meningkat dari 52,04% pada

2020 menjadi 91,64% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 7,92% per tahun.

- Perumahan Rakyat: Capaian penerapan SPM di tingkat provinsi meningkat dari 59,15% pada 2020 menjadi 85,27% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 5,22% per tahun.
- Trantibum: Capaian penerapan SPM di tingkat provinsi meningkat dari 74,11% pada 2020 menjadi 91,12% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 3,40% per tahun.
- Sosial: Capaian penerapan SPM di tingkat provinsi meningkat dari 66,28% pada 2020 menjadi 88,69% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 4,48% per tahun.

Grafik 3.26 Perbandingan Penerapan SPM Kabupaten/Kota per Bidang Tahun 2020-2024



Secara akumulatif rata-rata keseluruhan 6 bidang SPM untuk capaian Kabupaten/Kota mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,956% setiap tahun sejak tahun 2020 dengan rata-rata capaian sebesar 56,31% sedangkan di tahun 2024 rata-rata capaian sebesar 86,09%. Perbandingan penerapan SPM Kabupaten/Kota per bidang Tahun 2020 s.d. 2024, antra lain:

- Pendidikan: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 62,13% pada 2020 menjadi 85,88% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 4,75% per tahun.
- Kesehatan: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 65,03% pada 2020 menjadi 84,44% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 3,88% per tahun.
- Pekerjaan Umum: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 60,12% pada 2020 menjadi 86,34% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 5,24% per tahun.
- Perumahan Rakyat: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 39,17% pada 2020 menjadi 86,77% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 9,52% per tahun.

- Trantibumlinmas: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 57,50% pada 2020 menjadi 86,55% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 5,48% per tahun.
- Sosial: Capaian penerapan SPM di tingkat Kabupaten/Kota meningkat dari 53,91% pada 2020 menjadi 86,55% pada 2024, dengan rata-rata kenaikan 6,53% per tahun.

Kinerja IKU persentase capaian penerapan SPM di daerah didukung dalam indikator yang terdapat di dalam RPJMN 2020-2024 serta RO Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024. Dalam pencapaian target indikator tersebut, Kemendagri melalui Ditjen Bina Banda melaksanakan asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi kepada daerah untuk mengintegrasikan dan menerapkan SPM. Dalam RPJMN 2020-2024, indikator persentase capaian penerapan SPM di daerah memiliki target 100% dengan capaian di Tahun 2024 sebesar 87,86%. Sedangkan, dalam RKP 2024, penerapan 6 bidang SPM di daerah ditargetkan diterapkan di 412 daerah. Realisasi penerapan SPM dalam RKP 2024, sebagai berikut

Tabel 3.57 Target dan Realisasi Penerapan SPM dalam RO Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Indikator RO	Target 2024	Realisasi 2024
1	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	412 Daerah	412 Daerah
2	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	412 Daerah	412 Daerah
3	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum dan air limbah	412 Daerah	412 Daerah
4	Jumlah Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan rakyat	412 Daerah	412 Daerah
5	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas	412 Daerah	412 Daerah
6	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	412 Daerah	412 Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rincian Output Prioritas Nasional (ROPN) tahun 2024, bahwa terhadap pencapaian kinerja daerah yang telah mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah sesuai dengan target dalam RPJMN yaitu sebanyak 412 daerah.

Faktor-faktor pendukung dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain:

1. Skema kerja internal Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan melakukan koordinasi internal melibatkan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II – IV selaku pengampu bidang SPM dan Sekretariat Ditjen untuk menjalankan fungsi koordinasi lintas bidang SPM dalam melakukan asistensi dan supervisi serta evaluasi secara berkala kepada seluruh Pemerintah Daerah terkait progres capaian Penerapan SPM.
2. Basis Regulasi, yaitu Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemenuhan pelayanan dasar harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Selanjutnya dalam Pasal 298 menjelaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk penerapan SPM.
3. Adanya regulasi teknis/pembaharuan regulasi yang mengatur terkait dengan jenis dan mutu pelayanan dasar pada masing-masing Bidang SPM sehingga terdapat standar teknis bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM di setiap bidangnya.

Beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tanggal 26 Februari 2024 s.d. 7 Maret 2024 secara offline bertempat di Hotel Vasa Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
2. Terselenggaranya SPM Awards dengan diberikannya penghargaan kepada Daerah yang melaksanakan penerapan SPM terbaik di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja.
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian secara Triwulanan atau oleh Unit Kerja teknis terkait dan pelaksanaan Monev terpadu oleh Sekretariat Bersama Penerapan SPM Tingkat Pusat.
4. Terlaksananya koordinasi dengan Kementerian Teknis dalam rangka asistensi dan supervisi secara berkala kepada seluruh Pemerintah Daerah terkait progres capaian penerapan SPM.
5. Mendorong pembentukan tim penerapan SPM di tingkat Provinsi berdasarkan pada pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 59 tahun 2021, dan untuk tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pada pasal 21 ayat (1) Permendagri Nomor 59 tahun 2021, yang pembinaannya dilakukan oleh Kemendagri sehingga mempermudah koordinasi antara Pusat dan Daerah.
6. Rapat Koordinasi Pusda Evaluasi Pelaksanaan Penerapan SPM setiap Bidang.
7. Fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah dan NGO dalam penerapan SPM di daerah.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Tataran Regulasi
  - a. Adanya perubahan Peraturan Menteri terkait standar teknis SPM.
  - b. Daerah belum sepenuhnya memahami implementasi Peraturan Menteri terkait standar teknis SPM diantaranya teknis pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di daerah.
  - c. Tim Koordinasi Penerapan SPM di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota belum optimal dalam menjalankan peran dan tugas dengan baik.
2. Tataran Implementasi
  - a. Kondisi kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di daerah belum dapat terpenuhi dan atau merata;
  - b. Terjadinya rotasi dan mutasi pegawai di daerah tanpa mempertimbangkan kaderisasi, sehingga perlu adanya pemahaman pegawai baru dalam menjalankan tugas tersebut.
  - c. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas sehingga masih ada daerah yang belum memprioritaskan SPM;
  - d. Akses sumber pendanaan alternatif masih terbatas untuk pelaksanaan penerapan SPM di Daerah;
  - e. Kesulitan/keterbatasan dalam mendapatkan data aktual oleh Perangkat Daerah pemangku SPM;
  - f. Kurangnya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif terhadap pemenuhan pelayanan dasar di daerah.
  - g. Kondisi geografis yang mempengaruhi topografi daerah yang beraneka ragam sehingga menyebabkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sulit dilaksanakan di daerah.
  - h. Tim Koordinasi Penerapan SPM di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota belum memahami peran dan tugas tim dengan baik.

- i. Dokumentasi pelaksanaan 4 tahapan SPM yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam aplikasi e-SPM oleh Daerah.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

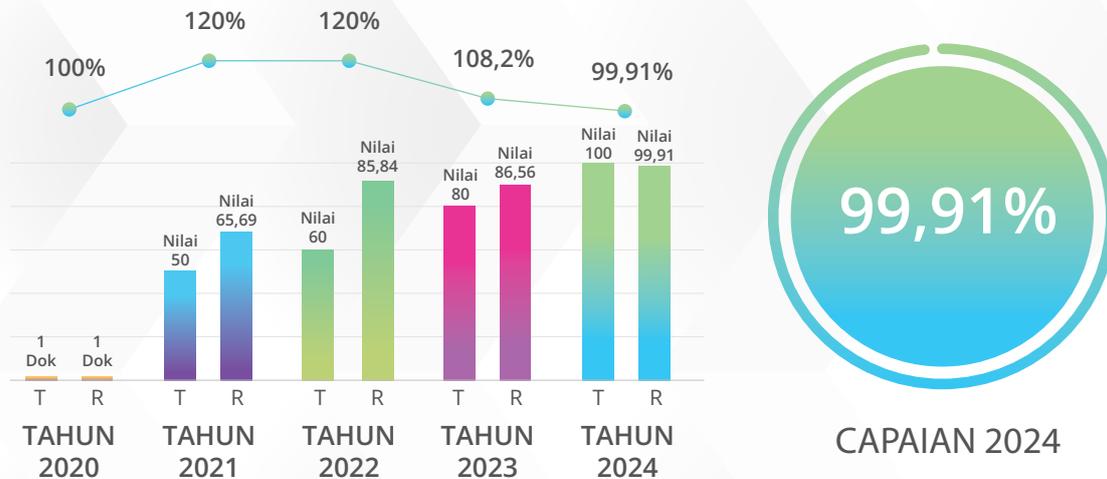
1. Rapat koordinasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penerapan SPM setiap bidang.
2. Rapat koordinasi dalam rangka asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM setiap bidang;.
3. Pelaksanaan Desk, Bimtek atau Workshop oleh Unit Kerja pengampu SPM.
4. Monitoring dan evaluasi terkait SPM setiap Bidang di Daerah secara daring dan luring.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan adalah penerapan e-SPM yang berdampak terhadap terhadap efisiensi kinerja di sektor pelayanan publik dengan mengintegrasikan sistem monitoring dan pelaporan SPM secara elektronik. Melalui aplikasi ini, proses pengumpulan data data berjalan lebih cepat dan real time. Dengan adanya sistem elektronik ini, proses pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah di daerah dapat dilakukakn secara cepat dan real time, tanpa perlu berkunjung ke daerah untuk mengumpulkan data.

Dari aspek anggaran, Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 146.158.716.000 dengan rincian Rp. 65.945.199.000 (45,12%) merupakan dana operasional, Rp. 71.241.440.000 atau (48,74%) untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan serta Rp. 8.972.077.000 (6,14%) untuk kegiatan yang berkaitan dengan SPM yang secara khusus mendukung capaian IKU Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah serta indikator lain yang berkaitan dengan SPM.



## Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah



Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah merupakan parameter dalam mengukur pelaksanaan urusan di daerah selaras dengan Kebijakan Pembangunan Nasional

T = Target R = Realisasi

Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 yaitu urusan pemerintahan absolut (sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat), urusan pemerintahan konkuren (dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah) dan urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan).

Untuk memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah perlu adanya proses sinkronisasi, yang dalam hal ini terfokus kepada sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan yang selaras termasuk dalam proses penyusunan rencana kerja serta evaluasi pelaksanaan program kegiatan di daerah yang berkaitan dengan urusan dimaksud.

Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinilai melalui indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui 3 aspek:

1. Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan) dinilai berdasarkan penerbitan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); Peraturan Kepala Daerah; atau regulasi daerah lainnya terkait 32 urusan konkuren di daerah pada salah satu sub urusan:
  - 1) Urusan Pendidikan (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Manajemen Pendidikan.
  - 2) Urusan Kesehatan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (11 sub urusan penilaian dilakukan

- selain pada sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota.
- 4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Perumahan.
  - 5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Bencana dan sub urusan Trantibum.
  - 6) Urusan Sosial (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Rehabilitasi Sosial.
  - 7) Urusan Tenaga Kerja (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Hubungan Industrial.
  - 8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pemenuhan Hak Anak.
  - 9) Urusan Pangan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
  - 10) Urusan Pertanahan (9 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
  - 11) Urusan Lingkungan Hidup (11 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengelolaan Persampahan dan KLHS.
  - 12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada Sub Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sub urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Penataan Desa.
  - 14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengendalian Penduduk.
  - 15) Urusan Perhubungan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
  - 16) Urusan Komunikasi dan Informatika (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Aplikasi Informatika.
  - 17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (8 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Sub urusan Pelayaran dan Sub urusan Perkeretaapian.
  - 18) Urusan Penanaman Modal (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
  - 19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kepemudaan.
  - 20) Urusan Statistik (2 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Statistik Sektoral.
  - 21) Urusan Persandian (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
  - 22) Urusan Kebudayaan (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kebudayaan dan sub urusan Pengembangan kebudayaan dan Cagar budaya.
  - 23) Urusan Perpustakaan (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pembinaan Perpustakaan.
  - 24) Urusan Kearsipan (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengelolaan Arsip.
  - 25) Urusan Kelautan dan Perikanan (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
  - 26) Urusan Pariwisata (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Destinasi Pariwisata dan Sub Urusan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
  - 27) Urusan Pertanian (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Prasarana Pertanian.
  - 28) Urusan Kehutanan (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan.
  - 29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Energi Baru Terbarukan dan sub urusan dan Ketenagalistrikan.
  - 30) Urusan Perdagangan (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Perlindungan Konsumen.
  - 31) Urusan Perindustrian (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
  - 32) Urusan Transmigrasi (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengembangan Kawasan Transmigrasi .
2. Aspek implementasi kebijakan (program dan kegiatan) dinilai dari ketersediaan program dan anggaran pada dokumen perencanaan

pembangunan daerah, yaitu RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.

3. Aspek Kinerja kebijakan (capaian kinerja dan anggaran) diukur melalui tagging kegiatan dan anggaran dalam SIPD/pelaksanaan kebijakan yang di tuangkan pada program dan kegiatan di daerah/ ketersediaan regulasi/output lainnya/capaian target sesuai indikator.

Penghitungan capaian Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

$$IS = (\text{Kebijakan} \times BK) + (\text{Implementasi Kebijakan} \times BIK) + (\text{Kinerja Kebijakan} \times BKK)$$

Keterangan:

- IS (Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) adalah ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan, capaian implementasi kebijakan dan nilai capaian implementasi kebijakan.
- Nilai capaian kebijakan (Kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui ketersediaan kebijakan di daerah yakni dengan bobot 40.
- Nilai capaian implementasi (Implementasi Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan yakni dengan bobot 30.
- Nilai capaian kinerja kebijakan (Kinerja Kebijakan x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan bobot 30.

Tabel 3.58 Kategorisasi Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Kategori	Skala
Sangat Sinkron	80 – 100
Sinkron	50 – 79
Kurang Sinkron	<50

**Sampel formulasi perhitungan 2024:**

Contoh penilaian urusan Pendidikan sub urusan Manajemen Pendidikan dengan tema Pembentukan TP UKSM Daerah Provinsi,

Kebijakan = dimana terdapat 1 regulasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi terkait Pembentukan TP UKSM, maka target dari penyebut kebijakan adalah 1, sedangkan pembilang diisi atas realisasi turunan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi 1 jika sudah ada regulasi dan 0 jika belum menerbitkan kebijakan

Implementasi Kebijakan = pada aspek implementasi penyebut bernilai 1 diartikan harus

ada program/kegiatan yang tertuang dalam dokrenda tahun 2024 terkait Pembentukan TP UKSM, penyebut diisi dengan ada atau tidaknya program/kegiatan pada dokrenda (bernilai 1 atau 0)

Kinerja Kebijakan = pada aspek implementasi penyebut bernilai 1 diartikan program/kegiatan yang tertuang dalam dokrenda terkait Pembentukan TP UKSM harus direalisasikan baik dari segi anggaran dan kinerja, penyebut diisi dengan telah direalisasikan/tidaknya tidaknya program/kegiatan pada dokrenda (bernilai 1 atau 0) yang juga berkontribusi dalam memenuhi capaian indikator urusan yang telah disepakati pada saat pelaksanaan Rakortekrenbang



$$IS_{Pendidikan\ DKI\ Jakarta} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) = 100$$

$$IS_{Pendidikan\ \dots} = \left(\frac{\dots}{\dots} \times 40\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) = \dots$$

$$IS_{Pendidikan\ Kalimantan\ Utara} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) = 100$$

$$IS_{Pendidikan\ Nasional} = \frac{\sum IS_{Pendidikan\ 34\ Provinsi}}{34}$$

$$IS_{Pendidikan\ Nasional} = \frac{100+100+100+\dots+0}{34} = 100$$

Contoh penilaian urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan

$$IS_{ESDM\ Aceh} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) = 100$$

$$IS_{ESDM\ \dots} = \left(\frac{\dots}{\dots} \times 40\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) = \dots$$

$$IS_{ESDM\ Riau} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) = 100$$

$$IS_{ESDM\ Papua} = \left(\frac{0}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{0}{1} \times 30\right) = 30$$

artinya sampai dengan saat ini Kebijakan/Regulasi terkait Rencana Umum Energi Daerah (RUED) pada Provinsi Papua masih belum disusun/dalam proses penyusunan, namun pada dokumen perencanaan daerah tahun 2024 telah dialokasikan program dan kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan energi di Daerah, namun demikian bila dilihat dari capaian kinerja kebijakan Provinsi Papua belum dapat diukur karena belum menyampaikan laporan kinerja.

$$IS_{ESDM\ Lampung} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{0}{1} \times 30\right) = 70$$

artinya sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun Kebijakan terkait RUED dan telah mengalokasikan program kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah tahun 2024, namun sampai untuk laporan kerjanya belum tersampaikan kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah karena masih proses penyusunan.

$$IS_{ESDM\ Nasional} = \frac{\sum IS_{Pangan\ 34\ Provinsi}}{34}$$

$$IS_{ESDM\ Nasional} = \frac{100+100+\dots+60+100}{34} = 97,06$$

Dengan demikian IS seluruh urusan dinilai dari

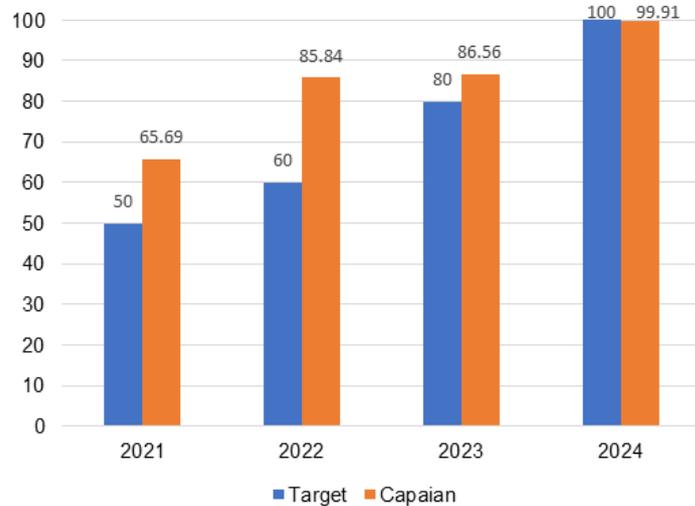
$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{\sum IS_{32\ Urusan\ Nasional}}{32}$$

$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{IS_{Pendidikan\ Nasional} + \dots + IS_{ESDM\ Nasional} + \dots + IS_{Transmigrasi\ Nasional}}{32}$$

$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{100+\dots+97,06+\dots+100}{32} = 99,91$$

Capaian nilai Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024 adalah sebesar 99,91 belum dapat mencapai target pada Renstra yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan nilai 86,56 mengalami peningkatan sebesar 13,35.

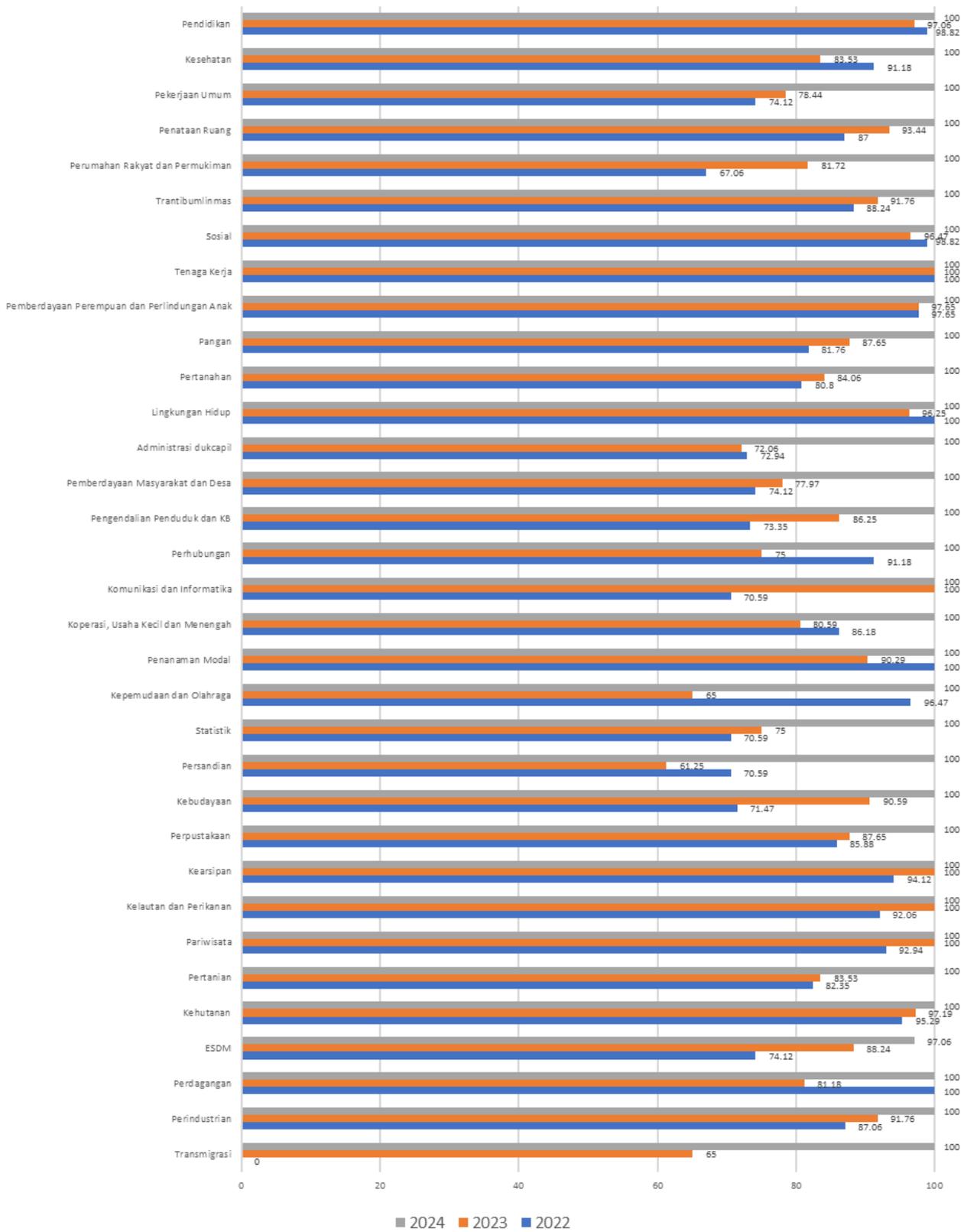
Grafik 3.26 Perbandingan Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2021 s.d.2024



Berdasarkan data yang diolah, indeks sinkronisasi urusan pemerintahan daerah tahun 2024 berada pada nilai 99,91 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu), dengan kondisi yang cukup beragam antar Urusan Pemerintahan, dimana secara umum nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai 100 (seratus) dikarenakan keterbatasan Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti NSPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi tidak menganggarkan terkait sub urusan yang dinilai pada tahun 2024 (tidak ada program dan kegiatan terkait sub urusan yang dinilai) atau tidak terdapat data terkait capaian pelaksanaan sub urusan terkait.



Grafik 3.27 Persandingan Nilai Indeks Bersarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022 s.d. 2024



Pencapaian kinerja Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan adanya RO Prioritas dalam RKP 2024. Sehubungan dengan dilaksanakannya Pilkada serentak Tahun 2024 terdapat ROPN Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada masa transisi Pilkada Serentak Tahun 2024, antara lain:

1. Penyelarasan Kebijakan Penyerantakan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
2. Penyusunan Kebijakan Pedoman RPJMD
3. Asistensi dan Supervisi Penyusunan RPJPD
4. Asistensi dan Supervisi Penyusunan RPJMD
5. Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan RKP

Pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi kunci dalam melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan termasuk didalamnya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan K/L dan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Selain itu, setiap urusan memiliki ROPN masing-masing yang berkaitan dengan Isu Strategis nasional seperti Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Upah Minimum Provinsi, Kota Layak Anak, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan lainnya sesuai dengan prioritas dari masing-masing urusan, namun sejatinya tidak mengabaikan pelaksanaan tematik lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup seluruh sub urusan yang ada.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda telah melakukan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain

1. Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dengan Kementerian/Lembaga teknis masing-masing urusan.
2. Pelaksanaan Rakortekrenbang tanggal 26 Februari 2024 s.d. 7 Maret 2024 secara offline bertempat di Hotel Vasa Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
3. Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah melibatkan seluruh Unit Kerja di Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah serta Unit Kerja lain Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah pada masing-masing urusan.
5. Asistensi dan supervisi daerah dalam pemetaan dukungan Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan.
6. Asistensi dan supervisi tematik urusan prioritas kepada pemerintah daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Keterbatasan Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti NSPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat serta belum memahami bagaimana cara implementasi kebijakan tersebut.
2. Proses birokrasi yang panjang, berjenjang serta kompleks dapat memperlambat proses penyusunan hingga implementasi kebijakan;



3. Tidak adanya pemberian penghargaan atau sanksi terhadap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sinkronisasi Urusan Pemerintahan
4. Belum optimalnya alokasi anggaran penyalarsan NSPK Urusan Pemerintahan di Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah
5. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Kementerian/Lembaga pengampu Urusan Pemerintahan
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di daerah belum memadai.
7. Terjadinya rotasi dan mutasi pegawai di daerah tanpa mempertimbangkan kaderisasi, sehingga perlu adanya pemahaman pegawai baru dalam menjalankan tugas tersebut.
8. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas serta keberagaman dalam menentukan prioritas sehingga daerah tidak menganggarkan kegiatan untuk penyusunan Kebijakan/Regulasi/NSPK dan atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan seluruh sub urusan mengakibatkan tidak tercapainya target pembangunan nasional dan daerah;
9. Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif dalam pelaksanaan Kebijakan Daerah yang telah disusun selaras dengan Kebijakan Pusat.
10. Keterbatasan kewenangan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong penetapan Kebijakan/Regulasi Daerah dalam menindaklanjuti kebijakan /regulasi/NSPK pusat.

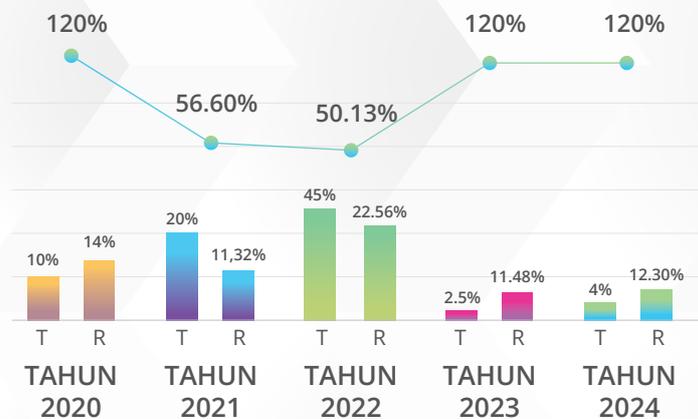
Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun Kebijakan/Regulasi Daerah sesuai amanat Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan 32 Urusan Konkuren.
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah pada masing-masing urusan.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait dalam membahas pelaksanaan urusan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik secara daring maupun luring.
5. Pelaksanaan Bimtek atau Workshop dalam rangka meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
6. Penyusunan regulasi pendukung dalam rangka percepatan implementasi di Daerah.
7. Asistensi dan supervisi pelaksanaan urusan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dari aspek anggaran, yaitu Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 146.158.716.000 dengan rincian Rp. 65.945.199.000 (45,12%) merupakan dana operasional, Rp. 71.241.440.000 atau (48,74%) untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan serta Rp. 8.972.077.000 (6,14%) untuk kegiatan yang berkaitan dengan SPM yang secara khusus mendukung capaian IKU Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah serta indikator lain yang berkaitan dengan SPM.



## Persentase Desa dengan Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"



CAPAIAN 2024

Terdapat 9.251 Desa yang telah meningkatkan profesionalitas, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

T = Target R = Realisasi

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengaturan desa tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa antara lain membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan pengaturan desa tersebut sejalan dengan Lampiran IV RPJMN Tahun 2020-2024, percepatan pembangunan desa secara terpadu dilakukan untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan:

1. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa,

pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif.

2. Penetapan batas desa.
3. Peningkatan pelayanan dasar desa.
4. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa.
5. Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, maka jumlah Desa di Indonesia saat ini sebanyak 75.265 desa di 37 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Peta sebaran desa di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini:



8. Kinerja Pemerintahan desa/kelurahan meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan anggaran kelurahan, pertanggungjawaban kepala desa/lurah, prasarana dan administrasi pemerintahan desa/kelurahan, serta prasarana dan sarana dusun / lingkungan.
9. Pembinaan dan Pengawasan meliputi jenis pembinaan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dan kelurahan, pembinaan pemerintah provinsi kepada pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa dan kelurahan, serta pembinaan dan pengawasan camat kepada desa/kelurahan.

Kategorisasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang sesuai Lampiran II Permendagri Nomor 12 Tahun 2007, yaitu swasembada, swakarya dan swadaya dengan klasifikasi status kemajuan desa dan kelurahan dalam kategori mula, madya dan lanjut, dengan rincian klasifikasi antara lain:

1. Klasifikasi desa swasembada dengan nilai total skor  $\geq 80\%$  dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun, dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 90% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
  - b. Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Madya, jika perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran

serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.

- c. Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Lanjut, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.
2. Klasifikasi desa swakarya nilai total skor 60% - 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun, dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a. Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
    - b. Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori madya, apabila perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
    - c. Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori lanjut, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.



3. Klasifikasi Desa Swadaya dengan nilai total skor  $\leq 60\%$  dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun, dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi status kemajuan Swadaya Kategori Mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 50% dari skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
  - b. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Swadaya Kategori Madya, jika perolehan skor total keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 50% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
  - c. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Swadaya Kategori Lanjut, apabila perolehan skor total variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 50% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah desa swakarya lanjut sebanyak 4.004 Desa dan desa swasembada sebanyak 5.247 Desa sehingga capaian indeks penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kategori nilai "baik" diperoleh melalui perhitungan formulasi berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Total Desa Swakarya Lanjut} + \text{Desa Swasembada}}{\text{Total Jumlah Desa di Indonesia}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{4.004 \text{ Desa} + 5.247 \text{ Desa}}{75.265 \text{ Desa}} \times 100\% = 12,30\%$$

Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dengan Kategori Nilai "Baik" pada tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 100% atau sebanyak 9.251 Desa dari target 4% yang menunjukkan peningkatan kinerja profesionalitas, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik.

Tabel 3.59 Perbandingan Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	10%	20%	45%	2,5%	4%
Realisasi	14%	11,32%	22,56%	11,48%	12,30%
Capaian	120%	56,60%	50,13%	120%	120%

Berdasarkan grafik diatas yang menyajikan data terkait Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" dari tahun 2020-2024, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan capaian dari 14% menjadi 22,56%. Kemudian, pada Tahun 2023 hingga Tahun 2024 terdapat kenaikan yang semula 2,5% menjadi 4%. Terdapat penyesuaian target pada Tahun 2022 ke 2023 karena revisi terhadap IKU sebagai upaya perbaikan terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang semula berorientasi proses, menjadi berorientasi pada outcome kegiatan. Pada tahun 2023, Kemendagri mengajukan Usulan Revisi Renstra Kemendagri 2020-2024 kepada Kementerian PPN/Bappenas dan disetujui usulan tersebut oleh Bappenas melalui surat Bappenas tanggal 29 Desember 2023 nomor 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023 hal Persetujuan

atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, maka target Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" pada tahun 2023 menjadi 2,5% dan pada tahun 2024 menjadi 4% dengan kenaikan jumlah target sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian Persentase Desa dengan Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" pada Tahun 2024 salah satunya disebabkan oleh peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui penggunaan Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) sehingga profil desa dapat terpublikasi secara online. Pada Tahun 2024, 64.008 Desa telah terpublikasi secara online profil desanya dari 75.265 Desa. Berikut jumlah data profil desa dari tahun ke tahun:

Tabel 3.60 Jumlah Data Profil Desa yang terpublikasi secara online tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Data Profil Desa yang terpublikasi secara online
2020	14.388 desa
2021	19.765 desa
2022	25.386 desa
2023	54.085 desa
2024	64.008 desa

Keberhasilan pencapaian IKU ini pada Tahun 2024 juga didukung dengan pembinaan aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa sebanyak 133.082 orang. Selain itu, Kemendagri melalui Ditjen Bina pemdes juga melakukan penataan kelembagaan desa sebanyak 7.160 Lembaga. Kemendagri juga melakukan penataan layanan administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan sebanyak 12.775 Desa.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes telah melakukan serangkaian Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mendorong Pemerintah Desa untuk menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) melalui Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa

dengan jumlah pengguna sebanyak 53.315 Desa menerapkan secara online dan 15.127 Desa menerapkan secara offline.

2. Membentuk Desa Model Perencanaan Pembangunan Partisipatis sebanyak 70 Desa sebagai desa percontohan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengendalian desa.
3. Melakukan penataan sebanyak 4.500 lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan 2.500 lembaga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dan, memberi dukungan penguatan pelaksanaan fungsi bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga dalam 10 program PKK.
4. Mendorong Pemerintahan Desa dalam memperbaharui data profil desa dalam Prodeskel dan terpublikasi secara online dengan capaian penambahan Tahun 2024 sebanyak 10.000 Desa.

Gambar 3.15 Jumlah Desa yang Memperbaharui Data Prodeskel dan Terpublikasi Secara Online Tahun 2024



- Melaksanakan evaluasi perkembangan desa dengan hasil sebanyak 2000 Desa berkategori “Berkembang” dan “Cepat Berkembang”

Gambar 3.16 Sebaran Jumlah Desa dengan Kategori Cepat Berkembang & Berkembang Tahun 2024



- Melaksanakan pelatihan aparatur dan pengurus kelembagaan desa sebanyak 930 orang dalam 32 angkatan dengan materi pelatihan berupa Tata Kelola Pemerintahan Desa, Penyusunan Peraturan Desa, Pembangunan Desa, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- Melaksanakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa dengan capaian 123.444 Orang.
- Melaksanakan Peringatan Hari Desa Nasional pada 15 Januari 2025 dengan tema “Desa Mandiri, Indonesia Maju” berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa.

**Kendala yang dihadapi** yang dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

- Penetapan dan penegasan batas desa belum menjadi prioritas utama dalam rencana penyusunan APBD dan APBDes.
- Adanya ketidaksesuaian tipologi pada laporan penegasan batas desa dan belum ada peraturan terkait penegasan batas kelurahan sehingga desa-desa yang berbatasan dengan segmen kelurahan masih banyak yang belum dilakukan penegasan
- Ketidaklengkapan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Ditjen Bina Pemdes sehingga tidak dapat ditindaklanjuti pelaporannya kepada Sekretariat Tim Percepatan KSP
- Belum adanya pedoman verifikasi teknis dan yuridis dokumen penegasan batas desa
- Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki regulasi terkait kebijakan Pemilihan Kepala Desa.
- Masih terdapat kabupaten/kota yang belum melaksanakan laporan konsolidasi laporan keuangan desa sehingga tidak tersedia basis

data yang lengkap atau menyeluruh terkait keuangan desa dan masih terdapat Kabupaten/ Kota yang pasif dalam pelaporan konsolidasi, akibat kesulitan dalam memvalidasi akibat adanya data sampah/bug, anomali data.

- Belum adanya internalisasi 6 SPM Posyandu ke dalam kebijakan Posyandu pada dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran daerah.
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas baik dari segi isian data maupun interoperabilitas (berbagi pakai data) Prodeskel,
- Belum adanya internalisasi program Prodeskel dalam kebijakan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran daerah.
- Belum optimalnya komitmen, konsistensi dan ketertiban pemerintah desa pada waktu pengisian data evaluasi diri desa dari segi kualitas maupun kuantitas.

Alternatif solusi dalam mengatasi kendala di atas, antara lain :

- Percepatan fasilitasi penetapan batas desa sebagai bagian dari capaian prioritas melalui kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial dan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota terkait penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa.
- Mendorong pemerintah daerah untuk segera memfasilitasi perubahan keputusan Bupati/ Walikota tentang penambahan masa jabatan Kepala Desa dan BPD.
- Sosialisasi, asistensi dan supervisi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terutama pasca pemilihan kepala desa serentak.
- Mendorong implementasi transaksi non tunai di desa dengan melibatkan fungsi koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi yang menangani pengawasan keuangan desa.
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi yang sinergi antar pemangku

kepentingan dan instansi terkait melalui sistem informasi dan data yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program PKK dan Posyandu.

6. Peningkatan kinerja kader melalui peningkatan motivasi dan semangat kader PKK dan Posyandu dengan memberikan penghargaan dan insentif bagi kader PKK dan Posyandu yang berprestasi.
7. Memperbaharui dan peningkatan kapasitas server ataupun metode lainnya yang dapat memfasilitasi Sistem Informasi Prodeskel sebagai Gudang Data (Data Warehouse) Desa/ Kelurahan.
8. Integrasi Prodeskel dengan SIPD akan menjadi langkah awal untuk menyelaraskan program kegiatan dari desa hingga provinsi dalam penyusunan dokumen RKPD dan RPJMD.
9. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan mendorong keterisian aplikasi Eprodeskel.
10. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih maupun aparatur desa dengan mengoptimalkan Learning Management System (LMS) agar dapat memberikan dampak yang lebih efektif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

11. Percepatan pembentukan Permendagri tentang pedoman pengembangan kapasitas aparatur desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa serta pihak ketiga.

12. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan isu-isu strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Efisiensi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerja ini berupa optimalisasi penggunaan aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) yang telah memungkinkan 64.008 Desa telah terpublikasi secara online profil desanya dari 75.265 Desa. Digitalisasi ini mengurangi beban administrasi manual, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan akurasi dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yang telah digunakan oleh 53.315 Desa menerapkan secara online dan 15.127 Desa menerapkan secara offline. Sistem tersebut turut meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan aset desa, meminimalkan penyimpangan, serta memastikan penggunaan dana desa lebih tepat sasaran.

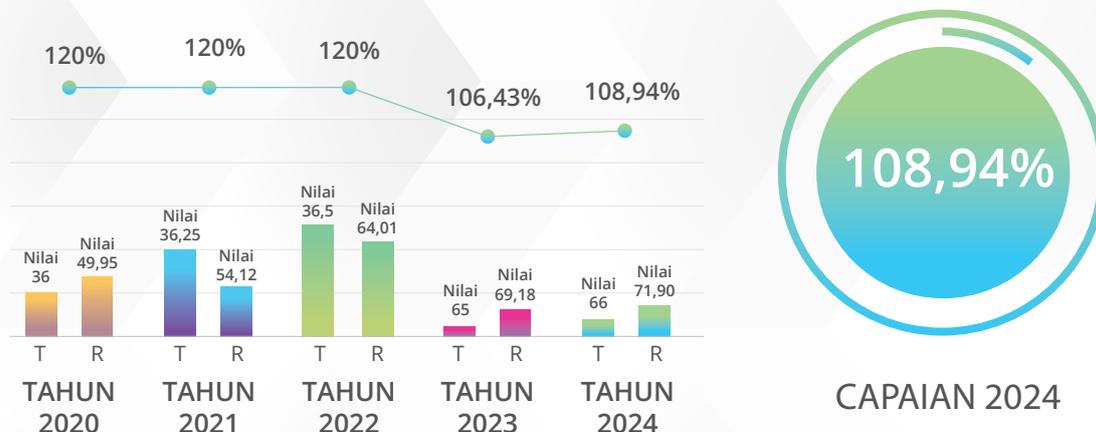
# RAPAT KOORDINASI NASIONAL IMPLEMENTASI PROGRAM Penguatan Pemerintahan DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) TAHUN 2024

GRAND MERCURE JAKARTA KEMAYORAN  
08 - 09 AGUSTUS 2024





## Rata-Rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah



Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi tolok ukur pengelolaan keuangan daerah, sebagai dasar pembinaan dan pengawasan, dapat memacu dan memotivasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah

T = Target R = Realisasi

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diamanatkan untuk melakukan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya, sejak tahun 2020 diukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) digunakan sebagai ukuran atas kinerja pengelolaan daerah pada masing-masing daerah dan juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah, yang diukur melalui 6 dimensi meliputi:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15 yang

mencakup kesesuaian nomenklatur program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), kesesuaian nomenklatur program RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, serta kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot 20, yang mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer, dan penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot 15, yang mencakup ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan, serta keteraksesan dokumen (mudah diakses dan diunduh melalui SIPD).

4. Penyerapan anggaran APBD (Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer) dengan bobot 20.
5. Kondisi keuangan daerah yang meliputi antara lain kemandirian keuangan daerah dengan bobot 15.
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit selama 3 tahun terakhir berturut-turut dengan bobot 15.

Dari pembobotan di atas dikelompokkan menjadi:

1. Peringkat baik dengan nilai A, yaitu Nilai IPKD lebih besar dari nilai  $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$ .
2. Peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, yaitu Nilai IPKD berada diantara nilai  $MEAN - (1 \times \text{standar deviasi})$  dan  $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$ .
3. Peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C, yaitu Nilai IPKD kurang dari  $MEAN - (1 \times \text{standar deviasi})$ .

Hasil pengukuran pada Tahun n didapatkan nilai untuk masing-masing daerah. kemudian nilai-nilai tersebut dirata-ratakan untuk mendapatkan ukuran indikator "Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah".

$$\text{Rata - rata IPKD} = \frac{\sum (\text{IPKD Provinsi} + \text{IPKD Kabupaten} + \text{IPKD Kota})}{\sum (\text{Provinsi} + \text{Kabupaten} + \text{Kota})}$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) melakukan pengukuran IPKD tingkat provinsi, sedangkan pengukuran IPKD tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pengukuran IPKD menggunakan Aplikasi Sistem Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sumber data pengukuran IPKD diperoleh dari:

1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RPJMD dan RKPd.
2. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD.

3. Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan LKPD.
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Tim Evaluasi pengawasan Realisasi Anggaran terkait dengan dokumen dan Informasi penyerapan anggaran.
6. Badan Pemeriksa Keuangan terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD.

Hasil perhitungan IPKD Tahun 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023. Hasil tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.61 Rekapitulasi Jumlah Daerah Kategori IPKD Tahun 2024

Daerah	Kategori				
	Baik	Perlu Perbaikan	Sangat Perlu Perbaikan	Tidak Ada Predikat	Tidak Menginput
Provinsi	2	27	5	-	4
Kabupaten	40	294	50	9	22
Kota	11	66	13	1	2
Nasional	53	387	68	10	28

Tabel 3.62 Rekapitulasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024

No.	Daerah	Jumlah Daerah (yang menginput)	Rata-rata	Total Nilai
1.	Provinsi	34	74,66	2.538,44
2.	Kabupaten	384	71,85	27.589,42
3.	Kota	90	71,11	6.399,72
4.	Nasional	508	71,90	36.527,59

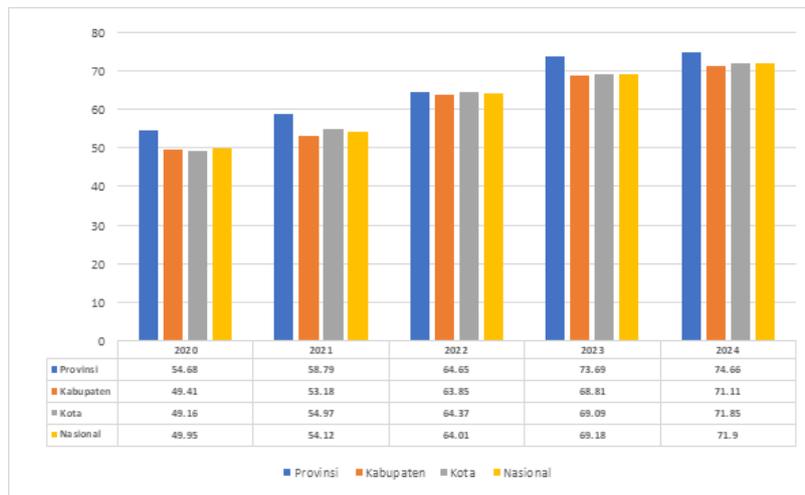
$$\text{Rata - rata IPKD} = \frac{(2.538,44 + 27.589,42 + 6.399,72)}{\sum (34 + 384 + 90)}$$

$$\text{Rata - rata IPKD} = \frac{36.527,59}{508}$$

$$\text{Rata - rata IPKD} = \mathbf{71,90}$$

Perkembangan IPKD tahun 2020 hingga 2024 ditunjukkan dengan tabel dan grafik yang ada di bawah menunjukkan, bahwa dari tahun ketahun IPKD mengalami peningkatan yang sangat baik secara Nasional maupun tingkatan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), hal ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap tata kelola keuangan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah berhasil.

Grafik 3.28 Persandingan IPKD Tahun 2020 s.d 2024



Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri,

Tabel 3.63 Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD Tahun 2020 s.d 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi	28	28	31	32	34
Kabupaten	176	184	274	366	384
Kota	49	49	72	87	90
Nasional	253	261	377	485	508

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri.

Grafik dan tabel di atas menunjukkan peningkatan capaian IPKD di setiap tahunnya, baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Nasional, meskipun pada pengukuran IPKD Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah daerah yang menginput data pada Aplikasi IPKD. Hal ini menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Capaian ini juga menunjukkan keberhasilan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah. Nilai IPKD dengan 6 dimensi pengukurannya pada tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dirincikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.64 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurannya tiap Provinsi dengan nilai minimum 66

No.	Provinsi	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
1	DKI JAKARTA	13,08	20,00	15,00	15,00	9,83	15,00	87,91
2	DI YOGYAKARTA	13,11	20,00	15,00	15,00	8,65	15,00	86,76
3	KALIMANTAN BARAT	13,32	19,64	15,00	15,00	5,88	15,00	83,84
4	KALIMANTAN TIMUR	10,47	20,00	15,00	15,00	7,98	15,00	83,45
5	SULAWESI TENGGARA	14,10	19,64	14,74	15,00	4,51	15,00	82,99
6	RIAU	11,41	20,00	15,00	15,00	6,52	15,00	82,92
7	JAWA TIMUR	10,63	20,00	14,74	15,00	6,84	15,00	82,21
8	KALIMANTAN SELATAN	9,11	20,00	14,48	15,00	8,05	15,00	81,64
9	SUMATERA SELATAN	11,46	18,57	14,74	15,00	5,91	15,00	80,68
10	JAWA BARAT	9,56	19,64	15,00	15,00	5,96	15,00	80,16
11	JAWA TENGAH	10,49	20,00	9,05	15,00	9,76	15,00	79,29
12	BANTEN	10,00	20,00	13,71	15,00	4,23	15,00	77,94
13	SUMATERA BARAT	9,49	20,00	15,00	15,00	3,20	15,00	77,70
14	SULAWESI TENGAH	8,93	19,64	14,74	15,00	4,28	15,00	77,59
15	BALI	12,90	20,00	15,00	10,00	4,05	15,00	76,95
16	KALIMANTAN TENGAH	9,99	20,00	10,35	15,00	6,10	15,00	76,43
17	JAMBI	8,69	20,00	14,74	15,00	3,00	15,00	76,43
18	ACEH	9,40	19,29	11,38	15,00	5,35	15,00	75,41
19	SULAWESI SELATAN	11,54	15,00	15,00	15,00	3,77	15,00	75,31
20	KALIMANTAN UTARA	9,53	19,64	12,16	15,00	3,67	15,00	75,00
21	SULAWESI BARAT	9,28	20,00	13,97	15,00	1,45	15,00	74,69
22	KEPULAUAN RIAU	6,02	19,29	14,74	15,00	4,41	15,00	74,46
23	BENGKULU	9,50	15,00	15,00	15,00	3,42	15,00	72,92
24	LAMPUNG	12,08	15,00	14,74	10,00	5,02	15,00	71,84
25	NUSA TENGGARA BARAT	10,35	13,93	13,19	15,00	4,30	15,00	71,77
26	SULAWESI UTARA	9,13	14,64	14,74	15,00	2,83	15,00	71,34
27	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9,20	14,64	13,97	15,00	3,04	15,00	70,85
28	SUMATERA UTARA	8,02	19,64	15,00	10,00	2,93	15,00	70,59
29	MALUKU	8,46	14,64	14,22	15,00	1,56	15,00	68,88
30	GORONTALO	11,06	15,00	7,50	15,00	2,50	15,00	66,06
31	PAPUA BARAT	2,98	18,57	7,76	15,00	6,72	15,00	66,03

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri.

Tabel 3.65 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurannya tiap Kabupaten dengan nilai minimum 66

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
1	GROBOGAN	12,28	19,83	14,48	20,00	5,44	15,00	87,03
2	BINTAN	13,37	20,00	15,00	15,00	7,90	15,00	86,27
3	DHARMASRAYA	11,36	20,00	14,74	20,00	4,75	15,00	85,85
4	ACEH JAYA	9,54	19,14	15,00	20,00	7,10	15,00	85,77
5	LAMPUNG TENGAH	13,76	20,00	14,74	20,00	2,20	15,00	85,71
6	ACEH UTARA	14,92	20,00	15,00	15,00	5,72	15,00	85,64
7	KUDUS	13,97	20,00	15,00	15,00	6,55	15,00	85,53
8	BANGKA	14,98	20,00	14,48	20,00	0,83	15,00	85,29
9	MAROS	13,87	20,00	15,00	15,00	5,73	15,00	84,60
10	PESAWARAN	13,36	18,45	14,22	20,00	3,09	15,00	84,13
11	MUNA BARAT	13,27	18,45	14,48	20,00	2,90	15,00	84,10
12	TASIKMALAYA	12,82	19,83	12,41	20,00	3,94	15,00	84,01
13	PURWOREJO	14,27	20,00	14,48	15,00	5,09	15,00	83,84
14	BANJAR	13,70	20,00	15,00	15,00	5,09	15,00	83,79
15	SEMARANG	8,89	20,00	13,97	20,00	5,90	15,00	83,76
16	PANGKAJENE KEPULAUAN	10,94	20,00	14,22	20,00	3,46	15,00	83,63
17	BELITUNG TIMUR	13,54	19,66	14,74	15,00	5,51	15,00	83,45
18	ACEH BARAT	12,16	19,31	15,00	15,00	6,83	15,00	83,30
19	JAYAPURA	11,82	19,83	15,00	20,00	1,65	15,00	83,29
20	BLORA	13,07	20,00	15,00	15,00	5,05	15,00	83,12
21	KOTAWARINGIN BARAT	13,13	19,83	15,00	15,00	5,07	15,00	83,03
22	KARAWANG	10,13	20,00	14,74	15,00	8,13	15,00	83,00
23	WAJO	14,13	20,00	13,97	15,00	4,87	15,00	82,96
24	DOMPU	14,96	20,00	15,00	15,00	2,76	15,00	82,72
25	BIREUEN	13,66	19,66	15,00	15,00	4,41	15,00	82,72
26	SUMBA TIMUR	11,74	19,48	15,00	15,00	6,48	15,00	82,70
27	TULUNGAGUNG	12,23	19,83	15,00	15,00	5,60	15,00	82,65
28	DEMAK	12,64	20,00	13,97	15,00	5,92	15,00	82,53
29	TEGAL	12,69	20,00	14,48	15,00	4,91	15,00	82,09
30	LOMBOK UTARA	11,62	20,00	15,00	15,00	5,31	15,00	81,92
31	PAPUA BARAT	2,98	18,57	7,76	15,00	6,72	15,00	66,03
31	BANGKA TENGAH	12,98	20,00	15,00	15,00	3,72	15,00	81,69
32	MUARA ENIM	11,39	20,00	13,97	15,00	6,20	15,00	81,56
33	PIDIE	11,67	19,48	15,00	15,00	5,40	15,00	81,56
34	MINAHASA UTARA	10,34	20,00	12,67	20,00	3,34	15,00	81,35
35	TAPANULI UTARA	9,02	20,00	15,00	20,00	2,22	15,00	81,25
36	ROKAN HULU	10,96	15,00	14,48	20,00	5,71	15,00	81,15

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
37	WONOSOBO	12,40	14,66	14,48	20,00	4,53	15,00	81,06
38	MOROWALI	9,05	19,48	14,22	20,00	3,30	15,00	81,06
39	LAMANDAU	14,60	20,00	15,00	15,00	1,45	15,00	81,05
40	ASAHAN	11,35	19,83	14,48	15,00	5,35	15,00	81,00
41	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	10,99	20,00	15,00	15,00	4,81	15,00	80,79
42	BALANGAN	12,97	20,00	15,00	15,00	2,72	15,00	80,69
43	TUBAN	13,34	19,66	10,09	15,00	7,59	15,00	80,67
44	MAGELANG	10,89	20,00	15,00	15,00	4,74	15,00	80,63
45	LANDAK	8,54	19,48	14,74	20,00	2,81	15,00	80,58
46	TANJUNG JABUNG BARAT	8,78	19,66	15,00	15,00	7,15	15,00	80,58
47	TANJUNG JABUNG TIMUR	12,67	18,97	15,00	15,00	3,87	15,00	80,51
48	KETAPANG	10,44	19,66	13,45	15,00	6,94	15,00	80,48
49	LAMPUNG BARAT	8,99	19,14	14,48	20,00	2,87	15,00	80,48
50	LUMAJANG	14,06	14,83	15,00	20,00	1,53	15,00	80,42
51	LUWU TIMUR	13,47	20,00	15,00	15,00	1,94	15,00	80,41
52	KONAWA	13,56	19,48	13,97	15,00	3,40	15,00	80,41
53	BARITO SELATAN	9,25	20,00	15,00	15,00	6,11	15,00	80,36
54	GIANYAR	13,20	20,00	14,48	15,00	2,67	15,00	80,35
55	BOYOLALI	9,37	20,00	10,09	20,00	5,81	15,00	80,27
56	LABUHANBATU UTARA	10,06	19,14	12,41	20,00	3,62	15,00	80,23
57	MINAHASA SELATAN	12,16	19,83	15,00	15,00	3,23	15,00	80,22
58	HULU SUNGAI UTARA	13,74	20,00	14,74	15,00	1,70	15,00	80,18
59	BATANG	10,85	20,00	14,74	15,00	4,53	15,00	80,11
60	BUTON	11,71	20,00	14,74	15,00	3,55	15,00	80,00
61	JEMBRANA	12,14	19,48	13,97	15,00	4,39	15,00	79,98
62	PURWAKARTA	11,49	19,83	15,00	15,00	3,65	15,00	79,96
63	SINTANG	9,56	14,66	13,97	20,00	6,75	15,00	79,93
64	LUWU	8,99	18,79	12,67	20,00	4,47	15,00	79,92
65	TOLI TOLI	10,48	19,66	14,74	15,00	5,03	15,00	79,90
66	GAYO LUES	10,05	19,66	10,60	20,00	4,52	15,00	79,83
67	MADIUN	11,60	19,83	13,45	15,00	4,84	15,00	79,72
68	TAKALAR	11,98	20,00	15,00	15,00	2,71	15,00	79,68
69	KAMPAR	9,18	19,48	14,74	15,00	6,25	15,00	79,65
70	TANAH LAUT	13,34	19,83	15,00	15,00	1,48	15,00	79,65
71	TABANAN	11,57	19,66	13,71	15,00	4,71	15,00	79,64
72	SOPPING	11,68	20,00	15,00	15,00	2,95	15,00	79,62

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
73	GOWA	13,12	18,62	14,74	15,00	3,07	15,00	79,55
74	BANGKA SELATAN	14,74	19,31	14,48	15,00	0,94	15,00	79,47
75	KUTAI KARTANEGARA	12,00	20,00	13,19	15,00	4,27	15,00	79,46
76	BOALEMO	11,46	19,83	14,48	15,00	3,66	15,00	79,42
77	BULUKUMBA	11,43	20,00	14,74	15,00	3,25	15,00	79,42
78	SUMBA TENGAH	11,00	20,00	14,74	15,00	3,67	15,00	79,41
79	TABALONG	12,25	20,00	15,00	15,00	2,07	15,00	79,32
80	MOJOKERTO	10,10	19,66	14,22	15,00	5,33	15,00	79,31
81	MAGETAN	13,35	20,00	7,50	20,00	3,40	15,00	79,25
82	TAPANULI TENGAH	11,22	19,66	15,00	20,00	3,18	10,01	79,06
83	CIANJUR	12,02	19,66	14,48	15,00	2,84	15,00	78,99
84	KLATEN	9,61	20,00	14,74	15,00	4,64	15,00	78,99
85	PINRANG	10,75	19,66	14,22	15,00	4,24	15,00	78,86
86	MELAWI	14,79	20,00	13,45	10,00	5,61	15,00	78,85
87	KUBU RAYA	6,70	19,83	15,00	20,00	2,29	15,00	78,82
88	SUKOHARJO	13,33	15,00	14,74	15,00	5,71	15,00	78,78
89	SUMEDANG	13,91	15,00	15,00	15,00	4,75	15,00	78,65
90	PASAMAN BARAT	10,43	20,00	15,00	15,00	3,21	15,00	78,64
91	JOMBANG	14,53	19,66	14,48	10,00	4,96	15,00	78,62
92	SIDENRENG RAPPANG	10,85	19,66	14,74	15,00	3,36	15,00	78,60
93	SIGI	12,84	19,66	7,24	20,00	3,85	15,00	78,59
94	PASER	10,57	20,00	15,00	15,00	2,99	15,00	78,56
95	BARITO TIMUR	9,44	20,00	15,00	15,00	4,06	15,00	78,50
96	KARANGANYAR	5,43	19,83	11,64	20,00	6,57	15,00	78,46
97	KAYONG UTARA	9,75	19,83	10,86	20,00	3,02	15,00	78,46
98	BENGKULU UTARA	9,34	20,00	14,48	15,00	4,38	15,00	78,20
99	MALINAU	10,26	18,79	15,00	15,00	4,12	15,00	78,17
100	SOLOK	11,57	20,00	13,71	15,00	2,85	15,00	78,12
101	NAGEKEO	12,82	20,00	6,21	20,00	4,09	15,00	78,11
102	TEBO	11,40	19,14	15,00	15,00	2,57	15,00	78,10
103	BONE	11,92	20,00	14,22	15,00	1,91	15,00	78,05
104	SIKKA	11,99	19,66	14,22	15,00	2,15	15,00	78,02
105	KULON PROGO	13,14	15,00	15,00	15,00	4,75	15,00	77,88
106	SLEMAN	10,91	20,00	14,48	15,00	2,43	15,00	77,83
107	CIREBON	13,00	15,00	14,74	15,00	5,07	15,00	77,81
108	POLEWALI MANDAR	10,31	19,83	13,97	20,00	3,69	10,01	77,80

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
109	CIAMIS	8,81	19,83	15,00	15,00	3,99	15,00	77,63
110	NATUNA	10,31	20,00	15,00	15,00	2,29	15,00	77,61
111	TOJO UNA UNA	9,12	20,00	13,71	15,00	4,76	15,00	77,59
112	NIAS BARAT	12,29	19,83	13,71	15,00	1,53	15,00	77,36
113	BADUNG	12,21	20,00	14,48	10,00	5,66	15,00	77,36
114	TOBA SAMOSIR	9,59	19,83	13,19	15,00	4,69	15,00	77,30
115	HULU SUNGAI SELATAN	10,31	20,00	15,00	15,00	1,83	15,00	77,14
116	MALANG	10,35	20,00	15,00	15,00	1,79	15,00	77,14
117	ACEH SELATAN	9,85	14,83	14,22	20,00	3,13	15,00	77,03
118	DAIRI	8,35	15,00	15,00	20,00	3,54	15,00	76,89
119	SIAK	11,31	19,66	9,05	15,00	6,78	15,00	76,80
120	INDRAMAYU	10,96	15,00	15,00	15,00	5,79	15,00	76,75
121	WONOGIRI	12,52	15,00	15,00	15,00	4,12	15,00	76,64
122	GUNUNG MAS	8,39	19,83	14,22	15,00	4,15	15,00	76,59
123	BIMA	8,76	19,83	14,22	15,00	3,77	15,00	76,58
124	JEMBER	14,94	20,00	15,00	15,00	1,63	10,01	76,58
125	LEBAK	6,98	15,00	14,74	20,00	4,82	15,00	76,54
126	GORONTALO	10,74	14,14	15,00	20,00	1,62	15,00	76,50
127	BERAU	8,88	19,66	12,93	15,00	5,00	15,00	76,46
128	TORAJA UTARA	12,42	19,31	15,00	10,00	4,69	15,00	76,42
129	PASAMAN	8,91	19,48	14,74	15,00	3,29	15,00	76,42
130	BANGKA BARAT	11,55	19,66	11,90	15,00	3,26	15,00	76,36
131	JEPARA	10,65	15,00	14,48	15,00	6,11	15,00	76,25
132	SUKABUMI	10,03	19,66	15,00	15,00	1,55	15,00	76,23
133	KLUNGKUNG	13,49	14,83	14,48	15,00	3,43	15,00	76,23
134	PRINGSEWU	7,60	20,00	15,00	15,00	3,62	15,00	76,22
135	KAPUAS HULU	8,76	18,62	14,74	15,00	4,08	15,00	76,21
136	GORONTALO UTARA	12,09	20,00	11,90	15,00	2,21	15,00	76,20
137	PONOROGO	9,19	15,00	14,48	20,00	2,48	15,00	76,15
138	BANJARNEGARA	7,21	20,00	13,97	15,00	4,86	15,00	76,04
139	ROTE NDAO	10,77	19,48	8,02	20,00	2,63	15,00	75,90
140	PADANG PARIAMAN	10,26	19,14	14,48	15,00	1,99	15,00	75,86
141	PATI	10,77	15,00	13,97	15,00	6,10	15,00	75,83
142	LAMPUNG TIMUR	12,52	20,00	9,83	15,00	3,43	15,00	75,77
143	PANDEGLANG	3,18	19,66	14,22	20,00	3,65	15,00	75,71
144	BULELENG	11,64	15,00	14,74	15,00	4,31	15,00	75,69
145	ACEH BARAT DAYA	8,55	19,83	13,71	15,00	3,59	15,00	75,68
146	INDRAGIRI HULU	10,66	20,00	11,90	15,00	3,09	15,00	75,64

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
147	LOMBOK TENGAH	8,42	20,00	15,00	15,00	2,18	15,00	75,60
148	SITUBONDO	11,81	14,66	15,00	15,00	4,12	15,00	75,58
149	LEMBATA	8,73	19,31	15,00	15,00	2,54	15,00	75,58
150	SUBANG	11,41	14,66	14,22	15,00	5,29	15,00	75,58
151	GARUT	12,05	15,00	14,74	15,00	3,78	15,00	75,57
152	KENDAL	11,83	15,00	14,48	15,00	4,26	15,00	75,57
153	KOTABARU	12,93	20,00	15,00	10,00	2,62	15,00	75,54
154	KATINGAN	9,86	19,48	14,48	15,00	1,67	15,00	75,50
155	BULUNGAN	9,64	19,66	13,19	15,00	2,98	15,00	75,46
156	BOLAANG MONGONDOW	8,81	18,97	8,53	20,00	4,09	15,00	75,40
157	PAMEKASAN	12,12	19,66	11,12	15,00	2,46	15,00	75,36
158	BANYUMAS	11,62	15,00	15,00	15,00	3,73	15,00	75,35
159	PESISIR SELATAN	7,73	19,83	13,97	15,00	3,81	15,00	75,33
160	KONAWA KEPULAUAN	11,57	19,83	12,16	15,00	1,70	15,00	75,25
161	PELALAWAN	11,46	13,97	13,45	20,00	1,37	15,00	75,24
162	MINAHASA TENGGARA	9,04	19,83	12,67	15,00	3,68	15,00	75,22
163	TANAH DATAR	8,05	19,83	14,74	15,00	2,58	15,00	75,20
164	BANGGAI LAUT	8,20	19,31	12,93	15,00	4,74	15,00	75,18
165	KABUPATEN BANDUNG	12,21	19,83	10,86	15,00	2,26	15,00	75,17
166	BANTUL	10,45	15,00	15,00	15,00	4,69	15,00	75,14
167	OGAN KOMERING ULU TIMUR	10,99	19,83	14,74	10,00	4,53	15,00	75,09
168	BELU	8,25	18,97	14,22	15,00	3,64	15,00	75,08
169	TRENGGALEK	11,04	20,00	11,12	15,00	2,84	15,00	75,00
170	BOJONEGORO	11,72	19,66	14,74	10,00	3,87	15,00	74,99
171	SOLOK SELATAN	9,13	20,00	11,90	15,00	3,89	15,00	74,91
172	SRAGEN	14,46	15,00	10,86	15,00	4,59	15,00	74,91
173	MEMPAWAH	13,06	19,83	7,50	15,00	4,44	15,00	74,83
174	NIAS	10,09	18,97	11,90	15,00	3,86	15,00	74,81
175	LAHAT	9,29	19,31	13,71	15,00	2,46	15,00	74,77
176	BELITUNG	9,81	14,48	14,74	15,00	5,74	15,00	74,76
177	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	7,35	19,31	14,48	15,00	3,62	15,00	74,76
178	BUTON TENGAH	10,58	19,48	13,45	15,00	1,16	15,00	74,67
179	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	7,57	19,48	14,48	15,00	3,14	15,00	74,67
180	PIDIE JAYA	9,45	14,83	11,90	20,00	3,38	15,00	74,56
181	PASURUAN	8,24	20,00	14,74	15,00	1,55	15,00	74,53
182	TULANG BAWANG BARAT	12,99	15,00	14,22	15,00	2,26	15,00	74,48
183	PAKPAK BHARAT	11,74	19,48	10,09	15,00	3,10	15,00	74,41

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
184	LAMPUNG SELATAN	12,86	15,00	13,71	15,00	2,79	15,00	74,35
185	BANYUASIN	9,17	19,66	12,41	15,00	2,93	15,00	74,17
186	LOMBOK TIMUR	9,64	19,83	12,93	15,00	1,73	15,00	74,12
187	REMBANG	9,13	15,00	11,64	20,00	3,35	15,00	74,12
188	CILACAP	11,17	15,00	12,16	15,00	5,79	15,00	74,11
189	AGAM	8,41	19,48	12,93	15,00	3,21	15,00	74,03
190	BANDUNG BARAT	8,96	20,00	14,74	10,00	5,33	15,00	74,02
191	ACEH BESAR	9,66	14,48	14,74	15,00	5,12	15,00	74,00
192	OGAN KOMERING ULU	6,48	19,31	13,97	15,00	4,17	15,00	73,92
193	BARITO KUALA	9,14	19,83	10,09	15,00	4,81	15,00	73,87
194	KUTAI TIMUR	10,38	20,00	13,45	15,00	4,99	10,01	73,83
195	MANDAILING NATAL	12,84	19,48	12,41	15,00	4,08	10,01	73,82
196	TANAH BUMBU	9,09	19,66	11,64	15,00	3,38	15,00	73,76
197	LOMBOK BARAT	8,73	19,31	11,38	15,00	4,33	15,00	73,75
198	KOLAKA UTARA	10,26	19,48	10,09	15,00	3,89	15,00	73,71
199	MAMUJU TENGAH	8,91	20,00	13,71	15,00	1,09	15,00	73,70
200	MUSI RAWAS UTARA	9,50	20,00	12,41	15,00	1,78	15,00	73,69
201	KOTAWARINGIN TIMUR	7,42	20,00	11,12	15,00	5,15	15,00	73,69
202	TOLIKARA	10,48	18,62	7,76	20,00	1,83	15,00	73,68
203	TEMANGGUNG	10,68	15,00	14,74	15,00	3,25	15,00	73,66
204	NAGAN RAYA	11,12	14,14	13,71	15,00	4,67	15,00	73,64
205	SAROLANGUN	7,81	19,66	11,90	15,00	4,24	15,00	73,60
206	TANGERANG	5,96	19,31	14,22	15,00	3,96	15,00	73,46
207	HUMBANG HASUNDUTAN	12,62	19,66	8,02	15,00	3,16	15,00	73,45
208	SAMPANG	8,15	19,83	12,67	15,00	2,79	15,00	73,44
209	MAMUJU	9,13	19,31	12,16	15,00	2,82	15,00	73,42
210	NGAWI	6,43	18,97	12,93	15,00	5,08	15,00	73,41
211	MUNA	9,82	20,00	11,38	15,00	2,12	15,00	73,32
212	PEKALONGAN	9,48	14,83	14,48	15,00	4,48	15,00	73,28
213	ACEH TAMIANG	8,74	14,48	15,00	15,00	5,00	15,00	73,21
214	GUNUNGKIDUL	9,50	15,00	14,74	15,00	3,95	15,00	73,19
215	MAJALENGKA	8,89	14,48	14,22	15,00	5,46	15,00	73,05
216	FLORES TIMUR	8,58	19,66	11,38	15,00	3,21	15,00	72,83
217	SUMBAWA BARAT	9,00	20,00	10,60	15,00	3,22	15,00	72,82
218	BLITAR	7,17	20,00	11,12	15,00	4,42	15,00	72,71
219	WAY KANAN	10,49	14,83	14,48	15,00	2,90	15,00	72,70
220	MUSI RAWAS	7,21	19,66	14,22	15,00	1,55	15,00	72,64
221	KEPAHIANG	7,47	18,97	12,16	15,00	3,97	15,00	72,56

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
223	SIDOARJO	4,28	19,66	14,22	15,00	4,30	15,00	72,46
224	PULANG PISAU	11,63	19,14	10,09	15,00	1,60	15,00	72,46
225	ACEH TENGAH	11,06	16,55	10,09	15,00	4,72	15,00	72,42
226	KEPULAUAN SELAYAR	12,08	20,00	9,05	15,00	1,19	15,00	72,32
227	NUNUKAN	11,46	19,66	9,05	15,00	2,16	15,00	72,32
228	KEBUMEN	12,59	15,00	15,00	10,00	4,67	15,00	72,25
229	OGAN KOMERING ILIR	10,52	19,83	13,71	10,00	3,19	15,00	72,24
230	BANGKALAN	10,36	19,31	7,50	15,00	4,80	15,00	71,98
231	BONE BOLANGO	9,44	15,00	13,97	15,00	3,32	15,00	71,73
232	BATANGHARI	6,12	19,48	15,00	15,00	1,11	15,00	71,71
233	SUKAMARA	10,39	19,31	9,83	15,00	2,17	15,00	71,69
234	BEKASI	13,06	15,00	15,00	15,00	3,46	10,01	71,53
235	BUNGO	13,05	14,31	9,05	15,00	4,77	15,00	71,18
236	MALAKA	13,54	19,14	2,59	20,00	0,84	15,00	71,11
237	KONAWA SELATAN	10,64	20,00	13,45	15,00	1,98	10,01	71,07
238	OGAN KOMERING ULU SELATAN	12,86	19,66	5,69	15,00	2,83	15,00	71,04
239	MURUNG RAYA	8,47	18,62	10,35	15,00	3,53	15,00	70,96
240	KUANTAN SINGINGI	4,89	19,31	11,64	15,00	5,11	15,00	70,95
241	DELI SERDANG	12,78	19,83	6,98	10,00	6,18	15,00	70,77
242	NGANJUK	8,67	19,83	6,98	15,00	5,25	15,00	70,73
243	KARIMUN	9,46	19,66	15,00	10,00	1,52	15,00	70,64
244	SANGGAU	9,84	14,83	14,48	15,00	1,43	15,00	70,58
245	BOLAANG MONGONDOW UTARA	8,43	20,00	7,76	15,00	4,38	15,00	70,58
246	SIMALUNGUN	8,06	19,48	15,00	20,00	2,96	5,01	70,51
247	BANGGAI	7,57	19,14	7,24	15,00	6,56	15,00	70,50
248	MALUKU TENGAH	11,66	17,76	8,02	15,00	3,05	15,00	70,48
249	BOMBANA	9,35	19,66	15,00	10,00	1,28	15,00	70,28
250	SERDANG BEDAGAI	5,87	19,83	11,64	15,00	2,82	15,00	70,15
251	PEMALANG	6,53	19,83	14,74	15,00	4,03	10,01	70,13
252	BARRU	8,22	15,00	13,71	15,00	3,17	15,00	70,10
253	PACITAN	6,87	20,00	9,31	15,00	3,81	15,00	69,99
254	SEKADAU	9,24	14,66	7,76	20,00	3,28	15,00	69,93
255	PROBOLINGGO	9,91	14,31	11,38	15,00	4,32	15,00	69,92
256	SERANG	8,33	19,31	6,72	15,00	5,49	15,00	69,86
257	KEPULAUAN MERANTI	11,22	18,45	13,97	15,00	1,16	10,01	69,80
258	BENGKAYANG	10,67	19,83	13,45	15,00	0,84	10,01	69,79
259	BARITO UTARA	7,85	20,00	8,53	15,00	3,31	15,00	69,69

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
260	LABUHANBATU	11,04	19,83	14,48	15,00	4,26	5,01	69,62
261	KARO	13,58	14,14	8,02	15,00	3,84	15,00	69,57
262	SINJAI	11,17	19,48	6,47	15,00	2,43	15,00	69,54
263	MANGGARAI BARAT	8,61	19,31	10,35	15,00	1,26	15,00	69,53
264	KARANGASEM	11,64	15,00	13,45	10,00	4,44	15,00	69,53
265	PESISIR BARAT	8,75	17,59	11,12	15,00	2,04	15,00	69,49
266	BUJOL	8,45	18,79	7,50	15,00	4,72	15,00	69,46
267	KUNINGAN	8,62	19,83	7,50	15,00	3,50	15,00	69,45
268	LAMONGAN	8,33	15,00	14,48	15,00	1,51	15,00	69,33
269	LABUHANBATU SELATAN	9,18	19,48	6,47	15,00	3,89	15,00	69,02
270	KEPULAUAN MENTAWAI	7,78	20,00	14,74	15,00	1,48	10,01	69,01
271	MALUKU TENGGARA	9,16	19,14	9,31	15,00	1,26	15,00	68,87
272	KEPULAUAN SANGIHE	10,18	14,83	11,38	15,00	2,42	15,00	68,81
273	POSO	9,93	15,00	13,97	10,00	4,85	15,00	68,75
274	OGAN ILIR	5,76	20,00	13,97	15,00	3,92	10,01	68,65
275	LINGGA	7,76	13,10	14,74	15,00	3,00	15,00	68,60
276	HULU SUNGAI TENGAH	7,87	19,66	9,05	15,00	1,89	15,00	68,47
277	BUTON UTARA	9,13	19,83	8,79	15,00	0,70	15,00	68,45
278	TIMOR TENGAH UTARA	8,96	18,79	7,76	15,00	2,66	15,00	68,17
279	KUTAI BARAT	10,05	19,66	13,97	5,00	4,43	15,00	68,11
280	MERANGIN	15,00	14,48	4,14	15,00	4,39	15,00	68,01
281	BANGLI	11,29	19,14	9,57	10,00	2,98	15,00	67,98
282	TULANG BAWANG	10,28	20,00	5,43	15,00	2,26	15,00	67,97
283	MOROWALI UTARA	10,91	8,62	14,74	15,00	3,67	15,00	67,94
284	SIJUNJUNG	7,30	19,48	6,98	15,00	4,16	15,00	67,92
285	SERUYAN	8,63	19,66	7,76	15,00	1,80	15,00	67,84
286	LIMA PULUH KOTA	8,47	19,31	6,72	15,00	3,08	15,00	67,58
287	BUTON SELATAN	7,33	19,48	14,48	15,00	1,25	10,01	67,56
288	KOLAKA	6,49	14,48	14,48	15,00	1,95	15,00	67,40
289	MANGGARAI	7,98	19,48	7,76	15,00	2,18	15,00	67,40
290	ENREKANG	12,98	19,31	8,53	10,00	1,58	15,00	67,40
291	NGADA	12,44	13,62	7,76	15,00	3,54	15,00	67,36
292	PADANG LAWAS UTARA	9,03	14,83	10,86	20,00	2,50	10,01	67,22
293	TAPIN	11,01	20,00	15,00	5,00	0,96	15,00	66,98
294	LUWU UTARA	7,55	19,66	7,50	15,00	2,27	15,00	66,98
295	TAPANULI SELATAN	9,80	19,66	5,95	15,00	1,56	15,00	66,96
296	BREBES	9,63	15,00	13,45	10,00	3,83	15,00	66,90
297	MUARO JAMBI	2,98	18,28	10,35	15,00	5,16	15,00	66,76

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
298	BANTAENG	8,68	15,00	14,74	10,00	2,96	15,00	66,38
299	MUKO MUKO	5,53	15,00	11,90	15,00	3,88	15,00	66,30
300	BANYUWANGI	8,31	14,66	11,90	15,00	1,43	15,00	66,29
301	KUPANG	10,70	14,31	8,79	15,00	2,38	15,00	66,18
302	LAMPUNG UTARA	10,11	19,66	14,74	15,00	1,61	5,01	66,12
303	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	10,33	19,66	13,97	15,00	2,15	5,01	66,11

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri.

Tabel 3.66 Nilai IPKD dan 6 Dimensi pengukurannya tiap Kota dengan nilai minimum 66

No.	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
1	KOTA MEDAN	12,65	20,00	15,00	20,00	5,95	15,00	88,59
2	KOTA DEPOK	13,45	19,83	14,74	20,00	3,30	15,00	86,32
3	KOTA TASIKMALAYA	10,72	20,00	15,00	20,00	5,05	15,00	85,77
4	KOTA BALIKPAPAN	13,15	20,00	15,00	15,00	3,92	15,00	82,07
5	KOTA SUKABUMI	13,00	14,31	14,22	20,00	5,19	15,00	81,72
6	KOTA PEKALONGAN	13,89	15,00	15,00	20,00	1,87	15,00	80,76
7	KOTA DENPASAR	12,81	15,00	13,45	15,00	8,86	15,00	80,12
8	KOTA BANJAR	11,43	14,48	14,74	20,00	4,43	15,00	80,08
9	KOTA PALANGKARAYA	10,02	20,00	7,76	20,00	5,97	15,00	78,75
10	KOTA GUNUNGSITOLI	10,98	19,66	14,48	15,00	3,14	15,00	78,26
11	KOTA SEMARANG	11,85	20,00	15,00	13,33	2,99	15,00	78,17
12	KOTA BATAM	11,39	20,00	14,74	13,33	3,61	15,00	78,08
13	KOTA SURAKARTA	11,23	20,00	14,74	13,33	3,69	15,00	77,99
14	KOTA SERANG	9,14	14,83	15,00	20,00	3,98	15,00	77,94
15	KOTA PANGKAL PINANG	10,99	19,83	14,22	13,33	4,38	15,00	77,75
16	KOTA BAU BAU	8,49	19,83	14,74	15,00	4,39	15,00	77,45
17	KOTA PONTIANAK	11,06	19,66	15,00	13,33	2,91	15,00	76,95
18	KOTA METRO	11,95	15,00	15,00	15,00	4,41	15,00	76,36
19	KOTA SINGKAWANG	9,48	19,66	14,74	13,33	4,08	15,00	76,29
20	KOTA PROBOLINGGO	13,87	15,00	15,00	13,33	3,93	15,00	76,14
21	KOTA SABANG	9,28	17,76	12,41	15,00	6,68	15,00	76,14
22	KOTA PEMATANG SIANTAR	11,39	19,66	10,60	13,33	5,91	15,00	75,89
23	KOTA MOJOKERTO	12,12	19,48	13,97	13,33	1,49	15,00	75,39
24	KOTA LUBUK LINGGAU	10,87	19,31	13,19	13,33	3,56	15,00	75,26
25	KOTA TOMOHON	13,87	15,00	15,00	13,33	3,05	15,00	75,25
26	KOTA SUNGAI PENUH	8,97	15,00	14,74	15,00	6,53	15,00	75,24

No.	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
27	KOTA TIDORE KEPULAUAN	11,53	19,31	7,50	20,00	1,51	15,00	74,86
28	KOTA SAMARINDA	9,17	19,83	15,00	13,33	2,32	15,00	74,65
29	KOTA TANGERANG SELATAN	9,06	20,00	9,57	15,00	5,69	15,00	74,31
30	KOTA YOGYAKARTA	11,73	14,83	15,00	15,00	2,71	15,00	74,27
31	KOTA PADANG	12,40	20,00	11,64	10,00	5,12	15,00	74,16
32	KOTA MATARAM	7,22	19,83	15,00	15,00	1,98	15,00	74,03
33	KOTA BITUNG	8,55	15,00	14,74	20,00	0,45	15,00	73,73
34	KOTA TANJUNG PINANG	6,17	19,83	15,00	13,33	4,21	15,00	73,54
35	KOTA SALATIGA	11,67	14,31	13,97	13,33	5,24	15,00	73,52
36	KOTA PARIAMAN	8,77	18,79	12,16	15,00	3,78	15,00	73,49
37	KOTA BENGKULU	7,15	19,48	13,97	13,33	4,28	15,00	73,21
38	KOTA BANDUNG	10,78	20,00	14,74	15,00	7,56	5,01	73,09
39	KOTA KUPANG	11,04	15,00	13,71	13,33	4,72	15,00	72,80
40	KOTA MADIUN	10,73	19,48	12,41	13,33	1,83	15,00	72,80
41	KOTA MAKASSAR	9,62	20,00	15,00	6,67	6,35	15,00	72,63
42	KOTA BONTANG	12,07	19,83	9,05	13,33	3,32	15,00	72,60
43	KOTA SOLOK	12,54	19,83	7,50	13,33	3,84	15,00	72,05
44	KOTA SURABAYA	10,68	14,83	13,71	10,00	7,76	15,00	71,97
45	KOTA PAYAKUMBUH	9,59	15,00	13,45	13,33	5,39	15,00	71,76
46	KOTA JAMBI	9,48	19,48	12,93	13,33	1,52	15,00	71,75
47	KOTA BEKASI	12,54	20,00	15,00	15,00	3,78	5,01	71,33
48	KOTA LHOKSEUMAWE	8,48	19,66	8,79	15,00	4,33	15,00	71,26
49	KOTA CIMAHI	9,69	14,83	14,22	13,33	4,18	15,00	71,25
50	KOTA BLITAR	10,89	15,00	15,00	13,33	1,77	15,00	71,00
51	KOTA PADANGSIDIMPUAN	9,83	20,00	7,76	15,00	3,40	15,00	70,99
52	KOTA SAWAHLUNTO	6,05	19,31	12,93	15,00	2,49	15,00	70,79
53	KOTA TARAKAN	12,24	20,00	8,02	13,33	2,10	15,00	70,69
54	KOTA PALEMBANG	9,99	20,00	15,00	13,33	2,28	10,01	70,61
55	KOTA KOTAMOBAGU	7,46	14,48	15,00	15,00	3,50	15,00	70,45
56	KOTA GORONTALO	8,94	15,00	14,74	13,33	3,38	15,00	70,40
57	KOTA PALU	9,18	14,83	9,57	20,00	1,64	15,00	70,22
58	KOTA BANJARMASIN	12,17	19,83	14,74	6,67	1,81	15,00	70,22
59	KOTA TEBING TINGGI	9,91	13,79	14,48	13,33	2,96	15,00	69,48
60	KOTA MALANG	10,91	15,00	12,67	13,33	2,45	15,00	69,37
61	KOTA PALOPO	10,61	20,00	15,00	6,67	2,08	15,00	69,36
62	KOTA BOGOR	8,56	14,83	13,71	15,00	2,04	15,00	69,13
63	KOTA TEGAL	13,95	15,00	13,45	10,00	1,62	15,00	69,02
64	KOTA PEKANBARU	9,68	14,48	13,71	13,33	2,42	15,00	68,62

No.	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
65	KOTA MANADO	10,87	19,31	15,00	6,67	1,61	15,00	68,46
66	KOTA TANGERANG	5,94	14,66	13,45	13,33	5,42	15,00	67,80
67	KOTA BANJARBARU	6,87	20,00	8,53	15,00	2,16	15,00	67,56
68	KOTA BIMA	11,47	15,00	8,02	15,00	2,98	15,00	67,47
69	KOTA BANDA ACEH	8,09	14,66	10,60	15,00	4,00	15,00	67,34
70	KOTA BUKITTINGGI	7,11	14,14	13,97	15,00	1,45	15,00	66,66
71	KOTA BATU	9,81	14,83	9,83	15,00	1,70	15,00	66,17
72	KOTA MAGELANG	9,99	10,00	13,45	15,00	2,68	15,00	66,11

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri.

Keterangan:

1. Dimensi 1 adalah kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Dimensi 2 adalah pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.
3. Dimensi 3 adalah transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Dimensi 4 adalah penyerapan anggaran.
5. Dimensi 5 adalah kondisi keuangan daerah.
6. Dimensi 6 adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Pengukuran IPKD secara nasional juga menjadi ukuran beberapa indikator kinerja pada sasaran prioritas RPJMN sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, khususnya kegiatan Prioritas Nasional, yang meliputi:

1. Pengelolaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah yang Efektif dan Efisien sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2. Pengesahan APBD Tepat Waktu
3. Pemenuhan Indikator Mandatory Spending
4. Penerapan SIPD Bidang Perencanaan Anggaran dalam mendukung Stranas PK
5. Pemenuhan Penganggaran SPM
6. Pencapaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen
7. Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
8. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam Mendukung Kemudahan Investasi
9. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan Kontribusi terhadap Penerimaan Daerah
10. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Secara Wajar

Keberhasilan pencapaian kinerja Rata-Rata IPKD Tahun 2024 ini disebabkan dukungan Kemendagri terhadap pengelolaan keuangan daerah, seperti perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah, pembinaan umum tentang keuangan daerah, digitalisasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, fasilitasi

pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keuangan daerah. Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuda telah melakukan serangkaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian IPKD Tahun 2024, antara lain:

1. Melakukan evaluasi Ranperda APBD Provinsi, Ranperda perubahan APBD Provinsi, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi, Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi.
2. Melakukan konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/Kota.
3. Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah
4. Pertimbangan/Rekomendasi Pencairan dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
5. Melakukan Penilaian terhadap usulan pendirian BUMD
6. Mendorong Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah melalui penerapan SIPD dan Elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.
7. Asistensi tata kelola keuangan daerah antara lain:
  - a. Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) khususnya di bidang Keuangan Daerah
  - b. Penyusunan APBD,
  - c. Penyusunan LKPD
  - d. Penerapan transaksi Non Tunai
  - e. Pengelolaan Barang Milik Daerah

8. Fasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui:
  - a. Fasilitasi penyusunan APBD.
  - b. Fasilitasi pemenuhan belanja yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending).
  - c. Fasilitasi pemenuhan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
  - d. Fasilitasi optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan basis data pajak daerah dan retribusi daerah, modernisasi dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, dan Penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah.
  - e. Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi.
  - f. Fasilitasi optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
  - g. Fasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah.
  - h. Fasilitasi pemanfaatan Creative Financing, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah dalam pembangunan infrastruktur daerah.
  - i. Fasilitasi peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk optimalisasi penyerapan anggaran daerah.
9. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi kepada pemda di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait Baik di tingkat Pusat maupun Daerah antara lain BPKP, Kemenkeu, BPK-RI, Samsat dan K/L Lainnya serta Pemerintah Daerah.

Dalam pencapaian kinerja IPKD Tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan sebagai berikut:

1. Adanya pergantian/mutasi pejabat di lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah.
2. Adanya kebijakan automatic adjustment pada Ditjen Bina Keuda sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan.
3. Tingginya frekuensi perubahan/revisi anggaran.
4. Terdapat daerah yang belum menginput data pada aplikasi pengukuran IPKD.
5. Terdapat kesalahan dalam penginputan data dalam aplikasi IPKD oleh user Pemerintah Daerah.
6. Rendahnya pemahaman SDM pemerintah daerah terkait implementasi aplikasi IPKD

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Bersama BSKDN melakukan pendampingan

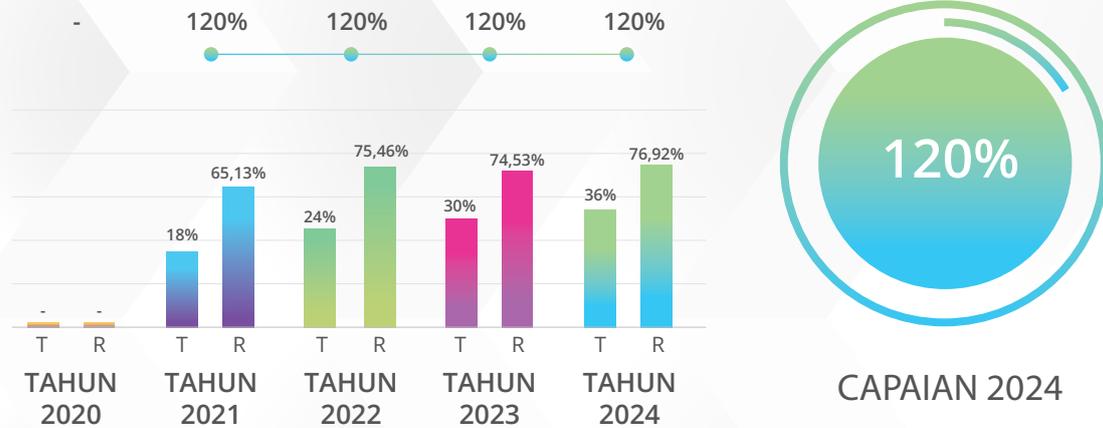
dan asistensi kepada daerah dalam penginputan aplikasi IPKD sehingga terjadi kenaikan yang signifikan terhadap daerah yang menginput aplikasi IPKD dibanding tahun sebelumnya.

2. Telah dilakukan pembinaan kepada daerah yang berperingkat sangat perlu perbaikan melalui kegiatan-kegiatan reguler Ditjen Bina Keuangan Daerah antara lain asistensi, fasilitasi, sosialisasi dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah.
3. Telah dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan BSKDN dalam rangka penyempurnaan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, supervisi dan pelatihan yang aplikatif di lingkungan Ditjen Bina Keuda dan Pemerintah Daerah.
5. Mengusulkan pembentukan jabatan fungsional analis keuangan daerah sebagai jabatan fungsional yang bertugas untuk melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan daerah (Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 821.29/230/SJ tanggal 19 Januari 2022, hal Usulan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah).
6. Melakukan percepatan penandatanganan pakta integritas dan penetapan kinerja tingkat Eselon II dan Jabatan Fungsional.
7. Penambahan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kriteria yang diperlukan untuk masing-masing direktorat yang ada di Lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah;
8. Secara periodik perlu dilaksanakan evaluasi atas realisasi penyerapan anggaran Ditjen Bina Keuda.

Efisiensi penggunaan sumber daya (SDM, Anggaran, atau sarana dan prasarana) yang telah dilakukan dalam pencapaian IPKD Tahun 2024, antara lain:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang efektif dan efisien
2. Memahami anatomi dokumen anggaran
3. Jenis dana yang tersedia
4. Sistem pengendalian intern
5. Komponen pokok organisasi/unit kerja
6. Melakukan pengelolaan kepegawaian (SDM) secara tertib administrasi
7. Mekanisme pengadaan barang/jasa yang baik dan benar
8. Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sebagai dasar pembiayaan dan belanja
9. Melakukan pengelolaan keuangan dengan menjaga akuntabilitas pelaporan

## Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi



Penilaian Indeks Inovasi Daerah kepada 420 pemerintah daerah (31 provinsi, 303 kabupaten, 86 kota) atas indeks inovasi tinggi dengan predikat 'sangat inovatif' dan 'inovatif', diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan daya saing pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

T = Target R = Realisasi

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Pasal 65 ayat (1) dijelaskan bahwa "Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN", Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai UKE I Kementerian Dalam Negeri yang mengampu tugas Penelitian dan Pengembangan harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

Hal ini juga ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). BSKDN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Perubahan tersebut juga diikuti dengan penyesuaian dokumen

Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024, yang dituangkan dalam Permendagri 4 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/Insentif inovasi daerah mengamanatkan BSKDN melaksanakan penilaian inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah.

Kegiatan penilaian inovasi daerah bertujuan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Daerah yang berinovasi tinggi adalah daerah dengan predikat "Sangat Inovatif" dan "Inovatif".

Pada tahun 2024, proses penilaian Indeks Inovasi Daerah melibatkan beberapa Kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, yaitu

1. Kemenko Polhukam
2. Kemenko PMK
3. Kemen PANRB
4. Kementerian PPN/Bappenas
5. Kementerian Komunikasi dan Digital
6. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
7. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
8. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
9. Ombudsman RI
10. Universitas Indonesia
11. Universitas Gadjah Mada
12. Universitas Sriwijaya
13. Kemitraan
14. CNN Indonesia
15. Kompas TV

Dalam proses penilaian Indeks Inovasi Daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dapat direplikasi.

Nilai Indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 35,01-100 berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Kategorisasi nilai inovasi daerah dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.67  
Kategorisasi Nilai Indeks Inovasi Daerah

Predikat	Rentang Nilai
Sangat Inovatif	60,01 – 100
Inovatif	35,01 – 60
Kurang Inovatif	0,1 – 35,00
Tidak Dapat Dinilai	0



Data rekapitulasi hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah di Indonesia Tahun 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024. Hasil pengukuran tersebut menetapkan 420 daerah dengan predikat “Sangat Inovatif” dan “Inovatif”, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kategori Provinsi sebanyak 10 daerah “Sangat Inovatif” dan 21 daerah “Inovatif”;
  2. Kategori Kabupaten sebanyak 69 daerah “Sangat Inovatif” dan 234 daerah “Inovatif”; dan
  3. Kategori Kota sebanyak 33 daerah “Sangat Inovatif” dan 53 daerah “Inovatif”.
- Adapun rincian seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memiliki predikat “Sangat Inovatif”, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.68 Daftar Provinsi dengan Predikat Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
1.	Provinsi Bali	Sangat Inovatif	94,132
2.	Provinsi DKI Jakarta	Sangat Inovatif	87,232
3.	Provinsi Jawa Barat	Sangat Inovatif	83,636
4.	Provinsi Jawa Tengah	Sangat Inovatif	76,648
5.	Provinsi Jawa Timur	Sangat Inovatif	71,296
6.	Provinsi Kalimantan Timur	Sangat Inovatif	67,088
7.	Provinsi Lampung	Sangat Inovatif	65,484
8.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sangat Inovatif	64,084
9.	Provinsi Sumatera Barat	Sangat Inovatif	62,464
10.	Provinsi Sumatera Selatan	Sangat Inovatif	60,748

Tabel 3.69 Daftar Kabupaten dengan Predikat Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
1	Kabupaten Aceh Jaya	Sangat Inovatif	98,86
2	Kabupaten Klungkung	Sangat Inovatif	93,984
3	Kabupaten Bangli	Sangat Inovatif	93,768
4	Kabupaten Badung	Sangat Inovatif	92,248
5	Kabupaten Buleleng	Sangat Inovatif	91,212
6	Kabupaten Tangerang	Sangat Inovatif	88,924
7	Kabupaten Bantul	Sangat Inovatif	88,212
8	Kabupaten Sleman	Sangat Inovatif	88,168
9	Kabupaten Bogor	Sangat Inovatif	84,276
10	Kabupaten Sumedang	Sangat Inovatif	81,348
11	Kabupaten Aceh Jaya	Sangat Inovatif	98,86
12	Kabupaten Klungkung	Sangat Inovatif	93,984
13	Kabupaten Bangli	Sangat Inovatif	93,768
14	Kabupaten Badung	Sangat Inovatif	92,248
15	Kabupaten Buleleng	Sangat Inovatif	91,212
16	Kabupaten Tangerang	Sangat Inovatif	88,924

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
17	Kabupaten Pati	Sangat Inovatif	76,836
18	Kabupaten Temanggung	Sangat Inovatif	76,556
19	Kabupaten Klaten	Sangat Inovatif	75,788
20	Kabupaten Tegal	Sangat Inovatif	74,744
21	Kabupaten Grobogan	Sangat Inovatif	73,228
22	Kabupaten Magelang	Sangat Inovatif	73,152
23	Kabupaten Sukoharjo	Sangat Inovatif	72,864
24	Kabupaten Purworejo	Sangat Inovatif	72,848
25	Kabupaten Cilacap	Sangat Inovatif	72,584
26	Kabupaten Banyuwangi	Sangat Inovatif	72,416
27	Kabupaten Situbondo	Sangat Inovatif	71,868
28	Kabupaten Sampang	Sangat Inovatif	71,404
29	Kabupaten Bangkalan	Sangat Inovatif	71,172
30	Kabupaten Lamongan	Sangat Inovatif	71,084
31	Kabupaten Pamekasan	Sangat Inovatif	70,98
32	Kabupaten Sidoarjo	Sangat Inovatif	70
33	Kabupaten Ngawi	Sangat Inovatif	69,936
34	Kabupaten Blitar	Sangat Inovatif	69,92
35	Kabupaten Jember	Sangat Inovatif	69,696
36	Kabupaten Trenggalek	Sangat Inovatif	68,676
37	Kabupaten Pasuruan	Sangat Inovatif	68,336
38	Kabupaten Malang	Sangat Inovatif	68,336
39	Kabupaten Mojokerto	Sangat Inovatif	67,804
40	Kabupaten Sambas	Sangat Inovatif	67,744
41	Kabupaten Balangan	Sangat Inovatif	67,7
42	Kabupaten Tabalong	Sangat Inovatif	67,472
43	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sangat Inovatif	67,428
44	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sangat Inovatif	67,408
45	Kabupaten Tapin	Sangat Inovatif	67,2
46	Kabupaten Bangka	Sangat Inovatif	66,544
47	Kabupaten Bangka Tengah	Sangat Inovatif	66,512
48	Kabupaten Mesuji	Sangat Inovatif	65,892
49	Kabupaten Lampung Selatan	Sangat Inovatif	65,816
50	Kabupaten Lampung Barat	Sangat Inovatif	65,696
51	Kabupaten Pringsewu	Sangat Inovatif	65,504
52	Kabupaten Pesawaran	Sangat Inovatif	65,496

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
53	Kabupaten Lampung Utara	Sangat Inovatif	65,304
54	Kabupaten Dompu	Sangat Inovatif	64,3
55	Kabupaten Lombok Tengah	Sangat Inovatif	63,96
56	Kabupaten Sumba Timur	Sangat Inovatif	63,912
57	Kabupaten Sorong	Sangat Inovatif	63,716
58	Kabupaten Pelalawan	Sangat Inovatif	63,332
59	Kabupaten Indragiri Hilir	Sangat Inovatif	63,296
60	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Sangat Inovatif	63,12
61	Kabupaten Soppeng	Sangat Inovatif	62,82
62	Kabupaten Padang Pariaman	Sangat Inovatif	62,38
63	Kabupaten Dharmas Raya	Sangat Inovatif	61,74
64	Kabupaten Pasaman Barat	Sangat Inovatif	61,288
65	Kabupaten Ogan Ilir	Sangat Inovatif	60,98
66	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Sangat Inovatif	60,716
67	Kabupaten Muara Enim	Sangat Inovatif	60,648
68	Kabupaten Karo	Sangat Inovatif	60,356
69	Kabupaten Deli Serdang	Sangat Inovatif	60,012

Tabel 3.70 Daftar Kota dengan Predikat Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
1	Kota Denpasar	Sangat Inovatif	94,172
2	Kota Tangerang	Sangat Inovatif	90,2
3	Kota Bengkulu	Sangat Inovatif	88,776
4	Kota Yogyakarta	Sangat Inovatif	87,372
5	Kota Jambi	Sangat Inovatif	85,732
6	Kota Bekasi	Sangat Inovatif	82,616
7	Kota Sukabumi	Sangat Inovatif	82,368
8	Kota Cimahi	Sangat Inovatif	81,272
9	Kota Pekalongan	Sangat Inovatif	76,716
10	Kota Magelang	Sangat Inovatif	76,348
11	Kota Semarang	Sangat Inovatif	75,964
12	Kota Surakarta	Sangat Inovatif	73,964
13	Kota Surabaya	Sangat Inovatif	72,072
14	Kota Mojokerto	Sangat Inovatif	71,568
15	Kota Batu	Sangat Inovatif	69,98
16	Kota Madiun	Sangat Inovatif	67,924

No	Pemerintah Daerah	Predikat	Skor Nilai
17	Kota Probolinggo	Sangat Inovatif	67,888
18	Kota Pontianak	Sangat Inovatif	67,712
19	Kota Bontang	Sangat Inovatif	67,14
20	Kota Pangkal Pinang	Sangat Inovatif	66,376
21	Kota Bandar Lampung	Sangat Inovatif	65,844
22	Kota Tidore Kepulauan	Sangat Inovatif	64,824
23	Kota Bima	Sangat Inovatif	64,54
24	Kota Mataram	Sangat Inovatif	64,312
25	Kota Pekanbaru	Sangat Inovatif	63,4
26	Kota Makassar	Sangat Inovatif	63,148
27	Kota Palopo	Sangat Inovatif	62,904
28	Kota Padang Panjang	Sangat Inovatif	62,372
29	Kota Sawah Lunto	Sangat Inovatif	62,22
30	Kota Padang	Sangat Inovatif	62,072
31	Kota Solok	Sangat Inovatif	62,02
32	Kota Pariaman	Sangat Inovatif	61,724
33	Kota Palembang	Sangat Inovatif	61,28

Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah

Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebanyak 542 Daerah, kecuali kota administratif provinsi DKI Jakarta. Namun, pada tahun 2024, terdapat penambahan lokasi perhitungan inovasi daerah, yaitu 4

Daerah Otonomi Baru (Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah). Perhitungan persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi, dihitung dengan formulasi berikut :

$$\begin{aligned}
 & \textit{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi} \\
 & = \frac{\textit{Jumlah Daerah dengan Kategori Sangat Inovatif dan Inovatif}}{\textit{Jumlah Daerah}} \times 100\% \\
 & = \frac{420}{546} \times 100\% = \mathbf{76,92\%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \textit{Realisasi Capaian} \\
 & = \frac{\textit{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}}{\textit{Persentase Target Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}} \times 100\% \\
 & = \frac{76,92\%}{36\%} \times 100\% = \mathbf{213,67\%}
 \end{aligned}$$

Adapun rekapitulasi indeks inovasi daerah tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.71 Rekapitulasi Jumlah Daerah pada tiap Kategori indeks Inovasi Daerah

	Provinsi	Kabupaten	Kota
Sangat Inovatif	10	69	33
Inovatif	21	234	53
Kurang Inovatif	7	95	7
Tidak Dapat Dinilai	0	17	0
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>415</b>	<b>93</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>546</b>	

Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah, Januari 2025

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase realisasi kinerja daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi sebesar 76,92%. Hasil dan dampak positif dari tercapainya inovasi tinggi di daerah adalah mendorong penerapan good governance melalui peningkatan digitalisasi layanan masyarakat pada sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, penanggulangan bencana, dan pengaduan masyarakat. Inovasi Daerah Tahun 2024 didominasi inovasi terkait Urusan Kesehatan dan Pendidikan. Berikut contoh bentuk inovasi dalam mengatasi stunting, inovasi bidang kesehatan, pendidikan, dan inflasi:

#### Inovasi Stunting

1. Sekolah Asuh Stunting Kab. Banyuwangi
2. Si Besti (Situbondo Bebas Stunting) Kab. Situbondo
3. Dapur Tanggap Gercep Besti (Dapur Gerakan Cepat Bebas Stunting Terintegrasi) Kota Palembang

#### Inovasi Stunting

1. Lake Acil (Layanan Kesehatan Akses Terpencil) Kab. Balangan
2. Sahabat Paru (Satu Hari Diagnosa TBC Tuntas di RS Paru) Prov. Sumatera Barat
3. Dottorota (Aplikasi Pengembangan Telemedicine Homecare)" Kota Makassar

#### Inovasi Pendidikan

1. SAS (Siswa Asuh Sebaya) Bergerak Berbagi Kab. Banyuwangi
2. Adi Pintar (Asesmen Diagnostik dan Penilaian Terpadu Hasil Belajar) Kota Mojokerto
3. Demi Sepeda Bagus (Sebuah model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui PKBM, inklusi sosial, pendidikan keluarga, kolaborasi stakeholder dan pendidikan berdiferensiasi di Kabupaten Deli Serdang) Kab. Deli Serdang

#### Inovasi Inflasi

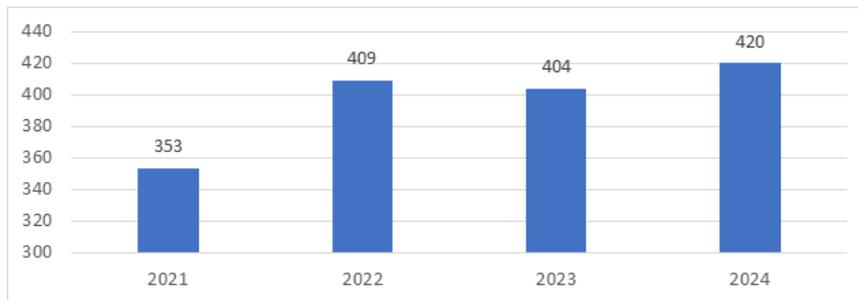
1. Julak Wasi (Ojek Jual Sayur/Sembako/Ikan Kawal Inflasi) Kab. Tabalong
2. Wartek (Warung Tekan Inflasi) Kota Madiun
3. Siharpa (Sistem Informasi Harga Pangan) Kab. Sleman

Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah, Januari 2025

Tabel 3.72 Sampel Inovasi Daerah

	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>Target</b>	18%	24%	30%
<b>Realisasi</b>	65,13%	75,46%	74,53%
	353 Daerah	409 Daerah	404 Daerah

Grafik 3.29 Jumlah Daerah yang Mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi Tahun 2021-2024



Capaian kinerja sejak Tahun 2021 dilakukan pengukuran pertama kali hingga Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun pertama dilakukan pengukuran didapatkan hasil sebanyak 353 daerah berpredikat inovasi tinggi atau 65,13% dari 542 daerah. Pada tahun 2022, sebanyak 409 daerah berpredikat tinggi atau 75,46% dari 542 daerah. Dan, di Tahun 2024, telah tercapai 420 daerah berpredikat tinggi atau 76,92% dari 546 daerah.

Indikator persentase daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi juga termuat dalam RPJMN 2020-2024 dengan target Tahun 2024 sebesar 75% sehingga target tersebut terlampaui dengan angka realisasi sebesar 76,92. Sedangkan dalam RKP Tahun 2024, terdapat Prioritas Nasional yang juga mendukung pelaksanaan kinerja IKU ini. Kemendagri melalui BSKDN melakukan pembinaan inovasi daerah terutama bagi daerah yang mendapatkan kriteria "Kurang Inovatif" dan "Tidak Dapat Dinilai" berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah. RO PN yang mendukung pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) dengan capaian 177 Daerah (Prov/Kab/Kot) dari target 191 Daerah.
2. Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L dengan capaian 38 Daerah (Prov/Kab/Kot) dari target 34 Daerah.
3. Penerapan Pilot Project Inovasi Daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di

daerah 3T dengan capaian 5 Daerah (Prov/ Kab/Kot) dari target 5 Daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini didukung dengan adanya:

1. Pelaksanaan Pembinaan Inovasi Daerah kepada pemerintah daerah berpredikat kurang inovatif dan tidak dapat dinilai yang dilakukan di 5 (lima) lokasi:
2. (Makassar, Bali, Medan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua)
3. Pembentukan Group Whatsapp Fasilitator Inovasi untuk mempermudah komunikasi, koordinasi, dan konsultasi;
4. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Tuxedovation (Tutorial Exhibition Display of Innovation) sebagai upaya untuk mendiseminasikan praktek-praktek baik inovasi daerah;
5. Melibatkan BPSDM Kemendagri dalam hal penguatan kompetensi inovasi daerah melalui diklat dan proyek perubahan; dan
6. Penguatan kolaborasi lintas K/L dalam hal pembinaan inovasi daerah, salah satunya termanifestasikan dalam Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPP Nas)
7. Terbentuknya kesepakatan bersama lintas K/L antara BSKDN Kemendagri, Kedeputan Pelayanan Publik Kemenpan-RB, dan Kedeputan Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administasi Negara (KKIAN) LAN-RI.

Kemendagri melalui BSKD telah melakukan serangkaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Melakukan pembinaan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan terkait pengembangan potensi-potensi inovasi di daerah dan teknis dalam pengoperasian aplikasi Indeks Inovasi Daerah, terutama daerah yang berpredikat "Kurang Inovatif" dan "Tidak Dapat Dinilai".
2. Telah dilaksanakan Sosialisasi Penilaian Inovasi Daerah dengan tujuan meningkatkan motivasi daerah dalam melakukan inovasi.
3. Melakukan bimbingan teknis penginputan aplikasi indeks inovasi daerah berdasarkan hasil peta pembinaan Inovasi Daerah sehingga daerah yang semula dengan kategori tidak dapat dinilai menjadi dapat dinilai.
4. Penguatan JIPPNas dengan berkolaborasi bersama K/L yang terlibat dalam Indeks Inovasi Daerah dalam pembinaan peningkatan inovasi daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Kendala Infrastruktur dalam hal kondisi jaringan dan keterbatasan sarpras (jaringan internet, komputer, SDM) di wilayah 3T mengakibatkan koordinasi dan komunikasi terkait pelaporan inovasi daerah terkendala.
2. Disparitas pelaporan inovasi daerah yang disebabkan belum maksimalnya proses pembudayaan inovasi pada masing-masing pemerintah daerah. Disparitas disebabkan karena masing-masing pemerintah daerah tidak sama dalam hal motivasi dan sudut pandang inovasi daerah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan asistensi pelaporan inovasi daerah secara intensif, baik secara kegiatan formal (Bimbingan Teknis, Pengayaan, dan Sosialisasi) dan kegiatan informal (Coaching secara personal melalui WA, Google Meet, Zoom, dan kunjungan langsung ke BSKDN).
2. Komunikasi intensif dengan melibatkan pemerintah provinsi sebagai penghubung komunikasi dengan pemerintah daerah apabila dijumpai kendala pelaporan inovasi daerah, terutama wilayah yang mengalami kendala infrastruktur dan sarana prasarana.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia melalui pendekatan yang lebih efektif dan efisien.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Penghematan belanja perjalanan dinas dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan melalui pembatasan personil dan perluasan jumlah daerah kepada setiap tim yang ditugaskan.
2. Melakukan efisiensi waktu proses validasi data inovasi daerah oleh perguruan tinggi dengan pendekatan cross-checking dalam waktu yang simultan.
3. Pelibatan mitra kerjasama yang dapat berbagi peran dalam pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah (Innovative Government Award).





## Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah



Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah tahun 2024 mencapai 100% dari target yang ditetapkan dengan predikat Sangat Baik. Capaian ini mencerminkan efektivitas peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kepatuhan di lingkungan pemerintah daerah. Dengan komitmen yang kuat, Kemendagri terus mendorong pengawasan yang lebih optimal demi mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan berkinerja tinggi

T = Target R = Realisasi

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah merupakan sarana dalam menilai kinerja pengawasan pemerintah daerah dan membantu pemerintah dalam mengatur efektivitas dan efisiensi proses pengawasan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan hal utama yang perlu diterapkan dalam pemerintahan. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pengawasan pemerintah daerah dan membantu pemerintah dalam mengukur efektivitas dan efisiensi proses pengawasan yang mendukung salah satu sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

dilaksanakan dalam bentuk pengawasan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal dan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengawasan Teknis oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pengawasan kepala daerah terhadap pemerintah daerah.

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah ini dihitung dengan memperhatikan presentase hasil pengawasan umum, presentase hasil pengawasan teknis, dan persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan. Adapun persentase pembobotan perhitungan sebagai berikut:

1. Persentase hasil pengawasan umum (bobot 40%);
2. Persentase hasil pengawasan teknis (bobot 30%); dan
3. Persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan (bobot 30%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.



Target indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Tahun 2024 adalah sebesar 100 dan telah tercapai nilai sebesar 100 atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pengawasan pada pemerintahan daerah dengan baik.

1. Nilai hasil pengawasan umum Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merujuk pada kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan, memastikan tata kelola yang baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka menjamin pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan optimal, salah satu parameter pengukuran yang harus dinilai adalah persentase penyelenggaraan pengawasan umum pada pemerintahan daerah. Angka ini diukur dari tingkat kepatuhan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan Umum yang dilakukan Inspektorat Jenderal masih belum mencakup

semua provinsi, terdapat 4 Provinsi yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang terdiri dari Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya yang belum masuk dalam penilaian. Hal ini dikarenakan DOB masih belum memiliki organisasi perangkat daerah yang lengkap dan masih dalam pembinaan pemerintah pusat selama tiga tahun setelah diresmikan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga penilaian yang sama dengan daerah lain masih belum dapat dilaksanakan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap 34 daerah provinsi dengan total temuan sebanyak 455 temuan dan 869 rekomendasi. Dari total temuan dan rekomendasi tersebut, sampai dengan saat ini telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 819 rekomendasi, sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai sebanyak 49 rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator bahwa seluruh pengawasan umum telah dilaksanakan di 34 daerah provinsi oleh Inspektorat Jenderal sehingga mencapai nilai 100 dengan bobot penilaian 40%, atau dengan hasil indeks sebesar 40. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:



$$\begin{aligned} \text{Nilai Pengawasan Umum} &= \frac{\text{Jumlah daerah yang dilakukan pengawasan}}{\text{jumlah target daerah yang dilakukan pengawasan}} \times 100 \\ &= \frac{34 \text{ daerah}}{34 \text{ daerah}} \times 100 = 100 \end{aligned}$$

2. Nilai hasil pengawasan teknis  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran sebagai koordinator kementerian dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal sebagai koordinator memiliki tugas salah satunya memantau pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Nilai hasil pengawasan teknis dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pengawasan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sepanjang tahun 2024, seluruh

Kementerian/Lembaga telah melaksanakan pengawasan teknis. Fungsi pengawasan teknis terhadap urusan pemerintah di daerah pada Tahun 2024 juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil pengawasan teknis telah memenuhi kriteria bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga telah melakukan pengawasan teknis terhadap urusan pemerintahan di daerah sehingga mencapai nilai 100 dengan bobot penilaian 30%, atau dengan hasil indeks sebesar 30. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Pengawasan Teknis} &= \frac{\text{Jumlah daerah yang dilakukan pengawasan teknis}}{\text{jumlah target daerah yang dilakukan pengawasan}} \times 100 \\ &= \frac{34 \text{ daerah}}{34 \text{ daerah}} \times 100 = 100 \end{aligned}$$

3. Persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan  
 Persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase ini menggambarkan hubungan antara jumlah penyimpangan yang terdeteksi dan jumlah keseluruhan kegiatan atau proses yang diawasi, serta seberapa banyak tindak lanjut yang dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan tersebut. Adapun nilai hasil pengawasan dalam rangka pencegahan penyimpangan yang diolah dalam Laporan Kinerja ini merupakan data yang berasal dari data Monitoring Center for Prevention (MCP). Data dimaksud dijabarkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.73 Daftar Kota dengan Predikat Sangat Inovatif

Provinsi	Nilai dalam %
Nanggroe Aceh Darussalam	90
Sumatera Utara	80
Sumatera Selatan	100
Sumatera Barat	100
Bengkulu	100
Riau	68
Kepulauan Riau	100
Jambi	59
Lampung	88
Bangka Belitung	100
Kalimantan Barat	100
Kalimantan Timur	66
Kalimantan Selatan	
Kalimantan Tengah	100
Kalimantan Utara	0
Banten	100
DKI Jakarta	70
Jawa Barat	100
Jawa Tengah	100
Daerah Istimewa Yogyakarta	90
Jawa Timur	82
Bali	100
Nusa Tenggara Timur	70
Nusa Tenggara Barat	100
Gorontalo	58
Sulawesi Barat	100
Sulawesi Tengah	50
Sulawesi Utara	68
Sulawesi Tenggara	40
Sulawesi Selatan	80
Maluku Utara	86
Maluku	40
Papua Barat	20
Papua	80
<b>Total</b>	<b>2685</b>
<b>Rata-rata nilai</b>	<b>78,970</b>

Data capaian kepatuhan ini didapatkan dari sumber data Monitoring Center for Prevention (MCP), pengukuran yang dilakukan dengan berkolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada area intervensi pengawasan APIP, dimana rata-rata persentase hasil pengawasan dalam rangka pencegahan

penyimpangan sebesar 78,97. Pada tahun 2024 Inspektorat Jenderal menetapkan target nilai sebesar 75 sehingga berdasarkan hasil perhitungan nilai ini telah mencapai target dengan capaian 100% sehingga mendapatkan nilai 100. Dengan demikian bobot penilaian 30% atau dengan hasil indeks sebesar 30.

$$\begin{aligned} \text{Nilai pengawasan penyimpangan} &= \frac{\text{Hasil rata - rata nilai 2024}}{\text{target nilai 2024}} \times 100 \\ &= \frac{78,97}{75} \times 100 = 105 \approx 100 \end{aligned}$$

Analisis penyebab keberhasilan yang menunjang pencapaian Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 indeks ini mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal terus konsisten dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah terutama pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan, diantaranya:

1. Penyusunan PKPT 2024 berbasis risiko yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pengawasan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan target waktu dan anggaran.
2. Penggunaan aplikasi siwasiat yang bertujuan untuk memantau proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. Aspek Anggaran: Jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 8,683,411,000,- telah terealisasi sebesar Rp 8,682,839,005- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan

sejalan dan efektif serta optimal digunakan.

2. Aspek SDM dan Teknologi: Adanya pemanfaatan aplikasi Siwasiat untuk memfasilitasi kordinasi dengan K/L teknis terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan, serta Rapat dan koordinasi dengan pihak yang berkepentingan dilaksanakan melalui daring melalui zoom meeting sehingga lebih efisien waktu dan anggaran.

Adapun Program/Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan terus mendorong pelaksanaan pengawasan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Utama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terhadap urusan teknis sesuai dengan tanggungjawab masing-masing melalui forum sosialisasi dan koordinasi perencanaan pengawasan setiap tahun.
2. Menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Melakukan konsolidasi dan persamaan persepsi terkait fungsi pengawasan secara nasional, melalui Rapat Koordinasi Pengawasan sebagai agenda konsolidasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

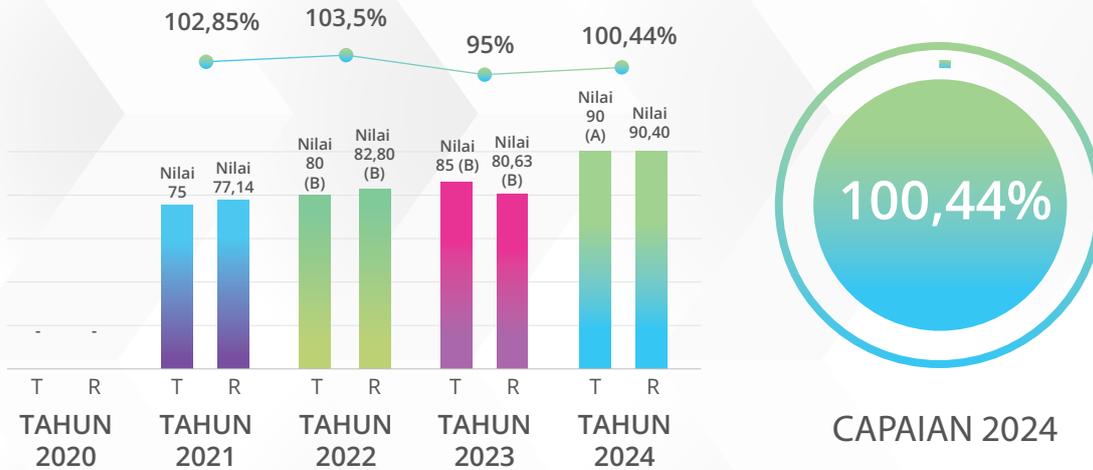
1. Masih terdapat inkonsistensi jadwal pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Terdapat keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Mendorong konsistensi pelaksanaan pengawasan umum serta fokus dan sasarannya berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara desk melalui metode daring.



## Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah



Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah tahun 2024 mencapai Nilai 90,40 dengan predikat Baik, mencerminkan peningkatan efektivitas dalam menjalankan fungsi pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan. Indeks ini menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah serta menentukan langkah strategis untuk penguatan kapasitas pengawasan di tingkat daerah. Dengan capaian ini, Kemendagri terus berkomitmen dalam mendorong akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik

T = Target R = Realisasi

Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah digunakan untuk mengukur dan menilai sejauh mana Inspektorat Daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kapasitas Inspektorat Daerah mengacu pada kemampuan atau kinerja yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap kegiatan pemerintahan ditingkat daerah. Kapasitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah. Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah menjadi penting agar inspektorat dapat menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan transparan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah ini dihitung dengan memperhatikan kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), kecukupan anggaran pengawasan yang dialokasikan oleh Inspektorat Daerah, level kapabilitas APIP suatu daerah, persentase

pengawasan dugaan penyimpangan yang terjadi di daerah dan juga tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu. Dengan adanya evaluasi dan peningkatan kapasitas ini, diharapkan Inspektorat Daerah dapat memainkan peran yang lebih maksimal dalam memastikan bahwa kegiatan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dapat meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2024 telah tercapai nilai sebesar dari 90,40 target sebesar 90. Nilai indeks ini menggambarkan kondisi bahwa inspektorat daerah telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya dengan baik dan telah mencapai tujuan yang sudah ditargetkan dalam memberikan pembinaan kepada Inspektorat Daerah. Parameter penilaian IKPI Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah dijabarkan dalam kriteria berikut:

Tabel 3.74 Kriteria dan Rentang Nilai Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

Target Nilai	Kriteria IKP
90-100	A (sangat baik)
70-89	B (baik)
60-69	C (cukup)
<60	D (kurang)

1. Kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (bobot 15%);
2. Kecukupan anggaran pengawasan (15%);
3. Level Kapabilitas APIP (bobot 30%);
4. Persentase pengawasan dugaan penyimpangan (bobot 20%); dan
5. Persentase kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu (bobot 20%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai subindikator.

1. Kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Kecukupan kuantitas mengacu pada jumlah sumber daya manusia yang tersedia dan dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi atau program dengan efektif. Dalam Inspektorat Daerah kecukupan kuantitas ini merujuk pada jumlah pegawai atau personel yang dimiliki oleh inspektorat

daerah yang berperan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan bisa dilakukan secara lebih menyeluruh dan efektif apabila terdapat kecukupan SDM, namun apabila jumlah SDM tidak mencukupi, maka pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah bisa menjadi terbengkalai atau kurang optimal.

Kompetensi SDM merujuk pada kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh para pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Kompetensi SDM menjadi sangat penting karena pengawasan yang baik memerlukan keahlian khusus, termasuk dalam hal audit, investigasi, analisis data, dan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan pemerintahan. Kompetensi yang rendah dapat menghambat efektivitas pengawasan dan pemeriksaan, karena tugas-tugas pengawasan membutuhkan keahlian yang tidak hanya teknis tetapi juga kemampuan untuk memahami konteks kebijakan dan regulasi. Dengan demikian, kecukupan kuantitas dan kompetensi SDM merupakan faktor krusial pengawasan yang lebih baik dan efisien dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Adapun nilai kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang diolah dalam Laporan Kinerja ini merupakan data yang berasal dari data Monitoring Center for Prevention (MCP). Data dimaksud dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.75 Nilai Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM Inspektorat Daerah

No	Provinsi	Level Kapabilitas APIP
1	Nanggroe Aceh Darussalam	100
2	Sumatera Utara	42
3	Sumatera Selatan	72
4	Sumatera Barat	80
5	Bengkulu	80
6	Riau	99
7	Kepulauan Riau	99
8	Jambi	60
9	Lampung	58
10	Bangka Belitung	27
11	Kalimantan Barat	95
12	Kalimantan Timur	20

No	Provinsi	Level Kapabilitas APIP
13	Kalimantan Selatan	23
14	Kalimantan Tengah	60
15	Kalimantan Utara	22
16	Banten	75
17	DKI Jakarta	100
18	Jawa Barat	87
19	Jawa Tengah	55
20	Daerah Istimewa Yogyakarta	14
21	Jawa Timur	64
22	Bali	85
23	Nusa Tenggara Timur	32
24	Nusa Tenggara Barat	50
25	Gorontalo	40
26	Sulawesi Barat	23
27	Sulawesi Tengah	48
28	Sulawesi Utara	69
29	Sulawesi Tenggara	23
30	Sulawesi Selatan	45
31	Maluku Utara	54
32	Maluku	30
33	Papua Barat	38
34	Papua	33
<b>Total</b>		<b>1.902</b>
<b>Rata-rata nilai</b>		<b>55.94</b>

Berdasarkan data di atas, kecukupan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, mencapai nilai 55,94 dengan bobot penilaian 15%, atau dengan hasil indeks 8.39. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kecukupan kuantitas dan kompetensi SDM} &= \frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Pemda}} \\ &= \frac{1.902}{34} = 55,94 \end{aligned}$$

2. Kecukupan anggaran pengawasan.  
Kecukupan anggaran pengawasan Inspektorat Daerah adalah hal yang sangat vital untuk memastikan bahwa Inspektorat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif, efisien, dan transparan.

Kecukupan Anggaran Pengawasan Inspektorat Daerah merujuk pada sejauh mana dana yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Daerah cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, audit, dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah. Anggaran yang dialokasikan harus sesuai dengan prioritas tugas yang ada, misalnya untuk pengawasan terhadap program-program prioritas pemerintah daerah atau pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang besar, seperti belanja daerah atau dana-dana khusus. Inspektorat Daerah juga memerlukan fleksibilitas anggaran untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti investigasi terhadap dugaan penyimpangan atau korupsi

yang memerlukan sumber daya tambahan. Anggaran yang cukup memungkinkan Inspektorat Daerah untuk melakukan kegiatan pengawasan secara menyeluruh dan mendalam. Tanpa kecukupan anggaran, pengawasan akan terbatas dan mungkin hanya dapat dilakukan secara terbatas atau selektif, yang dapat berisiko mengabaikan area-area yang rentan terhadap penyimpangan.

Adapun nilai kecukupan anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah yang diolah dalam Laporan Kinerja ini merupakan data yang berasal dari data Monitoring Center for Prevention (MCP). Data dimaksud dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.76 Nilai Kecukupan Anggaran Pengawasan pada Inspektorat Daerah

No	Provinsi	Persentase pengawasan dugaan penyimpangan
1	Nanggroe Aceh Darussalam	90
2	Sumatera Utara	95
3	Sumatera Selatan	77
4	Sumatera Barat	77
5	Bengkulu	96
6	Riau	86
7	Kepulauan Riau	100
8	Jambi	90
9	Lampung	100
10	Bangka Belitung	75
11	Kalimantan Barat	77
12	Kalimantan Timur	100
13	Kalimantan Selatan	40
14	Kalimantan Tengah	77
15	Kalimantan Utara	88
16	Banten	66
17	DKI Jakarta	100
18	Jawa Barat	90
19	Jawa Tengah	72
20	Daerah Istimewa Yogyakarta	74
21	Jawa Timur	80
22	Bali	88
23	Nusa Tenggara Timur	76
24	Nusa Tenggara Barat	63
25	Gorontalo	62
26	Sulawesi Barat	62
27	Sulawesi Tengah	84
28	Sulawesi Utara	59
29	Sulawesi Tenggara	70
30	Sulawesi Selatan	100

No	Provinsi	Persentase pengawasan dugaan penyimpangan
31	Maluku Utara	100
32	Maluku	75
33	Papua Barat	90
34	Papua	100
<b>Total</b>		<b>2.779</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>81.73</b>

Berdasarkan data di atas, kecukupan anggaran pengawasan sesuai parameter penghitungan capaian indikator, mencapai nilai 81,73 dengan bobot penilaian 15%, atau dengan hasil indeks 12,26. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kecukupan anggaran pengawasan} &= \frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Pemda}} \\ &= \frac{2.779}{34} = 81,73 \end{aligned}$$

### 3. Level Kapabilitas APIP

Level Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) merujuk pada sejauh mana Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melakukan tugas pengawasan dan audit dalam rangka memastikan transparansi,

akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kebijakan publik. Penilaian terhadap level kapabilitas ini penting karena mencerminkan kualitas dan efektivitas pengawasan yang dapat dilakukan oleh APIP dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kapabilitas APIP dinilai menggunakan model maturitas yang mengukur perkembangan kapasitas dan kapabilitasnya. Model ini mengklasifikasikan tingkat kematangan dalam beberapa level, mulai dari level yang paling dasar hingga level yang paling maju. Model ini menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh APIP untuk mencapai level kapabilitas yang optimal.

Adapun level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.77 Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah

No	Provinsi	Kecukupan anggaran pengawasan
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Level 3
2	Sumatera Utara	Level 3
3	Sumatera Selatan	Level 3
4	Sumatera Barat	Level 3
5	Bengkulu	Level 3
6	Riau	Level 3
7	Kepulauan Riau	Level 3
8	Jambi	Level 3
9	Lampung	Level 3
10	Bangka Belitung	Level 3
11	Kalimantan Barat	Level 3
12	Kalimantan Timur	Level 3
13	Kalimantan Selatan	Level 3
14	Kalimantan Tengah	Level 3

No	Provinsi	Kecukupan anggaran pengawasan
15	Kalimantan Utara	Level 3
16	Banten	Level 3
17	DKI Jakarta	Level 3
18	Jawa Barat	Level 3
19	Jawa Tengah	Level 3
20	Daerah Istimewa Yogyakarta	Level 3
21	Jawa Timur	Level 3
22	Bali	Level 3
23	Nusa Tenggara Timur	Level 3
24	Nusa Tenggara Barat	Level 3
25	Gorontalo	Level 3
26	Sulawesi Barat	Level 3
27	Sulawesi Tengah	Level 3
28	Sulawesi Utara	Level 3
29	Sulawesi Tenggara	Level 3
30	Sulawesi Selatan	Level 3
31	Maluku Utara	Level 3
32	Maluku	Level 3
33	Papua Barat	Level 3
34	Papua	Level 3

Berdasarkan data di atas, didapati bahwa semua Inspektorat Provinsi sudah berada pada Kapabilitas APIP level 3 sesuai dengan target 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, level kapabilitas APIP sesuai parameter penghitungan capaian indikator dengan bobot penilaian 30%, atau dengan hasil indeks 30. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Level Kapabilitas APIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai}}{\text{Target Nilai}} = \frac{\text{Level 3}}{\text{Level 3}} \times 100 = 100$$

4. Persentase pengawasan dugaan penyimpangan.

Pengawasan terhadap dugaan penyimpangan sangat penting untuk mendeteksi adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau pemborosan anggaran, yang dapat merusak tata kelola pemerintahan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penyimpangan ini dapat berupa pelanggaran terhadap hukum,

prosedur, etika, atau kebijakan yang dapat merugikan keuangan negara, masyarakat, atau integritas sistem pemerintahan itu sendiri. Pengawasan terhadap dugaan penyimpangan adalah bagian penting dari upaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Melalui proses yang transparan, objektif, dan berbasis data, Inspektorat Daerah dapat membantu mencegah dan menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan atau program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku.

Adapun nilai persentase pengawasan dugaan penyimpangan pada Inspektorat Daerah yang diolah dalam Laporan Kinerja ini merupakan data yang berasal dari data Monitoring Center for Prevention (MCP). Data dimaksud dijabarkan dalam tabel berikut:

Adapun level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.78 Nilai Persentase Pengawasan Dugaan Penyimpangan pada Inspektorat Daerah

No	Provinsi	Persentase pengawasan dugaan penyimpangan
1	Nanggroe Aceh Darussalam	100
2	Sumatera Utara	100
3	Sumatera Selatan	100
4	Sumatera Barat	100
5	Bengkulu	100
6	Riau	100
7	Kepulauan Riau	100
8	Jambi	100
9	Lampung	100
10	Bangka Belitung	100
11	Kalimantan Barat	100
12	Kalimantan Timur	100
13	Kalimantan Selatan	100
14	Kalimantan Tengah	100
15	Kalimantan Utara	100
16	Banten	100
17	DKI Jakarta	100
18	Jawa Barat	100
19	Jawa Tengah	100
20	Daerah Istimewa Yogyakarta	100
21	Jawa Timur	100
22	Bali	100
23	Nusa Tenggara Timur	100
24	Nusa Tenggara Barat	100
25	Gorontalo	100
26	Sulawesi Barat	100
27	Sulawesi Tengah	100
28	Sulawesi Utara	100
29	Sulawesi Tenggara	100
30	Sulawesi Selatan	100
31	Maluku Utara	100
32	Maluku	88
33	Papua Barat	85
34	Papua	85
<b>Total</b>		<b>3.358</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>98.76</b>

Berdasarkan data di atas, persentase pengawasan dugaan penyimpangan sesuai parameter penghitungan capaian indikator, mencapai nilai 98,76 dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 19,75. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pengawasan Dugaan Penyimpangan} &= \frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Pemda}} \\ &= \frac{3.358}{34} = 98,76 \end{aligned}$$

5. Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu. Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi untuk pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peraturan ini mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk pengangkatan pejabat seperti Inspektur dan Inspektur Pembantu, dalam hal ini, konsultasi atau koordinasi dengan instansi yang berwenang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan dilakukan dengan baik.

Adapun nilai persentase kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu diolah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari data dimaksud diketahui sudah semua Inspektorat Provinsi mematuhi dalam melakukan konsultasi sebelum pengangkatan Inspektur dan Inspektur Pembantu. Sesuai parameter penghitungan capaian dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 20.

Mayoritas sub indikator dalam indeks ini juga telah terakomodir dalam instrumen pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang merupakan program kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pengawasan di daerah.

Capaian Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara baik dalam meningkatkan kualitas dari Inspektorat Daerah.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam

mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah, sebagai berikut:

1. Aspek Anggaran: jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp3.265.052.000,- telah terealisasi sebesar Rp3.264.872.665,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.
2. Aspek SDM dan Teknologi: Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah dan layanan konsultasi dengan daerah secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

Adapun Program/Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan terus mendorong pelaksanaan kolaborasi penguatan inspektorat daerah dengan berbagai stakeholders lainnya, diantaranya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPK.
2. Menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal Kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan.
4. Menyusun dan menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK RI,

dan Kepala BPKP tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

5. Menyusun Rencana Aksi Bersama KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP terkait Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Tahun 2024 s.d. 2025.
6. Melaksanakan kegiatan webinar dengan topik pengawasan yang diikuti oleh Inspektorat Daerah seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- a. Terdapat pemerintah daerah yang belum mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belum maksimalnya implementasi nota kesepahaman antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat di daerah.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi untuk mendorong pemenuhan pengalokasian anggaran pengawasan Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Berkoordinasi dengan BPKP dalam penyusunan strategi pemenuhan level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai untuk mendorong implementasi nota kesepahaman antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat di daerah.







# SASARAN 8

## Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki tanggung jawab mendasar memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia baik dalam maupun luar negeri. Hal ini mendorong pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya landasan operasional penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan turunannya.

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta perolehan informasi mengenai data kependudukan atas dirinya maupun keluarganya untuk semua keperluan. Hal ini dikarenakan dokumen dan identitas kependudukan sangat penting bagi kedudukan hukum seseorang dalam segala aspek baik hubungan keperdataan, hubungan pidana dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, ketersediaan

database dan pendataan kependudukan yang valid menjadi pelayanan dan aspek yang sangat dibutuhkan keberadaannya bagi masyarakat. Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid akan menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan yang akurat untuk semua keperluan. Ketika setiap penduduk terdaftar secara resmi dalam sistem, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan identitas resmi, dokumen-dokumen kependudukan, serta hak-hak hukum dan perdata lainnya yang mendasar. Keberadaan layanan ini tidak hanya sekedar mencatat keberadaan individu, tetapi juga menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak krusial dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau akta kelahiran bukan sekedar lembaran kertas, melainkan kunci akses bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, hak legal, dan layanan publik lainnya. Salah satu langkah percepatan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam hal pemanfaatan dan akses data kependudukan. Dengan ketersediaan data yang baik dari layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang lebih inovatif serta sesuai perkembangan teknologi, Kementerian/ lembaga dapat menjangkau populasi secara luas untuk keperluan nasional, dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

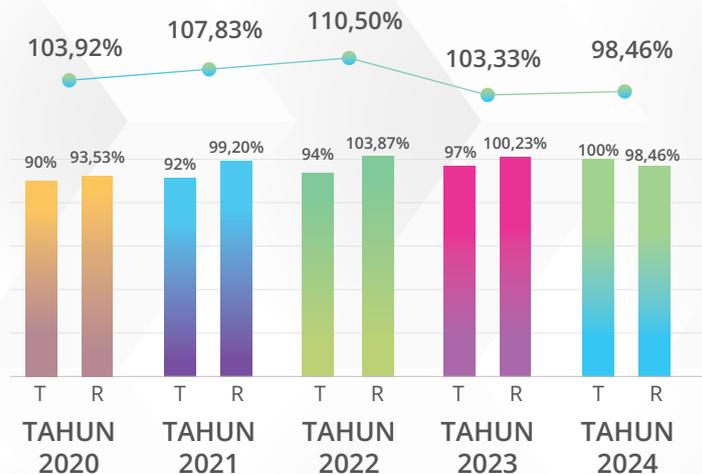
Capaian kinerja sasaran strategis “Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan” diperoleh sebesar 109,23%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil. Hal ini didukung oleh capaian kinerja 1 (satu) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil, dan 1 (satu) indikator dengan predikat tinggi atau kategori berhasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.79 Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	98,46% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	98,46%	Tinggi/Berhasil
2	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.500 Lembaga Pengguna	4.753 Lembaga Pengguna	120%	Sangat Tinggi/Sangat Berhasil
<b>Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>109,23%</b>	<b>Sangat Tinggi/Sangat Berhasil</b>



### Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil



**CAPAIAN 2024**

Setiap penduduk mempunyai hak yang sama dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan dan terjaminnya hak-hak keperdataan dalam aspek kependudukannya, sehingga memperjelas kedudukan hukum setiap orang dalam segala aspek sejak lahir sampai meninggal. Layanan administrasi kependudukan yang menjadi prioritas utama meliputi Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Kematian

T = Target

R = Realisasi

Penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan hal penting karena menjadi dasar identifikasi, pembuktian status, serta hak-hak warga negara. Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mencerminkan keberhasilan pemerintah atau lembaga terkait dalam melibatkan dan mendaftarkan penduduknya pada sistem administrasi penduduk.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, telah melakukan berbagai langkah besar dan strategis dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan menyelenggarakan peningkatan layanan administrasi kependudukan. Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan terhadap Data Perseorangan dan Data Agregat. Berdasarkan Pasal 59 Ayat

(1) Undang Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, akta pencatatan sipil (kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta pengakuan anak). Pasal 59 Ayat (2) surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan kematian, surat keterangan pengangkatan anak, surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia, surat keterangan pengganti tanda identitas, surat keterangan pencatatan sipil. Dari 23 dokumen kependudukan diatas terdapat empat dokumen kependudukan yang sudah tidak diterbitkan yakni surat keterangan pindah datang, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan kelahiran dan surat keterangan kematian.

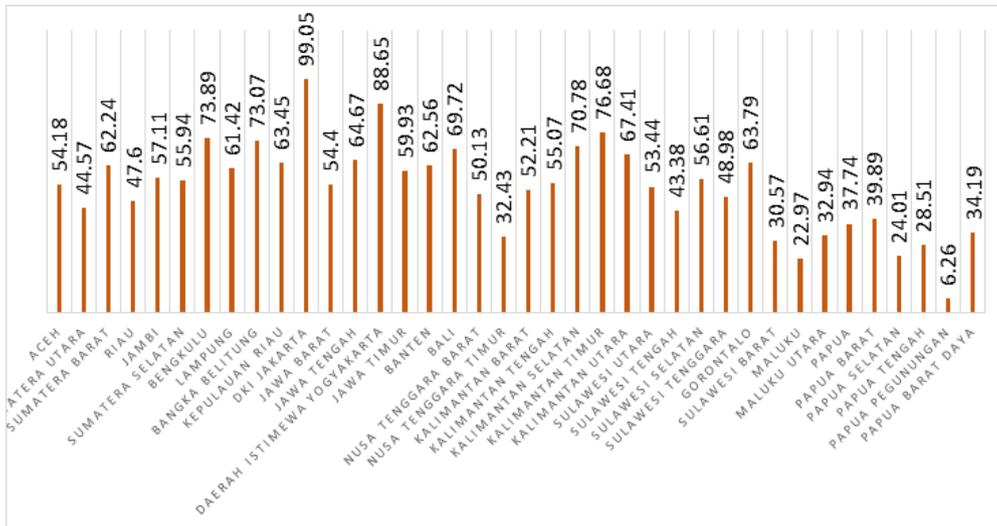
Surat keterangan pindah datang dan surat keterangan datang dari luar negeri tidak lagi diterbitkan karena fungsinya sudah dijadikan satu dalam surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah luar negeri. Untuk surat keterangan kelahiran dan surat keterangan kematian sudah tidak lagi diterbitkan karena sudah tidak menjadi kewenangan Ditjen Dukcapil dan instansi pelaksana. Terdapat penambahan satu dokumen kependudukan yakni Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Sehingga total dokumen kependudukan saat ini yang diterbitkan menjadi 20 dokumen kependudukan.

Dalam laporan ini dituangkan 6 dari 20 jenis dokumen tersebut yang menjadi layanan

prioritas nasional dan sekaligus menjadi batasan pengukuran kinerja indikator yaitu Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penerbitan Akta kelahiran, Penerbitan Akta Kematian, Penerbitan Akta Perkawinan, dan Penerbitan Akta Perceraian. Adapun target dan realisasi dari 6 dokumen kependudukan di atas yang diperoleh dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) cut off tanggal 30 Desember 2024, antara lain:

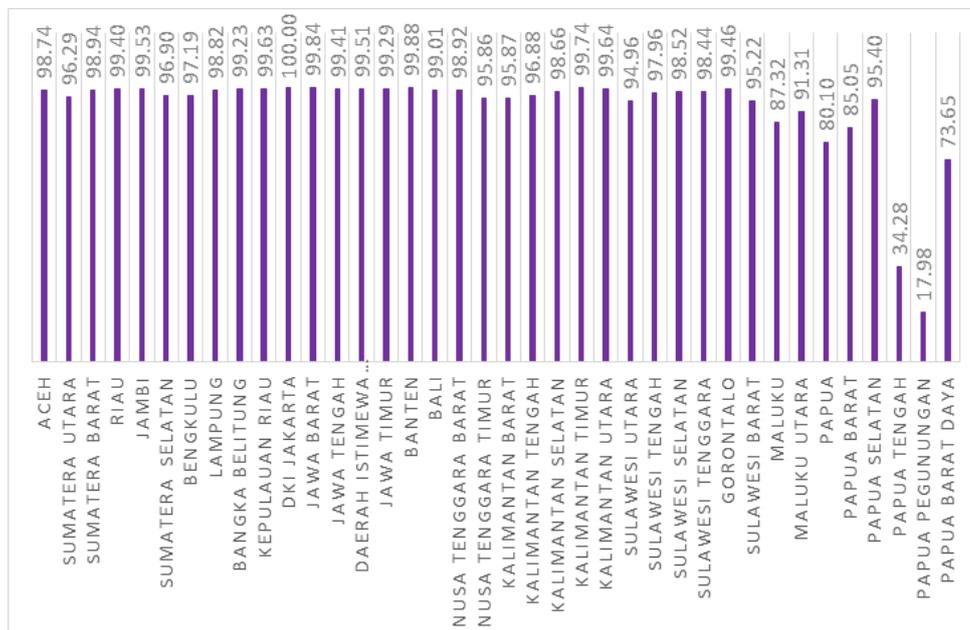
1. Penerbitan KIA telah mencapai 43.786.715 jiwa atau 58,19% dari total jumlah wajib KIA secara dinamis 75.245.173. Berdasarkan target Renstra tahun 2024 sebesar 60% dari total jumlah anak, maka capaian penerbitan KIA sebesar 96,98%.

Grifik 3.30 Penerbitan Kartu Identitas Anak tiap Provinsi



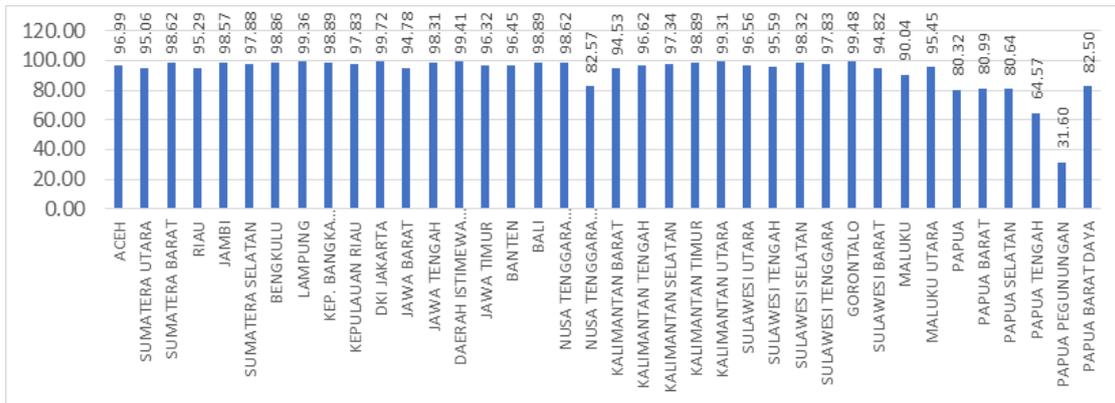
2. Perekaman KTP-el telah mencapai 203.798.952 jiwa dengan persentase capaian sebesar 97,80 % dari total wajib KTP-el dinamis 208.390.574 jiwa.

Grifik 3.31 Perekaman KTP tiap Provinsi



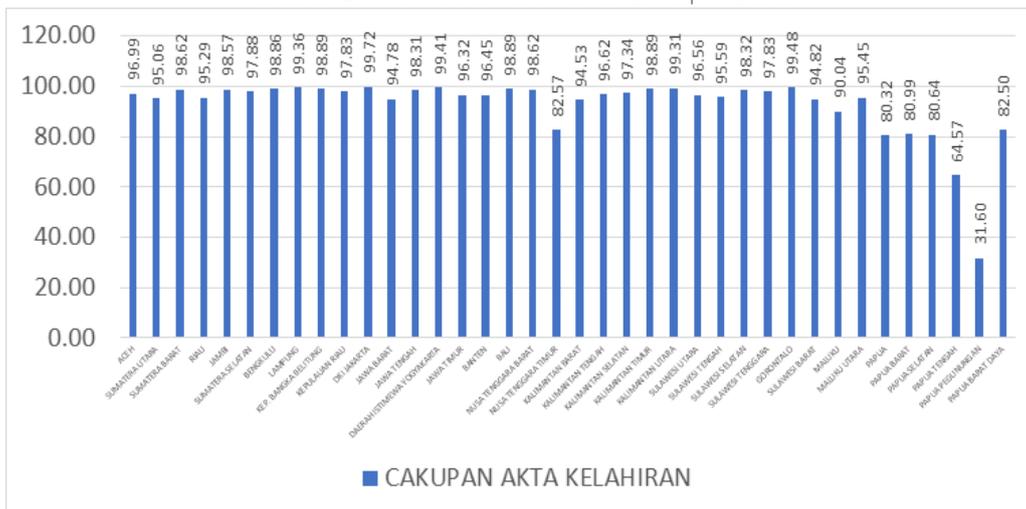
- Penerbitan Akta kelahiran target 100%, telah mencapai 75.720.208 akta atau 96,03% dari total jumlah anak usia 0 s.d. 17 tahun sebesar 78.849.834 jiwa dengan persentase capaian sebesar 96,03%.

Grafik 3.32 Penerbitan Akta Kelahiran tiap Provinsi



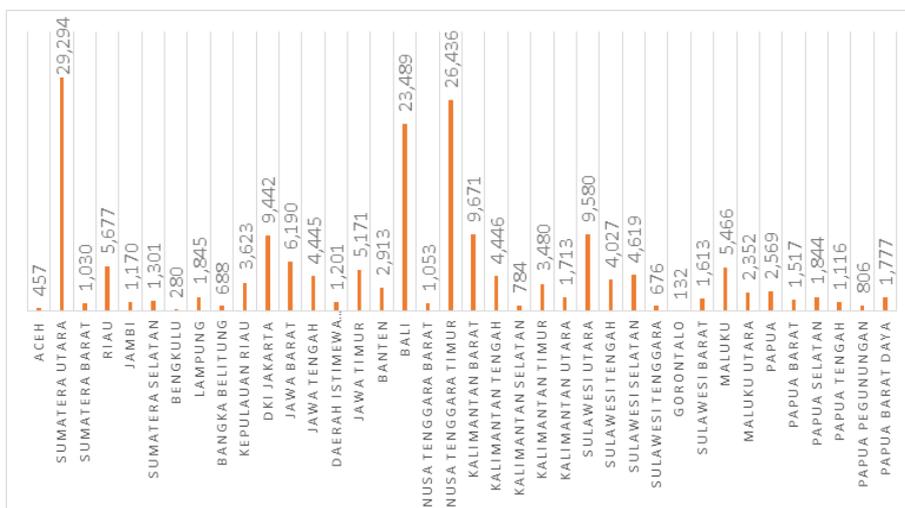
- Penerbitan akta Kematian target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 12.372.370 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.33 Penerbitan Akta Kematian tiap Provinsi



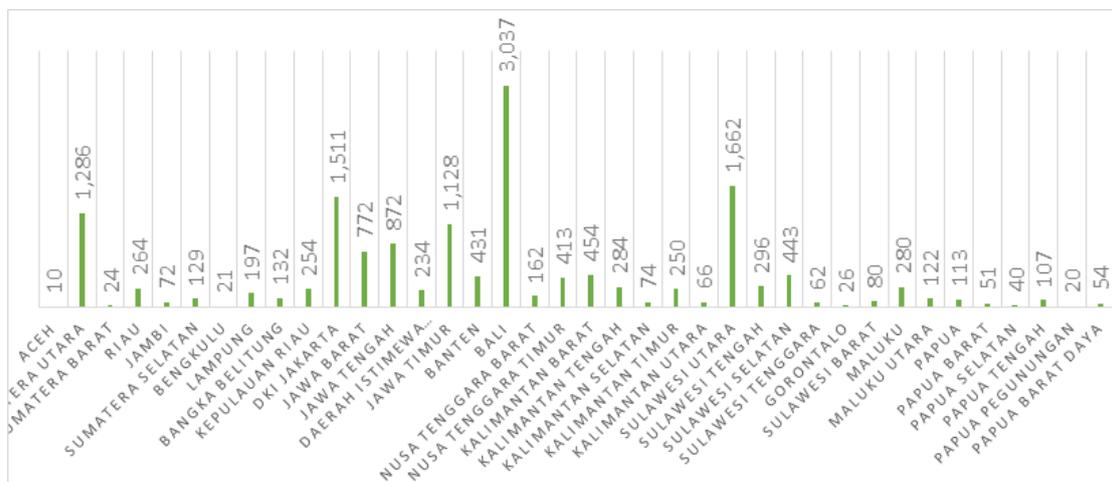
- Penerbitan akta perkawinan non Muslim target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 184.020 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.34 Penerbitan Akta Perkawinan tiap Provinsi



6. Penerbitan akta perceraian non Muslim target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 15.433 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan

Grafik 3.35 Penerbitan Akta Perceraian tiap Provinsi



Berdasarkan data realisasi tersebut, persentase rata-rata realisasi cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil didapatkan melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Persentase 6 Dokumen Kependudukan}}{6}$$

$$\text{Realisasi} = \frac{590,81}{6}$$

$$\text{Realisasi} = \mathbf{98,46}$$

Nilai capaian Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{persentase rata-rata realisasi}}{\text{Persentase Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{98,46\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \mathbf{98,46\%}$$

Indikator RPJMN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 dalam kegiatan prioritas Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan mencakup empat layanan yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun, akta kematian, penerbitan akta perkawinan non-Muslim, dan penerbitan akta perceraian non-Muslim dengan target 100%. Realisasi kinerja Tahun 2024 pada layanan penerbitan akta kematian, penerbitan akta perkawinan non Muslim dan penerbitan akta perceraian non Muslim sebesar 100% pada tiga layanan tersebut. Sedangkan, layanan penerbitan akta kelahiran sebesar 98,46% atau tidak mencapai target.

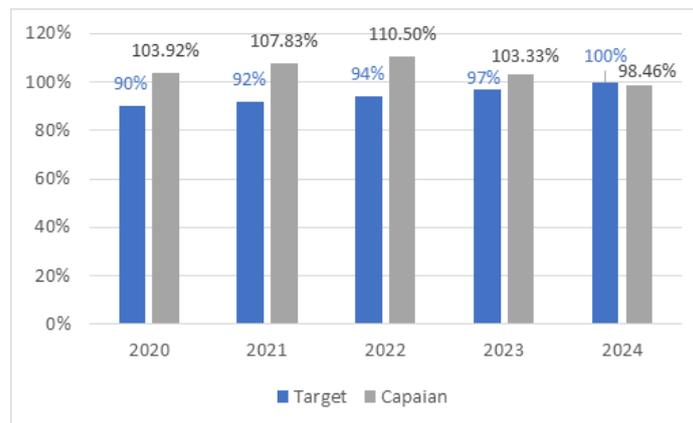
Faktor-faktor yang menyebabkan layanan penerbitan akta kelahiran tidak mencapai target, antara lain:

1. Dinamika kependudukan yang terjadi sangat dinamis, seperti kematian dan pindah kewarganegaraan.
2. Kondisi geografis setiap daerah berbeda-beda yang mempengaruhi kapabilitas penduduk untuk menjangkau unit layanan administrasi kependudukan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran bagi anak.
4. Dan, adanya kecenderungan masyarakat mengurus akta kelahiran menjelang masuk sekolah.
5. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mendukung program penerbitan akta kelahiran. Pada tahun 2017 – 2021 terdapat dukungan anggaran dari APBN dalam bentuk dana alokasi khusus non fisik administrasi kependudukan yang dapat digunakan daerah untuk melakukan kegiatan

jemput bola ke masyarakat. Namun sejak tahun 2022 sampai saat ini, DAK non fisik Adminduk sudah tidak diberikan lagi sehingga frekuensi kegiatan jemput bola berkurang yang berpengaruh pada capaian target penerbitan akta kelahiran.

Dalam kurun waktu 2020 – 2023 Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah melebihi target, yakni 103,92%, 107,83%, 110,50%, dan 103,33% secara berturut-turut. Namun, pada Tahun 2024 terdapat kenaikan target persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi 100% sehingga capaian IKU turun menjadi 98,46%. Tidak tercapainya target cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada tahun 2024 disebabkan oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Grafik 3.36 Target dan Capaian Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 - 2024



Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil telah melakukan inovasi dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, antara lain:

1. Diterbitkannya Kepmendagri nomor 400.8.2.13 – 3886 Dukcapil Tahun 2024 tentang pedoman pencatatan peningkatan status hukum anak melalui pelayanan terpadu.
2. Diterbitkannya Kepmendagri nomor 400.8-30 Dukcapil Tahun 2024 tentang pembentukan tim fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan administrasi kependudukan tahun 2024.
3. Dilakukannya layanan jemput bola dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Pemberian buku saku pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berisi kumpulan jawaban atas pertanyaan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Buku ini disusun untuk membantu masyarakat dan aparat penyelenggara layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pemberian brosur dan banner terkait tata cara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Dinas Dukcapil.

Program/ kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, antara lain:

1. Terlaksananya Rakornas II Dukcapil 2024 dengan tema "Akurasi Data Kependudukan

untuk Mendukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional".

2. Dilaksanakannya Dukcapil Prima Award 2024 dalam Rakornas II Dukcapil sebagai bentuk penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas inovasi dan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Melaksanakan Program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjangkau layanan Dukcapil serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kegiatan GISA, meliputi pelayanan administrasi kependudukan di lokasi-lokasi tertentu khususnya di wilayah 3T, kegiatan Jemput Bola Layanan Adminduk hingga pintu-pintu rumah, serta sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan.
4. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan registrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kepala dinas dan kepala bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di dinas dukcapil provinsi dan kab/kota.
5. Pengadaan sewa perangkat dan jaringan layanan adminduk di daerah perbatasan.
6. Fasilitasi layanan jemput bola di daerah dengan cakupan kinerja rendah.
7. Fasilitasi layanan adminduk bagi penduduk rentan adminduk.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan indikator Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dalam administrasi kependudukan. Dengan digitalisasi dokumen kependudukan, dapat mengurangi biaya cetak dan distribusi fisik KTP-el serta dokumen lainnya.

Terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Ditiadaknya dukungan anggaran DAK non fisik administrasi kependudukan bagi dinas dukcapil Kab/Kota.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan di daerah.
3. Kurangnya pelatihan bagi aparatur Dinas Dukcapil Provinsi, Kabuapten, dan Kota.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran dan pencatatan sipil.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Mendorong Kementerian Keuangan untuk pengalokasian anggaran DAK non-fisik administrasi kependudukan bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.
2. Pengadaan sewa perangkat dan jaringan layanan Adminduk di daerah perbatasan untuk perekaman data kependudukan.
3. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan registrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Dinas Dukcapil Provinsi, Kabuapten, dan Kota.

# PENGHARGAAN DUKCAPIL PRIMA AWARD TAHUN 2024



## Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik



Secara akumulasi jumlah lembaga pengguna (pusat dan daerah) yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik sebanyak 4.753 Lembaga Pengguna. Capaian ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan lembaga-lembaga terhadap kualitas data kependudukan yang disediakan, tetapi juga efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam mendorong pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik

T = Target    R = Realisasi

Indikator Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri yang baru sejak Tahun 2022 (sebelumnya merupakan Indikator Kinerja Program/IKP). Hal ini merupakan tindak lanjut atas penyesuaian level dari IKU menjadi IKP dan dari IKP menjadi IKU, sebagaimana hasil evaluasi Kementerian PANRB atas implementasi SAKIP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.

Kementerian PANRB telah melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Mendagri pada sasaran ke-8 terkait pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik. Sebelumnya, nomenklatur IKU adalah "Jumlah Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional Untuk Pelayanan Publik (Kumulatif)", yang mengukur jumlah lembaga yang telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dalam pemanfaatan data kependudukan. Namun, indikator tersebut kini disesuaikan menjadi "Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan

publik". Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja lebih mencerminkan dampak nyata dari pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik. Jika sebelumnya indikator hanya berfokus pada jumlah lembaga yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, kini pengukuran lebih diarahkan pada implementasi nyata, yaitu jumlah lembaga yang benar-benar menggunakan data kependudukan dalam layanan publik mereka.

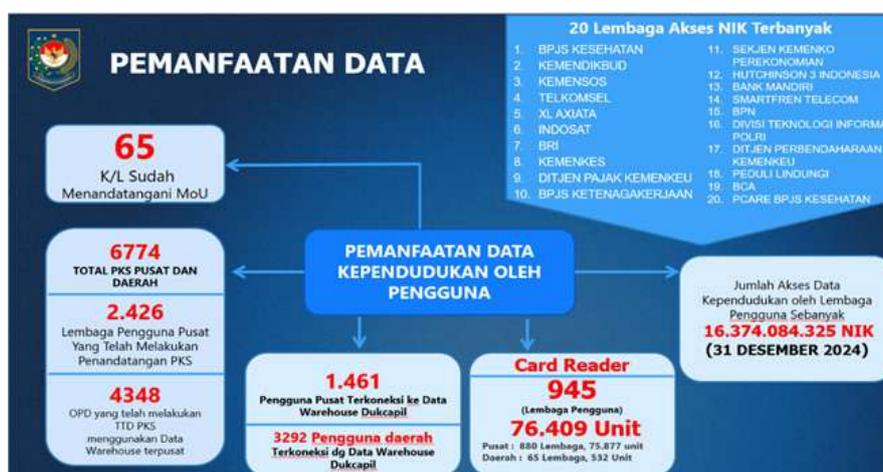
Indikator Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik menjadi parameter yang mengukur seberapa banyak instansi atau lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menggunakan data kependudukan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Indikator ini penting untuk mengukur seberapa efektif penggunaan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik, seperti distribusi Bansos, layanan kesehatan, layanan pendidikan, perpajakan, dan lain-lain. Peningkatan jumlah lembaga pengguna juga menunjukkan bahwa sistem informasi administrasi kependudukan

semakin terintegrasi, akurat, dan mudah diakses, yang sejalan dengan sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil menyediakan Aplikasi Data Warehouse (DWH) terpusat dan jaringan komunikasi data yang menghubungkan pusat data Kemendagri dengan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota yang tercatat pada sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) serta tersambung pada aplikasi Data Warehouse terpusat Ditjen Dukcapil.

Gambar 3.17 Rincian Jumlah Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik Tahun 2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan aplikasi DWH Terpusat Ditjen Dukcapil, terdapat sebanyak 4.753 lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik pada Tahun 2024 dari target sebanyak 1.500 lembaga pengguna, dengan perhitungan sebagai berikut:

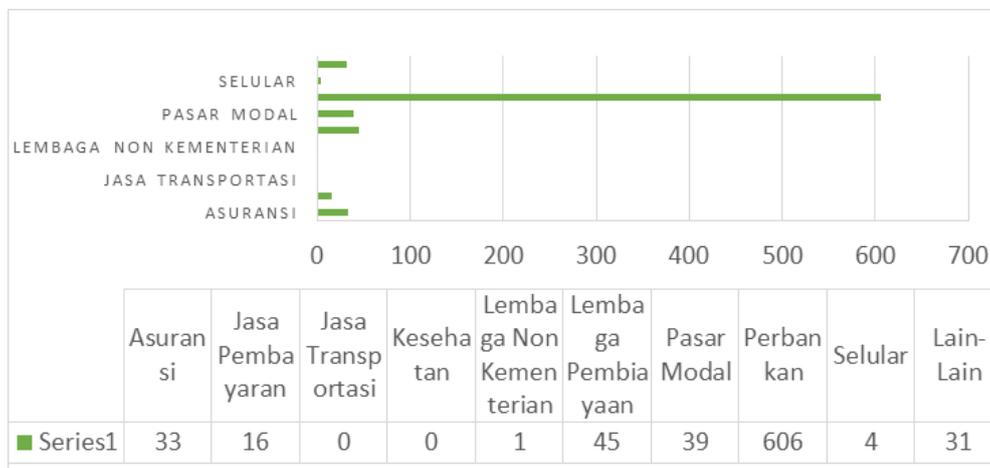
$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah Lembaga Pengguna Pusat dan Daerah yang mengakses (kumulatif)}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{4.753}{1.500} \times 100\% \\ &= 316,17 \% \end{aligned}$$

Peningkatan jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan sejak Tahun 2020 hingga 2025 mengalami peningkatan yang signifikan, dari 1.922 lembaga pada Tahun 2020 menjadi 4.753 lembaga pada Tahun 2024. Namun, dari tahun 2023 ke 2024, terjadi penurunan sebesar 206 lembaga yang disebabkan oleh adanya pemutakhiran data lembaga pengguna daerah yang dihapuskan dari rekapitulasi lembaga pengguna yang telah memanfaatkan hak akses. Hal ini menunjukkan peningkatan efektifitas penggunaan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Selain itu, capaian ini juga sangat dipengaruhi oleh besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemendagri pada Ditjen Dukcapil. Pelaksanaan PNBP ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-5299 Dukcapil Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

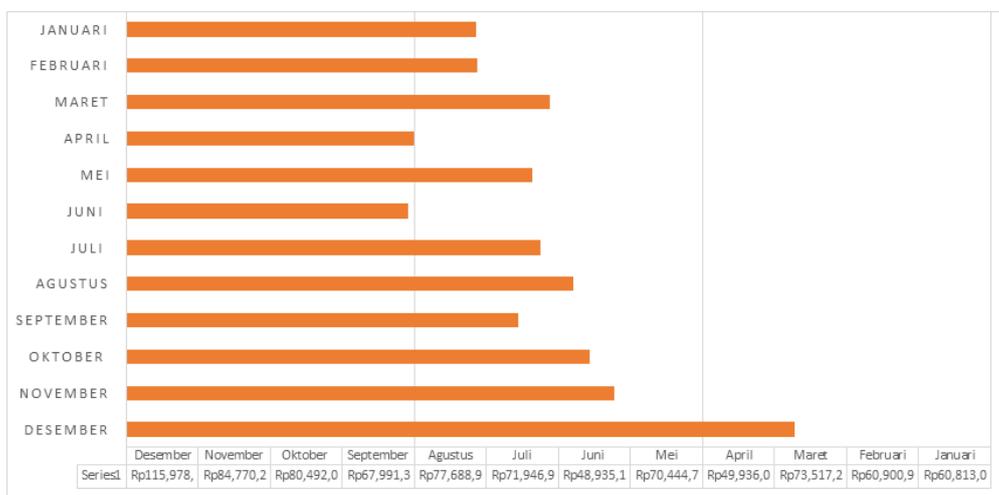
Pajak dalam Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerimaan PNBP Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil dari Januari Tahun 2024 hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp863.451.196.000,- dari sebanyak 775 pengguna, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Grafik 3.36 Klasifikasi Lembaga Pengguna Data Kependudukan yang Membayarkan PNBP



Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran Layanan Kependudukan (SIMPELKU)

Grafik 3.37 Pemasukan PNBP Pemanfaatan Data Kependudukan per Bulan Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)

Pagu Anggaran penggunaan PNBP lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebesar Rp.165.700.000.000,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.165.608.548.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.80 Penggunaan Anggaran PNPB lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	PAJU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN
		Rp		Rp	%	Rp	%	
1	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pengadaan Cadangan Server Aplikasi sistem informasi Perkantoran Berbasis Elektronik (E-Office) dan SIDARA	7.500.000.000		7.497.500.000	99,97	2.500.000	0,03	
2	Pengadaan Security	13.100.000.000		13.075.000.000	99,81	25.000.000	0,19	
3	Pengadaan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Jaringan	60.000.000.000		59.998.000.000	100,00	2.000.000	0,00	
4	Pengadaan Database Firewall	7.700.000.000		7.680.000.000	99,74	20.000.000	0,26	
5	Pengadaan Lisensi Server GPU	12.500.000.000		12.499.998.000	100,00	2.000	0,00	
6	Pengadaan Lisensi Linux	1.200.000.000		1.199.500.000	99,96	500.000	0,04	
7	backup sistem FR DRC batam	12.500.000.000		12.500.000.000	100,00	0	0,00	
8	Pengadaan Lisensi ABIS Tahap II	15.000.000.000		15.000.000.000	100,00	0	0,00	
9	Pengadaan Perangkat Keras Pemanfaatan IKD (Layanan Publik)	12.000.000.000		11.984.000.000	99,87	16.000.000	0,13	
10	Pengadaan Perangkat Keras Pemanfaatan IKD (Layanan Komersial)	12.000.000.000		11.984.000.000	99,87	16.000.000	0,13	
11	Pengadaan Perangkat Keras Enkripsi (Layanan Komersial)	2.000.000.000		2.000.000.000	100,00	0	0,00	
12	Pengadaan Pengembangan Gateway API Management untuk Pemanfaatan IKS Dokumen Kependudukan	2.300.000.000		2.300.000.000	100,00	0	0,00	
13	Pengadaan Software Pemanfaatan IKD (Layanan Publik)	3.500.000.000		3.498.500.000	99,96	1.500.000	0,04	
14	Pengadaan Software Pemanfaatan IKD (Layanan Komersial)	3.500.000.000		3.498.500.000	99,96	1.500.000	0,04	
15	Rekonsiliasi PHBP atas jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	900.000.000		893.550.000	99,28	6.450.000	0,72	
<b>TOTAL PNPB</b>		<b>165.700.000.000</b>		<b>165.608.548.000</b>	<b>99,94</b>	<b>91.452.000</b>	<b>0,06</b>	

Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil telah menyelenggarakan Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tema "Promosi Interoperabilitas IKD dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai Digital Public Infrastructure(DPI)" padatanggal20-21November 2024 yang dibuka oleh Wakil Mendagri, Bapak Bima Arya Sugiarto serta dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Narasumber dari UCL London, dan Lembaga Pengguna Pusat.

Keberhasilan capaian IKU ini didukung dengan banyaknya lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran K/L, pelaksanaan demokrasi, dan penegakan hukum, dengan rincian antara lain:

1. Kementerian Sosial memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Kementerian Kesehatan memanfaatkan data kependudukan dalam rangka verifikasi dan validasi penerimaan layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan Puskesmas.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memanfaatkan data kependudukan dalam rangka perencanaan, sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data penyelenggaraan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan di Indonesia. Data kependudukan digunakan untuk memastikan akurasi dalam pendataan siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, serta pengelolaan beasiswa dan program pendidikan lainnya.
4. BPJS Kesehatan memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi proses registrasi

kepesertaansertapelayanankesehatan.Selain itu, data kependudukan juga mendukung pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang efisien dan tepat sasaran.

5. BPJS Ketenagakerjaan memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi atas data calon peserta dan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemanfaatan data ini memastikan bahwa setiap individu yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki identitas sesuai sehingga memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, administrasi, serta pelayanan jaminan kesehatan.
6. PT Bank Nasional Indonesia memanfaatkan data kependudukan melalui integrasi E-KYC (Electronic Know Your Customer) Dukcapil untuk meningkatkan efisiensi layanan perbankan. Dengan E-KYC, pelanggan tidak perlu datang langsung ke cabang untuk registrasi.
7. PT Allo Bank memanfaatkan data kependudukan melalui integrasi E-KYC Dukcapil untuk mempercepat proses verifikasi identitas secara digital, memungkinkan registrasi pelanggan tanpa kunjungan fisik.
8. Dana memanfaatkan data kependudukan melalui E-KYC Dukcapil untuk memverifikasi identitas pengguna secara cepat dan akurat.
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data berbagai pihak yang terlibat dalam sektor konstruksi dan perumahan. Hal ini mencakup pemohon Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi, Asosiasi Terkait Rantai Pasok, dan Asosiasi Pengembang Perumahan, Serta Data Penilai Ahli, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan

sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Selain itu, data kependudukan juga digunakan untuk memverifikasi masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan perumahan, bantuan rumah bagi korban bencana, dan program bantuan sosial lainnya.

10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang memanfaatkan data kependudukan dalam rangka melakukan verifikasi, sinkronisasi, dan validasi atas data pemohon layanan pertanahan. Data kependudukan juga membantu penentuan hak atas tanah yang terkait dengan identitas penduduk, sehingga mencegah sengketa pertanahan dan penyalahgunaan kewenangan.
11. Kementerian Ketenagakerjaan memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi atas data ketenagakerjaan. Data ini digunakan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran terkait penyediaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, serta program-program jaminan sosial tenaga kerja.
12. Kementerian Keuangan memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data terkait berbagai program yang memerlukan alokasi anggaran dan perpajakan, meliputi data calon penerima dan penerima penjaminan untuk UMKM dan korporasi, verifikasi calon pengguna dan pengguna Sistem Layanan Digital Kementerian Keuangan, serta data terkait Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
13. Komisi Pemilihan Umum memanfaatkan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi pemutakhiran data pemilih melalui penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4).
14. Kepolisian Negara Republik Indonesia memanfaatkan data kependudukan dalam rangka mengefektifkan fungsi dan perannya dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum, seperti identifikasi dalam menangani kasus kriminal, verifikasi identitas saksi, terdakwa, dan korban, serta pencegahan kejahatan melalui analisis pola dan distribusi kejahatan yang lebih akurat untuk merencanakan strategi yang lebih tepat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
15. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanfaatkan data kependudukan dalam

rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data untuk kepentingan penegakan hukum di Kejaksaan, seperti memastikan identitas terdakwa, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam perkara hukum yang ditangani.

16. Mahkamah Agung memanfaatkan data kependudukan dalam rangka layanan pencatatan perceraian penduduk di peradilan, baik umum maupun agama.
17. Kementerian Hukum dan HAM memanfaatkan data kependudukan dalam rangka verifikasi dan validasi data terkait tahanan, warga binaan pemasyarakatan, anak, dan pengunjukj.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi. Dari sisi Dukcapil, Seiring dengan perkembangan zaman tentunya terdapat infrastruktur yang perlu diperbaharui serta dikembangkan karena terbatas untuk memenuhi kebutuhan saat ini sehingga perlu untuk selalu dilakukan peremajaan, serta pemeliharaan dan pengembangan. Apabila dilihat dari sisi lembaga pengguna, tidak sepenuhnya lembaga pengguna siap dari sisi teknis seperti jaringan, sistem dan aplikasi untuk dapat melakukan integrasi dengan Ditjen Dukcapil serta melakukan pemanfaatan data kependudukan.
2. Kendala Teknis. Terjadinya kendala-teknis dilapangan seperti downtime server serta ketidaksesuaian dan kesalahan data.
3. Kurangnya Pemahaman Lembaga Pengguna. Beberapa lembaga pengguna kurang memahami seperti apa proses pemanfaatan data kependudukan serta cara mengintegrasikannya dengan sistem mereka.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Optimalisasi anggaran yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan anggaran yang bersumber dari PNBPN sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dengan memprioritaskan pengeluaran untuk infrastruktur esensial, pengembangan sistem serta perbaikan layanan.
2. Penanganan Kendala Teknis dengan melakukan manajemen risiko dan tindak lanjutnya, seperti membuat Whatsapp Group

DWH dimana terjalin komunikasi intensif antara Lembaga Pengguna dengan Ditjen Dukcapil dan peningkatan kapasitas server dan pengelolaan data untuk meminimalkan risiko downtime server.

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan membangun sistem monitoring berbasis dashboard untuk memantau kinerja lembaga pengguna secara real-time.
4. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan lembaga pengguna dalam proses pemanfaatan data kependudukan, mulai dari penyusunan perjanjian kerja sama hingga laporan pemanfaatan data.
5. Peningkatan Komunikasi Publik dengan pengajuan pembuatan portal pemanfaatan data kependudukan yang akan memberikan informasi kepada calon pengguna maupun pengguna terkait dengan manfaat, cara kerja pemanfaatan data kependudukan hingga dapat melakukan akses pemanfaatan data kependudukan.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital dengan mengimplementasikan sistem berbasis digital seperti aplikasi Data Warehouse (DWH), sehingga memungkinkan lembaga pengguna pusat maupun daerah dapat melakukan akses pemanfaatan data kependudukan melalui mekanisme akses web service. Selain itu, mekanisme lainnya juga yang dapat digunakan oleh lembaga pengguna yaitu melalui aplikasi web portal dan card reader.
2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi melalui peningkatan kapasitas infrastruktur IT seperti server, jaringan, maupun sistem pengamanan data untuk memastikan proses pemanfaatan data berjalan lancar tanpa gangguan.
3. Pemanfaatan Anggaran yang Tepat Sasaran dengan memfokuskan pada proyek-proyek prioritas yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan.

# RAKORNAS

## KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024

### "PERAN IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik"

BATAM, 27-29 FEBRUARI 2024



# SASARAN 9

## Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi berdasarkan provinsi yang di dalamnya terdapat kota dan kabupaten hingga pembagian kewilayahan berdasarkan kecamatan dan kelurahan atau desa. Oleh sebab itu, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, tata Kelola kewilayahan merupakan salah satu kewenangan mutlak Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengatur kewilayahan yang sesuai dengan kepentingan strategis nasional.

Dalam hal penyelenggaraan tata Kelola kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, dalam hal

penyelenggaraan pembinaan kepada pemerintah daerah telah ditetapkan dalam peraturan teknis lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dengan terwujudnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik diharapkan dapat terwujudnya pengembangan kewilayahan yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan" diperoleh sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil Hal ini didukung oleh capaian indikator Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.81 Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	Nilai 60	100%	Sangat Tinggi/Sangat Berhasil
<b>Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>100%</b>	<b>Sangat Tinggi/Sangat Berhasil</b>



## Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan



Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan menjadi instrumen Kementerian Dalam Negeri sebagai poros kewilayahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum-teknis kepada pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah untuk mendukung fungsi pelayanan pemerintahan

T = Target    R = Realisasi

Berdasarkan pasal 373 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menugaskan pemerintah pusat dalam hal pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan fungsi tersebut telah diturunkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, dalam hal penyelenggaraan pembinaan kepada pemerintah daerah telah ditetapkan dalam peraturan teknis lainnya, yaitu PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, PP Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah ditetapkan arah kebijakan dan strategis yaitu:

1. Meningkatkan kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (Korbinwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Percepatan penyelesaian batas wilayah daerah melalui optimalisasi batasan waktu penyelesaian segmen batas sesuai dengan Permendagri 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
3. Mempercepat pembakuan rupa bumi unsur buatan dan alami dengan mendorong pelibatan K/L, Pemda dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembakuan nama rupa bumi di daerahnya.
4. Meningkatkan integrasi dan transparansi dalam bentuk digitalisasi data wilayah administrasi pemerintahan dan toponimi sehingga pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memanfaatkan data yang update dan akurat pada aspek pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial budaya.
5. Meningkatkan implementasi standar pelayanan perkotaan dengan memprioritaskan program kegiatan dan anggaran daerah yang diarahkan untuk mencapai standar pelayanan perkotaan dan mempercepat penyelesaian permasalahan

- perkotaan (transportasi, banjir, air minum, sampah dan limbah) melalui kerja sama daerah.
6. Meningkatkan manajemen pelayanan umum khususnya PTSP melalui pelaksanaan pelayanan sesuai standar dan terintegrasi secara elektronik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.
  7. Memperkuat peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang mampu mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan pembangunan desa, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan mendukung capaian SPM di wilayah kecamatan.
  8. Mengembangkan kerjasama daerah sebagai instrumen peningkatan ekonomi dan daya saing daerah dengan memperkuat peran TKKSD dan sekretariat kerjasama dan pengintegrasian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan daerah.
  9. Mengembangkan wilayah dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dan terpadu melalui penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan khusus dan strategis nasional dengan menguatkan kapasitas Pemerintah Daerah dari aspek kebijakan (regulasi), kelembagaan dan keuangan serta SDM aparatur.
  10. Memprioritaskan penyelesaian segmen batas antar negara melalui perundingan, survei bersama, kerjasama dibidang ekonomi, sosial dan budaya (ekososbud) serta mendorong organisasi kerjasama dengan negara yang berbatasan dengan laut dan memperkuat kapasitas pelayanan pemerintahan yang didukung dengan sarpras perbatasan yang memadai.
  11. Meningkatkan peran Pemerintahan Daerah dalam penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan melalui pemetaan permasalahan pertanahan di daerah dan fasilitasi Pemerintahan Daerah dalam upaya penanganan masalah pertanahan.
- Dalam mendukung ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan bahwa terhadap Pilar/Sektor/Variabel pada masing-masing parameter yang menjadi komposit perhitungannya dilakukan penjumlahan rata-rata dari 5 Indikator Kinerja Program yang menjadi indeks komposit antara lain:
1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik, dengan dimensi hitung dari aspek pelaksanaan dan aspek hasil, realisasi dan pengelolaan keuangan serta koordinasi



- dan komunikasi perangkat GWPP.
2. Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial, dengan dimensi penilaian antara lain:
    - a. Segmen Batas, yaitu Daerah telah selesai segmenbatassecaramenutup(membentuk polygon tertutup) yang dibuktikan dengan Permendagri;
    - b. Rupa Bumi, yaitu Pembaharuan Kepmendagri tentang kode data wilayah; dan
    - c. Terintegrasi merupakan Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Permendagri dan telah disampaikan kepada K/L terkait yang membidangi informasi geospasial.
  3. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik, dengan bobot perhitungan berdasarkan kriteria indikator-indikator SNI ISO 37122 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas serta indikator SPM dan SPM Teknis.
  4. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu, dengan indikator diantaranya perizinan, non perizinan, terintegrasi dan terpadu.
  5. Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori Baik, dengan indikator program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban

umum dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan secara simultan/agregat/komposit digunakan formula Additive Aggregation Methods sebagai berikut:

$$ITKK \text{ per Kabupaten} = \sum_n^i W_i I_{ij}$$

dimana:

ITKPK : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKK)

Wi : Bobot masing-masing IKP

Iij : Indeks IKP

ITKK disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan tata kelola penyelenggaraan kewilayah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai indeks mempunyai rentang 0 sampai dengan 100, dengan kategorisasi sebagai berikut:

1. ITKK kategori kurang baik: Lebih kecil dan sama dengan 50
2. ITKK kategori baik : dengan nilai 50,01 -75
3. ITKK kategori sangat baik: 75,01 – 100

Dalam metode perhitungannya, contoh/simulasi dalam pengukuran skor Indeks Tata Kelola Kewilayahan yang terdiri dari 5 Indeks Komposit untuk Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.82 Contoh Perhitungan Indeks Kewilayahan berdasarkan Indeks Komposit

Kab/ Kota	Nilai Capaian Indeks GWPP	Nilai Capaian Persentase segmen dan rupabumi	Nilai Capaian Indeks Perkotaan	Nilai Capaian Indeks Perizinan	Nilai Capaian Indeks Kecamatan	Akumulasi Nilai Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Kategori
	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
Kab Aceh Barat	92,22	88,24	68,00	88,66	78,12	83,03	Kategori IKU Sangat Baik

ITKK Kab Aceh Barat = (92,22×0,2) + (88,24×0,2) + (68,00×0,2) + (88,66×0,2) + (78,12×0,2) = 83,03  
Maka ITKK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 sebesar 83,03 dengan kategori Sangat Baik

Tahun 2024 merupakan tahun ke 3 perhiungan nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan dengan

penilaian dilaksanakan kepada 514 kabupaten/kota dengan hasil penialian rata-rata nilai Indeks Tata Kelola Kewilayan secara nasional berada pada angka 60% dengan rincian sebagai berikut:

1. 0 Daerah dengan ITKK kategori sangat baik
2. 167 Daerah dengan ITKK kategori baik
3. 347 Daerah dengan ITKK kategori Kurang

Tabel 3.83 Daftar Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks  
Tata Kelola Kewilayahan Kategori Baik Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks	Kategori	No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks	Kategori
1	KAB. TANAH DATAR	72.39	ITKK Baik	36	KAB. ACEH SELATAN	64.80	ITKK Baik
2	KAB. MANGGARAI	69.80	ITKK Baik	37	KAB. ACEH TENGGARA	64.80	ITKK Baik
3	KAB. INDRAGIRI HILIR	69.63	ITKK Baik	38	KAB. ACEH TIMUR	64.80	ITKK Baik
4	KAB. KULON PROGO	68.74	ITKK Baik	39	KAB. ACEH TENGAH	64.80	ITKK Baik
5	KAB. BANTUL	68.74	ITKK Baik	40	KAB. ACEH BARAT	64.80	ITKK Baik
6	KAB. GUNUNGKIDUL	68.74	ITKK Baik	41	KAB. ACEH BESAR	64.80	ITKK Baik
7	KAB. SLEMAN	68.74	ITKK Baik	42	KAB. PIDIE	64.80	ITKK Baik
8	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	67.84	ITKK Baik	43	KAB. ACEH UTARA	64.80	ITKK Baik
9	KAB. MALUKU TENGAH	67.79	ITKK Baik	44	KAB. SIMEULUE	64.80	ITKK Baik
10	KAB. MALUKU TENGGARA	67.79	ITKK Baik	45	KAB. ACEH SINGKIL	64.80	ITKK Baik
11	KAB. BURU	67.79	ITKK Baik	46	KAB. BIREUEN	64.80	ITKK Baik
12	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	67.79	ITKK Baik	47	KAB. ACEH BARAT DAYA	64.80	ITKK Baik
13	KAB. KEPULAUAN ARU	67.79	ITKK Baik	48	KAB. GAYO LUES	64.80	ITKK Baik
14	KAB. MALUKU BARAT DAYA	67.79	ITKK Baik	49	KAB. ACEH JAYA	64.80	ITKK Baik
15	KAB. BURU SELATAN	67.79	ITKK Baik	50	KAB. NAGAN RAYA	64.80	ITKK Baik
16	KOTA AMBON	67.79	ITKK Baik	51	KAB. ACEH TAMIANG	64.80	ITKK Baik
17	KOTA TUAL	67.79	ITKK Baik	52	KAB. BENER MERIAH	64.80	ITKK Baik
18	KAB. DHARMASRAYA	67.53	ITKK Baik	53	KOTA BANDA ACEH	64.80	ITKK Baik
19	KAB. MALAKA	67.13	ITKK Baik	54	KOTA SABANG	64.80	ITKK Baik
20	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	67.05	ITKK Baik	55	KOTA LHOKSEUMAWE	64.80	ITKK Baik
21	KAB. HALMAHERA UTARA	66.44	ITKK Baik	56	KOTA LANGSA	64.80	ITKK Baik
22	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	65.65	ITKK Baik	57	KOTA SUBULUSSALAM	64.80	ITKK Baik
23	KAB. BANTAENG	65.65	ITKK Baik	58	KAB. POSO	62.53	ITKK Baik
24	KAB. JENEPONTO	65.65	ITKK Baik	59	KAB. BOLAANG MONGONDOW	61.37	ITKK Baik
25	KAB. GOWA	65.65	ITKK Baik	60	KAB. MINAHASA	61.37	ITKK Baik
26	KAB. BARRU	65.65	ITKK Baik	61	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	61.37	ITKK Baik
27	KAB. SOPPENG	65.65	ITKK Baik	62	KAB. KEPULAUAN TALAUD	61.37	ITKK Baik
28	KAB. WAJO	65.65	ITKK Baik	63	KAB. MINAHASA SELATAN	61.37	ITKK Baik
29	KAB. SIDENRENG RAPPANG	65.65	ITKK Baik	64	KAB. MINAHASA UTARA	61.37	ITKK Baik
30	KAB. PINRANG	65.65	ITKK Baik	65	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	61.37	ITKK Baik
31	KAB. ENREKANG	65.65	ITKK Baik	66	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	61.37	ITKK Baik
32	KAB. TANA TORAJA	65.65	ITKK Baik	67	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	61.37	ITKK Baik
33	KAB. LUWU TIMUR	65.65	ITKK Baik	68	KOTA MANADO	61.37	ITKK Baik
34	KOTA MAKASSAR	65.65	ITKK Baik	69	KOTA BITUNG	61.37	ITKK Baik
35	KOTA PAREPARE	65.65	ITKK Baik				
36	KAB. ACEH SELATAN	64.80	ITKK Baik				

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks	Kategori
70	KOTA TOMOHON	61.37	ITKK Baik
71	KOTA KOTAMOBAGU	61.37	ITKK Baik
72	KOTA MEDAN	58.80	ITKK Baik
73	KAB. LABUHANBATU	58.80	ITKK Baik
74	KAB. TAPANULI TENGAH	58.76	ITKK Baik
75	KAB. TAPANULI UTARA	58.76	ITKK Baik
76	KAB. NIAS	58.76	ITKK Baik
77	KAB. LANGKAT	58.76	ITKK Baik
78	KAB. KARO	58.76	ITKK Baik
79	KAB. DELI SERDANG	58.76	ITKK Baik
80	KAB. SIMALUNGUN	58.76	ITKK Baik
81	KAB. ASAHAN	58.76	ITKK Baik
82	KAB. DAIRI	58.76	ITKK Baik
83	KAB. TOBA	58.76	ITKK Baik
84	KAB. MANDAILING NATAL	58.76	ITKK Baik
85	KAB. NIAS SELATAN	58.76	ITKK Baik
86	KAB. PAKPAK BHARAT	58.76	ITKK Baik
87	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	58.76	ITKK Baik
88	KAB. SAMOSIR	58.76	ITKK Baik
89	KAB. SERDANG BEDAGAI	58.76	ITKK Baik
90	KAB. BATU BARA	58.76	ITKK Baik
91	KAB. PADANG LAWAS UTARA	58.76	ITKK Baik
92	KAB. PADANG LAWAS	58.76	ITKK Baik
93	KAB. LABUHANBATU UTARA	58.76	ITKK Baik
94	KAB. NIAS BARAT	58.76	ITKK Baik
95	KOTA PEMATANGSIANTAR	58.76	ITKK Baik
96	KOTA SIBOLGA	58.76	ITKK Baik
97	KOTA TANJUNG BALAI	58.76	ITKK Baik
98	KOTA BINJAI	58.76	ITKK Baik
99	KOTA TEBING TINGGI	58.76	ITKK Baik
100	KOTA PADANG SIDEMPUAN	58.76	ITKK Baik
101	KAB. KOLAKA	57.56	ITKK Baik
102	KAB. MUNA	57.56	ITKK Baik
103	KAB. BOMBANA	57.56	ITKK Baik
104	KAB. WAKATOBI	57.56	ITKK Baik
105	KAB. KOLAKA UTARA	57.56	ITKK Baik
106	KAB. KOLAKA TIMUR	57.56	ITKK Baik
107	KAB. MUNA BARAT	57.56	ITKK Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks	Kategori
108	KAB. BUTON TENGAH	57.56	ITKK Baik
109	KOTA TARAKAN	57.53	ITKK Baik
110	KAB. SANGGAU	57.07	ITKK Baik
111	KAB. KAYONG UTARA	56.97	ITKK Baik
112	KAB. BANJAR	56.84	ITKK Baik
113	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	56.84	ITKK Baik
114	KAB. TANAH LAUT	56.82	ITKK Baik
115	KAB. KOTABARU	56.82	ITKK Baik
116	KAB. TAPIN	56.82	ITKK Baik
117	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	56.82	ITKK Baik
118	KAB. TANAH BUMBU	56.82	ITKK Baik
119	KAB. BALANGAN	56.82	ITKK Baik
120	KOTA BANJARMASIN	56.82	ITKK Baik
121	KOTA BANJARBARU	56.82	ITKK Baik
122	KAB. INDRAGIRI HULU	56.69	ITKK Baik
123	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	56.52	ITKK Baik
124	KOTA ADM. JAKARTA UTARA	56.52	ITKK Baik
125	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	56.52	ITKK Baik
126	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	56.52	ITKK Baik
127	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	56.52	ITKK Baik
128	KAB. MINAHASA TENGGARA	56.37	ITKK Baik
129	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	56.37	ITKK Baik
130	KOTA PONTIANAK	56.17	ITKK Baik
131	KAB. SIAK	55.75	ITKK Baik
132	KOTA PAYAKUMBUH	55.29	ITKK Baik
133	KAB. KAMPAR	54.92	ITKK Baik
134	KOTA PARIAMAN	54.91	ITKK Baik
135	KAB. PADANG PARIAMAN	54.89	ITKK Baik
136	KAB. SINTANG	54.76	ITKK Baik
137	KAB. KEEROM	54.43	ITKK Baik
138	KOTA JAYAPURA	54.43	ITKK Baik
139	KAB. PELALAWAN	54.26	ITKK Baik
140	KOTA BALIKPAPAN	53.80	ITKK Baik
141	KOTA SAMARINDA	53.80	ITKK Baik
142	KOTA BONTANG	53.80	ITKK Baik
143	KAB. TAPANULI SELATAN	53.76	ITKK Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks	Kategori
144	KAB. LABUHANBATU SELATAN	53.76	ITKK Baik
145	KAB. ROKAN HULU	53.43	ITKK Baik
146	KAB. KUANTAN SINGINGI	52.94	ITKK Baik
147	KAB. SEKADAU	52.90	ITKK Baik
148	KAB. KETAPANG	52.87	ITKK Baik
149	KAB. LIMA PULUH KOTA	52.66	ITKK Baik
150	KAB. KONAWE SELATAN	52.56	ITKK Baik
151	KAB. KONAWE KEPULAUAN	52.56	ITKK Baik
152	KAB. LANDAK	52.24	ITKK Baik
153	KAB. BARITO KUALA	51.82	ITKK Baik
154	KAB. HULU SUNGAI UTARA	51.82	ITKK Baik
155	KAB. MERAUKE	51.60	ITKK Baik
156	KAB. NABIRE	51.60	ITKK Baik
157	KAB. RAJA AMPAT	51.60	ITKK Baik
158	KAB. MAYBRAT	51.60	ITKK Baik
159	KOTA SORONG	51.60	ITKK Baik
160	KAB. BULUKUMBA	50.65	ITKK Baik
161	KAB. SINJAI	50.65	ITKK Baik
162	KAB. BONE	50.65	ITKK Baik
163	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	50.65	ITKK Baik
164	KAB. LUWU	50.65	ITKK Baik
165	KAB. LUWU UTARA	50.65	ITKK Baik
166	KAB. TORAJA UTARA	50.65	ITKK Baik
167	KOTA PALOPO	50.65	ITKK Baik

Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil telah melakukan kegiatan strategis dalam mendukung pemenuhan data capaiannya, antara lain:

1. Asistensi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2. Penguatan Sekretariat Bersama Pembina Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
3. Penyelesaian Segmen Batas.
4. Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi dan Supervisi Kegiatan Penegasan Status Pulau.
5. Penilaian data maturasi Indeks Pelayanan Perkotaan.
6. Pemetaan Daerah yang Memiliki PTSP Berbasis Elektronik.

7. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
8. Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks kinerja kecamatan.

Berdasarkan pencapaian kinerja Indeks Tata Kelola Kewilayahan tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam setiap penyelenggaraan indikator komposit, antara lain:

1. Satuan Kerja pelaksana Dekonsentrasi GWPP belum sepenuhnya menempatkan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sebagai prioritas sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- yang memposisikan Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat (atributif).
2. Belum optimalnya pelaksanaan dekonsentrasi GWPP yang dilaksanakan secara ex-officio dikarenakan waktu pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP berdampingan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD;
  3. Belum optimalnya peran Sekber Pembina GWPP dalam melakukan pendampingan kepada Provinsi.
  4. Belum terintegrasinya pelayanan perkotaan. Pelayanan perkotaan yang termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan, pendidikan, permukiman dan pelayanan lainnya belum terpenuhi secara merata di wilayah perkotaan.
  5. Adanya moratorium penegasan batas daerah dalam hal dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu tahun 2024 sehingga dilakukan penundaan proses penetapan batas daerah.
  6. Masih terdapat daerah yang belum menyesuaikan nomenklatur kelembagaan DPMPTSP dan terkendala sarana dan prasarana dukungan aplikasi perizinan mandiri yang terintegrasi dengan OSS.
  7. Masih terdapat daerah yang belum melakukan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kepada Camat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, melalui:
  - a. Penguatan peran perangkat GWPP dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang bersifat atributif dan delegatif;
  - b. Penguatan peran aktif Sekretariat Bersama GWPP dalam melakukan pembinaan terhadap masing-masing tugas dan wewenang GWPP sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah, melalui:
  - a. Memperkuat fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan fasilitasi penyelesaian batas daerah dengan memberikan rekomendasi penarikan garis oleh Gubernur kepada pemerintah pusat;
  - b. Mendorong proses pembahasan 31 segmen tersisa dilakukan secara intensif dan sangat mendetail dengan melibatkan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah;
3. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP Prima yang berbasis OSS RBA, melalui:
  - a. Percepatan penyeragaman kelembagaan PTSP di daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) khususnya pada daerah di bagian timur Indonesia;
  - b. Mendorong pemerintah daerah untuk mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan kepada kepala DPMPTSP dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan.
  - c. Mendorong upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana perizinan berupa Website Publikasi DPMPTSP mandiri serta aplikasi perizinan online atau Sicantik Cloud;
  - d. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM perizinan melalui jabatan fungsional penata perizinan.
4. Peningkatan Kualitas Maturasi Perkotaan, melalui:
  - a. Rekomposisi parameter penilaian Indeks perkotaan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik perkotaan Indonesia yang selanjutnya ditetapkan menjadi standar nasional Indonesia.
  - b. Pembangunan sistem pengukuran standar pelayanan perkotaan.
5. Peningkatan Kinerja Kecamatan, melalui:
  - a. Penguatan peran Kecamatan sebagai Hub antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pemberian layanan dasar kepada warga negara
  - b. Pemantauan dan penguatan kecamatan dalam kontribusinya terhadap pengawalan perencanaan pembangunan daerah/ pemberdayaan masyarakat di wilayahnya melalui Musrenbang
  - c. Pendelegasian sebagian urusan pemerintahan daerah kepada camat dalam optimalisasi pelayanan publik.



# SASARAN 10

## Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Hal ini sejalan dengan salah satu dari 5 (lima) Prioritas Kerja Presiden 2019-2024 dan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu reformasi birokrasi.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta

perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/ atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Adapun tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai secara nasional dan termasuk di internal Kementerian Dalam Negeri. Sehingga perlu perbaikan-perbaikan yang terarah dan termanajemen baik dari dalam maupun luar Kementerian Dalam Negeri.

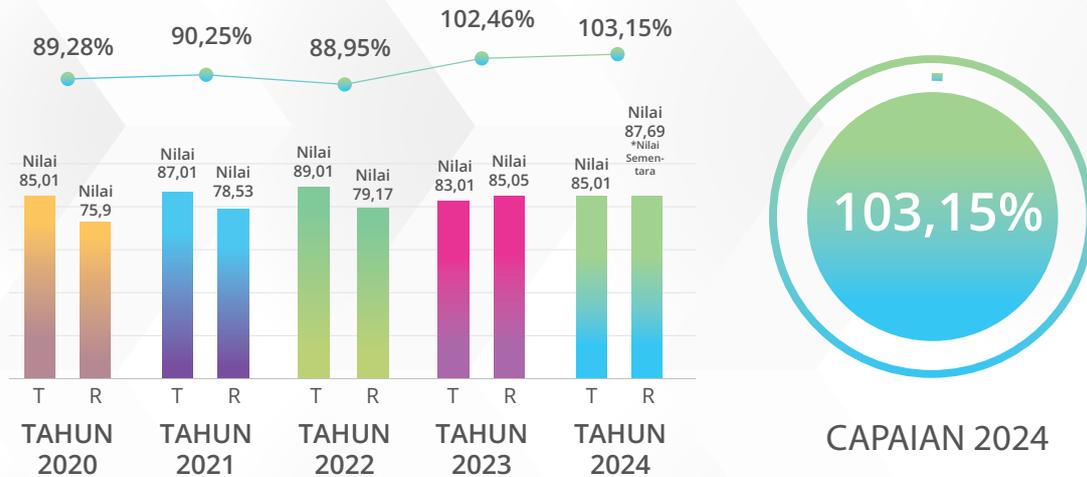
Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri" diperoleh sebesar 103,15%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil Hal ini didukung oleh capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.84 Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,69 *Nilai Sementara	103,15%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				103,15%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



## Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri



Transformasi organisasi birokrasi menuntut adanya kolaborasi dan sinergi yang dibangun, baik secara horizontal dan vertikal pada setiap instansi pemerintah. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu mengubah cara kerja, kultur, dan cara berpikir (mindset) sehingga nantinya organisasi birokrasi dapat semakin adaptif dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

T = Target    R = Realisasi

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintahan. Arahan Presiden mengenai RB mencakup tiga hal utama: mewujudkan birokrasi yang menghasilkan hasil nyata, memastikan manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat, serta menciptakan birokrasi yang lincah dan cepat. Hal ini dapat tercapai melalui upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, bukan sekadar agenda rutin.

Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional, serta menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Penajaman terhadap Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024 bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis RB, menghasilkan Road Map yang lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan, serta menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020, target Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri sebesar 93,01 (kategori A)

diharapkan dapat berkontribusi pada tunjangan kinerja 100%. Namun, karena perubahan komponen penilaian oleh Kementerian PAN-RB, target tersebut mengalami penurunan menjadi 85,01 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024. Penurunan ini didasarkan pada terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 tentang perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang mengharuskan penyesuaian dengan Road Map internal Kemendagri.

Penyesuaian tersebut mencakup:

1. Penyesuaian substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB sesuai Road Map RB Nasional, dengan harapan mampu menjawab isu strategis internal, nasional, dan internasional.
2. Sasaran program pembangunan yang bersifat lintas sektor dan lintas instansi, sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran.
3. Pengelolaan RB yang fokus pada percepatan pencapaian tujuan strategis RB melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta penanganan isu prioritas seperti kemiskinan dan investasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri sebesar 87,69 merupakan nilai evaluasi sementara sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/43/RB.04/2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024. Nilai final Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024 akan diumumkan setelah masa sanggah (27 Februari 2025 s.d 12 Maret 2025) yaitu pada saat Ekspose Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Final.

Kemendagri telah menginput rencana aksi pelaksanaan RB tahun 2024 melalui portalrb.menpan.go.id, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1597 Tahun 2024. Untuk memastikan kualitas pelaksanaan rencana aksi RB, telah dilakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Pengiriman surat edaran pengisian rencana aksi kepada masing-masing UKE I dan II pada 13 Juni 2024.
2. Rapat pembahasan pengisian rencana aksi pada 19 Juni 2024.
3. Rapat pembahasan progres tindak lanjut pada 6 Agustus 2024.
4. Pengiriman surat percepatan tindak lanjut pada 15 Agustus 2024.
5. Focus Group Discussion (FGD) mengenai progres pelaksanaan RB pada 23 Oktober 2024 dan 18 November 2024.

Instrumen evaluasi pada Tahun 2024 menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknik Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, setiap komponen penilaian RB General dan Tematik diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Tabel 3.85 Indikator Penyusun Indeks Reformasi Birokrasi

Penilaian		Bobot	Range Nilai
<b>RB General</b>		<b>100,00</b>	
A.	Strategi Pelaksanaan RB General	10,00	
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0 -100
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0 - 100
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40,00	
	Hard Element (Sasaran 1)	33,00	
	Kebijakan Percepatan	33,00	
1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2,00	0 - 100
2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0 - 5
3.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	1 - 5
4.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,00	0 - 3
5.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4,00	0 - 100
6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	0 - 100
7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,00	0 - 5
8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	0 - 100
9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2,00	0 - 100
10.	Indeks Pengelolaan Aset	2,00	0 - 100
11.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	1 - 5
12.	Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	0 - 100
13.	Indeks Reformasi Hukum	1,50	0 - 100
14.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,50	1 - 5
15.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	0 - 100

Penilaian		Bobot	Range Nilai
	Soft Element (Sasaran 2)	7,00	
	Kebijakan Percepatan	7,00	
1.	Indeks Sistem Merit	4,00	0-410
2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00	
	a. Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5
	b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100
C.	Capaian Sasaran Strategis RB	7,00	
	Hard Element (Sasaran 1)	7,00	
1.	Indeks SPBE	9,00	1-5
2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00	
	a. Capaian Prioritas Nasional	3,00	0-100
	b. Capaian IKU	7,00	0-100
3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00	
	a. Opini BPK	5,00	WTP-WDP-TW
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100
1.	Indeks BerAkhlaq	4,00	0-100
2.	Survei Penilaian Integritas	10,00	0-100
3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100
	NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN	100,00	
	KOEFISIEN	100,00	Koefisien adalah penambahan atau pengurangan hasil RB General yang didasarkan pada variable
	TOTAL RB GENERAL		
	RB Tematik	10,00	
A.	Capaian RB Tematik		
1.	Pengentasan Kemiskinan	2,00	0-100
2.	Realisasi Investasi	2,00	0-100
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2,00	0-100
4.	Prioritas Aktual Presiden		
	Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,00	0-100
	Pengendalian Inflasi	2,00	0-100
	<b>TOTAL RB TEMATIK</b>	<b>10,00</b>	
	<b>TOTAL NILAI RB</b>	<b>110,00</b>	

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknik Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Dengan formula pengukuran di atas, maka diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.86 Komponen dan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	82,14
B	RB Tematik	10	5,55
C	Indeks RB	110	87,69
			(A)

Sumber: Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/43/RB.04/2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024.

Evaluasi menggunakan instrumen dilakukan sejak Tahun 2023 dengan diterbitkannya PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Perbandingan capaian masing-masing indikator untuk RB General dan RB Tematik pada tahun 2023 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.87 Hasil Penilaian per Indikator Komponen RB General Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023-2024

No	Indikator	2023	2024	No	Indikator	2023	2024
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,78	2,5	15	Indeks Reformasi Hukum	56,96	87,08
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	87,26	98	16	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral/Indeks Pembangunan Statistik	2,94	3,28
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	82,35	82,35	17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	91,04	93,65
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	4	18	Indeks Sistem Merit	375	375
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,354	3,53	19	Indeks Pelayanan Publik	4,56	4,61
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,75	0,75	20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	90,47	87,04
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75,9	77,9	21	Indeks SPBE	3,64	4,21
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,56	98,95	22	Capaian Prioritas Nasional	94,58	92,52
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	-	23	Capaian IKU	77,78	81,71
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	84,57	90,11	24	Opini BPK	WTP	WTP
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96,48	95,37	25	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	77,6	81,71
12	Indeks Pengelolaan Aset	3,04	3,6	26	Indeks BerAkhlaq	58,4	79,08
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4	5	27	Survei Penilaian Integritas	71,77	75,23
14	Indeks Kualitas Kebijakan	75,05	75,05	28	Survei Kepuasan Masyarakat	92,03	92,37
				29	Net Koefisien (Strategi Pembangunan)	1,51	-
				30	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,5	0,89 (K/L)
				31	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,8	1,15 (K/L)

No	Indikator	2023	2024
32	Digitalisasi Administrasi Pemerintah Berfokus pada Penanganan Stunting	0,6	0,4 (K/L)
33	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,8	1,84 (K/L)
34	Laju Infasi (Strategi Pembangunan)	0,8	1,27 (K/L)
35	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	0,31	-

No	Indikator	2023	2024
36	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,2	-
37	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	0,38	-
38	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	80,93	-
39	Laju Infasi (Capaian Dampak)	1,2	-

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024 sebesar 87,69 menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendagri telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024 sebesar 87,69 dimaksud apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024, telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 sebesar 87,69 dengan capaian sebesar 103,15%.

Keberhasilan ini didukung oleh kontribusi nyata pelaksanaan reformasi birokrasi yang dibagi menjadi dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), yaitu RB General dan RB Tematik. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai kontribusi nyata implementasi RB, antara lain:

#### 1. RB General

- a. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi  
Kemendagri telah melakukan penyederhanaan birokrasi terhadap jabatan administrasi, dengan 82% struktur yang disederhanakan dan total 876 jabatan. Sebagai tindak lanjut, Kemendagri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1325 Tahun 2023 tentang sistem kerja dan pengelolaan kinerja ASN setelah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
- b. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi  
Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1325 Tahun 2023 dilakukan terkait sistem kerja dan pengelolaan kinerja ASN. Kemendagri juga menerapkan squad team dan pengawasan oleh APIP serta mengembangkan aplikasi SIKERJA untuk mendukung implementasi sistem kerja baru.
- c. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  - 1). Menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang revisi Renstra Kemendagri 2020-

2024, yang mencakup penyesuaian sasaran strategis, program, kegiatan, indikator, dan target kinerja. Selain itu, Kemendagri mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan SPIP, serta melakukan pengalokasian anggaran untuk manajemen risiko di masing-masing Unit Kerja Eselon I. Kemendagri juga menyusun SOP Manajemen Risiko dan indikator kinerja risiko, serta membentuk tim kerja Unit Pemilik Risiko (UPR) pada setiap level Unit Kerja Eselon I.

- 2). Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan manajemen risiko, menyusun dokumen manajemen risiko (Risk Register) di setiap level, dan melaksanakan diklat manajemen risiko. Selain itu, Kemendagri juga mempercepat pengelolaan BMN, melaksanakan mitigasi kebijakan antikorupsi, dan menyusun program kerja pengawasan berbasis risiko. Sosialisasi mekanisme Whistleblowing System (WBS) juga dilakukan secara berkala.
- d. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
  - 1). Menerima penganugerahan Zona Integritas dengan predikat WBK untuk Inspektorat II pada Inspektorat Jenderal, berdasarkan Surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/236/PW.99/2024.
  - 2). Menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai Internal ZI.
  - 3). Mengusulkan 23 Unit Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024.
  - 4). Melakukan penilaian internal terhadap satuan kerja yang diusulkan Zona Integritas Menuju WBK dan mengusulkan 13 unit kerja ke Tim

- Penilai Nasional (TPN).
- 5). Melakukan evaluasi AKIP sebagai persyaratan pembangunan Zona Integritas.
  - 6). Bekerja sama dengan Kementerian PANRB dan Tim Panel Independen (TPI) terkait kendala dalam pendampingan dan penilaian pada tahun 2023 serta pembekalan untuk Tahun 2024.
  - 7). Menyusun perjanjian kerja sama antara Kementerian PANRB, satuan kerja yang diusulkan, dan TPI yang menilai dalam rangka pendampingan menuju WBK.
- e. Nilai Sistem Kerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
- 1). Menyusun rencana program dan anggaran, serta perjanjian kinerja Menteri Dalam Negeri.
  - 2). Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kinerja (SiRIKA).
  - 3). Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kemendagri.
  - 4). Menyusun laporan kinerja Kemendagri dan rencana aksi indikator kinerja utama (IKU) untuk Kemendagri dan UKE I.
  - 5). Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Nomor B/52/AA.05/2023, Kemendagri memperoleh nilai 77,90 dengan predikat "BB", yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik. Implementasi SAKIP di Kemendagri telah menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi.
- f. Indeks Perencanaan Pembangunan
- Menyusun revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024. Kemendagri juga menyampaikan usulan penyesuaian sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 kepada Kementerian PPN/Bappenas.
- g. Tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Menyusun enam domain arsitektur SPBE dalam Sistem Informasi Arsitektur (SIA-SPBE) serta merancang peta rencana SPBE di seluruh unit kerja. Implementasi arsitektur SPBE juga diterapkan dalam evaluasi belanja TIK (Clearance), dengan hasil penilaian Kementerian PANRB menunjukkan bahwa implementasi kebijakan arsitektur SPBE Kemendagri mencapai Level 3.
- h. Tingkat Digitalisasi Arsip
- Menyusun rancangan peraturan terkait arsip, termasuk Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pengorganisasian kearsipan. Selain itu, Kemendagri menetapkan Tim Satuan Tugas SRIKANDI, melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi kompetensi kearsipan, serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi SRIKANDI. Koordinasi dengan ANRI diperkuat, dan hasil penilaian ANRI menunjukkan Kemendagri memperoleh nilai 90,11 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan).
- i. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran dan penyelesaian tagihan bagi pejabat perbendaharaan. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan setiap bulan dan triwulan, serta pendidikan dan pelatihan pejabat perbendaharaan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan. Hasil evaluasi disampaikan kepada satuan kerja (Satker) lingkup Kemendagri. Selain itu, pengendalian pencairan anggaran dilakukan secara berkala, dengan hasil penilaian pada aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan menunjukkan nilai sebesar 95,37.
- j. Indikator Pengelolaan Aset
- Menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) semester II dan tahun 2023 serta laporan barang pengguna un-audited tahun anggaran 2023. Usulan rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) disampaikan, sementara tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara (BMN) dilakukan melalui KPKNL dengan pembaruan data BMN secara berkala.
- k. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
- Menyelesaikan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan untuk periode 2024-2028.
- l. Indeks Kualitas Kebijakan
- Melaksanakan rapat koordinasi untuk menginventarisasi kembali bukti (evidence) dalam rangka penilaian indeks kualitas

- kebijakan pada aplikasi. Rapat koordinasi internal antara Biro Hukum dan komponen terkait juga dilakukan untuk memastikan kelengkapan evidence. Berdasarkan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kemendagri memperoleh nilai 75,05.
- m. Indeks Reformasi Hukum  
Melakukan koordinasi dengan Biro Kepegawaian terkait permohonan formasi dan diklat jabatan fungsional perancang perundang-undangsertadenganBPSDM mengenai peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional penyusun perancang perundang-undangan dan analis hukum. Rekapitulasi data jabatan fungsional tersebut juga dilakukan. Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum dalam Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Indeks Reformasi Hukum Kemendagri tahun 2024 mencapai 87,08 dengan kategori A (Sangat Baik).
- n. Indeks Pembangunan Statistik  
Menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan standar data, metadata, dan interoperabilitas data prioritas. Penyusunan standar data dan metadata dilakukan sebagai tindak lanjut lokakarya pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia pada data prioritas tahun 2023. Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 dipersiapkan, dan penilaian mandiri atas evaluasi tersebut juga dilaksanakan.
- o. Indeks Tata Kelola Pengadaan  
Menyusun rencana pengadaan melalui dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun anggaran 2024. Percepatan input RUP dilakukan melalui aplikasi SIRUP, sementara asistensi terhadap pengelola pengadaan barang/jasa diberikan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem e-Purchasing. Penilaian atas kualitas implementasi pengelolaan barang dan jasa mencatat nilai indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ sebesar 28,13, tingkat kematangan UKPBJ sebesar 40,00, dan pemanfaatan sistem pengadaan sebesar 25,52. Berdasarkan penilaian LKPP, Indeks Tata Kelola Pengadaan Kemendagri mencapai 93,65.
- p. Indeks Sistem Merit  
Melengkapi profil kompetensi PNS melalui penilaian kompetensi untuk berbagai jabatan, mengimplementasikan manajemen talenta, dan menetapkan rencana tahunan pengembangan kompetensi. Persiapan program beasiswa ASN dilakukan, serta pengembangan aplikasi SIKERJA sesuai kebijakan nasional. Penilaian kinerja ASN dilaksanakan secara objektif dan sistematis dengan dialog kinerja. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan ASN, disertai monitoring tindak lanjut penilaian indeks profesionalitas ASN serta pengelolaan publikasi informasi kepegawaian. Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemendagri memperoleh nilai 375 dalam penerapan sistem merit dengan kategori IV (Sangat Baik).
- q. Indeks Pelayanan Publik  
Meningkatkan kapasitas petugas layanan guna menciptakan pelayanan publik yang prima di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah. Surveillance SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 dilaksanakan untuk memastikan sistem manajemen mutu dan anti-penyuapan. Rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan pelayanan publik digital SIOLA diadakan dengan unit kerja terkait. Informasi pelayanan publik disajikan melalui digital branding dan media informasi lainnya, serta sosialisasi peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui pencetakan brosur di ruang layanan ULA Kemendagri. Monitoring dan evaluasi proses pengajuan layananSIOLAsertapelaksanaanpelayanan publik di UPT Kemendagri dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggara layanan publik. Berdasarkan penilaian Kementerian PANRB, Kemendagri memperoleh nilai indeks pelayanan publik sebesar 4,61 dengan kategori "A".
- r. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik  
Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai kepatuhan standar pelayanan publik dan melakukan evaluasi pedoman standar pelayanan. Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Kemendagri memperoleh nilai 87,04 dalam Zona Hijau dengan kategori B dan opini kualitas tinggi pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024.
- s. Indeks SPBE  
Kemendagri memperkuat kolaborasi dalam Tim Koordinasi SPBE dan melakukan perubahan kebijakan SPBE. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB, Indeks SPBE Kemendagri tahun 2024 mencapai 4,21 dengan kategori Memuaskan.

- t. Capaian Prioritas Nasional  
Mewujudkan kinerja efektivitas output dengan membandingkan capaian dan target RO yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, ditandai dengan kinerja kategori Baik berdasarkan efektivitas IKU K/L dan efektivitas RO K/L dalam mendukung Prioritas Nasional berdasarkan penilaian Kementerian PPN/ Bappenas.
  - u. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Mewujudkan kualitas capaian indikator kinerja utama (IKU) pembangunan pada K/L dengan membandingkan jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU.
  - v. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  
Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan pengendalian intern melalui bimbingan teknis serta monitoring dan asistensi. Rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi, penyelesaian kasus TPTGR, serta peningkatan kapasitas SDM bendahara dan pengelola keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Kemendagri memperoleh opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2022 selama 10 tahun berturut-turut.
  - w. Tindak Lanjut Rekomendasi  
Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI terkait Laporan Keuangan Tahun 2023 melalui monitoring berkala dan pemutakhiran hasil pemeriksaan dengan unit kerja serta Tim Pemantauan BPK.
  - x. Indeks BerAKHLAK  
Menguatkan internalisasi budaya kerja BerAKHLAK melalui kegiatan "Menuju Kemendagri BerAKHLAK" dengan penerapan pada 12 komponen. Evaluasi dan penyesuaian dilakukan terhadap 41 Agent of Change. Forum Grup Diskusi (FGD) digelar untuk penerapan budaya kerja BerAKHLAK di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan survei Kementerian PANRB, Indeks BerAKHLAK Kemendagri mencapai 79,08 dengan kategori Sehat, mencerminkan budaya kerja yang telah mengakar dalam organisasi.
  - y. Survei Penilaian Integritas  
Kemendagri merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 terkait Unit Pengendalian Gratifikasi serta merevitalisasi struktur keanggotaan dan tugas Tim Saber Pungli. Surat Edaran Mendagri diterbitkan untuk melarang pungutan liar dan mendorong keterlibatan aktif ASN dalam pencegahan korupsi. Penyusunan risk register korupsi dan fraud control plan dilakukan sebagai langkah mitigasi. Pelaporan LHKPN diwajibkan bagi pejabat negara di lingkungan Kemendagri.
  - z. Survei Kepuasan Masyarakat  
Kemendagri menyelenggarakan rapat koordinasi untuk persiapan dan ekspos hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 bersama pihak eksternal dan unit kerja terkait. Berdasarkan hasil penilaian eksternal, Survei Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 92,37.
2. RB Tematik, antara lain:
- a. Penurunan Angka Kemiskinan
    - 1). Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui radiogram, fasilitasi program, serta pelaporan daerah.
    - 2). Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menyusun rekomendasi kebijakan terkait strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
    - 3). Institut Pemerintahan Dalam Negeri meningkatkan kualitas program pengentasan kemiskinan melalui digitalisasi dan peningkatan kapabilitas praja pratama.
    - 4). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.
    - 5). Direktorat Jenderal Otonomi Daerah membahas percepatan pembentukan produk hukum daerah terkait perlindungan hak penyandang disabilitas.
  - b. Peningkatan Realisasi Investasi
    - 1). Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengasistensi penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi guna mendukung kemudahan investasi.
    - 2). Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelesaikan segmen batas daerah dan batas kewenangan sumber daya laut serta mengintegrasikan data wilayah administrasi.
    - 3). Direktorat Jenderal Otonomi Daerah membahas perubahan peraturan daerah terkait kemudahan perizinan

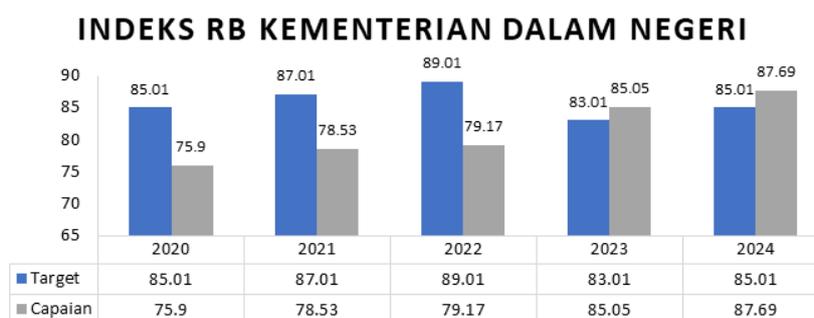
- usaha dan melaksanakan koordinasi penerapan e-perda.
- c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Hilirisasi Stunting)
- 1). Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan FGD dan koordinasi teknis untuk percepatan penurunan stunting serta mendesain e-learning bagi petugas.
  - 2). Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri melaksanakan bimbingan teknis aplikasi pusat jejaring inovasi daerah serta lokakarya strategi penanganan stunting.
  - 3). Institut Pemerintahan Dalam Negeri meningkatkan kualitas rekonsiliasi data stunting melalui digitalisasi dan peningkatan kapabilitas praja pratama.
  - 4). Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan pelatihan lembaga kemasyarakatan serta fasilitasi tata kelola program kesejahteraan keluarga.
- d. Pengendalian Tingkat Inflasi
- 1). Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan dan penyusunan indeks pengendalian inflasi serta menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian inflasi pangan.
  - 2). Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan rapat mingguan pengendalian inflasi dan evaluasi kinerja tim pengendalian inflasi daerah.
  - 3). Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menganalisis strategi pembangunan ekonomi daerah dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait kesejahteraan sosial.
- e. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

- 1). Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 sebagai ajang promosi produk dalam negeri.
- 2). Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang/jasa.
- 3). Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menetapkan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan menyelenggarakan rapat koordinasi terkait UMK dan koperasi.
- 4). Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menyusun strategi dan kebijakan program P3DN melalui rapat perumusan dan penyusunan policy brief.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024 mencapai 85,05. Capaian tersebut melampaui target sebesar 85,01 dengan persentase realisasi sebesar 100,05%.

Hasil evaluasi tahun 2023 tidak dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena adanya perubahan signifikan dalam kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 beserta peraturan turunannya. Meskipun demikian, capaian dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan.

Grafik 3.39 Target dan Capaian Indeks RB Kemendagri Tahun 2020-2024



Sumber: LHE RB Tahun 2020-2023 dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/43/RB.04/2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024, data diolah

Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024 mencapai 87,69, atau 103,15% dari target yang ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat positif. Tren capaian selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang konsisten, meskipun dengan variasi dalam laju kenaikan. Pada Tahun 2020, nilai indeks sebesar 75,9 meningkat menjadi 78,53 pada Tahun 2021, kemudian naik menjadi 79,17 pada Tahun 2022, dan mengalami kenaikan signifikan menjadi 87,69 pada Tahun 2024.

Nilai rata-rata nasional Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Indonesia untuk tahun 2024 belum dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian PANRB. Adapun nilai rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi (RB) nasional Indonesia pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga sebesar 76,81.
2. Pemerintah Provinsi: 69,71.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota: 59,32.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023 berada di atas rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam implementasi reformasi birokrasi yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan manajemen SDM aparatur, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas yang lebih efektif.

Kemendagri melakukan berbagai tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja birokrasi, manajemen SDM, transparansi, dan pengendalian risiko guna mencapai tujuan reformasi birokrasi yang lebih efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa rekomendasi berdasarkan Surat Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB Nomor B/644/RB.06/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang telah ditindaklanjuti, antara lain:

1. Kementerian PANRB:
  - a. Rekomendasi: Pertimbangkan keberadaan eselon III dan IV, terapkan squad team, susun Peta Rencana SPBE, dan sampaikan Rencana Aksi.
  - b. Tindak Lanjut: Penyederhanaan birokrasi dengan transformasi 876 jabatan, evaluasi kelembagaan pasca penyederhanaan, penerapan squad team, pengembangan aplikasi SIKERJA, penyusunan Peta Rencana SPBE, serta Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan.
2. BPKP:
  - a. Rekomendasi: Evaluasi SPIP dengan rekomendasi perbaikan sasaran, indikator, target kinerja, pengendalian tambahan, anggaran SDM, dan manajemen risiko.

- b. Tindak Lanjut: Penetapan Peraturan Menteri tentang Sasaran Strategis dan Target Kinerja, evaluasi kebijakan SPIP, pengalokasian anggaran untuk manajemen risiko, dan penyusunan dokumen manajemen risiko.
3. Kementerian PPN/Bappenas:
    - a. Rekomendasi: Sesuaikan nomenklatur sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam Renja dan Renstra, serta perbaiki keselarasan anggaran dan output prioritas.
    - b. Tindak Lanjut: Penyampaian usulan penyesuaian sasaran strategis pada Renja 2024, dan penetapan perubahan atas Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kemendagri 2020-2024.
  4. Arsip Nasional Republik Indonesia:
    - a. Rekomendasi: Tetapkan kebijakan kearsipan, terapkan aplikasi Srikandi, laksanakan pemberkasan elektronik, dan sertifikasi data center.
    - b. Tindak Lanjut: Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Kepmendagri, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan arsip elektronik.
  5. Kementerian Keuangan:
    - a. Rekomendasi: Perbaiki penarikan dana, dan tingkatkan pengukuran IPA serta ketepatan waktu laporan RKBMN.
    - b. Tindak Lanjut: Bimbingan teknis dan sosialisasi, evaluasi kinerja anggaran, serta pelatihan pejabat perbendaharaan dan pengendalian pencairan anggaran.
  6. Lembaga Administrasi Negara:
    - a. Rekomendasi: Perbaiki relevansi bukti dukung dalam aplikasi penilaian kualitas kebijakan.
    - b. Tindak Lanjut: Rapat koordinasi inventarisasi bukti dukung dan koordinasi internal Biro Hukum terkait input evidence pada aplikasi.
  7. Badan Pusat Statistik:
    - a. Rekomendasi: Implementasikan metadata statistik sesuai format dan Peraturan BPS.
    - b. Tindak Lanjut: Bimbingan teknis penyusunan standar data dan metadata, serta evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.
  8. Komisi Aparatur Sipil Negara:
    - a. Rekomendasi: Lengkapi profil kompetensi pegawai, laksanakan manajemen talenta, dan tingkatkan sistem merit.
    - b. Tindak Lanjut: Penilaian kompetensi pegawai, implementasi manajemen talenta, pengisian jabatan berbasis sistem merit, serta pelatihan ASN di lingkungan

Kemendagri.

9. Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a. Rekomendasi: Perbaiki proses promosi, pencegahan suap, pengawasan internal, serta penyediaan informasi yang memadai.
- b. Tindak Lanjut: Revisi Peraturan Menteri tentang Unit Pengendalian Gratifikasi, optimalisasi Tim UPG, penyusunan risk register korupsi, dan pembangunan fraud control plan.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan digital dengan menggunakan aplikasi SIOLA, mendorong pelayanan digital melalui MPP, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan pengembangan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
2. Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan harmonisasi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Fungsional yang relevan, terutama untuk jabatan-jabatan yang belum memiliki standar kompetensi teknis.

3. Integrasi dan pertukaran data sistem untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data melalui integrasi dan pertukaran data sistem Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD) dan ESR (E-Government Service Rating).
4. Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dengan mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pelatihan dan pembinaan kepada pejabat pengelola SPIP.
5. Peningkatan pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan membangun 23 unit kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kemendagri.
6. Meningkatkan kompetensi aparatur negara melalui pelatihan dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sesuai kebutuhan jabatan, serta menetapkan rencana tahunan pengembangan kompetensi klasikal dan non-klasikal sebagai tindak lanjut dari Human Capital Development Plan (HCDP) Kemendagri.





# SASARAN 11

## Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas

Kementerian Dalam Negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel dan berintegritas.

Akuntabilitas dimaknai sebagai suatu perwujudan dari tanggungjawab pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam tindakan, nilai, ataupun prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai fungsi maupun sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel

dan berintegritas meliputi Indeks Pengawasan Internal dan Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Dengan terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas menjadi sasaran strategis yang sangat penting maka diharapkan akan terwujudnya visi yakni "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong", serta Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Capaian kinerja sasaran strategis "Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas" diperoleh sebesar 100,41%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil. Hal ini didukung oleh capaian 2 (dua) indikator dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.88 Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 100 (Sangat Baik)	100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)	Nilai 85,7	100,82%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				100,41%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



## Indeks Pengawasan Internal



CAPAIAN 2024

Indeks Pengawasan Internal tahun 2024 mencapai nilai 100 dengan predikat Sangat Baik, mencerminkan optimalisasi peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Capaian ini menunjukkan efektivitas pengawasan dalam mendorong perbaikan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sejalan dengan komitmen tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

T = Target R = Realisasi

Salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai pengawas internal di Kementerian Dalam Negeri, yang dalam pelaksanaannya tugasnya untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan proses di dalam organisasi berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta untuk mencegah adanya penyimpangan yang dapat merugikan negara atau masyarakat. Inspektorat Jenderal Kemendagri memiliki peran yang sangat penting dalam bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan internal yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja kementerian.

Indeks Pengawasan Internal Kemendagri digunakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Melalui indeks ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, khususnya dalam menjalankan fungsi mereka sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Indeks Pengawasan Internal dihitung dengan memperhatikan opini laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri, nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Dalam Negeri, persentase penyelesaian TLHP BPK dan pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP Kementerian Dalam Negeri dan nilai kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri. Pengukuran terhadap indikator ini merupakan pengukuran terhadap hasil dan dampak dari pengendalian dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh APIP. Adapun rumusan pengukurannya sebagai berikut:

1. Opini laporan keuangan Kemendagri (bobot 20%);
2. Nilai SAKIP Kemendagri (bobot 20%);
3. Nilai Maturitas SPIP (bobot 20%);
4. Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan Pelaksanaan Pengawasan Internal oleh APIP Kementerian Dalam Negeri (bobot 20%);
5. Nilai Kapabilitas APIP (bobot 20%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai sub indikator. Indeks Pengawasan Internal Tahun 2024 telah tercapai sebesar nilai 100 dengan predikat sangat baik, dari target sebesar Nilai 100. Indeks Pengawasan Internal telah tercapai sebesar 100% dari target sebesar 100. Nilai indeks ini menggambarkan kondisi bahwa inspektorat daerah telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya dengan baik dan telah mencapai tujuan yang sudah ditargetkan.

#### 1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

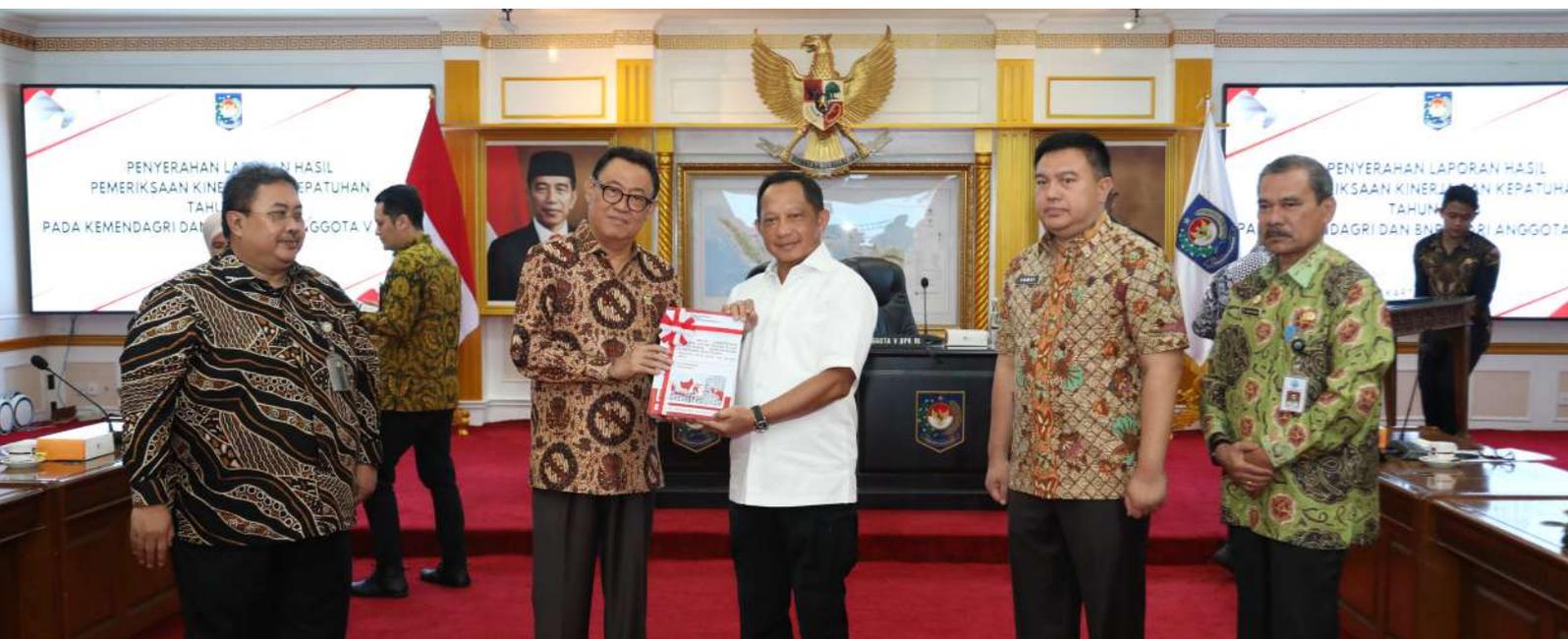
Opini Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria

yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memiliki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Capaian tersebut juga merupakan hasil dari pengawalan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga bahwa laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan mempresentasikan posisi keuangan yang baik. Pencapaian ini secara tidak langsung juga merupakan andil dari Inspektorat Jenderal sebagai APIP dalam melakukan pengawasan intern dalam hal pemeriksaan keuangan dan kinerja, reviu laporan keuangan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penilaian indikator ini dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.89 Kategorisasi Predikat Opini BPK

Opini BPK	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	80
Tidak Wajar (TW)	60
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	40

Kementerian Dalam Negeri telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian, dapat disimpulkan target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah tercapai nilai 100 dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 20.



2. Nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian SAKIP merupakan bagian dari penilaian capaian Reformasi Birokrasi, dengan target pada tahun 2024 predikat BB. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, nilai hasil evaluasi AKIP Kementerian Dalam Negeri sebesar 77,90 (BB). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah tercapai sesuai dengan target sehingga mendapatkan nilai 100 dengan bobot penilaian 20% atau hasil indeks 20.

3. Nilai Maturitas SPIP Kemendagri Penyelenggaraan SPIP memiliki peran yang sangat penting bahkan terus berkembang dalam kerangka pelaksanaan birokrasi pemerintahan, hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Nilai Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan atau kualitas dari penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah. SPIP sendiri merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pemerintahan dapat tercapai dengan efisien, efektif, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2024, Kemendagri menetapkan target SPIP tercapai pada Level 3. Penilaian maturitas ini mengacu pada sejauh mana penerapan SPIP tersebut sesuai dengan standar dan prinsip yang telah ditetapkan. Terhadap seluruh upaya yang dilakukan, sampai dengan Tahun 2024, Nilai maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mencapai Level 3 sehingga target pada tahun 2024 telah tercapai dan mendapatkan nilai 100 dengan bobot penilaian 20%, atau hasil indeks 20.

4. Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan Pelaksanaan Pengawasan Internal oleh APIP Kementerian Dalam Negeri

Capaian persentase TLHP atas Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri secara tuntas atau 100%. Pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang aktif, profesional, proaktif dan inovatif telah dilaksanakan seluruhnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian TLHP BPK dan pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP Kementerian Dalam Negeri yang telah dilaksanakan memperoleh nilai 100 dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 20.

5. Nilai Kapabilitas APIP Nilai Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal menetapkan target nilai Kapabilitas APIP mencapai pada level 3. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, memberikan hasil Level 3 untuk kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri sehingga target pada tahun 2024 telah tercapai dan mendapatkan nilai 100 dengan bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks 20.

Pada tahun 2024, Indeks Pengawasan Internal mengalami kenaikan dibanding dengan capaian kinerja pada 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan konsistensi Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan internal di Kemendagri.

Analisis penyebab keberhasilan yang menunjang pencapaian Indeks Pengawasan Internal Tahun 2024, diantaranya:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 10 kali berturut-turut sejak Laporan Keuangan Tahun 2014 s.d 2023, yang juga merupakan hasil dari pengawalan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri.

2. Komitmen unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang diasistensi oleh Inspektorat Jenderal juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
3. Kapabilitas APIP menjadi salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi capaian indikator Indeks Pengawasan Internal.
4. Mengoptimalkan pendampingan terhadap pengendalian internal di lingkungan UKE.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Pengawasan Internal, sebagai berikut:

1. Aspek Anggaran: Jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,267,138,000,- telah terealisasi sebesar Rp2,262,766,673- atau sebesar 99,81%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.
2. Aspek SDM dan Teknologi: Melaksanakan

rapat koordinasi bersama pihak yang berkepentingan secara daring melalui zoom meeting.

Adapun upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Pengawasan Internal, diantaranya:

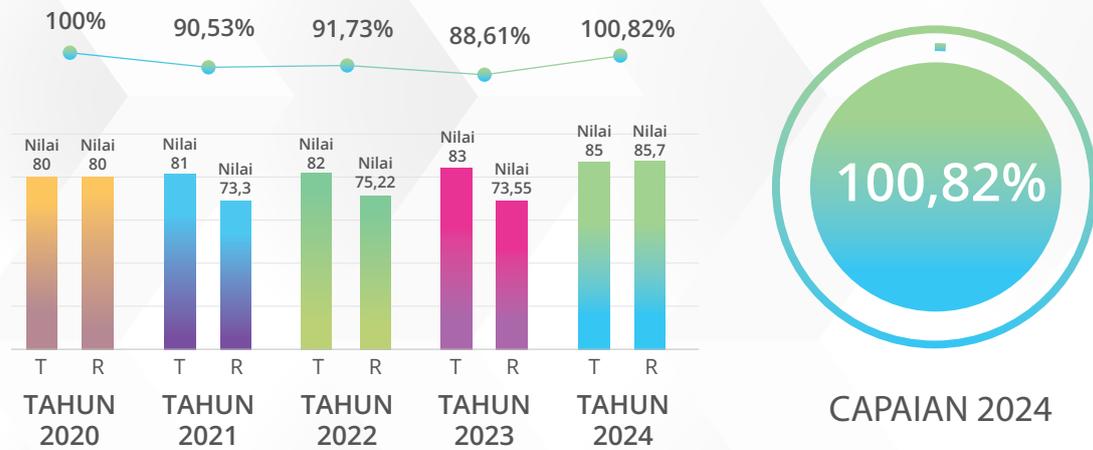
1. Mengakomodir aktivitas pengawasan internal secara memadai dalam dokumen Perencanaan Pengawasan setiap tahun yang mencakup pengawasan keuangan dan kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, mengoptimalkan pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Reviu Laporan Kinerja serta monitoring dan evaluasi secara periodik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akuntabilitas dan efektifitas pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Dalam Negeri tetap terjaga.
2. Mengoptimalkan pendampingan terhadap pengendalian internal di lingkungan Unit Kerja Eselon (UKE) I sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

# RAPAT KOORDINASI

**TEKNIS PENGAWASAN & PENYERAHAN PENGHARGAAN SPIP TERINTEGRASI**



## Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus



Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus tahun 2024 mencapai Nilai 85,70 dengan predikat Baik, mencerminkan peningkatan efektivitas dalam menangani pengaduan, indikasi penyimpangan, dan potensi kasus terkait aparat penyelenggara negara. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam pengawasan khusus di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

T = Target R = Realisasi

Pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu bentuk pengawasan internal yang dilakukan untuk menilai kinerja, kepatuhan, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka mendeteksi dan mencegah adanya penyimpangan, baik yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, kebijakan, maupun prosedur yang diterapkan. Dalam melaksanakan perannya, Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan fungsi untuk mengakomodir pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dimaksud merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pengawasan khusus dalam penanganan pengaduan dan indikasi penyimpangan atau potensi kasus yang berhubungan dengan aparat penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dihitung dengan memperhatikan persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya lingkup Kemendagri serta persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan investigasi lingkup Kemendagri.

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus Tahun 2024 telah tercapai sebesar 85,70 dari target sebesar 85. Nilai indeks ini menggambarkan kondisi bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya dengan baik dan telah mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. Adapun rumusan pengukurannya sebagai berikut:

1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi Lainnya Lingkup Kemendagri (Bobot 60%); dan
2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi Lingkup Kemendagri (Bobot 40%).

Hasil akhir persentase dari formula perhitungan merupakan nilai total penjumlahan dari masing-masing pembobotan nilai sub indikator.

1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi Lainnya Lingkup Kemendagri. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan partisipasi publik dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri seringkali menerima pelimpahan kasus dari instansi lain. Pelimpahan kasus tersebut berkaitan dengan penyimpangan dan mal administrasi yang berhubungan dengan pemerintahan dalam negeri. Jika dalam pelimpahan kasus atau penanganan pengaduan ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran, Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan rekomendasi berupa perbaikan administrative, sanksi administratif, dan penyampaian kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Sepanjang Tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri menerima sebanyak 562 pengaduan yang secara keseluruhan telah ditangani dan diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dikoordinasikan sebanyak 65 pengaduan;
- b. Dilimpahkan sebanyak 49 pengaduan;
- c. Diklarifikasi sebanyak 36 pengaduan;
- d. Dilakukan pemeriksaan khusus sebanyak 95 pengaduan;
- e. Diarsipkan sebanyak 317 pengaduan

Persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lain dihitung dengan menjumlahkan pengaduan yang diarsipkan, dilimpahkan, diklarifikasi, dan dilakukan pemeriksaan khusus (riksus) kemudian dibagi dengan jumlah pengaduan. Hasil yang didapat dari perumusan tersebut yaitu sebesar nilai 88,43% dengan bobot penilaian 60% atau dengan hasil indeks 53,06. Perhitungan dari hasil capaian indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

#### ***Penanganan dumas dan pelimpahan***

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang diarsipkan, dilimpahkan, diklarifikasi, & riksus}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100$$

$$= \frac{497}{562} \times 100\% = 88,43\%$$

2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan investigasi oleh Kemendagri merupakan bagian penting dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terhadap pemerintah daerah. Langkah-langkah tindak lanjut yang diambil berdasarkan temuan hasil pemeriksaan meliputi rekomendasi perbaikan administratif, pemberian sanksi administratif, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan tindak pidana.

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi dihitung dengan jumlah saran atas Pemeriksaan Investigasi tindak lanjut kemudian dibagi dengan keseluruhan saran yang dikeluarkan atas Pemeriksaan Investigasi. Hasil yang didapat dari perumusan tersebut yaitu sebesar nilai 81,6% dengan bobot penilaian 40% atau dengan hasil indeks 32,64.

Apabila dibandingkan dengan lima tahun terakhir, capaian indeks ini mengalami kenaikan dengan nilai melebihi dari target yang ditentukan yaitu

85,7. Hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan khusus.

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus, diantaranya:

1. Penggunaan Sistem Informasi penanganan pengaduan masyarakat (e-Dumas) sebagai upaya untuk memudahkan akses masyarakat dan pihak terkait dalam menyampaikan pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Intensif dalam melakukan koordinasi dan penggunaan SP4N Lapor.
3. Melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia APIP di lingkungan Inspektorat Khusus yang secara langsung mengemban tugas penanganan pengaduan dan pemeriksaan khusus/investigatif melalui Pendidikan dan pelatihan investigatif, pelatihan penanganan pengaduan dan lain sebagainya.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus, sebagai berikut:

1. Aspek Anggaran: Jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pemeriksaan Khusus Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.413.469.000-, telah terealisasi sebesar Rp2.412.888.228- atau sebesar 99,98%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.
2. Aspek SDM dan Teknologi: Menggunakan aplikasi dalam pelaporan dan penanganan pengaduan masyarakat sehingga dapat menghemat penggunaan anggaran dan juga lebih efektif dalam penggunaan waktu. Selain itu, pengklasifikasian pengaduan sesuai hasil penelaahan membuat penanganan lebih optimal dengan adanya beberapa pengaduan

yang dilimpahkan kepada Inspektorat Daerah ataupun APH.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Proses tindaklanjut atas pemeriksaan investigasi memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga pada saat penilaian persentase tindaklanjut masih belum 100% ditindaklanjuti. Selain itu, saat tim melakukan penelaahan pada aduan masyarakat.
2. masih banyak pengaduan yang tidak disertai dengan identitas lengkap pengadu, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk melakukan klasifikasi dan penanganan.

Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada internal kementerian Dalam Negeri dan juga masyarakat terkait dengan Whistle Blowing System (WBS) dan peningkatan kapabilitas SDM Inspektorat khusus.





# SASARAN 12

## Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini menggambarkan bahwa kedudukan Kementerian Dalam Negeri sangat strategis dalam mewujudkan Pemerintahan Dalam Negeri khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjamin keberlangsungan roda pemerintahan di daerah

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun strategi kebijakan dengan melihat ragam permasalahan yang terjadi di daerah, memperhatikan perkembangan teknologi baik di Indonesia maupun terhadap Isu Global, atau isu-isu aktual lainnya. Hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri khususnya terkait pemerintahan daerah akan dijadikan sebagai salah satu rekomendasi perbaikan mulai dari proses perumusan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai dengan proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

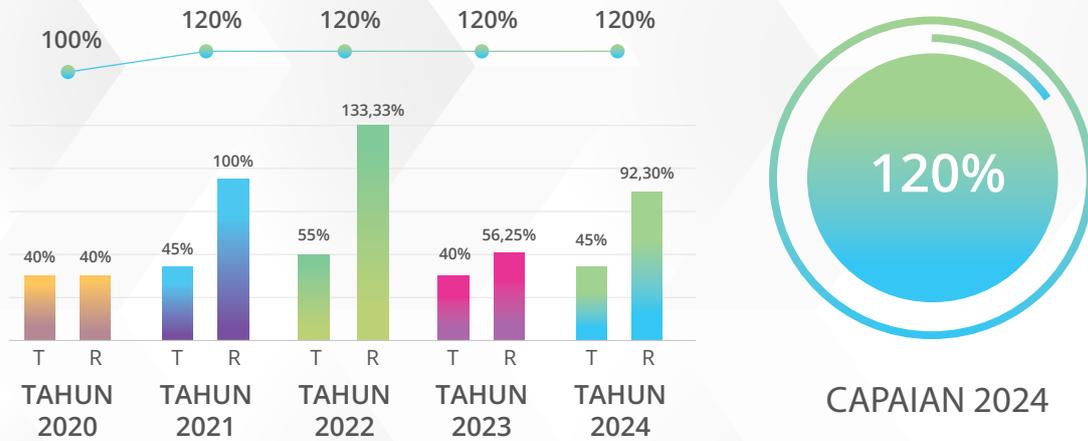
Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri” diperoleh sebesar 120%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil Hal ini didukung oleh capaian indikator persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.90 Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	92,30%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri



Penelaahan mendalam atas implementasi dan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintah daerah menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan yang mampu memperbaiki kebijakan dalam negeri secara berkelanjutan sesuai fungsi Kementerian Dalam Negeri

T = Target R = Realisasi

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Pasal 65 ayat (1) dijelaskan bahwa "Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN", Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai UKE I Kementerian Dalam Negeri yang mengampu tuisi Penelitian dan Pengembangan harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan diubah menjadi Fungsi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, tugas BSKDN adalah menyelenggarakan

perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN mempunyai peran sebagai unit kerja yang dapat memberikan rekomendasi strategi kebijakan yang tepat guna. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, Kemendagri melalui BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Mendagri kepada pemangku kepentingan (Unit Kerja Eselon/UKE I) di lingkup Kementerian Dalam Negeri, berupa disposisi Menteri Dalam Negeri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri. Pada Tahun 2024, telah dihasilkan sebanyak 13 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melalui berbagai forum yang dirincikan, antara lain:

Tabel 3.91 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024

	Forum Diskusi Aktual	Kajian Strategis	Kirstranas
Jumlah Rekomendasi	5	7	1

1. 5 rekomendasi kebijakan melalui forums diskusi strategis
    - a. Strategi Penerapan Digitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10.5/2800/BSKDN, tgl. 10 Juni 2024).
    - b. Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10/4386/BSKDN, tgl. 10 September 2024).
    - c. Strategi Penguatan Sistem Antikorupsi di Desa (Rekomendasi Nomor.100.3/5867/BSKDN, tgl. 28 November 2024).
    - d. Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Serentak 2024 (Rekomendasi Nomor. 200.2/3556/BSKDN, tgl. 16 Juli 2024).
    - e. Alternatif Kebijakan Penganggaran Pilkada Serentak (Rekomendasi Nomor.200.2/2181/BSKDN, tgl. 3 Mei 2024).
  2. 7 rekomendasi kebijakan melalui Kajian Strategis
    - a. Model Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Daerah (Rekomendasi Nomor.000.10.5/5264/BSKDN, tgl. 24 Oktober 2024).
    - b. Analisis Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Publik (Rekomendasi Nomor.400.8/5265/BSKDN, tgl. 24 Oktober 2024).
    - c. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Terhadap Laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang Kondisi Perekonomian Terkini (Rekomendasi Nomor.500/4315/BSKDN, tgl. 3 September 2024).
  3. 1 Rekomendasi Kebijakan melalui Kistranas, yaitu Optimalisasi Rekrutmen & Kaderisasi Parpol untuk Penguatan Demokrasi (Rekomendasi Nomor.200.2/3795/BSKDN, tgl. 26 Juli 2024).
- Penelaahan mendalam atas rekomendasi kebijakan yang disampaikan ke Bapak Mendagri menghasilkan 12 rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas kebijakan dalam negeri secara berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendagri, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.92 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024

	Policy Brief	Kajian Strategis	Kistranas
Jumlah Rekomendasi	5	6	1

1. 5 Rekomendasi kebijakan dalam bentuk Policy Brief
  - a. Model Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Daerah.
  - b. Analisis Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Publik.
  - c. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Terhadap Laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang Kondisi Perekonomian Terkini.
  - d. Uji coba penerapan penilaian kabupaten kota/bersih.
  - e. Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan pada Pilkada Serentak 2024.
  - f. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024 dari Perspektif HAM.
2. 6 Rekomendasi kebijakan dalam bentuk Kajian strategis

3. Rekomendasi kebijakan dalam bentuk Kritranas, yaitu Optimalisasi Rekrutmen & Kaderisasi Parpol untuk Penguatan Demokrasi.

Penelaahan mendalam atas rekomendasi kebijakan yang disampaikan ke Bapak Mendagri menghasilkan 12 rekomendasi kebijakan yang

ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas kebijakan dalam negeri secara berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendagri, dengan rincian sebagai berikut:

Penghitungan capaian indikator dilakukan dengan formulasi berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh MDN ke Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan kepada Mendagri}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{12 \text{ Disposisi ke Pemangku Kepentingan}}{13 \text{ Rekomendasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 92,30\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{92,3\%}{45\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 205,11\%$$

Keberhasilan pencapaian Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri didukung dengan adanya beberapa faktor, antara lain:

1. Ditetapkannya Kepmendagri Nomor 000.10-206 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Strategi Kebijakan di Lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.
2. Koordinasi yang efektif antar Unit Kerja Eselon I Kemendagri dilakukan melalui kegiatan penyusunan program yang melibatkan perwakilan masing-masing unit kerja untuk menghimpun isu-isu strategis terbaru.
3. Penyusunan rekomendasi strategi kebijakan melibatkan tenaga ahli, di mana setiap kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) dan kajian strategis menghadirkan narasumber dari akademisi atau praktisi yang kompeten di bidangnya.
4. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

Kemendagri melalui BSKD telah melakukan serangkaian Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan kinerja indikator ini, antara lain:

1. Pelaksanaan FDA melibatkan pakar, akademisi, dan praktisi sebagai narasumber serta mengundang peserta dari daerah, Kementerian/Lembaga lain, dan Unit Kerja Eselon I Kemendagri.
2. Pelaksanaan Rapat Penyusunan Program (Sungram) di awal tahun anggaran melibatkan UKE I Kemendagri untuk menghimpun isu-isu strategis terbaru.
3. Koordinasi internal dengan UKE I Kemendagri dilakukan sesuai dengan judul kegiatan masing-masing pusat strategi kebijakan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini, antara lain:

1. Keterbatasan SDM Analisis Kebijakan terlihat dari jumlah pegawai yang hanya 26 orang, jauh dari kebutuhan ideal berdasarkan formasi yang ditetapkan sebanyak 60 orang.
2. Kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan terlihat dari belum adanya peraturan yang mengatur keterlibatan BSKDN

dalam penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Eselon I di lingkungan Kemendagri..

3. Keterbatasan dalam pemantauan dan evaluasi tindak lanjut disposisi Bapak Menteri Dalam Negeri kepada pemangku kepentingan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Melakukan kerja sama dengan K/L terkait untuk peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian maupun lembaga donor seperti Monash dan Kosso Nippon.
2. Ditetapkannya Kepmendagri Nomor 000.10-206 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Strategi Kebijakan di Lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

3. Ditetapkannya instrumen Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan (IKRK) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dari dukungan lembaga lain, seperti SKALA.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKSDN.

# RAH KEBIJAKAN PUSAT D

# ANGKA MENYUKSESKAN A

JAKARTA, 06 -07 DESEMBER 2024

**BerAKHLAK**

berorientasi pelayanan berintegritas kompeten  
akhlak mulia peduli keadilan





**Pagu & Realisasi Anggaran  
Kementerian Dalam Negeri  
Tahun 2024**



## Pagu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2024 adalah sebesar Rp.3.347.771.832.000,-.

Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun 2024, terdapat penambahan Pagu Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.2.186.906.598.000,- dan pengurangan Pagu sebesar Rp.328.906.603.000,- sehingga total pagu Kementerian Dalam Negeri TA.2024 menjadi sebesar Rp. 5.205.771.827.000,- (Sumber data: OMSPAN Kementerian Keuangan Tahun 2024), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.93 Penambahan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

No	Penambahan Anggaran
1	Penambahan Anggaran HLDN untuk pengadaan Blangko KTP-el sebesar Rp.3.604.428.000,- (terbit DIPA tanggal 20 Maret 2024).
2	Penambahan Anggaran PLN untuk kegiatan Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital sebesar Rp.557.405.902.000,- (terbit DIPA tanggal 22 April 2024).
3	Penambahan Anggaran PLN dan HLN sebesar Rp.51.527.030.000,- (terbit DIPA tanggal 17 Mei 2024).
4	Penambahan Pagu HLN sebesar Rp.517.472.000,- (terbit DIPA tanggal 3 Juni 2024).
5	Penambahan Pagu PLN untuk kegiatan P3PD sebesar Rp.1.075.410.809.000,- (terbit DIPA tanggal 20 Juni 2024).
6	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPPSDM Regional Makassar sebesar Rp.1.751.977.000,- (terbit DIPA tanggal 3 Juli 2024).
7	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPPSDM Regional Yogyakarta sebesar Rp. 2.041.871.000,- (terbit DIPA tanggal 19 Juli 2024).
8	Penambahan Pagu PLN untuk kegiatan P3PD sebesar Rp.57.107.697.000,- (terbit DIPA tanggal 29 Juli 2024).
9	Penambahan Pagu PNBPPPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp.2.415.508.000,- (terbit DIPA tanggal 31 Juli 2024).
10	Penambahan Pagu PNBPIPDN Jatinangor sebesar Rp.994.187.000,- (terbit DIPA tanggal 2 Agustus 2024).
11	Penambahan HDN sebesar Rp.53.308.011.000,- (terbit DIPA tanggal 23 Agustus 2024).
12	Penambahan Pagu PNBPPPSDM Regional Makassar sebesar Rp.200.000.000,- (terbit DIPA tanggal 23 Agustus 2024).
13	Penambahan Pagu PNBPPada seluruh Satker Balai Pemdes sebesar Rp.183.141.000,- (terbit DIPA tanggal 2 September 2024).
14	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPada PPSDM Regional Yogyakarta sebesar Rp.1.621.620.000,- (terbit DIPA tanggal 9 September 2024).
15	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPada PPSDM Regional Makassar sebesar Rp.2.378.824.000,- (terbit DIPA tanggal 20 September 2024).
16	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPada PPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp.2.394.284.000,- (terbit DIPA tanggal 23 September 2024).
17	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPada PPSDM Regional Bandung sebesar Rp.1.810.571.000,- (terbit DIPA tanggal 30 September 2024).
18	Penambahan Pagu PHLN sebesar Rp.77.829.966.000,- (terbit DIPA tanggal 10 Oktober 2024).
19	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPPada sebesar Rp. 65.700.000.000,- (terbit DIPA tanggal 12 Oktober 2024).

No	Penambahan Anggaran
20	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN pada PPSDM Regional Makassar sebesar Rp.568.080.000,- (terbit DIPA tanggal 14 Oktober 2024).
21	Penambahan Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp.697.467.000,- (terbit DIPA tanggal 15 Oktober 2024).
22	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN sebesar Rp.1.344.806.000,- (terbit DIPA tanggal 16 Oktober 2024).
23	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN BPSDM Pusat sebesar Rp.872.077.000,- (terbit DIPA tanggal 28 Oktober 2024).
24	Penambahan Pagu HLN sebesar Rp.373.167.000,- (terbit DIPA tanggal 5 November 2024).
25	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Regional Bandung sebesar Rp.378.228.000,- (terbit DIPA tanggal 8 November 2024).
26	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN Balai Satpol PP dan Damkar sebesar Rp.403.200.000,- (terbit DIPA tanggal 8 November 2024).
27	Penambahan Pagu Penggunaan Balai Besar Pemdes Malang sebesar Rp.378.902.000,- (terbit DIPA tanggal 11 November 2024).
28	Penambahan Pagu HDN sebesar Rp.809.469.000,- (terbit DIPA tanggal 13 November 2024).
29	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Regional Yogyakarta sebesar Rp.258.250.000,- (terbit DIPA tanggal 20 November 2024).
30	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp.1.476.260.000,- (terbit DIPA tanggal 21 November 2024).
31	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN BPSDM Pusat sebesar Rp.1.131.007.000,- (terbit DIPA tanggal 28 November 2024).
32	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Bandung sebesar Rp.1.959.132.000,- (terbit DIPA tanggal 28 November 2024).
33	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN Balai Satpol PP dan Damkar sebesar Rp.100.800.000,- (terbit DIPA tanggal 28 November 2024).
34	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Regional Makassar sebesar Rp.513.519.000,- (terbit DIPA tanggal 29 November 2024).
35	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN PPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp.725.215.000,- (terbit DIPA tanggal 29 November 2024).
36	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN IPDN Jatinangor sebesar Rp.817.000.000,- (terbit DIPA tanggal 29 November 2024).
37	Penambahan Anggaran dari BA BUN untuk Kegiatan SIPD sebesar Rp.81.332.690.000,- (terbit DIPA tanggal 6 Desember 2024).
38	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN Balai Besar Pemdes Malang sebesar Rp.194.918.000,- (terbit DIPA tanggal 10 Desember 2024).
39	Penambahan Pagu Penggunaan PNBPN BPSDM Pusat sebesar Rp.1.060.000.000,- (terbit DIPA tanggal 11 Desember 2024).
40	Penambahan Hibah Langsung Luar Negeri pada Ditjen Bina Bangsa sebesar Rp.28.809.113.000,- (terbit DIPA tanggal 30 Desember 2024)

Tabel 3.94 Pengurangan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

No	Pengurangan Anggaran
1	Drop Loan PLN Ditjen Bina Adwil sebesar Rp.500.000.000,- (terbit DIPA tanggal 1 November 2024).
2	Drop Loan pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp.294.949.670.000,- (terbit DIPA tanggal 3 Desember 2024).
3	Drop Loan pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp.12.740.782.000,- (terbit DIPA tanggal 16 Desember 2024).
4	Drop Loan pada Ditjen Bina Bangda sebesar Rp.514.431.000,- (terbit DIPA tanggal 18 Desember 2024).
5	Drop Loan pada Ditjen Bina Adwil sebesar Rp.15.701.720.000,- (terbit DIPA tanggal 26 Desember 2024).

### Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Dari total Pagu anggaran sebesar Rp.5.205.771.827.000,-, Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2024 adalah sebesar Rp.5.021.069.637.329,- (unaudited) atau 96,45%. Realisasi Anggaran sebesar 96,45% dimaksud berada di atas rata-rata nasional sebesar 94,85% atau peringkat ke-8 dari 21 Kementerian/Lembaga pagu sedang dan peringkat ke-33 dari 86 Kementerian/Lembaga (Sumber: OMSPAN Kementerian Keuangan Tahun 2024), dengan rincian berdasarkan Unit Kerja Eselon I, sebagai berikut:

Tabel 3.95 Realisasi Kemendagri per Unit Kerja Eselon I Tahun 2024

No	Unit Kerja Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	IPDN	602.603.761.000	601.643.081.631	99,84
2	POLPUM	221.138.641.000	220.412.541.101	99,67
3	ITJEN	88.732.681.000	88.199.661.002	99,40
4	BPSDM	230.806.716.000	229.334.445.297	99,36
5	DKPP	76.268.173.000	75.723.751.229	99,29
6	SETJEN	663.728.823.000	656.475.342.710	98,91
7	DUKCAPIL	1.278.777.600.000	1.261.683.882.407	98,66
8	BSKDN	55.559.478.000	54.554.886.362	98,19
9	KEUDA	110.137.836.000	107.327.986.566	97,45
10	BANGDA	343.644.826.000	331.706.706.202	96,53
11	OTDA	95.012.875.000	90.903.206.981	95,67
12	ADWIL	224.738.969.000	210.789.633.085	93,79
13	PEMDES	1.214.621.448.000	1.092.314.512.756	89,93
<b>Total</b>		<b>5.205.771.827.000</b>	<b>5.021.069.637.329</b>	<b>96,45</b>

Dari total Pagu anggaran sebesar Rp.5.205.771.827.000,-, terdapat pagu blokir sebesar Rp.40.290.593.000,- yang tersebar pada seluruh Unit kerja Eselon I. Adapun realisasi Kemendagri setelah dikurangi Blokir adalah sebesar 97,20%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.96 Realisasi Kemendagri Setelah Dikurangi Blokir per Unit Kerja Eselon I Tahun 2024

No	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Setelah Dikurangi Blokir (Rp)	Realisasi Setelah Dikurangi Blokir	
					(Rp)	%
1	IPDN	602.603.761.000	297.861.000	602.305.900.000	601.643.081.631	99,89
2	POLPUM	221.138.641.000	668.459.000	220.470.182.000	220.412.541.101	99,97
3	ITJEN	88.732.681.000	451.967.000	88.280.714.000	88.199.661.002	99,91
4	BPSDM	230.806.716.000	875.768.000	229.930.948.000	229.334.445.297	99,74
5	DKPP	76.268.173.000	170.119.000	76.098.054.000	75.723.751.229	99,51
6	SETJEN	663.728.823.000	1.108.902.000	662.619.921.000	656.475.342.710	99,07
7	DUKCAPIL	1.278.777.600.000	4.505.424.000	1.274.272.176.000	1.261.683.882.407	99,01
8	BSKDN	55.559.478.000	157.965.000	55.401.513.000	54.554.886.362	98,47
9	KEUDA	110.137.836.000	1.605.257.000	108.532.579.000	107.327.986.566	98,89
10	BANGDA	343.644.826.000	10.091.059.000	333.553.767.000	331.706.706.202	99,45
11	OTDA	95.012.875.000	3.365.057.000	91.647.818.000	90.903.206.981	99,19
12	ADWIL	224.738.969.000	10.916.820.000	213.822.149.000	210.789.633.085	98,58
13	PEMDES	1.214.621.448.000	6.075.935.000	1.208.545.513.000	1.092.314.512.756	90,38
<b>Total</b>		<b>5.205.771.827.000</b>	<b>40.290.593.000</b>	<b>5.165.481.234.000</b>	<b>5.021.069.637.329</b>	<b>97,20</b>





**BAB IV**  
**Peningkatan**  
**Akuntabilitas Kinerja**  
**Kementerian Dalam Negeri**

## Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/598/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024, hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri TA.2024 mengalami kenaikan nilai sebesar 2,0 dibandingkan tahun lalu, yaitu yang semula sebesar 75,90 (BB) pada TA.2023 menjadi 77,90 (BB) pada TA.2024. Selain itu, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi terkait dengan kualitas Implementasi AKIP di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.

Catatan:

### 1. Perencanaan Kinerja

Kementerian Dalam Negeri telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Strategis (Renstra) yang telah dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat kementerian dan unit kerja di bawahnya dengan kualitas yang baik. Penyusunan dokumen tersebut sebagian besar telah dilakukan berdasarkan hasil penjenjangan kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis di tingkat kementerian yang indikator kinerjanya belum berorientasi pada hasil (outcome) dan cenderung berfokus pada proses atau output. Sebagai contoh, sasaran strategis "Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri" memiliki indikator "Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 JP Per Tahun";
- b. Kementerian Dalam Negeri telah menyusun penjenjangan kinerja sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kinerja. Namun penjenjangan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip penyusunan penjenjangan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari beberapa kelemahan berikut:
  1. Pada tingkat pusat, masih terdapat penjenjangan kinerja yang hanya dijabarkan pada satu faktor kinerja, sehingga kurang mencerminkan keterpaduan berbagai faktor kinerja lain yang mendukung pencapaian kinerja tersebut;
  2. Ditemukan kesamaan indikator kinerja pada beberapa tingkat penjenjangan, sehingga berpotensi menimbulkan redundansi dan mengurangi

kejelasan hierarki kinerja. Sebagai contoh, padapenjenjangan kinerja tingkat pusat, terdapat kinerja "Meningkatnya Kualitas Demokrasi" dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, dan Indeks Kinerja Demokrasi. Kinerja tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran kinerja "Meningkatnya Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi", tetapi indikator kinerja yang digunakan tetap sama dengan indikator pada tingkat sebelumnya;

3. Pada tingkat unit kerja terdapat indikator kinerja yang belum setara dengan kondisi kinerja yang diwujudkan. Sebagai contoh pada kinerja level outcome Dirjen Bina Pemerintah Desa terdapat kinerja "Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien", namun terdapat salah satu indikator yang ditetapkan belum sepenuhnya relevan/setara dengan kondisi yang akan diwujudkan seperti "Jumlah Kab/Kota yang desanya telah di tata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai ketentuan perundangan";
- c. Kementerian Dalam Negeri dan unit kerja terkait telah menyusun dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (Manual IKU). Namun dokumen tersebut, baik di tingkat kementerian maupun sebagian unit kerja, masih belum dilengkapi dengan deskripsi dan definisi operasional atau formulasi perhitungan yang memadai. Sebagai contoh pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah, dokumen Manual IKU yang disusun hanya memuat penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja, indikator program, dan target. Manual IKU tersebut belum disertai dengan penjelasan komprehensif seperti definisi operasional, metode pengukuran, sumber data, dan mekanisme pelaporan pada setiap indikator kinerja;
- d. Penetapan target kinerja di tingkat pusat belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi kinerja eksisting maupun capaian kinerja sebelumnya. Hal ini terlihat pada beberapa kasus berikut:
  1. Indikator Indeks Kinerja Ormas: Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 66, sedangkan capaian tahun sebelumnya telah mencapai 76,45. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian

antara target yang ditetapkan dengan realitas capaian kinerja sebelumnya, yang dapat mencerminkan penurunan ambisi dalam penetapan target;

2. Indikator Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Baik: Pada tahun 2023, realisasi kinerja telah mencapai 12,22%. Namun target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 hanya sebesar 4%, dimana target tersebut jauh dibawah capaian sebelumnya.
  - e. Penyusunan rencana aksi pada sebagian unit kerja belum sepenuhnya menjabarkan rencana aksi atas Perjanjian Kinerja unit kerja terkait. Sebagai contoh pada Ditjen Otonomi Daerah terdapat lima indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, namun matriks rencana aksi yang disampaikan hanya terbatas pada pengukuran kinerja satu indikator kinerja saja yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Pengukuran Kinerja  
Penyusunan rencana aksi pada sebagian unit kerja belum sepenuhnya menjabarkan rencana aksi atas Perjanjian Kinerja unit kerja terkait. Sebagai contoh pada Ditjen Otda terdapat lima indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, namun matriks rencana aksi yang disampaikan hanya terbatas pada pengukuran kinerja satu indikator kinerja saja yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:
    - a. Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja melalui aplikasi Sirika, namun aplikasi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan untuk dapat mengakomodir proses pengukuran kinerja dan masih terbatas pada proses pengumpulan pelaporan hasil pelaksanaan pengukuran kinerja;
    - b. Pelaksanaan pengukuran capaian rencana aksi unit kerja belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja unit kerja. Pada beberapa unit kerja pengukuran capaian rencana aksi hanya dilakukan pada sebagian indikator kinerja.
  3. Pelaporan Kinerja  
Pelaksanaan pengukuran capaian rencana aksi unit kerja belum sepenuhnya dilakukan

berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja unit kerja. Pada beberapa unit kerja pengukuran capaian rencana aksi hanya dilakukan pada sebagian indikator kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya adalah Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perbaikan perencanaan kinerja di tahun berikutnya. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara capaian kinerja pada tahun sebelumnya dengan target yang ditetapkan untuk tahun berikutnya. Sebagai contoh dalam Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintah Desa Tahun 2023, realisasi kinerja indikator Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" telah mencapai 12,23%. Namun, target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Pemerintah Desa Tahun 2024 hanya sebesar 4%, jauh lebih rendah dari capaian sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal  
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP diseluruh unit kerja. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut, telah disusun pedoman evaluasi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3-53 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:
  - a. Tindak lanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya relevan atau sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hal ini terlihat pada rekomendasi untuk Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum ). Salah satu rekomendasinya adalah melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja program dalam dokumen Renstra Ditjen. Namun dokumen tindak lanjut yang disampaikan berupa dokumen Renstra di tingkat kementerian, sehingga tidak spesifik menjawab kebutuhan perbaikan pada level Ditjen;
  - b. Evaluasi AKIP Internal belum menguji keselarasan kinerja organisasi dengan level individu untuk memastikan terkawalnya kinerja organisasi.

## Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, KemenPAN dan RB merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mereviu kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup, sehingga dapat menjawab isu strategis yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri;
2. Menyempurnakan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dengan cara memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan Critical Success Factor (CSF) yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup serta memastikan penetapan indikator kinerja pada jenjang kinerja yang ditetapkan;
3. Melakukan reviu terhadap dokumen Manual IKU di tingkat kementerian maupun unit kerja untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan definisi operasional setiap indikator kinerja yang ditetapkan;
4. Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja, khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya, dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik;
5. Melakukan reviu terhadap rencana aksi yang ditetapkan pada unit kerja untuk memastikan bahwa rencana aksi tersebut telah menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai seluruh kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja unit terkait;
6. Menyempurnakan aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja internal untuk memastikan proses pengukuran kinerja, termasuk pengumpulan data kinerja dapat terfasilitasi secara optimal dalam sistem informasi yang ada;
7. Memastikan proses pengukuran capaian rencana aksi dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja unit kerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya, sehingga perencanaan kinerja ke depan memiliki target kinerja yang lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
9. Memastikan pemantauan tindak lanjut alas evaluasi internal dilakukan secara menyeluruh untuk menguji kesesuaian dan relevansi bukti dukung yang disampaikan, memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar mendukung pencapaian tujuan dari rekomendasi yang telah diberikan;
10. Mendorong proses evaluasi internal yang tidak hanya terbatas pada pengujian kualitas perencanaan di tingkat organisasi, tetapi juga mencakup evaluasi kinerja pada level individu untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran organisasi dapat ditunjang oleh kontribusi yang optimal dari setiap anggota;

Sehubungan dengan hasil rekomendasi dimaksud, diminta agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran Lingkup Kemendagri oleh APIP, dengan memastikan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan berorientasi hasil (outcome).
2. Pelaksanaan reviu terhadap dokumen Manual Indikator Kinerja di Tingkat Kementerian maupun unit kerja oleh APIP.
3. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut atas evaluasi internal secara menyeluruh oleh APIP, agar terdapat kesesuaian dan relevansi bukti dukung sehingga tercapai tujuan dari rekomendasi yang telah diberikan.
4. Memastikan proses evaluasi internal oleh APIP mencakup hingga evaluasi kinerja pada level individu untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran organisasi dapat ditunjang oleh kontribusi yang optimal dari setiap anggota.
5. Seluruh Unit Kerja melakukan penyempurnaan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah agar memahami cascading/turunan kinerja serta pencapaian output dan outcome-nya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor.

6. Penyempurnaan kualitas penetapan target kinerja oleh Bagian Perencanaan Program Biro Perencanaan, agar target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya, dan menggambarkan sebuah kondisi yang baik.
7. Pelaksanaan reviu rencana aksi perjanjian kinerja oleh Bagian Monev dan Pelaporan Kinerja Biro Perencanaan, agar penetapan rencana aksi dapat menjabarkan langkah-langkah yang tepat dalam mencapai seluruh kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja unit terkait.
8. Partisipasi aktif seluruh unit kerja dalam pemanfaatan aplikasi Sirika Kemendagri, khususnya dalam proses pengukuran kinerja atas implementasi Sakip Kemendagri.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan pelaporan kinerja dalam penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan memiliki target kinerja yang lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja juga telah melakukan beberapa perbaikan, antara lain:

1. Melakukan revisi rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024).
2. Penetapan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Terbitnya Kepmendagri No. 000.9.3-53 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Kemendagri).
3. Melakukan reviu dan perbaikan pada Pohon Kinerja Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.
4. Penyampaian Surat Edaran Bapak Sekjen Kemendagri tentang Pemanfaatan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kemendagri kepada Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri.
5. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi peran Kementerian Dalam Negeri sesuai mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem dan penyusunan Renja yang telah Mengakomodir kinerja dimaksud.

6. Pemanfaatan menu e-Sakip pada aplikasi SIRIKA Kemendagri untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dimana didalamnya terdapat beberapa fitur, yaitu:
  - a. Integrasi Aplikasi Sirika dengan e-SAKIP Reviu;
  - b. Lembar Kerja Evaluasi Tingkat Kementerian/ UKE I/UPT;
  - c. Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kementerian/UKE I/UPT; dan
  - d. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tingkat Kementerian/UKE I/UPT.
7. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Kemendagri Tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon I hingga Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kemendagri dan Kampus IPDN di Daerah.
8. Melakukan koordinasi secara intens dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri terkait penajaman dan peningkatan implementasi SAKIP Kemendagri.
9. Pelaksanaan Rapat koordinasi peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja melalui aplikasi SIRIKA di lingkungan Kemendagri.
10. Dialog Kinerja Penyusunan SKP yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Kemendagri dan melibatkan seluruh ASN lingkup Kemendagri.
11. Proses penyusunan peraturan/SOP yang memuat kebijakan reward and punishment oleh Inspektorat Jenderal dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sehingga dapat mendorong setiap Unit Kerja untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.
12. Melaksanakan dan memaksimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja tahunan sebagai pelaksanaan Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024.
13. Menyusun Laporan Kinerja dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.
14. Secara continue melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap kegiatan pada seluruh UKE I, dan apabila ada kendala segera cari solusi, serta upayakan realisasi anggaran dan realisasi target kinerja mendekati sempurna (>95%).

## Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup kementerian Dalam Negeri TA. 2024

Total Pagu Anggaran Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri TA.2024 sebesar Rp. 391.412.729.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 366.524.462.805,- atau sebesar (93,64%). Kementerian Dalam Negeri memiliki 109 Rincian Output (RO) Prioritas Nasional yang tersebar pada 9 Unit Kerja Eselon 1 (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang mendukung pada 7 Tema Prioritas Nasional, yaitu:

1. Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” sebanyak 5 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 90,09% atau sebesar Rp. 2.914.617.768 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.235.136.000,-).
2. Prioritas Nasional 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan” sebanyak 55 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 90,26% atau sebesar Rp. 163.167.558.991,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 180.771.851.000,-).
3. Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan Sumber

Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” sebanyak 15 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 95,47% atau sebesar Rp. 19.703.930.425,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. 20.637.826.000,-).

4. Prioritas Nasional 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” sebanyak 7 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 94,04% atau sebesar Rp. 3.884.710.214,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. 4.130.711.000,-).
5. Prioritas Nasional 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” sebanyak 14 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 87,70% atau sebesar Rp. 27.472.583.200,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. 31.326.732.000,-).
6. Prioritas Nasional 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim” sebanyak sebanyak 1 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 94,69% atau sebesar Rp. 966.333.350 dari Pagu anggaran sebesar Rp. 1.020.477.000,-).
7. Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” sebanyak 12 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 98,75% atau sebesar Rp. 148.414.728.857,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. 150.289.996.000,-).



Tabel 4.1 Capaian dan Kinerja Prioritas Nasional Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA. 2024

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
<b>PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>								
1	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	600.000.000	456.538.969	76,09	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	25	35	140,00
2	Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di lokasi OSS	697.000.000	674.412.522	96,76	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	23	23	100,00
3	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	438.136.000	414.924.212	94,70	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	9	7	77,78
4	Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	850.000.000	749.999.970	88,24	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
5	Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi	650.000.000	618.742.095	95,19	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
<b>PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>								
1	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	61.980.506.000	52.129.545.194	84,11	Rekomendasi Kebijakan	22	22	100,00
2	Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	1.974.600.000	1.962.639.969	99,39	Laporan	34	34	100,00
3	Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	944.453.000	909.647.939	96,31	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	80	80	100,00
4	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	1.855.413.000	1.780.664.054	95,97	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	86	86	100,00
5	Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi	1.000.000.000	995.959.668	99,60	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	46	46	100,00
6	Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1.000.000.000	981.101.592	98,11	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	18	18	100,00
7	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1.757.626.000	1.537.592.485	87,48	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	10	12	120,00
8	Rekomendasi Kebijakan Batas Daerah	4.286.184.000	4.024.073.142	93,88	Rekomendasi Kebijakan	30	30	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
9	K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan	408.191.000	397.989.929	97,50	Kesepakatan	12	12	100,00
10	Penerapan SPM sub bidang Bencana	1.038.597.000	1.037.302.574	99,88	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
11	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	1.259.597.000	1.172.616.419	93,09	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	449	449	100,00
12	Penerapan SPM sub urusan Trantibum	1.038.597.000	1.016.946.255	97,92	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
13	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	680.318.000	672.795.544	98,89	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
14	Fasilitasi dan dukungan trantibumlinmas dalam pemilu dan pilkada Tahun 2024	16.700.370.000	16.485.573.771	98,71	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	50	131,58
15	Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	1.000.000.000	999.297.000	99,93	Desa	100	100	100,00
16	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	690.000.000	660.920.000	95,79	Desa	105	105	100,00
17	Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	31.316.106.000	29.185.930.493	93,20	Desa	40000	40000	100,00
18	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	3.000.000.000	2.990.422.590	99,68	Orang	930	930	100,00
19	Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Tahun 2024	9.912.804.000	8.396.456.403	84,70	Provinsi	38	38	100,00
20	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Air Limbah	1.100.000.000	876.384.108	79,67	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00
21	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat	1.100.000.000	924.700.499	84,06	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00
22	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	822.490.000	736.409.515	89,53	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00
23	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	872.177.000	854.089.003	97,93	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00
24	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas	927.410.000	905.725.072	97,66	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
25	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	1.100.000.000	875.919.550	79,63	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	412	412	100,00
26	Daerah yang mendapatkan fasilitasi percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perkotaan)	979.000.000	651.717.059	66,57	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	10	10	100,00
27	Rekomendasi Kebijakan DPOD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan Daerah	1.600.297.000	1.596.572.305	99,77	Rekomendasi Kebijakan	4	4	100,00
28	Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Daerah, Kekhususan/Keistimewaan Daerah	4.431.804.000	4.271.363.637	96,38	Rekomendasi Kebijakan	8	8	100,00
29	Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi diselesaikan permasalahannya	2.794.595.000	2.736.331.042	97,92	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	22	22	100,00
30	Provinsi yang disupervisi Kinerjanya dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus/ Keistimewaan sesuai Undang-Undang	2.906.919.000	2.792.802.631	96,07	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	10	10	100,00
31	Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	2.643.155.000	2.211.800.532	83,68	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	16	16	100,00
32	Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	967.939.000	690.231.812	71,31	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	234	234	100,00
33	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat K/L dan daerah	604.962.000	494.029.232	81,66	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00
34	Database peraturan daerah	844.197.000	826.469.145	97,90	Data	1	1	100,00
35	Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1.231.578.000	878.119.960	71,30	Rekomendasi	7	7	100,00
36	Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1.135.135.000	900.648.705	79,34	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
37	Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	550.000.000	540.161.997	98,21	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	70	70	100,00
38	Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu	738.000.000	697.311.359	94,49	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
39	Daerah yang Memenuhi Indikator Mandatory Spending	250.000.000	245.337.647	98,14	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
40	Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	250.000.000	239.343.025	95,74	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
41	Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen	350.000.000	348.317.706	99,52	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
42	Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	2.375.000.000	2.342.223.745	98,62	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
43	Daerah yang Melakukan Penyesuaian Perda PDRD	1.050.000.000	1.036.063.538	98,67	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
44	Daerah yang BUMDnya Memberikan Kontribusi Terhadap Penerimaan Daerah	1.100.000.000	1.035.777.093	94,16	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	281	281	100,00
45	Daerah yang Melakukan Penatausahaan BMD Secara Wajar	850.000.000	837.762.600	98,56	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
46	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)	820.000.000	816.767.723	99,61	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	191	177	92,67
47	Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L	750.000.000	708.033.620	94,40	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	38	111,76
48	Penerapan Pilot Project Inovasi Daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di daerah 3T	500.000.000	499.476.200	99,90	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	5	5	100,00
49	penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah	1.634.269.000	1.621.369.961	99,21	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	529	97,60
50	Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Regional	347.072.000	342.250.785	98,61	Orang	240	240	100,00
51	Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerepan SPM di Daerah Lingkup Pusat	337.224.000	337.181.000	99,99	Orang	210	210	100,00
52	Aparatur yang meningkat Kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat)	207.072.000	204.319.350	98,67	Orang	120	148	123,33
53	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah	207.072.000	207.062.000	100,00	Orang	120	120	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
54	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri	207.072.000	203.992.614	98,51	Orang	120	119	99,17
55	Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam hal Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	344.050.000	344.018.200	99,99	Orang	120	120	100,00
<b>PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>								
1	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	545.736.000	423.375.844	77,58	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	514	514	100,00
2	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK	450.000.000	393.839.179	87,52	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	11	11	100,00
3	Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	450.000.000	336.669.774	74,82	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	11	11	100,00
4	Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak	500.000.000	498.727.766	99,75	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	60	60	100,00
5	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	648.300.000	506.533.410	78,13	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
6	Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	650.000.000	472.701.500	72,72	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	32	32	100,00
7	Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/ Kota Layak anak (KLA)	650.000.000	487.720.733	75,03	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	28	28	100,00
8	Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	699.100.000	698.196.059	99,87	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	30	30	100,00
9	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Daerah dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	961.983.000	935.916.278	97,29	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	514	514	100,00
10	Pelayanan Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	9.639.697.000	9.606.171.982	99,65	Lembaga	1.000	6.774	677,40
11	Akta Kematian yang diterbitkan	512.522.000	497.139.651	97,00	Akta	300.000	1.866.044	622,01
12	Akta Perkawinan yang diterbitkan	800.000.000	797.099.434	99,64	Akta	35.000	184.020	525,77

Prioritas Nasional/ Rincian Output		Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja	
			(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%
13	Akta Perceraian yang diterbitkan	528.198.000	527.021.332	99,78	Akta	4.500	15.433	342,96
14	Akta Kelahiran yang diterbitkan	889.120.000	817.107.421	91,90	Akta	450.000	5.834.371	1296,52
15	Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	2.713.170.000	2.705.710.062	99,73	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	50	50	100,00
<b>PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>								
1	Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intrasuku, umat beragama Ras dan Golongan	500.000.000	499.979.879	100,00	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
2	Penguatan Kinerja PPWK di daerah	1.161.402.000	1.161.385.168	100,00	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
3	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	984.155.000	983.962.713	99,98	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
4	Penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila Untuk Menyukseskan Pemilu Tahun 2024	404.283.000	404.279.773	100,00	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	2	2	100,00
5	Fasilitas pembentukan dan penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	356.875.000	356.843.548	99,99	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
6	Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinnekaan	323.996.000	323.980.715	100,00	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
7	Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah	400.000.000	154.278.418	38,57	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	60	60	100,00
<b>PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>								
1	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	1.574.090.000	1.540.543.700	97,87	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	76	90	118,42
2	Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangsa) yang dikembangkan	18.957.781.000	16.558.980.547	87,35	Sistem Informasi	1	1	100,00
3	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	700.000.000	455.965.801	65,14	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output	Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja		
		(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%	
4	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	500.000.000	498.567.190	99,71	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
5	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	500.000.000	251.758.000	50,35	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
6	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	800.000.000	799.921.500	99,99	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
7	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	500.000.000	498.243.634	99,65	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
8	Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	900.000.000	703.106.828	78,12	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	48	48	100,00
9	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	500.000.000	491.491.408	98,30	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
10	Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	700.000.000	610.484.540	87,21	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00
11	Daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	400.000.000	370.905.699	92,73	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	8	8	100,00
12	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	1.994.860.000	1.404.161.336	70,39	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	33	33	100,00
13	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	2.500.001.000	2.498.695.261	99,95	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	5	10	200,00
14	Daerah yang Menerapkan SIPD Bidang Perencanaan Anggaran Dalam Rangka Penguatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	800.000.000	789.757.756	98,72	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	542	542	100,00
<b>PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>								
1	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	1.020.477.000	966.333.350	94,69	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	34	34	100,00

Prioritas Nasional/ Rincian Output	Pagu (Rp)	Penyerapan		Target		Kinerja		
		(Rp)	%	Satuan	Jumlah	Capaian	%	
<b>PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>								
1	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika	495.442.000	495.414.717	99,99	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
2	Tim terpadu PKS daerah yang efektif	900.000.000	899.999.000	100,00	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
3	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	4.250.000.000	4.249.974.548	100,00	Orang	450	450	100,00
4	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	172.500.000	172.500.000	100,00	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100,00
5	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	870.000.000	869.999.675	100,00	Orang	1.000	1.000	100,00
6	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	300.000.000	300.000.000	100,00	Orang	200	200	100,00
7	Fasilitasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyesuaian Mekanisme Kerja Pemerintah Daerah	1.350.043.000	1.330.814.470	98,58	Daerah (Prov/Kab/Kota)	32	32	100,00
8	Fasilitasi Persiapan Pilkada Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.058.981.000	6.734.599.640	83,57	Daerah (Prov/Kab/Kota)	545	545	100,00
9	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	1.030.572.000	1.024.940.879	99,45	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	38	38	100,00
10	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	4.247.863.000	3.721.894.541	87,62	Kesepakatan	5	4	80,00
11	Kapasitas pengurus ormas	210.000.000	209.996.637	100,00	300	Orang	300	100
12	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	128.404.595.000	128.404.594.750	100,00	9	Lembaga	9	100

## IMPLEMENTASI DAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN RISIKO DALAM Mendukung Pencapaian Kinerja Lingkup Kemendagri Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 13 dan 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan menegaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penilaian risiko. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang menilai 3 Komponen (Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan) dengan 5 unsur (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan). Selanjutnya, penerapan manajemen risiko mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan Manajemen Risiko mengindikasikan bahwa Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi di internal. Pengendalian ini bersifat menyeluruh, yang menandakan seluruh unit kerja di setiap lapisan pada Kementerian Dalam Negeri berperan dalam kesuksesan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Adapun manfaat yang diperoleh Kementerian Dalam Negeri dengan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan manajemen risiko ini adalah:

1. Media pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah;
2. Menjadi data dukung dalam proses monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri;

3. Memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi Kementerian Dalam Negeri;
4. Meningkatkan akuntabilitas organisasi Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh lapisan pada Kementerian Dalam Negeri mulai dari level Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT. Pada Level Kementerian, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan pelaksanaan manajemen risiko bertujuan untuk mendukung perencanaan dan pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus menjadi tolak ukur dalam Laporan Kinerja Kemendagri dimaksud.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan manajemen risiko, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Sosialisasi dan Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Dalam Negeri;
2. Merumuskan dan mengidentifikasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT) setelah 2 minggu DIPA ditetapkan;
3. Mengadakan diklat Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan beberapa Unit Kerja Eselon I untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai Kementerian Dalam Negeri dalam memahami manajemen risiko.
4. Membentuk tim penilaian mandiri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 000.4.6-625 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024;

5. Menjalinkan kerja sama bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 100.4.7.1/6225/SJ dan Nomor HK.02/PKS-03/D3/04/2024 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Risiko dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
6. Membentuk tim penjaminan kualitas melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 800.1.10-23 tanggal 26 Januari 2024 tentang Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024;
7. Melakukan Evaluasi atas Rencana Mitigasi yang telah diimplementasikan di setiap semester, melalui:
  - a. Pengisian formulir Rencana Mitigasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT)
  - b. Proses evaluasi implementasi mitigasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT); dan
  - c. Proses Evaluasi oleh Unit Kepatuhan Manajemen Risiko terhadap seluruh dokumen manajemen risiko yang telah disusun di setiap level.
8. Salah satu keberhasilan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri terlihat dari peningkatan nilai sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Nilai Maturitas SPIP Tahun 2022 s.d 2024

Nilai	2022	2023	2024
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,297 (Level 3)	3,354 (Level 3)	3,531 (Level 3)
Manajemen Risiko Indeks	3,009 (Level 3)	3,078 (Level 3)	3,397 (Level 3)
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,006 (Level 3)	3,000 (Level 3)	3,000 (Level 3)

Nilai dari SPIP dan Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 berada pada level 3 atau "terdefinisi" yang artinya Kementerian Dalam Negeri telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan dan menunjukkan tahapan-tahapan implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja khususnya Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri yang berkualitas.

A man wearing glasses and a batik shirt is speaking at a podium. The podium has a microphone and a logo on the front. The background is a plain wall.

# **BAB V**

## **Penutup**

## Penutup

Pencapaian tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri tertuang pada visi misi Kementerian Dalam Negeri. Pencapaian visi misi Kementerian Dalam Negeri tercapai dalam 5 tahun kerja, sehingga Tahun 2024 (tahun ke-5 atau tahun terakhir Rencana Strategis) pencapaian visi dan misi dapat dilihat dari ketercapaian Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 (Adendum). Dalam Laporan Kinerja ini dituangkan data berdasarkan 12 Sasaran Strategis yang di dalamnya diukur berdasarkan ketercapaian 27 Indikator Kinerja Utama. Adapun rata-rata capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri berdasarkan 12 sasaran sebesar 105,28% dengan predikat Sangat Tinggi dan kategori Sangat Berhasil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1 Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2024

No	Sasaran Strategis	Capaian %	Predikat	Kategori
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	103,60	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	113,17	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	113,89	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	100,67	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	100,70	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	86,62	Sedang	Cukup Berhasil
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	111,97	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	109,23	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	100	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	103,15	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	100,41	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	120	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
<b>Kinerja Kementerian Dalam Negeri</b>		<b>105,28</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Berhasil</b>

Ketercapaian kinerja sebesar 105,28% dimaksud menggambarkan semakin berkualitasnya aspek pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri. Adapun upaya yang perlu dilakukan dalam pencapaian target kinerja ke depannya yaitu dengan memperkuat pelaksanaan aspek pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri seperti aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek penataan aparatur, melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

# Lampiran

# **Lampiran I**

# **PK Awal 2024**



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia,**

**Muhammad Tito Karnavian**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58 *	DITJEN POLPUM
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	
		3. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66 *	
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia **	Nilai 6,3 **	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75% *	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)	
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	IPDN
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD *	Sedang *	DITJEN OTDA
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi) *	
		3. Persentase capaian penerapan SPM di daerah **	100%**	DITJEN BINA BANGDA
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (Sinkron)	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4% *	DITJEN BINA PEMDES
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 66 *	DITJEN BINA KEUDA
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%	BSKDN
		8. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		9. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil *	98% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan *	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik *	1.500 Lembaga Pengguna *	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01 *	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)	
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri *	45% *	BSKDN

\* Terdapat penyesuaian nomenklatur/target berdasarkan usulan revisi Renstra

\*\* Indikator baru dalam usulan revisi Renstra

No	Program	Anggaran
	<b>Kementerian Dalam Negeri</b>	<b>Rp. 3.347.771.832.000,-</b>
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.102.798.091.000,-
2.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 396.337.065.000,-
3.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 691.283.486.000,-
4.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 157.353.190.000,-

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia,**



**Muhammad Tito Karnavian**

# **Lampiran II**

## **PK Adendum 2024**



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia,**

  
**Muhammad Tito Karnavian**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	DITJEN POLPUM
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	
		3. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66	
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)	
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	IPDN
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	DITJEN OTDA
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)	
		3. Persentase capaian penerapan SPM di daerah	100%	DITJEN BINA BANGDA
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sinkron)	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4%	DITJEN BINA PEMDES
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 66	DITJEN BINA KEUDA
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%	BSKDN
		8. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		9. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.500 Lembaga Pengguna	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)	
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	BSKDN

No	Program	Anggaran*
	<b>Kementerian Dalam Negeri</b>	<b>Rp. 5.205.771.827.000,-</b>
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.226.859.135.000,-
2.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 1.658.647.723.000,-
3.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 1.162.640.058.000,-
4.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 157.624.911.000,-

*\*Terdapat pagu blokir sebesar **Rp.40.290.593.000,-***

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia,**

  
**Muhammad Tito Karnavian**

**Lampiran III**  
**Matriks Semula**  
**Menjadi Renstra**

**MATRIKS SEMULA MENJADI  
PERJANJIAN KINERJA KEMENDAGRI TAHUN 2024**

NO	SEMULA			MENJADI			PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,58	DITJEN POLPUM
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	
		3. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66		3. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66	
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150 Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	75%	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)	IPDN
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	DITJEN OTDA
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)	
		3. Persentase capaian penerapan SPM di daerah	100%		3. Persentase capaian penerapan SPM di daerah	100%	DITJEN BINA BANGDA
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (Sinkron)		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sinkron)	
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4%		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4%	DITJEN BINA PEMDES
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 66		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 66	DITJEN BINA KEUDA
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%	BSKDN
		8. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)		8. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		9. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)		9. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	

NO	SEMULA			MENJADI			PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	98% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.500 Lembaga Pengguna			2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)			2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	BSKDN

Program	Anggaran	
	Semula	Menjadi
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.102.798.091.000,-	Rp. 2.226.859.135.000,-
Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 396.337.065.000,-	Rp. 1.658.647.723.000,-
Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 691.283.486.000,-	Rp. 1.162.640.058.000,-
Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 157.353.190.000,-	Rp. 157.624.911.000,-
<b>Kementerian Dalam Negeri</b>	<b>Rp. 3.347.771.832.000,-</b>	<b>Rp. 5.205.771.827.000,-</b>

**Lampiran IV**  
**Matriks Semula**  
**Menjadi Renstra**  
**Tahun 2020-2024**

**MATRIKS SEMULA MENJADI RENSTRA KEMENDAGRI  
TAHUN 2020-2024**

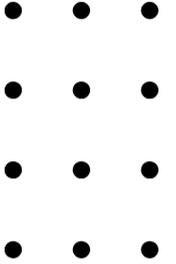
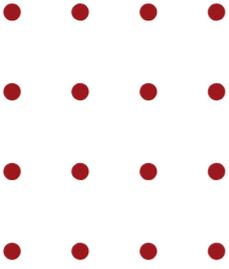
SEMULA (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2020)						MENJADI (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2024)					KETERANGAN			
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET							
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023		2024		
<b>Sasaran Strategis 1</b> <b>Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia</b>						<b>Sasaran Strategis 1</b> <b>Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia</b>								
1	Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	77,72	78,06	78,37	78,66	1	Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	77,72	78,06	79,25	79,58	Perubahan target Tahun 2023 menjadi 79,25, dan Tahun 2024 menjadi 79,58 karena menyesuaikan RKP Tahun 2024.
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	77,5% (Pilkada)	-	-	-	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	77,5% (Pilkada)	-	-	-	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Tetap.
3	Indeks Kinerja Ormas	.*	Nilai 60	Nilai 62	Nilai 65	Nilai 70	3	Indeks Kinerja Ormas	.*	Nilai 60	Nilai 62	Nilai 65	Nilai 66	Perubahan target tahun 2024 menjadi nilai 66 karena menyesuaikan RKP Tahun 2024.
<b>Sasaran Strategis 2</b> <b>Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah</b>						<b>Sasaran Strategis 2</b> <b>Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah</b>					<p>Terdapat indikator-indikator yang di drop pada sasaran strategis ini karena beberapa pertimbangan dan berdasarkan evaluasi dari BPKP dan evaluasi internal dari APIP Itjen Kemendagri (dari segi Lapkin, pencapaian sasaran yang sulit untuk dicapai), yaitu indeks ketahanan nasional ideologi, indeks ketahanan nasional ekonomi, dan indeks ketahanan nasional sosbud. Selain itu, ketika dievaluasi, butuh penyesuaian pada indikator ini sehingga diusulkan indeks baru yaitu indeks harmoni Indonesia dimana sudah mencakup indeks ketahanan nasional gatra ekonomi dan indeks ketahanan nasional sosial budaya. Lalu terkait gatra ideologi, secara umum sudah tercover dalam indeks capaian revolusi mental (ICRM).</p>			
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,385	Nilai 2,39	Nilai 2,395	Nilai 2,40	1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,385	Nilai 2,39	-	-	Indikator di drop sejak Tahun 2023 dan diganti dengan Indeks Harmoni Indonesia.
2	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,1	67,2	67,3	67,4	67,5	2	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	-	-	-	73,13	-	Perubahan target Tahun 2023 karena menyesuaikan target RKP. Indikator di drop dan digantikan dengan Indeks Harmoni Indonesia.
3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,870	Nilai 2,875	Nilai 2,880	Nilai 2,885	3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,870	Nilai 2,875	-	-	Indikator di drop sejak Tahun 2023 dan diganti dengan Indeks Harmoni Indonesia.
4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,310	Nilai 2,315	Nilai 2,320	Nilai 2,325	Nilai 2,330	4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,310	Nilai 2,315	Nilai 2,320	-	-	Indikator di drop sejak Tahun 2023 dan diganti dengan Indeks Harmoni Indonesia.
							5	Indeks Harmoni Indonesia	-	-	-	Nilai 6	Nilai 6,3	Indikator baru untuk mengganti Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dan Sosial Budaya.
<b>Sasaran Strategis 3</b>						<b>Sasaran Strategis 3</b>								
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	.*	.*	62	63	64	1	Indeks Kewaspadaan Nasional	.*	.*	62	63	64	Tetap.
<b>Sasaran Strategis 4</b> <b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas</b>						<b>Sasaran Strategis 4</b> <b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas</b>								
1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	.*	.*	50 Daerah	100 Daerah	150 Daerah	1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	.*	.*	50 Daerah	100 Daerah	150 Daerah	Tetap.

SEMULA (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2020)						MENJADI (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2024)					KETERANGAN			
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET							
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023		2024		
2	Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60							Dihapus karena: 1. Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertujuan untuk menilai kepuasan masyarakat pada suatu wilayah tertentu terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan atas sebuah fungsi tertentu (objek kepuasan adalah masyarakat). 2. Objek pembinaan Ditjen Bina Adwil adalah pemerintah daerah yang secara berjenjang fungsi monitoringnya terbagi atas 2 hal yaitu a) Tata kelola monitoring perangkat daerah Kab/Kota oleh Provinsi; dan b) Tata kelola monitoring perangkat daerah provinsi oleh pusat. 3. Target indeks penyelenggaraan trantibumlinmas berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 yaitu di tahun 2020 dan 2021 dengan target 1 dokumen/instrumen, di Tahun 2022 dengan target 50 daerah dengan nilai >60, di Tahun 2023 dengan target 100 daerah dengan nilai >65, dan di Tahun 2024 dengan target 150 daerah dengan nilai >70. 4. Maka Indeks kepuasan masyarakat dihapus pada renstra kemendagri tahun 2020-2024 dan atau tahun 2025-2029. Selanjutnya, Indeks kepuasan masyarakat dapat diusulikan kembali pada RPJMN Tahun 2030-2034 saat ketercapaian indeks penyelenggaraan trantibumlinmas telah mencapai nilai 100 pada proyeksi tahun 2030 (dengan asumsi setiap tahunnya naik sebesar 5 poin sampai dengan nilai 100 pada Tahun 2030).	
<b>Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri</b>						<b>Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri</b>								
1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	50%	60%	70%	80%	1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	25%	60%	70%	75%	Perubahan target Tahun 2024 menjadi 75% karena menyesuaikan RKP Tahun 2024.
2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)	2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)	Tetap.
3	Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)	3	Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)	Tetap.
4	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	Nilai 3,00	Nilai 3,20	Nilai 3,30	Nilai 3,40	Nilai 3,60	4	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	Nilai 3,00	Nilai 3,20	Nilai 3,30	Nilai 3,50	Nilai 3,60	Perubahan target Tahun 2023 menjadi Nilai 3,50 karena menyesuaikan dengan capaian tahun 2022 sebesar 3,69 yang sudah melebihi target.
<b>Sasaran Strategis 6 Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah</b>						<b>Sasaran Strategis 6 Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah</b>								
1	Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	1	Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Tetap.
<b>Sasaran Strategis 7 Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif</b>						<b>Sasaran Strategis 7 Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif</b>								
1	Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	1	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	-	-	Indikator dihapus sejak Tahun 2023 karena terdapat perubahan pada instrumen pengukuran indeks.
							2	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	-	-	-	-	sedang	Indikator muncul pada tahun 2024 untuk menggantikan Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 2,9 (Tinggi)	Nilai 3,0 (Tinggi)	Nilai 3,1 (Tinggi)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	3	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai 2,85 (Sedang)	Nilai 2,9 (Sedang)	Nilai 3,0 (Sedang)	Nilai 3,41 (Tinggi)	Nilai 4,00 (Tinggi)	Perubahan target Tahun 2023 & 2024 karena terdapat perubahan pada instrumen pengukuran indeks.
3	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	50%	70%	80%	100%	4	Persentase Capaian penerapan SPM di Daerah	30%	50%	70%	80%	100%	Perubahan nomenklatur karena nomenklatur yang sebelumnya "Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM" dinilai masih dalam tahap proses sehingga diubah menjadi "Persentase Capaian penerapan SPM di Daerah" karena sudah di tahap hasil karena sudah diterapkan.
4	Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	-*	Nilai 50 (Sinkron)	Nilai 60 (Sinkron)	Nilai 70 (Sinkron)	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	5	Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	-*	Nilai 50	Nilai 60	Nilai 80 (Sinkron)	Nilai 100 (Sinkron)	Perubahan target Tahun 2023 & 2024 karena terdapat perubahan pada instrumen pengukuran indeks.
5	Persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai "Baik"	10%	20%	45%	60%	75%	6	Persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai "Baik"	10%	20%	45%	2,5%	4%	Perubahan target Tahun 2023 & 2024 karena terdapat perubahan pada instrumen pengukuran indeks.
6	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 36,25	Nilai 36,5	Nilai 36,75	Nilai 37	7	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 36,25	Nilai 36,5	Nilai 65,00	Nilai 66,00	Perubahan target Tahun 2023 & 2024, karena terdapat perubahan pada instrumen pengukuran indeks.
7	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	-*	18%	24%	30%	36%	8	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	-*	18%	24%	30%	36%	Tetap.
8	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	55 Daerah	82 Daerah	110 Daerah	137 Daerah	165 Daerah								Indikator dihapus karena perubahan SOTK Kemendagri yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 137 Tahun 2022.

SEMULA (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2020)						MENJADI (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2024)					KETERANGAN			
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET							
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023		2024		
9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100	9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100	Tetap.
10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	-*	Nilai 75 (B)	Nilai 80 (B)	Nilai 85 (B)	Nilai 90 (A)	10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	-*	Nilai 75 (B)	Nilai 80 (B)	Nilai 85 (B)	Nilai 90 (A)	Tetap.
<b>Sasaran Strategis 8</b> Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan						<b>Sasaran Strategis 8</b> Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan								
1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	92% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	94% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	97% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	92% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	94% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	97% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Tetap.
2	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)	1.923 Lembaga Pengguna	2.223 Lembaga Pengguna	2.523 Lembaga Pengguna	2.873 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	2	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.	300 Lembaga Pengguna	600 Lembaga Pengguna	900 Lembaga Pengguna	1.250 Lembaga Pengguna	1.500 Lembaga Pengguna	Perubahan nomenklatur indikator sesuai catatan Kementerian PANRB untuk mengganti indikator "Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)" menjadi "Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik" agar indikator Kinerja Utama bersifat outcome.
<b>Sasaran Strategis 9</b> Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan						<b>Sasaran Strategis 9</b> Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan								
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60	1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60	Tetap.
<b>Sasaran Strategis 10</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri						<b>Sasaran Strategis 10</b> Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri								
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,01	Nilai 89,01	Nilai 91,01	Nilai 93,01	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,01	Nilai 89,01	Nilai 83,01	Nilai 85,01	Penyesuaian target Tahun 2023 dan 2024 karena perubahan bobot penilaian Indeks RB dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 tentang perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
<b>Sasaran Strategis 11</b> Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas						<b>Sasaran Strategis 11</b> Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas								
1	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100	1	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100	Tetap.
2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 85	2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 85	Tetap.
<b>Sasaran Strategis 12</b> Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri						<b>Sasaran Strategis 12</b> Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri								
1	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	40%	45%	55%	60%	65%	1	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	40%	45%	55%	40%	45%	Perubahan nomenklatur dan target Tahun 2023 & 2024 karena terdapat perubahan SOTK Kemendagri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2024 *AUDITED*

